2025 Annual Report and Sustainability Report
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

WOMFinance
a member of Maybank group

Do The Right Things Right, Sustainable Growth



PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower floor 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350

Penjelasan Tema
Theme Explanation

Do The Right Things Right, Sustainable Growth



Tahun 2025 menjadi periode penting bagi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dalam menavigasi dinamika industri pembiayaan yang terus berkembang di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Perubahan perilaku konsumen, percepatan digitalisasi, serta peningkatan ekspektasi terhadap tata kelola dan manajemen risiko menuntut perusahaan pembiayaan untuk tidak hanya bertumbuh, tetapi juga bertumbuh dengan cara yang tepat. Dalam konteks tersebut, Perseroan menegaskan komitmennya untuk menjalankan strategi yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kepatuhan sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Tema "*Do The Right Things Right, Sustainable Growth*" mencerminkan keyakinan Perseroan bahwa keberlanjutan kinerja tidak hanya ditentukan oleh pencapaian hasil, tetapi juga oleh kualitas proses dalam mencapainya. Perseroan secara konsisten memastikan bahwa setiap keputusan bisnis, kebijakan operasional, dan inisiatif strategis dijalankan secara tepat, selaras dengan regulasi, serta berorientasi pada kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.

The year 2025 marked a crucial period for PT Wahana Ottomitra Multiartha ("the Company") in navigating the dynamics of the ever-evolving financing industry amidst the global and domestic economic challenges. Changes in consumer behavior, accelerated digitalization, and increasing expectations for governance and risk management require financing companies to not only grow, but also grow appropriately. In this context, the Company affirms its commitment to implementing strategies based on the principles of prudence, integrity, and compliance as the foundation for sustainable growth.

The theme "Do The Right Things Right, Sustainable Growth" reflects the Company's belief that sustainable performance is determined not only by the achievement of results, but also by the quality of the process involved in achieving them. The Company consistently ensures that every business decision, operational policy, and strategic initiative is executed appropriately, in line with regulations, and oriented towards stakeholders' long-term interests.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan berfokus pada penguatan fundamental bisnis melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang disiplin, serta pengelolaan portofolio pembiayaan yang sehat dan terdiversifikasi. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk menjaga kualitas aset, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat ketahanan bisnis di tengah volatilitas pasar, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang terukur dan berkesinambungan.

Di sisi lain, Perseroan terus mengakselerasi transformasi digital dan peningkatan kapabilitas organisasi guna meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dan mitra usaha. Optimalisasi proses berbasis teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan data secara bertanggung jawab menjadi bagian integral dari upaya Perseroan dalam memastikan bahwa pertumbuhan bisnis berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada nilai tambah jangka panjang.

Dengan berpegang pada prinsip melakukan hal yang benar dan melakukannya dengan cara yang benar, Perseroan optimistis dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat sinergi antara kinerja keuangan, tata kelola, dan keberlanjutan, guna memberikan kontribusi positif bagi industri pembiayaan nasional serta menciptakan nilai yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Throughout 2025, the Company focused on strengthening its business fundamentals through the implementation of good corporate governance, disciplined risk management, and management of a healthy and diversified financing portfolio. This approach enables the Company to maintain asset quality, improve operational efficiency, and strengthen business resilience amid market volatility, while supporting measurable and sustainable business growth.

Furthermore, the Company continues to accelerate digital transformation and enhance organizational capabilities to improve service quality to customers and business partners. Optimizing technology-based process, strengthening human resources, and utilizing data responsibly are integral parts of the Company's efforts to ensure that business growth is effective, efficient, and oriented towards long-term added value.

By adhering to the principle of doing the right thing and doing it the right way, the Company is optimistic about achieving sustainable and responsible growth. Going forward, the Company will continue to strengthen the synergy between financial performance, governance, and sustainability, to make a positive contribution to the national financing industry and create sustainable value for shareholders and all stakeholders.

Daftar Isi
Table of Content

4 Penjelasan Tema
Theme Explanation

6 Daftar Isi
Table of Content

8 Jejak Langkah
Milestone

10 Ringkasan Kinerja 2025
2025 Performance Summary



Ringkasan Kinerja
Performance Highlights

14 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

17 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

20 Ikhtisar Saham
Share Highlights

22 Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights

23 Aksi Korporasi
Corporate Actions

23 Penghentian Sementara Perdagangan Saham/Penghapusan Pencatatan Saham
Suspension/Delisting

24 Peristiwa Penting
Event Highlights



Laporan Manajemen
Management Report

31 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

43 Laporan Direksi
Board of Directors Report

53 Laporan Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Report

58 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2025
Board of Commissioners Statements regarding Responsibility for 2025 Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

59 Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2025
Board of Directors Statements regarding Responsibility for 2025 Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk



Profil Perusahaan
Company Profile

62 Identitas Perusahaan
Corporate Identity

65 Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History

67 Logo Perusahaan
Corporate Logo

68 Kegiatan Usaha [GRI 2-6.a]
Business Activities

74 Wilayah Operasional [OJK C.6] [GRI 2-6.d]
Significant Changes

76 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

78 Struktur Organisasi
Organizational Structure

80 Keanggotaan Dalam Asosiasi [OJK C.5] [GRI 2-28]
Association Membership

82 Profil Direksi
Board of Directors Profile

93 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

103 Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Profile

108 Pejabat Senior
Senior Officers

112 Demografi Karyawan
Employee Demographics

125 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of Shareholders

137 Daftar Entitas Anak, Asosiasi, dan Ventura Bersama
List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

138 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and/or Listing

148 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant and Public Accounting Firm

148 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals

151 Informasi pada Situs Web Perseroan
Corporate Website Information

154 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications



Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis

160 Tinjauan Perekonomian
Economic Overview

163 Tinjauan Industri Pembiayaan
Financing Industry Overview

165 Proyeksi Perekonomian Tahun 2026
Economic Outlook for 2026

167 Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha
Operational Overview per Business Segment

179 Prospek Usaha Tahun 2026
Business Prospects for 2026

181 Tinjauan Keuangan
Financial Overview

186 Kemampuan Membayar Utang
Debt Service Ability

187 Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility Level

187 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

189 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material
Commitments for Capital Good Investments

190 Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun 2025
Capital Good Investments Realized in 2025

191 Target dan Realisasi Tahun 2025
Target and Realization of 2025

191 Proyeksi Tahun 2026
Projections for 2026

192 Dividen
Dividends

193 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Public Offering Proceeds

194 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition or Debt/ Capital Restructuring

194 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/ MSOP)
Employee and Management Share Option Program (ESOP/MSOP)

195 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan, dan Transaksi dengan Pihak Berelasi
Material Transaction Containing Conflict of Interest, and Transaction with Related Parties

197 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir
Amendments to Laws and Regulations Affecting the Company in the Most Recent Financial Year

236 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan
Changes in Accounting Policies and Disclosures

237 Teknologi Informasi
Information Technology



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

244 Pencapaian Terbaik dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Best Achievements in Corporate Governance Practices

245 Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policy

250 Penetapan Standar Kualitas Tata Kelola yang Baik di Lingkup Perusahaan
Determination of Good Corporate Governance Quality Standards within the Company

254 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

257 Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders and General Meeting of Shareholders

292 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

306 Komisaris Independen
Independent Commissioner

308 Direksi
Board of Directors

328 Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

336 Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information of the Board of Commissioners and the Board of Directors

352 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

375 Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs of the Board of Directors

421 Akuntan Publik
Public Accountant

425 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

429 Manajemen Risiko
Risk Management

439 Perkara Hukum
Litigation

451 Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions

451 Kode Etik [G-07]
Code of Conduct

452 Kebijakan Conflict Management [G-09] [GRI 2-15]
Conflict Management Policy

453 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan
Long-Term Performance-Based Compensation Policy for Management and/or Employees

453 Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) [G-08]
Insider Trading

454 Akses Informasi & Data Perusahaan
Access to Company Information & Data

457 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

459 Kebijakan Anti Korupsi [G-07] [GRI 205-1, 205-2, 205-3]
Anti-Corruption Policy

462 Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa
Policies & Provisions on Vendor Management and Procurement of Goods & Services

467 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of the Public Company Corporate Governance Guidelines



Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

478 Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan
Sustainability Performance Highlights

485 Penjelasan Direksi
Board of Directors' Explanation

492 Tentang Laporan
About the Report

496 Inisiatif Strategis Keberlanjutan
Strategic Sustainability Initiatives

502 Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

511 Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance

519 Kinerja Lingkungan Hidup
Environmental Performance

529 Kinerja Sosial
Social Performance

575 Lembar Umpan Balik [OJK G.2]
Feedback Form

576 Tanggapan Umpan Balik atas Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 [OJK G.3]
Feedback Response for the 2024 Sustainability Report

577 Indeks POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

580 Indeks Isi Standar GRI
GRI Standard Content Index

583 Indeks ESG IDX
IDX ESG Index



Laporan Keuangan
Financial Report

Jejak Langkah
Milestone

1982

Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing. Nama Perseroan berganti menjadi PT Fuji Semeru Leasing.
The Company was established under the name of PT Jakarta Tokyo Leasing. The Company's name changed into PT Fuji Semeru Leasing.

1997

Nama Perseroan diubah menjadi PT Wahana Ometraco Multiartha.
The Company's name changed to PT Wahana Ometraco Multiartha.

2000

Nama Perseroan diubah menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.
The Company's name changed to PT Wahana Ottomitra Multiartha.

2003

Menerbitkan Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 dengan Tingkat Suku Bunga Tetap, senilai Rp300 miliar yang memperoleh peringkat A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
The Company issued Bonds I WOM Finance Year 2003 with Fixed Interest Rate with nominal value of Rp300 billion; rated A- by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

2004

Perseroan mengubah Anggaran Dasar dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
The Company's Articles of Association was amended in line with the Initial Public Offering pursuant to the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

2005

- Perubahan status kepemilikan saham PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, mayoritas menjadi milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
- Menerbitkan Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 dengan Tingkat Suku Bunga Tetap senilai Rp500 miliar yang memperoleh peringkat A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

- The share ownership status of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk changed, resulting in PT Bank Maybank Indonesia Tbk becoming the majority shareholder.
- The Company issued Bonds II WOM Finance Year 2005 with Fixed Interest Rate with nominal value of Rp500 billion; rated A- by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

2006

Menerbitkan Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 dengan Tingkat Suku Bunga Tetap senilai Rp825 miliar yang memperoleh peringkat A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The Company issued Bonds III WOM Finance Year 2006 with Fixed Interest Rate with nominal value of Rp825 billion; rated A- by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

2007

Menerbitkan Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 dengan Tingkat Suku Bunga Tetap senilai Rp1 triliun yang memperoleh peringkat A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The Company issued Bonds IV WOM Finance Year 2007 with Fixed Interest Rate with nominal value of Rp1 trillion; rated A- by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

2011

1. Perseroan mengubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
2. Menerbitkan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 dengan Tingkat Suku Bunga Tetap senilai Rp1,4 triliun yang memperoleh peringkat AA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

1. The Company's Articles of Association was amended in line with the Initial Public Offering pursuant to the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).
2. The Company issued Bonds V WOM Finance Year 2011 with Fixed Interest Rate with nominal value of Rp1.4 trillion; rated AA by PT Fitch Ratings Indonesia.





2014

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance.
  Sustainable Public Offering of Continuing Bonds I WOM Finance.

2015

- Penerbitan 1.481.481.480 saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas.
  The Company issued 1,481,481,480 new shares through Limited Public Offering.

2016

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I.
  Sustainable Public Offering of Continuing Bonds II Phase I WOM Finance.

2017

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III.
- Sustainable Public Offering of Continuing Bonds II Phase II WOM Finance.
- Sustainable Public Offering of Continuing Bonds II Phase III WOM Finance.

2018

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I.
- Sustainable Public Offering of Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance.
- Sustainable Public Offering of Continuing Bonds II Phase V WOM Finance.
- Sustainable Public Offering of Continuing Bonds III Phase I WOM Finance.

2019

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II.
  Sustainable Public Offering of Continuing Bonds III Phase II WOM Finance.

2020

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III.
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV.
- Sustainable Public Offering of Continuing Bonds III Phase III WOM Finance.
- Sustainable Public Offering of Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance.

2021

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I.
  Sustainable Public Offering of Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance.

2022

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II.
  Sustainable Public Offering of Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance.

2023

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III.
  Sustainable Public Offering of Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance.

2024

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I.
  Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase I WOM Finance.

2025

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II.
  Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance.

Ringkasan Kinerja 2025
2025 Performance Summary



Total Pendapatan
Total Revenues

Rp2,17
triliun | trillion

Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

Rp142,55
miliar | billion

Total Pembiayaan
Total Financing

181.571
unit | unit

Total Penyaluran Pembiayaan
Total Financing Disbursement

Rp5,94
triliun | trillion

Total Aset
Total Assets

Rp 7,37
triliun | trillion

Total Liabilitas
Total Liabilities

Rp 5,39
triliun | trillion

Total Ekuitas
Total Equity

Rp 1,98
triliun | trillion

Rasio Keuangan Penting
Key Financial Ratios

7,45%	2,41%	2,32x
Return on Equity (ROE)	*Return on Assets* (ROA)	*Gearing Ratio*

01

Ringkasan Kinerja
Performance Highlights

Melalui penerapan strategi yang tepat dalam pengelolaan portofolio dan risiko serta pengembangan talenta yang komprehensif, Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan baru di tengah kondisi bisnis yang menantang.

By applying proper strategies in managing portfolio and risk as well as comprehensive talent development, the Company successfully recorded an increase in new financing distribution amidst challenging business conditions.







Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Pendapatan **Revenues**					
Pembiayaan Multiguna, Modal Kerja, dan Investasi - Neto Multipurpose, Working Capital, and Investment Financing - Net	1.808.849	1.819.420	1.700.753	1.414.831	1.241.703
Administrasi Administration	39.841	37.387	41.284	45.516	83.750
Bunga Bank Interest from Banks	23.744	21.145	12.774	11.094	8.310
Lain-lain Others	297.167	288.988	240.599	223.064	237.220
Total Pendapatan **Total Revenues**	**2.169.601**	**2.166.940**	**1.995.410**	**1.694.505**	**1.570.983**
Beban **Expenses**					
Umum dan Administrasi General and Administrative	671.410	618.188	593.561	563.850	510.697
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	452.770	357.231	292.171	150.035	208.967
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	406.912	410.387	378.391	356.283	308.655
Beban Pendanaan dan Keuangan Financing Costs and Financing Charges	353.162	356.319	309.881	261.994	295.982
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization	90.769	81.052	78.434	63.071	70.708
Lain-lain Others	15.120	10.521	20.363	17.023	21.432
Total Beban **Total Expenses**	**1.990.143**	**1.833.698**	**1.672.801**	**1.412.256**	**1.416.441**
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan **Income Before Final Tax Expense and Income Tax Expense**	179.458	**333.242**	**322.609**	**282.249**	**154.542**
Beban Pajak Final dan Beban Pajak Penghasilan Final Tax Expense and Income Tax Expense	36.905	70.327	86.202	84.646	44.479
Laba Tahun Berjalan **Income for the Year**	142.553	**262.915**	**236.407**	**197.603**	**110.063**
Penghasilan Komprehensif Lain **Other Comprehensive Income**					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi **Items that will not be reclassified to profit or loss**					
Keuntungan Aktuarial Actuarial Gain	35.119	5.361	4.702	6.558	14.534
Pajak Penghasilan Income Tax	(7.726)	(1.179)	(1.034)	(1.443)	(3.197)
Laba Komprehensif Lainnya - Neto Setelah Pajak **Other Comprehensive Income - Net of Tax**	27.393	**4.182**	**3.668**	**5.115**	**11.337**
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	169.946	**267.097**	**240.075**	**202.718**	**121.400**
Laba per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh) **Basic Earnings per Share (expressed in full Rupiah amount)**	40,95	**75,52**	**67,90**	**56,76**	**31,61**

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Kas dan Setara Kas - Neto Cash and Cash Equivalents - Net	509.795	539.724	342.970	483.969	448.752
Piutang Pembiayaan Multiguna, Modal Kerja, dan Investasi - Neto Multipurpose, Working Capital, and Financing Receivables - Net	6.464.466	5.993.064	5.935.864	4.864.805	4.415.639
Piutang Lain-lain - Neto Other Receivables - Net	77.776	73.951	51.098	21.779	24.206
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	17.111	36.552	26.010	12.606	12.048
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Property and Equipment - Net of Accumulated Depreciation	84.013	86.017	81.769	65.034	73.654
Aset Hak-Guna - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Right-of-Use Assets - Net of Accumulated Depreciation	93.864	98.064	92.273	81.426	83.388
Aset Tidak Berwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi Intangible Assets - Net of Accumulated Amortization	45.485	49.284	49.463	42.834	32.352
Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets - Net	31.263	24.691	14.495	14.983	16.220
Aset Lain-lain Other Assets	44.895	44.994	41.773	58.790	41.513
Total Aset Total Assets	**7.368.668**	**6.946.341**	**6.635.715**	**5.646.226**	**5.147.772**
Utang Bank Bank Loans	2.419.878	2.190.467	2.626.237	2.350.136	1.967.885
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	65.595	87.792	86.702	65.452	49.684
Utang Pajak Taxes Payable	19.926	32.733	50.699	41.097	23.689
Utang Lain-lain Other Payables	172.293	166.852	181.869	136.719	105.029
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	23.768	32.014	41.142	46.396	50.978
Utang Obligasi - Neto Bonds Payable - Net	2.395.241	2.240.119	1.660.253	1.200.615	1.319.928
Liabilitas Imbalan Kerja Liability for Employee Benefits	88.795	104.263	92.891	90.779	85.190
Utang Subordinasi Subordinated Loan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Total Liabilitas **Total Liabilities**	**5.385.496**	**5.054.240**	**4.939.793**	**4.131.194**	**3.802.383**
Total Ekuitas **Total Equity**	**1.983.172**	**1.892.101**	**1.695.922**	**1.515.032**	**1.345.389**
Total Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	**7.368.668**	**6.946.341**	**6.635.715**	**5.646.226**	**5.147.772**



RASIO KEUANGAN PENTING YANG RELEVAN

RELEVANT FINANCIAL RATIOS

Uraian Description	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Return on Assets (ROA) - (%)	**2,41**	4,67	5,04	5,26	3,17
Return on Equity (ROE) - (%)	**7,45**	14,93	14,97	14,09	8,69
Non-Performing Financing / NPF (*Gross*) - (%)	**2,17**	1,96	2,08	1,63	1,42
Borrowing and Debt Securities Issues - net / Total Assets (x)	**0,68**	0,67	0,68	0,66	0,68
Gearing Ratio (x)	**2,32**	2,24	2,40	2,22	2,30
Financing to Asset Ratio (%)	**87,73**	86,28	89,45	86,16	85,78
Current Ratio (x)	**1,82**	1,60	1,88	1,91	1,62

INFORMASI LAINNYA

OTHER INFORMATION

Uraian Description	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Total Konsumen Total Constumers	**275.993**	284.830	310.929	304.856	339.170
Total Karyawan Total Employees	**2.170**	2.274	2.335	2.415	2.416
Jaringan Usaha Business Network	**195**	211	202	164	166

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

PEMBIAYAAN / FINANCING

Dalam Unit
In Unit

Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	Jenis Produk Products	2025	2024	2023	2022	2021
Pembiayaan Multiguna Barang Multipurpose Goods Financing	Pembiayaan Motor Baru (PPSA) New Motorcycle Financing (PPSA)	36.853	39.320	61.184	53.873	71.146
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Service Financing	Pembiayaan Multiguna MotorKu (PPSA) MotorKu Multipurpose Financing (PPSA)	8.066	49.729	47.669	96.158	120.750
	Fasilitas Dana MotorKu MotorKu Funding Facility	48.561	50.841	65.536	19.173	11
	Pembiayaan Multiguna MobilKu (PPSA) MobilKu Multipurpose Financing (PPSA)	-	-	-	6	6.459
	Fasilitas Dana MobilKu MobilKu Funding Facility	11.437	10.499	10.179	9.220	10.402
Pembiayaan Investasi Investment Financing	*Sale and Leaseback* MobilKu MotorKu Sale and Leaseback	17.247	14.391	14.254	7.557	547
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	Fasilitas Modal Usaha MobilKu MobilKu Working Capital Facility	-	-	-	1.641	2.695
	Sale and Leaseback MobilKu MobilKu Sale and Leaseback	6.368	5.403	6.146	4.713	393
	Sale and Leaseback MotorKu MotorKu Sale and Leaseback	44.159	6.134	-	-	-
Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah) Sale and Purchase Financing (Murabahah Contracts)	Pembiayaan Syariah Motor Baru New Motorcycle Sharia Financing	7.559	7.198	6.247	7.636	-
	Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu" "MasKu" Precious Metals Sharia Financing	861	833	1.044	1.324	253
Pembiayaan Jasa (Akad Ijarah) Service Financing (Ijarah Contract)	Pembiayaan Syariah "HajiKu" "Hajiku" Sharia Financing	460	-	-	-	-

Dalam Juta
In Million

Kegiatan Pembiayaan Financing Activities	Jenis Produk Products	2025	2024	2023	2022	2021
Pembiayaan Multiguna Barang Multipurpose Goods Financing	Pembiayaan Motor Baru (PPSA) New Motorcycle Financing (PPSA)	900.881	919.023	1.330.806	1.129.397	1.407.807
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Service Financing	Pembiayaan Multiguna MotorKu (PPSA) MotorKu Multipurpose Financing (PPSA)	91.142	568.820	518.093	956.248	1.094.492
	Fasilitas Dana MotorKu MotorKu Funding Facility	609.179	612.631	709.776	185.787	111
	Pembiayaan Multiguna MobilKu (PPSA) MobilKu Multipurpose Financing (PPSA)	-	-	-	540	482.207
	Fasilitas Dana MobilKu MobilKu Funding Facility	973.193	836.486	791.722	661.835	771.433
Pembiayaan Investasi Investment Financing	*Sale and Leaseback* MobilKu MobilKu Sale and Leaseback	1.982.316	1.736.538	1.767.002	908.671	76.562
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	Fasilitas Modal Usaha MobilKu MobilKu Business Capital Facility	-	-	-	142.181	257.103
	Sale and Leaseback MobilKu MobilKu Sale and Leaseback	623.013	508.252	587.105	420.474	49.405
	Sale and Leaseback MotorKu MotorKu Sale and Leaseback	549.487	74.928	-	-	-
Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah) Sale and Purchase Financing (Murabahah Contracts)	Pembiayaan Syariah Motor Baru New Motorcycle Sharia Financing	181.243	163.863	131.917	161.458	-
	Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu" "MasKu" Precious Metals Sharia Financing	15.350	8.948	8.574	8.829	1.372
Pembiayaan Jasa (Akad Ijarah) Service Financing (Ijarah Contract)	Pembiayaan Syariah "HajiKu" "Hajiku" Sharia Financing	11.286	-	-	-	-

Total Pembiayaan
Total Financing

(Rp Juta)
(Rp Million)

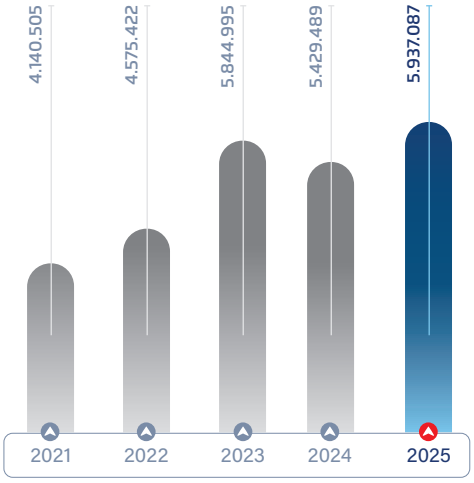

Total Pembiayaan
Total Financing

(Unit)
(Unit)

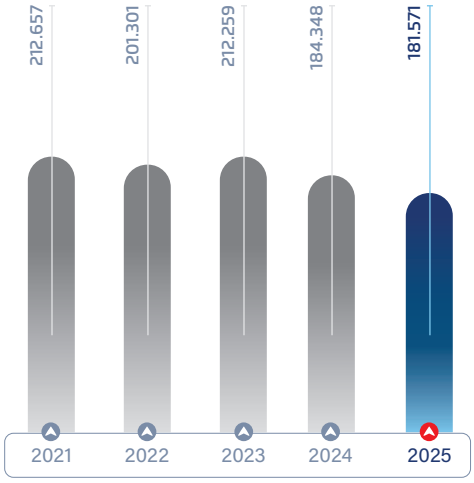

Total Aset
Total Assets

(Rp Juta)
(Rp Million)

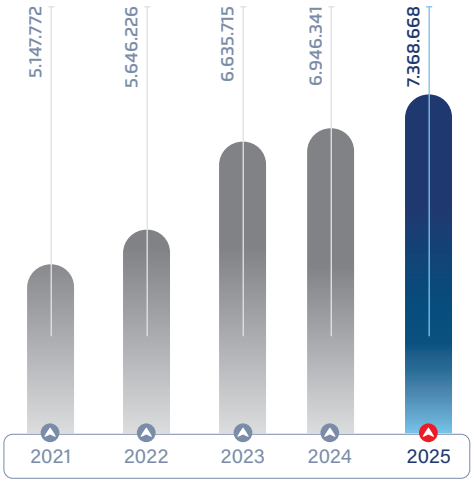

Total Liabilitas
Total Liabilities

(Rp Juta)
(Rp Million)

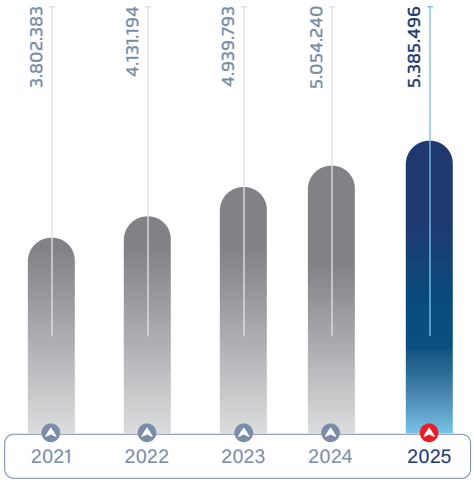

Total Ekuitas
Total Equity

(Rp Juta)
(Rp Million)

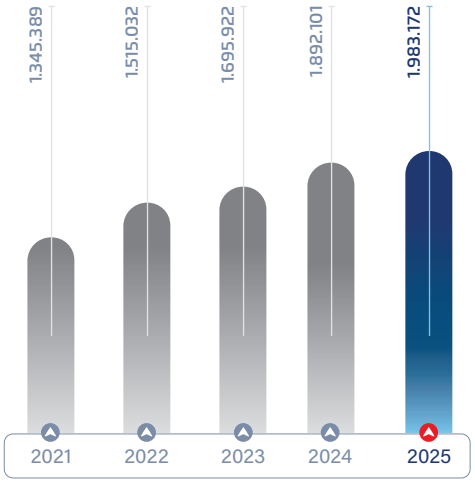

Total Pendapatan
Total Revenues

(Rp Juta)
(Rp Million)

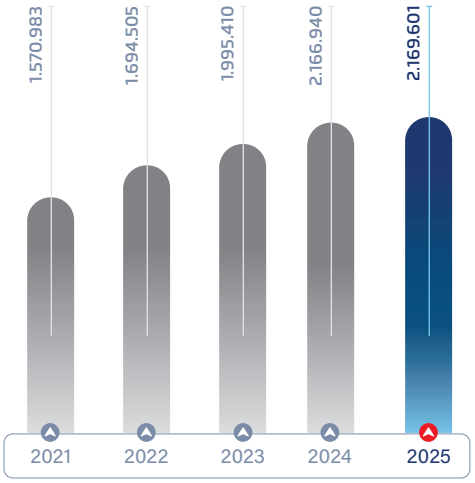

Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

(Rp Juta)
(Rp Million)

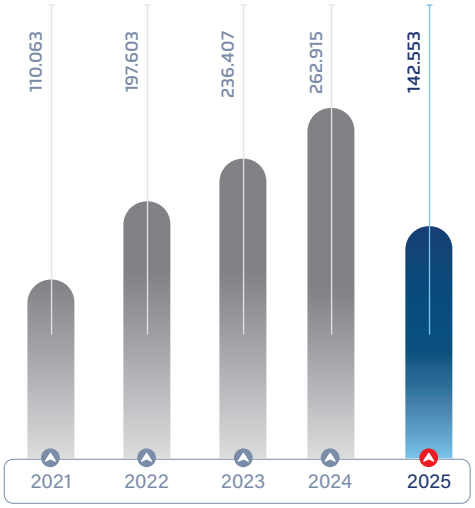

Non-Performing Financing
NPF (Gross)

(Persentase)(%)
(Percentage)(%)

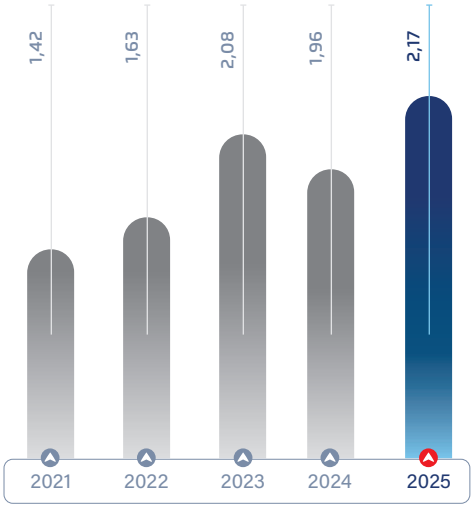



Ikhtisar Saham

Share Highlights

PERGERAKAN HARGA SAHAM 2025 SHARE PRICE MOVEMENT IN 2025

Periode Period	**Jumlah Saham yang Beredar** Total Outstanding Shares	**Harga Tertinggi** Highest Nominal	**Harga Terendah** Lowest Nominal	**Harga Penutupan** Closing Nominal	**Volume Perdagangan** Trading Volume	**Kapitalisasi Pasar** Market Capitalization
Triwulan I Quarter I	3.481.481.480	434	328	364	8.548.200	1.267.259.258.720
Triwulan II Quarter II	3.481.481.480	362	330	346	9.487.200	1.204.592.592.080
Triwulan III Quarter III	3.481.481.480	400	332	336	11.804.400	1.169.777.777.280
Triwulan IV Quarter IV	3.481.481.480	374	318	324	11.362.700	1.127.999.999.520

Hingga 30 Desember 2025
As of December 30, 2025

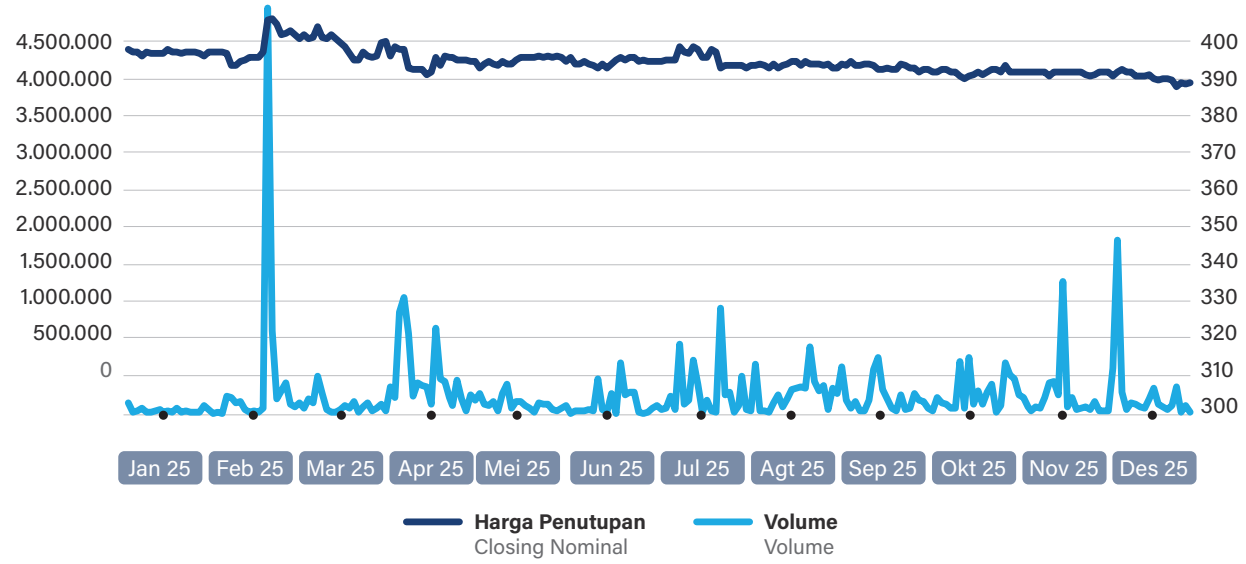

PERGERAKAN HARGA SAHAM 2024 SHARE PRICE MOVEMENT IN 2024

Periode Period	**Jumlah Saham yang Beredar** Total Outstanding Shares	**Harga Tertinggi** Highest Nominal	**Harga Terendah** Lowest Nominal	**Harga Penutupan** Closing Nominal	**Volume Perdagangan** Trading Volume	**Kapitalisasi Pasar** Market Capitalization
Triwulan I Quarter I	3.481.481.480	452	356	418	23.992.800	1.455.259.258.640
Triwulan II Quarter II	3.481.481.480	428	338	362	17.429.100	1.260.296.295.760
Triwulan III Quarter III	3.481.481.480	348	340	364	12.083.000	1.267.259.258.720
Triwulan IV Quarter IV	3.481.481.480	384	332	352	9.782.100	1.224.481.480.960

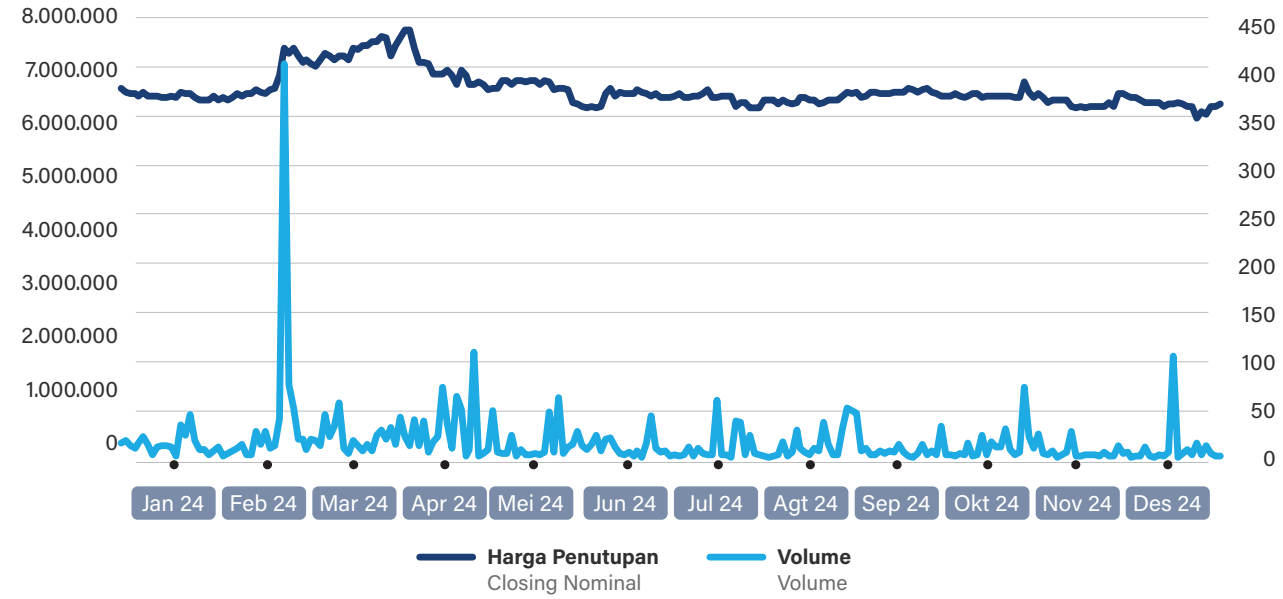



Ikhtisar Obligasi

Bond Highlights

Nama Obligasi Bonds	**Seri** Series	**Tingkat Bunga** Coupon Rate	**Nominal** Nominal	**Tanggal Pencatatan** Listing Date	**Jatuh Tempo** Maturity	**Sisa Hutang Pokok Obligasi Per Seri yang Masih Belum Lunas di Tahun 2025** Outstanding Principal of the Bonds Per Series that has Not Been Paid off in 2025
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023	B	7,00%	779.000.000.000	12 April 2023 April 12, 2023	11 April 2026 April 11, 2026	779.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024	B	6.95%	119.555.000.000	3 Juli 2024 July 3, 2024	2 Juli 2027 July 2, 2027	119.555.000.000
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025	A	6,45%	595.000.000.000	25 Juni 2025 June 25, 2025	4 Juli 2026 July 4, 2026	595.000.000.000
	B	6,85%	905.000.000.000	25 Juni 2025 June 25, 2025	24 Juni 2028 June 24, 2028	905.000.000.000

Nama Obligasi Bonds	**Peringkat** Ratings
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023	AA+(idn)
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024	AAA (idn)
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025	AAA (idn)

Aksi Korporasi
Corporate Actions

Sepanjang Tahun 2025, Perseroan melaksanakan aksi korporasi berupa penerbitan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp1,5 triliun, yang diterbitkan melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

In 2025, the Company carried out a corporate action by issuing the Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025, valued at Rp1.5 trillion, through the Sustainable Public Offering (PUB) mechanism.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham/ Penghapusan Pencatatan Saham
Suspension/Delisting

Hingga Laporan Tahunan 2025 ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

As of the publication of this 2025 Annual Report, there has been no suspension of stock trading and/or delisting of the Company's shares.

Peristiwa Penting
Event Highlights





Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Jakarta, 25 Maret 2025
Jakarta, March 25, 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

Function Room, Sentral Senayan III Lt. 28,
Jl. Asia Afrika No.8,
Gelora Bung Karno Senayan,
Jakarta 10270

Jakarta, 25 Maret 2025
Jakarta, March 25, 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders

Function Room, Sentral Senayan III Lt. 28,
Jl. Asia Afrika No.8,
Gelora Bung Karno Senayan,
Jakarta 10270

Paparan Publik
Public Expose



Jakarta, 25 Maret 2025
Jakarta, March 25, 2025

Paparan Publik
Public Expose

Function Room, Sentral Senayan III Lt. 28,
Jl. Asia Afrika No.8,
Gelora Bung Karno Senayan,
Jakarta 10270



Jakarta, 26 Maret 2025
Jakarta, March 26, 2025

Working Capital Installment 4 (Uncommitted)

Rp250.000.000.000

PT Bank KEB Hana Indonesia

Jakarta, 20 Agustus 2025
Jakarta, August 20, 2025

Pinjaman Korporasi (Modal Kerja)
Corporate Lending (Working Capital)

Rp200.000.000.000

PT Bank Shinhan Indonesia

Jakarta, 30 Oktober 2025
Jakarta, October 30, 2025

Fixed Loan Sliding 2

Rp200.000.000.000

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Jakarta, 4 Desember 2025
Jakarta, December 4, 2025

Pinjaman Tetap 22
Fixed Loan 22

Rp800.000.000.000

PT Bank Pan Indonesia Tbk



Jakarta, 18 Desember 2025
Jakarta, December 18, 2025

Kredit Modal Kerja - Angsuran *(Executing)*
Working Capital Loan - Installments (Executing)

Rp200.000.000.000

PT Bank Ina Perdana Tbk

Penerbitan Obligasi
Bond Issuance



Jakarta, 24 Juni 2025
Jakarta, June 24, 2025

Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025
Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025

Rp1.500.000.000.000

Penawaran Umum Berkelanjutan
Sustainable Public Offering



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

02

Laporan Manajemen
Management Report

Melalui penerapan strategi yang tepat oleh Direksi serta pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Perseroan mampu mencatatkan kinerja yang solid dan memperkuat daya saing di industri, meskipun berada di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang sangat menantang.

Through the implementation of appropriate strategies by the Board of Directors and active supervision by the Board of Commissioners, the Company was able to record solid performance and strengthen its competitiveness in the industry, amidst very challenging economic and business conditions.





Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara konsisten memberikan pengawasan dan arahan strategis yang efektif, serta bersinergi dengan Direksi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pencapaian target bisnis di tengah dinamika pasar.

Throughout 2025, the Board of Commissioners consistently provided effective oversight and strategic direction, and synergized with the Board of Directors to ensure sustainable growth and achievement of business targets amidst market dynamics.



Sarastri Baskoro

Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Dengan penuh rasa syukur kami menyampaikan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugas pengawasan kepada Direksi, termasuk pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi pengawasan yang ketat atas pelaksanaan strategi Perseroan, terutama pada aspek penyaluran pembiayaan, penerapan teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, penerapan tata kelola yang baik bagi Perseroan, serta implementasi keuangan berkelanjutan.

Mengingat kondisi ekonomi yang masih menantang, Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Perseroan telah dikelola dengan baik dan profesional. Untuk itu, sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melakukan komunikasi yang intensif dengan Direksi untuk membahas berbagai strategi bisnis serta isu-isu signifikan, termasuk konsistensi pelaksanaan rencana bisnis tahun 2025. Arahan-arahan kepada Direksi diberikan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan secara umum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Kondisi perekonomian tahun 2025 masih sangat menantang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercapai sebesar 5,11%. Di tengah kondisi tersebut, penjualan sepeda motor hanya mengalami kenaikan sebesar 1,25% menjadi 6.412.769 unit sepanjang Januari-Desember 2025, karena daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Di tengah kondisi tersebut, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan dengan baik dalam memperkuat fondasi Perseroan untuk mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Inisiatif strategis yang diambil Direksi dalam menyikapi kondisi ekonomi dan industri selama tahun 2025 berhasil membuat Perseroan dapat mempertahankan kinerja yang solid di tengah kondisi yang sangat menantang.

With heartfelt gratitude, we would like to present the Board of Commissioners' Report the Company for the 2025 financial year. Throughout 2025, the Board of Commissioners carried out its supervisory functions and duties to the Board of Directors, including overseeing the implementation of the Company's Business Plan. Furthermore, the Board of Commissioners also carried out strict supervisory function over the Company's strategy implementation, particularly in aspects of financing disbursement, information technology application, human resource development, implementation of good governance for the Company, and sustainable finance.

Given the challenging economic conditions, the Board of Commissioners consistently ensured that the Company was managed properly and professionally. As such, throughout 2025, the Board of Commissioners communicated intensively with the Board of Directors to discuss various business strategies and significant issues, including ensuring the consistent implementation of the 2025 business plan. Directions to the Board of Directors were provided through mechanisms established in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

This report is prepared as a form of accountability for the implementation of our supervisory duties and provision of advice to the Board of Directors in general company management in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The economic condition in 2025 remained highly challenging. According to Statistics Board of Indonesia (BPS), Indonesia's economic growth reached 5.11% in 2025. Despite this, motorcycle sales only increased by 1.25% to 6,412,769 units from January to December 2025, due to the people's purchasing power was not yet fully recovered.

Amidst these conditions, the Board of Commissioners considered that the Board of Directors properly carried out its duties and responsibilities in managing the Company by strengthening the Company's foundation to support sustainable business growth. The strategic initiatives taken by the Board of Directors in responding to economic and industrial conditions throughout 2025 successfully made the Company able to maintain solid performance amidst very challenging conditions.



Dewan Komisaris menilai Direksi mampu merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan strategi bisnis dalam kegiatan harian yang dapat berjalan secara efektif dan optimal, termasuk kemampuan Perseroan menyesuaikan strategi dan operasional dengan perubahan pasar, kondisi ekonomi, dan daya beli masyarakat.

The Board of Commissioners acknowledges that the Board of Directors is capable of planning, directing, and coordinating all Company activities to achieve the Company's objectives. This is evidenced by the effective and optimal implementation of business strategies in daily activities, including the Company's ability to adapt its strategies and operations to changes in market, economic conditions, and consumer purchasing power.

Dewan Komisaris juga menilai Direksi mampu menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, baik yang dilakukan melalui ekspansi dan *upgrade* Kantor Jaringan di beberapa wilayah, maupun meningkatkan daya saing melalui inovasi strategi bisnis, salah satunya melalui pengembangan layanan berbasis teknologi informasi. Langkah otomasi dalam akuisisi konsumen yang dikembangkan Direksi juga berhasil mengendalikan risiko kredit dan kualitas portofolio Perseroan.

The Board of Commissioners also acknowledges the Board of Directors' ability to maintain and improve service quality, including by expanding and upgrading Network Office in several regions, and by increasing competitiveness through innovative business strategies, one of which is through the development of information technology-based services. The automation of customer acquisition developed by the Board of Directors also successfully controls credit risk and the quality of the Company's portfolio.

Pada tahun 2025, Direksi secara aktif melanjutkan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan. Perseroan melanjutkan program WOMXPerience, yang dirancang untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan secara lebih personal, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih berkesan. Selain itu, Direksi juga terus meningkatkan kerja sama dengan beragam platform aplikasi digital untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem layanan keuangan yang terintegrasi dan mudah dijangkau.

In 2025, the Board of Directors actively pursued initiatives to improve operational efficiency and customer service quality. The Company continued its WOMXPerience program, designed to understand customer needs and expectations more personally, thereby providing a more memorable experience. Furthermore, the Board of Directors continued to increase collaboration with various digital application platforms to facilitate consumer payment transactions. This was part of the effort to strengthen an integrated and accessible financial services ecosystem.

Direksi juga terus mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk memperluas akses layanan pembiayaan. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah dengan menggandeng PT POS Indonesia yang memiliki jaringan sangat luas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan tersebut akan difungsikan sebagai *point of sales* (titik layanan) untuk memberikan akses layanan pembiayaan bagi Perseroan.

The Board of Directors also continues to develop partnerships with third parties to expand access to financing services. One important step taken is to partner with PT POS Indonesia, which has a vast network spread throughout Indonesia. This network will function as point of sales (service points) to provide access to financing services for the Company.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, tahun 2025 Perseroan dapat membukukan kinerja keuangan yang cukup solid. Perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar Rp2,17 triliun, dengan total pembiayaan sebesar Rp5,94 triliun dan laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp142,55 miliar.

Through these various initiatives, the Company was able to record positive financial performance in 2025, generally in line with its targets. The Company recorded total revenues of Rp2.17 trillion, with total financing of Rp5.94 trillion, and income for the year of Rp142.55 billion.

Dari aspek fundamental, Perseroan mencatat pertumbuhan total aset sebesar 6,08% menjadi Rp7,37 triliun, didukung oleh kenaikan ekuitas sebesar 4,81% menjadi Rp1,98 triliun, sementara liabilitas meningkat 6,55% menjadi Rp5,39 triliun.

In terms of fundamental aspect, the Company recorded a 6.08% growth in total assets to Rp7.37 trillion, supported by a 4.81% increase in equity to Rp1.98 trillion, while liabilities increased by 6.55% to Rp5.39 trillion.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan sepanjang tahun 2025. Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, antara lain terkait penerapan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, penerapan prinsip tata kelola yang baik dan aspek-aspek lainnya. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat, rekomendasi, serta persetujuan terhadap hal-hal yang disampaikan Direksi.

PENGAWASAN TERHADAP PERUMUSAN STRATEGI

Fungsi pengawasan telah dijalankan Dewan Komisaris sejak perumusan strategi Perseroan, dalam hal ini dalam proses penyusunan Rencana Bisnis. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi untuk memastikan strategi dan kebijakan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan aspirasi pemegang saham. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi agar strategi disusun berdasarkan kondisi makro ekonomi, daya saing bisnis, dan daya beli masyarakat.

Pada tahap akhir, Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atas strategi, kebijakan, dan target yang akan disampaikan Direksi kepada pemegang saham. Persetujuan dari Dewan Komisaris diberikan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tujuan Perseroan dan kondisi eksternal yang berpotensi memengaruhi target strategis.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Bisnis yang telah disampaikan Direksi dan diinformasikan kepada Pemegang Saham sebagai acuan pengawasan.

Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan *review* atas setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan Rencana Bisnis tersebut. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi dan *review* terhadap kinerja keuangan, analisis risiko, perkembangan bisnis, penjualan, operasional, teknologi informasi, kinerja cabang, dan aspek utama lainnya.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris adalah upaya yang dijalankan Perseroan untuk terus meningkatkan daya saingnya di tengah kondisi persaingan industri yang semakin ketat dan kondisi ekonomi yang cukup menantang. Inisiatif yang dijalankan Direksi untuk meningkatkan layanan digital merupakan inisiatif yang sangat baik, namun masih perlu penyempurnaan dan tingkat keamanannya harus terus ditingkatkan.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

As the body in charge of overseeing the Company management carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners conducted various supervisory activities throughout 2025. This supervision covered various aspects, including the implementation of the Company's strategies and policies, application of good governance principles, and other aspects. Furthermore, the Board of Commissioners also provided advice, recommendations, and approval on matters submitted by the Board of Directors.

OVERSIGHT OF STRATEGY FORMULATION

The Board of Commissioners has carried out its supervisory function since the Company's strategy formulation, specifically during the preparation of Business Plan. The Board of Commissioners provides guidance to the Board of Directors to ensure that the strategies and policies are in line with the vision, mission, objectives, and shareholders' aspirations. Furthermore, the Board of Commissioners also provides input to the Board of Directors so that strategies are formulated based on macroeconomic conditions, business competitiveness, and public purchasing power.

In the final stage, the Board of Commissioners will approve the strategies, policies, and targets that the Board of Directors will present to the shareholders. The Board of Commissioners' approval is granted after a comprehensive evaluation of the Company's objectives and external conditions that could potentially impact strategic targets.

OVERSIGHT OF STRATEGY IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners oversees the implementation of the Company's strategy. In performing its oversight function, the Board of Commissioners adheres to the Business Plan submitted by the Board of Directors and communicated to Shareholders as a reference for oversight.

The Board of Commissioners monitors and reviews every strategic initiative implemented by the Board of Directors and assesses its alignment with the Business Plan. Furthermore, the Board of Commissioners also evaluates and reviews financial performance, risk analysis, business development, sales, operations, information technology, branch performance, and other key aspects.

Several key areas of focus for the Board of Commissioners are the Company's efforts to continuously improve its competitiveness amidst the increasingly fierce industry competition and challenging economic conditions. The initiatives carried out by the Board of Directors to improve digital services are excellent but still need refinement and their security measures must be continuously enhanced.



Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap upaya penyaluran pembiayaan yang dilakukan di tengah meningkatnya risiko kredit akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Dewan Komisaris terus mengingatkan Direksi agar selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan aspek manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, Direksi dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dunia usaha, sehingga bisa mengelola dengan baik dinamika strategi penyaluran pembiayaan yang tepat, agar portofolio pembiayaan Perseroan dapat terjaga dengan baik dengan risiko yang seminimal mungkin.

MEKANISME DAN FREKUENSI PENGAWASAN

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap Direksi melalui beberapa mekanisme, antara lain dengan memeriksa laporan salah satunya Rencana Bisnis Tahunan dan melakukan pengawasan tambahan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, Dewan Komisaris membagi pembidangan tugas pengawasan, sehingga semua aspek operasional Perseroan tak luput dari pengawasan Dewan Komisaris. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Dewan Komisaris, dilaksanakan melalui rapat internal Dewan Komisaris serta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal sebanyak 8 kali rapat internal Dewan Komisaris dengan rata-rata kehadiran anggota di atas kuorum rapat. Selain itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama Direksi sebanyak 11 kali.

Rapat Dewan Komisaris bertujuan untuk mengevaluasi laporan kinerja dan realisasi target, *review* Laporan Keuangan untuk menilai profitabilitas, kualitas aset, dan efektivitas strategi dan mengevaluasi Pencapaian KPI, mencakup aspek keuangan, operasional, kepatuhan, dan manajemen risiko.

PENUGASAN KOMITE

Dewan Komisaris juga dapat melakukan pengawasan dengan menugaskan komite-komite khusus di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite ini bertugas untuk menganalisis dan melakukan pengawasan lebih mendalam dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

TANGGAPAN, NASIHAT DAN REKOMENDASI

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris dapat memberikan tanggapan, nasihat dan rekomendasi kepada Direksi. Beberapa tanggapan

Furthermore, the Board of Commissioners also pays attention to financing disbursement efforts amid increasing credit risk due to the unstable economic conditions. The Board of Commissioners continues to remind the Board of Directors to prioritize prudential principles and enhance risk management in financing disbursement. Therefore, the Board of Directors is required to stay abreast of the developments in business world, and thus, properly manage the dynamics of appropriate financing disbursement strategies, in order to ensure the Company's financing portfolio is well-maintained with minimal risk.

OVERSIGHT MECHANISM AND FREQUENCY

The Board of Commissioners strictly oversees the Board of Directors through several mechanisms, including reviewing reports including the Annual Business Plan and conducting additional oversight through Audit Committee, Risk Oversight Committee, as well as Nomination and Remuneration Committee.

BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS

To ensure smooth oversight, the Board of Commissioners divides its supervisory duties so that all aspects of the Company's operations are subject to the Board of Commissioners' oversight. Follow-up to the supervision carried out by each member of the Board of Commissioners is held through the Board of Commissioners' internal meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 8 internal meetings, with an average attendance exceeding the meeting quorum. Furthermore, the Board of Commissioners held 11 joint meetings with the Board of Directors.

The Board of Commissioners' meetings are aimed at evaluating performance reports and target realization, reviewing Financial Statements to assess profitability, asset quality, and strategy effectiveness and evaluating KPI achievement, covering financial, operational, compliance, and risk management aspects.

COMMITTEE ASSIGNMENTS

The Board of Commissioners can also conduct oversight by assigning special committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee, Risk Oversight Committee as well as Nomination and Remuneration Committee. These committees are in charge of analyzing and conducting more in-depth oversight and reporting the results to the Board of Commissioners.

RESPONSES, ADVICE, AND RECOMMENDATIONS

In accordance with the provisions of laws and regulations, the Board of Commissioners can provide responses, advice, and recommendations to the Board of Directors. Some

dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun strategi yang realistis dan adaptif terhadap sesuai kondisi pasar.
2. Memperkuat pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan.
4. Memelihara kualitas portofolio melalui seleksi kredit yang ketat dan pengelolaan piutang bermasalah.
5. Melakukan inovasi atas produk dan layanan.
6. Memastikan transparansi serta ketepatan pelaporan keuangan dan operasional.
7. Melakukan pengembangan kompetensi dan kepemimpinan sumber daya manusia guna mendukung pencapaian target Perseroan secara berkelanjutan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Prospek ekonomi global dan nasional tahun 2026 diperkirakan akan sangat menantang. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 3,1% pada 2026, sedikit menurun dari 3,2% pada 2025. Melambatnya pertumbuhan global terutama karena penurunan investasi dan perdagangan akibat ketidakpastian tarif impor dan kebijakan. Namun demikian, Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh positif dalam rentang 4,7% hingga 5,5%, dengan optimisme mencapai 5,8% jika didukung oleh peningkatan investasi dan ekspor.

Penjualan sepeda motor diyakini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025. Faktor pendorong utamanya adalah adanya indikasi membaiknya kondisi ekonomi dan strategi produsen dalam mengeluarkan model baru.

Di tengah kondisi tersebut, Dewan Komisaris optimis Perseroan akan dapat meraih pertumbuhan usaha yang positif pada tahun 2026. Dewan Komisaris meyakini Perseroan memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan menjadi peluang bisnis. Untuk itu, Dewan Komisaris akan terus memberikan dukungan kepada Direksi agar dapat mewujudkan hal tersebut.

Atas Rencana Bisnis Tahunan (RBT) 2026, Dewan Komisaris menilai target-target yang ditetapkan Direksi pada RBT tersebut merupakan target yang realistis dan sangat mungkin untuk diwujudkan. Dewan Komisaris juga menilai bahwa RBT disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar, tren digitalisasi layanan keuangan serta kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Dewan Komisaris memandang bahwa RBT 2026 yang telah disusun oleh Direksi mencerminkan langkah strategis Perseroan dalam menjawab dinamika industri pembiayaan yang kian kompetitif serta tantangan makro ekonomi yang masih berlanjut.

of the responses and recommendations provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors, among others, are as follows:

1. Developing realistic strategies that are adaptive to market conditions.
2. Strengthening risk management and regulatory compliance.
3. Improving operational efficiency and financial performance.
4. Maintaining portfolio quality through rigorous credit selection and managing non-performing receivables.
5. Innovating products and services.
6. Ensuring transparency and accuracy of financial and operational reporting.
7. Developing human resource competencies and leadership to support sustainable achievement of the Company's targets.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY BOARD OF DIRECTORS

The global and national economic outlook for 2026 is expected to be very challenging. The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth of 3.1% in 2026, a slight decrease from 3.2% in 2025. Slowing global growth was mainly due to a decline in investment and trade due to uncertainty over import tariffs and policies. Nevertheless, Bank Indonesia projects positive economic growth in the range of 4.7% to 5.5%, with optimism that it will reach 5.8% if supported by increased investment and exports.

Motorcycle sales are expected to increase compared to those of 2025. The main driving factors are indications of improving economic conditions and manufacturers' strategies in releasing new models and manufacturers' strategies in launching new models.

Amidst these conditions, the Board of Commissioners is optimistic that the Company will achieve positive business growth in 2026. The Board of Commissioners believes that the Company has a number of potentials that can be optimized into business opportunities. Thus, the Board of Commissioners continues to support the Board of Directors in order to realize such achievement.

For the 2026 Annual Business Plan (RBT), the Board of Commissioners considers that the targets set by the Board of Directors in the RBT are realistic and highly achievable. The Board of Commissioners also considers that the RBT is prepared with due observance of market conditions, trends in digitalization of financial services and evolving consumer needs. The Board of Commissioners views that the 2026 RBT prepared by the Board of Directors reflects the Company's strategic steps in addressing the increasingly competitive dynamics of financing industry and ongoing macroeconomic challenges.



RBT 2026 juga menunjukkan arah kebijakan yang sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan, penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas kredit yang selama ini menjadi fokus utama Perseroan.

PANDANGAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik di Perseroan pada 2025 telah berjalan secara memadai, tercermin dari adanya mekanisme pengawasan Direksi, transparansi pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi OJK, serta struktur organisasi dan komite pendukung yang jelas.

Dengan menerapkan tata kelola yang baik dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Perseroan juga dapat memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai dengan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik, Dewan Komisaris memandang implementasi tata kelola yang baik di lingkup Perseroan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengembangan perangkat kebijakan yang terus diperbaharui, hingga evaluasi dan pemantauan tata kelola yang baik, menjadi cerminan komitmen Direksi untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik tata kelola yang baik di seluruh elemen operasi dan bisnis Perseroan.

Namun demikian, Dewan Komisaris secara berkelanjutan telah mendorong Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan etika di seluruh lini Perseroan.
2. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi telah bekerja secara efektif dalam mendukung fungsi pengawasan.
3. Mendorong komunikasi yang lebih terbuka dengan pemegang saham dan regulator untuk membangun kepercayaan.
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap Kebijakan & Prosedur internal, pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif, serta penerapan transparansi dalam proses pengambilan keputusan strategis Perseroan.
5. Mendorong pengelolaan Perseroan yang lebih akuntabel, proaktif dalam mitigasi risiko, serta mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan manajemen risiko di Perseroan sepanjang tahun 2025 telah berjalan cukup baik, dengan identifikasi dan mitigasi risiko utama, termasuk risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan,

The 2026 RBT also demonstrates policy direction that is in line with the Company's strategy for sustainable growth, strengthening governance and improving credit quality, which have been the Company's primary focuses.

VIEWS ON GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners considered that the implementation of Good Corporate Governance principles at the Company's in 2025 was adequate, as reflected in the Board of Directors' oversight mechanisms, transparent financial reporting, compliance with OJK regulations, and clear organizational structure and supporting committees.

By implementing good corporate governance in its operations, the Company can create added value for all stakeholders. The Company can also ensure that the established targets are achieved by implementing sound business practices.

As the body in charge of overseeing good corporate governance implementation, the Board of Commissioners believes that good corporate governance implementation within the Company continues to improve over time. The development of continuously updated policy instruments, until evaluation and monitoring of good corporate governance, reflect the Board of Directors' commitment to implementing good corporate governance principles and practices in all elements of the Company's operations and business.

Nevertheless, the Board of Commissioners constantly encourage the Board of Directors to improve the quality of governance implementation, among others, by:

1. Cultivating a culture of compliance and ethics across all levels of the Company.
2. Ensuring that the Audit Committee, Risk Oversight Committee, as well as Nomination and Remuneration Committee have worked effectively in supporting oversight function.
3. Encouraging more open communication with shareholders and regulators to build trust.
4. Conducting periodic evaluation of internal Policies & Procedures, development of a more comprehensive risk management system, and implementation of transparency in the Company's strategic decision-making processes.
5. Encouraging the Company's management to be more accountable, proactive in risk mitigation, and able to create sustainable value for shareholders.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners considered that the risk management at the Company's throughout 2025 was implemented quite well, with the identification and mitigation of key risks, including credit, operational,

yang dilakukan secara konsisten serta dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Sistem ini dinilai mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih hati-hati, meskipun tetap perlu peningkatan cakupan dan efektivitas mitigasi risiko untuk menghadapi dinamika pasar dan perkembangan bisnis yang semakin kompleks.

Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi untuk terus meningkatkan penerapan manajemen risiko melalui perluasan cakupan identifikasi risiko, termasuk risiko reputasi dan teknologi, penajaman prosedur mitigasi risiko, percepatan digitalisasi sistem pemantauan risiko secara *real-time*, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tim manajemen risiko. Selain itu, Dewan Komisaris juga menggaris bawahi tentang pentingnya integrasi manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga setiap keputusan bisnis tidak hanya mempertimbangkan peluang pertumbuhan, tetapi juga potensi risiko secara proaktif.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris menilai penerapan sistem pengendalian internal di Perseroan tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan telah menjadi komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali dengan mengacu pada *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commissio*n (COSO).

Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan. *Internal Control Integrated Framework* diterapkan untuk memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di Perseroan telah berjalan dengan baik serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaporan, penanganan, dan tindak lanjut atas setiap laporan dinilai telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan sehingga mendukung terciptanya budaya integritas di seluruh lingkungan Perseroan.

Dalam penerapan WBS sesuai dengan kebijakan Perseroan, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas aktif dengan wewenang dan tanggung jawab paling sedikit mencakup dalam membangun budaya anti *fraud*, memberikan persetujuan Surat Pernyataan Integritas Karyawan, mengawasi penerapan kode etik terkait pencegah *fraud*, mengawasi penerapan Strategi anti *fraud*, mendorong pengembangan kualitas SDM untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), memantau evaluasi dan tindak lanjut atas kejadian *fraud* serta memastikan bahwa

liquidity, and compliance risks being consistently carried out and regularly reported to the Board of Commissioners.

This system is considered capable of supporting more prudent decision-making, though the scope and effectiveness of risk mitigation still need to be improved to address the increasingly complex market dynamics and business developments.

Nevertheless, the Board of Commissioners advises the Board of Directors to continue improving the risk management implementation by expanding the scope of risk identification, including reputational and technological risks, sharpening risk mitigation procedures, accelerating digitalization of real-time risk monitoring systems, and enhancing capacity and competency of the risk management team. Furthermore, the Board of Commissioners emphasizes the importance of integrating risk management into strategic decision-making process, so as to ensure that every business decision proactively considers not only growth opportunities but also potential risks.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners considered that the internal control system at the Company's in 2025 was well-implemented and became a crucial oversight component in the Company's management, serving as a benchmark for sound and controlled operational activities, as outlined in the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

The objectives of internal control, according to COSO, include operational objectives, reporting objectives, and compliance objectives. Internal Control Integrated Framework is applied to ensure the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with applicable laws and regulations.

IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Board of Commissioners assessed that the Company's Whistleblowing System (WBS) has been applied effectively and in line with established procedures and regulations. The reporting, handling, and follow-up mechanisms for each report are deemed to meet the principles of transparency, accountability, and compliance, thus supporting the creation of a culture of integrity throughout the Company.

In applying WBS according to Company policy, the Board of Commissioners plays an active supervisory role with the authority and responsibility to at least include building an anti-fraud culture, providing approval for Employee Integrity Statement, supervising the implementation of code of conduct related to fraud prevention, supervising the implementation of Anti-Fraud Strategies, encouraging HR quality development to increase awareness, monitoring the evaluation and follow-up of fraud incidents, and ensuring



saluran komunikasi WBS tersedia secara memadai baik bagi pihak internal maupun eksternal, dengan jaminan kerahasiaan pelapor yang bebas dari intervensi atau tindakan balasan agar seluruh jenjang organisasi di Perseroan memahami dan mematuhi kebijakan serta prosedur terkait pengendalian *fraud*.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memandang ketiga komite tersebut telah menjalankan perannya secara efektif, independen, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Masing-masing komite telah berkontribusi penting dalam memastikan penerapan tata kelola yang baik bagi Perseroan melalui pelaksanaan tugas yang terarah, objektif, dan sesuai dengan piagam serta pedoman kerja yang berlaku.

Dewan Komisaris menilai, ketiga komite telah melakukan rapat yang terstruktur, didukung dokumentasi yang baik, dan menghasilkan rekomendasi yang relevan serta tepat waktu. Selain itu, komite juga telah menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan *ad-hoc* yang informatif, memadai, dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan Dewan Komisaris serta telah berperan aktif dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan pengelolaan risiko sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Dalam melakukan penilaian, indikator penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

1. Kemampuan Komite dalam menggunakan wewenang, memanfaatkan sumber daya, mengakses informasi yang relevan, serta menyelenggarakan rapat dan membahas isu-isu strategis secara sistematis, konstruktif, dan berbasis data.
2. Ketepatan, ketelitian, dan konsistensi Komite dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul, serta kesesuaian pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab dengan Piagam Komite.
3. Kecukupan jumlah dan komposisi anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta kecermatan, relevansi, dan kebermanfaatan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan strategis.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Tahun 2025, komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ibu Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan pada 30 September 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris

that WBS communication channels are adequately available for both internal and external parties, with guaranteed confidentiality of the whistleblower who is free from intervention or retaliation so that all levels of the Company's organization understand and comply with the policies and procedures related to fraud control.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Oversight Committee. Throughout 2025, the Board of Commissioners viewed that these three committees carried out their roles effectively, independently, and professionally in supporting the Board of Commissioners' oversight function. Each committee made significant contribution to ensuring the implementation of good governance for the Company through the execution of duties that were focused, objective, and in accordance with the applicable charter and work guidelines.

The Board of Commissioners considered that the three committees held structured meetings with proper documentation and made relevant and timely recommendations. Furthermore, the committees submitted informative, adequate, and transparent reports to the Board of Commissioners on a regular and ad-hoc basis to support the Board of Commissioners' decision-making and played an active role in strengthening corporate governance, compliance, and risk management practices in accordance with good corporate governance principles.

In conducting the assessment, the Board of Commissioners used assessment indicators as follows:

1. The Committee's ability to exercise its authority, utilize resources, access relevant information, and hold meetings and discuss strategic issues in a systematic, constructive, and data-driven manner.
2. The Committee's accuracy, thoroughness, and consistency in following up on emerging issues, and conformity of its functions and responsibilities implementation with the Committee Charter.
3. The adequacy of the number and composition of members in carrying out its supervisory function, as well as the accuracy, relevance, and usefulness of recommendations provided to the Board of Commissioners for strategic decision-making.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

In 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners underwent changes due to the end of Ms. Myrnie Zachraini Tamin's term of office as Independent Commissioner of the Company on September 30, 2025. This resolution was stated in the Deed of Resolution of the Company's Meeting Number 1 dated October 1, 2025, made before Aulia Taufani, S.H., a Notary in South Jakarta. Thus,

di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	:	Sarastri Baskoro
Komisaris Commissioner	:	Thilagavathy Nadason
Komisaris Commissioner	:	Taufik Aulia
Komisaris Independen Independent Commissioner	:	Rallyati A. Wibowo, S.E.

Atas nama Perseroan, Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Myrnie Zachraini Tamin atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

On behalf of the Company, we extend our gratitude and appreciation to Ms. Myrnie Zachraini Tamin for her dedication and contribution while serving as Independent Commissioner of the Company.

APRESIASI

Tahun 2025 yang penuh tantangan telah berhasil dilalui Perseroan dengan pencapaian kinerja yang cukup baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan atas kerja keras, komitmen, dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Berkat sinergi dan profesionalisme seluruh insan Perseroan, kinerja yang solid, dan berkelanjutan dapat terwujud dengan baik.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kepada seluruh konsumen dan mitra kerja, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik. Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada konsumen dan seluruh pemangku kepentingan.

APPRECIATION

The Company successfully navigated the challenging year of 2025, achieving impressive performance. The Board of Commissioners expresses its highest appreciation to the Board of Directors, all management, and employees for their hard work, commitment, and dedication. Such synergy and professionalism of all Company personnel resulted in achieving solid, and sustainable performance.

The Board of Commissioners also expresses its gratitude to the Shareholders for their trust and support, thus enabling the Board of Commissioners to carry out its duties and responsibilities properly. To all customers and business partners, the Board of Commissioners expresses its gratitude for the trust and excellent cooperation that has been established. The Company is committed to continuously providing sustainable value and benefits to customers and all stakeholders.

Jakarta, 6 Maret 2026 | March 6, 2026
Atas Nama Dewan Komisaris | On Behalf of the Board of Commissioners



Sarastri Baskoro

Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Komisaris
Board of Commissioners



01 **Thilagavathy Nadason**
Komisaris
Commissioner

02 **Sarastri Baskoro**
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

03 **Taufik Aulia**
Komisaris
Commissioner

04 **Rallyati A. Wibowo, S.E.**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors



05 **Djaja Suryanto Sutandar**
Presiden Direktur
President Director

06 **Anthony Yuarez Panggabean**
Direktur
Director

07 **Njauw Vido Onadi**
Wakil Presiden Direktur
Vice President Director

08 **Wibowo**
Direktur
Director

09 **Cincin Lisa Hadi**
Direktur
Director

Menghadapi dinamika 2025, Perseroan memperkokoh fondasi pertumbuhan melalui akselerasi digital KAWAN 2.0, diversifikasi produk syariah, dan ekspansi strategis demi ketahanan bisnis jangka panjang.

Facing the dynamics of 2025, the Company strengthened its growth foundation through digital acceleration of KAWAN 2.0, diversification of sharia products, and strategic expansion for long-term business resilience.

Djaja Suryanto Sutandar

Presiden Direktur
President Director



Laporan Direksi
Board of Directors Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, Perseroan dapat melalui tahun 2025 yang penuh tantangan dengan baik. Perkenankan kami atas nama Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan untuk periode tahun buku 2025.

Tahun 2025 kinerja Perseroan menunjukkan hasil positif untuk sejumlah indikator kinerja keuangan seperti pertumbuhan aset, kredit dan juga pendapatan, namun mengalami pelemahan untuk sejumlah indikator kinerja keuangan lainnya. Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja Perseroan tentu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, yang berada di luar kendali Perseroan. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan pengelolaan dan kinerja Perseroan sepanjang tahun buku 2025 melalui Laporan Tahunan 2025.

We would like to extend praise and gratitude to the God Almighty for His grace and abundant blessings so as the Company's could went through the challenging year of 2025 properly. On behalf of the Board of Directors, allow us to submit our accountability report on the Company's management for the 2025 financial year.

In 2025, the Company's performance showed positive results for a number of financial performance indicators, such as asset growth, credit, and revenues, but weakened for several other financial performance indicators. We recognized that the Company's performance was influenced by both internal and external factors, many of which were beyond the Company's control. Through this opportunity, allow us to report on the Company's management and performance throughout the 2025 financial year through the 2025 Annual Report.

KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI PEMBIAYAAN TAHUN 2025

Ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren positif meskipun menghadapi tantangan eksternal yang dinamis. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,11% pada tahun 2025, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,03%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, investasi infrastruktur, dan ekspor yang stabil.

Inflasi Indonesia pada tahun 2025 berada dalam rentang target Bank Indonesia yaitu 2,0% - 4,0%, dengan tingkat inflasi inti yang terjaga. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga dan menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan range Rp16.000 - Rp17.000 per USD. Stabilitas nilai tukar ini penting bagi perusahaan pembiayaan untuk menjaga profil risiko.

Kendati ekonomi tumbuh cukup baik, namun daya beli masyarakat cenderung mengalami pelemahan akibat kenaikan harga pangan, penurunan daya saing ekspor, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini berdampak pada permintaan kendaraan dan produk pembiayaan secara umum.

ECONOMIC CONDITIONS AND FINANCING INDUSTRY IN 2025

Indonesia's economy in 2025 showed a positive trend despite facing dynamic external challenges. According to Statistics Indonesia, Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) growth reached 5.11% in 2025, higher than the previous year's of 5.03%. This growth was driven by strong domestic consumption, infrastructure investment, and stable exports.

Indonesia's inflation in 2025 was expected to be within Bank Indonesia's target range of 2.0% - 4.0%, with a manageable core inflation rate. Bank Indonesia had lowered interest rates and implemented an accommodative monetary policy to support economic growth. However, Rupiah's exchange rate against United States Dollar (USD) showed high volatility, ranging from Rp16,000 to Rp17,000 per USD. This exchange rate stability was crucial for finance companies to maintain their risk profile.

Despite the relatively good economic growth, consumer purchasing power tended to weaken due to rising food prices, declining export competitiveness, and widespread layoffs. This situation impacted demand for vehicles and financing products in general.



Industri pembiayaan tahun 2025 mengalami perlambatan pertumbuhan. Meskipun piutang perusahaan pembiayaan masih tumbuh positif, laju pertumbuhannya jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Sektor pembiayaan produktif menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik, namun secara keseluruhan, industri ini menghadapi tantangan yang berat. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efisiensi operasional berbasis digital, dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Tahun 2025 menjadi tahun penuh ujian bagi Perseroan. Kendati penjualan sepeda motor meningkat tipis, namun daya beli masyarakat cenderung tertekan. Sementara itu, walau telah mengalami penurunan, namun tingkat suku bunga BI Rate masih relatif tinggi, yaitu sebesar 4,75%. Hal tersebut membuat Perseroah harus sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan agar kualitas pembiayaan dapat tetap terjaga. Selain itu, persaingan industri yang semakin ketat berpotensi menekan margin keuntungan. Di sisi lain perkembangan regulasi menuntut adaptasi dari Perseroan, baik secara bisnis konvensional maupun digital, diiringi dengan pelindungan data konsumen yang menambah kompleksitas operasional.

Direksi merespons secara *prudent* dengan strategi diversifikasi yang agresif, mengalihkan fokus dari pembiayaan motor konvensional ke produk Syariah serta segmen UMKM yang tetap stabil, dan terus memperkuat penetrasi di wilayah Indonesia Timur yang potensinya masih terbuka lebar. Untuk mengatasi persaingan, melakukan pengembangan aplikasi KAWAN 2.0 yang terintegrasi dengan *credit scoring*.

Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatnya risiko finansial. Perseroan berupaya untuk menjaga risiko kredit dengan NPF *gross* 2,17%, sementara risiko pasar dimitigasi melalui diversifikasi dan alokasi portofolio, serta risiko operasional melalui *Disaster Recovery Center* (DRC) dengan replikasi data *real-time* serta *stress testing* bulanan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kestabilan kinerja, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang di tengah dinamika industri yang menantang.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Direksi merumuskan strategi dan kebijakan bisnis tahun 2025 melalui proses terstruktur yang melibatkan analisis kondisi internal-eksternal, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta masukan lintas fungsi melalui rapat strategi, menetapkan KPI yang selaras dengan visi Perseroan "*Empower, Expand, Elevate*" – memberdayakan konsumen melalui layanan inovatif, ekspansi berkelanjutan ke wilayah potensial, dan peningkatan pengalaman unggul berbasis nilai Integritas, Kolaborasi, dan Inovasi.

Financing industry in 2025 growth slowdown. Although financing companies receivables continued to grow positively, the growth rate was much lower than that of the previous year. Productive financing sector showed a better growth, but overall, the industry faced significant challenges. Such conditions prompted the Company to strengthen risk management, increase digital-based operational efficiency, and maintain the quality of its financing portfolio.

CHALLENGES FACED

The year 2025 was a challenging year for the Company. Although motorcycle sales increased slightly, consumer purchasing power was likely under pressure. Meanwhile, despite a decline, BI Rate remained relatively high at 4.75%. This required the Company to exercise extreme caution in disbursing financing to maintain quality. Furthermore, the increasingly fierce industry competition has the potential to squeeze profit margin. On the other side, regulatory developments require the Company to adapt to both conventional and digital business environments, along with consumer data protection, which adds to operational complexity.

The Board of Directors responded prudently with an aggressive diversification strategy, shifting focus from conventional motorcycle financing to Sharia products and stable MSME segments, while strengthening penetration in Eastern Indonesia with its promising potential. To overcome competition, KAWAN 2.0 application is developed, which is integrated with credit scoring.

Another challenge faced was increasing financial risk. The Company strove to maintain credit risk with a gross NPF of 2.17%, while market risk is mitigated through diversification and portfolio allocation, and operational risk through Disaster Recovery Center (DRC) with real-time data replication and monthly stress testing. These approaches not only maintained stable performance but also built long-term resilience amidst challenging industry dynamics.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

The Board of Directors formulated its 2025 business strategy and policies through a structured process involving the analysis of internal and external conditions, evaluation of previous year's performance, and cross-functional input through strategy meetings, established KPIs in line with the Company's vision of "Empower, Expand, Elevate" – empowering consumers through innovative services, continuous expansion into potential areas, and enhancing excellent customer experiences based on the values of Integrity, Collaboration, and Innovation.

Tahun 2025, Perseroan telah melakukan ekspansi geografis dan penetrasi pasar dengan memperluas jaringan pemasaran dengan membuka 8 cabang baru diantaranya berasal dari 4 Peningkatan Kantor Selain Kantor Cabang dan 4 Kantor Cabang Baru di wilayah Sulawesi, Maluku dan Kalimantan yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Langkah ini salah satunya juga ditujukan untuk mengurangi konsentrasi geografis di pulau Jawa.

Transformasi digital melalui aplikasi KAWAN 2.0 menjadi salah satu tulang punggung strategi Perseroan tahun 2025, dengan pengembangan berkelanjutan yang mencapai lebih dari 1 juta *download, onboarding* digital 70% dari total konsumen baru. Pengembangan aplikasi ini juga mempercepat proses persetujuan kredit yang cukup signifikan, dari 7 hari menjadi 2,8 hari, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasi *end-to-end*.

KAWAN 2.0 telah memenuhi ISO 27001 dan ketentuan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dengan enkripsi *end-to-end*, 2FA, dan penetrasi testing yang dilakukan secara berkala. Transformasi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan cabang fisik, tetapi juga menciptakan *competitive moat* melalui data aset terbesar di industri, *positioning* Perseroan sebagai digital *financing leader* sejalan visi "Elevate". Perseroan juga melakukan kolaborasi strategis dan pengembangan UMKM menjadi katalisator pertumbuhan Perseroan tahun 2025, dengan penyaluran pembiayaan UMKM melalui 150 kemitraan dealer lokal, 15 perbankan, dan *shareholders*, menjaga kualitas portofolio sehat sejalan komitmen inklusi keuangan nasional OJK dan target pemerintah 30% kredit UMKM.

Peningkatan kualitas portofolio juga menjadi fokus utama Perseroan di tahun 2025. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui perbaikan proses inisiasi kredit melalui evaluasi berkesinambungan kebijakan kredit yang menghasilkan NPF *gross* sebesar 2,17% dengan cadangan *coverage ratio* 120%, didukung sentralisasi operasional dan sistem Syariah lengkap yang mendorong pembiayaan haji/emas agar tetap tumbuh.

In 2025, the Company undertook geographic expansion and market penetration by expanding its marketing network by opening 8 new branches, including 4 Upgraded Offices Other than Branch Offices and 4 New Branch Offices in the untapped potential of Sulawesi, Maluku, and Kalimantan, whose potential has not been fully exploited. This initiative was also aimed at reducing geographic concentration on the island of Java.

Digital transformation through KAWAN 2.0 application became one of the backbones of the Company's 2025 strategy, with ongoing development achieving over 1 million downloads and digital onboarding of 70% of new customers. This application development also significantly accelerated credit approval process, from 7 days to 2.8 days, and increased operational efficiency through its end-to-end automation.

KAWAN 2.0 has complied with ISO 27001 and provisions of laws and regulations on personal data protection with end-to-end encryption, 2FA, and penetration testing that is carried out periodically. This transformation not only reduced reliance on physical branches but also created a competitive edge through the industry's largest data asset, positioning the Company's as the digital financing leader in line with its "Elevate" vision. The Company's also pursued strategic collaboration and MSME development as a catalyst for the Company's growth in 2025 by disbursing financing through 150 local dealer partnerships, 15 banks, and shareholders, while maintaining a healthy portfolio quality in line with OJK's national financial inclusion commitment and the government's target of 30% MSME loan.

Improving portfolio quality was also a key focus for the Company's in 2025. This was achieved by improving credit initiation process through continuous evaluation of credit policy resulting in gross NPF of 2.17% with reserve coverage ratio of 120%. This was supported by operational centralization and comprehensive Sharia system that encouraged continued growth in hajj/gold financing.



PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS SERTA LANGKAH MONITORING YANG DILAKUKAN

Direksi memiliki peran utama dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perseroan melalui mekanisme yang terstruktur dan selaras dengan visi serta tujuan bisnis Perseroan. Proses dimulai dengan analisis kondisi internal dan eksternal, termasuk evaluasi kinerja, risiko, peluang pasar, perkembangan industri, dan ketentuan regulator. Selanjutnya, Direksi melakukan koordinasi lintas fungsi untuk menghimpun masukan strategis dari unit bisnis, operasional, risiko, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun strategi Perseroan, menetapkan prioritas program, serta menentukan target dan arah kebijakan bisnis tahunan. Direksi juga bertanggung jawab memastikan bahwa strategi yang ditetapkan diimplementasikan secara efektif, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta memberikan arahan perbaikan agar seluruh kebijakan tetap relevan dan sesuai dengan dinamika usaha serta prinsip tata kelola yang baik bagi Perseroan.

Direksi memastikan strategi dan kebijakan strategis Perseroan diterapkan dengan baik melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terstruktur. Mekanisme tersebut meliputi:

1. Penetapan KPI dan target kinerja bagi seluruh unit kerja yang selaras dengan strategi Perseroan.
2. Rapat koordinasi dan *monitoring* dilakukan secara rutin untuk meninjau capaian kinerja, progres inisiatif strategis, serta potensi kendala di lapangan.
3. Laporan berkala dari masing-masing fungsi, termasuk keuangan, risiko, operasional, pemasaran, dan kepatuhan, yang menjadi dasar Direksi dalam mengambil keputusan korektif.
4. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, yang memastikan implementasi strategi berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan ketentuan regulator.
5. Evaluasi dan penyesuaian strategi, apabila terdapat perubahan kondisi bisnis, risiko baru, atau dinamika pasar yang memerlukan respon cepat.

Melalui mekanisme ini, Direksi dapat memastikan bahwa setiap strategi yang ditetapkan dijalankan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

ANALISIS KINERJA DAN PENCAPAIAN TARGET

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten menjalankan strategi bisnis yang terarah, antara lain melalui pengembangan layanan digital serta melakukan ekspansi secara selektif di wilayah-wilayah potensial. Langkah-langkah strategis ini merupakan wujud komitmen Perseroan untuk memberikan akses terhadap produk Perusahaan Pembiayaan kepada masyarakat secara lebih luas dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN STRATEGY AND STRATEGIC POLICY FORMULATION AND MONITORING STEPS TAKEN

The Board of Directors plays a key role in formulating the Company's strategies and strategic policies through a structured mechanism in line with the Company's vision and business objectives. The process begins with an analysis of internal and external conditions, including evaluation of performance, risks, market opportunities, industry developments, and regulatory requirements. Next, the Board of Directors coordinates across functions to gather strategic input from business units, operations, risk, finance, and other supporting functions. The results of such analysis are then used to formulate the Company's strategy, establish program priorities, and determine annual business targets and policy directions. The Board of Directors is also responsible for ensuring effective implementation of established strategies, monitoring and evaluating performance, and providing guidance for improvements to ensure all policies remain relevant and in line with business dynamics and good governance principles for the Company.

The Board of Directors ensures the proper implementation of the Company's strategies and strategic policies through a structured monitoring and evaluation mechanism. This mechanism includes:

1. Establishing KPIs and performance targets for all units in line with the Company's strategy.
2. Coordination and monitoring meetings are held regularly to review performance achievements, progress on strategic initiatives, and potential obstacles in the field.
3. Periodic reports from each function, including finance, risk, operations, marketing, and compliance, which serve as the basis for the Board of Directors in making corrective decisions.
4. Internal control system and risk management, which ensure strategy implementation complies with policies, procedures, and regulatory requirements.
5. Evaluating and adjusting strategies when there are changes in business conditions, new risks, or market dynamics requiring rapid response.

Through this mechanism, the Board of Directors can ensure that each established strategy is implemented consistently, effectively, and in accordance with the principles of good governance.

PERFORMANCE ANALYSIS AND TARGET ACHIEVEMENT

Amidst the various challenges faced throughout 2025, the Company consistently implemented a targeted business strategy, including through developing digital services and selective expansion in potential regions. These strategic steps demonstrate the Company's commitment to providing wider access of financing products to the public and providing added value to all stakeholders.

Perseroan secara konsisten berhasil menjaga kualitas pembiayaan dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio NPF-Bruto yang tercatat sebesar 2,17% dengan NPF-Neto sebesar 0,95%. Perseroan berusaha melakukan pengelolaan risiko yang disiplin serta penerapan strategi bisnis yang tepat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Total penyaluran pembiayaan baru pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 9,35% menjadi Rp5,94 triliun. Hal ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menyusun dan mengeksekusi strategi bisnis di tengah adanya pelemahan daya beli konsumen dan kondisi bisnis Indonesia yang cukup menantang.

Perseroan pun berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada total aset menjadi Rp7,37 triliun atau meningkat 6,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Total ekuitas tercatat sebesar Rp1,98 triliun, atau tumbuh sebesar 4,81%. Sedangkan laba bersih tercatat mengalami penurunan menjadi Rp142,55 miliar dengan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,41% dan *Return on Equity* (ROE) sebesar 7,45%. Selain itu, Perseroan mempertahankan gearing ratio yang sehat sebesar 2,32 kali lipat, memastikan *leverage* keuangan yang baik untuk mendukung tujuan strategisnya.

PROSPEK USAHA

Perseroan memandang tahun 2026 dengan optimisme yang positif dan penuh peluang. Hal tersebut ditopang oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% dengan inflasi terjaga di kisaran 2,8%-3,2%, serta stabilitas nilai tukar Rupiah. Kondisi makro ini diharapkan memperbaiki daya beli masyarakat yang menjadi motor utama permintaan pembiayaan kendaraan dan UMKM.

Proyeksi Industri Pembiayaan 2026 menunjukkan pemulihan penjualan sepeda motor dengan pertumbuhan sekitar 5%, sementara pasar mobil diperkirakan tumbuh stabil 3%. Industri diperkirakan tumbuh kembali sekitar 7%, didukung percepatan digitalisasi layanan dan perluasan segmen Syariah, khususnya pembiayaan haji, cicil emas, dan pembiayaan kendaraan listrik (EV) yang semakin diminati pasar.
Dalam konteks tersebut, Perseroan merancang strategi bisnis yang futuristik dan adaptif untuk tahun 2026 dengan fokus:

1. Ekspansi Segmen Syariah.
2. Pengembangan Segmen UMKM serta Korporasi yang diharapkan tumbuh dengan menargetkan sektor perkebunan, nelayan, dan logistik yang kuat dalam ekonomi domestik.
3. Perluasan Jaringan Cabang terutama di wilayah Indonesia Timur dan sentra UMKM yang belum terlayani optimal.
4. Peningkatan pendanaan melalui penerbitan obligasi, serta terus memperkuat kerja sama dengan pihak perbankan.

Dalam menghadapi dinamika pasar, Perseroan juga menyiapkan skenario mitigasi risiko berupa penguatan manajemen risiko kredit, likuiditas, dan risiko pasar, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi OJK yang terus berkembang.

The Company consistently maintained strong financing quality. This is reflected in the Gross NPF ratio of 2.17% and a Net NPF ratio of 0.95%. The Company strives for disciplined risk management and appropriate business strategies to support sustainable business growth.

Total new financing disbursement in 2025 increased by 9.35% to Ro5.94 trillion. This reflects the Company's success in formulating and executing its business strategy, amidst weakening consumer purchasing power and challenging Indonesian business conditions.

The Company also recorded positive growth in total assets to Rp7.37 trillion, a 6.08% increase compared to that of the previous year. Total equity was recorded at Rp1.98 trillion, representing a 4.81% growth. Meanwhile, net profit decreased to Rp142.55 billion, with a Return on Assets (ROA) of 2.41% and a Return on Equity (ROE) of 7.45%. Furthermore, the Company maintained a sound gearing ratio of 2.32x, ensuring sound financial leverage to support its strategic objectives.

BUSINESS PROSPECTS

The Company's looks to 2026 with positive optimism and opportunities. This is supported by the projected national economic growth of 5.2% with inflation maintained at 2.8%-3.2% and the stability of Rupiah exchange rate. These macroeconomic conditions are expected to improve public purchasing power, which is the main driver of demand for vehicle and MSME financing.

The 2026 Financing Industry Projection shows a recovery in motorcycle sales with growth of around 5%, while car market is expected to grow steadily at 3%. The industry is expected to grow again by around 7%, supported by accelerated service digitalization and expansion of Sharia segment, particularly Hajj financing, gold installments, and electric vehicle (EV) financing, which are increasingly popular in the market.
In these contexts, the Company's designs a futuristic and adaptive business strategy for 2026 with a focus on:

1. Sharia Segment Expansion.
2. Development of MSME and Corporate Segments, expected to grow by targeting strong plantation, fishing, and logistics sectors in domestic economy.
3. Branch Network Expansion, particularly in Eastern Indonesia and underserved MSME centers.
4. Increasing funding through bond issuance, and continuing to strengthen cooperation with banking institutions.

To address market dynamics, the Company's also prepares risk mitigation scenarios by strengthening credit, liquidity, and market risk management, as well as increasing compliance with the ever-evolving OJK regulations.



Dengan pondasi strategi yang matang dan didukung oleh perkembangan makroekonomi positif, Perseroan siap memperkuat posisinya sebagai pemain utama industri pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan di Indonesia tahun 2026.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan strategi bisnis, Perseroan menganggap karyawan sebagai kunci sukses dalam mencapai tujuan organisasi.

Langkah strategis perseroan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman praktis untuk menunjang produktivitas, inovasi, serta kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi perubahan, sekaligus menciptakan keterlibatan karyawan terhadap perusahaan *(employee engagement)* dalam mencapai lingkungan kerja yang positif.

Melalui program pengembangan yang disusun dalam *Learning Framework* 2025, Perseroan berhasil menjangkau seluruh karyawan dari level *staff* hingga level manajerial.

Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia yang dijalankan Perseroan berfokus pada enam pilar utama yaitu:

1. **WOM *Onboarding Program*:** Program pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan baru Perseroan dari level *Staff* sampai dengan Manajerial yang mencakup pengenalan *company culture*, proses bisnis perusahaan dan *technical skill*.
2. ***Functional Training Program*:** Program pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan *skill* untuk mendukung proses kerja di fungsi *Marketing, Operation,* dan *Risk*, serta beberapa program pelatihan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap kebijakan dari regulator.
3. ***Behavioral Competency Training*:** Program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pekerjaan. Program ini juga bertujuan mengasah kualitas kepemimpinan dan kemampuan *soft skill* untuk semua level karyawan sebagai penggerak strategi bisnis dalam mencapai visi Perseroan.
4. ***Development Program*:** Program pelatihan yang bertujuan untuk proses pengembangan bagi karyawan yang masuk dalam kategori *talent* untuk dipersiapkan menjadi *successor* serta pengembangan kompetensi dan pengetahuan dari fungsi bisnis secara umum serta dilengkapi dengan keterampilan *soft skill.*
   Dalam program ini akan dipersiapkan beberapa *Journey Training* yang dilakukan dengan metode *Self Learning, Lecturing,* dan *On Job Training.*
5. **Sertifikasi Program:** Program sertifikasi yang dilakukan sebagai upaya kepatuhan perseroan terhadap regulator baik dari sertifikasi dasar pembiayaan, sertifikasi Manajemen Risiko serta sertifikasi program lainnya.

With a solid strategic foundation and support of positive macroeconomic developments, the Company's is ready to strengthen its position as a key player in innovative and sustainable financing industry in Indonesia by 2026.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

In implementing business strategy, the Company's considers its employees as the key to success in achieving organizational goals.

The Company's strategic steps in developing human resources are implemented through training, education, and practical experience to support productivity, innovation, and organization's adaptability to change, while simultaneously fostering employee engagement and achieving positive work environment.

Through the development programs arranged in the Learning Framework 2025, the Company has managed to reach all of its employees, from staff to managerial levels.

The Human Resource development strategy, carried out by the Company's, focuses on six main pillars, namely:

1. **WOM Onboarding Program:** A mandatory training program for all new the Company's employees, from Staff to Managerial level, covering introduction to company culture, company business processes, and technical skills.
2. **Functional Training Program:** A training program related to skill enhancement to support work processes in Marketing, Operations, and Risk functions, as well as several training programs related to compliance with regulatory policies.
3. **Behavioral Competency Training:** A training program aimed at improving employee skills to support increased work productivity. This program is also aimed at honing leadership qualities and soft skills for all employee levels as the driving force of business strategy in achieving the Company's vision.
4. **Development Program:** A training program aimed at developing talent-based employees to prepare them to become successors, as well as developing competencies and knowledge of general business functions, complemented by soft skills.

   This program will prepare several Journey Training programs, implemented by using Self Learning, Lecturing, and On Job Training methods.
5. **Program Certification:** A certification program implemented as the Company's effort to comply with the regulators, including basic financing certification, risk management certification, and other program certifications.

6. ***Learning Non-Training Program*:** Program pembangunan budaya *Learning & Sharing* melalui berbagai metode pelatihan baik *Workshop*, *Webinar*, *Podcast* serta video *Micro Learning* untuk menunjang *in class Training*.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tahun 2025 merupakan periode penting bagi Perseroan dalam memperkuat penerapan tata kelola yang baik sebagai fondasi utama untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan bisnis. Perseroan melakukan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Beberapa langkah kunci yang diimplementasikan pada tahun 2025 antara lain:

1. Penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan internal terkait tata kelola yang baik bagi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi Perseroan.
2. Peningkatan transparansi dan akurasi pelaporan melalui sistem pelaporan berkala yang disesuaikan dengan ketentuan SEOJK dan POJK, memastikan informasi lengkap dan tepat waktu kepada OJK, pemegang saham, serta publik.
3. Penguatan budaya integritas dengan kampanye etika kerja, pelatihan Kepatuhan, serta sosialisasi kode etik secara intensif kepada seluruh karyawan—tingkat partisipasi pelatihan mencapai 98%.
4. Penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko berbasis risiko yang meliputi audit internal dengan pendekatan *risk-based*, penajaman pengawasan kepatuhan, serta pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur agar senantiasa relevan dan efektif.
5. Optimalisasi peran Dewan Komisaris dan Komite Pendukung khususnya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, yang secara rutin memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tata kelola dan manajemen risiko di seluruh unit bisnis Perseroan.

Hasil implementasi ini tercermin dari kualitas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan kebijakan, pengawasan, dan internalisasi budaya kepatuhan telah berjalan secara konsisten dan memberikan dampak positif terhadap praktik operasional Perseroan. Selain itu, juga memperoleh apresiasi berupa penghargaan "*The Best Indonesia Good Corporate Governance Award*" dari Economic Review, sebagai bentuk pengakuan atas praktik tata kelola yang semakin matang dan berkelanjutan.

6. **Learning Non-Training Program:** A program to build a culture of learning and sharing through various training methods, including Workshop, Webinar, Podcast, and Micro-Learning videos to support in-class Training.

PROGRESS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Year 2025 was a crucial period for the Company's to strengthen the implementation of good corporate governance as the primary foundation for maintaining stakeholder trust and ensuring business sustainability. The Company's carried out various strategic initiatives to comprehensively and sustainably improve the quality of corporate governance.

Several key steps implemented in 2025 included:

1. Developing and/or refining internal good corporate governance for the Company's policies in accordance with laws and regulations and the Company's conditions.
2. Improving transparency and reporting accuracy through periodic reporting system in line with the provisions of SEOJK and POJK, ensuring complete and timely information to OJK, shareholders, and the public.
3. Strengthening a culture of integrity through work ethic campaign, compliance training, and intensive dissemination of the code of conduct to all employees—training participation reached 98%.
4. Implementing risk-based internal control and risk management, including internal audit with a risk-based approach, sharpening compliance oversight, and continuously monitoring policy implementation and procedure to ensure their relevance and effectiveness.
5. Optimizing the roles of the Board of Commissioners and Supporting Committees, particularly Audit Committee and Risk Oversight Committee, which regularly provide direction and evaluation on the implementation of corporate governance policies and risk management across all the Company's business units.

The implementation results are reflected in the Company's high level of compliance with good corporate governance principles. This demonstrates that efforts to strengthen policies, oversight, and internalize a culture of compliance have been consistently implemented and have had a positive impact on the Company's operational practices. Furthermore, it also received appreciation in the form of the "Best Indonesia Good Corporate Governance Award" from the Economic Review, as a form of recognition for the increasingly mature and sustainable governance practices.



Dengan langkah-langkah tersebut, Perseroan menegaskan komitmennya untuk menjalankan bisnis secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan, sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang dalam menghadapi tantangan bisnis dan regulasi yang dinamis.

With these steps, the Company's affirms its commitment to conducting business transparently, responsibly, and sustainably, as an integral part of its long-term strategy to address dynamic business and regulatory challenges.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi Perseroan membawahi beberapa satuan kerja dan komite struktural yang berperan penting dalam mendukung fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Sekretaris Perusahaan, Divisi Audit Internal, Divisi Legal Counsel & Anti Fraud (termasuk fungsi Kepatuhan), serta Divisi Manajemen Risiko.

Penilaian kinerja terhadap seluruh komite ini dilakukan secara sistematis dan berbasis hasil dengan metodologi yang mengukur berbagai aspek, yaitu frekuensi dan efektivitas pelaksanaan rapat komite, tingkat kehadiran anggota, kualitas penyampaian materi dan laporan, penanganan *issues* yang muncul (*matters arising*), serta kelengkapan dokumentasi aktivitas kerja.

Sepanjang tahun 2025, hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh komite memberikan kontribusi yang sangat baik dalam membantu tugas dan tanggung jawab Direksi, memperkuat tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengembangan bisnis, sekaligus memastikan pelaksanaan strategi dan kebijakan perusahaan berjalan secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of the Company's oversees several units and structural committees that play a vital role in supporting the Company's oversight and decision-making functions, including the Risk Management Committee, Sharia Product and Business Development Committee, Information Technology Steering Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Division, Legal Counsel & Anti-Fraud Division (including Compliance function), and Risk Management Division.

Performance assessments of all these committees are conducted systematically and based on results, by using a methodology that measures various aspects, including the frequency and effectiveness of committee meetings, member attendance, quality of presentations and reports, handling of matters arising, and completeness of work activity documentation.

Throughout 2025, the evaluation results showed that all committees made excellent contributions in assisting the Board of Directors in carrying out duties and responsibilities, strengthening corporate governance, risk management, and business development, while ensuring that the Company's strategies and policies were implemented optimally and in accordance with applicable regulations.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

In 2025, the Company made no changes to the composition of the Board of Directors. Therefore, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Presiden Direktur President Director	:	Djaja Suryanto Sutandar
Wakil Presiden Direktur Vice President Director	:	Njauw Vido Onadi*
Direktur Director	:	Anthony Yuarez Panggabean
Direktur Director	:	Wibowo
Direktur Director	:	Cincin Lisa Hadi

*) Pengangkatan Njauw Vido Onadi menjadi Wakil Presiden Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 Oktober 2024 dan efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan per tanggal 5 Februari 2025.
*) Appointment of Njauw Vido Onadi as Vice President Director at the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 9, 2024, and effectively serving as Vice President Director of the Company as of February 5, 2025.

APRESIASI

Kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan, arahan, serta nasihat yang diberikan dalam pengelolaan usaha Perseroan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas kerja sama dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam upaya pencapaian target Perseroan.

Kepada para Pemegang Saham, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam mengelola usaha Perseroan. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh vendor dan mitra strategis atas kerja sama yang terjalin dengan baik. Selanjutnya, kepada seluruh konsumen setia Perseroan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Mari sambut 2026 dengan optimisme tinggi namun langkah *prudent* sambil tetap berpijak kokoh di prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang teruji.

APPRECIATION

We would like to express our gratitude to the Board of Commissioners for the oversight, direction, and advice in managing the Company's business. We also extend our gratitude to all management and employees for their cooperation and dedication in achieving the Company's targets.

To our Shareholders, we express our gratitude for trusting us in managing the Company's business. We also express our appreciation and gratitude to all vendors and strategic partners for the excellent cooperation. Furthermore, to all of the Company's loyal customers, we express our appreciation and gratitude for the trust placed in us.

Let's welcome 2026 with high optimism but prudent steps, while remaining firmly grounded in proven governance and risk management principles.

Jakarta, 6 Maret 2026 | March 6, 2026
Atas Nama Direksi | On Behalf of the Board of Directors

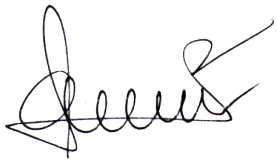

Djaja Suryanto Sutandar

Presiden Direktur
President Director

Dewan Pengawas Syariah memastikan seluruh produk dan layanan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dijalankan sesuai prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik dan keberlanjutan usaha di Perseroan.

The Sharia Supervisory Board ensures that all Sharia Business Unit products and services are conducted in compliance with Sharia principles and DSN-MUI fatwas, as part of the Company's commitment to sound governance and sustainable growth at the Company's.

Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board



Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Report

Bismillahirrahmannirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kami dalam menjalankan amanah sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan sepanjang tahun buku 2025.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan penuh tanggung jawab memastikan bahwa seluruh produk dan layanan Unit Usaha Syariah (UUS) telah sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang baik bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sinergi yang erat dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi terus dijaga melalui rapat koordinasi serta korespondensi intensif, khususnya dalam pengembangan produk pembiayaan syariah dengan menggunakan akad *Murabahah*, *Ijarah Multijasa*, dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT).

All praise is bestowed upon Allah SWT for the mercy, guidance, and strength for us in carrying out our mandate as the Company's Sharia Supervisory Board (DPS) throughout the 2025 financial year.

The Company's Sharia Supervisory Board responsibly ensures that all products and services of Sharia Business Unit (UUS) fully comply with sharia principles in accordance with the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), as the manifestation of our commitment to good governance for the Company as stipulated in POJK Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

Close synergy with the Board of Commissioners and/or Board of Directors is continuously maintained through coordination meetings and intensive correspondence, particularly in developing sharia financing products under Murabahah, Ijarah Multijasa, and Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) contracts.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat berdasarkan Pedoman Dewan Pengawas Syariah yang terakhir diperbarui pada 17 Februari 2023, yang mengatur landasan hukum, struktur, tugas, rapat, dan etika kerja secara komprehensif.

Sepanjang 2025, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan 7 (tujuh) rapat dengan tingkat kehadiran 100% dari kedua anggota, membahas agenda strategis, diantaranya:

1. Mekanisme pencairan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) di BU atau cabang;
2. Persetujuan SK Pengelolaan Kendaraan Tarikan V.8 (318/SK/OPP/12-24);
3. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai *review* dan persetujuan IM *Piloting Project* Pembiayaan Haji;
4. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai sosialisasi perubahan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024;
5. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai rencana Pelaksanaan Uji Petik DPS 2025;
6. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai penyampaian evaluasi kebijakan yang disetujui oleh DPS tahun 2025;
7. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai laporan implementasi produk Haji dan IMBT;
8. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai uji Petik Pengawasan Jakarta Timur 1;

IMPLEMENTATION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD DUTIES

Sharia Supervisory Board performs its supervisory and advisory functions based on Sharia Supervisory Board Charter, last updated on February 17, 2023, which comprehensively regulates the legal basis, structure, duties, meetings, and work ethics.

Throughout 2025, DPS held 7 (seven) meetings with 100% attendance from the two members, discussing strategic agenda items, including:

1. Disbursement mechanism of Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) at BU or branches;
2. Approval of Recalled Vehicle Management Decision Letter V.8 (318/SK/OPP/12-24);
3. DPS Coordination Meeting regarding the review and approval of IM Piloting Project for Hajj Financing;
4. DPS Coordination Meeting regarding of amendments to POJK Number 48 of 2024;
5. DPS Coordination Meeting regarding plan to conduct 2025 DPS Sampling;
6. DPS Coordination Meeting regarding submission of the evaluation of policies approved by DPS in 2025;
7. DPS Coordination Meeting regarding report on the Implementation of Hajj and IMBT products;
8. DPS Coordination Meeting regarding sampling of Supervision at East Jakarta 1;



9. *Meeting* Koordinasi DPS Persetujuan Perubahan Kebijakan HajiKu;
10. *Meeting* Koordinasi DPS Rencana Pengembangan Produk Haji Khusus;
11. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai Penambahan Opsi Titip Jual Logam Mulia;
12. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai Rencana Kerjasama MASKu dengan Galeri24; dan
13. *Meeting* Koordinasi DPS Permohonan Opini Pengalihan Hak Tagih Pembiayaan Syariah.

Salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah juga hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Untuk meningkatkan kompetensi Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah mengikuti kegiatan pelatihan/*workshop*/ seminar baik yang diselenggarakan DSN-MUI maupun pihak eksternal yang terpercaya selama tahun 2025.

HASIL PENGAWASAN DAN REKOMENDASI

Hasil pengawasan menegaskan bahwa kegiatan operasional UUS Perseroan telah sesuai prinsip syariah, dengan tidak ditemukan pelanggaran material terhadap fatwa DSN MUI dan ketentuan dari OJK pada produk pembiayaan syariah yang menggunakan akad *Murabahah, Ijarah Multijasa*, dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). Pengawasan mencakup *review* dokumen, uji petik cabang, dan evaluasi kebijakan, yang didukung oleh mekanisme opini dewan pengawas secara independen dan transparan.

KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DPS

Pembentukan DPS Perseroan berlandaskan Anggaran Dasar Perseroan, POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta sebagaimana susunan Anggota DPS Perseroan terakhir yang dimuat pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Per 31 Desember 2025, komposisi DPS tetap terdiri dari dua anggota ahli syariah yang diangkat melalui RUPS Tahunan 2023 atas rekomendasi DSN-MUI dengan masa jabatan hingga RUPS Tahunan 2026, yaitu:

1. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. sebagai Ketua
2. Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen sebagai Anggota

9. DPS Coordination Meeting for Approval of Changes to HajiKu Policy;
10. DPS Coordination Meeting for Special Hajj Product Development Plan;
11. DPS Coordination Meeting regarding Adding Option of Precious Metals Consignment Sale;
12. DPS Coordination Meeting regarding MASKu's Collaboration Plan with Galeri24; and
13. DPS Coordination Meeting regarding Request for Opinion on Transfer of Sharia Financing Collection Rights.

One of the members of Sharia Supervisory Board was also present at the Annual GMS and Extraordinary GMS on March 25, 2025, to ensure its transparency and accountability.

To improve competence, the Company's Sharia Supervisory Board participated in training/workshops/seminars organized by either DSN-MUI or trusted external parties throughout 2025.

SUPERVISION RESULTS AND RECOMMENDATIONS

The supervision results confirms that the Company's UUS operations are in accordance with Sharia principles, with no material violations found against DSN-MUI fatwas nor provisions from Financial Services Authority (OJK) on the sharia financing products under Murabahah, Ijarah Multijasa, and Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Supervision includes document review, random sampling at branches, and policy evaluation, supported by a mechanism of independent and transparent opinion of the supervisory board.

COMPOSITION AND INDEPENDENCE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Company's DPS is established based on the Company's Articles of Association, POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, POJK Number 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions, and the latest composition of the Company's DPS Members was stated in the Deed of Resolution of the Company's Meeting Number 1 dated October 1, 2025, made before Aulia Taufani, S.H., a Notary in South Jakarta.

As of December 31, 2025, the composition of Sharia Supervisory Board remained consisting of two sharia experts appointed through the 2023 Annual GMS upon the recommendation of DSN-MUI with a term of office until the 2026 Annual GMS, as follows:

1. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. as Chairman
2. Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen as Member

Seluruh anggota memenuhi kriteria integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi sebagaimana diwajibkan, tanpa hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali, serta memperhatikan ketentuan rangkap jabatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan OJK.

All members meet the required criteria for integrity, financial reputation, and competence, have no family relationships with the Board of Directors, Board of Commissioners, or controlling shareholders, and pay attention to the provisions on holding concurrent positions as stipulated in OJK regulations.

APRESIASI

DPS menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kerja sama yang solid dalam menjaga kepatuhan syariah, serta kepada seluruh karyawan UUS yang telah menerapkan rekomendasi dengan disiplin tinggi.

Terima kasih juga disampaikan kepada OJK, DSN-MUI, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan sinergis yang telah memperkuat ekosistem keuangan syariah Perseroan.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam mengembangkan produk syariah yang bermanfaat bagi umat, sehingga semakin banyak masyarakat yang terdampak positif. Amin Ya Rabbal Alamin.

APPRECIATION

DPS would like to express its deep appreciation to the Board of Commissioners and Board of Directors for the solid cooperation in maintaining sharia compliance, as well as to all UUS employees who have implemented the recommendations with high discipline.

We also extend our gratitude to OJK, DSN-MUI, shareholders, and all stakeholders for their synergistic support that has strengthened the Company's sharia financial ecosystem.

May Allah SWT always guide us all in developing sharia products that are beneficial to the people, so that more and more people are positively impacted. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 6 Maret 2026 | March 6, 2026
Atas Nama Dewan Pengawas Syariah | On Behalf of the Sharia Supervisory Board



Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board



01 **Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.**

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

02 **Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen**

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board


Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2025

Board of Commissioners Statements regarding Responsibility for 2025 Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan. [GRI 2-14]

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk for 2025 fiscal year has been presented comprehensively. Therefore, we are fully responsible for the accountability of the contents of these Annual Report and Sustainability Report. [GRI 2-14]

This statement is made truthfully.

Jakarta, 6 Maret 2026 | March 6, 2026

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Sarastri Baskoro
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Thilagavathy Nadason
Komisaris
Commissioner

Taufik Aulia
Komisaris
Commissioner

Rallyati A. Wibowo, S.E.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2025

Board of Directors Statements regarding Responsibility for 2025 Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan. [GRI 2-14]

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report and Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk for 2025 fiscal year has been presented comprehensively. Therefore, we are fully responsible for the accountability of the contents of these Annual Report and Sustainability Report. [GRI 2-14]

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 6 Maret 2026 | March 6, 2026

Direksi | Board of Directors

Djaja Suryanto Sutandar
Presiden Direktur
President Director

Njauw Vido Onadi
Wakil Presiden Direktur
Vice President Director

Anthony Yuarez Panggabean
Direktur
Director

Wibowo
Direktur
Director

Cincin Lisa Hadi
Direktur
Director

03

Profil Perusahaan
Company Profile

Perseroan terus berkomitmen memperkuat fondasi dan kapabilitas usaha melalui pengembangan layanan dan efisiensi operasional guna menjaga keberlanjutan bisnis.

The Company remains committed to strengthening its business foundations and capabilities through service development and operational efficiency to maintain business sustainability.





Identitas Perusahaan
Corporate Identity

Nama Perusahaan [GRI 2-1]
Company Name

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Nama Panggilan
Common Name

WOM Finance (WOMF)



Bidang Usaha [OJK C.4]
Line of Business

Perusahaan Pembiayaan
Financing Company

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

23 Maret 1982
March 23, 1982

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian Nomor 179 tanggal 23 Maret 1982 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian Nomor 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor C2-3167-HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982.

Deed of Establishment Number 179 dated March 23, 1982, which was subsequently amended pursuant to the Deed of Amendment to the Deed of Establishment Number 96, dated December 15, 1982, both drawn up before Kartini Muljadi, S.H., a Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia pursuant to Decree Number C2-3167-HT01.01.TH82 dated December 23, 1982.

Kepemilikan Saham [OJK C.3]
Share Ownerships

PT Bank Maybank Indonesia Tbk	PT Wahana Makmur Sejati	Masyarakat Public
67,49%	25,01%	7,50%

Jumlah Karyawan [OJK C.3]
Total Employees

2.170 orang / peoples (2025)

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp500.000.000.000

Modal Disetor
Paid-up Capital

Rp348.148.148.000

Total Aset [OJK C.3]
Total Assets

Rp7,37 triliun trillion

Total Liabilitas [OJK C.3]
Total Liabilities

Rp5,39 triliun trillion

AKSES TERHADAP PERSEROAN [OJK C.2] [GRI 2-6.A]

ACCESS TO THE COMPANY [OJK C.2] [GRI 2-6.A]



Jaringan Kantor per 31 Desember 2025
Office Network as of December 31, 2025

- **1** Kantor Pusat / Head Office
- **10** Kantor Regional / Regional Offices
- **195** Kantor Layanan / Service Offices
- **188** Kantor Cabang / Branch Offices
- **46** Kantor Cabang Syariah* / Sharia Offices*
- **7** Kantor Selain Kantor Cabang / Non-Branch Offices

*) Jumlah Kantor Cabang Unit Usaha Syariah dimaksud di atas adalah jumlah Kantor Cabang yang memiliki izin Kantor Cabang Unit Usaha Syariah selain izin sebagai Kantor Cabang dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
*) The number of Sharia Business Unit's Branch Offices referred to above is the number of Branch Offices that have a Sharia Business Unit Branch Office permit in addition to a permit as a Branch Office and can carry out financing activities based on sharia principles.

Rincian kontak dan alamat kantor regional disajikan sebagaimana berikut ini.

The contact details and addresses of the regional offices are presented as follows.

INFORMASI AKSES UTAMA

PRIMARY ACCESS INFORMATION

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Altira Office Tower lantai 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.

Telepon
Telephone

+62 21 2188 2400

Faximile
Facsimile

+62 21 2188 2420

Situs
Website

www.wom.co.id

Surat Elektronik
Email

corporate_secretary@wom.co.id



Layanan Pelanggan (*Contact Center*)
Customer Service (Contact Center)

Telepon/WhatsApp:
Telephone/WhatsApp:

0811 1951 1888

Surat Elektronik
Email

wcare@wom.co.id

Jam Operasional Cabang
Branch Operating Hours

08.30-15.30

Jam Operasional Kantor Pusat
Head Office Operating Hours

08.15-17.15

Media Sosial
Social Media

- Facebook : womfinanceku.id
- Instagram : @womfinance_id
- X : @womfinance_id
- Youtube : womfinance_id
- LinkedIn : WOM Finance
- TikTok : @womfinance_id

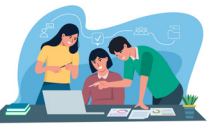

KANTOR REGIONAL

REGIONAL OFFICES

No	Wilayah/Regional Region	Alamat Address	Telepon Telephone
1	Regional Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi Region	Kantor MGK, Jalan Kota Bandar Baru Kemayoran Blok B - 6 Lantai G1-2-3 Nomor MKKT4 - B 05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	02129371347
2	Regional Jawa Barat (Jabar) West Java Region	Jalan Raya Bojongsoang Nomor 321, Komplek Transmart Buah Batu Square Ruko A15, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	0227539421
3	Regional Jawa Tengah Selatan (Jateng Selatan) South Central Java Region	Ruko D2, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0318539693
4	Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim BNT) East Java, Bali, and Southeast Nusa Tenggara Region	Ruko Blok F17 & 18, Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	0318539693
5	Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Northern Sumatera Region	Jalan Komplek Multatuli Indah Blok BB No 26 & 27, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	06188812417
6	Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) South Sumatera Region	Jalan Basuki Rahmat 887, RT 009 RW 002, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	08118152105
7	Regional Sulawesi Sulawesi Region	Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Manggala Junction Ruko Nomor B 18, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	081113200888
8	Regional Banten Banten Region	CBD Gading Serpong Ruko PDC Orange - 11, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	02159599157
9	Regional Jawa Tengah Utara (Jateng Utara) North Central Java Region	Ruko Metro Plaza Blok C15 & C16, Jalan MT Haryono Nomor 970, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	0248417891
10	Regional Kalimantan Kalimantan Region	Jalan S Parman Komp Mall Lembuswana Blok D No. 12, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	05417808035

Perseroan menyediakan akses terhadap informasi alamat dan kontak seluruh jaringan kantor, termasuk kantor cabang, kantor cabang syariah, serta kantor selain kantor cabang, yang tersedia melalui www.wom.co.id

Melalui laman tersebut, para pemangku kepentingan dapat memperoleh rincian yang lebih lengkap mengenai lokasi operasional Perseroan di berbagai wilayah, sehingga memudahkan dalam memperoleh layanan.

The Company provides access to address and contact information for its entire office network, including branch offices, sharia branch offices, and other non-branch offices, which is available at www.wom.co.id

Through this webpage, stakeholders can obtain more comprehensive details regarding the Company's operational locations across various regions, thereby facilitating access to services.

Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History



Perseroan didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing, berfokus pada pembiayaan sepeda motor, khususnya merek Honda. Seiring perkembangan bisnis, pada tahun 2000 Perseroan bertransformasi dan mengubah nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha, memperluas layanan pembiayaan mencakup merek Jepang lainnya seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki.

Pada tahun 2004, Perseroan resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan kode saham "WOMF", setelah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal saat itu (Bapepam-LK) untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) atas 200.000.000 saham bernominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp700 per saham. Sejak saat itu, nama Perseroan menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Ketentuan yang berlaku.

Pasca-IPO, pada tahun 2005 PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("MBI") mengakuisisi 43% saham Perseroan. Kepemilikan MBI kemudian meningkat menjadi 68,55% pada tahun 2015 seiring aksi korporasi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu, yang memperkuat struktur pemegang saham strategis dan mendukung fokus pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

The Company was established in 1982 under the name PT Jakarta Tokyo Leasing, focusing on motorcycle financing, particularly for Honda. As the business expanded, the Company underwent a transformation in 2000 and changed its name to PT Wahana Ottomitra Multiartha, broadening its financing services to include other Japanese brands such as Yamaha, Suzuki, and Kawasaki.

In 2004, the Company officially listed its shares on Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange/IDX) under the stock code "WOMF," after obtaining an effective statement from the capital market authority at the time (Bapepam-LK) to exercise an Initial Public Offering (IPO) of 200,000,000 shares with a nominal value of Rp100 per share and an offering price of Rp700 per share. Since then, the Company's name has become PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk in accordance with the Articles of Association and applicable provisions.

Following the IPO, in 2005, PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("MBI") acquired a 43% stake in the Company. MBI's ownership subsequently increased to 68.55% in 2015 in line with a corporate action through a rights issue, which strengthened the strategic shareholder structure and supported the Company's focus on sustainable growth.

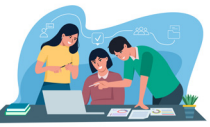

Dalam rangka memperkuat struktur pendanaan jangka panjang serta menjaga fleksibilitas keuangan guna mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan, Perseroan melaksanakan aksi korporasi melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Selain itu, pada tahun 2025 Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit dari perbankan dengan total sebesar Rp1,65 triliun, yang diharapkan dapat mengoptimalkan struktur permodalan serta mendukung kebutuhan operasional Perseroan.

Selain dengan langkah memperkuat permodalan, sejak tahun 2022, Perseroan mulai mengakselerasi transformasi operasional melalui sentralisasi proses kredit, digitalisasi akuisisi, serta penguatan tata kelola untuk memastikan proses yang andal dan efisien. Inisiatif tersebut ditopang peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, pengembangan saluran pemasaran digital melalui kemitraan dengan *marketplace* (antara lain Bukalapak, Tokopedia, dan GoBills), serta sinergi layanan pembayaran berbasis QRIS bersama MBI.

Pada tahun 2022, Perseroan meluncurkan aplikasi KAWAN guna menghadirkan pengalaman pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi pelanggan.

Dengan fondasi tata kelola, kemitraan strategis, dan penguatan kapabilitas digital, Perseroan terus memperluas jangkauan layanan pembiayaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan di seluruh Indonesia.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Pada tahun buku, tidak terdapat perubahan nama Perseroan. Perubahan nama terakhir terjadi pada tahun 2000, ketika Perseroan mengubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha, berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, dan telah disetujui Menteri Hukum dan Perundang- undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C-7437.HT.01.04. Th.2000 tanggal 27 Maret 2000.

To strengthen its long-term funding structure and maintain financial flexibility, aiming to support sustainable business growth and development, the Company executed a corporate action through a Continuing Public Offering (PUB) mechanism. Furthermore, in 2025, the Company obtained loan facility from banks totaling Rp1.65 trillion, which is expected to optimize its capital structure and support the Company's operational needs.

In addition to steps taken to strengthen its capital, starting in 2022, the Company's began accelerating its operational transformation through centralized credit process, digital acquisition, and strengthened governance to ensure reliable and efficient operations. These initiatives have been supported by enhanced human capital capabilities, development of digital marketing channels through partnerships with marketplaces (including Bukalapak, Tokopedia, and GoBills), as well as QRIS-based payment service integration in collaboration with MBI.

In 2022, the Company's launched KAWAN application to provide a more seamless, faster, and integrated financing experience for customers.

With a strong foundation of governance, strategic partnerships, and enhanced digital capabilities, the Company's continues to expand the reach of its financing services and improve service quality for customers throughout Indonesia.

INFORMATION ON THE COMPANY'S NAME CHANGE

During this financial year, there were no changes to the Company's name. The last name change occurred in 2000, when the Company changed its name from PT Jakarta Tokyo Leasing to PT Wahana Ottomitra Multiartha, based on the Deed of Amendment to the Articles of Association Number 5 dated March 15, 2000, drawn up before Anna Wong, S.H., a Notary in Tangerang, and approved by the Minister of Law and Regulations of the Republic of Indonesia through Decree Number C-7437.HT.01.04.Th.2000 dated March 27, 2000.

Logo Perusahaan
Corporate Logo

Logo Perseroan adalah instrumen komunikasi bagi sebuah perusahaan yang menjadi pembeda dengan perusahaan lain. Berikut penjabaran makna dibalik logo Perseroan:

The Company's logo is a communication instrument for a company and distinguishes it from other entities. The following presents the meaning behind the Company's logo:



01



Logo Utama dilahirkan dari dua komponen dasar, yaitu elemen nama dan simbol "W". Simbol "W" melambangkan *warmth* atau kehangatan sebagai sebuah sikap kerja yang diberikan kepada rekanan, mitra, dan pelanggan Perseroan.
The main logo comprises two basic components, namely the name element and the "W" symbol. The "W" symbol represents warmth, reflecting the work attitude toward the Company's associates, partners, and customers.

02



Lingkaran elips yang mengelilingi elemen "W" merupakan komposisi yang mencerminkan sinergi pendorong untuk membangun Perseroan sebagai perusahaan keuangan yang terbaik di Indonesia.
The ellipse surrounding the "W" element is a composition reflecting the supporting synergy to make the Company's the best multifinance company in Indonesia.

03

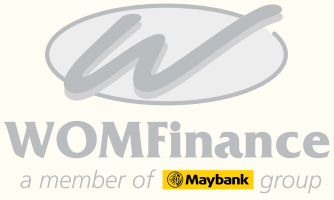

Bagian "*a member of* Maybank *group*" menegaskan bahwa Perseroan adalah anak usaha dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
The part "a member of Maybank group" affirms the Company's position as the subsidiary of PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Kegiatan Usaha [GRI 2-6.a]
Business Activities



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Perseroan menjalankan usaha dan kegiatan di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan sebagai Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
   a. Sewa pembiayaan;
   b. Jual dan sewa-balik;
   c. Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
   d. Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
   e. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
   f. Pembiayaan proyek;
   g. Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
   h. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara:
   a. Jual dan sewa-balik;
   b. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
   c. Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
   d. Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The Company conducted its business and activities in the field of financing companies in accordance with its Articles of Association. Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company as a Finance Company can carry out the following business activities:

1. Investment Financing, carried out by:
   a. Finance lease;
   b. Sale and lease-back;
   c. Factoring with recourse;
   d. Factoring without recourse;
   e. Purchase on installment payments;
   f. Project financing;
   g. Infrastructure financing; and/or
   h. Other financing activities with prior approval from the Financial Services Authority.
2. Working Capital Financing, carried out by:
   a. Sale and lease-back;
   b. Purchase payment by installment;
   c. Factoring with recourse;
   d. Factoring without recourse;

e. Fasilitas modal usaha; dan/atau
f. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara:
   a. Sewa pembiayaan;
   b. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
   c. Fasilitas dana; dan/atau
   d. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan/atau Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagai berikut:
   a. Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Murabahah*;
      - *Salam*; dan/atau
      - *Istishna'*.
   b. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Mudharabah*;
      - *Musyarakah*;
      - *Mudharabah Musytarakah*; dan/atau
      - *Musyarakah Mutanaqisah*.
   c. Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Ijarah*;
      - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
      - *Hawalah* atau *Hawalah bil Ujrah*;
      - *Wakalah* atau *Wakalah bil Ujrah*;
      - *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah*;
      - *Ju'alah*; dan/atau
      - *Qardh*.
6. Selain kegiatan usaha dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:
   a. Sewa operasi;
   b. Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
   c. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

e. Business working capital facilities; and/or
f. Other financing activities with prior approval from Financial Services Authority.

3. Multipurpose Financing, carried out by:
   a. Finance lease;
   b. Purchase on installment payments;
   c. Funding facilities; and/or
   d. Other financing activities with prior approval from Financial Services Authority.
4. Other financing business activities based on Financial Services Authority approval.
5. Providing financing and/or conducting business activities based on sharia principles, in accordance with applicable regulations and stipulated by the Financial Services Authority, the Government, and/or Institutions that have the authority to issue fatwa in sharia sector are as follows:
   a. Trade Financing is performed using the following types of contracts:
      - Murabahah;
      - Salam; and/or
      - Istishna'.
   b. Investment Financing is performed using the following types of contracts:
      - Mudharabah;
      - Musyarakah;
      - Mudharabah Musytarakah; and/or
      - Musyarakah Mutanaqisah.
   c. Service Financing is performed using the following types of contracts:
      - Ijarah;
      - Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
      - Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
      - Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
      - Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
      - Ju'alah; and/or
      - Qardh.
6. In addition to the aforementioned business activities, the Company may carry out other supporting business activities as follows:
   a. Operating leases;
   b. Any fee-based activities, which do not violate the laws and regulations in the financial services sector; and/or
   c. Other businesses that deal directly or indirectly with the aforementioned purposes, provided that their implementation does not violate the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.

PRODUK DAN LAYANAN

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki beragam produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk dan layanan yang dihasilkan yakni seperti berikut:



Pembiayaan Multiguna Barang
Multipurpose Goods Financing

Pembiayaan Motor Baru (PPSA)
New Motorcycle Financing (PPSA)

01



Pembiayaan Multiguna Jasa
Multipurpose Services Financing

- Pembiayaan Multiguna MotorKu (PPSA)
- Fasilitas Dana MotorKu
- Pembiayaan Multiguna MobilKu (PPSA)
- Fasilitas Dana MobilKu
- MotorKu Multipurpose Financing (PPSA)
- MotorKu Funding Facility
- MobilKu Multipurpose Financing (PPSA)
- MobilKu Funding Facility

02

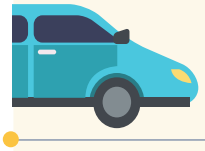

Pembiayaan Investasi
Investment Financing

Sale and Leaseback MobilKu
MobilKu Sale and Leaseback

03



Pembiayaan Modal Kerja
Working Capital Financing

- Fasilitas Modal Usaha MobilKu
- *Sale and Leaseback* MobilKu
- *Sale and Leaseback* MotorKu
- MobilKu Business Capital Facility
- MobilKu Sale and Leaseback
- MotorKu Sale and Leaseback

04



Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah)
Sale and Purchase Financing (Murabahah Contract)

- Pembiayaan Syariah Motor Baru
- Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu"
- New Motorcycle Sharia Financing
- "MasKu" Precious Metals Sharia Financing

05



Pembiayaan Jasa (Akad Ijarah)
Service Financing (Ijarah Contract)

Pembiayaan Syariah "HajiKu"
"HajiKu" Sharia Financing

06

PRODUCTS AND SERVICES

In carrying out its business, the Company offers a range of products and services tailored to meet consumer needs. The products and services offered are as follows:

RANTAI NILAI DAN HUBUNGAN BISNIS LAIN [GRI 2-6.B]

Perseroan beroperasi pada sektor jasa keuangan non bank dengan fokus pada pembiayaan sepeda motor dan layanan terkait. Rantai nilai Perseroan mencakup *origination* pembiayaan, penyaluran, *servicing*, dan *collection*, yang dijalankan melalui jaringan kantor (pusat, regional, cabang, dan layanan) serta kanal digital. Produk/layanan utama meliputi pembiayaan kendaraan roda dua, dana tunai, serta pembiayaan syariah seperti Haji dan Logam Mulia, yang dijalankan melalui kantor cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) di berbagai wilayah Indonesia.

Pada sisi hulu, Perseroan bermitra dengan dealer kendaraan, penyedia layanan TI dan *credit bureau*, perusahaan asuransi, serta mitra penagihan, dengan mekanisme seleksi dan evaluasi berbasis *due diligence*, SLA, dan kepatuhan.

Pada sisi hilir, Perseroan berinteraksi dengan pelanggan, platform pembayaran, dan penjamin/asuransi untuk memastikan pengalaman layanan yang andalan, aman, dan patuh. Perseroan juga membina hubungan bisnis relevan lainnya, termasuk institusi perbankan/afiliasi, *marketplace*, serta asosiasi industri/regulator, guna memperluas akses layanan dan memperkuat tata kelola.

Berikut rincian terkait aktivitas bisnis, pasar yang dilayani, rantai pasok dari hulu ke hilir, dan hubungan bisnis relevan lainnya:

VALUE CHAIN AND OTHER BUSINESS RELATIONSHIPS [GRI 2-6.B]

The Company's operates within the non-bank financial services sector with a primary focus on motorcycle financing and related services. The Company's value chain encompasses financing origination, disbursement, servicing, and collection, all carried out through its office network (head office, regional, branch, and service offices) as well as digital channels. The main products/services include two-wheeled vehicle financing, cash funds, and sharia financing such as Hajj and Precious Metals, which are run through branch offices and Other Non-Branch Offices (KSKC) in various regions of Indonesia..

On the upstream, the Company partners with vehicle dealers, IT service providers, and credit bureaus, insurance companies, and collection partners with selection and evaluation mechanisms based on due diligence, SLA, and compliance requirements.

Downstream, the Company interacts with customers, payment platforms, and guarantor/insurance providers to ensure a reliable, secure, and compliant service experience. The Company's also maintains other relevant business relationships, including those with banking institutions/affiliates, marketplaces, as well as industry associations/regulators, to expand service accessibility and strengthen governance.

The following provides details on business activities, markets served, supply chain from upstream to downstream, and other relevant business relationships:

AKTIVITAS DAN PRODUK/LAYANAN

ACTIVITIES AND PRODUCTS/SERVICES

Aktivitas Kunci Key Activities	**Deskripsi Singkat** Brief Description	**Produk/Layanan Terkait** Related Products/ Services	**Kanal Distribusi** Distribution Channels	**Segmen/Pasar Dilayani** Segments/Markets Served
Origination Pembiayaan Financing Origination	Akuisisi aplikasi, verifikasi, *scoring* Acquisition of applications, verification, scoring	Pembiayaan Financing	Cabang, *dealer, digital* Branches, dealers, digital channels	Ritel (konsumen) Retail (consumer)
Servicing	Penagihan, layanan pelanggan, restrukturisasi Billing, customer service, restructuring	Layanan purna jual After-sales services	*Contact center*, aplikasi, kantor layanan Contact center, applications, service offices	Pelanggan eksisting Existing customers
Collection & recovery	Pengelolaan tunggakan Management of overdue accounts	Penanganan DPD/NPL Handling of DPD/NPL	Tim internal & mitra Internal teams & partners	Pelanggan berisiko At-risk customers

PASAR YANG DILAYANI

Perseroan melayani pasar ritel konsumen di 10 regional melalui 195 kantor layanan yang terdiri dari 188 kantor cabang (yang termasuk didalam 46 kantor cabang yang memiliki izin Kantor Cabang Unit Usaha Syariah selain izin sebagai Kantor Cabang dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) dan 7 kantor selain kantor cabang.

MARKETS SERVED

The Company serves the consumer retail market in 10 regions through 195 service offices, consisting of 188 branch offices (including 46 branch offices that have Sharia Business Unit Branch Office permits in addition to permits as Branch Offices and can carry out financing activities based on sharia principles) and 7 offices other than branch offices.

ENTITAS HULU DAN HILIR

UPSTREAM AND DOWNSTREAM ENTITIES

Alur Pembiayaan Perseroan
Company Financing Flow



HUBUNGAN BISNIS RELEVAN LAINNYA

Untuk memperkuat penciptaan nilai sekaligus mengelola risiko material di sepanjang rantai nilai, Perseroan membina sejumlah hubungan bisnis strategis, sebagai berikut:

OTHER RELEVANT BUSINESS RELATIONSHIPS

To strengthen value creation while managing material risks across the value chain, the Company's maintains several strategic business relationships as follows:

Mitra/Institusi Partner/Institution	**Tujuan Kerja Sama** Purpose of Cooperation	**Dampak pada Nilai/Kinerja** Impact on Value/Performance
Mitra Kanal Pembayaran dan Distribusi Non-Dealer Non-Dealer Payment Channel and Distribution Partners	Menyediakan kanal pembayaran dan distribusi alternatif untuk mendukung kemudahan transaksi dan akses layanan bagi konsumen. Providing alternative payment and distribution channels to support easy transactions and service access for customers.	Meningkatkan efisiensi operasional, kemudahan pembayaran bagi konsumen, serta kontinuitas dan jangkauan layanan bisnis. Improving operational efficiency, ease of payment for customers, and continuity and reach of business services.
Asosiasi Industri (APPI – Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) Industry Association (APPI – Association of Indonesian Financing Companies)	Mendukung advokasi kebijakan, koordinasi industri, dan penyelarasan praktik usaha di sektor pembiayaan. Supporting policy advocacy, industry coordination, and alignment of business practices in the financing sector.	Mendukung keberlanjutan usaha melalui kepastian regulasi, penguatan tata kelola industri, dan pengelolaan risiko kebijakan. Supporting business sustainability through regulatory certainty, strengthening industrial governance, and managing policy risks.

PERUBAHAN YANG BERSIFAT SIGNIFIKAN [OJK C.6] [GRI 2-6.D]

Pada tahun pelaporan, tidak terdapat perubahan signifikan pada sektor kegiatan, struktur rantai pasok, maupun hubungan bisnis utama.

SIGNIFICANT CHANGES [OJK C.6] [GRI 2-6.D]

In this reporting year, were no significant changes in the business sector, supply chain structure, or main business relationships.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

Wilayah Operasional [OJK C.6] [GRI 2-6.d]

Significant Changes



Kantor Regional Sumatera bagian Utara
Northern Sumatera Regional Offices

- 21 **Kantor Cabang** Branch Offices
- 2 **Kantor Cabang Unit Usaha Syariah*** Sharia Business Unit Branch Offices*
- - **Kantor Selain Kantor Cabang** Non-Branch Offices

Kantor Regional Banten
Banten Regional Offices

- 15 **Kantor Cabang** Branch Offices
- 7 **Kantor Cabang Unit Usaha Syariah*** Sharia Business Unit Branch Offices*
- 2 **Kantor Selain Kantor Cabang** Non-Branch Offices

Kantor Regional Jawa Barat
West Java Regional Offices

- 15 **Kantor Cabang** Branch Offices
- 7 **Kantor Cabang Unit Usaha Syariah*** Sharia Business Unit Branch Offices*
- - **Kantor Selain Kantor Cabang** Non-Branch Offices

Kantor Regional Sumatera bagian Selatan
Southern Sumatera Regional Offices

- 20 **Kantor Cabang** Branch Offices
- 1 **Kantor Cabang Unit Usaha Syariah*** Sharia Business Unit Branch Offices*
- 1 **Kantor Selain Kantor Cabang** Non-Branch Offices

Kantor Regional Jakarta, Bogor, Depok & Bekasi
Jakarta, Bogor, Depok & Bekasi Regional Offices

- 21 **Kantor Cabang** Branch Offices
- 10 **Kantor Cabang Unit Usaha Syariah*** Sharia Business Unit Branch Offices*
- - **Kantor Selain Kantor Cabang** Non-Branch Offices

Kantor Regional Jawa Tengah bagian Utara
Northern Central Java Regional Offices

- 15 **Kantor Cabang** Branch Offices
- 2 **Kantor Cabang Unit Usaha Syariah*** Sharia Business Unit Branch Offices*
- - **Kantor Selain Kantor Cabang** Non-Branch Offices



Kantor Regional Jawa Tengah bagian Selatan
Southern Central Java Regional Offices

- **17** Kantor Cabang — Branch Offices
- **6** Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* — Sharia Business Unit Branch Offices*
- **1** Kantor Selain Kantor Cabang — Non-Branch Offices

Kantor Regional Sulawesi
Sulawesi Regional Offices

- **18** Kantor Cabang — Branch Offices
- **3** Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* — Sharia Business Unit Branch Offices*
- **-** Kantor Selain Kantor Cabang — Non-Branch Offices

Kantor Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara
East Java, Bali, and Nusa Tenggara Regional Offices

- **32** Kantor Cabang — Branch Offices
- **5** Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* — Sharia Business Unit Branch Offices*
- **3** Kantor Selain Kantor Cabang — Non-Branch Offices

Kantor Regional Kalimantan
Kalimantan Regional Offices

- **14** Kantor Cabang — Branch Offices
- **3** Kantor Cabang Unit Usaha Syariah* — Sharia Business Unit Branch Offices*
- **-** Kantor Selain Kantor Cabang — Non-Branch Offices

*) Jumlah Kantor Cabang Unit Usaha Syariah dimaksud di atas adalah jumlah Kantor Cabang yang memiliki izin Kantor Cabang Unit Usaha Syariah selain izin sebagai Kantor Cabang dan dapat melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

*) The number of Sharia Business Unit Branch Offices mentioned above refers to Branch Offices that hold both a Sharia Branch Office license and a regular Branch Office license, and are authorized to conduct financing activities based on sharia principles.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

Visi Vision



Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

To be one of the best financing companies in Indonesia through good corporate governance implementation.



Misi Mission

- Mengutamakan kepuasan konsumen dan mitra kerja lainnya.
- Membangun infrastruktur berbasis TI untuk melaksanakan proses yang baik.
- Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial.
- Mengoptimalkan kinerja perusahaan.

- Placing the satisfaction of the customers and business partners as the first priority.
- Establishing IT-based infrastructures to promote sound.
- Developing and expanding business network, particularly in potential areas.
- Optimizing company performance.

Nilai Perusahaan Corporate Values



01 Teamwork

Kami bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan.

We work together as a team based on mutual respect and dignity.



02 Integrity

Kami jujur, profesional, dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha kami.

We are honest, professional, and ethical in all our dealings.



03 Growth

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.



04 Excellence & Efficiency

Kami berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang sempurna dan layanan prima.

We are committed to delivering outstanding performance and superior services.



05 Relationship Building

Kami secara berkesinambungan membangun hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

We continuously build long-term and mutually beneficial partnerships.

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Struktur Organisasi Perseroan per 31 Desember 2025
Company's Organizational Structure as of December 31, 2025

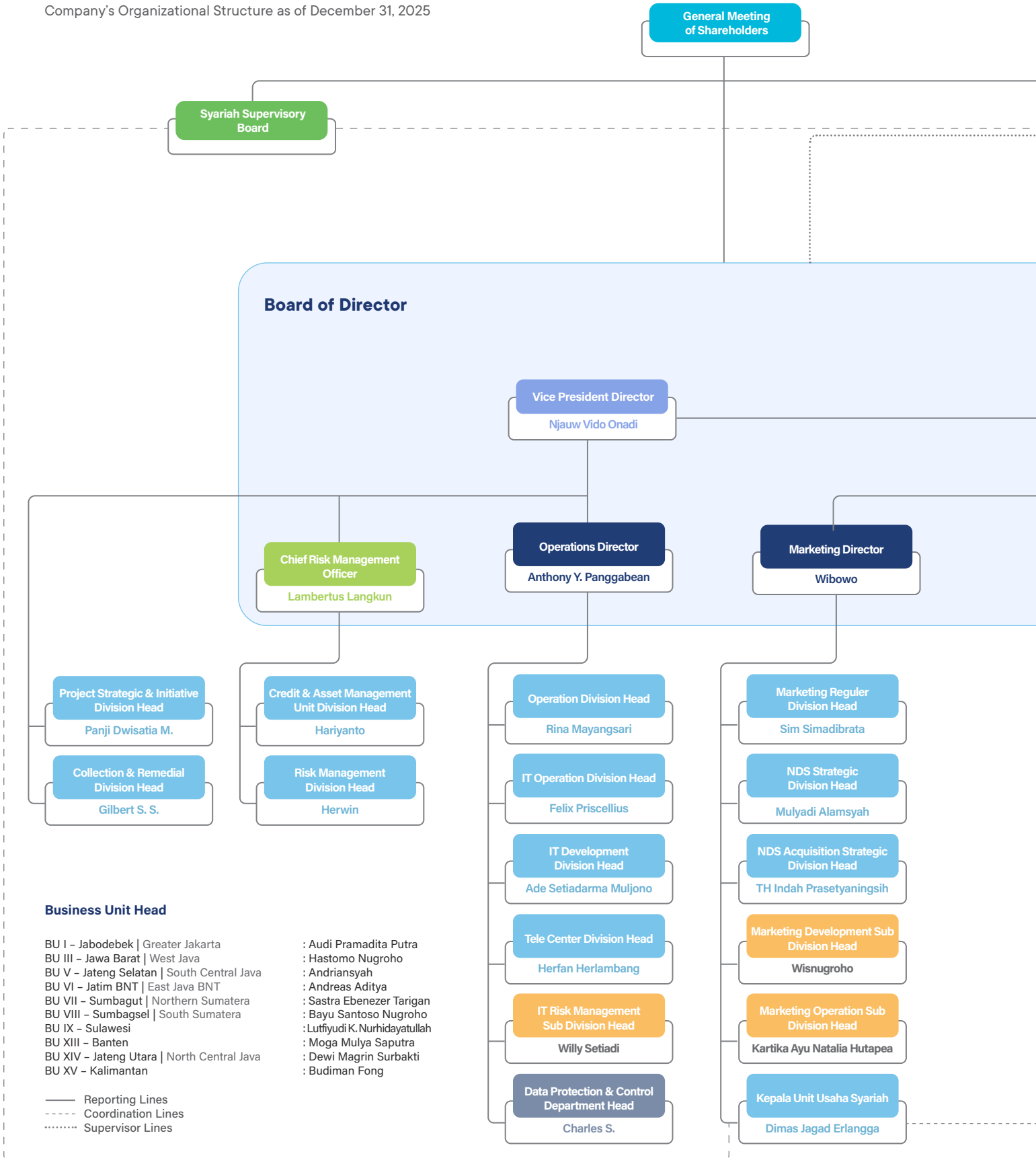

Business Unit Head

BU I – Jabodebek | Greater Jakarta	: Audi Pramadita Putra
BU III – Jawa Barat | West Java	: Hastomo Nugroho
BU V – Jateng Selatan | South Central Java	: Andriansyah
BU VI – Jatim BNT | East Java BNT	: Andreas Aditya
BU VII – Sumbagut | Northern Sumatera	: Sastra Ebenezer Tarigan
BU VIII – Sumbagsel | South Sumatera	: Bayu Santoso Nugroho
BU IX – Sulawesi	: Lutfiyudi K. Nurhidayatullah
BU XIII – Banten	: Moga Mulya Saputra
BU XIV – Jateng Utara | North Central Java	: Dewi Magrin Surbakti
BU XV – Kalimantan	: Budiman Fong

——— Reporting Lines
- - - - - Coordination Lines
····· Supervisor Lines

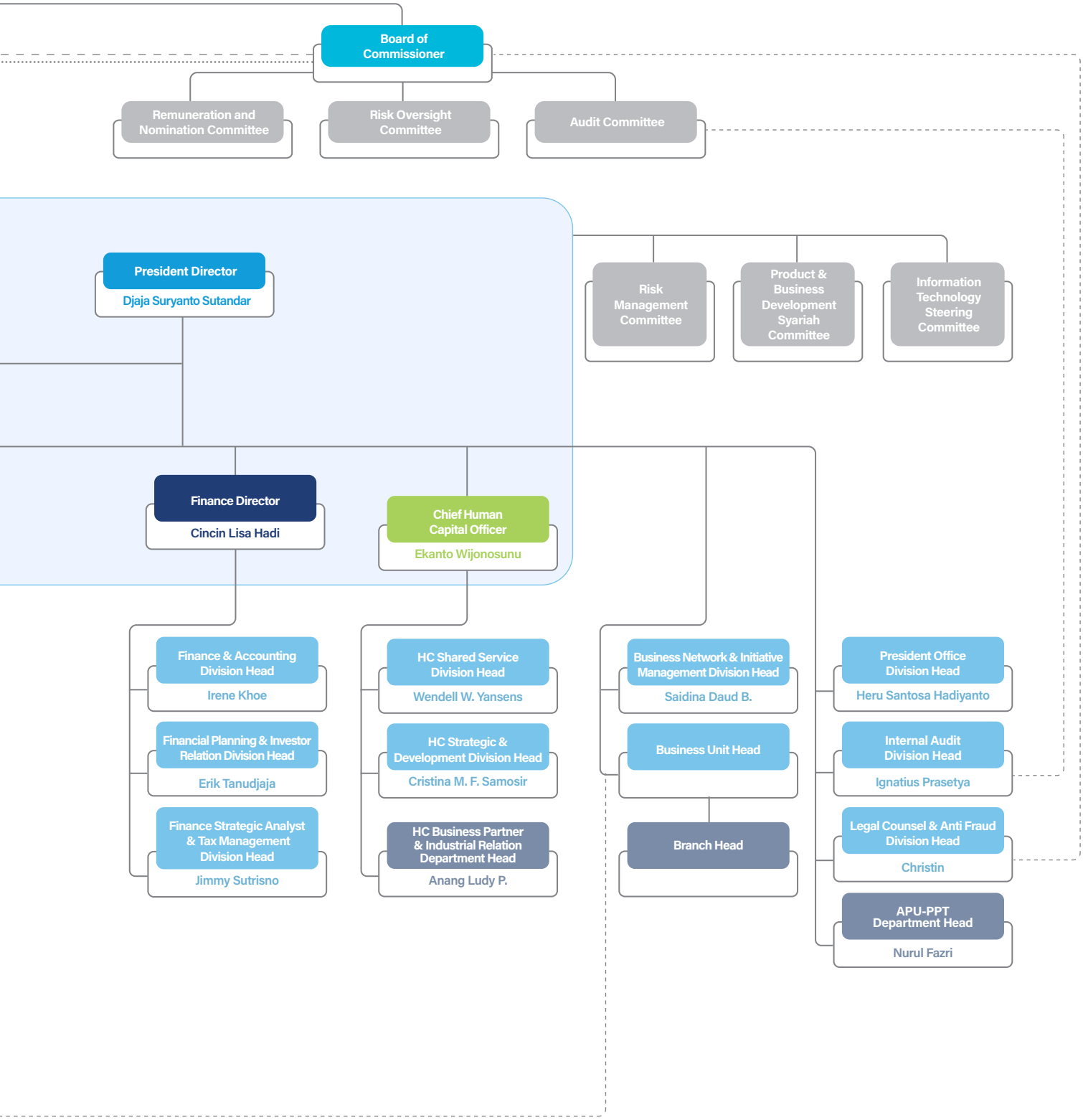
Board of Commissioner
Remuneration and Nomination Committee
Risk Oversight Committee
Audit Committee
President Director
Djaja Suryanto Sutandar
Risk Management Committee
Product & Business Development Syariah Committee
Information Technology Steering Committee
Finance Director
Cincin Lisa Hadi
Chief Human Capital Officer
Ekanto Wijonosunu
Finance & Accounting Division Head
Irene Khoe
Financial Planning & Investor Relation Division Head
Erik Tanudjaja
Finance Strategic Analyst & Tax Management Division Head
Jimmy Sutrisno
HC Shared Service Division Head
Wendell W. Yansens
HC Strategic & Development Division Head
Cristina M. F. Samosir
HC Business Partner & Industrial Relation Department Head
Anang Ludy P.
Business Network & Initiative Management Division Head
Saidina Daud B.
Business Unit Head
Branch Head
President Office Division Head
Heru Santosa Hadiyanto
Internal Audit Division Head
Ignatius Prasetya
Legal Counsel & Anti Fraud Division Head
Christin
APU-PPT Department Head
Nurul Fazri



Keanggotaan Dalam Asosiasi [OJK C.5] [GRI 2-28]

Association Membership

Perseroan secara aktif tergabung dalam berbagai asosiasi industri yang relevan. Keanggotaan ini mencerminkan peran aktif Perseroan dalam mendukung pengembangan sektor jasa keuangan, khususnya industri pembiayaan di Indonesia. Melalui partisipasi dalam asosiasi-asosiasi tersebut, Perseroan turut berkontribusi dalam perumusan kebijakan, pertukaran informasi, serta penguatan kerja sama antar pelaku industri, sekaligus memastikan bahwa Perseroan senantiasa sejalan dengan standar dan praktik terbaik yang berlaku di industri. Hingga tahun 2025, Perseroan tercatat sebagai anggota aktif dalam sejumlah asosiasi industri strategis, antara lain:

1. Keanggotaan Perseroan Pada Asosiasi
   a. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).
   b. Indonesia *Corporate Secretary Association* (ICSA).
   c. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
   d. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

2. Keanggotaan Perseroan Pada Lembaga Lainnya
   a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
   b. Lembaga Pencatatan Aset - PT Rapi Utama Indonesia (RAPINDO).
   c. Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan - PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ).
   d. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

The Company is actively involved in various relevant industry associations. This membership reflects the Company's active role in supporting the development of the financial services sector, particularly the financing industry in Indonesia. Through its participation in these associations, the Company's contributes to policy formulation, information exchange, and strengthening collaboration among industry players, while ensuring that the Company's remains aligned with prevailing industry standards and best practices. As of 2025, the Company is registered as an active member of several strategic industry associations, including:

1. The Company's Membership in Associations
   a. Indonesian Financial Services Association (APPI).
   b. Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA).
   c. Indonesian Employers Association (APINDO).
   d. Indonesian Issuers Association (AEI).

2. The Company's Membership in Other Institutions
   a. Alternative Institution for Dispute Resolution in Financial Services (LAPS SJK).
   b. Asset Registration Institution - PT Rapi Utama Indonesia (RAPINDO).
   c. Credit Information Management Institution – PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ).
   d. National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

Nama Asosiasi Name of Association	**Cakupan (Lokal, Nasional, Internasional)** Scope (Local, National, International)	**Status (Pengurus/ Anggota)** Status (Management/Member)
ICSA (*Indonesian Corporate Secretary Association*)	Nasional National	Anggota Member
APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) APPI (Indonesian Financial Services Association)	Nasional National	Anggota Member
APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) APINDO (Indonesian Employers Association)	Nasional National	Anggota Member
AEI (Asosiasi Emiten Indonesia) AEI (Indonesian Issuers Association)	Nasional National	Anggota Member
LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) LAPS SJK (Alternative Institution for Dispute Resolution at Financial Services)	Nasional National	Anggota Member
RAPINDO (PT Rapi Utama Indonesia)	Nasional National	Anggota Member
Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan - PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) Credit Information Management Institution – PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ)	Nasional National	Anggota Member
DSN - MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) DSN – MUI (National Sharia Council – Indonesian Ulema Council)	Nasional National	Anggota Member


Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Djaja Suryanto Sutandar

Presiden Direktur
President Director

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 61 tahun per 31 Desember 2025
61 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Jakarta
Jakarta

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Tahunan tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 20 Juli 2011.
3. Diangkat kembali sebagai Direktur melalui:
   a. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2014 tanggal 16 April 2014.
   b. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   c. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   d. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Tugas dan Tanggung Jawab*

Memimpin dan mengelola Perseroan termasuk memberikan arahan strategis dalam hal kebijakan dan strategi di lingkup pengembangan bisnis, manajemen risiko, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia, agar sesuai dengan tujuan Perseroan.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Bsc Finance dari California State University of Sacramento, USA (1986).

Riwayat Pekerjaan

- Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- Sekretaris Perusahaan Perseroan (2021 - 2022).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2015 - saat ini).
- Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2015 - saat ini).
- Komisaris, PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance), Jakarta (2013 - 2017).
- Presiden Direktur Perseroan (2011 - saat ini).
- EVP *Regional & Branch Network Development Head*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2011).

Legal Basis of Appointment

1. First appointed: Resolution of the 2011 Annual GMS dated May 11, 2011.
2. Effective date of initial appointment: July 20, 2011.
3. Reappointed as Director through:
   a. Resolution of the 2014 Annual GMS dated April 16, 2014.
   b. Resolution of the 2017 Annual GMS dated May 31, 2017.
   c. Resolution of the 2020 Annual GMS dated March 12, 2020.
   d. Resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023 (for the current term).

Duties and Responsibilities*

In charge of leading and managing the Company including providing strategic directives in terms of policies and strategies in business development, risk management, operations, finance, and human resources, in order to be in line with the Company's objectives.

Educational Background

He obtained a Bsc in Finance from California State University of Sacramento, USA (1986).

Work Experience

- Chairman of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 - present).
- Corporate Secretary of the Company (2021 - 2022).
- Member of the Integrated Risk Management Committee of the Maybank Indonesia Financial Conglomerate, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2015 - present).
- Chairman of the Company's Risk Management Committee (2015 - present).
- Commissioner, PT Maybank Indonesia Finance (formerly PT BII Finance), Jakarta (2013 - 2017).
- President Director of the Company (2011 - present).
- EVP Regional & Branch Network Development Head, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2011).

- Presiden Komisaris, PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance), Jakarta (2007 - 2013).
- SVP *Chief Secured Loan Officer*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2007 - 2010).
- SVP *Chief National Sales Officer*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2005 - 2007).
- *Regional Sales Head*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2005).
- *Regional Sales Head* Jawa Timur, Bali, NTT/NTB, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Surabaya (2003 - 2005).
- SVP *Regional Head East Java & Eastern part of Indonesia*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Surabaya (2002).
- VP *Temporary Head of Credit Review Division*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Thamrin Head Office (2000).
- SVP *Regional Head* untuk Sumatera, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia), Sumatera (1999 - 2002).
- VP *Branch Manager*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Cabang Kalibesar, Jakarta (1996 - 1999).
- VP *Deputy Area Manager* untuk Area Jawa Tengah dan Jawa Barat PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Bandung, Jawa Barat (1996).
- AVP *Branch Manager*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Cabang Bandung, Jawa Barat (1993 - 1996).
- *Senior Manager*, *Sub Branch Manager*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Cabang Tanah Abang, Jakarta (1991 - 1992).
- *Manager*, *Corporate Credit and Marketing*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Cabang Utama Thamrin, Jakarta (1990 - 1991).
- *Account Officer*, *Corporate Credit & Marketing*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Cabang Utama Thamrin, Jakarta (1988 - 1989).
- *Management Trainee*, *all banking activities*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Cabang Juanda, Jakarta (1987 - 1988).

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan
- Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2015 - saat ini).

Di Luar Perseroan
Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2015 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing Anggota Direksi tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Anggota Direksi.

- President Commissioner, PT Maybank Indonesia Finance (formerly PT BII Finance), Jakarta (2007 - 2013).
- SVP Chief Secured Loan Officer, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2007 - 2010).
- SVP Chief National Sales Officer, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2005 - 2007).
- Regional Sales Head, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Jakarta (2005).
- Regional Sales Head for East Java, Bali, and NTT/NTB, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Surabaya (2003 - 2005).
- SVP Regional Head, East Java & Eastern part of Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Surabaya (2002).
- VP Temporary Head of Credit Review Division, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Thamrin Head Office (2000).
- SVP Regional Head for Sumatera, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia), Sumatera (1999 - 2002).
- VP Branch Manager, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Kalibesar Branch, Jakarta (1996 - 1999).
- VP Deputy Area Manager for Middle & West Java Area, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Bandung, West Java (1996).
- AVP Branch Manager, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Bandung Branch, West Java (1993 - 1996).
- Senior Manager, Sub-Branch Manager, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Tanah Abang Branch, Jakarta (1991 - 1992).
- Manager, Corporate Credit and Marketing, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Thamrin Main Branch, Jakarta (1990 - 1991).
- Account Officer, Corporate Credit & Marketing, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Thamrin Main Branch, Jakarta (1988 - 1989).
- Management Trainee, all banking activities, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk), Juanda Branch, Jakarta (1987 - 1988).

Concurrent Positions

Within the Company
- Chairman of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 - present).
- Chairman of the Company's Risk Management Committee (2015 - present).

Outside the Company
Member of the Integrated Risk Management Committee of the Maybank Indonesia Financial Conglomerate, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2015 - present).

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Directors.



Njauw Vido Onadi

Wakil Presiden Direktur
Vice President Director

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 46 tahun per 31 Desember 2025
46 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Jakarta
Jakarta

Periode Jabatan
Term of Office

Efektif sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
Effective from February 5, 2025, to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

Sebagai Direktur
1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Agustus 2016.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 19 Agustus 2016.
3. Diangkat kembali
   a. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   b. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   c. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Sebagai Wakil Presiden Direktur:
1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2024 (untuk periode saat ini).
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 5 Februari 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab*

Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan fungsi Manajemen Risiko di Perseroan termasuk didalamnya aktivitas initiation credit sehingga tercapai kualitas portofolio yang sehat dan manajemen risiko Perseroan yang berjalan efektif.

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta (2003) dan pendidikan pascasarjana jurusan Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2014).

Legal Basis of Appointment

As Director
1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated August 19, 2016.
2. Effective date of initial appointment: August 19, 2016.
3. Reappointed:
   a. Resolution of the 2017 Annual GMS dated May 31, 2017.
   b. Resolution of the 2020 Annual GMS dated March 12, 2020.
   c. Resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023.

As Vice President Director:
1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated October 9, 2024 (for the current term).
2. Effective date of initial appointment February 5, 2025.

Duties and Responsibilities*

Directing, evaluating, and coordinating the implementation of Risk Management function in the Company, including credit initiation activities, enabling the achievement of sound portfolio quality and effective risk management of the Company.

Educational Background

He completed undergraduate education majoring in Accounting from Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta (2003) and postgraduate education majoring in Finance from University of Gadjah Mada, Yogyakarta (2014).

Riwayat Pekerjaan

- Wakil Presiden Direktur Perseroan (Februari 2025 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (Alternate), PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2016 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016 - saat ini).
- Direktur Perseroan (2016 - Februari 2025).
- SVP *Portfolio Management* & *Risk Analytic*, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2011 - 2016).
- *Credit Unit Head*, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2007 - 2011).
- Internal Audit *Team Leader*, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2003 - 2006).
- Auditor Kantor Akuntan Publik Trisno, Agoes dan Rekan (2001 - 2022).

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan

- Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

Di Luar Perseroan

Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (*Alternate*) - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2016 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing Anggota Direksi tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Anggota Direksi.

Work Experience

- Vice President Director of the Company (February 2025 – present)
- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 – present).
- Alternate Member of the Integrated Risk Management Committee of the Maybank Indonesia Financial Conglomerate, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2016 – present).
- Deputy Chair of the Company's Risk Management Committee (2016 – present).
- Director of the Company (2016 – February 2025).
- SVP Portfolio Management & Risk Analytics, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2011 – 2016).
- Credit Unit Head, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2007 – 2011).
- Internal Audit Team Leader, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2003 – 2006).
- Auditor, Public Accounting Firm Trisno, Agoes & Partners (2001 – 2002).

Concurrent Positions

Within the Company

- Deputy Chairman of the Company's Risk Management Committee (2016 - present)
- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 - present)

Outside the Company

Alternate Member of the Integrated Risk Management Committee of the Maybank Indonesia Financial Conglomerate - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2016 - present)

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Directors.



Cincin Lisa Hadi

Direktur
Director

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 47 tahun per 31 Desember 2025
47 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Tangerang
Tangerang

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Januari 2022.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 12 April 2022.
3. Diangkat kembali:
   - Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan Perseroan, termasuk didalamnya pengelolaan *treasury* dan *cash management* yang tepat, serta memantau dan memastikan pengelolaan keuangan Perseroan sesuai dengan ketentuan internal Perseroan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan jurusan Akuntansi dari STIE Trisakti (2000).

Riwayat Pekerjaan

- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2022 - saat ini).
- Sekretaris Perusahaan Perseroan (2022 - saat ini).
- Direktur Perseroan (2022 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- *Chief Financial Officer* Perseroan (2021 - 2022).
- *Head of Finance & Accounting*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2017 - 2021).
- *Head of Financial Reporting*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2014 - 2017).
- *Financial Reporting Head*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2010 - 2014)

Legal Basis of Appointment

1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated January 13, 2022.
2. Effective date of initial appointment: April 12, 2022.
3. Reappointed:
   - Resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023 (for the current term).

Duties and Responsibilities*

Responsible for the overall Company's financial management, including appropriate treasury and cash management, as well as monitoring and ensuring that the Company's financial management complies with the Company's internal policies, applicable laws and regulations, and Indonesian financial accounting standards.

Educational Background

She completed undergraduate education majoring in Accounting from STIE Trisakti (2000).

Work Experience

- Member of the Company's Risk Management Committee (2022 – present).
- Corporate Secretary of the Company (2022 – present).
- Director of the Company (2022 – present).
- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 – present).
- Chief Financial Officer of the Company (2021 – 2022).
- Head of Finance & Accounting, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2017 – 2021).
- Head of Financial Reporting, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2014 – 2017).
- Financial Reporting Head, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2010 – 2014).

- *Consolidated Reporting Manager*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2005 - 2010).
- *Associate Auditor*, KAP Dedy Muliadi & Rekan (Moore Stephens) (2002 - 2004).
- *Junior Auditor* (*Assistant*-1), PT Deloitte Advisory (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) (2001 - 2002).

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan
- Sekretaris Perusahaan Perseroan (2022 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2022 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini ini).

Di Luar Perseroan
-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing Anggota Direksi tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Anggota Direksi.

- Consolidated Reporting Manager, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2005 – 2010).
- Associate Auditor, KAP Dedy Muliadi & Rekan (Moore Stephens) (2002 – 2004).
- Junior Auditor (Assistant-1), PT Deloitte Advisory (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) (2001 – 2002).

Concurrent Positions

Within the Company
- Corporate Secretary of the Company (2022 – present).
- Member of the Company's Risk Management Committee (2022 – present).
- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 – present).

Outside the Company
-

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Directors.



Anthony Yuarez Panggabean

Direktur
Director

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 63 tahun per 31 Desember 2025
63 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Tangerang Selatan
South Tangerang

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Februari 2016.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 17 Mei 2016.
3. Diangkat kembali:
   a. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   b. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   c. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi penyelenggaraan fungsi *service*, tele *center*, dan *information technology* ("IT") Perseroan.

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan jurusan Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma, Jakarta (1993).

Riwayat Pekerjaan

- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016 - saat ini).

- Direktur Perseroan (2016 - saat ini).
- *IT Risk Management Head*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2015 - 2016).
- *International Assignment in* Maybank KL *involved in Regional Banking System Project*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2013 - 2014).

- *Head Operation Support*, Jakarta Ekajiwa dan Puri Kencana, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2012 - 2013).
- *Regional Operation Head* Ekajiwa dan Puri Kencana, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2012).

Legal Basis of Appointment

1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated February 18, 2016.
2. Effective date of initial appointment: May 17, 2016.
3. Reappointed:
   a. Resolution of the 2017 Annual GMS dated May 31, 2017.
   b. Resolution of the 2020 Annual GMS dated March 12, 2020.
   c. Resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023 (for the current term).

Duties and Responsibilities*

Responsible for the overall management of operational activities, including the implementation of the Company's service, telecenter, and information technology ("IT") functions.

Educational Background

He completed undergraduate education majoring in Management Informatics education from University of Gunadarma, Jakarta (1993).

Work Experience

- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 - present).
- Member of the Company's Risk Management Committee (2016 - present).
- Director of the Company (2016 - present).
- IT Risk Management Head, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2015 - 2016).
- International Assignment in Maybank Kuala Lumpur, involved in the Regional Banking System Project, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2013 - 2014).
- Head of Operation Support, Jakarta Ekajiwa and Puri Kencana, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2012 - 2013).
- Regional Operation Head, Ekajiwa and Puri Kencana, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2012).

- *Regional Operation Head* Ekajiwa, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2011 - 2012).
- *Acting Service Quality Head*, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2011).
- *Regional Operation Head* Sumatera, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2010 - 2011).
- *Group Head of Operation*, PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2008 - 2010).
- *Group Head of Operation and IT*, PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2002 - 2008).
- *Head of Operation Risk Management & Policy Unit*, PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2002).
- *Head of Service Quality Assurance Unit*, PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2001 - 2002).
- *Head of Operation, Financial Special Audit Unit*, PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2001).
- *Head of Operation Division* - Jakarta, PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1997 - 2001).
- *Head of Sundries Section - Head Office* Jakarta, PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1996 - 1997).
- *Head of Loan Administration Section - Head Office* Jakarta, PT Bank MNC Internasional Tbk (d/h PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1994 - 1996).
- Koordinator *Accounting Staff, Regional Office* I, Jakarta Area, PT Bank CIMB Niaga Tbk (d/h PT Bank Niaga Tbk) (1988 - 1993).
- *Accounting Staff* (*Processor*), Cabang Thamrin, PT Bank CIMB Niaga Tbk (d/h PT Bank Niaga Tbk) (1986 - 1988).

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini)
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2016 - saat ini).

Di Luar Perseroan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing Anggota Direksi tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Anggota Direksi.

- Regional Operation Head, Ekajiwa, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2011 - 2012).
- Acting Service Quality Head, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2011).
- Regional Operation Head, Sumatera, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2010 - 2011).
- Group Head of Operations, PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2008 - 2010).
- Group Head of Operations and IT, PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2002 - 2008).
- Head of Operations Risk Management & Policy Unit, PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2002).
- Head of Service Quality Assurance Unit, PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2001 - 2002).
- Head of Operations, Financial Special Audit Unit, PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (2001).
- Head of Operations Division - Jakarta, PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1997 - 2001).
- Head of Sundries Section - Head Office Jakarta, PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1996 - 1997).
- Head of Loan Administration Section - Head Office Jakarta, PT Bank MNC Internasional Tbk (formerly PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk) (1994 - 1996).
- Accounting Staff Coordinator, Regional Office I, Jakarta Area, PT Bank CIMB Niaga Tbk (formerly PT Bank Niaga Tbk) (1988 - 1993).
- Accounting Staff (Processor), Thamrin Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk (formerly PT Bank Niaga Tbk) (1986 - 1988).

Concurrent Positions

Within the Company
- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 - present).
- Member of the Company's Risk Management Committee (2016 - present).

Outside the Company

-

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Directors.



Wibowo

Direktur
Director

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 52 tahun per 31 Desember 2025
52 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Tangerang Selatan
South Tangerang

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Oktober 2019.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 30 Juli 2020.
3. Diangkat kembali:
   a. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   b. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab atas pencapaian target *marketing* secara nasional serta memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan dan implementasi kebijakan *marketing* yang diterapkan di Perseroan berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan.

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta (1997).

Riwayat Pekerjaan

- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).
- Direktur Perseroan (2020 - saat ini).
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2019 - saat ini).
- *Chief Marketing Officer* Perseroan (2019 - 2020).
- *Business Director*, PT Serba Mulia Auto (2017 – 2019).
- *Regional Office Head East Java & Kalimantan*, PT Buana Finance Tbk (2015 - 2017).
- *Area Manager* Jawa Timur 1, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2014 - 2015).
- *Branch Manager, Main Branch*, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2013).
- *Branch Manager*, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2004 - 2012).
- Kepala Operasional, PT BFI Finance Indonesia Tbk (1997 - 2003)

Legal Basis of Appointment

1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated October 10, 2019.
2. Effective date of initial appointment: July 30, 2020.
3. Reappointed:
   a. Resolution of the 2020 Annual GMS dated March 12, 2020.
   b. Resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023 (for the current term).

Duties and Responsibilities*

Responsible for achieving national marketing targets, as well as monitoring and ensuring that all of the Company's business development activities and marketing policies implementation are carried out following the provisions established by the Company.

Educational Background

He Completed undergraduate education majoring in Accounting from the College of Economics, Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta (1997).

Work Experience

- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 – present).
- Director of the Company (2020 – present).
- Member of the Company's Risk Management Committee (2019 – present).
- Chief Marketing Officer of the Company (2019 – 2020).
- Business Director, PT Serba Mulia Auto (2017 – 2019).
- Regional Office Head for East Java & Kalimantan, PT Buana Finance Tbk (2015 – 2017).
- Area Manager East Java 1, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2014 – 2015).
- Branch Manager, Main Branch, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2013).
- Branch Manager, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2004 – 2012).
- Operations Head, PT BFI Finance Indonesia Tbk (1997 – 2003).

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan

- Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan (2019 - saat ini).
- Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan (2021 - saat ini).

Di Luar Perseroan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing Anggota Direksi tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Anggota Direksi.

Concurrent Positions

Within the Company

- Member of the Company's Risk Management Committee (2019 - present).
- Member of the Company's Information Technology Steering Committee (2021 - present).

Outside the Company

-

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Directors.

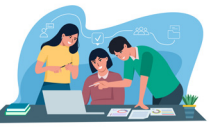

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

In 2025, the Company did not make any changes to the composition of the Board of Directors. Accordingly, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Presiden Direktur President Director	:	Djaja Suryanto Sutandar
Wakil Presiden Direktur Vice President Director	:	Njauw Vido Onadi*
Direktur Director	:	Anthony Yuarez Panggabean
Direktur Director	:	Wibowo
Direktur Director	:	Cincin Lisa Hadi

*) Pengangkatan Njauw Vido Onadi menjadi Wakil Presiden Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 Oktober 2024 dan efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan per tanggal 5 Februari 2025.

*) Appointment of Njauw Vido Onadi as Vice President Director at the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 9, 2024 and effectively serving as Vice President Director of the Company as of February 5, 2025.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



Sarastri Baskoro

Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

65 tahun per 31 Desember 2025
65 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Jakarta
Jakarta

Periode Jabatan
Term of Office

Efektif sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
Effective from October 17, 2024, to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

Sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen:
1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 (untuk periode saat ini).
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 17 Oktober 2024.

Legal Basis of Appointment

As President Commissioner/Independent Commissioner:
1. First appointed: Resolution of the 2024 Annual GMS dated March 28, 2024 (for the current term).
2. Effective date of initial appointment: October 17, 2024

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Duties and Responsibilities*

Responsible for supervising the Board of Directors' policies in managing the Company and providing advice to the Board of Directors.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Bachelor of Arts dari York University, Toronto, Canada (1983) dan gelar Postgraduate Banking and Finance dari Monash University, Australia (1996).

Educational Background

She obtained Bachelor of Arts degree from York University, Toronto, Canada (1983) and Postgraduate Banking and Finance degree from Monash University, Australia (1996).

Riwayat Pekerjaan

- Ketua Komite Pemantau Risiko (Oktober 2025 - saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024 - September 2025).
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2024 - saat ini).
- Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan (2024 - saat ini).
- *Advisor*, PT Ringkas Asia Technology (2022 - Desember 2025).
- Komisaris Independen, PT Tunas Ridean (2018 - 2023).
- Komisaris Independen, PT Heksa Solution Insurance (2016 - 2018).
- *Executive Relationship Officer*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016).
- Komisaris, PT Mandiri Tunas Finance (2009 - 2017).
- *Group Head Consumer Loans*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001 - 2016).

Work Experience

- Chairman of the Company's Risk Monitoring Committee (October 2025 - present).
- Member of the Company's Risk Monitoring Committee (2024 - September 2025).
- Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee (2024 - present).
- President Commissioner/Independent Commissioner of the Company (2024 - present).
- Advisor, PT Ringkas Asia Technology (2022 - December 2025).
- Independent Commissioner, PT Tunas Ridean (2018 - 2023).
- Independent Commissioner, PT Heksa Solution Insurance (2016 - 2018).
- Executive Relationship Officer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016).
- Commissioner, PT Mandiri Tunas Finance (2009 - 2017).
- Group Head of Consumer Loans, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001 - 2016).

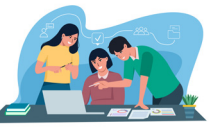

- *Division Head* CRM Retail, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000 - 2001).
- *Consumer Banking Director*, PT Bank Papan Sejahtera Tbk (1996 - 1997).
- *Assistant Vice President - Credit Cycle Head*, Citibank Card Center, Citibank, N.A. (saat ini telah diakuisisi oleh PT Bank UOB Indonesia) (1983 - 1990).

Pernyataan Independensi

Pernyataan independensi sebagai Komisaris Independen telah dinyatakan dalam RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024.

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan

- Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (Oktober 2025 - saat ini)
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2024 - saat ini).

Di Luar Perseroan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

- Division Head of Retail CRM, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000 - 2001).
- Consumer Banking Director, PT Bank Papan Sejahtera Tbk (1996 - 1997).
- Assistant Vice President - Credit Cycle Head, Citibank Card Center, Citibank, N.A. (now acquired by PT Bank UOB Indonesia) (1983 - 1990).

Declaration of Independence

Statement of independence as an Independent Commissioner was declared at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 28, 2024.

Concurrent Positions

Within the Company

- Chairman of the Company's Risk Monitoring Committee (October 2025 - present).
- Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee (November 2024 - present).

Outside the Company

-

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Commissioners.



Thilagavathy Nadason

Komisaris
Commissioner

Warga negara Malaysia
Malaysian citizen

64 tahun per 31 Desember 2025
64 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Malaysia
Malaysia

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan tahun 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
The 2024 Annual General Meeting of Shareholders to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 April 2015.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 4 Juni 2015
3. Diangkat kembali:
   a. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   b. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   c. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.
   d. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 (untuk periode saat ini).

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Accounting dari National University of Singapore, Singapura (1985).

Riwayat Pekerjaan

- Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2024 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024 - saat ini).

- Komisaris Perseroan (2015 - saat ini).
- Direktur, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009 – 2024).
- Direktur, *Chief Finance Officer*, Direktur *Operations* dan *Branch Service Center*, PT Bank Lippo Tbk (2005 - 2008, sebelum merger) - PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008 - 2009, setelah *merger*).

- *Partner*, *Transaction Services*, Pricewaterhouse Coopers Indonesia (1998 - 2005).
- *Senior Manager*, *Assurance*, Pricewaterhouse Coopers Hongkong (1993 - 1997).
- *Manager Assurance* dan Pelatihan, Pricewaterhouse Coopers Singapore (1985 - 1992).

Legal Basis of Appointment

1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated April 23, 2015.
2. Effective date of initial appointment: June 4, 2015
3. Reappointed:
   a. Resolution of the 2017 Annual GMS dated May 31, 2017.
   b. Resolution of the 2020 Annual GMS dated March 12, 2020.
   c. Resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023.
   d. Resolution of the 2024 Annual GMS dated March 28, 2024 (for the current term).

Duties and Responsibilities*

Responsible for supervising the Board of Directors' policies in managing the Company and providing advice to the Board of Directors.

Educational Background

She obtained a Bachelor of Accounting degree from National University of Singapore, Singapore (1985).

Work Experience

- Vice Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee (2024 - present).
- Vice Chairman of the Company's Risk Monitoring Committee (2024 - present).
- Commissioner of the Company (2015 - present).
- Director, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009 - 2024).
- Director, Chief Finance Officer, Director of Operations and Branch Service Center at PT Bank Lippo Tbk (2005 - 2008, before the merger) and PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008 - 2009, after the merger).
- Partner, Transaction Services, PricewaterhouseCoopers Indonesia (1998 - 2005).
- Senior Manager, Assurance, PricewaterhouseCoopers Hong Kong (1993 - 1997).
- Manager Assurance and Training, PricewaterhouseCoopers Singapore (1985 - 1992).

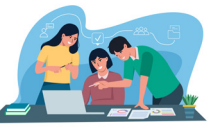

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan

- Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (2024 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024 - saat ini).

Di Luar Perseroan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

Concurrent Positions

Within the Company

- Vice Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee (2024 - present).
- Vice Chairman of the Company's Risk Monitoring Committee (2024 - present).

Outside the Company

-

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Commissioners.



Taufik Aulia

Komisaris
Commissioner

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 57 tahun per 31 Desember 2025
57 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Jakarta
Jakarta

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 9, 2024, to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2024 (untuk periode saat ini).
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 9 Oktober 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Bachelor of Science Industrial Engineering, Special Concentration: Management and Finance dari University of Wisconsin – Madison (1991).

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris, PT Candi Magelang Persada (April 2025 - saat ini)
- Komisaris Utama, PT Sahari Inovasi Investama (2024 - saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024 - saat ini).
- Komisaris Perseroan (2024 – saat ini).
- Komisaris, PT Kyochon Indonesia (2024 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Kalimas Multikarsa (2024 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Sahari Sukses Sejahtera (2023 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Investama Sejahtera (2023 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Graha Sahari Wangi (2023 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Islaverde Bioinnovation Utama (2023 - saat ini).
- Direktur, PT Gandamitra Sukses Development (2023 - saat ini).
- Komisaris, PT Anugrah Sukses Development (2023 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Wahanaartha Ritelindo (2023 - saat ini).
- Anggota Pembina, Yayasan Wahanaartha (2023 - saat ini).
- Direktur, PT Sahari Multi Investama (2023 - saat ini).
- Direktur Utama, PT Wahana Makmur Sejati (2023 - saat ini).
- Direktur Utama, PT Wahanaartha Harsaka (2023 - saat ini).
- Direktur, PT Mitra Amanah Investama (2023 - saat ini).
- Direktur, PT Mitrajaya Amanah Cemerlang (2023 - saat ini).

Legal Basis of Appointment

1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated October 9, 2024 (for the current term).
2. Effective date of initial appointment: October 9, 2024.

Duties and Responsibilities*

Responsible for overseeing the Board of Directors' policies in running the Company and providing advice to the Board of Directors.

Educational Background

He obtained a Bachelor of Science in Industrial Engineering, Special Concentration: Management and Finance from University of Wisconsin - Madison (1991).

Work Experience

- Commissioner, PT Candi Magelang Persada (April 2025 - present).
- President Commissioner, PT Sahari Inovasi Investama (2024–present).
- Member of the Company's Risk Monitoring Committee (2024 - present).
- Commissioner of the Company (2024 - present).
- Commissioner, PT Kyochon Indonesia (2024 - present).
- President Commissioner, PT Kalimas Multikarsa (2024 - present).
- President Commissioner, PT Sahari Sukses Sejahtera (2023 - present).
- Commissioner, PT Sahari Investama Sejahtera (2023 - present).
- President Commissioner, PT Graha Sahari Wangi (2023 - present).
- President Commissioner, PT Islaverde Bioinnovation Utama (2023 - present).
- Director, PT Gandamitra Sukses Development (2023 - present).
- Commissioner, PT Anugrah Sukses Development (2023 - present).
- President Commissioner, PT Wahanaartha Ritelindo (2023 - present).
- Member of the Governing Board, Yayasan Wahanaartha (2023 - present).
- Director, PT Sahari Multi Investama (2023 - present).
- President Director, PT Wahana Makmur Sejati (2023 - present).
- President Director, PT Wahanaartha Harsaka (2023 - present).
- Director, PT Mitra Amanah Investama (2023 - present).
- Director, PT Mitrajaya Amanah Cemerlang (2023 - present).



- Komisaris Utama, PT Sahari Makmur Sejati (2022 - saat ini).
- Komisaris, PT Graha Sahari Utama (2020 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Sejahtera Sejati (2019 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Makmur Sejahtera (2019 - saat ini).
- Komisaris, PT Sima Graha Utama (2018 - saat ini).
- Komisaris, PT Patra Tian Energy (2017 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Raya Investama (2016 - saat ini).
- Direktur, PT Deronesia (2014 - saat ini).
- Komisaris, PT Mitra Cassia Transport (2014 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Sukses Sejahtera (2014 - 2023).
- Direktur Utama, PT Kalimas Multikarsa (2013 - 2024).
- Direktur Utama, PT Graha Sahari Wangi (2013 - 2023).
- Komisaris, PT Star Industrial Supplies (2013 - saat ini).
- Komisaris, PT Oretin (2012 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Multi Investama (2011 - 2023).
- Komisaris, PT Dua Kawan Selaras (2010 - saat ini).
- Komisaris, PT Kalenesia (2007 - saat ini).
- Direktur, PT Wahanaartha Harsaka (2007 - 2023).
- Komisaris, PT Gandamitra Sukses Development (2006 - 2023).
- Direktur, PT Wahana Makmur Sejati (2006 - 2023).
- Direktur, PT Anugrah Sukses Development (2005 - 2023).
- *General Manager* Finance, PT Wahana Makmur Sejati (2001 - 2006).
- *Manager Investor Relation & Business*, PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (1996 - 2001).

- President Commissioner, PT Sahari Makmur Sejati (2022 - present).
- Commissioner, PT Graha Sahari Utama (2020 - present).
- Commissioner, PT Sahari Sejahtera Sejati (2019 - present).
- Commissioner, PT Sahari Makmur Sejahtera (2019 - present).
- Commissioner, PT Sima Graha Utama (2018 - present).
- Commissioner, PT Patra Tian Energy (2017 - present).
- Commissioner, PT Sahari Raya Investama (2016 - present).
- Director, PT Deronesia (2014 - present).
- Commissioner, PT Mitra Cassia Transport (2014 - present).
- Commissioner, PT Sahari Sukses Sejahtera (2014 - 2023).
- President Director, PT Kalimas Multikarsa (2013 - 2024).
- President Director, PT Graha Sahari Wangi (2013 - 2023).
- Commissioner, PT Star Industrial Supplies (2013 - present).
- Commissioner, PT Oretin (2012 - present).
- Commissioner, PT Sahari Multi Investama (2011 - 2023).
- Commissioner, PT Dua Kawan Selaras (2010 - present).
- Commissioner, PT Kalenesia (2007 - present).
- Director, PT Wahanaartha Harsaka (2007 - 2023).
- Commissioner, PT Gandamitra Sukses Development (2006 - 2023).
- Director, PT Wahana Makmur Sejati (2006 - 2023).
- Director, PT Anugrah Sukses Development (2005 - 2023).
- General Manager Finance, PT Wahana Makmur Sejati (2001 - 2006).
- Manager, Investor Relations & Business, PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (1996 - 2001).

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan

- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024 - saat ini).

Di Luar Perseroan

- Komisaris, PT Candi Magelang Persada (April 2025 - saat ini)
- Komisaris Utama, PT Sahari Inovasi Investama (2024 - saat ini).
- Komisaris, PT Kyochon Indonesia (2024 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Kalimas Multikarsa (2024 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Sahari Sukses Sejahtera (2023 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Investama Sejahtera (2023 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Graha Sahari Wangi (2023 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Islaverde Bioinnovation Utama (2023 - saat ini).
- Direktur, PT Gandamitra Sukses Development (2023 - saat ini).
- Komisaris, PT Anugrah Sukses Development (2023 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Wahanaartha Ritelindo (2023 - saat ini).
- Anggota Pembina, Yayasan Wahanaartha (2023 - saat ini).
- Direktur, PT Sahari Multi Investama (2023 - saat ini).
- Direktur Utama, PT Wahana Makmur Sejati (2023 - saat ini).
- Direktur Utama PT Wahanaartha Harsaka (2023 - saat ini).
- Direktur, PT Mitra Amanah Investama (2023 - saat ini).
- Direktur, PT Mitrajaya Amanah Cemerlang (2023 - saat ini).
- Komisaris Utama, PT Sahari Makmur Sejati (2022 - saat ini).
- Komisaris, PT Graha Sahari Utama (2020 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Sejahtera Sejati (2019 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Makmur Sejahtera (2019 - saat ini).

Concurrent Positions

Within the Company

- Member of the Company's Risk Monitoring Committee (2024 - present).

Outside the Company

- Commissioner, PT Candi Magelang Persada (April 2025 - present).
- President Commissioner, PT Sahari Inovasi Investama (2024 - present).
- Commissioner, PT Kyochon Indonesia (2024 - present).
- President Commissioner, PT Kalimas Multikarsa (2024 - present).
- President Commissioner, PT Sahari Sukses Sejahtera (2023 - present).
- Commissioner, PT Sahari Investama Sejahtera (2023 - present).
- President Commissioner, PT Graha Sahari Wangi (2023 - present).
- President Commissioner, PT Islaverde Bioinnovation Utama (2023 - present).
- Director, PT Gandamitra Sukses Development (2023 - present).
- Commissioner, PT Anugrah Sukses Development (2023 - present).
- President Commissioner, PT Wahanaartha Ritelindo (2023 - present).
- Member of the Governing Board, Yayasan Wahanaartha (2023 - present).
- Director, PT Sahari Multi Investama (2023 - present).
- President Director, PT Wahana Makmur Sejati (2023 - present).
- President Director, PT Wahanaartha Harsaka (2023 - present).
- Director, PT Mitra Amanah Investama (2023 - present).
- Director, PT Mitrajaya Amanah Cemerlang (2023 - present).
- President Commissioner, PT Sahari Makmur Sejati (2022 - present).
- Commissioner, PT Graha Sahari Utama (2020 - present).
- Commissioner, PT Sahari Sejahtera Sejati (2019 - present).
- Commissioner, PT Sahari Makmur Sejahtera (2019 - present).

- Komisaris, PT Sima Graha Utama (2018 - saat ini).
- Komisaris, PT Patra Titan Energy (2017 - saat ini).
- Komisaris, PT Sahari Raya Investama (2016 - saat ini).
- Direktur, PT Deronesia (2014 - saat ini).
- Komisaris, PT Mitra Cassia Transport (2014 - saat ini).
- Komisaris, PT Star Industrial Supplies (2013 - saat ini).
- Komisaris, PT Oretin (2012 - saat ini).
- Komisaris, PT Dua Kawan Selaras (2010 - saat ini).
- Komisaris, PT Kalenesia (2007 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- Memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan PT Wahana Makmur Sejati selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

- Commissioner, PT Sima Graha Utama (2018 - present).
- Commissioner, PT Patra Titan Energy (2017 - present).
- Commissioner, PT Sahari Raya Investama (2016 - present).
- Director, PT Deronesia (2014 - present).
- Commissioner, PT Mitra Cassia Transport (2014 - present).
- Commissioner, PT Star Industrial Supplies (2013 - present).
- Commissioner, PT Oretin (2012 - present).
- Commissioner, PT Dua Kawan Selaras (2010 - present).
- Commissioner, PT Kalenesia (2007 - present).

Affiliated Relationship

- Has no family affiliation with any members of the Board of Directors, any other members of the Board of Commissioners, or any of the Company's Majority Shareholders or Controlling Shareholders.
- Has no financial affiliation with any members of the Board of Directors, any other members of the Board of Commissioners, or PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the Company's Majority Shareholder and Controlling Shareholder.
- Has an affiliation in the form of a financial relationship with PT Wahana Makmur Sejati as the Company's Majority and Controlling Shareholder.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Commissioners.



Rallyati A. Wibowo, S.E.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 65 tahun per 31 Desember 2025
65 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Jakarta
Jakarta

Periode Jabatan
Term of Office

Efektif sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
Effective from October 2, 2024, to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 (untuk periode saat ini).
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 2 Oktober 2024.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1985) dan meraih gelar Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2010).

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Riwayat Pekerjaan

- Ketua Komite Audit Perseroan (2024 - saat ini).
- Anggota Komite Audit, PT Mitrabara Adiperdana Tbk (2024 - September 2025).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024 - saat ini).

- Komisaris Independen Perseroan (2024 - saat ini).
- Anggota Dewan Pengurus, Ikatan Komite Audit Indonesia (2022 - Oktober 2025).
- Anggota Komite Audit, PT Bank Central Asia Tbk (2021 - saat ini).

- Anggota Dewan Pengurus, Ikatan Komite Audit Indonesia (2019 - 2022).
- Anggota Komite Audit, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2016 - 2023).
- Anggota Komite Audit, Universitas Indonesia (2014 - 2019).

- Direktur Logistik dan Umum, PT Adi Sarana Armada Tbk (2012 - 2015).

Legal Basis of Appointment

1. First appointed: Resolution of the 2024 Annual GMS dated March 28, 2024 (for the current term).
2. Effective date of initial appointment: October 2, 2024.

Educational Background

She obtained a Bachelor's degree in Accounting Faculty of Economics from the University of Indonesia, Jakarta (1985) and a Master's degree in Accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia (2010).

Duties and Responsibilities*

Responsible for supervising the Board of Directors' policies in managing the Company and providing advice to the Board of Directors.

Work Experience

- Chairman of the Company's Audit Committee (2024 - present).
- Member of the Audit Committee, PT Mitrabara Adiperdana Tbk (2024 - September 2025).
- Member of the Company's Risk Monitoring Committee (2024 - present).
- Independent Commissioner of the Company (2024 - present).
- Member of the Executive Board, the Indonesian Audit Committee Association (2022 - October 2025).
- Member of the Audit Committee, PT Bank Central Asia Tbk (2021 - present).
- Member of the Executive Board, the Indonesian Audit Committee Association (2019 - 2022).
- Member of the Audit Committee, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2016 - 2023).
- Member of the Audit Committee, Universitas Indonesia (2014 - 2019).
- Director of Logistics and General Affairs, PT Adi Sarana Armada Tbk (2012 - 2015).

- *Finance & Administration Director*, PT Indospec Asia (2012).
- Anggota Komite Audit, PT Tugu Pratama Indonesia (saat ini bernama PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk) (2010 - 2011).
- Kepala Divisi Akuntansi, Keuangan dan SDM, Risk Management, PT Surya Citra Media (2005 - 2009).
- Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (1995 - 2005).
- *Vice President - Financial Controller*, PT Sewu New York Life (perusahaan telah diakuisisi dan saat ini bernama PT Asuransi Jiwa Sequis Life) (1992 - 1995).
- Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1986 - saat ini).
- *Senior Assistant - Assistant Manager*, Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (saat ini bernama Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) (1986 - 1992).

Pernyataan Independensi

Pernyataan independensi sebagai Komisaris Independen telah dinyatakan dalam RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024.

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan
- Ketua Komite Audit Perseroan (2024 - saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan (2024 - saat ini).

Di Luar Perseroan
- Anggota Komite Audit, PT Bank Central Asia Tbk (2021 - saat ini).
- Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (1986 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tersedia pada Bab Tata Kelola Perusahaan mengenai Dewan Komisaris.

- Finance & Administration Director, PT Indospec Asia (2012).
- Member of the Audit Committee, PT Tugu Pratama Indonesia (now PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk) (2010 - 2011).
- Head of Accounting, Finance, HR, and Risk Management Division, PT Surya Citra Media (2005 - 2009).
- Head of Finance and Accounting Division, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (1995 - 2005).
- Vice President - Financial Controller, PT Sewu New York Life (the company has been acquired and now called PT Asuransi Jiwa Sequis Life) (1992 - 1995).
- Staff Lecturer, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (1986 - present).
- Senior Assistant - Assistant Manager, Public Accounting Firm Drs. Hadi Sutanto & Partners (now Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners) (1986 - 1992).

Declaration of Independence

Statement of independence as an Independent Commissioner was declared at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 28, 2024.

Concurrent Positions

Within the Company
- Chairman of the Company's Audit Committee (2024 - present).
- Member of the Company's Risk Monitoring Committee (2024 - present).

Outside the Company
- Member of the Audit Committee, PT Bank Central Asia Tbk (2021 - present).
- Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (1986 - present).

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners, please see the Corporate Governance Chapter on the Board of Commissioners.

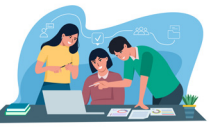

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

In 2025, the Company made a change to the composition of the Board of Commissioners in connection with the end of the term of office of one of members the Company's Board of Commissioners. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, is as follows:

Presiden Komisaris / Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	:	Sarastri Baskoro
Komisaris Commissioner	:	Thilagavathy Nadason
Komisaris Commissioner	:	Taufik Aulia
Komisaris Independen Independent Commissioner	:	Rallyati A. Wibowo, S.E.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Profile



Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.

Ketua
Chairman

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 73 tahun per 31 Desember 2025
73 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Bekasi
Bekasi

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

Sebagai Anggota DPS:
1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Maret 2008.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 26 Maret 2008.

Sebagai Ketua DPS (posisi jabatan sampai dengan saat ini):
1. Diangkat pertama kali : Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Maret 2009.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 19 Maret 2009.
3. Diangkat kembali:
   a. Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2011.
   b. Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 April 2014.
   c. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   d. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   e. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar sarjana dengan jurusan Dakwah dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir (1979), pendidikan pascasarjana dengan jurusan Pendidikan Islam dari Institut Studi Islam Kairo, Mesir (1991) dan pendidikan Doktor dengan jurusan Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perseroan atau UUS Perseroan sesuai dengan prinsip syariah.

Legal Basis of Appointment

As a member of DPS:
1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated March 26, 2008.
2. Effective date of initial appointment: March 26, 2008.

As Chairman of DPS (current position):
1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated March 19, 2009.
2. Effective date of initial appointment: March 19, 2009.
3. Reappointed:
   a. Resolution of the Extraordinary GMS dated May 11, 2011.
   b. Resolution of the Extraordinary GMS dated April 16, 2014.
   c. Resolution of the 2017 Annual GMS dated May 31, 2017.
   d. Resolution of the 2020 Annual GMS dated March 12, 2020.
   e. Resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023 (for the current term).

Educational Background

He obtained Bachelor Degree majoring in Da'wah at Al-Azhar University, Cairo, Egypt (1979), a Master's degree in Islamic Education department at the Islamic University of Cairo, Egypt (1991) and a Doctoral degree in Islamic Education at the State Islamic University of Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008).

Duties and Responsibilities*

Responsible for supervising and providing advice and suggestions to the Board of Directors, ensuring that the Company's activities or the Company's UUS are in accordance with sharia principles.

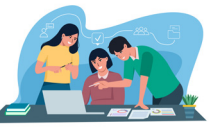

Riwayat Pekerjaan

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (2017 - 2024).
- Ketua DPS Perseroan (2009 - saat ini).
- Anggota DPS Perseroan (2008 - 2009).
- Anggota DPS, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (2003 - 2024).
- Dosen Tidak Tetap Ilmu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Syahid, Jakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Indonesia (STEKPI), dan Fakultas Agama Islam UNISMA (Universitas Islam 45) Bekasi (2002 - 2004).
- Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa, Bekasi, dalam Bidang Ilmu Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Pemikiran Pendidikan Islam, Tafsir Tematik, dan Kapita Selekta Pendidikan Islam (1992 - saat ini).
- Ketua, Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa (1991 - 2001).

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan

-

Di Luar Perseroan

- Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa, Bekasi, dalam Bidang Ilmu Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Pemikiran Pendidikan Islam, Tafsir Tematik, dan Kapita Selekta Pendidikan Islam (1992 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota DPS tersedia pada Tata Kelola Perusahaan mengenai DPS.

Work Experience

- Member of the Integrated Governance Committee of the Maybank Indonesia Financial Conglomerate, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (2017 - 2024).
- Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board (2009 - present).
- Member of the Company's Sharia Supervisory Board (2008 - 2009).
- Member of the Sharia Supervisory Board, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (2003 - 2024).
- Part-Time Lecturer in Islamic Education at the Faculty of Tarbiyah, IAIN Syahid Jakarta; Indonesian School of Economics and Banking (STEKPI); and Faculty of Islamic Studies, UNISMA (Universitas Islam 45) Bekasi (2002 - 2004).
- Full-Time Lecturer at Attaqwa Islamic Higher Education Institute, Bekasi, in Islamic Education, History of Islamic Education, Islamic Educational Thought, Thematic Tafsir, and Selected Topics in Islamic Education (1992 - present).
- Chairman, Attaqwa Islamic Higher Education Institute (1991 - 2001).

Concurrent Positions

Within the Company

-

Outside the Company

- Full-Time Lecturer at Attaqwa Islamic Higher Education Institute, Bekasi, in Islamic Education, History of Islamic Education, Islamic Educational Thought, Thematic Tafsir, and Selected Topics in Islamic Education (1992 – present).

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the DPS, please see the Corporate Governance Chapter on the DPS.



Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen

Anggota
Member

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia 64 tahun per 31 Desember 2025
64 years old as of December 31, 2025

Domisili
Domicile

Bogor
Bogor

Periode Jabatan
Term of Office

RUPS Tahunan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026.
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders to the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Dasar Hukum Pengangkatan

1. Diangkat pertama kali: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2011.
2. Tanggal efektif menjabat pertama kali: 11 Mei 2011.
3. Diangkat kembali:
   a. Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 April 2014.
   b. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017.
   c. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020.
   d. Keputusan RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 (untuk periode saat ini).

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Peternakan dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1984), pendidikan pascasarjana dengan jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1990), post graduate advance studies in human ecology (1994), pendidikan pascasarjana jurusan program Ekonomi dari University of New England, Australia (1996), dan pendidikan Doktor dengan jurusan Philosophy in Economics dari University of New England, Australia (2001).

Tugas dan Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perseroan atau UUS Perseroan sesuai dengan prinsip syariah

Riwayat Pekerjaan

- Tim Asesmen dan Penilaian Calon Lembaga Pemeriksa Halal (2022 - saat ini).
- DPS, PT MNC Finance (2022 - saat ini).
- Anggota Tim Penyusun Daftar Efek Syariah - OJK (2022).
- Dewan Pakar Social Trust Fund (STF), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021 - saat ini).
- Pimpinan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat (2020 - 2025).
- Dewan Pembina, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020 - 2022).
- Penasihat Syariah, BP-TAPERA (2020 - 2023).

Legal Basis of Appointment

1. First appointed: Resolution of the Extraordinary GMS dated May 11, 2011.
2. Effective date of initial appointment: May 11, 2011.
3. Reappointed:
   a. Resolution of the Extraordinary GMS dated April 16, 2014.
   b. Resolution of the 2017 Annual GMS dated May 31, 2017.
   c. Resolution of the 2020 Annual GMS dated March 12, 2020.
   d. Resolution of the 2023 Annual GMS dated March 30, 2023 (for the current term).

Educational Background

He obtained Bachelor Degree in Animal Husbandry from Bogor Agricultural Institute, Bogor (1984), a Master's degree in Regional and Rural Development Planning from Bogor Agricultural Institute, Bogor (1990), post graduate advance studies in human ecology (1994), a master's degree in Economics program from Institute of New England, Australia (1996), and a Doctoral degree in Economics program from University of New England, Australia (2001).

Duties and Responsibilities*

Responsible for supervising and providing advice and suggestions to the Board of Directors, ensuring that the Company's activities or the Company's UUS are in accordance with sharia principles.

Work Experience

- Assessment and Evaluation Team for Prospective Halal Inspection Agencies (2022 - present).
- Sharia Supervisory Board (SSB) Member, PT MNC Finance (2022 - present).
- Member of the Sharia Securities List Preparation Team-OJK (2022).
- Expert Council, Social Trust Fund (STF), Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2021 - present).
- National Board Member, National Amil Zakat Agency (BAZNAS) (2020 - 2025).
- Advisory Board Member, Center for Halal Product Research and Development, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2020 - 2022).
- Sharia Advisor, BP-TAPERA (2020 - 2023).



- Anggota Senat Universitas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018 - 2022).

- DPS, PT BRI Manajemen Investasi (d/h PT Danareksa Investment Management) (2017 - saat ini).
- DPS, PT MNC Guna Usaha Indonesia (2016 - saat ini).

- DPS, PT Treasure Fund Investama (2016 - 2020).

- DPS, PT GAP Capital (2016 - 2019).
- Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Produk Halal, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2016 - 2017).
- Ketua, UPZ Baznas Kota Tangerang Selatan Mas Al-Husainy Cempaka Putih (2015 - 2020).
- Wakil Ketua, Badan Wakaf Indonesia (2014 - 2017).
- Anggota, DPS Perseroan (2011 - saat ini).
- Dewan Pengawas Syariah, PT Maybank Indonesia Finance (2011 - 2017).
- Direktur *Executive Islamic Banking and Finance* (IBFI), Trisakti (2011 - 2013).
- Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah (2011 - 2013).
- Dekan, Fakultas Ekonomi YARSI (2009 - 2011).
- Direktur, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) (2005 - 2009).
- Peneliti Senior SMERU, Research Institute (2003).
- Dosen Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002 - saat ini).
- *Staff* Ahli Bidang BUMN Komisi V, DPR RI (2001 - 2004).

- Kepala Bidang Teknologi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Riset dan Teknologi (eselon III/a) (2001 - 2003).
- Kepala Seksi Perumusan dan Pengendalian Program, Dinas Peternakan Bengkulu (1987).
- *Staff* Bina Program, Dinas Pendidikan Bengkulu (1984).

Informasi Rangkap Jabatan

Di Dalam Perseroan

-

Di Luar Perseroan

- DPS, PT MNC Finance (2022 - saat ini).

- Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat (2020 - 2025).
- DPS, PT BRI Manajemen Investasi (d/h PT Danareksa Investment Management) (2017 - saat ini).

- DPS, PT MNC Guna Usaha Indonesia (2016 - saat ini).

- Dosen Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

*) Untuk tugas dan tanggung jawab lainnya dari masing-masing anggota DPS tersedia pada Tata Kelola Perusahaan mengenai DPS.

- Member of the University Senate, Faculty of Economics and Business, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2018 - 2022).
- Sharia Supervisory Board Member, PT BRI Manajemen Investasi (formerly PT Danareksa Investment Management) (2017 - present).
- Sharia Supervisory Board Member, PT MNC Guna Usaha Indonesia (2016 - present).
- Sharia Supervisory Board Member, PT Treasure Fund Investama (2016 - 2020).
- Sharia Supervisory Board Member, PT GAP Capital (2016 - 2019).
- Head, Center for Research and Development of Halal Products, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2016 - 2017).
- Head, UPZ Baznas, South Tangerang City, Mas Al-Husainy Cempaka Putih (2015 - 2020).
- Vice Chairman, Indonesian Waqf Board (2014 - 2017).
- Sharia Supervisory Board Member, the Company (2011 - present).
- Sharia Supervisory Board Member, PT Maybank Indonesia Finance (2011 - 2017).
- Executive Director, Islamic Banking and Finance Institute (IBFI) Trisakti (2011 - 2013).
- Head, Center for Islamic Economic Studies and Development, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2011 - 2013).
- Dean, Faculty of Economics, YARSI University (2009 - 2011).
- Director, Center for Sharia Economic Communication (PKES) (2005 - 2009).
- Senior Researcher, SMERU Research Institute (2003).
- Lecturer in Islamic Economics, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2002 - present).
- Expert Staff for SOEs, Commission V, House of Representatives (DPR RI) (2001 - 2004).
- Head of Environmental Technology and Biodiversity Division, Ministry of Research and Technology (Echelon III/a) (2001 - 2003).
- Head of Program Formulation and Control Section, Bengkulu Livestock Service (1987).
- Program Development Staff, Bengkulu Education Office (1984)

Concurrent Positions

Within the Company

-

Outside the Company

- Sharia Supervisory Board Member, PT MNC Finance (2022 – present).
- Head of the National Board of Zakat (BAZNAS), Central Office (2020 - 2025).
- Sharia Supervisory Board Member, PT BRI Manajemen Investasi (formerly PT Danareksa Investment Management) (2017 – present).
- Sharia Supervisory Board Member, PT MNC Guna Usaha Indonesia (2016 – present).
- Lecturer in Islamic Economics, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2002 – present).

Affiliated Relationship

Has no affiliations in the form of financial or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or with the Major and Controlling Shareholders of the Company.

*) For other duties and responsibilities of each member of the DPS, please see the Corporate Governance Chapter on the DPS.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Sehingga susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AND REASONS FOR THE CHANGES

In 2025, the Company did not make any changes to the composition of the Company's Sharia Supervisory Board. Accordingly, the composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2025, is as follows:

Ketua Chairman	:	Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Anggota Member	:	Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen

Pejabat Senior
Senior Officers

Ketua • Chief



Ekanto Wijonosunu
• Chief Human Capital Officer



Lambertus Langkun
• Chief Risk Management Officer

Kepala Divisi • Division Head



Sim Simadibrata
• Marketing Reguler Division Head



Mulyadi Alamsyah
• NDS Strategic Division Head



TH Indah Prasetyaningsih
• NDS Acquisition Strategic Division Head



Dimas Jagad Erlangga
• Kepala Unit Usaha Syariah



Hariyanto
• Credit & Asset Management Unit Division Head



Gilbert Samuel Siahaan
• Collection & Remedial Division Head



Herwin
• Risk Management Division Head



Panji Dwisatia Munajat
• Project Strategic & Initiative Division Head



Irene Khoe
• Finance & Accounting Division Head



Erik Tanudjaja
- Financial Planning & Investor Relation Division Head



Jimmy Sutrisno
- Finance Strategic Analyst & Tax Management Division Head



Rina Mayangsari
- Operation Division Head



Felix Priscellius
- IT Operation Division Head



Ade Setiadarma Muljono
- IT Development Division Head



Herfan Herlambang
- Tele Center Division Head



Wendell William Yansens
- HC Shared Service Division Head



Cristina M.F Samosir
- HC Strategic & Development Division Head



Saidina Daud Bantayan
- Business Network & Initiative Management Division Head



Heru Santosa Hadiyanto
- President Office Division Head



Ignatius Prasetya
- Internal Audit Division Head



Christin
- Legal Counsel & Anti Fraud Division Head

Kepala Unit Bisnis • Business Unit Head



Audi Pramadita Putra
• Business Unit Head



Hastomo Nugroho
• Business Unit Head



Andriansyah
• Business Unit Head



Andreas Aditya
• Business Unit Head



Sastra Ebenezer Tarigan
• Business Unit Head



Bayu Santoso Nugroho
• Business Unit Head



Lutfiyudi K. Nurhidayatullah
• Business Unit Head



Moga Mulya Saputra
• Business Unit Head



Dewi Magrin Surbakti
• Business Unit Head



Budiman Fong
• Business Unit Head

Sub Division Head • Sub Division Head



Wisnugroho
- Marketing Development Sub Division Head



Kartika Ayu Natalia Hutapea
- Marketing Operation Sub Division Head



Willy Setiadi
- IT Risk Management Sub Division Head



Demografi Karyawan
Employee Demographics

Per 31 Desember 2025, jumlah karyawan Perseroan mencapai 2.170 orang karyawan, mengalami penurunan sebesar 4,57% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2024 yang sebanyak 2.274 orang karyawan. Demografi karyawan Perseroan dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

As of December 31, 2025, the Company's total number of employees reached 2.170 people, representing a decrease of 4.57% compared to the total of 2,274 employees as of December 31, 2024. The Company's employee demographics are presented below:

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Table of Employee Composition by Gender

(orang)
(people)

Jenis Kelamin Gender	**2025**		**2024**		
	Jumlah Total	**Komposisi** Composition **(%)**	**Jumlah** Total	**Komposisi** Composition **(%)**	
Laki-laki Male	**1.426**	**65,71%**	1.520	66,84%	↓
Perempuan Female	**744**	**34,29%**	754	33,16%	↑
Jumlah Total	**2.170**	**100,00**	**2.274**	**100,00**	↓

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan
Table of Employee Composition by Position

(orang)
(people)

Level Jabatan Position	**2025**				**2024**				
	Laki-laki Male	**Perempuan** Female	**Jumlah** Total	**Komposisi** Composition (%)	**Laki-laki** Male	**Perempuan** Female	**Jumlah** Total	**Komposisi** Composition (%)	
Entry-level	**146**	**93**	**239**	**11,01%**	190	121	311	13,68%	↓
Mid-level	**980**	**558**	**1.538**	**70,88%**	1.036	551	1.587	69,79%	↓
Senior-level	**261**	**83**	**344**	**15,85%**	256	72	328	14,42%	↑
Executive-level	**39**	**10**	**49**	**2,26%**	38	10	48	2,11%	↑
Jumlah Total	**1.426**	**744**	**2.170**	**100,00%**	**1.520**	**754**	**2.274**	**100,00%**	↓

Tabel Karyawan Berdasarkan Usia
Table of Employee Composition by Age

(orang)
(people)

Usia Age	2025				2024				
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
18-24 tahun / years old	111	74	185	8,53%	150	96	246	10,82	↓
25-34 tahun / years old	746	469	1.215	55,99%	734	438	1.172	51,54	↑
35-44 tahun / years old	394	138	532	24,52%	447	162	609	26,78	↓
45-54 tahun / years old	164	59	223	10,28%	178	55	233	10,25	↓
>55 tahun / years old	11	4	15	0,69%	11	3	14	0,62	↑
Jumlah Total	**1.426**	**744**	**2.170**	**100,00%**	**1.520**	**754**	**2.274**	**100,00**	↓

Tabel Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Table of Employee Composition by Education Level

(orang)
(people)

Tingkat Pendidikan Education Level	2025				2024				
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
SMP Junior High School	1	0	1	0,05%	2	0	2	0,09	↓
SMA Senior High School	228	36	264	12,17%	253	33	286	12,58	↓
Akademi Academy	106	69	175	8,06%	118	73	191	8,40	↓
Strata 1 (S1) Bachelor (S1)	1.073	620	1.693	78,02%	1.131	629	1.760	77,40	↓
Strata 2 dan 3 (S2 & S3) Master and Doctoral (S2 & S3)	18	19	37	1,71%	16	19	35	1,54	↑
Jumlah Total	**1.426**	**744**	**2.170**	**100,00**	**1.520**	**754**	**2.274**	**100,00**	↓



Tabel Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan
Table of Employee Composition by Employment Status

(orang)
(people)

Status Ketenagakerjaan Employment Status	2025				2024				
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	
Kontrak Contract	68	36	104	4,79%	4	2	6	0,26	↑
Tetap Permanent	1.296	677	1.973	90,92%	1.457	728	2.185	96,09	↓
Percobaan Probation	62	31	93	4,29%	59	24	83	3,65	↑
Jumlah Total	**1.426**	**744**	**2.170**	**100,00%**	**1.520**	**754**	**2.274**	**100,00**	↓

Tabel Karyawan Berdasarkan Unit Kerja
Table of Employee Composition by Work Unit

(orang)
(people)

Direktorat Directorate	2025	2024	
Finance	64	63	↑
Human Capital	134	128	↑
Marketing	545	617	↓
Non	347	351	↓
Operations	520	549	↓
Risk Management	172	566	↓
Vice President	388	0	↑
Jumlah Total	**2.170**	**2.274**	↓

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan total 332 Program, 603 *Batch* pelatihan yang menjangkau 68.581 peserta. Tabel berikut menyajikan data pelatihan secara terperinci.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROGRAMS

Throughout 2025, the Company conducted a total of 332 Programs, 603 Training Batches that reached 68,581 participants. The following table presents its detailed training data.

No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	Total Peserta Total Participants
Total Keseluruhan Grand Total		**603**	**68.581**
Behavioral Competency Training Program			
1	*Analytical Thinking*	4	81
2	*Basic Communication Skill*	6	106
3	*Basic Negotiation Skill*	6	97
4	*Becoming A Star Employee*	6	124
5	BEI *for Managerial*	3	67

No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	Total Peserta Total Participants
6	*Career Motivation*	2	43
7	*Creative & Design Thinking*	4	77
8	*Critical Thinking*	2	32
9	*Effective Habit for Effective People*	4	75
10	*Effective Presentation Skill*	4	83
11	*English Course*	2	16
12	Etos Kerja – Banten Work Ethic – Banten	4	124
13	Etos Kerja - Kantor Pusat Work Ethic – Head Office	4	81
14	Etos Kerja - Jabar Work Ethic – West Java	4	114
15	Etos Kerja - Jabodebek Work Ethic – Jabodebek	4	114
16	Etos Kerja - Jateng Selatan Work Ethic – Southern Central Java	4	100
17	Etos Kerja - Jateng Utara Work Ethic – Northern Central Java	4	125
18	Etos Kerja - Jatim Work Ethic – East Java	4	97
19	Etos Kerja - Kalimantan Work Ethic – Kalimantan	4	121
20	Etos Kerja - Sulawesi Work Ethic – Sulawesi	4	118
21	Etos Kerja - Sumbagsel Work Ethic – Southern Sumatera	4	111
22	Etos Kerja - Sumbagut Work Ethic – Northern Sumatera	4	117
23	*Growth Mindset*	4	83
24	*Happier Work Mindset*	2	43
25	*Intermediate Communication Skill*	4	64
26	*Intermediate Negotiation Skills*	4	67
27	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	1	3
28	*Orientasi New Branch Head* Eksternal	1	11
29	*Personal Branding*	2	41
30	*Problem Solving & Decision Making*	4	78
31	*Time Management*	4	78
32	WBP - *Self Leading*	4	58
33	WLM - *Impactful Leadership for Marketing and Credit Analysis Excellence* 2025	7	178
34	WSP - *Fundamental Leadership*	4	80
35	WSP - *Maximizing Leadership*	4	85
36	WSP - PICA & PDCA	4	81
Functional Training Program			
1	CX *Webinar* Membaca Loyalitas Konsumen CX Webinar on Interpreting Customer Loyalty	1	21
2	CX *Webinar* Strategi Pelayanan *Collection & Remedial* CX Webinar on Service Strategies for Collection & Remedial	1	42

No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	**Total Peserta** Total Participants
3	Dasar dan Panduan *Survey Marketing* - Sulawesi Basic Guidelines for Marketing Surveys – Sulawesi	1	21
4	FIC Dokumen Legalitas Kerjasama Dealer FIC on Dealer Cooperation Legal Documentation	3	198
5	*Institute Core*	1	541
6	IT *Awareness*	4	2.488
7	MotorKu *Acceleration Program - Expert*	1	1
8	MSJ - *Elementary* 2025	3	610
9	MSJ - *Intermediate* 2025	2	55
10	OOTD *Basic* Basic OOTD	8	178
11	OOTD Lanjutan Advanced OOTD	2	8
12	Pembekalan Regional *Telemarketing Manager* Regional Telemarketing Manager Briefing	1	1
13	PICA *for Branch Head*	1	8
14	PICA *for Operation*	5	247
15	*Refreshment Entry Point - Awareness Building*	2	188
16	*Refreshment Entry Point - Refreshment Point Marketing Head*	6	508
17	*Risk for Marketing Staff* - Jateng Selatan Risk for Marketing Staff – Southern Central Java	3	55
18	Sertifikasi *Credit Analyst* Credit Analyst Certification	9	18
19	*Service Leadership*	1	45
20	*Sharing Session Anti Fraud* (*Phase* 1)	5	237
21	TFT - *Centro Phase* 3	1	20
22	TFT *Credit Proposal* Regional - Banten TFT Regional Credit Proposal – Banten	2	12
23	TFT *Credit Proposal* Regional - Jabodebek TFT Regional Credit Proposal – Jabodebek	1	12
24	TFT *Credit Proposal* Regional - Jateng Selatan TFT Regional Credit Proposal – Southern Central Java	1	7
25	TFT *Credit Proposal* Regional - Jateng Utara TFT Regional Credit Proposal – Northern Central Java	2	7
26	TFT *Credit Proposal* Regional - Jatim BNT TFT Regional Credit Proposal – East Java BNT	1	12
27	TFT *Credit Proposal* Regional - Jawa Barat TFT Regional Credit Proposal – West Java	2	10
28	TFT Credit Proposal Regional - Kalimantan	1	5
29	TFT *Credit Proposal* Regional - Sumbagsel TFT Regional Credit Proposal – Southern Sumatera	1	9
30	TFT *Credit Proposal* Regional - Sumbagut TFT Regional Credit Proposal – Northern Sumatera	1	9
31	*Training - Centro Phase* 3 Centro Phase 3 Training	1	917
32	*Training - Centro Phase* 3 *Onsite* Palembang Centro Phase 3 Onsite Training in Palembang	1	12
33	*Training - Centro Phase* 3 *Onsite* Yogyakarta Centro Phase 3 Onsite Training in Yogyakarta	1	12

No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	**Total Peserta** Total Participants
34	*Training* - Penanganan Aplikasi *Agency* Training - Agency Application Handling	2	88
35	*Training* AI *for Reporting*	1	25
36	*Training* CORE - Sumbagut Training CORE - Northern Sumatera	1	25
37	*Training Credit All Marketing Head* - Jabodebek	2	47
38	*Training Credit for Marketing Head* - Sumbagsel	2	41
39	*Training* CX *for Frontliner*	1	61
40	*Training* ESG *Risk*	1	22
41	*Training* Insentif Motorku Motorku Incentive Training	3	36
42	*Training* Internal Audit Internal Audit Training	1	26
43	*Training Interview Skill Telecenter*	1	19
44	*Training* K3	2	41
45	*Training* Kompetensi Managerial - Banten Managerial Competency Training – Banten	1	15
46	*Training* Motorku *Knowledge for Centro*	2	67
47	*Training* New *Function Head* - Jateng Selatan	2	18
48	*Training* Pembiayaan Syariah IMBT Sharia Financing IMBT Training	2	180
49	*Training Pre Approval* - BU Jatim	1	39
50	*Training Preparing Credit Proposal* - Senior Manager Preparing Credit Proposal Training – Senior Manager	1	33
51	*Training* Proses Asuransi Insurance Process Training	3	177
52	*Training Risk Rating* Risk Rating Training	3	142
53	Webinar APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT, and CPF Webinar	1	349
54	*Workshop* CX *for Branch Head* & Kapos *Head* CX Workshop for Branch Head & Kapos Head	1	40
55	*Workshop* Hajiku - CORE Hajiku Workshop – CORE	1	57
56	*Workshop* Hajiku - *Credit* Hajiku Workshop – Credit	1	13
57	*Workshop* Hajiku - *Marketing* Hajiku Workshop – Marketing	1	21
58	*Workshop* Hajiku - *Operation* Hajiku Workshop – Operation	1	48
59	*Workshop* Hajiku - TFT Hajiku Workshop – TFT	1	23
Development Program			
1	*Key Position Development Program*	9	289
2	*Management Trainee*	5	81
3	WOM *Leadership for Senior Manager*	1	9



No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	**Total Peserta** Total Participants
4	WOM *Managerial Program*	4	56
5	WOM *Senior Managerial Program*	2	4
6	WOM *Supervisory Certification Program*	2	56
Learning Non Training			
1	*COOL SERIES* 19 : *Mindfulness* COOL SERIES 19: Mindfulness	1	5.752
2	*COOL SERIES* 20 : *Sustainability* 101 COOL SERIES 20: Sustainability 101	1	5.727
3	*COOL SERIES* 21 : *Report* Pembiayaan di Perseroan COOL SERIES 21: Financing Report at the Company's	1	6.191
4	*COOL SERIES* 22 : Pelindungan Konsumen & Masyarakat COOL SERIES 22: Consumer & Public Protection	1	6.237
5	*COOL SERIES* 23 : APU PPT & PPPSPM COOL SERIES 23: APU PPT & PPPSPM	1	5.576
6	FIC - *Sustainability* & ESG *for Rising Manager* FIC – Sustainability & ESG for Rising Managers	3	277
7	FIC Peraturan Perusahaan FIC – Company Regulations	3	613
8	FIC Sosialisasi *Launch* Koperasi Karyawan FIC – Socialization of the Launch of Employee Cooperative	3	653
9	HCSA	8	799
10	ILP - *Creative & Design Thinking Skill*	1	21
11	ILP - *Effective Habit for Effective People Part* 1	1	24
12	ILP - *Effective Habit for Effective People Part* 2	1	30
13	ILP - *Effective Habit for Effective People Part* 3	1	16
14	ILP - *Effective Habit for Effective People Part* 4	1	1
15	ILP - *Essential Communication Skills*	1	16
16	ILP - *Growth Mindset*	1	24
17	ILP - *Level Up Your Leadership*	1	20
18	ILP - *Time Management*	1	26
19	ILP - *Unlock Your Analytical Thinking*	1	16
20	*Inspirational Forum* - Mengatasi *Mental Block* Inspirational Forum - Overcoming Mental Blocks	1	265
21	*Inspirational Forum - Financial Wellbeing* Inspirational Forum - Financial Wellbeing	1	196
22	*Inspirational Forum* "*Women As A Leader*" Inspirational Forum "Women as a Leader"	1	48
23	Kuis Korespondensi Correspondence Quiz	11	2.581
24	*Story From Leaders* - Banten Story From Leaders – Banten	1	43
25	*Story From Leaders - Branch* Region Banten Story From Leaders – Branch in Banten Region	1	41
26	*Story From Leaders - Branch* Region Jabodebek Story From Leaders – Branch in Jabodebek Region	1	20
27	*Story From Leaders - Branch* Region Jateng Selatan Story From Leaders – Branch in Southern Central Java Region	1	21
28	*Story From Leaders - Branch* Region Jateng Utara Story From Leaders – Branch in Northern Central Java Region	1	18
29	*Story From Leaders - Branch* Region Jatim Bali Story From Leaders – Branch in East Java and Bali Region	1	30

No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	**Total Peserta** Total Participants
30	*Story From Leaders - Branch* Region Jawa Barat Story From Leaders – Branch in West Java Region	1	19
31	Story From Leaders - Branch Region Kalimantan	1	38
32	Story From Leaders - Branch Region Sulawesi	1	64
33	*Story From Leaders - Branch* Region Sumbagsel Story From Leaders – Branch in Southern Sumatera Region	1	18
34	*Story From Leaders - Branch* Region Sumbagut Story From Leaders – Branch in Northern Sumatera Region	1	40
35	*Story From Leaders* - Jabodebek Story From Leaders – Greater Jakarta Area	1	55
36	*Story From Leaders* - Jateng Selatan Story From Leaders – Southern Central Java	1	46
37	*Story From Leaders* - Jateng Utara Story From Leaders – Northern Central Java	1	40
38	*Story From Leaders* - Jatim Bali Story From Leaders – East Java and Bali	1	42
39	*Story From Leaders* - Jawa Barat Story From Leaders – West Java	1	72
40	*Story From* Leaders - Kalimantan	1	26
41	*Story From* Leaders - Sulawesi	1	33
42	*Story From Leaders* - Sumbagsel Story From Leaders – Southern Sumatera	1	45
43	*Story From Leaders* - Sumbagut Story From Leaders – Northern Sumatera	1	52
44	*Tiger Camp* 2025 - *Department Head*	1	86
45	*Tiger Camp* 2025 - *Head Office*	6	445
46	*Tiger Camp* 2025 - Region Sumbagsel Tiger Camp 2025 - Southern Sumatera Region	1	53
47	*Tiger Camp* 2025 - Regional Banten Tiger Camp 2025 - Banten Region	1	51
48	*Tiger Camp* 2025 - Regional Jabodebek Tiger Camp 2025 - Greater Jakarta Region	1	53
49	*Tiger Camp* 2025 - Regional Jateng Selatan Tiger Camp 2025 - South Central Java Region	1	169
50	*Tiger Camp* 2025 - Regional Jateng Utara Tiger Camp 2025 - North Central Java Region	1	30
51	*Tiger Camp* 2025 - Regional Jatim BNT Tiger Camp 2025 - East Java Regional BNT	1	94
52	*Tiger Camp* 2025 - Regional Jawa Barat Tiger Camp 2025 - West Java Region	1	42
53	*Tiger Camp* 2025 - Regional Kalimantan Tiger Camp 2025 - Kalimantan Region	1	25
54	*Tiger Camp* 2025 - Regional Sulawesi Tiger Camp 2025 - Sulawesi Region	1	39
55	*Tiger Camp* 2025 - Regional Sumbagut Tiger Camp 2025 - North Sumatra Region	1	90
56	*Tiger Camp* 2025 - *Telecenter*	1	285
57	*Webinar* Tecorner - *Emotional Intelligence* Webinar Tecorner - Emotional Intelligence	1	135
58	*Webinar* Tecorner - *Employee Self Promoting* Tecorner Webinar – Employee Self-Promoting	1	85
59	*Webinar* Tecorner - Gen-Z*: Ideal Habit in Work Culture* Tecorner Webinar – Gen-Z: Ideal Habits in Work Culture	1	68
60	*Webinar* Tecorner - *Self Compassion* untuk Meningkatkan Karir Tecorner Webinar – Self-Compassion to Improve Career Advancement	1	121



No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	**Total Peserta** Total Participants
61	*Webinar* Tecorner - *Working in Over Generation for* Gen Z Tecorner Webinar – Working Across Generations for Gen Z	1	35
Sertifikasi APPI (LSPPI) APPI Certification (LSPPI)			
1	Seminar Nasional "Arah Kebijakan OJK Tahun 202S dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru" National Seminar: "OJK Policy Direction for 2025 and Economic Growth Strategy of the New Government"	1	3
2	Seminar Nasional "*Economic Outlook* 2026" National Seminar "Economic Outlook 2026"	1	6
3	Seminar Nasional "*Will Trade War Create Financial Turmoil*?" National Seminar: "Will Trade War Create Financial Turmoil?"	1	5
4	Seminar Nasional *Resilience and Turnaround*: Indonesia's Economic Direction 2026 National Seminar on Resilience and Turnaround: Indonesia's Economic Direction 2026	1	1
5	Sertifikasi *Managerial* Managerial Certification	9	278
6	Sertifikasi Penagihan Collection Certification	11	244
Public Training			
1	5 Langkah Rekrut *Manager* & Karyawan Five Steps to Recruit Managers & Employees	1	2
2	*Assessment Center Assessor Certification*	1	1
3	*Assessment Center Assessor Certification* (ACAC)	1	1
4	Belajar *Flutter Clean Architecture: Travel App Developer* Learning Flutter Clean Architecture: Travel App Developer	1	2
5	*Bootcamp Data Analyst Python* 2025 (+ *Portfolio Projects*)	1	1
6	*Branch Manager Master Class*	1	1
7	*Certified Anti Fraud Manager* (CAFM)	1	1
8	*Certified Anti Fraud Officer* (CAFO)	1	2
9	*Certified* Chat GPT *Prompt Specialist* (CCPS)	1	2
10	*Certified Digital Marketing Specialist* (CDMS)	1	1
11	*Certified in Risk and Information Systems Control* (CRISC)	1	1
12	*Certified Strategic Execution Professional* (CSEP)	1	2
13	*Certified Training Designer and Delivery Professional*	1	1
14	*Chartered Accountant (Level Professional)*	1	1
15	Cisco CCNA	1	1
16	*Coaching for Empowering Multigenerational Teams*	1	5
17	COBIT 2019	3	3
18	*Company Culture Bootcamp #4*	1	1
19	*Creative Selling Technique*	1	1
20	*Customer Service Masterclass*	1	1
21	*Data Engineering Essentials using* SQL, Python, *and* PySpark	1	1
22	*Designing Omni Marketing Communication Plan*	1	2
23	*Effective Handling of Disciplinary Actions and Termination*	1	1
24	*Effective Leadership*	1	1
25	*Empowering People through Coaching, Counseling*	1	1
26	*Excel complete* (*Basic + Intermediate + Advance*)	1	1

No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	Total Peserta Total Participants
27	*Full-Stack Laravel Flutter: Build E-Wallet Mobile Apps*	1	1
28	*Generate Your Exponential Business Growth*	1	1
29	*Greenhouse Gas* (GHG) *Calculation, Mitigation, Audit and Reporting Training*	1	1
30	*Hello Point Workshop* L1	1	1
31	*How to be Professional in CSR & ESG Initiative*	1	1
32	Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial Labor Law & Industrial Relations	1	1
33	Hukum Perkreditan Credit Law	1	1
34	Humble Leaders	1	2
35	*Intermediate* Excel	1	1
36	ISO/IEC 27001:2022 & ISO/IEC 27001:2022 *Requirements Training Course*	1	1
37	ISO/IEC 27001:2022 *Internal Auditor Training Course*	1	1
38	IT *Risk Management* & *Digitalization*	1	2
39	ITIL 4 *Foundation*	1	2
40	*Job Evaluation, Grading and Total Rewards*	1	1
41	K3 Umum – Kemenaker General OHS – Ministry of Manpower	1	1
42	Kelas *Online* Laravel 11, Inertia dan *React* (*Full Stack Developer*) Online Class on Laravel 11, Inertia, and React (Full Stack Developer)	1	1
43	Laravel 11, Vue 3 & Inertia (2024): *Full-Stack Web Developer*	1	1
44	*Legislative Drafting Training* (*Basic Level*)	1	1
45	Literasi Keuangan Syariah Islamic Financial Literacy	1	1
46	*Machine Learning* A-Z: AI, Python & R + ChatGPT Prize [2024]	1	1
47	Mini MBA *Batch* 13	1	2
48	MOC 55344A: *Identity with Windows Server*	1	1
49	*My Career Compass Workshop*	1	1
50	Pelatihan Audit Teknologi Informasi Berbasis Standar CIISA/CISA Information Technology Audit Training Based on CIISA/CISA Standards	1	1
51	Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak (*Certified Contract Drafter*) Contract Drafting Training and Certification (Certified Contract Drafter)	1	1
52	Pendidikan Khusus Profesi Advokat Special Education for the Advocate Profession	1	1
53	Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Implementation of the AML CFT and CPF Program	1	1
54	Perhitungan PPh Pasal 21 Calculation of Income Tax Article 21	1	1
55	Program Sertifikasi BNSP: Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) BNSP Certification Program: Human Resources (HR) Manager	1	1
56	Program Sertifikasi BNSP: Staf Sumber Daya Manusia (SDM) BNSP Certification Program: Human Resources (HR) Staff	1	3
57	Program Sertifikasi BNSP : Supervisor Sumber Daya Manusia (SDM) BNSP Certification Program: Human Resources (HR) Supervisor	1	1
58	*Project Management Mastery*	1	1
59	*Road To Sustainability Professional* & GRI *Certified*	1	1
60	Sertifikasi Personal *Data Protection Officer* Personal Data Protection Officer Certification	1	1



No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	**Total Peserta** Total Participants
61	Standar Profesi Sekretaris Perusahaan Professional Standards for Corporate Secretaries	1	1
62	*Strategic Corporate Culture and Change Management*	1	1
63	*Strategic Thinking & Leadership Enhancement*	1	2
64	*Sustainability Reporting*: *Standards Implementation* + *Update* Terkini ISSB *Standards*: IFRS S1 & S2 Sustainability Reporting: Standards Implementation + Latest Updates on ISSB Standards: IFRS S1 & S2	1	1
65	*Training Credit Scoring*	1	2
66	Ujian Sertifikasi Nasional *Risk Management Professional* National Risk Management Professional Certification Exam	1	1
67	*Web Security* untuk *Penetration Tester* dan *Bug Bounty Hunter* Web Security for Penetration Testers and Bug Bounty Hunters	1	3
68	*Workshop Mental Health First Aider*	1	3
WOM *on Boarding*			
1	WOM *on Boarding*	12	4.748
Employee Engagement			
1	ZTalks Episode 3	1	20
2	ZTalks Episode 4	1	74
3	Natal Regional 2024 : BU Jatim Bali 2024 Regional Christmas: East Java Bali Business Unit	1	68
4	Natal HO & Nasional 2024 2024 HO & National Christmas	1	114
5	*Online Tiger Program*	12	70
6	*Appreciation Program*	5	9
7	*Sport Engagement Badminton*	7	145
8	*Sport Engagement Mini Soccer*	8	240
9	*Sport Engagement Tennis*	7	58
10	*Sport Engagement Yoga*	2	30
11	*Independence Day Telecenter*	1	100
12	*Daily Race Spin Telecenter*	4	400
13	*Townhall Telemarketing*	2	200
14	Program HUT WOM Finance 43 : *ZTalks Eps* 2 WOM Finance 43rd Anniversary Program: ZTalks Episode 2	1	266
15	Program HUT WOM Finance 43 : Mobile Legends *Tournament* WOM Finance 43rd Anniversary Program : Mobile Legends Tournament	1	65
16	Program HUT WOM Finance 43 : TIGER *Cup Badminton Head Office* PWOM Finance 43rd Anniversary Program : TIGER Cup Badminton Head Office	1	56
17	Program HUT WOM Finance 43 : *Main Event* WOM Finance 43rd Anniversary Program : Main Event	1	1.457
18	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Jateng Selatan 43rd Anniversary of WOM Finance Regional: South Central Java Business Unit	1	145
19	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Sumbagsel 43rd Anniversary of WOM Finance Regional: South Sumatera Business Unit	1	108
20	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Jatim Bali 43rd Anniversary of WOM Finance Regional: East Java and Bali Business Unit	1	187
21	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Jawa Barat 43rd Anniversary of WOM Finance Regional: West Java Business Unit	1	13
22	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Sumbagut 43rd Anniversary of WOM Finance Regional: Northern Sumatera Business Unit	1	141
23	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Sulawesi WOM Finance 43rd Anniversary Regional: Sulawesi Business Unit	1	39

No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	Total Peserta Total Participants
24	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Banten 43rd Anniversary of WOM Finance Regional: Banten Business Unit	1	130
25	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Jabodebek 43rd Anniversary of WOM Finance Regional: Greater Jakarta Area Business Unit	1	22
26	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Jateng Utara 43rd Anniversary of WOM Finance Regional: North Central Java Business Unit	1	132
27	HUT WOM Finance 43 Regional : BU Kalimantan WOM Finance 43rd Anniversary Regional: Kalimantan Business Unit	1	22
28	Ramadhan *Head Office* : *Telecenter*	1	250
29	Ramadhan Regional 2025 : BU Kalimantan Ramadhan Regional 2025 : Kalimantan Business Unit	1	40
30	Ramadhan Regional 2025 : BU Sumbagsel Ramadhan Regional 2025 : South Sumatera Business Unit	1	64
31	Ramadhan Regional 2025 : BU Jateng Utara Ramadhan Regional 2025 : North Central Java Business Unit	1	38
32	Ramadhan Regional 2025 : BU Jateng Selatan Ramadhan Regional 2025 : South Central Java Business Unit	1	90
33	Ramadhan Regional 2025 : BU Sulawesi Ramadhan Regional 2025 : Sulawesi Business Unit	1	18
34	Ramadhan Regional 2025 : BU Jatim BNT Ramadhan Regional 2025 : East Java BNT Business Unit	1	33
35	Ramadhan Regional 2025 : BU Jawa Barat Ramadhan Regional 2025 : West Java Business Unit	1	152
36	Ramadhan Regional 2025 : BU Jabodebek Ramadhan Regional 2025 : Greater Jakarta Area Business Unit	1	96
37	Ramadhan Regional 2025 : BU Sumbagut Ramadhan Regional 2025 : Northern Sumatera Business Unit	1	322
38	Ramadhan Regional 2025 : BU Banten Ramadhan Regional 2025 : Banten Business Unit	1	192
39	*Engagement Event*: *New Year Party Head Office* 2025	1	725
40	*Engagement Event*: *Valentine's Day*	1	594
41	*Engagement Event*: Ramadhan *Head Office* & Nasional	1	400
42	*Engagement Event*: Hari Kartini Engagement Event: Kartini Day	1	71
43	*Engagement Event*: Hari Kartini Inspirational Forum Engagement Event: Kartini Day Inspirational Forum	1	23
44	*Engagement Event*: Hari Pendidikan 2025 Engagement Event: Education Day 2025	1	367
45	*Engagement Event*: Hari Lingkungan Hidup Engagement Event: Environment Day	1	44
46	*Engagement Event*: *Family Month*	1	237
47	*Engagement Event*: *Independence Day*	1	407
48	*Engagement Event*: Hari Batik Nasional Engagement Event: National Batik Day	1	57
49	*Engagement Event*: Hari Olahraga Nasional Engagement Event: National Sports Day	1	217
50	*Engagement Event*: Hari Kesehatan Mental Engagement Event: Mental Health Day	1	200
51	*Engagement Event*: Hari Pahlawan Nasional Engagement Event: National Heroes' Day	1	49
52	*Engagement Event*: Christmas *Celebration*	1	96
53	*Engagement Event*: *End-Year Appreciation Program*	1	200
54	*Engagement Head Office October* 2025	1	60
55	*Engagement Head Office* November 2025	1	60
56	*Engagement Head Office December* 2025	1	60



No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	**Total Peserta** Total Participants
57	Natal Regional: Jabodebek Regional Christmas: Greater Jakarta Area	1	20
58	Natal Regional: Jatengsel Regional Christmas: Jatengsel	1	25
59	Natal Regional: Sumbagut Regional Christmas: Northern Sumatera	1	118
60	Natal Regional: Jatim BNT Regional Christmas: East Java BNT	1	57
61	Natal Regional: Sulawesi Regional Christmas: Sulawesi	1	20
62	Natal Regional: Banten Regional Christmas: Banten	1	25
63	Natal Regional: Jatara Regional Christmas: Jatara	1	24
64	Natal Regional: Kalimantan Regional Christmas: Kalimantan	1	15
65	*Welcoming New Employee* HO 2025	1	59
66	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Jawa Barat TIGER CUP Regional Badminton Tournament : West Java Business Unit	1	64
67	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Jateng Selatan TIGER CUP Regional Badminton Tournament : Central Java Business Unit	1	36
68	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Sumbagut TIGER CUP Regional Badminton Tournament : Northern Sumatera Business Unit	1	122
69	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Sulawesi TIGER CUP Regional Badminton Tournament : Sulawesi Business Unit	1	44
70	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Sumbagsel TIGER CUP Regional Badminton Tournament : South Sumatera Business Unit	1	56
71	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Jateng Utara TIGER CUP Regional Badminton Tournament : North Central Java Business Unit	1	80
72	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Kalimantan TIGER CUP Regional Badminton Tournament : Kalimantan Business Unit	1	28
73	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Jabodebek TIGER CUP Regional Badminton Tournament : Greater Jakarta Area Business Unit	1	86
74	TIGER CUP *Badminton Regional* : BU Banten TIGER CUP Regional Badminton Tournament : Banten Business Unit	1	34
75	TIGER CUP Badminton Regional : BU Jatim TIGER CUP Regional Badminton Tournament : East Java Business Unit	1	56
76	TIGER Program 2025 : TIGER *in Me Batch* 5 2025	1	16
77	TIGER Program 2025 : TIGER *Executive Zone Batch* 6 2025	1	20
78	TIGER Program 2025 : TIGER *Executive Zone Batch* 7 2025	1	40
79	WOM *Counseling Program*	1	73
80	*Engagement Regional* Jabodebek Engagement Regional Greater Jakarta Area	1	100
81	*Engagement Regional* Jabar Engagement Regional West Java	1	100
82	*Engagement Regional* Jatengsel	1	100
83	*Engagement Regional* Jatim BNT Engagement Regional East Java BNT	1	100
84	*Engagement Regional* Sumbagsel Engagement Regional South Sumatera	1	100
85	*Engagement Regional* Sulawesi	1	100
86	*Engagement Regional* Kalimantan	1	100
87	Bantuan Sembako Sumatra Utara Basic Food Assistance for North Sumatera	1	27

No	Klasifikasi Classification	Total	
		Realisasi *Batch* Batch Realization	Total Peserta Total Participants
Pendidikan & Pengembangan **Education & Development**			
1	Pendidikan Karyawan (D3 & S1) dan Anak Karyawan (SD, SMP & SMA) Employee Education (Diploma III & Bachelor's Degree) and Employee Children's Education (Elementary, Junior High & Senior High School)	1	23
2	Pendidikan S1 Universitas Terbuka Bachelor's Degree Program at Universitas Terbuka (Open University)	1	7
3	Pendidikan S2 Ukrida Master's Degree Program at Ukrida	1	22
4	Pendidikan S2 Binus Master's Degree Program at Binus	1	3
5	*Assessment Center on Site*	1	110
6	*Psychotest Online* (*Talentlytica*)	1	706
7	*Psychotest Online* (*Extended Form*)	1	1.600
8	*Talent League Award*	1	2

BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2025, Perseroan mengeluarkan biaya sebesar Rp10,56 miliar untuk pelatihan dan pendidikan karyawan.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT COSTS

In 2025, the Company incurred a total of Rp10.56 billion for employee training and education.

Struktur dan Komposisi **Pemegang Saham**

Structure and Composition of Shareholders

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49	**2.349.646.729**	**234.964.672.900**	**67,49**
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01	**870.600.000**	**87.060.000.000**	**25,01**
Masyarakat Public	261.234.751	26.123.475.100	7,50	**261.234.751**	**26.123.475.100**	**7,50**



KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

COMPOSITION OF THE 20 MAJOR SHAREHOLDERS

Tabel 20 (dua puluh) Pemegang Saham Terbesar Perseroan

Table of the 20 (twenty) Major Shareholders of the Company

No	1 Januari 2025 January 1, 2025				31 Desember 2025 December 31, 2025			
	Deskripsi Description	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Nilai Nominal** Nominal Value (Rp)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage (%)	**Deskripsi** Description	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Nilai Nominal** Nominal Value (Rp)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage (%)
1	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	234.964.672.900	67,49
2	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	87.060.000.000	25,01
3	UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account - 2091144090	55.000.000	5.500.000.000	1,58	UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account – 2091144090	55.000.000	5.500.000.000	1,58
4	PT MRVL Asia Investama	37.000.000	3.700.000.000	1,06	PT MRVL Asia Investama	37.000.000	3.700.000.000	1,06
5	Teh Cheong Hua	20.798.000	2.079.800.000	0,60	Teh Cheong Hua	20.799.300	2.079.930.000	0,60
6	Hermanto	15.348.100	1.534.810.000	0,44	Hermanto	15.348.100	1.534.810.000	0,44
7	Andy Tanujaya	14.072.200	1.407.220.000	0,40	Andy Tanujaya	14.258.200	1.425.820.000	0,41
8	Rony Attan	9.638.700	963.870.000	0,28	Beatus Indonesia, PT	9.200.000	920.000.000	0,26
9	Lokman Jamil	8.584.400	858.440.000	0,25	Lokman Jamil	8.584.400	858.440.000	0,25
10	Hermanto	8.551.300	855.130.000	0,25	Hermanto	8.551.300	855.130.000	0,25
11	Susanto	6.217.300	621.730.000	0,18	Rony Attan	6.305.800	630.580.000	0,18
12	DBS Bank Ltd S/A Aggregate Value Fund Vcc	4.400.000	440.000.000	0,13	Susanto	5.419.800	541.980.000	0,16
13	GSCO LLC S/A John Locke Capital Emerging Markets Master Fund, Ltd.	3.948.500	394.850.000	0,11	DBS Bank Ltd S/A Aggregate Value Fund VCC	4.400.000	440.000.000	0,13
14	Eddy Lolo	2.500.000	250.000.000	0,07	GSCO LLC S/A John Locke Capital Emerging Markets Master Fund, Ltd.	3.948.500	394.850.000	0,11
15	David Evan Winarta	2.294.800	229.480.000	0,07	Eddy Lolo	2.500.000	250.000.000	0,07
16	Denny Hartono, SH	2.053.600	205.360.000	0,06	David Evan Winarta	2.295.100	229.510.000	0,07
17	Lokman Jamil	1.970.500	197.050.000	0,06	Lokman Jamil	1.970.500	197.050.000	0,06
18	RHB Investment Bank Berhad	1.953.000	195.300.000	0,06	RHB Investment Bank Berhad	1.953.000	195.300.000	0,06
19	Hariono Ibrahim, DR	1.939.900	193.990.000	0,06	Hariono Ibrahim, DR	1.939.900	193.990.000	0,06
20	Hermanto	1.914.800	191.480.000	0,05	Hermanto	1.914.800	191.480.000	0,05


Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank



KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut merupakan rincian kepemilikan saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada tahun 2025:

OWNERSHIP OF COMPANY'S SHARES BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The following presents the details of the Company's direct and indirect share ownership by members of the Board of Commissioners and Board of Directors serving in 2025:

Tabel Kepemilikan Saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Table of the Ownership of Company's Shares by the Board of Directors and Board of Commissioners

Nama Name	**Jabatan Position**	**1 Januari 2025** January 1, 2025	
		Kepemilikan Langsung Direct Ownership	
		Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage (%)
Komisaris Board of Commissioners			
Sarastri Baskoro	Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Taufik Aulia	Komisaris Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Direksi Board of Director			
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	Nihil / None	Nihil / None
Njauw Vido Onadi	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	Nihil / None	Nihil / None
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Operasional Director of Operations	Nihil / None	Nihil / None
Wibowo	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Nihil / None	Nihil / None
Cincin Lisa Hadi	Direktur Keuangan Director of Finance	Nihil / None	Nihil / None

	31 Desember 2025 December 31, 2025					
	Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership		**Kepemilikan Langsung** Direct Ownership		**Kepemilikan Tidak Langsung** Indirect Ownership	
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage (%)	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage (%)	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage (%)
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None

KETENTUAN TERKAIT KEWAJIBAN LAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN KEPADA OJK

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan kepada OJK dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
2. Piagam Dewan Komisaris dan/atau Piagam Direksi Perseroan.

PROVISIONS ON THE OBLIGATION TO REPORT CHANGES IN SHARE OWNERSHIP IN THE COMPANY TO OJK

Members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners who own shares with voting rights, either directly or indirectly, are required to submit a report on their voting rights ownership and any changes in the Company's voting rights ownership to OJK, by considering the following requirements:

1. Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2024 on Reports on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on Share Pledging Activities of Public Companies.
2. The Company's Board of Commissioners Charter and/or Board of Directors Charter.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT DENGAN KEPEMILIKAN KURANG DARI 5%

COMPOSITION OF PUBLIC SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5% SHARES

Tabel Pemegang Saham Perseroan yang Dimiliki Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5%
Table of the Company's Shares Held by the Public with Ownership Less Than 5%

Status Pemilik Owner Status	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Bank - Domestik Bank - Domestic	69	6.900	0,00%	69	6.900	0,00%
Broker	22	2.200	0,00%	22	2.200	0,00%
Individual - Domestik Individual - Domestic	131.678.735	13.167.873.500	3,78%	124.389.735	12.438.973.500	3,57%
Perusahaan Terbatas NPWP Limited Liability Company (NPWP)	38.547.600	3.854.760.000	1,11%	45.674.500	4.567.450.000	1,31%
Individual - Luar Negeri Individual - Foreign	89.200	8.920.000	0,00%	121.300	12.130.000	0,00%
Institusi - Luar Negeri Institution - Foreign	90.919.125	9.091.912.500	2,61%	91.049.125	9.104.912.500	2,62%
Jumlah Total	**261.234.751**	**26.123.475.100**	**7,50%**	**261.234.751**	**26.123.475.100**	**7,50%**

KLASIFIKASI PEMEGANG SAHAM

CLASSIFICATION OF SHAREHOLDERS

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2025
Table of Classification of the Company's Shareholders as of December 31, 2025

Kelompok Pemegang Saham Group of Shareholders	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Domestik Domestic			
Individu Individual	1.924	121.761.035	3,50%
Institusi Institution	11	3.268.532.620	93,88%
Jumlah Total	1.935	3.390.293.655	97,38%
Asing Foreign			
Individu Individual	20	157.300	0,00%
Institusi Institution	19	91.030.525	2,61%
Jumlah Total	**39**	**91.187.825**	**2,62%**

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

THE COMPANY'S MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS, BOTH DIRECT AND INDIRECT, UP TO THE ULTIMATE INDIVIDUAL OWNERS

Kepemilikan Saham dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Share Ownership of PT Bank Maybank Indonesia Tbk

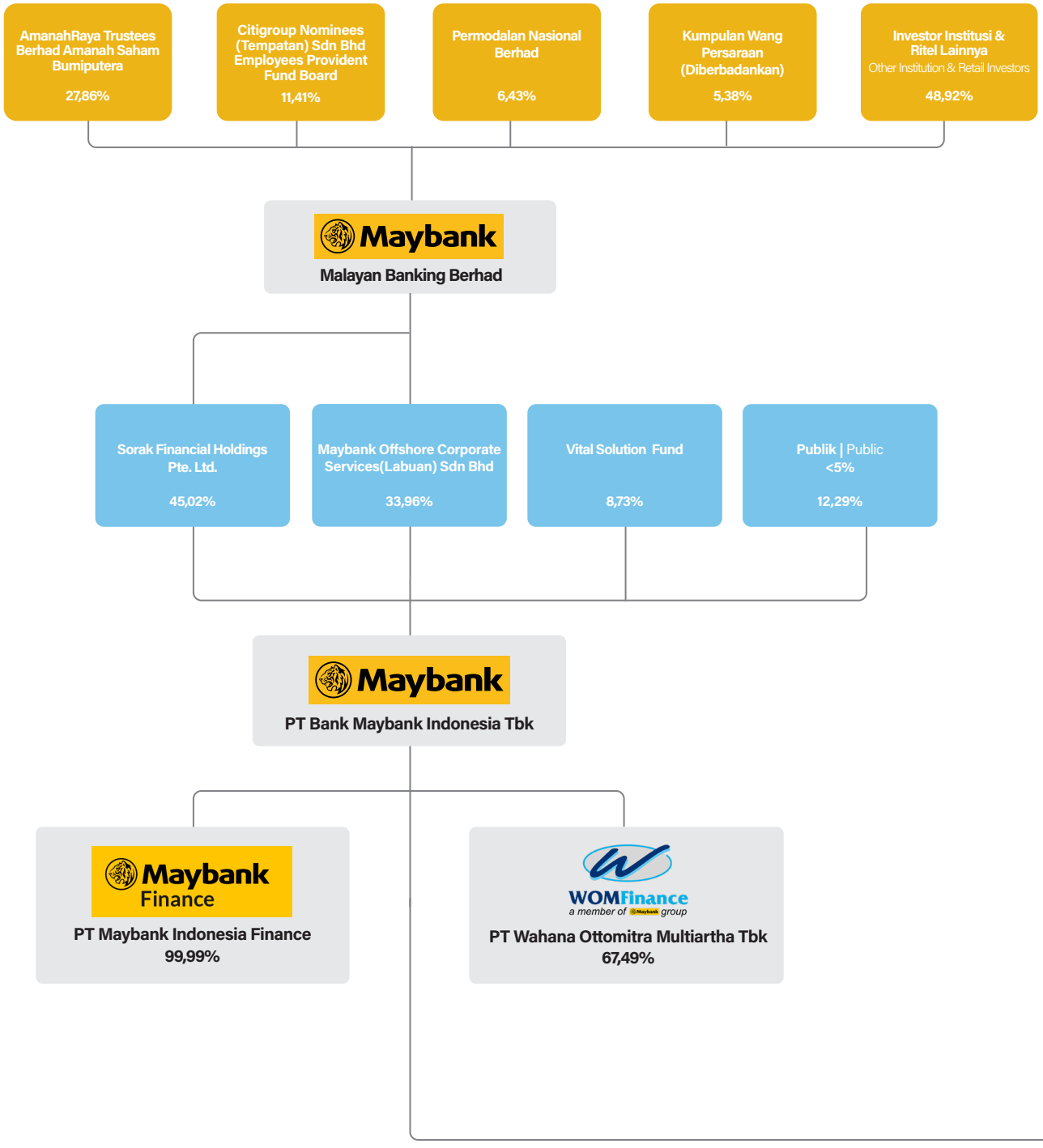

Kepemilikan Saham dari PT Wahana Makmur Sejati (WMS)
Share Ownership of PT Wahana Makmur Sejati (WMS)

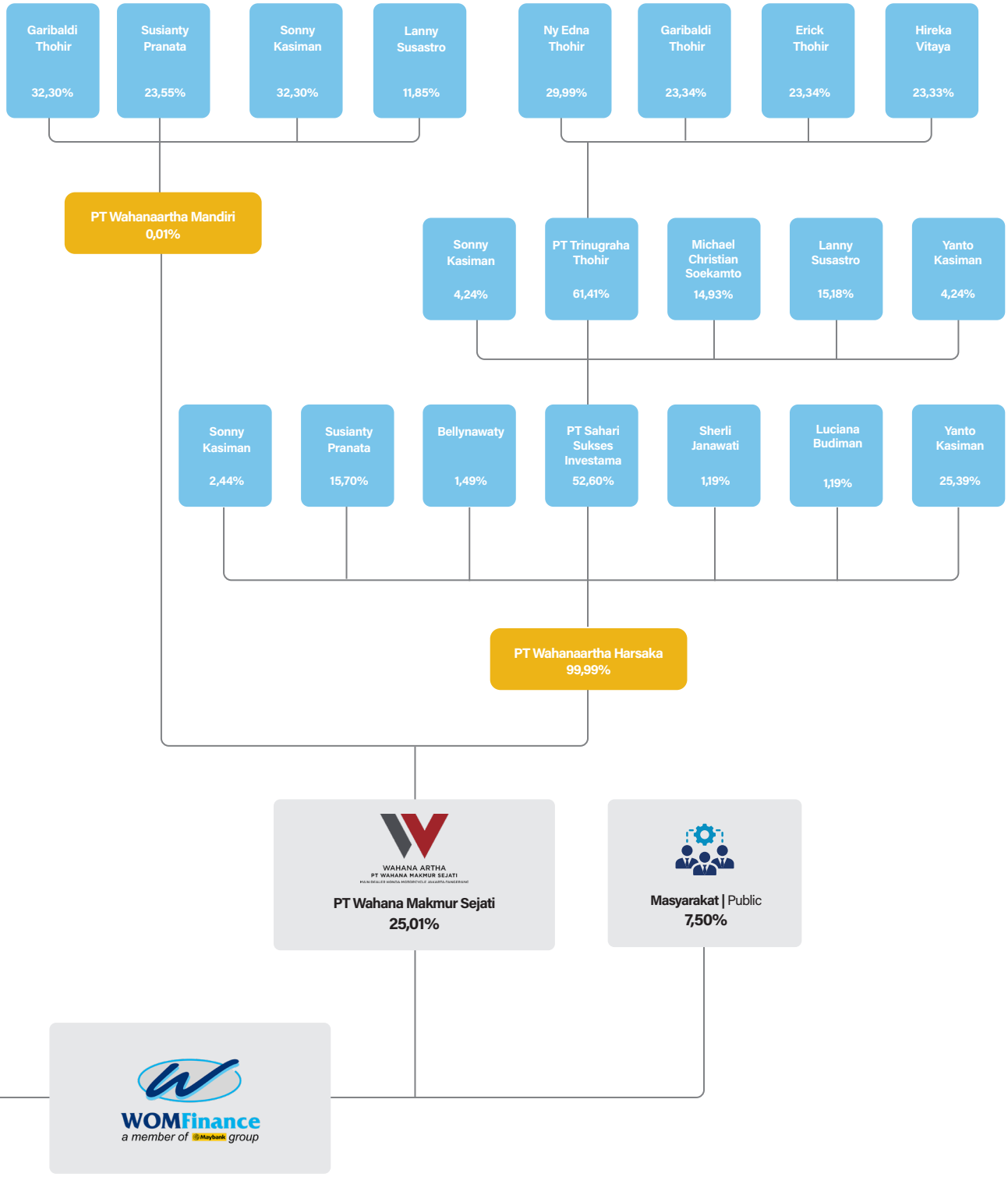

PEMEGANG SAHAM UTAMA

MAJOR SHAREHOLDERS

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Sentral Senayan III
Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno
Jakarta Pusat 10270 Indonesia

www.maybank.co.id

+62 21 2922 8888
+62 21 2922 8914

2.349.646.729 lembar saham atau 67,49%
2,349,646,729 shares or 67.49%



PROFIL PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia atau Bank) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), sebagai salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan *Community Financial Services* (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu Perseroan untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas *digital banking* melalui M2U (*App & Web*), M2E untuk nasabah korporasi, dan berbagai saluran lainnya.

Pada akhir Desember 2025, Maybank Indonesia memiliki 275 cabang, termasuk 20 cabang Syariah yang tersebar di Indonesia dan satu cabang luar negeri (Mumbai, India). Di samping itu, Maybank Indonesia juga memiliki sebanyak 22 KCP Mobile dan 661 ATM (termasuk 26 CRM/*Cash Recycle Machines*) yang terkoneksi melalui jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan jaringan ATM Maybank di Singapura, Malaysia, dan Brunei. Hingga 31 Desember 2025, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp116,2 triliun dan memiliki total aset senilai Rp193,7 triliun.

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK PROFILE

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia or the Bank) is one of the leading private banks in Indonesia and is part of the Malayan Banking Berhad (Maybank) Group, one of the largest financial services groups in ASEAN. Previously, Maybank Indonesia was known as PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), which was founded on May 15, 1959, obtained its license as a foreign exchange bank in 1988, and listed its shares on the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (now merged into the Indonesia Stock Exchange) in 1989.

Maybank Indonesia provides a comprehensive range of products and services for individual and corporate customers through Community Financial Services (Retail Banking and Non-Retail Banking) and Global Banking, as well as automotive financing through its subsidiaries, the Company's for two wheelers and Maybank Finance for four wheelers. Maybank Indonesia also continues to develop digital banking services and capacity through M2U (App and Web), M2E for corporate customers, and various other channels.

As December 2025, Maybank Indonesia has 275 branches, including 20 Sharia branches located across Indonesia and one overseas branch (Mumbai, India). Moreover, Maybank Indonesia also has 22 KCP Mobile and 661 ATMs (including 26 CRM/Cash Recycle Machines) connected through ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS networks, as well as linked to Maybank ATMs in Singapore, Malaysia, and Brunei. As of December 31, 2025, Maybank Indonesia managed customer deposits of Rp116.2 trillion and posted total assets of Rp193.7 trillion.

VISI

Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas.

MISI

Humanising Financial Services

Melalui misi tersebut, dengan keberadaan kami di tengah masyarakat, kami berkomitmen untuk:

- Menyediakan layanan finansial yang simpel, mudah diakses, dan memahami kebutuhan nasabah.
- Menjadi mitra keuangan yang terpercaya untuk masa depan yang berkelanjutan.
- Melayani masyarakat dengan penuh hormat, jujur, adil, serta menjunjung tinggi martabat dan integritas.

VISION

To be the leading financial services provider in Indonesia, driven by passionately committed and innovative people, creating value and serving communities.

MISSION

Humanising Financial Services

Through this mission, with being at the heart of the community, we will:

- Make financial services simple, intuitive, and accessible.
- Build trusted partnerships for a sustainable future together.
- Treat everyone with respect, dignity, fairness, and integrity.

KOMPOSISI MANAJEMEN BANK MAYBANK INDONESIA PER 31 DESEMBER 2025

MANAGEMENT COMPOSITION OF BANK MAYBANK INDONESIA AS OF DECEMBER 31, 2025

Jabatan Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Nama** Name
Presiden Komisaris President Commissioner	Dato' Sri Khairussaleh Ramli
Komisaris Commissioner	Edwin Gerungan
Komisaris Commissioner	Datuk Lim Hong Tat
Komisaris Commissioner	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
Komisaris Independen Independent Commissioner	Hendar
Komisaris Independen Independent Commissioner	Marina R. Tusin
Komisaris Independen Independent Commissioner	Putut Eko Bayuseno
Komisaris Independen Independent Commissioner	Daniel James Rompas
Jabatan Direksi Board of Directors	**Nama** Name
Presiden Direktur President Director	Steffano Ridwan
Direktur Director	Irvandi Ferizal
Direktur Director	Effendi
Direktur Director	Widya Permana
Direktur Director	Ricky Antariksa
Direktur Director	Bambang Andri Irawan
Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Compliance Director	Yessika Effendi
Direktur Unit Usaha Syariah Sharia Business Unit Director	Romy Hardiansyah
Direktur Director	Shaiful Adhli Yazid
Direktur Director	Bianto Surodjo

PT Wahana Makmur Sejati

Gedung Wahanaartha Jl. Gunung Sahari Raya No. 32, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720

www.wahanaartha.com

+62 21 6012070

870.600.000 lembar saham atau 25,01%
870,600,000 shares or 25.01%



PROFIL PT WAHANA MAKMUR SEJATI

PT Wahana Makmur Sejati ("WMS") berawal dari 4 (empat) dealer sepeda motor Honda yang bergabung menjadi PD Union Motor di tahun 1972. PD Union Motor dipercaya oleh PT Astra Honda Motor untuk menjalankan rantai distribusi sepeda motor Honda untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Pada tahun 1983 PD Union Motor melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit usaha menjadi dua perusahaan yang berbeda yaitu PT Pro Union Indo Jaya sebagai dealer sepeda motor dan mobil Honda, dan WMS sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Jakarta dan Tangerang.

Kini WMS memiliki 3 (tiga) unit gudang yaitu di Cimanggis, Jawa Barat berkapasitas 6.500 unit motor; di Jatake, Tangerang berkapasitas 2.500 unit motor; serta gudang ke-3 di Jatiasih, Bekasi dengan kapasitas 7.000 unit motor. Saat ini WMS memiliki jaringan 117 dealer dan 293 bengkel resmi motor Honda di wilayah Jakarta dan Tangerang.

VISI

Wahana Artha Group ("WAG") ingin menjadi grup perusahaan yang terus berkembang, memanfaatkan pasar Indonesia kelas menengah yang tumbuh cepat, dengan menawarkan produk dan layanan kelas dunia, serta dipercaya oleh mitra bisnis dan pemangku kepentingan.

MISI

1. WAG menghormati komitmen dan menepati janji kepada pelanggan.
2. WAG menghargai setiap orang dengan kerendahan hati, kesantunan dan rasa hormat.

PT WAHANA MAKMUR SEJATI PROFILE

PT Wahana Makmur Sejati ("WMS") originated from four Honda motorcycle dealers that joined PD Union Motor in 1972. PD Union Motor has been trusted by PT Astra Honda Motor to manage the Honda motorcycle distribution chain for the Jakarta and Tangerang areas. In 1983, PD Union Motor underwent restructuring, separating its business units into two distinct entities: PT Pro Union Indo Jaya, which operated as a Honda motorcycle and car dealer, and WMS, which became the Main Dealer for Honda motorcycles in the Jakarta and Tangerang regions.

WMS currently has 3 (three) warehouse units, in Cimanggis, West Java with a capacity of 6,500 motorbikes; in Jatake, Tangerang with a capacity of 2,500 motorbikes; and the third warehouse in Jatiasih Bekasi with a capacity of 7,000 motorbikes. Presently, WMS has a network of 117 dealers and 293 authorized Honda motorcycle workshops in Jakarta and Tangerang.

VISION

Wahana Artha Group ("WAG") aspires to be an ever-growing corporate group, leveraging the rapidly expanding Indonesian middle-class market by offering world-class products and services, while earning the trust of its business partners and stakeholders.

MISSION

1. WAG menghormati komitmen dan menepati janji kepada pelanggan.
2. WAG places the utmost priority on trust and strives to achieve shared prosperity with its business partners and stakeholders.

3. WAG menghargai kemampuan dan keterampilan tanpa diskriminasi jenis kelamin, agama, maupun suku.
4. WAG mengutamakan kepercayaan dan berharap untuk sejahtera bersama dengan mitra bisnis dan pemangku kepentingan.
5. WAG rumah bagi Wahanians untuk bekerja, berkembang dan berbahagia.
6. WAG berkomitmen untuk menjalankan praktisi usaha berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

3. WAG values every individual with humility, courtesy, and respect.
4. WAG is a home for Wahanians to work, grow, and find happiness.
5. WAG values capabilities and skills without discrimination based on gender, religion, or ethnicity.
6. WAG commits to implementing sustainable business practices for a better future.

KOMPOSISI MANAJEMEN PT WAHANA MAKMUR SEJATI PER 31 DESEMBER 2025

COMPOSITION OF PT WAHANA MAKMUR SEJATI MANAGEMENT AS OF DECEMBER 31, 2025

Jabatan Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Nama** Name
Komisaris Utama President Commissioner	Garibaldi Thohir
Komisaris Commissioner	Susianty Pranata
Komisaris Commissioner	Sunaga Kasiman
Komisaris Commissioner	Cornelia Patsy Budiman

Jabatan Direksi Board of Directors	**Nama** Name
Direktur Utama President Director	Taufik Aulia
Direktur Director	Edi Setiawan Surja
Direktur Director	Michael Christian S

Daftar Entitas Anak, Asosiasi, dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Hingga penyusunan Laporan Tahunan 2025, Perseroan tercatat tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi.

As of the preparation of the 2025 Annual Report, the Company had no subsidiaries or associates.



Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Setelah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan menerbitkan 200.000.000 saham bernominal Rp100 per lembar dengan harga penawaran Rp700 per saham. Saham tersebut kemudian dicatatkan di BEJ dan BES (kini BEI) pada 13 Desember 2004.

After obtaining an effective statement from Bapepam-LK, the Company conducted its Initial Public Offering (IPO) and issued 200,000,000 shares with a nominal value of Rp100 per share at an offering price of Rp700 per share. These shares were subsequently listed on the BEJ and BES (now IDX) on December 13, 2004.

Tabel Ringkasan Pencatatan Saham Perdana
Table of Initial Share Listing Summary

Bursa Stock Exchange	Bursa Efek Jakarta dan Bursa efek Surabaya Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange
Kode Saham Stock Code	WOMF
Tanggal Pencatatan Saham Listing Date	13 Desember 2004 December 13, 2004
Jumlah Saham Dicatatkan Number of Shares Listed	200.000.000 lembar 200,000,000 shares
Nilai Nominal Nominal Value	Rp100 per saham Rp100 per share
Harga Penawaran Offering Price	Rp700 per saham Rp700 per share
Biro Administrasi Efek Share Registrar	PT Sinartama Gunita Wisma 46 Kota BNI, Lantai 25–28 dan 30–31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Konsultan Hukum Legal Consultant	William, Effendi & Co. Law Office Jl. Blora No. 31, Menteng, Jakarta 10310
Akuntan Publik Public Accountant	Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Wisma 46 Kota BNI, Lantai 25–28 dan 30–31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Periode Period	**Aksi Korporasi** Corporate Actions	**Nominal (Rp/ lembar)** Nominal Value (Rp/ share)	**Harga Penawaran** Offering Price	**Jumlah Saham DIterbitkan** Number of Shares Issued	**Modal Ditempatkan dan Disetor** Issued and Fully Paid-up Capital		
					Jumlah Saham Number of Shares	**Total Nilai Nominal (Rp)** Total Nominal Value (Rp)	**Total Harga Penawaran** Total Offering Price
Sebelum IPO Before the IPO	-	100	-	-	1.800.000.000	180.000.000.000	-
13 Desember 2024 December 13, 2024	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	100	700	200.000.000	2.000.000.000	200.000.000.000	140.000.000.000
23 Februari–2 Maret 2015 February 23–March 2, 2015	Penawaran Umum Terbatas I (HMETD/ PUT I) Limited Public Offering I (HMETD / PUT I)	100	135	1.481.481.480	3.481.481.480	348.148.148.000	199.999.999.800

KRONOLOGI PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM

CHRONOLOGY OF SHAREHOLDER CHANGES

Tanggal/Periode Perubahan Date/Period of Change	**Pemegang Saham ≥5** Shareholders ≥5%	**Jumlah Saham** Number of Shares	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership
4 Mei 2004 May 4, 2004	PT Millenia Prosperindo Optima	630.000.000	35,00
	PT Wahanaartha Harsaka	990.000.000	55,00
	PT Wahanaartha Mekarselaras	180.000.000	10,00
24 Mei 2004 May 24, 2004	Begawan Investment (L) Bhd.	720.000.000	40,00
	Mochamad Thohir	226.746.000	12,60
	Susianty Pranata	165.321.000	9,18
	Yanto Kasiman	226.746.000	12,60
	Dewi Ratnasari Gozali	321.300.000	17,85
29 September 2004 September 29, 2004	Begawan Investment (L) Bhd.	720.000.000	40,00
	Mochamad Thohir	226.746.000	12,60
	Susianty Pranata	165.321.000	9,18
	Yanto Kasiman	226.746.000	12,60
	Dewi Ratnasari Gozali	321.300.000	17,85
	Masyarakat Public	200.000.000	10,00
22 Juli 2005 July 22, 2005	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	860.000.000	43,00
	International Finance Corporation	380.000.000	19,00
	DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	660.000.000	33,00
3 Juli 2006 July 3, 2006	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	939.800.000	46,99
	International Finance Corporation	300.200.000	15,01
	DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	660.000.000	33,00
31 Desember 2007 December 31, 2007	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.600.000	50,03
	International Finance Corporation	239.400.000	11,97
	DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	660.000.000	33,00

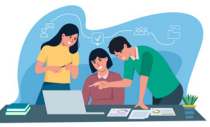

Tanggal/Periode Perubahan Date/Period of Change	**Pemegang Saham ≥5** Shareholders ≥5%	**Jumlah Saham** Number of Shares	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership
31 Desember 2008 December 31, 2008	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.600.000	50,03
	International Finance Corporation	239.400.000	11,97
	DBS Nominess (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	456.080.445	22,80
31 Desember 2009 December 31, 2009	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.600.000	50,03
	International Finance Corporation	239.400.000	11,97
	DBS Nominess (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	660.000.000	33,00
31 Desember 2010 December 31, 2010	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.600.000	50,03
	International Finance Corporation	239.400.000	11,97
	PT Wahana Makmur Sejati	334.802.500	16,74
	DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	325.197.500	16,26
31 Desember 2011 December 31, 2011	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	62,00
	PT Wahana Makmur Sejati	344.891.000	17,24
	DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	315.109.000	15,76
31 Desember 2012 December 31, 2012	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	62,00
	PT Wahana Makmur Sejati	344.891.000	17,24
	DBS Nominess (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	315.109.500	15,76
31 Desember 2013 December 31, 2013	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	62,00
	PT Wahana Makmur Sejati	327.373.500	16,37
	DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	332.626.500	16,63
31 Desember 2014 December 31, 2014	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	62,00
	PT Wahana Makmur Sejati	351.831.026	17,59
	DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	5,00
	Masyarakat Public	308.168.974	15,41
31 Desember 2015 (pasca-HMETD) December 31, 2015 (post-HMETD)	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	68,55
	PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	17,67
	Masyarakat Public	479.834.751	13,78
31 Desember 2016 December 31, 2016	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	68,55
	PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	17,67
	Masyarakat Public	479.834.751	13,78
31 Desember 2017 December 31, 2017	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	68,55
	PT Wahana Makmur Sejati	738.308.900	21,21
	Masyarakat Public	356.525.851	10,24

Tanggal/Periode Perubahan Date/Period of Change	**Pemegang Saham ≥5** Shareholders ≥5%	**Jumlah Saham** Number of Shares	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership
31 Desember 2018 December 31, 2018	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	68,55
	PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	23,94
	Masyarakat Public	261.518.151	7,51
31 Desember 2019 December 31, 2019	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	68,55
	PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	23,94
	Masyarakat Public	261.518.151	7,51
17 Februari 2020 February 17, 2020	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.386.646.729	68,55
	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01
	Masyarakat Public	224.234.751	6,44
24 Maret 2021 March 24, 2021	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	67,49
	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01
	Masyarakat Public	261.234.751	7,50
31 Desember 2022 December 31, 2022	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	67,49
	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01
	Masyarakat Public	261.234.751	7,50
31 Desember 2023 December 31, 2023	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	67,49
	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01
	Masyarakat Public	261.234.751	7,50
31 Desember 2024 December 31, 2024	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	67,49
	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01
	Masyarakat Public	261.234.751	7,50



KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF THE ISSUANCE AND/OR LISTING OF OTHER SECURITIES

Tabel Penerbitan atau Pencatatan Efek Lainnya
Table of the Issuance or Listing of Other Securities

Per 31 Desember 2025
As of December 31, 2025

Nama Name	**Seri** Series	**Bunga (%)** Interest Rate (%)	**Nominal (Rp)** Nominal Value (Rp)
Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Bonds I WOM Finance Year 2003	Seri A Series A	13,50	150.000.000.000
	Seri B Series B	13,75	150.000.000.000
Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Bonds II WOM Finance Year 2005	Seri A Series A	12,75	190.000.000.000
	Seri B Series B	13,25	140.000.000.000
	Seri C Series C	13,90	170.000.000.000
Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Bonds III WOM Finance Year 2006	Seri A Series A	14,85	200.000.000.000
	Seri B Series B	15,15	465.000.000.000
	Seri C Series C	15,35	160.000.000.000
Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Bonds IV WOM Finance Year 2007	Seri A Series A	11,25	225.000.000.000
	Seri B Series B	11,63	185.000.000.000
	Seri C Series C	12,00	590.000.000.000
Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Bonds V WOM Finance Year 2011	Seri A Series A	8,75	294.000.000.000
	Seri B Series B	9,60	120.000.000.000
	Seri C Series C	10,30	366.000.000.000
	Seri D Series D	11,00	620.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 Continuing Bonds I Phase I WOM Finance Year 2014	Seri A Series A	10,25	397.000.000.000
	Seri B Series B	11,00	203.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 Continuing Bonds I Phase II WOM Finance Year 2014	Seri A Series A	10,25	300.000.000.000
	Seri B Series B	11,25	500.000.000.000

	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Maturity	Total (Rp) Total (Rp)	Keterangan Remarks
	A-(idn)	11 November 2006 November 11, 2006	300.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
		11 November 2007 November 11, 2007		
	A-(idn)	7 Juni 2007 June 7, 2007	500.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
		7 Juni 2008 June 7, 2008		
		7 Juni 2009 June 7, 2009		
	A-(idn)	7 Juni 2008 June 7, 2008	825.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
		7 Juni 2009 June 7, 2009		
		7 Juni 2010 June 7, 2010		
	A-(idn)	29 Mei 2010 May 29, 2010	1.000.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
		29 Mei 2011 May 29, 2011		
		29 November 2011 November 29, 2011		
	AA(idn)	9 Maret 2012 March 9, 2012	1.400.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
		4 Maret 2013 March 4, 2013		
		4 Maret 2014 March 4, 2014		
		4 Maret 2015 March 4, 2015		
	AA-(idn)	5 Juli 2015 July 5, 2015	600.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
		25 Juni 2017 June 25, 2017		
	AA-(idn)	15 Desember 2015 December 15, 2015	800.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
		5 Desember 2017 December 5, 2017		

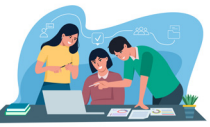

Tabel Penerbitan atau Pencatatan Efek Lainnya
Table of the Issuance or Listing of Other Securities

Per 31 Desember 2025
As of December 31, 2025

Nama Name	**Seri** Series	**Bunga (%)** Interest Rate (%)	**Nominal (Rp)** Nominal Value (Rp)
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 Continuing Bonds I Phase III WOM Finance Year 2015	Seri A Series A	9,25	140.000.000.000
	Seri B Series B	10,25	860.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 Continuing Bonds I Phase IV WOM Finance Year 2015	Seri A Series A	9,35	203.000.000.000
	Seri B Series B	10,80	397.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016	Seri A Series A	8,50	442.000.000.000
	Seri B Series B	9,50	223.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017	Seri A Series A	7,80	400.000.000.000
	Seri B Series B	8,90	320.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 Continuing Bonds II Phase III WOM Finance Year 2017	Seri A Series A	7,15	601.500.000.000
	Seri B Series B	8,45	266.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018 Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance Year 2018	Seri A Series A	6,85	626.000.000.000
	Seri B Series B	7,50	55.000.000.000
	Seri C Series C	8,15	112.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 Continuing Bonds II Phase V WOM Finance Year 2018	Seri A Series A	7,35	293.000.000.000
	Seri B Series B	8,60	67.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 Continuing Bonds III Phase I WOM Finance Year 2018	Seri A Series A	9,25	411.500.000.000
	Seri B Series B	9,75	40.000.000.000
	Seri C Series C	10,00	119.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019 Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019	Seri A Series A	8,50	931.500.000.000
	Seri B Series B	9,15	125.500.000.000
	Seri C Series C	9,85	618.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020 Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020	Seri A Series A	8,50	227.500.000.000
	Seri B Series B	9,60	32.800.000.000

	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Maturity	Total (Rp) Total (Rp)	Keterangan Remarks
	AA-(idn)	12 April 2016 April 12, 2016 2 April 2018 April 2, 2018	1.000.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA-(idn)	2 Januari 2017 January 2, 2017 22 Desember 2018 December 22, 2018	600.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA-(idn)	4 Juli 2017 July 4, 2017 24 Juni 2019 June 24, 2019	665.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA-(idn)	1 September 2018 September 1, 2018 22 Agustus 2020 August 22, 2020	720.500.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA-(idn)	16 Desember 2018 December 16, 2018 6 Desember 2020 December 6, 2020	867.500.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA-(idn)	16 April 2019 April 16, 2019 6 April 2020 April 6, 2020 6 April 2021 April 6, 2021	793.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA-(idn)	18 Juni 2019 June 18, 2019 8 Juni 2021 June 8, 2021	360.500.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA-(idn)	30 Desember 2019 December 30, 2019 20 Desember 2020 December 20, 2020 20 Desember 2021 December 20, 2021	570.500.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA(idn)	9 Juni 2020 June 9, 2020 29 Mei 2021 May 29, 2021 29 Mei 2022 May 29, 2022	1.675.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA(idn)	8 Juni 2021 June 8, 2021 28 Mei 2023 May 28, 2023	260.300.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date



Tabel Penerbitan atau Pencatatan Efek Lainnya
Table of the Issuance or Listing of Other Securities

Per 31 Desember 2025
As of December 31, 2025

Nama Name	Seri Series	Bunga (%) Interest Rate (%)	Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020	Seri A Series A	8,00	328.000.000.000
	Seri B Series B	9,15	172.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021	Seri A Series A	5,50	302.000.000.000
	Seri B Series B	7,00	198.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022	Seri A Series A	4,25	335.000.000.000
	Seri B Series B	6,30	465.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023	Seri A Series A	5,95	221.000.000.000
	Seri B Series B	7,00	779.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024	Seri A Series A	6,75	880.445.000.000
	Seri B Series B	6,95	119.555.000.000
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025	Seri A Series A	6,45	595.000.000.000
	Seri B Series B	6,85	905.000.000.000

	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Maturity	Total (Rp) Total (Rp)	Keterangan Remarks
	AA(idn)	20 September 2021 September 20, 2021 10 September 2023 September 10, 2023	500.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA(idn)	8 Agustus 2022 August 8, 2022 28 Juli 2024 July 28, 2024	500.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA(idn)	18 April 2023 April 18, 2023 8 April 2025 April 8, 2025	800.000.000.000	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo Has been fully paid as of the maturity date
	AA+(idn)	21 April 2024 April 21, 2024 11 April 2026 April 11, 2026	1.000.000.000.000	Seri B *Outstanding* Series B are still outstanding
	AAA(idn)	12 Juli 2025 July 12, 2025 2 Juli 2027 July 2, 2027	1.000.000.000.000	Seri B *Outstanding* Series B are still outstanding
	AAA(idn)	4 Juli 2026 July 4, 2026 24 Juni 2028 June 24, 2028	1.500.000.000.000	Masih *Outstanding* Still outstanding

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accounting Firm

Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accounting Firm	Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Yasir
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services Provided	Audit terhadap laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 Audit of the Company's annual financial statements for the financial year ended December 31, 2025
Jasa lainnya Other Services	*Limited Review* 30 Juni 2025 Limited Review as of June 30, 2025
Periode Penugasan Assignment Period	Per laporan keuangan tahunan As stated in the annual financial statements
Biaya Jasa (*fee*) Service Fees	Jasa Audit: Rp787.750.000,- Jasa Non-Audit (*Limited Review*) 30 Juni 2025: Rp208.000.000,- Audit Services: Rp787,750,000,- Non-Audit Services (Limited Review) as of June 30, 2025: Rp208,000,000,-

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Supporting Institutions and/or Professionals

BIRO ADMINISTRASI EFEK — SHARE REGISTRAR

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	PT Sinartama Gunita
Alamat Address	Gedung Menara Tekno Lt 7 Jln. H. Fachrudin No. 19, Kebun Sirih - Tanah Abang Jakarta Pusat
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pemeliharaan Data Saham Perseroan Company Shares Data Administration
Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Pemeliharaan Data Saham untuk Periode Desember 2024 s.d November 2025 Shares Data Administration Fees for the Period of December 2024 to November 2025
Biaya Jasa (*fee*) Service Fees	Rp22.000.000,-

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK — SHARE RATING AGENCY

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Alamat Address	Equity Tower, Lantai 30, Sudirman Central Business District Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services Provided	*Review rating* Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Review of the rating for the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025
Periode Penugasan Assignment Period	Per Penerbitan Obligasi sampai dengan Obligasi Lunas Per Bond Issuance up to Paid Off Bonds
Biaya Jasa (*fee*) Service Fees	*Review rating* Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025: Rp666.000.000,- Review of the rating the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025: Rp666,000,000

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	IRMA & SOLOMON Law Firm
Alamat Address	Sequis Center Lt.9, Jl. Jend. Sudirman 71, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Hukum Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Legal Service for the Plan of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025
Periode Penugasan Assignment Period	Sejak tanggal 15 April 2025 hingga diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 From April 15, 2025, until the effective statement from the Financial Services Authority is obtained for the registration statement of of the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025
Biaya Jasa (*fee*) Service Fees	Rp105.450.000,-

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12910
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Pendaftaran Obligasi dan Agen Pembayaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Bond Registration Services and Payment Agent for the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025
Periode Penugasan Assignment Period	Per Penerbitan Obligasi sampai dengan Obligasi Lunas Per Bond Issuance up to Paid Off Bonds
Biaya Jasa (*fee*) Service Fees	Jasa Pendaftaran Obligasi dan Agen Pembayaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025: Rp12.949.998,- Bond Registration Services and Payment Agent for the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025: Rp12,949,998,-

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Alamat Address	Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pembuatan akta-akta Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Preparation of Deeds for the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024
Periode Penugasan Assignment Period	Per pembuatan akta Per deed issuance
Biaya Jasa (*fee*) Service Fees	Rp44.400.000,-

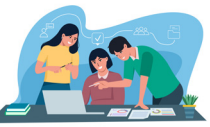

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	Aulia Taufani, S.H
Alamat Address	Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pembuatan akta-akta terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa berikut dengan pemberitahuan dan/atau persetujuannya kepada Kementerian Hukum RI serta pengumumannya dalam Berita Negara RI (apabila ada perubahan anggaran dasar) Preparation of deeds related to the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders, including notifications and/or approvals to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and their announcements in the State Gazette of the Republic of Indonesia (if there are amendments to the Articles of Association)
Periode Penugasan Assignment Period	Per Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun 2025 Per General Meeting of Shareholders in 2025
Biaya Jasa (*fee*) Service Fees	Rp49.950.000,-

Nama Lembaga/Profesi Name of Institution/Profession	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Alamat Address	BRI II Building 30th floor, Jl. Jend Sudirman kav 44-46, Jakarta 10210
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Trustee Services for the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025
Periode Penugasan Assignment Period	Sejak penunjukan (29 April 2025, Per Penerbitan Obligasi sampai dengan Obligasi Lunas) Since the appointment (April 29, 2025, Per Bond Issuance up to Paid off Bonds)
Biaya Jasa (*fee*) Service Fees	Jasa Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025: Rp83.250.000,- Trustee Services for the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025: Rp83,250,000,-

Informasi pada **Situs Web Perseroan**

Corporate Website Information



Menu Menu		**Deskripsi** Description	
Pelanggan Customer	Promo		
	Produk | Products	Pembiayaan Multiguna Barang | Multipurpose Goods Financing	Pembiayaan Motor Baru | New Motorcycle Financing
		Pembiayaan Investasi | Investment Financing	*Sale and Leaseback* MobilKu | MobilKu Sale and Leaseback
		Pembiayaan Modal Kerja | Working Capital Financing	*Sale and Leaseback* MobilKu | MobilKu Sale and Leaseback
			Sale and Leaseback MotorKu | MotorKu Sale and Leaseback
		Pembiayaan Multiguna Jasa | Multipurpose Financing	Multiguna MotorKu | MotorKu Multipurpose
			Fasilitas Dana MotorKu | Dana MotorKu Facility
			Fasilitas Dana MobilKu | Dana MobilKu Facility
		Pembiayaan Syariah | Sharia Financing	Logam Mulia - MasKu | Gold Financing - MasKu
			Porsi Haji - HajiKu | Hajj Portion Financing - HajiKu
			Motor Baru | New Bike Financing - Motor Baru
	Kawan		



Menu Menu	**Deskripsi** Description		
Korporat Corporate	Informasi Perusahaan | Corporate Information	Profil Perusahaan | Company Profile	Sejarah | History
			Nilai - Nilai Perusahaan | Corporate Value
		Manajemen | Management	Dewan Komisaris | Board of Commissioners
			Direksi | Board of Directors
			Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board
			Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
			Kepala Unit Audit Internal | Head of Internal Audit Unit
			Kepala Regional | Regional Head
		Komitmen Manajemen SMKI | ISMS Management Commitment	
		Penghargaan | Awards	
		Struktur Organisasi Perusahaan | Corporate Organizational Structure	
		Struktur Pemegang Saham | Shareholding Structure	
		Struktur Grup Perusahaan | Corporate Group Structure	
		Anggaran Dasar Perusahaan | Company's Articles of Association	
		Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal | Capital Market Supporting Professional Institutions	
	Hubungan Investor | Investor Relations	Laporan Tahunan | Annual Reports	
		Laporan Keuangan | Financial Statements	
		Rapat Umum Pemegang Saham | General Meeting of Shareholders	
		Prospektus Penawaran Umum | Public Offering Prospectus	
		Informasi Obligasi/Sukuk | Bond/Sukuk Information	
		Keterbukaan Informasi Information Disclosure	Publikasi | Publication
			Laporan | Report
		Informasi Keuangan Financial Information	Ikhtisar Keuangan | Financial Highlights
		Berita dan Informasi | News and Information	
		Pemeringkat Pembiayaan | Financing Rating	

Menu Menu	**Deskripsi** Description		
	Tata Kelola | Corporate Governance	Pedoman Kerja | Working Guidelines	
		Kode Etik Perusahaan | Company's Code of Conduct	
		Komite Perusahaan | Corporate Committee	Komite Audit | Audit Committee
			Komite Manajemen Risiko | Risk Management Committee
			Komite Remunerasi dan Nominasi | Remuneration and Nomination Committee
			Komite Teknologi Informasi | Information Technology Committee
			Komite Pemantau Risiko | Risk Oversight Committee
			Komite Produk & Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah | Sharia Product & Business Development Committee
		Pedoman Tata Kelola Perusahaan | Corporate Governance Guidelines	
		APU PPT | AML–CTF	Penjelasan APU PPT | AML–CTF Explanation
			Pelatihan APU PPT | AML–CTF Training
		Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Consumer Complaint	Sistem Penanganan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat | Consumer and Public Protection Handling System
			Laporan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat | Consumer and Public Protection Report
		Kebijakan Perusahaan | Company Policies	Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor | Policy on Communication with Shareholders or Investors
			Kebijakan Manajemen Risiko | Risk Management Policy
			Kebijakan *Whistleblowing* | Whistleblowing Policy
	Keberlanjutan | Sustainability	Ikhtisar Keberlanjutan | Sustainability Overview	
		Komitmen Kami | Our Commitment	
		Tindakan Keberlanjutan | Sustainability Actions	Literasi & Inklusi Keuangan | Financial Literacy & Inclusion
			Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan | Social & Environmental Responsibility
		Tata Kelola Keberlanjutan | Sustainability Governance	
		Laporan Keberlanjutan | Sustainability Report	
	Kebijakan Privasi | Privacy Policy		
Karir Career	Tips	Tips Pengembangan Karir | Career Development Tips	
		Peluang | Opportunities	
	Events		
	Karir | Career	Peluang | Opportunities	
Hotline Service			

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



01

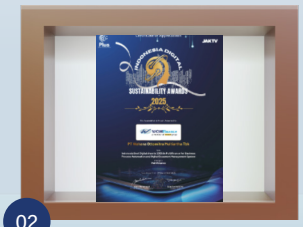
02


03



04



05


06


07



08



09

01	14 Februari 2025 February 14, 2025
Nama Penghargaan Award Name	Indonesia Good Corporate Governance IX 2025 sebagai The Best Indonesia GCG Award - IX - 2025 Gold Award (B) Excellent (4 Star****) Indonesia Good Corporate Governance IX 2025 as The Best Indonesia GCG Award - IX - 2025 Gold Award (B) Excellent (4 Star****)
Kategori Category	Public Company - Multifinance - Asset > Rp.7 T
Dikeluarkan oleh Issued By	Economic Review

02	18 Februari 2025 February 18, 2025
Nama Penghargaan Award Name	Indonesia Digital Sustainability Awards 2025 in Multifinance for Business Process Automation and Digital Document Management System
Kategori Category	Multifinance
Dikeluarkan oleh Issued By	JAKTV - Plus Idea Komunika

03	26 Februari 2025 February 26, 2025
Nama Penghargaan Award Name	WOW Brand 2025 Award in the Motorcycle Leasing Category
Kategori Category	Motorcycle Leasing
Dikeluarkan oleh Issued By	Markplus, Inc & Marketeers



10 11 12 13



14



15



16



17



18



19



20

04	18 Maret 2025 March 18, 2025
Nama Penghargaan **Award Name**	
The Best Indonesia Corporate Secretary 2025 sebagai PLATINUM Award (Very Excellent) (5 Star*****) The Best Indonesia Corporate Secretary 2025 as PLATINUM Award (Very Excellent) (5 Star*****)	
Kategori **Category**	
Multifinance Public Company – Asset > Rp.7 T	
Dikeluarkan oleh **Issued By**	
Economic Review	

05	18 Maret 2025 March 18, 2025
Nama Penghargaan **Award Name**	
Cincin Lisa Hadi sebagai The Best Indonesia Corporate Secretary 2025, Platinum Award - Score: 90.10 - Very Excellent (5*****) Cincin Lisa Hadi as The Best Indonesia Corporate Secretary 2025, Platinum Award - Score: 90.10 - Very Excellent (5*****)	
Kategori **Category**	
Public Company - Multifinance - Assets > Rp7 T.	
Dikeluarkan oleh **Issued By**	
Economic Review	

06	20 Maret 2025 March 20, 2025
Nama Penghargaan **Award Name**	
14th Infobank Isentia Digital Brand Appreciation 2025 sebagai The 2nd Best Perusahaan Pembiayaan 2025 14th Infobank Isentia Digital Brand Appreciation 2025 as The 2nd Best Financing Company 2025	
Kategori **Category**	
Aset Rp5 Triliun S.D. <Rp10 Triliun	
Dikeluarkan oleh **Issued By**	
Infobank	



07 25 April 2025 / April 25, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
Cincin Lisa Hadi sebagai The Top Financial Woman Leaders Award 2025

Cincin Lisa Hadi as The Top Financial Woman Leaders Award 2025

Kategori / Category
Implementing Strategic Initiatives to Enhance Financing Disbursement

Dikeluarkan oleh / Issued By
Herstory.id

08 21 Juni 2025 / June 21, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
Anthony Yuarez Panggabean sebagai Indonesia Visionary Leaders Awards 2025

Anthony Yuarez Panggabean as Indonesia Visionary Leaders Awards 2025

Kategori / Category
Indonesia Visionary Leaders Awards 2025

Dikeluarkan oleh / Issued By
Indonesia Award Magazine

09 26 Juni 2025 / June 26, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
The 10th Annual SPEx2® Award sebagai The Best Execution Winner

The 10th Annual SPEx2® Award as The Best Execution Winner

Kategori / Category
Financing Industry

Dikeluarkan oleh / Issued By
Kontan

10 4 Juli 2025 / July 4, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
Ibu Cincin Lisa Hadi sebagai The Most Outstanding Women 2025

Mrs. Cincin Lisa Hadi as The Most Outstanding Women 2025

Kategori / Category
The Most Outstanding Women 2025

Dikeluarkan oleh / Issued By
Infobank

11 4 Juli 2025 / July 4, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
Ibu Sarastri Baskoro sebagai The Most Outstanding Women 2025

Mrs. Sarastri Baskoro as The Most Outstanding Women 2025

Kategori / Category
The Most Outstanding Women 2025

Dikeluarkan oleh / Issued By
Infobank

12 4 Juli 2025 / July 4, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
Ibu Thilagavathy Nadason sebagai The Most Outstanding Women 2025

Mrs. Thilagavathy Nadason as The Most Outstanding Women 2025

Kategori / Category
The Most Outstanding Women 2025

Dikeluarkan oleh / Issued By
Infobank

13 4 Juli 2025 / July 4, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
Ibu Myrnie Zachraini Tamin sebagai The Most Outstanding Women 2025

Mrs. Myrnie Zachraini Tamin as The Most Outstanding Women 2025

Kategori / Category
The Most Outstanding Women 2025

Dikeluarkan Oleh / Issued By
Infobank

14 1 Agustus 2025 / August 1, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
Infobank Multifinance Appreciation 2025 sebagai The Excellent Performance Multifinance Company

Infobank Multifinance Appreciation 2025 as The Excellent Performance Multifinance Company

Kategori / Category
Asset Category of IDR 5 trillion < IDR 10 trillion

Dikeluarkan Oleh / Issued By
Infobank

15 15 Agustus 2025 / August 15, 2025

Nama Penghargaan / Award Name
Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award - VII - 2025 sebagai The Best Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award 2025 with Platinum Award (A) (Very Excellent) (5 Star *****)

Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award - VII - 2025 as The Best Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award 2025 with Platinum Award (A) (Very Excellent) (5 Star *****)

Kategori / Category
Multifinance - Public Company - Asset > Rp7T

Dikeluarkan Oleh / Issued By
Economic Review

16	31 Oktober 2025 October 31, 2025
Nama Penghargaan **Award Name**	Bapak Wibowo sebagai Best Chief Marketing Officer 2025 sebagai Indonesia Best CMO Awards 2025 Mr. Wibowo as Best Chief Marketing Officer 2025 as Indonesia Best CMO Awards 2025
Kategori **Category**	Expanding Market Share through Syariah-Driven Product Innovation in the Multifinance
Dikeluarkan oleh **Issued By**	Warta Ekonomi

17	4 Desember 2025 December 4, 2025
Nama Penghargaan **Award Name**	Bapak Djaja Suryanto Sutandar sebagai TOP Leader Digital Awards 2025 Mr. Djaja Suryanto Sutandar as TOP Leader Digital Awards 2025
Kategori **Category**	Digital Implementation 2025
Dikeluarkan oleh **Issued By**	IT Works

18	4 Desember 2025 December 4, 2025
Nama Penghargaan **Award Name**	TOP Digital Awards sebagai Top Digital Implementation 2025 TOP Digital Awards as Top Digital Implementation 2025
Kategori **Category**	Level Starts 5
Dikeluarkan oleh **Issued By**	IT Works

19	8 Desember 2025 December 8, 2025
Nama Penghargaan **Award Name**	Bapak Djaja Suryanto Sutandar sebagai The Top 100 Chief Executive Officer (CEO) 2025 Mr. Djaja Suryanto Sutandar as The Top 100 Chief Executive Officer (CEO) 2025
Kategori **Category**	The Top 100 Chief Executive Officer (CEO) 2025
Dikeluarkan oleh **Issued By**	Infobank

20	8 Desember 2025 December 8, 2025
Nama Penghargaan **Award Name**	Ibu Cincin Lisa Hadi sebagai 200 The Next Future Leaders Mrs. Cincin Lisa Hadi as 200 The Next Future Leaders
Kategori **Category**	200 The Next Future Leaders
Dikeluarkan oleh **Issued By**	Infobank

04

Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis

Perseroan memperkuat inovasi dan digitalisasi layanan melalui pengembangan aplikasi KAWAN untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan transaksi, dan kualitas interaksi dengan konsumen.

The Company strengthens innovation and digital capabilities through the development of the KAWAN application to enhance accessibility, transaction convenience, and the quality of customer engagement.





Tinjauan Perekonomian

Economic Overview



PEREKONOMIAN DUNIA

Perekonomian global tahun 2025 menunjukkan kondisi yang masih penuh ketidakpastian dan dinamika dengan beragam tantangan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berada pada kisaran sekitar 2,8%-3,2% menurut berbagai lembaga internasional seperti seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ketidakpastian ini dipicu oleh beberapa faktor utama, antara lain ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, kebijakan tarif resiprokal oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Cina yang berdampak pada rantai pasok global, serta dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan dalam rantai produksi dan distribusi.

Perekonomian negara-negara besar menunjukkan perlambatan, seperti Cina yang tumbuh sekitar 5,0% pada 2025, sedikit menurun dibandingkan sebelumnya, akibat turunnya ekspor ke AS. Ekonomi AS sendiri masih mengalami fluktuasi pada tahun 2025. Setelah tumbuh cukup solid pada paruh pertama, ekonomi AS kembali melambat pada paruh kedua akibat beberapa faktor, termasuk pengetatan kebijakan moneter The Fed yang berupaya menekan inflasi, serta ketidakpastian akibat kondisi geopolitik global.

GLOBAL ECONOMY

In 2025, the global economy remained characterized by uncertainty and dynamic conditions, amid various challenges. Global economic growth was estimated to be in the range of approximately 2.8%-3.2%, according to various international institutions such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). This uncertainty was driven by several key factors, including prolonged geopolitical tensions, reciprocal tariff policies imposed by major countries such as the United States (U.S.) and China that affected global supply chains, as well as the impacts of climate change that were increasingly being felt across production and distribution chains.

Economic growth in major countries showed signs of deceleration, such as China, which recorded growth of around 5.0% in 2025, slightly lower than in the previous period, due to declining exports to the United States. The U.S. economy itself continued to experience fluctuations in 2025. After relatively solid growth in the first half of the year, the U.S. economy slowed again in the second half due to several factors, including the tightening of monetary policy by the Federal Reserve aimed at curbing inflation, as well as uncertainty stemming from global geopolitical conditions.

Sementara itu, pertumbuhan di negara-negara berkembang bervariasi, dengan India yang tetap menunjukkan tren positif karena investasi yang kuat. Harga komoditas global diperkirakan turun sekitar 12%, yang berdampak pada penerimaan negara-negara pengekspor namun membantu menekan inflasi global.

Dalam menghadapi kondisi ini, berbagai negara berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta melakukan reformasi untuk meningkatkan daya saing dan investasi pada sektor strategis, termasuk digitalisasi. Risiko perlambatan juga diperkirakan berasal dari volatilitas harga komoditas, suku bunga yang tinggi, kendala rantai pasok, serta ketahanan pangan dan energi yang terpengaruh oleh perubahan iklim. Secara keseluruhan, ekonomi global tahun 2025 bergerak dalam suasana yang menuntut kehati-hatian dan adaptasi dari semua pelaku ekonomi.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Indonesia tahun 2025 menunjukkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Bank Dunia, IMF, dan pemerintah Indonesia secara konsisten merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,03%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh ekspansi fiskal yang stimulatif, peningkatan konsumsi domestik, serta investasi yang mulai menggeliat kembali meskipun tantangan dari tekanan eksternal seperti pelemahan harga komoditas dan ketidakpastian perdagangan global masih ada.

Konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan dengan kontribusi sebesar 82,23%, tumbuh 5,49% yoy, didukung oleh aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Selain konsumsi, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh positif sebesar 5,04% yoy dengan kontribusi sekitar 20,09% terhadap PDB.

Ekspor Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 9,91% yoy, meskipun sedikit melambat dibanding kuartal sebelumnya, tetap mendorong kinerja ekonomi nasional. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, diikuti oleh perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan.

Meanwhile, growth among emerging economies varied, with India continuing to demonstrate a positive trend supported by strong investment. Global commodity prices were projected to decline by approximately 12%, which had an impact on the revenues of exporting countries but helped to ease global inflationary pressures.

In response to these conditions, various countries sought to maintain economic stability through adaptive fiscal and monetary policy management, as well as by undertaking reforms to enhance competitiveness and investment in strategic sectors, including digitalization. Risks of an economic slowdown were also expected to arise from commodity price volatility, elevated interest rates, supply chain constraints, as well as food and energy security challenges affected by climate change. Overall, the global economy in 2025 operated in an environment requiring prudence and adaptability from all economic stakeholders.

INDONESIAN ECONOMY

Indonesia's economy in 2025 demonstrated economic stability amid global uncertainty. The World Bank, the IMF, and the government of Indonesia consistently revised economic growth projections in a positive direction. Statistics Indonesia (BPS) reported that throughout 2025, Indonesia's economy grew by 5.11%, higher than the previous year's growth of 5.03%. This growth was supported by stimulative fiscal expansion, increased domestic consumption, and a recovery in investment activity, despite ongoing challenges from external pressures, including weakening commodity prices and uncertainty in global trade.

Household consumption remained the primary driver of growth, contributing 82.23% and expanding by 5.49% yoy, supported by increased economic activity and improved public mobility. In addition to consumption, investment, or Gross Fixed Capital Formation (GFCF) also recorded positive growth of 5.04% yoy, contributing approximately 20.09% to GDP.

Indonesia's exports grew by 9.91% yoy. Although this represented a slight slowdown compared to the previous quarter's growth, exports continued to support national economic performance. The manufacturing sector contributed the largest share to economic growth, followed by trade, agriculture, construction, and mining.



Selain itu, inflasi dapat dijaga pada kisaran yang sehat, sekitar 2,5%-3%, sehingga memberikan lingkungan ekonomi yang kondusif. Sektor-sektor seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa masih menjadi motor utama pertumbuhan, sementara sektor ekspor masih menghadapi tantangan dari kondisi global yang belum sepenuhnya pulih. Pemerintah juga terus mengupayakan berbagai reformasi struktural dan digitalisasi guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan dan peningkatan daya saing.

Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2025 mencatat surplus. Secara kumulatif di tahun 2025, neraca perdagangan surplus USD41,05 miliar, ditopang oleh surplus neraca komoditas non-migas sebesar USD60,75 miliar, meskipun komoditas migas masih defisit sebesar USD19,70 miliar.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia di 2025 tetap tangguh dengan pola pertumbuhan yang stabil dan peluang ekspansi yang tersisa, meskipun menghadapi risiko dari ketegangan geopolitik dan dinamika pasar internasional. Keberlanjutan pertumbuhan ini menjadi modal penting bagi capaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa datang.

Furthermore, inflation was maintained within a healthy range of around 2.5%-3.0%, thereby providing a conducive economic environment. Sectors such as manufacturing industry, trade, and services continued to serve as the main drivers of growth, while the export sector still faced challenges due to global conditions that had not yet fully recovered. The government also continued to pursue various structural reforms and digitalization initiatives to support sustainable growth and enhance competitiveness.

Indonesia's trade balance in 2025 recorded a surplus. Cumulatively in 2025, the trade balance posted a surplus of USD41.05 billion, supported by a non-oil and gas trade surplus of USD60.75 billion, despite the oil and gas trade balance still recording a deficit of USD19.70 billion.

Overall, Indonesia's economy in 2025 remained resilient, with a stable growth pattern and remaining opportunities for expansion, despite facing risks stemming from geopolitical tensions and dynamics in international markets. The sustainability of this growth serves as an important foundation for achieving long-term development goals and improving public welfare in the future.

Tinjauan Industri Pembiayaan

Financing Industry Overview



Industri pembiayaan tahun 2025 menunjukkan kondisi yang penuh tantangan namun juga dilengkapi dengan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri. Berdasarkan data OJK, hingga Agustus 2025, piutang bersih industri pembiayaan hanya tumbuh 1,26%. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan dalam ekspansi bisnis akibat tekanan ekonomi makro dan faktor eksternal global, termasuk ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan kredit. Sektor otomotif yang lazim menjadi fokus pembiayaan mengalami penurunan penjualan, turut menekan volume pembiayaan.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor Indonesia sepanjang tahun 2025 tembus 6.412.769 unit, meningkat dibandingkan penjualan tahun 2024 sebanyak 6.333.310 unit. Namun demikian, penjualan mobil mengalami penurunan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang tahun 2025 penjualan *whole sales* tercatat sebanyak 865.723 unit atau turun 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan penjualan retail tercatat sebanyak 833.692 unit atau turun 6,3% dibandingkan 2024 yang mencapai 889.680 unit.

The financing industry in 2025 faced challenging conditions while also presenting strategic opportunities that could be leveraged by industry players. Based on data from OJK, as of August 2025, net receivables in the financing industry grew by only 1.26%. This indicates a slowdown in business expansion due to macroeconomic pressures and global external factors, including geopolitical uncertainty that affected public purchasing power and credit demand. The automotive sector, which has traditionally been a key focus of financing activities, experienced a decline in sales, further weighing on financing volumes.

According to data from the Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI), Indonesian motorcycle sales reached 6,412,769 units in 2025, an increase from 6,333,310 units in 2024. However, car sales declined. According to data from the Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo), wholesale sales reached 865,723 units in 2025, a 7.2% decrease compared to the previous year's sales. Retail sales reached 833,692 units, a 6.3% decrease compared to 889,680 units in 2024.



Dalam aspek risiko, tekanan terhadap kualitas aset juga menjadi perhatian, dengan potensi meningkatnya kredit bermasalah (NPL) akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Hal ini mengharuskan perusahaan pembiayaan untuk lebih selektif dalam pemberian kredit. Dukungan pemerintah dan penguatan regulasi menjadi elemen kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan industri.

Di sisi peluang, digitalisasi dan inovasi produk pembiayaan menjadi faktor pendorong utama. Peralihan ke pembiayaan berbasis teknologi digital meningkatkan efisiensi dan menarik segmen pasar baru, termasuk pembiayaan syariah yang mengalami pertumbuhan positif dan diharapkan terus berkembang melalui diversifikasi produk. Perusahaan *multifinance* didorong untuk lebih agresif memanfaatkan teknologi finansial (*fintech*) untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, industri pembiayaan di 2025 berada pada titik penyesuaian strategi antara mengelola risiko yang meningkat dan memanfaatkan peluang inovasi digital. Peran kolaborasi dengan pemerintah, adaptasi teknologi, dan peningkatan kualitas manajemen risiko menjadi faktor penentu keberhasilan industri dalam menavigasi kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini serta mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

From a risk perspective, pressure on asset quality also remained a concern, with the potential for an increase in non-performing loans (NPLs) due to economic conditions that were not yet fully stabilized. This situation required financing companies to be more selective in extending credit. Government support and stronger regulatory frameworks remain key elements in maintaining stability and encouraging growth in the industry.

On the opportunity side, digitalization and innovation in financing products emerged as key driving factors. The shift toward digital-based financing has improved efficiency and attracted new market segments, including sharia financing, which recorded positive growth and is expected to continue expanding through product diversification. Multifinance companies are encouraged to more aggressively leverage financial technology (fintech) to enhance access and service quality.

Overall, the financing industry in 2025 was at a point of strategic adjustment, balancing the management of heightened risks with the need to capitalize on opportunities arising from digital innovation. Collaboration with the government, technological adaptation, and the strengthening of risk management quality were critical determinants of the industry's success in navigating these challenging economic conditions and in supporting national economic recovery and growth.

Proyeksi Perekonomian Tahun 2026

Economic Outlook for 2026



Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode transisi penting bagi ekonomi global setelah menghadapi dinamika geopolitik, perubahan iklim, serta pemulihan pascapandemi yang masih berlanjut dalam beberapa sektor. Sejumlah lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia berada di kisaran moderat, antara 3–3,2%, dengan dukungan dari peningkatan konsumsi domestik di negara berkembang dan stabilisasi inflasi setelah periode kenaikan suku bunga tinggi pada awal dekade 2020-an. Namun, ketidakpastian akibat konflik regional, disrupsi rantai pasok teknologi, serta penyesuaian kebijakan moneter global masih menjadi risiko utama yang perlu diantisipasi.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa diprediksi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan negara berkembang. Di AS, ekonomi cenderung melandai memasuki fase *soft landing* setelah beberapa tahun kebijakan moneter ketat. Sementara itu, Eropa menghadapi tekanan tambahan akibat transisi energi hijau dan kebutuhan restrukturisasi industri. Di sisi lain, Asia Timur dan Asia Tenggara menunjukkan kinerja lebih solid berkat diversifikasi pasar ekspor, integrasi rantai pasok kawasan, serta peningkatan investasi di bidang teknologi dan manufaktur berkelanjutan.

Faktor digitalisasi dan transformasi energi akan memainkan peran besar dalam membentuk arah pertumbuhan global sepanjang 2026. Penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam industri dan jasa diprediksi meningkatkan efisiensi

The year 2026 is projected to be an important transitional period for the global economy after facing geopolitical dynamics, climate change, and the ongoing post-pandemic recovery in several sectors. A number of international institutions, such as the IMF and the World Bank, estimate that global economic growth will remain at a moderate level, in the range of 3–3.2%, supported by increased domestic consumption in developing countries and the stabilization of inflation following a period of high interest rate hikes in the early 2020s. However, uncertainty stemming from regional conflicts, disruptions in technology supply chains, and adjustments in global monetary policy remains a major risk that needs to be anticipated.

Developed countries such as the United States and the European region are predicted to experience slower growth compared to developing countries. In the United States, the economy is expected to decelerate into a soft-landing phase after several years of tight monetary policy. Meanwhile, Europe faces additional pressure due to the green energy transition and the need for industrial restructuring. On the other hand, East Asia and Southeast Asia are showing more solid performance thanks to the diversification of export markets, regional supply chain integration, and increased investment in technology and sustainable manufacturing.

Digitalization and energy transformation factors will play a major role in shaping the direction of global growth throughout 2026. The adoption of artificial intelligence technologies in industry and services is expected to enhance global economic



ekonomi global, sementara investasi besar dalam energi terbarukan terus memperluas basis pertumbuhan hijau. Namun, tantangan muncul pada aspek ketimpangan digital antar negara serta keterbatasan pasokan bahan baku penting seperti litium dan nikel untuk mendukung produksi kendaraan listrik.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh stabil pada kisaran 5,0–5,3% pada 2026. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi infrastruktur, serta membaiknya ekspor non-komoditas. Pemerintah melanjutkan agenda transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi daerah sebagai bagian dari strategi memperluas basis pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sektor fiskal, kebijakan pemerintah Indonesia diarahkan untuk tetap ekspansif namun terjaga, dengan fokus pada efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan pajak melalui digitalisasi administrasi perpajakan. Stabilitas makroekonomi juga diharapkan terjaga dengan dukungan kebijakan moneter yang berhati-hati, menjaga inflasi dalam kisaran 2,5–3,5%, serta memperkuat cadangan devisa melalui kinerja ekspor yang positif dan pengelolaan utang luar negeri yang *prudent*.

Secara keseluruhan, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penguatan daya tahan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Meski masih diwarnai risiko eksternal, arah kebijakan nasional yang berfokus pada produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan akan menjadi fondasi penting dalam menjaga optimisme pasar dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi kawasan Asia.

efficiency, while large-scale investments in renewable energy continue to expand the foundation of green growth. However, challenges arise in the form of digital inequality between countries and limited supplies of critical raw materials such as lithium and nickel to support electric vehicle production.

Indonesia's economy is projected to grow steadily in the range of 5.0–5.3% in 2026. This growth is supported by consistently strong household consumption, increased infrastructure investment, and improving non-commodity exports. The government continues to pursue its economic transformation agenda through industrial downstreaming, the digitalization of public services, and the strengthening of regional economies as part of a strategy to broaden the base of inclusive and sustainable growth.

In the fiscal sector, Indonesia's government policies are directed toward remaining expansionary yet well managed, with a focus on spending efficiency and increasing tax revenues through the digitalization of tax administration. Macroeconomic stability is also expected to be maintained with the support of prudent monetary policy, keeping inflation within the range of 2.5–3.5%, as well as strengthening foreign exchange reserves through positive export performance and prudent management of external debt.

Overall, 2026 is expected to be a momentum for consolidation and strengthening economic resilience at both the global and national levels. Although external risks persist, the direction of national policies focusing on productivity, innovation, and sustainability will serve as an important foundation for maintaining market optimism and strengthening Indonesia's position as one of the engines of economic growth in the Asian region.

Tinjauan Operasional per Segmen Usaha

Operational Overview per Business Segment



STRATEGI BISNIS

Menghadapi tahun 2025, Perseroan telah menyiapkan serangkaian strategi-strategi yang menyesuaikan kondisi terkini, sebagai berikut:

1. Ekspansi geografis dan penetrasi pasar dengan cara memperluas jaringan pemasaran ke wilayah baru yang potensial untuk terus meningkatkan pertumbuhan bisnis.
2. Fokus melakukan pengembangan segmen komersial (*fleet*) dan korporasi dengan berfokus kepada proses inisiasi kredit yang baik.
3. Terus melakukan pengembangan dan perbaikan aplikasi KAWAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.
4. Perbaikan secara berkesinambungan terhadap proses inisiasi kredit dengan terus melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur kredit.
5. Berkolaborasi dengan pihak eksternal dan *shareholders* untuk menciptakan peluang bisnis yang baru, serta meningkatkan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tetap berfokus pada kualitas portofolio yang sehat.
6. Pengembangan talenta melalui pelatihan secara berkelanjutan untuk menciptakan *talent readiness* dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

BUSINESS STRATEGY

Facing 2025, the Company prepared a series of strategies tailored to current conditions, as follows:

1. Geographic expansion and market penetration by expanding its marketing network into new potential regions to continuously drive business growth.
2. Focusing on developing commercial (fleet) and corporate segments by focusing on a robust credit initiation process.
3. Continuously developing and improving KAWAN application to increase the efficiency and effectiveness of business process.
4. Constantly improving the credit initiation process by continually evaluating credit policies and procedures.
5. Collaborating with external parties and shareholders to create new business opportunities and increase financing for the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector while maintaining focus on sound portfolio quality.
6. Developing talent through ongoing training to create talent readiness to support the Company's business growth.

STRATEGI PEMASARAN

Pada tahun 2025, Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang berfokus pada penguatan penetrasi pasar dan pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan. Strategi ini dijalankan melalui optimalisasi jaringan distribusi, sinergi dengan mitra usaha, serta pemanfaatan kanal digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas.

Pendekatan pemasaran dilakukan dengan menyesuaikan penawaran produk terhadap kebutuhan segmen pasar, sekaligus memperkuat kualitas layanan, dan pengalaman konsumen. Melalui strategi tersebut, Perseroan berupaya menjaga kinerja pemasaran yang stabil serta memperkuat posisi perusahaan di tengah dinamika industri pembiayaan.

MARKETING STRATEGY

In 2025, the Company's applied a marketing strategy that focused on strengthening market penetration and sustainable financing growth. This strategy was applied by optimizing distribution networks, synergizing with business partners, and utilizing digital channels to reach a wider consumer base.

The marketing approach involved tailoring product offerings to the needs of market segments while simultaneously strengthening service quality, and customer experience. Through this strategy, the Company's strives to maintain stable marketing performance and strengthen the Company's position amidst the dynamics of the financing industry.

PANGSA PASAR

Pada tahun 2025, total piutang pembiayaan industri mencapai Rp505,59 triliun. Perseroan mencatatkan piutang pembiayaan sebesar Rp6,46 triliun, yang mencerminkan pangsa pasar sebesar 1,24% dari total industri. Capaian ini menunjukkan posisi Perseroan yang tetap stabil di tengah dinamika pertumbuhan industri pembiayaan nasional.

MARKET SHARE

In 2025, the industry's total financing receivables reached Rp505.59 trillion. The Company recorded financing receivables of Rp6.46 trillion, reflecting a market share of 1.24% of the total industry. This achievement demonstrates the Company's continued stable position amid the dynamic growth of the national financing industry.

KEGIATAN PEMBIAYAAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyediakan berbagai produk dan layanan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Jenis produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan meliputi:

FINANCING ACTIVITIES

In conducting its business activities, the Company provides a range of financing products and services tailored to meet customer needs. The types of financing products and services offered include:



Pembiayaan Multiguna Barang
Multipurpose Goods Financing

Pembiayaan Motor Baru (PPSA)
New Motorcycle Financing (PPSA)

01



Pembiayaan Multiguna Jasa
Multipurpose Services Financing

- Pembiayaan Multiguna MotorKu (PPSA)
- Fasilitas Dana MotorKu
- Pembiayaan Multiguna MobilKu (PPSA)
- Fasilitas Dana MobilKu
- MotorKu Multipurpose Financing (PPSA)
- MotorKu Funding Facility
- MobilKu Multipurpose Financing (PPSA)
- MobilKu Funding Facility

02



Pembiayaan Investasi
Investment Financing

Sale and Leaseback MobilKu
MobilKu Sale and Leaseback

03



Pembiayaan Modal Kerja
Working Capital Financing

- Fasilitas Modal Usaha MobilKu
- *Sale and Leaseback* MobilKu
- *Sale and Leaseback* MotorKu
- MobilKu Business Capital Facility
- MobilKu Sale and Leaseback
- MotorKu Sale and Leaseback

04



Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah)
Sale and Purchase Financing (Murabahah Contract)

- Pembiayaan Syariah Motor Baru
- Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu"
- New Motorcycle Sharia Financing
- "MasKu" Precious Metals Sharia Financing

05



Pembiayaan Jasa (Akad Ijarah)
Service Financing (Ijarah Contract)

Pembiayaan Syariah "HajiKu"
"HajiKu" Sharia Financing

06

KINERJA PEMBIAYAAN

Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pembiayaan guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selama tahun 2025, kinerja pembiayaan Perseroan tetap stabil di tengah kondisi permintaan pasar yang relatif terbatas. Adapun rincian kinerja pembiayaan Perseroan pada tahun tersebut adalah sebagai berikut:

FINANCING PERFORMANCE

The Company continuously strives to improve its financing performance to achieve sustainable growth. Throughout 2025, the Company's financing performance remained stable amid relatively limited market demand. The details of the Company's financing performance during the year are as follows:

Jenis Pembiayaan Financing Type	**2025**		**2024**		**Pertumbuhan** Growth **(%)**
	Unit	**%**	**Unit**	**%**	
Konvensional Conventional	**172.691**	**95,11**	176.317	95,64	(2,06)
Syariah Sharia	**8.880**	**4,89**	8.031	4,36	10,57
Jumlah Total	**181.571**	**100,00**	**184.348**	**100,00**	**(1,51)**

Dalam Juta
In Million

Kegiatan Pembiayaan Financing Product	**Nama Produk** Name of the Product	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth **(%)**
Pembiayaan Multiguna Barang Multipurpose Goods Financing	Pembiayaan Motor Baru (PPSA) New Motorcycle Financing (PPSA)	**900.881**	919.023	(1,97)
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Service Financing	Pembiayaan Multiguna MotorKu (PPSA) MotorKu Multipurpose Financing (PPSA)	**91.142**	568.820	(83,98)
	Fasilitas Dana MotorKu MotorKu Funding Facility	**609.179**	612.631	(0,56)
	Pembiayaan Multiguna MobilKu (PPSA) MobilKu Multipurpose Financing (PPSA)	**-**	-	-
	Fasilitas Dana MobilKu MobilKu Funding Facility	**973.193**	836.486	16,34
Pembiayaan Investasi Investment Financing	*Sales and Leaseback* MobilKu MobilKu Sale and Leaseback	**1.982.316**	1.736.538	14,15
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	Fasilitas Modal Usaha MobilKu MobilKu Business Capital Facility	**-**	-	-
	Sales and Leaseback MobilKu MobilKu Sale and Leaseback	**623.013**	508.252	22,58
	Sales and Leaseback MotorKu MotorKu Sale and Leaseback	**549.487**	74.928	633,35
Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah) Sale and Purchase Financing (Murabahah Contracts)	Pembiayaan Syariah Motor Baru New Motorcycle Sharia Financing	**181.243**	163.863	10,61
	Pembiayaan Syariah Logam Mulia "MasKu" "MasKu" Precious Metals Sharia Financing	**15.350**	8.948	71,54
Pembiayaan Jasa (Akad Ijarah) Service Financing (Ijarah Contract)	Pembiayaan Syariah ("HajiKu") ("HajiKu") Sharia Financing	**11.286**	-	100,00
Jumlah Total		**5.937.087**	**5.429.489**	**9,35**



PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR BARU
NEW MOTORCYCLE FINANCING

Pada tahun 2025, permintaan konsumen yang relatif terbatas turut memengaruhi kinerja penyaluran pembiayaan sepeda motor baru Perseroan.

In 2025, relatively limited consumer demand also affected the Company's performance in disbursing new motorcycle financing.

KINERJA PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR BARU

NEW MOTORCYCLE FINANCING PERFORMANCE

Sepeda Motor Baru – Konvensional New Motorcycle - Conventional	2025	2024	Pertumbuhan Growth (%)
Unit	36.853	39.320	(6,27)
Nilai Pembiayaan (Rp juta) Financing Value (Rp million)	900.880,76	919.023,10	(1,97)
Rata-Rata Nilai Pembiayaan per Unit (Rp juta) Average Financing Value per Unit (Rp million)	24,44	23,37	4,59

Pada tahun 2025, pembiayaan sepeda motor baru konvensional Perseroan tercatat sebanyak 36.853 unit, menurun sebesar 6,27% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 39.320 unit. Penurunan ini disebabkan oleh *market* sepeda motor baru yang mengalami penurunan akibat pelemahan daya beli masyarakat.

In 2025, the Company's conventional new motorcycle financing amounted to 36,853 units, representing a decline of 6.27% compared to 39,320 units in 2024. This decrease was attributable to a contraction in the new motorcycle market due to weakened consumer purchasing power.

Turunnya penjualan unit berdampak terhadap berkurangnya nilai pembiayaan menjadi Rp901 miliar, turun sebesar 1,97%. Rata-rata nilai pembiayaan per unit mencapai Rp24,44 juta.

The decline in unit sales led to a reduction in financing value to Rp901 billion, down by 1.97%. The average financing value per unit reached Rp24.44 million.

KUALITAS PEMBIAYAAN

Kualitas pembiayaan Perseroan tetap terjaga seiring dengan berlanjutnya transformasi proses bisnis yang didukung oleh penerapan digitalisasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital, proses *profiling* konsumen dan *credit scoring* menjadi semakin akurat, sehingga mendukung proses akuisisi yang lebih efisien, efektif, serta berorientasi pada kualitas pembiayaan yang berkelanjutan.

FINANCING QUALITY

The Company's financing quality remains maintained as business process transformation continues, supported by the implementation of digitalization. Through the use of digital technology, customer profiling and credit scoring processes have become more accurate, thereby supporting a more efficient and effective acquisition process that is oriented toward sustainable financing quality.

PROFITABILITAS

Perseroan melakukan penyesuaian *Total Acquisition Cost* (TAC) berdasarkan tipe sepeda motor dan karakteristik *dealer* guna menjaga tingkat profitabilitas secara optimal. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari strategi manajemen biaya yang berfokus pada efisiensi dan pengelolaan risiko pembiayaan yang berimbang. Selain itu, Perseroan juga melakukan evaluasi kinerja *dealer* secara

PROFITABILITY

The Company adjusted its Total Acquisition Cost (TAC) based on motorcycle types and dealer characteristics to maintain optimal profitability. This adjustment was implemented as part of a cost management strategy focused on efficiency and balanced financing risk management. In addition, the Company conducted periodic evaluations of dealers' performance by taking into account their contribution to the

berkala dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap portofolio pembiayaan serta tingkat risiko kredit, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas pangsa pasar.

financing portfolio as well as credit risk levels, as an effort to enhance productivity and expand market share.

Dalam rangka memperkuat hubungan kemitraan dan mendorong kinerja penjualan yang berkualitas, Perseroan menerapkan sistem *reward* berbasis kinerja bagi para *dealer*. *Dealer* dengan kontribusi portofolio yang signifikan, disertai tingkat risiko kredit yang terjaga dan potensi pasar yang tinggi, memperoleh insentif yang lebih besar dibandingkan dengan *dealer* lainnya. Implementasi sistem penghargaan berbasis kinerja ini terbukti meningkatkan motivasi dan daya saing para *dealer*, serta memberikan dampak positif terhadap profitabilitas Perseroan secara keseluruhan.

To strengthen partnership relationships and encourage high-quality sales performance, the Company implemented a performance-based reward system for dealers. Dealers with significant portfolio contributions, accompanied by well-managed credit risk levels and high market potential, received greater incentives compared to other dealers. The implementation of this performance-based reward system has proven to increase dealer motivation and competitiveness, while also having a positive impact on the Company's overall profitability.



PEMBIAYAAN SYARIAH
SHARIA FINANCING

Pembiayaan syariah di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, didorong oleh karakter demografis, tren ekonomi, serta dukungan regulasi yang kuat. Karena itu, Perseroan juga menyediakan layanan pembiayaan syariah untuk menangkap potensi tersebut. Selain pembiayaan sepeda motor, Perseroan juga memberikan layanan pembiayaan logam mulia.

Sharia financing in Indonesia has significant growth potential, driven by demographic characteristics, economic trends, and strong regulatory support. Accordingly, the Company also provides sharia financing services to capture this potential. In addition to motorcycle financing, the Company also offers precious metal financing services.

Logam mulia merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki karakteristik unik sebagai sarana lindung nilai terhadap risiko, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Instrumen ini tetap menunjukkan prospek pasar yang positif, terutama saat tingkat ketidakpastian ekonomi meningkat. Melihat potensi tersebut, Perseroan menyalurkan pembiayaan logam mulia sebagai langkah strategis untuk memperluas portofolio usaha sekaligus meningkatkan sumber pendapatan alternatif secara berkelanjutan.

Precious metals are one of the investment instruments with unique characteristics as a hedge against risk, particularly amid uncertain economic conditions. This instrument continues to demonstrate positive market prospects, especially when economic uncertainty increases. In view of this potential, the Company has channeled precious metal financing as a strategic initiative to expand its business portfolio while sustainably enhancing alternative sources of income.

Pada tahun 2025, Perseroan memperluas cakupan pembiayaan syariah dengan menawarkan layanan Pembiayaan Pengurusan Pendaftaran Porsi Haji melalui produk Hajiku. Produk ini dirancang untuk membantu masyarakat mendaftar dan mengamankan porsi haji reguler melalui cicilan yang ringan dan proses yang mudah.

In 2025, the Company expanded the scope of its sharia financing by offering Hajj financing services through Hajiku product. This product is designed to assist the public in registering for and securing a regular Hajj quota through affordable installments and a simple process.



KINERJA PEMBIAYAAN SYARIAH MOTOR BARU

PERFORMANCE OF SHARIA NEW MOTORCYCLE FINANCING

Pembiayaan Motor Baru New Motorcycle Financing	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth **(%)**
Unit	**7.559**	7.198	5,02
Nilai Pembiayaan (Rp juta) Financing Value (Rp million)	**181.242,66**	163.863,13	10,61
Rata-Rata Nilai Pembiayaan per Unit (Rp juta) Average Financing Value per Unit (Rp million)	**23,98**	22,76	5,32

Tahun 2025, volume pembiayaan syariah motor baru mengalami kenaikan 5,02% menjadi 7.559 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 7.198 unit.

Kenaikan volume pembiayaan juga berdampak pada kenaikan nilai pembiayaan Perseroan. Tahun 2025 nilai pembiayaan sepeda motor baru syariah sebesar Rp181,24 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp163,86 miliar.

In 2025, the volume of sharia new motorcycle financing increased by 5.02% to 7,559 units from 7,198 units in the previous year.

The increase in financing volume also led to an increase in the Company's financing value. In 2025, the financing value of sharia new motorcycle amounted to Rp181.24 billion, increased by Rp163.86 billion in the previous year.

KUALITAS PEMBIAYAAN

FINANCING QUALITY

Kualitas pembiayaan sepeda motor baru syariah tahun 2025 berada kualitas yang baik. Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, Perseroan menerapkan proses *profiling* calon konsumen yang tepat dan akurat dengan penerapan analisis risiko yang komprehensif untuk memastikan penyaluran pembiayaan yang berkualitas dan berisiko rendah.

The quality of sharia new motorcycle financing in 2025 remained at a sound level. As part of the implementation of prudential principles, the Company applied accurate and appropriate prospective customer profiling supported by comprehensive risk analysis to ensure high-quality and low-risk financing disbursement.

PROFITABILITAS

PROFITABILITY

Pembiayaan sepeda motor baru syariah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pendapatan Perseroan dengan tingkat profitabilitas yang cukup baik.

Sharia new motorcycle financing made a positive contribution to the Company's revenue performance, with a relatively solid level of profitability.

KINERJA PEMBIAYAAN LOGAM MULIA

PERFORMANCE OF PRECIOUS METAL FINANCING

Pembiayaan Logam Mulia Precious Metal Financing	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth **(%)**
Unit	**861**	833	3,36
Nilai Pembiayaan (Rp juta) Financing Value (Rp million)	**15.349,86**	8.948,13	71,54
Rata-Rata Nilai Pembiayaan per Unit (Rp juta) Average Financing Value per Unit (Rp million)	**17,83**	10,74	65,96

Di tahun 2025, volume pembiayaan Logam Mulia Perseroan tercatat sebanyak 861 unit, mengalami peningkatan sebesar 3,36% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 833 unit. Peningkatan ini terutama disebabkan karena masyarakat mencari aset yang aman di tengah ketidakpastian global dan kekhawatiran akan adanya inflasi, juga meningkatnya kesadaran masyarakat atas investasi logam mulia. Hal ini terlihat dari lonjakan permohonan untuk pembiayaan logam mulia meskipun harga beli semakin meningkat hingga dua kali lipat di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

Peningkatan ini berbanding lurus dengan nilai pembiayaan logam mulia. Tahun 2025 nilai pembiayaan logam mulia sebesar Rp15,3 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp8,95 miliar. Peningkatan ini didorong dengan lonjakan kenaikan harga beli logam mulia yang cukup signifikan di Tahun 2025.

KUALITAS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Logam Mulia Perseroan menunjukkan kualitas yang baik, didukung oleh penerapan proses *profiling* calon konsumen yang tepat dan akurat. Penerapan analisis kelayakan yang komprehensif serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses seleksi konsumen turut memastikan penyaluran pembiayaan yang berkualitas dan berisiko rendah.

PROFITABILITAS

Pembiayaan Logam Mulia memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pendapatan Perseroan dengan tingkat profitabilitas yang cukup baik.

KINERJA PEMBIAYAAN HAJI

In 2025, the Company's Precious Metals financing volume was recorded at 861 units, a 3.36% increase compared to 833 units in 2024. This increase was primarily due to people seeking safe haven assets amid global uncertainty and concerns about inflation, as well as increased public awareness of precious metals investment. This was evident in the surge in applications for precious metals financing, despite the purchase price doubling in 2025 compared to the price in 2024.

This increase was directly proportional to the financing value of precious metals. In 2025, the financing value of precious metals reached Rp15.3 billion, compared to Rp8.95 billion the previous year. This increase was driven by a significant surge in precious metal purchase prices in 2025.

FINANCING QUALITY

The Company's Precious Metal Financing demonstrated good quality, supported by the implementation of accurate and appropriate prospective customer profiling. The application of comprehensive feasibility analysis, along with the use of digital technology in the customer selection process, further ensured high-quality and low-risk financing disbursement.

PROFITABILITY

Precious Metal Financing made a positive contribution to the Company's revenue performance, with a relatively solid level of profitability.

PERFORMANCE OF HAJJ FINANCING

Pembiayaan Haji Hajj Financing	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth **(%)**
Unit	**460**	-	-
Nilai Pembiayaan (Rp juta) Financing Value (Rp million)	**11.285.500**	-	-
Rata-Rata Nilai Pembiayaan per Unit (Rp juta) Average Financing Value per Unit (Rp million)	**24,53**	-	-

Produk Hajiku diluncurkan pada akhir *Quartal* I 2025. Produk ini mendapat sambutan yang baik dari pelanggan. Hingga akhir tahun 2025, volume pembiayaan Haji telah mencapai 460 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp11,28 milar.

Hajiku product was launched at the end of the Quarter I of 2025. The product received a positive response from customers. At the end of 2025, the volume of Hajj financing had reached 460 units, with an financing value of Rp11.28 billion.



PEMBIAYAAN MULTIGUNA JASA
MULTIPURPOSE SERVICES FINANCING

Perseroan terus mengedepankan fleksibilitas dalam memenuhi beragam kebutuhan konsumen melalui skema Pembiayaan Multiguna Jasa. Produk ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan margin keuntungan Perseroan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

The Company continues to emphasize flexibility in meeting diverse customer needs through its Multipurpose Services Financing scheme. This product not only provides convenience for customers but also contributes to higher profit margins for the Company compared to other financing products.

KINERJA PEMBIAYAAN MULTIGUNA JASA

PERFORMANCE OF MULTIPURPOSE SERVICES FINANCING

Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Services Financing	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth **(%)**
Unit	**68.064**	111.069	(38,72)
Nilai Pembiayaan (Rp juta) Financing Value (Rp million)	**1.673.513,09**	2.017.936,63	(17,07)
Rata-Rata Nilai Pembiayaan per Unit (Rp juta) Average Financing Value per Unit (Rp million)	**24,59**	18,17	35,33

Pada tahun 2025, kinerja Pembiayaan Multiguna Jasa Perseroan tercatat sebanyak 68.064 unit, menurun sebesar 38,72% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 111.069 unit. Sedangkan Nilai Pembiayaan mencapai Rp1,67 triliun di tahun 2025, turun sebesar 17,07% dari tahun 2024 sebesar Rp2,02 triliun.

In 2025, the Company's Multipurpose Services Financing performance amounted to 68,064 units, representing a decrease of 38.72% compared to 111,069 units in 2024. Meanwhile, the Financing Value reached Rp1.67 trillion in 2025, decreasing by 17.07% from Rp2.02 trillion in 2024.

KUALITAS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Multiguna Jasa menunjukkan kualitas yang baik, tercermin dari rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah di sepanjang tahun 2025. Dukungan digitalisasi berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pembiayaan multiguna.

FINANCING QUALITY

Multipurpose Services Financing demonstrated good quality, as reflected in the low level of non-performing financing throughout 2025. Support from digitalization played an important role in maintaining and improving the quality of multipurpose financing.

PROFITABILITAS

Produk Pembiayaan Multiguna memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan dengan tingkat profitabilitas yang cukup baik.

PROFITABILITY

Multipurpose Financing products made a positive contribution to the Company's financial performance, with a relatively solid level of profitability.



PEMBIAYAAN INVESTASI
INVESTMENT FINANCING

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Perseroan menerapkan strategi diversifikasi produk, salah satunya melalui fokus pada produk Pembiayaan Investasi. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

In order to increase revenue, the Company implemented a product diversification strategy, one of which focused on Investment Financing products. These products were designed to address increasingly diverse customer needs and to support sustainable business growth.

KINERJA PEMBIAYAAN INVESTASI

PERFORMANCE OF INVESTMENT FINANCING

Pembiayaan Investasi Investment Financing	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth **(%)**
Unit	**17.247**	14.391	19,85
Nilai Pembiayaan (Rp juta) Financing Value (Rp million)	**1.982.315,54**	1.736.538,20	14,15
Rata-Rata Nilai Pembiayaan per Unit (Rp juta) Average Financing Value per Unit (Rp million)	**114,94**	120,67	(4,75)

Di tahun 2025, volume Pembiayaan Investasi Perseroan tercatat sebanyak 17.247 unit, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp2 triliun, meningkat sebesar 14,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan unit produk pembiayaan investasi naik sebesar 19,85%.

In 2025, the Company's Investment Financing volume amounted to 17,247 units, with a financing value of Rp2 trillion, increased by 14.15% compared to the previous year's volume. Meanwhile, the number of investment financing product units increased by 19,85%.

KUALITAS PEMBIAYAAN

Risiko Pembiayaan Investasi dapat dimitigasi dengan baik karena proses akuisisi yang didukung dengan digitalisasi.

FINANCING QUALITY

Investment Financing risk was well mitigated through an acquisition process supported by digitalization.

PROFITABILITAS

Pembiayaan Investasi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pendapatan Perseroan dengan tingkat profitabilitas yang cukup baik.

PROFITABILITY

Investment Financing made a positive contribution to the Company's revenue performance, with a relatively solid level of profitability.

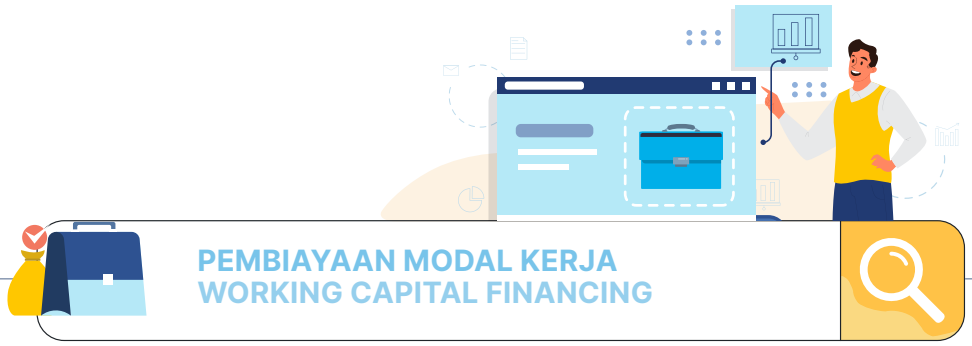

PEMBIAYAAN MODAL KERJA
WORKING CAPITAL FINANCING

Perseroan berperan aktif dalam mendukung perekonomian yang produktif melalui penyediaan produk Pembiayaan Modal Kerja, yang dirancang untuk membantu konsumen dalam mengembangkan usahanya.

The Company plays an active role in supporting a productive economy through the provision of Working Capital Financing products, which are designed to assist customers in developing their businesses.

KINERJA PEMBIAYAAN MODAL KERJA

PERFORMANCE OF WORKING CAPITAL FINANCING

Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth **(%)**
Unit	**50.527**	11.537	337,96
Nilai Pembiayaan (Rp juta) Financing Value (Rp million)	**1.172.499,15**	583.180,18	101,05
Rata-Rata Nilai Pembiayaan per Unit (Rp juta) Average Financing Value per Unit (Rp million)	**23,20**	50,55	(54,09)

Pada tahun 2025, Pembiayaan Modal Kerja Perseroan tercatat sebanyak 50.527 unit dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun, meningkat sebesar 337,96% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 11.537 unit. Nilai pembiayaan meningkat 101,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan *market* dari sektor UMKM untuk keperluan produktif.

In 2025, the Company's Working Capital Financing amounted to 50,527 units with a value of Rp1,2 million, representing an increase of 337.96% compared to 11,537 units in 2024. The financing value increased by 101.05% compared to the previous year's value. This growth was driven by increased market demand from the MSME sector for productive purposes.

KUALITAS PEMBIAYAAN

Perseroan terus memperkuat manajemen risiko pada Pembiayaan Modal Kerja untuk memastikan mitigasi risiko pembiayaan berjalan optimal. Pengelolaan risiko pada proses akuisisi Pembiayaan Modal Kerja semakin terkendali dengan dukungan digitalisasi dan kompetensi sumber daya manusia.

FINANCING QUALITY

The Company continued to strengthen risk management for Working Capital Financing to ensure optimal mitigation of financing risks. Risk management in the Working Capital Financing acquisition process became more controlled with the support of digitalization and human resource competencies.

PROFITABILITAS

Pembiayaan Modal Kerja merupakan salah satu produk yang memberikan kontribusi margin pendapatan bagi Perseroan. Perseroan terus berupaya meningkatkan nilai pembiayaan agar selaras dengan kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

PROFITABILITY

Working Capital Financing is one of the products contributing to the Company's revenue margins. The Company continues to strive to increase financing value in line with increasingly diverse customer needs.

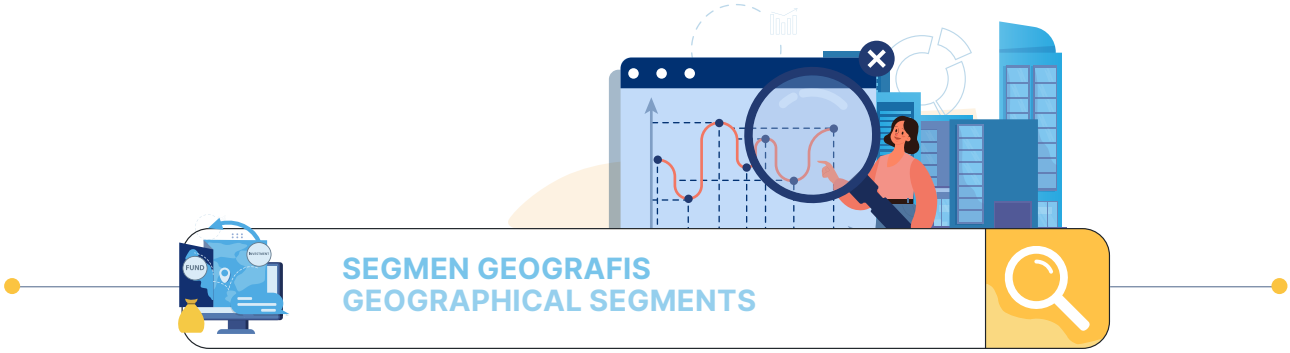

SEGMEN GEOGRAFIS
GEOGRAPHICAL SEGMENTS

Perseroan membagi segmen operasi Perseroan dalam 5 (lima) segmen geografis sesuai wilayah operasi Perseroan, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) & Banten; Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi; Jawa Tengah; Jawa Barat; dan Sumatera. Pada tahun 2025, wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi masih menjadi kontributor terbesar bagi Perseroan diikuti oleh Sumatera dan Jabodebek & Banten.

Kinerja Segmen Geografis tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Company divides its operating segments into 5 (five) geographical segments in accordance with its operating areas, namely Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi (Jabodebek) & Banten; East Java, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi; Central Java; West Java; and Sumatera. In 2025, East Java, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi region remained the largest contributor to the Company, followed by Sumatera and Jabodebek & Banten.

Geographical Segment Performance in 2025 and 2024 is as follows:

2025

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Uraian Description	Jabodebek, Banten Jabodebek, Banten	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi East Java, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi	Jawa Tengah Central Java	Jawa Barat West Java	Sumatera Sumatera
Pendapatan Segmen **Segment Revenues**	**481.193**	**658.482**	**273.830**	**189.292**	**510.361**
Beban Segmen **Segment Expenses**					
Beban Usaha Operating Expenses	181.049	233.227	98.885	64.639	170.708
Beban Pendanaan dan Keuangan Financing Costs and Financing Charges	76.587	114.672	43.358	31.944	85.251
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	75.580	150.181	59.738	43.330	124.060
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	12.859	16.997	8.300	4.918	10.843
Total Beban **Total Expenses**	**346.075**	**515.077**	**210.281**	**144.831**	**390.862**
Hasil Segmen **Segment Results**	**135.118**	**143.405**	**63.549**	**44.461**	**119.499**

2024

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Uraian Description	Jabodebek, Banten Jabodebek, Banten	Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi	Jawa Tengah Central Java	Jawa Barat West Java	Sumatera Sumatera
Pendapatan Segmen **Segment Revenues**	**495.713**	**613.621**	**288.786**	**194.576**	**517.411**
Beban Segmen **Segment Expenses**					
Beban Usaha Operating Expenses	177.563	201.033	95.683	64.120	167.478
Beban Pendanaan dan Keuangan Financing Costs and Financing Charges	73.805	107.098	49.046	33.792	90.355
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	61.080	91.358	60.050	37.101	107.648
Beban Penyusutan Depreciation Expenses	12.982	14.187	8.372	5.353	11.038
Total Beban **Total Expenses**	**325.430**	**413.676**	**213.151**	**140.366**	**376.519**
Hasil Segmen **Segment Results**	**170.283**	**199.945**	**75.635**	**54.210**	**140.892**

Prospek Usaha Tahun 2026

Business Prospects for 2026



Pada tahun 2026, perekonomian global diperkirakan tetap bergerak dalam lingkungan yang penuh tantangan. Berdasarkan proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan berada di kisaran 3,1% seiring pemulihan yang masih terbatas dan ketidakpastian kondisi global.

Untuk perekonomian Indonesia, pertumbuhan diproyeksikan berada di level sekitar 5,1% dengan inflasi yang tetap terjaga, serta konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh menjadi penopang utama kinerja ekonomi nasional pada tahun 2026.

Untuk industri sepeda motor, volume penjualan pada 2026 diperkirakan mencapai 6,4 - 6,7 juta unit, memberikan dampak positif terhadap prospek pembiayaan sepeda motor, termasuk bagi bisnis Perseroan. Di industri pembiayaan, pertumbuhan diperkirakan berada pada kisaran 8% sampai dengan 10% dengan dukungan dari sektor produktif dan konsumtif. Selain itu, kebutuhan pembiayaan dunia usaha juga masih cukup besar, khususnya di sektor perdagangan dan UMKM.

Permintaan pembiayaan Logam Mulia diperkirakan tetap terbuka pada tahun 2026 seiring minat masyarakat terhadap aset yang relatif stabil.

In 2026, the global economy is expected to continue operating in a challenging environment. Based on IMF projections, global economic growth is estimated to be around 3.1%, reflecting a still-limited recovery and ongoing global uncertainty.

For the Indonesian economy, growth is projected to remain at approximately 5.1%, with inflation kept under control. Household consumption is expected to continue growing and remain the main pillar supporting national economic performance in 2026.

For the motorcycle industry, sales volume in 2026 is estimated to reach 6.4 - 6.7 million units, positively affecting the prospects for motorcycle financing, including the Company's business. In the financing industry, growth is estimated to be in the range of 8% to 10%, supported by the productive and consumer sectors. Furthermore, the business sector's financing needs remain substantial, particularly in the trading and MSME sectors.

Demand for Precious Metal financing is also expected to remain open in 2026, in line with continued public interest in relatively stable assets.



Memasuki tahun 2026, Perseroan akan terus mengembangkan potensi bisnis, baik melalui perluasan wilayah pembiayaan maupun optimalisasi kanal distribusi. Digitalisasi proses bisnis akan tetap menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat layanan, serta memperkuat pengalaman konsumen melalui aplikasi KAWAN.

Perseroan juga akan mengoptimalkan *database* konsumen *existing* dengan kategori *excellent & good* untuk meningkatkan kualitas portofolio. Di sisi pengelolaan risiko, strategi penagihan akan diarahkan pada penguatan penanganan *early overdue* guna menjaga rasio pembiayaan bermasalah tetap terkendali.

Secara keseluruhan, peluang bisnis pada tahun 2026 tetap terbuka, dan Perseroan akan terus memperkuat fondasi pertumbuhan melalui pengembangan bisnis yang sehat, terukur, dan berkelanjutan.

Entering 2026, the Company will continue to develop its business potential, both through the expansion of financing coverage areas and the optimization of distribution channels. The digitalization of business processes will remain a primary focus to enhance productivity, accelerate service delivery, and strengthen customer experience through the KAWAN application.

The Company will also optimize its existing customer database within the excellent & good categories to improve portfolio quality. On the risk management side, collection strategies will be directed toward strengthening early overdue handling to ensure that non-performing financing ratios remain under control.

Overall, business opportunities in 2026 remain open, and the Company will continue to strengthen the foundation for growth through sound, measured, and sustainable business development.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview



LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp7,37 triliun, meningkat 6,08% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,95 triliun. Peningkatan jumlah aset tersebut disebabkan adanya peningkatan piutang pembiayaan modal kerja sebesar Rp389,71 miliar.

Rincian perkembangan aset Perseroan dalam periode 2023 - 2025 disajikan pada tabel berikut:

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

ASSETS

The Company's total assets as of December 31, 2025 amounted to Rp7.37 trillion, representing an increase of 6.08% compared to the previous year, which totaled Rp6.95 trillion. The increase in total assets was primarily attributable to a rise in working capital financing receivables amounting to Rp389.71 billion.

Details of the Company's asset development over the 2023 - 2025 period are presented in the following table:

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Aset Assets	**2025**	**2024**	**2023**
Kas dan Setara Kas - Neto Cash and Cash Equivalents - Net	**509.795**	539.724	342.970
Piutang Pembiayaan Multiguna - Neto Multipurpose Financing Receivables - Net	**3.118.630**	3.342.845	3.593.623
Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Neto Working Capital Financing Receivables - Net	**880.989**	491.278	504.563
Piutang Pembiayaan Investasi - Neto Investment Financing Receivables - Net	**2.464.847**	2.158.941	1.837.678
Piutang Lain-Lain - Neto Other Receivables - Net	**77.776**	73.951	51.098

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Aset Assets	2025	2024	2023
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	17.111	36.552	26.010
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Property and Equipment - Net of Accumulated Depreciation	84.013	86.017	81.769
Aset Hak-Guna - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Right-of-Use Assets - Net of Accumulated Depreciation	93.864	98.064	92.273
Aset Tidak Berwujud - Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi Intangible Assets - Net of Accumulated Amortization	45.485	49.284	49.463
Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets - Net	31.263	24.691	14.495
Aset Lain-Lain Other Assets	44.895	44.994	41.773
Total Aset Total Assets	**7.368.668**	**6.946.341**	**6.635.715**

LIABILITAS

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp5,39 triliun, meningkat 6,55% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp229,41 miliar dan peningkatan utang obligasi sebesar Rp155,12 miliar. Adapun rincian perkembangan liabilitas Perseroan dalam periode 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

LIABILITIES

The Company's total liabilities as of December 31, 2025 amounted to Rp5.39 trillion, representing an increase of 6.55% compared to the previous year, which totaled Rp5.05 trillion. The increase in total liabilities was driven by an increase in bank loans of Rp229.41 billion and an increase in bond payables of Rp155.12 billion. Details of the Company's liabilities development over the 2023 - 2025 period are as follows:

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Liabilitas Liabilities	2025	2024	2023
Utang Bank Bank Loans	2.419.878	2.190.467	2.626.237
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	65.595	87.792	86.702
Utang Pajak Taxes Payable	19.926	32.733	50.699
Utang Lain-Lain Other Payables	172.293	166.852	181.869
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	23.768	32.014	41.142
Utang Obligasi - Neto Bonds Payable - Net	2.395.241	2.240.119	1.660.253
Liabilitas Imbalan Kerja Liability for Employee Benefits	88.795	104.263	92.891
Utang Subordinasi Subordinated Loan	200.000	200.000	200.000
Total Liabilitas Total Liabilities	**5.385.496**	**5.054.240**	**4.939.793**

EKUITAS

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1,98 triliun, meningkat 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,89 triliun. Rincian laporan perubahan ekuitas Perseroan dalam periode 2023 - 2025 disajikan pada tabel berikut:

EQUITY

The Company's total equity as of December 31, 2025 amounted to Rp1.98 trillion, representing an increase of 4.81% compared to the previous year, which totaled Rp1.89 trillion. Details of the Company's statement of changes in equity over the 2023 - 2025 period are presented in the following table:

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Laporan Perubahan Ekuitas Statement of Changes in Equity	**2025**	**2024**	**2023**
Saldo Awal Beginning balance	**1.892.101**	1.695.922	1.515.032
Keuntungan Aktuarial - Neto Setelah Pajak Tangguhan Actuarial Gain - Net of Deferred Tax	**27.393**	4.182	3.668
Dividen Dividend	**(78.875)**	(70.918)	(59.185)
Total Laba Tahun Berjalan Total Income for the Year	**142.553**	262.915	236.407
Saldo Akhir Ending Balance	**1.983.172**	**1.892.101**	**1.695.922**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

PENDAPATAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2,17 triliun, relatif stabil dengan kenaikan sebesar 0,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rincian komponen pendapatan Perseroan untuk periode 2023 - 2025 disajikan pada tabel berikut:

REVENUES

For the year ended December 31, 2025, the Company's recorded revenue of Rp2.17 trillion, relatively stable with an increase of 0.12% compared to the previous year.

Details of the components of the Company's revenue for the 2023 - 2025 period are presented in the following table:

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Pendapatan Revenues	**2025**	**2024**	**2023**
Pembiayaan Multiguna, Modal Kerja, dan Investasi - Neto Multipurpose, Working Capital, and Investment Financing - Net	**1.808.849**	1.819.420	1.700.753
Administrasi Administration	**39.841**	37.387	41.284
Bunga Bank Interest from Banks	**23.744**	21.145	12.774
Lain-Lain Others	**297.167**	288.988	240.599
Total Pendapatan Total Revenues	**2.169.601**	**2.166.940**	**1.995.410**



BEBAN

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1,99 triliun, meningkat 8,53% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,83 triliun. Peningkatan beban ini utamanya disebabkan oleh peningkatan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 26,74%.

Rincian komponen beban Perseroan untuk periode 2023 - 2025 disajikan pada tabel berikut:

EXPENSES

The Company's expenses for the year ended December 31, 2025 were recorded at Rp1.99 trillion, an increase of 8.53% from the previous year amounting to Rp1.83 trillion. This increase in expenses was mainly due to a 26.74% increase in provision for impairment losses.

Details of the components of the Company's expenses for the 2023 - 2025 period are presented in the following table:

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Beban Expenses	**2025**	**2024**	**2023**
Umum dan Administrasi General and Administrative	**671.410**	618.188	593.561
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	**452.770**	357.231	292.171
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	**406.912**	410.387	378.391
Beban Pendanaan dan Keuangan Financing Costs and Financing Charges	**353.162**	356.319	309.881
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization	**90.769**	81.052	78.434
Lain-Lain Others	**15.120**	10.521	20.363
Total Beban Total Expenses	**1.990.143**	**1.833.698**	**1.672.801**

LABA TAHUN BERJALAN, LABA KOMPREHENSIF, DAN LABA PER SAHAM DASAR

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp142,55 miliar turun sebesar 45,78% dari tahun 2024 sebesar Rp262,92 miliar. Laba komprehensif sebesar Rp169,95 miliar, menurun sebesar 36,37% dari tahun 2024 sebesar Rp267,10 miliar. Penurunan laba tahun berjalan berdampak terhadap penurunan laba per saham dasar.

INCOME FOR THE YEAR, COMPREHENSIVE INCOME, AND BASIC EARNINGS PER SHARE

In 2025, the Company recorded Income for the Year amounting to Rp142.55 billion, decreased by 45.78% from Rp262.92 billion in 2024. Comprehensive income amounted to Rp169.95 billion, decreased by 36.37% from Rp267.10 billion in 2024. The decrease in income for the year had an impact on the decrease in basic earnings per share.

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Laba Income	**2025**	**2024**	**2023**
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	**142.553**	262.915	236.407
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	**169.946**	267.097	240.075
Laba per Saham Dasar (Dinyatakan dalam Nilai Rupiah Penuh) Basic Earnings per Share (Expressed in full Rupiah amount)	**40,95**	75,52	67,90

LAPORAN ARUS KAS

Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp510,09 miliar, menurun dibandingkan posisi awal tahun yang sebesar Rp540,22 miliar.

STATEMENTS OF CASH FLOWS

The Company's total cash and cash equivalents at the end of year 2025 amounted to Rp510.09 billion, decrease from Rp540.22 billion at the beginning of the year.

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Arus Kas Cash Flows	**2025**	**2024**	**2023**
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash (Used in) Provided by Operating Activities	**(252.262)**	239.589	(685.871)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	**(69.872)**	(98.107)	(114.794)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by Financing Activities	**292.008**	54.967	659.784
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents	**(30.126)**	196.449	(140.881)

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2025 tercatat sebesar Rp252,26 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp239,59 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran kas terkait dengan transaksi sehubungan dengan pembiayaan.

NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net cash used in operating activities in 2025 amounted to Rp252.26 billion, representing an increase compared to Rp239.59 billion in the previous year. This was primarily due to increased cash outflows related to financing transactions.

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2025 tercatat sebesar Rp69,87 miliar, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp98,11 miliar. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pengeluaran kas terkait pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud serta penurunan penambahan nilai aset hak-guna.

NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash used in investing activities in 2025 amounted to Rp69.87 billion, decreased from Rp98.11 billion in the previous year. This was due to a decrease in cash expenditures related to the purchase of fixed assets and intangible assets and a decrease in additional value of right-of-use assets.

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2025 tercatat sebesar Rp292,01 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp54,97 miliar. Hal ini disebabkan adanya penerimaan dana atas penerbitan obligasi PUB V Tahap II WOM Finance Tahun 2025 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025 Seri A dengan tingkat suku bunga 6,45% sebesar Rp595 miliar dan Seri B dengan tingkat suku bunga 6,85% sebesar Rp905 miliar.

NET CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash provided by financing activities in 2025 amounted to Rp292.01 billion, representing an increase compared to Rp54.97 billion in the previous year. This increase was driven by proceeds from the issuance of WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025, which were listed on Indonesia Stock Exchange on June 25, 2025, consisting of Series A with an interest rate of 6.45% amounting to Rp595 billion and Series B with an interest rate of 6.85% amounting to Rp905 billion.



Kemampuan Membayar Utang

Debt Service Ability

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perseroan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio rentabilitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan laba dari kegiatan usaha.

The Company's ability to meet its debt obligations is measured using solvency ratios and profitability ratios. Solvency ratios measure the Company's ability to settle all of its liabilities, both short-term and long-term. Meanwhile, profitability ratios reflect the Company's ability to generate profit from its business activities.

Rasio solvabilitas dinyatakan dengan perbandingan liabilitas terhadap aset dan perbandingan liabilitas dengan ekuitas. Rasio rentabilitas dapat diukur dari imbal hasil rata-rata aset dan imbal hasil rata-rata ekuitas.

Solvency ratios are expressed as the ratio of liabilities to assets and the ratio of liabilities to equity. Profitability ratios can be measured by the average return on assets and the average return on equity.

RASIO SOLVABILITAS

Rincian rasio solvabilitas Perseroan selama periode 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

SOLVENCY RATIOS

Details of the Company's solvency ratios for the 2023 - 2025 period are as follows:

Rasio Ratios	2025	2024	2023
Liabilitas terhadap Total Aset Debt to Total Assets	73,09%	72,76%	74,44%
Liabilitas terhadap Total Ekuitas Debt to Total Equity	271,56%	267,12%	291,27%

Di tahun 2025, Perseroan mencatatkan rasio liabilitas terhadap aset sebesar 73,09%, meningkat dari tahun 2024 sebesar 72,76%. Sedangkan rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 271,56%, meningkat dari tahun 2024 sebesar 267,12%. Dari rasio solvabilitas tersebut Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menunaikan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

In 2025, the Company recorded a debt-to-assets ratio of 73.09%, an increase from 72.76% in 2024. Meanwhile, the debt-to-equity ratio stood at 271.56%, up from 267.12% in 2024. Based on these solvency ratios, the Company has a sufficient capacity to meet both its short-term and long-term obligations.

RASIO RENTABILITAS

Rincian rasio rentabilitas Perseroan selama periode 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

PROFITABILITY RATIOS

Details of the Company's profitability ratios for the 2023 - 2025 period are as follows:

Rasio Ratios	2025	2024	2023
Imbal Hasil Rata-Rata Aset Return on Assets (ROA)	2,41%	4,67%	5,04%
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas Return on Equity (ROE)	7,45%	14,93%	14,97%

Pada tahun 2025 imbal hasil rata-rata aset sebesar 2,41% turun dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,67%. Sedangkan imbal hasil rata-rata ekuitas sebesar 7,45% turun dari tahun 2024 sebesar 14,93%. Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mencatatkan laba yang tetap positif dan dapat memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham Perseroan.

In 2025, the average return on assets was 2.41%, declining from 4.67% in 2024. Meanwhile, the average return on equity stood at 7.45%, down from 14.93% in 2024. These profitability ratios indicate the Company's ability to continue generating positive earnings and to provide added value to its shareholders.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectibility Level

Kolektibilitas piutang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menagih piutangnya kepada pihak lain. Adapun tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada periode 2023 - 2025 adalah sebagai berikut:

The receivable collectibility reflects the Company's ability to collect its receivables from counterparties. The level of the Company's receivable collectibility for the 2023 - 2025

Uraian Description	**2025**	**2024**	**2023**
Tunggakan 1-90 hari Overdue 1-90 days	**12,53%**	12,18%	12,75%
Tunggakan lebih dari 91 hari Overdue more than 91 days	**2,17%**	1,96%	2,08%

Piutang untuk tunggakan 1-90 hari pada tahun 2025 sebesar 12,53%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 12,18%. Untuk tunggakan lebih dari 91 hari menjadi sebesar 2,17%, meningkat dari tahun 2024 sebesar 1,96%.

Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menagih piutangnya agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah.

Receivables overdue for 1-90 days in 2025 amounted to 12.53%, an increase compared to 12.18% in 2024. Receivables overdue for more than 91 days amounted to 2.17%%, increasing from 1.96% in 2024.

The Company constantly improves its ability to collect receivables, preventing them to become non-performing loans.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

STRUKTUR MODAL

Per 31 Desember 2025, struktur modal Perseroan terdiri atas pemegang saham dengan kepemilikan saham bernilai nominal Rp100 per saham. Rincian komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE

As of December 31, 2025, the Company's capital structure consisted of shareholders with shares having a par value of Rp100 per share. The detailed composition of the Company's share ownership is as follows:

Uraian Description	**Jumlah**	**Komposisi** Composition **(%)**
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	**2.349.646.729**	67,49
PT Wahana Makmur Sejati	**870.600.000**	25,01
Masyarakat umum (masing-masing di bawah 5%) Public (each below 5%)	**261.234.751**	7,50
Jumlah Total	**3.481.481.480**	**100**



Mengacu pada POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, Perseroan senantiasa menjaga tingkat *gearing ratio* pada batas yang ditetapkan regulator. Adapun posisi *gearing ratio* Perseroan selama periode 31 Desember 2023 sampai 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Referring to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies as amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies, the Company consistently maintains its gearing ratio within the limits stipulated by the regulator. The Company's gearing ratio position for the period from December 31, 2023 to December 31, 2025 is as follows:

Uraian Description	**31 Desember 2025** December 31, 2025	**31 Desember 2024** December 31, 2024	**31 Desember 2023** December 31, 2023
Pinjaman Borrowing	**5.015.119**	4.630.586	4.486.490
Ekuitas Equity	**1.983.172**	1.892.101	1.695.922
Utang subordinasi Subordinated Loan	**174.074**	174.074	174.074
Gearing Ratio (x)	**2,32 kali lipat** 2.32 times	2,24 kali lipat 2.24 times	2,40 kali lipat 2.40 times

Gearing ratio Perseroan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing tercatat sebesar 2,32 kali lipat dan 2,24 kali lipat. Nilai tersebut masih sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, yang menetapkan batas maksimal *gearing ratio* sebesar 10 kali lipat dan minimal 0 kali lipat.

The Company's gearing ratio in 2025 and 2024 was recorded at 2.32 times and 2.24 times, respectively. These figures remain in compliance with POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies as amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies, which stipulates a maximum gearing ratio of 10 times and a minimum of 0 times.

KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan struktur permodalan Perseroan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan setiap Perseroan untuk menyisihkan dan mempertahankan dana cadangan yang tidak dapat didistribusikan hingga jumlahnya mencapai paling sedikit 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Pengelolaan struktur permodalan Perseroan difokuskan untuk menjaga rasio permodalan yang sehat guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta memberikan imbal hasil optimal bagi para pemegang saham. Dalam pelaksanaannya, kebijakan permodalan disusun dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, dinamika industri pembiayaan, serta mengacu pada rencana bisnis Perseroan yang telah ditetapkan.

Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui skema pinjaman

CAPITAL STRUCTURE POLICY

The Company's capital structure policy refers to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which requires each company to set aside and maintain a reserve fund that cannot be distributed until it reaches at least 20% of the issued and fully paid-up capital.

The Company's capital structure management is focused on maintaining a sound capital ratio to support sustainable business growth and to provide optimal returns to shareholders. In its implementation, the capital policy is formulated by taking into account macroeconomic conditions, dynamics of the financing industry, and by referring to the Company's established business plan.

In maintaining and adjusting its capital structure, the Company may adjust dividend payments to shareholders, issue new shares, or seek funding through bank loans and/or bond issuances. In this regard, the Company ensures that

perbankan maupun penerbitan obligasi. Dalam hal ini, Perseroan memastikan tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun berjalan.

Perseroan menetapkan kebijakan permodalan dengan mempertahankan struktur yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisis secara bulanan untuk memastikan sesuai dengan POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2;
2. Memenuhi ketentuan rasio permodalan;
3. Memenuhi ketentuan *gearing ratio*;
4. Memiliki Rasio NPF Neto paling tinggi 5% (lima persen); dan
5. Memiliki Rasio Modal Inti terhadap modal disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).

there were no changes to its objectives, policies, or processes during the year.

The Company establishes a capital policy by maintaining a sound capital structure to secure access to funding at a reasonable cost. In managing its capital, the Company conducts monthly analyses to ensure compliance with POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies as amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies, which stipulates the following provisions:

1. Having a Sound Level set at a minimum of Composite Rating 2;
2. Fulfilling capital ratio requirements;
3. Fulfilling gearing ratio requirements;
4. Having a Net Non-Performing Loan (NPF) Ratio of at least 5% (five percent); and
5. Having a Core Capital to Paid-in Capital Ratio of at least 50% (fifty percent).

Ikatan Material untuk **Investasi Barang Modal**

Material Commitments for Capital Good Investments

Pada tahun 2025 Perseroan tidak memiliki ikatan dengan pihak ketiga untuk investasi barang modal.

In 2025, the Company did not have commitments with third parties for capital good investments.



Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun 2025

Capital Good Investments Realized in 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan sejumlah investasi barang modal, baik yang ditujukan untuk menunjang operasional Perseroan pada tahun buku maupun untuk menunjang rencana ke depan Perseroan.

Jumlah investasi barang modal yang direalisasikan tahun 2025 adalah sebesar Rp41,09 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp486 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40,60 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian peralatan kantor Perseroan.

Investasi barang modal Perseroan selama tahun 2023 - 2025 antara lain digunakan untuk:

Throughout 2025, the Company's made several capital goods investments, both to support the Company's operations during the financial year and to support its future plans.

The amount of capital goods investment realized in 2025 was Rp41.09 billion. This amount increased by Rp486 million compared to the previous year amounting to Rp40.60 billion. This increase was mainly due to an increase in the Company's office equipment purchases.

The Company's capital goods investments during 2023 - 2025 were, among others, allocated for:

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Uraian Description	2025	2024	2023
Renovasi kantor Leaseholds improvement	13.080	15.162	13.210
Kendaraan Vehicles	5.156	13.044	8.171
Peralatan kantor Office equipment	21.720	10.773	26.867
Perabot kantor Office furniture and fixtures	1.133	1.624	1.701
Jumlah Total	**41.089**	**40.603**	**49.949**

Target dan Realisasi Tahun 2025

Target and Realization of 2025

Perseroan dalam rencana bisnisnya telah menetapkan sejumlah target pada tahun berjalan. Adapun realisasi dan pencapaian target pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

In its business plan, the Company had established several targets for the current year. The realization and achievement of these targets in 2025 can be explained as follows:

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Uraian Description	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)
Aset Assets	7.738.783	7.368.668	95,22
Ekuitas Equity	2.057.250	1.983.172	96,40
Pendapatan Revenues	2.361.395	2.169.601	91,88
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	258.589	142.553	55,13

Pencapaian target Perseroan belum sepenuhnya terealisasi karena tantangan yang dihadapi. Namun demikian, Perseroan optimistis pencapaian kinerja dapat terus meningkat pada tahun mendatang.

The Company's targets were not fully realized due to challenges faced. Nevertheless, the Company remains optimistic that performance achievements will continue to improve in the coming year.

Proyeksi Tahun 2026

Projections for 2026

Dalam menetapkan proyeksi kinerja tahun 2026, Perseroan memperhatikan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional, perkembangan industri pembiayaan, serta potensi bisnis yang dapat dioptimalkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, proyeksi bisnis Perseroan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

In setting the performance projections for 2026, the Company takes into account the performance realized in the previous year, the conditions of national economic growth, developments in the financing industry, and business potential that can be optimized. Based on these considerations, the Company's business projections for 2026 are as follows:

Dalam Rp Juta
In Rp Million

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2026 2026 Target	Pertumbuhan Growth (%)
Aset Assets	7.368.668	7.792.714	5,75
Ekuitas Equity	1.983.172	2.087.886	5,28
Pendapatan Revenues	2.169.601	2.364.513	8,98
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	142.553	174.806	22,63



Dividen
Dividends

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai suatu liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut diumumkan dan disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

The distribution of dividends to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements for the period when the dividends are announced and approved by the Company's shareholders.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan melakukan pembagian dividen harus berdasarkan keputusan (RUPS) Tahunan atau RUPS Luar Biasa. Sebelum tahun buku keuangan berakhir, Perseroan juga dapat membagikan dividen interim yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sepanjang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS memiliki hak untuk memutuskan hasil dari penggunaan laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan, yang hanya akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan memiliki saldo laba positif, namun jika diperlukan Perseroan dapat memutuskan untuk tidak mendistribusikan dividen.

DIVIDEND POLICY

Referring to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's dividend distribution must be based on the resolutions of the Annual or Extraordinary GMS. Before the end of the financial year, the Company may also distribute interim dividends determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, as long as the Company's Articles of Association permit it.

The GMS has the right to decide on the use of net profit after deducting allocations for the reserve fund, which will only be distributed to shareholders in the form of dividends if the Company has a positive retained earnings balance; however, if necessary, the Company may decide not to distribute dividends.

KRONOLOGIS PEMBAGIAN DIVIDEN

Berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Tahunan tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah menetapkan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp78.874.643.209 atau 30% dari Laba Bersih Perseroan kepada para pemegang saham.

Adapun kronologis pembagian dividen dalam lima tahun buku terakhir (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

CHRONOLOGY OF DIVIDEND DISTRIBUTION

Based on the approval granted by the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for 2025 held on March 25, 2025, the Company had determined a cash dividend distribution for the 2024 financial year amounting to Rp78,874,643,209, or 30% of the Company's Net Profit, to its shareholders.

The chronology of dividend distribution over the last five financial years (2020 - 2024) is as follows:

Tahun Buku Financial Year	**Dividen Tunai** Cash Dividend	**Laba Bersih (Rp)** Net Income (Rp)	**Rasio Pembayaran Dividen** Dividend Payout Ratio	**Dividen per Lembar Saham (Rp)** Dividend per Share (Rp)	**Tanggal Pembayaran** Payout Date
2024	Membagikan dividen Distribute dividends	262.915.477.362	30%	22,66	25 April 2025 April 25, 2025
2023	Membagikan dividen Distribute dividends	236.407.041.698	30%	20,37	2 Mei 2024 May 2, 2024
2022	Membagikan dividen Distribute dividends	197.602.505.544	30%	17,0	3 Mei 2023 May 3, 2023
2021	Membagikan dividen Distribute dividends	110.062.021.746	30%	9,5	27 April 2022 April 27, 2022
2020	Tidak membagikan dividen Do not distribute dividends	57.378.437.576	-	-	-

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of The Use of Public Offering Proceeds

Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan V. Laporan tersebut telah disampaikan kepada OJK, BEI, wali amanat, dan dipublikasikan di situs web bursa.

The Company reported the realization of the use of proceeds from the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds IV and V. This report has been submitted to the OJK, IDX, the trustee, and has been published on the stock exchange's website.

Jenis Penawaran Umum Public Offering Type	**Tanggal Efektif** Effective Date	**Tanggal Jatuh Tempo** Tempo Due Date	**Realisasi Hasil Penawaran** Offering Proceed Realization		**Realisasi Penggunaan Dana** Funding Usage Realization			**Sisa Dana** Fund Balance
			Jumlah Penawaran Umum Total Public Offering	**Hasil Bersih** Net Proceed	**Modal Kerja** Working Capital	**Deposito** Deposits	**Total**	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Sustainable Public Offering of Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023	16 Juli 2021 July 16, 2021	11 April 2026 April 11, 2026	1.000.000.000.000	997.155.022.600	997.155.022.600	-	997.155.022.600	-
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024	21 Juni 2024 June 21, 2024	2 Juli 2027 July 2, 2027	1.000.000.000.000	995.109.990.131	995.109.990.131	-	995.109.990.131	-
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025	21 Juni 2024 June 21, 2024	24 Juni 2028 June 24, 2028	1.500.000.000.000	1.496.059.608.002	1.496.059.608.002	-	1.496.059.608.002	-



Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha menyebutkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan terbuka.

Tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal yang terjadi di sepanjang tahun 2025.

Based on Article 3 paragraph (1) POJK Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities states that a transaction is categorized as a material transaction if the transaction value is equal to or greater than 20% of the equity of a public company.

There is no material information regarding investments, expansions, divestments, business mergers, acquisitions, and/or debt/capital restructuring that occurred throughout 2025.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and Management Share Option Program (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh pekerja (*Employee Stock Option Program*/ESOP) dan/atau manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP). Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise*.

Until the end of 2025, the Company did not have an Employee Stock Option Program (ESOP) and/or Management Stock Option Program (MSOP). Therefore, there is no information available regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization, the term, the eligibility requirements for employees and/or management, or the exercise price.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan, dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Material Transaction Containing Conflict of Interest, and Transaction with Related Parties

Selama tahun 2025, Perseroan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan. Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

During 2025, the Company did not engage in material transactions involving conflicts of interest. In the course of normal business activities, the Company conducts transactions with related parties. Details of transactions with related parties and the nature of these relationships are as follows:

No	**Objek Transaksi** Transaction Object	**Nama Pihak Berelasi** Related Parties	**Sifat Hubungan** Nature of Relationship	**Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi** Transaction Fairness	**Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme Transaksi** Company Policy in Transaction Mechanism	**Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait** Compliance Related with Regulation and Rules
1.	Rekening giro, utang obligasi, perjanjian kerja sama pembiayaan, utang subordinasi, pendapatan bunga, dan beban pendanaan Current accounts, bonds payable, joint financing, subordinated loan, interest income, and financing cost	PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")	Pemegang saham mayoritas Perseroan The majority shareholder of the Company	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. In business practice, these transactions are reasonable and necessary to support the Company's operations.	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 134/SK/OPP/05-24 Versi 03 tanggal 29 Mei 2024 The Company has an internal policy regarding affiliated transactions, as outlined in the Guidelines for Affiliated Transactions, Conflict of Interest Transactions, and Material Transactions, No. 134/SK/OPP/05-24 Version 03 dated May 29, 2024.	Perseroan telah mencantumkan transaksi afiliasi dengan BMI pada prospektus aksi korporasi, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan. The Company has disclosed affiliated transactions with BMI in its corporate action prospectus, quarterly financial statements, and annual financial statements.
2.	Fasilitas pembiayaan kendaraan Financing facilities vehicles	PT Maybank Indonesia Finance ("MIF")	Hubungan entitas pengendali dengan Perseroan Under common ownership with the Company	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. In business practice, these transactions are reasonable and necessary to support the Company's operations.	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 134/SK/OPP/05-24 Versi 03 tanggal 29 Mei 2024 The Company has an internal policy regarding affiliated transactions, as outlined in the Guidelines for Affiliated Transactions, Conflict of Interest Transactions, and Material Transactions, No. 134/SK/OPP/05-24 Version 03 dated May 29, 2024.	Perseroan telah mencantumkan transaksi afiliasi dengan MIF pada prospektus aksi korporasi, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan. The Company has disclosed affiliated transactions with MIF in its corporate action prospectus, quarterly financial statements and annual financial statements.



No	**Objek Transaksi** Transaction Object	**Nama Pihak Berelasi** Related Parties	**Sifat Hubungan** Nature of Relationship	**Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi** Transaction Fairness	**Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme Transaksi** Company Policy in Transaction Mechanism	**Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait** Compliance Related with Regulation and Rules
3.	Liabilitas sewa, beban bunga atas liabilitas sewa, dan utang dealer Lease liabilities, interest expense on lease liabilities, and dealers payables	PT Wahanaartha Ritelindo ("WARI")	Hubungan afiliasi dengan Perseroan Under affiliation with the Company	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. In business practice, these transactions are reasonable and necessary to support the Company's operations.	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 134/SK/OPP/05-24 Versi 03 tanggal 29 Mei 2024 The Company has an internal policy regarding affiliated transactions, as outlined in the Guidelines for Affiliated Transactions, Conflict of Interest Transactions, and Material Transactions, No. 134/SK/OPP/05-24 Version 03 dated May 29, 2024	Perseroan telah mencantumkan transaksi afiliasi dengan WARI pada prospektus aksi korporasi, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan. The Company has disclosed affiliated transactions with WARI in its corporate action prospectus, quarterly financial statements, and annual financial statements.
4.	Utang asuransi Insurance payables	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("Etiqa")	Mempunyai pemegang akhir yang sama Owned by the same ultimate holder	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. In business practice, these transactions are reasonable and necessary to support the Company's operations.	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 134/SK/OPP/05-24 Versi 03 tanggal 29 Mei 2024 The Company has an internal policy regarding affiliated transactions, as outlined in the Guidelines for Affiliated Transactions, Conflict of Interest Transactions, and Material Transactions, No. 134/SK/OPP/05-24 Version 03 dated May 29, 2024.	Perseroan telah mencantumkan transaksi afiliasi dengan Etiqa pada prospektus dan aksi korporasi Perseroan. The Company has disclosed affiliated transactions with Etiqa in its prospectus, and corporate action.
5.	Pinjaman karyawan, gaji dan tunjangan Loans to employee, salaries and benefits	Dewan Komisaris dan Direksi Boards of Commissioners and Directors	Personil manajemen kunci Key management personnel	Secara praktik bisnis, transaksi ini bersifat wajar untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. In business practice, these transactions are reasonable and necessary to support the Company's operations.	Perseroan memiliki kebijakan internal mengenai transaksi afiliasi yaitu pada SK Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material No. 134/SK/OPP/05-24 Versi 03 tanggal 29 Mei 2024 The Company has an internal policy regarding affiliated transactions, as outlined in the Guidelines for Affiliated Transactions, Conflict of Interest Transactions, and Material Transactions, No. 134/SK/OPP/05-24 Version 03 dated May 29, 2024.	Perseroan telah mencantumkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai pihak berelasi dalam Laporan keuangan triwulanan dan tahunan Perseroan. The Company has listed the Board of Commissioners and the Board of Directors as related parties in its quarterly and annual financial statements.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Amendments to Laws and Regulations Affecting the Company in the Most Recent Financial Year

Sepanjang tahun 2025, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan dan/atau peraturan baru diterbitkan oleh regulator yang berdampak terhadap Perseroan, antara lain:

Throughout 2025, there were several amendments to existing laws and regulations and/or new regulations issued by regulators that impacted the Company, as follows:

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TAHUN 2025

Selama tahun 2025, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan dan/atau peraturan baru diterbitkan oleh regulator yang berpengaruh terhadap Perseroan, yaitu:

AMENDMENTS TO LAWS AND REGULATIONS IN 2025

Throughout 2025, several laws and regulations were amended and/or new regulations were issued by the regulators that have an impact on the Company, as follows:

A. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)

A. FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION (POJK)

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
1. POJK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya ("POJK No. 2 Tahun 2025")	12 Februari 2025	1. Pungutan dan penerimaan lainnya wajib disetor ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bank Tempat Pembayaran. Penyetoran dilakukan setelah Wajib Bayar terdaftar pada aplikasi penerimaan OJK. 2. Jenis Pungutan yang berlaku di OJK meliputi: a. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi yang merupakan biaya registrasi; dan b. Biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian. 3. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a di atas wajib dibayar oleh Pihak sebelum pengajuan dimaksud disampaikan kepada OJK. 4. Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a di atas bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum dihitung berdasarkan nilai emisi yang dihitung secara mandiri berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana tercantum dalam dokumen pernyataan pendaftaran. 5. Nilai emisi merupakan total dana bruto yang diperoleh oleh Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum setelah pelaksanaan penjatahan dalam rangka Penawaran Umum. 6. Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan konfirmasi nilai emisi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal terakhir penjatahan dalam rangka Penawaran Umum. Adapun selisih kurang bayar wajib dibayar kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah konfirmasi nilai emisi. 7. Biaya Tahunan dibayar dalam 4 (empat) tahap, yaitu setiap tanggal 15 bulan April, Juli, dan Oktober serta tanggal 31 bulan Desember. 8. Kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Wajib Bayar memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan serta berakhir setelah perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dicabut, dibatalkan, atau dibubarkan.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan POJK No. 2 Tahun 2025 dalam hal pembayaran pungutan dan penerimaan lainnya kepada OJK.

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of the Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		9. Jenis penerimaan lainnya meliputi: a. Penerimaan dari sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; b. Hasil pengelolaan atau penyimpanan Pungutan dan penerimaan lainnya; c. Denda terkait dengan pengadaan barang dan jasa; d. Hasil pemanfaatan aset; dan e. Penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Tata cara penagihan atas penerimaan dari sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dikenakan kepada Pihak, mengacu pada POJK mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. 11. OJK mengategorikan kewajiban pembayaran Pungutan sebagai piutang macet apabila: a. Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran Pungutan dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dalam surat tagihan; b. Telah dilakukan penagihan dengan upaya optimalisasi; dan c. Dikenakan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda dan/atau tindakan tertentu, jika ada. 12. OJK mengategorikan kewajiban pembayaran penerimaan lainnya selain sanksi administratif berupa denda sebagai piutang macet apabila: a. Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran berdasarkan dokumen hukum atas penerimaan lainnya; dan b. Telah dilakukan penagihan dengan upaya optimalisasi sesuai kewenangan OJK. 13. Dalam melakukan penyelesaian piutang macet, OJK berwenang melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet yang telah dilakukan upaya optimalisasi penagihan. 14. OJK dapat melakukan Verifikasi biaya tahunan secara: a. Rutin, dilakukan terhadap setiap transaksi pembayaran biaya tahunan. b. Khusus, dilakukan terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan yang terjadi lebih dari 1 tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya tahunan dan perubahan dasar pengenaan Pungutan, serta paling lambat 10 tahun sebelum pelaksanaan verifikasi. 15. OJK dapat melakukan Verifikasi terhadap penerimaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran OJK dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan dokumen hukum dan/atau dokumen perikatan. 16. Pihak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran dengan menyampaikan persyaratan: a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dokumen pendukung berupa bukti pembayaran; dan b. Dokumen keputusan dari OJK dan/atau dokumen terkait lainnya. 17. Pengembalian kelebihan pembayaran dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap.	

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		18. OJK dapat menetapkan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sampai dengan 0% dari besaran Pungutan dalam hal: a. Wajib Bayar sedang mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dalam pemberesan, dan/atau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK; b. Sebagian besar atau seluruh Pihak: ▪ Tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ▪ Mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya; dan c. OJK akan atau sedang mengembangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu. 19. Ketentuan mengenai Pungutan dan penerimaan lainnya dalam POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. 20. Penagihan Pungutan dan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan terhadap kewajiban pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.	
1. POJK Number 2 of 2025 on Procedures for the Imposition of Levies in the Financial Services Sector and Other Revenues ("POJK No. 2 of 2025")	February 12, 2025	1. Levies and other revenues must be deposited into the Financial Services Authority (OJK) Account at the designated Payment Bank. The deposit shall be made after the Obligor is registered in OJK revenue application. 2. The types of Levies applicable in OJK shall include: a. Fees for licensing, approval, registration, ratification, and review of corporate action plans, which constitute registration fees; and b. Annual fees for regulation, supervision, inspection, and research. 3. Fees for licensing, approval, registration, ratification, and review of corporate action plans as referred to in point 2 letter a above must be paid by the relevant Party prior to the submission of such application to OJK. 4. The registration fee, as referred to in point 2 letter a above, for an Obligor conducting a Public Offering shall be calculated based on the emission value, which is self-assessed based on the total funds to be raised as stated in the registration statement document. 5. The emission value constitutes the total gross proceeds obtained by the Obligor conducting a Public Offering following the allotment in the context of the Public Offering. 6. Obligors conducting a Public Offering must submit confirmation of the emission value no later than two (2) business days after the last date of allocation in the context of the Public Offering. Any underpayment difference must be paid to OJK no later than five (5) business days after confirmation of the emission value. 7. The Annual Fee shall be paid in four (4) installments, namely on April 15, July 15, October 15, and December 31 of each year. 8. The annual fee obligation shall commence when the Obligor obtains licensing, approval, registration, and ratification, and shall end when such licensing, approval, registration, and ratification are revoked, cancelled, or dissolved.	The Company complies with and observes the provisions of POJK No. 2 of 2025 on the payment of levies and other receipts to OJK.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		9. The types of other receipts shall include: a. Receipts from administrative sanctions in the form of fines for violations of laws and regulations in the Financial Services Sector; b. Proceeds from the management or placement of Levies and other receipts; c. Fines related to the procurement of goods and services; d. Proceeds from the utilization of assets; and e. Other lawful receipts in accordance with the prevailing laws and regulations. 10. The procedures for the collection of receipts from administrative sanctions in the form of fines for violations of laws and regulations in the Financial Services Sector imposed on a Party shall refer to POJK on procedures for the collection of administrative sanctions in the form of fines in the financial services sector. 11. OJK shall categorize the obligation to pay Levies as uncollectible receivables if: a. The Obligor fails to settle its obligation within 1 (one) year from the due date of the Levy payment and has been imposed an administrative sanction in the form of a fine as stipulated in the billing letter; b. Collection efforts have been carried out with optimization measures; and c. Additional administrative sanctions other than administrative fines and/or certain actions, if any, have been imposed. 12. OJK shall categorize the obligation to pay other receipts, other than administrative sanctions in the form of fines, as uncollectible receivables if: a. The Obligor fails to settle its obligation within 1 (one) year from the due date of payment as stipulated in the legal document governing such other receipts; and b. Collection efforts have been carried out with optimization measures in accordance with OJK's authority. 13. In settling uncollectible receivables, OJK is authorized to perform write-offs and write-off of claims on uncollectible receivables for which optimal collection efforts have been undertaken. 14. OJK may conduct Verification of the annual fee as follows: a. Routine, conducted for each annual fee payment transaction b. Special, conducted in relation to the obligation to pay the annual fee where more than 1 (one) year has elapsed since the annual fee payment and there has been a change in the basis for the imposition of the Levy, and no later than 10 (ten) years prior to the implementation of the verification. 15. OJK may conduct Verification of other receipts as regulated under the Government Regulation on OJK's Work Plan and Budget and Levies in the Financial Services Sector, in accordance with the relevant legal documents and/or binding agreements. 16. A Party may submit a request for a refund of overpayment by fulfilling the following requirements: a. A written application for a refund of overpayment accompanied by supporting documents in the form of proof of payment; and b. A decision document issued by OJK and/or other relevant supporting documents. 17. The refund of overpayment shall be executed no later than 10 (ten) business days after the complete application documents have been received.	

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		18. OJK may determine an adjustment to the obligation to pay Levies up to 0% of the applicable Levy amount in the event that: a. The Obligor is experiencing financial distress, undergoing restructuring or liquidation, and/or other specific conditions as determined by OJK; b. The majority or all Parties: ▪ Are unable to maintain their soundness level in accordance with the prevailing laws and regulations; and/or ▪ Are experiencing financial difficulties that may potentially result in failure to fulfill their obligations to consumers or may endanger their business continuity; and c. OJK is planning to or is in the process of developing certain industries, types of services, or financial products, either nationally or within specific regions. 19. The provisions on Levies and other receipts under this POJK shall come into effect on January 1, 2025. 20. The collection of Levies and the imposition of administrative sanctions shall apply to obligations for the payment of Levies and other receipts effective as of January 1, 2025.	
2. POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 14 Tahun 2025")	1 Juli 2025	1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, kecuali diatur khusus dalam POJK ini. Selain itu Perusahaan Terbuka juga dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. 2. Pelaksanaan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi ("RUPO"), dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Sukuk ("RUPSu") secara elektronik dapat menggunakan: a. e-RUPS, e-RUPO, dan/atau e-RUPSu yang disediakan oleh Penyedia Sistem dapat berupa lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan pihak lain dimaksud wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia; dan/atau b. Sistem yang disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Terbuka. 3. Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia Sistem, Perusahaan Terbuka wajib mengacu ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem. 4. Dalam pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, Perusahaan Terbuka wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS Secara Elektronik dalam: a. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; b. Pengumuman RUPS; dan c. Pemanggilan RUPS 5. Perusahaan Terbuka wajib memastikan RUPS Secara Elektronik juga dilaksanakan dan dihadiri secara fisik paling sedikit oleh: a. Pimpinan RUPS; b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS 6. Tempat pelaksanaan RUPS Secara Elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik. 7. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau Perusahaan Terbuka. 8. Jumlah pemegang saham atau penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud angka 7 di atas dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan POJK No. 14 Tahun 2025 dalam hal penyelenggaraan RUPS secara elektronik.



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		9. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit: a. Pembukaan; b. Penetapan kuorum kehadiran; c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan e. Penutupan. 10. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud angka 5 di atas atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS Secara Elektronik. 11. Pemberian suara dalam RUPS Secara Elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. 12. Perusahaan Terbuka, Penyelenggara e-RUPO dan/atau e-RUPSu wajib membuat risalah RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, RUPO, atau RUPSu. 13. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, wajib dilakukan melalui paling sedikit: a. Situs web Penyedia Sistem; b. Situs web Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Efeknya diadministrasikan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau c. Situs web Emiten, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.	
2. POJK Number 14 of 2025 on the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Conducted Electronically ("POJK No. 14 of 2025")	July 1, 2025	1. The convening of a General Meeting of Shareholders (GMS) by a Public Company must be carried out in accordance with POJK on the planning and implementation of general meetings of shareholders of public companies, unless otherwise specifically regulated in this POJK. In addition, a Public Company may also conduct the GMS electronically. 2. The implementation of a GMS, a General Meeting of Bondholders ("RUPO"), and/or a General Meeting of Sukuk Holders ("RUPSu") electronically may utilize: a. An e-GMS, e-RUPO, and/or e-RUPSu provided by a System Provider, which may be a central securities depository appointed by OJK or another party approved by OJK, provided that such other party is an Indonesian legal entity domiciled in the territory of Indonesia; and/or b. A system provided by the Issuer or the Public Company. 3. In the event that a Public Company conducts an Electronic GMS using the e-GMS provided by a System Provider, the Public Company must comply with the terms and conditions for the use of the e-GMS as stipulated by the System Provider. 4. In conducting an Electronic GMS, a Public Company must include information regarding the plan to hold the Electronic GMS in: a. The notification of the GMS agenda to OJK; b. The announcement of the GMS; and c. The notice to the GMS. 5. A Public Company must ensure that an Electronic GMS is also conducted and physically attended by at least: a. The chairperson of the GMS; b. 1 (one) member of the Board of Directors and/or 1 (one) member of the Board of Commissioners; and c. Capital market supporting professionals who assist in the implementation of the GMS	The Company complies with and observes the provisions of POJK No. 14 of 2025 regarding the convening of the General Meeting of Shareholders (GMS) electronically.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		6. The venue of the Electronic GMS shall be the location where the GMS is physically held. 7. Shareholders or their Proxies from shareholders may attend either in person or electronically via the e-GMS provided by the System Provider or the Public Company. 8. The number of shareholders or proxies of shareholders who may attend in person as referred to in point 7 above may be determined by the Public Company, provided that shareholders or Proxies of shareholders who declare earlier that they will attend in person shall have the right to attend in person over those who declare later, until the predetermined number has been fulfilled. 9. The GMS shall be conducted in an orderly and efficient manner, which must include at least the following activities: a. Opening; b. Determination of the attendance quorum; c. Discussion of questions or opinions submitted by shareholders or their proxies electronically for each agenda item; d. Determination of resolutions for each agenda item based on the decision-making quorum; and e. Closing. 10. Under certain conditions, a Public Company may not conduct the GMS physically as referred to in point 5 above or may impose limitations on the physical attendance of shareholders, either partially or entirely, in the implementation of the Electronic GMS. 11. Voting in an Electronic GMS may be conducted after the notice of the GMS until the opening of each agenda item that requires voting in the GMS. 12. The Public Company, the e-RUPO Organizer and/or the e-RUPSu Organizer must prepare the minutes of the Electronic GMS, Electronic RUPO, and/or Electronic RUPSu in the form of a notarial deed drawn up by a notary registered with OJK, without requiring the signatures of the participants of the GMS, RUPO, or RUPSu. 13. The obligation to make announcements, notice, corrections to notice, re-notice, and announcements of the summary of minutes of an Electronic RUPO and/or Electronic RUPSu must be carried out through at least: a. The website of the System Provider; b. The website of the Central Securities Depository, if the Securities are administered by the Central Securities Depository; and/or c. The website of the Issuer, in the Indonesian language and a foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.	
3. POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("POJK No. 19 Tahun 2025")	2 November 2025	1. Kemudahan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM") wajib dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank ("LKNB"). 2. LKNB meliputi: a. Perusahaan pembiayaan; b. Perusahaan modal ventura; c. Lembaga keuangan mikro; d. Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; e. Perusahaan pergadaian; dan f. LKNB lainnya yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 3. Kemudahan akses pembiayaan UMKM dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan melalui: a. Penetapan kebijakan khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM; b. Penyusunan skema khusus pembiayaan UMKM; c. Percepatan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM; d. Penetapan biaya terkait pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan secara wajar; dan/atau e. Bentuk kemudahan lainnya.	Perseroan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 19 Tahun 2025 terkait dengan kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal Perseroan agar sesuai dengan POJK No. 19 Tahun 2025.



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		4. Bank dan LKNB dapat bekerja sama dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM. 5. Bank dan LKNB wajib menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari: a. Direksi; b. Dewan komisaris; dan c. Dewan Pengawas Syariah bagi Bank dan LKNB yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM. 6. Tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a wajib paling sedikit menetapkan: a. Rencana strategis pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung; dan b. Kebijakan dan prosedur untuk seluruh proses bisnis pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, yang paling sedikit memuat: ▪ Prinsip kehatian-hatian dalam pembiayaan kepada UMKM; ▪ Kebijakan persetujuan pembiayaan kepada UMKM; ▪ Dokumentasi dan administrasi pembiayaan kepada UMKM; ▪ Pengawasan pembiayaan kepada UMKM; dan ▪ Penyelesaian pembiayaan kepada UMKM yang bermasalah. 7. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud angka 6 huruf b di atas wajib dikinikan dan dikaji ulang minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. 8. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b wajib paling sedikit mengarahkan dan memantau: a. Rencana strategis pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM; dan b. Pelaksanaan tata kelola dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM. 9. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud angka 5 huruf c wajib paling sedikit: a. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam pemberian pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan prinsip syariah; dan b. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola syariah dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM. 10. Bank dan LKNB wajib memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas LKNB. Unit tersebut dapat dirangkap oleh fungsi lain pada LKNB dengan memperhatikan ketentuan rangkap jabatan. 11. Bank dan LKNB yang telah memiliki kewajiban penerapan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko, bagi masing-masing Bank dan LKNB. 12. Bank dan LKNB wajib menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis serta laporan realisasi atas rencana dimaksud dalam laporan realisasi rencana bisnis. 13. Kemudahan akses pembiayaan UMKM dilakukan dengan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. 14. Bank dan LKNB menetapkan kebijakan khusus dalam pembiayaan kepada UMKM dapat berupa penyederhanaan dalam penyaluran pembiayaan UMKM dan/atau penetapan kriteria khusus dalam penilaian penyaluran pembiayaan bagi nasabah/direktur atau calon nasabah/debitur UMKM.	

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of the Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		15. Dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM, Bank dan LKNB menyusun skema khusus penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan/atau siklus usaha UMKM. 16. Bank dan LKNB melakukan percepatan proses bisnis penyaluran pembiayaan kepada UMKM melalui: a. Penyederhanaan jenjang persetujuan atas pengajuan pembiayaan dari nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM; dan/atau b. Pengembangan metode penilaian pembiayaan. 17. Selain dilakukan oleh Bank dan LKNB secara mandiri, pengembangan metode penilaian pembiayaan metode penilaian pembiayaan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. 18. Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak ketiga wajib memastikan bahwa pihak ketiga telah berizin dari OJK atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian pembiayaan wajib melakukan penginian dan kaji ulang terhadap keandalan metode penilaian pembiayaan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 20. Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian pembiayaan dapat menggunakan sistem teknologi informasi yang disediakan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi. 21. Bank dan LKNB wajib melakukan evaluasi terhadap kewajaran penentuan biaya terkait pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan kepada nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. 22. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud angka 21 di atas, Bank dan LKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan evaluasi. 23. Kebijakan dan prosedur dalam melakukan evaluasi wajib paling sedikit memuat: a. Tata cara evaluasi kewajaran biaya terkait pembiayaan kepada UMKM; b. Evaluasi perhitungan sumber biaya dana dan komponen biaya terkait pembiayaan kepada UMKM; dan c. Analisis dampak perubahan biaya terkait pembiayaan kepada UMKM. 24. Bank dan LKNB wajib melaksanakan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia internal untuk meningkatkan kemudahan akses pembiayaan UMKM, paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tetap memperhatikan POJK mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia. 25. Bank dan LKNB dapat bekerja sama dengan mitra yang mendukung pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, yaitu: a. LJK berupa: ▪ Perusahaan penjamin; dan/atau ▪ Perusahaan asuransi, yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah; b. Penyelenggara layanan urun dana; c. Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan/atau d. Pihak lain. 26. Bank dan LKNB wajib memastikan bahwa mitra telah terdaftar atau berizin dari OJK atau otoritas lain yang berwenang dan wajib memiliki perjanjian kerja sama.	



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		27. Bank dan LKNB dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital dalam pembiayaan kepada UMKM dan wajib memberikan informasi terkait penggunaan atas teknologi informasi kepada UMKM sebagai pengguna teknologi informasi. 28. Untuk mendukung kelancaran pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, Bank dan LKNB dapat melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih atas piutang macet dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. 29. Bank dan LKNB wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan berupa edukasi keuangan kepada pelaku UMKM sesuai dengan POJK mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat. 30. Bank dan LKNB yang memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM menerapkan pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. 31. Bagi Bank dan LKNB yang: a. Belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan kemudahan akses pembiayaan UMKM harus menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan POJK ini; b. Telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan kemudahan akses pembiayaan UMKM harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK ini; dan/atau c. Belum memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM harus memiliki unit atau fungsi dimaksud paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak berlakunya POJK ini. 32. Bagi Bank dan LKNB yang belum memiliki rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis, rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM pertama kali disampaikan kepada OJK untuk rencana bisnis atau perubahan rencana bisnis tahun 2026.	
3. POJK Number 19 of 2025 on Ease of Access to Financing for Micro, Small, and Medium Enterprises ("POJK No. 19 of 2025")	November 2, 2025	1. Ease of access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises ("MSMEs") must be implemented by Banks and Non-Bank Financial Institutions ("NBFIs"). 2. NBFIs include: a. Financing companies; b. Venture capital companies; c. Microfinance institutions; d. Peer-to-peer lending service providers based on information technology; e. Pawnshops; and f. Other NBFIs. Which conduct business activities either conventionally or based on Sharia principles. 3. Ease of access to MSME financing shall be implemented in the form of financing disbursement through: a. The establishment of specific policies for MSME Financing; b. The development of special MSME financing schemes; c. The acceleration of business processes in the disbursement of financing to MSMEs; d. The determination of financing-related fees charged to MSMEs on a reasonable basis; and/or e. Other forms of facilitation. 4. Banks and NBFIs may cooperate in providing ease of access to MSME financing. 5. Banks and NBFIs must clearly define the duties and responsibilities of: a. The Board of Directors; b. The Board of Commissioners; and c. The Sharia Supervisory Board for Banks and NBFIs conducting business activities based on Sharia principles, in providing ease of access to MSME financing.	The Company complies with the provisions of POJK No. 19 of 2025 on ease of access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises and will make the necessary adjustments to its internal policies to ensure alignment with POJK No. 19 of 2025.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		6. The duties and responsibilities of the Board of Directors, as referred to in point 5, letter a, must at least stipulate: a. A strategic plan for providing ease of access to MSME financing, aligned with capital support, human resources, and supporting infrastructure; and b. Policies and procedures covering the entire business process for providing ease of access to MSME financing, which at a minimum shall include: ▪ The prudential principle in financing to MSMEs; ▪ Policies for the approval of financing to MSMEs; ▪ Documentation and administration of financing to MSMEs; ▪ Supervision of financing to MSMEs; and ▪ Resolution of non-performing MSME financing. 7. The policies and procedures as referred to in point 6 letter b above must be updated and reviewed at least once every 3 (three) years. 8. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners, as referred to in point 5, letter b, must at least direct and monitor: a. The strategic plan for providing ease of access to MSME financing; and b. The implementation of governance in providing ease of access to MSME financing. 9. The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, as referred to in point 5, letter c, must at least: a. Evaluate the policies and procedures established for providing financing to MSMEs in accordance with Sharia principles; and b. Direct and monitor the implementation of Sharia governance in providing ease of access to MSME financing. 10. Banks and NBFIs must have a unit or function responsible for handling the provision of ease of access to MSME financing, in accordance with the business scale and complexity of the NBFI. Such a unit may be combined with other functions within the NBFI, subject to the applicable provisions on concurrent positions. 11. Banks and NBFIs that are already required to implement risk management must apply risk management in providing ease of access to MSME financing in accordance with POJK on the implementation of risk management applicable to each respective Bank and NBFI. 12. Banks and NBFIs must include in their business plan a plan for the disbursement of financing to MSMEs, as well as a realization report on that plan in the business plan realization report. 13. Ease of access to MSME financing shall be implemented by applying the principles of simplicity, appropriateness, speed, affordability, and inclusiveness. 14. Banks and NBFIs may establish specific policies for MSME financing in the form of simplification of MSME financing disbursement and/or the determination of specific criteria in the assessment of financing disbursement for MSME customers/directors or prospective customers/debtors. 15. In providing ease of access to MSME financing, Banks and NBFIs shall develop special schemes for the disbursement of financing to MSMEs, tailored to the business characteristics and/or business cycles of MSMEs. 16. Banks and NBFIs shall accelerate the business process for the disbursement of financing to MSMEs through: a. Simplification of the approval hierarchy for financing applications from MSME customers/debtors and/or prospective customers/debtors; and/or b. The development of financing assessment methods.	



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		17. In addition to being carried out independently by Banks and NBFIs, the development of financing assessment methods may also be conducted through cooperation with third parties. 18. Banks and NBFIs that develop financing assessment methods through cooperation with third parties must ensure that such third parties are licensed by OJK or other competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations. 19. Banks and NBFIs that develop financing assessment methods must update and periodically review the reliability of such financing assessment methods at least 1 (one) time within a period of 3 (three) years. 20. Banks and NBFIs that develop financing assessment methods may utilize information technology systems provided independently or through cooperation with information technology service providers. 21. Banks and NBFIs must conduct an evaluation of the reasonableness of the determination of fees related to financing to MSMEs that are charged to MSME customers/debtors and/or prospective customers/debtors, periodically at least 1 (one) time within a period of 3 (three) months. 22. In conducting the evaluation as referred to in point 21 above, Banks and NBFIs must have policies and procedures to conduct the evaluation. 23. The policies and procedures for conducting the evaluation must at least include: a. Procedures for evaluating the reasonableness of fees related to financing to MSMEs; b. Evaluation of the calculation of cost of funds and cost components related to financing to MSMEs; and c. Analysis of the impact of changes in fees related to financing to MSMEs. 24. Banks and NBFIs must implement an internal human resources competency development program to enhance ease of access to MSME financing, at least 1 (one) time within a period of 1 (one) year, while taking into account POJK on human resources quality development. 25. Banks and NBFIs may cooperate with partners that support the provision of ease of access to MSME financing, namely: a. FSIs in the form of: ▪ Guarantee companies; and/or ▪ Insurance companies, which conduct business activities either conventionally or based on sharia principles; b. Securities crowdfunding service providers; c. Financial sector technology innovation providers; and/or d. Other parties. 26. Banks and NBFIs must ensure that such partners are registered with or licensed by OJK or other competent authorities and must enter into a cooperation agreement. 27. Banks and NBFIs may utilize information technology to promote a digital ecosystem in financing to MSMEs and must provide information regarding the use of such information technology to MSMEs as users of the information technology. 28. To support the smooth provision of ease of access to MSME financing, Banks and NBFIs may perform write-offs and/or write-off of claims on non-performing receivables, while taking into account the prevailing laws and regulations.	

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		29. Banks and NBFIs must carry out activities to enhance financial literacy in the form of financial education for MSME actors in accordance with POJK on the improvement of financial literacy and inclusion for consumers and the public. 30. Banks and NBFIs that provide ease of access to MSME financing must implement consumer protection in accordance with the prevailing laws and regulations on consumer and public protection in the financial services sector. 31. For Banks and NBFIs that: a. Do not yet have policies and procedures for the implementation of ease of access to MSME financing, must prepare such policies and procedures in accordance with the provisions of this POJK; b. Already have policies and procedures for the implementation of ease of access to MSME financing, must adjust them to comply with the provisions of this POJK; and/or c. Do not yet have a unit or function responsible for handling the provision of ease of access to MSME financing, must establish such unit or function no later than 4 (four) months from the effective date of this POJK. 32. For Banks and NBFIs that do not yet include a plan for the disbursement of financing to MSMEs in their business plan, such plan for the disbursement of MSME financing shall be submitted to OJK for the first time in the 2026 business plan or any amendment thereto.	
4. POJK Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("POJK No. 25 Tahun 2025") POJK No 25 of 2025 on Amendments to POJK Number 49 of 2024 regarding Supervision, Determination of Supervisory Status, and Follow-up Supervisory Actions for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("POJK No. 25 of 2025")	10 November 2025 November 10, 2025	1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku, ketentuan mengenai: a. Kriteria Tingkat Kesehatan dalam penetapan status Pengawasan; b. Kriteria parameter kuantitatif berupa rasio ekuitas terhadap modal disetor dalam penetapan status Pengawasan; dan c. Kriteria parameter kuantitatif berupa rasio piutang pembiayaan bermasalah neto dalam penetapan status Pengawasan. dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2027. 2. Pada saat POJK No. 25 Tahun 2025 ini berlaku, status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus bagi Lembaga Keuangan Mikro yang ditetapkan berdasarkan POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("POJK No. 49 Tahun 2024") dinyatakan telah berakhir berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2025 ini. 1. For Microfinance Institutions that obtained a business license prior to the effectiveness of this POJK, the provisions on: a. The Soundness Level criteria in determining Supervisory Status; b. The quantitative parameter criteria in the form of the equity-to-paid-up capital ratio in determining Supervisory Status; and c. The quantitative parameter criteria in the form of the net non-performing financing receivables ratio in determining Supervisory Status. shall become effective as of December 31, 2027. 2. Upon the entry into force of POJK No. 25 of 2025, any intensive supervisory status or special supervisory status imposed on Microfinance Institutions pursuant to POJK Number 49 of 2024 on Supervision, Determination of Supervisory Status, and Follow-up Supervisory Actions for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("POJK No. 49 of 2024") shall be deemed to have ended under POJK No. 25 of 2025.	Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, sehingga tidak berdampak pada ketentuan POJK No. 25 Tahun 2025 ini namun akan tetap tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan POJK No. 49 Tahun 2024. The Company is engaged in the financing business sector; therefore, the provisions of POJK No. 25 of 2025 do not have a direct impact on the Company. Nevertheless, the Company will continue to comply with and observe the provisions of POJK No. 49 of 2024.

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of the Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
5. POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura ("POJK No. 35 Tahun 2025")	22 Desember 2025	Penyesuaian ketentuan diantaranya atas: 1. POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, diantaranya yaitu mengenai: a. Kepemilikan warga negara asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 35 Tahun 2025 ini. b. Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan atas perubahan PSP wajib memperoleh persetujuan dari OJK dan setelah mendapatkan persetujuan OJK, pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan PSP dimaksud harus memperoleh persetujuan RUPS. c. Kewajiban pelaporan kepada OJK bagi perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek berupa pengurangan atau penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP. d. Penyesuaian dokumen permohonan persetujuan dan pelaksanaan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan. 2. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diantaranya yaitu mengenai: a. Pembiayaan investasi yang dilakukan melalui tatap muka dapat dikecualikan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: ▪ Diberikan kepada debitur dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah; ▪ Nilai pembiayaan investasi paling banyak Rp10.000.000,00; dan ▪ Persentase piutang pembiayaan investasi tanpa melalui tatap muka secara fisik paling tinggi sebesar 5% dari total piutang pembiayaan. b. Untuk dapat melakukan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana, Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: ▪ Memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2; ▪ Memenuhi ketentuan rasio permodalan; ▪ Memenuhi ketentuan *gearing ratio*; ▪ Memiliki Rasio NPF Neto paling tinggi 5%; dan ▪ Memiliki Rasio Modal Inti terhadap modal disetor paling rendah 50%. c. Perusahaan pembiayaan dengan rasio Modal Inti lebih dari 100% dibandingkan dengan modal disetor, persyaratan memiliki agunan dapat dikecualikan bagi kegiatan usaha pembiayaan modal kerja bagi kegiatan fasilitas modal usaha dan fasilitas dana hingga Rp100.000.000,00 untuk setiap debitur dengan persyaratan: ▪ Diberikan kepada debitur UMKM; ▪ Harus mengalihkan risiko melalui mekanisme asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau penjaminan kredit; dan ▪ Piutang pembiayaan fasilitas modal usaha yang tidak menggunakan agunan paling tinggi 10% dari total piutang pembiayaan. d. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan Layanan Pembiayaan Digital melalui Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Investasi tanpa melalui tatap muka secara fisik dengan tetap memperhatikan ketentuan pada POJK ini. e. Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor sampai dengan paling tinggi 3%, persyaratan tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit 2 dapat dikecualikan, dengan menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut: ▪ Kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen); ▪ Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 0% (nol persen); atau ▪ Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 0% (nol persen); dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan POJK No. 35 Tahun 2025 dalam hal menjalankan proses bisnis Perseroan dan akan melakukan penyesuaian ketentuan internal Perseroan agar sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2025.

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of the Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company

f. Perusahaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan dengan cara:
   - Mengalihkan risiko pembiayaan melalui asuransi kredit/ penjaminan kredit;
   - Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai dengan cara pembiayaan Sewa Pembiayaan/Jual dan Sewa-Balik atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
   - Melakukan pembebanan Jaminan Fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

g. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan mitigasi risiko tambahan berupa penilaian data historis calon debitur yang termuat dalam sistem layanan informasi keuangan.

h. Dalam hal data historis calon debitur dari sistem layanan informasi keuangan sebagaimana dimaksud huruf g di atas:
   - Memiliki kualitas piutang pembiayaan selain kualitas lancar yang tidak material;
   - Diketahui masih memiliki kemampuan bayar; dan
   - Masih sesuai *risk appetite* Perusahaan Pembiayaan,

   Perusahaan Pembiayaan dapat mempertimbangkan calon debitur untuk memperoleh penyaluran pembiayaan.

i. Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan penerbitan efek melalui penawaran umum wajib melaporkan rencana penerbitan efek melalui penawaran umum paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas.

j. Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan rasio saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) neto terhadap total aset (*financial to asset ratio*) paling rendah 50% paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan.

k. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak POJK ini diundangkan, Perusahaan Pembiayaan yang sudah memiliki izin usaha saat POJK ini diundangkan wajib memiliki rasio saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen).

3. POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, diantaranya yaitu mengenai:

   a. Pembiayaan investasi yang dilakukan melalui tatap muka dapat dikecualikan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - Diberikan kepada debitur dengan skala UMKM;
      - Nilai pembiayaan investasi paling banyak Rp10.000.000,00; dan
      - Persentase piutang Pembiayaan Investasi tanpa melalui tatap muka secara fisik paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Saldo Aset Produktif (*outstanding principal*).

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		b. Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor sampai dengan paling tinggi 3% (tiga persen), persyaratan Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 atau persyaratan peringkat faktor profil risiko paling rendah 2 dapat dikecualikan, dengan menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagai berikut bagi: ▪ Kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen); ▪ Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen); atau ▪ Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% (nol persen). dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. c. Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah dengan cara: ▪ Mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah melalui asuransi syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah atau melalui mekanisme penjaminan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ▪ Mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau ▪ Melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan syariah. d. Perusahaan Syariah dapat melakukan mitigasi risiko tambahan berupa penilaian data historis calon debitur yang termuat dalam sistem layanan informasi keuangan. e. Dalam hal data historis calon debitur dari sistem layanan informasi keuangan: ▪ Memiliki kualitas piutang pembiayaan selain kualitas lancar yang tidak material; ▪ Diketahui masih memiliki kemampuan bayar; dan ▪ Masih sesuai *risk appetite* Perusahaan Syariah, Perusahaan Syariah dapat mempertimbangkan calon Konsumen untuk memperoleh penyaluran pembiayaan. f. Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan efek syariah melalui penawaran umum wajib melaporkan rencana penerbitan efek syariah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas. g. Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK ini diundangkan, ketentuan terkait kewajiban memiliki rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 50% dinyatakan mulai berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan. h. Dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan, Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK ini diundangkan wajib memiliki rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen).	
5. POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 regarding the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies ("POJK No. 35 of 2025")	December 22, 2025	Adjustments to the provisions, among others, to: 1. POJK Number 47/POJK.05/2020 on Business Licensing and Institutional Aspects of Financing Companies and Sharia Financing Companies, including, among others, provisions regarding: a. Foreign ownership shall be implemented in accordance with the provisions of POJK No. 35 of 2025. b. Changes in ownership resulting in an acquisition that leads to a change of the Controlling Shareholder (PSP) must obtain prior approval from OJK and, after obtaining such approval, the acquisition resulting in the change of the PSP must obtain approval from the GMS. c. The obligation to report to OJK for companies whose shares are traded on the stock exchange in the event of a reduction or increase in paid-up capital that does not result in a change of the PSP. d. Adjustments to the application documents for approval and the implementation of ownership changes resulting in an acquisition.	The Company complies with and observes the provisions of POJK No. 35 of 2025 in carrying out its business processes and will make the necessary adjustments to its internal policies to ensure alignment with POJK No. 35 of 2025.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		2. POJK Number 35/POJK.05/2018 on the Business Operations of Financing Companies, including, among others, provisions regarding: a. Investment financing conducted through face-to-face meetings may be exempted if the following requirements are met: ▪ It is provided to debtors classified as micro, small, and medium enterprises; ▪ The investment financing amount is at a maximum of Rp10,000,000.00; and ▪ The percentage of investment financing receivables conducted without physical face-to-face meetings is at a maximum of 5% of the total financing receivables. b. To conduct Working Capital Financing in the form of a Business Capital Facility and Multipurpose Financing in the form of a Fund Facility, a Financing Company must fulfill the following requirements: ▪ Have a Soundness Level with at least a Composite Rating of 2; ▪ Comply with the capital ratio requirements; ▪ Comply with the gearing ratio requirements; ▪ Have a Net NPF Ratio of no more than 5%; and ▪ Have a Core Capital to paid-up capital ratio of at least 50%. c. A financing company with a Core Capital ratio of more than 100% of its paid-up capital may be exempted from the collateral requirement for working capital financing activities in the form of Business Capital Facilities and Fund Facilities up to Rp100,000,000.00 for each debtor, subject to the following requirements: ▪ It is granted to MSME debtors; ▪ The risk must be transferred through an insurance mechanism linked to credit or credit guarantee; and ▪ Receivables from Business Capital Facilities that do not use collateral shall be at a maximum of 10% of the total financing receivables. d. A Financing Company may conduct Digital Financing Services through Working Capital Financing, Multipurpose Financing, and Investment Financing without physical face-to-face meetings with pay attention to provision stated in this POJK. e. A Financing Company with a net NPF ratio for motor vehicle financing of up to a maximum of 3% may be exempted from the requirement to have a Soundness Level of at least Composite Rating 2, provided that it applies the following provisions regarding the minimum down payment for motor vehicle financing to debtors: ▪ Two- or three-wheeled motor vehicles, at a minimum of 0% (zero percent); ▪ Four-wheeled or more motor vehicles used for investment financing, at a minimum of 0% (zero percent); or ▪ Four-wheeled or more motor vehicles used for multipurpose financing, at a minimum of 0% (zero percent). of the selling price of the relevant vehicle. f. The Company must mitigate financing risks by: ▪ Transferring financing risks through credit insurance/ credit guarantees; ▪ Transferring risks over financed assets under Leasing/ Leaseback financing schemes or assets serving as collateral for financing activities through insurance mechanisms; and/or ▪ Encumbering Fiduciary Security, mortgage rights, or hypothec over.	



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company

g. A Financing Company may undertake additional risk mitigation in the form of assessing the historical data of prospective debtors contained in the financial information service system.
h. In the event that the historical data of prospective debtors from the financial information service system as referred to in letter g above:
   - Shows a financing receivables quality other than current that is not material;
   - Indicates that the prospective debtor still has the ability to pay; and
   - Remains within the Financing Company's risk appetite.

   The Financing Company may consider the prospective debtor for the disbursement of financing.
i. A Financing Company that intends to issue securities through a public offering must report its plan to issue securities through a public offering no later than 2 (two) months prior to the general meeting of shareholders that approves the public offering or limited public offering.
j. A Financing Company must comply with the requirement for the ratio of net outstanding financing receivables principal to total assets (financial to asset ratio) of at least 50%, no later than 2 (two) years from the promulgation of this POJK.
k. Within 2 (two) years from the promulgation of this POJK, a Financing Company that already holds a business license at the time this POJK is promulgated must have a ratio of net outstanding financing receivables principal to total assets (financing to asset ratio) of at least 40% (forty percent).

3. POJK Number 10/POJK.05/2019 on the Business Operations of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies, including, among others, provisions regarding:
   a. Investment financing conducted through face-to-face meetings may be exempted if the following requirements are met:
      - It is provided to debtors classified as MSMEs;
      - The investment financing amount is at a maximum of Rp10,000,000.00; and
      - The percentage of Investment Financing receivables conducted without physical face-to-face meetings is at a maximum of 5% (five percent) of the total Outstanding Productive Assets (outstanding principal).
   b. A Sharia Financing Company or UUS with a Net Non-Performing Productive Assets Ratio for Sharia motor vehicle financing of up to a maximum of 3% (three percent) may be exempted from the requirement to have a Soundness Level of at least Composite Rating 2 or a minimum risk profile factor rating of 2, provided that it applies the following provisions regarding the amount of down payment for motor vehicle financing to Consumers as follows for:
      - Two-or three-wheeled motor vehicles, at a minimum of 0% (zero percent);
      - Four-wheeled or more motor vehicles used for Investment Financing, at a minimum of 0% (zero percent); or
      - Four-wheeled or more motor vehicles used for Multipurpose Financing, at a minimum of 0% (zero percent);

      of the selling price of the relevant vehicle.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		c. A Sharia Company must mitigate Sharia financing risks by: ▪ Transferring Sharia Financing risks through Sharia insurance linked to the Sharia Financing or through a Sharia guarantee mechanism in accordance with the prevailing laws and regulations; ▪ Transferring risks over collateral arising from Sharia Financing activities through a Sharia insurance mechanism; and/or ▪ Encumbering fiduciary security, mortgage rights, or hypothec over collateral arising from Sharia Financing activities. d. A Sharia Company may undertake additional risk mitigation in the form of assessing the historical data of prospective debtors contained in the financial information service system. e. In the event that the historical data of prospective debtors from the financial information service system: ▪ Shows a financing receivables quality other than current that is not material; ▪ Indicates that the prospective debtor still has the ability to pay; and ▪ Remains within the Sharia Company's risk appetite, the Sharia Company may consider the prospective Consumer for the disbursement of financing. f. A Sharia Company that intends to issue Sharia securities through a public offering must report its plan to issue Sharia securities no later than 2 (two) months prior to the general meeting of shareholders that approves the public offering or limited public offering. g. For a Sharia Company that has obtained a business license at the time this POJK is promulgated, the provision regarding the obligation to have a ratio of net Outstanding Productive Assets (Outstanding Principal) to total assets (financing to asset ratio) of at least 50% shall become effective 2 (two) years from the promulgation of this POJK. h. Within 2 (two) years from the promulgation of this POJK, a Sharia Company that has obtained a business license at the time this POJK is promulgated must have a ratio of net Outstanding Productive Assets (Outstanding Principal) to total assets (financing to asset ratio) of at least 40% (forty percent).	

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
6. POJK Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 38 Tahun 2025")	22 Desember 2025	1. PUJK terdiri atas: a. LJK meliputi: ▪ Bank Umum; ▪ Bank Perekonomian Rakyat; ▪ Perusahaan Efek; ▪ Dana Pensiun; ▪ Perusahaan Asuransi; ▪ Perusahaan Reasuransi; ▪ **Perusahaan Pembiayaan**; ▪ Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; ▪ Perusahaan Modal Ventura; ▪ Lembaga Keuangan Mikro; dan ▪ Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; b. Pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; dan c. Pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. 2. OJK berwenang mengajukan gugatan untuk pelindungan konsumen terhadap: a. PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari OJK; dan/atau b. Pihak lain dengan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian. 3. Gugatan bertujuan: a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. OJK dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam proses pengajuan gugatan. 5. OJK mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebelum mengajukan Gugatan paling sedikit melalui: a. Situs web dan media sosial resmi OJK; b. Papan pengumuman di kantor OJK; dan c. Surat kabar nasional. 6. Konsumen yang tidak bersedia masuk dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan harus menyampaikan pernyataan keluar secara tertulis kepada OJK. 7. Konsumen tidak dibebankan biaya atas pelaksanaan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan dibebankan pada anggaran OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan POJK No. 38 Tahun 2025 dalam hal terdapat gugatan oleh OJK untuk pelindungan konsumen.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
6. POJK Number 38 of 2025 on Lawsuits by the Financial Services Authority for Consumer Protection in the Financial Services Sector ("POJK No. 38 of 2025")	December 22, 2025	1. PUJK consist of: a. FSIs, which include: ▪ Commercial banks; ▪ Rural banks; ▪ Securities companies; ▪ Pension funds; ▪ Insurance companies; ▪ Reinsurance companies; ▪ **Financing companies**; ▪ Infrastructure financing companies; ▪ Venture capital companies; ▪ Microfinance institutions; and ▪ Other Financial Services Institutions; b. Parties conducting business activities in fundraising, fund distribution, and fund management in the financial services sector, which are licensed and declared to be supervised by OJK in accordance with the prevailing laws and regulations; and c. Other financial services business actors include parties that carry out financial sector technological innovation activities in the financial services sector, which are licensed and declared to be supervised by OJK in accordance with the prevailing laws and regulations. whether conducting business activities conventionally or based on Sharia principles. 2. OJK is authorized to file lawsuits for consumer protection against: a. PUJK that hold or have previously held a license from OJK; and/or b. Other parties acting in bad faith that cause losses. 3. The lawsuit aims: a. To recover assets belonging to the injured party from the party causing the loss, whether under the control of the party causing the loss or under the control of another party acting in bad faith; and/or b. To obtain compensation from the party causing the loss to Consumers and/or Financial Services Institutions as a result of violations of the prevailing laws and regulations in the financial services sector. 4. OJK may coordinate with external parties in the process of filing a lawsuit. 5. OJK shall announce the list of Consumers to be included in the Lawsuit prior to filing the Lawsuit through at least: a. OJK's official website and social media; b. The announcement board at OJK's office; and c. A national newspaper. 6. Consumers who do not agree to be included in the list of Consumers to be named in the Lawsuit must submit a written opt-out statement to OJK. 7. Consumers shall not be charged any fees for the implementation of the lawsuit up to the enforcement of the court decision. The costs required for the implementation of the Lawsuit up to the enforcement of the court decision shall be borne by OJK's budget in accordance with the prevailing laws and regulations.	The Company complies with and observes the provisions of POJK No. 38 of 2025 in the event of a lawsuit filed by OJK for consumer protection.



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
7. POJK Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 39 Tahun 2025") POJK Number 39 of 2025 on Procedures for the Collection of Administrative Sanctions in the Form of Fines in the Financial Services Sector ("POJK No. 39 of 2025")	22 Desember 2025 December 22, 2025	1. Pihak yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda ("SABD") wajib membayar ke OJK dengan cara penyetoran ke rekening OJK atau pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK. 2. Pembayaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah surat SABD ditetapkan atau surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan ditetapkan. 3. Setiap hari keterlambatan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari SABD dan paling banyak 48% dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. 4. Keterlambatan pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud angka 3 di atas tidak lagi dikenakan sanksi denda dan/atau bunga. 1. A Party upon whom an Administrative Sanction in the Form of a Fine ("SABD") is imposed must make payment to OJK by depositing the amount into OJK's account or through other payment methods as determined by OJK. 2. Payment must be made within 30 days after the SABD letter is issued or after OJK's response letter to an objection is issued. 3. For each day of delay, interest of 2% per month of the SABD shall be imposed, with a maximum of 48% of the SABD amount determined by OJK, provided that any fraction of a month shall be calculated as 1 (one) full month. 4. Any delay in the payment of interest as referred to in point 3 above shall not be subject to additional fines and/or interest.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan POJK No. 39 Tahun 2025 dalam melakukan pembayaran atas sanksi administrative berupa denda (jika ada) kepada OJK. The Company complies with and observes the provisions of POJK No. 39 of 2025 in making payments of administrative sanctions, in the form of fines (if any), to OJK.
8. POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 40 Tahun 2025")	22 Juni 2026	1. Emiten yang telah melakukan penawaran umum wajib: a. Menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") kepada OJK; dan b. Mengumumkan LRPD kepada masyarakat. terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum direalisasikan. 2. LRPD wajib dibuat setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud pada angka 1 setelah: a. Tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum saham, Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; b. Tanggal penjatahan untuk Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu; atau c. Tanggal pelaksanaan Efek yang memberikan hak untuk membeli saham yang melekat pada Penawaran Umum saham, atau Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham. 3. Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum belum seluruhnya direalisasikan dan Emiten akan melakukan Penawaran Umum selanjutnya, Emiten harus memberikan penjelasan mengenai alasan pelaksanaan Penawaran Umum beserta dokumen pendukung.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan POJK No. 40 Tahun 2025 dalam hal Perseroan akan melakukan penawaran umum.

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of the Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		4. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Umum dengan rencana penggunaan dana yang sama dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum sebelumnya yang dananya masih tersisa, Emiten wajib merealisasikan sisa dana hasil Penawaran Umum sebelumnya paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. 5. Penyampaian dan pengumuman LRPD wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sebagaimana dimaksud angka 2 di atas. 6. LRPD harus memuat paling sedikit informasi mengenai: a. Jenis penawaran umum; b. Jumlah seluruh dana yang telah diperoleh; c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum; d. Rencana penggunaan dana sesuai dengan level penggunaan dana; e. Dana yang telah direalisasi dan peruntukannya; f. Dana yang masih tersisa; g. Penempatan dana yang belum terealisasi; dan h. Target waktu seluruh dana hasil penawaran umum dapat direalisasikan. 7. LRPD wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang Direksi. 8. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sampai dengan 4 (empat) level penggunaan dana, meliputi: a. Level 1 merupakan penggunaan dana oleh Emiten sendiri; b. Level 2 merupakan penggunaan dana oleh anak perusahaan atau entitas lain yang menerima dana Penawaran Umum dari Emiten; c. Level 3 merupakan penggunaan dana oleh entitas anak tidak langsung atau entitas lain yang menerima dana Penawaran Umum dari entitas dimaksud pada level 2; dan d. Level 4 merupakan penggunaan dana oleh entitas anak tidak langsung atau entitas lain yang menerima dana Penawaran Umum dari entitas dimaksud di level 3. 9. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dimuat dalam Prospektus beserta perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum, tidak dapat digunakan secara spesifik untuk uang muka pada seluruh level penggunaan dana. 10. Emiten yang melakukan Penawaran Umum wajib mengungkapkan target waktu realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam Prospektus. 11. Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Pertanggungjawaban realisasi dimaksud wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan. 12. Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek untuk pertama kali pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah: a. Tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; b. Tanggal penjatahan untuk Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau c. Tanggal pelaksanaan Efek yang memberikan hak untuk membeli saham yang melekat pada Penawaran Umum saham, atau Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham.	



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		1. Issuers that have conducted a public offering are required to: a. Submit a report on the realization of use of proceeds ("lrpd") to ojk; and b. Announce the lrpd to the public. as of the date of the Public Offering's proceeds until all proceeds from the Public Offering have been realized. 2. The LRPD must be prepared every 6 (six) months, with reporting dates of June 30 and December 31. The first LRPD must be prepared on the nearest reporting date as referred to in point 1 after: a. The date of delivery of securities for a public offering of shares, debt securities, and/or sukuk; b. The date of allotment for a public offering for capital increase by granting pre-emptive rights; or c. The date of exercise of securities granting the right to purchase shares attached to the public offering of shares, or debt securities that can or must be converted into shares. 3. If the use of proceeds from the Public Offering has not been fully realized and the Issuer plans to conduct a subsequent Public Offering, the Issuer must provide an explanation of the reasons for conducting the Public Offering along with supporting documents. 4. If the Issuer intends to conduct a Public Offering with the same planned use of proceeds as the previous Public Offering, the Issuer must realize the remaining proceeds from the previous Public Offering no later than 12 (twelve) months from the effective date of the registration statement for the Public Offering. 5. Submission and announcement of the LRPD must be made no later than the 15th of the following month after the reporting date referred to in point 2 above. 6. The LRPD must contain at least the following information: a. Type of public offering; b. Total amount of proceeds obtained; c. Total costs incurred in implementing the public offering; d. Planned use of proceeds according to the level of use of proceeds; e. Proceeds that have been realized and their allocation; f. Remaining proceeds; g. Allocation of unrealized proceeds; and h. Target timeframe for the realization of all proceeds from the public offering. 7. The LRPD must be signed by at least 1 (one) member of the Board of Directors. 8. The use of proceeds from a Public Offering may only be carried out at up to four levels of use, including: a. Level 1 is the use of proceeds by the Issuer itself; b. Level 2 is the use of proceeds by subsidiaries or other entities receiving Public Offering proceeds from the Issuer; c. Level 3 is the use of proceeds by indirect subsidiaries or other entities receiving Public Offering proceeds from the entity referred to in level 2; and d. Level 4 is the use of proceeds by indirect subsidiaries or other entities receiving Public Offering proceeds from the entity referred to in level 3. 9. The planned use of proceeds from the Public Offering contained in the Prospectus, along with changes to the use of proceeds from the Public Offering, cannot be used specifically for down payments at all levels of use of funds. 10. Issuers conducting a Public Offering are required to disclose the target timeframe for the use of proceeds from the Public Offering in the Prospectus. 11. Public Companies are required to account for the use of proceeds from a Public Offering at each annual GMS until all proceeds from the Public Offering have been disbursed. This accountability report must be included as an agenda item at the annual GMS. 12. Public Companies are required to account for the use of proceeds from a Public Offering for the first time at the nearest annual GMS, even if the use of proceeds has not yet reached one year after: a. The date of delivery of securities for a public offering of equity securities, debt securities, and/or sukuk; b. The date of allotment for a public offering for capital increase by granting pre-emptive rights; or c. The date of exercise of securities granting the right to purchase shares attached to the public offering, or debt securities that can or must be converted into shares.	
8. POJK Number 40 of 2025 on the Use of Proceeds from Public Offerings ("POJK No. 40 of 2025")	June 22, 2026		The Company complies with and observes the provisions of POJK No. 40 of 2025 in the event that the Company will conduct a public offering.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
9. POJK Nomor 42 Tahun 2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("POJK No. 42 Tahun 2025")	22 Desember 2025	1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("PVML") wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan serta transparansi Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan yang dihasilkan. 2. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PVML dilarang melakukan manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 3. PVML wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML untuk: a. Memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan; b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; c. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan d. Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK mengenai pelaporan keuangan. 4. PVML wajib menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML dan wajib menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sesuai dengan POJK mengenai pelaporan keuangan. 5. PVML wajib: a. Membentuk Unit Kerja; atau b. Menunjuk Pejabat Eksekutif, yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan PVML. 6. Unit kerja/Pejabat Eksekutif dimaksud dapat dirangkap oleh unit kerja/Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*. 7. Direksi bertanggung jawab atas: a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan POJK mengenai pelaporan keuangan; c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML. 8. Komitmen tanggung jawab sebagaimana angka 7 dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Direksi pada lembaran terpisah dalam Laporan Keuangan yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK sesuai dengan POJK mengenai penyampaian Laporan Keuangan bagi masing-masing PVML. 9. Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik. 10. Dewan Komisaris PVML wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML. Hasil pengawasan tersebut dituangkan ke dalam laporan pengawasan rencana bisnis. 11. Bagi PVML yang diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite audit wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas: a. Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan; dan b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan POJK mengenai pelaporan keuangan.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan POJK No. 42 Tahun 2025 dalam proses pelaporan keuangan dan akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal Perseroan agar sesuai dengan POJK No. 42 Tahun 2025.

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of the Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		12. Hasil pemantauan dan evaluasi komite audit sebagaimana dimaksud angka 11 di atas digunakan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meyakini integritas dari proses pelaporan laporan keuangan PVML. 13. PSP harus mendukung proses pelaporan keuangan PVML yang berkualitas dan andal. PSP dilarang melakukan tindakan intervensi yang berpotensi menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan PVML. 14. Pihak terafiliasi dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, dan/atau Pejabat Eksekutif, dalam proses pelaporan keuangan PVML. 15. Dalam hal diketahui terdapat kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain harus memberikan informasi kepada OJK. 16. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud angka 15 di atas disampaikan secara daring atau luring kepada OJK dan ditujukan kepada satuan kerja di OJK yang membawahkan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat PVML.	
9. POJK Number 42 of 2025 on the Integrity of Financial Reporting of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("POJK No. 42 of 2025")	December 22, 2025	1. Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("PVML") must have an integrated financial reporting process to ensure the correctness, accuracy, and transparency of Financial Information in the Financial Statements produced. 2. The Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Controlling Shareholder (PSP), Executive Officers, and/or employees of PVML are prohibited from manipulating Financial Information and/or the Financial Statements of PVML such that they do not reflect the actual condition. 3. PVML must prepare and establish internal control policies and procedures in the PVML financial reporting process in order to: a. Ensure the correctness, accuracy, and transparency of Financial Information in the Financial Statements; b. Enhance operational efficiency and effectiveness in the financial reporting process; c. Ensure compliance with the prevailing laws and regulations in the financial reporting process; and d. Ensure that the Financial Statements have been prepared in accordance with POJK on financial reporting. 4. PVML must implement internal control policies and procedures in the PVML financial reporting process and must provide information systems that support financial reporting in accordance with POJK on financial reporting. 5. PVML must: a. Establish a work unit; or b. Appoint an Executive Officer, who is responsible for the prevention of fraud and manipulation in the recording of Financial Information and Financial Statements of PVML.	The Company complies with and observes the provisions of POJK No. 42 of 2025 in the process of financial reporting and will make the necesary adjustments to the Company's internal provisions to comply with POJK No. 42 of 2025.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		6. The aforementioned work unit/Executive Officer may be combined with the work unit/Executive Officer responsible for the risk management function, compliance function, or anti-fraud function. 7. The Board of Directors is responsible for: a. The preparation and presentation of Financial Information and Financial Statements; b. The conformity of the preparation and presentation of the Financial Statements with POJK on financial reporting; c. The completeness and accuracy of the contents of the Financial Statements; and d. The implementation of internal controls in the PVML financial reporting process. 8. The commitment of responsibility as referred to in point 7 shall be set out in a duly stamped statement letter signed by the Board of Directors on a separate page of the Financial Statements, submitted simultaneously with the submission of the Financial Statements through OJK's data communication network system in accordance with POJK on the submission of Financial Statements for each respective PVML. 9. The Board of Directors must submit an internal control report to OJK simultaneously with the submission of the annual financial statements audited by a public accountant. 10. The Board of Commissioners of PVML must supervise the implementation of internal control policies and procedures in the PVML financial reporting process. The results of such supervision shall be set out in the business plan supervision report. 11. For PVML required to establish an audit committee, the audit committee must carry out its duties and responsibilities to monitor and evaluate: a. The implementation of internal control policies and procedures in the process of preparing and submitting Financial Statements; and b. The conformity of the preparation and presentation of Financial Statements with POJK on financial reporting. 12. The results of the monitoring and evaluation by the audit committee, as referred to in point 11 above, shall be used as recommendations to the Board of Commissioners to ensure the integrity of the PVML financial reporting process. 13. The PSP must support a high-quality and reliable PVML financial reporting process. The PSP is prohibited from undertaking any intervention that may potentially cause misstatements in the Financial Information and/or Financial Statements of PVML and/or significant weaknesses in the PVML financial reporting process. 14. Affiliated parties are prohibited from intervening with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, PSP, and/or Executive Officers in the PVML financial reporting process. 15. In the event that any weakness or condition that may potentially endanger the business continuity of PVML in the PVML financial reporting process is identified, the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, PSP, Executive Officers, employees, and/or other parties must provide such information to OJK. 16. The submission of information as referred to in point 15 above shall be made either online or offline to OJK and addressed to the relevant work unit at OJK responsible for the supervisory function in accordance with the domicile of the PVML's head office.	



B. SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SEOJK)

B. FINANCIAL SERVICES AUTHORITY CIRCULAR LETTERS (SEOJK)

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact to Company
1. SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SEOJK No. 10 Tahun 2025")	5 Desember 2025	1. Pihak sebagai berikut: a. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung; b. Setiap Pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen) atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung; c. Pengendali Perusahaan Terbuka yang memiliki saham dengan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau d. Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dengan hak suara menjadi kurang dari 5% (lima persen), diwajibkan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka kepada OJK. 2. Pemegang saham yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka diwajibkan menyampaikan laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 4 Tahun 2024"). 3. Penyampaian laporan dalam SEOJK ini meliputi: a. Laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) POJK No. 4 Tahun 2024; dan b. Laporan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) POJK No. 4 Tahun 2024, disampaikan kepada OJK melalui sistem elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem pelaporan secara elektronik. 4. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak: a. Terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka; atau b. Ditandatanganinya perjanjian atau kesepakatan terkait aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka yang menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 4 Tahun 2024. 5. Dalam menyediakan sistem publikasi laporan secara elektronik, OJK menunjuk Bursa Efek sebagai Penyedia Sistem Publikasi Secara Elektronik.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan SEOJK No. 10 Tahun 2025 dalam hal penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact to Company
1. SEOJK Number 10/SEOJK.04/2025 on Submission of Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on Activities of Pledged Shares of Public Companies Electronically ("SEOJK No. 10 of 2025")	December 5, 2025	1. The following parties: a. Members of the board of directors or members of the board of commissioners who own shares with voting rights, either directly or indirectly; b. Any party who owns shares with voting rights of at least 5% (five percent) of the shares of a public company, either directly or indirectly; c. Controllers of a public company who own shares with voting rights of the public company, either directly or indirectly; and/or d. Any party referred to in letter b whose percentage of ownership of shares with voting rights decreases to less than 5% (five percent), are required to submit a report of ownership or any changes in ownership of the Public Company's shares to OJK. 2. Shareholders who engage in Pledge Activities for Public Company Shares are required to submit a report of their Pledge Activities for Public Company Shares to the OJK in line with the provisions of OJK Regulation Number 4 of 2024 on Reports of Ownership or Any Changes in Ownership of Public Company Shares and Reports of Pledge Activities for Public Company Shares ("POJK No. 4 of 2024"). 3. Submission of reports in this OJK Circular includes: a. Reports on ownership or any changes in share ownership of a public company as referred to in Article 2 paragraphs (1), (2), and (3) of OJK Regulation No. 4 of 2024; and b. Reports on activities pledging shares of a public company as referred to in Article 6 paragraph (1) of OJK Regulation No. 4 of 2024, submitted to OJK through an electronic system provided by an electronic reporting system provider. 4. Submission of reports as referred to in point 3 must be made immediately, no later than 3 (three) business days after: a. The occurrence of ownership of voting rights over shares or any change in ownership of voting rights over shares of a public company; or b. The signing of an agreement or consensus regarding the activity of pledging shares of a public company that results in the fulfillment of the conditions referred to in Article 6 paragraph (2) of OJK Regulation No. 4 of 2024. 5. In providing an electronic report publication system, OJK appoints the Stock Exchange as the Electronic Publication System Provider.	The Company complies with and observes the provisions of SEOJK No. 10 of 2025 on the submission of reports on ownership or any changes in share ownership of public companies and reports on activities pledging shares of public companies.

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact to Company
2. SEOJK Nomor 20/SEOJK.08/2025 tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan ("SEOJK No. 20 Tahun 2025")	1 Januari 2027	1. PUJK memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi: a. Prosedur singkat layanan pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. b. Penanganan pengaduan yang diterima oleh PUJK dalam laporan tahunan, situs web PUJK, dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK. 2. Dalam hal PUJK memiliki situs web, PUJK wajib mempublikasikan prosedur singkat Layanan Pengaduan melalui situs web PUJK secara permanen dan terkini. 3. PUJK wajib mempublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima PUJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 4. Publikasi penanganan Pengaduan PUJK paling sedikit memuat: a. Jumlah Pengaduan yang diterima PUJK; b. Jumlah Pengaduan berdasarkan klasifikasi Pengaduan terkait jenis transaksi keuangan; dan c. Persentase dan status penyelesaian Pengaduan berdasarkan klasifikasi Pengaduan terkait jenis transaksi keuangan. 5. PUJK menunjuk salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab atas publikasi penanganan Pengaduan sesuai kebijakan internal PUJK. 6. PUJK memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan kepada OJK, terdiri atas: a. Laporan jenis produk dan/atau layanan serta permasalahan yang diadukan; b. Laporan Pengaduan yang diselesaikan dalam periode pelaporan; c. Laporan penanganan Pengaduan yang menjadi sengketa; d. Laporan penyebab Pengaduan; dan e. Laporan pemberitaan negatif produk dan/atau layanan. 7. Laporan Layanan Pengaduan disampaikan setiap semester paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan dan 10 Januari tahun berikutnya. 8. PUJK menunjuk salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan Layanan Pengaduan sesuai kebijakan internal PUJK. 9. Penyampaian laporan layanan pengaduan dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK. 10. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud angka 9 di atas mengalami gangguan, PUJK menyampaikan laporan secara daring melalui surat elektronik resmi PUJK kepada OJK dengan disertai salinan digital atau hasil pindai (*scan*) surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan Layanan Pengaduan.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan SEOJK No. 20 Tahun 2025 dalam publikasi prosedur layanan pengaduan dan penanganan pengaduan serta akan melakukan penyesuaian ketentuan internal Perseroan agar sesuai dengan SEOJK No. 20 Tahun 2025.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact to Company
2. SEOJK Number 20/ SEOJK.08/2025 on the Publication of Complaint Handling and Complaint Service Reports ("SEOJK No. 20 of 2025")	January 1, 2027	1. PUJK has the obligation to publish: a. A brief procedure for complaint services to consumers and/or the public. b. The handling of complaints received by PUJK in the annual report, PUJK's website, and/or other media officially managed by PUJK. 2. If PUJK has a website, PUJK must publish a brief procedure for Complaint Services via PUJK website permanently and up to date. 3. PUJK must publish the handling of Complaints received by PUJK at least 1 (one) time per year. 4. The publication of PUJK's Complaint handling must at least include: a. The number of Complaints received by PUJK; b. The number of Complaints based on the classification of Complaints related to the type of financial transaction; and c. The percentage and status of Complaint resolution based on the classification of Complaints related to the type of financial transaction. 5. PUJK shall designate one member of the Board of Directors who is responsible for the publication of Complaint handling in accordance with PUJK's internal policies. 6. PUJK has the obligation to prepare and submit a Complaint Service report to OJK, consisting of: a. A report on the types of products and/or services and the issues being complained of; b. A report on Complaints resolved within the reporting period; c. A report on the handling of Complaints that have become disputes; d. A report on the causes of Complaints; and e. A report on negative media coverage on products and/or services. 7. The Complaint Service report shall be submitted every semester, no later than July 10 of the current year and January 10 of the following year. 8. PUJK shall designate one member of the Board of Directors who is responsible for the preparation and submission of the Complaint Service report in accordance with PUJK's internal policies. 9. The submission of the Complaint Service report shall be made online through the electronic reporting system provided by OJK. 10. In the event that the electronic reporting system as referred to in point 9 above experiences a disruption, PUJK shall submit the report online via the official PUJK email to OJK, accompanied by a digital copy or scanned copy of the cover letter signed by a member of the Board of Directors responsible for the preparation and submission of the Complaint Service report.	The Company complies with and observes the provisions of SEOJK No. 20 of 2025 in publishing complaint service procedures and complaint handling, and has made the necessary adjustments to its internal policies to ensure alignment with SEOJK No. 20 of 2025.



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact to Company
3. SEOJK Nomor 28/ SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. ("SEOJK No. 28 Tahun 2025")	19 November 2025	1. Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi PVML didasarkan pada 5 (lima) prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. 2. PVML wajib menyusun laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap akhir tahun buku, paling sedikit memuat: a. Transparansi penerapan Tata kelola yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik. b. Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang Baik; dan c. Rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik. 3. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik dan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam: a. Pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS; b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; d. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah; e. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; f. Penerapan manajemen risiko; g. Penerapan strategi anti *fraud*; h. Penerapan fungsi kepatuhan; i. Penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal; j. Penanganan Benturan Kepentingan; k. Penerapan kebijakan remunerasi; l. Keterbukaan informasi; m. Etika bisnis; n. Kebijakan pembiayaan; o. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan p. rencana bisnis. 4. PVML harus memiliki, mengevaluasi, dan melakukan pengkinian prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola. 5. PVML harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas. 6. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML dinilai berdasarkan pengukuran: a. Struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*). b. Proses penerapan tata kelola (*governance process*). c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*).	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan SEOJK No. 28 Tahun 2025 dalam hal menyusun dan menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Perseroan serta akan melakukan penyesuaian ketentuan internal Perseroan agar sesuai dengan SEOJK No. 28 Tahun 2025.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact to Company
		7. Penetapan peringkat Tata Kelola yang Baik dan nilai masing-masing indikator dilakukan berdasarkan analisis terhadap: a. Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik; b. Pengukuran tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola; dan c. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola yang Baik yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. 8. Rencana tindak disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri. Rencana tindak dimaksud meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaian, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik. 9. Bagi PVML yang menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan faktor Tata Kelola yang Baik, laporan penerapan Tata Kelola yang Baik menjadi bagian dari laporan penilaian tingkat kesehatan yang disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya. 10. PVML sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas tidak perlu menyampaikan kembali laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada tanggal 30 April. 11. Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. 12. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, OJK menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman dalam situs web OJK dan/atau surat elektronik kepada PVML.	
3. SEOJK Number 28/ SEOJK.06/2025 on the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("SEOJK No. 28 of 2025")	November 19, 2025	1. The implementation of Good Corporate Governance for PVML is based on 5 (five) principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. 2. PVML must prepare a report on the Implementation of Good Corporate Governance at the end of each financial year, which shall at least include: a. Transparency in the implementation of Good Corporate Governance, disclosing all aspects of the application of the principles of Good Corporate Governance; b. A self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance; and c. An action plan, including the necessary corrective actions and the timeline for completion, if there are still deficiencies in the implementation of Good Corporate Governance. 3. Transparency in the implementation of Good Corporate Governance and the self-assessment of its implementation shall at least be reflected in: a. The performance of duties and authorities of shareholders and the GMS; b. The performance of duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors; c. The performance of duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners; d. The performance of duties, responsibilities, and authorities of the Sharia Supervisory Board; e. The completeness and performance of committee duties; f. The implementation of risk management; g. The implementation of the anti-fraud strategy; h. The implementation of the compliance function; i. The implementation of internal audit and external audit functions;	The Company complies with and observes the provisions of SEOJK No. 28 of 2025 in preparing and submitting the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for the Company and will make the necessary adjustment to its internal policies to ensure alignment with SEOJK No. 28 of 2025.



Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact to Company
		j. The handling of Conflicts of Interest; k. The implementation of the remuneration policy; l. Information disclosure; m. Business ethics; n. Financing policies; o. The implementation of sustainable finance, including the implementation of social and environmental responsibility; and p. The business plan. 4. PVML must have, evaluate, and update internal procedures regarding the implementation of Good Corporate Governance in the conduct of its business activities for each governance assessment factor. 5. PVML must conduct a periodic self-assessment covering at least 16 (sixteen) governance implementation assessment factors as referred to in point 3 above. 6. The assessment of the implementation of Good Corporate Governance in PVML shall be based on the measurement of: a. Governance structure and infrastructure (governance structure); b. The governance implementation process (governance process); and c. The results of governance implementation (governance outcome). 7. The determination of the Good Corporate Governance rating and the value of each indicator shall be based on an analysis of: a. The implementation of the principles of Good Corporate Governance; b. Governance measurement of the structure, process, and outcomes of governance implementation; and c. Other information related to Good Corporate Governance based on relevant data and information. 8. An action plan shall be prepared to enhance or improve the implementation of Good Corporate Governance as a follow-up to the results of the self-assessment. The action plan shall include the necessary corrective actions, the timeline for completion, and any constraints/obstacles to completion, if there are still deficiencies in the implementation of Good Corporate Governance. 9. For PVML that implements a soundness level assessment incorporating the Good Corporate Governance factor, the report on the Implementation of Good Corporate Governance shall form part of the soundness level assessment report submitted to OJK no later than February 15 of the following year. 10. PVML, as referred to in point 9 above, is not required to resubmit the report on the Implementation of Good Corporate Governance on April 30. 11. 1The report on the Implementation of Good Corporate Governance shall be submitted online through OJK's data communication network system. 12. In the event that OJK's data communication network system is not yet available, experiences technical disruptions, or in cases of force majeure, OJK shall deliver a notification or announcement on OJK's website and/or via electronic mail to PVML.	

C. PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ("PADK OJK")

C. REGULATIONS OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("PADK OJK")

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
1. PADK Nomor 37/ PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan ("PADK OJK No. 37 Tahun 2025")	2 Desember 2025	1. Ketentuan mengenai penyediaan informasi dan penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK OJK No. 37 Tahun 2025 ini. 2. Format ringkasan informasi produk dan/atau layanan dan contoh iklan sebagaimana dimuat dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK OJK No. 37 Tahun 2025 ini. 3. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan dan iklan yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan sebelum berlakunya PADK OJK No. 37 Tahun 2025 ini disesuaikan dengan format ringkasan informasi produk dan/atau layanan dan contoh iklan sebagaimana dimuat dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah PADK OJK No. 37 Tahun 2025 ini mulai berlaku.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan PADK OJK No. 37 Tahun 2025 dalam hal penyediaan dan penyampaian informasi untuk pemasaran layanan jasa keuangan serta penyesuaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan dan iklan agar sesuai dengan PADK OJK No. 37 Tahun 2025.
1. PADK Number 37/ PADK.08/2025 on the Provision of Information and Delivery of Information for Marketing of Financial Services Products and Services ("PADK OJK No. 37 of 2025")	December 2, 2025	1. Provisions on the provision of information and the delivery of information for the marketing of financial products and/or services are as set out in Appendix I, which is an integral part of this OJK Regulation No. 37 of 2025. 2. The format for summaries of product and/or service information and examples of advertisements are as set out in Appendix II and Appendix III, which are an integral part of this OJK Regulation No. 37 of 2025. 3. Summaries of product and/or service information and advertisements created by financial services business actors prior to the enforcement of this OJK Regulation No. 37 of 2025 must be adjusted to the format for summaries of product and/or service information and examples of advertisements as set out in Appendix II and Appendix III, which are an integral part of this OJK Regulation no later than 6 (six) months after the enforcement of this OJK Regulation No. 37 of 2025.	The Company complies with and observes the provisions of OJK PADK No. 37 of 2025 in terms of providing and delivering information for marketing financial services as well as adjusting the summary of product and/or service information and advertisements to comply with PADK OJK No. 37 of 2025.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
2. PADK Nomor 48/PADK.06/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("PADK OJK No. 48 Tahun 2025")	30 Desember 2025	1. Ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi PVML sebagaimana tercantum dalam: a. Lampiran I yang memuat penerapan Manajemen Risiko; b. Lampiran II yang memuat pedoman Manajemen Risiko; c. Lampiran III yang memuat struktur organisasi Manajemen Risiko; dan d. Lampiran IV yang memuat penilaian tingkat risiko. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK OJK No. 48 Tahun 2025 ini. 2. Pada saat PADK OJK No. 48 Tahun 2025 ini mulai berlaku, SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Pada saat PADK OJK No. 48 Tahun 2025 ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penilaian profil risiko pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada ketentuan: a. Romawi V SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah; b. Romawi V SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; c. Romawi V SEOJK Nomor 15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; d. Romawi V SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Perseroan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan PADK OJK No. 48 Tahun 2025 dalam hal penilaian profil risiko termasuk pelaporan penilaian profil risiko kepada OJK serta akan melakukan penyesuaian ketentuan internal Perseroan agar sesuai dengan PADK OJK No. 48 Tahun 2025.
2. PADK Number 48/PADK.06/2025 on the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("PADK OJK No. 48 of 2025").	December 30, 2025	1. The provisions on the Implementation of Risk Management for PVML as set out in: a. implementation of Risk Management; b. Appendix II containing the Risk Management guidelines; c. Appendix III containing the Risk Management organizational structure; and d. Appendix IV containing the risk level assessment, which constitute an integral and inseparable part of PADK OJK No. 48 of 2025. 2. At the time PADK OJK No. 48 of 2025 comes into effect, SEOJK Number 7/SEOJK.05/2021 on the Implementation of Risk Management for Financing Companies and Sharia Financing Companies is revoked and declared no longer valid. 3. At the time PADK OJK No. 48 of 2025 comes into effect, the provisions on risk profile assessment for Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, Venture Capital Companies, and Indonesia Exmbank under: a. Roman V of SEOJK Number 11/SEOJK.05/2020 on the Soundness Level Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies; b. Roman V of SEOJK Number 27/SEOJK.05/2021 on the Soundness Level Assessment of Infrastructure Financing Companies; c. Roman V of SEOJK Number 15/SEOJK.05/2022 on the Soundness Level Assessment of Indonesia Eximbank; d. Roman V of SEOJK Number 19/SEOJK.06/2024 on the Soundness Level Assessment of Venture Capital Companies and Sharia Venture Capital Companies; are revoked and declared no longer valid.	The Company complies with and observes the provisions of PADK OJK No. 48 of 2025 in terms of risk profile assessment, including reporting risk profile assessments to OJK and will make the necessary adjustments the Company's internal provisions to comply with PADK OJK No. 48 of 2025.

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of the Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
3. PADK Nomor 45/ PADK.06/2025 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah ("PADK OJK No. 45 Tahun 2025")	1 Juli 2027	1. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk menyampaikan laporan bulanan sampai dengan periode laporan bulan Mei 2027 tetap dilakukan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dalam SEOJK Nomor 26 /SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan. 2. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan sampai dengan periode laporan bulan Mei 2027 tetap dilakukan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 4/ SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dalam SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan. 3. Laporan bulanan yang harus disampaikan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan laporan lain. 4. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan laporan bulanan: a. Bagi Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan Format 1 PADK OJK No. 45 Tahun 2025 ini; b. Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS sesuai dengan Format 2 PADK OJK No. 45 Tahun 2025 ini. 5. Selain menyampaikan laporan bulanan sesuai Format 1, Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS harus menyampaikan laporan UUS sesuai Format 2 PADK OJK No. 45 Tahun 2025 ini secara terpisah. 6. Perusahaan harus menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 7. Perusahaan menunjuk anggota Direksi atau pejabat yang setara pada perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan. Anggota Direksi atau pejabat dimaksud menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan Bulanan. 8. Perusahaan harus melaporkan perubahan anggota Direksi atau pejabat dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas kepada OJK sesuai dengan Format 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PADK OJK No. 45 Tahun 2025 ini. 9. Penyampaian Laporan Bulanan disampaikan kepada OJK secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.	Perseroan akan tunduk dan memperhatikan ketentuan-ketentuan PADK OJK No. 45 Tahun 2025 dalam hal penyampaian laporan bulanan kepada OJK serta akan melakukan penyesuaian ketentuan internal Perseroan agar sesuai dengan PADK OJK No. 45 Tahun 2025.

Peraturan Regulation	Tanggal Keberlakuan Effective Date	*Summary* Peraturan Summary of the Regulation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
		10. Dalam hal perusahaan melakukan perubahan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas, perusahaan harus menyampaikan permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*). 11. Dalam hal: a. Sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum tersedia; dan/atau b. Sistem jaringan komunikasi OJK dan/atau perusahaan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, perusahaan menyampaikan Laporan Bulanan secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh OJK. 12. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b di atas, OJK menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan, surat tercatat, dan/atau surat elektronik kepada perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis. 13. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada huruf angka 11 huruf b terjadi pada perusahaan, maka perusahaan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar. 14. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, serta bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional perusahaan, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang.	
3. PADK Number 45/PADK.06/2025 on Monthly Reports of Financing Companies and Sharia Financing Companies ("PADK OJK No. 45 of 2025")	1 Juli 2027	1. The obligation of Financing Companies to submit monthly reports until the reporting period of May 2027 remains in accordance with the form, structure, and procedures for submitting reports as regulated in SEOJK Number 3/SEOJK.05/2016 on Monthly Reports of Financing Companies as amended in SEOJK Number 26/SEOJK.05/2019 on Amendments to SEOJK Number 3/SEOJK.05/2016 on Monthly Reports of Financing Companies. 2. The obligation of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units (UUS) to submit monthly reports until the reporting period of May 2027 remains in accordance with the format, structure, and reporting procedures as stipulated in OJK Circular No. 4/SEOJK.05/2016 on Monthly Reports of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies, as amended by OJK Circular No. 27/SEOJK.05/2019 on Amendments to OJK Circular No. 4/SEOJK.05/2016 on Monthly Reports of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies.	The Company will comply with and observe the provisions of PADK OJK No. 45 of 2025 in terms of submitting monthly reports to OJK and will make the necessary adjustment the Company's internal provisions to comply with PADK OJK No. 45 of 2025.

Peraturan Regulation	**Tanggal Keberlakuan** Effective Date	***Summary* Peraturan** Summary of the Regulation	**Dampak terhadap Perseroan** Impact on the Company
		3. The monthly reports that must be submitted consist of a statement of financial position, a statement of profit or loss and other comprehensive income, a cash flow statement, an analysis of the conformity of assets and liabilities, and other reports. 4. The format, structure, and guidelines for preparing monthly reports: a. For financing companies are in accordance with Format 1 of PADK OJK No. 45 of 2025; b. For sharia financing companies and sharia business units (UUS) in line with Format 2 of PADK OJK No. 45 of 2025. 5. In addition to submitting monthly reports in accordance with Format 1, Financing Companies with UUS must submit a separate UUS report in accordance with Format 2 of OJK Regulation No. 45 of 2025. 6. Companies must submit monthly reports to OJK no later than the 10th of the following month. 7. Companies appoint a member of the Board of Directors or an equivalent official within the Company to be responsible for the preparation and presentation of the Monthly Report. The said member of the Board of Directors or official shall appoint a drafting officer to prepare, verify, and submit the Monthly Report. 8. Companies must report changes in the members of the Board of Directors or officers and/or drafting officers as referred to in point 7 above to OJK in accordance with Format 3, which is an integral part of PADK OJK No. 45 of 2025. 9. Monthly reports are submitted to OJK online through OJK's data communication network system. 10. If the Company changes the preparation officer as referred to in point 7 above, the Company must submit a request to obtain and/or change the user ID and password. 11. In the event that: a. OJK's data communication network system as referred to in point 9 is not yet available; and/or b. OJK and/or Company's communication network system experiences technical disruptions or force majeure The Company shall submit the Monthly Report online in electronic form to the email address designated by OJK. 12. In the event of a technical disruption or force majeure as referred to in point 11 letter b above, OJK shall provide notification or announcement on the Financial Services Authority website, by registered mail, and/or by email to the Company on the same day after the technical disruption occurs. 13. In the event of a technical disruption or force majeure as referred to in point 11 letter b at the Company, the Company shall provide written notification to OJK on the same day after the technical disruption or force majeure occurs. 14. Force majeure as referred to in point 11 letter b includes fire, mass riots, war, armed conflict, sabotage, pandemics, cyberattacks, and natural disasters such as earthquakes or floods, non-natural disasters, and/or social disasters that disrupt the Company's operational activities, as evidenced by a statement from an authorized agency official.	



Perubahan Kebijakan **Akuntansi dan Pengungkapan**

Changes in Accounting Policies and Disclosures

Di tahun 2025, Perseroan telah menerapkan standar dan sejumlah amandemen/penyesuaian/interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025.

In 2025, the Company's implemented the relevant Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) standards and a number of amendments/adaptations/ interpretations effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2025.

Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, kecuali sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

The adoption of new or revised SFAS did not result in any changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or prior years, except as disclosed below:

Standar Akuntansi Accounting Standards	**Adopsi atas IFRS/IAS** Adoption to IFRS/IAS	**Alasan Perubahan dan Ringkasan Perubahan** Reasons for Changes and Summary for Changes	**Dampak terhadap Laporan Keuangan** Impact on Financial Statements
Amandemen PSAK Nomor 221 Amendment of SFAS Number 221	IAS Nomor 21 IAS Number 21	Ketika kondisi ekonomi suatu negara memburuk, misalnya hiperinflasi, akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah mata uang negara tersebut tertukarkan menjadi mata uang lain serta kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan. When a country's economic conditions deteriorate, for example, during hyperinflation, it becomes difficult to determine whether the country's currency can be exchanged for another currency and what exchange rate should be used when the currency is not exchangeable.	-

Teknologi Informasi
Information Technology



Perseroan terus meningkatkan keandalan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung automasi pengolahan data, verifikasi proses pembiayaan, akuisisi dan manajemen risiko. Perseroan telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengembangkan penggunaan teknologi dalam rangka mendukung tujuan jangka panjang pada aspek teknologi informasi.

Pengembangan teknologi informasi Perseroan pada tahun 2025 lebih menitikberatkan kepada pengembangan proses bisnis, dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada pelanggan. Secara garis besar, pengembangan TI Perseroan meliputi solusi, infrastruktur perangkat keras (*hardware*), dan keamanan (*security*). Perseroan memfokuskan pengembangan teknologi dalam mendukung proses bisnis agar lebih cepat dan tepat untuk meningkatkan pembiayaan berkualitas.

Implementasi strategi dalam mendukung kebutuhan bisnis dan operasional Perseroan melalui pengembangan aplikasi inti (*Core System*). Perseroan juga terus mengembangkan digitalisasi dalam berbagai aspek dengan senantiasa memerhatikan aspek keamanan data dan kesesuaian dengan regulasi terkait yang berlaku di Indonesia.

Perseroan juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti dalam mengakses data kependudukan yang membantu *profiling* calon konsumen dalam menghasilkan *credit scoring* secara lebih presisi. Ketepatan dalam *credit scoring* ini mendukung proses akuisisi yang lebih *clean* sehingga kualitas pembiayaan dapat terjaga.

The Company continues to enhance the reliability of Information Technology (IT) to support the automation of data processing, verification of financing processes, acquisition, and risk management. The Company has undertaken various initiatives to develop the use of technology in support of its long-term objectives in the area of information technology.

The Company's information technology development in 2025 placed greater emphasis on enhancing business processes and improving infrastructure to increase efficiency and customer service. In general, the Company's IT development encompassed solutions, hardware infrastructure, and security. The Company focused its technology development on supporting business processes to be faster and more accurate in order to enhance the quality of financing.

The Company implemented strategies to support its business and operational needs through the development of core applications (Core System). The Company also continued to expand digitalization across various aspects, while consistently paying close attention to data security and compliance with applicable regulations in Indonesia.

The Company also entered into cooperation with third parties, including in accessing population data, to support prospective customer profiling and generate more precise credit scoring. This improved accuracy in credit scoring supports a cleaner acquisition process, thereby helping to maintain financing quality.



Kerja sama dengan beberapa vendor pengembang aplikasi dilakukan Perseroan untuk menyempurnakan sistem seperti *credit scoring* sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mendukung keandalan teknologi, Perseroan juga terus melakukan pembaruan perangkat komputasi yang digunakan oleh karyawan dan infrastruktur *Core System*.

Perseroan juga mengembangkan sistem terkait produk syariah, sentralisasi operasional, dan fitur pada aplikasi "KAWAN". Selain itu, Perseron melalui Divisi Teknologi Informasi juga telah melakukan penyesuaian sistem terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku mulai 17 Oktober 2024. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam melindungi data konsumen sesuai dengan ketentuan pemerintah dan regulator jasa keuangan.

Dalam aspek *security*, Perseroan telah meningkatkan fitur keamanan data berbasis *Application Programming Interface* (API). Pendekatan API ini terutama untuk melindungi data-data penting Perseroan dari serangan *cyber*. Perseroan juga terus meningkatkan level keamanan pengembangan aplikasi.

Untuk memastikan keandalan operasional teknologi informasi, Perseroan melaksanakan *renewal* Sertifikasi ISO 27001:2022 pada tahun 2025 guna menjaga keberlanjutan standar keamanan informasi dan kesiapan menghadapi tantangan teknologi.

Sosialisasi mengenai IT *Security Awareness* dan pengembangan aplikasi baru juga terus dilakukan Perseroan kepada seluruh karyawan. Selain itu, Perseroan mengikutsertakan karyawan yang terkait teknologi informasi dalam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata kelola teknologi informasi Perseroan berfokus pada pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan jangka panjang, mengelola risiko, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Implementasi tata kelola teknologi informasi Perseroan memiliki kerangka kerja yang meliputi struktur, proses, dan hasil. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan TI dalam mendukung visi, misi, dan tujuan Perseroan. Dalam praktiknya, Direksi dibantu oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi yang beranggotakan manajemen, perwakilan kepala divisi pengguna TI dan kepala divisi penyelenggara TI.

The Company collaborated with several application development vendors to enhance systems such as credit scoring in accordance with organizational needs. To support technological reliability, the Company also continued to upgrade computing devices used by employees as well as its Core System infrastructure.

The Company also developed a system related to sharia products, operational centralization, and features in "KAWAN" application. In addition, through its Information Technology Division, the Company has adjusted its systems to comply with Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, which came into effect on October 17, 2024. These efforts are part of the Company's commitment to safeguarding customer data in accordance with government regulations and financial services authorities' requirements.

In terms of security, the Company has enhanced data security features based on Application Programming Interfaces (API). This API-based approach is primarily intended to protect the Company's critical data from cyberattacks. The Company also continued to strengthen the security level of its application development.

To ensure the reliability of information technology operations, the Company carried out the renewal of ISO 27001:2022 Certification in 2025 to maintain the sustainability of information security standards and readiness in addressing technological challenges.

The Company has continuously conducted dissemination on IT Security Awareness and the development of new applications for all employees. In addition, the Company has involved employees related to information technology in training programs to enhance their competencies.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The Company's information technology governance focuses on the effective and efficient management and use of information technology to achieve long-term objectives, manage risks, and comply with applicable regulations.

The implementation of the Company's information technology governance is based on a framework that encompasses structure, processes, and outcomes. The Board of Directors is responsible for managing IT in support of the Company's vision, mission, and objectives. In practice, the Board of Directors is assisted by the Information Technology Steering Committee, which comprises management, representatives of heads of IT user divisions, and the head of the IT provider division.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi berpedoman pada Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi yang telah disahkan dan ditandatangani pada 22 November 2021.

Pada tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana pengembangan TI yang searah dengan rencana kegiatan usaha Perseroan. Rekomendasi yang diberikan telah mempertimbangkan kondisi obyektif dan internal Perseroan.

Untuk memastikan proses tata kelola TI berjalan dengan baik, Perseroan telah membentuk satu peraturan perusahaan yang mengadopsi standar internasional seperti ISO dan COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*).

Dalam aspek keamanan, Perseroan telah menerapkan sistem akses dual kontrol pada setiap sistem aplikasi yang diimplementasikan. Sistem itu bertujuan untuk meningkatkan level keamanan sistem layanan inti yang dioperasikan. Selain itu, Perseroan memiliki *back up* dan pemulihan data sebagai bagian dari manajemen risiko untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan sistem.

Perseroan juga telah melakukan internal audit dan eksternal audit untuk memastikan implementasi TI sesuai dengan regulasi, etika bisnis, dan prinsip berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Laporan audit diserahkan kepada Direksi sebagai bahan utama dalam pengambilan kebijakan strategis terkait teknologi.

Dari hasil audit yang dilakukan pada tahun 2025, tidak ditemukan pelanggaran maupun kelemahan yang signifikan dalam sistem operasional teknologi informasi Perseroan. Hal ini menandakan teknologi Perseroan dinilai cukup andal dan memadai dalam mendukung pengembangan bisnis maupun pengelolaan risiko.

Di tahun 2025 ini, Perseroan juga telah berhasil mempertahankan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 serta meraih beberapa penghargaan bergengsi, seperti:

1. TOP LEADER on Digital Implementation 2025 yang diselenggarakan oleh IT Works;
2. TOP DIGITAL # Stars 5 yang diselenggarakan oleh IT Works;
3. Golden Trophy yang diselenggarakan oleh IT Works;
4. The BEST INDONESIA IT & DIGITAL OPERATIONAL EXCELLENCE AWARD - 2025 sebagai PLATINUM Award (A) (Very Excellent) (5 Star *****).

In carrying out its duties and responsibilities, the Information Technology Steering Committee is guided by the Information Technology Steering Committee Charter, which was approved and signed on November 22, 2021.

In 2025, the Information Technology Steering Committee provided recommendations to the Board of Directors regarding IT development plans aligned with the Company's business activity plan. These recommendations were formulated after taking into account the Company's objective conditions and internal circumstances.

To ensure that IT governance processes are implemented effectively, the Company has established a corporate regulation that adopts international standards such as ISO and COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies).

In terms of security, the Company has implemented a dual control access system for every application system deployed. This system is intended to enhance the security level of the core service systems in operation. In addition, the Company has established data backup and recovery mechanisms as part of its risk management to anticipate potential system failures.

The Company has also conducted internal and external audits to ensure that the implementation of IT complies with regulations, business ethics, and sustainability principles in support of the achievement of the Company's objectives. Audit reports are submitted to the Board of Directors as a key reference in making strategic technology-related policy decisions.

Based on the audit results conducted in 2025, no significant violations or weaknesses were identified in the Company's information technology operational systems. This indicates that the Company's technology is considered sufficiently reliable and adequate in supporting business development as well as risk management.

In 2025, the Company also successfully maintained its ISO/IEC 27001:2022 certification and received several prestigious awards, as follows:

1. TOP LEADER on Digital Implementation 2025 organized by IT Works;
2. TOP DIGITAL # Stars 5 organized by IT Works;
3. Golden Trophy organized by IT Works; and
4. The BEST INDONESIA IT & DIGITAL OPERATIONAL EXCELLENCE AWARD - 2025 as PLATINUM Award (A) (Very Excellent) (5 Star *****).



RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2026

Perseroan menempatkan teknologi informasi sebagai bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Peninjauan secara berkala dan pengembangan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Perseroan untuk mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan.

Alokasi sumber daya teknologi pada 2026 ditujukan untuk meningkatkan layanan berbasis digital guna memberikan kemudahan serta pengalaman baru bagi para pelanggan dalam menunjang perkembangan bisnis Perseroan.

Pengembangan dan peningkatan utilisasi aplikasi yang sudah dirilis pada tahun sebelumnya tetap menjadi fokus pengembangan teknologi informasi Perseroan. Pengembangan akan dilakukan dengan penambahan modul, peningkatan koneksi serta perbaikan *service* kepada konsumen yang dapat diharapkan menjadi faktor pendorong peningkatan bisnis Perseroan.

Perseroan juga akan meningkatkan sisi keamanan Sistem Teknologi untuk bisa memberikan rasa aman kepada setiap pengguna perangkat teknologi Perseroan. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, Perseroan senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku seperti terkait dengan pemberlakuan aturan pelindungan data pribadi yang sudah dimulai tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengembangkan penggunaan teknologi dalam rangka mendukung tujuan jangka panjang Perseroan untuk menjadi perusahaan pembiayaan terdepan dalam aspek teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi Perseroan di tahun 2025 lebih menitikberatkan kepada pengembangan proses bisnis, dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada pelanggan.

Rencana penting terkait dengan pengembangan teknologi informasi yang telah terealisasi oleh Perseroan pada tahun 2025 adalah:

1. Pengembangan sistem terkait produk syariah.
2. Pengembangan sistem Sentralisasi Operasional.
3. Pengembangan fitur pada aplikasi "KAWAN".
4. Penyesuaian sistem terkait kebijakan Pelindungan Data Konsumen.
5. Peremajaan perangkat Pusat Pemulihan Bencana.
6. Pembaharuan perangkat jaringan perusahaan.
7. Peningkatan perangkat keamanan IT perusahaan.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN FOR 2026

The Company positions information technology as an integral component in supporting the achievement of organizational objectives. Periodic reviews and continuous development will be carried out in accordance with the Company's needs and the challenges it faces, in order to support sustainable business growth.

The allocation of technology resources in 2026 was directed toward enhancing digital-based services to provide greater convenience and new experiences for customers, thereby supporting the Company's business development.

The development and enhancement of the utilization of applications released in previous years remain a key focus of the Company's information technology development. Such development will be carried out through the addition of modules, improved connectivity, and enhanced customer services, which are expected to serve as drivers of the Company's business growth.

The Company will also strengthen the security aspects of its Technology Systems to provide a sense of safety for all users of the Company's technological devices. To enhance customer confidence, the Company will continue to comply with applicable regulations, including those related to the implementation of personal data protection rules that came into effect in the previous year.

In 2025, the Company took various initiatives to develop technology utilization in order to support its long-term goal of becoming a leading finance Company in the information technology sector. The Company's information technology development in 2025 focused on business process development and infrastructure improvement to enhance efficiency and customer service.

Important plans related to information technology development that have been realized by the Company in 2025 are:

1. Development of systems related to sharia products.
2. Development of an Operational Centralization system.
3. Development of features on the "KAWAN" application.
4. Adjustment of systems related to Consumer Data Protection policies.
5. Renewal of Disaster Recovery Center equipment.
6. Renewal of company network equipment.
7. Improvement of company IT security equipment.



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

05

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola yang Baik di Perseroan dijalankan melalui penguatan manajemen risiko, pengendalian internal, serta kebijakan terukur untuk menjaga ketahanan usaha dan menciptakan nilai berkelanjutan.

At the Company's, Good Corporate Governance is carried out through strengthening risk management, internal control, and measurable policies to safeguard business resilience and create sustainable value.





Pencapaian Terbaik dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Best Achievements in Corporate Governance Practices

Selama periode tahun 2025, Perseroan memperkuat kualitas penerapan tata kelola melalui pengawasan Dewan Komisaris yang lebih ketat, peningkatan kesiapan risiko, dan internalisasi budaya integritas. Capaian berikut mencerminkan konsistensi dan kematangan praktik governansi di lingkup Perseroan.

During the period of 2025, the Company's strengthened the quality of its governance practices through tighter oversight by the Board of Commissioners, enhanced risk preparedness, and internalization of an integrity culture. The following achievements reflect the consistency and maturity of governance practices within the Company's.



Assessment Tata Kelola yang Baik
Corporate Governance Assessment

Pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan penilaian sendiri terhadap penerapan tata kelola yang baik, dengan hasil penilaian Indikator Individual peringkat 2 dengan definisi peringkat yaitu mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan tata kelola yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

In 2025, the Company conducted a self-assessment of its good governance implementation, with the Individual Indicator rating 2 reflecting that the Company's management has implemented good governance in general. This is reflected in the adequate fulfillment of good governance principles. In the event of weakness in the implementation of good governance principles, this weakness is generally less significant and can be resolved through normal action by the Company's management.



Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris
Effectiveness of The Supervision by The Board of Commissioners

- Kehadiran Rapat 96%
- 96% Meeting Attendance



Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Risk Management and Internal Control

- Tindak lanjut audit internal: 98,72%
- Follow-up on internal audit: 98.72%



Integritas dan WBS
Integrity and WBS

- Penyelesaian WBS : 100%
- *Zero Retaliation*
- Pelatihan Anti *Fraud* & Anti *Fraud Awareness*
- WBS Resolution: 100%
- Zero Retaliation
- Anti-Fraud & Anti-Fraud Awareness Training

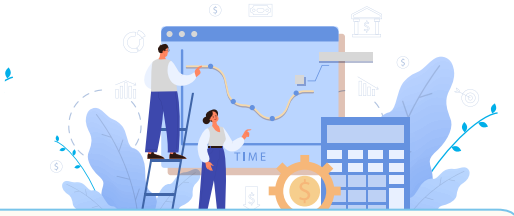

Penghargaan dan Pengakuan Pihak Eksternal Perusahaan
External Awards and Recognition for The Company

Meraih The Best Indonesia GCG Award IX 2025 Gold Award (B) – Excellent (4 Star) pada kategori Public Company–Multifinance (Aset > Rp7 Triliun) dari Economic Review

Won the Best Indonesia GCG Award IX 2025 Gold Award (B) – Excellent (4 Star) in the Public Company–Multifinance category (Assets > Rp7 Trillion) from the Economic Review

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy

Penerapan tata kelola yang baik bagi Perseroan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja Perseroan melalui penguatan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas pengelolaan usaha. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang diterapkan secara konsisten, Perseroan mampu memastikan setiap kebijakan dan keputusan strategis disusun berdasarkan pertimbangan risiko yang memadai serta mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya yang lebih disiplin, efisien, dan terarah, sehingga kinerja operasional dan keuangan Perseroan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penerapan tata kelola yang baik bagi Perseroan juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat reputasi dan daya saing Perseroan. Tata kelola yang baik bagi Perseroan membantu memitigasi risiko hukum, operasional, dan reputasi, serta menumbuhkan budaya integritas dan etika bisnis di seluruh organisasi. Dengan fondasi tata kelola yang kuat, Perseroan memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika bisnis, mendukung keberlanjutan usaha, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola yang baik bagi Perseroan tersebut menjadi salah satu faktor tercapainya kinerja Perseroan dalam memperoleh aset sebesar Rp7,37 triliun dan modal meningkat dibanding tahun sebelumnya.

KOMITMEN PERSEROAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan dinamika industri pembiayaan yang semakin kompleks dan berbasis digital, Perseroan berkomitmen untuk memastikan operasional dan bisnis Perseroan tetap dijalankan secara *prudent* dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dalam setiap pengambilan keputusan dan strategi Perseroan dengan disertai penguatan ekosistem digital yang memiliki peran penting dalam mendukung komitmen Perseroan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kinerja operasional, dan menjaga pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

Selama tahun 2025, Perseroan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola yang baik dengan mengacu pada ketentuan regulator dan *best practices* yang berlaku yaitu dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik industri, mengembangkan sistem,

The implementation of good corporate governance for the Company's makes a significant contribution to improving the Company's performance through enhanced decision-making quality and more effective business management. By consistently applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, the Company is able to ensure that every policy and strategic decision is formulated based on adequate risk considerations and effective oversight mechanisms. This, in turn, encourages more disciplined, efficient, and focused resource management, thereby enabling the Company's operational and financial performance to be sustainably maintained.

On the other hand, the implementation of good corporate governance for the Company's also plays an important role in enhancing investor and stakeholder confidence, while strengthening the Company's reputation and competitiveness. Good corporate governance for the Company's helps mitigate legal, operational, and reputational risks, and fosters a culture of integrity and business ethics throughout the organization. With a strong governance foundation, the Company has greater flexibility and resilience in responding to business dynamics, supporting business sustainability, and creating long-term value for all stakeholders.

The implementation of good corporate governance for the Company has been one of the factors contributing to the Company's performance in achieving total assets of Rp7.37 trillion and increasing capital compared to that of the previous year.

COMPANY'S COMMITMENT TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

In facing the increasingly complex and digital-driven economic developments and the dynamics of financing industry, the Company is committed to ensuring that its operations and business remain prudent and based on the principles of good governance. The good governance principles are implemented effectively and sustainably in every decision-making and strategy of the Company, accompanied by strengthened digital ecosystem, which has an important role in supporting the Company's commitment to enforce competitiveness, improve operational performance, and maintain sustainable business growth of the Company.

Throughout 2025, the Company continued to evaluate and refine the implementation of good corporate governance by referring to applicable regulatory requirements and prevailing best practices. This was carried out through adjustments and enhancements to policies and operational procedures to ensure compliance with applicable regulations and the adoption of industry best practices, the development of systems, and

serta meningkatkan *awareness* seluruh insan Perseroan. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi, tata kelola berbasis data, dan peningkatan kompetensi pengawasan, Perseroan terus memperkuat efektivitas pengendalian internal, memastikan kualitas proses bisnis, serta menjaga perlindungan menyeluruh bagi konsumen dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan regulator dan perkembangan praktik keberlanjutan global, menegaskan tekad Perseroan untuk menciptakan nilai jangka panjang yang tidak hanya tercermin dalam kinerja keuangan, tetapi juga dalam kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha.

Dengan berlandaskan tata kelola yang kuat, budaya integritas yang melekat, dan pengawasan yang berkesinambungan, Perseroan berkomitmen untuk melangkah menuju masa depan sebagai perusahaan pembiayaan yang kompetitif, kredibel, dan berkelanjutan.

DASAR-DASAR PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK

Perseroan telah melaksanakan tata kelola yang baik dengan mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait penerapan tata kelola yang baik juga mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan tata kelola yang baik di Perseroan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) antara lain:
    a. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
    b. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
    c. POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
    d. POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
    e. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
    f. POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

increased awareness among all Company personnel. Moreover, through the use of technology, data-driven governance, and enhanced supervisory competencies, the Company continues to strengthen the effectiveness of internal controls, ensure the quality of business processes, and maintain comprehensive protection for consumers and stakeholders. This approach is aligned with regulatory policy directions and the development of global sustainability practices, underscoring the Company's determination to create long-term value that is reflected not only in financial performance, but also in public trust and business sustainability.

Based on strong governance, an ingrained culture of integrity, and continuous supervision, the Company's committed to moving towards the future as a competitive, credible, and sustainable financing company.

REFERENCES FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company implements Good Corporate Governance (GCG) in accordance with regulatory requirements, internal policies, and industry best practices. Furthermore, these internal provisions are closely aligned with the Company's Articles of Association. This ensures that all formulated policies not only comply with prevailing regulations but also remain consistent with the fundamental governing documents of the Company.

The laws and regulations that serve as references for the implementation of good corporate governance in the Company include:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.
3. Law Number 8 of 1995 on Capital Markets.
4. Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
5. Financial Services Authority Regulations (POJK) and Circular Letter of The Financial Services Authority (SEOJK), including:
    a. POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
    b. POJK Number 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
    c. POJK Number 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies.
    d. POJK Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies.
    e. POJK Number 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Guidelines of Audit Committees.
    f. POJK Number 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter.

g. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
h. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
i. POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
j. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
k. POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
l. POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
m. POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
n. POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
o. POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
p. POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
q. SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
r. SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
s. SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
t. SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
u. SEOJK Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

g. POJK Number 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper Tests for Key Parties of Financial Services Institutions.
h. POJK Number 35/POJK.05/2018 on the Implementation of Financing Company Business, as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.
i. POJK Number 10/POJK.05/2019 on the Implementation of Sharia Financing Company Business and Sharia Business Units of Financing Companies as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.
j. POJK Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders of Public Companies.
k. POJK Number 28/POJK.05/2020 on the Assessment of the Soundness Level of Non-Bank Financial Services Institutions.
l. POJK Number 47/POJK.05/2020 on Business Licensing and Institution of Financing Companies and Sharia Financing Companies, as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.
m. POJK Number 4/POJK.05/2021 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.
n. POJK Number 9 of 2023 on the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
o. POJK Number 4 of 2024 on Reports on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on Share Pledging Activities of Public Companies.
p. POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
q. SEOJK Number 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies.
r. SEOJK Number 11/SEOJK.05/2020 on the Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
s. SEOJK Number 22/SEOJK.05/2021 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.
t. SEOJK Number 18/SEOJK.03/2023 on Procedures for the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
u. SEOJK Number 28/SEOJK.06/2025 on Report on Implementing Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

The Company is consistently committed to implementing good corporate governance principles, which include the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

Prinsip Tata Kelola Perseroan
Company Governance Principles



Penjelasan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

The explanation of good corporate governance principles above and their general implementation within the Company is as follows:

Prinsip Dasar Basic Principle	**Penjelasan** Explanation	**Penerapan di Lingkup Perseroan** Implementation within the Company
Keterbukaan Transparency	Keterbukaan mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparency includes openness in the decision-making process as well as openness in disclosing and providing information that is relevant and easily accessible to stakeholders.	▪ Perseroan mengungkapkan informasi material yang relevan dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan melalui *website* Perseroan, antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keterbukaan informasi lainnya terkait kegiatan usaha Perseroan. ▪ Penerapan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan pada rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris ataupun Direksi. ▪ Seluruh *stakeholders* Perseroan mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. ▪ The Company discloses relevant and timely material information that is easily accessible to stakeholders through its website, including the Annual Report, Financial Statements, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and other information disclosures related to the Company's business activities. ▪ Transparency is applied in the decision-making processes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings, and committee meetings under both the Board of Commissioners and the Board of Directors. ▪ All Company stakeholders have access to information in accordance with the principle of transparency.

Prinsip Dasar Basic Principle	**Penjelasan** Explanation	**Penerapan di Lingkup Perseroan** Implementation within the Company
Akuntabilitas Accountability	Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Accountability includes clarity of functions and the implementation of responsibilities.	▪ Perseroan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi, dan usaha Perseroan yang dapat dilihat pada struktur organisasi Perseroan. ▪ Direksi dan Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan. ▪ Perseroan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, kebijakan mengenai sistem penghargaan dan hukuman, serta kebijakan mengenai sistem pendeteksian dini di Perseroan. ▪ Perseroan membentuk komite untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi ataupun Dewan Komisaris. ▪ Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan. ▪ The Company defines clear functions, structures, systems, and responsibilities for each corporate body. These are aligned with the Company's vision, mission, and strategic objectives, as evidenced in its organizational structure. ▪ The Board of Directors and the Board of Commissioners are required to report their performance to shareholders through the Annual GMS. ▪ The Company establishes a Code of Ethics and Code of Conduct, a policy on reward and punishment systems, and a policy on early detection systems within the Company. ▪ The Company forms committees to support the duties and functions of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners. ▪ The Company establishes a check-and-balance system in its management structure.
Tanggung Jawab Responsibility	Tanggung jawab kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Responsibility for ensuring that management aligns with applicable laws and regulations, ethical values, as well as established standards, principles, and practices.	▪ Perseroan menetapkan Policy Manajemen Risiko, membentuk fungsi manajemen risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Pemantau Risiko sebagai bentuk tanggung jawab Direksi terhadap penerapan manajemen risiko. ▪ Perseroan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan Perseroan kepada konsumen atau masyarakat sekitar yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. ▪ The Company establishes a Risk Management Policy, forms a risk management function, a Risk Management Committee, and a Risk Oversight Committee as part of the Board of Directors' responsibility in implementing risk management. ▪ The Company carries out Corporate Social Responsibility programs as a form of the Company's sustainable contribution to consumers and surrounding communities that can create positive impacts on the environment.
Independensi Independency	Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Independency refers to a condition that is managed autonomously and professionally, free from conflicts of interest and from any influence or pressure that is inconsistent with applicable laws and regulations, ethical values, and established standards, principles, and practices	▪ Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari segala tekanan dan intervensi dari pihak lain. ▪ Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh personel Perseroan senantiasa berupaya menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. ▪ The Company is managed independently and professionally, free from any pressure or intervention from other parties. ▪ The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Company personnel consistently strive to avoid any form of conflict of interest in decision-making, as stipulated in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct.
Kewajaran Fairness	Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Fairness includes equality, balance, and justice in fulfilling stakeholders' rights arising from agreements, laws and regulations, as well as ethical values, standards, principles, and practices.	▪ Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran. ▪ Perseroan memberikan kesempatan kepada Pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Perseroan menghadirkan kondisi kerja yang baik bagi seluruh personil Perseroan sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya penilaian kinerja secara periodik serta kesempatan promosi yang sama bagi seluruh karyawan. ▪ The Company consistently considers the interests of all stakeholders based on the principle of fairness. ▪ The Company provides shareholders with the opportunity to attend and vote at the GMS in accordance with applicable regulations. ▪ The Company provides a conducive work environment for all personnel in line with its capabilities and prevailing laws and regulations, along with periodic performance evaluations and equal promotion opportunities for all employees.

Penetapan Standar Kualitas Tata Kelola yang Baik di Lingkup Perseroan

Determination of Good Corporate Governance Quality Standards within the Company

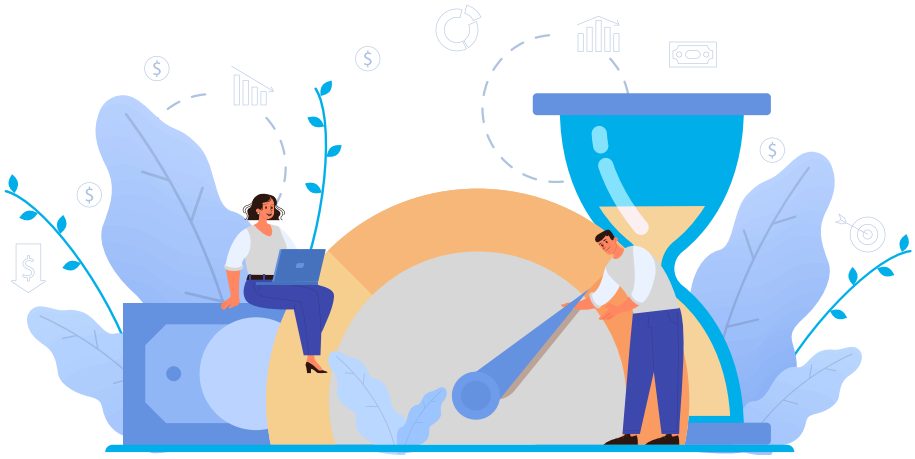

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara konsisten memperkuat penerapan tata kelola yang baik melalui berbagai pengembangan kerangka, kebijakan, dan mekanisme pengawasan. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berjalan secara efektif dan terukur di seluruh lini organisasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui serangkaian inisiatif utama berikut:

1. Penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan internal terkait tata kelola yang baik bagi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi Perseroan.
2. Meningkatkan kualitas transparansi dan publikasi kepada masyarakat melalui laporan tahunan Perseroan.
3. Melaksanakan sosialisasi terkait tata kelola yang baik pada Perseroan di antaranya mengenai:
   a. Peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator dalam rangka menjaga penerapan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Nilai-nilai Perseroan dan/atau kode etik Perseroan.

Throughout 2025, the Company consistently strengthened the implementation of good corporate governance through the development of various frameworks, policies, and supervisory mechanisms. Various strategic measures have been undertaken to ensure that the implementation of good corporate governance principles is effective and measurable across all levels of the organization.

These efforts were made through the following main initiatives:

1. Preparing and/or improving internal policies related to good corporate governance for the Company in accordance with laws and regulations and the Company's conditions.
2. Enhancing the quality of transparency and public disclosure through the Company's annual report.
3. Conducting good governance-related dissemination activities within the Company, including:
   a. New regulations issued by regulators in order to maintain the Company's compliance with applicable laws and regulations.
   b. The Company's values and/or the Company's code of ethics.

PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkuat penerapan tata kelola yang baik antara lain sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2025

Throughout 2025, the Company carried out various activities aimed at improving quality and strengthening the implementation of good corporate governance, including the following:

01	**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.	**Amendments to the Company's Articles of Association** Amendments to the Company's Articles of Association were made to align them with POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
02	**Pengangkatan Komite-Komite Perseroan** Penunjukan dan pengangkatan untuk periode selanjutnya terhadap anggota: ▪ Komite Pemantau Risiko.	**Appointment of Company Committees** The designation and appointment for the subsequent term of members of: ▪ The Risk Oversight Committee

03	**Penyempurnaan dan/atau Penyusunan Kebijakan Internal** Penyempurnaan dan/atau penyusunan kebijakan internal Perseroan terkait tata kelola yang baik, seperti: ▪ Piagam Komite Pemantau Risiko. ▪ Piagam Nominasi dan Remunerasi. ▪ Kebijakan ketentuan layanan Legal Counsel & Anti Fraud Division.	**Refinement and/or Formulation of Internal Policies** The refinement and/or formulation of the Company's internal policies related to good corporate governance, including: ▪ Risk Monitoring Committee Charter. ▪ Nomination and Remuneration Charter. ▪ Policy on Legal Counsel & Anti-Fraud Division services provisions.
04	**Kegiatan Teknologi Informasi** ▪ Pengembangan sistem terkait produk syariah; ▪ Pengembangan sistem Sentralisasi Operasional; ▪ Pengembangan fitur pada aplikasi "KAWAN"; ▪ Penyesuaian sistem terkait kebijakan Pelindungan Data Konsumen; ▪ Peremajaan perangkat Pusat Pemulihan Bencana; ▪ Pembaharuan perangkat jaringan Perseroan; ▪ Peningkatan perangkat keamanan IT Perseroan.	**Information Technology Activities** ▪ Development of systems related to sharia products; ▪ Development of an Operational Centralization system; ▪ Development of features on the "KAWAN" application; ▪ Adjustment of systems related to Consumer Data Protection policies; ▪ Renewal of Disaster Recovery Center equipment; ▪ Renewal of company network equipment; ▪ Improvement of company IT security equipment;
05	**Sosialisasi** Melaksanakan sosialisasi tata kelola yang baik pada Perseroan mengenai: ▪ Peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator dalam rangka penerapan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Nilai-nilai perusahaan. ▪ Budaya anti korupsi dan anti gratifikasi.	**Dissemination Activities** Conducting good corporate governance dissemination within the Company regarding: ▪ New regulations issued by regulators to ensure the Company's compliance with applicable laws and regulations. ▪ Corporate values. ▪ An anti-corruption and anti-gratification culture.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

PENILAIAN INTERNAL

Dalam upaya menegakkan praktik tata kelola yang baik yang unggul, Perseroan secara sistematis dan berkala mengevaluasi kualitas penerapannya. Hasil evaluasi dijadikan dasar strategis untuk merumuskan langkah perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola yang baik, terutama pada area yang masih memerlukan penyempurnaan. Setiap tahun buku, penilaian internal dilaksanakan melalui metode *self assessment* menggunakan kertas kerja penilaian internal. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan berdasarkan:

1. POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2. POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. SEOJK Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Penilaian tata kelola yang baik berfungsi sebagai alat strategis bagi manajemen untuk menilai kekuatan sekaligus area yang perlu diperkuat dalam penerapan tata kelola yang baik. Kegiatan ini mendorong peningkatan kualitas implementasi secara berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap aspek yang diukur mendukung tata kelola perusahaan yang efektif dan transparan.

PROSEDUR

Berdasarkan ketentuan OJK, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri terhadap 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola
   Penilaian struktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang baik agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan perusahaan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION ASSESSMENT

INTERNAL ASSESSMENT

In an effort to uphold superior good governance practices, the Company systematically and periodically evaluates the quality of its implementation. The evaluation results serve as a strategic basis for formulating steps to improve and strengthen the implementation of good governance, particularly in areas requiring refinement. Each fiscal year, an assessment is conducted internally through a self-assessment method using an internal assessment worksheet. This assessment is carried out based on:

1. POJK Number 28/POJK.05/2020 on the Assessment of the Soundness Level of Non-Bank Financial Services Institutions.
2. POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
3. SEOJK Number 28/SEOJK.06/2025 on the Report on Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

The good corporate governance assessment serves as a strategic tool for management to evaluate both the strengths and the areas that need to be strengthened in the Company's Governance implementation. This activity encourages continuous improvement of implementation quality while ensuring that every measured aspect supports effective and transparent corporate governance.

PROCEDURES

Based on OJK regulations, the Company must conduct a self-assessment of 3 (three) Governance aspects, namely:

1. Governance Structure
   The assessment of the governance structure aims to evaluate the adequacy of good corporate governance structure and infrastructure to ensure that the implementation of good corporate governance principles delivers outcomes that meet the expectations of the Company's stakeholders.

2. Proses Tata Kelola
   Penilaian proses tata kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Hasil Penerapan Tata Kelola
   Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan perusahaan sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan.

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 28/ SEOJK.05/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip tata kelola yang baik, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang paling sedikit meliputi 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola yang baik yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi.
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah.
5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
6. Penerapan manajemen risiko.
7. Penerapan strategi anti-*fraud*.
8. Penerapan fungsi kepatuhan.
9. Penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal.
10. Penanganan Benturan Kepentingan.
11. Penerapan kebijakan remunerasi.
12. Keterbukaan informasi.
13. Etika bisnis.
14. Kebijakan pembiayaan.
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
16. Rencana bisnis.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola yang baik dengan melibatkan antara lain Direksi, Internal Audit Division, serta fungsi atau unit kerja lainnya yang terkait di Perseroan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas penerapan tata kelola Perseroan.

2. Governance Process
   The assessment of the governance process aims to evaluate the effectiveness of the implementation of governance principles, supported by adequate governance structure and infrastructure, so that it delivers outcomes aligned with stakeholders' expectations.
3. Governance Outcome
   The assessment of governance outcomes aims to evaluate the quality of the outcomes that meet the expectations of the Company's stakeholders as a result of the implementation of good corporate governance principles, supported by sufficient Company's governance structure and infrastructure.

ASSESSMENT CRITERIA

The criteria used in the assessment are as stipulated in SEOJK of the Republic of Indonesia No. 28/SEOJK.06/2025 on the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. In implementing the 5 (five) good corporate governance principles, the Company must conduct a self-assessment that covers at least 16 (sixteen) good corporate governance implementation assessment factors, namely:

1. Implementation of the duties and authorities of shareholders and the General Meeting of Shareholders.
2. Implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors.
3. Implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners.
4. Implementation of the duties, responsibilities, and authorities of the Sharia Supervisory Board.
5. Completeness and implementation of committees' duties.
6. Implementation of risk management.
7. Implementation of anti-fraud strategies.
8. Implementation of the compliance function.
9. Implementation of the function internal audit and external audit.
10. Handling Conflict of Interest.
11. Implementation of the remuneration policy.
12. Information disclosure.
13. Business ethics.
14. Financing policy.
15. Implementation of sustainable finance, including the implementation of social and environmental responsibility, and
16. Business plan.

ASSESSORS

The Company conducts a self-assessment of its good corporate governance implementation by involving, among others, the Board of Directors, the Internal Audit Division, and other relevant functions or work units within the Company to produce a comprehensive and structured assessment of the effectiveness of the Company's governance implementation.

HASIL PENILAIAN TAHUN 2025

Dalam upaya memastikan praktik tata kelola yang baik, Perseroan menerapkan tiga aspek utama *governance* sebagai dasar penilaian tata kelola yang baik. Pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan penilaian sendiri terhadap penerapan tata kelola yang baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

2025 ASSESSMENT RESULTS

To ensure good governance practices, the Company implements three main aspects of governance as the basis for assessing good governance. In 2025, the Company conducted a self-assessment of its good governance implementation, with the following assessment results:

Indikator Indicator	**Peringkat** Rating	**Definisi Peringkat** Rating Definition
Individual	2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan tata kelola yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan. Reflecting that the Company's management has applied generally sound good governance. This is reflected in adequate compliance with good governance principles. If there are weaknesses in the implementation of good governance principles, these weaknesses are generally minor and can be resolved through normal management actions.

PENILAIAN EKSTERNAL

Pada Tahun 2025, selain melakukan penilaian sendiri, penerapan tata kelola yang baik juga dinilai oleh pihak eksternal dengan mengikuti kegiatan apresiasi/*award* sebagai berikut:

- Indonesia Good Corporate Governance Award IX 2025
  a. Pihak Penyelenggara:
     Economic Review
  b. Pihak yang melakukan penilaian:
     Dewan Juri Indonesia GCG Awards - IX – 2025
  c. Kriteria Penilaian:
     Aspek penilaian meliputi antara lain sistem, *Website*, *Annual Report* 2023 (publikasi 2024), Implementasi GCG, manajemen risiko, manajemen kepatuhan dan data publik pada Perseroan.
  d. Hasil penilaian:
     Perseroan berhasil meraih penghargaan The Best Indonesia GCG Award - IX - 2025 Gold Award (B) Excellent (4 Star****) dengan rincian sebagai berikut:
     Kategori : Public Company - Multifinance - Asset > Rp.7 T
     Sektor : Multifinance
     Nilai : 86.50 (dari 100)
     Tingkat : Excellent
  e. Penilaian : Aspek penilaian meliputi antara lain sistem, *Website, Annual Report* 2023 (publikasi 2024), implementasi GCG, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, serta data publik di perusahaannya, yang berada pada tingkat UNGGUL, sehingga mencerminkan tingkat kematangan tata kelola yang sangat tinggi serta efektivitas pengelolaan perusahaan dalam mendukung keberlanjutan usaha, peningkatan kinerja bisnis, dan penguatan kepercayaan para pemangku kepentingan.

EXTERNAL ASSESSMENT

In 2025, in addition to self-assessment, the implementation of good governance was assessed by external parties through the following appreciation/award activities:

- Indonesia Good Corporate Governance Award IX 2025
  a. Organizer:
     Economic Review
  b. Assessing Party:
     Panel of Judges of Indonesia GCG Awards - IX – 2025
  c. Assessment Criteria:
     Assessment aspects include system, website, 2023 Annual Report (published in 2024), GCG implementation, risk management, compliance management, and public data within the Company.
  d. Assessment Results:
     The Company successfully received the Best Indonesia GCG Award - IX - 2025 Gold Award (B) Excellent (4 Stars****) with the following details:
     Category : Public Company - Multifinance - Assets > Rp7 T
     Sector : Multifinance
     Score : 86.50 (out of 100)
     Level : Excellent
  e. Assessment: Assessment aspects included system, website, 2023 Annual Report (published in 2024), GCG implementation, risk management, compliance management, and public data within the Company, which were all at SUPERIOR level, reflecting a very high level of governance maturity and the effectiveness of Company management in supporting business sustainability, improving business performance, and strengthening stakeholders' trust.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA [GRI 2-9]

Penerapan tata kelola yang baik menjadi landasan utama dalam pengelolaan perusahaan sehingga Perseroan mampu memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan bisnis Perseroan. Komitmen ini diwujudkan melalui sistem pengelolaan yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung efektivitas penerapan tata kelola yang baik di seluruh lini organisasi, Perseroan telah menetapkan struktur tata kelola perusahaan yang mencerminkan prinsip *check and balance* dalam penerapan tata kelola yang baik di Perseroan.

GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISMS [GRI 2-9]

The implementation of good governance is the main foundation of corporate management, enabling the Company to strengthen stakeholders' trust and ensure business continuity. This commitment is achieved through a management system that upholds transparency, accountability, and the Company's compliance with laws and regulations. To support the effective implementation of good governance across all organizational levels, the Company has established a corporate governance structure that reflects the check-and-balance principle in applying good governance within the Company.

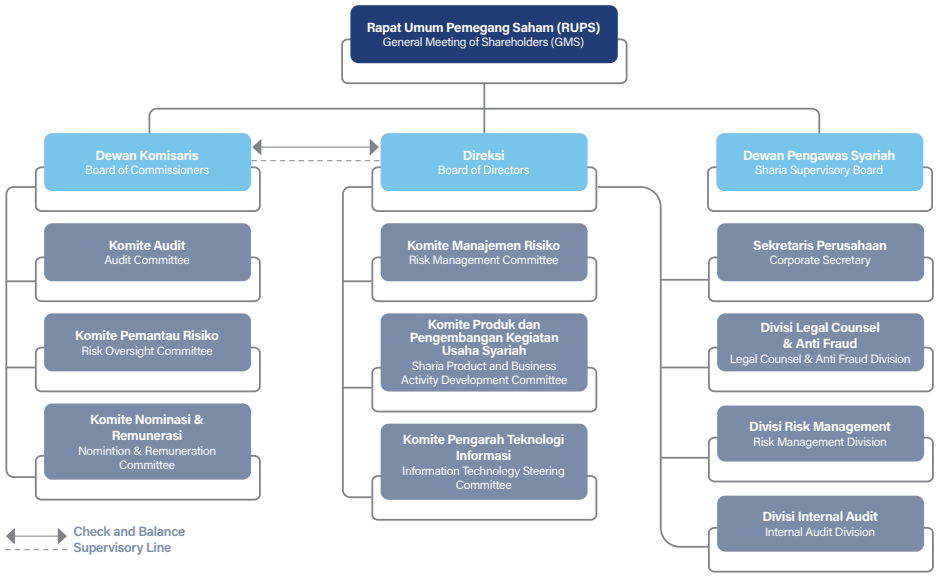

Struktur tata kelola di Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Dewan Pengawas Syariah.
5. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Komite-komite di bawah Direksi yaitu: Komite Manajemen Risiko, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, serta Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Sekretaris Perusahaan.
8. Legal Counsel & Anti Fraud Division, Risk Management Division, dan Internal Audit Division.

The Company's governance structure consists of:

1. The Company's General Meeting of Shareholders (GMS).
2. The Board of Commissioners.
3. The Board of Directors.
4. The Sharia Supervisory Board.
5. Committees under the Board of Commissioners, namely: The Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Nomination and Remuneration Committee;
6. Committees under the Board of Directors, namely: The Risk Management Committee, Sharia Product and Business Activity Development Committee, and Information Technology Steering Committee.
7. Corporate Secretary.
8. The Legal Counsel & Anti-Fraud Division, Risk Management Division, and Internal Audit Division.

SOFT STRUCTURE (KEBIJAKAN) TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melakukan upaya penyempurnaan *soft* struktur tata kelola yang baik bagi Perseroan melalui sosialisasi di antaranya mengenai:

1. Peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator dalam rangka penerapan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nilai-nilai perusahaan.
3. Budaya anti korupsi dan anti gratifikasi.

Perseroan memiliki kebijakan internal terkait tata kelola yang baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan tata kelola yang baik. Beberapa kebijakan Perseroan terkait tata kelola yang baik meliputi:

SOFT STRUCTURE (POLICIES) OF CORPORATE GOVERNANCE

Throughout 2025, the Company made efforts to improve the soft structure of good governance for the Company through dissemination, among others regarding:

1. New regulations issued by regulators in order to ensure the Company's compliance provisions of applicable laws and regulations.
2. Corporate values.
3. An anti-corruption and anti-gratification culture.

The Company has internal policies related to good corporate governance as a means of ensuring compliance with regulations, as well as supporting the infrastructure and implementation of good corporate governance. Several of the Company's policies related to good corporate governance include:

Perihal Subject	**Kebijakan Internal** Internal Policies
Ketentuan umum General Provisions	▪ Anggaran Dasar. ▪ Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku (termasuk di dalamnya ketentuan mengenai *insider trading*, *Whistleblowing System*, dan benturan kepentingan) ▪ Articles of Association. ▪ Code of Ethics and Guidelines for Conduct (including provisions regarding insider trading, Whistleblowing System, and conflicts of interest)
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Good Corporate Governance Guidelines.
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	▪ Piagam Direksi. ▪ Piagam Dewan Komisaris. ▪ Board of Directors Charter. ▪ Board of Commissioners Charter.
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Pedoman Dewan Pengawas syariah. The Sharia Supervisory Board Guidelines.
Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi baru Orientation Policy for Newly Appointed Members of the Board of Commissioners and Board of Directors	Kebijakan Program Orientasi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Baru Nomor 084/SK/FPIR/03-23 Versi 01, tanggal mulai berlaku 26 Juni 2023. Orientation Program Policy for Newly Appointed Members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners Number 084/SK/FPIR/03-23 Version 01, effective as of June 26, 2023.
Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners	▪ Piagam Komite Pemantau Risiko. ▪ Piagam Komite Audit. ▪ Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. ▪ Risk Oversight Committee Charter. ▪ Audit Committee Charter. ▪ Nomination and Remuneration Committee Charter.
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Kebijakan Nomor 233/SK/LCAF/12-25 Versi 01 perihal Ketentuan Sekretaris Perusahaan, tanggal mulai berlaku 19 Desember 2025. Policy Number 233/SK/LCAF/12-25 Version 01 on Provisions for Corporate Secretary, effective date December 19, 2025.
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Affiliated Transactions and Conflicts of Interest	Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Material Nomor 134/SK/OPP/05-24 Versi 03, tanggal mulai berlaku 29 Mei 2024. Guidelines on Affiliated Transactions, Conflict of Interest Transactions, and Material Transactions Number 134/SK/OPP/05-24 Version 03, effective as of May 29, 2024.

Perihal Subject	**Kebijakan Internal** Internal Policies
Anti *Fraud*	▪ Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* Nomor 307/SK/OPP/12-24 Versi 3, tanggal mulai berlaku 3 Februari 2025. ▪ Kebijakan Nomor 088/SK/OPP/03-25 Versi 02 perihal Penilaian Risiko Sistem Manajemen Anti Penyuapan, tanggal mulai berlaku 28 Maret 2025. ▪ Guidelines for the Implementation of the Anti-Fraud Strategy Number 307/SK/OPP/12-24 Version 3, effective as of February 3, 2025. ▪ Policy Number 088/SK/OPP/03-25 Version 02 concerning Anti-Bribery Management System Risk Assessment, effective date March 28, 2025.
Audit	▪ Piagam Audit Internal. ▪ Manual Internal Audit. ▪ Internal Audit Charter. ▪ Internal Audit Manual.
Manajemen Risiko Risk Management	Policy Manajemen Risiko Perseroan. Company Risk Management Policy.
Anti Money Laundering	▪ Kebijakan Nomor 131/SK/OPP/05-24 Versi 04 perihal Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanggal mulai berlaku 19 Juni 2024. ▪ Kebijakan Nomor 121/SK/LCAF/05-25 Versi 01 perihal Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM, tanggal mulai berlaku 16 Mei 2025. ▪ Policy Number 131/SK/OPP/05-24 Version 04 concerning Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction, effective date June 19, 2024. ▪ Policy Number 121/SK/LCAF/05-25 Version 01 concerning the Assessment of the Risk of Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of Proliferation and Mass Destruction, effective date May 16, 2025.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perseroan. The Company's Anti-Bribery Management System Policy.
Pengadaan Procurement	▪ Kebijakan Nomor 279/SK/OPP/11-14 Versi 4 perihal Ketentuan *Vendor Management* dan Pengadaan Barang & Jasa, tanggal mulai berlaku 18 Desember 2024. ▪ Prosedur *Vendor Management* dan Pengadaan Barang & Jasa Nomor 031/PCD/OPP/09-24 versi 02, tanggal mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024. ▪ Policy Number 279/SK/OPP/11-14 Version 4 concerning Vendor Management and Procurement of Goods & Services, effective date December 18, 2024. ▪ Vendor Management and Procurement of Goods & Services Procedure Number 031/PCD/OPP/09-24 version 02, effective date September 25, 2024.
Remunerasi Remuneration	▪ Kebijakan Nomor 054/SK/HCSD/03-22 Versi 01 perihal Kebijakan Remunerasi yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, serta Pemberian Insentif Jangka Panjang kepada Direksi, tanggal mulai berlaku tanggal 1 April 2022. ▪ Kebijakan Nomor 055/SK/HCSD/03-22 Versi 01 perihal Kebijakan Remunerasi yang Berlaku bagi Karyawan, serta Pemberian Insentif Jangka Panjang kepada Karyawan, tanggal mulai berlaku tanggal 7 Maret 2022. ▪ Policy Number 054/SK/HCSD/03-22 Version 01 regarding Remuneration Policy applicable to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, DPS, and Long-Term Incentives for the Board of Directors, effective from April 1, 2022. ▪ Policy Number 055/SK/HCSD/03-22 Version 01 regarding Remuneration Policy Applicable to Employees, as well as the Provision of Long-Term Incentives to Employees, effective date March 7, 2022.

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Shareholders and General Meeting of Shareholders

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan pihak yang secara sah memiliki saham Perseroan, baik individu maupun badan hukum. Pelaksanaan hak pemegang saham tetap menghormati kemandirian Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Kewenangan pemegang saham dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Informasi mengenai komposisi pemegang saham Perseroan disajikan pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERLINDUNGAN HAK DAN PERLAKUAN SETARA BAGI PEMEGANG SAHAM [G-08]

Perseroan menjamin bahwa setiap pemegang saham memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Perseroan memastikan seluruh hak pemegang saham terlindungi, antara lain hak untuk menerima informasi material secara akurat dan tepat waktu, menghadiri RUPS, memberikan suara, memperoleh dividen, serta menerima bagian atas aset Perseroan jika terjadi likuidasi sesuai ketentuan.

Perseroan tidak mentolerir praktik yang dapat merugikan pemegang saham minoritas atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak manapun. Seluruh keputusan korporasi dijalankan secara transparan dan bebas dari benturan kepentingan.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Dalam RUPS, pemegang saham berhak untuk:

1. Menghadiri dan memberikan suara;
2. Mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait agenda rapat;
3. Memperoleh informasi yang akurat dan relevan terkait agenda rapat;
4. Menerima dividen dan pembagian keuntungan sesuai ketentuan;
5. Mendapat akses atas risalah dan hasil pemungutan suara RUPS.

SHAREHOLDERS

Shareholders are parties who legally own the Company's shares, whether individuals or legal entities. The execution of shareholders' rights continues to respect the independence of the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out the Company's supervisory and management functions. Shareholders' authority is exercised through the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the provisions, laws and regulations, and the Articles of Association.

Information on the composition of the Company's shareholders is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

PROTECTION OF RIGHTS AND EQUAL TREATMENT OF SHAREHOLDERS [G-08]

The Company's ensures that all shareholders are treated equally without discrimination, including minority and foreign shareholders. The Company's safeguards all shareholder rights, including the right to receive accurate and timely material information, attend the GMS, vote, receive dividends, and obtain a share of the Company's assets in the event of liquidation, in accordance with applicable provisions.

The Company does not tolerate practices that may harm minority shareholders or provide undue benefits to any party. All corporate decisions are executed transparently and free from conflicts of interest.

SHAREHOLDERS' RIGHTS AND AUTHORITIES IN THE GMS

In the GMS, shareholders have the right to:

1. Attending and voting;
2. Raising questions and expressing opinions on the meeting agenda;
3. Receiving accurate and relevant information related to the meeting agenda;
4. Receiving dividends and profit distributions in accordance with applicable provisions;
5. Accessing the minutes and voting results of the GMS.

Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk antara lain:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (jika ada);
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan;
4. Menyetujui laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Perseroan yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menggunakan hak-haknya secara setara dan transparan. Setiap pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta ketentuan OJK dan BEI.

Dalam pelaksanaan rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan menyampaikan hak suara atas setiap mata acara secara langsung maupun melalui sistem elektronik eASY. KSEI. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku.

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RUPS

Pelaksanaan RUPS Perseroan di tahun 2025 diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan berikut:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Through the GMS, shareholders have the authority to, among other things:
1. Approving amendments to the Articles of Association;
2. Appointing and dismissing members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (if any);
3. Appointing a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements;
4. Approving the annual report and ratifying the financial statements.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The GMS is the highest resolution-adoption forum of the Company which provides shareholders with the opportunity to exercise their rights equally and transparently. Each GMS is conducted in accordance with the Company's Articles of Association, the Limited Liability Company Law, and the regulations of OJK and IDX.

During the meeting, shareholders are given the opportunity to ask questions, express opinions, and cast their votes on each agenda item, either directly or through the electronic system eASY.KSEI. GMS resolutions are adopted based on deliberation to reach consensus or by voting, in accordance with the applicable regulations.

LEGAL REFERENCES FOR GMS CONVENTION

The Company's GMS in 2025 was convened in compliance with the prevailing legal provisions, as regulated in the following laws and regulations:
1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Law Number 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.
3. POJK Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. POJK Number 14 of 2025 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Bondholders, and the General Meeting of Sukuk Holders.
5. The Company's Articles of Association.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS

Perseroan memastikan setiap penyelenggaraan RUPS, baik Tahunan maupun Luar Biasa, terlaksana secara tertib dan sesuai regulasi. Di tahun 2025, mekanisme RUPS telah dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar serta ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara elektronik. Seluruh agenda RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa juga difasilitasi melalui sistem elektronik untuk menjamin keterlibatan pemegang saham secara efektif, transparan, dan akuntabel.

PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN DALAM PERHITUNGAN SUARA RUPS

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan melakukan penunjukan pihak independen yakni PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek dalam melakukan penghitungan/validasi suara pada RUPS.

PENERBITAN INFORMASI RUPS

Perseroan mempublikasikan pemberitahuan, panggilan, ringkasan risalah RUPS pada situs *website* PT Bursa Efek Indonesia, situs *website* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *website* Perseroan.

PELAKSANAAN RUPS DI TAHUN 2025

Di tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 Maret 2025. Seluruh rapat tersebut dilaksanakan di Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Perseroan menyediakan *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) untuk mempermudah dan mempercepat interaksi antara Pemegang Saham dan Perseroan.

MECHANISM FOR CONVENING GMS

The Company ensures that every GMS, whether Annual or Extraordinary, conducted systematically and in compliance with regulations. In 2025, the GMS mechanism was implemented in accordance with the Articles of Association as well as OJK Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the GMS of Public Companies and OJK Regulation Number 14 of 2025 on the implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders electronically. All agendas of the Annual and Extraordinary GMS were also facilitated through an electronic system to ensure shareholder participation is effective, transparent, and accountable.

APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTY FOR GMS VOTE COUNTING

Based on OJK Circular Number 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, the Company appoints an independent party, namely PT Sinartama Gunita as the Securities Administration Bureau to conduct the counting/validation of votes at the GMS.

ISSUANCE OF GMS INFORMATION

The Company publishes notices, invitations, and summaries of the GMS minutes on Indonesia Stock Exchange website, Indonesia Central Securities Depository website, and the Company's website.

GMS CONVENTION IN 2025

In 2025, the Company convened 2 (two) GMS, namely the Annual GMS and the Extraordinary GMS, on March 25, 2025. All meetings were convened in the Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jl. Asia Afrika Number 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270. The Company provided the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) to facilitate and expedite interactions between Shareholders and the Company.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA TANGGAL 25 MARET 2025

CONVENING THE ANNUAL GMS AND EXTRAORDINARY GMS ON MARCH 25, 2025

1. Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025

1. Stages of the Annual GMS and Extraordinary GMS on March 25, 2025

Tahapan Stages	**Pelaksanaan** Convention	**Ketentuan** Conditions
Pemberitahuan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada Regulator Notice of the Annual GMS and Extraordinary GMS to the Regulator	**RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: 032/II/CS/2025 tertanggal 7 Februari 2025. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 25, 2025** Notification on the plan to hold the Meeting was submitted to the Financial Services Authority through Letter Number: 032/II/CS/2025 dated February 7, 2025.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Notification regarding the GMS plan must be submitted to OJK no later than 5 (five) working days before the announcement date of the GMS to the public, excluding the GMS announcement date.
Pengumuman **Announcement**		
Publikasi Publication	**RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Pengumuman Rapat yang diumumkan *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan pada tanggal 14 Februari 2025. **Annual GMS and Extraordinary GMS on March 25, 2025** The Meeting announcement was published on the official website of Indonesia Stock Exchange, the official website of Indonesia Central Securities Depository, and the Company's official website on February 14, 2025.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman RUPS pada situs *website* penyedia e-RUPS, situs *website* bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company has complied with the obligation to announce the GMS on e-GMS provider's website, stock exchange website, and the Public Company's website in both Indonesian and foreign languages, no later than 14 (fourteen) days prior to the notice of the GMS, excluding the announcement date and the notice date.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator	**RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Bukti Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 14 Februari 2025. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 25, 2025** Proof of the announcement of the Annual GMS and Extraordinary GMS was submitted to OJK and IDX on February 14, 2025.	
Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa beserta penjelasan mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa **Invitation to the Annual GMS and Extraordinary GMS along with the Explanation of the Agenda Items of the Annual GMS and Extraordinary GMS**		
Publikasi Publication	**RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan pada tanggal 3 Maret 2025. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 25, 2025** The Meeting invitation was published on the official website of Indonesia Stock Exchange, official website of Indonesia Central Securities Depository, and the Company's official website on March 3, 2025.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan Pemanggilan RUPS pada situs *website* penyedia e-RUPS, situs *website* bursa efek dan situs *website* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company has complied with the provisions for announcing the GMS invitation on e-GMS provider's website, stock exchange website, and the Public Company's website in both Indonesian and foreign languages, no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS, excluding the notice date and the date of the GMS.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator	**RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Bukti Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 3 Maret 2025. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 25, 2025** Proof of the invitation to the Annual GMS and Extraordinary GMS was submitted to OJK and IDX via e-Reporting on March 3, 2025.	
Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa **Annual GMS and Extraordinary GMS Convention**		
RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa Selasa, 25 Maret 2025 **Annual GMS & Extraordinary GMS** Tuesday, March 25, 2025		
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa **Summary of Minutes (Results) of the Annual GMS and Extraordinary GMS**		

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Conditions
Publikasi Publication	**RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa diumumkan pada situs *website* Bursa Efek Indonesia, situs *website* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs *website* Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 27 Maret 2025. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 25, 2025** The summary of the minutes of the Extraordinary GMS was published on Indonesia Stock Exchange website, Indonesia Central Securities Depository website, and the Company's website www.wom.co.id on March 27, 2025.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada situs *website* penyedia e-RUPS, situs *website* bursa efek dan situs *website* Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company has complied with the obligation to announce the Summary of GMS Minutes on e-GMS provider's website, stock exchange website, and the Public Company's website in both Indonesian and foreign languages, no later than 2 (two) business days after the GMS was held.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator	**RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (*e-Reporting*) tanggal 27 Maret 2025. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 25, 2025** Proof of the announcement was submitted to OJK (Capital Market and Supervisory Authority) and IDX (e-Reporting) on March 27, 2025.	
Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa **Minutes of Annual GMS and Extraordinary GMS**		
RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025 Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK pada tanggal 24 April 2025. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 25, 2025** The minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS were submitted to OJK on April 24, 2025.		

2. Proses Penyelenggaraan

2. Convention Process

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	
Tanggal dan Waktu Date and Time	**RUPS Tahunan** Selasa, 25 Maret 2025 Pukul 09.29 WIB - 10.22 WIB **RUPS Luar Biasa** Selasa, 25 Maret 2025 Pukul 10.26 WIB - 10.52 WIB	**Annual GMS** Tuesday, March 25, 2025 From 09:29 AM to 10:22 AM **Extraordinary GMS** Tuesday, March 25, 2025 From 10:26 AM to 10:52 AM
Tempat Venue	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno – Senayan Jakarta Pusat 10270	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika Number 8 Gelora Bung Karno – Senayan Jakarta Pusat 10270
Kuorum Quorum	**RUPS Tahunan** Pemegang Saham: 3.241.264.329 saham (93,1%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham. **RUPS Luar Biasa** Pemegang Saham: 3.243.427.329 saham (93,16%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham.	**Annual GMS** Shareholders: 3,241,264,329 shares (93.1%) of the total issued and fully paid-up shares at the time of the Meeting, which amounted to 3,481,481,480 shares. **Extraordinary GMS** Shareholders: 3,243,427,329 shares (93.16%) of the total issued and fully paid-up shares at the time of the Meeting, which amounted to 3,481,481,480 shares.
Pimpinan RUPS Chairman of GMS	**RUPS Tahunan** Ibu Sarastri Baskoro selaku Presiden Komisaris/ Komisaris Independen berdasarkan Keputusan tanggal 17 Februari 2025. **RUPS Luar Biasa** Ibu Sarastri Baskoro selaku Presiden Komisaris/ Komisaris Independen berdasarkan Keputusan tanggal 17 Februari 2025.	**Annual GMS** Mrs. Sarastri Baskoro as President Commissioner/ Independent Commissioner based on the Decision dated February 17, 2025. **Extraordinary GMS** Mrs. Sarastri Baskoro as President Commissioner/ Independent Commissioner based on the Decision dated February 17, 2025.

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including the President Commissioner	**RUPS Tahunan** ▪ Sarastri Baskoro: Presiden Komisaris/ Komisaris Independen ▪ Thilagavathy Nadason: Komisaris ▪ Taufik Aulia: Komisaris ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E.: Komisaris Independen **RUPS Luar Biasa** ▪ Sarastri Baskoro: Presiden Komisaris/ Komisaris Independen ▪ Thilagavathy Nadason: Komisaris ▪ Taufik Aulia: Komisaris ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E.: Komisaris Independen	**Annual GMS** ▪ Sarastri Baskoro: President Commissioner/ Independent Commissioner ▪ Thilagavathy Nadason: Commissioner ▪ Taufik Aulia: Commissioner ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Independent Commissioner ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E.: Independent Commissioner **Extraordinary GMS** ▪ Sarastri Baskoro: President Commissioner/ Independent Commissioner ▪ Thilagavathy Nadason: Commissioner ▪ Taufik Aulia: Commissioner ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Independent Commissioner ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E.: Independent Commissioner
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including the President Director	**RUPS Tahunan** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: Presiden Direktur ▪ Njauw Vido Onadi: Wakil Presiden Direktur ▪ Cincin Lisa Hadi: Direktur ▪ Anthony Yuarez Panggabean: Direktur ▪ Wibowo: Direktur **RUPS Luar Biasa** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: Presiden Direktur ▪ Njauw Vido Onadi: Wakil Presiden Direktur ▪ Cincin Lisa Hadi: Direktur ▪ Anthony Yuarez Panggabean: Direktur ▪ Wibowo: Direktur	**Annual GMS** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: President Director ▪ Njauw Vido Onadi: Vice President Director ▪ Cincin Lisa Hadi: Director ▪ Anthony Yuarez Panggabean: Director ▪ Wibowo: Director **Extraordinary GMS** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: President Director ▪ Njauw Vido Onadi: Vice President Director ▪ Cincin Lisa Hadi: Director ▪ Anthony Yuarez Panggabean: Director ▪ Wibowo: Director
Kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah Attendance of members of the Sharia Supervisory Board	**RUPS Tahunan** Dr. H. Abdul Jabar Majid,M.A.: Ketua **RUPS Luar Biasa** Dr. H. Abdul Jabar Majid,M.A.: Ketua	**Annual GMS** Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.: Chairman **Extraordinary GMS** Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.: Chairman
Undangan Invitees	**RUPS Tahunan** - **RUPS Luar Biasa** -	**Annual GMS** - **Extraordinary GMS** -
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Independent Party to conduct the quorum calculation and voting for the resolution of the Annual GMS and Extraordinary GMS	PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) dan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn PT Sinartama Gunita (Securities Administration Bureau) and Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn	
Kesempatan Tanya Jawab Question and Answer Opportunity	Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.	The meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies who were present to ask questions and/or provide opinions on the Meeting Agenda.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Annual GMS and Extraordinary GMS resolutions mechanism	Pengambilan keputusan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.	Resolution-adoption was made through a voting mechanism. Vote counting and validation during the Meeting were conducted by a Notary.

3. Proses Perhitungan Suara

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan dijelaskan dalam Tata Tertib RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diumumkan/diunggah dalam situs *website* Perseroan bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

3. Vote Counting Process

The vote count and voting procedures at the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS are explained in the GMS Meeting Conduct, which are distributed to shareholders and read by the Moderator before the Annual GMS and Extraordinary GMS begin. Complete disclosure of the vote count and voting procedures is set out in the Annual GMS and Extraordinary GMS Meeting Conduct, which is announced/uploaded on the Company's website with the Notice of the Annual GMS and Extraordinary GMS.

4. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan 25 Maret 2025

4. Resolutions and Realization of the Results of the Annual GMS on March 25, 2025

Mata Acara 1
Agenda 1

Mata Acara Agenda	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2024.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Submitted Questions and/or Provided Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir mengajukan pertanyaan. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*) ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies present to submit questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting. ▪ During the Q&A session, 1 (one) shareholder present raised a question. ▪ Resolutions were adopted through voting, both verbally and electronically (e-voting).
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. ▪ Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat secara musyawarah untuk mufakat. That the results of the voting are as follows: ▪ No shareholder or shareholder proxy abstained. ▪ No shareholder or shareholder proxy expressed disagreement. ▪ Shareholders or shareholder proxy who expressed agreement totaled 3,241,264,329 shares, representing 100% of all valid shares present at the Meeting. Accordingly, the Meeting approved the proposed resolution of the First Agenda of the Meeting by consensus.
Keputusan Resolutions	1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Februari 2025 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2024 serta tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. 1. Approving and receiving the Company's Annual Report for the Financial Year Ended December 31, 2024. 2. Ratifying the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2024, which had been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stated in the Independent Auditor's Report dated February 18, 2025, with the opinion that "the Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards." 3. Granting full release and discharging liability (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Company's Sharia Supervisory Board for performing management and supervisory actions during the 2024 financial year, as long as such management and supervisory actions were reflected in the Company's books and records for the financial year 2024 and did not constitute criminal acts.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Had been realized in 2025.

Mata Acara 2
Agenda 2

Mata Acara Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. Determination of the Use of the Company's Net Income for the Financial Year Ended December 31, 2024.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Submitted Questions and/or Provided Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir mengajukan pertanyaan. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*). ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies present to submit questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting. ▪ During the Q&A session, 1 (one) shareholder present raised a question. ▪ Resolutions were adopted through voting, both verbally and electronically (e-voting).

Mata Acara 2 Agenda 2	
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. ▪ Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. That the results of the voting are as follows ▪ No shareholder or shareholder proxy abstained. ▪ No shareholder or shareholder proxy expressed disagreement. ▪ Shareholders or shareholder proxy who expressed agreement totaled 3,241,264,329 shares, representing 100% of all valid shares present at the Meeting.
Keputusan Resolutions	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2024 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan. b. Setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) atau maksimal sebesar Rp78.874.643.209,- (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan Rupiah) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen atau sekitar sebesar Rp22,66 (dua puluh dua koma enam puluh enam Rupiah) per saham. c. Sisa dari laba bersih sebesar Rp181.540.834.153,- (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tiga Rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2024 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2025. b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 25 April 2025 dengan cara membayar dividen tunai sekitar sebesar Rp22,66 (dua puluh dua koma enam puluh enam Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan. c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 1. Determining the use of Net Income for the 2024 financial year under the following provisions: a. An amount of Rp2,500,000,000 (two billion five hundred million Rupiah) of the Company's Net Income was set as a general reserve fund in order to comply with the provisions of Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law and Article 21 of the Company's Articles of Association. b. Up to 30% (thirty percent), or a maximum of Rp78,874,643,209 (seventy-eight billion eight hundred seventy-four million six hundred forty-three thousand two hundred nine Rupiah) of the Company's Net Income was distributed as cash dividends for the 2024 Financial Year to 3,481,481,480 (three billion four hundred eighty-one million four hundred eighty-one thousand four hundred eighty) shares, resulting in a dividend of approximately Rp22.66 (twenty-two point sixty-six Rupiah) per share. c. The remaining Net Income of Rp181,540,834,153 (one hundred eighty-one billion five hundred forty million eight hundred thirty-four thousand one hundred fifty-three Rupiah) would be recorded as retained earnings. 2. Approving the distribution of cash dividends for the 2024 Financial Year under the following provisions: a. Shareholders entitled to receive cash dividends for the 2024 Financial Year were the shareholders whose names were recorded in the Company's Register of Shareholders as of April 15, 2025. b. Cash dividends would be paid on April 25, 2025, at approximately Rp22.66 (twenty-two point sixty-six Rupiah) per share. The dividend distribution was subject to tax in accordance with applicable regulations, which must be withheld by the Company. c. Granting authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all matters related to the dividend distribution and to announce it in compliance with applicable regulations.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Had been realized in 2025.

Mata Acara 3 **Agenda 3**	
Mata Acara Agenda	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Submitted Questions and/or Provided Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*). ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies present to submit questions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting. ▪ During the Q&A session, no questions or opinions were raised by the shareholders and/or their proxies present. ▪ Resolutions were adopted through voting, both verbally and electronically (e-voting).
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. ▪ Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. That the results of the voting are as follows: ▪ No shareholder or shareholder proxy abstained. ▪ No shareholder or shareholder proxy expressed disagreement. ▪ Shareholders or shareholder proxy who expressed agreement totaled 3,241,264,329 shares, representing 100% of all valid shares present at the Meeting.

Mata Acara 3
Agenda 3

Keputusan Resolutions	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut: ▪ Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*); ▪ Akuntan Publik yang memiliki izin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Industri Keuangan Non Bank dan Profesi Penunjang Pasar Modal; ▪ Akuntan Publik yang tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; ▪ Akuntan Publik yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); ▪ Akuntan Publik yang memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan ▪ Akuntan Publik yang memiliki integritas, independensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan. b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 termasuk untuk menetapkan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025, termasuk pada proses pelaksanaan rapat, penandatanganan surat-surat terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud, serta pemberitahuan dan pengumuman ke publik (jika diperlukan). 1. Approving the appointment of the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as the Public Accounting Firm for auditing the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025. 2. Approving the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners for: a. Appointing a Public Accountant for auditing the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025, with the following criteria for the Public Accountant to be appointed: ▪ A Public Accountant from the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited); ▪ A Public Accountant licensed and registered with the Financial Services Authority as a Supporting Profession for the Non-Bank Financial Industry and Supporting Profession for the Capital Market; ▪ A Public Accountant listed in the active register of Public Accountants and Public Accounting Firms at the Financial Services Authority; ▪ A Public Accountant registered with the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI); ▪ A Public Accountant who complies with Articles 7 and 9 of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities; and ▪ A Public Accountant possessing integrity, independence, capacity, and capability to audit the Company's financial statements. b. Determining the honorarium and other requirements related to appointing the Public Accountant for auditing the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025, and appointing a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm in case the appointed Public Accountant and/or the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) was unable to complete auditing the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025, including setting other terms on appointing a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm while considering recommendations from the Company's Audit Committee and complying with applicable laws and regulations. 3. Approving the granting of authority with the right of substitution to the Board of Directors for performing all necessary actions related to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025, including conducting the meeting process, signing documents related to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm, and providing notifications and announcements to the public (if required).
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Had been realized in 2025.

Mata Acara 4
Agenda 4

Mata Acara Agenda	Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Determination of the Distribution of Duties and Authorities of the Members of the Company's Board of Directors for the Financial Year 2025.

Mata Acara 4 **Agenda 4**	
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Submitted Questions and/or Provided Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*). ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies present to submit questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting. ▪ During the Q&A session, no questions or opinions were raised by the shareholders and/or their proxies present. ▪ Resolutions were adopted through voting, both verbally and electronically (e-voting).
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak abstain. ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. ▪ Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. That the results of the voting are as follows: ▪ No shareholder or shareholder proxy abstained. ▪ No shareholder or shareholder proxy expressed disagreement. ▪ Shareholders or shareholder proxy who expressed agreement totaled 3,241,264,329 shares, representing 100% of all valid shares present at the Meeting.
Keputusan Resolution	Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. The distribution of duties and authorities of the members of the Company's Board of Directors for the financial year 2025 was proposed to be delegated to the Company's Board of Directors, considering the provisions of Article 92 paragraph (6) of the Law on Limited Liability Company, and subject to obtaining prior approval from the Company's Board of Commissioners.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Had been realized in 2025.

Mata Acara 5 **Agenda 5**	
Mata Acara Agenda	Penetapan Besarnya Uang Jasa dan Tunjangan Lainnya untuk Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Para Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Besarnya Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan Lain bagi Para Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Determination of the Amount of Fees and Other Allowances for the Members of the Company's Board of Commissioners and the Members of the Company's Sharia Supervisory Board, as well as Delegation of Authority to the Board of Commissioners to Determine the Amount of Salaries/Honoraria and/or Other Allowances for the Members of the Company's Board of Directors for the Financial Year 2025.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Submitted Questions and/or Provided Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*). ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies present to submit questions and/or provide opinions related to the Fifth Agenda of the Meeting. ▪ During the Q&A session, no questions or opinions were raised by the shareholders and/or their proxies present. ▪ Resolutions were adopted through voting, both verbally and electronically (e-voting).
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak abstain. ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. ▪ Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.241.264.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. That the results of the voting are as follows: ▪ No shareholder or shareholder proxy abstained. ▪ No shareholder or shareholder proxy expressed disagreement. ▪ Shareholders or shareholder proxy who expressed agreement totaled 3,241,264,329 shares, representing 100% of all valid shares present at the Meeting.

Mata Acara 5 Agenda 5	
Keputusan Resolutions	1. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025. 2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025. 1. The determination of fees and other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners and the members of the Company's Sharia Supervisory Board was proposed to be delegated to the President Commissioner of the Company, taking into account the proposals and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee, and the amount of fees/honoraria and/or other forms of allowances determined for the members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board would be disclosed in the Annual Report for the Financial Year 2025. 2. Delegating authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or other allowances for the members of the Company's Board of Directors for the Financial Year 2025, taking into account the proposals and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee, and the amount of salaries and/or other forms of allowances determined for the members of the Board of Directors would be disclosed in the Annual Report for the Financial Year 2025.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Had been realized in 2025.

Mata Acara 6 Agenda 6	
Mata Acara Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan Selama Tahun 2024: ▪ Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering in 2024: ▪ Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Submitted Questions and/or Provided Opinions	Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan. Since the Sixth Agenda of the Meeting was only for reporting purposes, no Q&A session or decision-making was conducted.
Keputusan Resolution	Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut: Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat. The report presented to the shareholders or their proxies is as follows: Acknowledging the accountability for the realization of the use of funds from the entire proceeds of the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024, as previously submitted to the Financial Services Authority and summarized in the Meeting.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Had been realized in 2025.

5. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025

5. Resolutions and Realization of the Results of the Extraordinary GMS on March 25, 2025

Mata Acara 1 Agenda 1	
Mata Acara Agenda	Perubahan Beberapa Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Amendments to Several Provisions in the Company's Articles of Association to Align with the Prevailing Laws and Regulations, including the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Companies, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions.

Mata Acara 1
Agenda 1

Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Submitted Questions and/or Provided Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*). ▪ The meeting provided an opportunity for the shareholders or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the First Agenda of the Meeting. ▪ During the question-and-answer session, no questions or opinions were submitted by the shareholders and/or their proxies present. ▪ Resolution-adoption was carried out through a voting process conducted verbally and electronically (e-voting).
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. ▪ Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.243.427.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. That the results of the voting are as follows: ▪ No shareholder or shareholder proxy abstained. ▪ No shareholder or shareholder proxy expressed disagreement. ▪ Shareholders or shareholder proxy who voted in favor totaled 3,243,427,329 shares, representing 100% of all valid shares present at the Meeting.
Keputusan Resolutions	1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan termasuk untuk menyusun kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) serta menyelaraskan beberapa ketentuan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Approving the amendments to several provisions in the Company's Articles of Association, including those related to the Company's Purpose and Objectives as well as Business Activities, to align with the prevailing laws and regulations, including the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Companies, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions. 2. Delegating the authority and power to the Company's Board of Directors to adjust the Company's Articles of Association, including to restate and/or reconfirm them in a Notarial Deed (including amendments and/or additions) and to harmonize several provisions in relation to the amendments and restatement of the Company's Articles of Association, and granting the authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution to a Notary, to submit notifications and/or applications for approval of the amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or the relevant authorities and, accordingly, to file applications for the issuance of other required letters and documents; in short, to carry out all other necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Had been realized in 2025.

Mata Acara 2
Agenda 2

Mata Acara Agenda	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka: 1. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri. 2. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi pada Tahun Buku 2025. Approval of the Company's plan to transfer or pledge a substantial part or all of the Company's receivables in connection with: 1. Obtaining loans and/or sharia financing from banking financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) or non-bank financial institutions, both domestic and overseas. 2. Obtaining loans and/or financing from banking financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) or non-bank financial institutions, both domestic and overseas, including in connection with the Sustainable Public Offering of Self Registration Bonds in the 2025 Financial Year.

Mata Acara 2 Agenda 2	
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Submitted Questions and/or Provided Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*). ▪ The meeting provided an opportunity for the shareholders or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Second Agenda of the Meeting. ▪ During the question-and-answer session, no questions or opinions were submitted by the shareholders and/or their proxies present. ▪ Resolution-adoption was carried out through a voting process conducted verbally and electronically (e-voting).
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. ▪ Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. ▪ Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.243.427.329 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. That the results of the voting are as follows: ▪ No shareholder or shareholder proxy abstained. ▪ No shareholder or shareholder proxy expressed disagreement. ▪ shareholders or shareholder proxy declaring agreement totaled 3,243,427,329 shares, representing 100% of all valid shares present at the Meeting.
Keputusan Resolutions	1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2025. 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2025 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB V sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). 3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengalihan hak atau pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 yang dijabarkan sebelumnya dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2025. 1. Approving the Company's plan to transfer rights over or pledge a substantial portion or all of the Company's receivables in order to obtain loans and/or sharia financing from banking (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-bank financial institutions, both domestic and foreign, for the 2025 financial year. 2. Approving the Company's plan to transfer rights over or pledge a substantial portion or all of the Company's receivables in order to obtain loans and/or financing from banking (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) and non-bank financial institutions, both domestic and foreign, for the 2025 financial year, including the provision of collateral in relation to the continuation of PUB V issuance amounting up to Rp2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah). 3. Granting power and authority, with the right of substitution, to the Board of Directors to take all necessary actions in connection with the transfer of rights or the granting of collateral over a substantial portion or all of the Company's receivables as referred to in points 1 and 2 above, to be implemented during the 2025 financial year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Sebagian besar telah direalisasikan pada tahun 2025. Most were realized in 2025.

6. Perhitungan Suara RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025

6. Vote Counting of the Annual GMS on March 25, 2025

Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Abstain**
Mata Acara Pertama **First Agenda Item**		
3.241.264.329 saham (100%) 3,241,264,329 shares (100%)	-	-
Mata Acara Kedua **Second Agenda Item**		
3.241.264.329 saham (100%) 3,241,264,329 shares (100%)	-	-

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Ketiga **Third Agenda Item**		
3.241.264.329 saham (100%) 3,241,264,329 shares (100%)	-	-
Mata Acara Keempat **Fourth Agenda Item**		
3.241.264.329 saham (100%) 3,241,264,329 shares (100%)	-	-
Mata Acara Kelima **Fifth Agenda Item**		
3.241.264.329 saham (100%) 3,241,264,329 shares (100%)	-	-
Mata Acara Keenam **Sixth Agenda Item**		
Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat Laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan. The Sixth Meeting Agenda was only in the form of a report; therefore, no question-and-answer session or resolution-adoption process was conducted.		

RUPS Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Extraordinary GMS on March 25, 2025

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama **First Agenda Item**		
3.243.427.329 saham (100%) 3,243,427,329 shares (100%)	-	-
Mata Acara Kedua **Second Agenda Item**		
3.243.427.329 saham (100%) 3,243,427,329 shares (100%)	-	-

PELAKSANAAN RUPS DI TAHUN SEBELUMNYA

PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA 11 JANUARI 2024, RUPS TAHUNAN-RUPS LUAR BIASA 28 MARET 2024, DAN RUPS LUAR BIASA 9 OKTOBER 2024

1. Tahap Pelaksanaan

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Conditions
Pemberitahuan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada Regulator Notification of the Annual GMS and the Extraordinary GMS to the Regulator.	**1. RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 259/XI/CS/2023 tanggal 28 November 2023. **2. RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 072/II/CS/2024 tanggal 13 Februari 2024. **3. RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 279/VIII/CS/2024 tanggal 26 Agustus 2024. **1. Extraordinary GMS on January 11, 2024** The notification on the plan to convene the Meeting was submitted to the Financial Services Authority through Letter Number 259/XI/CS/2023 dated November 28, 2023. **2. Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** The notification on the plan to convene the Meeting was submitted to the Financial Services Authority through Letter Number 072/II/CS/2024 dated February 13, 2024. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** The notification on the plan to convene the Meeting was submitted to the Financial Services Authority through Letter Number 279/VIII/CS/2024 dated August 26, 2024.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Notification regarding the GMS plan must be submitted to OJK no later than 5 (five) working days before the announcement date of the GMS to the public, excluding the GMS announcement date.
Pengumuman **Announcement**		
Publikasi Publication	**1. RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Pengumuman Rapat yang diumumkan dalam web resmi PT Bursa Efek Indonesia, web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan web resmi Perseroan pada tanggal 5 Desember 2023. **2. RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Pengumuman Rapat yang diumumkan dalam web resmi PT Bursa Efek Indonesia, web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan web resmi Perseroan pada tanggal 20 Februari 2024. **3. RUPS Luar Biasa 09 Oktober 2024** Pengumuman Rapat yang diumumkan dalam web resmi PT Bursa Efek Indonesia, web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan web resmi Perseroan pada tanggal 2 September 2024. **1. Extraordinary GMS on January 11, 2024** The Meeting Announcement was published on the official website of Indonesia Stock Exchange, Indonesia Central Securities Depository, and the Company on December 5, 2023. **2. Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** The Meeting Announcement was published on the official website of Indonesia Stock Exchange, Indonesia Central Securities Depository, and the Company on February 20, 2024. **3. Extraordinary GMS on October 9, 2024** The Meeting Announcement was published on official website of Indonesia Stock Exchange, Indonesia Central Securities Depository, and the Company on September 2, 2024.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. In accordance with the Articles of Association, the Company has complied with the obligation to announce the GMS on e-GMS provider's website, stock exchange's website, and the Public Company's website, in both Indonesian and a foreign language, no later than 14 (fourteen) days prior to the notice of the GMS, excluding the announcement date and the notice date.

GMS CONVENTION IN THE PREVIOUS YEAR

CONVENTION OF EXTRAORDINARY GMS ON JANUARY 11, 2024, ANNUAL GMS– EXTRAORDINARY GMS ON MARCH 28, 2024, AND EXTRAORDINARY GMS ON OCTOBER 9, 2024.

1. Convention Stages

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Conditions
Laporan ke Regulator Report to the Regulator	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Bukti Pengumuman RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 5 Desember 2023 dan 20 Desember 2023. 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Bukti Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 20 Februari 2024 dan 06 Maret 2024. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Bukti Pengumuman RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 02 September 2024 dan 20 September 2024. 1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** The evidence of the Extraordinary GMS Announcement was submitted to OJK and IDX through e-Reporting on December 5, 2023 and December 20, 2023. 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** The evidence of the Annual GMS and Extraordinary GMS Announcement was submitted to OJK and IDX through e-Reporting on February 20, 2024 and March 6, 2024. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** The evidence of the Extraordinary GMS Announcement was submitted to OJK and IDX through e-Reporting on September 2, 2024 and September 20, 2024.	
Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa beserta penjelasan mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa **Notice of the Annual GMS and Extraordinary GMS along with the explanations of the agenda items of the Annual GMS and Extraordinary GMS**		
Publikasi Publication	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam web resmi PT Bursa Efek Indonesia, web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan web resmi Perseroan pada tanggal 20 Desember 2023. 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam web resmi PT Bursa Efek Indonesia, web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan web resmi Perseroan pada tanggal 6 Maret 2024. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam web resmi PT Bursa Efek Indonesia, web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan web resmi Perseroan pada tanggal 17 September 2024 dan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam web resmi PT Bursa Efek Indonesia dan web resmi Perseroan pada tanggal 20 September 2024. 1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** The Meeting Notice was announced on the official website of Indonesia Stock Exchange Indonesia Central Securities Depository, and the Company's official website on December 20, 2023. 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** The Meeting Notice was announced on the official website of Indonesia Stock Exchange, Indonesia Central Securities Depository, and the Company's official website on March 6, 2024. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** The Meeting Notice was announced on the official website of Indonesia Stock Exchange Indonesia Central Securities Depository, and the Company's official website on September 17, 2024, and the Meeting Notice was also announced on the official website of Indonesia Stock Exchange and the Company's official website on September 20, 2024.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan Pemanggilan RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company has complied with the provisions on GMS Notices by announcing them on e-GMS provider's website, stock exchange's website, and the Public Company's website, in both Indonesian and a foreign language, no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS, excluding the notice date and the date of the GMS.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Bukti Pemanggilan RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 20 Desember 2023. 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Bukti Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara *e-Reporting* pada tanggal 6 Maret 2024. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Bukti Pemanggilan RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 20 September 2024. 1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** Evidence of the Extraordinary GMS Notice was submitted to OJK and IDX via e-Reporting on December 20, 2023. 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** Evidence of the Annual GMS and Extraordinary GMS Notices was submitted to OJK and IDX via e-Reporting on March 6, 2024. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** Evidence of the Extraordinary GMS Notice was submitted to OJK and IDX via e-Reporting on September 20, 2024.	

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Conditions
Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa The Implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Kamis, 11 Januari 2024 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Kamis, 28 Maret 2024 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Kamis, 9 Oktober 2024 1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** Thursday, January 11, 2024 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** Thursday, March 28, 2024 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** Thursday, October 9, 2024	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa **Summary of the Minutes (Results) of the Annual GMS and Extraordinary GMS**		
Publikasi Publication	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 15 Januari 2024. 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 02 April 2024 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.wom.co.id pada tanggal 11 Oktober 2024. 1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** The Summary of the Minutes of the Extraordinary GMS was announced on the website of Indonesia Stock Exchange, Indonesia Central Securities Depository, and the Company's website www.wom.co.id on January 15, 2024. 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** The Summary of the Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS was announced on the website of Indonesia Stock Exchange, Indonesia Central Securities Depository, and the Company's website www.wom.co.id on April 2, 2024. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** The Summary of the Minutes of the Extraordinary GMS was announced on the website of Indonesia Stock Exchange, Indonesia Central Securities Depository, and the Company's website www.wom.co.id on October 11, 2024.	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company has complied with the obligation to announce the Summary of the Minutes of the GMS on e-GMS provider's website, stock exchange's website, and the Public Company's website, in both Indonesian and a foreign language, no later than 2 (two) working days after the GMS is convened.
Laporan ke Regulator Report to the Regulator	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (*e-Reporting*) tanggal 15 Januari 2024. 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (*e-Reporting*) tanggal 02 April 2024. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (*e-Reporting*) tanggal 11 Oktober 2024. 1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** The evidence of the announcement was submitted to OJK (Capital Market and Supervisor) and IDX (e-Reporting) on January 15, 2024. 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** The evidence of the announcement was submitted to OJK (Capital Market and Supervisor) and IDX (e-Reporting) on April 2, 2024. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** The evidence of the announcement was submitted to OJK (Capital Market and Supervisor) and IDX (e-Reporting) on October 11, 2024.	

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Conditions
Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Minutes of Annual GMS and Extraordinary GMS	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Risalah RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK pada tanggal 06 Februari 2024. 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK pada tanggal 26 April 2024. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Risalah RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK pada tanggal 7 November 2024. 1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** The Minutes of the Extraordinary GMS were submitted to OJK on February 6, 2024. 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** The Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS were submitted to OJK on April 26, 2024. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** Minutes of Extraordinary GMS submitted to OJK on November 7, 2024.	Risalah RUPS Tahunan wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS Tahunan diselenggarakan. Minutes of Annual GMS must be submitted to OJK no later than 30 (thirty) days after the Annual GMS is held.

2. Proses Penyelenggaraan

2. Convention Process

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	
Tanggal dan Waktu Date and Time	1. **RUPS Luar Biasa** Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 10:24 – 10:48 WIB 2. **RUPS Tahunan** Kamis, 28 Maret 2024 Pukul 10:30 – 11:45 WIB **RUPS Luar Biasa** Kamis, 28 Maret 2024 Pukul 11:50 – 12:05 WIB 3. **RUPS Luar Biasa** Rabu, 9 Oktober 2024 Pukul 10:17 – 10:46 WIB	1. **Extraordinary GMS** Thursday, January 11, 2024 From 10:24 AM to 10:48 AM 2. **Annual GMS** Thursday, March 28, 2024 From 10:30 AM to 11:45 AM **Extraordinary GMS** Thursday, March 28, 2024 From 11:50 AM to 12:05 PM 3. **Extraordinary GMS** Wednesday, October 9, 2024 From 10:17 AM to 10:46 AM
Tempat Venue	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270. Perseroan juga menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.	Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jalan Asia Afrika Number 8, Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta Pusat 10270. The Company also held the EGMS electronically in accordance with the provisions of POJK Number 16/POJK.04/2020 on the Electronic Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies.
Kuorum Quorum	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Pemegang Saham: 2.349.891.429 saham (67,5%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham. 2. **RUPS Tahunan 28 Maret 2024** Pemegang Saham: 3.240.232.995 saham (93,070522%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham. **RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Pemegang Saham: 3.240.559.195 saham (93,079892%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Pemegang Saham: 3.227.293.241 saham (92,6988%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 saham.	1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** Shareholders: 2,349,891,429 shares (67.5%) of the total issued and fully paid shares as of the Meeting, amounting to 3,481,481,480 shares. 2. **Annual GMS on March 28, 2024** Shareholders: 3,240,232,995 shares (93.070522%) of the total issued and fully paid shares as of the Meeting, amounting to 3,481,481,480 shares. **Extraordinary GMS on March 28, 2024** Shareholders: 3,240,559,195 shares (93.079892%) of the total issued and fully paid shares as of the Meeting, amounting to 3,481,481,480 shares. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** Shareholders: 3,227,293,241 shares (92.6988%) of the total issued and fully paid shares as of the Meeting, amounting to 3,481,481,480 shares.

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	
Pimpinan RUPS Chairman of GMS	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** Bapak I Nyoman Tjager selaku Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 14 Desember 2023. 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** Ibu Thilagavathy Nadason selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 22 Februari 2024. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** Ibu Thilagavathy Nadason selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 26 September 2024.	1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** Mr. I Nyoman Tjager as the President Commissioner/ Independent Commissioner of the Company, based on the Circular Decision of the Board of Commissioners dated December 14, 2023. 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** Mrs. Thilagavathy Nadason as the Company's Commissioner, based on the Circular Decision of the Board of Commissioners dated February 22, 2024. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** Mrs. Thilagavathy Nadason as the Company's Commissioner, based on the Circular Decision of the Board of Commissioners dated September 26, 2024.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including the President Commissioner	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** ▪ I Nyoman Tjager: Presiden Komisaris/Komisaris Independen ▪ Thilagavathy Nadason: Komisaris ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen 2. **RUPS Tahunan 28 Maret 2024** ▪ Thilagavathy Nadason: Komisaris ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen **RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** ▪ Sarasti Baskoro*): Presiden Komisaris/Komisaris Independen ▪ Thilagavathy Nadason: Komisaris ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E.*): Komisaris Independen *) masih menunggu persetujuan dari OJK 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** ▪ Sarasti Baskoro*): Presiden Komisaris/Komisaris Independen ▪ Thilagavathy Nadason: Komisaris ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Komisaris Independen ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E.: Komisaris Independen *) masih menunggu persetujuan dari OJK	1. **Extraordinary GMS – January 11, 2024** ▪ I Nyoman Tjager: President Commissioner / Independent Commissioner ▪ Thilagavathy Nadason: Commissioner ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Independent Commissioner 2. **Annual GMS – March 28, 2024** ▪ Thilagavathy Nadason: Commissioner ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Independent Commissioner **Extraordinary GMS – March 28, 2024** ▪ Sarasti Baskoro*): President Commissioner / Independent Commissioner ▪ Thilagavathy Nadason: Commissioner ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Independent Commissioner ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E.*): Independent Commissioner *) waiting for the approval from OJK 3. **Extraordinary GMS – October 9, 2024** ▪ Sarasti Baskoro*): President Commissioner / Independent Commissioner ▪ Thilagavathy Nadason: Commissioner ▪ Myrnie Zachraini Tamin: Independent Commissioner ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E.: Independent Commissioner *) waiting for the approval from OJK
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including the President Director	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: Presiden Direktur ▪ Njauw Vido Onadi: Direktur ▪ Wibowo: Direktur ▪ Cincin Lisa Hadi: Direktur 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: Presiden Direktur ▪ Anthony Yuarez Panggabean: Direktur ▪ Njauw Vido Onadi: Direktur ▪ Wibowo: Direktur ▪ Cincin Lisa Hadi: Direktur 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: Presiden Direktur ▪ Anthony Yuarez Panggabean: Direktur ▪ Njauw Vido Onadi: Direktur ▪ Wibowo: Direktur ▪ Cincin Lisa Hadi: Direktur	1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: President Director ▪ Njauw Vido Onadi: Director ▪ Wibowo: Director ▪ Cincin Lisa Hadi: Director 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: President Director ▪ Anthony Yuarez Panggabean: Director ▪ Njauw Vido Onadi: Director ▪ Wibowo: Director ▪ Cincin Lisa Hadi: Director 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** ▪ Djaja Suryanto Sutandar: President Director ▪ Anthony Yuarez Panggabean: Director ▪ Njauw Vido Onadi: Director ▪ Wibowo: Director ▪ Cincin Lisa Hadi: Director
Kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah Attendance of members of the Sharia Supervisory Board	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** ▪ Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A : Ketua ▪ H. Muhammad Taufik Darmansyah, SE, CPA: Anggota 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** ▪ Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.: Ketua 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** ▪ Dr. H. Abdul Jabar Majid, M. A.: Ketua	1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** ▪ Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.: Chairman ▪ H. Muhammad Taufik Darmansyah, SE, CPA: Member 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** ▪ Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.: Chairman 3. **Extraordinary GMS on October 09, 2024** ▪ Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.: Chairman
Undangan Invitees	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** ▪ N/A 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** ▪ Sarastri Baskoro ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** ▪ Taufik Aulia	1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** ▪ N/A 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** ▪ Sarastri Baskoro ▪ Rallyati A. Wibowo, S.E. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** ▪ Taufik Aulia

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Independent Party to conduct the quorum calculation and voting on the resolutions of the Annual GMS and Extraordinary GMS	1. **RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024** PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) dan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn 2. **RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024** PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) dan Aulia Taufani, S.H. 3. **RUPS Luar Biasa 9 Oktober 2024** PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) dan Aulia Taufani, S.H.	1. **Extraordinary GMS on January 11, 2024** PT Sinartama Gunita (Securities Administration Bureau) and Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn 2. **Annual GMS & Extraordinary GMS on March 28, 2024** PT Sinartama Gunita (Securities Administration Bureau) and Aulia Taufani, S.H. 3. **Extraordinary GMS on October 9, 2024** PT Sinartama Gunita (Securities Administration Bureau) Aulia Taufani, S.H.
Kesempatan Tanya Jawab Question and Answer Session	Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.	The Meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies who were present to raise questions and/or express opinions on the Meeting Agenda.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Resolution-Adoption Mechanism of the Annual GMS and Extraordinary GMS	Pengambilan keputusan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.	Resolutions were adopted through a voting mechanism. The counting and validation of votes during the Meeting were conducted by a Notary.

3. Proses Perhitungan Suara

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diumumkan/diunggah dalam situs *website* Perseroan bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

3. Vote Counting Process

The vote counting and voting procedures at the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS are explained in the Meeting Rules of Procedure, which are distributed to shareholders and read by the Meeting Director before the Annual GMS and Extraordinary GMS commence. Full disclosure of the vote counting and voting procedures is set out in the Meeting Rules of Procedure for the Annual GMS and Extraordinary GMS, which are announced/uploaded on the Company's website simultaneously with the Notice of the Annual GMS and Extraordinary GMS.

4. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa 11 Januari 2024

4. Resolutions and Realization of the Results of Extraordinary GMS on January 11, 2024

Mata Acara 1
Agenda 1

Mata Acara Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Company's Management Composition.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Meeting Agenda. ▪ During the Q&A session, no shareholders or proxies present at the meeting raised any questions or opinions.
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. ▪ Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dalam Rapat. ▪ Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 2.349.891.429 saham atau merupakan 67,5% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. That the results of the voting are as follows: ▪ No shareholders abstained. ▪ No shareholders and/or their proxies voted against the resolution in the Meeting. ▪ Shareholders who voted in favor amounted to 2,349,891,429 shares, representing 67.5% of the total valid shares present at the Meeting.

Mata Acara 1 Agenda 1	
Keputusan Resolutions	1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tuan H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A., selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 8 September 2023 dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Tuan H. Muhammad Taufik Darmansyah S.E., C.P.A., atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. 2. Menyetujui untuk membatalkan salah satu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 30 Maret 2023, yaitu khusus terkait dengan pengangkatan Tuan Taufik Aulia sebagai Komisaris Perseroan dan untuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Maret 2023 selain terkait hal tersebut dinyatakan tetap berlaku. 3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Tuan I Nyoman Tjager Komisaris : Nyonya Thilagavathy Nadason Komisaris Independen : Nona Myrnie Zachraini Tamin DIREKSI: Presiden Direktur : Tuan Djaja Suryanto Sutandar Direktur : Tuan Anthony Yuarez Panggabean Direktur : Tuan Njauw Vido Onadi Direktur : Tuan Wibowo Direktur : Nyonya Cincin Lisa Hadi DEWAN PENGAWAS SYARIAH: Ketua : Tuan Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. Anggota : Tuan Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen 4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dimaksud, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.	1. Accepting and approving the resignation of Mr. H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A., as a member of the Company's Sharia Supervisory Board, effective as of September 8, 2023, while expressing the Company's utmost gratitude and appreciation for his services and dedication during his term of office as a member of the Sharia Supervisory Board. Granting discharge and acquit et de charge to Mr. H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A., for supervising actions carried out during his term—from the last accountability period up to the effective date of his resignation—would be submitted for approval at the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024. 2. Approving the cancellation of one of the resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders dated March 30, 2023, specifically on appointing Mr. Taufik Aulia as a Commissioner of the Company, while keeping all other resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders dated March 30, 2023, in full force and effect. 3. Determining that, as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows: BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner/ Independent Commissioner : Mr. I Nyoman Tjager Commissioner : Mrs. Thilagavathy Nadason Independent Commissioner : Ms. Myrnie Zachraini Tamin BOARD OF DIRECTORS: President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar Director : Mr. Anthony Yuarez Panggabean Director : Mr. Njauw Vido Onadi Director : Mr. Wibowo Director : Mrs. Cincin Lisa Hadi SHARIA SUPERVISORY BOARD: Chairman : Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. Member : Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen 4. Granting authority and power, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors for carrying out all actions necessary in relation to changing the Company's management composition, including reaffirming and/or restating in a Notarial Deed on the change in the Company's management, notifying and announcing to the public (if required), as well as submitting registrations, obtaining acknowledgment, or seeking approval from the relevant authorities.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

5. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan 28 Maret 2024

5. Resolutions and Realization of the Results of Annual GMS on March 28, 2024

Mata Acara 1 Agenda 1	
Mata Acara Agenda	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2023.

Mata Acara 1 **Agenda 1**	
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions on the First Meeting Agenda. ▪ During the Q&A session, 2 shareholders or their proxies present at the Meeting raised questions and/or opinions. ▪ Resolutions were adopted through voting conducted verbally.
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 100 saham atau merupakan 0,000003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dalam Rapat. ▪ Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.240.232.895 saham atau merupakan 99,999997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.232.995 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. That the results of the voting are as follows: ▪ Shareholders who abstained amounted to 100 shares, representing 0.000003% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ No shareholders and/or their proxies voted against the resolution at the Meeting. ▪ Shareholders who voted in favor amounted to 3,240,232,895 shares, representing 99.999997% of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with the provisions of Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, shareholders of shares with valid voting rights who are present at the General Meeting of Shareholders but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,240,232,995 shares, representing 100% of the total valid votes present at the Meeting, deciding by majority vote to approve the proposed resolution of the First Meeting Agenda.
Keputusan Resolutions	1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Februari 2024 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan (termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mengundurkan diri sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Januari 2024) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang Tahun Buku 2023 serta tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. 1. Accepting and approving the Company's Annual Report for the Financial Year Ended December 31, 2023. 2. Ratifying the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2023, which had been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), as stated in the Independent Auditor's Report dated February 22, 2024, with the opinion that "the Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk as of December 31, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards". 3. Granting full discharge and acquit et de charge to the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (including Sharia Supervisory Board members who had resigned as per the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution dated January 11, 2024) for the management and supervisory actions carried out during the 2023 Financial Year, provided that such actions were reflected in the Company's books and records for the 2023 Financial Year and did not constitute criminal acts.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

Mata Acara 2 **Agenda 2**	
Mata Acara Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. Determination of the Use of the Company's Net Income for the Financial Year Ended December 31, 2023.

Mata Acara 2 **Agenda 2**	
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions on the Second Meeting Agenda. ▪ During the Q&A session, no shareholders or proxies present at the Meeting raised any questions or opinions. ▪ Resolution-adoption was carried out through voting conducted verbally.
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 180.100 saham atau merupakan 0,005558% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dalam Rapat. ▪ Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.240.052.895 saham atau merupakan 99,994442% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.232.995 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. That the results of the voting are as follows: ▪ Shareholders who abstained amounted to 180,100 shares, representing 0.005558% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ No shareholders and/or their proxies voted against the resolution at the Meeting. ▪ Shareholders who voted in favor amounted to 3,240,052,895 shares, representing 99.994442% of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with the provisions of Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, shareholders of shares with valid voting rights who are present at the General Meeting of Shareholders but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,240,232,995 shares, representing 100% of the total valid votes present at the Meeting, deciding by majority vote to approve the proposed resolution of the Second Meeting Agenda.
Keputusan Resolutions	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; b. Maksimal sebesar Rp70.922.112.509,- (tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan Rupiah) atau setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2023 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen atau sekitar sebesar Rp20,37 (dua puluh koma tiga tujuh Rupiah) per saham; c. Sisa dari Laba Bersih sebesar Rp162.984.929.189,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2023 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2024 dengan cara membayar dividen tunai sebesar Rp20,37 (dua puluh koma tiga tujuh Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan. c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 1. Determining the use of Net Income for the Financial Year 2023 under the following provisions: a. An amount of Rp2,500,000,000 (two billion five hundred million Rupiah) of the Company's Net Income should be allocated as a general reserve fund to comply with the provisions of Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law and Article 21 of the Company's Articles of Association; b. A maximum of Rp70,922,112,509 (seventy billion nine hundred twenty-two million one hundred twelve thousand five hundred nine Rupiah), or up to 30% (thirty percent) of the Company's Net Income, should be distributed as cash dividends for the Financial Year 2023 to 3,481,481,480 (three billion four hundred eighty-one million four hundred eighty-one thousand four hundred eighty) shares, resulting in a dividend of approximately Rp20.37 (twenty point thirty-seven Rupiah) per share; c. The remaining Net Income of Rp162,984,929,189 (one hundred sixty-two billion nine hundred eighty-four million nine hundred twenty-nine thousand one hundred eighty-nine Rupiah) should be recorded as retained earnings. 2. Approving the distribution of cash dividends for the Financial Year 2023 under the following provisions: a. Shareholders entitled to receive cash dividends for the Financial Year 2023 were those whose names were recorded in the Company's Shareholders Register. b. Cash dividends would be paid on May 2, 2024, by paying cash dividend amounting Rp20.37 (twenty point thirty-seven Rupiah) per share. The dividend distribution was subject to tax in accordance with the prevailing regulations, which must be withheld by the Company. c. Granting authority, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to carry out all matters related to the dividend distribution and to announce it in compliance with applicable regulations.

Mata Acara 2 **Agenda 2**	
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

Mata Acara 3 **Agenda 3**	
Mata Acara Agenda	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2024.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions on the Third Meeting Agenda. ▪ During the Q&A session, no shareholders or proxies present at the Meeting raised any questions or opinions. ▪ Resolutions were adopted through voting conducted verbally.
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 100 saham atau merupakan 0,000003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dalam Rapat. ▪ Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.240.232.895 saham atau merupakan 99.999997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.232.995 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. That the results of the voting are as follows: ▪ Shareholders who abstained amounted to 100 shares, representing 0.000003% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ No shareholders and/or their proxies voted against the resolution at the Meeting. ▪ Shareholders who voted in favor amounted to 3,240,232,895 shares, representing 99.999997% of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with the provisions of Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, shareholders of shares with valid voting rights who are present at the General Meeting of Shareholders but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,240,232,995 shares, representing 100% of the total valid votes present at the Meeting, deciding by majority vote to approve the proposed resolution of the Third Meeting Agenda.
Keputusan Resolutions	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sebagai berikut: ▪ Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*); ▪ Publik yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Industri Keuangan Non Bank dan Profesi Penunjang Pasar Modal; ▪ Akuntan Publik yang tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; ▪ Akuntan Publik yang memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan ▪ Akuntan Publik yang memiliki integritas, independent, kapasitas, dan kapabilitas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan. b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 termasuk untuk menetapkan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, termasuk pada proses pelaksanaan rapat, penandatanganan surat-surat terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Mata Acara 3 Agenda 3	
	1. Approving the appointment of the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2024. 2. Approving the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to: a. Appointing a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2024, with the following criteria for the Public Accountant: ▪ A Public Accountant from the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited); ▪ Registered with the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and registered with the Financial Services Authority (OJK) as a Supporting Profession for Non-Bank Financial Industry and Capital Market Supporting Profession; ▪ A Public Accountant listed in the active Public Accountant and Public Accounting Firm registry at the Financial Services Authority; ▪ A Public Accountant meeting the provisions of Articles 7 and 9 of the Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 on the Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities; and ▪ A Public Accountant who possesses integrity, independence, capacity, and capability to audit the Company's financial statements. b. Determining the amount of remuneration and other terms related to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2024, as well as appointing a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accountant and/or Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2024, including determining other terms on the appointment of a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee and the prevailing laws and regulations. 3. Approving the granting of authority, with the right of substitution, to the Board of Directors to carry out all actions deemed necessary in connection with the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2024, including conducting the meeting process and signing documents related to the appointment of the said Public Accountant and Public Accounting Firm.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

Mata Acara 4 Agenda 4	
Mata Acara Agenda	Perubahan susunan pengurus Perseroan. Changes in the Company's management composition.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions on the Fourth Meeting Agenda. ▪ During the Q&A session, no shareholders or proxies present at the Meeting raised any questions or opinions. ▪ Resolutions were adopted through voting conducted verbally.
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 100 saham atau merupakan 0,000003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dalam Rapat. ▪ Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.240.232.895 saham atau merupakan 99.999997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.232.995 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. That the results of the voting are as follows: ▪ Shareholders who abstained amounted to 100 shares, representing 0.000003% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ No shareholders and/or their proxies voted against the resolution at the Meeting. ▪ Shareholders who voted in favor amounted to 3,240,232,895 shares, representing 99.999997% of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with the provisions of Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, shareholders of shares with valid voting rights who are present at the General Meeting of Shareholders but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,240,232,995 shares, representing 100% of the total valid votes present at the Meeting, deciding by majority vote to approve the proposed resolution of the Fourth Meeting Agenda.

Mata Acara 4
Agenda 4

Keputusan Resolutions	1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan apresiasi dan terima kasih atas kinerja serta jasa-jasanya kepada Perseroan selama menjabat khususnya kepada Tuan I Nyoman Tjager yang telah memberikan kontribusi dan kinerja yang sangat baik selama masa jabatan yang bersangkutan di Perseroan. 2. Mengangkat kembali: a. Nyonya Thilagavathy Nadason sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026; dan b. Ibu Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 dengan ketentuan masa jabatan Ibu Myrnie Zachraini Tamin berakhir pada 30 September 2024. Terhadap usulan pengangkatan kembali tersebut, Nona Myrnie Zachraini Tamin telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Sarastri Baskoro sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan dan Nyonya Rallyati A. Wibowo, S.E. sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. 4. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris/ Komisaris Independen : Sarastri Baskoro[2]) Komisaris : Thilagavathy Nadason Komisaris Independen : Myrnie Zachraini Tamin[1]) Komisaris Independen : Rallyati A. Wibowo, S.E.[2]) Untuk masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Masa jabatan Nona Myrnie Zachraini Tamin berakhir pada 30 September 2024. 2. Pengangkatan Nyonya Sarastri Baskoro sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan dan Nyonya Rallyati A. Wibowo, S.E. sebagai Komisaris Independen Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

	1. Determining the end of the term of office of all members of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting, accompanied by expressions of appreciation and gratitude for their performance and contributions to the Company during their term of office, particularly to Mr. I Nyoman Tjager, who had provided significant contributions and excellent performance during his term at the Company. 2. Reappointing: a. Mrs. Thilagavathy Nadason as Commissioner of the Company for a term of office starting from the closing of this Meeting until the end of the term of the Board of Commissioners, i.e., the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026; and b. Ms. Myrnie Zachraini Tamin as Independent Commissioner of the Company for a term of office starting from the closing of this Meeting until the end of the term of the Board of Commissioners, i.e., the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, with the provision that Ms. Myrnie Zachraini Tamin's term would end on September 30, 2024. On this proposed reappointment, Ms. Myrnie Zachraini Tamin has provided a statement to the Company confirming that she will remain independent in order to comply with the provisions of Article 25 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. 3. Approving the appointment of Mrs. Sarastri Baskoro as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company and Mrs. Rallyati A. Wibowo, S.E. as Independent Commissioner, with terms of office starting from the closing of this Meeting and, after obtaining approval from the Financial Services Authority, until the end of the term of the Board of Commissioners, i.e., the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026. 4. Determining that, as of the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows: BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner/ Independent Commissioner : Sarastri Baskoro[2]) Commissioner : Thilagavathy Nadason Independent Commissioner : Myrnie Zachraini Tamin[1]) Independent Commissioner : Rallyati A. Wibowo, S.E.[2])

Mata Acara 4 **Agenda 4**	
	For the term of the Board of Commissioners ending at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, the provisions are as follows: 1. The term of office of Ms. Myrnie Zachraini Tamin would end on September 30, 2024. 2. The appointment of Mrs. Sarastri Baskoro as President Commissioner and Independent Commissioner and Mrs. Rallyati A. Wibowo, S.E. as Independent Commissioner would become effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK). 5. Granting authority and power, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to carry out all actions necessary in connection with the appointment of the members of the Company's Board of Commissioners, including reaffirming and/or restating such appointments in a notarial deed, notifying and announcing to the public (if required), and submitting registrations, obtaining acknowledgment, or seeking approval from the relevant authorities.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

Mata Acara 5 **Agenda 5**	
Mata Acara Agenda	Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang para Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Determination of the Division of Duties and Authorities of the Company's Board of Directors for the 2024 Financial Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Rapat Keenam. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to ask questions and/or express opinions on the Fifth Meeting Agenda, which was conducted concurrently with the Sixth Meeting Agenda. ▪ During the question-and-answer session, no shareholders or proxies present at the meeting raised any questions and/or opinions. ▪ Resolution-adoption was carried out through a voting process conducted verbally.
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 100 saham atau merupakan 0,000003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dalam Rapat. ▪ Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.240.232.895 saham atau merupakan 99.999997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.232.995 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima. The results of the voting are as follows: ▪ Shareholders who abstained totaled 100 shares, representing 0.000003% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ There were no shareholders and/or proxies who voted against at the Meeting. ▪ Shareholders who voted in favor totaled 3,240,232,895 shares, representing 99.999997% of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, shareholders of valid voting shares present at the General Meeting of Shareholders who abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Accordingly, the total number of shares voting in favor amounted to 3,240,232,995 shares, representing 100% of the total valid shares present at the Meeting, deciding by majority vote to approve the proposed resolution of the Fifth Meeting Agenda.
Keputusan Resolution	Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. The division of duties and authorities of the Company's Board of Directors for the 2024 financial year was proposed to be delegated to the Company's Board of Directors, by considering the provisions of Article 92 paragraph (6) of the Limited Liability Company Law, and subject to prior approval from the Company's Board of Commissioners.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

Mata Acara 6 **Agenda 6**	
Mata Acara Agenda	Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Determination of the amount of service fees and other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners and the members of the Company's Sharia Supervisory Board, as well as the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries/honoraria and/or other allowances for the members of the Company's Board of Directors for the 2024 Financial Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Rapat Kelima. ▪ Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to ask questions and/or express opinions on the Sixth Meeting Agenda, which was conducted concurrently with the Fifth Meeting Agenda. ▪ During the question-and-answer session, no shareholders or proxies present at the meeting raised any questions and/or opinions. ▪ Resolution-adoption were carried out through a voting process conducted verbally.
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 100 saham atau merupakan 0,000003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dalam Rapat. ▪ Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.240.232.895 saham atau merupakan 99,999997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.232.995 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam. The results of the voting are as follows: ▪ Shareholders who abstained totaled 100 shares, representing 0.000003% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ There were no shareholders and/or proxies who voted against at the Meeting. ▪ Shareholders who voted in favor totaled 3,240,232,895 shares, representing 99.999997% of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, shareholders of valid voting shares present at the General Meeting of Shareholders who abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Accordingly, the total number of shares voting in favor amounted to 3,240,232,995 shares, representing 100% of the total valid shares present at the Meeting, deciding by majority vote to approve the proposed resolution of the Sixth Meeting Agenda.
Keputusan Resolutions	1. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024. 2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024. 1. The determination of service fees and other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners and the members of the Company's Sharia Supervisory Board was proposed to be delegated to the President Commissioner of the Company, by considering the proposals and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of service fees/honoraria and/or any other form of allowances set for the members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board would be disclosed in the Annual Report for the 2024 Financial Year. 2. Authority and power were delegated to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or other allowances for the members of the Company's Board of Directors for the 2024 financial year, taking into account the proposals and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of salaries and/or any other form of allowances set for the members of the Board of Directors would be disclosed in the Annual Report for the 2024 Financial Year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

Mata Acara 7 **Agenda 7**	
Mata Acara Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2023 1. Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering during 2023 1. Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	Oleh karena Mata Acara Rapat Ketujuh hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan. Since the Seventh Meeting Agenda was for reporting purposes only, no question-and-answer session or decision-making was conducted.
Laporan Report	Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut: Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat. The report presented to the shareholders or their proxies is as follows: Acknowledging the accountability report on the realization of the use of proceeds from the entire Sustainable Public Offering of the Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023, as submitted to the Financial Services Authority, and the summary of which had been presented at the Meeting.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

6. Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa 28 Maret 2024

6. Resolutions and Realization of the Results of Extraordinary GMS on March 28, 2024

Mata Acara 1 **Agenda 1**	
Mata Acara Agenda	Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Mengalihkan Hak atau Menjaminkan Sebagian Besar atau Seluruh Piutang Milik Perseroan dalam Rangka Perolehan Pinjaman dan/atau Pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun Bukan Bank baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri termasuk dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2024. Approval of the Company's Plan to Transfer or Pledge a Substantial Portion or All of the Company's Receivables in Connection with Obtaining Loans and/or Financing from Banking Financial Institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) as well as Non-Bank Financial Institutions, both Domestic and International, including in relation to the Sustainable Public Offering of Continuing Bonds for the 2024 Financial Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat Pertama. ▪ Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to ask questions and/or express opinions on the First Meeting Agenda. ▪ During the question-and-answer session, no shareholders or proxies present at the meeting raised any questions and/or opinions. ▪ Resolution-adoption was carried out through a voting process conducted verbally.
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 100 saham atau merupakan 0,000003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dalam Rapat. ▪ Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.240.559.095 saham atau merupakan 99,999997 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.559.195 atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. The results of the voting are as follows: ▪ Shareholders who abstained totaled 100 shares, representing 0.000003% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ There were no shareholders and/or proxies who voted against at the Meeting. ▪ Shareholders who voted in favor totaled 3,240,559,095 shares, representing 99.999997% of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, shareholders of valid voting shares present at the General Meeting of Shareholders who abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Accordingly, the total number of shares voting in favor amounted to 3,240,559,195 shares, representing 100% of the total valid votes present at the Meeting, thereby resolving by majority vote to approve the proposed resolution of the Meeting Agenda.

Mata Acara 1 Agenda 1	
Keputusan Resolutions	1. Menyetujui tindakan Direksi menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Hibank Indonesia, dan PT Bank QNB Indonesia Tbk. 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2024 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan PUB V sampai total jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan PUB V dan pelaksanaannya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diperolehnya pernyataan efektif penerbitan PUB V dari Otoritas Jasa Keuangan maupun untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pengalihan hak atau pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas yang dijabarkan sebelumnya dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2024. 1. Approving the action of the Board of Directors to pledge a substantial portion or all of the Company's assets in the form of receivables arising from financing provided by the Company in connection with obtaining loans and/or funding from PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Hibank Indonesia, and PT Bank QNB Indonesia Tbk. 2. Approving the Company's plan to transfer or pledge a substantial portion or all of the Company's receivables in connection with obtaining loans and/or funding from banking financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) as well as non-bank financial institutions, both domestic and international, in the 2024 financial year, including the provision of security in relation to the issuance of PUB V up to a maximum total amount of Rp5,000,000,000,000,- insofar as it complies with the prevailing laws and regulations. 3. Granting authority and power, with substitution rights, to the Board of Directors to take all necessary actions in connection with the issuance of PUB V and its implementation within 2 (two) years from the date the effective statement for the issuance of PUB V was obtained from the Financial Services Authority, as well as to take all necessary actions in connection with the transfer of rights or the granting of security over a substantial portion or all of the Company's receivables as referred to in points 1 and 2 above, as previously described, with its implementation in the 2024 financial year.
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

7. Realisasi Hasil RUPS Luar Biasa 09 Oktober 2024

7. Realization of the Results of Extraordinary GMS on October 9, 2024

Mata Acara 1 Agenda 1	
Mata Acara Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Company's Management Composition.
Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Number of Shareholders Who Raised Questions and/or Expressed Opinions	▪ Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. ▪ Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ▪ Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. ▪ The meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present to ask questions and/or express opinions on the Meeting Agenda. ▪ During the question-and-answer session, no shareholders or proxies present at the meeting raised any questions and/or opinions. ▪ Resolutions were adopted through a voting process conducted verbally.

Mata Acara 1 Agenda 1	
Perhitungan Suara Vote Count	Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: ▪ Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 3.000 saham atau merupakan 0,0001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 212.314 saham atau merupakan 0,0066% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. ▪ Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 3.227.077.927 saham atau merupakan 99,9933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.227.080.927 atau merupakan 99,9934% dari total seluruh suara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan berdasarkan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat. The results of the voting are as follows: ▪ Shareholders and/or their proxies who abstained totaled 3,000 shares, representing 0.0001% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ Shareholders and/or their proxies who voted against totaled 212,314 shares, representing 0.0066% of the total valid shares present at the Meeting. ▪ Shareholders and/or their proxies who voted in favor totaled 3,227,077,927 shares, representing 99.9933% of the total valid shares present at the Meeting. In accordance with Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, shareholders of valid voting shares present at the General Meeting of Shareholders who abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted. Accordingly, the total number of shares voting in favor amounted to 3,227,080,927 shares, representing 99.9934% of the total valid votes present at the Meeting, thereby resolving by majority vote to approve the proposed resolution of the Meeting Agenda.
Keputusan Resolutions	1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Nona Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024, dengan demikian pengangkatan Nona Myrnie Zachraini Tamin berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 akan berakhir pada tanggal 30 September 2025, serta untuk meratifikasi/mengesahkan seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan Nona Myrnie Zachraini Tamin selaku Komisaris Independen Perseroan mulai dari sebelum pengangkatannya kembali pada Rapat yaitu tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat. Terhadap usulan pengangkatan kembali tersebut, Nona Myrnie Zachraini Tamin telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa Nona Myrnie Zachraini Tamin akan tetap independen guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Menyetujui untuk mengangkat: a. Tuan Taufik Aulia sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. b. Tuan Njauw Vido Onadi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan ketentuan: ▪ Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, Tuan Njauw Vido Onadi tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan; dan ▪ Dalam hal pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Tuan Njauw Vido Onadi akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai Direktur Perseroan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. 3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Nyonya Sarastri Baskoro[1]) Komisaris : Nyonya Thilagavathy Nadason Komisaris : Tuan Taufik Aulia Komisaris Independen : Nona Myrnie Zachraini Tamin[2]) Komisaris Independen : Nyonya Rallyati A. Wibowo, S.E.[3]) DIREKSI: Presiden Direktur : Tuan Djaja Suryanto Sutandar Wakil Presiden Direktur : Tuan Njauw Vido Onadi[4]) Direktur : Tuan Anthony Yuarez Panggabean Direktur : Tuan Wibowo Direktur : Nyonya Cincin Lisa Hadi

Mata Acara 1
Agenda 1

Untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan ketentuan:

1. Pengangkatan Nyonya Sarastri Baskoro sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengangkatan Nyonya Rallyati A. Wibowo, S.E. sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2024.
3. Masa jabatan Nona Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan berakhir pada 30 September 2025.
4. Pengangkatan Tuan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, Tuan Njauw Vido Onadi tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan.

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dimaksud, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

---

1. Approving the reappointment of Ms. Myrnie Zachraini Tamin as the Company's Independent Commissioner for a 1-year term, effective as of October 1, 2024. Accordingly, Ms. Myrnie Zachraini Tamin's appointment based on the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders dated March 28, 2024 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 would be ending on September 30, 2025, as well as ratifying/validating all legal actions taken by Ms. Myrnie Zachraini Tamin in her capacity as the Company's Independent Commissioner starting from before her reappointment at the Meeting, namely from October 1, 2024 until the closing of the Meeting. With respect to the proposed reappointment, Ms. Myrnie Zachraini Tamin had submitted a statement to the Company stating that she will remain independent to comply with Article 25 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 33/POJK.04/2014 on Directors and Boards of Commissioners of Issuers or Public Companies.
2. Approving the appointment of:
   a. Mr. Taufik Aulia as a Commissioner of the Company for a term of office starting from the closing of the Meeting until the end of the term of office of the Company's Board of Commissioners, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
   b. Mr. Njauw Vido Onadi, who was currently serving as a Director of the Company, as the Company's Vice President Director for a term of office effective as of the closing of the Meeting and after obtaining approval from the Financial Services Authority, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, subject to the following conditions:
      - As long as approval from the Financial Services Authority has not been obtained, Mr. Njauw Vido Onadi will remain serving as a Director of the Company; and
      - If the appointment of Mr. Njauw Vido Onadi as the Company's Vice President Director is not approved by the Financial Services Authority, Mr. Njauw Vido Onadi will remain serving as a Director of the Company, with a term of office in accordance with his appointment as Director of the Company, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
3. Determining that, as of the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

   BOARD OF COMMISSIONERS:
   President Commissioner/
   Independent Commissioner : Mrs. Sarastri Baskoro[1])
   Commissioner : Mrs. Thilagavathy Nadason
   Commissioner : Mr. Taufik Aulia
   Independent Commissioner : Ms. Myrnie Zachraini Tamin[2])
   Independent Commissioner : Mrs. Rallyati A. Wibowo, S.E.[3])

   BOARD OF DIRECTORS:
   President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar
   Vice President Director : Mr. Njauw Vido Onadi[4])
   Director : Mr. Anthony Yuarez Panggabean
   Director : Mr. Wibowo
   Director : Mrs. Cincin Lisa Hadi

   For the terms of office of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, which shall end at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, the following provisions apply:
   1. The appointment of Mrs. Sarastri Baskoro as President Commissioner as well as Independent Commissioner of the Company shall become effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority.
   2. The appointment of Mrs. Rallyati A. Wibowo, S.E. as Independent Commissioner of the Company shall become effective as of October 2, 2024.
   3. The term of office of Ms. Myrnie Zachraini Tamin as Independent Commissioner of the Company should end on September 30, 2025.
   4. The appointment of Mr. Njauw Vido Onadi as Vice President Director of the Company shall become effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority, and until such approval is obtained, Mr. Njauw Vido Onadi shall continue to serve as Director of the Company.
4. Granting authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary in connection with the change in the Company's management composition, including restating and/or reaffirming such change in a Notarial Deed, notifying and announcing it to the public (if required), and submitting registrations, obtaining receipt of notifications, or submitting applications for approval to the relevant authorities.

Mata Acara 1 Agenda 1	
Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow up	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Had been realized in 2024.

8. Perhitungan Suara / 8. Vote Count

RUPSLB 11 Januari 2024
EGMS on January 11, 2024

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama First Agenda Item		
2.349.891.429 saham (67,5%) 2,349,891,429 shares (67.5%)	-	-

RUPST 28 Maret 2024
AGMS on March 28, 2024

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama First Agenda Item		
3.240.232.895 saham (99,999997%) 3,240,232,895 shares (99.999997%)	-	100 saham (0,000003%) 100 shares (0.000003%)
Mata Acara Kedua Second Agenda Item		
3.240.052.895 saham (99,994442%) 3,240,052,895 shares (99.994442%)	-	180,100 saham (0.005558%) 180,100 shares (0.005558%)
Mata Acara Ketiga Third Agenda Item		
3.240.232.895 saham (99.999997%) 3,240,232,895 shares (99.999997%)	-	100 saham (0,000003%) 100 shares (0.000003%)
Mata Acara Keempat Fourth Agenda Item		
3.240.232.895 saham (99.999997%) 3,240,232,895 shares (99.999997%)	-	100 saham (0,000003%) 100 shares (0.000003%)
Mata Acara Kelima Fifth Agenda Item		
3.240.232.895 saham (99.999997%) 3,240,232,895 shares (99.999997%)	-	100 saham (0,000003%) 100 shares (0.000003%)
Mata Acara Keenam Sixth Agenda Item		
3.240.232.895 saham (99.999997%) 3,240,232,895 shares (99.999997%)	-	100 saham (0,000003%) 100 shares (0.000003%)
Mata Acara Ketujuh Seventh Agenda Item		

Mata Acara Rapat Ketujuh hanya bersifat Laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
Since the Seventh Meeting Agenda was only in the form of a report, no question-and-answer session or decision-making was carried out.

RUPSLB 28 Maret 2024
EGMS on March 28, 2024

Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Abstain**
Mata Acara Pertama **First Agenda Item**		
3.240.559.095 saham (99,999997%) 3,240,559,095 shares (99.999997%)	-	100 saham (0,000003%) 100 shares (0.000003%)

RUPSLB 09 Oktober 2024
EGMS on October 9, 2024

Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Abstain**
Mata Acara Pertama **First Agenda Item**		
3.227.077.927 saham (99,9933%) 3,227,077,927 shares (99.9933%)	212.314 saham (0,0066%) 212,314 shares (0.0066%)	3.000 saham (0,0001%) 3,000 shares (0.0001%)

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata kelola yang baik bagi Perseroan melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara kolektif. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memastikan setiap kebijakan, program kerja, serta pengelolaan anggaran berjalan sejalan dengan visi, misi, dan ketentuan Anggaran Dasar, sekaligus memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan.

The Board of Commissioners plays an important role in maintaining good governance for the Company's balance through its collectively exercised supervisory function. In its implementation, the Board of Commissioners ensures that every policy, work program, and budget management aligns with the Company's vision, mission, and Articles of Association, while also providing guidance and recommendations to the Board of Directors to support the achievement of the Company's strategic objectives.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
6. POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
7. Anggaran Dasar Perseroan.
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 45 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 14 tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 38 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LEGAL REFERENCES

The legal references for the establishment and appointment of the Company's Board of Commissioners refers to several provisions, including the following:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.
3. POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. POJK Number 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper Test for the Key Parties of Financial Services Institutions.
5. POJK Number 47/POJK.05/2020 on Business Licensing and Institution of Financing Companies and Sharia Financing Companies, as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.
6. POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
7. The Company's Articles of Association.
8. Deed of Statement of Meeting Decisions Number 45 dated March 28, 2024, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City.
9. Deed of Statement of Company Meeting Decisions Number 14 dated October 9, 2024, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City.
10. Deed of Statement of Company Meeting Decisions Number 38 dated October 31, 2024, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City.
11. Deed of Statement of Company Meeting Decisions Number 1 dated October 1, 2025, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki Piagam Dewan Komisaris yang menjadi pedoman bagi setiap anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Piagam ini disahkan pada 30 November 2022 dan disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Piagam tersebut dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan ketentuan dan praktik tata kelola terkini, serta dapat diakses publik melalui www.wom.co.id. Secara umum, Piagam ini mengatur tentang:

1. Landasan Hukum Piagam.
2. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris.
3. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
4. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
6. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris.
7. Jabatan Anggota Dewan Komisaris Berakhir.
8. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
9. Kewenangan Anggota Dewan Komisaris.
10. Waktu Kerja.
11. Keanggotaan dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
12. Nilai-nilai Dasar (*Core Values*) dan Etika Kerja.
13. Transparansi Anggota Dewan Komisaris.
14. Rapat Dewan Komisaris.
15. Remunerasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
16. Sertifikasi dan Syarat Berkelanjutan.
17. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan:

1. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan anggota Dewan Komisaris harus:
    a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
    b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
    c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
        - Tidak pernah dinyatakan pailit;
        - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Company has a Board of Commissioners Charter that serves as a guideline for each member in carrying out the supervisory and advisory functions to the Board of Directors. This Charter was ratified on November 30, 2022, and was prepared to ensure that duties are performed effectively, transparently, and accountably. The Charter is evaluated periodically to remain aligned with prevailing regulations and governance practices, and is accessible to the public through www.wom.co.id. In general, the Charter regulates the following matters:

1. Legal Basis of the Charter.
2. Board of Commissioners' Structure and Composition.
3. Limitation on Concurrent Positions of Board of Commissioners' Members.
4. Appointment of Board of Commissioners' Members.
5. Term of Office of Board of Commissioners' Members.
6. Resignation of Board of Commissioners' Members.
7. Termination of Office of Board of Commissioners' Members.
8. Board of Commissioners' Duties and Responsibilities.
9. Authorities of Board of Commissioners' Members.
10. Working Hours.
11. Membership in the Integrated Governance Committee.
12. Core Values and Work Ethics.
13. Transparency of Board of Commissioners' Members.
14. Board of Commissioners' Meetings.
15. Board of Commissioners' Remuneration and Performance Evaluation.
16. Certification and Continuing Requirements.
17. Reporting and Accountability.

CRITERIA FOR BOARD OF COMMISSIONERS' MEMBERS

Those who may be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals meeting the following criteria and requirements:

1. POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which requires members of the Board of Commissioners to be individuals who are:
    a. Possessing good character, morals, and integrity.
    b. Being legally competent.
    c. Having, within 5 (five) years prior to appointment and during their term of office:
        - Never being declared bankrupt;
        - Never serving as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;

- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

  1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
  2) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

2. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang mensyaratkan untuk anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK maka harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan:
   a. Persyaratan integritas meliputi:
      - Cakap melakukan perbuatan hukum.
      - Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
      - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
      - Memiliki komitmen terhadap pengembangan lembaga jasa keuangan yang sehat.
      - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama.
   b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
      - Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
      - Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
   c. Persyaratan kelayakan keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
      - Memiliki reputasi keuangan sebagaimana telah dijabarkan pada persyaratan reputasi keuangan di atas.

- Never being convicted of a criminal offense harming state finances and/or related to the financial sector; and
- Never serving as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their term of office:

  1) Failing to convene an Annual GMS;
  2) Having their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the GMS or failing to provide accountability to the GMS; and
  3) Causing a company licensed, approved, or registered with OJK to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial statements to OJK.

d. Having a commitment to complying with laws and regulations.
e. Possessing knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.

2. POJK Number 27/POJK.03/2016 on the Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions, which requires members of the Board of Commissioners obtaining approval from OJK by passing OJK's fit and proper test, thus meeting the following fit and proper assessment requirements:
   a. Integrity requirements, including:
      - Being legally competent.
      - Possessing good character and morals, at minimum being demonstrated by an attitude of complying with prevailing regulations, including never being convicted for a criminal offense within a certain period prior to nomination.
      - Having a commitment to complying with laws and regulations and supporting OJK policies.
      - Having a commitment to supporting the development of a sound financial services institution.
      - Not being included among parties prohibited from becoming key parties.
   b. Financial reputation requirements, at minimum evidenced by:
      - Not having non-performing loans and/or financing.
      - Never being declared bankrupt and/or never being a shareholder, controlling shareholder of an insurance company who is not a shareholder, member of the Board of Directors, or member of the Board of Commissioners being found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years prior to nomination.
   c. Financial eligibility requirements, at a minimum demonstrated by:
      - Having a financial reputation as described in the financial reputation requirements above.

- Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis lembaga jasa keuangan.
- Memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila lembaga jasa keuangan menghadapi kesulitan keuangan.

d. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan lembaga jasa keuangan dimana dicalonkan.

3. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dimaksud paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan hingga tanggal pengunduran dirinya dalam rapat tersebut.

Apabila pengunduran diri mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut dinyatakan sah setelah disetujui oleh RUPS dan telah diangkat pengganti untuk memenuhi jumlah minimal tersebut. Selain itu, usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi, sedangkan jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir karena dinyatakan pailit, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan RUPS, atau masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali.

- Having the financial capacity supporting the business development of the financial services institution.
- Having the commitment to undertaking necessary measures if the financial services institution faces financial difficulties.

d. Competency requirements, at a minimum covering knowledge and/or experience supporting the management of the financial services institution for which the individual is nominated.

3. Fulfilling the requirements for serving as a member of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association.

TERM OF OFFICE PROVISIONS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office of all serving members of the Board of Commissioners will expire upon the closing of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders to dismiss one or more members of the Board of Commissioners at any time prior to the expiration of their term of office. The Company's Articles of Association stipulate that members of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed.

MECHANISM FOR BOARD OF COMMISSIONERS' RESIGNATION AND DISMISSAL

The mechanism for the resignation and dismissal of members of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association stipulates that each has the right to resign from their position and is required to submit a written resignation letter to the Company at least 90 days prior to their resignation date. The Company is obliged to hold a General Meeting of Shareholders to decide on the resignation request no later than 90 days after receipt of the resignation letter, and the resigning member of the Board of Commissioners shall remain accountable for their actions from the date of appointment until the date of resignation at the meeting.

If the resignation results in the number of the Board of Commissioners' members being less than 3 (three) people, then the resignation is declared valid after being approved by the GMS and a replacement has been appointed to meet the minimum number. In addition, the proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of the Board of Commissioners' members to the GMS must consider the recommendations of the committee that performs the nomination function, while the term of office of a member of the Board of Commissioners may end due to being declared bankrupt, resigning, no longer fulfilling the provisions of OJK regulations and other laws and regulations, death, being dismissed based on the GMS, or his/her term of office has ended and not being reappointed.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu:

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND BASIS FOR THE APPOINTMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS' MEMBERS

The structure and composition of the members of the Company's Board of Commissioners have complied with the applicable requirements, as follows:

No.	POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya POJK Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Companies, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. A company with assets exceeding Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah) is required to have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.	Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 4 (empat) anggota Dewan Komisaris. As of December 31, 2025, the Company has 4 (four) members of the Board of Commissioners.
2.	Salah seorang anggota Dewan Komisaris wajib diangkat sebagai Komisaris Utama atau yang setara. One of the members of the Board of Commissioners must be appointed as the President Commissioner or an equivalent position.	Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) Presiden Komisaris. As of December 31, 2025, the Company has 1 (one) President Commissioner.
3.	Dalam hal terdapat kepemilikan perusahaan oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), perusahaan wajib memastikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia. If the company has foreign legal entity ownership and/or foreign individual ownership, either directly or indirectly, of at least 25% (twenty-five percent), the company must ensure that at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.	Dalam kepemilikan saham Perseroan terdapat kepemilikan asing secara tidak langsung lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan Perseroan telah memenuhi ketentuan yaitu per 31 Desember 2025, 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang atau 75% (delapan puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia. The Company's share ownership includes indirect foreign ownership of more than 25% (twenty-five percent), and the Company has complied with the requirements, namely that as of December 31, 2025, 3 (three) out of 4 (four) members, or 75% (seventy-five percent), of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.
4.	Dalam hal terdapat kepemilikan perusahaan oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 25% (dua puluh lima persen), perusahaan wajib memastikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. If the company has foreign legal entity ownership and/or foreign individual ownership, whether directly or indirectly, of more than 25% (twenty-five percent), the company must ensure that at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners reside within the territory of the Republic of Indonesia.	Dalam kepemilikan saham Perseroan terdapat kepemilikan asing secara tidak langsung lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan Perseroan telah memenuhi ketentuan yaitu per 31 Desember 2025, 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. The Company's share ownership includes indirect foreign ownership of more than 25% (twenty-five percent), and the Company has complied with the requirements, namely that as of December 31, 2025, 3 (three) out of 4 (four) members, or 75% (seventy-five percent), of the Board of Commissioners are domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.
5.	Bagi perusahaan yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS. For companies that establish a Remuneration and Nomination Committee, the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee must be taken into account for every proposal for the appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners submitted to the GMS.	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi serta untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS. The Company has established a Nomination and Remuneration Committee, and in appointing members of the Board of Commissioners, the Company has considered the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee and obtained approval from the GMS.
6.	Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. A company with total assets exceeding Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah) is required to have at least 1 (one) Independent Commissioner.	Per 31 Desember 2025, 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang atau 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Perseroan merupakan Komisaris Independen. As of December 31, 2025, 2 (two) out of 4 (four) members, or 50% (fifty percent), of the Company's Board of Commissioners are Independent Commissioners.
7.	Perusahaan wajib memastikan jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. The Company must ensure that the number of Board of Commissioners' members is at most the same as the number of Board of Directors' members.	Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Dewan Komisaris (4 anggota) lebih sedikit dari jumlah anggota Direksi (5 anggota). As of December 31, 2025, the number of Board of Commissioners' members (4 members) is less than the number of Board of Directors' members (5 members).

No.	POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. If the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.	Per 31 Desember 2025, 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang atau 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Perseroan merupakan Komisaris Independen. As of December 31, 2025, 2 (two) out of 4 (four) members, or 50% (fifty percent), of the Company's Board of Commissioners are Independent Commissioners.
2.	1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. 1 (one) of the members of the Board of Commissioners must be appointed as the main commissioner or president commissioner.	Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) Presiden Komisaris. As of December 31, 2025, the Company has 1 (one) President Commissioner.
3.	Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners submitted to the GMS must consider the recommendations of the Board of Commissioners or the committee performing the nomination function.	Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS. The appointment of the Company's Board of Commissioners has considered the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and has obtained approval from the GMS.

POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura POJK Number 47/POJK.05/2020 on Business Licensing and Institution of Financing Companies and Sharia Financing Companies, as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dewan Komisaris wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris yang merupakan Warga Negara Indonesia. A company that employs foreign workers to serve as members of the Board of Commissioners must have at least 50% (fifty percent) of its Board of Commissioners comprising Indonesian citizens.	Terdapat 1 (satu) orang dari 4 (empat) orang atau 25% (dua puluh lima persen) dari anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing. Dengan demikian, per 31 Desember 2025, anggota Dewan Komisaris yang merupakan Warga Negara Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari anggota Dewan Komisaris. There is 1 (one) individual out of 4 (four), or 25% (twenty-five percent), of the members of the Board of Commissioners who is a foreign worker. Accordingly, as of December 31, 2025, 3 (three) out of 4 (four) members, or 75% (seventy-five percent), of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.

Merujuk pada ketentuan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan maka calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sesuai jabatannya.

SUSUNAN ANGGOTA KOMISARIS PERSEROAN [GRI 2-11]

Di tahun 2025, terjadi perubahan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun susunan dan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Referring to POJK Number 27/POJK.03/2016 on the Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions, candidates for members of the Board of Commissioners are required to obtain approval from OJK before performing their actions, duties, and functions. All current members of the Company's Board of Commissioners have obtained approval from OJK by passing the fit and proper test prior to performing their actions, duties, and functions in accordance with their respective positions.

COMPOSITION OF MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS [GRI 2-11]

In 2025, there was a change in the number and composition of the Board of Commissioners based on Deed of Statement of the Company's Meeting Number 1 dated October 1, 2025, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta. The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Sarastri Baskoro	Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2024 Resolution of the Annual GMS dated March 28, 2024	Efektif menjabat tanggal 17 Oktober 2024 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Effective as of October 17, 2024 – 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2024 Resolution of the Annual GMS dated March 28, 2024	RUPS Tahunan Tahun 2024 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2024 – Annual GMS 2026
Taufik Aulia	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2024 Resolution of the Extraordinary GMS dated October 9, 2024	RUPS Luar Biasa Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 on October 9, 2024 – Annual General Meeting of Shareholders 2026
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2024 Resolution of the Annual GMS dated March 28, 2024	Efektif menjabat tanggal 2 Oktober 2024 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Effective as of October 2, 2024 – 2026 Annual General Meeting of Shareholders

RANGKAP JABATAN

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di instansi/perusahaan/lembaga/organisasi lain sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris.

CONCURRENT POSITIONS

Information regarding concurrent positions held by members of the Board of Commissioners in other institutions/companies/agencies/organizations throughout 2025 can be found in Company Profile Chapter concerning the profiles of each member of the Board of Commissioners.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara-cara sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Memiliki komitmen untuk mengawasi tindakan Perseroan dengan mengedepankan profesionalismenya.
   b. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun juga, khususnya dari pemegang saham pengendali.
   c. Menghindari terjadinya campur tangan atau dominasi yang tidak wajar dari pihak manapun juga serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari benturan kepentingan.
   d. Tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri, tercermin dari pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengenai hal-hal di bawah ini:
   a. Tidak pernah memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
   b. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS' INDEPENDENCE

1. In carrying out the duties and responsibilities, the Board of Commissioners acts independently, among others, in the following ways as outlined in the Board of Commissioners' Charter:
   a. Maintaining a commitment to supervising the Company's actions while prioritizing professionalism.
   b. Ensuring that decision-making in Board of Commissioners' meetings is objective and free from pressure from any party, particularly from controlling shareholders.
   c. Avoiding undue interference or domination by any party, remaining unaffected by unilateral interests, and being free from conflicts of interest.
   d. Refraining from actions that may affect the ability to act independently as regulated by applicable laws.
2. The Board of Commissioners consistently upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company over personal interests, as reflected in each member's statements on the following:
   a. Never using his/her position in the Company for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the Company's profits.
   b. Never taking and/or receiving personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities established by the GMS.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS [GRI 2-12]

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
   a. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
   b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
   c. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
   d. Dewan Komisaris memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.
   e. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha di semua tingkatan organisasi.
   f. Dewan Komisaris memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
   g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite paling kurang komite-komite sebagaimana di bawah ini dan atas setiap komite yang dimaksud tersebut dipandu oleh pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris:
      - Komite Audit;
      - Komite Nominasi dan Remunerasi;
      - Komite Pemantau Risiko.
   h. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi kinerja komite terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komite yang dimaksud pada huruf (g) angka ini sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
   i. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah Perseroan memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
   j. Dewan Komisaris mengkaji visi dan misi Perseroan.
   k. Dewan Komisaris mengkaji dan menyetujui laporan tahunan Perseroan.
   l. Dewan Komisaris menyusun dan memiliki piagam Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya Perseroan.

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES [GRI 2-12]

1. Each member of the Board of Commissioners may not act individually, but must act based on the decisions of the Board of Commissioners.
2. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners:
   a. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the policies of the Board of Directors in managing the Company and providing advice to the Board of Directors.
   b. The Board of Commissioners is required to direct, monitor, and evaluate the implementation of the Company's strategic policies.
   c. The Board of Commissioners oversees the Board of Directors' implementation of responsibilities on anti-money laundering and counter-terrorist financing programs.
   d. The Board of Commissioners ensures that discussions related to anti-money laundering and prevention of terrorism financing are included in the meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
   e. The Board of Commissioners monitors the implementation of the Good Corporate Governance in all business activities at every level of the organization.
   f. The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit, external auditors, OJK supervision, and/or other regulatory authorities' oversight results.
   g. In order to support the effectiveness of carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish committees, at a minimum, as follows, with each committee guided by charters and work procedures established and/or approved by the Board of Commissioners:
      - Audit Committee;
      - Nomination and Remuneration Committee;
      - Risk Oversight Committee.
   h. The Board of Commissioners must evaluate the performance of the relevant committees in carrying out their duties and responsibilities at least at the end of each financial year.
   i. The Board of Commissioners provides approval when the Company's Sharia Supervisory Board requires assistance from committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners.
   j. The Board of Commissioners reviews the Company's vision and mission.
   k. The Board of Commissioners reviews and approves the Company's annual report.
   l. The Board of Commissioners prepares and maintains a Board of Commissioners' charter to serve as a guideline for the Board in performing its functions, duties, and responsibilities in supervising the Company's operations.

m. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang berlaku di Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.
n. Dewan Komisaris menerima pengaduan/pelaporan secara tertulis dari karyawan Perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga terkait temuan dugaan pelanggaran sehubungan dengan pelaporan keuangan Perseroan.
o. Dewan Komisaris melakukan tindak lanjut penyelesaian pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan Perseroan dengan mempertimbangkan hasil telaahan yang telah dilakukan Komite Audit Perseroan terkait pengaduan/pelaporan tersebut.
p. Dewan Komisaris menyampaikan laporan setiap kejadian *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perseroan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK terkait penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan.
q. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan.
r. Dewan Komisaris untuk sementara diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam keadaan apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi dan dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain hal dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut.
s. Dewan Komisaris memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur tertulis layanan pengaduan yang berlaku di Perseroan.
t. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan atas ketentuan peraturan OJK terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
u. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

m. The Board of Commissioners conducts meetings that, at a minimum, cover the frequency, attendance, and decision-making procedures as regulated in the Company's Board of Commissioners' Charter and the Company's Articles of Association.
n. The Board of Commissioners receives written complaints/reports from the Company's employees, shareholders, or third parties on alleged violations related to the Company's financial reporting.
o. The Board of Commissioners follows up on resolving complaints/reports of alleged violations related to the Company's financial reports, considering the review conducted by the Company's Audit Committee on such complaints/reports.
p. The Board of Commissioners submits reports of any fraud incident expected to have a significant negative impact on the Company to OJK in accordance with OJK regulations on the operation of financing companies and Sharia business units of financing companies.
q. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that risk management implementation is effective in accordance with the Company's characteristics, complexity, and risk profile.
r. The Board of Commissioners is temporarily required to manage the Company if all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company has no member of the Board of Directors and in such cases, the Board of Commissioners' meeting has the right to grant temporary authority to one or more of its members under their joint responsibility, while still observing the provisions of the Company's Articles of Association on the convening of a GMS to revoke or affirm the temporary dismissal of member of the Board of Directors.
s. The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors has and implements written procedures for handling complaints applicable in the Company.
t. The Board of Commissioners is required to supervise the Board of Directors' compliance with OJK regulations on financial literacy, financial inclusion, consumer protection, and community protection in the financial services sector.
u. The Board of Commissioners carries out other duties and responsibilities assigned by the Company's Articles of Association, internal regulations, and the prevailing laws and regulations applicable to the Board of Commissioners.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN KOMISARIS

Tugas-tugas pokok Presiden Komisaris:

1. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris termasuk agenda rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Melakukan pemanggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
    a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
    b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
    c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
    d. Setiap anggota Dewan Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
4. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya, dengan ketentuan:
    a. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
    b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

PRESIDENT COMMISSIONER'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Main Duties of the President Commissioner:

1. May propose the holding of Board of Commissioners meetings, including setting the meeting agenda, while observing the provisions of the Company's Articles of Association.
2. Convening and chairing meetings of the Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. Ensuring that the Board of Commissioners is making decisions effectively based on accurate and complete information, including ensuring that:
    a. All strategic and significant issues become the concern of the Board of Commissioners;
    b. Discussing existing problems thoroughly and carefully;
    c. Giving all members of the Board of Commissioners the opportunity to contribute effectively;
    d. Providing each member of the Board of Commissioners with relevant information in a timely manner, including giving a brief explanation of the issues to be discussed in the Board of Commissioners meeting.
4. Performing other responsibilities assigned by the Board of Commissioners from time to time.

BOARD OF COMMISSIONERS' AUTHORITIES

1. Members of the Board of Commissioners, whether collectively or individually, at any time during the Company's office hours, have the right to enter the Company's buildings, premises, or other locations used or controlled by the Company, and have the right to examine all books, documents, and other evidence. They are entitled to inspect and reconcile the state of cash and other assets, as well as to be informed of all actions undertaken by the Board of Directors.
2. In performing their duties, the Board of Commissioners has the right to obtain explanations from the Board of Directors or any member of the Board of Directors on all matters required by the Board of Commissioners.
3. The Board of Commissioners has the right at any time to temporarily suspend one or more members of the Board of Directors if such members act contrary to the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations, or if they harm the purposes and objectives of the Company, or neglect their duties, subject to the following provisions:
    a. The temporary suspension must be notified in writing to the concerned member, accompanied by the reasons.
    b. Within a maximum period of 90 (ninety) days from the date of temporary suspension, the Board of Commissioners must convene a GMS to revoke or confirm the temporary suspension. In the GMS, the concerned member of the Board of Directors shall be given the opportunity to be present to defend themselves.



c. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk tujuan tersebut diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) angka ini atau RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) angka ini diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka ini menjadi batal.

4. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
6. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas.

PEMBIDANGAN BIDANG TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan fungsi pengawasan secara kolektif dan kolegial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak menetapkan pembidangan khusus atas tugas Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan pengawasan atas kebijakan pengurusan, kinerja Direksi, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik dilakukan secara bersama oleh Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS BARU

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan mengikuti program orientasi untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya

c. The GMS referred to in point (b) shall be chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is not present, and this absence does not need to be proven to any other party, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners present and appointed for this purpose among the members present at the GMS.

d. If the period for convening the GMS referred to in point (b) lapses, or if the GMS is convened but cannot adopt any resolution, the temporary suspension referred to in this point shall be nullified.

4. The Board of Commissioners is authorized to grant approval to the Board of Directors in carrying out certain legal acts as stipulated in the Company's Articles of Association.
5. The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members give their written approval to the proposals by signing such approval. Decisions made in this manner shall have the same force as decisions validly made in a Board of Commissioners meeting.
6. If deemed necessary, the Board of Commissioners has the right to request the assistance of experts in performing its duties for a limited period of time.

BOARD OF COMMISSIONERS' DIVISION OF DUTIES

The Company's Board of Commissioners performs its supervisory function collectively and collegially in accordance with applicable laws and regulations. The Company does not stipulate a specific division of duties for the Board of Commissioners; therefore, supervision of management policies, the performance of the Board of Directors, and the implementation of good corporate governance principles is carried out jointly by members of Board of Commissioners in accordance with their respective authorities.

POLICY AND ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Newly appointed members of the Board of Commissioners are required to participate in an orientation program to provide them with guidance so they can gain an understanding of the Company in a relatively short time, enabling them to perform their duties

secara efektif dan efisien. Selain itu, setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Oleh karena itu, program pengenalan tidak diselenggarakan.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS [G-05]

Perseroan secara konsisten mendukung peningkatan kapasitas Dewan Komisaris melalui berbagai program pelatihan guna memperkuat pemahaman dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Perseroan juga telah menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam SK Nomor 039/SK/HCSD/02-25 - SK Sertifikasi Profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Versi 3.

effectively and efficiently. In addition, each member of the Board of Commissioners must hold a certification in the field of finance issued by a Professional Certification Agency registered with the Financial Services Authority.

Throughout 2025, no new members of the Board of Commissioners were appointed. Therefore, the introduction program was not conducted.

BOARD OF COMMISSIONERS' COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM [G-05]

The Company consistently supports the enhancement of the Board of Commissioners' capacity through various training programs to strengthen understanding and the effectiveness of supervisory functions. The Company has also established a competency development policy for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as stipulated in Decision Letter Number 039/SK/HCSD/02-25 – Professional Certification Decision Letter issued by the Professional Certification Institute Version 3.

No.	Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1.	Sarastri Baskoro (Presiden Komisaris/Komisaris Independen) (President Commissioner/ Independent Commissioner)	Seminar Nasional *Economic Outlook* 2026 National Seminar Economic Outlook 2026	*Online Meeting*	2 September 2025 September 2, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Financial Services Association (APPI)
2.	Thilagavathy Nadason (Komisaris) (Commissioner)	Seminar Nasional *Economic Outlook* 2026 National Seminar Economic Outlook 2026	*Online Meeting*	2 September 2025 September 2, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Financial Services Association (APPI)
3.	Taufik Aulia (Komisaris) (Commissioner)	Seminar Nasional: "*Will Trade War Create Financial Turmoil*?" National Seminar: "Will Trade War Create Financial Turmoil?"	Ballroom Hotel Pullman, Thamrin, DKI Jakarta	6 Mei 2025 May 6, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Financial Services Association (APPI)
4.	Rallyati A. Wibowo, S.E. (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Seminar Nasional: "*Will Trade War Create Financial Turmoil*?" National Seminar: "Will Trade War Create Financial Turmoil?"	Ballroom Hotel Pullman, Thamrin, DKI Jakarta	6 Mei 2025 May 6, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Financial Services Association (APPI)

KEPUTUSAN DAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris mengeluarkan keputusan Dewan Komisaris sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali.

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

- Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan laporan pengawasan rencana bisnis Perseroan Semester I-2024 dan Semester II-2024;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik secara independen, sebagaimana telah diatur dengan aturan hukum, kebijakan dan perundang-undangan yang terkait;
- Sesuai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, dengan memberikan masukan serta rekomendasi mengenai pelaksanaan rencana bisnis dan pencapaian target Perseroan;

- Selain itu, pengawasan aktif Dewan Komisaris terlihat dalam pelaksanaan rapat koordinasi bersama Direksi, maupun komite-komite. Untuk membantu tugas dalam rangka pengawasan terhadap jalannya Perseroan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

PROSEDUR DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang berada di bawah pengawasannya. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS' DECISIONS AND APPROVALS

Throughout 2025, the Board of Commissioners issued a total of 39 (thirty nine) Board of Commissioners' decisions.

REPORT ON THE SUPERVISORY DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS FOR 2025

- Throughout 2025, the Board of Commissioners carried out supervision of the Company's business plan reports for the first half of 2024 and the second half of 2024;
- The Board of Commissioners had performed its duties and responsibilities independently in accordance with the principles of Good Corporate Governance, as regulated by applicable laws, policies, and regulations;

- In accordance with its functions, duties, and responsibilities, the Board of Commissioners had exercised its supervisory and advisory roles by providing input and recommendations regarding the implementation of the business plan and the achievement of the Company's targets;
- In addition, the Board of Commissioners' active supervision was reflected in the implementation of coordination meetings with the Board of Directors, as well as with committees. To support its supervisory duties over the Company's operations, the Board of Commissioners had established the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Oversight Committee.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

PROCEDURES AND CRITERIA FOR ASSESSING THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners periodically evaluates the performance of committees under its supervision. This evaluation is conducted annually through a self-assessment mechanism using the following criteria:

1. Penilaian Kinerja Komite oleh Seluruh Anggota Dewan Komisaris
   Kriteria penilaian kinerja komite oleh seluruh anggota Dewan Komisaris mencakup efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam membantu Dewan Komisaris.
2. Penilaian Kinerja Komite oleh Anggota Dewan Komisaris yang Menjadi Anggota Komite
   Kriteria penilaian kinerja oleh anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota komite mencakup penilaian pada area-area di bawah ini:
   a. Efektivitas komite dalam menggunakan wewenang, sumber daya, dan akses yang dimilikinya atas informasi.
   b. Efektivitas pertemuan komite dalam membahas isu-isu.
   c. Efektivitas komite dalam menangani masalah serta melaksanakan tanggung jawab komite berdasarkan Pedoman atau Piagam Komite.
   d. Efektivitas komite dilihat dari komposisi komite dalam menjalankan tugasnya.
   e. Efektivitas Komite dilihat dari kemampuan komite untuk memberikan pemahaman dan dokumen yang tepat waktu dan memadai kepada Dewan Komisaris.
   f. Efektivitas kepemimpinan ketua komite di dalam komite.

1. Committee Performance Assessment by All Members of the Board of Commissioners
   The full Board of Commissioners evaluates Committee performance based on the effectiveness with which the Committee discharges its duties and supports the Board's oversight functions.
2. Committee Performance Assessment by Board of Commissioners Members Serving on the Committee
   The criteria for assessing performance by Board of Commissioners members who are also committee members include evaluation in the following areas:
   a. The effectiveness of the committee in utilizing its authority, resources, and access to information.
   b. The effectiveness of committee meetings in discussing issues.
   c. The effectiveness of the committee in handling issues and performing its responsibilities based on the Committee Guidelines or Charter.
   d. The effectiveness of the committee as reflected in its composition in carrying out its duties.
   e. The effectiveness of the committee in providing timely and adequate understanding and documentation to the Board of Commissioners.
   f. The effectiveness of the committee chairman's leadership within the committee.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen berperan penting dalam menjaga objektivitas dan integritas pengawasan di Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Komisaris Independen harus bebas dari pengaruh pihak manapun, baik dari aspek keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham pengendali.

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dari 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan atau setara dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sehingga keanggotaan Komisaris Independen pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Per 31 Desember 2025, seluruh Komisaris Independen Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK serta telah diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

Independent Commissioners play an important role in maintaining the objectivity and integrity of the Company's supervision. In carrying out their functions, Independent Commissioners must remain free from the influence of any party, whether in terms of finance, management, share ownership, or family relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or controlling shareholders.

As of December 31, 2025, the Company had 2 (two) Independent Commissioners out of a total of 4 (four) members of the Company's Board of Commissioners, representing 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners. Accordingly, the composition of Independent Commissioners on the Company's Board of Commissioners has complied with the provisions of POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. As of December 31, 2025, all Independent Commissioners of the Company had obtained approval from the OJK after successfully passing the fit and proper test conducted by OJK and had been appointed based on the approval of the GMS.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen Perseroan antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan bahwa pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode wajib menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan independensinya tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

CRITERIA FOR INDEPENDENT COMMISSIONER

Criteria for Independent Commissioners of the Company include, among others:

1. Not being a person who has worked or held authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner for the following period, provided that reappointed Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms must declare to the GMS that they remain independent, and this declaration of independence must be disclosed in the annual report.
2. Not holding any shares, either directly or indirectly, in the Company.
3. Not having any affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders.
4. Not having any business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities.
5. Understanding the laws and regulations in the field of finance and other relevant legislation.

6. Berdomisili di Indonesia.
7. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan.
8. Memenuhi persyaratan lain dari Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen dan telah menyatakan dalam RUPS pengangkatannya mengenai independensi yang bersangkutan dan pernyataan independensi yang bersangkutan juga dituangkan pada Surat Pernyataan Independensi yang disampaikan kepada Perseroan, sebagai bentuk pemenuhan ketentuan independensi serta komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak mana pun.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

6. Residing in Indonesia.
7. Having good knowledge of the Company's financial condition.
8. Fulfilling other requirements for Independent Commissioners in accordance with applicable regulations.

INDEPENDENCE STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

As of December 31, 2025, the Company has 2 (two) Independent Commissioners who has declared their independence at the GMS that appointed them. Such declarations of independence are also set out in the Statements of Independence submitted to the Company, as a means of complying with independence requirements and demonstrating a commitment to carrying out the supervisory function objectively and free from the influence of any party.

STATEMENT OF INDEPENDENCY

No.	Pernyataan Statement
1.	Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perusahaan Pembiayaan dan dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Not having financial, managerial, share ownership, and/or family relationships with other members of the Company's Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of the Company's Sharia Supervisory Board (DPS), and/or the Company's major shareholders, or any relationship with the Company that could affect their ability to act independently, as regulated in the implementation provisions of Good Corporate Governance for Financing Companies and Good Corporate Governance for Issuers or Public Companies.
2.	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Not holding any shares, either directly or indirectly, in the Company.
3.	Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi Perseroan, anggota DPS Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan. Not having any affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of the DPS, or the Company's major shareholders.
4.	Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Not having any business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities.
5.	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan. Not being a person who has worked or held authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months prior to being appointed as an Independent Commissioner of the Company.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen Perseroan yang bersangkutan memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 4 di atas dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 5 di atas, maka Komisaris Independen yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan dan bersedia untuk diganti.

If it is later found that the relevant Independent Commissioner of the Company has any of the relationships referred to in points 1 to 4 above, or does not meet the requirements referred to in point 5 above, the relevant Independent Commissioner agrees to resign from the position as an Independent Commissioner of the Company and agrees to be replaced.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya dengan tujuan mencapai efektivitas pelaksanaan pekerjaannya.

The Board of Directors is the organ of the Company that has the authority and full responsibility for managing the Company in the interests of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives, and represents the Company, both within and outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Each member of the Board of Directors performs their duties in accordance with the division of tasks and authorities, aiming to achieve effectiveness in carrying out their responsibilities.

DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pembentukan dan pengangkatan Direksi Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
6. POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
7. Anggaran Dasar Perseroan.
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 14 tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 12 tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LEGAL REFERENCES

The legal basis used in the establishment and appointment of the Company's Board of Directors refers to the following provisions:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Law Number 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.
3. POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. POJK Number 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper test for Key Parties of Financial Service Institutions.
5. POJK Number 47/POJK.05/2020 on Business Licensing and Institution of Financing Companies and Sharia Financing Companies, as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.
6. POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
7. The Company's Articles of Association.
8. Deed of Statement of the Company Meeting Decision Number 93 dated March 30, 2023, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City.
9. Deed of Statement of the Company Meeting Decision Number 14 dated October 9, 2024, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City.
10. Deed of Statement of Company Meeting Decisions Number 12 dated February 12, 2025, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City.
11. Deed of Statement of the Company's Meeting Decision Number 1 dated October 1, 2025, executed before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 24 Oktober 2022 yang disusun untuk menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi Perseroan agar anggota Direksi dapat menjalankan tugasnya secara transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Untuk memastikan Piagam Direksi tetap relevan bagi setiap anggota Direksi Perseroan, Piagam Direksi diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik.

Piagam Direksi terakhir diperbaharui pada tanggal 24 Oktober 2022 dan dapat diakses oleh publik melalui *website* Perseroan (www.wom.co.id). Secara umum, Piagam Direksi mengatur tentang:

1. Landasan Hukum Piagam.
2. Struktur dan Komposisi Direksi.
3. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Direksi.
4. Pengangkatan Anggota Direksi.
5. Masa Jabatan Anggota Direksi.
6. Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Pemberhentian Sementara Anggota Direksi.
7. Jabatan Anggota Direksi Berakhir.
8. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
9. Kewenangan Anggota Direksi.
10. Waktu Kerja.
11. Keanggotaan dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
12. Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) dan Etika Kerja.
13. Transparansi Anggota Direksi.
14. Rapat Direksi.
15. Remunerasi dan Penilaian Kinerja Direksi.
16. Sertifikasi dan Syarat Berkelanjutan.
17. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Selama periode pelaporan, tidak terdapat pemisahaan fungsi *Chairman of the Board* dan *Chief Executive Officer*. Kedua fungsi tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab dari Presiden Direktur. Sedangkan, Dewan Komisaris Perseroan menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan atas segala tindakan implementasi strategi yang dilakukan Direksi Perseroan. [G-03]

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

The Company has established a Board of Directors Charter, approved by the Board of Directors on October 24, 2022, which serves as a guideline and binding code of conduct for all members of the Company's Board of Directors to ensure they carry out their duties transparently, effectively, efficiently, and responsibly.

To ensure that the Board of Directors Charter remains relevant to all members of the Company's Board of Directors, it is updated periodically in line with regulatory developments and best practices.

The most recent update to the Board of Directors Charter was made on October 24, 2022, and is accessible to the public through the Company's website (www.wom.co.id). In general, the Board of Directors Charter governs the following:

1. Legal Basis of the Charter.
2. Board of Directors' Structure and Composition.
3. Limitations on Concurrent Positions of the Board of Directors' Members.
4. Appointment of Board of Directors' Members.
5. Term of Office of the Board of Directors' Members.
6. Resignation and Temporary Suspension of the Board of Directors' Members.
7. Termination of Positions of Board of Directors' Members.
8. Board of Directors' Duties and Responsibilities.
9. Authority of the Board of Directors' Members.
10. Working Hours.
11. Membership in the Integrated Risk Management Committee.
12. Core Values and Work Ethics.
13. Transparency of Board of Directors' Members.
14. Board of Directors' Meetings.
15. Board of Directors' Remuneration and Performance Assessment.
16. Certification and Continuous Requirements.
17. Reporting and Accountability.

During the reporting period, there was no separation of the functions of Chairman of the Board and Chief Executive Officer. Both functions are the responsibilities of the President Director. Meanwhile, the Company's Board of Commissioners performs supervisory and monitoring functions over all actions in implementing strategies carried out by the Board of Directors. [G-03]

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI [G-06] [GRI 2-10]

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

1. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan anggota Direksi harus:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      - Tidak pernah dinyatakan pailit;
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
        2) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
   d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
   e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang mensyaratkan untuk anggota Direksi memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK maka harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan:
   a. Persyaratan integritas meliputi:
      - Cakap melakukan perbuatan hukum.
      - Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
      - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
      - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat.

CRITERIA FOR BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS [G-06] [GRI 2-10]

Individuals eligible for appointment as members of the Board of Directors are those who meet the criteria and requirements in accordance with:

1. POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which requires members of the Board of Directors to:
   a. Possessing good character, morality, and integrity.
   b. Being competent in performing legal acts.
   c. Within the 5 (five) years prior to appointment and during their term of office:
      - Never having been declared bankrupt;
      - Never having served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
      - Never having been convicted of committing a criminal offense detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and
      - Never having served as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their term of office:
        1) Failing to convene the Annual GMS;
        2) Having accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the GMS or failing to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; and
        3) Causing a company that obtained licenses, approvals, or registration from OJK to fail in submitting annual reports and/or financial statements to OJK.
   d. Having a commitment to complying with applicable laws and regulations.
   e. Possessing knowledge and/or expertise in areas required by the Company.
2. POJK Number 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Service Institutions, which requires members of the Board of Directors to obtain approval from OJK by passing the fit and proper test, requires meeting the following competence and suitability criteria:
   a. Integrity requirements, including:
      - Being competent in performing legal acts.
      - Possessing good character and morality, at a minimum demonstrated by complying with applicable regulations, including never being convicted of a criminal offense within a certain period prior to nomination.
      - Having a commitment to complying with laws and regulations and supporting OJK policies.
      - Having a commitment to developing a healthy Financial Service Institution.

- Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
   - Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
   - Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. Persyaratan kelayakan keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
   - Memiliki reputasi keuangan sebagaimana telah dijabarkan pada persyaratan reputasi keuangan di atas.
   - Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Lembaga Jasa keuangan.
   - Memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Lembaga Jasa Keuangan menghadapi kesulitan keuangan.

d. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan dimana dicalonkan.

3. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Ketentuan ini merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dimaksud paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dan anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan hingga tanggal pengunduran dirinya dalam rapat tersebut.

- Not being included among parties prohibited from becoming a Key Person.

b. Financial reputation requirements, at a minimum demonstrated by:
   - Not having any non-performing loans and/or financing.
   - Never having been declared bankrupt and/or never having been a shareholder or controlling shareholder of an insurance company, or a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years prior to nomination.

c. Financial eligibility requirements, at a minimum demonstrated by:
   - Having a financial reputation as described in the financial reputation requirements above.
   - Having financial capability supporting the business development of the Financial Service Institution.
   - Having a commitment to taking necessary measures if the Financial Service Institution faces financial difficulties.

d. Competency requirements, at a minimum including knowledge and/or experience supporting the management of the Financial Service Institution for which they are nominated.

3. Meeting the requirements as a member of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.

TERM OF OFFICE PROVISIONS FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office for all incumbent members of the Board of Directors will conclude at the close of the 2026 Annual GMS. This is subject to the GMS's authority to dismiss any member of the Board of Directors prior to the expiration of their term. In accordance with the Company's Articles of Association, Directors whose terms have expired remain eligible for reappointment.

MECHANISM FOR BOARD OF DIRECTORS' RESIGNATION AND DISMISSAL

The mechanism for the resignation and dismissal of members of the Board of Directors based on the Company's Articles of Association stipulates that each has the right to resign from their position and is required to submit a written resignation letter to the Company at least 90 days prior to their resignation date. The Company is obliged to hold a GMS to decide on the resignation request no later than 90 days after receipt of the resignation letter, and the resigning member of the Board of Directors shall remain accountable for their actions from the date of appointment until the date of resignation at the meeting.

Apabila pengunduran diri mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut dinyatakan sah setelah disetujui oleh RUPS dan telah diangkat pengganti untuk memenuhi jumlah minimal tersebut. Selain itu, usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi, sedangkan jabatan anggota Direksi dapat berakhir karena dinyatakan pailit, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan RUPS, atau masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali.

If the resignation results in the number of the Board of Directors members being less than 3 (three) people, then the resignation is declared valid after being approved by the GMS and a replacement has been appointed to meet the minimum number. In addition, the proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of the Board of Directors' members to the GMS must consider the recommendations of the committee that performs the nomination function, while the term of office of a member of the Board of Directors may end due to being declared bankrupt, resigning, no longer fulfilling the provisions of OJK regulations and other laws and regulations, death, being dismissed based on the GMS, or his/her term of office has ended and not being reappointed.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Susunan dan komposisi anggota Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu:

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The composition and structure of the Company's Board of Commissioners has complied with the following prevailing provisions:

No.	POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya POJK Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. Companies with total assets exceeding Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah) are required to have at least 3 (three) members of the Board of Directors.	Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 5 (lima) anggota Direksi. As of December 31, 2025, the Company has 5 (five) members of the Board of Directors.
2.	Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib mengangkat salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Utama atau setara. Companies meeting the provisions referred to in point 1 above are required to appoint one of the members of the Board of Directors as the President Director or equivalent.	Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) Presiden Direktur As of December 31, 2025, the Company has 1 (one) President Director.
3.	Perusahaan wajib memastikan Direktur Utama atau yang setara bukan merupakan pemegang saham perseorangan dalam perusahaan dan/atau memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham perseorangan dalam perusahaan. Companies must ensure that the President Director or equivalent is not an individual shareholder in the company and/or does not have a family relationship up to the second degree, either horizontally or vertically, with individual shareholders in the company.	Per 31 Desember 2025, Presiden Direktur Perseroan yang menjabat bukan merupakan pemegang saham perseorangan dalam Perseroan dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham perseorangan dalam Perseroan. As of December 31, 2025, the Company's President Director is not an individual shareholder in the Company and do not have a family relationship up to the second degree, either horizontally or vertically, with any individual shareholder in the Company.
4.	Dalam hal terdapat kepemilikan perusahaan oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), perusahaan wajib memastikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia. If the company is owned by a foreign legal entity and/or foreign citizen, directly or indirectly, by at least 25% (twenty-five percent), the company must ensure that at least 50% (fifty percent) of the Board of Directors are Indonesian citizens.	Dalam kepemilikan saham Perseroan terdapat kepemilikan asing secara tidak langsung lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan Perseroan telah memenuhi ketentuan yaitu per 31 Desember 2025, memiliki anggota Direksi yang merupakan Warga Negara Indonesia lebih dari 50% (lima puluh persen). The Company's shareholding includes indirect foreign ownership exceeding 25% (twenty-five percent), and the Company has complied with the provisions by ensuring that, as of December 31, 2025, more than 50% (fifty percent) of the Board of Directors are Indonesian citizens.
5.	Anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Members of the Board of Directors must be domiciled within the territory of the Republic of Indonesia.	Per 31 Desember 2025, seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. As of December 31, 2025, all members of the Board of Directors are domiciled within the territory of the Republic of Indonesia.

No.	POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya POJK Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
6	Bagi perusahaan yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS. For companies that establish a Remuneration and Nomination Committee, the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee must be considered in every proposal for the appointment and/or replacement of the members of the Board of Directors submitted to the GMS	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi serta untuk pengangkatan anggota Direksi Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS. The Company has established a Nomination and Remuneration Committee, and in appointing members of the Board of Directors, the Company has considered the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee and obtained approval from the GMS.

No.	POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. The Board of Directors must consist of at least 2 (two) members.	Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi. As of December 31, 2025, the Company had 5 (five) members of the Board of Directors.
2.	1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama atau presiden direktur. 1 (one) of the members of the Board of Directors is appointed as the President Director or Chief Executive Officer.	Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) Presiden Direktur As of December 31, 2025, the Company has 1 (one) President Director.
3.	Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors submitted to the GMS must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee performing the nomination function.	Pengangkatan anggota Direksi Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS. The appointment of the Company's Board of Directors' members has considered the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and obtained approval from the GMS.

POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura POJK Number 47/POJK.05/2020 on Business Licensing and Institution of Financing Companies and Sharia Financing Companies, as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib memiliki Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS. Financing companies with a Sharia Business Unit (UUS) are required to have a Director responsible for managing the UUS.	Wibowo selaku Direktur Perseroan bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS Perseroan. Mr. Wibowo, as the Company's Director, is responsible for managing the Company's UUS.

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan maka calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. Seluruh anggota Direksi telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sesuai jabatannya.

Based on the provisions of POJK Number 27/POJK.03/2016 on the Fit and Proper Test or Key Parties of Financial Service Institutions, prospective members of the Board of Directors are required to obtain approval from OJK before performing their actions, duties, and functions. All members of the Board of Directors have obtained approval from OJK by passing the competence and suitability assessment before performing their actions, duties, and functions in accordance with their positions.

SUSUNAN DIREKSI PERSEROAN [GRI 2-11]

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan dan komposisi anggota Direksi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS [GRI 2-11]

Based on Deed of Statement of the Company's Meeting Decision Number 1 dated October 1, 2025, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta Administrative City, the composition and structure of the Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2023 Annual GMS Resolution dated March 30, 2023	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026
Njauw Vido Onadi	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	RUPS Luar Biasa tanggal 09 Oktober 2024 Extraordinary GMS dated October 9, 2024	Efektif menjabat tanggal 5 Februari 2025 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Effective as of February 5, 2025 – Annual GMS 2026
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2023 Annual GMS Resolution dated March 30, 2023	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026
Wibowo	Direktur Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2023 Annual GMS Resolution dated March 30, 2023	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2023 Annual GMS Resolution dated March 30, 2023	RUPS Tahunan Tahun 2023 – RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026

INDEPENDENSI DIREKSI

1. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik hubungan horizontal maupun vertikal (termasuk mertua, menantu dan ipar) dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau pemegang saham utama Perseroan atau grup usaha Perseroan. Dengan demikian, seluruh anggota Direksi adalah independen.
2. Direksi juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi tercermin dari pernyataan masing-masing anggota Direksi mengenai hal-hal di bawah ini:
   a. Tidak pernah memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
   b. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
   c. Tidak pernah menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak kerja yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. All members of the Company's Board of Directors have no financial or family relationships up to the second degree, whether horizontal or vertical (including parents-in-law, children-in-law, and siblings-in-law), with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board (DPS), and/or the Company's major shareholders or business group. Accordingly, all members of the Board of Directors are independent.
2. The Board of Directors also consistently upholds the principle of independence and prioritizes the Company's interests above personal interests, and performs their duties with high integrity, as reflected in each member's declaration on the following matters:
   a. Never using the Company for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the Company's profits.
   b. Never taking and/or receiving personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined based on the GMS.
   c. Never using individual advisors and/or professional services as consultants except for special projects, supported by a clear engagement contract covering the scope of work, responsibilities, project duration, and fees, and with the consultant being an independent party having the qualifications required for special projects.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI [GRI 2-12]

1. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi:
   a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
   b. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Perseroan.
   c. Direksi wajib menyusun visi dan misi Perseroan.
   d. Direksi wajib menyusun laporan tahunan Perseroan.
   e. Direksi wajib memastikan agar Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
   f. Direksi wajib memastikan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan prosedur Layanan Pengaduan Perseroan.
   g. Direksi wajib memastikan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan di Perseroan.
   h. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan (DPS) secara tepat waktu dan lengkap.
   i. Direksi wajib membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perseroan dan DPS.
   j. Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari Internal Audit Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
   k. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
   l. Direksi wajib menyusun dan/atau memiliki Piagam Direksi untuk digunakan sebagai pedoman bagi Direksi dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES [GRI 2-12]

1. The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, and such authorities may be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.
2. Duties and responsibilities of the Board of Directors:
   a. The Board of Directors is fully responsible for performing its duties in managing the Company for the Company's interests in achieving its purposes and objectives.
   b. The Board of Directors is required to implement good corporate governance principles in every business activity of the Company at all levels of the organization.
   c. The Board of Directors is required to formulate the Company's vision and mission.
   d. The Board of Directors is required to prepare the Company's annual report.
   e. The Board of Directors is required to ensure that the Company considers the interests of all parties, particularly the interests of debtors, creditors, and/or other stakeholders.
   f. The Board of Directors is required to ensure the preparation, establishment, and implementation of the Company's Complaints Handling procedures.
   g. The Board of Directors is required to ensure that the implementation of the anti–money laundering and counter–terrorist financing program is carried out in accordance with the written policies and procedures established in the Company.
   h. The Board of Directors is required to ensure that information on the Company is provided to the Company's Board of Commissioners and the Company's Sharia Supervisory Board (DPS) in a timely and complete manner.
   i. The Board of Directors is required to assist and provide facilities and/or resources to support the smooth execution of the duties and authorities of the Company's organs and the DPS.
   j. The Board of Directors is required to follow up on audit findings and/or recommendations from the Company's Internal Audit, external auditors, OJK supervisory results, and/or supervisory results from other authorities.
   k. The Board of Directors and each member of the Board of Directors are required to provide explanations on all matters questioned by members of the Board of Commissioners.
   l. The Board of Directors is required to prepare and/or maintain a Board of Directors Charter to be used as a guideline for the Board of Directors in carrying out its functions, duties, and responsibilities in managing the Company.



m. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib membentuk komite-komite paling kurang komite-komite sebagaimana di bawah ini dan atas setiap komite yang dimaksud tersebut dipandu oleh pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Direksi:
   - Komite Manajemen Risiko;
   - Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah;
   - Komite Pengarah Teknologi Informasi.

n. Direksi wajib mengevaluasi kinerja komite terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing komite-komite yang dimaksud pada huruf (m) angka ini sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

o. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan OJK terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

p. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan Anggaran Dasar Perseroan.

q. Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap informasi atau fakta penting dan relevan terkait Perseroan yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan pada Bursa Efek dan/atau keputusan para pemegang saham dan/atau investor dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

r. Melakukan tugas dan tanggung jawab Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Direksi.

m. In order to support the effectiveness of performing its duties and responsibilities, the Board of Directors is required to establish committees, at minimum the following committees, each of which is guided by the work guidelines and rules of procedure established and/or approved by the Board of Directors:
   - Risk Management Committee;
   - Sharia Product and Business Activity Development Committee;
   - Information Technology Steering Committee.

n. The Board of Directors is required to evaluate the performance of the committees in relation to the implementation of the duties and responsibilities of each committee referred to in letter (m) of this section at least at the end of each financial year.

o. The Board of Directors is required to be responsible for ensuring compliance with OJK regulations related to financial literacy, financial inclusion, and consumer and public protection in the financial services sector.

p. The Board of Directors holds Board of Directors meetings that at least cover the frequency, attendance, and decision-making procedures as stipulated in this Charter and the Company's Articles of Association.

q. As a public company, the Board of Directors communicates with shareholders and/or investors on performance achievements, including disclosing material and relevant information or facts related to the Company that may affect the Company's securities price on the Stock Exchange and/or the decisions of shareholders and/or investors, while observing prudence and complying with applicable laws and regulations.

r. Performing other duties and responsibilities of the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association, the Company's internal regulations, and the laws and regulations applicable to the Board of Directors.

KEWENANGAN DIREKSI

1. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan di dalam menjalankan tugas itu, anggota Direksi dimaksud mempunyai hak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan, serta pula untuk membuat segala penyesuaian dan perjanjian, yang mengenai tindakan

BOARD OF DIRECTORS' AUTHORITIES

1. 2 (two) members of the Board of Directors acting jointly are authorized to represent the Board of Directors, and therefore to legally and directly represent the Company inside and outside the courts in all matters and events, and in carrying out such duties, the said members of the Board of Directors have the authority to bind the Company to other parties or other parties to the Company, as well as to execute all arrangements and agreements related to management actions and ownership

kepengurusan dan tindakan kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
4. Jika dianggap perlu, Direksi dapat menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dengan ketentuan memenuhi persyaratan:
   a. Untuk proyek yang bersifat khusus;
   b. Telah didasari oleh kontrak kerja yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya; dan
   c. Konsultan yang dimaksud merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI [GRI 2-12]

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 026/V/BOC-WOM/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk untuk Tahun Buku 2025, telah ditetapkan ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagaimana berikut:

actions, subject to the limitations set out in the Company's Articles of Association and with due observance of the prevailing capital market regulations.

2. Without prejudice to their responsibilities, for certain actions the Board of Directors is also authorized to appoint one or more persons as their representative or attorney under conditions determined by the Board of Directors in a specific power of attorney, and such authority must be exercised in accordance with the Company's Articles of Association.
3. The Board of Directors may also make valid decisions without holding a Board of Directors meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members give their approval to the proposal submitted in writing by signing such approval. Decisions made in this manner shall have the same force as decisions validly made in a Board of Directors meeting.
4. If deemed necessary, the Board of Directors may use individual advisors and/or professional services as consultants, provided that the following requirements are met:
   a. For a special-purpose project;
   b. Supported by a clear engagement contract covering the scope of work, responsibilities, duration of the project, and fees; and
   c. The consultant is an independent party having the qualifications required to undertake the special-purpose project.

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS [GRI 2-12]

Based on the Board of Directors' Decision Number 026/V/BOD-WOM/2025 dated May 26, 2025 on the Determination of the Division of Duties and Authorities of the Members of the Board of Directors of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk for the 2025 Financial Year, the scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors have been determined as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	1. Memimpin dan mengelola Perseroan termasuk memberikan arahan strategis dalam hal kebijakan dan strategi di lingkup pengembangan bisnis, manajemen risiko, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia agar sesuai dengan tujuan Perseroan. 2. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan berjalan sesuai target yang ditetapkan secara volume dan *market share* sehingga menunjang keuntungan Perseroan. 3. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan manajemen risiko Perseroan berjalan dengan baik sehingga tercapai kualitas portofolio yang sehat. 4. Memantau dan memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif, efisien dengan mengedepankan kualitas, *service excellence*, dan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*. 5. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya manusia berjalan efektif, efisien, dan fokus pada pemberdayaan, kualitas, produktivitas, serta pengembangan karyawan yang dapat menunjang pencapaian tujuan Perseroan. 6. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan fungsi bisnis di regional dan cabang sesuai dalam upaya menunjang pencapaian tujuan dan target Perseroan berupa *End Net Receivables* (ENR) dan profit, pemantauan strategi dan perbaikan kinerja dari setiap kantor jaringan Perseroan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perusahaan Perseroan serta sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. 7. Menetapkan dan memantau penerapan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran, strategi bisnis, Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan internal Perseroan lainnya, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 8. Memantau dan memastikan fungsi *Anti Fraud* dijalankan dengan tujuan untuk memastikan ketaatan masing-masing unit kerja Perseroan dalam melaksanakan aktivitas kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Memantau dan memastikan fungsi *Legal Counsel* dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meminimalisasi risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum yang mungkin timbul. 10. Mengawasi secara aktif penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Perseroan. 11. Mengevaluasi terhadap kinerja seluruh fungsi yang ada di Perseroan. 12. Mengawasi anggota Direksi Perseroan lainnya yang berada di bawah supervisi Presiden Direktur. 13. Mengawasi dan memerintahkan *Non Directorate* yang ada di Perseroan. 14. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 1. Leading and managing the Company, including providing strategic direction on policies and strategies in the areas of business development, risk management, operations, finance, and human resources to ensure alignment with the Company's objectives. 2. Monitoring and ensuring that all business development activities of the Company are carried out in accordance with the targets set in terms of volume and market share to support the Company's profitability. 3. Monitoring and ensuring that all risk management activities of the Company run effectively to achieve a healthy portfolio quality. 4. Monitoring and ensuring that operational activities run effectively and efficiently by prioritizing quality, service excellence, and adherence to the principles of Good Corporate Governance. 5. Monitoring and ensuring that all human resources management activities run effectively and efficiently, focusing on empowerment, quality, productivity, and employee development to support the achievement of the Company's objectives. 6. Monitoring and ensuring that all business function management activities at the regional and branch levels are properly carried out to support the achievement of the Company's objectives and targets in the form of ENR and profit, monitoring strategies and improving performance at each of the Company's network offices, while remaining in compliance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, the Company's internal regulations, and the Good Corporate Governance principles. 7. Determining and monitoring the implementation of effective and efficient internal controls to provide reasonable assurance that business activities are conducted in accordance with objectives, business strategies, the Company's Articles of Association, other internal provisions of the Company, and applicable laws and regulations. 8. Monitoring and ensuring that the Anti-Fraud function is carried out with the objective of ensuring the compliance of each of the Company's work units in performing critical activities in accordance with applicable laws and regulations. 9. Monitoring and ensuring that the Legal Counsel function is carried out by prioritizing the principle of prudence and in accordance with applicable laws and regulations, in order to minimize compliance risk, reputational risk, and legal risk that may arise. 10. Actively supervising the implementation of the Company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and counter-proliferation financing of weapons of mass destruction programs. 11. Evaluating the performance of all functions within the Company. 12. Supervising and overseeing other members of the Company's Board of Directors. 13. Supervising and overseeing Non-Directorate functions within the Company. 14. Carrying out other duties and authorities of the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association and the Company's internal provisions applicable to the Board of Directors.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Njauw Vido Onadi	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	1. Bersama dengan Presiden Direktur Perseroan memberikan arahan strategis dalam hal kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan performa Perseroan agar mencapai tujuan Perseroan termasuk di dalamnya pada bidang yang berada di bawah supervisi Wakil Presiden Direktur. 2. Merencanakan dan menyusun *Risk Management Strategic Plan* termasuk di dalamnya merencanakan *budget* operasional *Risk Management Directorate*, serta mengomunikasikan kepada seluruh jajaran *executive management*. 3. Mendukung Presiden Direktur Perseroan dalam memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan fungsi bisnis di regional dan cabang sesuai dalam upaya menunjang pencapaian tujuan dan target Perseroan berupa *End Net Receivables* (ENR) dan *profit*, pemantauan strategi dan perbaikan kinerja dari setiap kantor jaringan Perseroan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perusahaan Perseroan serta sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. 4. Mendukung Direktur Operasional Perseroan dalam melaksanakan pengurusan di bidang operasional Perseroan agar sesuai dengan sasaran, strategi bisnis, Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan internal Perseroan lainnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan fungsi Manajemen Risiko di Perseroan termasuk didalamnya aktivitas *initiation credit* sehingga tercapai kualitas portofolio yang sehat dan manajemen risiko Perseroan yang berjalan efektif. 6. Mengoordinasikan, mengarahkan, dan memantau aktivitas penagihan dan pengelolaan aset unit kendaraan tarikan termasuk pengembangan sistemnya agar berjalan efektif dan dapat meminimalkan tingkat *Non Performing Financing*. 7. Mengoordinasikan, mengarahkan, dan memantau aktivitas *project management* Perseroan agar seluruh *project* yang ditetapkan berjalan efektif, mencapai sasaran, dan waktu yang ditetapkan. 8. Mengoordinasikan kebijakan dan strategi di seluruh bidang yang berada di bawah supervisi Wakil Presiden Direktur. 9. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan unit kerja yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Direktur termasuk di dalamnya unit kerja yang berada di *Risk Management Directorate*, serta berkoordinasi dengan Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya. 10. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 1. Providing strategic direction together with the President Director regarding policies and strategies to enhance the Company's performance and achieve its objectives, including areas under the supervision of the Vice President Director. 2. Planning and developing the Risk Management Strategic Plan, including planning the operational budget of the Risk Management Directorate and communicating it to all levels of executive management. 3. Supporting the President Director in monitoring and ensuring all business function management activities at regional offices and branches are aligned with achieving the Company's goals and targets, such as End Net Receivables (ENR) and profit, and monitoring strategies and improving performance at each network office while adhering to applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, internal regulations, and principles of Good Corporate Governance. 4. Supporting the Operational Director in managing operational matters to ensure alignment with objectives, business strategies, the Company's Articles of Association, other internal regulations, and applicable laws and regulations. 5. Directing, evaluating, and coordinating the implementation of the Company's Risk Management function, including initiating credit activities, to achieve a healthy portfolio quality and effective risk management. 6. Coordinating, directing, and monitoring collection activities and managing repossessed vehicle assets, including developing systems to ensure effectiveness and minimizing Non-Performing Financing levels. 7. Coordinating, directing, and monitoring project management activities to ensure all projects are executed effectively, achieving objectives, and completed within the designated timeframe. 8. Coordinating policies and strategies across all areas under the supervision of the Vice President Director. 9. Directing, evaluating, and coordinating work units under the Vice President Director's supervision, including those in the Risk Management Directorate, and liaising with the President Director and other Board members. 10. Performing other duties and exercising other authorities of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association and internal regulations applicable to the Board of Directors.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director	1. Merencanakan dan menyusun *Corporate Financial Strategic Plan*, termasuk di dalamnya merencanakan *budget* operasional *Directorate* di bawahnya, serta mengomunikasikan kepada seluruh jajaran *executive management*. 2. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya pengelolaan *treasury* dan *cash management* yang tepat, serta memantau dan memastikan pengelolaan keuangan Perseroan sesuai dengan ketentuan internal Perseroan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 3. Membuka dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan investor yang tepat bagi Perseroan serta memastikan kegiatan *funding* dikelola sesuai dengan strategi pencapaian target yang ditetapkan. 4. Bertanggung jawab atas pengelolaan analisa laporan portofolio *finance* dan *project* pengembangan *finance* guna penyelarasan strategi kerja *Finance Directorate*. 5. Memantau aktivitas pelaporan, pembayaran kewajiban pajak, hingga pengelolaan atas case sengketa/perselisihan pajak di perusahaan, serta memastikan laporan penutupan asuransi agar sesuai dengan ketentuan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memantau pelaksanaan fungsi *Corporate Service & Communication* dan program-program *Environmental Social Governance* (ESG) di Perseroan dalam rangka memastikan keberlanjutan citra Perseroan dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang serta mendukung kinerja keuangan. 7. Mengoordinasikan kebijakan dan strategi di seluruh bidang yang berada di bawah supervisi Direktur Keuangan. 8. Mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi pengelolaan keuangan berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di *Finance Directorate* secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kapabilitas keuangan Perseroan. 9. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan unit kerja yang berada di *Finance Directorate*, serta berkoordinasi dengan Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya. 10. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 1. Supervising and overseeing the Company's Finance Directorate. 2. Planning and formulating the Corporate Financial Strategic Plan, including planning the operational expenses of the Directorate under her supervision, and communicating it to all levels of executive management. 3. Being responsible for the overall financial management of the Company, including proper treasury and cash management, as well as monitoring and ensuring that the Company's financial management complies with the Company's internal regulations, applicable laws and regulations, and Indonesian financial accounting standards. 4. Establishing and maintaining cooperation with other parties to obtain appropriate investors for the Company and ensuring that funding activities are managed in line with the strategies set to achieve the defined targets. 5. Being responsible for managing financial portfolio report analysis and finance development projects to align the Finance Directorate's work strategies. 6. Monitoring reporting activities, tax obligation payments, and insurance closure reports to comply with the Company's internal provisions and applicable laws and regulations. 7. Monitoring the implementation of Corporate Service & Communication functions and Environmental, Social, and Governance (ESG) programs within the Company to ensure the sustainability of the Company's reputation, maintain long-term business sustainability, and support financial performance. 8. Evaluating the implementation of financial management policies and strategies as well as the performance of all functions within the Finance Directorate on an ongoing basis in order to enhance the Company's financial capabilities. 9. Carrying out other duties and authorities of the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations applicable to the Board of Directors. 10. Being responsible to the President Director in carrying out these duties.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Directors	1. Merencanakan dan menyusun *Operations Strategic Plan* termasuk di dalamnya merencanakan *budget* operasional *Operations Directorate*, serta mengomunikasikannya kepada seluruh jajaran *executive management*. 2. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi penyelenggaraan fungsi Service, *Tele Center*, dan *Information Technology* ("IT") Perseroan. 3. Mengarahkan dan memantau pengelolaan layanan kepada konsumen serta telecenter secara nasional dalam rangka menjaga *brand image* Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dan loyalitas konsumen terhadap Perseroan. 4. Memastikan tersedianya dukungan sistem dan/atau prosedur kerja berbasis IT di setiap proses kerja yang ada di Perseroan termasuk mengarahkan dan memastikan keamanan perangkat IT untuk mencapai stabilitas serta keamanan sistem IT yang optimum. 5. Mengevaluasi implementasi ketentuan internal Perseroan terkait operasional, strategi operasional, dan IT berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di *Operations Directorate* secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan proses operasional yang cepat, efektif, dan efisien. 6. Mengarahkan dan memantau penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelindungan konsumen dan masyarakat serta pelindungan data pribadi (PDP) dalam menjalankan bisnis Perseroan. 7. Mengoordinasikan kebijakan dan strategi di seluruh bidang yang berada di bawah supervisi Direktur Operasional. 8. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan unit kerja yang berada di *Operations Directorate*, serta berkoordinasi dengan Wakil Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya. 9. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 1. Supervising and overseeing the Company's Operations Directorate. 2. Planning and formulating the Operations Strategic Plan, including planning the operational budget of the Operations Directorate, and communicating it to all levels of executive management. 3. Being responsible for the overall management of operational activities, including the preparation and establishment of the Company's internal regulations, as well as the implementation of the Company's Service, Tele Center, and Information Technology (IT) functions. 4. Directing and monitoring the management of customer service and national telecenter operations in order to maintain the Company's brand image, aimed at increasing financing distribution and customer loyalty toward the Company. 5. Ensuring the availability of IT-based system and/or work procedure support in every work process within the Company, including directing and ensuring the security of IT devices to achieve optimal IT system stability and security. 6. Evaluating the implementation of the Company's internal regulations related to operations, operational and IT strategies, as well as the performance of all functions within the Operations Directorate on an ongoing basis to enhance fast, effective, and efficient operational processes. 7. Directing and monitoring the implementation of applicable laws and regulations related to consumer and public protection as well as personal data protection (PDP) in conducting the Company's business activities. 8. Carrying out other duties and authorities of the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations applicable to the Board of Directors. 9. Being responsible to the President Director in carrying out these duties.
Wibowo	Direktur Director	1. Merencanakan dan menyusun *Marketing Strategic Plan* termasuk di dalamnya merencanakan *budget* operasional *Directorate* di bawahnya, serta mengomunikasikannya kepada seluruh jajaran *executive management*. 2. Bertanggung jawab atas pencapaian target *marketing* secara nasional. 3. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan dan implementasi kebijakan *marketing* yang diterapkan di Perseroan berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan. 4. Membuka dan menjalin relasi kerja sama dengan *brand* utama di bisnis sepeda motor dalam rangka memperoleh *market share* dan portofolio yang baik. 5. Mengembangkan strategi bisnis *Non Dealer Sales* dan memastikan implementasi strategi tersebut berjalan sesuai target yang ditetapkan Perseroan. 6. Mengembangkan dan memastikan strategi *branding marketing* dijalankan mengikuti perkembangan pasar, kebutuhan konsumen, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan Perseroan, dan posisi yang kompetitif di pasar. 7. Memantau dan memastikan strategi serta pengembangan yang dibuat Unit Usaha Syariah dalam memperluas jaringan baru, relasi dengan mitra bisnis, pencapaian target *sales*, dan *profit* Perseroan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. 8. Mengoordinasikan kebijakan dan strategi di seluruh bidang yang berada di bawah supervisi Direktur Pemasaran. 9. Mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi *marketing* berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di *Marketing Directorate* secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan target penjualan dan kualitas pembiayaan yang baik serta memperkuat *image* Perseroan di mata *stakeholders*, *dealer*, dan konsumen Perseroan. 10. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan unit kerja yang berada di *Marketing Directorate*, serta berkoordinasi dengan Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya. 11. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		1. Supervising and overseeing the Marketing Directorate within the Company. 2. Planning and formulating the Marketing Strategic Plan, including planning the operational budget of the directorates under it, as well as communicating it to all levels of executive management. 3. Being responsible for achieving national marketing targets. 4. Monitoring and ensuring that all business development activities of the Company and the implementation of marketing policies applied within the Company are running as determined by the Company. 5. Establishing and maintaining collaborative relationships with major brands in the motorcycle business to obtain good market share and portfolio. 6. Developing the Non-Dealer Sales business strategy and ensuring the implementation of such strategy is running in accordance with the targets set by the Company. 7. Developing and ensuring that branding and marketing strategies are implemented in line with market developments, consumer needs, and supporting the achievement of the Company's growth targets and competitive market position. 8. Monitoring and ensuring that the strategy and development of the Sharia Business Unit functions in expanding new networks, building relationships with dealers, and achieving the Company's sales and profit targets while adhering to the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association. 9. Evaluating the implementation of policies and marketing strategies, along with the performance of all functions under the Marketing Directorate on an ongoing basis, in order to increase sales targets, improve financing quality, and strengthen the Company's image in the eyes of stakeholders, dealers, and consumers. 10. Carrying out other duties and authorities of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association and the Company's internal regulations applicable to the Board of Directors. 11. Being responsible to the President Director in carrying out these duties.

PROGRAM ORIENTASI ANGGOTA DIREKSI BARU

Perseroan menyelenggarakan Program Orientasi bagi anggota Direksi baru untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai perusahaan. Program yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan ini mencakup penjelasan tentang:

1. Strategi Perseroan.
2. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan.
4. Fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi yang baru diangkat. Oleh karena itu, program pengenalan tidak diselenggarakan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's organizes an Orientation Program for newly appointed members of the Board of Directors to ensure a comprehensive understanding of the Company. The program, managed by the Corporate Secretary, includes explanations on:

1. The Company's strategy.
2. The duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors based on the Articles of Association and the applicable laws and regulations in Indonesia.
3. Policies related to Corporate Governance.
4. Facilities provided to support the execution of the Board of Directors' duties.

Throughout 2025, there were no newly appointed Directors. Therefore, no orientation program was conducted.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Dalam rangka memperkuat kualitas kepemimpinan dan efektivitas pengelolaan perusahaan, Perseroan secara berkesinambungan mendorong peningkatan kompetensi Direksi melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional. Perseroan juga telah menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 039/SK/HCSD/02-25 - SK Sertifikasi Profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Versi 3. [G-05]

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

To strengthen leadership quality and enhance the effectiveness of corporate management, the Company's continuously encourages the competency development of the Board of Directors through various training and professional development programs. The Company has also established a competency development policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners, as set out in Decision Letter Number 039/SK/HCSD/02-25 – Professional Certification Decision Letter issued by the Professional Certification Institute Version 3. [G-05]

Nama dan Jabatan Name and Position	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Djaja Suryanto Sutandar (Presiden Direktur) (President Director)	1. Seminar Nasional: "Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru" 2. Seminar Nasional: "*Economic Outlook* 2026" 1. National Seminar: "OJK Policy Direction for 2025 and the Economic Growth Strategy of the New Government" 2. National Seminar: "Economic Outlook 2026"	1. Dian Ballroom It. 11, The Raffles Hotel, DKI Jakarta 2. *Online Meeting*	1. 4 Februari 2025 2. 2 September 2025 1. February 4, 2025 2. September 2, 2025	1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 2. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 1. Indonesian Financial Services Association (APPI) 2. Indonesian Financial Services Association (APPI)
Njauw Vido Onadi (Wakil Presiden Direktur) (Vice President Director)	1. Seminar Nasional: "Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru" 2. Seminar Nasional: "*Will Trade War Create Financial Turmoil*?" 1. National Seminar: "OJK Policy Direction for 2025 and the Economic Growth Strategy of the New Government" 2. National Seminar: "Will Trade War Create Financial Turmoil?"	1. Dian Ballroom It. 11, The Raffles Hotel, DKI Jakarta 2. Ballroom Hotel Pullman, Thamrin, DKI Jakarta	1. 4 Februari 2025 2. 6 Mei 2025 1. February 4, 2025 2. May 6, 2025	1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 2. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 1. Indonesian Financial Services Association (APPI) 2. Indonesian Financial Services Association (APPI)
Cincin Lisa Hadi (Direktur) (Director)	1. Seminar Nasional: "*Will Trade War Create Financial Turmoil*?" 2. Seminar Nasional: "*Economic Outlook 2026*" 1. National Seminar: "Will Trade War Create Financial Turmoil?" 2. National Seminar: "Economic Outlook 2026"	1. Ballroom Hotel Pullman, Thamrin, DKI Jakarta 2. *Online Meeting*	1. 6 Mei 2025 2. 2 September 2025 1. May 6, 2025 2. September 2, 2025	1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 2. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 1. Indonesian Financial Services Association (APPI) 2. Indonesian Financial Services Association (APPI)
Anthony Yuarez Panggabean (Direktur) (Director)	1. Seminar Nasional: "*Will Trade War Create Financial Turmoil*?" 2. Seminar Nasional: "*Economic Outlook* 2026" 3. Cobit 2019 1. National Seminar: "Will Trade War Create Financial Turmoil?" 2. National Seminar: "Economic Outlook 2026" 3. Cobit 2019	1. Ballroom Hotel Pullman, Thamrin, DKI Jakarta 2. *Online Meeting* 3. Jambuluwuk Thamrin Hotel	1. 6 Mei 2025 2. 2 September 2025 3. 16 Oktober 2025 1. May 6, 2025 2. September 2, 2025 3. October 16, 2025	1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 2. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 3. Cynnex - ISACA 1. Indonesian Financial Services Association (APPI) 2. Indonesian Financial Services Association (APPI) 3. Cynnex - ISACA
Wibowo (Direktur) (Director)	1. Seminar Nasional: "Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru" 2. Seminar Nasional: "*Economic Outlook* 2026" 1. National Seminar: "OJK Policy Direction for 2025 and the Economic Growth Strategy of the New Government" 2. National Seminar: "Economic Outlook 2026"	1. Dian Ballroom It. 11, The Raffles Hotel, DKI Jakarta 2. *Online Meeting*	1. 4 Februari 2025 2. 2 September 2025 1. February 4, 2025 2. September 2, 2025	1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 2. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 1. Indonesian Financial Services Association (APPI) 2. Indonesian Financial Services Association (APPI)

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan, Direksi didukung oleh sejumlah satuan kerja dan komite yang berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Komite yang berada di bawah koordinasi Direksi meliputi Komite Manajemen Risiko; Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah; Komite Pengarah Teknologi Informasi; dan Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, seluruh komite tersebut telah melaksanakan tugasnya secara efektif dengan memberikan rekomendasi dan masukan yang relevan sesuai dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Direksi menilai kinerja komite-komite tersebut telah berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajerial dan operasional Perseroan.

TATA CARA PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Prosedur penilaian kinerja Satuan Kerja atau Komite di bawah Direksi sepanjang tahun 2025 dilakukan dengan menilai pencapaian fungsi dan tugas masing-masing, serta tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan.

Komite Manajemen Risiko juga berperan aktif memberikan rekomendasi dan masukan terkait sistem dan praktik manajemen risiko. Sekretaris Perusahaan turut memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal, sementara Audit Internal melakukan evaluasi yang baik terhadap efektivitas tata kelola Perseroan.

PROSEDUR DAN PENILAIAN KINERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

1. Masing-masing kriteria memiliki skor dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan indikator skor sebagai berikut:
   a. Nilai 1 = sangat buruk
   b. Nilai 2 = buruk
   c. Nilai 3 = cukup baik
   d. Nilai 4 = baik
   e. Nilai 5 = sangat baik
2. Pilih skor untuk masing-masing kriteria sesuai dengan kondisi Perseroan.
3. Skor akhir merupakan rata-rata dari kriteria yang dilakukan penilaian.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN KINERJA

1. Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko.
2. Tingkat kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko.
3. Pelaksanaan penyampaian laporan kerja Komite Manajemen Risiko.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In performing the Company's management functions, the Board of Directors is supported by several work units and committees that play an important role in strategic decision-making. The committees under the coordination of the Board of Directors include the Risk Management Committee; the Sharia Product and Business Activity Development Committee; the Information Technology Steering Committee; and the Corporate Secretary. Throughout 2025, all of these committees carried out their duties effectively by providing relevant recommendations and inputs in accordance with their respective mandates and responsibilities. The Board of Directors assessed that the performance of these committees has been optimal in supporting the managerial and operational functions of the Company.

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES FOR COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The performance assessment procedure for the Work Units or Committees under the Board of Directors throughout 2025 was carried out by assessing the achievement of each unit's functions and duties, as well as the level of effectiveness and efficiency in supporting the execution of the duties and responsibilities of the Company's Board of Directors.

The Risk Management Committee also played an active role in providing recommendations and input related to risk management systems and practices. The Corporate Secretary facilitated both internal and external communication, while Internal Audit conducted proper evaluations on the effectiveness of the Company's governance.

PROCEDURES AND PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES

1. Each criterion is assigned a score from 1 (one) to 5 (five), with the following score indicators:
   a. Score 1 = very poor
   b. Score 2 = poor
   c. Score 3 = sufficient
   d. Score 4 = good
   e. Score 5 = very good
2. Select a score for each criterion in accordance with the Company's condition.
3. The final score is the average of all evaluated criteria.

CRITERIA USED IN PERFORMANCE ASSESSMENT

1. Implementing Risk Management Committee's meetings.
2. Attendance level of Risk Management Committee's members.
3. Delivering the Risk Management Committee's work reports.

4. Pelaksanaan *Matters Arising*.
5. Dokumentasi laporan kerja Komite Manajemen Risiko.

4. Implementing Matters Arising.
5. Documenting the Risk Management Committee's work reports.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko untuk Tahun Buku 2025.

The following presents the performance assessment results of the Risk Management Committee for the 2025 Financial Year.

Kriteria Criteria	**Skor** Score					**Penilaian** Assessment
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	
Pelaksanaan Rapat Komite Implementation of Committee Meetings	1 x dalam setahun 1 x in a year	2 x dalam setahun 2 x in a year	4 x dalam setahun 4 x in a year	6 x dalam setahun 6 x in a year	8 x dalam setahun 8 x in a year	5 (sangat baik) 5 (very good)
Tingkat Kehadiran Anggota Komite Attendance Level of Committee Members	Rapat tidak dihadiri Ketua dan Wakil Ketua komite The meeting is not attended by the Chairman and Vice Chairman of the committee	Ketua dan Wakil Ketua hadir 2 x dalam setahun The Chairman and Vice Chairman attend the meeting 2 times a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 4 x dalam setahun The Chairman and Vice Chairman attend the meeting 4 times a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 6 x dalam setahun The Chairman and Vice Chairman attend the meeting 6 times a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 8 x dalam setahun The Chairman and Vice Chairman attend the meeting 8 times a year	5 (sangat baik) 5 (very good)
Pelaksanaan Penyampaian Implementation of Report Submission	Laporan kerja disampaikan tidak tepat waktu The work report is not submitted on time				Laporan kerja disampaikan tepat waktu The work report is submitted on time	5 (sangat baik) 5 (very good)
Matters Arising	*Matters Arising* tidak dijalankan Matters Arising are not carried out		*Matters Arising* dijalankan sebagian Some Matters Arising are carried out		Seluruh *Matters Arising* dijalankan All Matters Arising are carried out	5 (sangat baik) 5 (very good)
Dokumentasi Laporan Kerja Documentation of Work Reports	Laporan kerja tidak terdokumentasi dengan baik The work report is not properly documented				Laporan kerja terdokumentasi dengan baik The work report is well documented	5 (sangat baik) 5 (very good)
Rata-rata skor (%) Average Score (%)						**5,0**

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Prosedur terkait Penilaian Kinerja Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah adalah:

1. Masing-masing kriteria memiliki skor dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan indikator skor sebagai berikut:
   a. Nilai 1 = sangat buruk
   b. Nilai 2 = buruk
   c. Nilai 3 = cukup baik
   d. Nilai 4 = baik
   e. Nilai 5 = sangat baik
2. Pilih skor untuk masing-masing kriteria sesuai dengan kondisi Perseroan.
3. Skor akhir merupakan rata-rata dari kriteria yang dilakukan penilaian.

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE FOR THE SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE

The procedures for evaluating the performance of the Sharia Product and Business Activity Development Committee are as follows:

1. Each criterion is assigned a score from 1 (one) to 5 (five) with the following scoring indicators:
   a. Score 1 = very poor
   b. Score 2 = poor
   c. Score 3 = sufficient
   d. Score 4 = good
   e. Score 5 = very good
2. Select a score for each criterion according to the Company's condition.
3. The final score is the average of all criteria being evaluated.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN KINERJA

Kriteria terkait Penilaian Kinerja Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah adalah berdasarkan 5 poin berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Komite
2. Tingkat Kehadiran Anggota Komite
3. Pelaksanaan Penyampaian
4. *Matters Arising*
5. Dokumentasi Laporan Kerja

Pihak yang melakukan penilaian adalah Direksi Perseroan.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah untuk Tahun Buku 2025.

CRITERIA USED IN PERFORMANCE ASSESSMENT

The criteria for evaluating the performance of the Sharia Product and Business Activity Development Committee are based on the following five points:

1. Committee Meeting Implementation
2. Attendance Level of Committee Members
3. Submission Implementation
4. Matters Arising
5. Work Report Documentation

The party conducting the assessment is the Company's Board of Directors.

Below are the performance evaluation results of the Sharia Product and Business Activity Development Committee for the 2025 Financial Year.

Kriteria Criteria	**Skor** Score					**Penilaian** Assessment
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	
Pelaksanaan Rapat Komite Implementation of Committee Meetings	Tidak dilaksanakan Not being implemented	1 x dalam setahun 1 x in a year	2 x dalam setahun 2 x in a year	3 x dalam setahun 3 x in a year	>= 4 x dalam setahun >= 4 x in a year	3 (cukup baik) 3 (sufficient)
Tingkat Kehadiran Anggota Komite Attendance Level of Committee Members	Rapat tidak dihadiri Ketua The meeting is not attended by the Chairman	Ketua hadir 1 x dalam setahun The Chairman attends the meeting once in a year	Ketua hadir 2 x dalam setahun The Chairman attends the meeting 2 times a year	Ketua hadir 3 x dalam setahun The Chairman attends the meeting 3 times a year	Ketua hadir >= 4 x dalam setahun The Chairman attends the meeting >= 4 times a year	3 (cukup baik) 3 (sufficient)
Pelaksanaan Penyampaian Implementation of Report Submission	Laporan kerja disampaikan tidak tepat waktu The work report is not submitted on time				Laporan kerja disampaikan tepat waktu The work report is submitted on time	5 (sangat baik) 5 (very good)
Matters Arising	*Matters Arising* tidak dijalankan Matters Arising are not carried out		*Matters Arising* dijalankan sebagian Some Matters Arising are carried out		Seluruh *Matters Arising* dijalankan All Matters Arising are carried out	5 (sangat baik) 5 (very good)
Dokumentasi Laporan Kerja Documentation of Work Reports	Laporan kerja tidak terdokumentasi dengan baik The work report is not properly documented				Laporan kerja terdokumentasi dengan baik The work report is well documented	5 (sangat baik) 5 (very good)
Rata-rata skor (%) Average Score (%)						**4,2**

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Prosedur terkait Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah:

1. Masing-masing kriteria memiliki skor dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan indikator skor sebagai berikut:
   a. Nilai 1 = sangat buruk
   b. Nilai 2 = buruk
   c. Nilai 3 = cukup baik
   d. Nilai 4 = baik
   e. Nilai 5 = sangat baik
2. Pilih skor untuk masing-masing kriteria sesuai dengan kondisi Perseroan.
3. Skor akhir merupakan rata-rata dari kriteria yang dilakukan penilaian.

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE FOR THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE

The procedures for evaluating the performance of the Information Technology Steering Committee are as follows:

1. Each criterion is assigned a score from 1 (one) to 5 (five) with the following scoring indicators:
   a. Score 1 = very poor
   b. Score 2 = poor
   c. Score 3 = sufficient
   d. Score 4 = good
   e. Score 5 = very good
2. Select a score for each criterion according to the Company's condition.
3. The final score is the average of all criteria being evaluated.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN KINERJA

Kriteria terkait Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah berdasarkan 5 poin berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Komite
2. Tingkat Kehadiran Anggota Komite
3. Pelaksanaan Penyampaian
4. *Matters Arising*
5. Dokumentasi Laporan Kerja

Pihak yang melakukan penilaian adalah Direksi Perseroan.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi untuk Tahun Buku 2025.

CRITERIA USED IN PERFORMANCE ASSESSMENT

The criteria for evaluating the performance of the Information Technology Steering Committee are based on the following 5 points:

1. Committee Meeting Implementation
2. Attendance Level of Committee Members
3. Submission Implementation
4. Matters Arising
5. Work Report Documentation

The party conducting the assessment is the Company's Board of Directors.

Below are the performance assessment results of the Information Technology Steering Committee for the 2025 Financial Year.

Kriteria Criteria	**Skor** Score					**Penilaian** Assessment
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	
Pelaksanaan Rapat Komite Implementation of Committee Meetings	Tidak dilaksanakan Not being implemented	1 x dalam setahun 1 x in a year	2 x dalam setahun 2 x in a year	3 x dalam setahun 3 x in a year	>= 4 x dalam setahun >= 4 x in a year	5 (sangat baik) 5 (very good)
Tingkat Kehadiran Anggota Komite Attendance Level of Committee Members	Rapat tidak dihadiri Ketua The meeting is not attended by the Chairman	Ketua hadir 1 x dalam setahun The Chairman attends the meeting 1 x in a year	Ketua hadir 2 x dalam setahun The Chairman attends the meeting 2 x in a year	Ketua hadir 3 x dalam setahun The Chairman attends the meeting 3 x in a year	Ketua hadir >= 4 x dalam setahun The Chairman attends the meeting >= 4 x in a year	5 (sangat baik) 5 (very good)
Pelaksanaan Penyampaian Implementation of Report Submission	Laporan kerja disampaikan tidak tepat waktu The work report is not submitted on time				Laporan kerja disampaikan tepat waktu The work report is submitted on time	5 (sangat baik) 5 (very good)
Matters Arising	*Matters Arising* tidak dijalankan Matters Arising are not carried out		*Matters Arising* dijalankan sebagian Some Matters Arising are carried out		Seluruh *Matters Arising* dijalankan All Matters Arising are carried out	5 (sangat baik) 5 (very good)
Dokumentasi Laporan Kerja Documentation of Work Reports	Laporan kerja tidak terdokumentasi dengan baik The work report is not properly documented				Laporan kerja terdokumentasi dengan baik The work report is well documented	5 (sangat baik) 5 (very good)
Rata-rata skor (%) Average Score (%)						**5,0**

PROSEDUR DAN PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelaksanaan prosedur dan penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi dengan mengacu pada pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025. Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah berperan secara efektif dalam memfasilitasi komunikasi internal maupun eksternal Perseroan.

PROSEDUR DAN PENILAIAN KINERJA AUDIT INTERNAL

Penilaian kinerja serta pelaksanaan prosedur Audit Internal tahun 2025 dilakukan menggunakan sistem penilaian skor. Sepanjang tahun tersebut, Audit Internal telah melaksanakan kegiatan *assurance* pada berbagai unit bisnis Perseroan, dengan total 131 audit. Berdasarkan capaian tersebut, Direksi menilai bahwa Audit Internal telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan mandat yang diberikan.

PROCEDURES AND PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE CORPORATE SECRETARY

The implementation of the procedures and performance assessment of the Corporate Secretary was carried out by the Board of Directors with reference to performance achievements throughout 2025. The Board of Directors assessed that the Corporate Secretary had effectively facilitated both the Company's internal and external communications.

PROCEDURES AND PERFORMANCE ASSESSMENT OF INTERNAL AUDIT

The performance assessment and implementation of Internal Audit procedures for 2025 were conducted using a scoring assessment system. Throughout the year, Internal Audit carried out assurance activities across various business units of the Company, with a total of 131 audits. Based on these achievements, the Board of Directors assessed that Internal Audit had properly performed its functions and responsibilities in accordance with its assigned mandate.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Perseroan menegaskan komitmen terhadap kepatuhan syariah melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Unit Usaha Syariah. Langkah ini selaras dengan ketentuan POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang mengatur perlunya DPS sebagai bagian dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.

The Company reaffirms its commitment to sharia compliance through the establishment of a Sharia Supervisory Board (DPS) within the Sharia Business Unit. This initiative is aligned with the provisions of POJK Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions, which require the presence of a DPS as part of transparent and accountable governance.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan DPS Perseroan selain ketentuan disebutkan di atas mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan.
2. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
3. POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 93 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LEGAL REFERENCES

The legal references for the establishment and appointment of the Company's DPS, in addition to the provisions mentioned above, refers to several regulations, including:

1. The Company's Articles of Association.
2. POJK Number 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions.
3. POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
4. Deed of Statement of the Company's Meeting Decision Number 93 dated March 30, 2023, executed before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta.
5. Deed of Statement of the Company's Meeting Decision Number 1 dated October 1, 2025, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in the Administrative City of South Jakarta.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DPS

Perseroan telah menyusun dan menetapkan Pedoman DPS sebagai acuan utama bagi seluruh anggota DPS. Pedoman ini dirancang untuk menjamin bahwa setiap aktivitas DPS berjalan efektif, efisien, transparan, independen, dan bertanggung jawab. Pembaruan terakhir Pedoman DPS dilakukan pada 17 Februari 2023. Secara garis besar, Pedoman DPS Perseroan mengatur mengenai:

1. Landasan Hukum Pedoman.
2. Struktur dan Komposisi DPS.
3. Persyaratan Anggota DPS.
4. Pengangkatan Anggota DPS.
5. Batasan Rangkap Jabatan Anggota DPS.
6. Masa Jabatan Anggota DPS.
7. Pengunduran Diri Anggota DPS.
8. Tugas dan Wewenang DPS.
9. Mekanisme Permintaan Opini DPS.
10. Waktu Kerja.
11. Nilai-Nilai Dasar dan Etika Kerja.

DPS CHARTER

The Company has prepared and established the DPS Charter as the main reference for all DPS members. The Charter is designed to ensure that every DPS activity is carried out effectively, efficiently, transparently, independently, and responsibly. The most recent update of DPS Charter was established on February 17, 2023. In general, the Company's DPS Charter regulates the following:

1. Legal Basis of the Charter.
2. DPS' Structure and Composition.
3. Requirements for DPS Members.
4. Appointment of DPS Members.
5. Limitation on Concurrent Positions for DPS Members.
6. Term of Office of DPS Members.
7. Resignation of DPS Members.
8. DPS' Duties and Authorities.
9. Mechanism for Requesting DPS Opinions.
10. Working Hours.
11. Core Values and Work Ethics.

12. Rapat DPS.
13. Syarat Keberlanjutan.
14. Remunerasi dan Pertanggungjawaban.

KRITERIA ANGGOTA DPS

Yang dapat diangkat sebagai anggota DPS adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan:

1. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang mensyaratkan untuk anggota DPS memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK maka harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan:
   a. Persyaratan integritas meliputi:
      - Cakap melakukan perbuatan hukum.
      - Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
      - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
      - Memiliki komitmen terhadap pengembangan lembaga jasa keuangan yang sehat.
      - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama.
   b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
      - Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
      - Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
   c. Persyaratan kompetensi, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan lembaga jasa keuangan dimana dicalonkan.
2. Memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

12. DPS' Meetings.
13. Continuing Requirements.
14. Remuneration and Accountability.

CRITERIA FOR DPS MEMBERS

Those eligible to be appointed as members of DPS are individuals who meet the following criteria and requirements:

1. POJK Number 27/POJK.03/2016 on the Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions, which requires DPS members to obtain approval from OJK by passing the fit and proper test. Therefore, candidates must meet the following fit and proper assessment requirements:
   a. Integrity requirements, which include:
      - Being legally competent to perform legal actions.
      - Having good character and morals, at a minimum demonstrated by adherence to applicable regulations, including never having been convicted of a criminal offense within a certain period before nomination.
      - Having a commitment to comply with laws and regulations and to support OJK policies.
      - Having a commitment to the development of a sound financial services institution.
      - Not being included among parties prohibited from becoming key parties.
   b. Financial reputation requirements, demonstrated at a minimum by:
      - Not having non-performing loans and/or financing.
      - Never having been declared bankrupt and/or never having been a shareholder, controlling shareholder of an insurance company who is not a shareholder, member of the Board of Directors, or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years prior to nomination.
   c. Competency requirements, which at a minimum include knowledge and/or experience that supports the management of the financial services institution for which the individual is being nominated.
2. Fulfilling the requirements to serve as a DPS member based on the Company's Articles of Association.

KETENTUAN MASA JABATAN DPS

Masa jabatan anggota DPS akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2026, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota DPS pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa anggota DPS yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

TERM OF OFFICE PROVISIONS OF DPS

The term of office of DPS members will end at the close of the 2026 Annual GMS, without prejudice to the authority of the GMS to dismiss one or more DPS members at any time before the end of their term. The Company's Articles of Association state that DPS members whose term of office has ended may be reappointed.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DPS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian anggota DPS berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa setiap anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dimaksud paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dan anggota DPS yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan hingga tanggal pengunduran dirinya dalam rapat tersebut.

Selain itu, jabatan anggota DPS dapat berakhir karena dinyatakan pailit, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan RUPS, atau masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali.

MECHANISM FOR DPS' RESIGNATION AND DISMISSAL OF

The mechanism for resignation and dismissal of DPS members based on the Company's Articles of Association stipulates that every DPS member has the right to resign from his/her position and must submit a written resignation request to the Company at least 90 days before the date of his/her resignation. The Company is required to hold a GMS to resolve on the resignation request no later than 90 days after receiving the resignation letter and the DPS member who resigns will still be held accountable for his/her actions from the appointment date until the resignation date in the meeting.

Furthermore, the term of office of a DPS member may end due to being declared bankrupt, resigning, no longer fulfilling the provisions of OJK regulations and other laws and regulations, passing away, dismissal based on a GMS, or the end of his/her term of office and not being reappointed.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DPS

Susunan dan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND BASIS FOR THE APPOINTMENT OF DPS

The structure and composition of the Company's Sharia Supervisory Board have been arranged in accordance with the prevailing regulations.

No.	**POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya** POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions	**Implementasi di Perseroan** Implementation in the Company
1.	Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memiliki DPS. Sharia Financing Companies and a Sharia Business Units are required to have a DPS.	Perseroan telah memiliki DPS Perseroan. The Company already has its own DPS.
2.	DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. The DPS consists of 1 (one) Sharia expert or more, appointed by the GMS based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.	Per 31 Desember 2025, susunan anggota DPS Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang anggota dan telah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. As of December 31, 2025, the composition of the Company's DPS consists of 2 (two) members and has considered the recommendation of the National Sharia Board – Indonesian Ulema Council.
3.	DPS diangkat dalam RUPS. The DPS is appointed in the GMS.	Susunan anggota DPS Perseroan diangkat melalui RUPS Tahunan tahun 2023. The composition of the Company's DPS members was appointed through the 2023 Annual GMS.

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan maka calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. Seluruh anggota DPS Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sesuai jabatannya.

Based on the provisions of POJK Number 27/POJK.03/2016 on the Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions, candidates for DPS members are required to obtain approval from OJK before carrying out their actions, duties, and functions. All members of the Company's DPS have obtained approval from OJK by passing the fit and proper test prior to performing actions, duties, and functions in accordance with their positions.

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERSEROAN

COMPOSITION OF THE COMPANY'S SHARIA SUPERVISORY BOARD

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2023 Resolution of the Annual GMS dated March 30, 2023	RUPS Tahunan Tahun 2023 - RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026
Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2023 Resolution of the Annual GMS dated March 30, 2023	RUPS Tahunan Tahun 2023 - RUPS Tahunan Tahun 2026 Annual GMS 2023 – Annual GMS 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS

Berlandaskan Anggaran Dasar Perseroan, DPS memiliki kedudukan yang sejajar dengan Dewan Komisaris. DPS menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar setiap kegiatan usaha Perseroan senantiasa sesuai dengan prinsip syariah, dengan tugas dan wewenang utama sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Berfungsi sebagai penasihat dan memberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.
3. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DPS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Based on the Company's Articles of Association, DPS holds a position equal to that of the Board of Commissioners. DPS carries out supervisory and advisory functions to ensure that all of the Company's business activities consistently comply with Sharia principles, with the following main duties and authorities:

1. Serving as the supervisor of Sharia aspects in the operational activities of the Company's Sharia Business Unit (UUS) to ensure compliance with Sharia principles.
2. Serving as an adviser and providing recommendations to the Board of Directors, the heads of the Sharia Business Unit (UUS), and the heads of the Company's Sharia Branch Offices on matters related to Sharia principles.
3. Serving as a mediator between the Company and the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council in communicating proposals and suggestions for the development of the Company's products and services that require review and fatwas from the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.

INDEPENDENSI DPS

1. Seluruh anggota DPS Perseroan yang efektif menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS lainnya serta Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
2. DPS juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi tercermin dari pernyataan masing-masing anggota DPS yang efektif menjabat saat ini mengenai hal-hal di bawah ini:
   a. Selalu mendahulukan kepentingan Perseroan, Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.

DPS INDEPENDENCE

1. All members of the Company's DPS who are currently in office do not have any family relationship with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other DPS members, or with the Company's Major Shareholders or Controlling Shareholders.
2. DPS also consistently upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company above personal interests, while working and behaving with high integrity, as reflected in each DPS member's statement on the following matters:
   a. Always prioritizing the interests of the Company, the Company's Sharia Business Unit (UUS), and/or other stakeholders over personal interests.

b. Tidak pernah memanfaatkan jabatan pada DPS dan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan.
c. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

RANGKAP JABATAN DPS

1. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah memastikan anggota DPS memperhatikan dan tunduk pada ketentuan terkait rangkap jabatan DPS sesuai dengan POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Seluruh anggota DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perseroan.

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah di instansi/perusahaan/lembaga/organisasi lain sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota DPS.

RAPAT DPS TAHUN 2025

Frekuensi dan Kuorum Rapat:
1. Sesuai ketentuan regulator saat ini, DPS wajib menyelenggarakan rapat dengan Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pimpinan UUS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Pengawas Syariah saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Pengawas Syariah.

Pemimpin Rapat:
1. Apabila tidak ditentukan lain, maka rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
2. Apabila Ketua Dewan Pengawas Syariah berhalangan menghadiri rapat Dewan Pengawas Syariah dan belum mendelegasikan kewenangan untuk memimpin rapat dimaksud kepada salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk dalam rapat dimaksud.

b. Never using their position in the DPS and the Company's Sharia Business Unit (UUS) for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the Company's or the Sharia Business Unit's (UUS) benefits.
c. Never taking and/or receiving personal gain from the Company and the Sharia Business Unit (UUS), other than remuneration and other facilities determined by the GMS.

CONCURRENT POSITIONS OF THE DPS

1. Throughout 2025, the Company ensured that DPS members observed and complied with regulations regarding concurrent positions in accordance with POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
2. All DPS members did not hold concurrent positions as members of the Board of Directors or Board of Commissioners within the Company.

Information regarding the concurrent positions of the Sharia Supervisory Board members in other institutions/companies/agencies/organizations throughout 2025 can be found in Company Profile Chapter, which details the profiles of each DPS member.

DPS' MEETINGS IN 2025

Meeting Frequency and Quorum:
1. In accordance with current regulatory provisions, DPS is required to hold meetings with the Board of Directors, Executive Officers, and/or UUS leaders periodically at least once every 2 (two) months.
2. A meeting may be held if it is attended by more than 50% (fifty percent) of the total members of the Sharia Supervisory Board.
3. Meetings of the Sharia Supervisory Board may also be conducted via teleconference, videoconference, or other electronic media that enable all meeting participants to see and hear one another directly and to actively participate in the meeting.

Meeting Chairman:
1. Unless otherwise stipulated, meetings of the Sharia Supervisory Board shall be chaired by the Chairman of the Sharia Supervisory Board.
2. If the Chairman of the Sharia Supervisory Board is unable to attend the meeting and has not delegated the authority to chair the meeting to another member of the Sharia Supervisory Board, the meeting shall be chaired by a member of the Sharia Supervisory Board appointed at the meeting.

Keputusan dan Risalah Rapat:

1. Keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dengan ketentuan apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Pengawas Syariah yang akan menentukan.
2. Dari segala hal yang dibicarakan atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi di dalam rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat dan alasan perbedaannya.
4. Risalah rapat dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir pada rapat tersebut.
5. Risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

Decisions and Minutes of Meeting:

1. Decisions of the Sharia Supervisory Board meetings shall be made by deliberation to reach consensus. If consensus cannot be reached, decisions shall be made by a vote, with approval by more than ½ (one-half) of the members of the Sharia Supervisory Board present, provided that in the event of a tie between votes in favor and against, the Chairman of the meeting of the Sharia Supervisory Board shall cast the deciding vote.
2. All matters discussed or resolved at meetings of the Sharia Supervisory Board must be recorded in the minutes of meeting.
3. Any dissenting opinions arising during meetings of the Sharia Supervisory Board must be clearly stated in the minutes of meeting, together with the reasons for such differences of opinion.
4. The minutes of meeting shall be prepared by a person present at the meeting of the Sharia Supervisory Board appointed by the chairman of the meeting and must be signed by all members of the Sharia Supervisory Board present at the meeting.
5. The minutes of meeting must be distributed to all members of the Sharia Supervisory Board.

PELAKSANAAN RAPAT DPS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, DPS telah melaksanakan rapat 7 (tujuh) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF DPS' MEETINGS IN 2025

Throughout 2025, the DPS held 7 (seven) meetings with the following attendance rate:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Total Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Tingkat Kehadiran (%)** Attendance Rate (%)
Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	7	7	100%
Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	7	7	100%

Adapun rincian agenda rapat DPS sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The schedule and agenda of DPS meetings held in 2025 are as follows:

No.	**Tanggal** Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Peserta Rapat** Meeting Participants
1.	21 Januari 2025 January 21, 2025	▪ *Meeting* Koordinasi DPS mengenai mekanisme pencairan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) di BU atau Cabang ▪ *Meeting* Koordinasi DPS mengenai persetujuan SK Pengelolaan Kendaraan Tarikan V.8 (318/SK/OPP/12-24) ▪ DPS Coordination Meeting regarding mechanism for disbursing Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) at the Business Unit or Branch ▪ DPS Coordination Meeting regarding approval of the Decision on the Vehicle Management Withdrawal V.8 (318/SK/OPP/12-24)	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.
2.	8 April 2025 April 8, 2025	*Meeting* Koordinasi DPS mengenai *review* dan persetujuan IM *Pilot Project* Pembiayaan Haji DPS Coordination Meeting regarding the review and approval of Hajj Financing Pilot Project IM	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
3.	29 April 2025 April 29, 2025	1. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai sosialisasi perubahan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 2. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai rencana Pelaksanaan Uji Petik DPS 2025 3. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai penyampaian evaluasi kebijakan yang disetujui oleh DPS tahun 2025 1. DPS Coordination Meeting regarding the dissemination of changes to POJK Number 48 of 2024 2. DPS Coordination Meeting regarding the planned Implementation for DPS Spot Check 2025 3. DPS Coordination Meeting regarding the submission of policy evaluations approved by the DPS in 2025	Direksi WOMF, DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. WOMF Board of Directors, DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.
4.	26 Juni 2025 June 26, 2025	1. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai laporan implementasi produk Haji dan IMBT 2. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai uji Petik Pengawasan Jakarta Timur 1 1. DPS Coordination Meeting regarding the implementation report of Hajj and IMBT Products 2. DPS Coordination Meeting regarding Spot Check of Supervision at East Jakarta Timur 1	Direksi WOMF, DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. WOMF Board of Directors, DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.
5.	29 Agustus 2025 August 29, 2025	1. *Meeting* Koordinasi DPS Persetujuan Perubahan Kebijakan HajiKu 2. *Meeting* Koordinasi DPS Rencana Pengembangan Produk Haji Khusus 1. DPS Coordination Meeting regarding the Approval of Amendment to the HajiKu Policy 2. DPS Coordination Meeting regarding Special Hajj Products Development Plans	Direksi WOMF, DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. WOMF Board of Directors, DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.
6.	31 Oktober 2025 October 31, 2025	*Meeting* Koordinasi DPS mengenai Penambahan Opsi Titip Jual Logam Mulia DPS Coordination Meeting regarding the Addition of Option for Consignment Sales of Precious Metal	Direksi WOMF, DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. WOMF Board of Directors, DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.
7.	29 Desember 2025 December 29, 2025	1. *Meeting* Koordinasi DPS mengenai Rencana Kerjasama MASKu dengan Galeri24 2. *Meeting* Koordinasi DPS Permohonan Opini Pengalihan Hak Tagih Pembiayaan Syariah 1. DPS Coordination Meeting regarding the consideration of cooperation with MASKu and Galeri24 2. DPS Coordination Meeting regarding the Request for Legal Opinion on the Assignment of Sharia Financing Receivables	Direksi WOMF, DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & *function* terkait. WOMF Board of Directors, DPS, Head of Sharia Business Unit & related functions.

KEHADIRAN DPS DALAM RUPS DI TAHUN 2025

DPS ATTENDANCE AT GMS IN 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025 Annual GMS on March 25, 2025		RUPS Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025 Extraordinary GMS on March 25, 2025	
	Kehadiran Attendance		Kehadiran Attendance	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. (Ketua Dewan Pengawas Syariah) (Chairman of the Sharia Supervisory Board)	✓		✓	
Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen (Anggota Dewan Pengawas Syariah) (Member of the Sharia Supervisory Board)		✓		✓

PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS DPS

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR DPS

Nama dan Jabatan Name and Position	**Sertifikasi/Pelatihan** Certification/Training	**Tempat** Location	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. (Ketua Dewan Pengawas Syariah) (Chairman of the Sharia Supervisory Board)	1. *Training* dan *Workshop* Penerapan Kafalah di Perbankan dan Keuangan Syariah 2. *Workshop* Pra Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah X Tahun 2025 3. Seminar Nasional *Resilience and Turnaround: Indonesia's Economic Direction* 1. Training and Workshop on the Implementation of Kafalah in Sharia Banking and Finance 2. Workshop on the Pre-10th Ijtima' Sanawi of Sharia Supervisory Board 2025 3. National Seminar: Resilience and Turnaround: Indonesia's Economic Direction	Jakarta	1. 12 Juni 2025 2. 7 Oktober 2025 3. 28 Oktober 2025 1. June 12, 2025 2. October 7, 2025 3. October 28, 2025	1. Iqtishad Consulting Indonesia 2. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 3. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia 1. Iqtishad Consulting Indonesia 2. National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) 3. Indonesian Financial Services Association (APPI)
Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen (Anggota Dewan Pengawas Syariah) (Member of the Sharia Supervisory Board)	1. Kuliah Perdana : *Halal preneurship Building Creative and Competitive Halal Business in the Digital Era* 2. *Refreshment* Kebanksentralan 3. *Workshop* Kurikulum Doktor Perbankan Syariah FEB UIN Jakarta sesuai Arah Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syraih menuju Indonesia 2045 4. *Workshop* Pra Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah X Tahun 2025 5. Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah XXI Tahun 2025 6. Sertifikat Kompetensi pada bidang Pengawas Syariah 1. Inaugural Lecture: Halalpreneurship – Building Creative and Competitive Halal Businesses in the Digital Era 2. Central Banking Refresher Program 3. Workshop on the Doctoral Curriculum in Sharia Banking of Faculty of Economics and Business (FEB) of UIN Jakarta in line with the direction of Sharia economic and financial development toward Indonesia 2045 4. Workshop on the Pre-10th Ijtima' Sanawi of Sharia Supervisory Board 2025 5. 21st Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board 2025 6. Certificate of Competency in the field of Sharia Supervision	1. Malang 2. Jakarta 3. Jakarta 4. Jakarta 5. Jakarta 6. Jakarta	1. 17 Februari 2025 2. 21 Februari 2025 3. 27 Februari 2025 4. 24-25 September 2025 5. 26-27 September 2025 6. 27 November 2025 1. February 17, 2025 2. February 21, 2025 3. February 27, 2025 4. September 24-25, 2025 5. September 26-27, 2025 6. November 27, 2025	1. Universitas Muhammadiyah Malang 2. Bank Sentral Republik Indonesia 3. Universitas Islam Negeri Jakarta 4. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 5. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia Bidang Ekonomi Syariah 1. Universitas Muhammadiyah Malang 2. Central Bank of the Republic of Indonesia 3. Universitas Islam Negeri Jakarta 4. National Sharia Council – Indonesian Ulema Council 5. National Sharia Council – Indonesian Ulema Council 6. National Professional Certification Agency - Indonesian Ulema Council Professional Certification Agency for Sharia Economics

PELAKSANAAN TUGAS DPS TAHUN 2025

Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPS sepanjang tahun 2025 selengkapnya disajikan dalam Bab Laporan Manajemen pada bagian Laporan DPS. Pelaksanaan rapat DPS termasuk tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota DPS selengkapnya disajikan dalam Bab ini pada bagian Rapat DPS dan Risalah Rapat.

IMPLEMENTATION OF DPS' DUTIES IN 2025

The implementation of DPS supervisory activities throughout 2025 is fully presented in Management Report Chapter under the DPS Report section. The implementation of DPS meetings, including the attendance level of each DPS member, is fully presented in this chapter under the DPS Meetings and Meeting Minutes section.

Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information of the Board of Commissioners and the Board of Directors

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [GRI 2-17] [G-01]

Perseroan menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan prinsip keberagaman dan relevansi kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pengelolaan secara optimal. Pemilihan anggota didasarkan pada aspek latar belakang pendidikan, keahlian, serta pengalaman profesional yang relevan dengan kebutuhan strategis perusahaan. Adapun komposisi Dewan Komisaris dan Direksi saat ini mencerminkan keragaman tersebut, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, dan usia yang dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [G-04] [GRI 2-18]

PENILAIAN KNERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Perseroan dilakukan secara rutin setiap tahun. Proses ini menggunakan *Board of Commissioner* ("BOC") and BOC *Committees Effectiveness Evaluation* ("BEE"), yang mencakup penilaian individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*peers assessment*). Selain dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, penilaian juga dilakukan oleh Direksi Perseroan dengan metode 360° *Assessment* for BEE.

Proses evaluasi diadministrasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dan hasil akhirnya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Penilaian mencakup berbagai aspek, antara lain kompetensi dan pengalaman masing-masing anggota, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab, serta pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana tercermin dari penilaian diri sendiri maupun rekan sejawat.

Perseroan telah memiliki kebijakan penilaian Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Kebijakan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' AND THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION DIVERSITY [GRI 2-17] [G-01]

The Company establishes the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors by considering the principles of diversity and the relevance of competencies to support optimal execution of supervisory and management duties. The selection of members is based on educational background, expertise, and professional experience relevant to the Company's strategic needs. The current composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors reflects such diversity, including in terms of education (field of study), work experience, and age, as presented in the Company Profile Chapter.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS [G-04] [GRI 2-18]

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance assessment of the Company's Board of Commissioners is conducted annually. This process uses the Board of Commissioners ("BOC") and BOC Committees Effectiveness Evaluation ("BEE"), which includes individual assessments (self-assessment) and peer assessments. In addition to being conducted by members of the Board of Commissioners, the evaluation is also carried out by the Company's Board of Directors using the 360° Assessment for BEE method.

The evaluation process is administered by the Nomination and Remuneration Committee, and the final results are submitted to the Board of Commissioners. The assessment covers various aspects, including each member's competencies and experience, the performance of the Board of Commissioners' committees, the effectiveness of responsibility execution, and the implementation of supervisory functions as reflected in both self-assessments and peer assessments.

The Company has established a policy for evaluating the Board of Directors and Board of Commissioners in order to comply with the provisions of POJK Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies and SEOJK Number 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies. The performance assessment policy for the Board of Commissioners and Board of Directors is a form of accountability for the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities.

PROSEDUR DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun minimum 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) menggunakan Formulir *Board of Commissioner Effectiveness Evaluation*.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris

   Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris mencakup penilaian terhadap area-area penilaian di bawah ini:
   a. Efektivitas Dewan Komisaris secara keseluruhan.
   b. Prioritas utama dan area fokus Dewan Komisaris.
   c. Tanggung jawab Dewan Komisaris.
   d. Komposisi Dewan Komisaris.
   e. Remunerasi Dewan Komisaris.
   f. Komite Dewan Komisaris.
   g. Tingkah laku Dewan Komisaris.
   h. Interaksi dan komunikasi Dewan Komisaris.
   i. Keterlibatan Dewan Komisaris.
   j. President Komisaris.
   k. Administrasi dan proses Dewan Komisaris.
   l. Program pembelajaran dan pengembangan Komisaris.
2. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris
   Penilaian ini mencakup penilaian terhadap efektivitas kinerja, kepribadian dan aspek kualitas yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris itu sendiri.
3. Penilaian kinerja oleh rekan sejawat termasuk penilaian terhadap Komisaris Independen
   Penilaian ini mencakup penilaian terhadap efektivitas kinerja, kepribadian dan aspek kualitas yang dimiliki oleh rekan sejawatnya. Khusus untuk penilaian terhadap Komisaris Independen selaku rekan sejawat terdapat penilaian juga terkait independensi dan peranan Komisaris Independen pada Perseroan.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara Kolegial
   Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris atas kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted at least once a year. This evaluation is carried out by the Board of Commissioners through a self-assessment method using the Board of Commissioner Effectiveness Evaluation Form.

The criteria used in evaluating the performance of the Board of Commissioners are as follows:

1. Assessment of the Collegial Performance of the Board of Commissioners
   The assessment of the collegial performance of the Board of Commissioners covers the following assessment areas:
   a. Overall effectiveness of the Board of Commissioners.
   b. Main priorities and focus areas of the Board of Commissioners.
   c. Responsibilities of the Board of Commissioners.
   d. Composition of the Board of Commissioners.
   e. Remuneration of the Board of Commissioners.
   f. Board of Commissioners' Committees.
   g. Conduct and behavior of the Board of Commissioners.
   h. Interaction and communication within the Board of Commissioners.
   i. Engagement of the Board of Commissioners.
   j. The President Commissioner.
   k. Administration and processes of the Board of Commissioners.
   l. Learning and development programs for Commissioners.
2. Assessment of the individual performance of each Board of Commissioners member
   This assessment covers the assessment of the effectiveness of performance, personality, and quality aspects possessed by the individual member of the Board of Commissioners.
3. Peer assessment, including evaluation of Independent Commissioners
   This evaluation covers performance effectiveness, personality, and the professional qualities of peers. Specifically, for the peer review of Independent Commissioners, the assessment also includes their independence and their specific role within the Company.

ASSESSOR FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The parties responsible for evaluating the performance of the Board of Commissioners are as follows:

1. Collegial assessment of the Board of Commissioners
   The assessment is conducted by each member of the Board of Commissioners on the overall performance of the Board of Commissioners.

2. Penilaian Kinerja Individu Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris
   Masing-masing anggota Dewan Komisaris memberikan penilaian atas kinerjanya sendiri.
3. Penilaian Kinerja oleh Rekan Sejawat
   Masing-masing anggota Dewan Komisaris memberikan penilaian atas kinerja dari setiap anggota Dewan Komisaris lainnya.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Pada tahun 2025, telah dilakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. Secara keseluruhan Dewan Komisaris dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PROSEDUR DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Evaluasi terhadap kinerja Direksi dilakukan secara tahunan dengan mengacu pada *Key Performance Indicators* (KPI) Perseroan. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi standar kinerja Direksi, antara lain:

1. Nilai Tambah pemegang saham yang Semakin Meningkat.
2. Jaringan yang Optimal.
3. Peningkatan Pertumbuhan Usaha.
4. Kualitas Portofolio yang Optimal.
5. OPEX yang Optimal.
6. Kepuasan Pelanggan.
7. Optimalisasi teknologi sebagai *business enabler*.
8. Peningkatan Kualitas Manajemen Kepatuhan.
9. Peningkatan kepuasan & keterlibatan karyawan.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI TAHUN 2025

Pada tahun 2025 telah dilakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Secara keseluruhan Dewan Komisaris dan Direksi dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

2. Assessment of Individual Performance of Each Member of the Board of Commissioners
   Each member of the Board of Commissioners assesses his/her own performance.
3. Peer Assessment
   Each member of the Board of Commissioners evaluates the performance of every other member of the Board of Commissioners.

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

In 2025, a performance assessment of the Board of Commissioners was conducted. Overall, the Board has demonstrated effective performance in fulfilling its duties and responsibilities.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES AND CRITERIA FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The performance assessment of the Board of Directors is conducted annually by referring to the Company's Key Performance Indicators (KPIs). This assessment considers various aspects that serve as the performance standards for the Board of Directors, including:

1. Maximized shareholder value.
2. Optimized network.
3. Increased business growth.
4. Optimized portfolio quality.
5. Optimized OPEX.
6. Customer satisfaction.
7. Optimize technology as a business enabler.
8. Improve compliance management.
9. Increased employee satisfaction & engagement.

ASSESSOR FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors conducts a self-evaluation of its performance, which is forwarded to the Nomination and Remuneration Committee for review. The Committee's findings are subsequently reported to the Board of Commissioners.

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, a performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors was conducted. Overall, the Board of Commissioners and the Board of Directors were assessed to have carried out their duties and responsibilities effectively.

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [GRI 2-19, 2-20, 2-21]

PROSES NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sejalan dengan Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, proses nominasi dikoordinasikan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite melakukan identifikasi dan penilaian calon berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, rekam jejak, serta pemenuhan persyaratan regulator. Selain itu, proses ini memastikan bahwa struktur Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kombinasi keahlian yang memadai untuk mendukung efektivitas pengelolaan dan pengawasan Perseroan.

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Setiap usulan untuk mengganti dan/atau menunjuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang sesuai standar untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan secara paralel akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan hasil persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, meskipun Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS [GRI 2-19, 2-20, 2-21]

NOMINATION PROCESS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The nomination procedure for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company is carried out in accordance with the Articles of Association and the provisions of laws and regulations. The nomination process is coordinated by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee. The Committee identifies and evaluates candidates based on competency, integrity, experience, track record, and compliance with regulatory requirements. Furthermore, this process ensures that the Board of Directors and Board of Commissioners possess an adequate mix of expertise to support effective management and oversight of the Company.

PROCEDURE FOR PROPOSAL TO DETERMINATION OF NOMINATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Any proposal to replace and/or appoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors at the General Meeting of Shareholders must consider recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee recommends candidates who meet the required standards for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, ensuring that these candidates possess the relevant core skills and competencies and are deemed capable and suitable for appointment in accordance with the Financial Services Authority Regulation on Fit and Proper Assessment.

Once approved by the Board of Commissioners, the appointment proposal for candidates of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors will be submitted to the General Meeting of Shareholders and, in parallel, to OJK to obtain the necessary approval in accordance with the Fit and Proper Assessment provisions. Under Regulation of the Financial Services Authority on Fit and Proper Assessment, the effective date of appointment of Board of Commissioners and Board of Directors members is determined based on OJK's approval of the Fit and Proper Assessment, although the Company may hold the General Meeting of Shareholders prior to obtaining the Financial Services Authority approval.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penentuan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 25 Maret 2025, kewenangan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diberikan kepada Presiden Komisaris, dengan mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sementara itu, besaran remunerasi Direksi Perseroan dilimpahkan wewenangnya dan kuasa kepada Dewan Komisaris, juga berdasarkan pertimbangan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

KRITERIA PENENTUAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Indikator untuk menentukan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kinerja, kemampuan dan kondisi Perseroan;
2. Hasil *benchmarking* remunerasi yang berlaku di industri;
3. Pencapaian kinerja masing-masing anggota Direksi dengan indikator utama seperti keuntungan Perseroan, pertumbuhan penjualan, portofolio risiko serta produktivitas;
4. Kewajaran dengan memperhatikan *peer group*;
5. Faktor lain terkait namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KOMPONEN REMUNERASI

Perseroan menetapkan struktur Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan komponen-komponen yang terperinci sebagai berikut:

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The determination of remuneration for the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board is carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. Based on the Resolution of the Annual GMS dated March 25, 2025, the authority to determine the remuneration of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board is granted to the President Commissioner, taking into account the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. Meanwhile, the authority to determine the remuneration of the Board of Directors is delegated to the Board of Commissioners, also based on the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

CRITERIA FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The indicators used in determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

1. The performance, capability, and condition of the Company;
2. Results of Remuneration benchmarking applicable in the industry;
3. Performance achievements of each member of the Board of Directors, with key indicators such as the Company's profitability, sales growth, risk portfolio, and productivity;
4. Fairness based on peer group comparisons;
5. Other relevant factors that do not conflict with applicable laws and regulations.

REMUNERATION COMPONENTS

The Company establishes the remuneration structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors with the following detailed components:

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1.	Gaji Pokok Basic Salary	✓	✓
2.	Tunjangan Kesehatan Health Allowance	-	✓
3.	Tunjangan Kesehatan Keluarga Family Health Allowance	-	-
4.	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	-	✓
5.	Tunjangan Perjalanan Dinas Business Travel Allowance	-	-
6.	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	✓	✓

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
7.	Bonus Reward	✓	✓
8.	Asuransi Jabatan (Imbalan Pasca Kerja) Occupational Insurance (Post Employment Benefits)	-	-
9.	Tunjangan Keanggotaan Klub Club Membership Allowance	-	-
10.	Tunjangan Cuti Leave Allowance	-	✓
11.	Bantuan dana Pendidikan Education Fund Assistance	-	-
12.	Tunjangan *Entertainment*/Makan Entertainment/Meal Allowance	-	-
13.	Tunjangan Kendaraan Vehicle Allowance	-	✓

Berdasarkan Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi: [GRI 2-21]

Based on the Income Level of the Board of Commissioners and the Board of Directors: [GRI 2-21]

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun Total Remuneration per Person in 1 year	Jumlah (orang) Total (Person)
Di atas Rp2,5 miliar Above Rp2.5 billion	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2,5 miliar Above Rp1 billion to Rp2.5 billion	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion	4
Di atas Rp500 juta Above Rp500 million	-

Direksi
Board of Directors

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun Total Remuneration per Person in 1 year	Jumlah (orang) Total (Person)
Di atas Rp2,5 miliar Above Rp2.5 billion	5
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2,5 miliar Above Rp1 billion to Rp2.5 billion	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion	-
Di atas Rp500 juta Above Rp500 million	-

Pada tahun 2025, total remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mencapai Rp21,1 miliar.

In 2025, the total remuneration granted to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors amounted to Rp21.1 million.

JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2025

TOTAL REMUNERATION AND OTHER BENEFITS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2025

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah yang Diterima dalam Satu Tahun Total Received in a Year			
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
		Orang Person	Nominal	Orang Person	Nominal
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan tantiem dan fasilitas lainnya) Remuneration (salary, reward, routine allowance, bonus, and other facilities)	4	4.511.800.000	5	16.627.346.768

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [G-02]

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan kapan saja sesuai kebutuhan, atas inisiatif anggota Dewan Komisaris atau permintaan tertulis anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili minimal 1/10 dari total saham dengan hak suara. Selain itu, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diharapkan mencapai minimal 75% dari total rapat tahunan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS [G-02]

BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS

Board of Commissioners' meetings must be held at least once every 2 (two) months and can be held at any time as needed, either on the initiative of a Board of Commissioners' member or at the written request of Board of Commissioners' members or shareholders who collectively represent at least 1/10 of the total voting shares. In addition, the Board of Commissioners is required to hold regular joint meetings with the Board of Directors, at least once every 3 (three) months. Attendance of members of the Board of Commissioners is expected to reach at least 75% of the total annual meetings.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 8 (eight) meetings with the attendance frequency and meeting agendas as follows:

Frekuensi dan Peserta Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025
Frequency and Participants of Board of Commissioners' Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Sarastri Baskoro	Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner /Independent Commissioner	8	8	100%
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner	8	8	100%
Taufik Aulia	Komisaris Commissioner	7	8	88%
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	8	88%
Myrnie Zachraini Tamin*	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%

*) Masa jabatan Myrnie Zachraini Tamin berakhir pada tanggal 30 September 2025. Untuk periode tahun 2025, Rapat Dewan Komisaris Perseroan telah dilaksanakan sebanyak 5 kali rapat sampai dengan tanggal dimaksud. Berdasarkan hal tersebut Myrnie Zachraini Tamin telah menghadiri 5 kali dari 5 rapat yang dilaksanakan.
*) Myrnie Zachraini Tamin's term of office ended on September 30, 2025. For the 2025 period, the Company's Board of Commissioners held 5 meetings up to the said date. Based on this, Myrnie Zachraini Tamin attended 5 of the 5 meetings held.

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025
Agenda of the Board of Commissioners' Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	17 Februari 2025 February 17, 2025	Tugas dan Kewenangan Komite Pemantau Risiko Duties and Authorities of the Risk Oversight Committee	Dewan Komisaris Board of Commissioners
2.	23 April 2025 April 23, 2025	Kinerja WOM Finance Maret 2025 WOM Finance Performance, March 2025	Dewan Komisaris Board of Commissioners
3.	25 Juni 2025 June 25, 2025	1. *Technology Journey* 2. *Regional & Branch Performance* 1. Technology Journey 2. Regional & Branch Performance	Dewan Komisaris Board of Commissioners
4.	30 Juli 2025 July 30, 2025	1. KPI Direksi Tahun 2024 2. *Approval for Financial Statement as of* 30 Juni 2025 1. 2024 Board of Directors KPIs 2. Approval of Financial Statements as of June 30, 2025	Dewan Komisaris Board of Commissioners
5.	27 Agustus 2025 August 27, 2025	KPI Direksi Tahun 2024 2024 Board of Directors KPIs	Dewan Komisaris Board of Commissioners
6.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Laporan Keuangan 30 September 2025 Financial Statement as of September 30, 2025	Dewan Komisaris Board of Commissioners
7.	28 November 2025 November 28, 2025	Policy Pembiayaan Konsumen - Konvensional Consumer Financing Policy – Conventional	Dewan Komisaris Board of Commissioners
8.	15 Desember 2025 December 15, 2025	1. WOM Finance AOP 2026 2. *Approval Cassie Write Off* Tahun 2019 sampai dengan 2020 3. *Limit Approval* Kredit >Rp2 miliar 1. WOM Finance AOP 2026 2. Approval of Cassie Write-Off for 2019 to 2020 3. Limit Approval Kredit >Rp2 billion	Dewan Komisaris Board of Commissioners

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Mengacu pada Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2025, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Referring to Articles of Association, the Board of Commissioners is required to hold joint meetings with the Board of Directors regularly, at least once every 3 (three) months.

Throughout 2025, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held 11 (eleven) times, with the attendance frequency and meeting agendas as follows:

Frekuensi dan Peserta Rapat Gabungan Tahun 2025
Frequency and Participants of Joint Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**				
Sarastri Baskoro	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	11	11	100%
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Taufik Aulia	Komisaris Commissioner	8	11	73%
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	11	82%
Myrnie Zachraini Tamin*	Komisaris Independen Independent Commissioner	8	9	89%

Frekuensi dan Peserta Rapat Gabungan Tahun 2025
Frequency and Participants of Joint Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Direksi **Board of Directors**				
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	11	11	100%
Njauw Vido Onadi**	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	11	11	100%
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Director	10	11	90%
Wibowo	Direktur Director	11	11	100%
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director	11	11	100%

*) Masa jabatan Myrnie Zachraini Tamin berakhir pada tanggal 30 September 2025. Untuk periode tahun 2025, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Perseroan telah dilaksanakan sebanyak 9 kali rapat sampai dengan tanggal dimaksud. Berdasarkan hal tersebut Myrnie Zachraini Tamin telah menghadiri 8 kali dari 9 rapat yang dilaksanakan.
**) Pengangkatan Njauw Vido Onadi menjadi Wakil Presiden Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 Oktober 2024 dan efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan per tanggal 5 Februari 2025.
*) Myrnie Zachraini Tamin's term of office ended on September 30, 2025. For the 2025 period, joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners were held 9 times up to the said date. Based on this, Myrnie Zachraini Tamin attended 8 of the 9 meetings held.
**) Appointment of Njauw Vido Onadi as Vice President Director at the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 9, 2024 and effectively serving as Vice President Director of the Company as of February 5, 2025.

Agenda Rapat Gabungan Tahun 2025
Agenda of Joint Meeting in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	22 Januari 2025 January 22, 2025	Kinerja WOM Finance November dan Desember 2024 WOM Finance Performance for November and December 2024	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
2.	17 Februari 2025 February 17, 2025	Kinerja WOM Finance Januari 2025 WOM Finance Performance for January 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
3.	25 Maret 2025 March 25, 2025	Kinerja WOM Finance Februari 2025 WOM Finance Performance for February 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
4.	23 April 2025 April 23, 2025	Kinerja WOM Finance Maret 2025 WOM Finance Performance for March 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
5.	21 Mei 2025 May 21, 2025	Kinerja WOM Finance April 2025 WOM Finance Performance for April 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
6.	25 Juni 2025 June 25, 2025	Kinerja WOM Finance Mei 2025 WOM Finance Performance for May 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
7.	30 Juli 2025 July 30, 2025	Kinerja WOM Finance Juni 2025 WOM Finance Performance for June 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
8.	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Kinerja WOM Finance Juli 2025 WOM Finance Performance for July 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
9.	29 September 2025 September 29, 2025	Kinerja WOM Finance Agustus 2025 WOM Finance Performance for August 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
10.	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Kinerja WOM Finance September 2025 WOM Finance Performance for September 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
11.	28 November 2025 November 28, 2025	Kinerja WOM Finance Oktober 2025 WOM Finance Performance for October 2025	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors

RAPAT DIREKSI

Direksi menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali setiap bulan dan dapat diadakan setiap saat apabila dipandang perlu, untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Selain itu, Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala, minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, guna memastikan koordinasi dan

BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

The Board of Directors holds meetings at least once every month and may be held at any time if deemed necessary to support timely and accurate decision-making. In addition, the Board of Directors is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners, at least once every 3 (three) months, to ensure effective coordination and

pengawasan yang efektif. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat diharapkan mencapai minimal 50% dari total rapat tahunan.

oversight. Attendance of Board of Directors' members is expected to reach at least 50% of the total annual meetings.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Throughout 2025, the Board of Directors held 38 (thirty eight) meetings with attendance frequency and meeting agendas as follows:

Frekuensi dan Peserta Rapat Direksi Tahun 2025
Frequency and Participants of Board of Directors Meetings in 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kehadiran** Attendance	**Jumlah Rapat** Total Meetings	**Kehadiran (%)** Attendance (%)
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director	36	38	95%
Njauw Vido Onadi*	Wakil Presiden Direktur** Vice President Director	37	38	97%
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Director	36	38	95%
Wibowo	Direktur Director	35	38	92%
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director	38	38	100%

*) Pengangkatan Njauw Vido Onadi menjadi Wakil Presiden Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 Oktober 2024 dan efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan per tanggal 5 Februari 2025.
**) Rapat sebelum tanggal 5 Februari 2025 dihadiri Njauw Vido Onadi sebagai Direktur Perseroan dan setelah tanggal 5 Februari 2025, Njauw Vido Onadi menghadirinya sebagai Wakil Presiden Direktur.
*) Appointment of Njauw Vido Onadi as Vice President Director at the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 9, 2024 and effectively serving as Vice President Director of the Company as of February 5, 2025.
**) Meetings before February 5, 2025, were attended by Njauw Vido Onadi as Director of the Company and after February 5, 2025, Njauw Vido Onadi attended as Vice President Director.

Agenda Rapat Direksi Tahun 2025
Agenda of the Board of Directors' Meetings in 2025

No.	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*		**Peserta Rapat** *Meeting Participants*
1.	6 Januari 2025 January 6, 2025	1. AOP Internal FY25 2. *Financial Closing*	1. Internal AOP FY25 2. Financial Closing	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
2.	14 Januari 2025 January 14, 2025	1. *Update New Bike* 2. *Update* MotorKu 3. *Update* RAKERNAS 2025	1. Update of New Bike 2. Update of MotorKu 3. Update of RAKERNAS 2025	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
3.	20 Januari 2025 January 20, 2025	1. *Management Letter EY* 2. *Cost Environment Project* 2025	1. EY Management Letter 2. Cost Environment Project 2025	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
4.	3 Februari 2025 February 3, 2025	1. Validasi dan Anomali SLIK OJK 2. Update kondisi sistem di Januari 2025 3. Maybank *Policy Cascading*	1. Validation and Anomalies in OJK SLIK 2. System Status Update as of January 2025 3. Maybank Policy Cascading	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
5.	17 Februari 2025 February 17, 2025	1. *Financial Closing* 2. *Update Monitoring* Pembiayaan Fasdan & Fasmod	1. Financial Closing 2. Update Monitoring of Fasdan & Fasmod Financing	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
6.	24 Februari 2025 February 24, 2025	1. ODP *Rating* 2025 2. *Warehouse Analysis* 3. *Marketing Closing* 4. *Recovery Plan for CAE Environment*	1. ODP Rating 2025 2. Warehouse Analysis 3. Marketing Closing 4. Recovery Plan for CAE Environment	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
7.	3 Maret 2025 March 3, 2025	1. *Project Plan* 2025 2. *Financial Closing*	1. Project Plan 2025 2. Financial Closing	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
8.	10 Maret 2025 March 10, 2025	*Update Tele Center*	Tele Center Update	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
9.	17 Maret 2025 March 17, 2025	Kerja Sama WOM Finance dengan POS Indonesia	WOM Finance Collaboration with POS Indonesia	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
10.	24 Maret 2025 March 24, 2025	1. *Update Live National Credit Data Entry* 2. *Marketing Closing*	1. Update of Live National Credit Data Entry 2. Marketing Closing	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions

Agenda Rapat Direksi Tahun 2025

Agenda of the Board of Directors' Meetings in 2025

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*		Peserta Rapat *Meeting Participants*
11.	7 April 2025 April 7, 2025	*Financial Closing*	Financial Closing	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
12.	15 April 2025 April 15, 2025	Sentralisasi *Telemarketing* Sumatera	Centralization of Telemarketing in Sumatera	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
13.	21 April 2025 April 21, 2025	1. Perubahan Rencana Bisnis 2. Sentralisasi *Telemarketing* Sumatera 3. *Update Project* Tele RRD Maret 2025 4. *Update Progress Centro Phase 3* 5. *Issue* DRC *Site* 6. IT *Risk Assessment*	1. Business Plan Changes 2. Centralization of Telemarketing in Sumatera 3. Update Tele RRD Project for March 2025 4. Update Progress Centro Phase 3 5. DRC Site Issue 6. IT Risk Assessment	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
14.	28 April 2025 April 28, 2025	1. *Marketing Closing* 2. GRC *Solution* MBI 3. Hasil Analisa *Assessment* Camunda 4. *Security Awareness* 5. *New Handling Collection*	1. Marketing Closing 2. MBI GRC Solution 3. Results of Camunda Assessment Analysis 4. Security Awareness 5. New Handling Collection	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
15.	5 Mei 2025 May 5, 2025	*Financial Closing* April 2025	Financial Closing April 2025	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
16.	19 Mei 2025 May 19, 2025	1. *Assessment* Maybank - *Zero Threat* 2. Skema B2B dan GC	1. Maybank Assessment – Zero Threat 2. B2B and GC Scheme	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
17.	26 Mei 2025 May 26, 2025	1. *Marketing Closing* April 2025 2. *Project* WOM x Pos Indonesia 3. *Refreshment Google Workspace*	1. Marketing Closing for April 2025 2. WOM x Pos Indonesia Project 3. Google Workspace Refreshment	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
18.	9 Juni 2025 June 9, 2025	1. *Financial Closing* 2. *Update* Data Nasional	1. Financial Closing 2. National Data Update	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
19.	16 Juni 2025 June 16, 2025	1. *Monitoring* Fasdan *as of May* 2025 2. *Google Workspace*	1. Monitoring Fasdan as of May 2025 2. Google Workspace	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
20.	23 Juni 2025 June 23, 2025	1. *Marketing Closing* 2. *Technology Journey*	1. Marketing Closing 2. Technology Journey	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
21.	7 Juli 2025 July 7, 2025	1. *Financial Closing* 2. *Update Data Asset* 3. Interim *Result & Adjustment Cut Off* 31 Mei 2025 4. Renovasi *Centralized* & Cabang Pekanbaru 5. DRC *Site* and Server Dev	1. Financial Closing 2. Asset Data Update 3. Interim Results & Adjustment Cut-off as of May 31, 2025 4. Renovation of Centralized Office & Pekanbaru Branch 5. DRC Site and Server Development	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
22.	14 Juli 2025 July 14, 2025	Laporan Internal Audit Q2 Tahun 2025	Laporan Internal Audit Q2 Tahun 2025	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
23.	21 Juli 2025 July 21, 2025	1. *Update Progress* Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) 2. *Marketing Closing* 3. *Update Achievement* Juni 2025 4. *Exit Meeting Vendor Assessment* PT Adicipta Inovasi Teknologi Tbk 5. Pembelian Ruko Gedung Pekanbaru	1. Update on the Implementation Progress of Personal Data Protection (PDP) 2. Marketing Closing 3. Update on Achievements as of June 2025 4. Exit Meeting Vendor Assessment PT Adicipta Inovasi Teknologi Tbk 5. Purchase of Shophouse Building in Pekanbaru	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
24.	4 Agustus 2025 August 4, 2025	*Financial Closing*	Financial Closing	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
25.	11 Agustus 2025 August 11, 2025	*Propose Trip Agent Corporate*	Proposal for Corporate Travel Agent	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
26.	18 Agustus 2025 August 18, 2025	1. *Project* NDS RO 2. *Propose Trip Agent Corporate*	1. Project NDS RO 2. Propose Trip Agent Corporate	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
27.	25 Agustus 2025 August 25, 2025	1. *Marketing Closing* 2. *Update* Penanganan Litigasi Kasus Gorontalo	1. Marketing Closing 2. Update on the Handling of the Gorontalo Litigation Case	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions

Agenda Rapat Direksi Tahun 2025
Agenda of the Board of Directors' Meetings in 2025

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*		Peserta Rapat *Meeting Participants*
28.	8 September 2025 September 8, 2025	1. *Financial Closing* 2. *Update Progress Development Project Bisnis* 3. *Refreshment Server* dan *Network DRC*	1. Financial Closing 2. Update on the Progress of Business Development Projects 3. DRC Server and Network Refreshment	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
29.	15 September 2025 September 15, 2025	Pemilihan Vendor Validasi Rekening	Selection of Account Validation Vendor	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
30.	22 September 2025 September 22, 2025	1. IT *Cost* 2025 2. *New* PD Model Proposal 2025 3. *Marketing Closing*	1. IT Costs 2025 2. New PD Model Proposal 2025 3. Marketing Closing	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
31.	29 September 2025 September 29, 2025	*Update Approval* BU *Head*	Update Approval BU Head	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
32.	6 Oktober 2025 October 6, 2025	1. *Financial Closing* 2. IT *security*	1. Financial Closing 2. IT security	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
33.	13 Oktober 2025 October 13, 2025	1. Proposal MBI *Request Alternate Site* 2. IT *security cost*	1. Proposal for MBI Request for an Alternate Site 2. IT security cost	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
34.	27 Oktober 2025 October 27, 2025	1. *Marketing Closing* 2. Rencana Bisnis Tahunan & Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 3. *Annual Report & Sustainability Report* 2025	1. Marketing Closing 2. Annual Business Plan & Sustainable Finance Action Plan 3. Annual Report & Sustainability Report 2025	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
35.	3 November 2025 November 3, 2025	*Target Sales* 2026	Target Sales 2026	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
36.	10 November 2025 November 10, 2025	1. *Financial Closing* 2. DRC Wise-CAE *Update* 3. Pengiriman Data melalui API & Microsite	1. Financial Closing 2. DRC Wise-CAE Update 3. Data Transmission via API & Microsite	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
37.	1 Desember 2025 December 1, 2025	Rakernas 2026	National Working Meeting (Rakernas) 2026	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions
38.	9 Desember 2025 December 9, 2025	*Financial Closing*	Financial Closing	Direksi & Fungsi Board of Directors & Functions

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPS DI TAHUN 2025

ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN THE GMS IN 2025

Nama dan Jabatan Name and Position	RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025 Annual GMS on March 25, 2025		RUPS Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025 Extraordinary GMS on March 25, 2025	
	Kehadiran Attendance		Kehadiran Attendance	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**				
Sarastri Baskoro (Presiden Komisaris/Komisaris Independen) (President Commissioner/Independent Commissioner)	✓		✓	
Thilagavathy Nadason (Komisaris) (Commissioner)	✓		✓	

Nama dan Jabatan Name and Position	RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025 Annual GMS on March 25, 2025		RUPS Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025 Extraordinary GMS on March 25, 2025	
	Kehadiran Attendance		Kehadiran Attendance	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Taufik Aulia (Komisaris) (Commissioner)	✓		✓	
Rallyati A. Wibowo, S.E. (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	✓		✓	
Myrnie Zachraini Tamin (Komisaris Independen)* ((Independent Commissioner)*	✓		✓	
Direksi **Board of Directors**				
Djaja Suryanto Sutandar (Presiden Direktur) (President Director)	✓		✓	
Anthony Yuarez Panggabean (Direktur) (Director)	✓		✓	
Njauw Vido Onadi** (Wakil Presiden Direktur) (Vice President Director)	✓		✓	
Wibowo (Direktur) (Director)	✓		✓	
Cincin Lisa Hadi (Direktur) (Director)	✓		✓	

*) Masa jabatan Myrnie Zachraini Tamin berakhir pada tanggal 30 September 2025.
**) Pengangkatan Njauw Vido Onadi menjadi Wakil Presiden Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 Oktober 2024 dan efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan per tanggal 5 Februari 2025.
*) Myrnie Zachraini Tamin's term of office ended on September 30, 2025.
**) Appointment of Njauw Vido Onadi as Vice President Director at the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 9, 2024 and effectively serving as Vice President Director of the Company as of February 5, 2025.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DIREKSI, PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Dalam menjalankan perannya, anggota Dewan Komisaris Perseroan senantiasa menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik Perseroan.

AFFILIATION RELATIONSHIP BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND OTHER COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, MAJOR SHAREHOLDERS AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

In performing their roles, members of the Company's Board of Commissioners always maintain their independence and avoid conflict of interest that could interfere with their ability to carry out their duties professionally, transparently, and oriented towards the best interests of the Company.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI PER 31 DESEMBER 2025

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi;

DISCLOSURE OF AFFILIATION RELATIONSHIPS OF DECEMBER 31, 2025

1. All members of the Company's Board of Commissioners have no affiliation in the form of family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the Company's Major Shareholders and Controlling Shareholders;
2. All members of the Board of Commissioners have no affiliation in the form of financial relationships with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors;

3. Sebanyak 1 (satu) orang atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Utama Perseroan dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

3. 1 (One) individual or 25% (twenty-five percent) of all members of the Company's Board of Commissioners has an affiliation in the form of a financial relationship with the Company's Major Shareholder and/or Controlling Shareholder.

Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

As shown in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keuangan Dengan:** Financial Relationship With:						**Hubungan Keluarga Dengan:** Family Relationship With:					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali*** Major Shareholders and Controlling Shareholders*		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali*** Major Shareholders and Controlling Shareholders*	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Sarastri Baskoro	Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Taufik Aulia	Komisaris Commissioner		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓

*) Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni:
PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan sebagaimana didefinisikan pada POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

*) The Company's Major Shareholders and Controlling Shareholders are:
PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati. PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati are the Company's controlling shareholders as defined in POJK Number 47/POJK.05/2020 on Business Licensing and Institution of Financing Companies and Sharia Financing Companies, as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Dalam menjalankan perannya, anggota Direksi Perseroan senantiasa menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik Perseroan.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI PER 31 DESEMBER 2025

1. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

AFFILIATE RELATIONSHIPS BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS, MAJOR SHAREHOLDERS, AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

In carrying out their roles, members of the Company's Board of Directors always maintain their independence and avoid conflict of interest that could interfere with their ability to carry out their duties professionally, transparently, and oriented towards the Company's best interests.

DISCLOSURE OF AFFILIATION RELATIONSHIPS AS OF DECEMBER 31, 2025

1. All members of the Company's Board of Directors have no affiliations in the form of financial relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Company's Major Shareholders and Controlling Shareholders;

2. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2. All members of the Company's Board of Directors have no affiliations in the form of family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the Company's Major Shareholders and Controlling Shareholders.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keuangan Dengan:** Financial Relationship With:						**Hubungan Keluarga Dengan:** Family Relationship With:					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali*** Major Shareholders and Controlling Shareholders*		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali*** Major Shareholders and Controlling Shareholders*	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Njauw Vido Onadi	Wakil Presiden Direktur** Vice President Director**		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Cincin Lisa Hadi	Direktur Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Anthony Yuarez Panggabean	Direktur Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Wibowo	Direktur Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Catatan:
*) Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni:
PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Makmur Sejati yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan sebagaimana didefinisikan pada POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
**) Pengangkatan Njauw Vido Onadi menjadi Wakil Presiden Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 Oktober 2024 dan efektif menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan per tanggal 5 Februari 2025.
*) The Company's Major Shareholders and Controlling Shareholders are
PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati. PT Bank Maybank Indonesia Tbk and PT Wahana Makmur Sejati are the Company's controlling shareholders as defined in POJK Number 47/POJK.05/2020 on Business Licensing and Institution of Financing Companies and Sharia Financing Companies, as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 on the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.
**) Appointment of Njauw Vido Onadi as Vice President Director at the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 9, 2024 and effectively serving as Vice President Director of the Company as of February 5, 2025.

Rincian mengenai hubungan afiliasi setiap anggota Direksi tercantum dalam Bab Profil Perusahaan yang membahas profil individu masing-masing.

Details on the affiliation relationships of each member of the Board of Directors are presented in Company Profile Chapter which discusses the individual profiles of each member.

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di instansi/perusahaan/lembaga/organisasi lain sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris.

POLICY ON CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Information regarding concurrent positions held by members of the Board of Commissioners in other institutions/companies/agencies/organizations throughout 2025 can be found in Company Profile Chapter in the profile of each member of the Board of Commissioners.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

1. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah memastikan anggota Direksi memperhatikan dan tunduk pada ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan

POLICY ON CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Throughout 2025, the Company ensured that members of the Board of Directors adhered to and complied with the provisions related to holding concurrent positions

POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris pada perusahaan dan/atau lembaga lain.

3. Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi sebagai anggota komite sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Direksi.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Perseroan memastikan transparansi atas kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen tata kelola yang baik di Perseroan untuk mendukung keterbukaan informasi dan mencegah potensi konflik kepentingan.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan segera kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham Perseroan atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan sesuai ketentuan POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme yang diwajibkan regulator untuk memastikan keterbukaan dan kepatuhan.

KETENTUAN TERKAIT KEWAJIBAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN KEPADA OJK

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan kepada OJK dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan:

1. POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
2. Piagam Dewan Komisaris dan/atau Piagam Direksi Perseroan.

in accordance with POJK Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Companies, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions and Other Financial Service Institutions and POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

2. All members of the Company's Board of Directors do not concurrently serve as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in other companies and/or institutions.
3. All members of the Company's Board of Directors do not concurrently serve as members of more than 5 (five) committees in institutions/companies where they also serve as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners.

Information regarding the concurrent positions of Board of Directors members as committee members throughout 2025 can be found in the Company Profile Chapter, under the profile of each Board of Directors member.

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company ensures transparency on share ownership by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, whether direct or indirect, in accordance with the applicable laws and regulations. This disclosure is part of the Company's commitment to good corporate governance to support information transparency and prevent potential conflicts of interest.

Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall report immediately to OJK no later than 5 (five) working days since having ownership of voting rights over the Company's shares or any change in ownership of voting rights over the Company's shares in accordance with the provisions POJK Number 4 of 2024 on Reports on Ownership or Any Change in Ownership of Shares of Public Companies and Reports on Activities of Pledging Shares of Public Companies. Reporting is carried out through mechanisms required by the regulator to ensure transparency and compliance.

PROVISIONS REGARDING THE OBLIGATION TO REPORT CHANGES IN SHARE OWNERSHIP OF THE COMPANY TO THE OJK

Members of the Board of Directors or Board of Commissioners who hold shares with voting rights, either directly or indirectly, are required to submit a report on their ownership of voting rights and any changes in such ownership of the Company's shares to OJK by considering compliance with the following regulations:

1. POJK Number 4 of 2024 on Reports on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on Share Pledging Activities of Public Companies.
2. The Board of Commissioners Charter and/or the Board of Directors Charter of the Company.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang objektif dan independen, Dewan Komisaris didukung oleh tiga komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Ketiga komite tersebut berperan penting dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan pengawasan yang objektif dan terukur. Seluruh anggota komite independen telah memenuhi persyaratan independensi, tanpa adanya keterikatan finansial, kepemilikan, maupun hubungan pribadi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak.

To ensure the objective and independent execution of the supervisory function, the Board of Commissioners is supported by three committees: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Oversight Committee. These three committees play an important role in assisting the Board of Commissioners in carrying out objective and measurable oversight. All members of the independent committees have fulfilled the independence requirements, with no financial, ownership, or personal ties to the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders, enabling them to perform their duties professionally and impartially.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai perpanjangan fungsi pengawasan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan integritas pelaporan keuangan. Melalui penelaahan atas pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya, Komite Audit turut memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik di seluruh lini operasional. Selain itu, Komite Audit juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan tahunan 2025, sekaligus memastikan independensi dan kualitas proses audit sesuai ketentuan yang berlaku.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners as an extension of the supervisory function to ensure the effectiveness of the internal control system and the integrity of financial reporting. Through reviews of audit implementation and follow-up actions, the Audit Committee helps ensure the Company's compliance with laws and regulations, as well as the application of good corporate governance principles across all operational lines. In addition, the Audit Committee provides recommendations to the Board of Commissioners on the selection and appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm that conduct the audit of the 2025 annual financial statements, while ensuring the independence and quality of the audit process in accordance with applicable regulations.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN

1. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. POJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 015/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 056/XI/ BOCWOM/2024 tanggal 26 November 2024 mengenai Penetapan Susunan Komite Audit.

LEGAL BASIS FOR APPOINTMENT

1. POJK Number 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee.
2. POJK Number 48 of 2024 on Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and other Financial Services Institutions.
3. Board of Commissioners' Decision Letter Number 015/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended by Board of Commissioners' Decision Letter Number 056/XI/BOCWOM/2024 dated November 26, 2024, on the Determination of Audit Committee Composition

PIAGAM KOMITE AUDIT

Perseroan menetapkan Piagam Komite Audit sebagai pedoman resmi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Piagam ini memastikan kegiatan Komite Audit dijalankan secara independen, objektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, Piagam mengatur antara lain mengenai latar belakang pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, tata cara kerja, kode etik, penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, serta mekanisme penanganan pengaduan terkait dugaan

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Company has established the Audit Committee Charter as the official guideline for the implementation of the duties and responsibilities of the Audit Committee. This Charter ensures that the activities of the Audit Committee are carried out independently, objectively, and in accordance with good corporate governance principles. In addition, the Charter regulates, among other things, the background of its establishment, functions, duties, authorities, membership, working procedures, code of conducts, meeting arrangements, activity reporting systems, and the mechanisms

pelanggaran atas laporan keuangan. Pembaruan terakhir Piagam Komite Audit dilakukan pada 1 Juli 2024 agar tetap selaras dengan ketentuan dan praktik terbaik terkini.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. Persyaratan umum keanggotaan Komite Audit:
   a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
   b. Wajib memiliki pengetahuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang sehubungan dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
   c. Mematuhi kode etik yang diatur dalam Piagam Komite Audit ini dan kode etik lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan yang berlaku bagi Komite Audit Perseroan.
   d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
   e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
   f. Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
   g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Syarat ini tidak berlaku bagi Komisaris Independen Perseroan yang menjadi anggota Komite Audit Perseroan.
   h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
   i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
   j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan.
   k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

for handling complaints related to alleged violations of financial reporting. The most recent update to the Audit Committee Charter was made on July 1, 2024 to ensure alignment with the latest regulations and best practices.

CRITERIA FOR AUDIT COMMITTEE MEMBERS

1. General requirements for Audit Committee membership:
   a. Must possess high integrity, capability, knowledge, and experience relevant to their field of work, and be able to communicate effectively.
   b. Must have the ability to read and understand financial statements, understand the Company's business—particularly those related to its services or business activities—audit processes, risk management, and other relevant laws and regulations.
   c. Must comply with the code of ethics stipulated in this Audit Committee Charter and other codes of ethics established by the Company that apply to the Audit Committee.
   d. Must be willing to continuously enhance competencies through education and training.
   e. Must have at least 1 (one) member with an educational background and expertise in accounting and finance.
   f. Must not be a person from a Public Accounting Firm, a Law Consultant Office, a Public Appraisal Service Office, or any other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the past 6 (six) months.
   g. Must not be a person who works for or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the past 6 (six) months. This requirement does not apply to the Company's Independent Commissioners who serve as members of the Audit Committee.
   h. Must not have direct or indirect share ownership in the Company.
   i. If an Audit Committee member acquires the Company's shares, whether directly or indirectly, as a result of a legal event, such shares must be transferred to another party within no later than 6 (six) months after the shares are acquired.
   j. Must not have any affiliation with members of the Company's Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders.
   k. Must not have any direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.



2. Persyaratan khusus keanggotaan Komite Audit:
   a. Mengerti dan memahami Standar Akuntansi Keuangan.
   b. Mengerti dan memahami pengendalian internal atas pelaporan keuangan termasuk proses auditnya.

2. Specific requirements for Audit Committee membership:
   a. Understanding and having knowledge of Financial Accounting Standards.
   b. Understanding and having knowledge of internal control over financial reporting, including its audit processes.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan Komite Audit Perseroan tidak dapat melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Komite Audit dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan dan/atau mengganti anggota Komite Audit sebelum masa tugasnya berakhir.

TERM OF OFFICE PROVISIONS

The term of office of the Company's Audit Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association. Members of the Audit Committee may be reappointed for 1 (one) subsequent period, provided that this does not diminish the right and authority of the Board of Commissioners to dismiss and/or replace members of the Audit Committee before the end of their term of service.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE AUDIT DI SEPANJANG TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terjadi perubahan susunan dan komposisi Komite Audit. Dengan demikian, susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2025

Throughout 2025, there were no changes to the structure and composition of the Audit Committee. Accordingly, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2025 is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 056/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 Decision Letter of the Board of Commissioners Number 056/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024	26 November 2024 - 2026 November 26, 2024 – 2026
Rijanti Witarsa	Anggota Komite/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 015/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 056/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 Decision Letter of the Board of Commissioners Number 015/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended under Decision Letter of the Board of Commissioners Number 056/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024	29 Maret 2024 - 2026 March 29, 2024 - 2026
Anang Yudiansyah, S.E.	Anggota Komite/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 015/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 056/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 Decision Letter of the Board of Commissioners Number 015/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended under Decision Letter of the Board of Commissioners Number 056/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024	29 Maret 2024 - 2026 March 29, 2024 - 2026

PROFIL KOMITE AUDIT

Informasi terkait Profil Ketua Komite Audit yang juga menjabat sebagai Dewan Komisaris tercantum pada bagian Profil Dewan Komisaris. Sementara itu, informasi mengenai anggota komite yang berasal dari luar dapat dilihat di bawah ini.

AUDIT COMMITTEE'S PROFILE

Information on the profile of the Chairman of the Audit Committee, who also serves as a member of the Board of Commissioners, is presented in the Board of Commissioners Profile section. Meanwhile, information on committee members from outside the Company can be found below.

Rijanti Witarsa
Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of Audit Committee/Independent Party

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen
61 Tahun per 31 Desember 2025
61 years old as of December 31, 2025

Periode Jabatan
Term of Office
29 Maret 2024 - 2026
March 29, 2024 - 2026

Domisili
Domicile
Jakarta
Jakarta

Riwayat Pendidikan

1. MM/MBA, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), International Business School, Universitas Monash (2002)
2. Sarjana Akuntansi, Universitas Trisakti (1990)

Sertifikasi

Certification for Audit Committee Practices (IKAI)

Rangkap Jabatan

Komisaris Utama, PT Shape Up Indonesia (Desember 2023-Desember 2028)

Pengalaman Kerja

1. Internal Audit Director, PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (2008-2011)
2. Anggota Komite Audit, PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (2011)
3. Anggota Komite Audit, PT Kokoh Inti Arebama Tbk. (2011)
4. CFO Parent Company, PT Caturkarsa Mega Tunggal Tbk. (2011-2021)
5. Chief Financial Officer, PT Taman Safari Indonesia (2023-2024)
6. Anggota Komite Audit, PT Wahana Ottomitra Multiartha (2024-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 015/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 056/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Audit.

Educational Background

1. MM/MBA, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), International Business School, Monash University (2002)
2. Bachelor of Accounting, Universitas Trisakti (1990)

Certifications

Certification for Audit Committee Practices (IKAI)

Concurrent Positions

President Commissioner of PT Shape Up Indonesia (Desember 2023-Desember 2028)

Work Experience

1. Internal Audit Director, PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (2008–2011)
2. Audit Committee Member, PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (2011)
3. Audit Committee Member, PT Kokoh Inti Arebama Tbk. (2011)
4. CFO of Parent Company, PT Caturkarsa Mega Tunggal Tbk. (2011–2021)
5. Chief Financial Officer, PT Taman Safari Indonesia (2023–2024)
6. Audit Committee Audit, PT Wahana Ottomitra Multiartha (2024–present).

Legal Basis for Appointment

Decision Letter of the Board of Commissioners Number 015/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended under Decision Letter of the Board of Commissioners Number 056/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024 on the Determination of the Audit Committee Composition.

Anang Yudiansyah, S.E.
Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of Audit Committee/Independent Party

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

56 Tahun per 31 Desember 2025
56 years old as of December 31, 2025

Periode Jabatan
Term of Office

29 Maret 2024 - 2026
March 29, 2024 - 2026

Domisili
Domicile

Jakarta
Jakarta

Riwayat Pendidikan

Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (1994)

Sertifikasi

Chartered Accountant (IAI), Certified Internal Auditor (IIA), Certification in Audit Committee Practices (IKAI), Certified Professional Risk management (Revolution Mind Indonesia), Qualified Risk Oversight Practices (IKAI).

Rangkap Jabatan

1. Audit Committee, PT Prima Andalan Mandiri Tbk (2021-sekarang)
2. Audit Committee, PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (2023-sekarang)
3. Anggota Komite Audit, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Maret 2024-sekarang)
4. Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Maret 2024-sekarang).

Pengalaman Kerja

1. Senior Auditor, Ernst & Young (1992-1996)
2. Kepala Internal Audit, PT Semen Cibinong, Tbk (1996-2000)
3. Senior Manager, Ernst & Young (2000-2009)
4. Senior Advisor, PT Dex Solutions Indonesia (2009-sekarang)
5. Audit Committe, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (Desember 2011-Juni 2024)
6. Audit Committee, PT Indonesia Paradise Property Tbk (2016-sekarang)
7. Audit Committee, PT Taisho Pharmaceutical Tbk (2019-2023)
8. Audit Committee, PT Prima Andalan Mandiri Tbk (2021-sekarang)
9. Audit Committee, PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (2023-sekarang)
10. Anggota Komite Audit, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Maret 2024-sekarang)
11. Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Maret 2024-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 015/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 056/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Audit.

Educational Background

Bachelor of Accounting, Universitas Indonesia (1994)

Certifications

Chartered Accountant (IAI), Certified Internal Auditor (IIA), Certification in Audit Committee Practices (IKAI), Certified Professional in Risk Management (Revolution Mind Indonesia), Qualified Risk Oversight Practices (IKAI).

Concurrent Positions

1. Audit Committee, PT Prima Andalan Mandiri Tbk (2021–present)
2. Audit Committee, PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (2023–present)
3. Audit Committee Member, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (March 2024–present)
4. Member of the Risk Oversight Committee, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (March 2024–present)

Work Experience

1. Senior Auditor, Ernst & Young (1992–1996)
2. Head of Internal Audit, PT Semen Cibinong Tbk (1996–2000)
3. Senior Manager, Ernst & Young (2000–2009)
4. Senior Advisor, PT Dex Solutions Indonesia (2009–present)
5. Audit Committee, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (December 2011–June 2024)
6. Audit Committee, PT Indonesia Paradise Property Tbk (2016–present)
7. Audit Committee, PT Taisho Pharmaceutical Tbk (2019–2023)
8. Audit Committee, PT Prima Andalan Mandiri Tbk (2021–present)
9. Audit Committee, PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (2023–present)
10. Audit Committee Member, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (March 2024–present)
11. Member of the Risk Oversight Committee, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (March 2024–present)

Legal Basis for Appointment

Decision Letter of the Board of Commissioners Number 015/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended under Decision Letter of the Board of Commissioners Number 056/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024 on the Determination of the Audit Committee Composition.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

- Persyaratan anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 55/2015 yang telah diatur dalam Piagam Komite Audit.
- Dengan diangkatnya Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris WOMF tentang Pembentukan Komite Audit WOMF Nomor 056/XI/BOCWOM/2024 tertanggal 26 November 2024, maka anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Komite Audit menulis surat pernyataan yang berisi, antara lain:

1. Saya mempunyai akhlak, moral, integritas yang baik, dan cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan/atau yang berkaitan di sektor keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan saya selaku Anggota Komite Audit Perseroan.
3. Saya memiliki komitmen untuk tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan/prosedur yang berlaku di Perseroan.
4. Saya memiliki kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan, dan mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Saya bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Saya tidak pernah memanfaatkan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
7. Saya tidak pernah menerima dan/atau memberi dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kewajiban yang berkaitan dengan jabatan ataupun pekerjaan saya.
8. Saya senantiasa menjaga dan melindungi seluruh informasi rahasia yang berkaitan dengan Perseroan dan tidak memberikan keterangan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Dewan Komisaris atau kepada pihak otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Saya memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan, serta kewajiban-kewajiban saya untuk patuh terhadap prinsip-prinsip dasar, kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan hukum yang digariskan pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan dan seluruh kebijakan internal Perseroan yang berlaku bagi saya.

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

- The requirements for Audit Committee members include they must possess high integrity, capability, knowledge, and experience in accordance with their field of work, as well as the ability to communicate effectively as stipulated in POJK 55/2015, have been regulated in the Audit Committee Charter.
- With the appointment of the Audit Committee through the Decision Letter of the Board of Commissioners of WOMF on the Establishment of the WOMF Audit Committee Number 056/XI/BOCWOM/2024 dated November 26, 2024, the Audit Committee members have fulfilled the requirements of possessing integrity, good character, and strong moral values.

The Audit Committee submitted a written statement containing, among others:

1. I have good character, moral values, and integrity, and am legally competent.
2. I have never been sentenced for committing a criminal act that caused state financial loss and/or is related to the financial sector within a period of 5 (five) years prior to my appointment as a member of the Company's Audit Committee.
3. I am committed to complying with the prevailing laws and regulations and the applicable policies/procedures within the Company.
4. I have the capability, experience, knowledge, and/or expertise in the fields required by the Company, and am able to communicate well.
5. I am willing to continuously enhance my competencies through education and training.
6. I have never utilized the Company, whether directly or indirectly, for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the Company's benefits.
7. I have never received and/or provided anything in any form, whether directly or indirectly, that may influence duties related to my position or work.
8. I consistently safeguard and protect all confidential information related to the Company and will not disclose any information to other parties except with the approval of the Board of Commissioners or to authorized parties in accordance with prevailing laws and regulations.
9. I understand the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, as well as my obligations to comply with the fundamental principles, policies, and legal provisions set out in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, and all internal policies applicable to me.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Informasi Keuangan
   a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan lainnya sehubungan dengan informasi keuangan Perseroan.
   b. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Perseroan.

2. Audit Internal
   a. Mengevaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi atas Piagam Audit Internal Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
   b. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Unit Audit Internal Perseroan serta memberikan masukan-masukan yang diperlukan atas rencana kerja tersebut.
   c. Memastikan Unit Audit Internal Perseroan bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugasnya.
   d. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah ketidakpatuhan terhadap kebijakan, Undang-Undang, dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Unit Audit Internal Perseroan.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, dan/atau penggantian, dan/atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
   f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Unit Audit internal Perseroan, Akuntan Publik ('AP') dan/atau Kantor Akuntan Publik ('KAP') dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari Dewan Komisaris dan dalam rangka untuk menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan.
3. Audit Eksternal
   a. Sehubungan dengan pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan Perseroan yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP, Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab:
      - Mengawasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP dan memastikan AP dan/atau KAP mengkomunikasikan segera hal-hal/temuan-temuan yang signifikan kepada Komite Audit Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
      - Memastikan Manajemen Perseroan melakukan tindak lanjut atas hasil temuan AP dan/atau KAP.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Financial Information
   a. Reviewing financial information that will be published by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, annual reports, and other reports related to the Company's financial information.
   b. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes in accordance with the procedures established by the Company.
2. Internal Audit
   a. Evaluating and submitting the evaluation results of the Company's Internal Audit Charter to the Board of Commissioners prior to its approval by the Board of Commissioners.
   b. Evaluating the annual work plan of the Company's Internal Audit Unit and providing necessary recommendations on the work plan.
   c. Ensuring that the Company's Internal Audit Unit operates independently and upholds integrity in carrying out its duties.
   d. Reviewing audit reports and ensuring that the Board of Directors promptly takes necessary actions to address control weaknesses, fraud, non-compliance with policies, laws and regulations, and provisions or other issues identified and reported by the Company's Internal Audit Unit.
   e. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment and/or replacement and/or dismissal of the Head of the Company's Internal Audit Unit.
   f. Monitoring and evaluating the follow-up actions taken by the Board of Directors on the findings of the Company's Internal Audit Unit, the Public Accountant ('AP') and/or the Public Accounting Firm ('KAP'), and the supervisory results of the Financial Services Authority, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners on matters requiring its attention and to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the reporting process.
3. External Audit
   a. In relation to the audit services on the Company's financial information performed by AP and/or KAP, the Audit Committee is tasked with and responsible for:
      - Overseeing the audit conducted by the AP and/or KAP and ensuring that the AP and/or KAP promptly communicates significant matters/findings to the Company's Audit Committee for further submission to the Company's Board of Commissioners.
      - Ensuring that the Company's Management takes follow-up actions on the findings of the AP and/or KAP.

b. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab memberikan pendapat independen dalam hal terjadi:
   - Perbedaan pendapat antara Manajemen Perseroan dan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
   - Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.

c. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.

e. Terhadap evaluasi yang telah dilakukan oleh Komite Audit Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka ini di atas, Komite Audit Perseroan bertugas dan bertanggung jawab:
   - Menyusun dan menerbitkan laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP tersebut sesuai format yang ditentukan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sehubungan dengan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan; dan
   - Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud poin i huruf ini di atas kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tembusan kepada Direksi Perseroan. Selanjutnya atas laporan tersebut, Direksi Perseroan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan guna memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sehubungan dengan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan.

4. Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

   Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan/atau tata kelola yang baik di Perseroan.

5. Kode Etik

   Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab mentaati Kode etik yang ditetapkan perusahaan.

6. Tugas Lainnya

   Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan tugas khusus dari Dewan Komisaris Perseroan yang disampaikan dalam bentuk tertulis sepanjang tugas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. The Audit Committee is tasked with and responsible for providing an independent opinion in the event of:
   - Differences in opinion between the Company's Management and the AP and/or KAP on the services provided;
   - Non-compliance of the audit conducted by the AP and/or KAP with the applicable auditing standards.

c. The Audit Committee is tasked with and responsible for providing recommendations to the Company's Board of Commissioners on the appointment of the AP and/or KAP that will provide audit services on the annual historical financial information.

d. Conducting an evaluation of the audit services performed by the AP and/or KAP on the annual historical financial information.

e. With respect to the evaluation conducted by the Company's Audit Committee as referred to in item (d) above, the Company's Audit Committee is tasked with and responsible for:
   - Preparing and issuing a report on the results of the evaluation of the audit services performed by the AP and/or KAP on the annual historical financial information, in accordance with the format stipulated in the applicable regulations of the Financial Services Authority on the use of AP and KAP services in financial service activities; and
   - Submitting the report as referred to in point i above to the Company's Board of Commissioners with a copy to the Company's Board of Directors. Furthermore, based on this report, the Company's Board of Directors shall report to the Financial Services Authority in order to fulfill the reporting obligations pursuant to the applicable Regulations of the Financial Services Authority on the use of AP and KAP services in financial service activities.

4. Compliance with Laws and Regulations

   The Audit Committee is tasked with and responsible for reviewing compliance with the laws and regulations related to the Company's business activities, including but not limited to laws and regulations in the capital market sector and/or good governance in the Company.

5. Code of Ethics

   The Audit Committee is tasked with and responsible for complying with the Code of Ethics established by the Company.

6. Other Duties

   The Audit Committee is tasked with and responsible for carrying out special assignments from the Company's Board of Commissioners as conveyed in writing, provided that such assignments do not conflict with the prevailing laws and regulations and are intended to support the duties and functions of the Board of Commissioners in conducting supervision in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat dilakukan secara fisik maupun melalui media elektronik. Rapat sah apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Komite Audit. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau dengan suara terbanyak apabila tidak tercapai kesepakatan. Setiap hasil rapat dituangkan dalam risalah yang ditandatangani seluruh anggota yang hadir, memuat pula pendapat berbeda bila ada, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban Komite Audit.

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Audit dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE'S MEETINGS

The Audit Committee holds meetings regularly at least once every 3 (three) months, which may be conducted physically or through electronic media. A meeting is valid if attended by more than 50% of the Audit Committee members. Decisions are made based on deliberation to reach consensus, or by majority vote if consensus cannot be reached. Each meeting result is documented in minutes signed by all members present, which also include any differing opinions, and submitted to the Board of Commissioners as a form of accountability of the Audit Committee.

Throughout 2025, the Audit Committee held 16 (sixteen) meetings, with the attendance frequency and meeting agendas as follows:

Frekuensi Rapat Komite Audit 2025
Audit Committee Meeting Frequency in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner	16	16	100%
Rijanti Witarsa	Anggota Komite/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party	16	16	100%
Anang Yudiansyah, S.E.	Anggota Komite/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party	16	16	100%

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2025
Agenda of Audit Committee's Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	17 Januari 2025 January 17, 2025	Realisasi Internal Audit Q4 2024 Internal Audit Realization Q4 2024	Komisaris Independen, Presiden Direktur, Komite Audit, SKAI Maybank, Internal Audit WOM Independent Commissioner, President Director, Audit Committee, SKAI of Maybank, WOM Internal Audit
2.	17 Januari 2025 January 17, 2025	*Progress Meeting* dengan *Audit Committee Year End Audit* 31 Desember 2024 Progress Meeting with Audit Committee – Year-End Audit as of December 31, 2024	Komisaris Independen, Komite Audit, EY, Internal Audit WOM Independent Commissioner, Audit Committee, EY, WOM Internal Audit
3.	14 Februari 2025 February 14, 2025	Pembahasan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Discussion of Financial Statements as of December 31, 2024	Komisaris Independen, Komite Audit, EY, Finance & Accounting, Internal Audit WOM Independent Commissioner, Audit Committee, EY, Finance & Accounting, WOM Internal Audit
4.	5 Maret 2025 March 5, 2025	Pembahasan *Management Letter Year End Audit* 31 Desember 2024 Discussion of Management Letter – Year-End Audit as of December 31, 2024	Komisaris Independen, Komite Audit, EY, Internal Audit WOM Independent Commissioner, Audit Committee, EY, WOM Internal Audit
5.	21 April 2025 April 21, 2025	Pembahasan Laporan Keuangan per 31 Maret 2025 Discussion of Financial Statements as of March 31, 2025	Komisaris Independen, Direktur Keuangan, Komite Audit, Finance & Accounting, Tax, Internal Audit WOM Independent Commissioner, Finance Director, Audit Committee, Finance & Accounting, Tax, WOM Internal Audit
6.	25 April 2025 April 25, 2025	1. *Audit Rating* 2. Realisasi *Annual Audit Plan* Kuartal I 2025 1. Audit Rating 2. Realization of Annual Audit Plan – Q1 2025	Komisaris Independen, Presiden Direktur, Komite Audit, SKAI Maybank, Internal Audit WOM Independent Commissioner, President Director, Audit Committee, SKAI of Maybank, WOM Internal Audit

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2025
Agenda of Audit Committee's Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
7.	25 April 2025 April 25, 2025	*Review of IT Governance for* PT WOM, Tbk Review of IT Governance for PT WOM, Tbk	Komisaris Independen, Presiden Direktur, Direktur Operations dan IT, Komite Audit, IT, SKAI Maybank, SKAI Berhad, Internal Audit WOM Independent Commissioner, President Director, Operations and IT Director, Audit Committee, IT, SKAI of Maybank, SKAI of Berhad, WOM Internal Audit
8.	4 Juli 2025 July 4, 2025	*Kick Off Limited Review June* 2025 Kick Off Limited Review June 2025	Komisaris Independen, Komite Audit, EY, Internal Audit WOM Independent Commissioner, Audit Committee, EY, WOM Internal Audit
9.	7 Juli 2025 July 7, 2025	*Interim Review Result & Adjustment Cut Off May* 2025 Interim Review Result & Adjustment Cut Off May 2025	Komisaris Independen, Komite Audit, EY, Internal Audit WOM Independent Commissioner, Audit Committee, EY, WOM Internal Audit
10.	7 Juli 2025 July 7, 2025	Sosialisasi POJK 48 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dissemination of POJK 48 of 2024 on Good Governance for Financing Companies, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Institutions	Komisaris Independen, Komite Audit, Compliance Independent Commissioner, Audit Committee, Compliance
11.	18 Juli 2025 July 18, 2025	*Internal Audit Report as of June* 2025 Internal Audit Report as of June 2025	Komisaris Independen, Presiden Direktur, Komite Audit, SKAI Maybank, Internal Audit WOM Independent Commissioner, President Director, Audit Committee, SKAI Maybank, WOM Internal Audit
12.	28 Juli 2025 July 28, 2025	1. *Closing Meeting Limited Review* 30 Juni 2025 2. Diskusi Laporan Keuangan Interim tanggal 30 Juni 2025 dan untuk periode enam bulan berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit) 1. Closing Meeting Limited Review June 30, 2025 2. Discussion of Interim Financial Statements as of June 30, 2025, for the six-month period ended on that date (unaudited)	Komisaris Independen, Presiden Direktur, Finance Direktur, Komite Audit, SKAI Maybank, Internal Audit WOM, EY, Finance & Accounting, Risk Management, HC Shared Service Independent Commissioner, President Director, Finance Director, Audit Committee, SKAI of Maybank, WOM Internal Audit, EY, Finance & Accounting, Risk Management, HC Shared Services
13.	21 Oktober 2025 October 21, 2025	1. *Internal Audit Report as of September* 2025 2. *Annual Audit Plan FY* 2026 3. Penyesuaian Piagam Internal Audit Versi 05 2025 1. Internal Audit Report as of September 2025 2. Annual Audit Plan for FY 2026 3. Adjustment of Internal Audit Charter – Version 05 2025	Komisaris Independen, Komite Audit, Accounting Independent Commissioner, Audit Committee, Accounting
14.	27 Oktober 2025 October 27, 2025	Laporan Keuangan Interim tanggal 30 September 2025 Interim Financial Statements as of September 30, 2025	Komisaris Independen, Komite Audit, Accounting Independent Commissioner, Audit Committee, Accounting
15.	12 November 2025 November 12, 2025	*Kick Off Meeting Year End* Audit Desember 2025 Year-End Audit Kick-Off Meeting – December 2025	Komisaris Independen, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Keuangan, Direktur Operasional & TI, Direktur Pemasaran, Komite Audit, Manajemen Risiko, EY, Finance & Accounting, Internal Audit WOM Independent Commissioner, President Director, Vice President Director, Finance Director, Operations & IT Director, Marketing Director, Audit Committee, Risk Management, EY, Finance & Accounting, WOM Internal Audit
16.	30 Desember 2025 December 30, 2025	*Hardclose* Audit *Findings* 2025 Hardclose Audit Findings 2025	EY AC- Komite Audit, EY, Internal Audit Hard Close Audit Findings 2025

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah mengikuti berbagai pelatihan yang relevan dengan perkembangan bisnis dan tata kelola Perseroan, sebagai berikut:

TRAINING FOR AUDIT COMMITTEE'S MEMBERS

Throughout 2025, the Audit Committee participated in various training programs relevant to the Company's business developments and governance, as follows:

Nama Name	Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Rijanti Witarsa (Anggota Komite/Pihak Independen) Member of Audit Committee/ Independent Party	1. Peran Dewan Komisaris dalam Aspek Hukum Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan 2. *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection* 3. *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) 4. *Sustainability Reporting : Impact and Implementation of* PSPK 1 & 2 *for Professional* 1. The Role of the Board of Commissioners in the Legal Aspects of the Company's Financial Statements and 2. Annual Report 3. Financial Statement Fraud: Prevention and Detection 4. Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) 5. Sustainability Reporting: Impact and Implementation of PSPK 1 & 2 for Professional	1. Gedung Bidakara 2. Gedung Bidakara 3. Hotel Manhattan 4. Hotel Manhattan	1. 21 Januari 2025 2. Juli 2025 3. 26 Agustus 2025 4. 30 September 2025 1. January 21, 2025 2. July 2025 3. August 26, 2025 4. September 30, 2025	1. IKAI 2. IKAI 3. IKAI 4. IAI & IKAI
Anang Yudiansyah, S.E. (Anggota Komite/Pihak Independen) Member of Audit Committee/ Independent Party	1. *Town Hall meeting* IIA 2. Dukungan Dewan dan Manajemen Senior dalam Tata Kelola IA 3. Forum Penguatan Fungsi GRC 4. *The Strategic Role of Accountant in Turbulent Times* 5. *The Future of Corporate Reporting* 6. *Training* dan Sertifikasi QROP 1. IIA Town Hall Meeting 2. Board and Senior Management Support for Internal Audit Governance 3. GRC Function Strengthening Forum 4. The Strategic Role of Accountants in Turbulent Times 5. The Future of Corporate Reporting 6. QROP Training and Certification	1. *Online* 2. *Online* 3. *Online* 4. *Online* 5. *Online* 6. Jakarta	1. 24 Januari 2025 2. 13 Maret 2025 3. 19 Agustus 2025 4. 23 May 2025 5. 17 April 2025 6. 15 s.d 16 Oktober 2025 1. January 24, 2025 2. March 13, 2025 3. August 19, 2025 4. May 23, 2025 5. April 17, 2025 6. October 15 to 16, 2025	1. OJK 2. IIA 3. OJK 4. IAI-MIA 5. Malaysian Institute Accountant 6. IKAI

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit berperan aktif dalam memastikan efektivitas penerapan tata kelola yang baik di Perseroan. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komite Audit melaksanakan berbagai tugas yang meliputi:

1. Rapat dengan Auditor Eksternal membahas:
   - Hasil Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2025 Pembahasan meliputi isu-isu audit dan akuntansi signifikan dan temuan audit dan rekomendasi perbaikannya (*Management Letter*).
   - *Kick off limited review* atas Laporan Keuangan Semester 1/2025 dan hasil reviu.
     Limited review merupakan penugasan dari Maybank Berhad Malaysia dan Auditor Eksternal tidak menerbitkan laporan hasil *review* untuk Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE'S DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Audit Committee played an active role in ensuring the effectiveness implementation of good governance within the Company. In carrying out its supervisory function, the Audit Committee performed various duties, including:

1. Meeting with the External Auditor discussing:
   - Audit results of the 2025 Financial Statements.
     The discussion included significant audit and accounting issues as well as audit findings and their improvement recommendations (Management Letter).
   - Kick-off of the limited review of the Financial Statements for the first half of 2025 and the review results.
     The limited review was an assignment from Maybank Berhad Malaysia, and the External Auditor did not issue a review report for the Company.

2. Rapat dengan Direktur Keuangan & Tim membahas Laporan Keuangan Tahunan dan Kuartal 1/2025.
   Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan penerbitan laporan-laporan keuangan tersebut untuk pihak-pihak berkepentingan.
3. Rapat dengan Audit membahas:
   - Temuan audit Kuartal IV tahun 2024
   - Temuan audit Kuartal I dan Kuartal II tahun 2025 dan *Audit Rating*.
4. Rapat dengan IT Audit MBB.
   Membahas hasil temuan IT Audit MBB atas WOMF.
5. Rapat dengan Departemen *Compliance* membahas POJK Nomor 48 tahun 2024 tentang penerapan *Corporate Governance* pada Perusahaan Pembiayaan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola yang baik, Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Komite ini berperan memberikan rekomendasi strategis terkait proses nominasi dan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi guna memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, objektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

DASAR HUKUM

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan mengacu pada:

1. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. POJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya; dan
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 016/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 057/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai acuan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab komite. Piagam yang disahkan oleh Dewan Komisaris pada 15 Desember 2025 ini memuat ketentuan mengenai latar belakang, tujuan pembentukan komite, struktur dan keanggotaan komite,

2. Meeting with the Finance Director & Team discussing the Annual Financial Statements and Q1 2025 Financial Statements.
   The Audit Committee submitted recommendations to the Board of Commissioners for approval of the issuance of these financial statements to relevant stakeholders.
3. Meeting with Audit discussing:
   - Audit findings for Quarter IV 2024
   - Audit findings for Quarter I and Quarter II of 2025 and the Audit Rating.
4. Meeting with MBB IT Audit.
   Discussing the results of MBB IT Audit findings on WOMF.
5. Meeting with the Compliance Department discussing POJK Number 48 of 2024 regarding the implementation of Corporate Governance in Financing Companies.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In order to strengthen the implementation of good corporate governance, the Company has established a Nomination and Remuneration Committee under the supervision of the Board of Commissioners. This Committee provides strategic recommendations related to the nomination process and remuneration policies for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to ensure transparent, objective, and good corporate governance compliant implementation.

LEGAL BASIS

Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported at the GMS. The Nomination and Remuneration Committee is established with reference to:

1. POJK Number 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
2. POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions; and
3. Board of Commissioners' Decision Letter Number 016/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended by Board of Commissioners' Decision Letter Number 057/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024, on Determination of the Nomination and Remuneration Committee's Composition.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

The Company has established the Nomination and Remuneration Committee Charter as a reference for performing the committee's functions and responsibilities. The Charter, approved by the Board of Commissioners on December 15, 2025, sets out provisions on the background, purpose of establishing the committee's, structure and

tugas, tanggung jawab dan wewenang komite, tata cara kerja, penyelenggaraan rapat, serta sistem pelaporan dan pengungkapan kegiatan yang menjadi pedoman operasional komite secara menyeluruh.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang meliputi dari sekurang-kurangnya:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan yang berkedudukan sebagai Ketua;
2. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
3. 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.

Adapun yang dimaksud dengan pejabat eksekutif adalah pejabat Perseroan yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen Perseroan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Apabila diperlukan, Perseroan dapat menambah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari:

1. Anggota Dewan Komisaris;
2. Pihak yang berasal dari luar Perseroan (pihak independen); atau
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pejabat eksekutif yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia yang diangkat akan ditetapkan sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi.

Namun demikian, Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selain memenuhi ketentuan komposisi, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi juga wajib memenuhi persyaratan keanggotaan, yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai.
2. Memiliki pemahaman tentang informasi teknologi, bisnis Perseroan, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan peraturan terkait lainnya.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran yang konstruktif.

membership of the committee's, duties and responsibilities, working procedures, meeting arrangements, as well as the reporting and disclosure system serving as a comprehensive operational guideline for the committee.

CRITERIA FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S MEMBERS

The composition of the Nomination and Remuneration Committee shall consist of at least 3 (three) members, comprising at a minimum of:

1. 1 (one) Independent Commissioner of the Company, who shall serve as the Chairman;
2. 1 (one) member of the Board of Commissioners; and
3. 1 (one) executive officer responsible for human resources management.

An executive officer refers to a Company officer who reports directly to a member of the Board of Directors or who has significant influence over the Company's policies and/or operations.

Furthermore, if the Nomination and Remuneration Committee consists of more than 3 (three) members, the number of Independent Commissioners of the Company shall be at least 2 (two) members.

Where necessary, the Company may appoint additional members of the Nomination and Remuneration Committee from among:

1. Members of the Board of Commissioners;
2. Parties from outside the Company (independent parties); or
3. Members of the Sharia Supervisory Board.

The appointed executive officer responsible for human resources management shall serve as the Secretary of the Nomination and Remuneration Committee.

However, members of the Board of Directors of the Company may not serve as members of the Nomination and Remuneration Committee.

In addition to meeting the composition requirements, each member of the Nomination and Remuneration Committee must also meet the membership requirements, which shall include at least the following:

1. Possessing high integrity, as well as adequate competence, knowledge, and experience;
2. Having an understanding of information technology, the Company's business, risk management, and sufficient knowledge of the prevailing laws and regulations applicable to financing companies, the capital market, and other relevant regulations; and
3. Being able to communicate effectively and having the ability to provide constructive advice.

Lebih lanjut, bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan (pihak independen) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pemegang saham utama Perseroan;
2. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki oleh Perseroan; dan
3. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi.

Terakhir, pejabat eksekutif yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.

Furthermore, members of the Nomination and Remuneration Committee who are appointed from outside the Company (independent parties) must meet the following requirements:

1. Having no affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or the Company's controlling shareholders;
2. Not holding concurrent positions as members of other committees within the Company; and
3. Possessing experience related to nomination and/or remuneration matters.

Lastly, executive officers serving as members of the Nomination and Remuneration Committee must have adequate knowledge of the Company's remuneration and/or nomination systems, as well as its succession planning.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga masa jabatan anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dengan ketentuan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa jabatan anggota Komite tersebut berakhir.

TERM OF OFFICE PROVISIONS

The term of office of Committee members must not exceed the term of office of the Company's Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association. Accordingly, the term of office of any Committee member appointed during the ongoing term of office of the Board of Commissioners will end concurrently with the expiration of the Board of Commissioners' term, without prejudice to the rights and authority of the Board of Commissioners to dismiss and/or replace such Committee member before the end of their term of office.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI DI SEPANJANG TAHUN 2025

Tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2025. Berikut susunan dan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2025:

COMPOSITION, NUMBER, STRUCTURE, AND BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE THROUGHOUT 2025

There were no changes in the structure and composition of the Nomination and Remuneration Committee members during 2025. The following is the structure and composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2025:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Sarastri Baskoro	Ketua Komite/Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Chairman of the Committee/President Commissioner/Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 057/ XI/ BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Board of Commissioners's Decision Letter Number 057/ XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024, on the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee Composition	2024 - 2026

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Thilagavathy Nadason	Wakil Ketua/Komisaris Chairman/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 016/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 057/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Board of Commissioners' Decision Letter Number 016/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended by Board of Commissioners' Decision Letter Number 057/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024, on Determination of the Nomination and Remuneration Committee's Composition	2024 - 2026
Ekanto Wijonosunu	Anggota & Sekretaris/Chief Human Capital Officer Member & Secretary/Chief Human Capital Officer	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 016/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 057/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 202 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Board of Commissioners' Decision Letter Number 016/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended by Board of Commissioners' Decision Letter Number 057/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024, on Determination of the Nomination and Remuneration Committee's Composition.	2024 - 2026

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Informasi terkait Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga menjabat sebagai Dewan Komisaris tercantum pada bagian Profil Dewan Komisaris. Sementara itu, informasi mengenai anggota komite yang berasal dari luar Perseroan dapat dilihat pada di bawah ini.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S PROFILE

Information on the profile of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, who also serves as a member of the Board of Commissioners, is presented in the Board of Commissioners' Profile section. Meanwhile, information on committee members from outside the Company can be found below.



Ekanto Wijonosunu
Anggota & Sekretaris/Chief Human Capital Officer
Member & Secretary/Chief Human Capital Officer

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen
65 Tahun per 31 Desember 2025
65 years old as of December 31, 2025

Periode Jabatan
Term of Office
28 Maret 2024 - 2026
March 28, 2024 - 2026

Domisili
Domicile
Jakarta
Jakarta

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi, Universitas Sebelas Maret (1988)

Sertifikasi

- Sertifikasi Ahli Pembiayaan SPPI
- Sertifikasi Kompetensi General Manager Sumber Daya Manusia

Rangkap Jabatan

Chief Human Capital Officer, WOM Finance (2017-Sekarang)

Pengalaman Kerja

- VP Business Partner Global Banking, PT Maybank Indonesia (1990 – 2015)
- Chief Human Capital Officer, PT WOM Finance (2015 - Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 016/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 057/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Educational Background

Bachelor of Economics, Universitas Sebelas Maret (1988)

Certifications

- SPPI Financing Expert Certification
- Human Resources General Manager Competency Certification

Concurrent Positions

Chief Human Capital Officer, WOM Finance (2017–Present)

Work Experience

- VP Business Partner Global Banking, PT Maybank Indonesia (1990 – 2015)
- Chief Human Capital Officer, PT WOM Finance (2015 - Present)

Legal Basis for Appointment

Board of Commissioners' Decision Letter Number 016/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024, as lastly amended by Board of Commissioners' Decision Letter Number 057/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024, on Determination of the Nomination and Remuneration Committee's Composition.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Perseroan memastikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi tetap menjaga sikap independen. Bentuk independensi Komite tersebut tercermin melalui beberapa hal berikut:

1. Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Komisaris Independen Perusahaan;
2. Tidak ada Anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
   b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenal kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi, wajib memperhatikan:

1. Kinerja Keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
2. Prestasi kerja individual;
3. Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan di luar Perusahaan;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

PEMBAGIAN TUGAS ANTAR KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pembagian tugas antar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilaksanakan secara kolektif dan kolegial sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh anggota Komite secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi, termasuk pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan, independensi, dan penerapan tata kelola yang baik.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S INDEPENDENCE

In carrying out its functions and duties, the Company ensures that the Nomination and Remuneration Committee maintains its independence. The Committee's independence is reflected in the following aspects:

1. The appointment of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee from among the Company's Independent Commissioners;
2. No members of the Board of Directors serve as members of the Nomination and Remuneration Committee.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Related to remuneration policies:
   a. Conducting evaluations of remuneration policies;
   b. Evaluating the alignment between remuneration policies and their implementation;
   c. Providing recommendations to the Board of Commissioners on remuneration policies for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. Related to nomination policies:
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the systems and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
   b. Providing recommendations to the Board of Commissioners on candidates for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

In carrying out its duties and responsibilities related to remuneration policy, the Nomination and Remuneration Committee must consider:

1. The Company's financial performance and fulfillment of reserves as required under applicable laws and regulations;
2. Individual performance achievements;
3. Fairness compared to peer groups within and outside the Company;
4. Considerations of the Company's long-term goals and strategies.

DIVISION OF DUTIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The division of duties among members of the Company's Nomination and Remuneration Committee is carried out collectively and collegially in line with applicable laws and regulations. All Committee's members are jointly responsible for the implementation of nomination and remuneration function, including providing recommendations to the Board of Commissioners, while prioritizing the principles of compliance, independence, and the implementation of good governance.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S MEETINGS

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings, with attendance frequency and meeting agendas as follows:

Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 2025
Nomination and Remuneration Committee Meeting Frequency in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Sarastri Baskoro	Ketua Komite/Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Chairman of the Committee/ President Commissioner/ Independent Commissioner	4	4	100%
Thilagavathy Nadason	Wakil Ketua/Komisaris Vice Chairman/Commissioner	4	4	100%
Ekanto Wijonosunu	Anggota & Sekretaris/Chief Human Capital Officer Member & Secretary/Chief Human Capital Officer	4	4	100%

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025
Agenda of Nomination and Remuneration Committee's Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	13 Maret 2025 March 13, 2025	Bonus tahun buku 2024 & Kenaikan *Salary* BOD-BOC dan Karyawan tahun 2025 2024 fiscal year bonus and BOD-BOC and Employee Salary Increase in 2025	▪ Sarastri Baskoro ▪ Thilagavathy Nadason ▪ Ekanto Wijonosunu
2.	25 Juni 2025 June 25, 2025	*Mission Critical Position* (CEO, Director dan Komisaris) Mission Critical Position (CEO, Director, and Commissioner)	▪ Sarastri Baskoro ▪ Thilagavathy Nadason ▪ Ekanto Wijonosunu
3.	14 November 2025 November 14, 2025	Kandidat Direktur Operasional dan IT PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Candidate for Director of Operations and IT at PT WOM Finance Tbk	▪ Sarastri Baskoro ▪ Thilagavathy Nadason ▪ Ekanto Wijonosunu
4.	18 November 2025 November 18, 2025	Kandidat Direktur Marketing PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Candidate for Marketing Director of PT WOM Finance Tbk	▪ Sarastri Baskoro ▪ Thilagavathy Nadason ▪ Ekanto Wijonosunu

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan menempatkan pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi beserta Anggotanya sebagai bagian yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam penerapan tata kelola yang baik. Pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan pedoman internal Perseroan yang relevan.

TRAINING FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S MEMBERS

The Company considers the competency development of the Nomination and Remuneration Committee and its members to be a key component in supporting effective implementation of the Committee's duties and responsibilities in applying good governance. This is carried out in line with applicable laws and regulations as well as relevant Company's internal policies and guidelines.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi berperan aktif dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik, khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan berbagai tugas yang mencakup:

1. Rekomendasi Bonus & *Salary Increase* 2025;
2. Rekomendasi Perubahan Direksi;
3. Rekomendasi Perubahan Komisaris;

4. Rekomendasi Direksi Baru;
5. Rekomendasi Komisaris Baru.

KEBIJAKAN SUKSES UNTUK JABATAN STRATEGIS

Perseroan telah menetapkan kebijakan suksesi yang komprehensif untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan keunggulan operasional pada posisi strategis dan kritikal, termasuk Direksi. Kebijakan ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dirancang untuk mempersiapkan talenta internal agar siap mengemban peran kepemimpinan dan mendukung tujuan jangka panjang serta keberlanjutan Perseroan.

Melalui pendekatan yang terstruktur, Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi serta mengembangkan karyawan berpotensi tinggi dengan memastikan mereka memiliki keterampilan, kompetensi, dan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menduduki posisi kunci. Proses ini bertujuan menciptakan jalur talenta yang selaras dengan sasaran strategis Perseroan sekaligus memitigasi risiko kehilangan personel kunci secara mendadak.

Kerangka kerja perencanaan suksesi mengacu pada evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi, termasuk kemampuan kepemimpinan, dalam menentukan kandidat yang siap. Kebijakan ini juga menekankan transformasi pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi guna mendorong kolaborasi dan inovasi. Melalui peran aktif Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan secara proaktif mengantisipasi kebutuhan kepemimpinan, mencegah kekosongan sumber daya, serta memastikan kesinambungan bisnis dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pasar.

IMPLEMENTATION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee played an active role in supporting the implementation of good governance, particularly in managing human resources at the Board of Commissioners and Board of Directors level. In carrying out its functions, the Nomination and Remuneration Committee performed various tasks, including:

1. Recommendation for Bonus & Salary Increase 2025;
2. Recommendation for Changes to the Board of Directors;
3. Recommendation for Changes to the Board of Commissioners;
4. Recommendation for New of Board of Directors;
5. Recommendation for New of Board of Commissioners.

SUCCESSION POLICY FOR STRATEGIC POSITIONS

The Company has established a comprehensive succession policy to ensure leadership continuity and operational excellence in strategic and critical positions, including the Board of Directors. This policy forms part of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee and is designed to prepare internal talent to assume leadership roles while supporting the Company's long-term objectives and sustainability.

Through a structured approach, the Nomination and Remuneration Committee identifies and develops high-potential employees by ensuring they possess the skills, competencies, and leadership qualities required for key positions. This process aims to create a talent pipeline aligned with the Company's strategic goals while mitigating the risk of sudden loss of key personnel.

The succession planning framework is based on performance evaluations and competency assessments, including leadership capabilities, to determine candidates who are ready to take on key roles. This policy also emphasizes transforming individual knowledge into organizational knowledge to foster collaboration and innovation. Through the active role of the Nomination and Remuneration Committee, the Company proactively anticipates leadership needs, prevents resource gaps, and ensures business continuity and adaptability to market dynamics.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam menghadapi ketidakpastian dan potensi tantangan di masa depan, Perseroan menitikberatkan penguatan resiliensi melalui sistem manajemen risiko yang kokoh. Untuk mendukung hal tersebut, Dewan Komisaris telah memiliki Komite Pemantau Risiko guna memantau penerapan kebijakan risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. POJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
3. POJK Nomor 42 tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
4. POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
5. SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
6. SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan terhadap manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam tersebut disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara berkala dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan Perseroan. Pembaruan terakhir atas Piagam Komite dilakukan pada 29 September 2025.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Persyaratan Keanggotaan:

1. Wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Pihak independen adalah pihak diluar Perseroan yang memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

In facing uncertainties and potential challenges in the future, the Company focuses on strengthening resilience through a robust risk management system. To support this, the Board of Commissioners has established a Risk Oversight Committee to monitor the implementation of risk policies and provide recommendations for continuous improvement.

LEGAL BASIS FOR APPOINTMENT

The establishment of the Risk Oversight Committee is carried out with reference to the applicable regulations, including:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as most recently amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.
2. POJK Number 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions.
3. POJK Number 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions.
4. POJK Number 28/POJK.05/2020 concerning the Assessment of the Soundness Level of Non-Bank Financial Institutions.
5. SEOJK Number 11/SEOJK.05/2020 concerning the Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
6. SEOJK Number 7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Companies and Sharia Financing Companies.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

In order to ensure effective oversight of risk management, the Risk Oversight Committee refers to the Committee Charter, which serves as the foundation for carrying out its duties and responsibilities. The Charter is prepared in accordance with applicable laws and regulations and is periodically evaluated to ensure its continued relevance to the Company's needs. The latest update to the Committee Charter was made on September 29, 2025.

CRITERIA FOR RISK OVERSIGHT COMMITTEE'S MEMBERS

Requirements for Membership:

1. Must possess integrity, good morals, and character.
2. The Board of Directors' Members are prohibited from serving as the Risk Oversight Committee's members.
3. Independent parties are parties outside the Company who meet the requirements of having no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Directors' members, the Board of Commissioners' members, and/or the Company's controlling shareholders, or any relationship

memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

4. Mematuhi etika kerja yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko ini dan kode etik lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
5. Mantan anggota Direksi, pejabat eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dan akan menjadi pihak independen dalam anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pengangkatan. Yang dimaksud dengan pejabat eksekutif adalah pejabat Perseroan yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan.

with the Company that could affect their ability to act independently.

4. Comply with the work ethics stipulated in this Risk Oversight Committee Charter and other codes of ethics established by the Company.
5. Former Board of Directors' members, executive officers, or parties having relationships with the Company that could affect their ability to act independently and who will become independent members of the Risk Oversight Committee are required to undergo a waiting period of at least 6 (six) months prior to appointment. An executive officer is a Company official who is directly responsible to the Board of Directors' members or has significant influence over the Company's policies and/or operations.

KETENTUAN MASA JABATAN

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan seluruhnya baik yang berasal dari Dewan Komisaris maupun dari pihak independen tidak diperkenankan lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Terkait masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko dimaksud huruf ini, Dewan Komisaris Perseroan berhak melakukan pemberhentian dan/atau penggantian Komite Pemantau Risiko Perseroan sebelum masa tugasnya berakhir.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan yang telah berakhir masa tugasnya dapat dipilih dan diangkat kembali.

TERM OF OFFICE PROVISIONS

1. The term of office of all members of the Company's Risk Oversight Committee, whether originating from the Board of Commissioners or independent parties, shall not exceed the term of the Company's Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association. Therefore, the term of office of Risk Oversight Committee members appointed during the Board of Commissioners' term of office shall end concurrently with the expiration of the Board of Commissioners' term. Regarding the term of office of the Risk Oversight Committee members referred to in this clause, the Board of Commissioners has the right to dismiss and/or replace members of the Risk Oversight Committee before their term expires.
2. Members of the Company's Risk Oversight Committee whose term of office has ended may be re-elected and reappointed.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DI SEPANJANG TAHUN 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan susunan dan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0014/IX/BOD-WOM/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Surat Keputusan Penetapan Susunan Komite Pemantau Risiko, susunan dan komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND LEGAL BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE IN 2025

In 2025, there was a change in the structure and composition of members of the Risk Oversight Committee. Based on the Board of Directors' Decision Letter Number 0014/IX/ BOD-WOM/2025 dated September 30, 2025, on the Decision Letter on the Appointment of the Risk Oversight Committee, the structure and composition of the Risk Oversight Committee as of December 31, 2025, are as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Sarastri Baskoro	Ketua Komite/Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Chairman of the Committee/ President Commissioner/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 0014/IX/BOD-WOM/2025 tanggal 30 September 2025 Decision Letter of the Board of Commissioners Number 0014/IX/BOD-WOM/2025 dated September 30, 2025	2025 - 2026
Thilagavathy Nadason	Wakil Ketua/Komisaris Vice Chairman/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 017/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 Decision Letter of the Board of Commissioners Number 017/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024	2024 - 2026
Taufik Aulia	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 049/X/BOC-WOM/2024 tanggal 9 Oktober 2024 Decision Letter of the Board of Commissioners Number 049/X/BOC-WOM/2024 dated October 9, 2024	2024 - 2026

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Anggota/Komisaris Independen Member/Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 049/X/BOC-WOM/2024 tanggal 9 Oktober 2024 Decision Letter of the Board of Commissioners Number 049/X/BOC-WOM/2024 dated October 9, 2024	2024 - 2026
Anang Yudiansyah, S.E.	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 017/III/BOC-WOM/2024 tanggal 28 Maret 2024 Decision Letter of the Board of Commissioners Number 017/III/BOC-WOM/2024 dated March 28, 2024	2024 - 2026

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Informasi terkait Profil Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko yang juga menjabat sebagai Dewan Komisaris tercantum pada bagian Profil Dewan Komisaris. Sementara itu, informasi mengenai anggota independen dapat dilihat pada bagian Profil Komite Audit dalam laporan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dalam pelaksanaan tugasnya telah bersikap independen. Independensi ini didukung dengan keanggotaan 2 (dua) orang Komisaris Independen Perseroan dan satu orang pihak independen di luar perusahaan dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan.

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen adalah pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk independen. Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertugas memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris. Juga mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Membuat program kerja atau rencana tahunan Komite Pemantau Risiko dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;
5. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
6. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan;
7. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan yang dimiliki.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE'S PROFILE

Information on the profile of the Chairman and members of the Risk Oversight Committee who also serve as members of the Board of Commissioners is presented in the Board of Commissioners Profile section. Meanwhile, information on independent members can be found in the Audit Committee Profile section of this report.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE'S INDEPENDENCE

In carrying out its duties, the Risk Oversight Committee has maintained its independence which is supported by the composition of 2 (two) Independent Commissioners of the Company and one independent external party serving as members of the Company's Risk Oversight Committee.

According to the Risk Oversight Committee Charter, an Independent Party is an external party who has no financial, managerial, share ownership, and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the controlling shareholders, nor any other relationship that could affect their ability to remain independent. Under the Committee Charter, the Risk Oversight Committee is chaired by an Independent Commissioner.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Risk Oversight Committee is tasked with providing professional opinions on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. It also identifies issues that require the attention of the Board of Commissioners, including:

1. Assessing the alignment between the Company's risk management policies and their implementation;
2. Monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit to provide recommendations to the Board of Commissioners;
3. Preparing the work program or annual plan of the Risk Oversight Committee and submitting it to the Board of Commissioners for approval;
4. Reporting to the Board of Commissioners on the various risks faced by the Company and the implementation of risk management by the Board of Directors;
5. Evaluating the Company's risk management policies at least once a year;
6. Evaluating the accountability of the Board of Directors' implementation of the Risk Management Policy at least on a quarterly basis;
7. Maintaining the confidentiality of all Company documents, data, and information;

8. Membuat, mengingkari dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara periodik.
9. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.

8. Establishing, revising, and periodically updating the Work Guidelines and Procedures of the Risk Oversight Committee.
9. Organizing and granting authority to conduct investigations into matters within the scope of its duties.

REKOMENDASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Hasil rekomendasi Komite Pemantau Risiko yang sah merupakan risalah rapat yang diedarkan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan tambahan masukan yang kemudian dikaji terlebih dahulu pada agenda rapat berikutnya, sebelum kemudian ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua. Selanjutnya, hasil keputusan dalam risalah rapat tersebut diedarkan kepada Direksi dan unit kerja terkait.

RECOMMENDATIONS OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The valid recommendations of the Risk Oversight Committee are documented in the meeting minutes, which are circulated to all members to gather additional input. These inputs are reviewed at the next meeting agenda before being signed by the Chairman/Vice Chairman. Subsequently, the decisions recorded in the minutes are circulated to the Board of Directors and the relevant work units.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

RISK OVERSIGHT COMMITTEE'S MEETINGS

Throughout 2025, the Risk Oversight Committee held 4 (four) meetings, with attendance frequency and meeting agendas as follows:

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko 2025
Risk Oversight Committee Meeting Frequency in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Myrnie Zachraini Tamin*	Ketua Komite/Komisaris Independen Chairman of the Committee/Independent Commission	3	3	100%
Sarastri Baskoro	Ketua Komite/Presiden Komisaris/Komisaris Independen Chairman of the Committee/President Commissioner/ Independent Commission	4	4	100%
Thilagavathy Nadason	Wakil Ketua/Komisaris Vice Chairman/Commissioner	4	4	100%
Taufik Aulia	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	3	4	75%
Rallyati A. Wibowo, S.E.	Anggota/Komisaris Independen Member/Independent Commissioner	4	4	100%
Anang Yudiansyah	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	4	.4	100%

*) Masa jabatan Myrnie Zachraini Tamin berakhir pada tanggal 30 September 2025.
*) Myrnie Zachraini Tamin's term of office ended on September 30, 2025.

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko tidak menyelenggarakan pelatihan formal, namun tetap menjalankan fungsinya secara efektif melalui diskusi rutin, pertukaran informasi antaranggota, serta pemanfaatan pengalaman dan keahlian masing-masing anggota dalam mendukung proses pengawasan risiko.

TRAINING FOR RISK OVERSIGHT COMMITTEE'S MEMBERS

Throughout 2025, the Risk Oversight Committee did not conduct any formal training programs. However, the Committee continued to perform its functions effectively through regular discussions, information sharing among members, and the use of each member's experience and expertise in supporting the risk oversight process.



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam mendukung penerapan prinsip tata kelola yang baik, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengelolaan risiko di seluruh kegiatan usaha Perseroan. Dalam pelaksanaan fungsinya, Komite Pemantau Risiko menjalankan berbagai tugas yang mencakup:

1. Melakukan pembaruan pada Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Melakukan evaluasi, dan *monitoring* dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang efektivitas dalam penerapan Kebijakan Manajemen Risiko yang tercermin pada tingkat kesehatan Perseroan serta profil risiko Perseroan.

IMPLEMENTATION OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE'S DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Risk Oversight Committee played an active role in supporting the implementation of good corporate governance principles, particularly in the oversight and management of risks across all of the Company's business activities. In performing its functions, the Risk Oversight Committee carried out various duties, including:

1. Updating the Risk Management Policy.
2. Evaluating and monitoring, as well as providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the effectiveness of the implementation of the Risk Management Policy, as reflected in the Company's soundness level and risk profile.

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of the Board of Directors

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Direksi didukung oleh sejumlah komite dan satuan kerja yang berada di bawah koordinasinya. Organ pendukung tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Sekretaris Perusahaan, Legal Counsel & Anti-Fraud Division, serta Audit Internal. Seluruh organ pendukung ini berperan penting dalam memastikan penerapan tata kelola yang baik, pengambilan keputusan yang terarah, serta pelaksanaan operasional yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan.

In carrying out its duties and responsibilities effectively, the Board of Directors is supported by several committees and work units under its coordination. These supporting organs include the Risk Management Committee, Sharia Product and Business Activity Development Committee, Information Technology Steering Committee, Corporate Secretary, Legal Counsel & Anti-Fraud Division, and Internal Audit. All of these supporting organs play a key role in ensuring the implementation of tata kelola yang baik, focused decision-making, and operational execution in accordance with the principles of prudence and compliance.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha, Perseroan memiliki Komite Manajemen Risiko yang berperan dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Komite ini berfungsi menelaah potensi risiko, memantau pelaksanaannya, serta memberikan masukan strategis agar pengelolaan risiko selaras dengan arah kebijakan Perseroan.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan risiko di dalam Perseroan sekaligus mengantisipasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, misi, dan visi Perseroan. Melalui proses ini, Perseroan dapat secara sistematis mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap risiko yang terkait dengan pengelolaan dan operasionalnya.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan penyusunan Piagam Komite Manajemen Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. POJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
3. POJK Nomor 42 tahun 2024 tentang tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
4. SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
5. SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
6. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya (“Anggaran Dasar”).

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

To strengthen business resilience and sustainability, the Company has established a Risk Management Committee that ensures all business activities are conducted with prudence. This Committee functions to review potential risks, monitor their implementation, and provide strategic input so that risk management aligns with the Company’s policy direction.

The establishment of the Risk Management Committee is aimed to oversee and control risks within the Company while anticipating potential risks that may affect the achievement of the Company’s objectives, mission, and vision. Through this process, the Company can systematically identify and evaluate each risk related to its management and operations.

LEGAL BASIS FOR ESTABLISHMENT

The establishment of the Risk Management Committee and the drafting of its Charter are based on the prevailing provisions, including the following:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.
2. POJK Number 28/POJK.05/2020 on the Assessment of the Soundness Level of Non-Bank Financial Institutions.
3. POJK Number 42 of 2024 on the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions.
4. SEOJK Number 11/SEOJK.05/2020 on the Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
5. SEOJK Number 7/SEOJK.05/2021 on the Implementation of Risk Management for Financing Companies and Sharia Financing Companies.
6. The Company’s Articles of Association and its amendments (“Articles of Association”).

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menetapkan Piagam Komite Manajemen Risiko guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan risiko berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Piagam ini memuat ketentuan mengenai dasar hukum, keanggotaan, wewenang dan tanggung jawab, waktu kerja, kode etik, serta mekanisme penyelenggaraan rapat. Piagam tersebut telah disahkan dan ditandatangani pada 18 Juli 2025.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Manajemen Risiko bersifat non struktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Perseroan.
2. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.
3. Komposisi anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari:
   a. Anggota Tetap:
      - Seluruh anggota Direksi Perseroan.
      - Risk Management Division Head.
   b. Anggota tidak tetap Pejabat satu tingkat di bawah Direksi lainnya selain pejabat yang disebutkan di atas yang keanggotaannya bersifat tidak tetap didasarkan atas undangan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan topik yang dibahas dan/atau direkomendasikan dalam komite tersebut.
4. Presiden Direktur Perseroan yang membawahkan fungsi Kepatuhan bertindak sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko dan anggota Direksi Perseroan yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko bertindak sebagai Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko Perseroan.
5. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, maka Komite Manajemen Risiko berhak menunjuk dan menetapkan salah satu anggota tetap Komite Manajemen Risiko sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko berdasarkan keputusan komite yang ditandatangani oleh anggota tetap Komite Manajemen Risiko Perseroan yang memiliki hak suara.
6. Persyaratan keanggotaan:
   a. Dewan Komisaris Perseroan dilarang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.
   b. Setiap anggota Komite Manajemen Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER

The Company has established the Risk Management Committee Charter to ensure that the risk oversight function is carried out in accordance with good governance principles. The Charter sets out provisions on the legal basis, membership, authority and responsibilities, working hours, code of conducts, and meeting procedures. The Charter was approved and signed on July 18, 2025.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. The Risk Management Committee is non-structural, with its members drawn from the Company's existing organizational structure.
2. The Risk Management Committee reports to the Company's Board of Directors.
3. The composition of the Risk Management Committee members consists of:
   a. Permanent Members:
      - All members of the Company's Board of Directors.
      - Risk Management Division Head.
   b. Non-Permanent Members: Other officials one level below the Board of Directors, excluding those mentioned above, whose membership is non-permanent and based on invitations from the Risk Management Committee in accordance with the topics being discussed and/or recommended by the committee.
4. The Company's President Director, who oversees the Compliance function, acts as the Chairman of the Risk Management Committee, while the member of the Board of Directors overseeing the Risk Management function acts as the Deputy Chairman of the Company's Risk Management Committee.
5. To facilitate the Committee's duties, the Risk Management Committee has the right to appoint and designate one of its permanent members as the Secretary of the Risk Management Committee based on a committee decision signed by the permanent members with voting rights.
6. Membership requirements:
   a. Members of the Board of Commissioners are prohibited from serving on the Risk Management Committee.
   b. Each member of the Risk Management Committee must possess integrity, good character, and moral values.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO DI SEPANJANG TAHUN 2025

Komite Manajemen Risiko beranggotakan 7 (tujuh) orang. Pengangkatan anggota dilakukan oleh Direksi sesuai kebutuhan operasional, dan diatur secara resmi dalam Piagam Komite yang disahkan pada 18 Juli 2025.

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND LEGAL BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE IN 2025

The Risk Management Committee consists of 7 (seven) members. Members are appointed by the Board of Directors based on operational needs and are formally regulated in the Committee Charter, which was ratified on July 18, 2025.

PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Informasi terkait Profil Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko yang juga menjabat sebagai Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi. Sementara itu, informasi mengenai anggota lainnya dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Senior dalam laporan ini.

Profil anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S PROFILE

Information on the profiles of Chairman and members of the Risk Management Committee, who also serve as members of the Board of Directors, can be found in the Board of Directors' Profiles section. Information on other members can be found in the Senior Officers' Profile section of this report.

The profile of the Risk Management Committee members is as follows:

Nama Name	**Usia** Age	**Kewarganegaraan** Nationality	**Riwayat Pendidikan** Educational Background	**Jabatan di Perseroan** Position in the Company
Djaja Suryanto Sutandar Ketua Chairman	61	Warga Negara Indonesia Indonesian	Bsc Finance dari California State University of Sacramento, USA (1986) BSc in Finance from California State University, Sacramento, USA (1986)	Presiden Direktur President Director
Njauw Vido Onadi Anggota Member	46	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Akuntansi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (2003), dan Pascasarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2014) Bachelor's in Accounting, Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia, Jakarta (2003), and Master's in Accounting, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2014)	Wakil Presiden Direktur Vice President Director
Anthony Y Panggabean Anggota Member	63	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma, Jakarta (1993) Undergraduate in Bachelor's in Information Management, Universitas Gunadarma, Jakarta (1993) Undergraduate in	Direktur Director
Wibowo Anggota Member	52	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta (1997) Undergraduate in Bachelor's in Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta (1997), Undergraduate in	Direktur Director
Cincin Lisa Hadi Anggota Member	47	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Akuntansi, STIE Trisakti (2000) Bachelor's in Accounting, STIE Trisakti (2000)	Direktur Director
Herwin Anggota Member	46	Warga Negara Indonesia Indonesian	S1/*Bachelor Degree* Universitas Padjajaran Bachelor's Degree of Universitas Padjajaran	Risk Management Division Head

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:
   a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), strategi kerangka kerja, metodologi,

COMMITTEE'S AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

The authorities and responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

1. Providing recommendations to the President Director on Risk Management, which at a minimum include:
   a. Formulating policies, strategies, and guidelines for Risk Management implementation, including the level of risk appetite and risk tolerance, framework strategies, methodologies, systems and risk

system dan *tools* pengelolaan risiko serta rencana-rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal dan memastikan penerapan Manajemen Risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan;

b. Melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko Perseroan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan

c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti penyaluran pembiayaan yang dilakukan, pengambilan posisi risiko, atau pengambilan eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

2. Melakukan tugas-tugas lainnya sebagai Komite Manajemen Risiko yang tertuang dalam kebijakan internal Perseroan ataupun ditugaskan oleh Direksi Perseroan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan sistem Manajemen Risiko yang efektif dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

management tools, as well as contingency plans to anticipate abnormal conditions and ensure the implementation of Risk Management covering credit risk, operational risk, market risk, liquidity risk, legal risk, reputational risk, strategic risk, and compliance risk;

b. Improving or adjusting the implementation of Risk Management based on evaluation results, including refining Risk Management processes periodically or incidentally due to changes in the Company's external and internal conditions that affect funding adequacy, the Company's risk profile, and the effectiveness of Risk Management implementation; and

c. Determining matters related to business decisions deviating from normal procedures, such as disbursing financing, taking risk positions, or assuming risk exposures beyond established limits.

2. Performing other tasks as the Risk Management Committee stipulated in the Company's internal policies or assigned by the Board of Directors, in order to ensure achieving effective implementation of the Risk Management system while complying with applicable laws and regulations.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun, serta rapat non-rutin atau luar biasa apabila diperlukan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite; apabila Ketua berhalangan hadir, rapat akan dipimpin oleh Wakil Ketua.

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas). Seluruh Rapat yang dilaksanakan telah dinyatakan sah dan seluruh hasil rapat Komite Manajemen Risiko juga telah dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S MEETINGS

The Risk Management Committee holds regular meetings at least 4 (four) times a year, as well as non-routine or extraordinary meetings when necessary. Meetings are chaired by the Committee Chairman; in the Chairman's absence, the meetings will be chaired by the Vice Chairman.

Throughout 2025, the Risk Management Committee held 11 (eleven) meetings. All meetings conducted were deemed valid, and the outcomes of all RMC meetings were recorded in the meeting minutes and properly documented.

Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko 2025
Frequency of Risk Management Committee's Meetings 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Djaja Suryanto Sutandar	Ketua/Presiden Direktur Chairman/President Director	11	11	100%
Njauw Vido Onadi	Wakil Ketua/Wakil Presiden Direktur Vice Chairman/Vice President Director	11	11	100%
Anthony Y Panggabean	Anggota/Direktur Member/Director	8	11	73%
Wibowo	Anggota/Direktur Member/Director	11	11	100%
Cincin Lisa Hadi	Anggota/Direktur Member/Director	10	11	91%
Herwin	Anggota/Risk Management Division Head Member/Risk Management Division Head	11	11	100%

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko tidak menyelenggarakan pelatihan. Meskipun demikian, Komite tetap menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat pengelolaan risiko melalui peningkatan kapasitas secara mandiri, kolaborasi intensif antar anggota, serta pemanfaatan praktik terbaik dan wawasan industri yang relevan sehingga fungsi manajemen risiko Perseroan dapat berjalan adaptif, responsif, dan selaras dengan dinamika bisnis.

TRAINING OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S MEMBERS

Throughout 2025, the Risk Management Committee did not conduct any training programs. Nevertheless, the Committee demonstrated a strong commitment to strengthening risk management through continuous self-capacity building, intensive collaboration among members, and the application of relevant industry insights and best practices, enabling the Company's risk management function to remain adaptive, responsive, and aligned with business dynamics.

KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH

Dalam rangka memastikan kegiatan usaha syariah Perseroan berjalan sesuai prinsip yang berlaku, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah berperan sebagai pengawas sekaligus pengarah dalam merancang dan meninjau produk serta aktivitas usaha. Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah bekerja di bawah koordinasi Direksi, dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur secara formal dalam Piagam Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Perseroan.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Perseroan membentuk Komite Produk Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah untuk memastikan kegiatan Usaha Syariah berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Pembentukan ini mengacu pada POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

PIAGAM KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pengawasan, Perseroan menetapkan Piagam Komite Pengembangan Produk dan Usaha Syariah, yang secara resmi disahkan dan ditandatangani pada 12 Desember 2022. Piagam ini mengatur secara komprehensif latar belakang, dasar hukum, keanggotaan, wewenang dan tanggung jawab komite, serta mekanisme kerja termasuk waktu kerja, kode etik, dan penyelenggaraan rapat. Ketentuan dalam piagam juga mencakup frekuensi rapat, kuorum, pemanggilan, pimpinan rapat, pengambilan keputusan, dan dokumentasi risalah, sehingga seluruh kegiatan komite dapat dijalankan sesuai prinsip syariah dan standar operasional Perseroan.

SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE

In order to ensure that the Company's sharia business activities are conducted in accordance with applicable principles, the Sharia Product and Business Activity Development Committee acts as both supervisor and advisor in designing and reviewing products and business activities. The Sharia Product and Business Activity Development Committee operates under the coordination of the Board of Directors, with its duties and responsibilities formally governed by the Company's Sharia Product and Business Activity Development Committee Charter.

LEGAL BASIS FOR ESTABLISHMENT

The Company established the Sharia Product and Business Activity Development Committee to ensure that Sharia Business activities are carried out in accordance with applicable standards and regulations. This establishment refers to POJK Number 10/POJK.05/2019 on the Implementation of Sharia Financing Company Business and Sharia Business Units of Financing Companies as last amended by POJK Number 35 of 2025 on Amendments to POJK Number 46 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies.

SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE CHARTER

As part of efforts to strengthen governance and oversight, the Company has established the Sharia Product and Business Activity Development Committee Charter, which was officially approved and signed on December 12, 2022. This Charter comprehensively governs the background, legal basis, membership, authorities and responsibilities of the committee, as well as its working mechanisms, including working hours, code of conducts, and meeting procedures. The provisions in the Charter also cover meeting frequency, quorum, calling of meetings, meeting leadership, decision-making, and minute documentation, ensuring that all committee activities are conducted in accordance with sharia principles and the Company's operational standards.



STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 1 (satu) orang sebagai ketua dengan menjabat sebagai pimpinan Unit Usaha Syariah Perseroan dan 2 (dua) orang atau lebih dapat berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah anggota Direksi yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau *Marketing*.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite berlaku efektif sejak diangkat oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Direksi Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian anggota Komite tersebut sebelum masa jabatan berakhir.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH DI SEPANJANG TAHUN 2025

Per 31 Desember 2025, susunan dan komposisi Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF THE SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE

The Sharia Product and Business Activity Development Committee consists of at least 3 (three) members, with 1 (one) member serving as Chairman who holds the position of head of the Company's Sharia Business Unit, and 2 (two) or more members who may come from outside the Company or hold managerial positions under Board members overseeing Risk Management and/or Marketing.

TERM OF OFFICE PROVISIONS

The term of office of committee members becomes effective upon their appointment by the Company's Board of Directors, without prejudice to the rights and authorities of the Board of Directors to dismiss and/or replace such committee members before the end of their term.

COMPOSITION, NUMBER, STRUCTURE, AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE THROUGHOUT 2025

As of December 31, 2025, the composition and structure of the Sharia Product and Business Activity Development Committee are as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Dimas Jagad Erlangga	Ketua/Kepala Unit Usaha Syariah Chairman/Head of Sharia Business Unit	Surat Keputusan Direksi Nomor 008/VII/BOD-WOM/2024 tanggal 19 Juli 2024 Board of Directors' Decision Letter Number 008/VII/BOD-WOM/2024 dated July 19, 2024
Herwin	Anggota/Kepala Divisi Risk Management Member/Head of Risk Management Division	Surat Keputusan Direksi Nomor 008/VII/BOD-WOM/2024 tanggal 19 Juli 2024 Board of Directors' Decision Letter Number 008/VII/BOD-WOM/2024 dated July 19, 2024
Theresia Indah Prasetyaningsih	Anggota/Kepala Divisi NDS Acquisition Strategy Member/Head of NDS Acquisition Strategy Division	Surat Keputusan Direksi Nomor 008/VII/BOD-WOM/2024 tanggal 19 Juli 2024 Board of Directors' Decision Letter Number 008/VII/BOD-WOM/2024 dated July 19, 2024

PROFIL KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH

Informasi mengenai profil Ketua dan Anggota Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah yang merangkap sebagai Pejabat Senior disajikan pada bagian Profil Pejabat Senior.

SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE'S PROFILE

Information on the profiles of the Chairman and Members of the Sharia Product and Business Activity Development Committee who also serve as Senior Officers is presented in the Senior Officers' Profile section.

Nama Name	**Usia** Age	**Kewarganegaraan** Nationality	**Riwayat Pendidikan** Educational Background	**Riwayat Jabatan** Career History	**Jabatan di Perseroan** Position in the Company
Dimas Jagad Erlangga	39	Warga Negara Indonesia Indonesian	Meraih gelar Sarjana dengan jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta, Indonesia (2009) Earned a bachelor's degree in Accounting from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta, Indonesia (2009)	▪ *Management Trainee* khusus untuk Divisi Audit Internal (SKAI) di PT Panin Bank (2010 - 2011). ▪ *Risk Management Officer* dari PT Bank Syariah Bukopin (2011-2013). ▪ *Business Alliance* dan *Product Manager Automotive* dari PT Bank Syariah Mandiri (2013-2021). ▪ *Automotive Product* dan *Program Implementation Team Leader* dari PT Bank Syariah Indonesia (2021-2023). ▪ Kepala Unit Usaha Syariah dari PT Wahana Ottomitra Multiartha (2023-saat ini). ▪ Management Trainee specifically for the Internal Audit Division (SKAI) at PT Panin Bank (2010–2011). ▪ Risk Management Officer at PT Bank Syariah Bukopin (2011–2013). ▪ Business Alliance and Automotive Product Manager at PT Bank Syariah Mandiri (2013–2021). ▪ Automotive Product and Program Implementation Team Leader at PT Bank Syariah Indonesia (2021–2023). ▪ Head of Sharia Business Unit at PT Wahana Ottomitra Multiartha (2023–present).	Kepala Unit Usaha Syariah Head of Sharia Business Unit
Herwin	46	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Bachelor's Degree	Bergabung di WOM sejak (November 2016 - Saat ini) Joined WOM since November 2016 – present.	*Risk Management Division Head*
Theresia Indah Prasetyaningsih	40	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Magister Kenotariatan - Universitas Jaya Baya Master's Degree (S2) in Notarial Law - Universitas Jaya Baya	▪ *Head of Sales Branch* Kudus, PT BFI Finance, Tbk (Februari 2008 - Juli 2012) ▪ NDF *Acquisition Strategy New Customer*, PT BFI Finance, Tbk (Agustus 2012 - Agustus 2014) ▪ BSD *Strategic Planning & Business Dev.* NDF Motorcycle - Head, PT BFI Finance, Tbk (September 2014 - Agustus 2016) ▪ *Business Network & Initiative Dev. Department Head*, PT WOM Finance, Tbk (Agustus 2016 - Mei 2022) ▪ *Head of Agency & Partnership*, Bussan Auto Finance Head Office (Mei 2022 - Juni 2024) ▪ NDS *Motorcycle Division Head* di PT WOM Finance (Juli 2024 - Agustus 2025) ▪ NDS *Acquisition Strategy Division Head* PT WOM Finance (September 2025 - saat ini) ▪ Head of Sales of Kudus Branch, PT BFI Finance, Tbk (February 2008 – July 2012) ▪ NDF Acquisition Strategy - New Customer, PT BFI Finance, Tbk (August 2012 – August 2014) ▪ Head of BSD Strategic Planning & Business Development for NDF Motorcycle, PT BFI Finance, Tbk (September 2014 – August 2016) ▪ Head of Business Network & Initiative Development Department, PT WOM Finance, Tbk (August 2016 – May 2022) ▪ Head of Agency & Partnership, Bussan Auto Finance Head Office (May 2022 – June 2025) ▪ Head of NDS Motorcycle Division, PT WOM Finance (July 2024 – August 2025) ▪ Head of NDS Acquisition Strategy Division, PT WOM Finance (September 2025 - present)	NDS *Acquisition Strategy Division Head*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH

Komite menjalankan perannya secara efektif untuk mendukung pelaksanaan fungsi Direksi. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite, dengan ruang lingkup yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha syariah baru yang akan dilakukan atau dipasarkan.
2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha syariah perseroan.
3. Memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi aspek pemasaran, pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko.
4. Merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite ini memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan Perseroan terkait produk yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud di dalam Piagam dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
2. Komite dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite untuk pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan Direksi Perseroan.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Direksi dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH

Sesuai dengan Piagam Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, rapat Komite dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat Komite bisa berjalan dengan syarat memenuhi kuota kehadiran setengah dari jumlah anggota Komite.

Keputusan rapat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Committee performs its role effectively to support the implementation of the Board of Directors' functions. All tasks and responsibilities are carried out in accordance with the provisions set forth in the Committee Charter, with a scope covering the following:

1. Conducting studies and analysis on the development of new sharia products or business activities to be undertaken or marketed.
2. Evaluating and refining each of the Company's sharia products or business activities.
3. Providing recommendations, advice, inputs, and evaluations on marketing aspects, compliance with sharia principles, and risk mitigation.
4. Formulating and proposing monthly and annual performance targets for business activities based on Sharia principles.

In carrying out its duties and functions, the Committee has the following authorities:

1. Accessing the Company's documents, data, and information related to products required for performing its duties as stipulated in the Charter, while maintaining confidentiality.
2. Engaging independent parties outside the Committee members for performing its duties (if necessary) with the approval of the Company's Board of Directors.
3. Exercising other authorities granted by the Board of Directors, while observing and complying with the applicable laws and regulations.

SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE'S MEETINGS

In accordance with the Sharia Product and Business Activity Development Committee Charter, Committee meetings are held at least once every 6 (six) months. Meetings can proceed provided that at least half of the Committee members are present.

Decisions of the Sharia Product and Business Activity Development Committee meetings are made based on consensus, and the meeting outcomes must be recorded in minutes and properly documented.

Throughout 2025, the Sharia Product and Business Activity Development Committee held 2 (two) meetings, with attendance frequency and meeting agendas as follows:

Frekuensi Rapat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah 2025
Frequency of Sharia Product and Business Activity Development Committee Meetings 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran (%) Attendance (%)
Dimas Jagad Erlangga	Ketua/Kepala Unit Usaha Syariah Chairman/Head of Sharia Business Unit	2	2	100%
Herwin	Anggota/Kepala Divisi Risk Management Member/Head of Risk Management Division	2	2	100%
Theresia Indah Prasetyaningsih	Anggota/Kepala Divisi NDS Acquisition Strategy Member/Head of NDS Acquisition Strategy Division	2	2	100%

Agenda Rapat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Tahun 2025
Agenda of the Sharia Product and Business Activity Development Committee's Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting participants
1.	24 Juni 2025 June 24, 2025	1. Rencana Implementasi Produk IMBT 2. *Update* Implementasi Produk HajiKu 3. *Update* Produk MASKu 4. IMBT Product Implementation Plan 5. Update on the Implementation of the HajiKu Product 6. Update on the MASKu Product	▪ Ketua & Anggota Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah ▪ Chairman & Members of the Sharia Product and Business Activity Development Committee
2.	30 Desember 2025 December 30, 2025	1. *Update* Pencapaian Produk HajiKu 2025 2. *Update* Pencapaian Produk MASKu 2025 3. Kerjasama pengadaan Emas dengan Galeri 24 1. Update on the 2025 Performance of HajiKu Product 2. Update on the 2025 Performance of MASKu Product 3. Collaboration for Gold Procurement with Galeri 24	▪ Ketua & Anggota Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah ▪ Chairman & Members of the Sharia Product and Business Activity Development Committee

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH

Selama tahun pelaporan, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah melaksanakan tugasnya melalui pemberian saran dan rekomendasi kepada Direksi serta pembahasan mitigasi risiko terkait produk pembiayaan syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah berperan aktif dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik, khususnya dalam pengembangan produk dan kegiatan usaha berbasis prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsinya, Komite ini melaksanakan berbagai tugas yang mencakup:

1. Saran dan rekomendasi terkait pengembangan produk pembiayaan syariah yang sedang berjalan ataupun akan dikembangkan.
2. Mitigasi risiko terkait produk pembiayaan syariah.

TRAINING FOR THE SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE'S MEMBERS

During the reporting year, the Sharia Product and Business Activity Development Committee carried out its duties by providing advice and recommendations to the Board of Directors, as well as discussing risk mitigation related to Sharia financing products, in accordance with prevailing laws and regulations.

IMPLEMENTATION OF SHARIA PRODUCT AND BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT COMMITTEE'S DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Sharia Product and Business Activity Development Committee carried out an active role in supporting the implementation of good governance, particularly in the development of products and business activities based on sharia principles. In carrying out its functions, the Committee performed various duties, including:

1. Advice and recommendations regarding the development of existing and/or planned Sharia financing products
2. Risk mitigation related to Sharia financing products.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi sebagai wadah pengendali arah dan kebijakan penerapan teknologi di Perseroan. Dalam menjalankan perannya, Komite Pengarah Teknologi Informasi memastikan pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mendukung kebutuhan operasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi proses bisnis. Melalui perencanaan yang terarah dan evaluasi berkelanjutan, Komite Pengarah Teknologi Informasi turut memastikan transformasi digital Perseroan berjalan efektif, terukur, dan mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
4. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.

PIAGAM KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah menetapkan Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi yang disahkan pada 21 November 2021. Piagam ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain latar belakang, tugas dan tanggung jawab, wewenang, waktu kerja, serta keanggotaan komite yang mencakup kedudukan, masa tugas, dan komposisi. Selain itu, piagam juga mengatur kode etik, penyelenggaraan rapat termasuk frekuensi, kuorum, pemanggilan, pimpinan dan peserta rapat, hingga keputusan dan risalah rapat, sehingga memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi pengawasan dan arahan di bidang teknologi informasi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi beranggotakan paling sedikit:
   a. Ketua: Presiden Direktur Perseroan.
   b. Anggota:
      - Seorang Direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi.
      - Seorang Direktur dan/atau pejabat yang membawahkan fungsi manajemen risiko Perseroan.
      - Seorang pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara teknologi informasi Perseroan.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee functions as a supervisory forum for directing and formulating policies on the implementation of technology within the Company. In carrying out its role, the Information Technology Steering Committee ensures that the utilization of information technology not only supports operational needs but also delivers added value to business processes. Through structured planning and continuous evaluation, the Information Technology Steering Committee ensures that the Company's digital transformation progresses effectively, in a measurable manner, and supports the achievement of the Company's strategic objectives.

LEGAL BASIS FOR ESTABLISHMENT

1. Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions.
2. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law.
3. POJK Number 4/POJK.05/2021 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.
4. Articles of Association of the Company's along with its amendments.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE CHARTER

The Company's has set the Information Technology Steering Committee Charter, which was ratified on November 21, 2021. This Charter covers various key aspects, including background, duties and responsibilities, authority, working procedures, and committee membership, which encompasses position, term of office, and composition. In addition, the Charter also regulates the code of conducts, the conduct of meetings, including frequency, quorum, invitations, meeting leadership and participants, as well as resolutions and minutes, thereby providing a clear and structured framework for supervision and direction in the field of information technology.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

1. Members of the Information Technology Steering Committee shall consist of at least:
   a. Chairman: The Company's President Director.
   b. Members:
      - A Director overseeing the Information Technology operational unit.
      - A Director and/or an officer overseeing the Company's risk management function.
      - The highest-ranking officer overseeing the Company's information technology operational unit.

- Seorang pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi Perseroan.

2. Salah satu pejabat tertinggi Perseroan yang diangkat sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi akan ditetapkan sebagai sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.

- The highest-ranking officer overseeing the Company's information technology user unit.

2. One of the Company's highest-ranking officers appointed as a member of the Information Technology Steering Committee shall be designated as the Secretary of the Information Technology Steering Committee.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi berlaku efektif sejak diangkat oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Direksi untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut sebelum masa tugas berakhir.

TERM OF OFFICE PROVISIONS

The term of office of the Information Technology Steering Committee becomes effective from the date of appointment by the Company's Board of Directors, without prejudice to the rights and authority of the Board of Directors to dismiss and/or replace any member of the Information Technology Steering Committee prior to the end of the term of office.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DI SEPANJANG TAHUN 2025

Per 31 Desember 2025, keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan dengan susunan dan komposisi sebagai berikut:

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND BASIS FOR APPOINTMENT OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE THROUGHOUT 2025

As of December 31, 2025, the membership of the Information Technology Steering Committee is established with the following structure and composition:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office
Djaja Suryanto Sutandar	Ketua/Presiden Direktur Chairman/President Director	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Njauw Vido Onadi	Anggota/Wakil Presiden Direktur Member/Vice President Director	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Anthony Yuarez Panggabean	Anggota/Direktur Operasional Member/Operations Director	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Wibowo	Anggota/Direktur Pemasaran Member/Marketing Director	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Cincin Lisa Hadi	Anggota/Direktur Keuangan Member/Finance Director	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Lambertus Langkun	Anggota/Chief Risk Member/Chief Risk	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Felix Priscellius	Anggota merangkap Sekretaris/ Kepala Divisi Operasional IT Member concurrently serving as Secretary/IT Operations Division Head	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Ade Setiadarma Muljono	Anggota/Kepala Divisi Development IT Member/Head of IT Development Division	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Panji Dwisatia Munajat	Anggota/Kepala Divisi Strategis dan Inisiatif Proyek Member/Project Strategic and Initiatives Head	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Rina Mayangsari	Anggota/Kepala Divisi Operasi Member/Operations Division Head	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Wisnu Groho	Anggota/Kepala Sub Divisi Departemen Pemasaran Member/Head of Marketing Department Subdivision	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Willy Setiadi	Anggota/Kepala Sub Divisi Manajemen Risiko IT Member/Head of I T Risk Management Subdivision	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present
Jimmy Sutrisno	Anggota/Kepala Sub Divisi Analis dan Pengembangan Keuangan Member/Finance Analyst and Development Sub-Division Head	Surat Keputusan Direksi Nomor 005/IV/BOD-WOM/2025 tanggal 15 April 2025 Board of Directors' Decision Letter Number 005/IV/BOD-WOM/2025 dated April 15, 2025	2025 - Sekarang 2025 - Present

PROFIL KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Informasi terkait Profil Ketua dan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang juga menjabat sebagai Direksi tercantum pada bagian Profil Direksi. Adapun anggota lainnya yang merangkap sebagai Pejabat Senior Perseroan tercantum pada bagian Profil Pejabat Senior.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE'S PROFILE

Information on the profile of Chairman and members of Information Technology Steering Committee who also serve as Directors is listed in the Board of Directors' Profile section. Other members who also serve as Senior Officers of the Company are listed in the Senior Officers' Profile section.

Nama Name	Usia Age	Kewarganegaraan Nationality	Riwayat Pendidikan Educational Background	Jabatan di Perseroan Position in the Company
Djaja Suryanto Sutandar	61	Warga Negara Indonesia Indonesian	Bsc Finance dari California State University of Sacramento, USA (1986) BSc in Finance from California State University, Sacramento, USA (1986)	Presiden Direktur President Director
Njauw Vido Onadi	46	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Akuntansi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (2003), dan Pascasarjana Finance, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2014) Bachelor of Accounting, Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia, Jakarta (2003), and Master's in Finance, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2014)	Wakil Presiden Direktur Vice President Director
Anthony Yuarez Panggabean	63	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma, Jakarta (1993) Bachelor of Information Management, Universitas Gunadarma, Jakarta (1993)	Direktur Operasional Operations Director
Wibowo	52	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta (1997) Bachelor of Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta (1997)	Direktur Pemasaran Marketing Director
Cincin Lisa Hadi	46	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Akuntansi, STIE Trisakti (2000) Bachelor of Accounting, STIE Trisakti (2000)	Direktur Keuangan Finance Director
Lambertus Langkun	52	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Jayabaya Bachelor of Economy Accounting, Universitas Jayabaya	Chief Risk Officer Chief Risk Officer
Felix Priscellius	41	Warga Negara Indonesia Indonesian	▪ Sarjana Teknologi Informasi Universitas Bina Nusantara (2006) ▪ Chief Technology Officer Programme, NUS (2025) ▪ Bachelor of Information Technology, Universitas Bina Nusantara (2006) ▪ Chief Technology Officer Programme, National University of Singapore (2025)	Kepala Divisi Operasional IT Head of IT Operations Division

Nama Name	Usia Age	Kewarganegaraan Nationality	Riwayat Pendidikan Educational Background	Jabatan di Perseroan Position in the Company
Ade Setiadarma Muljono	44	Warga Negara Indonesia Indonesian	▪ Sarjana Teknologi Informasi Universitas Bina Nusantara (2003) ▪ Pascasarjana Applied Finance Binus Business School (2010) ▪ Bachelor of Information Technology, Bina Nusantara University (2003) ▪ Master's in Applied Finance, Binus Business School (2010)	Kepala Divisi Development IT Head of IT Development Division
Wisnu Groho	39	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Teknik Informatika, Universitas Atmajaya Yogyakarta Bachelor of Information Technology, Atmajaya Yogyakarta	Kepala Sub Divisi Departemen Pemasaran Head of Marketing Department Subdivision
Panji Dwisatia Munajat	45	Warga Negara Indonesia Indonesian	Pascasarjana Statistika, Universitas Padjadjaran Master's in Statistics, Universitas Padjadjaran	Kepala Divisi Strategis dan Inisiatif Proyek Project Strategic and Initiatives Division Head
Rina Mayangsari	47	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Manajemen Pemasaran, Atmajaya Yogyakarta (2001) Bachelor of Marketing Management, Atmajaya Yogyakarta (2001)	Kepala Divisi Operasi Operations Division Head
Willy Setiadi	36	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Teknologi Informasi Universitas Bisnis Informatika Indonesia Bachelor of Information Technology, Universitas Bisnis Informatika Indonesia	Kepala Sub Divisi Manajemen Risiko IT Head of IT Risk Management Subdivision
Jimmy Sutrisno	44	Warga Negara Indonesia Indonesian	Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara (2004) Bachelor of Accounting, Universitas Tarumanagara (2004)	Kepala Sub Divisi Analis dan Pengembangan Keuangan Head of Financial Analysis and Development Subdivision

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi berperan dalam memastikan arah strategis pengelolaan teknologi perusahaan berjalan selaras dengan kebutuhan bisnis dan kebijakan tata kelola. Komite ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

1. Rencana pengembangan teknologi informasi yang searah dengan rencana kegiatan usaha Perseroan, Dalam memberikan rekomendasi Komite Pengarah Teknologi Informasi, memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
   a. Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Perseroan. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
   b. Sumber daya yang dibutuhkan.
   c. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
   d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana pengembangan teknologi informasi.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Information Technology Steering Committee plays a role in ensuring that the strategic direction of the Company's technology management aligns with business needs and governance policies. The Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Directors, which include:

1. Information technology development plans aligned with the Company's business activity plans. In providing recommendations, the Information Technology Steering Committee considers efficiency, effectiveness, and the following factors:
   a. An implementation plan (roadmap) for achieving information technology requirements that support the Company's business strategy. The roadmap consists of the current state, the future state, and the steps to be taken to achieve the future state.
   b. Required resources.
   c. Benefits/value to be gained upon implementation of the plan.
   d. Potential obstacles that may arise in implementing the information technology development plan.
2. Formulation of information technology policies and procedures.

3. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan teknologi informasi. Komite Pengarah Teknologi informasi juga menerapkan status prioritas proyek teknologi informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan) misalnya pergantian *core system* dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan proyek teknologi informasi yang disetujui.
5. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor teknologi informasi yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan.
7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi informasi yang dimiliki Perseroan.

3. Alignment of approved information technology projects with the information technology development plan. The Information Technology Steering Committee also establishes priority status for critical information technology projects (those with significant impact on the Company's operational activities), such as core system replacement and network topology upgrades.
4. Compliance of information technology project implementation with the approved project plan.
5. Alignment of information technology with management information system needs and the Company's business requirements.
6. Effectiveness of risk mitigation for the Company's investments in information technology that contributes to achieving the Company's business objectives.
7. Monitoring of information technology performance and efforts to enhance IT performance.
8. Resolution efforts for various information technology-related issues that cannot be effectively, efficiently, and promptly resolved by the user and IT operating units.
9. Adequacy and allocation of the Company's information technology resources.

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Jika terdapat peristiwa penting yang memiliki dampak signifikan terhadap Perseroan, Ketua Komite dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu. Rapat Komite bisa berjalan dengan syarat memenuhi kuota kehadiran lebih dari 50% (lima puluh) persen dari jumlah anggota Komite. Setelah musyawarah untuk mufakat memutuskan hasil rapat, hasil tersebut wajib dituangkan dalam bentuk risalah dan didokumentasikan secara baik.

Sepanjang tahun 2025, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE'S MEETINGS

In accordance with the Information Technology Steering Committee Charter, the Committee meetings may be held at least 4 (four) times in 1 (one) year. If there are important events that have a significant impact on the Company, the Committee Chairperson may convene a meeting at any time. A Committee meeting may proceed provided that the attendance quota of more than 50% (fifty percent) of the total Committee members is met. After deliberation and consensus have determined the meeting resolutions, such resolutions must be documented in the meeting minutes and properly archived.

Throughout 2025, the Information Technology Steering Committee held 4 (four) meetings, with attendance frequency and meeting agendas as follows:

Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi 2025
Meeting Frequency of the Information Technology Steering Committee in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Djaja Suryanto Sutandar	Ketua/Presiden Direktur Chairman/President Director	4	4	100%
Njauw Vido Onadi	Anggota/Wakil Presiden Direktur Member/Vice President Director	4	4	100%
Anthony Yuarez Panggabean	Anggota/Direktur Operasional Member/Operations Director	4	4	100%
Wibowo	Anggota/Direktur Pemasaran Member/Marketing Director	3	4	75%
Cincin Lisa Hadi	Anggota/Direktur Keuangan Member / Finance Director	4	4	100%
Lambertus Langkun	Anggota/Chief Risk Member/Chief Risk	4	4	100%

Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi 2025

Meeting Frequency of the Information Technology Steering Committee in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran (%) Attendance (%)
Felix Priscellius	Anggota merangkap Sekretaris/Kepala Divisi Operasional IT Member concurrently serving as Secretary/IT Operations Division Head	4	4	100%
Ade Setiadarma Muljono	Anggota/Kepala Divisi Development IT Member/Head of IT Development Division	4	4	100%
Panji Dwisatia Munajat	Anggota/Kepala Divisi Strategis dan Inisiatif Proyek Member/Project Strategic and Initiatives Head	4	4	100%
Rina Mayangsari	Anggota/Kepala Divisi Operasi Member/Operations Division Head	3	4	75%
Wisnu Groho	Anggota/Kepala Sub Divisi Departemen Pemasaran Member/Head of Marketing Department Subdivision	4	4	100%
Willy Setiadi	Anggota/Kepala Sub Divisi Manajemen Risiko IT Member/Head of IT Risk Management Subdivision	4	4	100%
Jimmy Sutrisno	Anggota/Kepala Sub Divisi Analis dan Pengembangan Keuangan Member/Finance Analyst and Development Sub-Division Head	3	4	75%

Agenda Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2025

Agenda of Information Technology Steering Committee's Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda		Peserta Rapat Meeting Participants
1	29 April 2025 April 29, 2025	1. *Pending Matters Status* 2. *Audit Finding - Maybank KL* 3. *Compliance* 4. *System Availability & Server Utilization* 5. *Traffic & Response Time Major System* 6. *Helpdesk Ticket Summary* 7. *Payment Summary* 8. *Network Review* 9. *Network Dashboard* 10. *Cyber Security Monitoring* 11. *Continuous Activity November Dashboard* 2024 12. *IT Budget* 13. *IT Risk Management* 14. *Update Running dan Upcoming Project* 15. KAWAN	1. Pending Matters Status 2. Audit Finding - Maybank KL 3. Compliance 4. System Availability & Server Utilization 5. Traffic & Response Time Major System 6. Helpdesk Ticket Summary 7. Payment Summary 8. Network Review 9. Network Dashboard 10. Cyber Security Monitoring 11. Continuous Activity November Dashboard 2024 12. IT Budget 13. IT Risk Management 14. Update Running dan Upcoming project 15. KAWAN	17 orang | people
2	4 Agustus 2025 August 4, 2025	1. *Pending Matters Status* 2. *Audit Finding - Maybank KL* 3. *Compliance* 4. *System Availability & Server Utilization* 5. *Traffic & Response Time Major System* 6. *Helpdesk Ticket Summary* 7. *Payment Summary* 8. *Network Review* 9. *Network Dashboard* 10. *Cyber Security Monitoring* 11. *Continuous Activity July Dashboard* 2025 12. *IT Budget* 13. *IT Risk Management* 14. *Update Running* dan *Upcoming Project* 15. KAWAN	1. Pending Matters Status 2. Audit Finding - Maybank KL 3. Compliance 4. System Availability & Server Utilization 5. Traffic & Response Time Major System 6. Helpdesk Ticket Summary 7. Payment Summary 8. Network Review 9. Network Dashboard 10. Cyber Security Monitoring 11. Continuous Activity July Dashboard 2025 12. IT Budget 13. IT Risk Management 14. Update Running dan Upcoming project 15. KAWAN	17 orang | people

Agenda Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2025
Agenda of Information Technology Steering Committee's Meetings in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda		Peserta Rapat Meeting Participants
3	24 Oktober 2025 October 24, 2025	1. *Pending Matters Status* 2. *Audit Finding - Maybank KL* 3. *Compliance* 4. *System Availability & Server Utilization* 5. *Traffic & Response Time Major System* 6. *Payment Summary* 7. *Network Review* 8. *Cyber Security Monitoring* 9. *Continuous Activity* 10. *IT Budget* 11. *IT Risk - Cyber Security & Availability Continuous Monitoring* 12. *IT Risk - Security Awareness* 13. *Update Running* dan *Upcoming Project* 14. KAWAN	1. Pending Matters Status 2. Audit Finding - Maybank KL 3. Compliance 4. System Availability & Server Utilization 5. Traffic & Response Time Major System 6. Payment Summary 7. Network Review 8. Cyber Security Monitoring 9. Continuous Activity 10. IT Budget 11. IT Risk - Cyber Security & Availability Continuous Monitoring 12. IT Risk - Security Awareness 13. Update Running and Upcoming project 14. KAWAN	16 orang | people
4	10 Desember 2025 December 10, 2025	1. *Pending Matters Status* 2. *Audit Finding - Maybank KL* 3. *Compliance* 4. *System Availability & Server Utilization* 5. *Traffic & Response Time Major System* 6. *Payment Summary* 7. *Network Review* 8. *Cyber Security Monitoring* 9. *Continuous Activity* 10. *IT Budget* 11. *IT Risk - Cyber Security & Availability Continuous Monitoring* 12. *IT Risk - Security Awareness* 13. *Update Running* dan *Upcoming Project*	1. Pending Matters Status 2. Audit Finding - Maybank KL 3. Compliance 4. System Availability & Server Utilization 5. Traffic & Response Time Major System 6. Payment Summary 7. Network Review 8. Cyber Security Monitoring 9. Continuous Activity 10. IT Budget 11. IT Risk - Cyber Security & Availability Continuous Monitoring 12. IT Risk - Security Awareness 13. Update Running and Upcoming Project	19 orang | people

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi, Perseroan memandang pengembangan kompetensi Komite beserta Anggotanya sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola teknologi informasi. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan pemahaman yang memadai terhadap pengelolaan dan pengawasan teknologi informasi.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi berperan aktif dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik, khususnya dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan perusahaan. Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

1. Rencana pengembangan teknologi informasi yang searah dengan rencana kegiatan usaha Perseroan.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi.
3. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan teknologi informasi.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE'S TRAINING

To support the implementation of Information Technology Steering Committee's duties and responsibilities, the Company views the competency development of the Committee and its members as part of efforts to strengthen information technology governance. This approach is taken by referring to the Company's needs and applicable laws and regulations, to ensure an adequate understanding of information technology management and oversight.

IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE'S DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Information Technology Steering Committee actively supported the implementation of good governance, particularly in the planning, supervision, and control of the utilization of information technology within the Company. The Information Technology Steering Committee's duties and responsibilities include:

1. Planning information technology development that is in line with the business plan of the Company's.
2. Formulating information technology policies and procedures.
3. Aligning the approved information technology projects with the information technology development plan.

4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan proyek teknologi informasi yang disetujui.
5. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor teknologi informasi.
7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi informasi yang dimiliki Perseroan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Peran Sekretaris Perusahaan menjadi kunci dalam memastikan komunikasi dan koordinasi yang selaras antara Direksi, Dewan Komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab jabatan ini berada langsung di bawah Direksi, dengan penetapan pengangkatan dan pemberhentian berdasarkan Keputusan Direksi. Dalam setiap aktivitasnya, Sekretaris Perusahaan menegakkan nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola yang baik.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan telah menetapkan Cincin Lisa Hadi sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/V/BODWOM/2022 tanggal 9 Mei 2022. Penetapan ini telah dilaporkan secara resmi kepada OJK dan BEI melalui surat Nomor 0583/V/DIR-WOM/2022 tertanggal 10 Mei 2022, serta dipublikasikan pada situs resmi Perseroan (www.wom.co.id) dan situs Bursa Efek Indonesia pada tanggal yang sama.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi strategis dalam memastikan kelancaran komunikasi dan keterbukaan informasi antara Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan eksternal, termasuk regulator, otoritas pasar modal, dan publik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan dalam mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku serta memastikan setiap kebijakan dan perubahan regulasi dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh jajaran pengurus.

Informasi terkait profil Sekretaris Perusahaan disajikan dalam Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, keberadaan Sekretaris Perusahaan pada Perseroan dimaksudkan untuk memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan Publik dengan pemangku Kepentingan, serta

4. Aligning the implementation of information technology projects with the approved information technology projects.
5. Aligning the information technology with management information system needs and business activities needs of the Company's.
6. Ensuring effectiveness of the Company's risk mitigation for investments in the information technology sector.
7. Monitoring information technology performance and efforts to improve information technology performance.
8. Monitoring the adequacy and allocation of the Company's information technology resources.

CORPORATE SECRETARY

The role of the Corporate Secretary is important to ensuring aligned communication and coordination between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and other stakeholders. This position reports directly to the Board of Directors, with appointments and dismissals determined through a Board of Directors' Decisions. In all of its activities, the Corporate Secretary upholds the values of transparency, accountability, and professionalism as a manifestation of the implementation of good governance principles.

CORPORATE SECRETARY'S PROFILE

The Company appointed Cincin Lisa Hadi as the Corporate Secretary based on the Board of Directors' Decision Letter Number 004/V/BODWOM/2022 dated May 9, 2022. This appointment had been officially reported to OJK and IDX through Letter Number 0583/V/DIR-WOM/2022 dated May 10, 2022, and was published on the Company's official website (www.wom.co.id) and on Indonesia Stock Exchange website on the same date.

The Corporate Secretary holds a strategic function in ensuring smooth communication and information disclosure between the Company and all external stakeholders, including regulators, capital market authorities, and the public. In addition, the Corporate Secretary plays a role in overseeing the Company's compliance with prevailing regulations and ensuring that every policy and regulatory change is well-understood and consistently implemented by the management.

Information on the profile of the Corporate Secretary is presented in the Board of Director Profile section in the Company Profile Chapter.

CORPORATE SECRETARY'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Based on POJK Number 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the existence of the Corporate Secretary within the Company is intended to ensure smooth communication between the Public Company and its stakeholders, as well as to ensure that the Issuer or

memastikan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Memberikan saran kepada Direksi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang, ketentuan dan prosedur serta peraturan yang berdampak pada Direksi dan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan.
2. Bertanggung jawab memberikan saran kepada Direksi mengenai tugas dan kewajiban dalam mengungkapkan kepentingan terkait dampak benturan kepentingan dalam transaksi yang melibatkan Perseroan, larangan dalam transaksi efek dan larangan pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga.
3. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Website*.
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK dan Pemangku Kepentingan lainnya.

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan, Cincin Lisa Hadi, selaku Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai pelatihan yang tercantum dalam Program Peningkatan Kompetensi Direksi. Adapun pelatihan yang dimaksud meliputi:

1. Seminar Nasional "Will Trade War Create Financial Turmoil?", pada tanggal 6 Mei 2025 yang diselenggarakan oleh APPI.
2. Seminar Nasional "*Economic Outlook 2026*" pada tanggal 2 September 2025 yang diselenggarakan oleh APPI.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2025

Selain berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya, di tahun 2025, Sekretaris Perusahaan juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang dijalankan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Public Company continuously complies with prevailing laws and regulations.

1. Providing advice to the Board of Directors on issues related to the Company's compliance with laws, rules, procedures, and regulations that affect the Board of Directors and best practices of corporate governance.
2. Being responsible for providing advice to the Board of Directors on duties and obligations in disclosing interests related to the impact of conflicts of interest in transactions involving the Company, prohibitions on securities transactions, and restrictions on disclosure of information that may affect prices.
3. Keeping abreast of developments in the Capital Market, particularly laws and regulations applicable in the Capital Market.
4. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of Corporate Governance, including:
   a. Disclosure of information to the public, including information availability on the Company's website.
   b. Submission of reports to the Financial Services Authority.
   c. Organization and documentation of GMS.
   d. Organization and documentation of meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
   e. Implementation of orientation programs for the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
5. Acting as a liaison between the Company and Shareholders, the Financial Services Authority, and other Stakeholders.

CORPORATE SECRETARY'S TRAINING

Throughout 2025, the Corporate Secretary, Cincin Lisa Hadi, in her capacity as a member of the Board of Directors, participated in various training programs listed in the Directors' Competency Development Program. The relevant training programs included:

1. National Seminar "Will Trade War Create Financial Turmoil?", held on May 6, 2025, and organized by APPI.
2. National Seminar "Economic Outlook 2026", held on September 2, 2025, and organized by APPI.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY'S DUTIES IN 2025

In addition to serving as a liaison between the Company and its shareholders, regulators, and other stakeholders, in 2025 the Corporate Secretary also carried out duties and responsibilities in accordance with the function, including the following:

1. Keeping abreast of developments in the capital market, particularly the prevailing laws and regulations in the capital market sector.
2. Providing input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure compliance with applicable capital market laws and regulations.

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kaitannya Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan terbuka.

LAPORAN BERKALA & KORESPONDENSI

1. Laporan Keuangan
   Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan tengah tahun dan akhir tahun melalui surat kabar berperedaran nasional. Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2025 telah dipublikasikan pada Februari 2026 di harian Investor Daily, Perseroan juga telah mempublikasikan Laporan Keuangan Perseroan di situs *website* Perseroan dan situs *website* BEI. Laporan Keuangan Perseroan disusun antara lain sesuai dengan Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan serta peraturan dan/atau ketentuan terkait lainnya.
2. Laporan Tahunan
   Laporan tahunan Perseroan disusun sesuai dengan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan, yaitu tanggal 3 Maret 2025 melalui surat Perseroan Nomor 065/III/CS/2025 perihal Penyampaian Laporan Tahunan dan Berkelanjutan.
3. Korespondensi dengan OJK dan BEI
   Selain laporan tersebut di atas, adapun keterbukaan informasi di tahun 2025 yang telah disampaikan melalui IDXnet dan/atau SPE OJK, antara lain sebagai berikut:

3. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance, which includes:
   a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company's website;
   b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
   c. Organization and documentation of General Meetings of Shareholders (GMS);
   d. Organization and documentation of meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and
   e. Implementation of orientation programs on the Company for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
4. Acting as a liaison between the Company and its shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders in relation to the Company as a publicly listed financing company.

PERIODIC REPORTS & CORRESPONDENCE

1. Financial Statements
   The Company has published its mid-year and year-end financial statements through nationally circulated newspapers. The Audited Financial Statements as of December 31, 2025, has been published in February 2026 in the daily newspaper Investor Daily. The Company has also published its Financial Statements on the Company's website and IDX website. The Company's Financial Statements are prepared, among others, in accordance with Regulation VIII.G.7 on the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies, Regulation X.K.2 on the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies, and POJK Number 75/POJK.04/2017 on the Responsibilities of the Board of Directors for Financial Statements, as well as other relevant regulations and/or provisions.
2. Annual Report
   The Company's annual report is prepared in accordance with POJK Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies. The Company's Annual Report for the 2024 Financial Year was submitted to OJK in accordance with applicable regulations, or on the date of the annual GMS summons, namely March 3, 2025, through the Company's letter Number 065/III/CS/2025 regarding the Submission of the Annual and Sustainability Reports.
3. Correspondence with OJK and IDX
   In addition to the reports mentioned above, information disclosure in 2025 submitted via IDXnet and/or OJK's Electronic Filing System (SPE) included, among others, the following:

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia **Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange**			
OJK BEI OJK IDX	8 Januari 2025 January 8, 2025	007/I/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Desember 2024 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of December 2024 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	9 Januari 2025 January 9, 2025	008/I/CS/2025	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II dan III Tahun 2022 dan 2023 Report on Realization of Use of Proceeds from the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds IV Phase II and III Year 2022 and 2023
OJK BEI OJK IDX	9 Januari 2025 January 9, 2025	009/I/CS/2025	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Report on Realization of Use of proceeds from the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase I Year 2024
OJK BEI OJK IDX	7 Februari 2025 February 7, 2025	032/II/CS/2025	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Notification of Plan to Hold the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	10 Februari 2025 February 10, 2025	035/II/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Januari 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of January 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	12 Februari 2025 February 12, 2025	040/II/CS/2025	Penyampaian Hasil Pemeringkatan Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Annual Rating Results of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	13 Februari 2025 February 13, 2025	043/II/CS/2025	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material - Pelaporan dan Pengkinian Data *Beneficial Owner* PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Report of the Disclosure of Information or Material Facts – Reporting and Updating Beneficial Owner Data of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	14 Februari 2025 February 14, 2025	046/II/CS/2025	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Announcement of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI OJK IDX	14 Februari 2025 February 14, 2025	047/II/CS/2025	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Submission of Proof of Advertisement of the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI OJK IDX	19 Februari 2025 February 19, 2025	057/II/CS/2025	Penyampaian Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2024 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (*Audited*) Submission of Financial Statements as of December 31, 2024 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited)
OJK BEI OJK IDX	19 Februari 2025 February 19, 2025	058/II/CS/2025	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2024 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (*Audited*) Submission of Proof of Advertisement of Financial Statements as of December 31, 2024, of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited)
OJK BEI OJK IDX	3 Maret 2025 March 3, 2025	065/III/CS/2025	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Annual Report and Sustainability Report 2024 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	3 Maret 2025 March 3, 2025	066/III/CS/2025	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Notice for Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI OJK IDX	3 Maret 2025 March 3, 2025	067/III/CS/2025	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Submission of Proof of Advertisement of the Notice for Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI OJK IDX	6 Maret 2025 March 6, 2025	068/III/CS/2025	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material - Kesiapan Dana Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Seri B Tahun 2022 Report of the Disclosure of Information or Material Facts – Preparedness of Fund for Redemption of WOM Finance Continuing Bonds IV Phase II Series B Year 2022

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK BEI OJK IDX	7 Maret 2025 March 7, 2025	070/III/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Februari 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of February 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	27 Maret 2025 March 27, 2025	221/III/CS/2025	Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha TbK ("Perseroan") Report on Implementation Results of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI OJK IDX	27 Maret 2025 March 27, 2025	222/III/CS/2025	Laporan Bukti Iklan Hasil Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Report of Proof of Advertisement of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI OJK IDX	27 Maret 2025 March 27, 2025	223/III/CS/2025	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Disclosure of Information Related to Corporate Action – Cash Dividend of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI OJK IDX	8 April 2025 April 8, 2025	247/IV/CS/2025	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material - Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Seri B Tahun 2022 Report of the Disclosure of Information or Material Facts – Redemption of WOM Finance Continuing Bonds IV Phase II Series B Year 2022
OJK BEI OJK IDX	9 April 2025 April 9, 2025	249/IV/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Maret 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of March 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	24 April 2025 April 24, 2025	264/IV/CS/2025	Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	25 April 2025 April 25, 2025	267/IV/CS/2025	Penyampaian Laporan Keuangan Interim tanggal 31 Maret 2025 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Interim Financial Statements as of March 31, 2025, for the three-month period ended on that date (Unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	05 Mei 2025 May 5, 2025	278/V/CS/2025	Transaksi Afiliasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Affiliate Transactions of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company")
OJK BEI OJK IDX	7 Mei 2025 May 7, 2025	279/V/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per April 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of April 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	26 Mei 2025 May 26, 2025	300/V/CS/2025	Penyampaian Informasi Tambahan Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Submission of Additional Summary Information in Connection with the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025
OJK BEI OJK IDX	26 Mei 2025 May 26, 2025	301/V/CS/2025	Laporan Bukti Iklan Informasi Tambahan Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Report of Proof of Advertisement of Additional Summary Information in Connection with the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025
OJK BEI OJK IDX	10 Juni 2025 June 10, 2025	309/VI/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Mei 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of May 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	16 Juni 2025 June 16, 2025	313/VI/CS/2025	Penyampaian Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Submission of Additional Information and/or Corrections to Additional Summary Information in Connection with the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025
OJK BEI OJK IDX	16 Juni 2025 June 16, 2025	314/VI/CS/2025	Laporan Bukti Iklan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Report of Proof of Advertisement of Additional Information and/or Corrections to Additional Summary Information in Connection with the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK BEI OJK IDX	7 Juli 2025 July 7, 2025	330/VII/CS/2025	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 dan Tahap II Tahun 2025 Report on Realization of Use of Proceeds from the Sustainable Public Offering of WOM Finance Bonds V Phase I in 2024 and Phase II Year 2025
OJK BEI OJK IDX	7 Juli 2025 July 7, 2025	331/VII/CS/2025	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Report on Realization of Use of Proceeds from the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds IV Phase III Year 2023
OJK BEI OJK IDX	7 Juli 2025 July 7, 2025	332/VII/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Juni 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of June 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	7 Agustus 2025 August 7, 2025	366/VIII/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Juli 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of July 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	9 September 2025 September 9, 2025	380/IX/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Agustus 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of August 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	6 Oktober 2025 October 6, 2025	396/X/CS/2025	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Report on Realization of Use of Proceeds from the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025
OJK BEI OJK IDX	8 Oktober 2025 October 8, 2025	398/X/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per September 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of September 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	3 November 2025 November 3, 2025	422/XI/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Oktober 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Securities Holder Registration Report as of October 2025 of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK BEI OJK IDX	8 Desember 2025 December 8, 2025	448/XII/CS/2025	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material atas Perubahan Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 Report on Disclosure of Material Information or Facts on the Change in the Name of Public Accounting Firm that Audited the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year
OJK BEI OJK IDX	9 Desember 2025 December 9, 2025	453/XII/CS/2025	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per November 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of November 2025 for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Otoritas Jasa Keuangan **Financial Services Authority**			
OJK	3 Januari 2025 January 3, 2025	0013/I/DIR-WOM/2025	Tanggapan Surat OJK Nomor SR-5/KS.21/2024-Tahap 3 perihal penyampaian *update* data atas pihak yang diduga terkait dengan judi *online* dengan data nomor induk kependudukan tahap 3; Response to OJK Letter Number SR-5/KS.21/2024-Phase 3 on the submission of updated data on parties suspected of being involved in online gambling with citizen identification number data, phase 3;
OJK	3 Januari 2025 January 3, 2025	0014/I/DIR-WOM/2025	Tanggapan Surat OJK Nomor SR-5/KS.21/2024-Tahap 2 perihal penyampaian *update* data atas pihak yang diduga terkait dengan judi *online* dengan data nomor induk kependudukan tahap 2; Response to OJK Letter Number SR-5/KS.21/2024-Phase 2 on the submission of updated data on parties suspected of being involved in online gambling with citizen identification number data, phase 2;
OJK	3 Januari 2025 January 3, 2025	0015/I/DIR-WOM/2025	Tanggapan Surat OJK Nomor SR-5/KS.21/2024-Tahap 1 perihal penyampaian *update* data atas pihak yang diduga terkait dengan judi *online* dengan data nomor induk kependudukan tahap 1; Response to OJK Letter Number SR-5/KS.21/2024-Phase 1 on the submission of updated data on parties suspected of being involved in online gambling with citizen identification number data, phase 1;
OJK	6 Januari 2025 January 6, 2025	0024/I/DIR-WOM/2025	Laporan penggunaan tenaga kerja asing ("TKA") PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Tahun 2024 Report on the use of foreign workers ("TKA") by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") for the 2024 period

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	8 Januari 2025 January 8, 2025	006/I/CS/2025	Penyampaian Laporan Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Desember 2023 dan Desember 2024 Submission of the Financing Distribution Report Based on Age and Occupation Classification for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the period of December 2023 and December 2024
OJK	8 Januari 2025 January 8, 2025	005/I/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode November 2024 dan November 2025 Submission of the Request for Data on Financing Distribution Based on Age and Occupation Classification for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the period of November 2024 and November 2025
OJK	13 Januari 2025 January 13, 2025	0047/I/DIR-WOM/2025	Permohonan Informasi Terkait Status Pelaporan Produk Pembiayaan Porsi Haji dan Pembiayaan IMBT MotorKu dan MobilKu Unit Usaha Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (" UUS WOM Finance") Request for Information Regarding the Reporting Status of Hajj Financing Products and IMBT MotorKu and MobilKu Financing of the Sharia Business Unit of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("WOM Finance UUS")
OJK	23 Januari 2025 January 23, 2025	0102/I/DIR-WOM/2025	Penyampaian Pemenuhan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Rekomendasi Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") Compliance with Recommendations from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	24 Januari 2025 January 24, 2025	0106/I/DIR-WOM/2025	Permohonan Perpanjangan Waktu dalam Memberikan Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-154/PL.111/2025 perihal Konfirmasi dan Permintaan Penyampaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Request for Extension of Time to Respond by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to OJK Letter Number S-154/PL.111/2025 on Confirmation and Submission of Action Plan for Debtor Reports in SLIK of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dated January 13, 2025 ("OJK Letter")
OJK	30 Januari 2025 January 30, 2025	023/I/CS/2025	Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Tahunan per Desember 2024 Unit Usaha Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the Annual Business Plan Monitoring Report as of December 2024 for Sharia Business Unit of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	30 Januari 2025 January 30, 2025	024/I/CS/2025	Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Tahunan per Desember 2024 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Annual Business Plan Monitoring Report as of December 2024 for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	30 Januari 2025 January 30, 2025	025/I/CS/2025	Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis Tahunan per Desember 2024 Unit Usaha Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Annual Business Plan Realization Report as of December 2024 for Sharia Business Unit of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	30 Januari 2025 January 30, 2025	026/I/CS/2025	Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis Tahunan per Desember 2024 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Annual Business Plan Realization Report as of December 2024 for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	30 Januari 2025 January 30, 2025	0112/I/DIR-WOM/2025	Penyampaian Informasi Terkait Kerja Sama PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dengan Penyedia Jasa Pihak Ketiga Submission of Information Related to Cooperation of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") with Third-Party Service Providers
OJK	30 Januari 2025 January 30, 2025	0113/I/DIR-WOM/2025	Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Wakil Presiden Direktur PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Request for Approval to Serve as Principal Party Vice President Director of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK	5 Februari 2025 February 5, 2025	0139/II/DIR-WOM/2025	Penyampaian Pemenuhan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Rekomendasi Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") Compliance with Recommendations from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	5 Februari 2025 February 5, 2025	0141/II/DIR-WOM/2025	Surat Pengantar Penyampaian Pelaporan Tingkat Kesehatan Perusahaan Konven dan Syariah (UUS) per Desember 2024. Cover Letter for Submission of Conventional and Sharia Company (UUS) Health Level Reports as of December 2024.

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	10 Februari 2025 February 10, 2025	036/II/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Januari 2024 dan Januari 2025 Submission of Request for Financing Disbursement Data Based on Age and Occupation Classification for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company") for the period of January 2024 and January 2025
OJK	14 Februari 2025 February 14, 2025	0179/II/DIR-WOM/2025	Laporan Pemilik Manfaat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Report of Beneficial Owner of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK	18 Februari 2025 February 18, 2025	0188/II/DIR-WOM/2025	Laporan Perubahan Susunan Pengurus PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Report on Changes in Management Composition of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
OJK	18 Februari 2025 February 18, 2025	0189/II/DIR-WOM/2025	Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan/atau Pihak yang dapat dihubungi Report on Updated Data and Domicile Information of Principal Parties of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk and/or Contactable Parties
OJK	18 Februari 2025 February 18, 2025	0190/II/DIR-WOM/2025	Penyampaian Informasi Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. ("Perseroan") atas Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Njauw Vido Onadi Selaku Calon Wakil Presiden Direktur Perseroan sebagaimana termuat pada Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-4/PL.02/2025 tertanggal 3 Februari 2025 ("Surat Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK") Submission of Follow-up Information of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Fit and Proper Assessment Results of Mr. Njauw Vido Onadi as Prospective Vice President Director of the Company as stated in the OJK Board of Commissioners Decision Number KEP-4/PL.02/2025 dated February 3, 2025 ("OJK Fit and Proper Assessment Result Decision Letter")
OJK	19 Februari 2025 February 19, 2025	0201/II/DIR-WOM/2025	Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-154/PL.111/2025 tentang Konfirmasi dan Permintaan Penyampaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Response of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to OJK Letter Number S-154/PL.111/2025 on the Confirmation and Submission of Action Plan for Debtor Reports in SLIK of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dated January 13, 2025 ("OJK Letter").
OJK	20 Februari 2025 February 20, 2025	0206/II/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	24 Februari 2025 February 24, 2025	0207/II/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat KC Kabupaten Bogor (IV) Report on relocation of Bogor Regency branch office (IV)
OJK	27 Februari 2025 February 27, 2025	0223/II/DIR-WOM/2025	Penyampaian Pemenuhan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. ("Perseroan") atas Permintaan Data dan Dokumen Pengawasan *Offsite* Perusahaan Pembiayaan Submission of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") Compliance with Requests for Data and Documents for Offsite Supervision of Financing Companies
OJK	3 Maret 2025 March 3, 2025	0263/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	3 Maret 2025 March 3, 2025	0266/III/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat KC Ciputat Report on relocation of Ciputat branch office
OJK	3 Maret 2025 March 3, 2025	0267/III/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat KC UUS Tangerang Selatan Report on relocation of South Tangerang Sharia Business Unit branch office
OJK	7 Maret 2025 March 7, 2025	069/III/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Februari 2024 dan Februari 2025 Submission of Request for Financing Disbursement Data Based on Age and Occupation Classification for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company") for the period of February 2024 and February 2025
OJK	10 Maret 2025 March 10, 2025	0281/III/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat kantor cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Batang Hari Report on relocation of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk branch office in Batang Hari
OJK	10 Maret 2025 March 10, 2025	0284/III/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat kantor cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Sumedang Report on relocation of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk branch office in Sumedang

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	11 Maret 2025 March 11, 2025	0294/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tanggapan terkait Laporan Bulanan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") kepada Otoritas Jasa Keuangan Submission of Response regarding the Monthly Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to the Financial Services Authority
OJK	11 Maret 2025 March 11, 2025	0295/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	12 Maret 2025 March 12, 2025	0308/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-154/PL.111/2025 tentang Konfirmasi dan Permintaan Penyampaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-154/PL.111/2025 on the Confirmation and Submission of Action Plan for Debtor Reports in SLIK of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dated January 13, 2025 ("OJK Letter")
OJK	12 Maret 2025 March 12, 2025	0309/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-8/KS.12/2025 tentang Koreksi Laporan Debitur SLIK dalam Rangka Evaluasi Kualitas Data Laporan Debitur SLIK terkait Data Debitur Perseorangan tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-8/KS.12/2025 on the Corrections to Debtor Reports in SLIK as part of the Evaluation of SLIK Debtor Report Data Quality related to Individual Debtor Data dated January 13, 2025 ("OJK Letter")
OJK	17 Maret 2025 March 17, 2025	0336/III/DIR-WOM/2025	Permohonan Persetujuan Penempatan Sistem Elektronik Sistem *GRC Solution* pasa Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Maybank *Group* Kuala Lumpur, Malaysia Request for Approval for Placement of the GRC Solution Electronic System at the Data Center and/or Disaster Recovery Center at Maybank Group, Kuala Lumpur, Malaysia
OJK	17 Maret 2025 March 17, 2025	0337/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	18 Maret 2025 March 18, 2025	0338/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	18 Maret 2025 March 18, 2025	0339/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	18 Maret 2025 March 18, 2025	0340/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	25 Maret 2025 March 25, 2025	0364/III/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat kantor cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Kabupaten Kebumen (II) Report on the Relocation of the Branch Office of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk in Kebumen Regency (II)
OJK	26 Maret 2025 March 26, 2025	0385/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	26 Maret 2025 March 26, 2025	0386/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	26 Maret 2025 March 26, 2025	0387/III/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	8 April 2025 April 8, 2025	0441/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	9 April 2025 April 9, 2025	248/IV/CS/2025	Penyampaian Laporan Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Maret 2024 dan Maret 2025 Submission of Financing Disbursement Report Based on Age and Occupation Classification for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Company") for the period of March 2024 and March 2025
OJK	11 April 2025 April 11, 2025	0448/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-154/PL.111/2025 tentang Konfirmasi dan Permintaan Penyampaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-154/PL.111/2025 on the Confirmation and Request for Submission of the Action Plan for the SLIK Debtor Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dated January 13, 2025 ("OJK Letter")
OJK	11 April 2025 April 11, 2025	0449/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-8/KS.12/2025 tentang Koreksi Laporan Debitur SLIK dalam Rangka Evaluasi Kualitas Data Laporan Debitur SLIK terkait Data Debitur Perseorangan tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-8/KS.12/2025 on the Correction of the SLIK Debtor Report in the Context of Evaluating the Quality of SLIK Debtor Data related to Individual Debtor Data, dated January 13, 2025 ("OJK Letter")
OJK	15 April 2025 April 15, 2025	0489/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	15 April 2025 April 15, 2025	0493/IV/DIR-WOM/2025	"Penyampaian data/dokumen pendukung sebagai kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penempatan sistem elektronik *Governance, Risk, and Compliance* (GRC)" "Submission of supporting data/documents as part of the completeness of the application for approval of the electronic system placement for the Governance, Risk, and Compliance (GRC) solution"
OJK	16 April 2025 April 16, 2025	0500/IV/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat KC Mataram Report on the relocation of Mataram Branch Office
OJK	16 April 2025 April 16, 2025	0501/IV/DIR-WOM/2025	Laporan Pindah alamat KC Kabupaten Tangerang (V) Report on the relocation of Tangerang Regency Branch Office (V)
OJK	17 April 2025 April 17, 2025	0502/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dan Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Penyelesaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK Perseroan – Konven Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") and Request for Extension of Time to Complete the Action Plan for the Company's SLIK Debtor Report- Conventional
OJK	17 April 2025 April 17, 2025	0503/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dan Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Penyelesaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK Perseroan – Syariah Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") and Request for Extension of Time to Complete the Action Plan for the Company's SLIK Debtor Report-Sharia
OJK	21 April 2025 April 21, 2025	0510/IV/DIR-WOM/2025	Permohonan Informasi dan Arahan terkait Mekanisme/Tata Cara Penggabungan (Merger) Nomor *Credit Information File* (CIF) Debitur dan Penggantian Nomor CIF Debitur Request for Information and Guidance regarding the Mechanism/Procedures for the Merger of Debtor Credit Information File (CIF) Numbers and the Replacement of Debtor CIF Numbers
OJK	21 April 2025 April 21, 2025	0511/IV/DIR-WOM/2025	Laporan Perubahan Anggaran Dasar Report on Amendments to the Articles of Association
OJK	23 April 2025 April 23, 2025	0523/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung OJK Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Commitments from OJK On-Site Examination Results for 2024
OJK	24 April 2025 April 24, 2025	0532/IV/DIR-WOM/2025	Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk periode Tahun 2024 Report on the Implementation of Good Governance for the Financing Company PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk for the Year 2024

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	29 April 2025 April 29, 2025	0536/IV/DIR-WOM/2025	Permohonan Pembukaan Akses kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Untuk Melakukan Koreksi *Credit Information File* ("CIF") pada Sistem Layanan Informasi Keuangan ("SLIK") Request for Access by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to Make Corrections to the Credit Information File ("CIF") in the Financial Information Services System ("SLIK")
OJK	29 April 2025 April 29, 2025	0537/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung OJK Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Commitments from OJK On-Site Examination Results for 2024
OJK	30 April 2025 April 30, 2025	270/IV/CS/2025	Penyampaian *Management Letter* atas Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2024 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (*Audited*) Submission of Management Letter on the Financial Statements dated December 31, 2024, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Audited)
OJK	30 April 2025 April 30, 2025	0545/IV/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung OJK Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Commitments from OJK On-Site Examination Results for 2024
OJK	5 Mei 2025 May 5, 2025	0599/V/DIR-WOM/2025	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 kepada OJK Notification Letter on the Implementation of the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025 to OJK
OJK	5 Mei 2025 May 5, 2025	0600/V/DIR-WOM/2025	Surat Konfirmasi Penawaran Awal (*Bookbuilding*) Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Kepada OJK Confirmation Letter on the Initial Offering (Bookbuilding) of WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025 to OJK
OJK	7 Mei 2025 May 7, 2025	280/V/CS/2025	Penyampaian Laporan Perubahan Rencana Bisnis Tahun 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Report on Changes to the 2025 Business Plan for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	7 Mei 2025 May 7, 2025	281/V/CS/2025	Penyampaian Laporan Perubahan Rencana Bisnis Tahun 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Unit Usaha Syariah) Submission of Report on Changes to the 2025Business Plan, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Sharia Business Unit)
OJK	7 Mei 2025 May 7, 2025	282/V/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode April 2024 dan April 2025 Submission of Request for Data on Financing Disbursement Based on Age and Occupation Classification of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the Period of April 2024 and April 2025
OJK	14 Mei 2025 May 14, 2025	0664/V/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat KC Bekasi Report on the Relocation of Bekasi Branch Office
OJK	14 Mei 2025 May 14, 2025	0665/V/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat KC UUS Bekasi Report on the Relocation of Bekasi UUS Branch Office
OJK	14 Mei 2025 May 14, 2025	0667/V/DIR-WOM/2025	Penyampaian tindak lanjut perseroan atas pemeriksaan langsung OJK Tahun 2025 Submission of the Company's Follow-Up on OJK On-Site Examination for 2025
OJK	20 Mei 2025 May 20, 2025	293/V/CS/2025	Laporan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") on the Realization of Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services for the 2024 Financial Year
OJK	20 Mei 2025 May 20, 2025	0692/V/DIR-WOM/2025	Penyampaian tindak lanjut Perseroan atas pemeriksaan langsung OJK tahun 2024 Submission of the Company's Follow-Up on OJK On-Site Examination for 2024
OJK	20 Mei 2025 May 20, 2025	0694/V/DIR-WOM/2025	Pelaporan peningkatan KSKC menjadi KC Lamongan Report on the Upgrade of KS/ KC to Lamongan Branch Office
OJK	21 Mei 2025 May 21, 2025	0705/V/DIR-WOM/2025	Surat untuk penyampaian tindak lanjut Perseroan atas pemeriksaan langsung OJK Tahun 2024 Letter for the Submission of the Company's Follow-Up on OJK On-Site Examination for 2024

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	26 Mei 2025 May 26, 2025	0716/V/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-154/PL.111/2025 tentang Konfirmasi dan Permintaan Penyampaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-154/PL.111/2025 regarding Confirmation and Request for Submission of the Action Plan for the Company's SLIK Debtor Report, dated January 13, 2025 ("OJK Letter")
OJK	26 Mei 2025 May 26, 2025	0717/V/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-8/KS.12/2025 tentang Koreksi Laporan Debitur SLIK terkait Data Debitur Perseorangan tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-8/KS.12/2025 regarding Correction of the SLIK Debtor Report related to Individual Debtor Data, dated January 13, 2025 ("OJK Letter")
OJK	26 Mei 2025 May 26, 2025	0718/V/DIR-WOM/2025	Permohonan Pembukaan Akses kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") untuk Melakukan Koreksi *Credit Information File* ("CIF") pada Sistem Layanan Informasi Keuangan ("SLIK") Request for Access by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to Make Corrections to the Credit Information File ("CIF") in the Financial Information Services System ("SLIK")
OJK	28 Mei 2025 May 28, 2025	0719/V/DIR-WOM/2025	Laporan pindah alamat Sidoarjo 3 Waru Report on the relocation of Sidoarjo 3 Waru Branch Office
OJK	2 Juni 2025 June 2, 2025	0740/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-112/KS.12/2025 tertanggal 16 Mei 2025 perihal Himbauan Penyelesaian Tindak Lanjut Koreksi Laporan Debitur SLIK dalam Rangka Evaluasi Kualitas Data Laporan Debitur Perorangan SLIK ("Surat OJK") Submission of Response by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-112/KS.12/2025 dated May 16, 2025, on the Appeal for Completion of the Follow-Up on SLIK Debtor Report Corrections in the Context of Evaluating the Quality of Individual Debtor SLIK Data ("OJK Letter")
OJK	2 Juni 2025 June 2, 2025	0743/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian tindak lanjut perseroan atas pemeriksaan langsung kepada OJK Tahun 2024 Submission of the Company's Follow-Up on OJK On-Site Examination for 2024
OJK	10 Juni 2025 June 10, 2025	310/VI/CS/2025	Penyampaian permintaan data penyaluran pembiayaan berdasarkan klasifikasi usia dan pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Mei 2024 dan Mei 2025 Submission of Request for Data on Financing Disbursement Based on Age and Occupation Classification of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the Period of May 2024 and May 2025
OJK	10 Juni 2025 June 10, 2025	0773/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian tindak lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	10 Juni 2025 June 10, 2025	0774/VI/DIR-WOM/2025	Perubahan Hak Akses Administrator PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") pada SIstem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Change of Administrator Access Rights of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") in the Financial Information Services System (SLIK)
OJK	10 Juni 2025 June 10, 2025	0775/VI/DIR-WOM/2025	Perubahan Hak Akses Administrator Unit Usaha Syariah (UUS) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Change of Administrator Access Rights of the Sharia Business Unit (UUS) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") in the Financial Information Services System (SLIK)
OJK	16 Juni 2025 June 16, 2025	0799/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	16 Juni 2025 June 16, 2025	0800/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	18 Juni 2025 June 18, 2025	0813/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dan Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Penyelesaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK Perseroan – Konven Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") and Request for Extension of Time to Complete the Action Plan for the Company's SLIK Debtor Report- Conventional

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	18 Juni 2025 June 18, 2025	0814/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dan Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Penyelesaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK Perseroan – Syariah Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") and Request for Extension of Time to Complete the Action Plan for the Company's SLIK Debtor Report-Sharia
OJK	19 Juni 2025 June 19, 2025	0815/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian Data/Dokumen Pendukung sebagai Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Penempatan Sistem Elektronik *Governance, Risk and Compliance Solution* (GRC) pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Maybank Group Kuala Lumpur, Malaysia Submission of Supporting Data/Documents as Part of the Completeness of the Application for Approval of the Placement of the Governance, Risk, and Compliance (GRC) Electronic System at the Data Center and/or Disaster Recovery Center at Maybank Group, Kuala Lumpur, Malaysia
OJK	20 Juni 2025 June 20, 2025	0819/VI/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-112/KS.12/2025 tertanggal 16 Mei 2025 perihal Himbauan Penyelesaian Tindak Lanjut Koreksi Laporan Debitur SLIK dalam Rangka Evaluasi Kualitas Data Laporan Debitur Perorangan SLIK ("Surat OJK") Submission of Response by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-112/KS.12/2025 dated May 16, 2025, regarding the Appeal for Completion of the Follow-Up on SLIK Debtor Report Corrections in the Context of Evaluating the Quality of Individual Debtor Data ("OJK Letter")
OJK	24 Juni 2025 June 24, 2025	0827/VI/DIR-WOM/2025	Pelaporan pembukaan KC Tabalong Tanjung Report on the Opening of Tabalong Tanjung Branch Office
OJK	24 Juni 2025 June 24, 2025	0828/VI/DIR-WOM/2025	Pelaporan pembukaan KC Kuala Kapuas Report on the Opening of Kuala Kapuas Branch Office
OJK	24 Juni 2025 June 24, 2025	0829/VI/DIR-WOM/2025	Pelaporan Pengkinian KSKC menjadi KC pekalongan 2 Kajen. Report on the Upgrade of KS/KC to Pekalongan 2 Kajen Branch Office
OJK	8 Juli 2025 July 8, 2025	333/VII/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Juni 2024 dan Juni 2025 Submission of Request for Data on Financing Disbursement Based on Age and Occupation Classification of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the Period of June 2024 and June 2025
OJK	14 Juli 2025 July 14, 2025	0902/VII/DIR-WOM/2025	Penyampaian Data/Dokumen Pendukung sebagai Kelengkapan Dokumen Permohonan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Persetujuan Penempatan Sistem Elektronik *Governance, Risk, and Compliance Solution* (GRC) pada Pusat DATA dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Maybank *Group* Kuala Lumpur, Malaysia Submission of Supporting Data/Documents as Part of the Completeness of the Application by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") for Approval of the Placement of the Governance, Risk, and Compliance (GRC) Electronic System at the Data Center and/or Disaster Recovery Center at Maybank Group, Kuala Lumpur, Malaysia
OJK	14 Juli 2025 July 14, 2025	0910/VII/DIR-WOM/2025	Penyampaian tindak lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan) atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	14 Juli 2025 July 14, 2025	337/VII/CS/2025	Laporan Bukti Iklan Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Seri A Tahun 2024 Report on Evidence of Advertisement for the Settlement of Public Offering of WOM Finance Shelf-Registered Bonds V Phase I Series A Year 2024
OJK	15 Juli 2025 July 15, 2025	0912/VII/DIR-WOM/2025	Laporan Nihil atas Pemblokiran secara serta merta DTTOT Nil Report on the Immediate Blocking of DTTOT
OJK	17 Juli 2025 July 17, 2025	0919/VII/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-154/PL.111/2025 tentang Konfirmasi dan Permintaan Penyampaian *Action Plan* Laporan Debitur SLIK PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-154/PL.111/2025 on the Confirmation and Request for Submission of the Action Plan for the Company's SLIK Debtor Report, dated January 13, 2025 ("OJK Letter")
OJK	17 Juli 2025 July 17, 2025	0920/VII/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-8/KS.12/2025 tentang Koreksi Laporan Debitur SLIK dalam Rangka Evaluasi Kualitas Data Laporan Debitur SLIK terkait Data Debitur Perseorangan tertanggal 13 Januari 2025 ("Surat OJK") Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-8/KS.12/2025 regarding Correction of the SLIK Debtor Report in the Context of Evaluating the Quality of SLIK Debtor Data related to Individual Debtor Data, dated January 13, 2025 ("OJK Letter")

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	18 Juli 2025 July 18, 2025	0935/VII/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-112/KS.12/2025 tertanggal 16 Mei 2025 perihal Himbauan Penyelesaian Tindak Lanjut Koreksi Laporan Debitur SLIK dalam Rangka Evaluasi Kualitas Data Laporan Debitur Perorangan SLIK ("Surat OJK"). Submission of Response by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-112/KS.12/2025 dated May 16, 2025 regarding the Appeal for Completion of the Follow-Up on SLIK Debtor Report Corrections in the Context of Evaluating the Quality of Individual Debtor Data ("OJK Letter")
OJK	22 Juli 2025 July 22, 2025	0941/VII/DIR-WOM/2025	Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-50/EP.11/2025 tertanggal 15 Juli 2025 perihal Permintaan Informasi mengenai Proses Bisnis Penjualan NPL/NPF ("Surat OJK") Response by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-50/EP.11/2025 dated July 15, 2025 regarding the Request for Information on the Business Process of NPL/NPF Sales ("OJK Letter")
OJK	23 Juli 2025 July 23, 2025	0951/VII/DIR-WOM/2025	Penyampaian Data/Dokumen Pendukung sebagai Kelengkapan Dokumen Permohonan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Persetujuan Penempatan Sistem Elektronik *Governance, Risk, and Compliance Solution* (GRC) pada Pusat DATA dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Maybank *Group* Kuala Lumpur, Malaysia Submission of Supporting Data/Documents as Part of the Completeness of the Application by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") for Approval of the Placement of the Governance, Risk, and Compliance (GRC) Electronic System at the Data Center and/or Disaster Recovery Center at Maybank Group, Kuala Lumpur, Malaysia
OJK	28 Juli 2025 July 28, 2025	0959/VII/DIR-WOM/2025	Surat peningkatan KSKC menjadi KC Purworejo Letter on the Upgrade of KS/KC to Purworejo Branch Office
OJK	30 Juli 2025 July 30, 2025	352/VII/CS/2025	Penyampaian Laporan Keuangan Interim tanggal 30 Juni 2025 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Interim Financial Statements dated June 30, 2025, and for the six-month period ended on that date (Unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	30 Juli 2025 July 30, 2025	353/VII/CS/2025	Penyampaian Laporan Keuangan Interim tanggal 30 Juni 2025 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Interim Financial Statements dated June 30, 2025, and for the six-month period ended on that date (Unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	30 Juli 2025 July 30, 2025	355/VII/CS/2025	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Interim tanggal 30 Juni 2025 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Evidence of Publication of Interim Financial Statements dated June 30, 2025, and for the six-month period ended on that date (Unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	30 Juli 2025 July 30, 2025	356/VII/CS/2025	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Interim tanggal 30 Juni 2025 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Evidence of Publication of Interim Financial Statements dated June 30, 2025, and for the six-month period ended on that date (Unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	31 Juli 2025 July 31, 2025	358/VII/CS/2025	Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis Tahunan per Juni 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the Annual Business Plan Realization Report as of June 2025 for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	7 Agustus 2025 August 7, 2025	367/VIII/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Juli 2024 dan Juli 2025 Submission of a Request for Data on Financing Disbursement Based on Age and Occupation Classification for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the Period of July 2024 and July 2025
OJK	12 Agustus 2025 August 12, 2025	1008/VIII/DIR-WOM/2025	Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1632/PL.111/2025 tentang Konfirmasi dan Permintaan Penyampaian *Action Plan* Laporan Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perseroan tanggal 28 Juli 2025 ("Surat OJK") Response by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Financial Services Authority Letter Number S-1632/PL.111/2025 on the Confirmation and Request for Submission of the Action Plan for the Company's SLIK Debtor Report, dated July 28, 2025 ("OJK Letter")

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	22 Agustus 2025 August 22, 2025	1023/VIII/DIR-WOM/2025	Penyampaian Data/Dokumen Pendukung sebagai Kelengkapan Dokumen Permohonan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Persetujuan Penempatan Sistem Elektronik *Governance, Risk, and Compliance Solution* (GRC) pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Maybank *Group* Kuala Lumpur, Malaysia Submission of Supporting Data/Documents as Part of the Completeness of the Application by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") for Approval of the Placement of the Governance, Risk, and Compliance (GRC) Electronic System at the Data Center and/or Disaster Recovery Center at Maybank Group, Kuala Lumpur, Malaysia
OJK	27 Agustus 2025 August 27, 2025	1047/VIII/DIR-WOM/2025	Pindah alamat KC Mogot Relocation of Mogot Branch Office
OJK	27 Agustus 2025 August 27, 2025	1048/VIII/DIR-WOM/2025	Pindah alamat KC UUS Daan Mogot Relocation of UUS Daan Mogot Branch Offices
OJK	9 September 2025 September 9, 2025	381/IX/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Agustus 2024 dan Agustus 2025 Submission of a Request for Data on Financing Disbursement Based on Age and Occupation Classification for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the Period of August 2024 and August 2025
OJK	19 September 2025 September 19, 2025	1106/IX/DIR-WOM/2025	Penyampaian Informasi Keberlakuan Peraturan Internal Perseroan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) guna pemenuhan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Submission of Information on the Applicability of the Company's Internal Regulations by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") for Self-Assessment to Comply with OJK Regulation Number 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector
OJK	30 September 2025 September 30, 2025	1134/IX/DIR-WOM/2025	Penunjukan Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia Appointment of the Independent Commissioner of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") as a Member of the Integrated Governance Committee in the Maybank Indonesia Financial Conglomerate
OJK	6 Oktober 2025 October 6, 2025	393/X/CS/2025	Laporan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk ("Perseroan") Report on Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (the "Company")
OJK	9 Oktober 2025 October 9, 2025	399/X/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode September 2024 dan September 2025 Submission of Request for Data on Financing Disbursement Based on Age and Occupation Classification of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the Period of September 2024 and September 2025
OJK	9 Oktober 2025 October 9, 2025	1183/X/DIR-WOM/2025	Penyampaian Tindak Lanjut PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Langsung dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Tahun 2024 Submission of Follow-Up by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Commitments from the Financial Services Authority ("OJK") On-Site Examination Results for 2024
OJK	14 Oktober 2025 October 14, 2025	1206/X/DIR-WOM/2025	Laporan perubahan susunan pengurus WOM Report on Changes to the Management Structure of WOM
OJK	14 Oktober 2025 October 14, 2025	1207/X/DIR-WOM/2025	Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama WOM Report on Updating Data and Domicile Information from WOM's Principal Parties
OJK	28 Oktober 2025 October 28, 2025	1242/X/DIR-WOM/2025	Laporan peningkatan status kantor selain kantor cabang menjadi Kantor Cabang Tanjung Jabung Barat Report on the Upgrade of Offices Other than Branch Offices to Branch Office Tanjung Jabung Barat
OJK	28 Oktober 2025 October 28, 2025	1243/X/DIR-WOM/2025	Laporan pembukaan Kantor Cabang Luwu Timur Report on the Opening of Luwu Timur Branch Office
OJK	29 Oktober 2025 October 29, 2025	1251/X/DIR-WOM/2025	Penyampaian Simulasi Penilaian Sendiri PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") atas Penerapan Tata Kelola yang Baik Berdasarkan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("Rancangan SEOJK"). Submission of Self-Assessment Simulation by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on the Implementation of Good Governance Based on the Draft Financial Services Authority Circular Letter on Good Governance Implementation Reports for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions ("SEOJK Draft")

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	30 Oktober 2025 October 30, 2025	416/X/CS/2025	Penyampaian Laporan Keuangan Interim tanggal 30 September 2025 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Interim Financial Statements dated September 30, 2025, and for the nine-month period then ended (unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	11 November 2025 November 11, 2025	423/XI/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode Oktober 2024 dan Oktober 2025 Submission of Request for Data on Financing Disbursement Based on Age and Occupation Classification of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the Period of October 2024 and October 2025
OJK	12 November 2025 November 12, 2025	1306/XI/DIR-WOM/2025	Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. ("Perseroan") terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2390/PL.111/2025 perihal Pembinaan terkait Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tertanggal 7 November 2025 ("Surat OJK") Response by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to the Financial Services Authority Letter Number S-2390/PL.111/2025 regarding Guidance on the Operational Expense to Operating Income Ratio of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dated November 7, 2025 ("OJK Letter")
OJK	25 November 2025 November 25, 2025	426/XI/CS/2025	Penyampaian Hasil Pemeringkatan Efek Bersifat Utang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dan Hasil Pemeringkatan atas Perseroan Submission of Rating Results for Debt Securities of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") and Rating Results for the Company
OJK	26 November 2025 November 26, 2025	1334/XI/DIR-WOM/2025	Perihal Persetujuan Direksi atas Penunjukan dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2025 Regarding the Board of Directors' Approval for the Appointment and Determination of Public Accountant Fees for the Audit of the Company's 2025 Financial Statements
OJK	28 November 2025 November 28, 2025	430/XI/CS/2025	Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Tahunan 2026 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the 2026 Annual Business Plan Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	28 November 2025 November 28, 2025	431/XI/CS/2025	Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Tahunan 2026 Unit Usaha Syariah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the 2026 Annual Business Plan Report of Sharia Business Unit of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	28 November 2025 November 28, 2025	432/XI/CS/2025	Penyampaian Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the 2026 Sustainable Finance Action Plan Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	28 November 2025 November 28, 2025	1342/XI/DIR-WOM/2025	Pengajuan Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Penunjukan AP dan Penetapan Honorarium Jasa Audit WOM Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 Submission of Request for Board of Commissioners' Approval on the Appointment of a Public Accountant and Determination of Audit Service Fees for WOM for the Financial Year Ended December 31, 2025
OJK	28 November 2025 November 28, 2025	1348/XI/DIR-WOM/2025	Permohonan Pembukaan Akses kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") untuk Melakukan Koreksi *Credit Information File* ("CIF") pada Sistem Layanan Informasi Keuangan ("SLIK") Request for Access by PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") to Make Corrections to the Credit Information File ("CIF") in the Financial Information Services System ("SLIK")
OJK	8 Desember 2025 December 8, 2025	1371/XII/DIR-WOM/2025	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun 2025 pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Report on the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the Audit of the 2025 Annual Historical Financial Information of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
OJK	10 Desember 2025 December 10, 2025	454/XII/CS/2025	Penyampaian Permintaan Data Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Usia dan Pekerjaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") periode November 2024 dan November 2025 Submission of a Request for Data on Financing Distribution Based on Age and Occupation Classification of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") for the Period of November 2024 and November 2025

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
OJK	17 Desember 2025 December 17, 2025	1422/XII/DIR-WOM/2025	Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. ("Perseroan") atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-239/PL.02/2025 tertanggal 21 November 2025 perihal Penyelarasan Berkala Basis Data Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, serta Lembaga Jasa Keuangan (PVML) ("Surat OJK") Response of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") to the Financial Services Authority Letter Number S-239/PL.02/2025 dated November 21, 2025, on the Periodic Alignment of Database on Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Sharia Supervisory Board of the Financing Institution Industry, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (PVML) (the "OJK Letter").
OJK	30 Desember 2025 December 30, 2025	1439/XII/DIR-WOM/2025	Tanggapan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-546/PL.11/2025 perihal Permintaan Data, Informasi, dan Dokumen mengenai Dampak dan Tindak Lanjut Terkait Dampak Bencana Alam di Wilayah Sumatera tertanggal 18 Desember 2025 ("Surat OJK") Response of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company") to the Financial Services Authority Letter Number S-546/PL.11/2025 on the Request for Data, Information, and Documents on the Impact and Follow-up Actions Related to the Impact of Natural Disasters in Sumatra Region, dated December 18, 2025 ("OJK Letter").
Bursa Efek Indonesia **Indonesia Stock Exchange**			
BEI IDX	23 Januari 2025 January 23, 2025	017/I/CS/2025	Konfirmasi Kriteria Satu *Group* Perusahaan Confirmation of One Group Company Criteria
BEI IDX	4 Februari 2025 February 4, 2025	031/II/CS/2025	Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Laporan Data Entitas Anak dan Manajemen Entitas Anak Perusahaan Tercatat Response to Request for Explanation on Subsidiary Data and Management of Subsidiary Companies of the Listed Company
BEI IDX	10 Maret 2025 March 10, 2025	074/III/CS/2025	Rencana Penyelenggaraan *Public Expose* Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun 2025 Plan for the Annual Public Expose of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 2025
BEI IDX	20 Maret 2025 March 20, 2025	214/III/CS/2025	Penyampaian Materi *Public Expose* PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Tahun 2025 Submission of Materials for the 2025 Public Expose of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
BEI IDX	21 Maret 2025 March 21, 2025	217/III/CS/2025	Koreksi atas Penyampaian Materi *Public Expose* PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") Tahun 2025 Correction of the Materials Submitted for the 2025 Public Expose of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company")
BEI IDX	27 Maret 2025 March 27, 2025	224/III/CS/2025	Penyampaian Laporan Pelaksanaan *Public Expose* Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the Implementation Report of the Annual Public Expose of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
BEI IDX	20 Juni 2025 June 20, 2025	319/VI/CS/2025	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material - Kesiapan Dana Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Seri A Tahun 2024 Information Disclosure or Material Fact Report – Readiness of Funds for Redemption of the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase I Series A Year 2024
BEI IDX	14 Juli 2025 July 14, 2025	334/VII/CS/2025	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material - Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Seri A Tahun 2024 Information Disclosure or Material Fact Report – Redemption of the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase I Series A Year 2024
BEI IDX	14 Juli 2025 July 14, 2025	335/VII/CS/2025	Laporan Bukti Iklan Pelunasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Seri A Tahun 2024 Report on Proof of Advertisement for the Redemption of the Sustainable Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds V Phase I Series A Year 2024
BEI IDX	30 Juli 2025 July 30, 2025	351/VII/CS/2025	Penjelasan atas Perubahan Lebih dari 20% pada jumlah Aset dan/atau jumlah Liabilitas PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Explanation of Changes Exceeding 20% in Total Assets and/or Total Liabilities of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
BEI IDX	30 Juli 2025 July 30, 2025	354/VII/CS/2025	Penyampaian Laporan Keuangan Interim tanggal 30 Juni 2025 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Interim Financial Statements as of June 30, 2025, and for the Six-Month Period Ended on that Date (Unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Regulator	Tanggal Surat Letter Date	Nomor Surat Letter Number	Perihal Subject
BEI IDX	30 Juli 2025 July 30, 2025	357/VII/CS/2025	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Interim tanggal 30 Juni 2025 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Proof of Publication of Interim Financial Statements as of June 30, 2025, and for the Six-Month Period Ended on that Date (Unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
BEI IDX	6 Oktober 2025 October 6, 2025	395/X/CS/2025	Perubahan Pengurus Perseroan Changes to the Company's Management
BEI IDX	30 Oktober 2025 October 30, 2025	418/X/CS/2025	Penyampaian Laporan Keuangan Interim tanggal 30 September 2025 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (Tidak Diaudit) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Interim Financial Statements as of September 30, 2025, and for the Nine-Month Period Ended on that Date (Unaudited) of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
BEI IDX	25 November 2025 November 25, 2025	427/XI/CS/2025	Penyampaian Hasil Pemeringkatan Efek Bersifat Utang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") dan Hasil Pemeringkatan atas Perseroan Submission of Debt Securities Rating Results of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") and Rating Results on the Company

AUDIT INTERNAL

Perseroan membangun mekanisme pengawasan internal yang dijalankan secara independen. Melalui fungsi audit yang terstruktur, Audit Internal melakukan penelaahan atas berbagai aspek operasional guna mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, termasuk ketepatan penerapan pengendalian serta keselarasan aktivitas dengan kebijakan Perseroan dan ketentuan eksternal. Pengaturan pelaporan langsung kepada Presiden Direktur menegaskan independensi fungsi tersebut sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaannya.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Untuk memperkuat penerapan tata kelola yang baik, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai ketentuan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA AUDIT INTERNAL

Pengangkatan dan pemberhentian Audit Internal Division Head dilakukan oleh Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Piagam Audit Internal yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 01 Juli 2024. Piagam tersebut mencakup ketentuan pokok, antara lain visi, misi, tujuan, struktur, ruang lingkup, wewenang, serta tugas dan tanggung jawab Audit Internal. Selain itu, diatur pula aspek akuntabilitas, independensi, hubungan dengan auditor eksternal, standar profesional, kode etik, serta persyaratan keanggotaan, sehingga menjadi pedoman yang jelas dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik.

INTERNAL AUDIT

The Company has established an independent internal control mechanism. Through a structured audit function, Internal Audit conducts reviews of various operational aspects to identify areas requiring improvement, including the accuracy of control implementation and the alignment of activities with the Company's policies and external regulations. The direct reporting arrangement to the President Director reinforces the independence of the function and supports the effectiveness of its implementation.

LEGAL BASIS FOR ESTABLISHMENT

In order to strengthen the implementation of good corporate governance, the Company has established the Internal Audit Unit in accordance with POJK Number 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

AUTHORITY TO APPOINT AND DISMISS THE INTERNAL AUDIT HEAD

The appointment and dismissal of the Internal Audit Division Head are carried out by the President Director and approved by the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee.

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Internal Audit Unit performs its supervisory function based on the Internal Audit Charter, which was approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners on July 1, 2024. The Charter outlines key provisions including the vision, mission, objectives, structure, scope, authorities, as well as the duties and responsibilities of Internal Audit. It also regulates aspects of accountability, independence, relationships with external auditors, professional standards, code of conducts, and membership requirements, thereby serving as a clear guideline in supporting the implementation of good governance.

PROFIL AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT'S PROFILE



Ignatius Prasetya
Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Internal Audit Unit Head

Warga negara Indonesia
Indonesian citizen

45 tahun per 31 Desember 2025
45 years old as of December 31, 2025

Periode Jabatan
Term of Office

1 September 2018 s.d Saat Ini
September 1, 2018 to Present

Domisili
Domicile

Jakarta
Jakarta

Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi

Akuntansi dari STIE Perbanas tahun 2002

Pengalaman Kerja

- Internal Audit Officer, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2006 - 2009)
- Internal Audit Division Head, PT PT Bima Multi Finance (2014 - 2017)
- Internal Audit Division Head, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2017 - saat ini)

Dasar Hukum Penunjukan

Berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan internal audit division Head per 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur.

Educational Background and/or Certifications

Bachelor's Degree in Accounting – STIE Perbanas in 2002

Work Experience

- Internal Audit Officer, PT BFI Finance Indonesia Tbk (2006 – 2009)
- Internal Audit Division Head, PT Bima Multi Finance (2014 – 2017)
- Internal Audit Division Head, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2017 – present)

Legal Basis for Appointment

Based on the Decision Letter on the Appointment of the Internal Audit Division Head dated August 31, 2018, signed by the President Director.

INDEPENDENSI

Fungsi Internal Audit ditempatkan secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Dalam melaksanakan tugasnya, IA menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan Komisaris melalui Komite Audit.

Audit Internal akan mempertahankan independensi dari setiap lini dan unit kerja serta hanya akan mempertanggungjawabkan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Untuk menjaga independensi Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya maka:

1. Kecukupan akses komunikasi dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. Mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Komisaris dan Direksi agar Audit Internal dapat bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan terbebas dari segala gangguan.
3. Audit Internal tidak menjalankan tugas operasional baik di Kantor Pusat, Bisnis Unit maupun Cabang. Dalam hal auditor internal yang karena situasi tertentu, mendapatkan penugasan sementara dari Perusahaan untuk mendukung jalannya operasional perusahaan dan/atau penugasan auditor internal baru yang berasal dari unit kerja tertentu harus menjalani masa tunggu (*cooling-off period*) sebelum melakukan penugasan audit/konsultasi pada unit kerja sebelumnya, minimum dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

INDEPENDENCE

The Internal Audit function is positioned independently and reports directly to the President Director. In carrying out its duties, IA submits reports to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Internal Audit will maintain independence from all business lines and work units and is accountable solely to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. In order to maintain Internal Audit's independence in carrying out its duties, the following measures are implemented:

1. Ensuring adequate access for communication with the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
2. Receiving full support from the Board of Commissioners and the Board of Directors to ensure that Internal Audit can operate in a conducive environment free from any interference.
3. Internal Audit does not perform operational duties at the Head Office, Business Units, or Branches. In circumstances where an internal auditor, due to specific conditions, is temporarily assigned by the Company to support operational activities and/or when a newly appointed internal auditor originates from another work unit, a cooling-off period of at least 12 (twelve) months must be observed before performing audit/consultation assignments in their previous unit.



4. Audit Internal tidak melakukan atau menyetujui transaksi atau aktivitas di luar aktivitas Audit Internal.
5. Audit Internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, *scope*, cara, teknik dan pendekatan audit disertai dengan keahlian yang memadai dan kecermatan professional.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal adalah:

1. Menyusun strategi dan rencana kerja Audit Internal dengan pendekatan risiko (*risk based approach*) yang memadai. Rencana ini harus sejalan dengan Piagam Audit Internal dan tujuan bisnis perusahaan serta disetujui Presiden Direktur dan Komite Audit serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Mengimplementasikan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tersebut di atas, termasuk penugasan audit khusus atas permintaan Presiden Direktur maupun Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Membuat analisa, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung (*on-site audit*) dan pengawasan secara tidak langsung dan berkelanjutan (*continuous audit*) dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.
4. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan *review* dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan perusahaan.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Menyusun rencana sumber daya manusia Audit Internal (*man power planning*) dan memelihara profesionalisme Audit Internal dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai melalui pendidikan yang berkesinambungan dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi.
9. Membantu tata kelola yang baik di Perseroan, efektivitas manajemen risiko dan implementasi kode etik.
10. Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja Audit Internal secara berkala.
11. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit (*quality assurance*) yang dilakukan melalui supervisi terhadap pekerjaan Audit Internal dan mewajibkan Audit Internal untuk me*review* kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta memperhatikan penilaian mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

4. Internal Audit does not execute or approve transactions or activities outside the scope of Internal Audit.
5. Internal Audit has the freedom to determine auditing methods, scope, processes, techniques, and approaches, supported by adequate competence and professional due care.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of Internal Audit include:

1. Preparing Internal Audit strategies and work plans using an adequate risk-based approach, ensuring alignment with the Internal Audit Charter and the Company's business objectives, subject to approval by the President Director and the Audit Committee, and reporting the plans to the Board of Commissioners.
2. Implementing the approved work plan, including undertaking special audit assignments at the request of the President Director or the Board of Commissioners through the Audit Committee.
3. Conducting analysis, examinations, and assessments of efficiency and effectiveness in the areas of finance, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities through on-site audits and performing indirect and continuous monitoring (continuous audit) to achieve the defined mission, objectives, and strategies.
4. Contributing to strengthening effective controls by reviewing and evaluating internal controls across all business units within the Company.
5. Providing recommendations for improvements and delivering objective information on audited activities to all levels of management to support enhancements to systems, procedures, budgets, and policies.
6. Preparing audit reports and submitting those reports to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
7. Monitoring, analyzing, and reporting on the implementation status of recommended corrective actions.
8. Preparing Internal Audit human resources plans (manpower planning) and maintaining Internal Audit professionalism through adequate knowledge, skills, experience, certification programs, continuous education, and participation in professional organizations.
9. Supporting good governance in the Company, effective risk management, and the implementation of the code of conducts.
10. Preparing and updating Internal Audit guidelines as well as work systems and procedures on a periodic basis.
11. Conducting continuous evaluations of audit quality (quality assurance) through supervision of Internal Audit activities, requiring internal auditors to review the quality of their work, and considering the results of external quality assessments.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan per 31 Agustus 2018 Divisi Audit Internal dipimpin oleh Internal Audit Division Head yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan secara fungsional berhubungan dengan Komite Audit. Di dalam organisasi Perusahaan, kedudukan Divisi Audit berada satu tingkat di bawah Presiden Direktur. Laporan hasil audit internal secara periodik disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Untuk laporan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan signifikan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Direksi Perseroan bertanggung jawab merancang Sistem Pengendalian Internal, mencakup seluruh prosedur operasi standar Perseroan dan jalur pelaporan.

Berikut ini merupakan struktur organisasi Divisi Audit dan kedudukannya dalam Perseroan:

STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT

In accordance with Decision as of August 31, 2018 the Internal Audit Division is led by the Internal Audit Division Head, who reports to the President Director and functionally communicates with the Audit Committee. Within the Company's organizational structure, the Internal Audit Division is positioned one level below the President Director. Internal audit reports are periodically submitted to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee and the Director overseeing the Compliance Function.

Reports on the monitoring of corrective action follow-ups for significant findings are submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee and the Director overseeing the Compliance Function. The Company's Board of Directors is responsible for designing the Internal Control System, which includes all standard operating procedures of the Company and reporting lines.

Below is the organizational structure of the Internal Audit Division and its position within the Company:

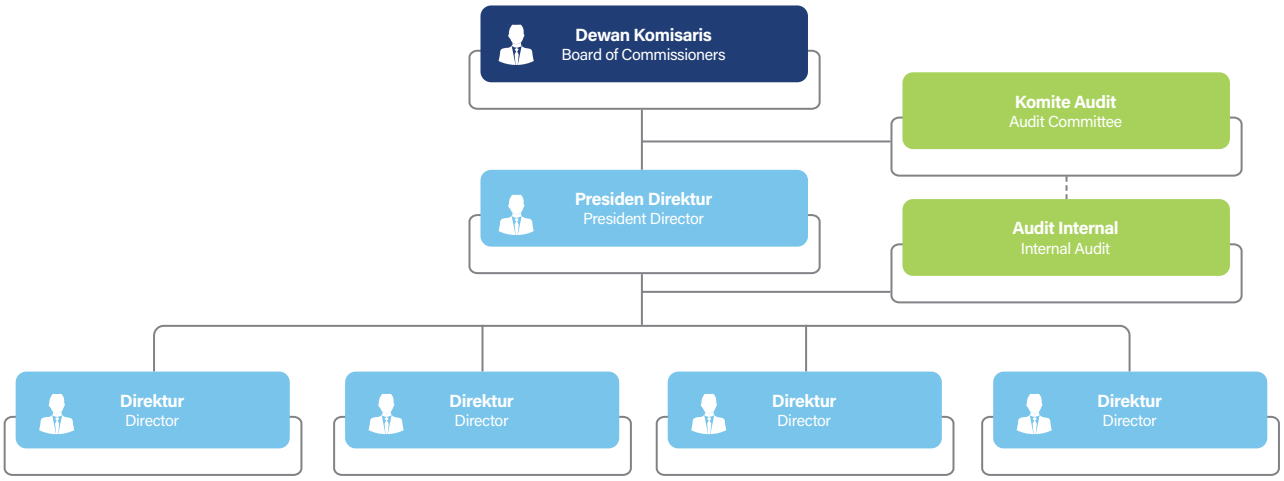

Per 31 Desember 2025, jumlah pegawai Audit Internal berjumlah 36 orang yang terdiri dari:

As of December 31, 2025, the number of Internal Audit employees is 36 personnel, consisting of:

Jabatan Position	**Jumlah** Total
Internal Audit Division Head	1
Internal Audit Department Head	5
Specialist	9
Section Head	9
Officer Audit	11
Staff	1

SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT'S PROFESSIONAL CERTIFICATION

Sertifikasi Certification	**Lembaga** Institution	**Nama** Name
Information Security Management System (ISMS) Auditor/ Lead Auditor Training Course (BS ISO/IEC 27001:2013) (PR320).	BSI Training Academy	Ignatius Prasetya
Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Manajerial Basic Financing Certification – Managerial	Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) Indonesian Financing Profession Certification Institute (SPPI)	▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Indra Yudha
Certified Data Protection Officer	Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia (APPDI) Indonesian Data Protection Practitioners Association (APPDI)	Ignatius Prasetya
Certified Information System Audit (CISA)	ICASA	Muhammad Reiza Indrawan
Qualification 4 Field of Bank Risk Management	BNSP	Dimas Erlangga Mantik
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Auditor Teknik Informasi) Information and Communication Technology (ICT) Auditor	BNSP	Dimas Erlangga Mantik
Teknisi Akuntansi Accounting Technician	BNSP	Sarah Fatimah
Brevet A & B	IAI ATPI	Sarah Fatimah
PPAK (Pendidikan Profesi Akuntansi) PPAK (Professional Accounting Education)	Univ. Brawijaya	Sarah Fatimah

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN ANGGOTA SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

SDM Unit Audit Internal diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan peningkatan kompetensi serta memperoleh sertifikasi profesional.

Berikut pendidikan dan pelatihan SDM Audit Internal Perseroan tahun 2025:

EDUCATION AND/OR TRAINING FOR INTERNAL AUDIT WORK UNIT MEMBERS

Human resources in the Internal Audit Unit are given the opportunity to participate in training programs and competency development, as well as to obtain professional certifications.

The following are the education and training programs for the Company's Internal Audit human resources in 2025:

No.	**Nama Pelatihan/Seminar** Training/Seminar Name	**Tempat** Location	**Penyelenggara** Organizer	**Peserta** Participants	**Tanggal Pelaksanaan** Date
1	Webinar OJK - *How to Achieve Peak Performance in* 2025	*Online*	OJK Institute	▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Agung Tri Cahyono	17 Januari 2025 January 17, 2025
2	Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan Digital Transformation: Technology Innovation Trends in the Financial Sector	*Online*	OJK Institute	▪ Ignatius Prasetya ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Lydia Margaretha P	23 Januari 2025 January 23, 2025
3	*Risk in Focus* 2025 : Indonesia	*Online*	IIA Indonesia	▪ Karmanto ▪ Magu Oktavian ▪ Dicky Aprialdi ▪ Agung Tri Cahyono	24 Januari 2025 January 24, 2025

No.	Nama Pelatihan/Seminar Training/Seminar Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
4	*Sharing Session*: Perlindungan Data Pribadi dan *Business Continuity Management* Sharing Session: Personal Data Protection and Business Continuity Management	*Online*	Maybank Indonesia	▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Indra Yudha ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Rika Kurnia ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Syahrial ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Andri Lesmana ▪ Helen Herlina ▪ Achmad Fadjarudin ▪ Faris Afif ▪ Fatia Azzahra ▪ Aria Canggih Wicaksono ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Arif Prasetyo ▪ Steffie ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Lydia Margaretha P ▪ Labbas Paniroi	24 Januari 2025 January 24, 2025
5	*Sharing Session*: APM, LHA dan WPS Tahun 2025 Sharing Session: APM, LHA, and WPS in 2025	*Online*	Development & QA Audit	▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Indra Yudha ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Rika Kurnia ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Syahrial ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Andri Lesmana ▪ Helen Herlina ▪ Achmad Fadjarudin ▪ Faris Afif ▪ Fatia Azzahra ▪ Aria Canggih Wicaksono ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Arif Prasetyo ▪ Steffie ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Lydia Margaretha P ▪ Labbas Paniroi ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Arief Soedjono ▪ Karmanto ▪ Magu Oktavian ▪ Laura Kristin Simorangkir ▪ Dicky Aprialdi ▪ R. Adhitya Firman Abdi ▪ Jihan Hanun Kusuma	30 Januari 2025 January 30, 2025
6	Audit Teknologi Informasi Berbasis CISA Information Technology Audit Based on CISA	*Offline*	DIORAMA	Budi Gunawan	6-7 Februari 2025 February 6-7, 2025
7	*Imboost Your Spirit: Cultivating Positivity For a Balanced and Fulfilling Life Confirmation*	*Online*	OJK Institute	▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Sendy Broto Kusumi ▪ Budi Gunawan ▪ Lydia Margaretha P	14 Februari 2025 February 14, 2025
8	*Outlook* Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 *Economic and Financial Outlook for 2025*	*Online*	OJK Institute	▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Agung Tri Cahyono	20 Februari 2025 February 20, 2025

No.	Nama Pelatihan/Seminar Training/Seminar Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
9	Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability	*Online*	OJK Institute	▪ Agung Tri Cahyono ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Budi Gunawan	25 Februari 2025 February 25, 2025
10	*Sustainability Accounting and Reporting in the Financial Services*	*Online*	OJK Institute	▪ Agung Tri Cahyono ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Budi Gunawan ▪ Lydia Margaretha P	06 Maret 2025 March 06, 2025
11	Dukungan Dewan dan Manajemen Senior Dalam Tata Kelola Audit Internal Support from the Board and Senior Management in Internal Audit Governance	*Online*	IIA Indonesia	▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Budi Gunawan ▪ Sendy Broto Kusumo	13 Maret 2025 March 13, 2025
12	Membangun Interaksi Efektif Dengan Dewan Building Effective Interaction with the Board	*Online*	IIA Indonesia	Budi Gunawan	20 Maret 2025 March 20, 2025
13	*Internal Quality Assessment: How Effective is Your Internal Audit Function*	*Online*	Wolters Kluwer	▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Budi Gunawan	25 Maret 2025 March 25, 2025
14	*Idea Talks Volume 7 Tahun 2025: Credit Scoring* Idea Talks Volume 7, 2025: Credit Scoring	*Online*	OJK Institute	▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Sendy Broto Kusumo	21 April 2025 April 21, 2025
15	*Insurance Revolution: How AI is Transforming the Underwriting and Optimizing Business Processes*	*Online*	OJK Institute	▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Sendy Broto Kusumo	24 April 2025 April 24, 2025
16	*Driving Audit Quality with Business Rules, SmartCheck and A.I.*	*Online*	Wolters Kluwer	▪ Budi Gunawan ▪ Sendy Broto Kusumo	29 April 2025 April 29, 2025
17	Peran Strategis Industri Jasa Keuangan dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah The Strategic Role of the Financial Services Industry in Promoting Regional Economic Development	*Online*	OJK Institute	▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Lydia Margaretha P	08 Mei 2025 May 08, 2025
18	Efek Domino Tarif Trump: Ancaman atau Peluang bagi Ekonomi Indonesia? Trump's Tariff Domino Effect: Threat or Opportunity for the Indonesian Economy?	*Online*	OJK Institute	▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Labbas Paniroi ▪ Lydia Margaretha P	15 Mei 2025 May 15, 2025
19	*Critical Thinking*	*Online*	HC Learning	▪ Andri Lesmana ▪ Aditya Rangga Kusuma	15 Mei 2025 May 15, 2025
20	*Effective Presentasion Skill Batch 2* Effective Presentation Skills – Batch 2	*Online*	HC Learning	▪ Labbas Paniroi ▪ Lydia Margaretha P	16 Mei 2025 May 16, 2025
21	*Customer Experience: Strategies for Success in Digital Era*	*Online*	OJK Institute	▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Ahmad Fariz Has	22 Mei 2025 May 22, 2025

No.	Nama Pelatihan/Seminar Training/Seminar Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
22	*Idea Talks Volume* 8 - Urgensi Transparansi Keuangan Hijau Pada Lembaga Jasa Keuangan Idea Talks Volume 8 – The Urgency of Green Finance Transparency in Financial Services Institutions	*Online*	OJK Institute	▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Ignatius Prasetya ▪ Labbas Paniroi	26 Mei 2025 May 26, 2025
23	GRC *Career Hack*	*Online*	IIA Indonesia	▪ Budi Gunawan ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Sendy Broto Kusumo	28 Mei 2025 May 28, 2025
24	Bedah Buku: Diorama Keuangan Berkelanjutan Indonesia Book Review: Indonesian Sustainable Finance Diorama	*Online*	OJK Institute	Sendy Broto Kusumo	3 Juni 2025 June 3, 2025
25	*The Future of Cybersecurity: Threats, Challenges, and Innovations*	*Online*	OJK Institute	▪ Syahrial ▪ Rika Kurnia ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Steffie ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Lydia Margaretha P	5 Juni 2025 June 5, 2025
26	*Intermediate Communication Skill Batch 2*	*Online*	HC Learning	Steffie	11 Juni 2025 June 11, 2025
27	*Implementing an Integrated Approach to Assurance Provision*	*Online*	Wolters Kluwer	▪ Budi Gunawan ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Indra Yudha ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Dimas Erlangga Mantik	12 Juni 2025 June 12, 2025
28	Sertifikasi Dasar Manajerial Basic Managerial Certification	*Online*	SPPI	Ignatius Prasetya	12 Juni 2025 June 12, 2025
29	Etos Kerja Head Office Batch 1 Work Ethos – Head Office Batch 1	*Online*	HC Learning	▪ Amalia Safitri Ayu Haryani	13 Juni 2025 June 13, 2025
30	Penerapan ICoFR Untuk Meningkatkan Integritas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Publik Implementation of ICoFR to Enhance Financial Statement Integrity and Public Trust	*Online*	LPPI	▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Sendy Broto Kusumo	13 Juni 2025 June 13, 2025
31	Strategi Aman Transaksi Aset Kripto dan Keuangan Digital: Perlindungan Data Pribadi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia Safe Strategies for Cryptocurrency and Digital Finance Transactions: Personal Data Protection and the Impact of Biometric Technology in Indonesia	*Online*	OJK Institute	▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Andri Lesmana ▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Steffie ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Lydia Margaretha P ▪ Labbas Paniroi	19 Juni 2025 June 19, 2025
32	*Idea Talks Volume* 9 : Digitalisasi Perbankan dari Dua Sudut Pandang Idea Talks Volume 9: Banking Digitalization from Two Perspectives	*Online*	OJK Institute	▪ Steffie ▪ Labbas Paniroi ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Lydia Margaretha P	23 Juni 2025 June 23, 2025

No.	Nama Pelatihan/Seminar Training/Seminar Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
33	IT *Awareness* (Dasar-Dasar Keamanan Siber, Dasar-Dasar Kesadaran Keamanan, Dasar-Dasar Pengelabuan/*Phising*, Pengantar Tentang Perlindungan Data, Permainan *Spot The Phish*: Dasar Permainan) IT Awareness (Cybersecurity Basics, Security Awareness Basics, Phishing Basics, Introduction to Data Protection, Spot the Phish Game: Basic Gameplay)	*Online*	HC Learning	▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Andri Lesmana ▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Indra Yudha ▪ Manika Widya Pangestika ▪ Aria Canggih Wicaksono ▪ Fatia Azzahra ▪ Laura Kristin S ▪ Ade Dwi P ▪ Faris Afif ▪ Helen Herlina ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Dicky Aprialdi ▪ Jihan Hanun Kusuma ▪ Magu Oktavian ▪ R. Adhitya Firman Abdi ▪ Arif Prasetyo ▪ Karmanto ▪ Achmad Fadjarudin ▪ Arief Soedjono ▪ Dimas Erlangga Mantik ▪ Anis Sukarno Putri ▪ M. Reiza Indrawan ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Lydia Margaretha P ▪ Labbas Paniroi ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Sendy Broto Kusumo	23 Juni 2025 June 23, 2025
34	Memutus Mata Rantai Scam: Sinergi dan Strategi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Breaking the Scam Chain: Synergy and Strategies for Consumer Protection in the Financial Sector	*Online*	OJK Institute	▪ Rika Kurnia ▪ Andri Lesmana ▪ Syahrial ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Faris Afif ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Labbas Paniroi ▪ Agung Tri Cahyono	26 Juni 2025 June 26, 2025
35	*Agentic AI in Finance: A New Era of Autonomous Decision Making*	*Online*	OJK Institute	▪ Ignatius Prasetya ▪ Rika Kurnia ▪ Andri Lesmana ▪ Syahrial ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Faris Afif ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Lydia Margaretha Puspaningrum ▪ Labbas Paniroi ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Agung Tri Cahyono	3 Juli 2025 July 3, 2025
36	*Problem Solving & Decision Making (Batch 2)*	*Online*	HC Learning	Magu Oktavian	3 Juli 2025 July 3, 2025
37	Shabu Q2 : Produk Pembiayaan di WOM Finance Shabu Q2: Financing Products at WOM Finance	*Online*	HC Learning	All Dept Head, Specialist and Staff	4 Juli 2025 July 4, 2025
38	Webinar APU PPT & PPPSPM Webinar on AML, CFT & CPF	*Online*	Maybank Indonesia	▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Indra Yudha ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Dimas Erlangga Mantik	9 Juli 2025 July 9, 2025

No.	Nama Pelatihan/Seminar Training/Seminar Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
39	Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM Implementation and Role of the Financial Industry in Business and Human Rights	*Online*	OJK Institute	▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Andri Lesmana ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ R. Adhitya Firman Abdi ▪ Lydia Margaretha P ▪ Steffie ▪ Agung Tri Cahyono	17 Juli 2025 July 17, 2025
40	*Employee Self Promoting* *Employee Self-Promotion*	*Online*	HC Learning	▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Andri Lesmana ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani	17 Juli 2025 July 17, 2025
41	Teknik Pengendalian Kecurangan dan Membangun *Whistleblower System* (WBS) yang Efektif Fraud Control Techniques and Building an Effective Whistleblower System (WBS)	*Online*	Accounting Academy	Aditya Rangga Kusuma	19 Juli 2025 July 19, 2025
42	*Navigating AI in Internal Audit: Opportunities and Challenges*	*Online*	Wolters Kluwer	▪ Budi Gunawan ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ DImas Erlangga Mantik	22 Juli 2025 July 22, 2025
43	*WOM Supervisory Program : PICA & PDCA (Batch: 3)*	*Online*	HC Learning	Labbas Paniroi	22 Juli 2025 July 22, 2025
44	*Building The Global Sustainable Islamic Finance Ecosystem*	*Online*	OJK Institute	▪ Andri Lesmana ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Faris Afif	24 Juli 2025 July 24, 2025
45	Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional : Pembangunan 3 Juta Rumah The Role of the Financial Services Industry in Supporting National Strategic Projects: Construction of 3 Million Houses	*Online*	OJK Institute	▪ Andri Lesmana ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Labbas Paniroi ▪ Lydia Margaretha P	31 Juli 2025 July 31, 2025
46	EQA *Preparation*: *Conformance and Performance = Quality*	*Online*	Wolters Kluwer	Budi Gunawan	5 Agustus 2025 August 5, 2025
47	*Mid-year Market Capital Review* 2025: Evaluasi Kinerja Pasar dan Strategi Investasi ke Depan Mid-Year Market Capital Review 2025: Market Performance Evaluation and Future Investment Strategies	*Online*	OJK Institute	▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Ignatius Prasetya	7 Agustus 2025 August 7, 2025
48	*Personal Branding*	*Online*	HC Learning	▪ Ahmad Fariz Has ▪ Rika Kurnia	8 Agustus 2025 August 8, 2025
49	*Training session Anti-Money Laundering / Countering Financing of Terrorism (AMLCFT) and Anti-Bribery and Corruption (AB&C)*	*Online*	Group Audit	▪ Ignatius Prasetya ▪ Budi Gunawan ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Indra Yudha ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Dimas Erlangga Mantik ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Steffie ▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Dicky Aprialdi ▪ Labbas Paniroi ▪ Lydia Margaretha P ▪ Anis Sukarno Putri ▪ M. Reiza Indrawan	11 Agustus 2025 August 11, 2025

No.	Nama Pelatihan/Seminar Training/Seminar Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
50	*Performing An Effective Quality Assessment*	*Online*	Group Audit	▪ Budi Gunawan ▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial	11 Agustus 2025 August 11, 2025
51	*Intermediate Communication Skill Batch 3*	*Online*	HC Learning	▪ Rika Kurnia ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Agung Tri Cahyono	13 Agustus 2025 August 13, 2025
52	*AI for Reporting and Analysis*	*Online*	HC Learning	▪ Andri Lesmana ▪ Steffie	13 Agustus 2025 August 13, 2025
53	Penerapan Program APU PPT & PPPSM (POJK No 8 Tahun 2023) Implementation of the AML-CFT & CPF Program (POJK Number 8 of 2023)	*Online*	Grajosa Resources	Aditya Rangga Kusuma	13 Agustus 2025 August 13, 2025
54	Dinamika Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Strategi Memperkuat Perekonomian Indonesia Geopolitical Dynamics and National Resilience: Strategies to Strengthen Indonesia's Economy	*Online*	OJK Institute	▪ Ahmad Fariz Has ▪ Faris Afif ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Aditya Rangga Kusuma	14 Agustus 2025 August 14, 2025
55	*COOL SERIES* 22 : Perlindungan Konsumen & Masyarakat *COOL SERIES 22: Consumer & Public Protection*	*Online*	HC Learning	All Specialist & Staff	14 Agustus 2025 August 14, 2025
56	*Effective Presentation Skill*	*Online*	HC Learning	Andri Lesmana	15 Agustus 2025 August 15, 2025
57	Webinar "Mewujudkan Hari Tua yang Sejahtera: Strategi Peningkatan Kepersertaan Dana Pensiun di Sektor Informal Webinar on "Achieving a Prosperous Retirement: Strategies to Increase Pension Fund Participation in the Informal Sector"	*Online*	OJK Institute	▪ Ignatius Prasetya ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Andri Lesmana	21 Agustus 2025 August 21, 2025
58	*Robotic Process Automation*	*Online*	Group Audit	▪ Andri Lesmana ▪ Syahrial ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Lydia Margaretha P ▪ R Firman Abdi ▪ Laura Kristin Simorangkir ▪ Anis Sukarno Putri ▪ M. Reiza Indrawan ▪ Steffie	26 Agustus 2025 August 26, 2025
59	Strategi Peningkatan Daya Saing serta Pendalaman Perbankan dan Pasar Modal Syariah Strategies to Enhance Competitiveness and Deepen Islamic Banking and Capital Markets	*Online*	OJK Institute	▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Reza Eka Nugraha ▪ Lydia Margaretha P	28 Agustus 2025 August 28, 2025
60	Webinar Bedah Buku "*Anti Fraud Journey The Untold Story*: Menapaki Jalan Sunyi Jiwa-Jiwa Pemberani" Webinar Book Review on "Anti-Fraud Journey: The Untold Story: Walking the Silent Path of Brave Souls"	*Online*	ACFE Indonesia	Aditya Rangga Kusuma	6 September 2025 September 6, 2025
61	Webinar "UMKM Mendunia: Strategi Peningkatan Skala Bisnis Menembus Pasar Nasional dan Internasional" Webinar: "SMEs Going Global: Strategies to Scale Businesses into National and International Markets"	*Online*	OJK Institute	Aditya Rangga Kusuma	9 September 2025 September 9, 2025
62	*Problem Solving & Decision Making (Batch 3)*	*Online*	HC Learning	Syahrial	11 September 2025 September 11, 2025
63	*Fraud Detection Blueprint: Five Essential Actions for Audit Professionals*	*Online*	Wolters Kluwer	Budi Gunawan	16 September 2025 September 16, 2025

No.	Nama Pelatihan/Seminar Training/Seminar Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
64	Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum Trends in Money Laundering Methods and Schemes: Strategies for Identification, Mitigation, and Law Enforcement	*Online*	OJK Institute	▪ Syahrial ▪ Rika Kurnia ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Andri Lesmana ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Sendy Broto Kusumo ▪ Budi Gunawan	18 September 2025 September 18, 2025
65	Webinar "*Transformasi Generative AI* : Peluang *Generative Engine Optimization* (GEO) dalam Menggeser Dominasi *Search Engine Optimization* (SEO)" Webinar on "Generative AI Transformation: Opportunities of Generative Engine Optimization (GEO) in Shifting the Dominance of Search Engine Optimization (SEO)"	*Online*	OJK Institute	Aditya Rangga Kusuma	25 September 2025 September 25, 2025
67	*Training Generating Images and Video using Gen AI Tools*	*Online*	Group Audit	▪ Andri Lesmana ▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Lydia Margaretha P	8 Oktober 2025 October 8, 2025
68	Webinar "*Risk Appetite and Risk Culture*: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan" Webinar on "Risk Appetite and Risk Culture: Key Pillars in Strengthening Risk Management in the Financial Sector"	*Online*	OJK Institute	Aditya Rangga Kusuma	9 Oktober 2025 October 9, 2025
69	Webinar "Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan" Webinar on "The Role of Digital Forensics in Handling and Uncovering Financial Crimes"	*Online*	OJK Institute	Aditya Rangga Kusuma	16 Oktober 2025 October 16, 2025
70	*COOL SERIES* 23 : APU, PPT & PPSM COOL SERIES 23: AML, CFT & CPF	*Online*	HC Learning	All Specialist & Staff	16 Oktober 2025 October 16, 2025
71	*Unlocking Audit Efficieny with TeamMate Analytic: From Data Preparation to Expert Automation*	*Online*	Wolters Kluwer	Ahmad Fariz Has	29 Oktober 2025 October 29, 2025
72	BB: *Connected Party Credit Transaction for Business Application*	*Online*	Group Audit	▪ Budi Gunawan ▪ Dimas Erlangga Mantik ▪ Kausarihsan Panggabean ▪ Aditya Rangga Kusuma ▪ Agung Tri Cahyono ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani ▪ Anis Sukarno Putri ▪ Andri Lesmana ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Dicky Aprialdi ▪ Fatia Azzahra ▪ Helen Herlina ▪ Jihan Hanun Kusuma ▪ Labbas Paniroi ▪ Laura Kristin Simorangkir ▪ Lydia Margaretha P ▪ Magu Oktavian ▪ Manika Widya P ▪ M. Reiza Indrawan ▪ Steffie ▪ Syahrial ▪ Rika Kurnia	7 November 2025 November 7. 2025

No.	Nama Pelatihan/Seminar Training/Seminar Name	Tempat Location	Penyelenggara Organizer	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
73	Webinar "Menumbuhkan Generasi Melek Finansial: Memahami Dinamika Ekonomi dan Stabilitas Keuangan sebagai Pilar Perekonomian Nasional" Webinar on "Cultivating a Financially Literate Generation: Understanding Economic Dynamics and Financial Stability as Pillars of the National Economy"	*Online*	OJK Institute	Aditya Rangga Kusuma	11 November 2025 November 11, 2025
74	*Unlocking Efficiency: RPA for Internal Audit*	*Online*	FKSPI	▪ Andri Lesmana ▪ Rika Kurnia ▪ Syahrial ▪ Ahmad Fariz Has ▪ Amalia Safitri Ayu Haryani	14 November 2025 November 14, 2025

PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Guna memastikan tata kelola dan pengendalian internal berjalan optimal, Audit Internal telah melakukan 131 (seratus tiga puluh satu) kegiatan *assurance* pada tahun 2025, pemeriksaan tersebut meliputi:

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT UNIT'S ACTIVITIES

To ensure optimal governance and internal control, Internal Audit conducted 131 (one hundred thirty one) assurance activities in 2025, which included:

No.	Kategori Category	Jumlah Pemeriksaan Total Inspections
1.	Pemeriksaan Cabang Branch Inspection	85 kali | times
2.	Pemeriksaan Gudang Warehouse Inspection	19 kali | times
3.	Pemeriksaan Khazanah Treasury Inspection	7 kali | times
4.	Pemeriksaan Kantor Pusat Head Office Inspection	12 kali | times
5.	Pemeriksaan Teknologi Informasi Information Technology Inspection	8 kali | times

RAPAT AUDIT INTERNAL

Di tahun 2025, Unit Audit Internal tidak menyelenggarakan rapat formal, namun pelaksanaan fungsi Audit Internal tetap dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi yang terdokumentasi secara internal, termasuk penyampaian laporan hasil audit dan pembahasan langsung dengan manajemen, guna memastikan efektivitas pengawasan serta tindak lanjut atas temuan audit.

INTERNAL AUDIT'S MEETINGS

In 2025, the Internal Audit Unit did not hold formal meetings, but still carried out Internal Audit function was still carried out through documented internal coordination and communication mechanism, including the submission of audit reports and direct discussions with management to ensure effective oversight and follow-up on audit findings.

KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Perseroan menunjuk Akuntan Publik independen yang berperan memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Melalui tinjauan objektif ini, Perseroan dapat memastikan bahwa laporan keuangannya telah disusun secara wajar dan memenuhi ketentuan pelaporan yang berlaku. Penunjukan Kantor Akuntan Publik mengikuti prosedur yang diatur dalam POJK Nomor 9 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Melalui proses ini, Perseroan memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2025

Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025, Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
    a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:
        - Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*);
        - Akuntan Publik yang memiliki izin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Industri Keuangan Non Bank dan Profesi Penunjang Pasar Modal;
        - Akuntan Publik yang tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;
        - Akuntan Publik yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
        - Akuntan Publik yang memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan

POLICY ON THE APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANTS

As an effort to enhance transparency and accountability, the Company appoints an independent Public Accountant to provide an opinion on the conformity of the financial statement presentation with Financial Accounting Standards (SAK). Through this objective review, the Company ensures that its financial statements have been prepared fairly and in compliance with applicable reporting requirements. The appointment of the Public Accounting Firm follows the procedures set out in POJK Number 9 on the Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Service Activities. Through this process, the Company obtains assurance that its financial statements have been prepared in accordance with the prevailing regulations.

PUBLIC ACCOUNTANT FOR 2025

In accordance with the resolutions of the Annual GMS held on March 25, 2025, the Shareholders resolved the following:

1. Approving appointing the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025.
2. Approving the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to:
    a. Appointing the Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025, with the following criteria for the Public Accountant being appointed:
        - A Public Accountant from the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited);
        - A Public Accountant licensed and registered with the Financial Services Authority as a Supporting Professional for the Non-Bank Financial Industry and a Supporting Professional for the Capital Market;
        - A Public Accountant listed in the active registry of Public Accountants and Public Accounting Firms maintained by the Financial Services Authority;
        - A Public Accountant registered with the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI);
        - A Public Accountant meeting the requirements stipulated in Articles 7 and 9 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2023 on the Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Service Activities; and



- Akuntan Publik yang memiliki integritas, independensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 termasuk untuk menetapkan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025, termasuk pada proses pelaksanaan rapat, penandatanganan surat-surat terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud, serta pemberitahuan dan pengumuman ke publik (jika diperlukan).

Merujuk pada hasil keputusan RUPS tersebut, Perseroan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan pekerjaan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

1. Bahwa sesuai Surat Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja Nomor 5164/PSS/2025 tertanggal 22 Juli 2025 ("Surat KAP"), terdapat perubahan nama Kantor Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) menjadi Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*). Perubahan dimaksud hanya dilakukan atas nama kantor dan tidak terdapat perubahan terhadap bentuk entitasnya, struktur kantor, anggota tim penugasannya maupun ketentuan dalam perjanjian dan kontrak-kontrak yang ada. Dengan demikian perubahan nama Kantor Akuntan Publik dimaksud menjadi Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) berdampak pada Kantor Akuntan Publik dimaksud masih dikategorikan Kantor Akuntan Publik yang sama sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (6) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa

- A Public Accountant having the integrity, independence, capacity, and capability to audit the Company's financial statements.

b. Determining the amount of honorarium and other terms relating to appoint the Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025, and appointing a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if, for any reason, the appointed Public Accountant and/or the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) is unable to complete auditing the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025, including determining other requirements for appointing the replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm by considering the recommendations of the Company's Audit Committee and applicable laws and regulations.

3. Approving granting the power of attorney with substitution rights to the Board of Directors for carrying out any necessary actions relating to appoint the Public Accountant and the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025, including conducting meetings, signing documents relating to appoint the Public Accountant and the Public Accounting Firm, and submitting and announcing to the public (if required).

Referring to the resolutions of the GMS, the Company has approved to appoint the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to perform the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025.

1. That, in accordance with the Letter from the Public Accounting Firm Purwanto Susanti dan Surja Number 5164/PSS/2025 dated July 22, 2025 ("KAP Letter"), there has been a change in the name of the Public Accounting Firm from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to Purwanto Susanti dan Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited). This change is solely in the firm's name and does not involve any changes to the entity's form, office structure, engagement team members, or provisions in existing agreements and contracts. Therefore, the name change to Purwanto Susanti dan Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) still classifies the firm as the same Public Accounting Firm in accordance with Article 16 paragraph (6) letter b of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities which states

Keuangan yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik dapat dikategorikan sebagai Kantor Akuntan Publik yang sama jika terdapat pendirian atau perubahan nama Kantor Akuntan Publik, namun komposisi Akuntan Publik 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya.

2. Bahwa dengan masih dikategorikannya Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang sama, maka Rekomendasi Komite Audit Tahun 2025, Keputusan Dewan Komisaris Maret 2025, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 25 Maret 2025 berlaku bagi Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*).
3. Bahwa Akuntan Publik Yasir adalah Rekan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) dan telah memenuhi kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

Informasi mengenai KAP dan Akuntan yang melakukan audit Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut:

that a Public Accounting Firm can be considered the same firm if there is a founding or name change of the Public Accounting Firm, provided that 50% (fifty percent) or more of the Public Accountants originate from the previous Public Accounting Firm.

2. That, with Purwanto Susanti dan Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) still categorized as the same Public Accounting Firm, the 2025 Audit Committee Recommendation, the Board of Commissioners' Decision in March 2025, and the Annual General Meeting of Shareholders' resolution on March 25, 2025, apply to Purwanto Susanti dan Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited).
3. That Public Accountant Yasir is a Partner at Purwanto Susanti dan Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) and has met the criteria to be appointed as the Public Accountant to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the Financial year Ended December 31, 2025.

Information on the KAP and the Public Accountants auditing the Company over the past 5 (five) years is presented as follows:

Daftar Akuntan Publik 2021-2025
List of Public Accountants 2021–2025

Tahun Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan Publik** Name of Public Accountant	**Biaya Audit** Audit Fee
2025	KAP Purwanto Susanti dan Surja d/h Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja formerly Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp787.750.000
2024	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp685.000.000
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp648.900.000
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	Rp630.000.000
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Christophorus Alvin Kossim	Rp618.000.000

Daftar Akuntan Publik 2021-2025
List of Public Accountants 2021–2025

Tahun Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan Publik** Name of Public Accountant	**Biaya Audit** Audit Fee
Jasa Lain Selain Audit Keuangan **Other Services Beyond Financial Audit**			
2025	KAP Purwanto Susanti dan Surja d/h Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja formerly Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp208.000.000
2024	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp1.198.000.000
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp198.000.000
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Muhammad Kurniawan	Rp198.000.000
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Christophorus Alvin Kossim	Rp864.670.000

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perseroan menekankan pentingnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai fondasi untuk menjalankan operasional secara andal dan terstruktur. Sistem ini membantu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, sekaligus mendukung transparansi serta efisiensi proses bisnis. Dengan keterlibatan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, Sistem Pengendalian Internal menjadi instrumen penting dalam mengelola risiko dan menjaga keberlanjutan kegiatan Perseroan.

The Company emphasizes the importance of the Internal Control System (SPI) as the foundation for conducting operations reliably and in a structured manner. This system helps ensure compliance with policies and regulations while supporting transparency and efficiency in business processes. With the involvement of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees, the Internal Control System serves as a key instrument in managing risks and maintaining the sustainability of the Company's activities.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL, SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Perseroan menempatkan integritas dan pengawasan sebagai pilar utama dalam seluruh aktivitas bisnisnya. SPI yang diterapkan berfungsi untuk menjaga kepatuhan, akurasi laporan, dan keamanan aset perusahaan, serta dibangun dengan kualitas tinggi untuk mendukung tujuan strategis Perseroan. Keterlibatan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan SPI.

Melalui SPI, Perseroan memperoleh keyakinan memadai dalam memitigasi risiko keuangan, mencegah penyimpangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sistem ini juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas organisasi.

Pelaksanaan SPI diarahkan untuk memastikan laporan keuangan dapat dipercaya, seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Perseroan Terbatas, regulasi OJK, dan kebijakan internal Perseroan. Keberhasilan sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab bersama di setiap tingkat organisasi, sehingga seluruh kegiatan Perseroan dijalankan dengan akuntabilitas, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL, AS WELL AS COMPLIANCE WITH OTHER LAWS AND REGULATIONS

The Company places integrity and oversight as the main pillars across all its business activities. SPI implemented functions to safeguard compliance, accuracy of reporting, and security of Company assets, and is designed with high quality to support the Company's strategic objectives. Active participation of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees is a key factor in the successful implementation of the SPI.

Through the SPI, the Company obtains reasonable assurance in mitigating financial risks, preventing irregularities, and ensuring compliance with applicable regulations. The system also contributes to improving operational efficiency and organizational effectiveness.

The implementation of the SPI is directed at ensuring reliable financial reporting, and that all operational activities are conducted in accordance with laws and regulations, including the provisions of the Limited Liability Company Law, OJK regulations, and the Company's internal policies. The success of the internal control system is a shared responsibility at every level of the organization, ensuring that all Company activities are conducted with accountability, prudence, and good governance.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO

Keandalan sistem pengendalian internal menjadi kunci dalam memastikan efektivitas operasional dan tata kelola perusahaan. COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) adalah komisi internasional yang dibentuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO menekankan bahwa pengendalian internal adalah sebuah proses yang merupakan bagian integral dari aktivitas bisnis yang

INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO

The reliability of the internal control system is key to ensuring operational effectiveness and corporate governance. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) is an international commission established to identify factors that lead to fraud and provide recommendations to reduce its occurrence. COSO emphasizes that internal control is a process that forms an integral part of ongoing business activities within an entity. For management reporting purposes to the public, the COSO framework has become

berjalan secara berkelanjutan dalam suatu entitas. Untuk tujuan pelaporan manajemen kepada publik, kerangka kerja COSO telah menjadi acuan bagi perusahaan publik sebagai model praktik terbaik dalam pengendalian internal. Kerangka kerja ini membantu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, sehingga mendukung tata kelola yang baik dan integritas operasional.

COSO dapat memberikan:
1. Cara untuk menerapkan pengendalian internal dalam setiap entitas, tanpa memperhatikan industri atau struktur legal pada setiap tingkatan dari entitas, unit operasi atau fungsi.
2. Pendekatan prinsip memberikan kemudahan dan memperkenankan untuk membuat, mengimplementasikan dan melaksanakan pengendalian internal – prinsip dapat diterapkan pada tingkatan entitas, operasi dan fungsi.
3. Syarat untuk sistem pengendalian internal yang efektif dengan mempertimbangkan bagaimana komponen dan prinsip tersebut ada dan berfungsi dan bagaimana komponen beroperasi secara bersamaan.
4. Cara untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dan untuk mengembangkan serta mengelola reaksi risiko secara tepat sampai dengan tingkatan yang diterima dan dengan fokus terbaik dalam pengukuran *anti-fraud*.
5. Kesempatan untuk mengembangkan penerapan pengendalian internal laporan keuangan dan laporan lainnya untuk mencapai tujuan laporan, operasional dan kepatuhan.
6. Kesempatan mengurangi ketidakefektifan, pengulangan ataupun ketidakefisienan dalam pengendalian risiko. Dengan demikian akan memberikan nilai minimal untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan perseroan.

Perseroan mengadopsi COSO *framework* sebagai pedoman utama bagi Unit Audit Internal dalam menilai efektivitas pengendalian internal. Model ini menguraikan tiga dimensi tujuan yang menjadi fokus utama pengendalian, yakni:
1. Dimensi Operasi – Efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, termasuk pencapaian kinerja operasional dan keuangan serta keamanan *asset* dibandingkan dengan kerugian.
2. Dimensi Laporan Keuangan – Laporan Keuangan dan Non Keuangan internal dan eksternal. Di dalamnya meliputi keandalan, ketepatan waktu, transparansi atau syarat lainnya yang ditetapkan oleh regulator, standar yang diakui, maupun kebijakan perusahaan.
3. Dimensi Kepatuhan – Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Untuk menilai efektivitas pengendalian internal, Perseroan menetapkan 5 (lima) komponen yang menjadi acuan dalam evaluasi, yang mencakup ketiga dimensi atau kriteria tujuan berikut:
1. Pengendalian Lingkungan
   a. Integritas dan nilai-nilai etika;
   b. Kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan;
   c. Filosofi perusahaan;
   d. Pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan;
   e. Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh komisi perusahaan.

a reference for public companies as a best-practice model in internal control. This framework assists companies in designing and implementing an internal control system that is effective and efficient, thereby supporting good governance and operational integrity.

COSO can provide:
1. A method for implementing internal control in any entity, regardless of industry or legal structure, at all levels of the entity, operating units, or functions.
2. A principles-based approach that facilitates and allows for creating, implementing, and executing internal control—principles can be applied at the entity, operational, and functional levels.
3. Requirements for an effective internal control system by considering how the components and principles exist and function, and how the components operate together.
4. A method for identifying and analyzing risks, and for developing and managing risk responses appropriately, up to an acceptable level, with a strong focus on anti-fraud measures.
5. Opportunities to develop the application of internal control over financial statements and other reports to achieve reporting, operational, and compliance objectives.
6. Opportunities to reduce ineffectiveness, redundancy, or inefficiency in risk controls, thereby providing minimum value in mitigating risks in achieving the Company's objectives.

The Company adopts the COSO framework as the main guideline for the Internal Audit Unit in assessing the effectiveness of internal control. This model outlines three objective dimensions that become the primary focus of control, namely:
1. Operations Dimension – The effectiveness and efficiency of the Company's operations, including the achievement of operational and financial performance, as well as asset protection against losses.
2. Financial Statement Dimension – Internal and external financial and non-financial statements, encompassing reliability, timeliness, transparency, or other requirements set by regulators, recognized standards, or Company policies.
3. Compliance Dimension – Adherence to laws and regulations.

To assess the effectiveness of internal control, the Company establishes 5 (five) components as the reference in evaluation, covering the three objective dimensions:

1. Environmental Control
   a. Integrity and ethical values;
   b. Competence of personnel within the Company;
   c. Company philosophy;
   d. Execution of responsibilities assigned;
   e. Attention and guidance provided by the Company's governing body.

2. Menilai Risiko
   a. Prediksi ataupun proyeksi risiko atas tujuan yang telah ditetapkan, hubungan-hubungan risiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan;
   b. Identifikasi serta analisis atas risiko yang relevan terhadap tujuan yang telah ditetapkan;
   c. Bentuk dasar terhadap penentuan bagaimana seharusnya penanganan risiko yang ada;
   d. Mekanisme yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko khusus yang tidak terlepas dari perubahan yang ada.
3. Aktivitas Pengendalian
   Kebijakan dan prosedur dalam setiap aktivitas perusahaan. Tujuannya agar dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Informasi dan komunikasi
   a. Identifikasi informasi yang berhubungan, rekam dan komunikasikan dalam bentuk yang memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya;
   b. Masukkan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai suatu kejadian, kondisi yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan keputusan bisnis atau bahkan laporan kepada pihak luar;
   c. Aliran informasi yang mendukung kesuksesan pengendalian dari instruksi pada tanggung jawab manajemen sampai pada perangkuman temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.
5. Pengawasan
   a. Penaksiran kinerja sistem pengendalian yang ada defisiensi atas pengendalian internal, harus dilaporkan kepada top manajemen;
   b. Kombinasi antara evaluasi terus-menerus dan evaluasi terpisah akan menjamin efektivitas sistem pengendalian internal yang dirancang.

TINJAUAN/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam upaya menjaga integritas dan kualitas pengelolaan Perseroan, Unit Audit Internal berfokus pada penilaian menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal. Dengan mengacu pada kerangka kerja COSO, unit ini melaksanakan evaluasi independen untuk menilai kecukupan, kepatuhan, dan efektivitas kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian yang berlaku. Penilaian efektivitas ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

1. Jendela: analisis kasus dan kerugian operasional oleh ORM (*Operational Risk Management*) yang disajikan dalam RMC (Risk Management Committee) bersama BOD per bulan;
2. RCSA (*Risk Control and Self Assessment*): tinjauan dari Division Head yang disetujui oleh Direksi per kuartal 3 (tiga) bulan terkait risiko yang ada pada fungsi masing-masing;

2. Risk Assessment
   a. Predicting or projecting risks related to established objectives and their relationships to various parts of the Company;
   b. Identifying and analyzing risks relevant to the established objectives;
   c. Establishing the basis for determining how existing risks should be addressed;
   d. Mechanisms required to identify specific risks in response to changing conditions.

3. Control Activities
   Policies and procedures for each Company activity, aimed at identifying risks that may be encountered in achieving the established objectives.

4. Information and Communication
   a. Identifying relevant information, recording, and communicating it in a manner that enables everyone in the Company to fulfill their responsibilities;

   b. Incorporating information from both internal and external sources on events or conditions that may be needed in business decision-making or reporting to external parties;

   c. Ensuring the flow of information supports effective control, from management instructions to the summarization of findings that require follow-up by management.
5. Monitoring
   a. Assessing the performance of the existing control system; deficiencies in internal control must be reported to top management;
   b. A combination of ongoing monitoring and separate evaluations ensures the effectiveness of the internal control system as designed.

REVIEW/EVALUATION OF INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS

In maintaining the integrity and quality of the Company's management, the Internal Audit Unit focuses on a comprehensive assessment of the internal control system. Referring to the COSO framework, the unit conducts independent evaluations to assess the adequacy, compliance, and effectiveness of applicable policies, procedures, and control mechanisms. This effectiveness assessment covers several key aspects, including:

1. Jendela: Analysis of operational loss cases by Operational Risk Management (ORM) presented in the Risk Management Committee (RMC) meetings with the Board of Directors on a monthly basis;
2. RCSA (Risk Control and Self Assessment): Review by Division Heads, approved by the Board of Directors, conducted quarterly to assess risks within their respective functions;

3. KRI (*Key Risk Indicator*): tinjauan oleh ORM dan *function* terkait atas *root cause* dan *action plan* cabang terhadap data anomali yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan yang disajikan dalam RMC bersama Direksi per bulan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi dan Dewan Komisaris, didampingi Komite Audit, menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah dirancang secara memadai dan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan. Pernyataan ini menegaskan komitmen Perseroan terhadap pengawasan yang berkesinambungan serta kepastian efektivitas pengendalian internal dalam mendukung operasional dan kepatuhan.

3. KRI (Key Risk Indicator): Review by ORM and relevant functions on root causes and branch action plans on anomalous data with potential to cause company losses, presented in the RMC meetings with the Board of Directors on a monthly basis.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners, accompanied by the Audit Committee, affirm that the Company's Internal Control System has been adequately designed and is continuously improved as needed. This statement underscores the Company's commitment to ongoing oversight and assurance of the effectiveness of internal controls in supporting operations and compliance.

Manajemen Risiko
Risk Management

Perseroan menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari strategi bisnisnya, dengan perhatian khusus pada risiko operasional dan proses bisnis. Setiap potensi risiko dievaluasi secara sistematis untuk memahami dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan keberlanjutan usaha.

Untuk mendukung pengelolaan risiko yang efektif, Dewan Komisaris dan Direksi membangun struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas, menegaskan tanggung jawab, batas wewenang, dan akuntabilitas. Komite Pemantau Risiko berperan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi praktik manajemen risiko, sementara Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam implementasi mitigasi risiko sehari-hari, menjamin langkah-langkah pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu.

KONSEP *THREE LINES OF DEFENSE*

Dalam rangka menjaga efektivitas pengelolaan risiko, Perseroan mengimplementasikan kerangka tiga lapis pertahanan (*three lines of defense*). Kerangka ini menegaskan pembagian tanggung jawab di setiap fungsi organisasi, sekaligus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko. Tiga lapisan tersebut terdiri dari:

1. Pemilik Risiko (*Risk Owner*), sebagai Lini Pertama: Unit Bisnis yang bertanggung jawab langsung untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko dalam operasional masing-masing.
2. Unit Manajemen Risiko (*Risk Overseer*), sebagai Lini Kedua: Fungsi pengawasan risiko yang memastikan kecukupan sistem, prosedur, dan metodologi manajemen risiko yang digunakan oleh Perseroan.
3. Unit Audit Internal, sebagai Lini Ketiga: Fungsi *assurance* independen (*independent assurance*) yang mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen risiko di seluruh organisasi berjalan dengan baik.

The Company considers risk management as an integral part of its business strategy, with particular attention to operational risks and business processes. Each potential risk is systematically evaluated to understand its impact on achieving objectives and sustaining the business.

To support effective risk management, the Board of Commissioners and the Board of Directors have established a clearly defined organizational structure, outlining responsibilities, authority limits, and accountability. The Risk Oversight Committee assists the Board of Commissioners in overseeing risk management practices, while the Risk Management Committee supports the Board of Directors in implementing day-to-day risk mitigation, ensuring that control measures are carried out comprehensively and in a timely manner.

THREE LINES OF DEFENSE CONCEPT

To maintain effective risk management, the Company implements the three lines of defense framework. This framework clarifies the division of responsibilities across organizational functions while strengthening oversight and risk mitigation. The three lines consist of:

1. Risk Owner, as the First Line: Business Units directly responsible for identifying, managing, and mitigating risks within their respective operations.
2. Risk Management Unit, as the second Line: The risk oversight function ensuring the adequacy of systems, procedures, and risk management methodologies applied by the Company.
3. Internal Audit Unit, as the third Line: The independent assurance function evaluating and ensuring that all risk management activities across the organization are properly executed.

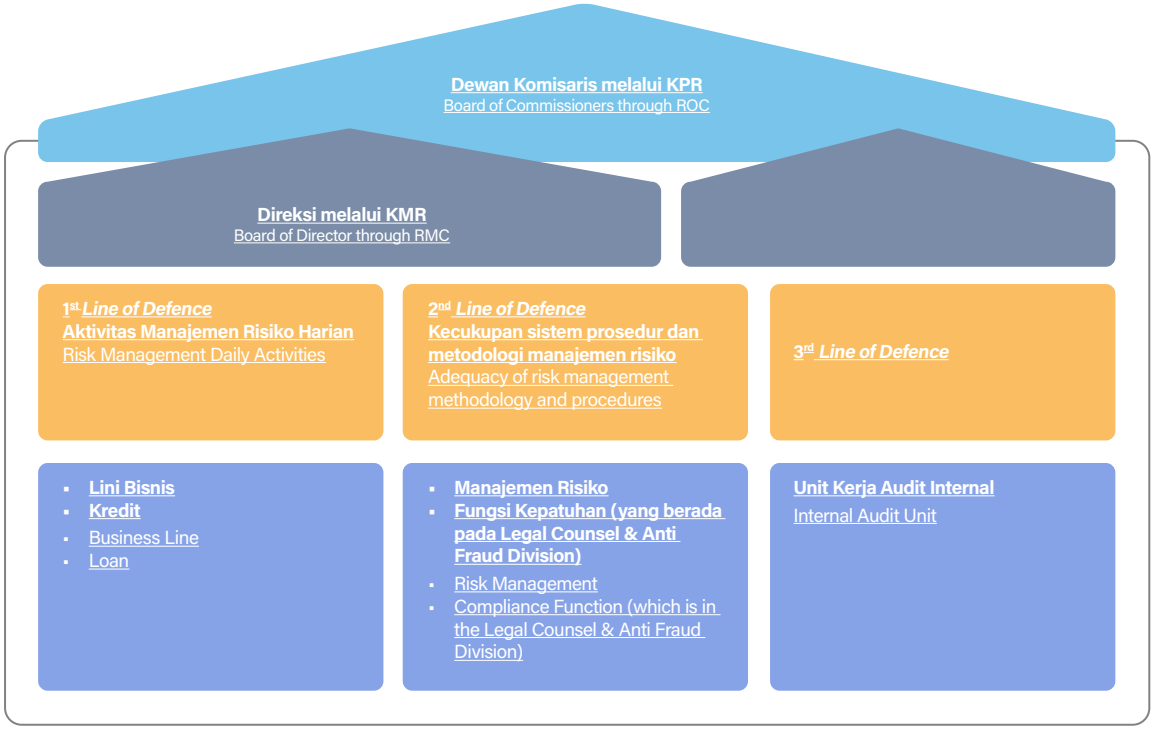

Pengelolaan risiko menjadi bagian integral dari strategi Perseroan dalam menjaga keberlanjutan bisnis. SDM yang kompeten dan sistem pendukung yang memadai menjadi fondasi pelaksanaan manajemen risiko. Perseroan terus mengembangkan kebijakan, prosedur, dan metodologi untuk mengantisipasi dinamika pasar. Selain itu, peningkatan budaya risiko menjadi perhatian utama melalui pelatihan dan kampanye internal yang meningkatkan kesadaran serta kapabilitas karyawan.

PENGELOLAAN RISIKO UTAMA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Pertumbuhan bisnis mendorong Perseroan menegakkan manajemen risiko yang matang. Pilar-pilar berikut menjadi dasar Budaya Sadar Risiko di seluruh aktivitas usaha.

Risk management becomes an integral part of the Company's strategy to ensure business sustainability. Competent human resources and adequate supporting systems form the foundation for implementing risk management. The Company continuously develops policies, procedures, and methodologies to anticipate market dynamics. In addition, enhancing a risk awareness culture is a key focus through internal training and campaigns that improve employee awareness and capabilities.

KEY RISK MANAGEMENT OF THE FINANCING COMPANY

Business growth drives the Company to maintain strong risk management. The following pillars form the foundation of a Risk Awareness Culture across all business activities.

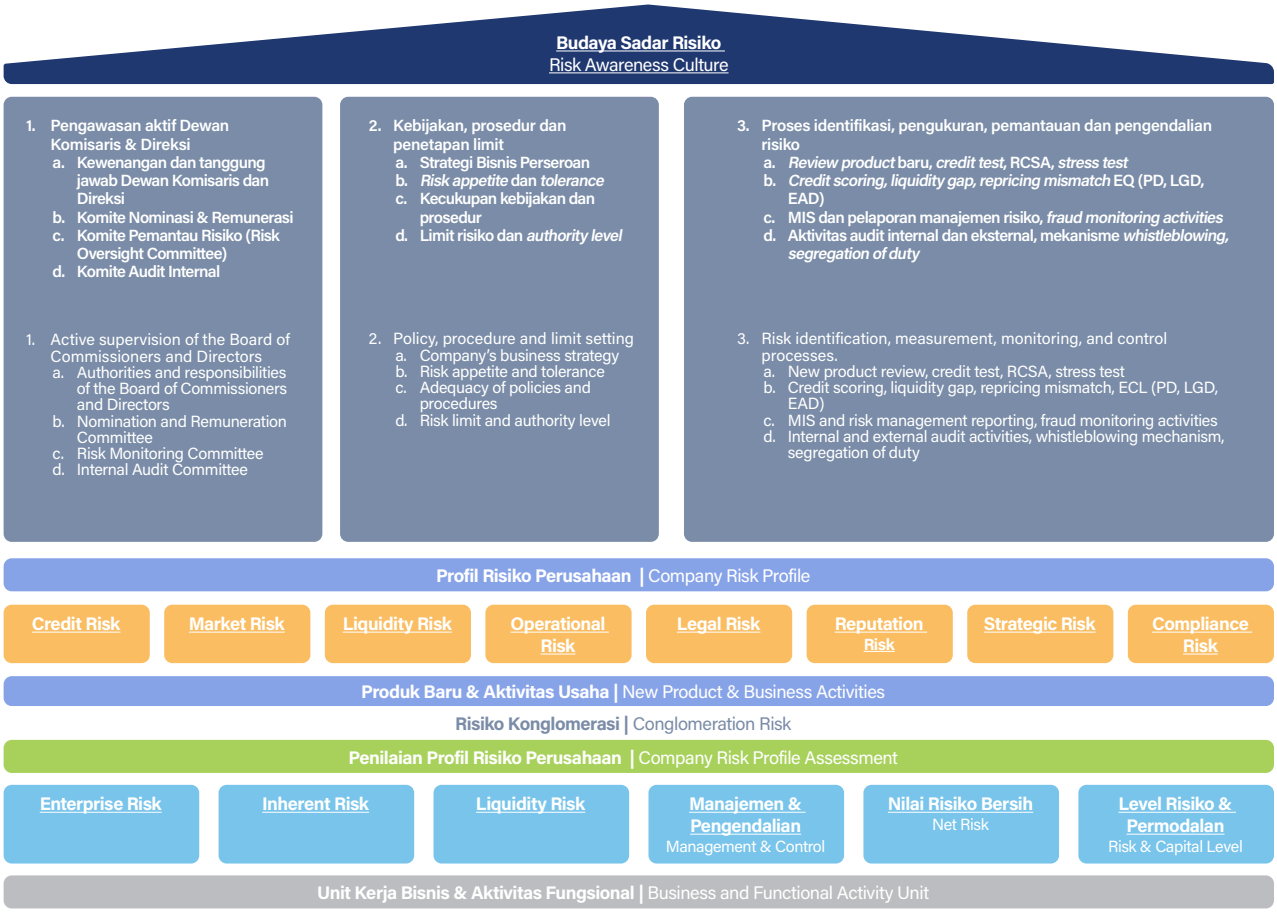

Perseroan secara aktif mengelola risiko utama yang dapat memengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan pembiayaan. Setiap risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan melalui penerapan kebijakan manajemen risiko yang prudent dan terukur. *Risk appetite*, kebijakan, prosedur, dan batasan risiko maksimal telah ditetapkan untuk memastikan eksposur risiko tetap dalam kendali. Infrastruktur yang memadai dan SDM profesional menjadi penopang utama keberhasilan pengelolaan risiko, sehingga setiap potensi risiko dapat dipantau dan diminimalkan sejak dini.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Berdasarkan ketentuan Regulator, Perseroan mengelola 8 (delapan) profil risiko utama, sebagai berikut:

RISIKO KREDIT

Perseroan memahami bahwa risiko pembiayaan merupakan potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Risiko ini muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan. Tanpa pengelolaan yang tepat, risiko pembiayaan berpotensi meningkat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian signifikan dan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Risiko tersebut biasanya timbul apabila struktur kredit, penilaian kelayakan debitur, dan pengelolaan piutang tidak dilakukan secara hati-hati dan disiplin.

The Company actively manages key risks that may affect the performance and financial stability of the financing company. Each risk is identified, assessed, and controlled through the implementation of prudent and measurable risk management policies. The risk appetite, policies, procedures, and maximum risk limits have been established to ensure risk exposure remains under control. Adequate infrastructure and professional human resources serve as the primary foundation for effective risk management, enabling early monitoring and mitigation of potential risks.

TYPES OF RISKS AND MANAGEMENT APPROACH

Based on regulatory requirements, the Company manages 8 (eight) key risk profiles, as follows:

CREDIT RISK

The Company recognizes that financing risk is a potential risk that may result in financial loss. This risk arises when borrowers are unable to fulfill their obligations to the Company. Without proper management, financing risk could escalate, leading to significant losses and negatively impacting the Company's financial condition. Such risks typically occur when credit structuring, debtor eligibility assessment, and receivables management are not carried out carefully and with discipline.



Dalam melakukan penilaian terhadap risiko pembiayaan, Perseroan secara konsisten mempertimbangkan sejumlah aspek penting, antara lain:

1. Komposisi portofolio pembiayaan dan tingkat konsentrasi
   Diversifikasi produk pembiayaan & distribusi sebaran wilayah pembiayaan memainkan peran penting dalam mengurangi potensi risiko pembiayaan yang akan timbul, terutama pada tingkat komposisi dan konsentrasi portofolio pembiayaan yang diberikan. Produk pembiayaan Perseroan diantaranya pembiayaan motor baru, pembiayaan motor bekas dan pembiayaan multiguna dengan agunan mobil atau motor. Sebaran wilayah pembiayaan yang diberikan Perseroan telah mencapai hampir seluruh pulau Jawa, Nusa Tenggara & Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Target debitur Perseroan masih didominasi oleh segmen *middle-low* dengan minimal pendapatan sesuai UMR wilayah setempat.
2. Strategi penyaluran pembiayaan
   Perseroan senantiasa menjaga pertumbuhan aset pembiayaan dan melakukan optimalisasi portofolio produk pembiayaan pada beberapa produk unggulan yang mendatangkan tingkat keuntungan signifikan. Saat ini Perseroan dihadapkan pada tingkat persaingan yang sangat ketat di pasar, sehingga perlu dilakukan terobosan proses penyaluran pembiayaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.
3. Kualitas piutang pembiayaan dan tingkat kecukupan pencadangan
   Rasio *Non-Performing Financing gross* per Desember 2025 sebesar 2,17% dengan tingkat kecukupan pencadangan 1,7x. Secara kualitas aset pembiayaan, Perseroan masih pada taraf cukup baik dan terkendali.
4. Faktor eksternal
   Kondisi ekonomi terutama tingkat inflasi, sangat mempengaruhi kualitas pembiayaan Perseroan. Hal ini karena mayoritas debitur merupakan segmen *middle-low* yang sangat sensitif terhadap perubahan atau kenaikan harga barang. Penurunan kualitas aset pembiayaan terjadi dikarenakan mayoritas segmen debitur mengalami penurunan kapasitas untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Perseroan.

STRATEGI MITIGASI RISIKO KREDIT

Perseroan menempatkan Risiko Pembiayaan sebagai salah satu risiko utama yang harus dikelola secara efektif. Mitigasi risiko ini dilakukan baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan. Pengelolaan risiko sehari-hari dilaksanakan oleh unit bisnis secara terpisah dari unit manajemen risiko, baik dari sisi fungsi maupun struktur organisasi, untuk memastikan prinsip *dual control* dan *segregation of duties* terpenuhi.

Perseroan menetapkan kebijakan limit risiko pembiayaan yang jelas, menjalankan evaluasi risiko secara menyeluruh, didukung SDM profesional, serta memanfaatkan sistem informasi manajemen risiko yang andal. Evaluasi dan peninjauan risiko dilakukan secara berkala oleh unit bisnis bersama unit manajemen risiko, dengan pemantauan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

In assessing financing risk, the Company consistently considers several key aspects, including:

1. Financing portfolio composition and concentration level
   Product diversification and the geographic distribution of financing play an important role in reducing potential financing risks, particularly in relation to the composition and concentration level of the financing portfolio. The Company's financing products include new motorcycle financing, used motorcycle financing, and multipurpose financing with motor vehicle collateral. The Company's financing coverage has reached almost all regions of Java, Nusa Tenggara & Bali, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi. The Company's target debtors are still dominated by the middle-low segment with minimum income aligned with the regional minimum wage.
2. Financing disbursement strategy
   The Company consistently maintains the growth of financing assets and optimizes its financing product portfolio by focusing on several key products that provide significant profitability. Currently, the Company faces very tight market competition, requiring innovative breakthroughs in financing distribution processes without compromising prudential principles.
3. Quality of financing receivables and adequacy of reserves
   The Non-Performing Financing (NPF) ratio on a gross basis as of December 2025 was 2.17% with an allowance adequacy at 1.7x. Overall, the quality of financing assets remains at a fairly good and manageable level.
4. External factors
   Economic conditions, particularly inflation levels, have a significant impact on the Company's financing quality. This is because the majority of debtors are in the middle-low segment, which is highly sensitive to price changes or increases. The decline in financing asset quality occurs when most debtors experience reduced capacity to meet their payment obligations to the Company.

CREDIT RISK MITIGATION STRATEGY

The Company places Financing Risk as one of the key risks that must be effectively managed. Mitigation efforts are carried out at both the individual financing level and the portfolio level. Day-to-day risk management is carried out by the business units separately from the risk management unit, both in terms of function and organizational structure, to ensure the principles of dual control and segregation of duties are met.

The Company establishes clear financing risk limit policies, conducts comprehensive risk evaluations supported by professional human resources, and utilizes a reliable risk management information system. Risk evaluation and review are performed regularly by business units together with the risk management unit, with active oversight from the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Risk Management Committee and the Risk Oversight Committee.

Unit manajemen risiko juga bekerja sama dengan unit bisnis dalam menyempurnakan kebijakan *risk appetite* yang tertuang dalam kebijakan pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko menjadi lebih terstruktur dan efektif. Selain itu, batasan wewenang persetujuan pembiayaan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing Perseroan.

Seluruh langkah ini mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat, menghasilkan keuntungan berkelanjutan, dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Proses persetujuan pembiayaan dirancang agar efektif, dengan pendelegasian wewenang dari kantor pusat hingga kantor cabang operasional, memungkinkan pengambilan keputusan yang optimal.

Diagram berikut menggambarkan siklus pembiayaan Perseroan:

The risk management unit also collaborates with the business units to enhance the risk appetite policies outlined in the financing policy, enabling more structured and effective risk management. In addition, financing approval authority limits are reviewed periodically to improve service quality and strengthen the Company's competitiveness.

All these measures support healthy business growth, generate sustainable profitability, and remain aligned with prudential principles. The financing approval process is designed to be efficient, with delegated authority from the head office to operational branch offices, allowing for optimal decision-making.

The diagram below illustrates the Company's financing cycle:

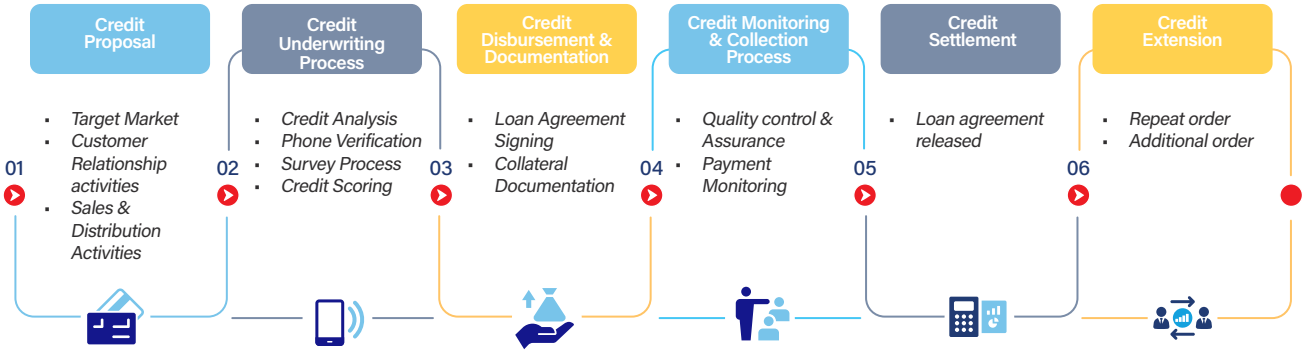

Diagram berikut menggambarkan proses persetujuan pembiayaan (*loan origination*):

The diagram below illustrates the financing approval process (loan origination):

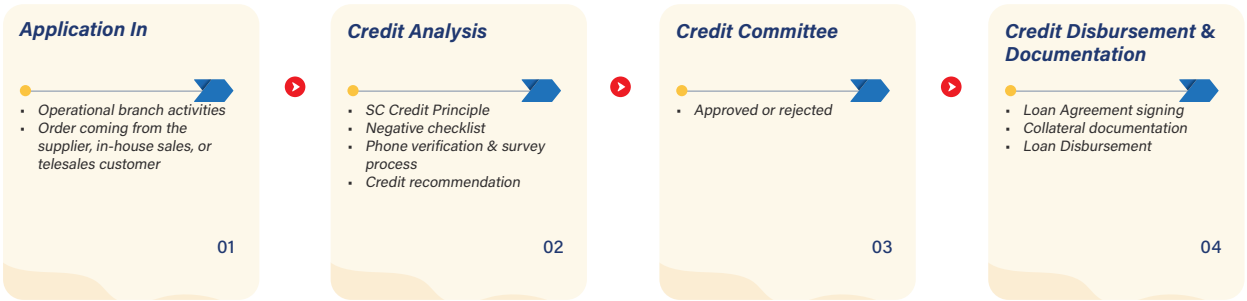

Perseroan menerapkan proses evaluasi pembiayaan yang sistematis sejak tahap pengajuan. Proposal pembiayaan dari kantor cabang, baik untuk nasabah perorangan maupun korporasi, dikaji secara independen oleh unit kredit analis. Proses ini memastikan setiap risiko telah diidentifikasi dan strategi mitigasinya telah ditetapkan, sehingga tingkat risiko pembiayaan dapat dipantau dengan akurat. Besaran pengajuan yang menjadi kewenangan kantor cabang ditentukan sesuai pendelegasian dari kantor pusat dan selalu ditinjau secara berkala untuk menjaga kepatuhan dan efektivitas pengelolaan risiko. Diagram berikut menyajikan alur pemantauan dan *collection* pembiayaan:

The Company implements a systematic financing evaluation process beginning from the application stage. Financing proposals from branch offices, whether for individual or corporate customers, are independently reviewed by credit analyst units. This process ensures that all risks have been identified and appropriate mitigation strategies have been established, enabling accurate monitoring of financing risk levels. The financing limits under the authority of branch offices are determined based on delegated authority from the head office and are reviewed periodically to maintain compliance and risk management effectiveness. The diagram below presents the monitoring and collection process flow:



Perseroan menempatkan pengelolaan risiko pembiayaan sebagai bagian integral dari operasional, dengan fokus pada pencegahan potensi kerugian sejak tahap awal kredit hingga penyelesaian kewajiban debitur. Upaya mitigasi dilakukan melalui pengelolaan koleksi, eksekusi agunan, hingga *write off* sesuai lama tunggakan pembayaran. Proses ini dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pengingat jatuh tempo kewajiban hingga tindakan eksekusi yang mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Unit Manajemen Risiko secara rutin memantau kualitas seluruh portofolio pembiayaan untuk mendeteksi indikasi penurunan kualitas akibat fluktuasi pasar, kondisi makro ekonomi, atau perubahan regulasi. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar rekomendasi tindakan preventif maupun perbaikan kebijakan untuk menjaga kesehatan portofolio.

Dalam hal kebijakan, Perseroan menerapkan hierarki 3 (tiga) tingkat, yaitu kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur, yang dirancang untuk menciptakan panduan yang jelas, terstruktur, dan konsisten di seluruh organisasi. Kebijakan dan prosedur ini ditinjau dan diperbarui secara berkala melalui komite terkait agar selalu relevan dengan dinamika pasar, regulasi, dan lingkungan bisnis. Keberhasilan pengelolaan risiko pembiayaan tercapai melalui penerapan siklus kredit yang prudent, mencakup penyusunan produk yang tepat, identifikasi target pasar yang akurat, penetapan kriteria risiko yang ketat, pengendalian dalam proses persetujuan kredit, pemeliharaan portofolio yang sehat, serta sistem penagihan dan pemulihan yang efektif.

RISIKO PASAR

Risiko pasar merupakan risiko yang muncul akibat perubahan nilai aset, kewajiban, ekuitas, atau rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, yang dipengaruhi oleh fluktuasi kondisi pasar secara umum. Bagi Perseroan, risiko ini terutama bersumber dari pergerakan suku bunga, mengingat Perseroan tidak memiliki utang maupun piutang dalam valuta asing.

STRATEGI MITIGASI RISIKO PASAR

Perseroan menempatkan pengelolaan risiko pasar sebagai prioritas utama untuk menjaga kestabilan margin dan profitabilitas. Dalam menghadapi fluktuasi suku bunga yang dapat memengaruhi kinerja keuangan, perseroan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang meliputi:

1. Me*monitoring repricing gap* antara hutang dan piutang dan mengkaji dampaknya terhadap posisi keuangan ataupun profitabilitas perusahaan.
2. Perseroan melakukan strategi *funding* yang memadai baik secara diversifikasi instrumen utang maupun jangka waktunya untuk meng-*cover* potensi pergerakan suku bunga di pasar yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan.

The Company places financing risk management as an integral part of its operations, with a focus on preventing potential losses from the early stages of credit through to the settlement of debtor obligations. Risk mitigation efforts are carried out through collection management, collateral execution, and write-offs based on the duration of delinquency. This process is implemented systematically, starting from due date reminders to enforcement actions in accordance with applicable regulations.

Furthermore, the Risk Management Unit regularly monitors the quality of the entire financing portfolio to detect signs of deterioration due to market fluctuations, macroeconomic conditions, or regulatory changes. The monitoring results serve as the basis for recommendations on preventive actions and policy improvements to maintain portfolio health.

In terms of policy, the Company applies a 3 (three)-tier hierarchy consisting of framework, policy, and procedures, designed to provide clear, structured, and consistent guidelines across the organization. These policies and procedures are reviewed and updated periodically by the relevant committees to ensure alignment with market dynamics, regulatory requirements, and the business environment. Successful financing risk management is achieved through the implementation of a prudent credit cycle, covering accurate product structuring, precise target market identification, stringent risk criteria and controls during the credit approval process, maintenance of a healthy portfolio, and effective collection and recovery systems.

MARKET RISK

Market risk refers to the risk arising from changes in the value of assets, liabilities, equity, or administrative accounts, including derivative transactions, caused by general market fluctuations. For the Company, this risk primarily stems from interest rate movements, as the Company does not maintain debt or receivables denominated in foreign currencies.

MARKET RISK MITIGATION STRATEGY

The Company places market risk management as a main priority to maintain stable margins and profitability. In responding to interest rate fluctuations that may affect financial performance, the Company implements mitigation measures including:

1. Monitoring the repricing gap between liabilities and receivables and assessing its impact on the Company's financial position and profitability.
2. The Company implements an adequate funding strategy through diversification of debt instruments and maturities to cover potential unfavorable market interest rate movements.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul ketika Perseroan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo melalui arus kas atau aset likuid yang mudah dicairkan, tanpa menimbulkan gangguan terhadap operasional maupun kondisi keuangan Perseroan

STRATEGI MITIGASI RISIKO LIKUIDITAS

Mitigasi yang dilakukan oleh perseroan antara lain:

1. Perseroan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap posisi *current ratio* dan *cash ratio* serta melakukan monitoring arus kas (*cash flow*) dari aktivitas operasional.
2. *Maintain liquidity gap* sd. 6 - 12 bulan ke depan pada posisi positif gap.
3. Perseroan memiliki *emergency credit line* di beberapa bank jika sewaktu-waktu diperlukan pada saat kondisi likuiditas mengetat.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional muncul dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, maupun faktor eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Di Perseroan, risiko ini terkait erat dengan aktivitas fungsional, antara lain pemberian kredit, pengelolaan sistem informasi dan manajemen, serta manajemen sumber daya manusia. Untuk mengelolanya, Perseroan secara sistematis mengidentifikasi potensi penyebab kegagalan operasional dalam setiap fungsi, menilai kemungkinan kerugian, dan mengambil langkah-langkah yang tepat guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul.

STRATEGI MITIGASI RISIKO OPERASIONAL

Perseroan menempatkan manajemen risiko operasional sebagai fokus utama dalam memastikan kelancaran kegiatan usaha. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan risiko ini dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghadapi berbagai potensi tantangan berikut:

1. Kerugian operasional signifikan yang dialami oleh industri Perusahaan Pembiayaan;
2. Regulasi yang baru dan praktik terbaik dalam Perusahaan Pembiayaan di Indonesia;
3. Perubahan yang relatif cepat dalam dunia bisnis;
4. Tumbuhnya kebutuhan akan pengukuran kinerja;
5. Perlindungan dan pengembangan terhadap nilai pemegang saham.

Perseroan menempatkan manajemen risiko operasional sebagai fondasi penting dalam menjaga kelancaran dan keberlanjutan operasional. Untuk itu, Perseroan membangun kerangka kerja yang komprehensif, meliputi kebijakan, prosedur, dan perangkat mitigasi risiko yang diterapkan secara konsisten.

Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko operasional ditanamkan secara menyeluruh di seluruh lini manajemen, sehingga strategi mitigasi dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, Perseroan menegakkan kebijakan anti fraud sebagai langkah preventif terhadap potensi penyimpangan, baik dari internal maupun eksternal. Bagian dari strategi

LIQUIDITY RISK

Liquidity risk arises when the Company encounters difficulty in meeting its maturing obligations through cash flow or liquid assets that can be readily converted into cash without disrupting operations or the Company's financial condition.

LIQUIDITY RISK MITIGATION STRATEGY

Mitigation efforts implemented by the Company include:

1. Actively monitoring current ratio and cash ratio positions, as well as tracking cash flows from operational activities.
2. Maintaining a positive liquidity gap for the upcoming 6–12 months.
3. The Company has emergency credit lines with several banks to be utilized if needed during periods of tight liquidity.

OPERATIONAL RISK

Operational risk arises from inadequate or failed internal processes, human errors, system disruptions, or external factors that may affect the Company's operational activities. Within the Company, this risk is closely related to functional activities, including credit granting, information system and management operations, and human resource management. To address this risk, the Company systematically identifies potential causes of operational failures across all functions, assesses potential loss exposure, and takes appropriate measures to minimize possible impacts.

OPERATIONAL RISK MITIGATION STRATEGY

The Company places operational risk management as a key focus to ensure smooth business operations. Efforts to enhance the quality of risk management are carried out effectively and efficiently to address potential challenges, including:

1. Significant operational losses experienced in the financing industry;
2. New regulations and best practices within Indonesia's financing companies;
3. Rapid changes in the business environment;
4. The growing need for performance measurement;
5. Protection and enhancement of shareholder value.

The Company positions operational risk management as a crucial foundation in maintaining operational continuity and sustainability. Therefore, the Company establishes a comprehensive framework encompassing policies, procedures, and risk mitigation tools applied consistently.

Awareness and understanding of operational risk are embedded across all management levels, enabling mitigation strategies to be executed effectively. In addition, the Company enforces anti-fraud policies as a preventive measure against potential internal and external misconduct. The mitigation strategy also includes Business Continuity Management,

mitigasi juga mencakup *Business Continuity Management*, yang menyediakan kerangka, standar, dan prosedur untuk memastikan operasional kritikal dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi gangguan, sesuai batas toleransi yang ditetapkan. Secara rutin, Perseroan menyelenggarakan latihan simulasi krisis dan pemulihan untuk menguji kesiapan serta efektivitas rencana mitigasi.

RISIKO HUKUM

Perseroan menghadapi risiko hukum yang muncul dari potensi tuntutan hukum maupun kekurangan dalam aspek yuridis, seperti perjanjian yang tidak lengkap atau ketiadaan regulasi yang mendukung. Penerapan Manajemen Risiko pada risiko hukum bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak negatif akibat kelemahan hukum, perubahan peraturan perundang-undangan, atau proses litigasi yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

STRATEGI MITIGASI RISIKO HUKUM

Perseroan memahami pentingnya pengelolaan Risiko Hukum untuk menjaga stabilitas operasional dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan beberapa langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki *Legal Counsel & Anti Fraud Division* yakni fungsi yang berperan dalam memastikan kepastian hukum dan kepentingan hukum perseroan dalam melakukan perbuatan hukumnya dengan pihak lain. *Legal Counsel & Anti Fraud Division* memberikan peran konsultatif dalam memitigasi risiko hukum yang ada dalam kegiatan perseroan.
2. *Legal Counsel & Anti Fraud Division* meninjau legalitas untuk setiap produk maupun lini bisnis baru.
3. *Legal Departme*nt sebagai bagian dari *Legal Counsel & Anti Fraud Division* menyusun, merancang, membuat dan mengontrol setiap pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga dengan memastikan fungsi dan tujuan Perseroan dalam setiap rencana perbuatan hukum setelah mendapatkan pengajuan dari fungsi-fungsi terkait.
4. *Legal Department* sebagai bagian dari *Legal Counsel & Anti Fraud Division* berfungsi menginventaris perjanjian Perseroan, sehingga memastikan ketersediaan dokumen perjanjian dalam hal terdapat permasalahan hukum.
5. *Legal Counsel & Anti Fraud Division* menyelaraskan peraturan hukum terbaru dengan penerapannya di dalam kegiatan yang dijalankan perseroan.
6. *Legal Counsel & Anti Fraud Division* juga bertanggung jawab dalam penanganan proses litigasi Perseroan, sehingga potensi risiko dapat terpantau dan semaksimal mungkin dapat diminimalisir.

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi timbul ketika kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perseroan menurun, yang dapat disebabkan oleh pemberitaan media atau rumor negatif, serta penerapan strategi komunikasi yang kurang efektif.

which provides the framework, standards, and procedures to ensure that critical operations can be restored quickly in the event of a disruption, within established tolerance limits. Regularly, the Company conducts crisis simulation and recovery exercises to test the readiness and effectiveness of mitigation plans.

LEGAL RISK

The Company faces legal risk arising from potential legal claims or deficiencies in juridical aspects, such as incomplete agreements or the absence of supporting regulations. The implementation of Risk Management for legal risk aims to reduce the possibility of negative impacts caused by legal weaknesses, regulatory changes, or litigation processes that may affect the Company's operations.

LEGAL RISK MITIGATION STRATEGY

The Company recognizes the importance of managing Legal Risk to maintain operational stability and protect corporate reputation. Therefore, the Company implements several measures, including:

1. The Company has a Legal Counsel & Anti-Fraud Division, which plays a role in ensuring legal certainty and protecting the Company's legal interests in its legal dealings with external parties. This division provides advisory support to mitigate legal risks associated with the Company's activities.
2. The Legal Counsel & Anti-Fraud Division reviews the legality of each new product and business line.
3. The Legal Department, as part of the Legal Counsel & Anti-Fraud Division, prepares, drafts, formulates, and monitors all third-party agreements by ensuring alignment with the Company's functions and objectives, based on submissions from relevant units.
4. The Legal Department, as part of the Legal Counsel & Anti-Fraud Division, maintains and inventories the Company's agreements to ensure document availability if legal issues arise.
5. The Legal Counsel & Anti-Fraud Division aligns the latest legal regulations with their implementation within the Company's operations.
6. The Legal Counsel & Anti-Fraud Division is also responsible for handling the Company's litigation process, ensuring that potential risks are monitored and minimized to the greatest extent possible.

REPUTATION RISK

Reputation risk arises when stakeholder trust in the Company declines, which may be caused by negative media coverage or rumors, as well as ineffective communication strategies.

STRATEGI MITIGASI RISIKO REPUTASI

Dalam upaya menjaga citra dan kepercayaan pemangku kepentingan, Perseroan menempatkan pengelolaan Risiko Reputasi sebagai prioritas. Pengelolaan risiko ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang timbul dari reputasi negatif. Adapun langkah-langkah pengelolaan Risiko Reputasi meliputi:

1. Sumber Daya Perseroan melalui *Corporate Services and Communication Department* menjalankan fungsi kehumasan yang senantiasa mengkomunikasikan segala informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. *Corporate Services and Communication Department* juga menjalankan fungsi pelayanan seperti:
   a. Monitoring berita negatif di media massa, media elektronik, maupun media *online*;
   b. Membuat layanan informasi konsumen dengan berbasis digital;
   c. Mengevaluasi serta menindaklanjuti setiap berita negatif yang diterima Perusahaan melalui berbagai kanal.
2. Kebijakan Perseroan memiliki pedoman penanganan keluhan konsumen dan pemberian informasi kepada pemangku kepentingan, antara lain:
   a. *Hotline Service* 150999
   b. *Email* pelanggan corporate_secretary@wom.co.id
   c. Pengiriman pesan melalui Media Sosial Instagram/ Facebook @womfinance_id
   d. Menghubungi nomor kantor 021-2188 2400
   e. *Walk in Customer* (Konsumen datang langsung ke kantor jaringan Perseroan)
   f. *Barcode* "Lapor Aja" dengan melakukan scan

REPUTATION RISK MITIGATION STRATEGY

In an effort to maintain corporate image and stakeholder confidence, the Company places Reputation Risk management as a priority. This risk management aims to reduce potential losses arising from negative reputation. The steps implemented include:

1. The Company's resources, through the Corporate Services and Communication Department, perform public relations functions that continuously communicate information required by stakeholders. The Corporate Services and Communication Department also provides service functions such as:
   a. Monitoring negative news in mass media, electronic media, and online media;
   b. Developing digital-based consumer information services;
   c. Evaluating and following up on any negative news received by the Company through various channels.
2. The Company has policies and guidelines for handling consumer complaints and providing information to stakeholders, including:
   a. Hotline Service 150999
   b. Customer email: corporate_secretary@wom.co.id
   c. Sending message through social media channels Instagram/Facebook @womfinance_id
   d. Contacting the Company's office number 021-2188 2400
   e. Walk-In Customer (consumers visiting the Company's network offices directly)
   f. "Lapor Aja" barcode by scanning

RISIKO STRATEGIS

Perseroan menyadari munculnya Risiko Strategis yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh Perseroan. Risiko strategis ini dapat memengaruhi permodalan, pendapatan bahkan reputasi Perseroan. Hal tersebut dapat terjadi akibat pelaksanaan keputusan yang tidak tepat atau akibat kurang responsifnya Perseroan mengantisipasi perubahan industri, ekonomi, teknologi dan regulasi.

STRATEGIC RISK

The Company recognizes the existence of Strategic Risk, which may arise from inappropriate establishment and execution of corporate strategies, inaccurate business decision-making, or the Company's lack of responsiveness to external changes—resulting in failure to achieve predetermined targets. This strategic risk may affect the Company's capital, revenue, and even reputation. Such conditions may occur due to improper decision implementation or the Company's slow response in anticipating changes in industry, economic conditions, technology, and regulatory developments.

STRATEGI MITIGASI RISIKO STRATEGIS

Dalam menghadapi Risiko Strategis, Perseroan telah menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk menyeimbangkan risiko dan pendapatan, dengan memperhatikan dinamika pasar, regulasi, serta kondisi bisnis. Mitigasi risiko strategis ini dilaksanakan berdasarkan beberapa parameter. Pertama, kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan lingkungan bisnis saat ini. Kedua, peran strategi bisnis Perseroan dalam konteks konglomerasi keuangan. Ketiga, posisi bisnis Perseroan di dalam konglomerasi tersebut. Keempat, pencapaian target rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam konglomerasi keuangan. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi,

STRATEGIC RISK MITIGATION STRATEGY

In addressing Strategic Risk, the Company has established mitigation measures to balance risk and income by considering market dynamics, regulations, and current business conditions. Strategic risk mitigation is carried out based on several parameters. First, the alignment of the Company's business strategy with the current business environment. Second, the role of the Company's business strategy within the financial conglomerate context. Third, the Company's business position within the conglomerate. Fourth, the achievement of business plan targets established within the financial conglomerate. Risk management is carried out through active supervision by the Board of Commissioners,



di mana Direksi bertanggung jawab menyiapkan rencana bisnis yang selanjutnya dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors, where the Board of Directors is responsible for preparing the business plan, which is then reviewed and approved by the Board of Commissioners.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan. Pengelolaan risiko kepatuhan menjadi hal yang krusial bagi Perseroan, karena kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan sanksi dari regulator berupa denda dan/atau sanksi lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, sehingga dapat mempengaruhi tata kelola Perseroan.

Risiko Kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum yaitu:

1. Perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
2. Perilaku organisasi yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Merujuk pada POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Perseroan menetapkan Presiden Direktur sebagai anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Presiden Direktur bertanggung jawab memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko terkait melalui perumusan kebijakan serta prosedur manajemen risiko kepatuhan dan pemantauan pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Presiden Direktur dibantu oleh Legal Counsel & Anti Fraud Division, unit independen yang bertugas menjalankan fungsi kepatuhan tanpa terikat pada satuan kerja operasional.

COMPLIANCE RISK

Compliance Risk is the risk that arises when the Company fails to comply with and/or does not implement the laws and regulations, as well as provisions applicable to the Company. Managing compliance risk is crucial, as failure to properly manage this risk may result in regulatory sanctions in the form of fines and/or other penalties, which could impact the Company's business continuity and affect its governance practices.

Compliance Risk may arise from two types of legal behavior:

1. Legal behavior, referring to conduct or activities of the Company that deviate from or violate applicable provisions and/or laws and regulations; and
2. Organizational behavior, referring to conduct or activities of the Company that deviate from or contradict commonly accepted standards.

Referring to POJK Number 48 of 2024 on Good Corporate Governance for Financing Companies, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, the Company designates the President Director as the member of the Board of Directors responsible for overseeing the compliance function. The President Director is responsible for ensuring compliance and mitigating related risks through the formulation of compliance risk management policies and procedures and monitoring their implementation. In carrying out these duties, the President Director is supported by the Legal Counsel & Anti-Fraud Division, an independent unit tasked with performing the compliance function without being tied to operational work units.

STRATEGI MITIGASI RISIKO KEPATUHAN

Perseroan memiliki komitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara aktif memperbaiki setiap kelemahan dalam proses apabila ditemukan. Pendekatan ini sejalan dengan strategi manajemen risiko kepatuhan Perseroan, yang menekankan pencegahan untuk meminimalkan potensi pelanggaran serta tindakan korektif untuk perbaikan. Untuk mengendalikan dan menekan risiko kepatuhan, Perseroan telah mengambil berbagai langkah, antara lain:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan di setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi atas ketentuan dan aturan yang berlaku, serta melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi Perseroan melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari fungsi, unit kerja, maupun kantor cabang Perseroan.
2. Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
3. Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional Perseroan, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.

COMPLIANCE RISK MITIGATION STRATEGY

The Company is committed to consistently complying with applicable laws and regulations and actively addressing any weaknesses in its processes whenever identified. This approach aligns with the Company's compliance risk management strategy, which emphasizes preventive measures to minimize potential violations and corrective actions for continuous improvement. To control and mitigate compliance risk, the Company has undertaken various measures, including:

1. Embedding a culture of compliance across all business activities at every organizational level, including by conducting dissemination of applicable rules and regulations, and providing consultative functions related to the implementation of Financial Services Authority regulations for the Company through providing advice/responses to inquiries from functions, work units, and branch offices.
2. Identifying sources of compliance risk.
3. Conducting gap analyses, assessing the impact of new regulations on Company operations, and proposing adjustments to internal manuals, policies, and procedures.

4. Mengelola risiko kepatuhan, selain dilakukan melalui uji kepatuhan, juga dilakukan melalui pemantauan terhadap pemenuhan komitmen Perseroan kepada regulator, baik berdasarkan hasil pemeriksaan regulator maupun melalui korespondensi antara Perseroan dengan regulator.
5. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Perseroan yang meliputi yaitu:
    a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
    b. Kebijakan dan prosedur.
    c. Pengendalian internal.
    d. Sistem informasi manajemen.
    e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menempatkan manajemen risiko sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa Sistem Manajemen Risiko telah diterapkan secara terstruktur dan efektif, sehingga seluruh potensi risiko dapat diidentifikasi, dinilai, dan dikelola secara konsisten. Pendekatan ini mendukung tercapainya tujuan operasional maupun strategi Perseroan secara menyeluruh.

4. Managing compliance risk through compliance testing and monitoring the fulfillment of the Company's commitments to regulators, based on regulatory examination results or correspondence between the Company and regulators.
5. Implementing Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs within the Company, including:
    a. Active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
    b. Policies and procedures.
    c. Internal controls.
    d. Management information systems.
    e. Human resources and training.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company places risk management as a fundamental basis for decision-making. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the Risk Management System has been implemented in a structured and effective manner, enabling all potential risks to be identified, assessed, and managed consistently. This approach supports the achievement of both operational objectives and the Company's overall strategic goals.

Perkara Hukum
Litigation

Sepanjang 2025, Perseroan terlibat dalam 39 (tiga puluh sembilan) Perkara yang masih dalam proses baik dalam kedudukannya sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, Pelapor dalam Perkara Hubungan Industrial (Perburuhan), Perkara Perdata, Perkara Pidana, maupun Perkara Perpajakan yang terdiri dari: 34 (tiga puluh empat) Perkara Perdata, 5 (lima) Perkara Pidana, dan 0 (nol) Perkara Pajak.

Throughout 2025, the Company was involved in 39 (thirty-nine) cases that are still in process, in various capacities including Plaintiff, Defendant, Petitioner, Respondent, or Reporter, in Industrial Relation (Labor) Cases, Civil Cases, Criminal Cases, and Tax Cases, which consist of: 34 (thirty-four) Civil Cases, 5 (five) Criminal Cases, and 0 (zero) Tax Cases.

Adapun perincian perkara hukum yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The details of the legal cases faced by the Company during 2025 are as follows:

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
1	Perkara antara Mulyati & Ferry Oktaviadi ("Konsumen") melawan: Tergugat-1 = Perseroan Tergugat-2 = Otoritas Jasa Keuangan Dengan Nomor Perkara: 41/Pdt.G/2025/PN Pbr tertanggal 03 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Pekanbaru Case between Mulyati & Ferry Oktaviadi ("Consumers") against: Defendant-1: The Company Defendant-2: Financial Services Authority Case Number: 41/Pdt.G/2025/PN Pbr, dated February 3, 2025, at Pekanbaru District Court	Proses Kasasi di Mahkamah Agung. Cassation Process at the Supreme Court.	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Have no material impact on the Company's financial condition.
2	Perkara antara M. Iqbal ("Non Konsumen/Pihak Ketiga") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Perseroan Tergugat-2 = Yevit Rendra ("Konsumen") Tergugat-3 = Edison Tergugat-4 = Tatik Merdeka Sari Dengan Nomor Perkara: 65/Pdt.G/2025/PN Pdg tertanggal 13 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Padang Case between M. Iqbal ("Non-Consumer/Third Party") as Plaintiff against: Defendant-1: The Company Defendant-2: Yevit Rendra ("Consumer") Defendant-3: Edison Defendant-4: Tatik Merdeka Sari Case Number: 65/Pdt.G/2025/PN Pdg, dated March 13, 2025, at Padang District Court	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Padang. Appeal process at Padang High Court.	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Have no material impact on the Company's financial condition.
3	Perkara antara Ma'Ruf ("Non Konsumen/Pihak Ketiga") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Perseroan Turut Tergugat = Nikma Nasir ("Ahli Waris Konsumen") Dengan Nomor Perkara: 19/Pdt.G/2025/PN Sgm tertanggal 17 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Sungguminasa Case between Ma'Ruf ("Non-Consumer/Third Party") as Plaintiff against: Defendant-1: The Company Co-Defendant: Nikma Nasir ("Consumer's Heir") Case Number: 19/Pdt.G/2025/PN Sgm, dated March 17, 2025, at Sungguminasa District Court	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Sungguminasa. Appeal process at Sungguminasa High Court.	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Have no material impact on the Company's financial condition.

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
4	Perkara antara Drg. Bujurngena Ginting ("Non Konsumen/Pihak Ketiga") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Ermida Br Tarigan ("Istri Konsumen") Tergugat-2 = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 897/Pdt.G/2025/PN Tng tertanggal 17 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Tangerang Case between Drg. Bujurngena Ginting ("Non-Consumer/Third Party") as Plaintiff against: Defendant-1: Ermida Br Tarigan ("Consumer's Wife") Defendant-2: The Company Case Number: 897/Pdt.G/2025/PN Tng, dated July 17, 2025, at Tangerang District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Trial Process at Tangerang District Court.	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Have no material impact on the Company's financial condition.
5	Perkara antara Gulasri Tobalani ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 53/Pdt.G/2025/PN Gto tertanggal 21 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Gorontalo Case between Gulasri Tobalani ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 53/Pdt.G/2025/PN Gto, dated July 21, 2025, at Gorontalo District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo Trial Process at Gorontalo District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
6	Perkara antara Andri Permana ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 454/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr tertanggal 23 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Case between Andri Permana ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 454/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, dated July 23, 2025, at North Jakarta District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Trial Process at North Jakarta District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
7	Perkara antara Desyani Pranatalia Panekenan ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 450/Pdt.G/2025/PN Mnd tertanggal 29 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Manado Case between Desyani Pranatalia Panekenan ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 450/Pdt.G/2025/PN Mnd, dated July 29, 2025, at Manado District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Manado Trial Process at Manado District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
8	Perkara antara Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Pusat Kabupaten Tegal (YAPEKNAS) (Non Konsumen/Pihak Ketiga) selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 20/Pdt.G/2025/PN Slw tertanggal 6 Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Slawi Case between Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Pusat Kabupaten Tegal (YAPEKNAS) ("Non-Consumer/Third Party") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 20/Pdt.G/2025/PN Slw, dated August 6, 2025, at Slawi District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Slawi Trial Process at Slawi District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
9	Perkara antara Rekha Indriani Arsyad ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 352/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 20 Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Makassar Case between Rekha Indriani Arsyad ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 352/Pdt.G/2025/PN Mks, dated August 20, 2025, at Makassar District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Makassar Trial Process at Makassar District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
10	Perkara antara Edi Yusup ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Perseroan Tergugat-2 = Sutisna Tergugat-3 = Saripudin Dengan Nomor Perkara: 1131/Pdt.G/2025/PN Tng tertanggal 3 September 2025 di Pengadilan Negeri Tangerang Case between Edi Yusup ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant-1: The Company Defendant-2: Sutisna Defendant-3: Saripudin Case Number: 1131/Pdt.G/2025/PN Tng, dated September 3, 2025, at Tangerang District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang Trial Process at Tangerang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
11	Perkara antara Casmidi ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Riky Minasandi ("*Collector Internal*") Tergugat-2 = Ali Bambang Suprapto ("BH Cabang Pemalang") Tergugat-3 = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 46/Pdt.G/2025/PN Pml tertanggal 24 September 2025 di Pengadilan Negeri Pemalang Case between Casmidi ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant-1: Riky Minasandi ("Internal Collector") Defendant-2: Ali Bambang Suprapto ("BH of Pemalang Branch") Defendant-3: The Company Case Number: 46/Pdt.G/2025/PN Pml, dated September 24, 2025, at Pemalang District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Pemalang Trial Process at Pemalang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
12	Perkara antara Jainul Mustofa ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 163/Pdt.G/2025/PN Mjk tertanggal 30 September 2025 di Pengadilan Negeri Mojokerto Case between Jainul Mustofa ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 163/Pdt.G/2025/PN Mjk, dated September 30, 2025, at Mojokerto District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto Trial Process at Mojokerto District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
13	Perkara antara Sudi Era Mulyani ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Perseroan Tergugat-2 = PT Veronica Jaya Abadi Tergugat-3 = Agung Dengan Nomor Perkara: 103/Pdt.G/2025/PN Tsm tertanggal 8 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Case between Sudi Era Mulyani ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant-1: The Company Defendant-2: PT Veronica Jaya Abadi Defendant-3: Agung Case Number: 103/Pdt.G/2025/PN Tsm, dated October 8, 2025, at Tasikmalaya District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Trial Process at Tasikmalaya District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
14	Perkara antara Suhariati ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 73/Pdt.G/2025/PN Jbg tertanggal 21 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jombang Case between Suhariati ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 73/Pdt.G/2025/PN Jbg, dated October 21, 2025, at Jombang District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jombang Trial Process at Jombang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
15	Perkara antara May Sarah ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Turut Tergugat-1 = Kepala Cabang Kantor BCA Finance Balikpapan Turut Tergugat-2 = Kepala Cabang Kantor FIF Group Balikpapan Turut Tergugat-3= Kepala Cabang Kantor Bussan Auto Finance Balikpapan Turut Tergugat-4 = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 251/Pdt.G/2025/PN Bpp tertanggal 1 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Balikpapan Case between May Sarah ("Consumer") as Plaintiff against: Co-Defendant-1: Branch Head of BCA Finance Balikpapan Co-Defendant-2: Branch Head of FIF Group Balikpapan Co-Defendant-3: Branch Head of Bussan Auto Finance Balikpapan Co-Defendant-4: The Company Case Number: 251/Pdt.G/2025/PN Bpp, dated October 1, 2025, at Balikpapan District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan Trial Process at Balikpapan District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
16	Perkara antara Irving Artemas ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat dan Turut Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 1291/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel tertanggal 21 November 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Case between Irving Artemas ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant and Co-Defendant: The Company Case Number: 1291/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel, dated November 21, 2025, at South Jakarta District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Trial Process at South Jakarta District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
17	Perkara antara Ilham R.H. Pontoh, Budiyawan Ointu, Fajar Ilham Huntua, Mohamad Ilham, Halim Gani, Carles Dama ("Non Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Perseroan Tergugat-2 = Hardi Herdian Pantu Turut Tergugat-1 = Uswatun Niswah Turut Tergugat-2 = Ayub Hasan Dengan Nomor Perkara: 90/Pdt.G/2025/PN Gto tertanggal 3 November 2025 di Pengadilan Negeri Gorontalo Case between Ilham R.H. Pontoh, Budiyawan Ointu, Fajar Ilham Huntua, Mohamad Ilham, Halim Gani, Carles Dama ("Non-Consumers") as Plaintiffs against: Defendant-1: The Company Defendant-2: Hardi Herdian Pantu Co-Defendant-1: Uswatun Niswah Co-Defendant-2: Ayub Hasan Case Number: 90/Pdt.G/2025/PN Gto, dated November 3, 2025, at Gorontalo District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo Trial Process at Gorontalo District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
18	Perkara antara Kusnanto ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Tarsono Tergugat-2 = Perseroan Tergugat-3 = Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Nomor Perkara: 61/Pdt.G/2025/PN Pml tertanggal 26 November 2025 di Pengadilan Negeri Pemalang Case between Kusnanto ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant-1: Tarsono Defendant-2: The Company Defendant-3: Financial Services Authority (OJK) Case Number: 61/Pdt.G/2025/PN Pml, dated November 26, 2025, at Pemalang District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Pemalang Trial Process at Pemalang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
19	Perkara antara Endang Sri Utaminingsih ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 1393/Pdt.G/2025/PN Sby tertanggal 9 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Surabaya Case between Endang Sri Utaminingsih ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 1393/Pdt.G/2025/PN Sby, dated December 9, 2025, at Surabaya District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Trial Process at Surabaya District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
20	Perkara antara Ansyar Said ("Non Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 109/Pdt.G/2025/PN Gto tertanggal 17 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Gorontalo Case between Ansyar Said ("Non-Consumer") as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 109/Pdt.G/2025/PN Gto, dated December 17, 2025, at Gorontalo District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo Trial Process at Gorontalo District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
21	Perkara antara Agustinus Samuel Permono ("Konsumen") selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Valentino Mega Wicaksono Tergugat-2 = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 96/Pdt.G/2025/PN Gns tertanggal 3 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Case between Agustinus Samuel Permono ("Consumer") as Plaintiff against: Defendant-1: Valentino Mega Wicaksono Defendant-2: The Company Case Number: 96/Pdt.G/2025/PN Gns, dated December 3, 2025, at Gunung Sugih District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Trial Process at Gunung Sugih District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
22	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Heriyansyah (Konsumen) Tergugat-2 = Lina Marlina Dengan Nomor Perkara: 39/Pdt.G.S/2025/PN Cbi tertanggal 6 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Cibinong Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant-1: Heriyansyah ("Consumer") Defendant-2: Lina Marlina Case Number: 39/Pdt.G.S/2025/PN Cbi, dated October 6, 2025, at Cibinong District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong Trial Process at Cibinong District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
23	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat= Afriandi Dengan Nomor Perkara: 27/Pdt.G.S/2025/PN Pdg tertanggal 28 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Padang Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant: Afriandi Case Number: 27/Pdt.G.S/2025/PN Pdg, dated October 28, 2025, at Padang District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Trial Process at Padang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
24	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Eko Prasetyo Mujiyanto Tergugat-2 = Emy Catur Ariyani Dengan Nomor Perkara: 21/Pdt.G.S/2025/PN Njk tertanggal 20 November 2025 di Pengadilan Negeri Nganjuk Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant-1: Eko Prasetyo Mujiyanto Defendant-2: Emy Catur Ariyani Case Number: 21/Pdt.G.S/2025/PN Njk, dated November 20, 2025, at Nganjuk District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk Trial Process at Nganjuk District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
25	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat = Safir Karisma Ajikirana Dengan Nomor Perkara: 55/Pdt.G.S/2025/PN Jbg tertanggal 24 November 2025 di Pengadilan Negeri Jombang Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant: Safir Karisma Ajikirana Case Number: 55/Pdt.G.S/2025/PN Jbg, dated November 24, 2025, at Jombang District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jombang Trial Process at Jombang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
26	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat = Harun Ali Dengan Nomor Perkara: 13/Pdt.G.S/2025/PN Pin tertanggal 28 November 2025 di Pengadilan Negeri Pinrang Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant: Harun Ali Case Number: 13/Pdt.G.S/2025/PN Pin, dated November 28, 2025, at Pinrang District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Pinrang Trial Process at Pinrang District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
27	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat = PT QILAU SEMESTA CITRA BUANA Dengan Nomor Perkara: 105/Pdt.G.S/2025/PN Blb tertanggal 25 November 2025 di Pengadilan Negeri Bandung Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant: PT QILAU SEMESTA CITRA BUANA Case Number: 105/Pdt.G.S/2025/PN Blb, dated November 25, 2025, at Bandung District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Bandung Trial Process at Bandung District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
28	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Hendro Yulianto Nurobi Tergugat-2 = Rina Agustina Dengan Nomor Perkara: 31/Pdt.G.S/2025/PN Llg tertanggal 5 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant-1: Hendro Yulianto Nurobi Defendant-2: Rina Agustina Case Number: 31/Pdt.G.S/2025/PN Llg, dated December 5, 2025, at Lubuklinggau District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Trial Process at Lubuklinggau District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
29	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Habibur Rahman Tergugat-2 = Mislah Ismawati Dengan Nomor Perkara: 67/Pdt.G.S/2025/PN Pkl tertanggal 15 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Pekalongan Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant-1: Habibur Rahman Defendant-2: Mislah Ismawati Case Number: 67/Pdt.G.S/2025/PN Pkl, dated December 15, 2025, at Pekalongan District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Pekalongan Trial Process at Pekalongan District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
30	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = Matrudi Tergugat-2 = Indah Suraya Dengan Nomor Perkara: 144/Pdt.G.S/2025/PN Sby tertanggal 15 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Surabaya Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant-1: Matrudi Defendant-2: Indah Suraya Case Number: 144/Pdt.G.S/2025/PN Sby, dated December 15, 2025, at Surabaya District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Trial Process at Surabaya District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
31	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat = PT DUTOFINDO VIRIYA PRODUCTION Dengan Nomor Perkara: 135/Pdt.G.S/2025/PN Sby tertanggal 10 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Surabaya Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant: PT DUTOFINDO VIRIYA PRODUCTION Case Number: 135/Pdt.G.S/2025/PN Sby, dated December 10, 2025, at Surabaya District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Trial Process at Surabaya District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
32	Perkara Perdata Gugatan Sederhana dimana Perseroan, selaku Penggugat melawan: Tergugat-1 = IR Sirhan Ronald Sitorus Tergugat-2 = Sihar Juliati Sinaga A.Md Dengan Nomor Perkara: 39/Pdt.G.S/2025/PN Clp tanggal 18 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Cilacap Simple Civil Case in which the Company, as Plaintiff, against: Defendant-1: IR Sirhan Ronald Sitorus Defendant-2: Sihar Juliati Sinaga A.Md Case Number: 39/Pdt.G.S/2025/PN Clp, dated December 18, 2025, at Cilacap District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap Trial Process at Cilacap District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
33	Perkara antara Liferiandi, selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 49/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pbr tertanggal 25 Juni 2025 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Case between Liferiandi as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 49/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pbr, dated June 25, 2025, at the Industrial Relations Court at Pekanbaru District Court	Proses Kasasi di Mahkamah Agung Cassation Process at the Supreme Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
34	Perkara antara I Ketut Wira Darmayuda, selaku Penggugat melawan: Tergugat = Perseroan Dengan Nomor Perkara: 13/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Dps tertanggal 2 Juli 2025 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Case between I Ketut Wira Darmayuda as Plaintiff against: Defendant: The Company Case Number: 13/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Dps, dated July 2, 2025, at the Industrial Relations Court at Denpasar District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar Trial Process at Denpasar District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
35	Perkara Pidana, dengan terdakwa: Achmad Dengan Nomor Perkara: 329/Pid.Sus/2025/Pn Mlg tertanggal 9 September 2025 di Pengadilan Negeri Malang Criminal Case, with Defendant: Achmad Case Number: 329/Pid.Sus/2025/PN Mlg, dated September 9, 2025, at Malang District Court	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya Appeal Process at Surabaya High Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
36	Perkara Pidana, dengan terdakwa: Dhimas Rony Wijayanarko ("Konsumen") Dengan Nomor Perkara: 112/Pid.Sus/2025/PN Wng tertanggal 25 November 2025 di Pengadilan Negeri Wonogiri Criminal Case, with Defendant: Dhimas Rony Wijayanarko ("Consumer") Case Number: 112/Pid.Sus/2025/PN Wng, dated November 25, 2025, at Wonogiri District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Wonogiri Trial Process at Wonogiri District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
37	Perkara Pidana, dengan terdakwa: Iswahyuddin Ilham Dengan Nomor Perkara: 247/Pid.B/2025/PN Gto tertanggal 9 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Gorontalo Criminal Case, with Defendant: Iswahyuddin Ilham Case Number: 247/Pid.B/2025/PN Gto, dated December 9, 2025, at Gorontalo District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo Trial Process at Gorontalo District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
38	Perkara Pidana, dengan terdakwa: Ardi Hardian Pantu Dengan Nomor Perkara: 244/Pid.B/2025/PN Gto tertanggal 9 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Gorontalo Criminal Case, with Defendant: Ardi Hardian Pantu Case Number: 244/Pid.B/2025/PN Gto, dated December 9, 2025, at Gorontalo District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo Trial Process at Gorontalo District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition
39	Perkara Pidana, dengan terdakwa: Zanyra Als Mona Binti Mansur Dengan Nomor Perkara: 406/Pid.Sus/2025/PN Sgl tertanggal 24 November 2025 di Pengadilan Negeri Sungai Liat Criminal Case, with Defendant: Zanyra Als Mona Binti Mansur Case Number: 406/Pid.Sus/2025/PN Sgl, dated November 24, 2025, at Sungai Liat District Court	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Sungai Liat Trial Process at Sungai Liat District Court	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan Have no material impact on the Company's financial condition

Selama tahun 2025, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja yang dihadapi oleh Perseroan.

During 2025, there were no cases categorized as significant/material and/or that could affect the Company's performance faced by the Company's.

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat tidak menerima sanksi administratif. Namun, Perseroan menerima sanksi finansial dari Otoritas Jasa Keuangan dengan total sebesar Rp54.300.000,00 dan Perseroan tidak menerima sanksi finansial dari regulator lainnya yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan/atau Kementerian Keuangan.

Throughout 2025, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were not subject to any administrative sanctions. However, the Company received financial sanctions from the Financial Services Authority totaling Rp54,300,000.00, but the Company was not subject to any financial sanctions from other regulators, such as Indonesia Stock Exchange and/or the Ministry of Finance.

Kode Etik [G-07]
Code of Conduct

Perseroan menempatkan integritas dan etika sebagai landasan utama dalam setiap aktivitasnya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perseroan dirancang untuk memastikan seluruh pegawai bertindak sesuai prinsip etika yang berlaku, baik dalam menjalankan tanggung jawab profesional di internal, mewakili Perseroan kepada pihak eksternal, menjaga kerahasiaan informasi, maupun dalam kegiatan investasi dan aktivitas di luar pekerjaan. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.

The Company's places integrity and ethics as the fundamental basis of every activity. The Company's Code of Ethics and Code of Conduct are designed to ensure that all employees act in accordance with applicable ethical principles, both when carrying out professional responsibilities internally, representing the Company to external parties, safeguarding confidential information, and conducting investment or activities outside of work. Compliance with prevailing regulations is an integral part of these guidelines.

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Perseroan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sebagai acuan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, menjaga etika kerja, mewakili perusahaan dengan integritas, berinteraksi dengan pihak eksternal secara tepat, serta mematuhi ketentuan terkait kerahasiaan, investasi, kegiatan di luar pekerjaan, dan kepatuhan, termasuk penerapan sanksi bila dilanggar.

KEY COMPONENTS OF THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT

The Company establishes the Code of Ethics and Code of Conduct as a reference for all employees in performing professional responsibilities, maintaining work ethics, representing the Company with integrity, interacting appropriately with external parties, and complying with provisions related to confidentiality, investment, external activities, and compliance, including the imposition of sanctions in case of violations.

SOSIALISASI DAN UPAYA PENEGAKANNYA

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersedia dalam sistem internal Perseroan, yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami, mengetahui, dan menerapkan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

DISSEMINATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

The Code of Ethics and Code of Conduct are available in the Company's internal system, easily accessible to all employees, enabling them to understand, become familiar with, and apply the provisions contained therein.

PERNYATAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BERLAKU BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KARYAWAN

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku diterapkan kepada seluruh personel Perseroan, termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, anggota komite Perseroan, serta karyawan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

STATEMENT ON THE APPLICABILITY OF THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND EMPLOYEES

The Code of Ethics and Code of Conduct apply to all Company personnel, including members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, members of Company committees, and employees who are established and responsible to the Board of Directors or the Board of Commissioners.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Perseroan akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkatan yang diatur dalam peraturan perusahaan, ketentuan internal, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT

In the event that a violation of the Code of Ethics and Code of Conduct is proven, the Company will impose sanctions in accordance with the level of violation as stipulated in Company regulations, internal provisions, or applicable laws and regulations.

PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN

Sepanjang tahun 2025, terdapat 2 (dua) pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dilakukan oleh Insan Perseroan.

VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT AND THE SANCTIONS IMPOSED

Throughout 2025, there were 2 (two) violations of the Code of Ethics and Code of Conduct committed by Company Personnel.

Kebijakan *Conflict Management* [G-09] [GRI 2-15]

Conflict Management Policy

Hingga akhir tahun pelaporan, Perseroan belum memiliki kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur mengenai *Conflict Management*. Dalam pelaksanaannya, penanganan potensi konflik kepentingan di lingkungan Perseroan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur internal terkait tata kelola perusahaan, termasuk pengaturan mengenai etika kerja dan kepatuhan.

As at the end of the reporting year, the Company does not yet have a written policy that specifically governs Conflict Management. In practice, the handling of potential conflicts of interest within the Company continues to refer to applicable laws and regulations as well as internal corporate governance–related policies and procedures, including provisions on work ethics and compliance.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Long-Term Performance-Based Compensation Policy for Management and/or Employees

Perseroan menyelenggarakan program pensiun sebagai bentuk kompensasi pesangon bagi karyawan. Dalam program ini, Perseroan membayarkan iuran ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan tetap karyawan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perseroan.

The Company administers a pension program as a form of severance compensation for employees. Under this program, the Company contributes to a Financial Institution Pension Fund (DPLK), with the contribution amount calculated based on a certain percentage of the fixed income of employees who meet the criteria established by the Company.

Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) [G-08]

Insider Trading

Seluruh organ Perseroan dilarang melakukan transaksi yang memanfaatkan informasi orang dalam (*insider information*). Informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki oleh pihak internal dan belum tersedia untuk publik. Apabila seorang personil Perseroan memiliki informasi tersebut, ia wajib menahan diri dari melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi maupun memengaruhi pihak lain, serta dilarang menyebarluaskan informasi tersebut.

Seluruh karyawan juga wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal Perseroan terkait perdagangan orang dalam (*insider trading*).

All Company organs are prohibited from conducting transactions that exploit insider information. Insider information refers to material information possessed by internal parties that has not yet been made available to the public. If a Company personnel member has access to such information, they must refrain from carrying out transactions for personal gain or influencing other parties, and are prohibited from disseminating the information.

All employees are also required to comply with laws and regulations as well as the Company's internal policies related to insider trading.

Akses Informasi & Data Perusahaan

Access to Company Information & Data

Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip transparansi kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan dengan menyediakan akses dan sarana informasi yang memadai. Selama tahun 2025, Perseroan selalu menyediakan informasi penting dan data perusahaan yang membutuhkan sosialisasi kepada publik baik melalui website Perusahaan (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) dan prehensif kepada pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.

The Company is committed to applying the principle of transparency to its shareholders and all stakeholders by providing adequate access to information and communication channels. Throughout 2025, the Company consistently made important information and company data available to the public, either through the Company's website (in Indonesian and English) or comprehensively to shareholders and all stakeholders.

Akses informasi dan data Perusahaan kepada publik secara eksternal dapat diakses melalui situs web resmi Perusahaan, media cetak, forum komunikasi internal dan media elektronik lainnya.

External access to the Company's information and data can be obtained through the Company's official website, print media, internal communication forums, and other electronic media.

MEDIA ELEKTRONIK

Perusahaan membangun dan memelihara komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai yaitu:

ELECTRONIC MEDIA

The Company establishes and maintains communication with stakeholders through appropriate information and communication technology, namely:

www.wom.co.id corporate.secretary@wom.co.id 150999

SITUS WEB

Perusahaan telah memiliki media untuk penyediaan Informasi Publik berupa situs web yang dapat diakses melalui alamat: http://www.wom.co.id. Situs ini merupakan media daring yang ditujukan untuk publik. Memuat berbagai informasi dan data mengenai Perusahaan, seperti produk, layanan, berita, rilis media dan informasi penting lainnya yang ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan. Situs web Perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan.

WEBSITE

The Company has established a medium for providing Public Information in the form of a website, accessible at: http://www.wom.co.id. This online platform is intended for the public and contains various information and data about the Company, such as products, services, news, press releases, and other important information aimed at all stakeholders. The Company's website publishes the Company's policies and other essential information.

KEGIATAN MEDIA RELATION

Di tahun 2025, Perseroan melaksanakan 36 (tiga puluh enam) kegiatan *Media Relations*, yang mencakup berbagai aktivitas sebagai berikut:

MEDIA RELATIONS ACTIVITIES

In 2025, the Company carried out 36 (thirty six) Media Relations activities, which included the following:

Tanggal Release Release Date	**Judul Release** Release Title
9 Januari 2025 January 9, 2025	WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Baru di Kupang WOM Finance Inaugurates New Branch Office in Kupang
15 Januari 2025 January 15, 2025	WOM Finance Perluas Layanan di Jawa Timur dengan Pembukaan Kantor Cabang di Pandaan WOM Finance Expands Services in East Java with Branch Opening in Pandaan
15 Januari 2025 January 15, 2025	Pindah ke Lokasi Baru, WOM Finance Kantor Cabang Ciputat Perluas Jangkauan Layanan Pembiayaan Relocating to a New Location, WOM Finance Ciputat Branch Expands Financing Service Reach
15 Januari 2025 January 15, 2025	WOM Finance Buka Kantor Cabang di Sangatta, Tingkatkan Akses Pembiayaan di Kalimantan WOM Finance Opens Branch in Sangatta, Increasing Financing Access in Kalimantan

Tanggal Release Release Date	Judul Release Release Title
4 Februari 2025 February 4, 2025	Rayakan Imlek 2025, WOM Finance Selenggarakan Program CSR untuk Masyarakat Pangkal Pinang Celebrating Chinese New Year 2025, WOM Finance Holds CSR Program for Pangkal Pinang Community
13 Februari 2025 February 13, 2025	WOM Finance Tingkatkan Akses Keuangan dengan Inklusi Keuangan WOM Finance Enhances Financial Access through Financial Inclusion
19 Februari 2025 February 19, 2025	Laba Bersih WOM Finance Capai Rp 263 Miliar di 2024, Tumbuh 11% WOM Finance Net Income Reaches Rp263 Billion in 2024, Growing 11%
20 Februari 2025 February 20, 2025	WOM Finance Resmikan Pindah Gedung Kantor Cabang Tembesi WOM Finance Inaugurates Relocation of Tembesi Branch Office
4 Maret 2025 March 4, 2025	WOM Finance Gelar Seremonial Pindah Gedung Kantor Cabang Sidoarjo 3 Waru WOM Finance Holds Relocation Ceremony for Sidoarjo 3 Waru Branch Office
7 Maret 2025 March 7, 2025	WOM Finance Resmikan Pindah Gedung Kantor Cabang Sumedang WOM Finance Inaugurates Relocation of Sumedang Branch Office
11 Maret 2025 March 11, 2025	WOM Finance Siap Gelar Pengundian WOMBASTIS 2024, Berhadiah Total Ratusan Juta Rupiah WOM Finance Ready to Hold WOMBASTIS 2024 Lucky Draw, with Total Prizes Worth Hundreds of Millions of Rupiah
18 Maret 2025 March 18, 2025	WOM Finance Sukses Gelar Pengundian WOMBASTIS 2024, Pemenang Hadiah Elektronik Sampai Dengan Mobil Diumumkan! WOM Finance Successfully Holds WOMBASTIS 2024 Lucky Draw, Winners of Prizes from Electronics to Cars Announced!
18 Maret 2025 March 18, 2025	Menyambut Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalisasi Tempat Ibadah di Wonogiri Welcoming Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalizes a Place of Worship in Wonogiri
19 Maret 2025 March 19, 2025	WOM Finance Gelar Literasi Keuangan Syariah di Cileungsi WOM Finance Holds Sharia Financial Literacy Program in Cileungsi
20 Maret 2025 March 20, 2025	Menyambut Ramadhan 1446 H, WOM Finance Revitalisasi Rumah Ibadah di Bogor Welcoming Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalizes Places of Worship in Bogor
20 Maret 2025 March 20, 2025	Menyambut Ramadhan 1446 H, WOM Finance Revitalisasi Rumah Ibadah Pangkep Welcoming Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalizes Place of Worship in Pangkep
21 Maret 2025 March 21, 2025	WOM Finance Revitalisasi Mushola An Nur di Blitar, Rayakan Idul Fitri dengan Semangat Kepedulian Sosial WOM Finance Revitalizes An Nur Prayer Room in Blitar, Celebrates Eid al-Fitr with Social Care Spirit
25 Maret 2025 March 25, 2025	WOM Finance Gelar RUPST dan RUPSLB, Tetapkan Pembagian Dividen WOM Finance Holds Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders, Approves Dividend Distribution
28 Maret 2025 March 28, 2025	Menyambut Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalisasi Tempat Ibadah di Pekanbaru Welcoming Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalizes a Place of Worship in Pekanbaru
28 Maret 2025 March 28, 2025	Menyambut Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalisasi Tempat Ibadah Palembang Welcoming Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalizes a Place of Worship in Palembang
28 Maret 2025 March 28, 2025	Menyambut Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalisasi Rumah Ibadah di Randudongka Welcoming Ramadan 1446 H, WOM Finance Revitalizes a Place of Worship in Randudongka
12 April 2025 April 12, 2025	WOM Finance Resmikan Perpindahan Kantor Cabang Mataram ke Lokasi Baru WOM Finance Inaugurates Relocation of Mataram Branch to New Location
24 April 2025 April 24, 2025	WOM Finance Bantu Masyarakat Serang Lewat Operasi Katarak Gratis WOM Finance Assists Serang Community Through Free Cataract Surgery
14 Mei 2025 May 14, 2025	WOM Finance Luncurkan Produk Baru: HajiKu, Solusi Pembiayaan Haji yang Mudah dan Terpercaya WOM Finance Launches New Product: HajiKu, an Easy and Reliable Hajj Financing Solution
15 Mei 2025 May 15, 2025	Perkuat Kepedulian Sosial, WOM Finance Lakukan Revitalisasi Rumah Ibadah Strengthening Social Care, WOM Finance Revitalizes Places of Worship
19 Mei 2025 May 19, 2025	WOM Finance Relokasi Kantor Cabang Bekasi 1, Perkuat Layanan di Bekasi WOM Finance Relocates Bekasi 1 Branch, Strengthening Services in Bekasi
20 Mei 2025 May 20, 2025	WOM Finance Luncurkan Produk Baru: HajiKu, Solusi Pembiayaan Haji yang Mudah dan Terpercaya WOM Finance Launches a New Product: HajiKu, an Easy and Reliable Hajj Financing Solution
22 Mei 2025 May 22, 2025	Membangun Generasi Melek Keuangan Syariah, WOM Finance Gelar Literasi Keuangan Building a Financially Literate Sharia Generation, WOM Finance Holds Financial Literacy Program
10 Juni 2025 June 10, 2025	WOM Finance Luncurkan Produk Baru: HajiKu, Solusi Pembiayaan Haji yang Mudah dan Terpercaya WOM Finance Launches New Product: HajiKu, an Easy and Reliable Hajj Financing Solution
16 Juni 2025 June 16, 2025	Perluas Jangkauan, WOM Finance Resmi Upgrade Kantor Cabang di Lamongan Expanding Reach, WOM Finance Officially Upgrades Branch in Lamongan
19 Juni 2025 June 19, 2025	WOM Finance Gelar Edukasi Keuangan, Fokus pada Perlindungan Konsumen WOM Finance Holds Financial Education Program, Focusing on Consumer Protection
23 Agustus 2025 August 23, 2025	Perluas Jangkauan Bisnis, WOM Finance *Upgrade* Kantor Cabang Purworejo Expanding Business Coverage, WOM Finance Upgrades Purworejo Branch Office
10 September 2025 September 10, 2025	Tingkatkan Layanan, WOM Finance Relokasi Kantor Cabang Bandung 2 Soreang Enhancing Services, WOM Finance Relocates Bandung 2 Soreang Branch
30 Oktober 2025 October 30, 2025	WOM Finance dan POS Indonesia Resmi Jalin Kerja Sama Strategis untuk Perluas Akses Layanan Pembiayaan di Seluruh Wilayah Indonesia WOM Finance and POS Indonesia Officially Establish Strategic Partnership to Expand Financing Services Across Indonesia

Tanggal Release Release Date	Judul Release Release Title
4 Desember 2025 December 4, 2025	WOM Finance Ajak Konsumen Berpartisipasi dalam Program Undian WOMBASTIS "Membuka Harapan" 2025 WOM Finance Invites Consumers to Participate in WOMBASTIS "Opening Hopes" 2025 Lucky Draw Program
10 Desember 2025 December 10, 2025	Jangkau Layanan Lebih Luas Ke Masyarakat, WOM Finance Tanjung Jabung Barat Resmi Upgrade Status Kantor Menjadi Kantor Cabang Reaching Wider Community Services, WOM Finance Tanjung Jabung Barat Officially Upgrades Office Status to Branch Office

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan *Media Visit*, yang mencakup berbagai kegiatan berikut:

Throughout 2025, the Company conducted 3 (three) Media Visit activities, which included the following:

Tanggal Date	Media
28 Februari 2025 February 28, 2025	*Media Visit* Jawa Pos Radar Semarang Jawa Pos Radar Semarang Media Visit
25 Maret 2025 March 25, 2025	*Press Conference* RUPST dan RUPSLB 2025 Press Conference for AGMS and EGMS 2025
25 Maret 2025 March 25, 2025	*Press Conference Public Expose* 2025 Press Conference for 2025 Public Expose

HUBUNGAN INVESTOR

Dalam rangka menjunjung prinsip keterbukaan dan kemudahan informasi, Perseroan membentuk Divisi *Financial Planning and Investor Relation* yang secara khusus bertanggung jawab mengelola hubungan dengan investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan secara rutin menyampaikan laporan keuangan melalui situs resmi di www.wom.co.id, di mana materi terkait kinerja bisnis tersedia untuk diakses dan diunduh oleh calon investor.

Selain itu, Perseroan menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk memfasilitasi informasi investor, antara lain pertemuan tatap muka, konferensi telepon, korespondensi melalui surat elektronik, serta kunjungan langsung. Korespondensi melalui *email* dapat dilakukan melalui corporate.secretary@wom.co.id.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan sebagai perusahaan publik, Perseroan menyelenggarakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 25 Maret 2025, yang dihadiri oleh pemegang saham, analis saham, dan perwakilan Bank-Bank yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Perseroan.

INVESTOR RELATIONS

In upholding the principles of transparency and ease of information access, the Company has established the Financial Planning and Investor Relations Division, which is specifically responsible for managing relationships with investors, regulators, and other stakeholders. The Company routinely submits financial statements through the official website at www.wom.co.id, where materials related to business performance are available for access and download by potential investors.

Furthermore, the Company provides various communication channels to facilitate investor information, including face-to-face meetings, conference calls, email correspondence, and direct visits. Email correspondence may be conducted via corporate.secretary@wom.co.id.

As a form of compliance with public company regulations, the Company held a Public Expose on March 25, 2025, attended by shareholders, stock analysts, and representatives of banks that have cooperation agreements with the Company.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Perseroan mengelola sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagai upaya memperkuat integritas dan kepatuhan Perseroan. Sistem ini menyediakan saluran resmi bagi seluruh karyawan, baik di kantor pusat, cabang, maupun Business Unit, untuk menyampaikan laporan terkait indikasi *fraud* atau pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.

Whistleblowing System diimplementasikan dalam kerangka Strategi *Anti-Fraud* dengan tujuan untuk:

1. Mendeteksi secara dini dugaan pelanggaran, indikasi *fraud*, atau pelanggaran etika melalui Laporan pengaduan. Laporan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk pelaksanaan investigasi independen dan penentuan tindak lanjut yang tepat.
2. Menciptakan dan mendorong budaya *anti-fraud* seluruh karyawan untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) karyawan menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi Perusahaan khususnya dalam konteks *Good Corporate Governance* yang akan meningkatkan citra Perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat *Anti-Fraud* yang memadai.

The Company manages a whistleblowing system as an effort to strengthen the Company's integrity and compliance. This system provides an official channel for all employees, whether at the head office, branch offices, or Business Units, to submit reports related to indications of fraud or violations of Company Regulations and applicable provisions.

The Whistleblowing System is implemented within the framework of the Anti-Fraud Strategy with the following objectives:

1. Early detection of suspected violations, indications of fraud, or ethical violations through whistleblowing reports. These reports then serve as the basis for conducting independent investigations and determining appropriate follow-up actions.
2. Creating and promoting an anti-fraud culture for all employees to participate in protecting their work units from losses due to fraud, leading to improved supervisory quality and a greater sense of ownership among employees.
3. Enhancing the Company's reputation, particularly in the context of Good Corporate Governance, by ensuring the availability of adequate Anti-Fraud mechanisms.

STRUKTUR DAN MEKANISME WBS

WBS STRUCTURE AND MECHANISM

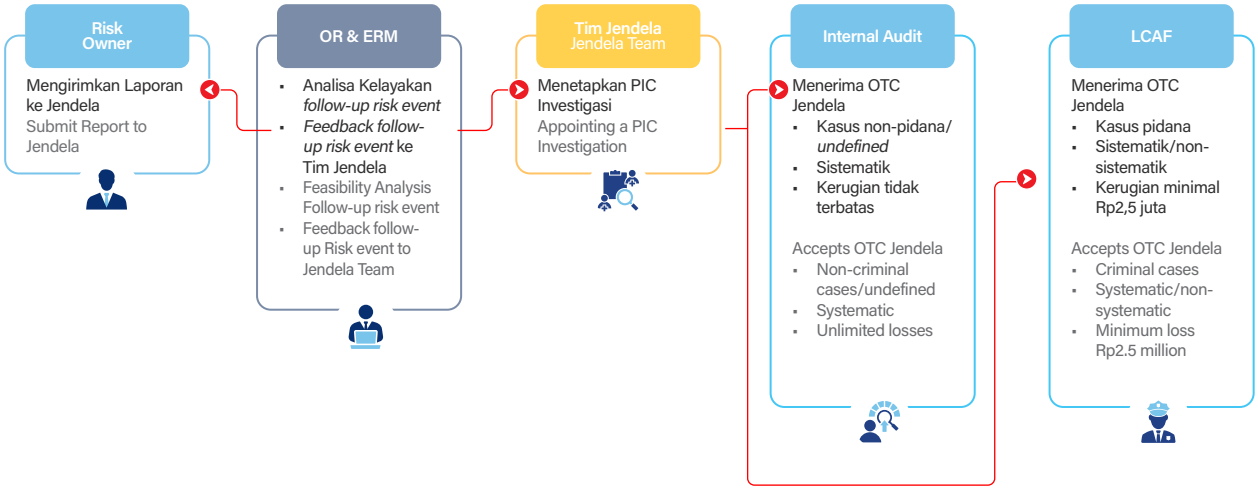

SOSIALISASI WBS

Perseroan terus memperkuat pemahaman seluruh Insan Perseroan mengenai mekanisme WBS. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan setiap individu mengetahui tanggung jawabnya dalam menjaga integritas, memahami prosedur pelaporan, serta menjalankan etika dalam berinteraksi

DISSEMINATION OF WBS

The Company continues to strengthen the understanding of all Company Personnel on the WBS mechanism. Dissemination activities are carried out to ensure that every individual understands the responsibility in maintaining integrity, is familiar with the reporting procedures, and upholds ethical



dengan pihak internal maupun eksternal. Selain itu, Perseroan menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta memastikan pelaporan dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Sebagai bentuk komitmen tersebut, perusahaan melakukan beberapa upaya, salah satunya melalui poster *Anti Fraud News* yang dikirimkan ke seluruh karyawan.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Perseroan menyediakan sarana pelaporan dugaan maupun indikasi pelanggaran melalui *email* Jendela (jendela@wom.co.id). Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku untuk memastikan penanganan yang tepat.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan memastikan setiap pelapor memperoleh perlindungan yang memadai, sebagaimana ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. *Email* Jendela hanya bisa diakses oleh Anggota Direksi dan beberapa fungsi tertentu dengan jabatan yang ditunjuk oleh Anggota Direksi. Keterbatasan akses terhadap email ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan informasi/laporan berikut pelapornya.
2. Laporan-laporan yang diterima akan ditangani secara rahasia dan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya untuk memastikan bahwa tidak terjadi balas dendam atau tindakan balasan terhadap pelapor.

PENANGANAN PENGADUAN DAN PIHAK YANG MENANGANI PENGADUAN

1. Pengaduan yang berasal dari *whistleblower* yang masuk ke *email* Jendela (jendela@wom.co.id) akan dilakukan analisa oleh fungsi *Operational Risk & Enterprise Risk Management* untuk menentukan pihak yang akan menangani pengaduan tersebut.
2. Laporan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti akan ditransfer kasusnya secara resmi atau *Officially Transferred Case* (OTC) melalui *email* ke Internal Audit atau Legal Counsel & Anti Fraud Division sesuai dengan kategori kasusnya.
3. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh tim Internal Audit atau Legal Counsel & Anti Fraud Division, meliputi proses investigasi *root cause*, penyusunan kronologis insiden, *action plan*, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku sesuai dengan peraturan Perusahaan.

conduct when interacting with both internal and external parties. In addition, the Company emphasizes the importance of maintaining confidentiality, complying with applicable regulations, and ensuring reports are submitted accurately and responsibly. As a form of this commitment, the Company has made several efforts, one of which is by having Anti Fraud News posters sent to all employees.

WHISTLEBLOWING REPORTING MECHANISM

The Company provides a reporting channel for suspected or indicated violations through the Jendela email (jendela@wom.co.id). Every incoming report will be followed up in accordance with the applicable Company rules and regulations to ensure proper handling.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Company ensures that each whistleblower receives adequate protection, in accordance with applicable provisions, as follows:

1. The Jendela email can only be accessed by Members of the Board of Directors and certain designated functions appointed by the Board of Directors. Limited access to this email serves to maintain the confidentiality of information/reports and the identity of the whistleblower.
2. Reports received will be handled confidentially and the identity of the whistleblower will be safeguarded to ensure there is no retaliation or adverse action against the whistleblower.

HANDLING OF COMPLAINTS AND RESPONSIBLE PARTIES

1. Complaints submitted by whistleblowers through the Jendela email (jendela@wom.co.id) will be analyzed by the Operational Risk & Enterprise Risk Management function to determine the appropriate party to handle the complaint.
2. Complaint reports requiring further action will be officially transferred as an Officially Transferred Case (OTC) via email to Internal Audit or the Legal Counsel & Anti-Fraud Division, according to the category of the case.
3. Complaints will be followed up by the Internal Audit team or the Legal Counsel & Anti-Fraud Division, encompassing root cause investigation, preparation of incident chronology, action plan development, and imposition of sanctions on the perpetrator in accordance with Company regulations.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun buku 2025, Perseroan menerima dan menindaklanjuti sejumlah pengaduan. Rincian jumlah pengaduan yang diterima beserta penyelesaian tindak lanjutnya disajikan sebagai berikut:

NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED AND PROCESSED IN THE LATEST FINANCIAL YEAR

Throughout the 2025 financial year, the Company received and acted upon several complaints. Details of the number of complaints received along with the status of their follow-up resolutions are presented as follows:

Status Laporan *Whistleblowing* *Whistleblowing Report Status*	**Jumlah pada Tahun 2025** Total Reports in 2025
Laporan diterima Report received	42
Indikasi *Fraud* Fraud Indications	38
Tidak terindikasi *Fraud* No Indication of Fraud	4

Kebijakan Anti Korupsi [G-07] [GRI 205-1, 205-2, 205-3]

Anti-Corruption Policy

Kebijakan internal yang berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan anti korupsi dan anti *fraud*, yang tertuang pada Peraturan Perusahaan, Pedoman Penerapan Strategi Anti-*Fraud*, Penilaian Risiko Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan.

Internal policies related to the commitment to implementing anti-corruption and anti-fraud measures are set forth in the Company Regulations, Anti-Fraud Strategy Implementation Guidelines, Anti-Bribery Management System Risk Assessment, Code of Ethics, and Code of Conducts of the Company.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perseroan menjadi acuan dalam mengarahkan perilaku di seluruh aspek operasional. Ketentuan tersebut mencakup tanggung jawab terhadap Perseroan, perilaku di lingkungan kerja, etika dalam mewakili Perseroan dan berinteraksi dengan pihak eksternal, pengelolaan informasi rahasia, dan aktivitas di luar pekerjaan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

The Company's Code of Ethics and Code of Conducts serve as a reference for directing behavior across all operational aspects. These provisions cover responsibilities toward the Company, workplace behavior, ethics in representing the Company and interacting with external parties, management of confidential information, activities outside of work, and compliance with applicable regulations.

Untuk memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas, Perseroan menerapkan praktik anti-*fraud* dan anti-korupsi melalui berbagai pedoman internal, antara lain Kode Etik, Pedoman Perilaku, Panduan Implementasi Strategi *Anti-Fraud*, Peraturan Perusahaan, serta Penilaian Risiko Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.

To strengthen a culture of integrity and accountability, the Company enforces anti-fraud and anti-corruption practices through a range of internal guidelines, including the Code of Ethics, Code of Conduct, Anti-Fraud Strategy Implementation Guide, Company Regulations, and Anti-Bribery Management System Risk Assessment.

OPERASI-OPERASI YANG DINILAI MEMILIKI RISIKO TERKAIT KORUPSI

Perseroan memiliki risiko korupsi yang serupa dengan industri sejenis. Risiko-risiko ini seringkali berpusat pada proses yang melibatkan interaksi dengan nasabah, pengelolaan dana, dan eksekusi jaminan. Operasi yang memiliki risiko terkait korupsi di perseroan antara lain:

1. Proses Pemberian Kredit (Pembiayaan) di mana tindakan korupsi dapat memfasilitasi kredit yang seharusnya ditolak, demi keuntungan pribadi dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam persetujuan kredit.

OPERATIONS ASSESSED TO HAVE CORRUPTION-RELATED RISKS

The Company faces corruption risks similar to those in comparable industries. These risks often center around processes involving interactions with customers, fund management, and collateral execution. Operations with corruption-related risks in the Company include:

1. Credit (Financing) Granting Process, where corrupt actions can facilitate the approval of loans that should have been rejected, for personal gain through abuse of authority in credit approval.



2. Pengelolaan Jaminan dan Penagihan, proses penarikan kendaraan bermotor (eksekusi jaminan fidusia) merupakan salah satu titik rawan tertinggi dalam tindakan korupsi di perseroan.
3. Pengadaan Barang dan Jasa, perseroan juga memiliki risiko korupsi seperti dalam pembelian aset, perlengkapan kantor, atau penggunaan jasa pihak ketiga.
4. Operasi Internal dan Sumber Daya Manusia, perseroan juga memiliki Risiko korupsi yang dapat terjadi dalam pengelolaan sumber daya internal seperti penyalahgunaan aset perusahaan dan penerimaan pegawai.

PROGRAM DAN PROSEDUR UNTUK MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA *(KICKBACKS)*, *FRAUD*, SUAP, DAN/ATAU GRATIFIKASI

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku tersebut, Perseroan juga menetapkan ketentuan mengenai pencegahan korupsi dan gratifikasi, yang antara lain mencakup:

1. Ketentuan mengenai anti gratifikasi yang termuat pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. Ketentuan anti gratifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja. Ketentuan anti gratifikasi tersebut antara lain meliputi:
   a. Larangan seluruh individu Perseroan memberikan hadiah, termasuk berupa hiburan yang patut diduga oleh pihak lain sebagai indikasi penyuapan atau gratifikasi.
   b. Larangan seluruh individu Perseroan menerima suatu pemberian atau hadiah yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan Perseroan, wewenang jabatan yang diembannya atau dalam suatu keadaan dimana kemudian tampak pada pihak lain bahwa pertimbangan bisnis yang dibuat telah dikompromikan.
   c. Tidak memperkenankan seluruh personil Perseroan menawarkan untuk memberikan bingkisan, hiburan, hadiah atau bentuk pemberian lainnya baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk:
      - Mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha Perseroan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
      - Mempengaruhi atau menimbulkan potensi benturan kepentingan.
2. Ketentuan mengenai anti korupsi yang termuat pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. Ketentuan anti korupsi tersebut antara lain meliputi:
   a. Larangan seluruh individu Perseroan memanfaatkan jabatannya di Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
   b. Kewajiban seluruh individu Perseroan harus tunduk dan patuh pada aturan hukum, moral dan etika serta seluruh kebijakan dan prosedur Perseroan yang berlaku.
   c. Larangan seluruh individu Perseroan menyalahgunakan nama Perseroan, fasilitas dan hubungan bisnis Perseroan

2. Collateral Management and Collection, with the repossession of motor vehicles (execution of fiduciary collateral) being one of the highest-risk points for corruption within the Company.
3. Procurement of Goods and Services, where the Company also faces corruption risks in asset purchases, office supplies, or the use of third-party services.
4. Internal Operations and Human Resources, where corruption risks may occur in managing internal resources, such as misusing Company assets or during employee recruitment.

PROGRAMS AND PROCEDURES TO ADDRESS CORRUPTION, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERY, AND/OR GRATUITIES

Based on the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, the Company also sets provisions on the prevention of corruption and gratuities, which include the following:

1. Provisions on anti-gratuities included in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct. These anti-gratuity provisions are intended to provide reasonable, proper, and trustworthy behavioral guidelines for all levels of the Company when interacting with customers, partners, and fellow employees. The anti-gratuity provisions include, among others:
   a. Prohibition for all Company personnel from giving gifts, including entertainment, that may be suspected by other parties as an indication of bribery or gratuity.
   b. Prohibition for all Company personnel from receiving any gift or benefit that is known or reasonably suspected to influence decision-making related to Company activities, the authority of their position, or in any circumstance that may cause others to perceive that business judgment has been compromised.
   c. Prohibition for all Company personnel from offering gifts, entertainment, rewards, or other forms of benefits, directly or indirectly, to other parties for the purpose of:
      - Influencing decision-making related to the Company's business activities in violation of applicable laws and regulations;
      - Influencing or creating potential conflicts of interest.
2. Provisions on anti-corruption included in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct. The anti-corruption provisions include, among others:
   a. Prohibition for all Company personnel from using their position within the Company for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the Company's benefits.
   b. Obligation for all Company personnel to comply with legal, moral, ethical standards as well as all applicable Company policies and procedures.
   c. Prohibition for all Company personnel from misusing the Company's name, facilities, or business relations

untuk kepentingan pribadi atau untuk hal-hal lain di luar pekerjaan.

for personal interests or for matters outside of their professional responsibilities.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA PEGAWAI

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta seluruh personil Perseroan untuk turut serta dalam mencegah, menghindari praktik korupsi dan gratifikasi dengan:

1. Menegakkan komitmen dari seluruh personal Perseroan untuk patuh pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan, ketentuan hukum yang berlaku, serta seluruh kebijakan internal Perseroan dengan menandatangani surat pernyataan komitmen pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku pada saat baru bergabung di Perseroan dan pada setiap tahunnya komitmen pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut dinyatakan Kembali oleh karyawan Perseroan melalui sistem internal Perseroan.
2. Menyelenggarakan *training anti fraud*, *training* penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta *training* mengenai nilai-nilai dasar (*core values*) Perusahaan.
3. Menyediakan saluran *whistleblowing system* Perseroan sebagai fasilitas penyampaian laporan pelanggaran, ketidakpatuhan atau penyimpangan di perusahaan.

Di tahun 2025, Perseroan melaksanakan pelatihan individual yang menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai Perseroan, kepatuhan APU PPT, dan penguatan budaya anti-*fraud* berdasarkan level jabatan berikut:

ANTI-CORRUPTION TRAINING/ DISSEMINATION PROGRAMS FOR EMPLOYEES

The Company consistently strives to enhance awareness and active participation of all personnel in preventing and avoiding corruption and gratuity practices through the following efforts:

1. Upholding the commitment of all Company personnel to comply with the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, applicable laws and regulations, and all internal Company policies by signing a personal commitment statement to the Code of Ethics and Code of Conduct upon joining the Company, and reaffirming this personal commitment annually through the Company's internal system.
2. Conducting anti-fraud training, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) program implementation training, as well as training on the Company's core values.
3. Providing the Company's whistleblowing system channel as a facility for reporting violations, non-compliance, or irregularities within the Company.

In 2025, the Company implemented individual training focused on the application of the Company's values, AML/CTF compliance, and strengthening of an anti-fraud culture, based on the following job levels:

Uraian Description	**Manajerial/Senior Manajer** Managerial/Senior Manager	**Supervisor**	**Staf** Staff
*Management Trainee**	0	81	0
Penerapan Strategi Anti *Fraud* Implementation of Anti-Fraud Strategy	239	1	0
Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Implementation of AML CTF and CPF Programs	347	1.646	3.933
WOM *On Boarding***	38	260	4.450
Jumlah Total	**624**	**1.988**	**8.383**

*) Pada pelatihan ini memuat materi pelatihan mengenai Nilai-nilai Perseroan, APU PPT dan Anti *Fraud* (3 Parameter harus terpenuhi).
**) Pelatihan yang diberikan khusus pada karyawan baru Perseroan yang mencakup materi pelatihan mengenai nilai-nilai perusahaan, APU PPT dan Anti *Fraud* (Pelatihan Khusus Karyawan Baru).
*) This training includes material on the Company's Values, AML/CTF, and Anti-Fraud (all three parameters must be fulfilled).
**) Training is specifically provided to new employees of the Company and includes material on the Company's values, AML/CTF, and Anti-Fraud (New Employee Training Program).

INSIDEN KORUPSI YANG TERBUKTI DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat insiden korupsi yang terbukti di lingkungan Perseroan. Namun demikian, mekanisme pengawasan dan sistem pelaporan terus diperkuat untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan kebijakan internal yang berlaku.

PROVEN CORRUPTION INCIDENTS AND ACTIONS TAKEN

As of December 31, 2025, there had not been any proven corruption incidents within the Company. Nevertheless, monitoring mechanisms and reporting systems continue to be strengthened to ensure that any indication of violations can be promptly addressed in accordance with applicable laws and internal policies.

Ketentuan & Kebijakan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa

Policies & Provisions on Vendor Management and Procurement of Goods & Services

Perseroan senantiasa memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan dan akuntabel melalui penerapan kebijakan yang terstandar. Dalam upaya tersebut, Perseroan telah menetapkan pedoman resmi mengenai pengelolaan pemasok dan pelaksanaan pengadaan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Nomor 279/SK/OPP/11-24 tentang Ketentuan Vendor Management dan Pengadaan Barang & Jasa.

The Company consistently ensures that all procurement processes for goods and services are conducted transparently and accountably through standardized policy implementation. To support this effort, the Company has established an official guideline on supplier management and procurement execution as stipulated in the Policy Number 279/SK/OPP/11-24 on Vendor Management and Procurement of Goods & Services.

LATAR BELAKANG

1. Melakukan proses seleksi terhadap calon pemasok rekanan secara adil, transparan, kompetitif, dan bermutu di dalam penyediaan barang/jasa serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjamin terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara Perusahaan dengan rekanan guna meningkatkan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah.
3. Perlunya standarisasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk menunjang kegiatan di Kantor Cabang, Kantor Regional, dan Kantor Pusat.
4. Menetapkan ketentuan, tata kelola, dan kontrol pengajuan pengadaan barang dan jasa dari Kantor Cabang, Kantor Regional dan Kantor Pusat sesuai dengan spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan.
5. Belum diaturnya ketentuan terkait perlindungan data pribadi pada saat dilakukannya kerja sama dengan vendor.

BACKGROUND

1. Conducting the selection process for prospective partner suppliers in a fair, transparent, competitive, and high-quality manner in providing goods/services, ensuring accountability in accordance with applicable regulations.
2. Ensuring the creation of mutually beneficial cooperation between the Company and its partners, enhancing capabilities in creating added value.
3. Standardizing the procurement of goods and/or services used to support activities at Branch Offices, Regional Offices, and the Head Office.
4. Establishing provisions, governance, and controls for submitting procurement requests from Branch Offices, Regional Offices, and the Head Office according to required goods/service specifications.
5. Addressing the absence of regulations governing personal data protection when engaging in cooperation with vendors.

TUJUAN

1. Melakukan seleksi rekanan yang kompetitif sehingga tercipta persaingan yang sehat diantara para rekanan dan memenuhi syarat serta kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik.
2. Memperoleh rekanan penyedia barang/jasa yang handal dan bermutu untuk kegiatan Perusahaan secara efektif dan efisien.
3. Mempercepat proses dan pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
4. Sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas pembelian barang dan/atau jasa.

OBJECTIVES

1. Conducting a competitive selection of partners, creating healthy competition among suppliers, and meeting specific requirements and criteria based on clear and transparent provisions and procedures, while applying Good Corporate Governance principles.
2. Obtaining reliable and high-quality providers of goods/services to support the Company's operations effectively and efficiently.
3. Accelerating processes and decision-making in the procurement of goods and/or services.
4. Serving as a guideline for conducting purchasing activities for goods and/or services.

KEBIJAKAN & PROSEDUR

1. Pengelolaan Pemasok
   a. Ketentuan Pengelolaan Pemasok
      - Proses Pengelolaan Pemasok mencakup seluruh proses pengadaan barang dan/ atau jasa yang berlaku di seluruh jaringan Perseroan.
      - Pemasok sebagai unsur terpenting dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa wajib dipastikan merupakan Pemasok yang terpercaya baik dari segi kualitas barang/ pelayanan, harga, pelayanan purna jual, atau waktu pengiriman. Untuk memastikan hal tersebut wajib dilakukan proses seleksi dan *monitoring* atas Pemasok yang akan dan/atau telah bekerjasama dengan Perseroan.
      - Pemasok rekanan Perseroan yang ditunjuk, diupayakan merupakan *authorized* distributor/ distributor resmi sehingga terjamin atas harga dan garansinya.
      - Penanggung jawab atas proses Pengelolaan Pemasok adalah *Procurement Department*. Seluruh fungsi kerja bertanggung jawab untuk mendukung proses Pengelolaan Pemasok dengan cara memberikan informasi calon-calon pemasok dan penilaian atas kinerja pemasok yang ada.
      - Aktivitas yang dilakukan dalam Pengelolaan Pemasok adalah sebagai berikut:
        1) *Vendor Relation*
           a) Pencarian Pemasok (*vendor sourcing*).
           b) Proses kerja sama dengan pemasok, pembuatan katalog pemasok, administrasi PKS pemasok.
           c) Kualifikasi dan evaluasi kinerja pemasok.
           d) Membina kerja sama dengan pemasok rekanan.
           e) Pemutusan kontrak kerja sama, pendataan *blacklisted* pemasok (*phasing out vendor*).
        2) *Vendor Selection*
           a) *Aanwijzing* dan analisa pemenang tender.
           b) Proses tender (penerimaan penawaran harga, penentuan jadwal tender, undangan tender, dan sebagainya).
           c) Seleksi pemasok: negosiasi harga, ketentuan pengiriman, pengaturan jangka waktu pembayaran, dan sebagainya.
           d) Pengajuan persetujuan pemenang tender dalam rangka mendapatkan pemasok rekanan.
           e) *Quality Assurance* atas kinerja pemasok: kunjungan vendor, PO *monitoring*, *quality checker* barang, ketepatan pengiriman, service delivery pemasok, dan sebagainya.

POLICIES & PROCEDURES

1. Supplier Management
   a. Supplier Management Provisions
      - The Supplier Management process covers all procurement processes for goods and/or services implemented throughout the Company's network.
      - Suppliers, as the most essential element in the procurement process for goods and/or services, must be ensured as trusted suppliers in terms of product/service quality, price, after-sales service, or delivery time. To ensure this, a selection and monitoring process must be conducted for suppliers that will or have already engaged in cooperation with the Company.
      - The Company's appointed partner suppliers should preferably be authorized/ official distributors to ensure pricing and warranty guarantees.
      - The party responsible for the Supplier Management process is the Procurement Department. All work functions are responsible for supporting the Supplier Management process by providing information on potential suppliers and performance assessments of existing suppliers.
      - Activities carried out in Supplier Management include the following:
        1) Vendor Relation
           a) Vendor sourcing.
           b) Cooperation process with suppliers, supplier catalog preparation, and supplier PKS (agreement) administration.
           c) Supplier qualification and performance evaluation.
           d) Maintaining cooperation with partner suppliers.
           e) Contract termination, supplier blacklist recording (phasing out vendor).
        2) Vendor Selection
           a) Aanwijzing and analysis for tender winners.
           b) Tender process (receipt of price quotations, tender schedule arrangement, tender invitations, et cetera).
           c) Supplier selection: price negotiation, delivery terms, payment period arrangements, et cetera.
           d) Submitting winning tender approval to obtain partner suppliers.
           e) Quality assurance of supplier performance: vendor visits, purchase order (PO) monitoring, goods quality checks, delivery timeliness, supplier service delivery, and other related activities.



2. Kriteria Pemasok
   Perseroan memastikan seluruh pemasok yang bekerja sama telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Perusahaan, sebagai berikut:

2. Supplier Criteria
   The Company ensures that all suppliers engaged in cooperation meet the required criteria and qualifications in accordance with Company provisions, as follows:

Kriteria Criteria	**Ketentuan** Conditions	
Bentuk Usaha Business Entity Form	Pemasok yang dapat bekerja sama dengan Perseroan dapat berupa: 1. Badan Hukum: a. Perseroan Terbatas (PT) b. Koperasi 2. Badan Usaha: a. Perusahaan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) b. Persekutuan Perdata (Maatschap) c. Firma 3. Perorangan: a. Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) b. Perorangan	Suppliers eligible to collaborate with the Company may include: 1. Legal Entities: a. Limited Liability Company (PT) b. Cooperative 2. Business Entities: a. Limited Partnership or Commanditaire Vennootschap (CV) b. Civil Partnership (Maatschap) c. Firm (Partnership) 3. Individuals: a. Trading Business (UD) or Trading Company (PD) b. Individual Entrepreneurs
Sumber Pemasok Supplier Source	Sumber pemasok yang akan bekerja sama dengan Perseroan dapat berasal dari: 1. Pemasok yang pernah bekerja sama dengan Perseroan. 2. Hasil pencarian dari *Procurement Department*. 3. Referensi dari karyawan Perseroan atau manajemen.	The sources of suppliers that will be eligible to collaborate with the Company may include: 1. Suppliers that have previously worked with the Company. 2. Suppliers identified through sourcing conducted by the Procurement Department. 3. Suppliers referred by Company employees or management.
Garansi Warranty	Pemasok bertanggung jawab memberikan layanan garansi atas setiap pengadaan barang/jasa yang dilakukan.	Suppliers are responsible for providing warranty services for each procurement of goods/services carried out.
Pengalaman Experience	1. Pemasok memiliki pengalaman dalam bidang usaha tersebut minimum 3 (tiga) tahun atau; 2. Untuk perusahaan yang belum memiliki pengalaman selama 3 (tiga) tahun tetapi telah menangani perusahaan besar minimum 3 (tiga) perusahaan. 3. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan/*project*, minimal sama besarnya dengan yang akan dikerjakan untuk Perseroan.	1. Suppliers must have a minimum of 3 (three) years of experience in the relevant business field; or 2. For companies that have not yet reached 3 (three) years of experience, they must have handled at least 3 (three) major companies. 3. Suppliers must have experience performing work/projects at least equal in scale to the work to be carried out for the Company.
Sumber Daya Manusia Human Resources	1. Memiliki tenaga ahli yang memadai dan mendukung pelaksanaan penyediaan barang dan/atau jasa tersebut dengan pengalaman dalam bidang tersebut minimum 3 (tiga) tahun. 2. Jika dibutuhkan untuk *project* tertentu, dan/atau dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, pemasok wajib memiliki *certified engineer* (tenaga ahli bersertifikasi) yang dapat diandalkan.	1. Having qualified experts who are adequate and capable of supporting the provision of the goods and/or services, with a minimum of 3 (three) years of experience in the relevant field. 2. If required for certain projects and/or mandated by laws and regulations, suppliers must have reliable certified engineers (certified professionals).
After Sales Service	1. Pemasok dapat memberikan *after sales service* dalam menindaklanjuti komplain/keluhan pada hari yang sama atau maksimal 3 (tiga) hari setelahnya. 2. Lokasi usaha pemasok berada di tempat yang strategis dan/atau memiliki akses yang baik dan/atau mempunyai jaringan/cabang untuk barang-barang yang digunakan di jaringan-jaringan Perseroan seluruh Indonesia.	1. Suppliers must be able to provide after-sales service in responding to complaints within the same day or within a maximum of 3 (three) days thereafter. 2. Suppliers' business locations are strategically situated and/or have good accessibility and/or maintain networks/branches to support the goods used across the Company's networks throughout Indonesia.
Term of Payment	1. Pemasok memberikan jangka waktu pembayaran pengadaan barang/jasa minimal 14 (empat belas) hari kerja setelah Perseroan menerima dokumen permintaan pembayaran dengan benar dan lengkap. 2. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa tertentu dapat dilakukan pembayaran dengan metode pembayaran bertahap (termin) sesuai *best practice* yang berlaku.	1. Suppliers shall provide a minimum payment term of 14 (fourteen) working days after the Company receives the payment request documents accurately and completely. 2. For certain goods and/or services procurement, payment may be made using a progressive (installment/term) payment method in accordance with applicable best practices.
Saran Usaha & Pendukung Business Recommendation & Supporting Information	Memiliki sarana usaha dan pendukung yang lengkap & produktif yang dibutuhkan oleh Perusahaan dengan ketentuan sarana dan prasarana yang digunakan pemasok tersebut merupakan milik pemasok sendiri atau hanya sebagian yang disewa.	Having complete and productive business facilities and supporting resources required by the Company, with the provision that the facilities and infrastructure used by the supplier are owned by the supplier or partially leased.
Risiko Kasus Litigasi Litigation Risk	Pemasok tidak memiliki potensi kasus litigasi (tidak memiliki riwayat terkena kasus hukum yang terekspos ke media massa/media sosial maupun yang diketahui dari pihak-pihak lain).	Suppliers must not have potential litigation risks (no history of legal cases that have been exposed in mass media/social media or known from other parties).

1. Evaluasi dan Pembinaan Rekanan
   a. Semua pemasok rekanan yang sudah masuk ke dalam daftar rekanan Perseroan wajib dievaluasi 1 (satu) kali setahun berdasarkan tanggal seleksi

1. Evaluation and Development of Partners
   a. All partner suppliers listed in the Company's vendor database must be evaluated once a year based on the previous vendor selection date, with the objective

rekanan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini, kesiapan rekanan, dan menilai kinerja dari rekanan.

b. Proses evaluasi dilakukan kepada daftar rekanan berdasarkan pada:
   - Historikal hubungan dengan rekanan (diundang tidak datang, wanprestasi, dll),
   - Hasil akhir dari tender (sering kalah tender),
   - Aktif memberikan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa,
   - Ketepatan penyerahan barang/jasa dari segi mutu, waktu, dan harga, serta
   - Jumlah komplain dari unit kerja.

c. Evaluasi Pemasok Renovasi.
   - Pemasok yang bekerjasama untuk pekerjaan renovasi dilakukan evaluasi atas hasil kinerja pemasok tersebut oleh fungsi terkait dan Procurement Department.
   - Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam kerjasama dengan pemasok selanjutnya.

d. Untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa telah menggunakan rekanan yang telah terdaftar, maka unit kerja terkait sesuai fungsi dan wewenangnya, bertugas membantu agar ketentuan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

2. Pengadaan Barang atau Jasa

a. Ketentuan Pengadaan Barang atau Jasa
   - Dalam rangka melakukan kerja sama dengan pemasok, Procurement Department berkoordinasi dengan Premises & GA Department bersama *function* terkait perihal daftar kebutuhan dan standardisasi/ spesifikasi kebutuhan barang/jasa yang ada di Perseroan.
   - Premises & GA Department dibantu dengan unit kerja terkait bertanggung jawab dalam hal penentuan standar/spesifikasi barang jasa dan daftar kebutuhannya untuk seluruh Jaringan kantor Perseroan.
   - Seluruh penyediaan atau pengadaan suatu barang dan jasa wajib telah melalui persetujuan pejabat berwenang sesuai dengan limit wewenang pengeluaran biaya yang berlaku dan merupakan tanggung jawab dari Premises & GA Department.

b. *Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)
   - Pada setiap pembelian barang/pengadaan jasa wajib terdapat surat perintah atas pengadaan barang/pengadaan jasa, surat perintah tersebut berupa:
     1) Barang, menggunakan *Purchase Order*.
     2) Jasa, menggunakan Perjanjian Kerja sama atau Surat Perintah Kerja.
   - Surat pemesanan barang/jasa (PO/SPK) yang sah mewakili Perseroan apabila dikeluarkan oleh fungsi Premises & GA Department sesuai dengan jenis kebutuhannya dan standar form yang berlaku untuk setiap pengadaan barang/ jasa yang dilakukan untuk Kantor Pusat.

of identifying current conditions, supplier readiness, and assessing supplier performance.

b. The evaluation process is carried out for partner suppliers based on:
   - Historical relationship with the supplier (attendance issues, default, etc.),
   - Tender results (frequent tender losses),
   - Proactiveness in providing information during the procurement process,
   - Accuracy in delivering goods/services in terms of quality, time, and price, and
   - Number of complaints received from work units.

c. Renovation Supplier Evaluation
   - Suppliers engaged for renovation work shall be evaluated on their performance results by the relevant function and the Procurement Department.
   - The evaluation results will be used as consideration for future cooperation with the supplier.

d. To ensure that the procurement of goods and services utilizes registered partner suppliers, the work units concerned, in accordance with their functions and authority, are responsible for supporting the effective implementation of this provision.

2. Procurement of Goods or Services

a. Provisions for Procurement of Goods or Services
   - In establishing cooperation with suppliers, the Procurement Department coordinates with the Premises & GA Department along with relevant functions on the list of requirements and the standardization/specification of the goods/ services required by the Company.
   - The Premises & GA Department, supported by the relevant work units, is responsible for determining the standards/specifications of goods and services and the list of needs for all Company office networks.
   - All provision or procurement of goods and services must be approved by authorized officials in accordance with the applicable expenditure approval limits and shall be the responsibility of the Premises & GA Department.

b. Purchase Order (PO) or Work Order (SPK)
   - Every purchase of goods/procurement of services must be accompanied by an official order document, consisting of:
     1) For goods procurement: Purchase Order (PO)
     2) For services procurement: Cooperation Agreement or Work Order (SPK)
   - A valid PO/SPK represents the Company if issued by the Premises & GA Department in accordance with the type of requirement and the standard form applicable for each procurement activity at the Head Office.

- Pengeluaran PO/SPK hanya merupakan kewenangan dari Premises & GA Department. Pengeluaran PO/SPK dilakukan oleh Premises & GA Department jika Internal Memo pengajuan dari *function* telah disetujui sesuai dengan pejabat limit dan telah dilakukannya negosiasi harga oleh Procurement Department yang dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
- Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pemasok rekanan yang dilakukan oleh Procurement Department, maka atas aktivitas pengeluaran PO/SPK atau adanya realisasi tagihan yang dilakukan oleh pemasok, Premises & GA Department harus menginformasikan aktivitas tersebut kepada Procurement Department.
- Standarisasi *Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)

c. Pembayaran Pengadaan Barang atau Jasa
   - Untuk kebutuhan pembayaran, pemasok tersebut wajib didaftarkan di sistem WISe. Pengajuan pendaftaran pemasok di sistem WISe melalui *Change Request* (CR) ditunjuk kepada IT Application Management Department diatur ketentuan sebagai berikut:
     1) Procurement Department untuk pemasok-pemasok yang diregister (disahkan) oleh Procurement Department dan pembayarannya dilakukan oleh Finance Kantor Pusat.
     2) *User Function* terkait untuk pemasok-pemasok yang diluar poin (a) diatas dan pemasok yang belum terdaftar di sistem.
     3) Fungsi terkait dapat mengajukan *change request* (CR) untuk pendaftaran vendor ke IT Application Management Department. Pengajuan *Change Request* (CR) wajib disetujui oleh Department Head Fungsi. Apabila pengajuan dari user/fungsi di Cabang/BU maka pengajuan CR diajukan melalui fungsi terkait di Kantor Pusat.
   - Pencatatan Pembelian Barang atau Pengadaan Jasa

     Pencatatan wajib dilakukan untuk setiap pembelian barang atau pengadaan jasa (baik renovasi atau non renovasi) yang memberikan peningkatan nilai aset. Khusus untuk aset tetap (aktiva tetap), pencatatan dilakukan oleh Accounting dan Premises & GA Department sebagai bentuk *dual control* atas monitoring aset tetap. Ketentuan mengenal aset selanjutnya mengacu pada Kebijakan perihal Pengelolaan Aset yang berlaku.

- Issuance of a PO/SPK is the authority of the Premises & GA Department. A PO/SPK will be issued once the Internal Memo submitted by the function has been approved according to the authorized approval limit and upon completion of price negotiation by the Procurement Department, evidenced by the Clarification and Negotiation Minutes.
- In conducting evaluation for partner suppliers performed by the Procurement Department, the Premises & GA Department must inform the Procurement Department of any PO/SPK issuance activities or billing realizations carried out by suppliers.
- Standardization of Purchase Order (PO) or Work Order (SPK)

c. Payment for Procurement of Goods or Services
   - For payment processing, suppliers must be registered in the WISe system. The supplier registration request in WISe through a Change Request (CR) submitted to the IT Application Management Department is regulated as follows:
     1) Procurement Department for suppliers registered/authorized by the Procurement Department and whose payments are processed by the Head Office Finance.
     2) Relevant User Function for suppliers outside point (a) above and suppliers not yet registered in the system.
     3) Relevant functions may submit a Change Request (CR) for vendor registration to the IT Application Management Department. The CR request must be approved by the respective Department Head. For submissions from Branch/BU users/functions, the CR must be submitted through the relevant function at the Head Office.
   - Recording of Goods Purchases or Service Procurement

     Recording must be carried out for every purchase of goods or procurement of services (whether renovation or non-renovation) that results in asset value enhancement. Specifically for fixed assets, recording must be performed by both the Accounting Department and the Premises & GA Department as a form of dual control in monitoring fixed assets. Further provisions on assets refer to the applicable Asset Management Policy.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of the Public Company Corporate Governance Guidelines

Komitmen Perseroan terhadap penerapan tata kelola yang baik diwujudkan melalui penerapan pedoman yang mengacu pada POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan mengimplementasikan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan tata kelola yang baik, dengan penerapan dalam Perseroan sebagai berikut:

The Company's commitment to implementing good governance is carried out by using guidelines that refer to POJK No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Guidelines for Public Company Governance and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Public Company Governance. The Company implements 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of good governance, and 25 (twenty five) recommendations that serve as benchmarks for the success of implementing good governance. As such, the Company implements the following matters:

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
ASPEK HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM **ASPECT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PUBLIC COMPANY AND SHAREHOLDERS IN SAFEGUARDING SHAREHOLDERS' RIGHTS**		
Prinsip 1 **Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** **Principle 1** **Enhancing the Value of the Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS)**		
1.1	Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Implementasi: Sesuai Teknis pengumpulan suara dalam RUPS Perseroan diatur dalam tata tertib RUPS (disampaikan kepada pemegang saham yang hadir sebelum penyelenggaraan RUPS) dan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi kepada pemegang saham, tata tertib RUPS Perseroan dapat diunduh pada *website* Perseroan: www.wom.co.id. Pada tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebagai berikut: 1. RUPS Tahunan Tahun 2025 yang diselenggarakan tanggal 25 Maret 2025; dan 2. RUPS Luar Biasa Tahun 2025 yang diselenggarakan tanggal 25 Maret 2025 Teknis pengumpulan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara terbuka sesuai tata cara yang disampaikan oleh pimpinan rapat, yaitu: 1. Tata cara pemungutan suara secara fisik: a. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan. b. Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh pemegang saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas Perseroan akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung. 2. Tata cara pemungutan suara secara elektronik: a. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat. b. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item* no. [...] *has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*' Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item* no. [...] *has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Berdasarkan pasal 20 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Bab 5 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham.

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
	A public company has procedures or technical mechanisms for collecting votes, whether conducted openly or by secret ballot, that prioritize independence and the interests of shareholders.	Implementation: Compliant The technical procedures for vote collection in the Company's GMS are regulated in the rules of procedure for the GMS (provided to shareholders in attendance prior to the GMS) and in the Company's Articles of Association, prioritizing independence and the interests of shareholders. As a form of transparency to shareholders, the Company's Rules of Procedure for the GMS can be downloaded from the Company's website: www.wom.co.id. In 2025, the Company held the following GMS: 1. Annual GMS 2025 held on March 25, 2025 2. Extraordinary GMS 2025 held on March 25, 2025 The procedure for collecting votes on each proposal submitted in each agenda item of the GMS, as referred to above, is conducted openly in accordance with the procedures communicated by the meeting chairman, as follows: 1. Voting Procedures for Physical Attendance: a. Voting is carried out verbally. b. Shareholders who are physically present and disagree or wish to cast a blank vote are invited to fill out the Voting Form that has been distributed. The Company's officers will collect the completed Voting Forms from the shareholders or their proxies, indicating the agenda item, the shareholder's name, the number of shares owned or represented, and the number of votes against or blank. The Company's officers will then submit the forms to the Notary for counting. 2. Voting Procedures for Electronic Attendance: a. The electronic voting process takes place on the eASY.KSEI application under the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu, during the voting period displayed on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application when opened by the Company. The Company allocates a maximum of 5 (five) minutes for Shareholders or their proxies to cast their electronic vote for each agenda item. b. During the voting process, the status "Voting for agenda item no. [...] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If Shareholders do not submit a vote for an agenda item until the status changes to "Voting for agenda item no. [...] has ended", it will be deemed an Abstain vote for the agenda concerned. c. Shareholders or their proxies who attend electronically may submit their votes from the Meeting Call until the opening of each agenda item. Shareholders or their proxies who have submitted their votes electronically may change or withdraw their votes no later than before the Chairman of the Meeting begins the voting process for resolution-adoption on each agenda item. If votes submitted prior to the Meeting are not changed or withdrawn, such votes are binding at the time the Chairman of the Meeting closes the vote for decision-making on each agenda item. Pursuant to Article 20 paragraph (17) of the Company's Articles of Association, shareholders of shares with valid voting rights who attend the GMS but abstain shall be deemed to have cast the same vote as the majority vote of shareholders issuing votes at the Meeting. Further information can be found in Chapter 5 regarding the General Meeting of Shareholders.

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual GMS.	Implementasi: Jelaskan Implementation: Explain 1. Kehadiran anggota Direksi pada RUPS yang diselenggarakan Perseroan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut: The attendance of the Board of Directors at the GMS held by the Company during 2025 is as follows: **RUPS Tahunan 25 Maret 2025** Annual GMS March 25, 2025: 100% Hadir / 100% Attendance **RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Extraordinary GMS March 25, 2025: 100% Hadir / 100% Attendance 2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris pada RUPS yang diselenggarakan Perseroan selama tahun 2025 Attendance of the Board of Commissioners at the GMS held by the Company during 2025 **RUPS Tahunan 25 Maret 2025** Annual GMS March 25, 2025: 100% Hadir / 100% Attendance **RUPS Luar Biasa 25 Maret 2025** Extraordinary GMS March 25, 2025: 100% Hadir / 100% Attendance Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dapat mewakili Perseroan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas setiap mata acara RUPS sehingga RUPS dapat dilaksanakan dengan baik. Informasi mengenai kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS selengkapnya dapat dilihat pada Bab 5 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris. The members of the Board of Directors and Board of Commissioners present may represent the Company in providing explanations to the shareholders on each agenda item of the GMS, ensuring the GMS is conducted properly. Further information regarding the attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners at the GMS can be found in Chapter 5 on the Board of Directors and Board of Commissioners
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS pada halaman *website* Perseroan dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan dapat diunduh pada *website* Perseroan: www.wom.co.id. Implementation: Compliant The Company has published a summary of the GMS minutes on the Company's website and it has been available for more than 1 (one) year. The summary of the Annual GMS minutes can be downloaded from the Company's website: www.wom.co.id.
Prinsip 2 **Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor** **Principle 2** **Enhancing the Quality of Communication between the Public Company and Shareholders or Investors**		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Implementasi: Sesuai Ketentuan internal Perseroan mengenai komunikasi dengan publik termasuk kepada pemegang saham maupun investor diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan serta Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang berlaku di Perseroan. Implementation: Compliant The Company's internal provisions on communication with the public, including shareholders and investors, are regulated in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct as well as the Communication Policy with Shareholders or Investors applicable in the Company.

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its website.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah mengungkapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan serta Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang berlaku di Perseroan pada *website* Perseroan: www.wom.co.id. Implementation: Compliant The Company has disclosed the Company's Code of Ethics and Code of Conduct as well as the Communication Policy with Shareholders or Investors applicable in the Company on the Company's website: www.wom.co.id.
ASPEK FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS **ASPECT OF THE FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**		
Prinsip 3 **Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris** **Principle 3** **Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners**		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company.	Implementasi: Sesuai Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris ditentukan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. Rekomendasi tersebut juga telah memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan Perseroan. Per 31 Desember 2025, Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat berjumlah 4 (empat) orang, di mana 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen. Implementation: Compliant The number and composition of the Board of Commissioners members are determined through the Company's Nomination and Remuneration Committee, which provides recommendations to the Board of Commissioners to then seek approval from the GMS. These recommendations also take into account the prevailing regulations and consider the Company's condition, capacity, achievement of objectives, and fulfillment of the Company's needs. As of December 31, 2025, the Company's Board of Commissioners in office consists of 4 (four) members, of which 50% (fifty percent) are Independent Commissioners.
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Commissioners considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Implementasi: Sesuai Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris. Implementation: Compliant The determination of the composition of the Board of Commissioners considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required to support the performance of their duties as members of the Board of Commissioners. The composition of the Company's Board of Commissioners reflects the diversity of its members, in terms of education (field of study), work experience, and age, as presented in Company Profile Chapter on the profile of each Board of Commissioners member.
Prinsip 4 **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** **Principle 4** **Enhancing the Quality of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities Implementation**		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.	Implementasi: Sesuai Kebijakan penilaian Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang dapat diakses melalui *website* Perseroan: www.wom.co.id. Dalam Piagam Dewan Komisaris tersebut mengatur mengenai penilaian dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun secara kolegial yang wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode *self-assessment* atau dengan metode lainnya. Implementation: Compliant The Board of Commissioners' evaluation policy is regulated in the Board of Commissioners Charter, which can be accessed on the Company's website: www.wom.co.id. The Board of Commissioners Charter regulates the evaluation and performance measurement of the Board of Commissioners, both individually and collectively, which must be conducted at least once a year using a self-assessment method or other methods.

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Public Company's Annual Report.	Implementasi: Sesuai Kebijakan penilaian Dewan Komisaris telah diatur dalam Piagam Dewan Komisaris dan mekanisme penilaian Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Implementation: Compliant The Board of Commissioners' evaluation policy has been regulated in the Board of Commissioners Charter, and the assessment mechanism of the Board of Commissioners is disclosed in the Company's Annual Report.
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy on the resignation of Board members if they are involved in financial crimes.	Implementasi: Sesuai Dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan terdapat ketentuan bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud dalam Piagam Dewan Komisaris tersebut mencakup juga persyaratan yang diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris selama menjabat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Implementation: Compliant The Company's Board of Commissioners Charter includes provisions stating that a member's term of office may end if the Board member no longer meets the requirements of OJK regulations and other applicable laws and regulations. The laws and regulations requirements referred to in the Board of Commissioners Charter also include the requirements stipulated in POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which state that members of the Board of Commissioners must, during their terms of office, meet the requirement of never having been convicted of crimes that harm state finances and/or are related to the financial sector.
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee responsible for Nomination and Remuneration functions establishes a succession policy in the nomination process of the Board of Directors members.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah memiliki Kebijakan Suksesi dalam Proses Nominasi Anggota Direksi Versi 01 Tahun 2021 yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Implementation: Compliant The Company has established a Succession Policy in the Nomination Process of Board of Directors Members, Version 01 of 2021, prepared by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board of Commissioners.

ASPEK FUNGSI DAN PERAN DIREKSI
ASPECT OF THE FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Prinsip 5
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
Principle 5
Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors

5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and the effectiveness in decision-making.	Implementasi: Sesuai Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. Perseroan juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan Perseroan dalam menentukan jumlah anggota Direksi. Per 31 Desember 2025, Direksi Perseroan berjumlah 5 (lima) anggota. Implementation: Compliant The determination of the number and composition of the Board of Directors members is carried out through the Company's Nomination and Remuneration Committee, which provides recommendations to the Board of Commissioners to then seek approval from the GMS. The Company also considers the condition, capacity, achievement of objectives, and fulfillment of the Company's needs in determining the number of Board of Directors members. As of December 31, 2025, the Company's Board of Directors consists of 5 (five) members.

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Directors considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Implementasi: Sesuai Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, dan usia yang dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai profil masing-masing anggota Direksi. Implementation: Compliant The determination of the composition of the Board of Directors members considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required to support the performance of their duties as members of the Board of Directors. The composition of the Company's Board of Directors reflects the diversity of its members in terms of education (field of study), work experience, and age, as presented in Company Profile Chapter on the profile of each Board of Directors member.
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors overseeing the accounting or finance division possess expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Implementasi: Sesuai Pelaksanaan tugas dan wewenang Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan untuk tahun 2025 dilakukan oleh Cincin Lisa Hadi. Informasi lebih lanjut mengenai Cincin Lisa Hadi, mohon melihat profil Cincin Lisa Hadi selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan. Implementation: Compliant The implementation of the duties and authorities of the Director overseeing the accounting and finance division for 2025 is carried out by Cincin Lisa Hadi. For further information on Cincin Lisa Hadi, please refer to her profile as Director and Corporate Secretary.
Prinsip 6 **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi** **Principle 6** **Enhancing the Quality of the Board of Directors' Duties and Responsibilities Implementation**		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors	Implementasi: Sesuai Kebijakan penilaian Direksi diatur dalam Piagam Direksi yang dapat diakses melalui *website* Perseroan: www.wom. co.id. Dalam Piagam Direksi tersebut mengatur mengenai penilaian kinerja Direksi baik secara individu maupun kolegial wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan target pencapaian kinerja Perseroan atau individu anggota Direksi maupun pencapaian-pencapaian komponen lain yang tercantum dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi. Implementation: Compliant The Board of Directors' assessment policy is regulated in the Board of Directors Charter, which can be accessed on the Company's website: www.wom.co.id. The Board of Directors Charter regulates the performance assessment of the Board of Directors, both individually and collectively, which must be conducted at least once a year. The assessment and measurement of the performance of Board members are based on the execution of duties carried out by the respective members according to the Company's performance targets or individual targets of the Board members, as well as the achievement of other components listed in the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPIs).
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors is disclosed through the Public Company's annual report.	Implementasi: Sesuai Kebijakan penilaian Direksi telah diatur dalam Piagam Direksi dan penilaian kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Implementation: Compliant The Board of Directors' assessment policy has been regulated in the Board of Directors Charter, and the assessment of the Board of Directors' performance is disclosed in the Company's Annual Report.

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy on the resignation of Board members if they are involved in financial crimes.	Implementasi: Sesuai Dalam Piagam Direksi terdapat ketentuan bahwa jabatan anggota Direksi dapat berakhir jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud dalam Piagam Direksi tersebut mencakup juga persyaratan yang diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa anggota Direksi selama menjabat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Implementation: Compliant The Board of Directors Charter contains provisions stating that a member's term of office may end if the Board member no longer meets the requirements of OJK regulations and other applicable laws. The regulatory requirements referred to in the Board of Directors Charter also include the requirements stipulated in POJK Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which state that members of the Board of Directors must, during their term of office, meet the requirement of never having been convicted of crimes that harm state finances and/or are related to the financial sector.
PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN **STAKEHOLDERS ENGAGEMENT**		
Prinsip 7 **Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan** **Principle 7** **Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Engagement**		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Public Company has a policy to prevent insider trading.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah mengatur ketentuan tentang pencegahan terjadinya perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan yang dapat diunduh pada *website* Perseroan www.wom.co.id. Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menetapkan bahwa personil Perseroan tidak diperkenankan melakukan transaksi dengan menggunakan informasi orang dalam (*insider information*) yaitu informasi material atau penting yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Apabila personil Perseroan memiliki informasi orang dalam, maka personil Perseroan tersebut wajib untuk tidak melakukan transaksi baik untuk diri sendiri maupun mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi, serta tidak meneruskan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain. Selain itu, dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku mengatur pula kewajiban personil Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan yang terkait dengan kegiatan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Implementation: Compliant The Company has regulated provisions on the prevention of insider trading in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, which can be downloaded from the Company's website: www.wom.co.id. The Code of Ethics and Code of Conduct stipulates that Company personnel are prohibited from conducting transactions using insider information, which is material or important information held by insiders that is not yet publicly available. If Company personnel possess insider information, they are required not to conduct transactions for themselves, not to influence others to conduct transactions, and not to forward or provide such information to others. In addition, the Code of Ethics and Code of Conduct also regulates the obligation of Company personnel to comply with applicable laws and regulations as well as the Company's internal policies related to insider trading activities.
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. The Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	Implementasi: Sesuai Perseroan memiliki kebijakan mengenai anti korupsi seperti: 1. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku; 2. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan 3. Kebijakan mengenai Penilaian Risiko Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Perseroan memiliki kebijakan mengenai anti *fraud* seperti Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*. Implementation: Compliant The Company has policies on anti-corruption, such as: 1. Code of Ethics and Code of Conduct; 2. Anti-Bribery Management System Policy; and 3. Policy on Risk Assessment of the Anti-Bribery Management System. The Company has policies on anti-fraud, such as the Guidelines for Implementing Anti-Fraud Strategies.

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy on the selection and capability enhancement of suppliers or vendors.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah memiliki kebijakan terkait kerjasama dengan dealer yang tertuang pada: 1. Kebijakan Grading Dealer Nomor 018/SKB/RISK/01-18 versi 02 yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2018. 2. Prosedur Pengajuan Kerjasama Dealer dan Registrasi Referantor Nomor 010/PCD/OPP&SQ/10-19 versi 01 yang berlaku pada tanggal 20 Maret 2020. 3. Kebijakan Kerjasama Dealer Nomor 077/SK/OPP/06-21 versi 2 yang berlaku pada tanggal 5 Juli 2021. Selain itu Perseroan memiliki Ketentuan *Vendor Management* dan Pengadaan Barang & Jasa yang tertuang pada: 1. Ketentuan *Vendor Management* dan Pengadaan Barang & Jasa Nomor 279/SK/OPP/11-24 versi 4 yang berlaku pada tanggal 18 Desember 2024. 2. Prosedur *Vendor Management* dan Pengadaan Barang & Jasa Nomor 031/PCD/OPP/09-24 versi 02 yang berlaku pada tanggal 25 September 2024. Implementation: Compliant The Company has established policies related to cooperation with dealers as set out in: 1. Dealer Grading Policy Number 018/SKB/RISK/01-18 version 02, effective February 1, 2018. 2. Dealer Cooperation and Referrer Registration Procedure Number 010/PCD/OPP&SQ/10-19 version 01, effective March 20, 2020. 3. Dealer Cooperation Policy Number 077/SK/OPP/06-21 version 2, effective July 5, 2021. In addition, the Company has Vendor Management and Procurement provisions as outlined in: 1. Vendor Management and Procurement of Goods & Services Number 279/SK/OPP/11-24 version 4, effective December 18, 2024. 2. Vendor Management and Procurement Procedure Number 031/PCD/OPP/09-24 version 02, effective September 25, 2024
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy on fulfilling creditors' rights.	Implementasi: Sesuai Kebijakan terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Implementation: Compliant Policies related to the protection of creditors' rights are outlined in the Good Corporate Governance Guidelines.
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. The Public Company has a whistleblowing system policy.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana tertuang pada *Policy* Manajemen Risiko, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan. Implementation: Compliant The Company has established a whistleblowing system policy as set out in the Risk Management Policy, Code of Ethics, and Code of Conduct.
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Public Company has a policy on providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah memiliki: 1. Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi sebagaimana tertuang pada Kebijakan Nomor 054/ SK/HCSD/03-22 versi 01 yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 tentang Kebijakan Remunerasi yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, serta Kebijakan Pemberian Insentif Jangka Panjang kepada Direksi. 2. Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan sebagaimana tertuang pada Kebijakan Nomor 055/SK/HCSD/03-22 versi 01 yang berlaku pada tanggal 7 Maret 2022 tentang Kebijakan Remunerasi yang berlaku bagi Karyawan serta Kebijakan Pemberian Insentif Jangka Panjang kepada Karyawan. Implementation: Compliant The Company has established: 1. A policy on providing long-term incentives to the Board of Directors as set out in Policy Number 054/SK/HCSD/03-22 version 01, effective April 1, 2022, on the Remuneration Policy applicable to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, DPS, and the Long-Term Incentive Policy for the Board of Directors. 2. A policy on providing long-term incentives to employees as set out in Policy Number 055/SK/HCSD/03-22 version 01, effective March 7, 2022, on the Remuneration Policy applicable to employees and the Long-Term Incentive Policy for employees.

No.	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation
KETERBUKAAN INFORMASI **INFORMATION DISCLOSURE**		
Prinsip 8 **Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi** **Principle 8** **Enhancing the Implementation of Information Disclosure**		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes information technology more broadly beyond its Website as a medium for disclosure of information.	Implementasi: Sesuai Perseroan telah memanfaatkan teknologi informasi, baik *website* Perseroan, media internal dan/atau media komunikasi massa, untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementation: Compliant The Company has utilized information technology, including the Company's website, internal media, and/or mass communication channels, to carry out information disclosure to stakeholders.
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company's Annual Report discloses ultimate beneficial owners holding at least 5% (five percent) of the Public Company's shares, in addition to the disclosure of ultimate beneficial owners through the major and controlling shareholders.	Implementasi: Sesuai Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan: 1. Daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki saham Perseroan 5% (lima persen) atau lebih; 2. Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan; dan/atau 3. Pemegang saham utama/pemegang saham pengendali Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan mengenai Struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali Implementation: Compliant The Company's Annual Report discloses: 1. A list of the Company's shareholders holding 5% (five percent) or more of the Company's shares; 2. Ultimate beneficial owners in the ownership of the Company's shares; and/or 3. Major/controlling shareholders of the Company. Further information can be found in Company Profile Chapter on the Structure of Major and Controlling Shareholders.

06

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

Perseroan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis melalui pembiayaan yang bertanggung jawab, penguatan tata kelola serta kolaborasi digital untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

The Company integrates sustainability principles into its business strategy through responsible financing, governance strengthening and digital collaboration to create long-term value for stakeholders.





Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Sustainability Performance Highlights

ASPEK EKONOMI

ECONOMIC ASPECT

KINERJA EKONOMI [OJK B.1]

ECONOMIC PERFORMANCE [OJK B.1]

Portofolio Pembiayaan
Financing Portfolio

(Rp Juta)
(Rp Million)

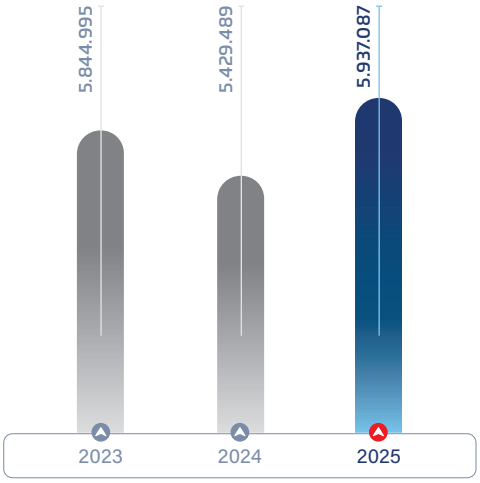

Total Pendapatan
Total Revenues

(Rp Juta)
(Rp Million)

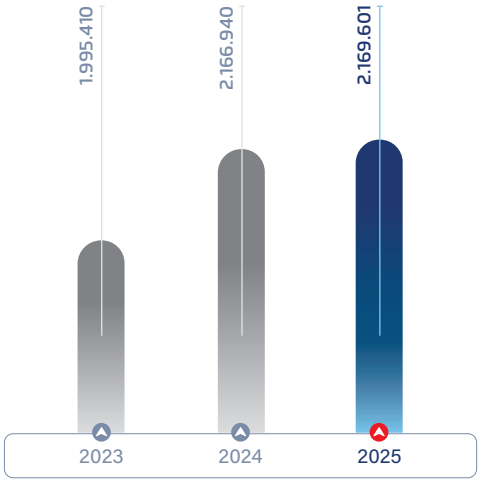

Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

(Rp Juta)
(Rp Million)

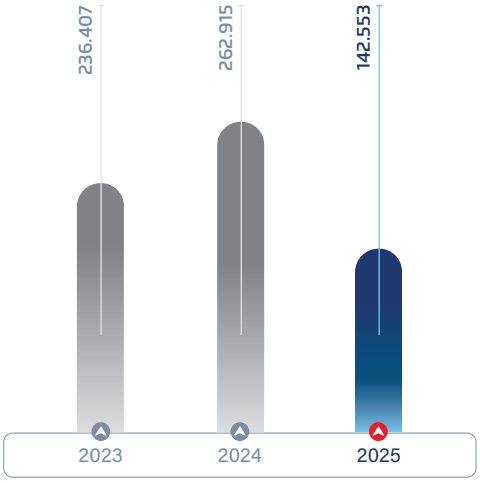

Total Perolehan Nilai Ekonomi
Total Economic Value Acquired

(Rp Juta)
(Rp Million)

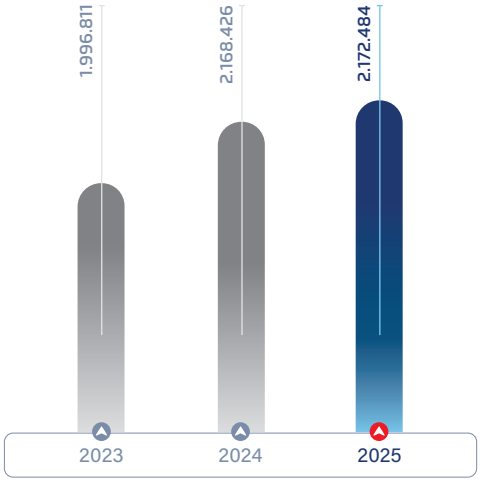

Total Nilai Ekonomi Didistribusikan
Total Economic Value Distributed

(Rp Juta)
(Rp Million)

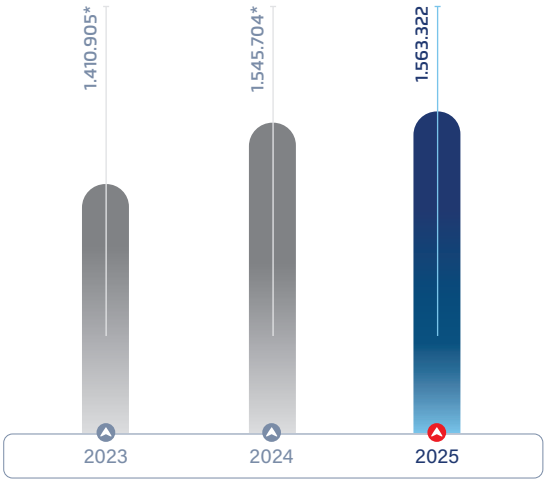

*)Penyajian kembali
*)Restatement

Pajak kepada Negara
Taxes to the State

(Rp Juta)
(Rp Million)

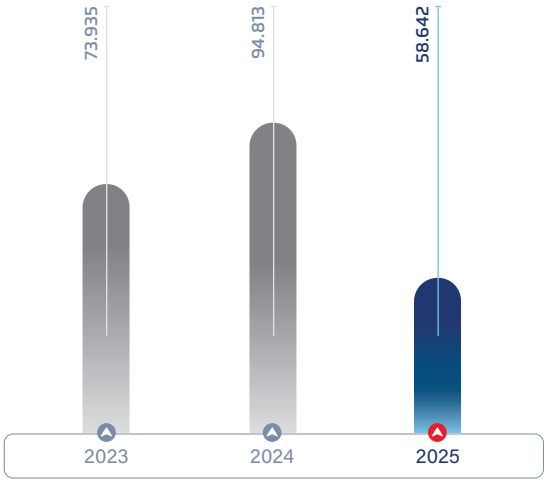

Persentase Pemasok Lokal
Local Suppliers Percentage

(%)

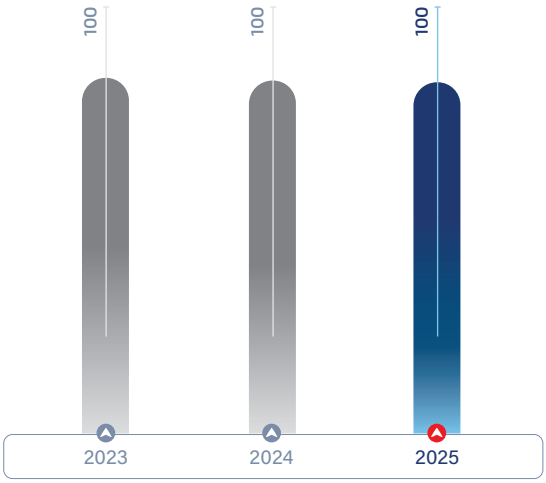

Produk Ramah Lingkungan (Pembiayaan Kendaraan Listrik Roda Dua)
Green Product (Electric Vehicle Two Wheeler Financing)

(Rp Juta)
(Rp Million)

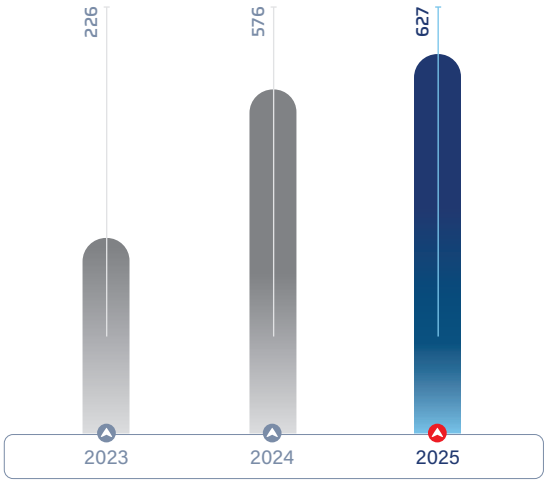

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

KINERJA LINGKUNGAN [OJK B.2]

Konsumsi Bahan Bakar
Fuel Consumption

(Gigajoules/GJ)

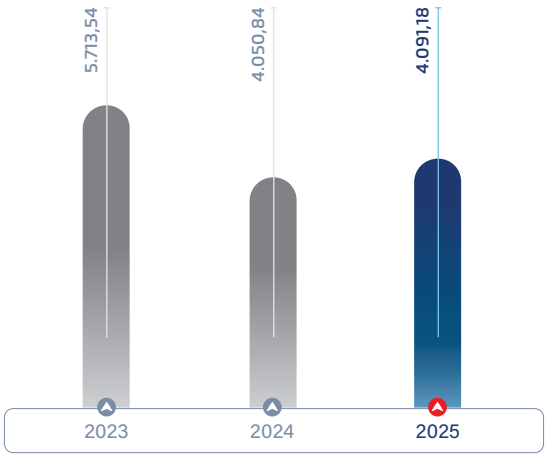

Penggunaan Energi
Energy Consumption

(Gigajoules/GJ)

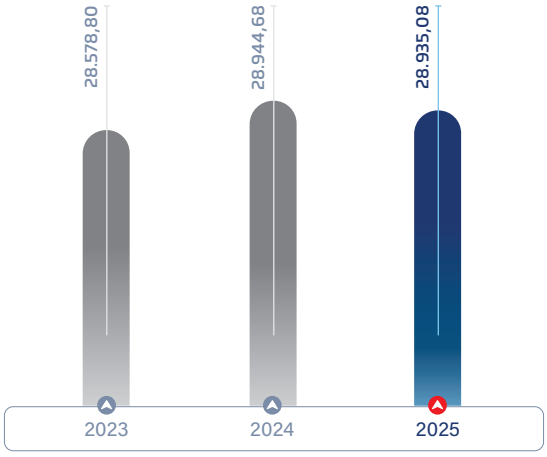

ENVIRONMENTAL ASPECT

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE [OJK B.2]

Pemakaian Listrik
Electricity Usage

(Gigajoules/GJ)

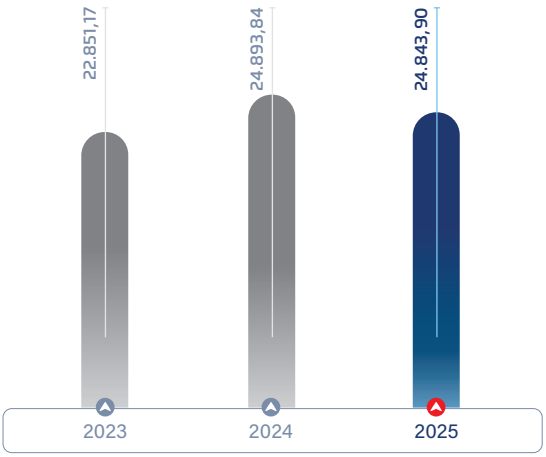

Cakupan 1 - Emisi GRK
Scope 1 - GHG Emission

(Ton CO_2 eq)

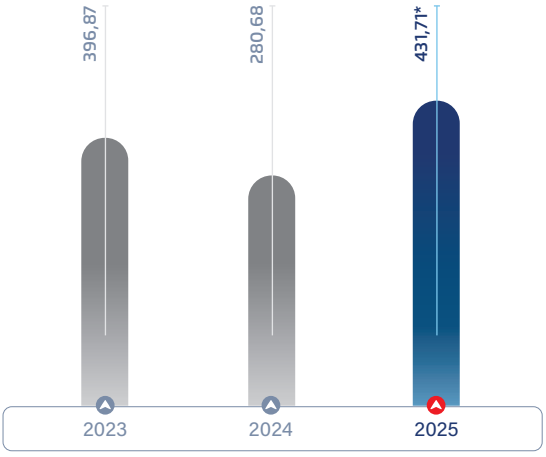

*) Pada tahun 2025, penghitungan Emisi GRK Cakupan 1 untuk pertama kalinya mencakup tambahan perhitungan emisi dari sumber bahan bakar *Generator Set*, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan *Refrigerant* untuk *Air Conditioner* yang belum dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.
In 2025, Scope 1 GHG emission calculation for the first time covers calculation of emission from fuel sources for Generator Set, Light Fire Extinguishers and Air Conditioner Refrigerants, that have not been done in previous years.

Cakupan 2 - Emisi GRK
Scope 2 - GHG Emission

(Ton CO_2 eq)

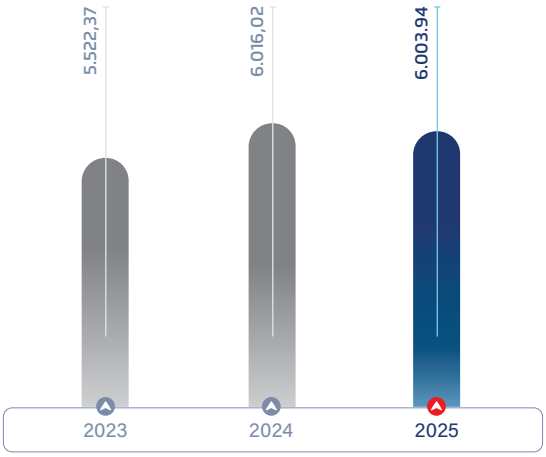

Cakupan 3 - Emisi GRK (Perjalanan Dinas via Udara)
Scope 3 - GHG Emission (Business Travel by Air)

(Ton CO_2 eq)

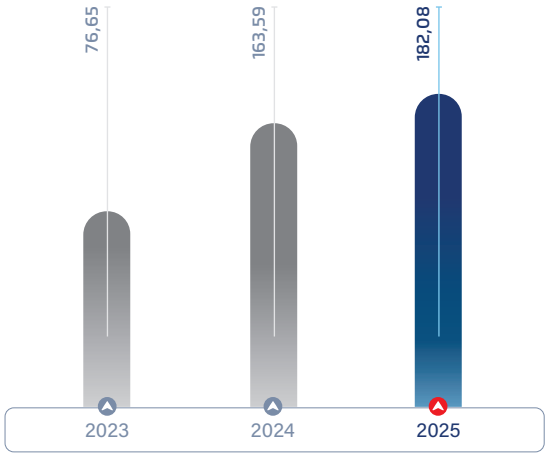

Jumlah Emisi GRK Cakupan 1, 2 dan 3
Total GHG Emission Scope 1, 2 and 3

(Ton CO_2 eq)

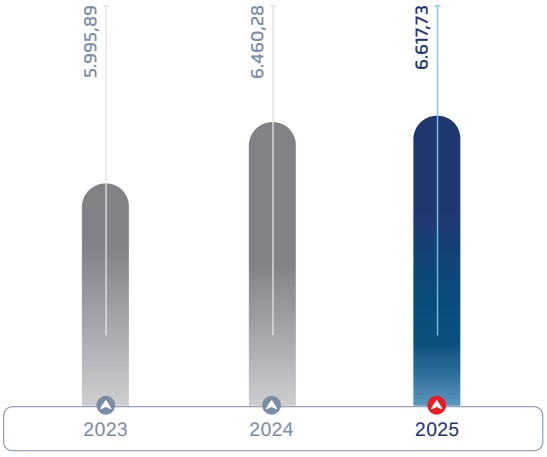

Penambahan (Pengurangan) Jumlah Emisi GRK Cakupan 1, 2 dan 3
Addition (Reduction) of Total GHG Emission Scope 1, 2 and 3

(Ton CO_2 eq)

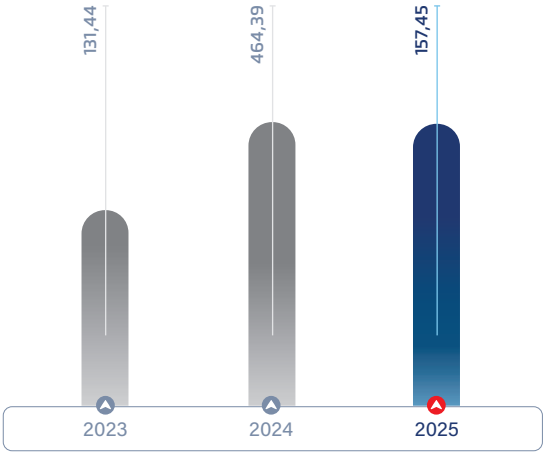

Pemakaian Air (PDAM)
Water Consumption (PDAM)

(M^3)

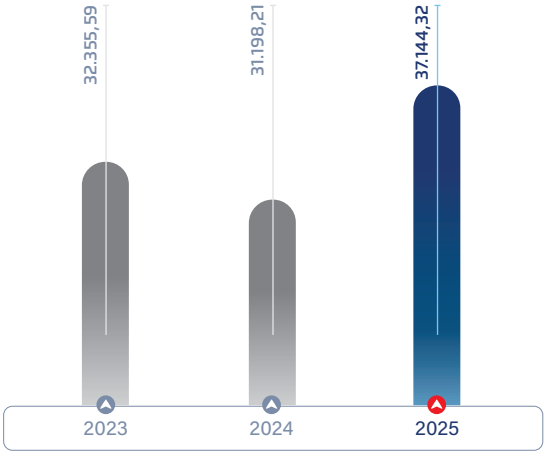

Penggunaan Kertas
Paper Consumption

(Rim)
(Ream)

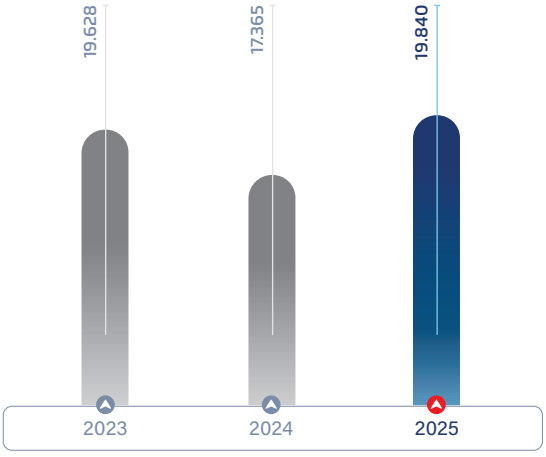

ASPEK SOSIAL

SOCIAL ASPECT

KINERJA SOSIAL [OJK B.3]

SOCIAL PERFORMANCE [OJK B.3]

JUMLAH KARYAWAN

NUMBER OF EMPLOYEES

Uraian Description	2025	2024	2023
Jumlah Karyawan Number of Employees	2.170	2.274	2.335

Komposisi Karyawan menurut Jenis Kelamin (%)
Employee Composition by Gender (%)

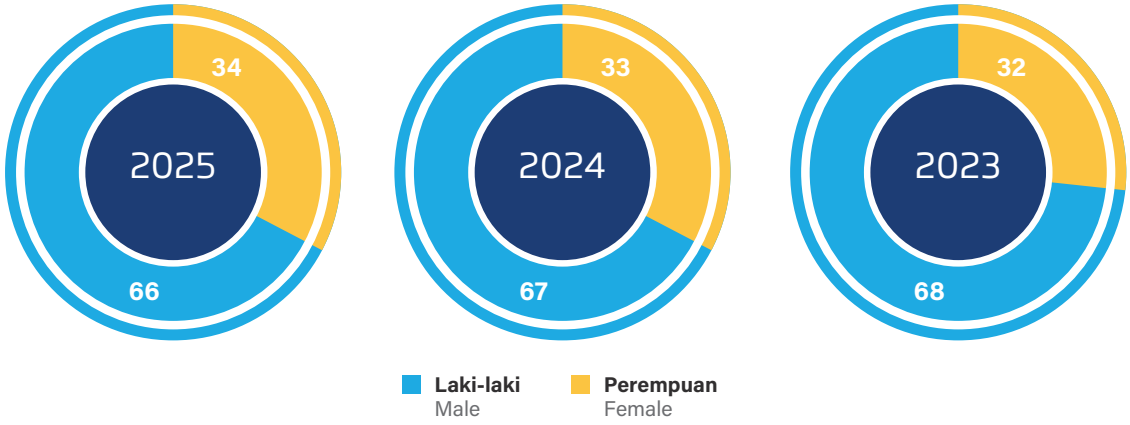

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi menurut Jenis Kelamin (%)
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors by Gender (%)

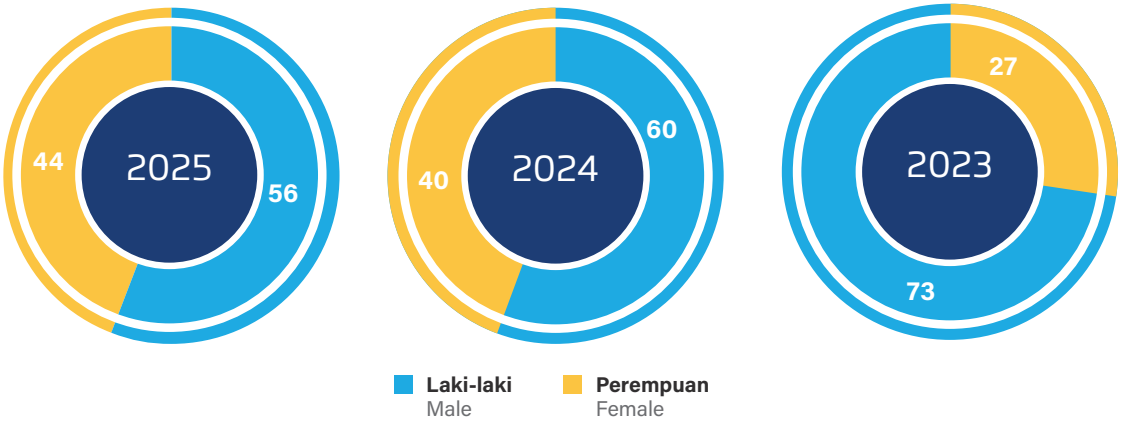

PERPUTARAN KARYAWAN (%) [S-03]

EMPLOYEE TURNOVER (%) [S-03]

Uraian Description	2025	2024	2023
Jumlah Perputaran Karyawan Total Employee Turnover	26,13	23,61	25,87

JUMLAH PENERIMA MANFAAT PROGRAM TJSL

NUMBER OF CSR PROGRAM BENEFICIARIES

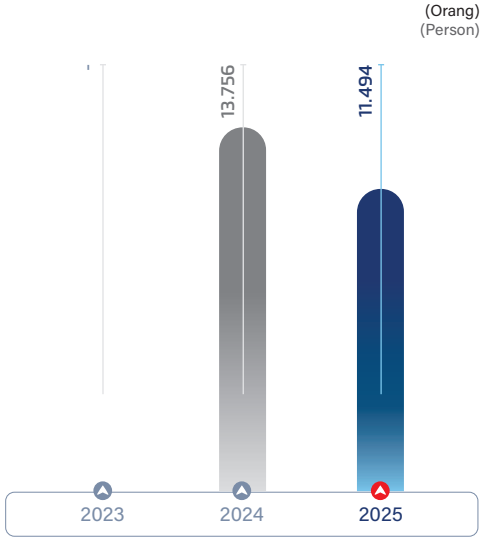

Catatan : Perhitungan jumlah penerima manfaat baru dilakukan di tahun 2024.
Note : The calculation of the number of beneficiaries is carried out starting in 2024.

REALISASI DANA TJSL

CSR BUDGET REALIZATION

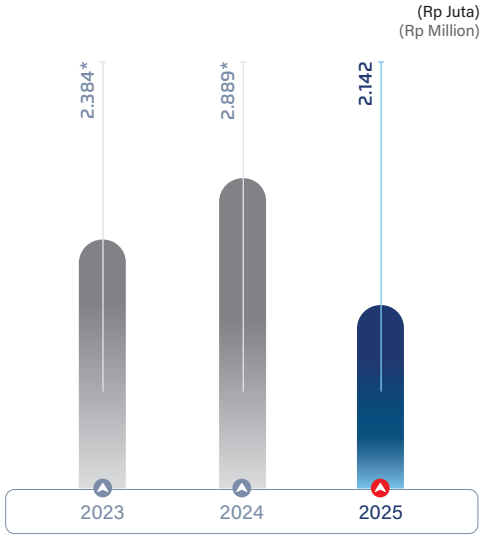

Catatan : Biaya penyaluran dana TJSL bagi masyarakat merupakan realisasi biaya atas pelaksanaan kegiatan TJSL termasuk donasi yang disalurkan oleh Perseroan.
Notes : The cost of distributing CSR funds to the community is the realization of costs for implementing CSR activities, including donations distributed by the Company.

*)Penyajian kembali
*)Restatement

PELATIHAN KARYAWAN [S-05]

EMPLOYEE TRAINING [S-05]

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Total Keikutsertaan Pelatihan Number of Training Participations	Keikutsertaan Participations	68.581	76.762	75.549
Persentase Jumlah Karyawan yang Ikut Serta dalam Pelatihan Percentage of Employees Participating in Training	%	97,60	98,28	92,98
Rata - Rata Jam Pelatihan Per Karyawan Average Training Hours Per Employee	Jam/Karyawan Hours/Employee	10,91	7,50	7,90

Catatan : Total karyawan FTE (*Full Time Equivalent*) yang mengikuti pelatihan dihitung berdasarkan keaktifannya sampai dengan 31 Desember.
Note: The total number of FTE (Full Time Equivalent) employees who participated in the training is calculated based on their active status until December 31.

KECELAKAAN KERJA [S-06]

OCCUPATIONAL ACCIDENTS [S-06]

Kasus
Case

2025	2024	2023
0	0	0

ASPEK TATA KELOLA

GOVERNANCE ASPECT

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

WHISTLEBLOWING SYSTEM

JUMLAH PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

NUMBER OF COMPLAINTS THROUGH WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Pengaduan
Complaint

2025	2024	2023
42	40	54

JUMLAH INSIDEN KEBOCORAN DATA

NUMBER OF DATA LEAKAGE INCIDENTS

Kasus
Case

2025	2024	2023
0	0	0

Penjelasan Direksi

Board of Directors' Explanation



Djaja Suryanto Sutandar

Presiden Direktur
President Director



Pemegang saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2025 dengan capaian keberlanjutan yang solid. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen, kerja keras dan kolaborasi seluruh insan Perseroan serta dukungan para pemangku kepentingan dalam membangun usaha yang beretika, inklusif dan bertanggung jawab. Sejalan dengan tema laporan tahun ini, "*Do The Right Things Right, Sustainable Growth*," Perseroan menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan pondasi penting dalam memastikan ketangguhan organisasi di tengah dinamika industri pembiayaan yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi.

Perseroan meyakini bahwa keputusan bisnis yang tepat harus diiringi dengan proses yang benar melalui tata kelola yang kuat, pengelolaan risiko yang *prudent*, inovasi digital berkelanjutan serta inisiatif yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Pada laporan ini, Perseroan menyampaikan kebijakan, respons, pencapaian, tantangan serta strategi dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan sepanjang tahun 2025, sebagai wujud komitmen untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN UNTUK MERESPONS TANTANGAN DALAM PEMENUHAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Penerapan Nilai Keberlanjutan di Lingkup Perseroan

Kebijakan tersebut tercermin dalam Kerangka Keberlanjutan Perseroan yang menjadi pedoman utama dalam implementasi strategi keberlanjutan. Kerangka Keberlanjutan tersebut mencakup empat pilar utama, yaitu *Sustaining the Sustainable* yang berfokus pada penguatan ekonomi berkelanjutan, *Greening the Operations* yang menitikberatkan pada operasional hijau dan ramah lingkungan, WOMempowered yang berorientasi pada aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta *Comply to Do It Right* yang menegaskan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Berdasarkan kebijakan induk tersebut, Perseroan mengimplementasikan berbagai proyek dan program keberlanjutan selama periode pelaporan, baik yang bersifat jangka pendek (1 tahun) maupun jangka menengah, sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan terintegrasi dalam strategi. dan kegiatan operasional Perseroan.

Respons terhadap Isu Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penerapan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan menghadirkan tantangan berupa kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap praktik berbasis ESG,

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

We would like to express our gratitude to the God Almighty for His abundant grace and blessings that enable the Company to go through 2025 with solid sustainability achievements. These achievements are the results of all Company personnel commitment, hard work and collaboration, as well as stakeholders' support in building an ethical, inclusive and responsible business. In line with the theme of this year's report, "Do The Right Things Right, Sustainable Growth," the Company emphasizes that sustainability is a critical foundation for ensuring organizational resilience amidst the dynamics of an increasingly competitive and digitalized financing industry.

The Company believes that appropriate business decisions must be accompanied by correct processes through strong governance, prudent risk management, sustainable digital innovation and initiatives that positively impact the environment and society. In this report, the Company provides policies, responses, achievements, challenges, as well as strategies in implementing Sustainable Finance throughout 2025 as the manifestation of its commitment to create long-term added value for all stakeholders.

POLICY TO ADDRESS TO CHALLENGES IN FULFILLING SUSTAINABILITY STRATEGY

Implementation of Sustainability Values within The Company

This policy is reflected in the Company's Sustainability Framework, which serves as the primary guideline for implementing its sustainability strategy. The Sustainability Framework encompasses four main pillars: Sustaining the Sustainable, which focuses on strengthening a sustainable economy; Greening the Operations, which emphasizes green and environmentally friendly operations; WOMempowered, which focuses on social activities and community empowerment; and Comply to Do It Right, which affirms its commitment to implementing good corporate governance.

Based on this master policy, the Company organized various sustainability projects and programs during the reporting period, both short-term (one year) and medium-term, as part of its efforts to ensure that sustainability is integrated into the Company's strategies and operational activities.

Respons towards Sustainable Finance Implementation Issues

The implementation of sustainable finance in the financial services sector presents challenges in the form of compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations, increasing stakeholder expectations for ESG-based practices, and

serta dukungan terhadap target pemerintah mencapai Nol Emisi 2060 atau lebih cepat. Menyikapi hal tersebut, Perseroan memperkuat portofolio pembiayaan secara *prudent* guna menjaga keberlanjutan jangka panjang, sekaligus mengembangkan pembiayaan berkelanjutan (*Sustainable Financing*) dalam kerangka pilar *Sustaining the Sustainable* (StS), dengan fokus pada segmen Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) serta pembiayaan motor baru ramah lingkungan diantaranya motor listrik. Di sisi operasional, Perseroan menerapkan kebijakan *Green Office* untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan menekan jejak lingkungan, memperkuat tata kelola melalui pengendalian internal dan kepatuhan yang konsisten, serta menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif WOMempowered sebagai kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial di wilayah operasional.

Komitmen Pimpinan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Direksi dan Dewan Komisaris menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong penerapan keuangan berkelanjutan melalui penetapan arah strategis, pengawasan implementasi serta integrasi keberlanjutan dalam kebijakan perusahaan. Komitmen ini tercermin dalam keterlibatan aktif pimpinan dalam perumusan program dan evaluasi kinerja keberlanjutan Perseroan.

Pimpinan Perseroan juga memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, baik dari sisi kebijakan, sistem, maupun kompetensi SDM, guna mendukung pelaksanaan program keberlanjutan secara konsisten. Dengan kepemimpinan yang kuat, Perseroan mampu menjaga kesinambungan implementasi keuangan berkelanjutan di seluruh lini organisasi.

Pencapaian Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sepanjang periode pelaporan, Perseroan berhasil merealisasikan berbagai inisiatif keuangan berkelanjutan yang mendukung pencapaian target strategis. Pencapaian tersebut mencakup peningkatan portofolio pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, penguatan kebijakan internal serta peningkatan kesadaran karyawan terhadap prinsip keberlanjutan.

Hasil implementasi ini menunjukkan bahwa Perseroan telah berada pada jalur yang tepat dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasional bisnis. Capaian tersebut menjadi dasar bagi Perseroan untuk memperluas cakupan program dan memperdalam integrasi ESG pada periode berikutnya.

Tantangan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Dalam konteks global, penerapan keuangan berkelanjutan masih dihadapkan pada dinamika perkembangan standar ESG, keterbatasan ketersediaan data yang andal dari rantai

support for the government's target of achieving Zero Emissions by 2060 or sooner. In response, the Company is strengthening its financing portfolio prudently to maintain long-term sustainability, while developing sustainable financing (Sustainable Leasing) within the framework of the Sustaining the Sustainable (StS) pillar, with a focus on the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segment including motorcycle financing, including energy-efficient and electric motorcycles. On the operational side, the Company implements a Green Office policy to improve resource efficiency and reduce its environmental footprint, strengthens governance through consistent internal control and compliance, and runs community empowerment programs through the WOMempowered initiative as a tangible contribution to social welfare in its operational areas.

Leaders' Commitment to Implementing Sustainable Finance

The Board of Directors and Board of Commissioners demonstrate a strong commitment to promoting sustainable finance implementation by setting strategic direction, overseeing implementation and integrating sustainability into company policies. This commitment is reflected in the leaders' active involvement in formulating and evaluating the Company's sustainability performance program.

The Company's leaders also ensure the availability of adequate resources, including policies, systems and human resource competencies, to support the consistent implementation of sustainability programs. With strong leadership, the Company is able to maintain the continuity of sustainable finance implementation across all levels of the organization.

Achievements in Sustainable Finance Implementation

Throughout the reporting period, the Company managed to implement various sustainable finance initiatives that supported the achievement of its strategic targets. Such achievements included increasing its financing portfolio with environmental and social considerations, strengthening internal policies and increasing employee awareness of sustainability principles.

These implementation results demonstrate that the Company is on the right track in integrating sustainability into its business operations. These achievements serve as the Company basis to expand its program coverage and deepen ESG integration in the coming period.

Challenges in Implementing Sustainable Finance

In the global context, the implementation of sustainable finance continues to face challenges arising from the evolving ESG standards, limited availability of reliable data across the value

nilai serta meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap transparansi dan dampak keberlanjutan. Perubahan kebijakan internasional terkait iklim dan keberlanjutan juga menuntut perusahaan untuk terus menyesuaikan strategi dan proses bisnis agar tetap relevan dan kompetitif.

Di tingkat nasional, Perseroan menghadapi tantangan yang terkait dengan kesiapan mitra usaha dalam memenuhi standar pelaporan ESG, penyesuaian terhadap regulasi yang terus berkembang serta kebutuhan peningkatan pemahaman dan kapabilitas internal terkait integrasi aspek keberlanjutan dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan. Tantangan ini memerlukan koordinasi lintas fungsi yang kuat serta penyelarasan kebijakan operasional dengan arah kebijakan regulator.

Untuk merespons tantangan global, Perseroan memperkuat sistem pengelolaan keberlanjutan melalui peningkatan kualitas data, penyelarasan kebijakan internal dengan praktik terbaik serta pemantauan perkembangan standar ESG yang relevan. Sementara itu, untuk mengatasi tantangan di tingkat nasional, Perseroan secara berkelanjutan melakukan penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sosialisasi kepada mitra usaha serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur internal. Melalui langkah mitigasi yang terstruktur tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan dapat berjalan secara konsisten dan mendukung pencapaian target keberlanjutan jangka panjang.

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Realisasi Kinerja Keberlanjutan dibandingkan Target Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat kinerja yang mencerminkan konsistensi dalam menjaga pencapaian pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam kerangka Keuangan Berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, Perseroan membukukan pendapatan yang relatif stabil sebesar Rp2,17 triliun dibandingkan tahun 2024, dengan tingkat pencapaian sebesar 91,88% terhadap target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp2,36 triliun.

Disamping itu, pada aspek produk keuangan berkelanjutan, Perseroan secara konsisten meningkatkan fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor listrik roda dua sebagai bagian dari dukungan terhadap pengurangan emisi karbon di sektor transportasi. Sepanjang tahun 2025, pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua membukukan nilai sebesar Rp627 juta. Perseroan senantiasa berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, kualitas aset, serta keberlanjutan portofolio secara keseluruhan.

Perseroan terus memperkuat penerapan praktik ramah lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja yang berlandaskan prinsip keberlanjutan, guna meningkatkan efisiensi kegiatan dan operasional bisnis sekaligus menjaga

chain and increasing stakeholder expectations regarding transparency and sustainability impacts. Changes in international climate and sustainability policies also require companies to continuously adjust their strategies and business processes in order to remain relevant and competitive.

At the national level, the Company faces challenges related to the readiness of business partners in meeting ESG reporting standards, the need to adapt to continuously evolving regulations, as well as the need to enhance internal understanding and capabilities in integrating sustainability aspects into business processes and decision-making. These challenges require strong cross-functional coordination and alignment of operational policies with regulatory directions.

To address global challenges, the Company strengthens its sustainability management system through improving data quality, aligning internal policies with best practices and monitoring developments in relevant ESG standards. Meanwhile, to overcome challenges at the national level, the Company continuously enhances human resource competencies, increases engagement and awareness among business partners and refines internal policies and procedures. Through these structured mitigation measures, the Company seeks to ensure that sustainable finance implementation is carried out consistently and supports the achievement of long-term sustainability targets.

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE

Realization of Sustainability Performance Compared to Targets in 2025

In 2025, the Company recorded performance that reflected consistency in maintaining achievements in economic, social, and environmental aspects as stipulated in the Sustainable Finance framework. From an economic perspective, the Company posted relatively stable revenue of Rp2.17 trillion compared to 2024, with an achievement rate of 91.88% against the 2025 revenue target of Rp2.36 trillion.

In addition, in terms of sustainable financial products, the Company has consistently increased focus on financing for two-wheeled electric motor vehicles as part of its support for reducing carbon emissions in the transportation sector. Throughout 2025, financing for two-wheeled Battery Electric Vehicles (KBLBB) recorded a value of Rp627 million. The Company constantly strives to maintain a balance between financing growth, asset quality, and overall portfolio sustainability.

The company continues to strengthen the implementation of environmentally friendly practices as part of a work culture based on the principle of sustainability, in order to improve the efficiency of business activities and operations while

kelestarian lingkungan. Komitmen ini dijalankan melalui pilar *Greening the Operations* yang diimplementasikan secara terstruktur dengan mengacu pada Surat Kebijakan tentang Penerapan Konsep Perkantoran Ramah Lingkungan (*Green Office*). Kebijakan tersebut menjadi landasan resmi dalam mengarahkan seluruh aktivitas operasional agar berjalan lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Dari sisi sosial, Perseroan terus memperkuat pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagai elemen penting dalam keberhasilan penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan upaya terus memperkuat kapasitas internal melalui berbagai pelatihan dan *workshop* terkait isu keberlanjutan serta LST bagi seluruh karyawan. Perseroan mengintegrasikan kurikulum keberlanjutan ke dalam program pengembangan di seluruh jenjang jabatan, mulai dari *Management Trainee* hingga level manajerial. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan ESG *Risk Training* bekerja sama dengan institusi pendidikan bagi jajaran manajerial yang terlibat dalam manajemen risiko, guna meningkatkan pemahaman atas risiko dan peluang LST serta mendukung penguatan kebijakan dan penerapan manajemen risiko keberlanjutan di Perseroan. Di berbagai program pengembangan lainnya, Perseroan juga menerapkan beragam metode pembelajaran seperti *Self Learning, Lecturing, Video Micro Learning, Focus Group Discussion, On Job Training, Team Building* serta *Coaching and Mentoring*, Perseroan mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas karyawan. Untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran, Perseroan menerapkan konsep *gamification training* sehingga proses pelatihan menjadi lebih interaktif dan menarik.

Dari sisi tata kelola, Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Keberlanjutan melalui Surat Kebijakan Nomor 278/SK/OPP/11-24 tentang Kerangka Keberlanjutan (*Sustainability Framework*) pada akhir tahun 2024 yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan pada kuartal pertama 2025 sebagai pedoman dalam memastikan seluruh aktivitas, produk, dan layanan selaras dengan prinsip LST. Perseroan juga menerbitkan Surat Kebijakan Nomor 015/SK/OPP/01-25 tentang Penerapan Konsep Perkantoran Ramah Lingkungan (*Green Office*) serta memperkuat aspek tata kelola melalui ketentuan internal terkait pelaporan sanksi regulator dan pelaksanaan *Bribery Risk Assessment* di Kantor Pusat maupun Cabang sesuai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sepanjang periode pelaporan, Perseroan juga mencatatkan *zero* kebocoran data, sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan informasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola di tahun 2025 menunjukkan komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan serta kedisiplinan dalam mengarahkan sumber daya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

preserving the environment. This commitment is carried out through the Greening the Operations pillar, which is implemented in a structured manner with reference to the Policy Letter on the Implementation of the Green Office Concept. This policy serves as the official basis for directing all operational activities to be more efficient, environmentally friendly, and sustainable.

From a social perspective, the Company continues to strengthen the development of human resource competencies as an important element in the successful implementation of Sustainable Finance by continuously strengthening internal capacity through various training and workshops related to sustainability issues and LST for all employees. The Company integrates sustainability curriculum into its development programs at all job levels, from Management Trainee to managerial level. In addition, the Company also conducts ESG Risk Training in collaboration with educational institutions for managerial staff involved in risk management, in order to improve understanding of LST risks and opportunities and support the strengthening of policies and implementation of sustainability risk management within the Company. In various other development programs, the Company also applies various learning methods such as Self Learning, Lecturing, Video Micro Learning, Focus Group Discussion, On Job Training, Team Building, and Coaching and Mentoring. The Company encourages the improvement of employee capacity and productivity. To enhance the learning experience, the Company applies the concept of gamification training so that the training process becomes more interactive and interesting.

From a governance perspective, the Company has issued a Sustainability Policy through Policy Letter Number 278/SK/OPP/11-24 concerning the Sustainability Framework at the end of 2024, which was disseminated to all employees in the first quarter of 2025 as a guideline to ensure that all activities, products, and services are in line with LST principles. The Company also issued Policy Letter No. 015/SK/OPP/01-25 on the Implementation of the Green Office Concept and strengthened its governance aspects through internal provisions related to regulatory sanctions reporting and the implementation of Bribery Risk Assessment at the Head Office and Branches in accordance with the Anti-Bribery Management System. Throughout the reporting period, the Company also recorded zero data leaks, as a manifestation of its commitment to maintaining information security and stakeholder trust.

Overall, the economic, environmental, social, and governance performance achievements in 2025 demonstrate the Company's commitment to implementing Sustainable Finance and its discipline in directing resources to achieve the targets that have been set.

Prestasi dan Tantangan termasuk Peristiwa Penting Selama Periode Pelaporan

Selama periode pelaporan, Perseroan mencatat berbagai prestasi yang mendukung penguatan kinerja keberlanjutan, termasuk keberhasilan implementasi program prioritas dan peningkatan kualitas tata kelola. Capaian tersebut memperkuat fondasi Perseroan dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah tantangan dan dinamika eksternal yang memengaruhi kinerja, seperti kondisi ekonomi, perubahan kebijakan dan perkembangan pasar. Perseroan merespons situasi tersebut melalui penyesuaian strategi dan penguatan manajemen risiko agar kinerja tetap terjaga.

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Pengelolaan Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas profil risiko dan efektivitas pengendalian yang diterapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa risiko keberlanjutan dapat dikelola secara proaktif dan selaras dengan strategi bisnis Perseroan.

Pemanfaatan Peluang dan Prospek Usaha

Perseroan memandang penerapan keuangan berkelanjutan sebagai peluang untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar, sekaligus memperluas basis konsumen. Pendekatan ini membuka potensi pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Dengan memanfaatkan tren pembiayaan berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu ESG, Perseroan optimis dapat memperkuat daya saing serta menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Situasi Eksternal dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Perseroan

Kondisi ekonomi global dan nasional, perubahan regulasi serta dinamika industri keuangan menjadi faktor eksternal yang memengaruhi strategi dan kinerja keberlanjutan Perseroan. Ketidakpastian pasar dan perkembangan teknologi turut membentuk tantangan sekaligus peluang bagi Perseroan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Untuk merespons situasi tersebut, Perseroan menerapkan strategi yang adaptif dan memperkuat ketahanan operasional melalui pengelolaan risiko yang *prudent* serta inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, Perseroan mampu menjaga kesinambungan usaha sekaligus mempertahankan komitmen terhadap penerapan keuangan berkelanjutan.

Achievements and Challenges, including Key Events during the Reporting Period

Throughout the reporting period, the Company recorded various achievements that supported the strengthening of sustainability performance, including the successful implementation of priority programs and improvement in governance quality. Such achievements strengthen the Company's foundation in conducting responsible business.

However, there were also a number of external challenges and dynamics that impacted performance, such as economic conditions, policy changes and market developments. The Company responded to these situations by adjusting its strategy and strengthening its risk management to maintain its performance.

TARGET ACHIEVEMENT STRATEGY

Risk Management for Sustainable Finance Implementation

The Company periodically evaluates its risk profile and the effectiveness of controls implemented. This approach ensures that sustainability risks are managed proactively, in line with the Company's business strategy.

Leveraging Business Opportunities and Prospects

The Company views sustainable finance implementation as an opportunity to develop products and services that are more relevant to market needs, while simultaneously expanding its customer base. This approach unlocks the potential business growth in line with sustainability principles.

By leveraging the trend in sustainable financing and increasing public awareness of ESG issues, the Company is optimistic that it can strengthen its competitiveness and create long-term added value for all stakeholders.

External Situation and Its Impact on the Company's Sustainability

Global and national economic conditions, regulatory changes and financial industry dynamics are external factors influencing the Company's sustainability strategy and performance. Market uncertainty and technology development pose both challenges and opportunities for the Company in conducting sustainable business.

To respond to these situations, the Company implements adaptive strategy and strengthens its operational resilience through prudent risk management and continuous innovation. Therefore, the Company is able to maintain its business continuity while maintaining the commitment to sustainable finance.

PENUTUP

Dengan berakhirnya tahun 2025, kami merefleksikan capaian keberlanjutan yang telah diraih Perseroan serta langkah-langkah strategis yang telah ditempuh untuk memperkuat integrasi prinsip ESG dalam seluruh proses bisnis. Kami menyadari bahwa perjalanan menuju keberlanjutan adalah komitmen jangka panjang yang menuntut inovasi, konsistensi dan peningkatan berkelanjutan. Ke depan, kami akan terus memperkuat peran Perseroan dalam menyediakan pembiayaan yang bertanggung jawab, mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik, meningkatkan kualitas layanan serta memperluas kontribusi sosial melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Atas nama Direksi, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Manajemen, seluruh insan Perseroan serta para pemangku kepentingan atas sinergi, kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan. Kepercayaan ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus melakukan hal yang benar dengan cara yang tepat serta menghadirkan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

CLOSING REMARKS

As the year 2025 ended, we reflected on the Company's sustainability achievements and strategic steps taken to strengthen the integration of ESG principles into all of its business processes. We recognize that the journey toward sustainability is a long-term commitment that demands innovation, consistency and continuous improvement. Moving forward, we will continue to strengthen the Company's role in providing responsible financing, supporting accelerated adoption of electric vehicles, improving service quality and expanding social contributions through various community empowerment initiatives.

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our appreciation and gratitude to the Board of Commissioners, Shareholders, Management, all the Company personnel and stakeholders for their ongoing synergy, trust and support. This trust drives us to continue doing the right things in the right way and delivering sustainable growth for all stakeholders.

Jakarta, 6 Maret 2026 | March 6, 2026
Atas Nama Direksi | On Behalf of the Board of Directors

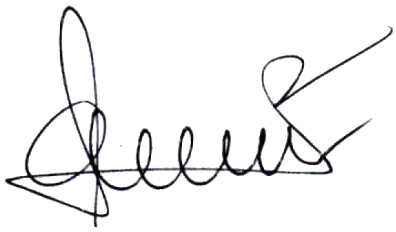

Djaja Suryanto Sutandar
Presiden Direktur
President Director

Tentang Laporan

About The Report

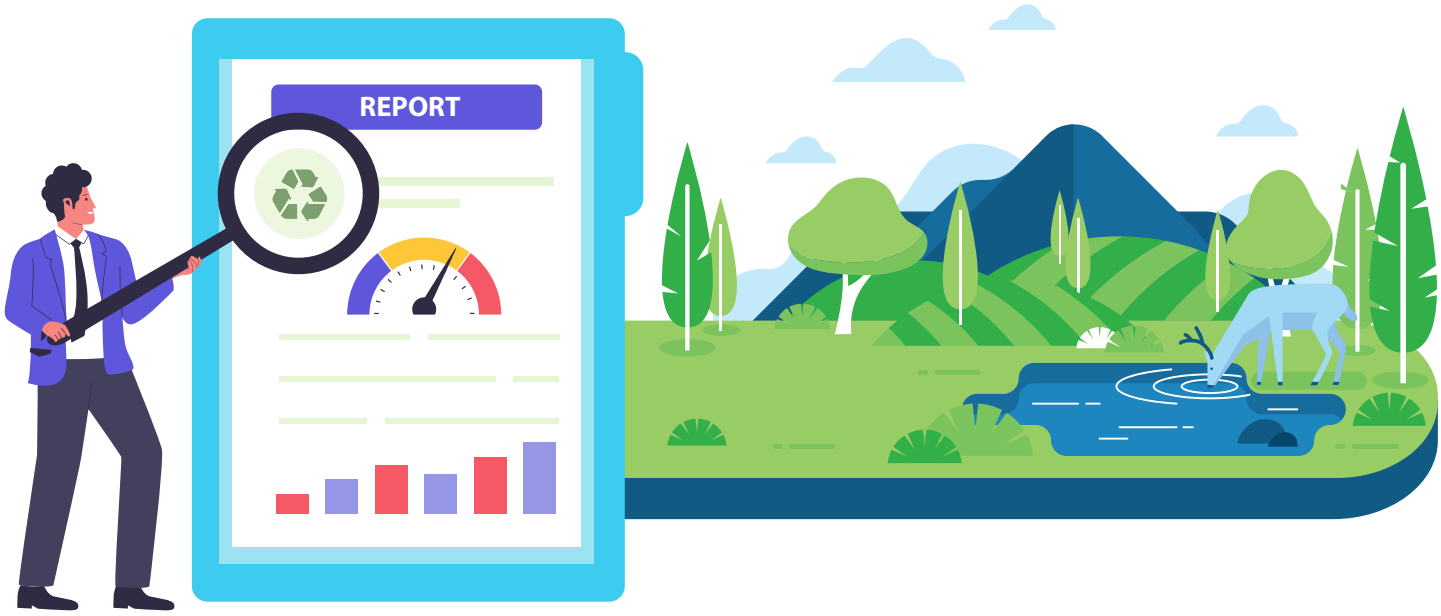

STANDAR PELAPORAN

Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK No.51/2017), Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 dan GRI Standards Topic dengan opsi "*with reference*".

Guna memudahkan pembaca menemukan informasi yang sesuai dengan rujukan, Perseroan menyertakan penanda khusus berupa angka dan huruf sesuai Isi Laporan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Lampiran POJK No.51/2017, SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik atau pencantuman angka pengungkapan Standar GRI di belakang kalimat atau alinea yang relevan. Data lengkap kecocokan isi laporan dengan kedua rujukan disajikan di bagian lampiran Laporan Keberlanjutan ini.

Laporan ini disusun sebagai rujukan dalam mengambil keputusan bagi seluruh pembaca dan pemangku kepentingan, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian kinerja keberlanjutan Perseroan sepanjang tahun 2025. Perseroan berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang andal dan menjadi referensi penting dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

REPORTING STANDARD

The Company 2025 Sustainability Report was prepared in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies (POJK No. 51/2017), Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 and GRI Standards Topic with the "with reference" option.

To facilitate readers' retrieval of information that aligns with the references, the Company includes special markers in the form of numbers and letters corresponding to the Sustainability Report Contents as stipulated in the Appendix to POJK No. 51/2017, SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies or by including GRI Standard disclosure number after any relevant sentence or paragraph. Complete data on the conformity of the report content with these two references is presented in the appendix to this Sustainability Report.

This report is prepared as a reference for decision-making by all readers and stakeholders, providing a comprehensive overview of the Company's sustainability performance throughout 2025. The Company expects that this report will serve as a reliable source of information and an important reference for future strategic decision-making.

Perseroan menerbitkan laporan ini dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan bisa didapatkan, dibaca dan/atau diunduh melalui situs resmi Perseroan dengan alamat https://www.wom.co.id/laporan-keberlanjutan.

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G.1] [GRI 2-5]

Pada periode pelaporan ini, Perseroan belum menunjuk pihak independen untuk melakukan penjaminan atau *assurance* atas Laporan Keberlanjutan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan manajemen saat ini.

Meskipun demikian, Perseroan senantiasa menjaga integritas, akurasi dan keandalan data yang disajikan. Seluruh informasi dan data kinerja keberlanjutan dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi dan validasi internal yang ketat oleh unit kerja terkait serta ditinjau oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Standar GRI.

ENTITAS YANG DIMASUKAN DALAM LAPORAN [GRI 2-2]

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perseroan tidak memiliki entitas anak. Lingkup laporan ini mencakup informasi dan kinerja LST Perseroan yang bersumber dari manajemen di kantor pusat dan cabang di seluruh wilayah operasional. Informasi keuangan diperoleh dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

PERIODE PELAPORAN, FREKUENSI DAN TITIK KONTAK PELAPORAN [GRI 2-3]

Perseroan menerbitkan Laporan Keberlanjutan bersamaan dengan Laporan Tahunan yang diterbitkan secara berkala setiap tahunnya. Laporan Keberlanjutan ini disusun untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, sesuai dengan periode pada Laporan Keuangan Perseroan.

The Company publishes this report in two languages: Indonesian and English. The report can be accessed, read and/or downloaded through the Company's official website at https://www.wom.co.id/sustainability-report.

WRITTEN VERIFICATION BY AN INDEPENDENT PARTY [OJK G.1] [GRI 2-5]

During this reporting period, the Company has not appointed an independent party to verify or provide assurance on the Sustainability Report. This decision is based on current management judgment.

Nevertheless, the Company is constantly to maintaining the integrity, accuracy and reliability of the data presented. All sustainability performance information and data in this report have undergone a rigorous internal verification and validation process by the relevant work units and have been reviewed by the Board of Directors to ensure compliance with POJK No. 51/POJK.03/2017 and GRI Standards.

ENTITIES INCLUDED IN THE REPORT [GRI 2-2]

As of the end of the reporting period, the Company did not have any subsidiaries. The scope of this report covers information and performance of the Company ESG sourced from management at the head office and branches throughout the operational areas. Financial information is obtained from the Financial Statements audited by a Public Accounting Firm.

REPORTING PERIOD, FREQUENCY AND REPORTING CONTACT POINTS [GRI 2-3]

The Company publishes this Sustainability Report simultaneously with its Annual Report annually. This Sustainability Report is prepared for the period from January 1 to December 31, 2025, in accordance with the period outlined in the Company's Financial Statements.

Para pemangku kepentingan dapat menyampaikan mengenai pertanyaan tentang laporan atau informasi yang dilaporkan dalam laporan ini melalui narahubung Perseroan, yaitu:

Stakeholders may submit questions regarding the report or information presented in this report through the Company's contact person, as follows:

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

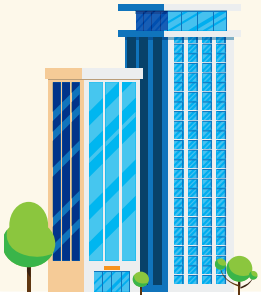

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Kantor Pusat | Head Office

Altira Office Tower (Lantai 32,33,35)
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Telp. +62 21 2188 2400
Faks. +62 21 2188 2420
Website: www.wom.co.id
Surel: corporate_secretary@wom.co.id

Altira Office Tower (32nd, 33rd, 35th Floors)
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Tel. +62 21 2188 2400
Fax. +62 21 2188 2420
Website: www.wom.co.id
Email: corporate_secretary@wom.co.id

PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) INFORMASI [GRI 2-4]

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025, Perseroan mengungkapkan informasi yang bersifat penyajian kembali (*restatement*) pada jumlah realisasi dana TJSL dan jumlah nilai ekonomi yang didistribusikan karena perbedaan metode perhitungan.

RESTATEMENT OF INFORMATION [GRI 2-4]

The 2025 Sustainability Report, the Company disclosed restated information on the amount of TJSL funds realized and the amount of economic value distributed due to differences in calculation methods.

PROSES PENENTUAN TOPIK MATERIAL [GRI 3-1]

Topik material adalah topik-topik yang memiliki dampak paling signifikan dalam bidang ekonomi, lingkungan, sosial dan Tata Kelola.

Penetapan topik material dalam laporan ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

01

Mendalami konteks bisnis Perseroan *(understanding the context).*
Understanding the context of the Company's business.

02

Mengidentifikasi dampak yang sudah maupun yang akan terjadi (*identify actual and potential impacts*).
Identifying actual and potential impacts.

03

Melakukan *assessment* terkait signifikansi suatu dampak *(assess the significance of the impacts).* Perseroan melibatkan para pemangku kepentingan internal untuk menetapkan topik-topik tersebut, di samping mempertimbangkan topik-topik dalam Sektor Keuangan *(Financial Sector).*
Assessing the significance of the impacts. the Company engages internal stakeholders to determine these topics, in addition to considering topics within the Financial Sector.

04

Perseroan kemudian memprioritaskan dampak yang paling signifikan, hasil dari langkah ke-2 dan ke-3 di atas *(prioritize the most significant impacts for reporting).*
The Company then prioritizes the most significant impacts, based on the results of steps 2 and 3 above (prioritize the most significant impacts for reporting).

PROCESS TO DETERMINE MATERIAL TOPICS [GRI 3-1]

Material topics are those with the most significant economic, environmental, social and Governance impacts.

The material topics in this report was determined through the following steps:

Perseroan kemudian menetapkan topik material yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu:

The Company then determines the same material topics as the previous year, as follows:



Topik Ekonomi & Tata Kelola
Economic & Governance Topics

- Kinerja Ekonomi | Economic Performance
- Antikorupsi & *Anti-Fraud* | Anti-Corruption & Anti-Fraud

01



Topik Sosial
Social Topics

- Ketenagakerjaan | Employment
- Pelatihan dan Pendidikan | Training and Education
- Kesehatan & Kesejahteraan Karyawan | Employee Health & Wellbeing
- Keamanan Data | Data Security

02



Topik Lingkungan
Environmental Topics

Portofolio & Produk Pembiayaan Berkelanjutan | Sustainable Finance Portfolio & Products

03

Daftar Topik Material [GRI 3-2]
List of Material Topics

No	Topik Material Material Topics	Alasan Materialitas Reason for Materiality	Batasan Pemangku Kepentingan Stakeholder Limitation		Indeks GRI Spesifik Specific GRI Index	TPB Terkait Relevant SDGs
			Di dalam Perseroan Inside the Company	Di luar Perseroan Outside the Company		
1	Kinerja Ekonomi Economic Performance	Menggambarkan pencapaian dan kinerja ekonomi Perseroan. Describing the Company's economic achievements and performance.	✓	✓	201-1, 201-2	8
2	Portofolio & Produk Pembiayaan Berkelanjutan Sustainable Financing Portfolio & Products	Menggambarkan inisiatif Perseroan dalam mengelola portofolio dan produk pembiayaan ramah lingkungan. Describing the Company's initiatives in managing eco-friendly financing portfolios and products.	✓	✓	203-2	8, 12, 13
3	Antikorupsi & *Anti Fraud* Anti-Corruption & Anti-Fraud	Menggambarkan upaya Perseroan menerapkan bisnis berbasis tata kelola yang baik. Describing the Company's efforts to implement good corporate governance.	✓	✓	205-2, 205-3	16
4	Ketenagakerjaan Employment	Menggambarkan upaya penyediaan lapangan kerja, penilaian dan remunerasi yang adil. Describing efforts to provide fair employment, assessment and remuneration.	✓		401-1, 401-2, 401-3	5, 8
5	Kesehatan & Kesejahteraan Karyawan Employee Health & Welfare	Menggambarkan upaya penyediaan tempat kerja yang aman dan nyaman. Describing efforts to provide a safe and comfortable workplace.	✓		403-1, 403-6	3, 8
6	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Menggambarkan inisiatif peningkatan kompetensi pekerja. Describing initiatives to improve employee competency.	✓		404-1, 404-2, 404-3	4, 8
7	Keamanan Data Data Security	Menggambarkan upaya menjaga kerahasiaan dan privasi data konsumen. Describing efforts to maintain the confidentiality and privacy of customer data.	✓	✓	418-1	16



Inisiatif Strategis Keberlanjutan

Strategic Sustainability Initiatives

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berkomitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang yang bertanggung jawab, Perseroan menerapkan Kebijakan Keberlanjutan yang terintegrasi dalam strategi bisnis dan operasional Perseroan. Kebijakan ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial serta pengelolaan dampak lingkungan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, penguatan tata kelola perusahaan serta pengembangan produk dan layanan yang berorientasi pada kebutuhan konsumen secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Kebijakan Keberlanjutan Perseroan didukung oleh keterlibatan seluruh unit kerja melalui penetapan target kinerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Perseroan juga mendorong kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperluas dampak positif bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan pendekatan ini, Perseroan tidak hanya berupaya menjaga kesinambungan usaha, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, konsumen, karyawan dan masyarakat luas.

KERANGKA DAN KOMITMEN KEBERLANJUTAN PERSEROAN [OJK A.1] [GRI 2-22]

Pelaksanaan aspek keberlanjutan Perseroan mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan melalui Surat Kebijakan No. 278/SK/OPP/11-24 tentang Kerangka Keberlanjutan (*Sustainability Framework*). Kerangka ini menjadi landasan bagi seluruh Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, termasuk pengembangan produk dan layanan, agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, Kerangka Keberlanjutan berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan dampak, mitigasi risiko, serta optimalisasi peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

As a financing company committed to responsible long-term growth, the Company implements a Sustainability Policy that is integrated into the Company's business and operational strategies. This policy serves as the basis for decision-making that considers the balance between economic performance, social responsibility and environmental impact management. The policy is implemented through the application of the principles of prudence, regulatory compliance, strengthening corporate governance and developing products and services that are inclusive and sustainable, oriented towards customer needs.

In its implementation, the Company's Sustainability Policy is supported by the involvement of all work units through the setting of performance targets, strengthening of human resource capacity and regular monitoring and evaluation. The Company also encourages collaboration with stakeholders to expand its positive impact on society and support inclusive economic development. With this approach, the Company not only strives to maintain business continuity, but also creates long-term value for shareholders, customers, employees and the wider community.

THE COMPANY SUSTAINABILITY FRAMEWORK AND COMMITMENTS [OJK A.1] [GRI 2-22]

The implementation of the Company's sustainability aspects refers to the applicable provisions as stipulated in Policy Letter No. 278/SK/OPP/11-24 concerning the Sustainability Framework. This framework serves as the basis for all of the Company's daily operational activities, including product and service development, to ensure that they are always in line with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. In addition, the Sustainability Framework serves as a guideline for impact management, risk mitigation, and optimization of opportunities to create long-term sustainable value for all stakeholders.

Kerangka Keberlanjutan Perseroan
The Company Sustainability Framework

***Sustaining the Sustainable* (StS)**
Secara berkelanjutan, Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan layanan dan produk pembiayaan yang mendukung masa depan berkelanjutan.
The Company continuously strives to develop financing services and products that support a sustainable future.



Greening the Operations
Mengidentifikasi tindakan yang layak untuk membantu memerangi perubahan iklim dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. *Greening the Operations* mencakup efisiensi dalam kegiatan dan operasional bisnis termasuk upaya dalam memelihara lingkungan dan menjalankan bisnis yang peka terhadap lingkungan.
Identifying viable actions to help combat climate change and its negative impacts on the environment. Greening the Operations encompasses efficiency in business activities and operations, including efforts to preserve the environment and conduct environmentally conscious business practices.

Comply to Do it Right
Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnis dan operasional yang beretika dengan penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) dengan berbagai Strategi yang mencakup kebijakan organisasi terkait dengan tata kelola, IT, keamanan data, anti korupsi dan kepuasan pelanggan.
The Company is committed to conducting ethical business and operational activities by implementing Good Governance through various strategies. This includes strategies covering organizational policies related to governance, IT, data security, anti-corruption and customer satisfaction.

WOMempowered
Perseroan menjalankan inisiatif yang menekankan pada pemberdayaan, pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas hidup, baik bagi pihak internal (karyawan) maupun eksternal (masyarakat luas). Strategi WOMempowered mencakup kontribusi aktif pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.
The Company implements initiatives that emphasize empowerment, capacity development and improving the quality of life for both internal (employees) and external (the wider community) parties. The WOMempowered strategy includes active contributions to education, health, economy, environment and socio-cultural aspects.

PRINSIP KEBERLANJUTAN [OJK F.1]

Dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan, Perseroan berpedoman pada 4 (empat) prinsip utama yang menjadi prinsip dasar dalam pengambilan keputusan strategis serta pelaksanaan seluruh inisiatif keberlanjutan di setiap lini aktivitas usaha. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) terintegrasi secara konsisten dalam proses bisnis, manajemen risiko, pengembangan produk serta hubungan dengan para pemangku kepentingan.

SUSTAINABILITY PRINCIPLES [OJK F.1]

In implementing its sustainability strategy, the Company adheres to 4 (four) key principles that form the framework for strategic decision-making and the implementation of all sustainability initiatives across all lines of business. These principles are designed to ensure that environmental, social and governance (ESG) aspects are consistently integrated into business processes, risk management, product development and relationships with stakeholders.



01 ***Engage for Inclusivity*** **(Inklusivitas)**
Engage for Inclusivity

Perseroan secara aktif mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penetapan isu-isu keberlanjutan yang material serta dalam penyusunan respons strategis yang relevan dan inklusif.
The Company actively identifies and involves stakeholders to participate in determining material sustainability issues and in developing relevant and inclusive strategic responses.



02 ***Work for What Matters*** **(Materialitas)**
Work for What Matters (Materiality)

Perseroan mengidentifikasi dan memprioritaskan topik keberlanjutan yang paling relevan dengan mempertimbangkan tingkat dampaknya terhadap kinerja Perseroan dan kepentingan pemangku kepentingan.
The Company identifies and prioritizes the most relevant sustainability topics by considering their level of impact on the Company's performance and stakeholder interests.



03 ***Bringing +Impact (Dampak)***
Bringing +Impact

Perseroan menyadari bahwa perilaku, kinerja dan hasil usaha memiliki dampak terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menghadirkan dampak positif (+*Impact*) yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
The Company recognizes that behavior, performance and business results have an impact on economic, environmental and social aspects. Therefore, the Company consistently strives to deliver a sustainable positive impact (+Impact) for all stakeholders.



04 ***Act the Talk (Responsif)***
Act the Talk (Responsive)

Perseroan merespons isu-isu keberlanjutan secara tepat waktu dan relevan serta mewujudkannya secara nyata melalui keputusan, tindakan dan kinerja yang sejalan dengan prinsip *Act the Talk*.
The Company responds to sustainability issues in a timely and relevant manner, and concretely implements these through decisions, actions, and performances in line with the Act the Talk principle.

Perseroan menanamkan nilai-nilai keberlanjutan kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan melalui berbagai inisiatif, termasuk program pelatihan dan pengembangan kapasitas. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), sekaligus mendorong penerapan praktik berkelanjutan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

The Company instills sustainability values in all employees and stakeholders through various initiatives, including training and capacity building programs. These programs are designed to enhance understanding of environmental, social and governance (ESG) aspects while encouraging the implementation of sustainable practices in day-to-day work activities.

Selain meningkatkan kesadaran, pelatihan dan sosialisasi juga diarahkan untuk membentuk pola pikir yang proaktif dan responsif terhadap isu-isu keberlanjutan, khususnya dalam konteks keuangan berkelanjutan dan integrasi prinsip LST ke dalam proses bisnis. Melalui pendekatan ini, Perseroan berupaya membangun ekosistem kerja yang produktif, bertanggung jawab serta mendukung pencapaian kinerja jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

In addition to raising awareness, training and dissemination are also aimed at fostering a proactive and responsive mindset toward sustainability issues, particularly in the context of sustainable finance and the integration of ESG principles into business processes. Through this approach, the Company strives to build a productive and responsible work environment that supports the achievement of inclusive and sustainable long-term performance.

LANGKAH STRATEGIS MENUJU DEKARBONISASI DAN *NET ZERO EMISSION* [IDX E-06]

Perseroan memahami bahwa agenda dekarbonisasi dan pencapaian *Net Zero Emission* merupakan bagian penting dari transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pendekatan yang diterapkan difokuskan pada pilar produk melalui pilar Sustaining the Sustainable (StS), yaitu dengan mendorong pembiayaan yang mendukung penggunaan kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan, khususnya sepeda motor listrik dan kendaraan dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Di sisi operasional, hingga saat ini Perseroan belum melakukan program dekarbonisasi yang secara langsung menyasar penurunan emisi dari aktivitas operasional internal.

STRATEGIC STEPS TOWARDS DECARBONIZATION AND NET ZERO EMISSION [IDX E-06]

The Company understands that the decarbonization agenda and achieving Net Zero Emissions are essential components of the transition to a low-carbon economy. The applied approach focuses on the product pillar through Sustaining the Sustainable (StS) pillar, by encouraging financing that supports the use of more energy-efficient and environmentally friendly vehicles, particularly electric motorcycles and vehicles with better fuel efficiency. On the operational side, to date the Company has not implemented a decarbonization program that directly targets reducing emissions from internal operational activities.

Melalui peningkatan portofolio pembiayaan pada segmen kendaraan rendah emisi, Perseroan berupaya berkontribusi secara tidak langsung terhadap pengurangan emisi karbon di tingkat konsumen, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap solusi transportasi yang lebih berkelanjutan. Strategi tersebut juga selaras dengan kebijakan internal Perseroan dalam menerapkan konsep Perkantoran Ramah Lingkungan (*Green Office*), yang diwujudkan melalui efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, pengurangan limbah serta penerapan praktik kerja yang lebih ramah lingkungan di lingkungan operasional. Dengan pendekatan ini, Perseroan tidak hanya mendorong keberlanjutan melalui produk pembiayaan, tetapi juga melalui operasional yang bertanggung jawab dan efisien.

PENCAPAIAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Keberlanjutan Perseroan dalam menciptakan pertumbuhan bisnis jangka panjang yang tangguh dan bertanggung jawab, Perseroan menyusun strategi keberlanjutan yang tertuang dalam strategi dan peta jalan keberlanjutan Perseroan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

By increasing its financing portfolio in the low-emission vehicle segment, the Company seeks to contribute indirectly to reducing carbon emissions at the customer level, while expanding public access to more sustainable transportation solutions. The strategy is also aligned with the Company's internal policies in implementing the Green Office concept, which is realized through efficient use of energy and resources, waste reduction and the adoption of more environmentally friendly work practices across operational activities. Through this approach, the Company not only promotes sustainability through its financing products, but also through responsible and efficient operational management.

SUSTAINABILITY STRATEGY ACHIEVEMENT

To support the achievement of the Company's Sustainable Vision and Mission of creating resilient and responsible long-term business growth, the Company prepares sustainability strategies, then incorporated into the Company's sustainability strategy and roadmap, as well as the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), submitted annually to the Financial Services Authority (OJK).

Target Prioritas RAKB RAKB Key Priority	**Pencapaian RAKB Tahun 2025** 2025 RAKB Achievements	**RAKB Tahun 2026** 2026 RAKB
1. Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Development of Financial Products and/or Services	Perseroan meningkatkan portofolio pembiayaan kendaraan sepeda motor listrik serta melakukan eksplorasi dan pengembangan produk pembiayaan lain yang mendukung prinsip keberlanjutan. The company is expanding its electric motorcycles financing portfolio and exploring developing other financing products that support sustainability principles.	Peningkatan portofolio pembiayaan motor listrik dan eksplorasi produk pembiayaan berkelanjutan. Expansion of the electric vehicle financing portfolio and exploration of sustainable financing products.
2. Pengembangan Kapasitas Internal Internal Capacity Building	Perseroan telah mengimplementasikan kurikulum keberlanjutan sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas sumber daya manusia di seluruh jenjang jabatan dalam rangka Peningkatan *Awareness* dan *knowledge* karyawan terkait Keuangan Berkelanjutan. The company has implemented a sustainability curriculum as part of its human resource capacity building program across all job levels in order to increase employee awareness and knowledge of sustainable finance.	Peningkatan *awareness* dan *knowledge* karyawan terkait Keuangan Berkelanjutan (tingkat lanjut). Increased employee awareness and knowledge regarding Sustainable Finance (advanced level).
3. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional Organizational Adjustment, Risk Management, Governance and/or Standard Operating Procedures	Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Keberlanjutan melalui Surat Kebijakan Nomor 278/SK/OPP/11-24 tentang Kerangka Keberlanjutan (*Sustainability Framework*) pada akhir tahun 2024 yang kemudian disosialisasikan secara bertahap kepada seluruh karyawan pada kuartal pertama 2025. Untuk memperkuat penerapannya, Perseroan kemudian menerbitkan Surat Kebijakan Nomor 015/SK/OPP/01-25 tentang Penerapan Konsep Perkantoran Ramah Lingkungan (*Green Office*). Di sisi lain, Perseroan juga memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* melalui ketentuan pelaporan sanksi serta pelaksanaan penilaian risiko penyuapan (*Bribery Risk Assessment*) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku. The Company has issued a Sustainability Policy through Policy Letter Number 278/SK/OPP/11-24 concerning the Sustainability Framework at the end of 2024, which was then gradually disseminated to all employees in the first quarter of 2025. To strengthen its implementation, the Company then issued Policy Letter No. 015/SK/OPP/01-25 concerning the Implementation of the Green Office Concept. On the other hand, the Company also strengthened the implementation of Good Corporate Governance through sanctions reporting provisions and the implementation of bribery risk assessments at the Head Office and Branch Offices in accordance with the applicable Anti-Bribery Management System provisions.	Memperkuat tupoksi LST dalam struktur organisasi Perseroan. Strengthening the main duties and functions of LST within the Company's organizational structure.
4. Kegiatan Lainnya yang Mendukung Keuangan Berkelanjutan Other Activities that Support Sustainable Finance	Perseroan senantiasa menerapkan kegiatan lainnya yang mendukung KB melalui penyediaan infrastruktur pendukung program *Green Office* dan *sustainability lifestyle* di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sebagai bagian dari strategi *Greening The Operations*. Selain itu, Perseroan juga mendukung implementasi KB melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), antara lain melalui pelaksanaan program *Safety Riding* bagi konsumen dan masyarakat serta melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. The Company continuously implements other activities that support KB through the provision of infrastructure to support the Green Office program and sustainable lifestyle at its Head Office and Branch Offices as part of its Greening The Operations strategy. In addition, the Company also supports the implementation of KB through its Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, including through the implementation of the Safety Riding program for consumers and the community, as well as through the Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) program to improve financial literacy and inclusion.	Memperluas praktik-praktik ramah lingkungan dalam operasional keseharian Perseroan (*green office & lifestyle*). Expanding environmentally friendly practices in the Company's daily operations (green office & lifestyle).

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan menjadi bagian dari peta jalan (*roadmap*) Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi ini merupakan pedoman bagi Perseroan sebagai lembaga jasa keuangan dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan serta melaporkan pencapaian dan rencana aksinya kepada OJK.

The Company's Sustainable Finance Action Plan (RAKB) is part of the Company's short-term and long-term roadmap. This strategy serves as a guideline for the Company as a financial services institution in implementing sustainable finance and reporting its achievements and action plans to the OJK.

DUKUNGAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS

Dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, Perseroan menetapkan fokus kontribusi pada 6 (enam) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) prioritas. Dalam rangka mewujudkan target-target keberlanjutan yang telah ditetapkan tersebut, Perseroan mengimplementasikan sejumlah inisiatif strategis yang dijalankan secara terintegrasi, sebagai berikut:

SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PRIORITY

In supporting the sustainable development agenda, the Company has identified 6 (six) SDGs priorities for its contributions. To realize the sustainability targets, the Company undertakes several strategic initiatives implemented in an integrated manner, including:

TPB Prioritas SDG Priorities	**Capaian 2025** 2025 Achievements	**Strategi** Strategies
4 QUALITY EDUCATION	Jumlah keikutsertaan pelatihan karyawan mencapai 68.581 jam dengan rata-rata 10,91 jam per karyawan. The total number of employee training hours reached 68,581 hours, with an average of 10.91 hours per employee.	▪ Penguatan kompetensi karyawan melalui program pelatihan terstruktur, sertifikasi profesional dan lokakarya pengembangan kapasitas. ▪ Pengembangan dan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital melalui pemanfaatan platform *Learning Management System* (LMS). ▪ Strengthening employee competencies through structured training programs, professional certification and capacity building workshops. ▪ Developing and optimizing digital-based learning systems through the use of Learning Management System (LMS) platforms.
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	Pendapatan mencapai Rp2,17 triliun dengan laba Rp142,55 miliar. Revenue reached Rp2.17 trillion with a profit of Rp142.55 billion.	▪ Peningkatan kualitas layanan pembiayaan melalui penyempurnaan standar operasional dan proses bisnis. ▪ Perluasan akses pembiayaan bagi segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari dukungan terhadap inklusi keuangan. ▪ Pengembangan portofolio pembiayaan multiguna untuk menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat secara lebih beragam. ▪ Improving the quality of financing services by refining operational standards and business processes. ▪ Expanding access to financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as part of supporting financial inclusion. ▪ Developing a multipurpose financing portfolio to respond to the diverse financing needs of the community.
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	Kenaikan pada nilai pembiayaan motor listrik sebesar 8,71% di bandingkan dengan tahun 2024. The financing of electric motorcycles increased by 8.71% compared to 2024.	Meningkatkan pembiayaan kendaraan hemat energi & nol emisi (motor listrik dan motor baru dengan teknologi *hybrid/eco mode*) melalui produk pembiayaan Motor Baru. Increasing financing for energy-efficient and zero-emission vehicles (new electric motorcycles and motorcycles with hybrid/eco mode technology) through the New Motorcycle financing product.
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION	Pada tahun 2025, Perseroan menerbitkan Surat Kebijakan No. 015/SK/OPP/01-25 tentang Penerapan Konsep Perkantoran Ramah Lingkungan (*Green Office*) sebagai bentuk komitmen dalam mendukung praktik operasional yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini mengatur penerapan prinsip efisiensi energi, pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta upaya pengurangan dampak lingkungan di lingkungan kerja Perseroan, guna mendorong budaya kerja yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. In 2025, the Company issued Policy Letter No. 015/SK/OPP/01-25 concerning the Implementation of the Green Office Concept as a form of commitment to supporting environmentally-friendly operational practices. This policy regulates the implementation of energy efficiency principles, responsible resource management, and efforts to reduce environmental impact in the Company's work environment, in order to promote a more sustainable and environmentally friendly work culture.	Penerapan konsep Perkantoran Ramah Lingkungan (*Green Office*). Implementation of the Green Office concept.

TPB Prioritas SDG Priorities	Capaian 2025 2025 Achievements	Strategi Strategies
	Pengembangan pembiayaan kendaraan rendah emisi melalui produk Motor Baru, termasuk sepeda motor listrik serta kendaraan dengan teknologi hemat energi seperti *hybrid* dan *eco mode*. Penerapan operasional kantor yang lebih efisien melalui optimalisasi penggunaan sumber daya, mencakup konsumsi BBM operasional, listrik serta pengendalian perjalanan dinas sebagai sumber emisi yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan. ▪ Total pembiayaan motor listrik roda dua sebesar Rp627 juta di tahun 2025. ▪ Monitoring data lingkungan termasuk emisi yang dihasilkan Perseroan. ▪ Efisiensi pada penggunaan sumber emisi GRK dari cakupan 1, 2 & 3. Development of low-emission vehicle financing through new motorcycle products, including electric motorcycles and vehicles with energy-efficient technologies such as hybrid and eco mode. Implementation of more efficient office operations through optimization of resource use, including operational fuel consumption, electricity and control of business travel as sources of emissions from the Company's operational activities. ▪ Increase in two-wheeled electric vehicles financing by Rp627 million in 2025. ▪ Management of environmental data, including emissions generated by the Company. ▪ Efficiency in the use of GHG emission sources from scopes 1, 2 and 3.	Peningkatan pembiayaan kendaraan rendah emisi melalui produk Motor Baru, mencakup sepeda motor listrik serta kendaraan dengan teknologi hemat energi seperti *hybrid* dan *eco mode*. Increased financing for low-emission vehicles through new motorcycle products, including electric motorcycles and vehicles with energy-efficient technologies such as hybrid and eco mode.
	Menyelenggarakan sosialisasi kode etik, pelatihan kepatuhan dan edukasi *anti-fraud*, termasuk pelatihan terkait Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Conducting code of conduct socialization, compliance training, and anti-fraud education, including training related to the implementation of Application of Good Governance principlesand Anti-Bribery Management Systems.	▪ Kepatuhan pada regulasi. ▪ Penerapan *Anti Fraud* & Anti korupsi. ▪ Pengelolaan Sistem Manajemen risiko. ▪ Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik. ▪ Compliance with regulations. ▪ Implementation of anti-fraud and anti-corruption. ▪ Management of risk management systems. ▪ Application of Good Governance principles.

UPAYA MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN TAHUN 2025 [OJK F.1]

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan sejumlah inisiatif untuk memperkuat budaya keberlanjutan di lingkungan kerja, antara lain:

1. ***Sustainability Hours***
   Perseroan mencatat pencapaian dan pengawasan atas *Sustainability Hours*, yaitu waktu yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan inisiatif yang berkontribusi dalam membangun budaya keberlanjutan sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh Maybank Group. Selama periode pelaporan, Perseroan telah terus aktif dalam melibatkan karyawan di berbagai kegiatan dan inisiatif keberlanjutan.
2. **Sosialisasi Kebijakan *Green Office***
   Perseroan melakukan sosialisasi Surat Kebijakan *Green Office* guna mendorong penerapan praktik kantor ramah lingkungan secara konsisten di seluruh unit kerja.
3. ***Employee Engagement* untuk Keberlanjutan**
   Berbagai kegiatan *employee engagement* dilaksanakan bekerja sama dengan fungsi Human Capital (HC) untuk memperkuat partisipasi karyawan dan menumbuhkan budaya keberlanjutan secara berkelanjutan.

EFFORTS TO BUILD A CULTURE OF SUSTAINABILITY IN 2025 [OJK F.1]

Throughout 2025, the Company implemented several initiatives to strengthen a culture of sustainability in the workplace, including:

1. **Sustainability Hours**
   The Company records achievements and monitoring of Sustainability Hours, which is the time allocated for various activities and initiatives that contribute to building a culture of sustainability in accordance with the categories set by Maybank Group. During the reporting period, the Company has continued to actively involve employees in various sustainability activities and initiatives.
2. **Green Office Policy Dissemination**
   The Company disseminated the Green Office Decision Letter to encourage the consistent implementation of environmentally friendly office practices across all units.
3. **Employee Engagement for Sustainability**
   Various employee engagement activities were implemented in cooperation with the Human Capital (HC) function to strengthen employee participation and foster a culture of sustainability.

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance



PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.1] [GRI 2-12, 2-13]

Perseroan membangun struktur tata kelola keberlanjutan yang terintegrasi dalam kerangka tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan bahwa aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) melekat dalam proses pengambilan keputusan strategis, manajemen risiko serta pelaporan kinerja. Melalui struktur ini, Perseroan menegaskan komitmennya untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keberlanjutan, Perseroan menugaskan Departemen Corporate Social & ESG yang telah dibentuk sejak tahun 2023 sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta pengelolaan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST). Pembentukan departemen ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mengintegrasikan keberlanjutan secara lebih sistematis ke dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan.

Departemen Corporate Social & ESG berada di bawah koordinasi Divisi Financial Planning & Investor Relation, yang bertanggung jawab kepada Finance Director. Penempatan fungsi keberlanjutan di bawah koordinasi divisi keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif

UNIT RESPONSIBLE FOR SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [OJK E.1] [GRI 2-12, 2-13]

The Company has established an integrated sustainability governance structure within its corporate governance framework to ensure that Environmental, Social and Governance (ESG) aspects are embedded in strategic decision-making, risk management and performance reporting. Through this structure, the Company affirms its commitment to creating sustainable economic value and long-term benefits for all stakeholders.

As a strategic step in strengthening sustainability governance, the Company assigned the Corporate Social & ESG Department, which was established in 2023, as the party primarily responsible for the implementation of sustainable finance, including the implementation of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) and the management of Environmental, Social and Governance (ESG) aspects. The establishment of this department reflects the Company's commitment to integrating sustainability more systematically into its organizational structure and decision-making processes.

The Corporate Social & ESG Department is under the coordination of the Financial Planning & Investor Relation Division, which reports to the Finance Director. The placement of sustainability functions under the coordination of the finance division aims to ensure that all sustainability initiatives

keberlanjutan terintegrasi secara menyeluruh dengan strategi keuangan dan arah bisnis Perseroan serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

Departemen Corporate Social & ESG berperan sebagai pusat koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program keberlanjutan di seluruh organisasi. Tugas dan tanggung jawab utamanya meliputi:

1. Menyusun perencanaan tahunan departemen yang mencakup program kerja, anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sebagai pedoman pencapaian target.
2. Memantau pengelolaan kegiatan dan biaya *Corporate Events*, khususnya program sosial (TJSL), inisiatif keberlanjutan serta membina hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal guna mendukung pelaksanaan strategi keberlanjutan.
3. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program inklusi dan literasi keuangan serta menyampaikan laporan rencana dan realisasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan monitoring dan koordinasi pelaporan RAKB dan Laporan Keberlanjutan, termasuk pengumpulan data lintas fungsi dan proses persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Berkolaborasi dengan Maybank Group dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam pelaksanaan program TJSL serta penyediaan data LST perusahaan.
6. Merumuskan dan mengembangkan strategi LST, meninjau kebijakan keberlanjutan serta mengintegrasikan inisiatif LST ke dalam kegiatan operasional perusahaan melalui kolaborasi internal.
7. Mengembangkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia, termasuk melakukan evaluasi kinerja bawahan berdasarkan pencapaian KPI departemen.

are fully integrated with the Company's financial strategy and business direction, as well as supporting the creation of sustainable long-term value.

The Corporate Social & ESG Department serves as the central coordination center for sustainability policies and program implementation across the organization. The main duties and responsibilities are as follows:

1. Preparing department's annual plan, including work programs, budgets, human resources, as well as facilities and infrastructure, as a guideline for achieving targets.
2. Monitoring activities and costs management of Corporate Events, particularly social programs (CSR) and sustainability initiatives and fostering relationships with external stakeholders to support the implementation of sustainability strategies.
3. Preparing, implementing and evaluating financial inclusion and literacy programs and submitting reports on plans and activity realization in accordance with applicable regulations.
4. Monitoring and coordinating the reporting of RAKB and Sustainability Report, including cross-functional data collection and approval process for the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Collaborating with Maybank Group and PT Bank Maybank Indonesia Tbk in implementing CSR programs and providing corporate ESG data.
6. Formulating and developing ESG strategies, reviewing sustainability policies and integrating ESG initiatives into the Company's operational activities through internal collaboration.
7. Developing human resources' competency and performance, including evaluating subordinates' performance based on the achievement of KPI for the department.

Struktur Divisi dan Departemen

Structure of Divisions and Departments

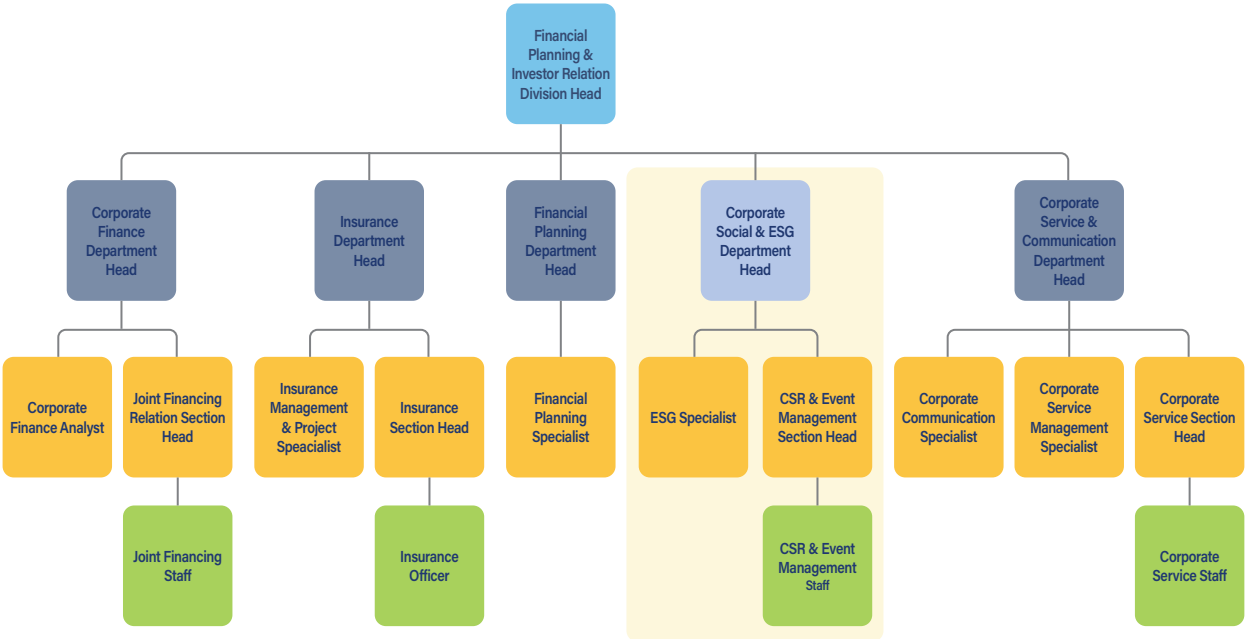

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.2] [GRI 2-17]

Selama periode pelaporan, Perseroan terus mengembangkan kapasitas internal melalui berbagai pelatihan dan *workshop* terkait isu keberlanjutan serta LST bagi seluruh karyawan. Pada tahun 2025, Perseroan telah menerapkan kurikulum keberlanjutan sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas di seluruh jenjang jabatan. Kurikulum tersebut diintegrasikan dalam program pelatihan untuk *Management Trainee*, karyawan level non manajerial, calon manajerial, hingga manajerial yang sudah menjabat.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan "ESG *Risk Training*" bekerja sama dengan para ahli dari institusi pendidikan, yang diikuti oleh peserta pada level manajerial yang berperan dalam proses manajemen risiko Perseroan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait konsep risiko dan peluang LST bagi departemen terkait, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan ataupun pembaruan kebijakan yang mendukung penerapan manajemen risiko LST Perseroan.

Berikut data mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2025:

COMPETENCY DEVELOPMENT RELATED TO SUSTAINABLE FINANCE [OJK E.2] [GRI 2-17]

During the reporting period, the Company continued to develop internal capacity through various training and workshops related to sustainability and ESG issues for all employees. In 2025, the Company applied a sustainability curriculum as part of its capacity development program at all levels. This curriculum is integrated into training programs for Management Trainees, non-managerial level employees, prospective managerial staff, and current managerial staff.

Furthermore, the Company also conducted "ESG Risk Training" in collaboration with experts from educational institutions, attended by participants at the managerial level who play a role in the Company's risk management process. This training aimed to improve the understanding of ESG risk and opportunity concepts for relevant departments and thus, serving as a reference for developing or updating policies that support the Company's ESG risk management implementation.

Below is the data on competency development related to sustainable finance carried out by the Company throughout 2025:

Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan Tahun 2025
Sustainability Competency Development in 2025

No	Deskripsi Description	Lingkup Scope	Topik Topic	Jumlah Peserta Number of Participants
1	*Training Functional Insight Corner batch 1*	Internal	*Sustainability &* ESG *for Manager*	69
2	*Training Functional Insight Corner batch 2 & 3*		*Sustainability &* ESG *for Manager*	208
3	*Training Cool Series Staff & Spv*		*Sustainability 101*	5.727
4	*Training* WOM *Managerial Program* (WMP) *batch 28*		*Imbedding Sustainability for your Next Managerial Career*	20
5	*Training* WOM *Managerial Program* (WMP) *batch 29*		*Imbedding Sustainability for your Next Managerial Career*	19
6	*Training* WOM *Managerial Program* (WMP) *batch 30*		*Imbedding Sustainability for your Next Managerial Career*	18
7	*Training Management Trainee batch 49*		*Unlocking Sustainability Potential*	23
8	*Training Management Trainee batch 50*		*Unlocking Sustainability Potential*	10
9	*Training Management Trainee batch 51*		*Unlocking Sustainability Potential*	17
10	*Training Management Trainee batch 52*		*Unlocking Sustainability Potential*	20
11	*Training Management Trainee batch 53*		*Unlocking Sustainability Potential*	19
12	*Training Management Trainee batch 54*		*Unlocking Sustainability Potential*	20
13	WOM *on Boarding Program*		ESG *Class video*	294
14	*Training External Department Head*	Eksternal External	ESG *Risk*	22
15	*Training GRI Standard*		*Sustainability Reporting Standard*	1
16	*Training* GHG *Accounting*		GHG *Accounting*	1
17	*Training* CSR *Expert*		CSR *Expert "How to Build Impactful Corporate Social Responsibility Initiative"*	1
18	*Training* IFRS S1 & S2		IFRS S1 & S2	1
	Jumlah Total			**6.490**

PENILAIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.3]

Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk memastikan seluruh kegiatan usaha, termasuk penerapan keuangan berkelanjutan, dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi jangka panjang. Proses manajemen risiko ini tidak hanya mencakup aspek keuangan dan operasional, tetapi juga memperhatikan dimensi LST yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha.

RISK ASSESSMENT OF SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [OJK E.3]

The Company runs an integrated risk management system to ensure that all business activities, including the implementation of sustainable finance, are carried out with prudent principles and long-term oriented. This risk management process encompasses not only financial and operational aspects, but also considers ESG dimensions that could potentially impact business sustainability.



Dalam penerapannya, Perseroan senantiasa mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko keberlanjutan.
In its implementation, The Company shall continuously identify, measure, control and monitor sustainability risks.

1. Identifikasi risiko dilakukan secara proaktif melalui pemetaan risiko serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
   Risk identification is carried out proactively through risk mapping and the Sustainable Finance Action Plan (RAKB).

2. Pengukuran risiko dilakukan dengan menilai kemungkinan dan dampak dari setiap risiko terhadap kinerja dan reputasi Perseroan, menggunakan parameter dan indikator risiko utama (*Key Risk Indicators*).
   Risk measurement is carried out by assessing the possibility and impact of each risk on the Company's performance and reputation, using key risk parameters and indicators.

3. Pengendalian risiko dilaksanakan dengan menyusun dan memperbarui kebijakan, prosedur serta limit risiko yang disesuaikan dengan dinamika pasar, regulasi dan faktor sosial-lingkungan yang relevan.
   Risk control is implemented by developing and updating policies, procedures and risk limits that are adjusted to market dynamics, regulations and relevant socio-environmental factors.

4. Pemantauan risiko dilakukan melalui mekanisme pelaporan rutin dari unit-unit kerja kepada fungsi manajemen risiko dan Direksi, dilengkapi dengan *early warning system* untuk mendeteksi perubahan kondisi yang dapat memengaruhi stabilitas usaha.
   Risk monitoring is carried out through a routine reporting mechanism from work units to the risk management function and the Board of Directors, complemented by an early warning system to detect changes in conditions that could impact business stability.

Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko dalam mengawasi dan mengendalikan risiko di dalam Perseroan sekaligus mengantisipasi potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, misi dan visi Perseroan. Melalui proses ini, Perseroan dapat secara sistematis mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap risiko yang terkait dengan pengelolaan dan operasionalnya.

The Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee in monitoring and controlling risks within the Company while anticipating potential risks that may affect the achievement of the Company's goals, mission, and vision. Through this process, the Company can systematically identify and evaluate any risks associated with its management and operations.

Melalui pendekatan ini, Perseroan berupaya menumbuhkan budaya pengelolaan risiko yang proaktif dan bertanggung jawab, guna mendukung ketahanan bisnis, menjaga reputasi perusahaan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Through this approach, The Company strives to foster a culture of proactive and responsible risk management to support business resilience, safeguard the Company's reputation and create long-term value for all stakeholders.

Penjelasan lebih lengkap mengenai sistem manajemen risiko Perseroan, termasuk kerangka kerja serta profil risiko utama, disampaikan secara terperinci dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

A more complete explanation of the Company's risk management system, including its framework and key risk profiles, is presented in detail in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

PROSES UNTUK MENGELOLA DAMPAK NEGATIF [GRI 2-25]

Perseroan menerapkan mekanisme pengelolaan atas potensi dampak negatif yang timbul dari kegiatan operasional dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan dan perbaikan berkelanjutan. Perseroan menyediakan serta berpartisipasi aktif dalam proses remediasi atas dampak yang teridentifikasi berasal dari aktivitas maupun keputusan bisnis. Untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan, Perseroan menyediakan mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) melalui berbagai kanal, antara lain *Hotline* 150999, email wcare@wom.co.id, media sosial resmi Perseroan, WhatsApp, aplikasi APPK OJK, kanal Lapor Aja! serta layanan *walk-in customer* di seluruh jaringan kantor. Seluruh pengaduan dicatat dalam sistem terpusat dan ditangani oleh unit terkait dengan target penyelesaian paling lama 10 hari kerja. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 hari kerja setelah batas waktu penyelesaian awal berakhir.

Selain itu, Perseroan mengoperasikan *Whistleblowing System* (WBS) yang independen untuk laporan pelanggaran etika, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang. Setiap laporan dianalisa kelayakan *follow up Risk Event* oleh fungsi Operational Risk & Enterprise Risk Management. Laporan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti akan ditransfer kasusnya secara resmi atau *Officially Transferred Case* (OTC) melalui email ke Internal Audit atau *Legal Counsel & Anti-Fraud* sesuai dengan kategori kasusnya. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh tim Internal Audit atau *Legal Counsel & Anti-Fraud*, meliputi proses investigasi *root cause*, penyusunan kronologis insiden, *action plan*, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku sesuai dengan peraturan Perseroan.

Masukan pengguna kanal pengaduan digunakan untuk memperbaiki prosedur dan meningkatkan aksesibilitas sistem. Pendekatan ini memastikan setiap dampak negatif dapat ditangani secara tuntas, adil dan konstruktif, sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perseroan.

MENGKOMUNIKASIKAN HAL-HAL KRITIS [GRI 2-16]

Perseroan memiliki mekanisme komunikasi yang terstruktur untuk memastikan setiap isu penting atau kritis tersampaikan tepat waktu kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Komunikasi dilakukan melalui berbagai forum formal dan rutin yang melibatkan seluruh tingkatan manajemen, guna memastikan pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi.

Secara berkala, Direksi dan unit kerja melaksanakan rapat manajemen untuk membahas perkembangan operasional, tantangan yang dihadapi serta strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran perusahaan. Sementara itu, rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi forum penting untuk membahas kebijakan strategis, meninjau kinerja serta mengevaluasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Forum-forum ini tidak hanya

PROCESS FOR MANAGING NEGATIVE IMPACTS [GRI 2-25]

The Company implements a management mechanism for potential negative impacts arising from operational activities by promoting the principles of transparency, fairness and continuous improvement. The Company provides and actively participates in the remediation process for impacts identified as originating from business activities and decisions. To accommodate and follow up on complaints, the Company provides a grievance mechanism through various channels, including Hotline 150999, email wcare@wom.co.id, the Company's official social media, WhatsApp, the OJK APPK application, the Lapor Aja! channel and walk-in customer service at all office networks. All complaints are recorded in a centralized system and handled by the relevant unit with a target resolution time of no more than 10 business days. Under certain conditions, the Company may extend the complaint resolution period by a maximum of 10 business days after the initial resolution deadline has expired.

Furthermore, the Company operates an independent Whistleblowing System (WBS) for reports of ethical violations, fraud, or abuse of authority. Each report is analyzed for suitability for Risk Event follow-up by the Operational Risk & Enterprise Risk Management function. Complaints requiring follow-up will be officially transferred (Officially Transferred Case/OTC) via email to Internal Audit or Legal Counsel & Anti-Fraud, depending on the case category. Complaints will be followed up by the Internal Audit or Legal Counsel & Anti-Fraud team, including root cause investigation, developing a chronology of the incident, developing an action plan and imposing sanctions on the perpetrator in accordance with Company regulations.

User feedback from the complaint channel is used for refining procedures and increasing system accessibility. This approach ensures that any negative impacts are addressed thoroughly, fairly and constructively, while strengthening stakeholder trust in the Company.

COMMUNICATING CRITICAL MATTERS [GRI 2-16]

The Company has a structured communication mechanism to ensure that all important or critical issues are communicated in a timely manner to the Board of Directors and the Board of Commissioners. Communication is conducted through various formal and regular forums involving all levels of management, to ensure prompt and coordinated decision-making.

Periodically, the Board of Directors and work units hold management meetings to discuss operational developments, challenges faced and strategies needed to achieve Company goals. Meanwhile, meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors serve as an important forum for discussing strategic policies, reviewing performance and evaluating potential risks that could impact business continuity. These forums not only ensure effective

memastikan penyampaian informasi yang efektif, tetapi juga memperkuat kolaborasi antar-tim dalam menangani dan menyelesaikan isu secara tepat waktu.

Dalam sistem pelaporan internal, setiap isu kritis dinilai berdasarkan tingkat dampak dan urgensinya. Isu yang berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha atau melampaui ambang eskalasi, yakni batas kriteria tertentu yang menentukan kapan suatu isu perlu dilaporkan ke tingkat manajemen lebih tinggi, segera diangkat ke rapat Direksi atau rapat Komite Dewan terkait. Pada setiap pertemuan, manajemen memaparkan penyebab utama, rencana tindak lanjut serta waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. Perkembangan penyelesaiannya kemudian dipantau secara rutin hingga tuntas dan dilaporkan kembali pada periode berikutnya.

Selain itu, Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko terintegrasi untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan. Penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) juga menjadi bagian dari strategi kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat seperti krisis keuangan, bencana alam, atau gangguan layanan. Melalui BCP, setiap unit kerja memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kesinambungan bisnis serta prosedur yang harus dijalankan dalam kondisi kritis.

Dengan sistem komunikasi yang terbuka dan proses pengawasan yang konsisten, Perseroan memastikan seluruh isu penting tertangani secara tepat waktu dan transparan serta mendukung penerapan tata kelola dan keberlanjutan usaha yang solid.

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN [GRI 2-27]

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2025, Perseroan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola yang baik dengan mengacu pada ketentuan regulator dan *best practices* yang berlaku yaitu diantaranya dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur operasional agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik industri, melakukan pengembangan sistem, serta meningkatkan *awareness* terkait kepatuhan kepada seluruh insan Perseroan.

MEKANISME UNTUK MENCARI NASIHAT DAN MENGEMUKAKAN MASALAH [GRI 2-26]

Perseroan menyediakan berbagai saluran komunikasi yang memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan nasihat terkait penerapan kebijakan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta untuk mengemukakan pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan perilaku bisnis, kepatuhan, maupun etika kerja.

information delivery but also strengthen collaboration between teams in addressing and resolving issues in a timely manner.

Within the internal reporting system, each critical issue is assessed based on its level of impact and urgency. Issues that have the potential to disrupt business continuity or exceed the escalation threshold, which is a specific criterion that determines when an issue needs to be reported to a higher level of management, are immediately escalated to a Board of Directors' meeting or a meeting of the relevant Board's Committee. At each meeting, management outlines the root cause, follow-up plan and established timeline for resolution. Progress is then regularly monitored until completion and reported back in the following period.

Furthermore, the Company runs an integrated risk management system to identify, analyze and control risks that could potentially disrupt Company operations. The Business Continuity Plan (BCP) is also part of its preparedness strategy for emergency situations such as financial crises, natural disasters, or service disruptions. Through the BCP, each work unit has a clear understanding of the roles and responsibilities in maintaining business continuity and procedures to follow in critical situations.

With an open communication system and consistent oversight process, The Company ensures that all critical issues are addressed in a timely and transparent manner, supporting the implementation of solid governance and business sustainability.

COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS [GRI 2-27]

The Company is committed to conducting its business activities in compliance with applicable laws and regulations. Throughout 2025, the Company will continue to evaluate and improve its implementation of good governance by referring to applicable regulatory requirements and best practices, namely by adjusting and refining policies and operational procedures to comply with applicable laws and regulations and adopting industry best practices, developing systems, and increasing awareness of compliance among all Company personnel.

MECHANISMS FOR SEEKING ADVICE AND RAISING CONCERNS [GRI 2-26]

The Company provides various communication channels that enable employees and stakeholders to obtain advice regarding the implementation of responsible business policies and practices, as well as to raise questions or concerns related to business conduct, compliance, or work ethics.

Karyawan dapat mencari nasihat mengenai penerapan kebijakan internal, tata kelola dan standar etika melalui atasan langsung, atau melalui Divisi Legal Counsel & Anti Fraud, yang memberikan panduan mengenai interpretasi kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Untuk memastikan pemahaman yang merata, Perseroan juga menyelenggarakan sosialisasi kode etik, pelatihan kepatuhan dan edukasi *anti-fraud*, termasuk pelatihan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui *blast email* dan sosialisasi *anti fraud.*

Sebagai wadah bagi karyawan dan pihak eksternal dalam mengemukakan permasalahan atau pelanggaran, Perseroan menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) yang hanya bisa diakses oleh Anggota Direksi dan beberapa fungsi tertentu dengan jabatan yang ditunjuk oleh Anggota Direksi. Keterbatasan akses terhadap email ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan informasi/laporan berikut pelapornya. Mekanisme ini memungkinkan pelapor untuk menyampaikan laporan secara aman dan rahasia melalui kanal email jendela@wom.co.id.

Setiap laporan yang diterima melalui WBS diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran, termasuk penegakan sanksi dan tindakan perbaikan bila diperlukan. Perseroan memastikan kerahasiaan identitas pelapor dan melindungi mereka dari segala bentuk tindakan pembalasan (retaliasi).

Melalui mekanisme komunikasi dan pelaporan yang terbuka ini, Perseroan berupaya membangun lingkungan kerja yang berintegritas, transparan dan akuntabel serta memperkuat budaya kepatuhan yang menjadi dasar penerapan keberlanjutan di seluruh lini operasional.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN [OJK E.4] [GRI 2-29]

Perseroan memahami bahwa pencapaian tujuan keberlanjutan tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan secara aktif membangun komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemegang Saham dan Investor, Konsumen, Karyawan, Komunitas, Mitra Kerja/Pemasok serta Pemerintah dan Regulator.

Berbagai forum diskusi, kegiatan dan metode pelibatan lainnya diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi pemangku kepentingan dalam menyampaikan masukan, berbagi pandangan serta berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan program keberlanjutan Perseroan. Melalui pendekatan ini, Perseroan memastikan setiap aspirasi pemangku kepentingan terakomodasi dan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Employees can seek advice regarding the implementation of internal policies, governance and ethical standards through their direct supervisors or through the Legal Counsel & Anti Fraud Division, which provides guidance on the interpretation of applicable policies and regulations.

To ensure widespread understanding, the Company also conducts code of conduct dissemination, compliance training and anti-fraud education, including training related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Anti-Bribery Management System through blast emails and anti-fraud awareness campaigns.

As a forum for employees and external parties to raise concerns or violations, the Company implements a Whistleblowing System (WBS) that can only be accessed by members of the Board of Directors and certain functions with positions appointed by members of the Board of Directors. This limited access to email serves to maintain the confidentiality of information/reports and the whistleblower. This mechanism allows reporters to submit reports securely and confidentially via email to jendela@wom.co.id.

Every report received through the WBS is verified and followed up in accordance with violation handling procedures, including the enforcement of sanctions and corrective actions when necessary. The Company ensures the confidentiality of the whistleblowers' identity and protects them from any form of retaliation.

Through this open communication and reporting mechanism, The Company strives to build a work environment with integrity, transparency and accountability, as well as strengthening a compliance culture that forms the basis for implementing sustainability across all operational lines.

STAKEHOLDER RELATIONS [OJK E.4] [GRI 2-29]

The Company understands that sustainability goals cannot be achieved without stakeholders' support and active involvement. Therefore, the Company actively builds communication and collaboration with various parties, including Shareholders and Investors, Customer, Employees, Communities, Partners/Suppliers, as well as the Government and Regulators.

Various discussion forums, activities and other engagement methods are held to provide a space for stakeholders to provide input, share views and contribute to the development of the Company's sustainability policies and programs. Through this approach, the Company ensures that every stakeholder's aspirations are accommodated and become an important part of the sustainable decision-making process.

Pelibatan para pemangku kepentingan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

Stakeholder engagement is explained in more detail as follows:

No	Pemangku Kepentingan Stakeholder	Topik/Masalah yang Dibahas Topic/Issue Discussed	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Frequency	Fungsi Manajemen Tata Kelola Tertinggi Highest Governance Management Function
1	Pemegang Saham dan Investor Shareholders and Investors	▪ Tata Kelola ▪ Organisasi ▪ Pencapaian Kinerja Ekonomi ▪ Governance ▪ Organization ▪ Economic Performance Achievement	▪ Menyediakan informasi pencapaian Perseroan melalui RUPS, Laporan Kuartal dan Penerbitan Laporan Tahunan. ▪ Komunikasi langsung maupun melalui analisis guna memastikan penyampaian informasi material. ▪ Providing information on the Company's achievements through the GMS, Quarterly Reports and Annual Report Publication. ▪ Direct communication and analysis to ensure the delivery of material information.	Sesuai kebutuhan As needed	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
2	Konsumen Customer	▪ Pelindungan Konsumen ▪ Hubungan Berkelanjutan ▪ Customer Protection ▪ Sustainable Relationships	▪ Penyediaan produk dan jasa sesuai peraturan yang berlaku. ▪ Pemberian informasi produk dan jasa dengan tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. ▪ Pengembangan layanan berkualitas prima demi kepuasan konsumen. ▪ Iklan dan Media promosi ▪ Provision of products and services in line with applicable regulations. ▪ Providing timely, adequate, clear and accurate product and service information. ▪ Developing high-quality services for customer satisfaction. ▪ Advertising and Promotional Media	Sesuai kebutuhan As needed	▪ *Line of Business* ▪ Sekretaris Perusahaan ▪ Line of Business ▪ Corporate Secretary
3	Karyawan Employees	▪ Hubungan Ketenagakerjaan ▪ Perlindungan dan Kondisi Kerja ▪ Pengembangan Kompetensi ▪ Pengembangan Karir dan Aktualisasi Diri ▪ Employment Relations ▪ Protection and Working Conditions ▪ Competency Development ▪ Career Development and Self-Actualization	▪ Pengelolaan insan Perseroan secara objektif, transparan, adil dan setara. ▪ Membangun dan mengembangkan lingkungan kerja kondusif demi optimalisasi produktivitas. ▪ Pengembangan karir, *talent management system* dan *assessment center*. ▪ Objective, transparent, fair and equal management of the Company's people. ▪ Building and developing a conducive work environment to optimize productivity. ▪ Career development, talent management system and assessment center.	Pertemuan berkala sesuai kebutuhan Periodic meetings as needed	Human Capital
4	Komunitas Community	▪ Pendidikan dan Budaya ▪ Teknologi dan Akses Infrastruktur ▪ Kesejahteraan dan Pendapatan ▪ Education and Culture ▪ Technology and Infrastructure Access ▪ Welfare and Income	Intensifikasi keterlibatan dalam kegiatan komunitas dengan program yang mencakup bidang pendidikan, pemberdayaan, budaya dan agama, kemanusiaan serta lingkungan. Intensifying involvement in community activities with programs covering education, empowerment, culture and religion, humanity and the environment.	Pertemuan berkala sesuai kebutuhan Periodic meetings as needed.	▪ Sekretaris Perusahaan ▪ Human Capital ▪ Corporate Secretary ▪ Human Capital

No	Pemangku Kepentingan Stakeholder	Topik/Masalah yang Dibahas Topic/Issue Discussed	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Frequency	Fungsi Manajemen Tata Kelola Tertinggi Highest Governance Management Function
5	Mitra Kerja/ Pemasok Partners/ Suppliers	▪ Hubungan Berkelanjutan ▪ Ekonomi ▪ Keadilan ▪ Sustainable Relationships ▪ Economy ▪ Fairness	▪ Syarat kerja sama yang jelas. ▪ Penilaian kinerja yang transparan ▪ Penilaian rutin. ▪ Clear terms of cooperation. ▪ Transparent performance appraisals ▪ Regular appraisals.	Pertemuan berkala sesuai kebutuhan Periodic meetings as needed	Procurement
6	Pemerintah dan Regulator Government and Regulators	▪ Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan ▪ Kepatuhan Terhadap Regulasi Pembiayaan ▪ Komunikasi dan Pelaporan yang Jelas, Akurat, Komprehensif dan Tepat Waktu ▪ Compliance with Laws and Regulations ▪ Compliance with Financing Regulations ▪ Clear, Accurate, Comprehensive and Timely Communication and Reporting	▪ Penyempurnaan terhadap kebijakan internal Perseroan terkait GCG sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Implementasi prinsip GCG di seluruh unit kerja. ▪ Improvement of the Company's internal GCG policies in accordance with current conditions and applicable laws and regulations. ▪ Implementation of GCG principles in all work units.	Pertemuan sesuai kebutuhan Meetings as needed	Compliance

PERMASALAHAN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.5]

Dalam menjalankan agenda keberlanjutan, Perseroan menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal. Tantangan eksternal meliputi kondisi pasar dan tingkat permintaan motor listrik dalam negeri yang masih terbatas serta dinamika regulasi terkait LST dan keberlanjutan yang terus berkembang. Sebagai langkah antisipatif, Perseroan akan terus mengelola kinerja pembiayaan motor listrik secara optimal serta menyesuaikan kebijakan internal sejalan dengan perkembangan regulasi LST.

Sementara itu, Perseroan juga menyadari bahwa pemahaman karyawan terhadap aspek keberlanjutan dan LST merupakan hal yang krusial dalam mendorong transformasi menuju visi dan misi keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan edukasi karyawan akan tetap menjadi salah satu fokus utama Perseroan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Perseroan senantiasa untuk terus memperkuat fondasi penerapan keuangan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berketahanan.

ISSUES IN THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE [OJK E.5]

In implementing its sustainability agenda, the Company faces various challenges from both external and internal factors. External challenges include market conditions and limited domestic demand for electric motorcycles, as well as evolving regulatory dynamics related to ESG and sustainability. As a preventative measure, the Company will continue to optimally manage the financing performance of electric motorcycles and adjust internal policies in line with the evolving ESG regulations.

Meanwhile, the Company also recognizes that employee understanding of sustainability and ESG aspects is crucial in driving the transformation towards a sustainable finance vision and mission. Therefore, employee capacity building and education will remain a key focus for the Company.

With these steps, the Company is continuously strengthening the foundation of sustainable finance implementation, thereby creating long-term value for all stakeholders while supporting the transition to an inclusive and resilient green economy.

Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance



KINERJA EKONOMI

Perseroan mengelola topik kinerja ekonomi melalui serangkaian kebijakan dan pedoman, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, kebijakan pembiayaan dan penetapan *risk appetite* serta sistem manajemen risiko kredit, likuiditas dan operasional. Penguatan proses bisnis dilakukan melalui digitalisasi *end-to-end*, pengembangan *credit scoring* berbasis data, optimalisasi struktur pendanaan serta peningkatan efisiensi operasional di seluruh jaringan kantor cabang.

Pengelolaan kinerja dilakukan oleh Direksi dan dievaluasi secara berkala melalui rapat manajemen, pelaporan kepada Dewan Komisaris serta pemantauan oleh Komite di bawah Dewan Komisaris. Efektivitas pengelolaan diukur melalui indikator utama seperti pertumbuhan pembiayaan, *outstanding* portofolio, kualitas aset (NPF), pendapatan, laba bersih serta efisiensi yang tercermin pada BOPO dan *cost of fund*.

ECONOMIC PERFORMANCE

The Company manages economic performance through a series of policies and guidelines, including Corporate Work Plan and Budget, financing policies and risk appetite determination and credit, liquidity and operational risk management systems. Business processes are strengthened through end-to-end digitalization, development of data-driven credit scoring, optimization of funding structures and increased operational efficiency across branch offices' network.

Performance management is carried out by the Board of Directors and evaluated periodically through management meetings, reporting to the Board of Commissioners and monitoring by Committees under the Board of Commissioners. The management effectiveness is measured through key indicators such as financing growth, outstanding portfolio, asset quality (NPF), revenues, net income and efficiency, as reflected in BOPO and cost of funds.

Dalam evaluasinya, Perseroan melibatkan pemangku kepentingan melalui berbagai mekanisme komunikasi, termasuk RUPS dan pelaporan berkala kepada pemegang saham dan kreditur, umpan balik pelanggan melalui survei dan kanal layanan serta pelaporan rutin kepada regulator. Masukan tersebut menjadi dasar penyempurnaan strategi, penyesuaian kebijakan pembiayaan dan penguatan kinerja ekonomi ke depan. (GRI 3-3)

In its evaluation, the Company involves the stakeholders through various communication mechanisms, including GMS and periodic reports to shareholders and creditors, customer feedback through surveys and service channels and routine reporting to regulators. Such input serves as the basis for refining strategies, adjusting financing policy and strengthening future economic performance. (GRI 3-3)

PERBANDINGAN TARGET DAN KINERJA PRODUKSI, PORTOFOLIO, TARGET PEMBIAYAAN, ATAU INVESTASI, PENDAPATAN DAN LABA RUGI [OJK F.2]

Selama tahun 2025, Perseroan berhasil menunjukkan kinerja yang solid di tengah kondisi perekonomian dan bisnis yang menantang, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

COMPARISON OF TARGETS AND PERFORMANCE OF PRODUCTION, PORTFOLIO, FINANCING TARGETS, OR INVESTMENTS, REVENUES AND PROFIT OR LOSS [OJK F.2]

For the year 2025, the Company managed to deliver solid performance amid challenging economic and business conditions, as shown in the following table:

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi
Comparison of Targets and Performance of Production, Portfolio, Financing Targets, or Investments, Revenue and Profit or Loss

(Dalam jutaan Rupiah)
(In millions of Rupiah)

Uraian Description	2025		2024		2023	
	Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization
Pendapatan Revenues	2.361.395	2.169.601	2.270.322	2.166.940	1.960.412	1.995.410
Beban Expenses	2.007.939	1.990.143	1.921.964	1.833.698	1.660.769	1.672.801
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	258.589	142.553	259.171	262.915	230.755	236.407
Aset Assets	7.738.783	7.368.668	7.990.889	6.946.341	6.082.162	6.635.715
Pembiayaan Financing	6.257.553	5.937.087	6.498.000	5.429.489	5.217.356	5.844.995
Liabilitas Liabilities	5.681.533	5.385.496	6.106.718	5.054.240	4.446.402	4.939.793
Ekuitas Equity	2.057.250	1.983.172	1.884.171	1.892.101	1.635.760	1.695.922

Perseroan membukukan pendapatan stabil yaitu sebesar Rp2,17 triliun di tahun 2025. Pencapaian nilai pendapatan tercatat mencapai 91,88% dari target yang ditetapkan. Perseroan mencatatkan penurunan laba tahun berjalan sebesar 45,78% dari Rp262,92 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp142,55 miliar di tahun 2025. Perolehan laba tahun berjalan tersebut mencapai 55,13% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2025.

The Company recorded stable revenues of Rp2.17 trillion in 2025. This revenues achievement reached 91.88% of the set target. The Company recorded a decrease of 45.78% in income for the year, from Rp262.92 billion in the previous year to Rp142.55 billion in 2025. This income for the year's achievement reached 55.13% of the set target for 2025.

Di sisi lain, penyaluran pembiayaan naik 9,35% dari Rp5,43 triliun di tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp5,94 triliun di tahun 2025. Aset Perseroan naik 6,08% dari Rp6,95 triliun menjadi Rp7,37 triliun di tahun 2025. Peningkatan aset tersebut diiringi oleh bertambahnya liabilitas dan ekuitas.

On the other hand, financing distribution rose 9.35% from Rp5.43 trillion in the previous year to Rp5.94 trillion in 2025. The Company's assets increased by 6.08% from Rp6.95 trillion to Rp7.37 trillion in 2025. This increase in assets was accompanied by the increase in liabilities and equity.

PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

Dari sisi jenis pembiayaan, kontributor terbesar pada portofolio pembiayaan Perseroan berasal dari investasi. Pembiayaan multiguna jasa kontribusi 28,19%, pada portofolio pembiayaan Perseroan di tahun 2025, angka tersebut berubah dari sebesar 37,17% di tahun 2024. Pembiayaan Investasi berkontribusi 33,39% di tahun 2025, naik dari 31,98% di tahun 2024. Dari sisi jenis obyek/agunan pembiayaan, pembiayaan yang menggunakan obyek/agunan mobil memberikan kontribusi terbesar yaitu 60,27%, naik dari 56,75%, di tahun 2024. Sementara motor berkontribusi 39,28% menurun dari 43,08%, di tahun 2024. Lainnya memberikan kontribusi 0,45% dari 0,16% di tahun sebelumnya.

FINANCING PORTFOLIO

In terms of financing types, the largest contributor to the Company's financing portfolio came from investments. Multipurpose Services financing contributed 28.19% to the Company's financing portfolio in 2025, a change from 37.17% in 2024. Investment Financing contributed 33.39% in 2025, up from 31.98% in 2024. In terms of collateral/financing object type, financing using cars as collateral/object provided the largest contribution of 60.27%, an increase from 56.75% in 2024. Meanwhile, motorcycles contributed 39.28%, a decrease from 43.08% in 2024. Others contributed 0.45% from 0.16% in the previous year.

Portofolio Menurut Jenis Pembiayaan
Portfolio by Financing Type

Jenis Pembiayaan Financing Type	2025		2024		2023		Perubahan (%) Change (%)	
	Rp – Juta Rp – Million	%	Rp – Juta Rp – Million	%	Rp – Juta Rp – Million	%	2025	2024
Pembiayaan Multiguna Barang Multipurpose Goods Financing	900.881	15,17	919.023	16,93	1.330.806	22,77	-1,97	-30,94
Pembiayaan Multiguna Jasa Multipurpose Service Financing	1.673.513	28,19	2.017.937	37,17	2.019.591	34,55	-17,07	-0,08
Pembiayaan Investasi Investment Financing	1.982.316	33,39	1.736.538	31,98	1.767.002	30,23	14,15	-1,72
Pembiayaan Modal Kerja Working Capital Financing	1.172.499	19,75	583.180	10,74	587.105	10,04	101,05	-0,67
Pembiayaan Jual Beli (Akad Murabahah) Sale and Purchase Financing (Murabahah Contract)	196.593	3,31	172.811	3,18	140.491	2,40	13,76	23,01
Pembiayaan Jasa (Akad Ijarah) Service Financing (Ijarah Contract)	11.286	0,19	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	**5.937.087**	**100,00**	**5.429.489**	**100,00**	**5.844.995**	**100,00**	**9,35**	**-7,11**

Portofolio Menurut Jenis Obyek/Agunan Pembiayaan
Portfolio by Objects/Colleteral Financing Type

Jenis Obyek/Agunan Pembiayaan Types of Financing Objects/Colleteral	2025		2024		2023		Perubahan (%) Change (%)	
	Rp – Juta Rp – Million	%	Rp – Juta Rp – Million	%	Rp – Juta Rp – Million	%	2025	2024
Motor Motorcycle	2.331.931	39,28	2.339.265	43,08	2.690.592	46,03	-0,31	-13,06
Mobil Car	3.578.521	60,27	3.081.276	56,75	3.145.830	53,82	16,14	-2,05
Lainnya Other	26.635	0,45	8.948	0,16	8.574	0,15	197,66	4,36
Jumlah Total	**5.937.087**	**100,00**	**5.429.489**	**100,00**	**5.844.995**	**100,00**	**9,35**	**-7,11**



Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konsumen dan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi dari sektor transportasi, Perseroan telah meluncurkan program pembiayaan khusus untuk kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Melalui penawaran skema pembiayaan yang kompetitif, Perseroan berupaya menjadikan kendaraan listrik sebagai pilihan yang semakin terjangkau dan menarik bagi masyarakat, guna mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong peningkatan adopsi kendaraan listrik secara luas serta mendukung visi pemerintah dalam menciptakan transportasi yang hijau dan efisien. Pada tahun 2025, portofolio pembiayaan untuk kendaraan ramah lingkungan tercatat mencapai Rp627 juta.

In line with the increasing customer demand and Indonesian Government's efforts to reduce emissions from transportation sector, the Company has launched a special financing program for more environmentally friendly electric vehicles. By offering competitive financing schemes, the Company strives to make electric vehicles an increasingly affordable and attractive option for the public, accelerating the transition to cleaner transportation system. This initiative is expected to encourage widespread adoption of electric vehicles and support the government's vision of creating green and efficient transportation. As of 2025, the financing portfolio for environmentally friendly vehicles reached Rp627 million.

Penjelasan lebih detail mengenai perkembangan pembiayaan dapat ditemukan pada bagian "Tinjauan Operasional Segmen Usaha" dalam bab Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan.

More details information regarding financing developments is presented in the "Business Segment Operational Review" section under Management Discussion and Analysis chapter in this Annual Report.

PERBANDINGAN TARGET DAN KINERJA PORTOFOLIO, TARGET PEMBIAYAAN, ATAU INVESTASI PADA INSTRUMEN KEUANGAN ATAU PROYEK YANG SEJALAN DENGAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.3]

COMPARISON OF TARGETS AND PERFORMANCE OF PORTFOLIO, FINANCING TARGETS, OR INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS OR PROJECTS ALIGNED WITH THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE [OJK F.3]

Perbandingan antara target dan kinerja portofolio, termasuk pembiayaan atau investasi pada instrumen keuangan maupun proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan, mencerminkan konsistensi Perseroan dalam menjalankan strategi keberlanjutan. Melalui capaian tersebut, Perseroan menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan usaha yang bertanggung jawab serta berorientasi pada dampak jangka panjang. Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan pembiayaan modal kerja Rp1.2 triliun atau sebesar 194% dari target yang ditetapkan oleh perseroan yaitu sebesar Rp603 miliar.

The comparison of portfolio targets and performance, including financing or investment in financial instruments and projects in line with sustainable finance, reflects the Company's consistency in implementing its sustainability strategy. Through such achievements, the Company affirms its commitment to supporting responsible business growth that is oriented towards long-term impact. Throughout 2025, the company realized working capital financing of Rp1,2 trillion, or 194% of the target set by the company, which was Rp603 billion.

Pada aspek produk keuangan berkelanjutan, Perseroan secara konsisten mendukung program pembiayaan kendaraan bermotor listrik roda dua guna mendukung upaya pengurangan emisi karbon di sektor transportasi. Sepanjang tahun 2025, pembiayaan KBLBB roda dua membukukan kinerja sebesar Rp627 juta.

In terms of sustainable financial products, the Company consistently support the financing program for two-wheeled electric vehicles to support the efforts in reducing carbon emissions in transportation sector. Throughout 2025, financing for KBLBB two-wheelers recorded a performance of Rp627 million.

NILAI EKONOMI LANGSUNG YANG DIHASILKAN DAN DIDISTRIBUSIKAN [GRI 201-1]

Perseroan mengalami peningkatan perolehan nilai ekonomi sebagaimana ditunjukkan berikut ini:

DIRECT ECONOMIC VALUE GENERATED AND DISTRIBUTED [GRI 201-1]

The Company experienced an increase in economic value as shown below:

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan
Direct Economic Value Generated and Distributed

(Dalam jutaan Rupiah)
(In millions of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	Perubahan (%) Change (%)	
				2025	2024
Nilai Ekonomi Langsung Dihasilkan **Direct Economic Value Generated**					
Pendapatan Pembiayaan Multiguna, Modal Kerja, dan Investasi - Neto Multipurpose, Working Capital, and Investment Financing Income - Net	1.808.849	1.819.420	1.700.753	(0,58)	6,98
Pendapatan Bunga Bank Interest Income from Banks	23.744	21.145	12.774	12,29	65,54
Pendapatan Administrasi Administration Income	39.841	37.387	41.284	6,57	-9,44
Pendapatan Lain-lain Other Income	297.167	288.988	240.599	2,83	20,11
Hasil Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sales of Property and Equipment	2.883	1.486	1.401	94,02	6,04
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan **Total Direct Economic Value Generated**	**2.172.484**	**2.168.426**	**1.996.811**	**0,19**	**8,59**
Nilai Ekonomi Langsung Didistribusikan **Direct Economic Value Distributed**					
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	671.410	618.188	593.561	8,61	4,15
Gaji dan Tunjangan Salaries and Benefits	406.912	410.387	378.391	(0,85)	8,46
Pembayaran Kepada Penyandang Dana: **Payments to Financiers:**					
Pemegang Saham (Dividen) Shareholders (Dividend)	78.529	70.445	58.819	11,48	19,77
Bank (Bunga Pinjaman) Banks (Loan Interest)	345.687	348.982	303.815	(0,94)	14,87
Jumlah Pembayaran Kepada Penyandang Dana: **Total Payments to Financiers:**	**424.216**	**419.427**	**362.634**	**1,14**	**15,66**
Pembayaran kepada Negara Payments to the State	58.642	94.813	73.935	(38,15)	28,24
Penyaluran Dana TJSL Disbursement of CSR Funds	2.142	2.889*	2.384*	(25,84)	21,16*
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung Didistribusikan **Total Direct Economic Value Distributed**	**1.563.322**	**1.545.704***	**1.410.905***	**1,14**	**9,55***
Nilai Perolehan Ekonomi yang Ditahan Sebelum Pembagian Dividen **Retained Economic Value before Dividend Distribution**	**609.162**	**622.722***	**585.906***	**(2,18)**	**6,28***
Nilai Ekonomi Langsung yang Ditahan Direct Economic Value Retained	**687.691**	**693.167***	**644.725***	**(0,79)**	**7,51***

Catatan: Biaya penyaluran dana TJSL bagi masyarakat merupakan realisasi biaya atas pelaksanaan kegiatan TJSL termasuk donasi yang disalurkan oleh Perseroan.
Notes : The cost of distributing CSR funds to the community is the realization of costs for implementing CSR activities, including donations distributed by the Company.

*)Penyajian kembali
*)Restatement



Porsi terbesar dari jumlah nilai perolehan ekonomi yang didistribusikan adalah komponen beban umum dan administrasi, dengan porsi sebesar 42,95% atau Rp671,41 miliar dari total nilai distribusi tahun 2025 yang mencapai Rp1,56 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,55 triliun.

The largest portion of economic value distributed was general and administrative expenses, with a portion of 42.95% or Rp671.41 billion of the total distribution value in 2025, which reached Rp1.56 trillion, an increase from the previous year of Rp1.55 trillion.

Porsi kedua terbesar dari jumlah nilai perolehan ekonomi yang didistribusikan adalah komponen beban gaji dan tunjangan karyawan, dengan porsi sebesar 26,03% sebesar Rp406,91 miliar dari total nilai distribusi tahun 2025 yang mencapai Rp1,56 triliun, turun dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian Perseroan dalam menjamin kesejahteraan para karyawan. Sementara porsi ketiga terbesar adalah komponen beban bunga. Pada tahun 2025, Perseroan kembali membagikan dividen kepada para pemegang saham, dengan jumlah total sebesar Rp78,53 miliar atau sebesar Rp22,66 per lembar saham.

The second largest portion of economic value distributed was salary and employee benefits components, with a portion of 26.03% of Rp406.91 billion of the total distribution value in 2025, which reached Rp1.56 trillion, a decrease from that of the previous year. This demonstrates the high the Company's attention to ensuring the welfare of its employees. Meanwhile, the third largest portion was interest expense component. In 2025, the Company once again distributed dividends to shareholders, totaling Rp78.53 billion, or Rp22.66 per share.

Setelah pendistribusian nilai perolehan ekonomi tahun 2025 total sebesar Rp1,56 triliun tersebut, Perseroan masih menahan nilai perolehan ekonomi tahun 2025 sebesar Rp687,69 miliar, yang akan digunakan untuk mengembangkan skala usaha. Jumlah tersebut menurun dari nilai perolehan ekonomi yang ditahan di tahun 2024, yakni sebesar Rp693,17 miliar.

After distributing the total economic value of Rp1.56 trillion in 2025, the Company retained Rp687.69 billion for business expansion. This amount marks a decrease from the retained economic value of Rp693.17 billion in 2024.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Perseroan secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional, baik melalui aspek finansial maupun non-finansial. Pada aspek non-finansial, Perseroan berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan literasi keuangan, seperti penyelenggaraan seminar dan lokakarya yang bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan program TJSL dengan membangun infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.

CONTRIBUTION TO THE STATE

The Company consistently demonstrates its commitment to contributing to national development, both financially and non-financially. In non-financial aspect, the Company plays an active role in increasing financial inclusion through various financial literacy activities, such as holding seminars and workshops aimed at broadening public understanding of prudent financial management. Furthermore, the Company implements its CSR programs by building basic infrastructure tailored to community needs in its operational areas.

Dari aspek finansial, Perseroan menegaskan komitmen kuatnya terhadap kepatuhan pajak sebagai wujud nyata dukungan terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak pernah menerima peringatan maupun sanksi signifikan dari otoritas terkait, yang mencerminkan efektivitas penerapan manajemen risiko di bidang perpajakan.

From a financial perspective, the Company affirms its strong commitment to tax compliance as a concrete manifestation of its support for achieving sustainability goals. Compliance with tax obligations is not only viewed as a legal obligation but also as an essential part of corporate social responsibility. Therefore, the Company consistently ensures that all tax obligations are fulfilled in accordance with applicable laws and regulations. As of December 31, 2025, the Company did not receive any warnings or significant sanctions from relevant authorities, reflecting the effectiveness of its risk management implementation in tax sector.

Dari aspek kontribusi finansial kepada negara, total pajak yang disetorkan Perseroan menunjukkan tren yang konsisten seiring dengan pertumbuhan kinerja perusahaan. Pada tahun 2025, total pajak yang disetorkan Perseroan pada tahun 2025 mencapai Rp58,64 miliar, atau menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp94,81 miliar.

In terms of financial contribution to the state, the total taxes paid by the Company showed a consistent trend in line with the company's performance growth. In 2025, the total tax paid by the Company in 2025 reached Rp58.64 billion, or decreased compared to the previous year of Rp94.81 billion.

PEMASOK LOKAL

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat perekonomian lokal, pada tahun 2025. Perseroan sepenuhnya memanfaatkan pemasok lokal untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi terhadap keberlanjutan rantai pasok, tetapi juga turut memberdayakan pelaku usaha lokal agar dapat berkembang bersama dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

LOCAL SUPPLIERS

As a commitment to strengthening local economy, the Company fully utilized local suppliers to support its operations in 2025. This initiative not only gives contribution to supply chain sustainability but also empowers local businesses to grow together and create a broader economic impact.

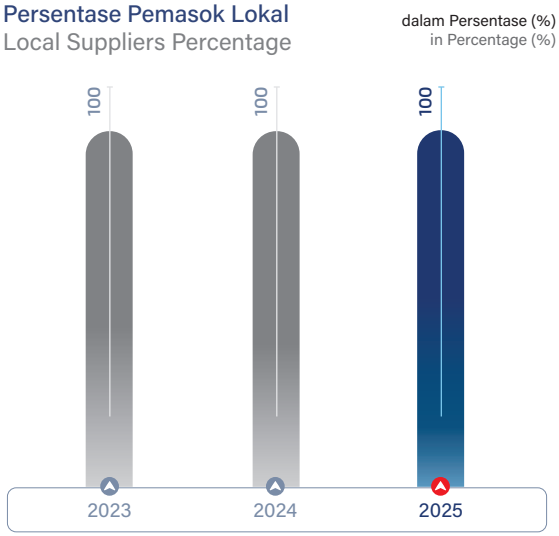

IMPLIKASI FINANSIAL SERTA RISIKO DAN PELUANG LAIN AKIBAT DARI PERUBAHAN IKLIM [GRI 201-2]

Perubahan iklim menjadi salah satu isu eksternal yang berpotensi mempengaruhi industri pembiayaan, termasuk Perseroan. Meskipun Perseroan belum mengidentifikasi dampak finansial yang signifikan secara langsung akibat perubahan iklim, dinamika kebijakan lingkungan, pergeseran preferensi pasar dan peningkatan penerapan standar keberlanjutan di sektor transportasi dapat berdampak pada portofolio pembiayaan di masa mendatang. Kebijakan pemerintah terkait pengurangan emisi, insentif kendaraan rendah emisi serta regulasi efisiensi energi berpotensi mempengaruhi pola permintaan pembiayaan kendaraan konvensional maupun pembiayaan untuk kendaraan ramah lingkungan.

Dalam konteks risiko, perubahan iklim dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat dan kualitas portofolio, terutama jika terjadi gangguan pada aktivitas ekonomi atau kenaikan biaya operasional terkait transisi energi. Selain itu, kebijakan pengetatan standar emisi dan potensi peningkatan pajak karbon (*carbon tax*) dapat mempengaruhi biaya pemilikan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan Perseroan. Kendati demikian, hingga periode pelaporan, risiko-risiko tersebut belum menimbulkan dampak finansial material terhadap kinerja Perseroan.

Di sisi peluang, pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik dan meningkatnya kesadaran lingkungan membuka ruang bagi pengembangan produk pembiayaan baru yang

FINANCIAL IMPLICATIONS AND OTHER RISKS AND OPPORTUNITIES DUE TO CLIMATE CHANGE [GRI 201-2]

Climate change is one of the external issues that has the potential to impact financing industry, includingthe Company. Though the Company has not yet identified a significant direct financial impact from climate change, environmental policy dynamics, shift to market preferences and increased implementation of sustainability standards in transportation sector could impact financing portfolio in the future. Government policies related to emission reductions, incentives for low-emission vehicles and energy efficiency regulations have the potential to influence demand patterns for conventional vehicle financing and financing for environmentally friendly vehicles.

In terms of risks, climate change could increase economic uncertainty, impacting customer purchasing power and portfolio quality, particularly if there are disruptions to economic activity or increases in operational costs related to energy transition. Furthermore, tightening emission standards and potential increases in carbon taxes could impact the cost of vehicle ownership financed by the Company. However, as of the reporting period, these risks had no material financial impact on the Company's performance.

In terms of opportunity, the growth of electric vehicle ecosystem and increasing environmental awareness provide room for the development of new financing products that support the



mendukung transisi menuju sektor transportasi yang lebih berkelanjutan. Perseroan melihat potensi untuk memperluas layanan pembiayaan yang relevan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai permintaan pasar. Selain itu, berbagai inisiatif pengurangan emisi yang dilakukan Perseroan, termasuk melalui penerapan konsep perkantoran ramah lingkungan yang lebih efisien guna mendukung persiapan Perseroan dalam menghadapi perkembangan kebijakan iklim nasional di masa mendatang.

KEWAJIBAN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DAN PROGRAM PENSIUN LAINNYA [GRI 201-3]

Perseroan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan program jaminan hari tua dan dana pensiun bagi karyawan sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap perlindungan kesejahteraan tenaga kerja. Dana tersebut akan dicairkan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan Perseroan, baik karena pensiun, pengunduran diri, maupun sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Skema kepesertaan, mekanisme pencairan serta besaran manfaat yang diterima sepenuhnya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga memastikan transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak-hak karyawan secara optimal.

BANTUAN FINANSIAL YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH [GRI 201-4]

Pada periode pelaporan, Perseroan tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah, baik dalam bentuk hibah, subsidi, insentif pajak, fasilitas pembiayaan khusus, maupun bentuk dukungan finansial lainnya. Seluruh aktivitas pendanaan Perseroan berasal dari operasi bisnis, fasilitas kredit perbankan dan sumber pendanaan komersial. Perseroan tetap memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak memperoleh keringanan, pengecualian, atau fasilitas perpajakan khusus dari pemerintah.

transition to a more sustainable transportation sector. The Company sees the potential to expand its financing services relevant to environmentally friendly technologies in line with market demand. Furthermore, various emission reduction initiatives undertaken by the Company, including through the implementation of a more efficient, environmentally friendly office concept in accordance to support the Company's preparation in facing future developments in national climate policy.

DEFINED BENEFIT RETIREMENT PLAN OBLIGATIONS AND OTHER RETIREMENT PLANS [GRI 201-3]

The Company collaborates with BPJS Ketenagakerjaan in managing old age security and pension funds for employees as part of the Company's commitment to protecting the welfare of its workforce. These funds will be disbursed to employees in accordance with the applicable provisions upon termination of employment between the employee and the Company, whether due to retirement, resignation, or other reasons stipulated in the applicable laws and regulations. The participation scheme, disbursement mechanism and amount of benefits received are fully managed by BPJS Ketenagakerjaan and implemented in accordance with applicable labor regulations, thereby ensuring transparency, accountability and optimal protection of employee rights.

FINANCIAL ASSISTANCE RECEIVED FROM THE GOVERNMENT [GRI 201-4]

Throughout the reporting period, the Company did not receive any financial assistance from the government, whether in the form of grants, subsidies, tax incentives, special financing facilities, or other forms of financial support. All of the Company's funding activities are derived from business operations, bank credit facilities and commercial funding sources. The Company continues to fulfill all tax obligations in accordance with applicable regulations and does not receive any tax relief, exemptions, or special facilities from the government.

Kinerja Lingkungan Hidup
Environmental Performance



ASPEK UMUM

Perseroan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan daya dukungnya melalui berbagai inisiatif berorientasi hijau. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Perseroan menerapkan operasional kantor yang efisien dan berwawasan lingkungan, termasuk pengelolaan penggunaan kertas, listrik, bahan bakar dan air secara bijak. Seluruh langkah ini sejalan dengan pilar lingkungan Perseroan yaitu *Greening the Operations*.

Perseroan terus memperkuat penerapan praktik ramah lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja yang berlandaskan prinsip keberlanjutan untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan dan operasional bisnis termasuk upaya dalam memelihara lingkungan dan menjalankan bisnis yang peka terhadap lingkungan. Melalui pilar *Greening the Operations*.

Penerapan pilar *Greening the Operations* di Perseroan dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada Surat Kebijakan (SK) tentang Penerapan Konsep Perkantoran Ramah Lingkungan (*Green Office*). Kebijakan ini menjadi landasan resmi dalam mengarahkan seluruh aktivitas operasional agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

BIAYA LINGKUNGAN HIDUP [OJK F.4]

Perseroan secara berkelanjutan mengimplementasikan proyek-proyek berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan. Pada tahun 2025, Perseroan mengalokasikan dana sebesar Rp46,44 juta, dimana dari dana tersebut dipergunakan untuk penyediaan infrastruktur

GENERAL ASPECTS

The Company continuously maintains environmental sustainability and improves its carrying capacity through various green-oriented initiatives. To achieve these objectives, the Company implements efficient and environmentally conscious office operations, including the prudent management of paper, electricity, fuel, and water usage. All of these measures are in line with the Company's environmental pillar of Greening the Operations.

The Company continues to strengthen the implementation of environmentally friendly practices as part of work culture based on sustainability principles to achieving efficiency in business activities and operations, including efforts to preserve the environment and conduct environmentally conscious business. Through Greening the Operations pillar.

The implementation of the Greening the Operations pillar at the Company is carried out in a structured manner with reference to the Decree (SK) on the Implementation of the Green Office Concept. This policy serves as the official basis for directing all operational activities to be more efficient, environmentally friendly and sustainable.

ENVIRONMENTAL COSTS [OJK F.4]

The company continuously implements environmentally-friendly projects to support environmental quality improvement. In 2025, the Company allocated funds amounting to Rp46.44 million, which were used to provide infrastructure to support the green office program and

pendukung program *green office* dan kegiatan kampanye bertemakan lingkungan hidup. Alokasi dana tersebut mencerminkan konsistensi Perseroan dalam memperkuat kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta memastikan seluruh aktivitas operasional sejalan dengan upaya mencapai kinerja lingkungan yang lebih optimal.

environmental campaign activities. This allocation of funds reflects the Company's consistency in strengthening its contribution to environmental conservation, encouraging the sustainable use of natural resources, and ensuring that all operational activities are in line with efforts to achieve optimal environmental performance.

ASPEK MATERIAL

PENGGUNAAN MATERIAL YANG RAMAH LINGKUNGAN [OJK F.5]

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN KERTAS

Kertas merupakan salah satu material penting yang digunakan Perseroan dalam kegiatan administrasi perkantoran, seperti korespondensi, pencetakan dokumen operasional dan berbagai kebutuhan lainnya. Sebagai wujud penerapan operasional kantor yang ramah lingkungan, Perseroan terus berupaya mengurangi konsumsi kertas melalui optimalisasi penggunaannya guna menciptakan proses kerja yang lebih efisien.

PENGGUNAAN G-SUITE UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS

Perseroan menerapkan digitalisasi proses bisnis dan mengadopsi konsep *paperless office* sebagaimana diatur dalam Surat Kebijakan Nomor 235/SK/LCAF/12-25 perihal Ketentuan Google Suite versi 08. Pemanfaatan G-Suite sebagai *platform* kerja digital menjadi langkah strategis untuk mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sepanjang tahun 2025, penggunaan kertas Perseroan tercatat sebanyak 19.840 rim.

MATERIAL ASPECT

USE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MATERIALS [OJK F.5]

PAPER MANAGEMENT AND CONSUMPTION

Paper is an important material used by the Company in office administration activities, such as correspondence, printing of operational documents, and various other needs. As a form of implementing environmentally friendly office operations, the Company continues to strive to reduce paper consumption by optimizing its use in order to create a more efficient work process.

G-SUITE UTILIZATION FOR REDUCING PAPER CONSUMPTION

The Company implements business process digitalization and adopts a paperless office concept, as outlined in Policy Letter Number 235/SK/LCAF/12-25 on Google Suite version 08. Utilizing G-Suite as a digital work platform is a strategic step to reduce paper consumption in daily operations. Throughout 2025, the Company's paper consumption was recorded at 19,840 reams.

Jumlah Penggunaan Kertas
Paper Consumption

Tahun Year	Jumlah Rim Number of Reams
2025	**19.840**
2024	17.365
2023	19.628

ASPEK ENERGI

UPAYA DAN PENCAPAIAN EFISIENSI ENERGI DAN PENGGUNAAN ENERGI TERBARUKAN [OJK F.7]

PENGELOLAAN ENERGI

Perseroan menggunakan dua sumber energi utama untuk mendukung kegiatan operasionalnya, yaitu energi listrik dari PLN dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengendalikan biaya energi, Perseroan melaksanakan berbagai inisiatif penghematan energi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain pengaturan jadwal penggunaan pendingin ruangan, pembatasan pemakaian lampu pada pagi dan siang hari serta mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Selain

ENERGY ASPECTS

EFFORTS AND ACHIEVEMENTS IN ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY USE [OJK F.7]

ENERGY MANAGEMENT

The Company uses two main energy sources to support its operations: electricity from PLN and fuel (BBM). To improve efficiency and control energy costs, the Company has implemented various energy saving initiatives. These measures include scheduling the use of air conditioning, limiting lighting during the day and turning off lights and electronic devices when not in use. Furthermore, the Company utilizes energy-saving LED lamps and glass panels to optimize natural light. These efforts involve all employees' active

itu, Perseroan juga memanfaatkan lampu hemat energi (LED) dan pemasangan panel kaca untuk mengoptimalkan cahaya alami. Upaya ini melibatkan partisipasi aktif seluruh karyawan di kantor pusat maupun cabang serta didukung dengan kampanye efisiensi energi kepada karyawan.

Pada tahun 2025, total konsumsi listrik Perseroan tercatat sebesar 24.843,90 Gigajoule, menurun dibandingkan 24.893,84 Gigajoule pada tahun 2024. Penghitungan dilakukan berdasarkan data biaya listrik dari PLN yang dikompilasi dari kantor pusat dan seluruh cabang.

Selain listrik, Perseroan juga memanfaatkan BBM untuk kendaraan operasional sebagai sarana transportasi, dengan jenis bahan bakar yang digunakan meliputi bensin (Pertamax/Pertalite) dan solar. Sepanjang tahun 2025, total konsumsi BBM Perseroan tercatat sebesar 4.089,18 Gigajoule (GJ), meningkat dibandingkan 4.050,84 Gigajoule (GJ) pada tahun 2024. Untuk meningkatkan efisiensi, Perseroan menerapkan kebijakan efisiensi perjalanan dinas, melakukan perawatan rutin kendaraan operasional serta mendorong penyelenggaraan rapat daring (*online meeting*) guna mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan.

participation at both head office and branches, supported by energy saving campaign to employees.

In 2025, the Company's total electricity consumption was 24,843.90 Gigajoules, a decrease compared to 24,893.84 Gigajoules in 2024. The calculation is based on electricity cost data from PLN, compiled from the head office and all branches.

Apart from electricity, the Company also utilizes fuel for operational vehicles as a means of transportation, with fuel types used including gasoline (Pertamax/Pertalite) and diesel. Throughout 2025, the Company's total fuel consumption was 4,089.18 Gigajoule (GJ), an increase compared to 4,050.84 Gigajoule (GJ) in 2024. To increase efficiency, the Company implements efficiency policy for official travel, carries out regular maintenance on operational vehicles and encourages online meetings to reduce unnecessary mobility.

JUMLAH ENERGI YANG DIGUNAKAN PERSEROAN [OJK F.6] [IDX E-03]

AMOUNTS OF ENERGY USED BY THE COMPANY [OJK F.6] [IDX E-03]

Jenis Energi Energy Type	Satuan Unit	2025	2024	2023
Konsumsi Energi **Energy Consumption**				
Penggunaan BBM Kendaraan Operasional Operational Vehicle Fuel Consumption	Gigajoule (GJ)	**4.091,18**	4.050,84	5.727,63
Penggunaan Listrik Electricity Consumption		**24.843,90**	24.893,84	22.851,17
Jumlah Konsumsi Energi Total Energy Consumption		**28.935,08**	**28.944,68**	**28.578,80**
Intensitas energi **Energy intensity**				
Jumlah Karyawan Number of Employees	karyawan employee	**2.170**	2.274	2.335
Intensitas Energi per Karyawan Energy Intensity per Employee	**Gigajoule (GJ)/karyawan** employee	**13,33**	**12,73**	**12,24**
Jumlah Pendapatan Total Revenue	Rp juta Rp million	**2.169.601**	2.166.940	1.995.410
Intensitas Energi per Pendapatan Energy Intensity per Revenue	**Gigajoule (GJ)/ Pendapatan** Revenue	**0,013**	**0,013**	**0,014**

Catatan : Konsumsi energi Perseroan merupakan jumlah energi dari dalam Perseroan yang digunakan dan bersumber dari energi tidak terbarukan.
Note : The Company's energy consumption is the amount of energy used within the Company and is sourced from non-renewable energy.

ASPEK AIR

PENGELOLAAN AIR [OJK F.8] [IDX E-04]

Perseroan memanfaatkan air untuk berbagai kebutuhan domestik karyawan dan manajemen, seperti konsumsi air minum, kebersihan, sanitasi serta keperluan ibadah dan aktivitas lainnya. Menyadari semakin terbatasnya ketersediaan air bersih di kawasan perkotaan akibat berkurangnya lahan resapan dan menurunnya sumber air tanah, Perseroan berkomitmen untuk menggunakan air

WATER ASPECT

WATER MANAGEMENT [OJK F.8] [IDX E-04]

The Company uses water for various domestic needs of employees and management, such as drinking water consumption, hygiene, sanitation, as well as for religious purposes and other activities. Recognizing the increasingly limited availability of clean water in urban areas due to reduced infiltration areas and declining ground water sources, the Company is committed to using water economically and

secara hemat dan bertanggung jawab. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan secara rutin melaksanakan kampanye penghematan air serta memastikan seluruh peralatan yang menggunakan air berfungsi dengan baik dan efisien.

Sepanjang tahun 2025, total konsumsi air Perseroan yang bersumber dari PDAM tercatat sebesar 37.144,32 meter kubik (m^3), dengan jumlah pengambilan dan pembuangan air yang seimbang. Perseroan tidak melakukan pengolahan terhadap air buangan dari kegiatan Mandi Cuci Kakus (MCK), sehingga seluruh air yang digunakan langsung dialirkan ke saluran pembuangan umum sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

responsibly. To support such matter, the Company regularly conducts water conservation campaigns and ensures that all water-using equipment is functioning properly and efficiently.

Throughout 2025, the Company's total water consumption from PDAM was 37,144.32 cubic meters, with a balanced intake and discharge rate. The Company does not treat wastewater from sanitary activities, so all water used is directly discharged into public drainage systems in accordance with applicable regulations and procedures.

Jumlah Konsumsi Air (PDAM)
Water Consumption (PDAM)

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Konsumsi Air dari PDAM Water Consumption from PDAM	m^3	37.144,32	31.198,21	32.355,59

ASPEK EMISI

JUMLAH DAN INTENSITAS EMISI YANG DIHASILKAN BERDASARKAN JENISNYA [OJK F.11 [IDX E-01, E-02]

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang timbul dari aktivitas operasional Perseroan bersumber dari lima kategori utama:
1. Emisi langsung dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor (mobil/motor) yang digunakan untuk keperluan mobilisasi dengan bahan bakar seperti diesel dan bensin.
2. Emisi langsung dari pembakaran bahan bakar stasioner untuk kebutuhan *generator set* (genset);
3. Emisi langsung dari sumber fugitif seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan *Refrigerant* untuk *Air Conditioner*;
4. Emisi tidak langsung dari penggunaan listrik PLN; serta
5. Emisi tidak langsung yang timbul dari perjalanan bisnis (udara).

Sepanjang tahun 2025, total emisi GRK Perseroan adalah sebesar 6.617,73 ton CO_2eq, meningkat dibandingkan 6.460,28 ton CO_2eq pada tahun 2024.

EMISSION ASPECTS

AMOUNT AND INTENSITY OF EMISSIONS GENERATED BY TYPE [OJK F.11 [IDX E-01, E-02]

Greenhouse Gas (GHG) emission arising from the Company's operational activities come from five main categories:
1. Direct emissions from the combustion of motor vehicle fuel (cars/motorcycles) used for transportation purposes with fuels such as diesel and gasoline.
2. Direct emissions from the combustion of stationary fuel for generator sets (gensets);
3. Direct emissions from fugitive sources such as Fire Extinguishers (APAR) and Refrigerants for Air Conditioners;
4. Indirect emissions from the use of electricity from PLN; and
5. Indirect emissions from business travel (air).

Throughout 2025, the Company's total GHG emissions is equal to 6.617,73 tons CO_2eq, an increase compared to 6,460.28 tons CO_2eq in 2024.

Jumlah Emisi GRK Berdasarkan Jenis dan Sumber [OJK F.11] [IDX E-01, E-02]
Total GHG Emission by Type and Source

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Cakupan 1 **Scope 1**				
Emisi GRK dari BBM Kendaraan Operasional GHG Emission from Operational Vehicle Fuel	Ton CO_2eq	283,48	280,68	396,87
Emisi GRK dari BBM Diesel untuk kebutuhan Genset GHG emission from diesel fuel for generator sets		8,94	-	-
Emisi GRK dari Isi Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) GHG emission from refilling portable fire extinguishers		0,08	-	-
Emisi GRK dari Isi Ulang *Freon* atau *Refrigerant* GHG emission from Freon or Refrigerant Refills		145,22	-	-
Jumlah Emisi Cakupan 1 Total Scope 1 Emission		431,71*	280,68	396,87

Jumlah Emisi GRK Berdasarkan Jenis dan Sumber [OJK F.11] [IDX E-01, E-02]
Total GHG Emission by Type and Source

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Cakupan 2 **Scope 2**				
Emisi GRK dari Penggunaan Listrik GHG Emission from Electricity Consumption	Ton CO_2eq	6.003,94	6.016,01	5.522,37
Jumlah Emisi Cakupan 2 Total Scope 2 Emission		**6.003,94**	**6.016,01**	**5.522,37**
Cakupan 3 **Scope 3**				
Emisi GRK dari Perjalanan Dinas via Udara GHG Emission from Business Travel by Air		182,08	163,59	76,65
Jumlah Emisi Cakupan 3 Total Scope 3 Emission		**182,08**	**163,59**	**76,65**
Jumlah Emisi GRK Total GHG Emission				
Jumlah Emisi GRK (Cakupan 1 & 2) Total GHG Emission (Scope 1 & 2)		6.287,28	6.296,69	5.919,24
Jumlah Emisi GRK (Cakupan 1,2 & 3) Total GHG Emission (Scope 1, 2 & 3)		**6.617,73**	**6.460,28**	**5.995,89**
Intensitas Emisi GRK **GHG Emission Intensity**				
Jumlah Pendapatan Total Revenues	Rp juta Rp million	2.169.601	2.166.940	1.995.410
Intensitas Emisi GRK per Pendapatan GHG Emission Intensity per Revenue	Ton CO_2eq/pendapatan revenue	0,0030	0,0029	0,0030
Jumlah Karyawan FTE Total FTE Employee	Karyawan Employee	2.170	2.274	2.335
Intensitas Emisi GRK per Karyawan GHG Emission Intensity per Employee	Ton CO_2eq/karyawan employee	3,0	2,8	2,5

Catatan | Notes :
- Penyajian data emisi menggunakan perhitungan dari Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
  The emission data is calculated based on the National Greenhouse Gas Inventory Guidelines.
- *) Pada tahun 2025, penghitungan Emisi GRK Cakupan 1 untuk pertama kalinya mencakup tambahan perhitungan emisi dari sumber bahan bakar *Generator Set*, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan *Refrigerant* untuk *Air Conditioner* yang belum dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.
  *) In 2025, Scope 1 GHG emission calculations for the first time include additional emissions calculations from Generator Set fuel sources, Fire Extinguishers (APAR), and Refrigerants for Air Conditioners, which were not included in previous years.

UPAYA DAN PENCAPAIAN PENGURANGAN EMISI YANG DILAKUKAN [OJK F.12] [IDX E-07]

UPAYA UNTUK MENGURANGI EMISI GRK

Perseroan senantiasa mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon sebagai wujud tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah nyata yang konsisten dilakukan untuk menekan emisi dari aktivitas operasional, antara lain melalui efisiensi penggunaan BBM dan listrik, digitalisasi proses kerja serta penerapan konsep *Green Office* secara keseluruhan. Selain itu, Perseroan juga menumbuhkan budaya kerja yang peduli lingkungan dengan melibatkan karyawan dalam berbagai inisiatif keberlanjutan, seperti kampanye efisiensi energi. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kelestarian bumi demi masa depan generasi berikutnya.

EFFORTS AND ACHIEVEMENTS OF EMISSIONS REDUCTION UNDERTAKEN [OJK F.12] [IDX E-07]

EFFORTS TO REDUCE GHG EMISSIONS

The Company is continuously to supporting the government's program to reduce carbon emissions as a form of responsibility for environmental sustainability. These efforts are realized through various concrete steps consistently taken to reduce operational activities emission, including through efficient fuel and electricity consumption, work process digitalization and the overall implementation of the Green Office concept. Furthermore, the Company fosters an environmentally conscious work culture by involving employees in various sustainability initiatives, such as energy efficiency campaigns. These steps are expected to foster a shared awareness of the importance of preserving the earth for the future of future generations.



Program MaybankCares Hours
Maybank Cares Hour Program

MaybankCares Hour merupakan kampanye penghematan energi melalui kegiatan mematikan lampu dan alat elektronik non-esensial secara serentak di seluruh grup dan cabang Maybank.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan MaybankCares Hour dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Juli, September dan November serta diikuti oleh cabang-cabang Perseroan sebagai bagian dari dukungan terhadap inisiatif keberlanjutan grup. Partisipasi ini mencerminkan upaya Perseroan dalam mendorong penerapan praktik hemat energi secara konsisten di lingkungan kerja

MaybankCares Hour is an energy-saving campaign that involves simultaneously turning off lights and non-essential electronic devices across Maybank Group and its branches.

Throughout 2025, MaybankCares Hour activities were held three times: in July, September and November, attended by the Company branches as part of its support for the group's sustainability initiatives. This participation reflects the Company's efforts to encourage the consistent implementation of energy-saving practices in the workplace.

PENGELOLAAN EMISI ZAT ODS (*OZONE DEPLETING SUBSTANCES*)

Dengan menyadari potensi dampak negatif refrigeran terhadap lapisan ozon di atmosfer, Perseroan telah mengambil langkah untuk menerapkan penggunaan refrigeran yang lebih ramah lingkungan di seluruh fasilitas pendingin di area operasional. Jenis refrigeran yang digunakan, yaitu R32 dan R410, dipilih karena sesuai dengan ketentuan dan standar lingkungan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menerapkan kebijakan pembatasan suhu ruangan pada kisaran 25–28°C sebagai upaya untuk menekan kebutuhan penambahan Refrigerant dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

OZONE DEPLETING SUBSTANCES EMISSION MANAGEMENT

By recognizing the potential negative impact of refrigerants on ozone layer in the atmosphere, the Company has taken steps to implement the use of more environmentally friendly refrigerants across all cooling systems in its operational areas. The refrigerants used, R32 and R410, are chosen as they comply with applicable environmental regulations and standards. Furthermore, the Company has implemented a policy of restricting room temperatures to a range of 25–28°C to reduce the need for additional refrigerant and mitigate its environmental impact.

EMISI ODS DARI PERAWATAN APK

Selain mengelola penggunaan refrigeran, Perseroan juga menaruh perhatian besar terhadap pencegahan risiko kebakaran di seluruh area operasional. Untuk memastikan keandalan Alat Pemadam Kebakaran (APK), Perseroan secara berkala melakukan pemeriksaan kondisi dan pengisian ulang material pemadam yang diperlukan. Sebagian besar APK yang digunakan mengandalkan Karbon Dioksida (CO^2) sebagai media pemadam, mengingat potensi kebakaran yang paling sering terjadi di area operasional berkaitan dengan instalasi listrik.

Apabila hasil inspeksi menunjukkan bahwa tekanan dalam APK tidak memenuhi standar yang berlaku, Perseroan segera melakukan pengisian ulang hingga mencapai batas tekanan yang sesuai dengan ketentuan. Pengisian ulang juga dilakukan setiap kali APK digunakan untuk menangani potensi kebakaran atau insiden kebakaran yang terjadi di sekitar area operasional.

ODS EMISSIONS FROM FIRE EXTINGUISHER MAINTENANCE

Apart from managing refrigerant use, the Company also places significant emphasis on fire risk prevention throughout its operational areas. To ensure the reliability of Fire Extinguishers (FE), the Company regularly inspects their condition and refills the required fire-suppressant materials. Most of fire extinguishers used rely on Carbon Dioxide (CO^2) as the suppressant, considering that the most common fires in operational areas are related to electrical installations.

In the event the inspection results indicate that the pressure in fire extinguishers does not meet the applicable standards, the Company immediately refills it in order to reach the required pressure limit. Refills are also carried out after each use of fire extinguishers to handle potential or actual fire incidents near operational areas.

ASPEK KEANEKARAGAMAN HAYATI

DAMPAK DARI WILAYAH OPERASIONAL YANG DEKAT ATAU BERADA DI DAERAH KONSERVASI ATAU MEMILIKI KEANEKARAGAMAN [OJK F.9]

Kegiatan operasional Perseroan berfokus pada layanan pembiayaan melalui jaringan kantor yang umumnya berlokasi di area komersial dan pemukiman. Seluruh kantor operasional dan cabang Perseroan tidak berada di kawasan konservasi, kawasan lindung, maupun wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Perseroan juga tidak memiliki aktivitas berbasis lahan atau fasilitas produksi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem alami. Meski demikian, Perseroan tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam proses ekspansi jaringan kantor dan operasional harian. Perseroan memastikan pemilihan lokasi kantor sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak menimbulkan risiko terhadap lingkungan.

USAHA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI [OJK F.10]

Meski kegiatan operasional Perseroan tidak berada dekat dengan daerah konservasi atau yang memiliki keanekaragam hayati yang dilindungi, namun sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan konservasi keanekaragaman hayati melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Inisiatif tersebut mencakup kegiatan penanaman pohon, pembersihan lingkungan serta dukungan terhadap kegiatan pelestarian alam yang melibatkan komunitas dan masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan ini, Perseroan berupaya berkontribusi terhadap peningkatan tutupan hijau dan pelestarian habitat lokal secara tidak langsung, sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Pada Tahun 2025, Perseroan bekerja sama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk melaksanakan kegiatan konservasi lingkungan melalui penanaman 50 bibit pohon yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Global Corporate Responsibility Day. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem.

BIODIVERSITY ASPECTS

IMPACTS OF OPERATIONAL AREAS NEAR OR IN CONSERVATION AREAS OR AREAS WITH BIODIVERSITY [OJK F.9]

The Company's operational activities focus on financing services through a network of offices that are generally located in commercial and residential areas. All of the Company's operational offices and branches are not located in conservation areas, protected areas, or areas with high biodiversity. The company also has no land-based activities or production facilities that could potentially disrupt natural ecosystems. However, the company still pays attention to environmental aspects in the process of expanding its office network and daily operations. The Company ensures that office locations are selected in accordance with Regional Spatial Plans (RTRW) and do not pose a risk to the environment.

BIODIVERSITY CONSERVATION EFFORTS [OJK F.10]

Although the Company's operational activities are not located near conservation areas or areas with protected biodiversity, as a form of contribution to environmental preservation, the Company carries out various biodiversity conservation activities through its Social and Environmental Responsibility (CSR) program. These initiatives include tree planting, environmental clean-ups and support for nature conservation activities by involving local communities and surrounding communities.

Through these activities, the Company strives to indirectly contribute to increasing green cover and preserving local habitats, while simultaneously raising environmental awareness among communities surrounding its operational areas.

In 2025, the Company cooperated with PT Bank Maybank Indonesia Tbk in implementing environmental conservation activities by planting 50 tree seedlings as part of a series of Global Corporate Responsibility Day activities. This activity is part of the Company's efforts to support environmental conservation and gradually increase awareness of ecosystem sustainability.

ASPEK LIMBAH DAN EFLUEN

JUMLAH LIMBAH DAN EFLUEN YANG DIHASILKAN BERDASARKAN JENIS SERTA DAMPAKNYA [OJK F.13] [IDX E-05]

Kegiatan operasional Perseroan berlangsung di lingkungan perkantoran dan bersifat layanan administratif, sehingga tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun efluen dari proses produksi atau kegiatan industri. Limbah yang timbul dari aktivitas operasional sepenuhnya merupakan limbah domestik perkantoran, antara lain limbah dari kegiatan MCK, sisa *pantry*, pembersihan kantor serta sampah umum yang bersifat non-B3. Limbah tersebut dikelola oleh pengelola gedung atau dinas kebersihan setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan pengelolaan tersebut, di Kantor Pusat Perseroan yang berlokasi di Gedung Altira telah diterapkan sistem pemilahan sampah oleh manajemen gedung ke dalam tiga kategori, yaitu Organik, Anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sebagai *tenant*, Perseroan mengikuti dan mendukung penerapan sistem ini dalam aktivitas operasional sehari-hari guna menjaga lingkungan kerja yang tertib, bersih, dan lebih ramah lingkungan.

Selain limbah domestik, Perseroan juga menghasilkan sejumlah kecil limbah non-B3 lainnya seperti limbah kertas dan limbah elektronik (*e-waste*) dari pemakaian perangkat kantor. Pengurangan penggunaan kertas dilakukan melalui digitalisasi proses, sementara limbah elektronik diserahkan kepada pengelola limbah berizin untuk diproses secara aman dan sesuai regulasi.

Sepanjang periode pelaporan, Perseroan tidak menghasilkan efluen maupun limbah B3 dan tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan limbah. Perseroan senantiasa menjaga praktik operasional yang ramah lingkungan melalui pengurangan limbah domestik, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

MEKANISME PENGELOLAAN LIMBAH DAN EFLUEN [OJKF.14]

PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH

Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak limbah plastik dari kemasan minuman sekali pakai, Perseroan telah menyediakan fasilitas air minum isi ulang melalui dispenser di lingkungan kantor. Langkah ini diharapkan dapat mendorong karyawan untuk beralih menggunakan botol atau tumbler pribadi. Selain itu, Perseroan juga aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menghimbau karyawan agar tidak membeli minuman dalam kemasan plastik.

WASTE AND EFFLUENT ASPECTS

AMOUNT OF WASTE AND EFFLUENT GENERATED BY TYPE AND IMPACT [OJK F.13] [IDX E-05]

The Company's operational activities take place in office environment and are primarily administrative services. Therefore, they do not generate hazardous waste or effluent from production processes or industrial activities. Waste generated from operational activities is entirely domestic office waste, including waste from sanitary activities, pantry waste, office cleaning and general non-hazardous waste. This waste is managed by the building management or local sanitation department in accordance with applicable regulations.

In line with this management, the Company's Head Office located in the Altira Building has implemented a waste sorting system by building management into three categories, namely Organic, Inorganic, and Hazardous and Toxic Materials (B3). As a tenant, the Company follows and supports the implementation of this system in its daily operational activities in order to maintain an orderly, clean, and more environmentally friendly work environment.

Apart from domestic waste, the Company also generates small amounts of other non-hazardous waste, such as paper waste and electronic waste (e-waste) from the use of office equipment. Paper consumption is reduced through process digitization, while electronic waste is handed over to licensed waste managers for safe and regulatory processing.

Throughout the reporting period, the Company generated no effluent or hazardous waste and there were no violations of waste management regulations. The Company is committed to maintaining environmentally friendly operational practices by reducing domestic waste, increasing resource efficiency and implementing responsible waste management.

WASTE AND EFFLUENT MANAGEMENT MECHANISM [OJKF.14]

WASTE REDUCTION AND UTILIZATION

As part of efforts to reduce the impact of plastic waste from disposable beverage packaging, the Company has provided refillable water facilities through dispensers in the office environment. This step is expected to encourage employees to switch to using personal bottles or tumblers. In addition, the Company is also actively providing education on the importance of reducing the use of disposable plastics by urging employees not to buy beverages in plastic packaging.

WOMERecycle: Mendorong Budaya Daur Ulang di Lingkungan Kantor
WOMERecycle: Promoting a Recycling Culture in the Office Environment





Selama tahun 2025, Perseroan melanjutkan program WOMERecycle sebagai bagian dari upaya keberlanjutan untuk memperkuat penerapan konsep *Green Office* dan mendorong gaya hidup berkelanjutan di lingkungan kerja. Program ini mengajak karyawan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan limbah, khususnya limbah kosmetik dan produk perawatan diri, melalui penyediaan *drop box* khusus di Kantor Pusat untuk pengumpulan kemasan yang dapat didaur ulang secara bertanggung jawab.

Selain sebagai sarana pengelolaan limbah, WOMERecycle juga berfungsi sebagai media edukasi untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku ramah lingkungan secara berkelanjutan. Selama tahun 2025, jumlah sampah yang di daur ulang melalui program WOMERecycle sebanyak 239 kilogram meningkat 6 (enam) kali lipat dari tahun sebelumnya.

During 2025, the Company continued the WOMERecycle program as part of its sustainability efforts to strengthen the implementation of the Green Office concept and encourage a sustainable lifestyle in the workplace. This program encourages employees to actively participate in waste management, particularly cosmetic and personal care product waste, by providing special drop boxes in Head Office for the collection of packaging that can be responsibly recycled.

In addition to being a means of waste management, WOMERecycle also serves as an educational medium to build awareness and sustainable environmentally friendly behavior change. During 2025, the amount of waste recycled through the WOMERecycle program was 239 kilograms, a 6 (six) fold increase from the previous year.

TUMPAHAN YANG TERJADI (JIKA ADA) [OJK F.15]

Kegiatan operasional Perseroan tidak melibatkan penggunaan bahan kimia, minyak, bahan bakar, atau zat berbahaya lainnya yang berpotensi menimbulkan tumpahan dan mencemari lingkungan. Dengan demikian, tidak ada laporan mengenai kejadian tumpahan dari kantor pusat maupun cabang.

SPILLS THAT OCCURRED (IF ANY) [OJK F.15]

The Company's operational activities do not involve the use of chemicals, oil, fuel, or other hazardous substances that could potentially cause spills and pollute the environment. Therefore, there was no report of spills from the head office or branches.



ASPEK PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

JUMLAH DAN MATERI PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITERIMA DAN DISELESAIKAN [OJK F.16]

Sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah menetapkan kebijakan operasional serta menjalankan berbagai program internal guna memastikan penerapan konsep *green office* berjalan secara efektif. Implementasi kebijakan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan kerja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar melalui pengurangan limbah, penghematan energi, serta penerapan praktik kerja yang lebih ramah lingkungan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima pengaduan terkait lingkungan melalui kanal pelaporan yang tersedia, yang mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan serta efektivitas komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan.

ASPECT OF ENVIRONMENTAL COMPLAINTS

NUMBER AND MATERIAL OF ENVIRONMENTAL COMPLAINTS RECEIVED AND RESOLVED [OJK F.16]

In compliance with applicable laws and regulations, the Company has established operational policies and implemented various internal programs to ensure the effective implementation of the green office concept. The implementation of this policy not only focuses on the efficient use of resources in the work environment, but also has a positive impact on the surrounding environment through waste reduction, energy conservation, and the implementation of more environmentally friendly work practices.

Throughout 2025, the Company received no environmental complaints through available whistleblowing channels, reflecting the successful implementation of environmental policies and effective communication with stakeholders.

Kinerja Sosial
Social Performance



ASPEK KETENAGAKERJAAN

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perseroan disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada berbagai peraturan turunan serta praktik ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Secara lebih spesifik, kebijakan SDM Perseroan dituangkan dalam kebijakan *Human Capital* yang mencakup seluruh aspek pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan, seleksi dan rekrutmen, hingga manajemen karier, remunerasi serta program jaminan sosial dan pensiun. Pengelolaan ini berada di bawah tanggung jawab Direktorat Human Capital, yang berperan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut sejalan dengan visi, kebutuhan serta kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku. [GRI 3-3]

EMPLOYMENT ASPECTS

Management of Human Resources (HR) in the Company is structured in accordance with applicable laws and regulations, including Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into law. Furthermore, this policy also refers to various derivative regulations and applicable employment practices in Indonesia. To be more specific, the Company's HR policy is outlined in the Human Capital Policy, which covers all aspects of HR management, from planning, selection and recruitment, to career management, remuneration and social security and retirement programs. This management falls under the responsibility of Human Capital Directorate, which ensures that this policy implementation aligns with the Company's vision, needs and compliance with applicable regulations. [GRI 3-3]

KESETARAAN KESEMPATAN BEKERJA [OJK F.18]

Perseroan memandang keberagaman sebagai aspek penting yang tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang memperkaya dinamika serta kualitas lingkungan kerja. Dengan keyakinan bahwa

EQUALITY OF EMPLOYMENT OPPORTUNITY [OJK F.18]

The Company views diversity as an important aspect that not only reflects social realities but also serves as a source of strength that enriches the dynamics and quality of work environment. Believing that every individual possesses

setiap individu memiliki potensi unik yang dapat mendorong keberhasilan organisasi, Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan dalam seluruh aspek pengelolaan SDM. Prinsip ini diimplementasikan melalui kebijakan *Human Capital* yang menjamin kesempatan yang adil bagi setiap karyawan dalam proses rekrutmen, penilaian kinerja, pengembangan karier serta akses terhadap pelatihan dan peningkatan kompetensi. Sistem remunerasi pun disusun berdasarkan prestasi dan kontribusi tanpa adanya diskriminasi, guna memastikan keadilan dan kesetaraan sesuai dengan kapasitas serta kualifikasi masing-masing individu.

Penerapan prinsip kesetaraan ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab moral Perseroan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, Perseroan senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, saling menghargai dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal.

unique potential that can drive organizational success, the Company applies equality principle in all aspects of HR management. This principle is implemented through the Human Capital Policy, which guarantees fair opportunities for every employee in the recruitment process, performance assessments, career development and access to training and competency development. The remuneration system is also based on merit and contribution without discrimination, ensuring fairness and equality in accordance with each individual's capacity and qualifications.

The implementation of this equality principle is not only a form of the Company's moral responsibility, but also reflects the compliance with Law No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into law. By implementing such principles, the Company is continuously to creating an inclusive, respectful work environment and providing equal opportunities for all employees to grow and contribute optimally.

KESETARAAN GENDER [IDX S-01]

GENDER EQUALITY [IDX S-01]

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender dan Jabatan
Employee Composition by Gender and Position

Level Jabatan Position Level	2025				2024				2023			
	Laki-laki Male		Perempuan Female		Laki-laki Male		Perempuan Female		Laki-laki Male		Perempuan Female	
	Jumlah Karyawan Total Employee	%	Jumlah Karyawan Total Employee	%	Jumlah Karyawan Total Employee	%	Jumlah Karyawan Total Employee	%	Jumlah Karyawan Total Employee	%	Jumlah Karyawan Total Employee	%
Entry-level	146	10,2	93	12,5	190	12,5	121	16	258	16,2	163	21,9
Mid-level	980	68,7	558	75	1.036	68,2	551	73,1	1.055	66,3	517	69,6
Senior-level	261	18,3	83	11,2	256	16,8	72	9,5	239	15	56	7,5
Executive-level	39	2,7	10	1,3	38	2,5	10	1,4	40	2,5	7	0,9
Subtotal	1.426	100	744	100	1.520	100	754	100	1.592	100	743	100
Jumlah Total	2.170				2.274				2.335			

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kerja [IDX S-04]
Employee Demographics Based on Employment Status [IDX S-04]

Status Kerja	2025				2024				2023			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	%
Permanen Permanent	1.358	708	2.066	95,21	1.516	752	2.268	99,74	1.588	742	2.330	99,79
Non-permanen Non-permanent	68	36	104	4,79	4	2	6	0,26	4	1	5	0,21
Subtotal	1.426	744	2.170	100	1.520	754	2.274	100	1.592	743	2.335	100
Jumlah Total	2.170				2.274				2.335			

Hingga 31 Desember 2025, jumlah karyawan sementara Perseroan tercatat sebanyak 104 orang, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024.

As of December 31, 2025, the Company had 104 temporary employees on record, an increase compared to 2024. The Company's temporary employees are primarily engaged in administrative and support roles.

KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN KESEMPATAN [GRI 405-1]

Perseroan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh individu tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, maupun karakteristik personal lainnya. Langkah ini diwujudkan melalui kebijakan dan praktik ketenagakerjaan yang menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dalam proses rekrutmen, pengembangan karier serta penilaian kinerja karyawan. Perseroan juga memastikan bahwa setiap karyawan memiliki akses yang setara terhadap fasilitas kerja, pelatihan dan program pengembangan kompetensi.

Sebagai bagian dari implementasi prinsip keberagaman tersebut, hingga akhir tahun pelaporan, Perseroan memiliki 1 (satu) karyawan penyandang disabilitas yang terlibat aktif dalam kegiatan operasional Perseroan. Keberadaan karyawan difabel ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam membuka akses kesempatan kerja yang inklusif serta menghargai kontribusi setiap individu berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Ke depan, Perseroan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan serta praktik ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan keberagaman dan kesetaraan kesempatan.

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY [GRI 405-1]

The Company is strive to creating an inclusive work environment and providing equal opportunities for all individuals regardless of their background, physical condition, or other personal characteristics. This step is realized through employment policies and practices that uphold the principle of non-discrimination in the recruitment process, career development and employee performance appraisal. The Company also ensures that every employee has equal access to work facilities, training and competency development programs.

As part of the implementation of this principle of diversity, by the end of the reporting year, the Company had one employee with a disability who was actively involved in the Company's operational activities. The presence of this employee with a disability reflects the Company's commitment to providing inclusive employment opportunities and valuing the contributions of each individual based on their competence and performance. Going forward, the Company will continue to evaluate and develop employment policies and practices that support greater diversity and equal opportunities.

PEGAWAI BERDASARKAN GENDER DAN KELOMPOK UMUR [IDX S-02]

EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER AND AGE GROUP [IDX S-02]

Komposisi Karyawan berdasarkan gender dan kelompok umur (tahun 2025)
Employee Composition by Gender and Age Group (2025)

Rentang Usia (tahun) Age Range (year)	**Level Jabatan** Position Level								**Jumlah Karyawan** Total Employee
	Entry-level		**Mid-level**		**Senior-level**		**Executive-level**		
	Laki-laki Male	**Perempuan** Female	**Laki-laki** Male	**Perempuan** Female	**Laki-laki** Male	**Perempuan** Female	**Laki-laki** Male	**Perempuan** Female	
18-24 tahun 18-24 years old	4	4	107	70	0	0	0	0	185
25-34 tahun 25-34 years old	38	55	590	368	155	45	3	1	1.215
35-44 tahun 25-34 years old	44	20	214	83	114	29	22	6	532
45-54 tahun 25-34 years old	56	13	63	35	32	8	13	3	223
>55 tahun >55 years old	4	1	6	2	0	1	1	0	15
Jumlah Total									**2.170**

Komposisi Karyawan berdasarkan gender dan kelompok umur (tahun 2024)
Employee Composition by gender and age group (2024)

Rentang Usia (tahun) Age Range (year)	Level Jabatan Position Level								Jumlah Karyawan Total Employee
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	
18-24 tahun 18-24 years old	9	15	141	81	0	0	0	0	246
25-34 tahun 25-34 years old	51	61	570	345	111	32	2	0	1172
35-44 tahun 25-34 years old	60	30	254	97	107	29	26	6	609
45-54 tahun 25-34 years old	65	14	69	28	35	10	9	3	233
>55 tahun >55 years old	5	1	2	0	3	1	1	1	14
Jumlah Total									**2.274**

Komposisi Karyawan berdasarkan gender dan kelompok umur (tahun 2023)
Employee Composition by gender and age group (2023)

Rentang Usia (tahun) Age Range (year)	Level Jabatan Position Level								Jumlah Karyawan Total Employee
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	
18-24 tahun 18-24 years old	21	37	160	102	0	0	0	0	320
25-34 tahun 25-34 years old	60	73	526	292	93	24	5	0	1.073
35-44 tahun 25-34 years old	93	36	290	105	109	25	29	3	690
45-54 tahun 25-34 years old	83	17	79	18	35	6	4	3	245
>55 tahun >55 years old	1	0	0	0	2	1	2	1	7
Jumlah Total									**2.335**

PEREKRUTAN KARYAWAN BARU DAN PERGANTIAN KARYAWAN [GRI 401-1] [IDX S-03]

Proses rekrutmen dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, dengan memberikan peluang yang sama bagi seluruh individu untuk bergabung dan berkontribusi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk menjamin proses seleksi yang adil dan objektif, Perseroan menerapkan prosedur yang transparan dan profesional, dengan pemilihan kandidat didasarkan pada kapasitas, kompetensi serta kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Perseroan juga menegaskan komitmennya terhadap integritas proses rekrutmen dengan menolak segala bentuk praktik tidak etis, seperti penggunaan jalur tidak resmi atau kandidat titipan, demi menjaga kualitas dan profesionalisme kerja.

Perseroan turut berupaya memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memprioritaskan perekrutan karyawan dari wilayah sekitar area operasional. Pendekatan ini tidak hanya

NEW EMPLOYEE HIRES AND EMPLOYEE TURNOVER [GRI 401-1] [IDX S-03]

The recruitment process is carried out based on the principle of equality, providing equal opportunities for all individuals to join and contribute according to the required qualifications. To ensure a fair and objective selection process, the Company implements transparent and professional procedures, with candidate selected based on capacity, competence and suitability to the organization's needs. The Company also affirms its commitment to the integrity of its recruitment process by rejecting all forms of unethical practices, such as using unofficial channels or favoritism, in order to maintain the quality and professionalism of its work.

The Company strives to empower local workforce by prioritizing recruitment from areas surrounding its operational areas. This approach not only has a positive economic impact

memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara Perseroan dan komunitas di sekitarnya.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan merekrut sebanyak 461 orang karyawan baru, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 476 orang karyawan baru. Rincian komposisi karyawan baru berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia dan wilayah kerja disajikan dalam tabel berikut.

on the local community but also strengthens social ties between the Company and its surrounding communities.

Throughout 2025, the Company recruited 461 new employees, a decrease compared to 2024, which reached 476 new employees. Details of the composition of new employees based on gender, age group, and work area are presented in the following table.

Komposisi Karyawan Baru
New Employee Composition

Keterangan Description	**Tahun** Year		
	2025	**2024**	**2023**
Jenis Kelamin **Gender**			
Pria Male	**311**	322	355
Wanita Female	**150**	154	169
Jumlah Total	**461**	**476**	**524**
Lokasi Kerja **Work Location**			
Kantor Pusat Head Office	**202**	254	280
Kantor Cabang Branch Office	**259**	206	168
Kantor Selain Kantor Cabang Sub Branch Office	**0**	16	76
Kantor Layanan Service Office	**0**	0	0
Jumlah Total	**461**	**476**	**524**
Usia **Age**			
s/d 24 tahun up to 24 years old	**112**	163	227
25 s/d 34 tahun 25 to 34 years old	**299**	264	260
35 s/d 49 tahun 35 to 49 years old	**48**	45	34
≥50 tahun ≥50 years old	**2**	4	3
Jumlah Total	**461**	**476**	**524**
Pengalaman Kerja Work Experience			
Professional	**349**	327	307
Fresh Graduate	**12**	14	56
Development Programme	**101**	135	161
Jumlah Total	**461**	**476**	**524**

Selain melaksanakan proses rekrutmen, Perseroan juga menjalankan prosedur penghentian hubungan kerja bagi sejumlah karyawan dengan tetap mengacu pada alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap keputusan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara adil, transparan dan mengikuti prosedur yang telah

Apart from conducting the recruitment process, the Company also implements termination procedures for a number of employees with due regard to reasons in accordance with applicable legal provisions. Each termination decision is made fairly, transparently and follows procedures established by laws and regulations. Detailed composition of employees who

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Rincian komposisi karyawan yang mengakhiri hubungan kerja dengan Perseroan sepanjang tahun 2025, berdasarkan kategori jenis kelamin, kelompok usia dan wilayah kerja, disajikan dalam tabel berikut.

terminated their employment with the Company throughout 2025, based on gender, age group and work location, is presented in the following table.

Komposisi Karyawan Keluar/Meninggalkan Perseroan
Composition of Employee Leaving the Company

Keterangan Description	Tahun Year		
	2025	**2024**	**2023**
Jenis Kelamin **Gender**			
Pria Male	**406**	394	478
Wanita Female	**161**	143	126
Jumlah Total	**567**	**537**	**604**
Lokasi Kerja **Work Location**			
Kantor Pusat Head Office	**174**	170	119
Kantor Cabang Branch Office	**378**	340	392
Kantor Selain Kantor Cabang Sub Branch Office	**15**	27	93
Kantor Layanan Service Office	**0**	0	0
Jumlah Total	**567**	**537**	**604**
Usia **Age**			
s/d 24 tahun up to 24 years old	**48**	81	47
25 s/d 34 tahun 25 to 34 years old	**328**	269	280
35 s/d 49 tahun 35 to 49 years old	**165**	158	239
≥50 tahun ≥50 years old	**26**	29	38
Jumlah Total	**567**	**537**	**604**

Tingkat perputaran karyawan (*turnover*) Perseroan pada tahun 2025 adalah sebesar 26,13%, naik dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 23,61%.

The Company's employee turnover rate in 2025 is 26.13%, an increase compared to 23.61% in 2024.

Berikut merupakan hasil perhitungan tingkat perputaran karyawan (*turnover*) selama tahun 2025, yang didasarkan pada jumlah karyawan yang direkrut dan yang mengakhiri hubungan kerja dengan Perseroan:

The following are the results of the employee turnover rate calculation for 2025, based on the number of employees recruited and those who terminated their employment with the Company:

Jumlah dan Penyebab Karyawan Berhenti/Meninggalkan Perseroan [IDX S-05]
Number and Causes for Employee Leaving the Company

Penyebab Cause	Tahun Year								
	2025			2024			2023		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Pensiun Pension	10	4	14	7	1	8	7	-	7
Meninggal Dunia Passed-away	-	-	-	1	1	2	7	-	7
Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri Resign at One's Own Request	242	111	353	237	92	329	339	108	447
Diberhentikan Terminated	154	46	200	149	49	198	125	18	143
Sub Total Karyawan Berhenti Sub Total Employee Leaving The Company	567			537			604		
Jumlah Karyawan Masuk Total New Hiring Employees	463			476			524		
Jumlah Karyawan di Awal Tahun Total Employees at the Beginning of the Year	2.274			2.335			2.415		
Jumlah Karyawan di Akhir Tahun Total Employees at the End of the Year	2.170			2.274			2.335		
Tingkat Perputaran Karyawan Turnover Rate	**26,13%**			**23,61%**			**25,87%**		

TUNJANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA KARYAWAN PURNAWAKTU YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA KARYAWAN PADA KURUN WAKTU TERTENTU ATAU PARUH WAKTU [GRI 401-2]

Perseroan menyediakan berbagai bentuk tunjangan dan fasilitas kerja untuk mendukung kesejahteraan, kenyamanan dan produktivitas karyawan. Seluruh karyawan penuh waktu menerima akses terhadap tunjangan yang mencakup jaminan kesehatan, program pengembangan kompetensi, cuti tahunan serta perlindungan ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan menyediakan sejumlah tunjangan tambahan sesuai kebijakan internal untuk mendukung keseimbangan kerja dan kualitas hidup karyawan.

Beberapa tunjangan tersebut hanya berlaku bagi karyawan penuh waktu dan tidak diberikan kepada karyawan dengan status kontrak atau paruh waktu, menyesuaikan ketentuan ketenagakerjaan dan standar operasional Perseroan.

BENEFITS PROVIDED TO FULL-TIME EMPLOYEES NOT PROVIDED TO CONTRACT OR PART-TIME EMPLOYEES [GRI 401-2]

The Company provides various benefits and work facilities to support employee well-being, comfort and productivity. All full-time employees receive access to benefits that include health insurance, competency development programs, annual leave and employment protection in accordance with applicable regulations. Furthermore, the Company provides a number of additional benefits, in accordance with internal policies, to support employee work-life balance and quality of life.

Some of these benefits are only applicable to full-time employees and are not provided to contract or part-time employees, in accordance with employment regulations and the Company's operational standards.

Tunjangan Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (GRI 401-2)
Employee Benefits by Employment Status

Jenis Tunjangan / Fasilitas Type of Benefits / Facilities	**Karyawan Tetap** Permanent Employees	**Karyawan Kontrak / Paruh Waktu** Contract / Part-Time Employees
Jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan + tambahan sesuai kebijakan perusahaan)* Health insurance (BPJS Health + additional benefits according to company policy)*	✓	✗
Jaminan Ketenagakerjaan (BPJS TK: JHT, JKM, JKK, JP) Employment Insurance (BPJS TK: JHT, JKM, JKK, JP)	✓	✓
Cuti tahunan, cuti khusus dan izin resmi Annual leave, special leave and official permits	✓	✓
Tunjangan Hari Raya (THR) Holiday Allowance (THR)	✓	✓
Program pelatihan & pengembangan kompetensi Training & competency development programs	✓	✓
Tunjangan transportasi / makan / komunikasi* Transportation / meal / communication allowances*	✓	✓
Pemeriksaan kesehatan berkala* Regular health check-ups*	✓	✗
Asuransi kesehatan tambahan / asuransi jiwa* Supplementary health insurance / life insurance*	✓	✗
Program kesejahteraan karyawan (*well-being initiative*)* Employee welfare programs (well-being initiatives)*	✓	✗
Program pengembangan karier jangka panjang Long-term career development programs	✓	✗

*Menyesuaikan kembali dengan kebijakan aktual Perseroan.
*Readjusting to the Company's current policies.

CUTI MELAHIRKAN [GRI 401-3]

Perseroan memberikan hak cuti melahirkan kepada karyawan perempuan dan laki-laki dengan tetap mempertahankan hak atas upah dasar. Karyawan perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 90 hari kalender yang dapat bertambah maksimal 90 hari berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Dokter Kebidanan/Dokter Anak bahwa karyawan perempuan mengalami masalah kesehatan pasca melahirkan dan/atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan. Sementara itu, karyawan laki-laki yang mendampingi pasangan melahirkan memperoleh hak cuti selama 2 hari. Kebijakan ini bertujuan mendukung kesejahteraan karyawan dan keluarganya, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, tercatat 35 karyawan perempuan telah memanfaatkan hak cuti melahirkan, dengan 31 karyawan di antaranya masih berstatus sebagai karyawan aktif dan 27 karyawan telah kembali aktif bekerja hingga periode pelaporan berakhir. Selain itu, Perseroan juga menyediakan ruang laktasi yang nyaman dan aman di kantor pusat sebagai bentuk dukungan bagi ibu menyusui, guna menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga dan mendukung keseimbangan kehidupan kerja.

MATERNITY LEAVE [GRI 401-3]

The Company provides maternity leave and paternity leave to both female and male employees while maintaining their rights to basic wages. Female employees are entitled to 90 calendar days of maternity leave, which can be extended by a maximum of 90 days if there are special circumstances proven by a doctor's/obstetrician's/pediatrician's certificate that the female employee is experiencing health problems after giving birth and/or the child she gave birth to has health problems. Meanwhile, male employees who accompany their partner during childbirth are entitled to 2 days of leave. This policy aims to support the well-being of employees and their families, while ensuring compliance with applicable labor regulations.

Throughout 2025, it was recorded that 35 female employees utilized their maternity leave rights, with 31 of them still active employees and 27 have returned to work by the end of the reporting period. Additionally, the Company also provides a comfortable and safe lactation room at the head office as a form of support for breastfeeding mothers, to create a family-friendly work environment and support work-life balance.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA [GRI 2-30]

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan belum memiliki Serikat Pekerja maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun telah menerapkan Peraturan Perusahaan (PP) yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan kerja dengan seluruh karyawan. Peraturan tersebut mencakup hak dan kewajiban

COLLECTIVE LABOR AGREEMENT [GRI 2-30]

As of December 31, 2025, although the Company had no Labor Union or Collective Labor Agreement (CLA), it implemented Company Regulations that served as guidelines for governing employment relations with all employees. These regulations cover the rights and obligations of employees

karyawan dan perusahaan serta tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan dan hubungan industrial, sehingga memastikan hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan secara berkelanjutan senantiasa untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh karyawan melalui penerapan prinsip kemitraan dan dialog terbuka. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah penyelenggaraan pertemuan interaktif secara rutin antara manajemen dan karyawan yang difasilitasi melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Selain itu, Perseroan juga secara proaktif menyampaikan informasi mengenai peraturan serta ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku agar setiap karyawan memahami hak dan tanggung jawabnya. Melalui pendekatan ini, Perseroan berupaya membangun komunikasi dua arah yang efektif, meningkatkan transparansi serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Upaya tersebut turut memperkuat hubungan kerja yang positif sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan kepuasan karyawan.

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEJADIAN PELANGGARAN HAM [IDX S-07, S-08, S-09]

Perseroan senantiasa untuk menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam seluruh aspek operasionalnya. Langkah ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan dan pedoman kode etik perusahaan yang menekankan penghormatan serta perlindungan terhadap HAM sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perseroan memastikan seluruh karyawan dan pemangku kepentingan memperoleh perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, agama, suku, maupun latar belakang lainnya.

Pedoman tersebut juga mencakup perlindungan terhadap potensi tindakan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk mendukung implementasinya, Perseroan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, menjamin kerahasiaan pelapor serta menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran dengan tegas. Sepanjang tahun 2025, tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran HAM di lingkungan Perseroan.

STRATEGI HUMAN CAPITAL

Human Capital berperan penting dalam pengembangan organisasi dengan mengoptimalkan potensi karyawan untuk menciptakan SDM yang kompetitif. Peran utamanya meliputi pengembangan kompetensi dan keterampilan, pembentukan budaya organisasi yang mendukung inovasi serta pengelolaan kinerja berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan adaptabilitas terhadap perubahan.

Perseroan terus berupaya mengoptimalkan produktivitas sumber daya manusia agar pelaksanaan strategi yang ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan dampak maksimal. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan

and company, as well as procedures for resolving labor and industrial relations disputes, ensuring a harmonious working relationship in accordance with applicable laws.

The Company continuously strives to maintain harmonious industrial relations with all employees through the application of partnership principles and open dialogue.One of the main steps taken is holding regular interactive meetings between management and employees, facilitated through Bipartite Cooperation Institution (LKS). Furthermore, the Company proactively provides information on applicable labor regulations and provisions so that all employee understands their rights and responsibilities. Through this approach, the Company strives to build effective two-way communication, increase transparency and create a conducive work environment. Such efforts also strengthen positive working relationships while promoting increased productivity and employee satisfaction.

HUMAN RIGHTS POLICY AND HUMAN RIGHTS VIOLATION INCIDENTS [IDX S-07, S-08, S-09]

The Company consistently upholds human rights principles in all aspects of its operations. This is achieved through the implementation of company policies and code of conduct guidelines that emphasize respect for and protection of human rights in accordance with applicable regulations. The Company ensures that all employees and stakeholders receive fair and equal treatment regardless of gender, age, religion, ethnicity, or other background.

The code of conduct also covers protection against potential acts of sexual harassment, both verbal and nonverbal. To support its implementation, the Company provides easily accessible reporting channels, guarantees whistleblower confidentiality and firmly follows up on any reports of violations. Throughout 2025, there were no cases of human rights violations within the Company.

HUMAN CAPITAL STRATEGY

Human Capital plays a crucial role in developing organization by optimizing employee potential to create competitive HR. Its primary role includes developing competencies and skills, establishing an organizational culture that supports innovation and managing continuous performance to increase productivity and adaptability to changes.

The Company continuously strives to optimize its human resource productivity to ensure the effective implementation of established strategies and generate maximum impact. This effort is carried out by involving competent leaders

para pemimpin yang kompeten serta memanfaatkan teknologi dalam setiap proses kerja Human Capital Perseroan, sebagaimana diuraikan berikut:

and utilizing technology in every process of the Company's Human Capital work, as described below:

Mengembangkan Pemimpin Masa Depan melalui Perencanaan Suksesi

Perseroan menerapkan strategi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin masa depan (*successors*) dalam persiapan transisi kepemimpinan. Perencanaan suksesi merupakan pendekatan strategis untuk mengembangkan potensi, bakat dan kemampuan karyawan, memastikan hadirnya pemimpin terbaik bagi Perseroan. Proses ini dimulai dari tahap perekrutan hingga pengembangan talenta yang ada secara berkelanjutan.

Developing Future Leaders through Succession Planning

The Company implements strategies to identify and develop future leaders (successors) in preparation for leadership transitions. Succession planning is a strategic approach to nurturing the potential, talents and abilities of employees, ensuring the emergence of top-quality leaders for the Company. This process begins at recruitment stage and extends to the continuous development of existing talents.

Standardisasi Program untuk Memperkuat Budaya dan Kompetensi Karyawan

Perseroan menstandarkan program yang bertujuan untuk meningkatkan budaya, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan karyawan. Strategi pengembangan SDM ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kinerja karyawan tetapi juga untuk memperkuat loyalitas terhadap Perseroan.

Standardizing Programs to Strengthen Employee Culture and Competence

The Company standardizes programs aimed at enhancing employee culture, abilities, skills and knowledge. These HR development strategies are designed not only to boost employee performance but also to strengthen loyalty to the Company.

Meningkatkan Proses Kerja Human Capital melalui Digitalisasi

Perseroan menerapkan strategi untuk membuat proses kerja Human Capital lebih efisien, cepat dan responsif. Digitalisasi diterapkan dalam setiap proses Human Capital sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan ini.

Improving Human Capital Work Processes through Digitalization

The Company implements strategies to make Human Capital work processes more efficient, swift and responsive. Digitalization is integrated into every Human Capital process as a primary key enabler to achieve this goal.

PROGRAM UTAMA SDM TAHUN 2025

HR MAIN PROGRAM IN 2025

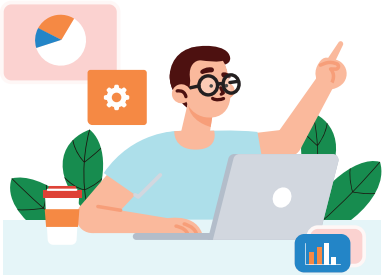

- Aktivitas perekrutan karyawan dan pengenalan perusahaan | Recruitment Branding Activity
- Perekrutan secara daring *& Psychological test* | Online Recruitment & Psychological test
- Program Pelatihan dan Pendidikan | Learning program
- Program Pengembangan Karyawan | Talent Management Program
- Program Kinerja dan Penghargaan | Performance & Reward Program
- Program Budaya dan Keterlibatan | Culture & Engagement Program

TENAGA KERJA ANAK DAN TENAGA KERJA PAKSA [OJK F.19] [IDX S-10]

Perseroan menaruh perhatian serius untuk menciptakan lingkungan kerja yang beretika, adil secara sosial serta menjamin seluruh karyawan bekerja dalam kondisi yang aman, sehat dan menghormati hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan kebijakan yang tegas mengenai batas usia minimum karyawan serta ketentuan 40 jam kerja yang diperbolehkan. Perseroan menerapkan sistem kerja yang mendukung produktivitas dan keseimbangan kehidupan kerja, yakni lima hari kerja (untuk Kantor Pusat) dengan jam kerja Senin–Jumat pukul 08.15–17.15 dan libur pada hari Sabtu serta enam hari kerja (untuk Kantor Regional) dengan jam kerja Senin–Jumat pukul 08.30–16.30 dan Sabtu pukul 08.30–14.30.

Kebijakan ini dirancang agar selaras dengan kebutuhan operasional Perseroan sekaligus menjaga kesejahteraan karyawan. Selain memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Perseroan dalam mendukung penghapusan praktik pekerja anak dan kerja paksa melalui proses rekrutmen yang ketat. Perseroan secara tegas menolak dan tidak mempekerjakan individu di bawah umur atau yang terlibat dalam bentuk kerja paksa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta pedoman yang tercantum dalam *Policy Human Capital*.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, hingga saat ini Perseroan memastikan bahwa tidak terdapat pekerja anak di seluruh unit kerja. Hal ini dibuktikan melalui penerapan proses rekrutmen yang ketat dan terstandarisasi, termasuk verifikasi identitas dan usia calon karyawan berdasarkan dokumen resmi yang sah. Setiap tahapan rekrutmen dilakukan secara transparan dan terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan usia minimum bekerja. Dengan mekanisme tersebut, Perseroan secara konsisten menjaga lingkungan kerja yang bebas dari praktik pekerja anak dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

UPAH MINIMUM REGIONAL [OJK F.20] [GRI 2-19]

KEBIJAKAN REMUNERASI

Perseroan menetapkan paket remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Struktur remunerasi mencakup gaji pokok, tunjangan, dukungan program pensiun serta berbagai manfaat lainnya yang disusun dengan mengacu pada standar Upah Minimum Regional (UMR). Dalam penetapannya, Perseroan menerapkan prinsip 3P (*Pay for Position*, *Pay for Person* dan *Pay for Performance*) untuk memastikan kompensasi diberikan secara adil berdasarkan posisi jabatan, kemampuan individu serta pencapaian kinerja. Selain itu,

CHILD LABOR AND FORCED LABOR [OJK F.19] [IDX S-10]

The Company is pay close attention to creating an ethical and socially fair work environment and ensuring that all employees work in safe, healthy conditions that respect human rights. To realize such matter, The Company has established a strict policy on minimum age limit for employees and provisions on the permitted 40 working hours. The Company applies a working system that supports productivity and work-life balance. This includes a 5-day workweek (for Head Office) with working hours from Monday to Friday, 08:15 AM to 05:15 PM and Saturdays off, as well as a 6-day workweek (for Regional Offices) with working hours from Monday to Friday, 08:30 AM to 04:30 PM and Saturday, 08.30 AM to 02.30 PM.

This policy is designed to align with the Company's operational needs while safeguarding employee welfare. Apart from ensuring compliance with laws and regulations, this policy also demonstrates the Company's commitment to supporting the elimination of child labor and forced labor through a rigorous recruitment process. The Company firmly rejects and does not employ underage individuals or those engaged in forced labor in accordance with the applicable laws and guidelines outlined in Human Capital Policy.

As an implementation of this policy, the Company ensures that there is no child labor in all of its units. This is demonstrated through the implementation of a strict and standardized recruitment process, including verification of identity and age of prospective employees based on valid official documents. Each recruitment stage is conducted transparently and documented to ensure the compliance with minimum employment age regulations. With this mechanism, the Company consistently maintains a work environment free from child labor practices and in line with human rights principles.

REGIONAL MINIMUM WAGE [OJK F.20] [GRI 2-19]

REMUNERATION POLICY

The Company establishes remuneration packages in accordance with applicable laws and regulations, including Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into law. The remuneration structure includes basic salary, allowances, pension support programs and various other benefits, compiled in accordance with the Regional Minimum Wage (UMR) standard. In determining this matter, the Company applies the 3P (Pay for Position, Pay for Person and Pay for Performance) principles to ensure that compensation is provided fairly based on position, individual abilities and performance achievements. Furthermore, the remuneration system also emphasizes performance



sistem remunerasi juga menitikberatkan pada hasil kinerja, di mana kompensasi variabel bagi karyawan yang berkontribusi langsung terhadap kegiatan usaha disesuaikan dengan capaian dan kontribusinya, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Untuk meningkatkan retensi dan keterlibatan karyawan, Perseroan juga menyediakan berbagai manfaat tambahan di luar gaji pokok, seperti fasilitas asuransi kesehatan, bantuan kredit kendaraan bermotor, tempat tinggal bagi karyawan luar daerah, pinjaman dana darurat, bantuan pendidikan untuk karyawan dan anak serta program beasiswa. Selain itu, Perseroan memberikan perlindungan melalui keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta fasilitas komunikasi guna menunjang kesejahteraan karyawan.

Perseroan memastikan bahwa tingkat upah bagi karyawan pada golongan terendah, khususnya yang baru bergabung (*entry level*), telah mempertimbangkan standar kebutuhan hidup layak. Besaran upah minimum disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi serta variabel ekonomi lainnya, sehingga kompensasi yang diberikan selalu setara atau lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang sebelumnya dikenal sebagai UMR. [OJK F.20]

outcomes, with variable compensation for employees who directly contribute to business activities is adjusted based on their achievements and contributions, with due observance of the Company's financial condition.

To improve retention and employee engagement, the Company also provides various additional benefits beyond basic salary, such as health insurance, vehicle loan assistance, housing for employees working outside their home regions, emergency loans, educational assistance for employees and their children and scholarship programs. Furthermore, the Company provides protection by enrolling its employees in BPJS Health and Employment and communication facilities to support employee welfare.

The Company ensures that the wages for its entry-level employees, particularly new hires, have considered the standards for a decent living. The minimum wage is adjusted based on basic necessities price, inflation rate and other economic variables, ensuring that the compensation is always equal to or higher than the Provincial Minimum Wage (UMP), previously known as UMR. [OJK F.20]

Perbandingan Upah Karyawan Baru Level Terendah Dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2025
Comparison of New Employee Wages-Lowest Level to Provincial Minimum Wage in 2025

No	Wilayah Operasional Operational Area	Gaji Karyawan *Entry Level* Entry-Level Employee Wages	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum Wage	Rasio Gaji Karyawan *Entry Level* Dibandingkan Upah Minimum Salary Ratio of Entry-Level Employees to Minimum Wage
1	Kantor Pusat Head Office	5.396.761	5.395.761	1,00
2	Cabang Kemayoran | Regional Jakarta - Bogor - Depok – Bekasi Kemayoran Branch | Regional Jakarta - Bogor - Depok - Bekasi	5.396.761	5.395.761	1,00
3	Cabang Bandung | Regional Jawa Barat Bandung Branch | Regional West Java	4.668.634	4.482.914	1,40
4	Cabang Yogyakarta | Regional Jawa Tengah Bagian Selatan Yogyakarta Branch | Regional Southern-Central Java	3.039.538	2.655.042	1,40
5	Cabang Denpasar | Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Denpasar Branch | Regional East Java, Bali, Nusa Tenggara	3.346.823	3.298.116	1,01
6	Cabang Medan | Regional Sumatera Bagian Utara Medan Branch | Regional North Sumatra	4.014.072	4.014.072	1,00
7	Cabang Palembang | Regional Sumatera Bagian Selatan Palembang Branch | Regional South Sumatra	3.923.218	3.916.635	1,00
8	Cabang Samarinda | Regional Kalimantan Samarinda Branch | Regional Kalimantan	3.797.411	3.724.473	1,02

Perbandingan Upah Karyawan Baru Level Terendah Dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2025
Comparison of New Employee Wages-Lowest Level to Provincial Minimum Wage in 2025

No	Wilayah Operasional Operational Area	Gaji Karyawan *Entry Level* Entry-Level Employee Wages	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum Wage	Rasio Gaji Karyawan *Entry Level* Dibandingkan Upah Minimum Salary Ratio of Entry-Level Employees to Minimum Wage
9	Cabang Pare-Pare | Regional Sulawesi Pare-Pare Branch | Regional Sulawesi	3.740.868	3.657.527	1,02
10	Cabang Tangerang | Regional Banten Tangerang Branch | Regional Banten	4.901.117	4.901.117	1,00
11	Cabang Semarang | Regional Jawa Tengah Bagian Utara Semarang Branch | Regional Northern-Central Java	3.454.827	3.454.827	1,00





KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap menjadi aspek penting dalam mendukung kenyamanan dan keamanan aktivitas kerja karyawan, meskipun tidak termasuk dalam topik material Perseroan. Penerapan K3 diarahkan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, meminimalkan risiko kecelakaan kerja serta menjaga kelancaran operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Perseroan melaksanakan penerapan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan operasional perusahaan jasa pembiayaan.

Pengelolaan K3 berada di ranah fungsi Premises & General Affairs Department, bekerja sama dengan pengelola gedung dan penyedia layanan kesehatan. Pendekatan manajemen mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, pengenalan jalur evakuasi, penyediaan fasilitas kerja yang ergonomis, pemeliharaan sarana pencegahan kebakaran serta penyediaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan.

Perseroan memantau efektivitas pelaksanaan K3 melalui indikator seperti tingkat absensi karena sakit serta hasil evaluasi kepuasan dan kenyamanan kerja karyawan. Temuan dari evaluasi digunakan untuk memperkuat fasilitas, prosedur dan program K3 sehingga manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. [GRI 3-3]

LINGKUNGAN BEKERJA YANG LAYAK DAN AMAN [OJK F.21] [IDX S-11]

Perseroan meyakini bahwa pencapaian tujuan bisnis bergantung pada kualitas lingkungan kerja yang mendukung. Oleh karena itu, Perseroan berupaya menciptakan suasana kerja yang tidak hanya aman, tetapi juga nyaman dan berorientasi pada kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dan semangat karyawan untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam menjalankan setiap tanggung jawab serta berkontribusi optimal terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis tahun pelaporan.

Sebagai wujud perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, Perseroan terus memperkuat kebijakan serta implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan melibatkan seluruh karyawan dalam berbagai program dan inisiatifnya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi risiko di lingkungan kerja, mendukung tercapainya kondisi tanpa kecelakaan kerja (*zero accident*) serta meminimalkan gangguan kesehatan yang mungkin timbul akibat faktor pekerjaan.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Occupational Health and Safety (OHS) remains an important aspect in supporting the comfort and safety of employees' work activities, even though it is not included in the Company's material topics. The implementation of OHS is aimed at ensuring a safe working environment, minimizing the risk of workplace accidents and maintaining smooth operations and quality of service to customers. The Company implements OSH in accordance with applicable laws and regulations and the operational needs of the financing services company.

OHS management falls under the Premises & GA Department, in cooperation with building managers and healthcare providers. The management approach includes regular medical checks-ups identifying evacuation routes, providing ergonomic work facilities, maintaining fire prevention equipment and providing social security coverage for all employees.

The Company monitors the effectiveness of OHS implementation through indicators such as the rate of absences due to illness and the results of employee satisfaction and workplace comfort evaluations. Evaluation findings are used to strengthen OHS facilities, procedures and programs so that occupational health and safety risk management can be implemented consistently and sustainably. [GRI 3-3]

DECENT AND SAFE WORKING ENVIRONMENT [OJK F.21] [IDX S-11]

The Company believes that achieving business objectives is dependent on the quality of a supportive work environment. Therefore, the Company is strive to creating a work environment that is not only safe, but also comfortable and oriented towards employee well-being. This conducive work environment is expected to foster employee motivation and enthusiasm to deliver their best performance in carrying out each responsibility and contribute optimally to achieving the targets set in the reporting year's Business Plan.

As the manifestation of its concern for employee well-being, the Company continues to strengthen its Occupational Health and Safety (OHS) policies and implementation by involving all employees in various programs and initiatives. These efforts aim to increase awareness and vigilance regarding potential risks in working environment, support the achievement of zero occupational accident and minimize health problems that may arise from work-related factors.

SISTEM MANAJEMEN K3 [GRI 403-1]

Perseroan menerapkan berbagai ketentuan dan prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disesuaikan dengan karakteristik operasional Perseroan sebagai perusahaan jasa perkantoran. Penerapan K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mendukung kelancaran aktivitas kerja dan produktivitas karyawan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal yang relevan dengan pengelolaan gedung dan fasilitas kerja.

Untuk mendukung implementasi K3, Perseroan melengkapi Kantor Pusat, Kantor Regional, Cabang, Pos, Contact Center dan Learning Center dengan berbagai fasilitas keselamatan kerja, antara lain:

1. **Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) Portable dan P3K**
   Perseroan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) portable di Kantor Pusat, Contact Center, Learning Center serta Kantor Regional, Cabang dan Pos. Selain itu, Kotak P3K juga tersedia di berbagai kantor cabang dan wilayah operasional. Peralatan ini merupakan perlengkapan penting yang ditempatkan secara strategis di lokasi yang mudah terlihat dan mudah dijangkau.
2. **Pemeliharaan *Air Conditioning* (AC)**
   Pemeliharaan AC dilakukan untuk memastikan kinerja pendingin tetap optimal dan meminimalkan kemungkinan kerusakan pada komponen AC. Pemeliharaan preventif ini dilakukan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional, Cabang dan Pos, dengan jadwal sebanyak empat kali dalam satu tahun.
3. **Pengendalian Hama Rutin *(Pest Control)***
   Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari gangguan hama dan penyakit. Data terkait implementasi pengendalian hama adalah sebagai berikut:

OHS MANAGEMENT SYSTEM [GRI 403-1]

The Company implements various provisions and procedures related to Occupational Safety and Health (OSH) that are tailored to the operational characteristics of the Company as an office services company. The implementation of OSH aims to create a safe and healthy work environment, as well as to support the smooth running of work activities and employee productivity. In its implementation, the Company refers to applicable laws and regulations as well as internal policies relevant to the management of buildings and work facilities.

To support OHS implementation, the Company equips its head office, regional offices, branches, post offices, Contact Center and Learning Center with various occupational safety facilities, including:

1. **Portable Fire Extinguishers and First Aid Kits (P3K)**

   The Company provides Portable Fire Extinguishers at Head Office, Contact Center, Learning Center, as well as Regional Offices, Branches and Post Offices. Furthermore, First Aid Kits (P3K) are made available at various branch offices and operational areas. These kits are considered essential equipment and strategically placed in prominent and easily accessible locations.
2. **Air Conditioning (AC) Maintenance**
   Air conditioning (AC) maintenance is conducted to ensure the cooling performance remains optimal and to minimize potential damage to AC components. This preventative maintenance is performed at Head Office and Regional Offices, Branches and Post Offices and is scheduled four times a year.
3. **Routine Pest Control Implementation**
   This activity aims to prevent pest infestations and related diseases. The data on pest control implementation are as follows:

Implementasi Pengendalian Hama
Pest Control Implementation

Lokasi Kerja Work Location	2025	2024	2023
Kantor Pusat Head Office	6	4	3
Telecenter	6	4	3
Learning Center	6	4	3

4. **Pencucian Karpet dan Kursi**
   Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja.

4. **Carpet and Chair Cleaning**
   To maintain cleanliness, health and comfort of employees at work, this activity is carried out periodically.

Di samping pengamanan fisik lingkungan kantor, Perseroan menyediakan perlindungan kesehatan bagi seluruh karyawan melalui BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta asuransi kesehatan tambahan. Fasilitas kesehatan dasar seperti kotak P3K, akses ke penyedia layanan kesehatan dan mekanisme darurat yang difasilitasi oleh pengelola gedung mendukung penanganan cepat apabila terjadi kondisi medis tertentu.

Apart from physical security measures for office environment, the Company provides health protection for all employees through BPJS Health, BPJS Employment and supplementary health insurance. Basic health facilities such as first aid kits, access to healthcare providers and emergency mechanisms facilitated by the building managers support rapid response to specific medical conditions.

Dengan demikian, melalui pedoman, infrastruktur keselamatan, perlindungan kesehatan serta pemeliharaan fasilitas yang rutin, sistem manajemen K3 Perseroan dirancang untuk memastikan bahwa setiap karyawan dapat bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat dan terlindungi, sesuai komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan karyawan.

PENGIDENTIFIKASIAN BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN INVESTIGASI INSIDEN [GRI 403-2]

Perseroan menerapkan proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perusahaan yang berbasis kantor. Proses ini dilakukan secara berkala oleh Departemen Premises & General Affairs guna memastikan bahwa seluruh area kerja memenuhi standar keselamatan dan terbebas dari potensi bahaya yang dapat mengganggu kesehatan atau keselamatan karyawan dan konsumen.

Identifikasi bahaya mencakup penilaian terhadap risiko ergonomi, kondisi ruang kerja, potensi kebakaran, kondisi peralatan kantor, risiko listrik serta risiko keselamatan umum di gedung perkantoran. Selain itu, Perseroan juga memperhatikan risiko non-fisik seperti beban kerja, stres dan risiko kelelahan kerja. Temuan dari proses ini digunakan sebagai dasar untuk penetapan tindakan pencegahan dan pengendalian, termasuk penataan ruang kerja yang ergonomis, pemeliharaan alat pemadam kebakaran (APAR), penyediaan jalur evakuasi yang jelas serta sosialisasi prosedur keselamatan di lingkungan kantor.

Sebagai upaya mitigasi K3, Perseroan melakukan inspeksi rutin pada area kerja, fasilitas keselamatan dan sistem gedung serta memastikan seluruh karyawan memperoleh perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan. Dengan pendekatan ini, Perseroan memastikan bahwa proses identifikasi bahaya dan mitigasi berjalan secara konsisten dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif bagi seluruh karyawan.

LAYANAN KESEHATAN KERJA [GRI 403-3]

Perseroan berupaya meningkatkan kualitas kesehatan karyawan dengan memberikan perlindungan melalui program asuransi kesehatan kerja. Selain kepesertaan dalam program asuransi kesehatan wajib, yaitu BPJS Kesehatan, Perseroan juga bekerja sama dengan penyedia asuransi swasta terkemuka untuk memberikan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Seluruh premi atas program asuransi tambahan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Perseroan sebagai bagian dari komitmen terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan yang lebih optimal, Perseroan menyediakan Asuransi Kesehatan Simas Sehat Corporate dari Sinarmas yang mencakup berbagai

Thus, through guidelines, safety infrastructure, health protection and regular facility maintenance, the Company's OHS management system is designed to ensure that every employee can work in a safe, healthy and secure environment, in line with the Company's commitment to sustainability and employee well-being.

HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND INCIDENT INVESTIGATION [GRI 403-2]

The Company implements an OHS hazard identification and risk assessment process tailored to the characteristics of the Company's office-based operations. This process is conducted periodically by Premises & General Affairs Department to ensure that all work areas meet the safety standards and are free from potential hazards that could harm employee and customer health or safety.

Hazard identification includes an assessment of ergonomic risks, workspace conditions, potential fire hazards, office equipment conditions, electrical risks and general safety risks in office buildings. Furthermore, the Company also considers non-physical risks such as workload, stress and fatigue. The findings from this process are used as the basis for establishing preventative and control measures, including ergonomic workspace design, fire extinguisher maintenance, clear evacuation routes and dissemination of safety procedures within office environment.

As part of OHS mitigation efforts, the Company conducts routine inspections of work areas, safety facilities, and building systems, and ensures that all employees receive social security protection through the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) in accordance with regulations. With this approach, the Company ensures that the hazard identification and mitigation processes are carried out consistently and contribute to the creation of a safe, healthy, and productive work environment for all employees.

OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES [GRI 403-3]

The Company strives to improve the health of its employees by providing protection through occupational health insurance programs. In addition to participation in the mandatory health insurance program, namely BPJS Kesehatan, the Company also collaborates with leading private insurance providers to provide additional protection that is more comprehensive and tailored to the needs of employees. All premiums for these additional insurance programs are fully covered by the Company as part of its commitment to the welfare of its workforce.

In order to provide optimal health protection, the Company provides Simas Sehat Corporate Health Insurance from Sinarmas, which covers various benefits, including: (1)

manfaat, antara lain: (1) jaminan rawat inap, (2) jaminan rawat jalan, (3) jaminan pemeriksaan dan penggantian kacamata serta (4) jaminan persalinan. Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung kesehatan dan produktivitas karyawan secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan kondusif.

Disamping itu, Perseroan juga mendaftarkan seluruh karyawan dalam program asuransi nasional pemerintah Indonesia, BPJS Kesehatan. Skema pembayaran premi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 1% dari pendapatan ditanggung oleh karyawan dan 4% sisanya ditanggung oleh Perseroan.

PARTISIPASI, KONSULTASI DAN KOMUNIKASI PEKERJA TENTANG K3 [GRI 403-4]

Perseroan melibatkan karyawan dalam penerapan K3 melalui sosialisasi mengenai prosedur keselamatan, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan darurat yang disampaikan melalui pertemuan internal serta koordinasi dengan pengelola gedung.

Karyawan dapat menyampaikan masukan atau laporan terkait kondisi keselamatan melalui atasan, Divisi Human Capital, maupun saluran pelaporan lainnya, termasuk mekanisme *Whistleblowing System*. Setiap masukan dan laporan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan atas kondisi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.

PELATIHAN PEKERJA MENGENAI K3 [GRI 403-5]

Perseroan memfasilitasi penyampaian informasi dan sosialisasi terkait prosedur keselamatan gedung, jalur evakuasi dan penggunaan fasilitas darurat sebagai dasar pemahaman K3 bagi seluruh karyawan. Pelatihan K3 formal akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan perusahaan. Di tahun 2025, Perseroan telah melakukan pelatihan K3 sebanyak 6 (enam) kali untuk karyawan secara daring dan luring.

PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN PEKERJA [GRI 403-6]

Perseroan melaksanakan berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan kesehatan karyawan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Inisiatif tersebut diarahkan untuk:

1. Menurunkan risiko dan insiden penyakit akibat kerja;
2. Mengurangi tingkat absensi yang disebabkan oleh masalah kesehatan;
3. Melindungi karyawan dari risiko cedera, penyakit akibat kerja serta potensi bahaya selama proses kerja; dan
4. Mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman melalui penggunaan peralatan kerja yang aman dan ramah lingkungan.

hospitalization coverage, (2) outpatient coverage, (3) coverage for eye examinations and eyeglass replacement and (4) childbirth coverage. This facility is expected to support the health and productivity of employees on an ongoing basis, while creating a healthier and more conducive work environment.

In addition, the Company also registers all employees in the Indonesian government's national insurance program, BPJS Kesehatan. The premium payment scheme is carried out in accordance with applicable regulations, namely 1% of income is borne by employees and the remaining 4% is borne by the Company.

EMPLOYEE PARTICIPATION, CONSULTATION AND COMMUNICATION ON OHS [GRI 403-4]

The Company involves employees in OHS implementation through the disseminations of information on safety procedures, evacuation routes and emergency preparedness, delivered through internal meetings and coordination with building managers.

Employees can submit input or reports regarding safety conditions through their supervisors, Human Capital Division, or other reporting channels, including Whistleblowing System. All feedback and reports are followed up as an effort to continuously improve health and safety conditions in the workplace.

EMPLOYEE TRAINING ON OHS [GRI 403-5]

The Company facilitates the delivery of information and dissemination on building safety procedures, evacuation routes and emergency facility use as the basis for understanding OHS for all employees. Formal OHS training will be tailored to operational needs and company policies. As of 2025, the Company conducted 6 (six) in-person and offline OHS training sessions for employees.

IMPROVING THE QUALITY OF EMPLOYEE HEALTH [GRI 403-6]

The Company implements various strategic measures focused on improving employees' health as an effort to create a productive and sustainable work environment. These initiatives are aimed at:

1. Reducing the risk and incidence of occupational diseases;
2. Lowering the rate of absences due to health issues;
3. Protecting employees from risks of injury, occupational diseases, and potential hazards during work process; and
4. Creating a healthy and comfortable work environment through the use of safe and eco-friendly equipment.

Sebagai bentuk implementasi dari strategi tersebut, sepanjang tahun 2025 Perseroan menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental serta pemahaman kesehatan karyawan, antara lain:

- *Medical Check-Up* untuk Level Manajerial dan Mini *Medical Check-Up* untuk Level Non-Manajerial;
- Layanan Konsultasi Psikologis dan Konsultasi Nutrisi;
- Seminar Kesehatan "Hernia Nukleus Pulposus (Saraf Kejepit): Panduan Hidup Sehat dan Rekomendasi Olahraga";
- Kelas "Anti Jompo: *Stretch from Desk*";
- Program *Healthy Lifestyle Challenge*;
- Peringatan Hari Olahraga Nasional; dan
- Kegiatan *Sport Clubs* di *Head Office*.

As a form of implementing this strategy throughout 2025, the Company held various programs and activities aimed at improving employees' physical and mental conditions and understanding of health, among others:

- Medical Check-Up for Managerial Level and Mini Medical Check-Up for Non-Managerial Level;
- Psychological Consultation and Nutrition Consultation Services;
- Health Seminar "Herniated Nucleus Pulposus (Nerve Compression): A Guide to Healthy Living and Exercise Recommendations";
- "Feel Younger: Stretch from Desk" Class;
- Healthy Lifestyle Challenge Program;
- Commemoration of National Sport Day; and
- Sport Clubs Activities at Head Office.





Kegiatan *Sport Clubs* di *Head Office* | Sport Clubs Activities at Head Office

Program *Healthy Lifestyle Challenge;*
Healthy Lifestyle Challenge Program

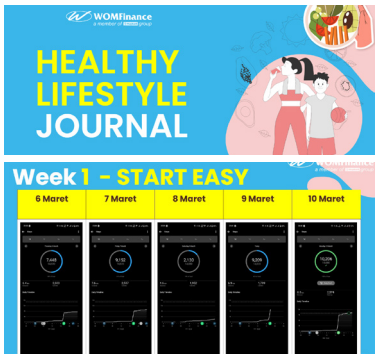

Kelas "Anti Jompo: *Stretch from Desk*"
"Feel Younger: Stretch from Desk" Class



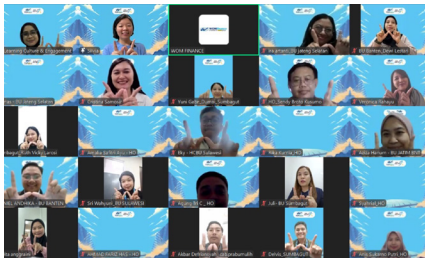

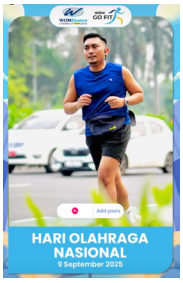

Peringatan Hari Olahraga Nasional
Commemoration of National Sport Day

PENCEGAHAN DAN MITIGASI DAMPAK DARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [GRI 403-7]

Perseroan mengelola seluruh aktivitas usaha dengan mempertimbangkan potensi dampak terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, khususnya karena mayoritas pekerjaan dilakukan di lingkungan perkantoran. Risiko utama yang berkaitan dengan aktivitas usaha meliputi risiko ergonomi, kelelahan akibat penggunaan komputer dalam jangka panjang, risiko kebakaran gedung serta potensi gangguan kesehatan terkait kualitas udara dan kebersihan lingkungan kerja.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan menerapkan berbagai langkah pencegahan, termasuk penyediaan fasilitas kerja yang ergonomis, penataan ruang kerja yang aman serta pemeliharaan rutin infrastruktur gedung melalui kegiatan *pest*

PREVENTION AND MITIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY [GRI 403-7]

The Company manages all of its business activities by considering the potential impacts on employee health and safety, particularly since the majority of work is conducted in office environments. The main risks associated with these business activities include ergonomic risks, fatigue due to prolonged computer use, fire risk in building and potential health problems related to air quality and cleanliness of the working environment.

To mitigate these risks, the Company implements various preventative measures, including providing ergonomic work facilities, arranging safe workspaces and periodic maintenance of building infrastructure through pest control

control, pemeliharaan AC, pencucian karpet dan kursi serta, pemeriksaan peralatan keselamatan seperti APAR dan jalur evakuasi. Perseroan juga bekerja sama dengan pengelola gedung untuk memastikan kelayakan fasilitas keselamatan, kesiapsiagaan bencana dan pemenuhan standar kesehatan lingkungan.

Selain itu, Perseroan menyediakan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta asuransi tambahan untuk mendukung pencegahan dan penanganan risiko kesehatan. Informasi mengenai prosedur keselamatan dan evakuasi disosialisasikan kepada karyawan guna memastikan setiap individu memahami langkah yang harus dilakukan dalam situasi darurat.

Melalui pendekatan ini, Perseroan memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berlangsung secara aman, sekaligus meminimalkan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan.

PEKERJA YANG DICAKUP SISTEM MANAJEMEN K3 [GRI 403-8]

Seluruh karyawan Perseroan tercakup dalam sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan di lingkungan kerja Perseroan. Sistem ini mencakup prosedur keselamatan gedung, kesiapsiagaan darurat, pemeliharaan fasilitas keselamatan serta kebijakan kesehatan dan keamanan yang berlaku bagi semua unit kerja, baik di kantor pusat maupun jaringan kantor cabang.

Perseroan memastikan bahwa seluruh pekerja, seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, atau teknisi gedung yang disediakan oleh pihak ketiga, berada di bawah perlindungan standar keselamatan yang sama melalui kebijakan pengelolaan vendor dan persyaratan K3 yang ditetapkan. Adapun akses terhadap fasilitas keselamatan gedung, jalur evakuasi dan prosedur darurat juga berlaku bagi seluruh individu yang beraktivitas di area kerja Perseroan.

Dengan cakupan ini, seluruh pekerja yang berada di lokasi operasional perseroan, baik karyawan maupun pihak ketiga, mendapatkan perlindungan yang konsisten sesuai standar keselamatan yang berlaku.

KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA [GRI 403-9] [GRI 403-10] [IDX S-06]

Sepanjang tahun pelaporan, Perseroan tidak mencatat adanya insiden kecelakaan kerja maupun kasus fatalitas yang dialami oleh karyawan sebagai akibat dari aktivitas kerja. Kondisi ini mencerminkan karakteristik kegiatan operasional Perseroan yang didominasi oleh aktivitas perkantoran dengan tingkat risiko keselamatan yang relatif rendah serta didukung oleh penerapan prosedur kerja yang memperhatikan aspek

implementation, air conditioning maintenance, carpet and chair cleaning and inspections of safety equipment such as fire extinguishers and evacuation routes. The Company also cooperates with the building managers to ensure the adequacy of safety facilities, disaster preparedness and compliance with environmental health standards.

Furthermore, the Company provides health coverage through BPJS Health, BPJS Employment and supplementary insurance to support the prevention and management of health risks. Information regarding safety and evacuation procedures is disseminated to employees to ensure that everyone understands the steps to take in an emergency.

Through this approach, the Company ensures that all business activities are conducted safely while minimizing the impact on employee health and safety.

EMPLOYEES COVERED BY OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) MANAGEMENT SYSTEM [GRI 403-8]

All company employees are covered by the Occupational Health and Safety (OHS) management system implemented in the Company's work environment. This system covers building safety procedures, emergency preparedness, safety facility maintenance and health and safety policies applicable to all units, both at head office and branch offices' network.

The Company ensures that all workers, such as security officers, cleaning staff, or building technicians provided by third parties, are covered by the same safety standards through vendor management policies and established occupational health and safety requirements. Access to building safety facilities, evacuation routes, and emergency procedures also applies to all individuals working in the Company's work areas.

With this coverage, all workers at the company's operational locations, both employees and third parties, receive consistent protection in accordance with applicable safety standards.

WORKPLACE ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES [GRI 403-9] [GRI 403-10] [IDX S-06]

Throughout the reporting year, the Company did not record any work accidents or fatalities experienced by employees as a result of work activities. This condition reflects the characteristics of the Company's operational activities, which are dominated by office activities with a relatively low level of safety risk and are supported by the implementation of work procedures that take into account occupational safety and

keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan tetap melakukan pemantauan terhadap potensi risiko keselamatan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas mobilitas karyawan, penggunaan fasilitas kantor serta kegiatan operasional di jaringan layanan.

Selain itu, Perseroan juga tidak mencatat adanya kasus penyakit akibat kerja sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh karyawan bekerja di lingkungan kerja yang tidak terpapar bahaya fisik, kimia, maupun biologis yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. Meskipun demikian, Perseroan tetap berupaya menjaga kondisi kesehatan karyawan melalui penerapan standar kebersihan lingkungan kerja, pengaturan ruang kerja yang ergonomis serta penyediaan akses terhadap layanan kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan produktivitas dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat secara berkelanjutan.

health aspects in accordance with applicable regulations. The Company continues to monitor potential safety risks, particularly those related to employee mobility, use of office facilities and operational activities in the service network.

In addition, the Company did not record any cases of occupational diseases as defined in applicable laws and regulations. All employees work in a work environment that is not exposed to physical, chemical, or biological hazards that have the potential to cause occupational diseases. Nevertheless, the Company continues to strive to maintain the health of its employees through the implementation of workplace hygiene standards, ergonomic workspace arrangements and the provision of access to health services. These efforts are carried out to ensure the continuity of productivity and support the creation of a safe and healthy work environment on an ongoing basis.



PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PEGAWAI

Perseroan meyakini bahwa pengembangan kompetensi karyawan merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan ekspansi bisnis melalui peningkatan daya saing. Oleh karena itu, Perseroan secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan guna memastikan karyawan mencapai standar kompetensi yang ditetapkan serta mampu menyesuaikan keterampilannya dengan kebutuhan perusahaan. Melalui program-program tersebut, Perseroan berupaya mendorong seluruh karyawan untuk terus meningkatkan kemampuan yang akan menunjang kemajuan karier mereka di masa mendatang.

Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan telah mengembangkan *Learning Framework* yang komprehensif, mencakup program wajib bagi karyawan baru yaitu "WOM On Boarding Program". Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan karyawan baru dengan perusahaan, menanamkan nilai-nilai inti Perseroan serta memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab masing-masing posisi. Sebagai kelanjutan, Perseroan juga menyediakan pelatihan lanjutan yang berfokus pada pengembangan keterampilan fungsional (*Functional Skills*) dan perilaku (*Behavioural Skills*). Selain itu, terdapat pula program pengembangan seperti *Key Position Development Program, Management Trainee*, WOM *Managerial Program* dan WOM *Senior Managerial Program* yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan menempati posisi yang lebih tinggi dalam jenjang karier mereka.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengembangan kompetensi, Perseroan telah menerapkan *Learning Management System* (LMS) yang dirancang untuk mempermudah pelaksanaan pelatihan sekaligus memantau perkembangan karyawan secara menyeluruh. Sistem ini mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif serta pengelolaan data pelatihan yang lebih sistematis. Perseroan terus menerapkan berbagai metode pembelajaran, antara lain *Self Learning*, *Lecturing*, *Video Micro Learning*, *Focus Group Discussion*, *On Job Training*, *Team Building* serta *Coaching and Mentoring*. Untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta, Perseroan juga mengadopsi konsep *gamification training* agar setiap program pelatihan lebih menarik dan interaktif. [GRI 3-3]

Selama tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan total 332 program dengan 603 batch pelatihan yang melibatkan 68.581 peserta dengan rata-rata jam pelatihan sebesar 10,91 jam per karyawan. Rincian terkait kegiatan pengembangan kompetensi, termasuk rata-rata jam pelatihan berdasarkan jenis kelamin dan jenjang jabatan, disajikan pada grafis berikut:

EMPLOYEE TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company believes that employee competency development is a key factor in driving business growth and expansion by increasing competitiveness. Therefore, the Company consistently conducts various training and development programs to ensure its employees meet the established competency standards and are able to align their skills with the Company's needs. Through such programs, the Company strives to encourage all employees to continuously improve their skills, which will support their future career advancement.

To support this matter, the Company has developed a comprehensive Learning Framework, including mandatory program for new employees, "WOM Onboarding Program." This program aims to strengthen new employee engagement with the Company, instill the Company's core values and provide a deeper understanding of each position's responsibilities. As a follow-up, the Company also provides advanced training focused on developing functional skills and behavioral skills. Furthermore, there are also development programs such as the Key Position Development Program, Management Trainee, WOM Managerial Program and WOM Senior Managerial Program, which are designed to prepare employees to take on higher positions in their career paths.

To increase efficiency in competency development, the Company has implemented a Learning Management System (LMS) designed to streamline training implementation and monitor employee progress comprehensively. This system supports a more effective learning process and more systematic training data management. The Company continues to implement various learning methods, including Self Learning, Lecturing, Video Micro Learning, Focus Group Discussion, On Job Training, Team Building, as well as Coaching and Mentoring. To increase participant participation and motivation, the Company has also adopted a gamification training concept to make each training program more engaging and interactive. [GRI 3-3]

During 2025, the Company implemented a total of 332 programs with 603 training batches involving 68,581 participants with an average of 10.91 training hours per employee. Details related to competency development activities, including the average number of training hours based on gender and job level, are presented in the following graphic:

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2025 [OJK F.22] [IDX S-05] [GRI 404-1, 404-2, 404-3]

HR DEVELOPMENT PROGRAMS IN 2025 [OJK F.22] [IDX S-05] [GRI 404-1, 404-2, 404-3]

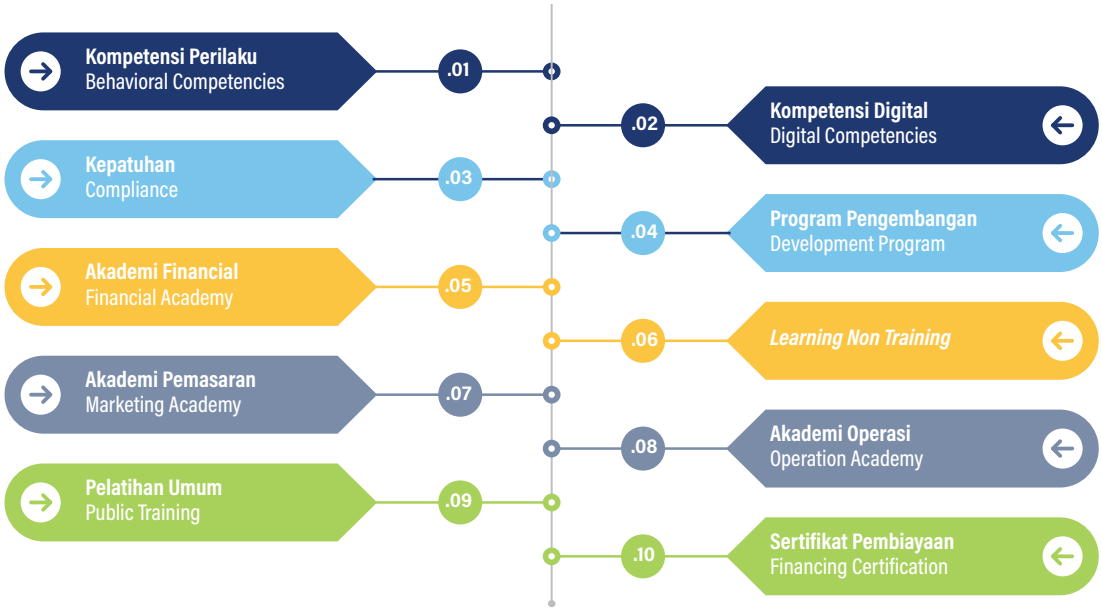

Rata-rata Jam Pelatihan
Average Training Hours

(Jam per Karyawan)
(Hours per Employee)

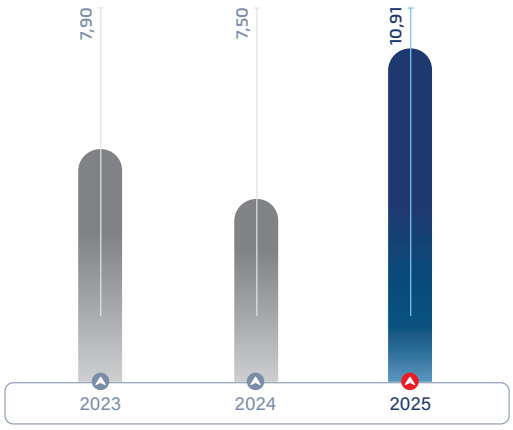

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin
Average Training Hours by Gender

(Jam per Karyawan)
(Hours per Employee)

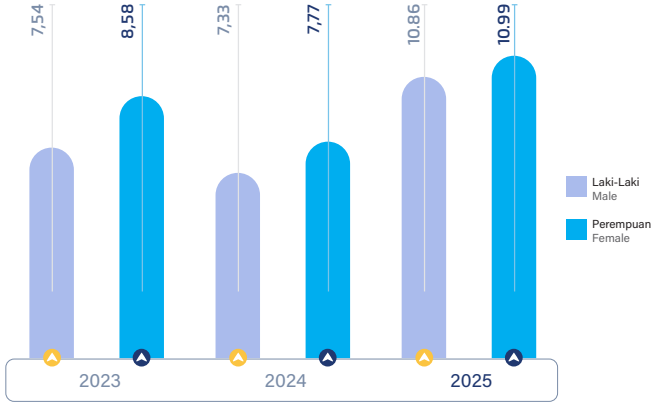

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Jabatan
Average Training Hours by Position

(Jam per Karyawan)
(Hours per Employee)



Catatan : Data rata-rata jam pelatihan mencakup karyawan Tetap, Kontrak dan Percobaan
Notes : Data of average training hours includes permanent, contract and probationary employees

Pada tahun 2025, Perseroan merealisasikan dana sebesar Rp10,5 miliar untuk kegiatan Pengembangan SDM dalam hal Pendidikan, Pelatihan, Program Peningkatan Kompetensi lainnya.

PENILAIAN KINERJA, KOMPETENSI DAN JENJANG KARIR [GRI 404-3]

Penilaian kinerja karyawan dilaksanakan secara berkala pada seluruh jenjang jabatan dengan menerapkan pendekatan komunikasi dua arah antara karyawan dan atasan langsung. Dalam proses ini, Direktorat Human Capital berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk memastikan bahwa sasaran dan strategi Perseroan selaras dengan *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditetapkan bagi setiap unit kerja maupun individu, yang kemudian dijabarkan dalam *Individual Performance Planning* (IPP).

Selain itu, Perseroan melaksanakan penilaian kinerja pada pertengahan dan akhir tahun, dimulai dengan *self-appraisal* yang dilanjutkan dengan proses evaluasi berjenjang. Proses ini dilakukan melalui platform *myW2U* yang mendukung pengisian penilaian kinerja secara daring melalui *Performance Appraisal Online*. Dalam hal pengukuran kompetensi, Karyawan dituntut secara mandiri untuk melakukan pengisian Kompetensi pada proses penilaian kinerja. Selain itu, Perseroan juga menerapkan metode *Assessment Center* dengan melibatkan *Assessor Internal*, yang menilai karyawan dari level supervisor hingga posisi manajerial puncak seperti Kepala Divisi dan Direksi. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan tiga klaster kompetensi utama sebagai berikut:

1. **Kompetensi Inti**
   Kompetensi Inti adalah kompetensi yang mencerminkan nilai-nilai budaya, spirit dan kekhasan perseroan yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh seluruh jajaran, tanpa terkecuali. Kompetensi Inti Perseroan meliputi:
   a. *Integrity* (Integritas)
   b. *Teamwork* (Kerjasama)
   c. *Tenacity* (Kegigihan)
   d. *Improvement* (Perbaikan)
   e. *Service* (Layanan)
2. **Kompetensi Manajerial**
   Kompetensi Manajerial adalah kompetensi yang kritikal bagi karyawan yang memiliki anggota tim dengan objektif mencangkup pengembangan tim, menjamin pencapaian sasaran tim kerja dengan efektif, tepat waktu dan tepat sasaran. Kompetensi Manajerial Perseroan meliputi:
   a. *Planning & Organizing*
   b. *Leading Team*
   c. *Building Team*
   d. *Decision Making*
   e. *Analytical Thinking*
3. **Kompetensi Fungsional**
   Kompetensi Fungsional adalah kompetensi khusus untuk menjawab tantangan bidang kerja tertentu. Kompetensi fungsional dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kompetensi non teknis dan kompetensi teknis.

In 2025, the Company realized funds amounting to Rp10.5 billion for HR Development activities in terms of Education, Training and other Competency Improvement Programs.

PERFORMANCE ASSESSMENT, COMPETENCY AND CAREER PATH [GRI 404-3]

Employee performance assessments are conducted periodically at all levels of positions, implementing a two-way communication approach between employees and their direct supervisors. In this process, the Human Capital Directorate coordinates with relevant units to ensure that the Company's goals and strategies are aligned with the Key Performance Indicators (KPIs) established for each unit and individual, which are then outlined in the Individual Performance Planning (IPP).

Furthermore, the Company conducts performance assessments mid-year and at the end of the year, beginning with a self-appraisal, followed by a tiered evaluation process. This process is conducted through myW2U platform, which supports online completion of performance assessment through Performance Appraisal Online. In terms of competency measurement, employees are required to independently fill in their competencies during the performance appraisal process. In addition, the Company also implements the Assessment Center method by involving Internal Assessors, who assess employees from supervisor level to top managerial positions such as Division Heads and Board of Directors. This assessment is based on three main competency clusters, as follows:

1. **Core Competencies**
   Core Competencies are those that reflect the Company's cultural values, spirit and uniqueness, which must be possessed and developed by all personnel without exception. The Company's Core Competencies include:
   a. Integrity
   b. Teamwork
   c. Tenacity
   d. Improvement
   e. Service
2. **Managerial Competencies**
   Managerial Competencies are critical for employees who lead teams, with objectives focused on team development, ensuring an effective, timely and on target achievement of team goals. The Company's Managerial Competencies include:
   a. Planning & Organizing
   b. Leading Teams
   c. Building Team
   d. Decision Making
   e. Analytical Thinking
3. **Functional Competencies**
   Functional Competencies are specific to addressing challenges within particular fields of work. These competencies are divided into 2 (two) categories, namely non-technical competencies and technical competencies.



Pengukuran kompetensi ini dilaksanakan untuk menilai keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan guna mendukung keberhasilan karyawan dalam menjalankan perannya saat ini, sekaligus memproyeksikan kesiapan mereka untuk menempati posisi di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, melalui proses ini Perseroan dapat mengidentifikasi keunggulan dan area yang perlu dikembangkan dari setiap karyawan, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan program pengembangan kompetensi.

This competency assessment is conducted to evaluate the skills and abilities needed to support employees' success in their current roles, while also projecting their readiness to occupy higher-level positions. Furthermore, through this process, the Company can identify each employee's strengths and areas for development, which then serve as the basis for developing competency development programs.

Hasil dari penilaian kinerja dan kompetensi memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan karier, penetapan jenjang karier serta kebijakan remunerasi bagi karyawan. Setiap karyawan yang akan mendapatkan promosi telah mengikuti program pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan mereka dalam menempati posisi baru, termasuk bagi mereka yang akan menduduki jabatan manajerial puncak. Untuk mendukung transisi yang optimal, Perseroan juga menyediakan program pra-jabatan khusus guna mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab baru dan memastikan kelancaran adaptasi di posisi yang lebih tinggi.

The results of performance and competency evaluations serve a crucial role in determining career development direction, career progression and remuneration policy for employees. All employees to be promoted has participated in a development program to enhance their skills and readiness for their new position, including those advancing to top management positions. To support an optimal transition, the Company also provides a special pre-assignment program to prepare employees for new responsibilities and ensure a smooth adaptation to higher-level positions.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2026

HR DEVELOPMENT PLAN IN 2026

Perseroan meyakini bahwa pembentukan sumber daya manusia berkualitas unggul memerlukan proses yang berkesinambungan serta terarah. Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian mendalam atas capaian program pengembangan SDM pada tahun pelaporan, Perseroan telah menyusun rencana pengembangan SDM untuk tahun 2026. Rencana tersebut mencakup *Goals*, *Key Initiatives* dan strategi utama yang akan menjadi acuan dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja karyawan di tahun mendatang, sebagaimana diuraikan berikut:

The Company believes that developing high-quality human resources requires a continuous and focused process. Based on the evaluation and in-depth review of the achievements of its HR development program in the reporting year, the Company has prepared HR development plan for 2026. This plan includes Goals, Key Initiatives and key strategies that will serve as a reference for improving employee competency and performance in the coming year, as outlined below:

Sumber daya manusia merujuk kepada setiap individu yang terlibat dalam aktivitas kerja yang mendukung tercapainya tujuan organisasi, yang berkontribusi dengan keterampilan, kompetensi dan pengetahuan di dalam suatu organisasi. SDM mencakup seluruh karyawan dari berbagai jenjang organisasi, mulai dari staf hingga manajemen puncak. Di dalam perusahaan, SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas tetapi juga sebagai sumber inovasi, kreativitas dan pertumbuhan perusahaan.

Human resources refer to every individual involved in work activities that support the achievement of organizational goals, contributing skills, competencies and knowledge within an organization. HR encompasses all employees at all levels of the organization, from staff to top management. Within a company, HR plays a role not only as duty implementers but also as a source of innovation, creativity and growth.

Sebagai aset penting perusahaan, sumber daya manusia berhak untuk mendapatkan tahapan pengalaman *(employee journey)* yang dilalui oleh seorang karyawan selama masa kerjanya di sebuah perusahaan, mulai dari proses rekrutmen hingga saat ia meninggalkan perusahaan, termasuk semua interaksi dan momen penting yang mereka alami. Konsep ini mencakup berbagai tahapan seperti orientasi, pelatihan, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan karier, keterlibatan dan retensi karyawan, yang semuanya berkontribusi pada budaya perusahaan yang positif dan kinerja karyawan.

As a vital company asset, human resources are entitled to experience employee journey throughout their years of services at a company, from recruitment to resignation, including all interactions and significant moments. This concept encompasses various stages such as orientation, training, continuing education and career development, employee engagement and retention, all of which contribute to a positive company culture and employee performance.

Dengan dilandasi *Core Value* Perseroan TIGER yang terdiri dari: Team Work, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency and Relationship Building, perusahaan akan terus berkomitmen untuk menjalankan program pengembangan SDM yang akan dituangkan dalam program Pengembangan dan Pelatihan SDM tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pelatihan Sumber Daya Manusia
   Perseroan mengembangkan pembelajaran berbasis digital melalui Learning Management System (LMS) untuk mendukung peningkatan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Program pelatihan yang difasilitasi melalui LMS meliputi:
   a. WOM On Boarding (WOB)
      Program orientasi wajib bagi karyawan baru untuk menyelaraskan pemahaman terkait perusahaan, proses bisnis dan peran kerja.
   b. *Functional Training Program*
      Pelatihan peningkatan keterampilan fungsi Marketing, Operation, dan Risk, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan regulator.
   c. *Behavioral Competency Training Program*
      Pengembangan perilaku, keterampilan dan sikap kerja guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan.
   d. *Development Program*
      Program pengembangan talenta untuk mempersiapkan *successor* melalui metode *self-learning*, pelatihan kelas dan *on-the-job training*.
   e. Sertifikasi Program
      » Sertifikasi Keahlian Bidang Pembiayaan
      Guna memenuhi ketentuan Pasal 14 POJK No. 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Perseroan melaksanakan 4 (empat) jenis sertifikasi berikut:
         - Sertifikasi Ahli Pembiayaan - untuk jajaran anggota Direksi.
         - Sertifikasi Dasar Pembiayaan – untuk jajaran anggota Dewan Komisaris.
         - Sertifikasi Dasar Pembiayaan – untuk karyawan Perseroan yang menduduki jabatan posisi manajerial sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
         - Sertifikasi Profesi Penagihan, yaitu sertifikasi profesi yang diterapkan pada pegawai dan/atau tenaga alih daya yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan.

      » Sertifikasi Manajemen Risiko
      Sertifikasi yang bertujuan meningkatkan kualitas Manajemen Risiko, anggota Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan yang membawahkan fungsi manajemen risiko memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Based on TIGER Company Core Values of Teamwork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency and Relationship Building, the Company remains committed to implementing HR development programs, which will be outlined in the 2026 HR Development and Training Program as follows:

1. Human Resources Training
   The Company continues to develop digital platform-based learning media to support the HR training process. The Learning Management System (LMS) developed will facilitate the following training programs:
   a. WOM On Boarding (WOB)
      Mandatory orientation program for new employees to align understanding of the company, business processes, and job roles.
   b. Functional Training Program
      Functional skills enhancement training in Marketing, Operations, and Risk, including compliance with regulatory policies.
   c. Behavioral Competency Training Program
      Development of behavior, skills, and work attitudes to improve employee effectiveness and productivity.
   d. Development Program
      Training programs aimed at developing talent-based employees to prepare them to become successors, using Self Learning, Lecturing and On-Job methods.
   e. Certification Program
      » Financing Expertise Certification
      To comply with Article 14 of POJK No. 43 of 2024 concerning the Development of Human Resources Quality in Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions. the Company implements the following four types of certification:
         - Financing Expert Certification - for members of the Board of Directors.
         - Basic Financing Certification – for members of the Board of Commissioners.
         - Basic Financing Certification – for Company employees holding managerial positions up to one level below the Board of Directors.
         - Collection Professional Certification, a professional certification applied to employees and/or outsourced personnel who handle collateral collection and execution functions.

      » Risk Management Certification
      Certification aimed at improving the quality of Risk Management, Members of the Board of Directors and officials one (1) level below members of the Board of Directors of Financing Companies who oversee risk management functions must have a certificate of expertise in risk management from an LSP registered with the Financial Services Authority.

f. *Learning non training program*
Program pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan budaya *Learning & Share* yang dilaksanakan dengan beberapa metode pelatihan seperti Seminar, *Workshop, Podcast dan Talkshow* yang akan dikemas dalam beberapa series Program.

g. *Culture & Employee Engagement* Program
Sebagai bagian dalam *employee journey,* Perseroan melaksanakan program Internalisasi Budaya dan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan emosional, komitmen dan motivasi karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan.

2. Pendidikan Sumber Daya Manusia
Pembelajaran berkelanjutan merupakan salah satu fondasi pada pertumbuhan karir karyawan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Terkait pembelajaran berkelanjutan ini, perusahaan telah menyelenggarakan program beasiswa di bidang pendidikan sebagai bagian dari upaya retensi karyawan serta mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Saat ini, perusahaan telah menjalin kerja sama dengan universitas-universitas ternama untuk jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) di berbagai jurusan. Program beasiswa ini tidak hanya ditujukan bagi karyawan, tetapi juga terbuka bagi anggota keluarga karyawan. Pada program pendidikan sumber daya manusia tahun 2026, perusahaan akan membuka peluang baru dengan menghadirkan program beasiswa untuk jurusan dan universitas lainnya sehingga memberikan pilihan beasiswa pendidikan ke karyawan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program manajemen talenta merupakan sebuah proses dalam menarik, menyiapkan dan mengembangkan karyawan bertalenta sehingga siap untuk menjadi suksesor yang dapat menempati posisi-posisi kritikal di perusahaan guna mendukung pertumbuhan organisasi. Aktivitas *talent identification* bertujuan untuk melakukan proses identifikasi dan seleksi internal guna memilih karyawan yang tepat sesuai dengan kriteria potensi, kompetensi dan performance. Karyawan yang telah diidentifikasi tersebut akan masuk ke dalam *Talent Pool*. Perseroan mengembangkan dan mengimplementasikan *Talent Pool* dimana suksesor-suksesor di level supervisor sampai dengan senior manager dapat diidentifikasi dan dipersiapkan untuk posisi yang lebih tinggi di perusahaan.

f. Learning non-training program
A training program implemented to enhance Learning & Sharing culture, implemented through several training methods such as seminars, workshops, podcasts and talk shows, which will be packaged into several series of programs.

g. Culture & Employee Engagement Program
As part of employee journey, the Company implements Culture Internalization program and a series of activities designed to increase employee emotional engagement, commitment and motivation towards their work and the Company.

2. Human Resources Education
Continuous learning is one of the foundations of employee career growth and the Company's long-term success. In relation to this continuous learning, the Company has implemented educational scholarship program to foster its employee retention efforts and support the development of skills and knowledge. Currently, the Company has established partnerships with leading universities for Bachelor's and Master's degrees in various majors. This scholarship program is not only intended for employees but also open to their family members. In the 2026 human resources education program, the Company will open new opportunities by introducing scholarship programs for other majors and universities, providing employees with educational scholarship options.

3. Human Resources Development
Talent management program is a process of attracting, preparing and developing talented employees for them to be ready to become successors to critical positions within the Company in order to support organizational growth. Talent identification activities aim to conduct an internal identification and selection process to select the right employees based on potential, competency and performance criteria. These identified employees will then be added to the Talent Pool. The Company has developed and implemented Talent Pool in which successors from supervisor to senior manager levels can be identified and prepared for higher-level positions within the Company.



ASPEK MASYARAKAT

Perseroan berupaya untuk memberikan kontribusi sosial yang bernilai bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui program TJSL yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan. Upaya ini merupakan bagian dari pendekatan Perseroan dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan komunitas lokal sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan program TJSL dilakukan oleh Departemen Corporate Social and ESG yang berada di bawah pengawasan serta bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaannya kepada Divisi Financial Planning and Investor Relation. Unit ini bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat dan prioritas sosial yang relevan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas lokal dan mitra sosial untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

Evaluasi terhadap program dilakukan melalui pemantauan hasil kegiatan dan keterlibatan peserta sebagai dasar penyempurnaan pada tahun berikutnya. Pendekatan ini memastikan bahwa kontribusi sosial Perseroan tetap relevan, berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk nyata dari komitmen Perseroan dalam menerapkan program TJSL, Perseroan telah menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang dirancang secara terstruktur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku. Setiap inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan disusun untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, sekaligus memperkuat peran Perseroan dalam menciptakan dampak sosial yang positif.

Pelaksanaan Bantuan Sosial Perseroan diatur secara khusus melalui kebijakan internal yang tertuang dalam Surat Kebijakan No. 011/SK/OPP/01-24 tentang Pelaksanaan Kegiatan CSR di Kantor Pusat, Business Unit dan Cabang. Dengan berlandaskan pada kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, Perseroan mengintegrasikan komitmen terhadap TPB ke dalam pelaksanaan TJSL Perseroan. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Perseroan telah menjalankan berbagai program TJSL yang dirancang secara terstruktur, sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan internal yang berlaku. [GRI 3-3]

COMMUNITY ASPECT

The Company strives to provide valuable social contributions to communities surrounding its operational areas through Community empowerment, education, health, social and environmental programs. These efforts are part of the Company's approach to maintaining harmonious relationships with local communities while supporting sustainable development.

Community programs CSR are managed by the Corporate Social and ESG Department, which is supervised by and responsible for reporting on their implementation to the Financial Planning and Investor Relation Division. This unit is responsible for planning, implementing and monitoring activities based on the identification of community needs and relevant social priorities. In its implementation, the Company collaborates with educational institutions, local communities and social partners to ensure that the program is implemented on target.

The programs are evaluated by monitoring activity results and participant engagement as a basis for improvements in the following year. This approach ensures that the Company's social contributions remain relevant, sustainable and positively impact the surrounding community. As a tangible form of the Company's commitment to implementing the CSR program, the Company has carried out various corporate social responsibility programs that are structured in accordance with applicable laws regulations and internal policies. Each corporate social responsibility initiative is designed to provide sustainable benefits to the community and the surrounding environment, while strengthening the Company's role in creating a positive social impact.

The implementation of Corporate Social Assistance is specifically regulated through internal policies as outlined in Policy No. 011/SK/OPP/01-24 concerning the Implementation of CSR Activities at the Head Office, Business Units, and Branches. Based on this established policy, the Company integrates its commitment to SDG into the implementation of corporate social responsibility. As a concrete manifestation of this commitment, the Company has implemented various CSR programs, structured in accordance with applicable laws and internal policies. [GRI 3-3]



OPERASI YANG MELIBATKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL [GRI 413-1]

Perseroan menjalankan kegiatan usaha melalui jaringan kantor yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Keterlibatan dengan masyarakat lokal diwujudkan antara lain melalui program TJSL, kegiatan literasi dan inklusi keuangan serta dukungan terhadap aktivitas sosial yang mendorong peningkatan pengetahuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan program dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari kantor cabang dan pemangku kepentingan setempat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan sekolah, komunitas, lembaga sosial, maupun mitra lokal lainnya untuk memastikan bahwa program yang dijalankan dapat diakses oleh kelompok sasaran dan memberikan manfaat yang terukur. Informasi mengenai sebaran lokasi operasional yang terlibat dalam program pengembangan masyarakat serta jenis kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada bagian realisasi pelaksanaan TJSL dalam laporan ini.

OPERATIONS INVOLVING LOCAL COMMUNITIES [GRI 413-1]

The Company conducts its business activities through a network of offices spread across various regions in Indonesia. Engagement with local communities is realized through CSR programs, financial literacy and inclusion activities, and support for social activities that promote knowledge, independence, and community welfare. Programs are planned by considering input from branch offices and local stakeholders, ensuring that activities are aligned with each region's characteristics and needs.

In its implementation, the Company collaborates with schools, communities, social institutions and other local partners to ensure that its programs are accessible to target groups and provide measurable benefits. Information on the distribution of operational locations involved in community development programs and the types of activities carried out is presented in the CSR implementation realization section of this report.

OPERASI YANG MEMILIKI DAMPAK NEGATIF TERHADAP MASYARAKAT LOKAL [OJK F.23] [GRI 413-2]

Seluruh aktivitas operasional Perseroan dilaksanakan di lingkungan perkantoran dan fasilitas layanan yang tidak menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Perseroan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu penggunaan lahan, mempengaruhi kualitas lingkungan, ataupun menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan bagi komunitas di sekitar wilayah operasional.

Meskipun demikian, Perseroan tetap memastikan bahwa setiap kegiatan operasional dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan dan kondisi lingkungan setempat, termasuk kepatuhan terhadap aturan penggunaan bangunan, perizinan dan ketentuan lingkungan yang berlaku. Perseroan juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat atau pihak eksternal yang ingin menyampaikan masukan maupun keluhan terkait keberadaan kantor operasional.

Hingga akhir tahun 2025. Perseroan tidak mencatat adanya dampak negatif material terhadap masyarakat lokal pada periode pelaporan.

OPERATIONS THAT HAVE NEGATIVE IMPACT ON LOCAL COMMUNITIES [OJK F.23] [GRI 413-2]

All Company's operations are conducted in office environments and service facilities that do not have a significant social or environmental impact on local communities. The Company does not engage in activities that could potentially disrupt land use, affect environmental quality, or pose health and safety risks to communities surrounding its operational areas.

Nevertheless, The Company ensures that all operations are conducted with due regard for the comfort and conditions of the local environment, including compliance with building regulations, permits and applicable environmental regulations. The Company also provides communication channels for the public or external parties who wish to submit input or file complaints regarding the location of its operational offices.

Until the end of 2025, The Company did not record any material negative impacts on local communities during the reporting period.

PENGADUAN MASYARAKAT [OJK F.24]

Perseroan mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan dan menangani potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan operasional terhadap masyarakat sekitar. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya kepercayaan pelanggan, meningkatnya risiko kredit macet, penyitaan kendaraan akibat tunggakan pembayaran, hingga spekulasi

PUBLIC COMPLAINTS [OJK F.24]

The Company takes proactive steps to minimize and address potential negative impacts that may arise from its operations on the surrounding community. These impacts can include decreased customer trust, increased risk of non-performing loans, vehicle confiscation due to payment arrears and excessive speculation in motor vehicle financing

berlebihan dalam pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut berpotensi merugikan baik Perseroan maupun masyarakat, sehingga perlu segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat.

Sebagai upaya pencegahan, Perseroan menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat, antara lain melalui telepon, email, situs web, media sosial, WhatsApp, APPK OJK, Lapor Aja!, maupun langsung ke kantor operasional. Pengaduan yang diterima tidak hanya terkait dengan dampak operasional, tetapi juga mencakup dugaan pelanggaran etika, integritas, norma sosial, maupun peraturan yang berpotensi merugikan lingkungan. Melalui mekanisme ini, Perseroan berupaya mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat secara langsung serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk menciptakan kegiatan operasional yang lebih bertanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.

Pada tahun 2025, rincian atau rekap data pengaduan yang tercatat adalah sebagai berikut:

applications. These conditions have the potential to harm both the Company and the community and therefore, need to be immediately identified and addressed appropriately.

As a preventative measure, the Company provides various complaint channels that are easily accessible to the public, including telephone, email, website, social media, WhatsApp, OJK's APPK, Lapor Aja! and directly to operational offices. Complaints received not only relate to operational impacts but also include alleged violations of ethics, integrity, social norms and regulations that potentially harm the environment. Through these mechanisms, the Company strives to directly listen to community's aspirations and concerns and implement continuous improvements to create more responsible operations that positively impact all parties.

In 2025, the details or summary of recorded complaint data were as follows:

Jumlah Pengaduan Masyarakat dan Status Penyelesaian
Number of Public Complaints and Settlement Status

Jenis Pengaduan Complaint Type	2025				2024		2023	
	Jumlah Pengaduan Number of Complaints		Status Penyelesaian Settlement Status		Jumlah Pengaduan Number of Complaints		Jumlah Pengaduan Number of Complaints	
	Konsumen Customer	Masyarakat Public	Selesai Settled	Dalam Proses Penyelesaian In Settlement Process	Konsumen Customer	Masyarakat Public	Konsumen Customer	Masyarakat Public
Kuartal 1 Quarter 1	-	-	-	-	4	-	6	-
Kuartal 2 Quarter 2	1	-	1	-	2	-	6	-
Kuartal 3 Quarter 3	3	2	5	-	4	3	7	-
Kuartal 4 Quarter 4	-	-	-	-	2	-	10	-
Jumlah Pengaduan Number of Complaints	**4**	**2**	**6**	**0**	**12**	**3**	**29**	**0**

KEGIATAN TJSL [OJK F.25] [IDX S-22]

Bagi Perseroan, membangun dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat merupakan prioritas utama, keberhasilan Perseroan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mendengarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta menyelenggarakan program-program yang mampu menjawab tantangan secara relevan dan tepat sasaran.

CSR ACTIVITIES [OJK F.25] [IDX S-22]

For the Company, building and maintaining harmonious relationships with the community is a top priority. The Company's success is measured not only by financial performance, but also by the extent to which its presence benefits the surrounding environment. Therefore, the Company is committed to continuously listening to community's needs and aspirations and implementing programs that address challenges in a relevant and targeted manner.

Melalui program TJSL, Perseroan berupaya memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya turut melibatkan masyarakat secara partisipatif agar memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi penerima manfaat. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya berperan sebagai mitra yang andal dalam pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

Through its CSR program, the Company strives to make a real contribution to improving the quality of life of the community. The implementation of this program involves the community in a participatory manner to ensure that each program is truly in line with the needs and expectations of the beneficiaries. Thus, the Company not only acts as a reliable partner in financing, but also as part of the solution to drive social and economic progress in the community.

Selain itu, Perseroan menjalin komunikasi yang transparan dan responsif dengan masyarakat melalui penyediaan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau kekhawatiran atas potensi dampak negatif dari kegiatan operasional. Setiap pengaduan yang masuk akan ditangani dengan melakukan penelusuran mendalam guna mengidentifikasi akar permasalahan serta menetapkan solusi terbaik untuk penyelesaiannya.

Furthermore, the Company maintains transparent and responsive communication with the community by providing various easily accessible complaint channels. These mechanisms allow the public to voice complaints or concerns about the potential negative impacts of its operational activities. Every complaint received will be handled by conducting an in-depth investigation to identify the root cause and determine the best solution.

ORGANISASI PELAKSANA TJSL

Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang berada di bawah pengawasan serta bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaannya kepada Divisi Financial Planning and Investor Relation. Setiap program yang dijalankan merupakan hasil dari keputusan serta kebijakan yang dirumuskan melalui diskusi internal antar-departemen yang dilaksanakan pada akhir tahun sebagai bagian dari perencanaan tahunan Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa partisipasi aktif karyawan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan setiap program, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Perseroan menyusun dan merealisasikan program TJSL ke dalam 4 (empat) pilar kegiatan, yakni:

CSR IMPLEMENTING ORGANIZATION

The implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER), activities is under the supervision of and responsible for reporting its implementation to the Financial Planning and Investor Relation Division. Each program implemented is the result of decisions and policies formulated through internal discussions between departments held at the end of the year as part of the Company's annual planning.

The Company believes that active employee and community participation is a crucial factor in the success of each program, ensuring effective implementation and providing maximum benefits to the communities surrounding its operational areas.

The Company has structured and implemented its CSR programs into four pillars of activity, as follows:

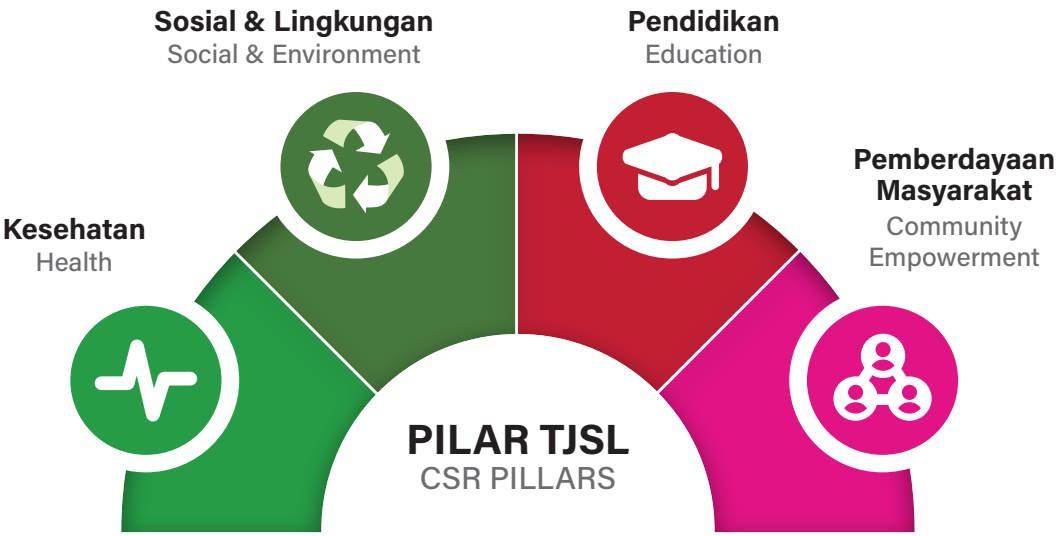

2025 CSR Achievement

Kesehatan
Health



1. Blood Donation 3x
2. Cataract Surgery 2x

763
Beneficiaries

Sosial & Lingkungan
Social & Environment



1. Chinese New Year
2. Ramadan 1446 H
3. Nyepi Day
4. Eid al-Adha 1446 H
5. Vesak Day
6. Christmas
7. Global CR Day

2.902
Beneficiaries

Pendidikan
Education



1. Financial Literacy 15x
2. Financial Inclusion 12x
3. Safety Riding 2x

7.819
Beneficiaries

Pemberdayaan Masyarakat
Community Empowerment



1. Educational Scholarship

10
Beneficiaries

REALISASI TJSL DAN DUKUNGAN PENCAPAIAN TPB [OJK F.25]

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyalurkan dana sebesar Rp2,14 miliar untuk pelaksanaan program TJSL, yang memberikan manfaat bagi sebanyak 11.494 penerima manfaat.

Perseroan terus memastikan bahwa setiap pelaksanaan program TJSL sejalan dengan 17 (tujuh belas) TPB di Indonesia, dengan terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap potensi risiko serta dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa program TJSL tahun 2025 telah berkontribusi pada 5 (lima) dari 17 (tujuh belas) TPB. Capaian ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan yang berdampak langsung dan berkesinambungan.

CSR REALIZATION AND SUPPORT FOR SDG ACHIEVEMENT [OJK F.25]

Throughout 2025, the Company has distributed funds amounting to Rp2.14 billion for the implementation of the TJSL program, which benefits 11,494 beneficiaries.

The Company continues to ensure that each CSR program aligns with Indonesia's 17 (seventeen) SDGs. This is achieved by first conducting an in-depth analysis of the potential risks and impacts of these activities. The analysis shows that the 2025 CSR programs contributing to 5 (five) of 17 (seventeen) SDGs. This achievement reflects the Company's commitment to supporting inclusive sustainable development through the implementation of community empowerment, education, health, social and environmental programs that have a direct and sustainable impact.

Realisasi Kegiatan TJSL Tahun 2025 [OJK F.25] [GRI 413-1]
Realization of CSR Activities in 2025

No.	Program & Kegiatan Program & Activity	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement/Realization
Kesehatan Health				
1	Operasi Katarak Cataract Surgery	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	14 Maret dan 22 April 2025 March 14 and April 22, 2025 5 Agustus 2025 August 5, 2025	Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Tunas Muda Care dalam pelaksanaan program operasi katarak gratis bagi 100 mata katarak. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu Ungaran, Kendal dan Serang. Program ini bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi penglihatan pasien, sehingga mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri dan produktif. The Company collaborated with the Tunas Muda Care Foundation in implementing a free cataract surgery program for 100 cataract. This activity was carried out in three regions, namely Ungaran, Kendal and Serang. The program aims to help restore patients' vision so that they can resume their daily activities more independently and productively.

Realisasi Kegiatan TJSL Tahun 2025 [OJK F.25] [GRI 413-1]

Realization of CSR Activities in 2025

No.	Program & Kegiatan Program & Activity	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement/Realization
2	Donor Darah Blood Donations		15 April - 8 Mei 2025 April 15 - May 8, 2025 23 Juli 2025 July 23, 2025 25 September 2025 September 25, 2025	Perseroan secara rutin melaksanakan kegiatan donor darah di Kantor Pusat, Regional dan Cabang dengan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat. Sepanjang tahun 2025, kegiatan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 721 kantong darah yang dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. The company regularly conducts blood donation activities at its Head Office, Regional Offices and Branches in collaboration with the local Indonesian Red Cross (PMI). Throughout 2025, these activities successfully collected 721 bags of blood, which were used to support the community's healthcare needs.
Sosial dan Lingkungan Social and Environment				
1	Hari Raya Imlek Chinese New Year		1 - 12 Februari 2025 February 1-12, 2025	Dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek, Perseroan melaksanakan kegiatan revitalisasi terhadap 10 vihara/klenteng. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan vihara/klenteng sebagai rumah ibadah, sehingga dapat menunjang kelancaran aktivitas keagamaan serta memperkuat fungsi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. In celebration of Chinese New Year, the Company carried out revitalization activities at 10 temples. These activities aimed to improve the quality and comfort of the temples as houses of worship, thereby supporting the smooth running of religious activities and strengthening the social and environmental functions of the surrounding community.
2	Ramadan 1446 H Ramadan 1446 H		17 - 28 Maret 2025 March 17-28, 2025	Pada bulan suci Ramadan 1446 H, Perseroan melaksanakan revitalisasi terhadap 10 mushola/masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan tempat ibadah yang lebih layak, bersih dan nyaman, sehingga dapat mendukung kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. During the holy month of Ramadan 1446 H, the Company revitalized 10 prayer rooms/mosques. This activity aimed to create a more suitable, clean and comfortable place of worship, thereby supporting the community's devotion in performing their religious duties during Ramadan.
3	Hari Raya Nyepi Nyepi Day		17 April 2025 April 17, 2025	Perseroan melaksanakan revitalisasi dapur umum di Pura Puseh Lan Pura Desa Demung, Bali. Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan fasilitas ibadah umat Hindu, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sehingga pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan lebih optimal. The company is revitalizing the public kitchen at Pura Puseh Lan Pura Desa Demung, Bali. This program aims to support the worship facilities needed by Hindus, particularly in the implementation of religious activities, so that worship can be carried out more optimally.
4	Hari Raya Waisak Vesak Day		15 Mei - 4 Juni 2025 May 15 - June 4, 2025	Dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak, Perseroan melaksanakan revitalisasi terhadap 10 vihara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kelayakan fasilitas ibadah bagi umat Buddha, sehingga mampu menunjang kelancaran pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan. In celebration of Vesak Day, the Company revitalized 10 temples. This activity aimed to improve the comfort and suitability of worship facilities for Buddhists, thereby supporting the smooth running of worship and religious activities.
5	Idul Adha 1446 H Eid al-Adha 1446 H		7 - 9 Juni 2025 June 7 - 9, 2025	Dalam rangka perayaan Idul Adha 1446 H, Perseroan mendistribusikan sebanyak 1.567 kantong daging kurban kepada masyarakat di wilayah sekitar Kantor Cabang. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Perseroan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi serta memperkuat solidaritas sosial dengan masyarakat sekitar. In celebration of Eid al-Adha 1446 H, the Company distributed 1,567 bags of sacrificial meat to the community around the Branch Office. This activity is a form of the Company's concern in supporting the fulfillment of nutritious food needs and strengthening social solidarity with the surrounding community.

Realisasi Kegiatan TJSL Tahun 2025 [OJK F.25] [GRI 413-1]
Realization of CSR Activities in 2025

No.	Program & Kegiatan Program & Activity	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal	Tanggal Kegiatan Activity Date	Pencapaian / Realisasi Achievement/Realization
6	Global CR Day Global CR Day		27 September 2025 September 27, 2025	Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan Global CR Day melalui kolaborasi dengan One Maybank. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup melalui pendekatan edukasi dan literasi hijau yang disampaikan secara interaktif dan aplikatif. The company participated in Global CR Day activities through collaboration with One Maybank. These activities aimed to raise children's awareness of the importance of protecting the environment through an interactive and practical approach to education and green literacy.
7	Hari Raya Natal Christmast Day		11 Desember 2025 December 11, 2025	Dalam rangka perayaan hari raya natal tahun 2025, Perseroan melaksanakan kegiatan natal di Panti Asuhan Permata Hati Suci Bekasi. In celebration of Christmas 2025, the Company held a Christmas event at the Permata Hati Suci Orphanage in Bekasi.
Pendidikan Education				
1	*Safety Riding*		15 - 16 April 2025 April 15 - 16, 2025 24 - 25 Juni 2025 June 24 - 25, 2025	Perseroan menyelenggarakan kegiatan edukasi keselamatan berkendara (*Safety Riding*) yang diikuti oleh 123 peserta yang terdiri dari karyawan, konsumen dan masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya mewujudkan *zero accident*. The company organized a safety riding education program attended by 123 participants consisting of employees, customer and the general public. This program aimed to increase understanding and awareness of the importance of safety riding, thereby contributing to efforts to achieve zero accidents.
Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment				
1	Beasiswa Pendidikan Educational Scholarship		Juli 2024 - Juli 2028 July 2024 - July 2028	Perseroan memberikan beasiswa pendidikan kepada 5 siswa berprestasi yang telah lulus proses seleksi dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Pembinaan Generasi Berkarakter yang telah dilaksanakan sejak tahun 2024. The company provides educational scholarships to five outstanding students who have passed the selection process and are continuing their education at university. This program is a continuation of the Character Building Program that has been implemented since 2024.
			April 2025 - April 2029 April 2025 - April 2029	Perseroan bekerja sama dengan ISCO Foundation dalam memberikan akses layanan pendidikan berupa beasiswa kepada 10 anak selama periode empat tahun sebagai upaya mendukung keberlanjutan pendidikan. The company collaborates with the ISCO Foundation in providing access to educational services in the form of scholarships to 10 children over a period of four years as an effort to support educational sustainability.

PROGRAM LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Perseroan memahami bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri pembiayaan yang tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak serta memberikan pemahaman yang baik terkait akses terhadap produk dan/atau layanan yang dimiliki oleh Pelaku

FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION PROGRAM

The Company understands that financial literacy plays a crucial role in driving the growth of a resilient and sustainable financing industry. Therefore, the Company consistently plays an active role in increasing public knowledge and awareness regarding prudent financial management, as well as providing a good understanding regarding access to products and/or services offered by Financial Services Business Players. By

Usaha Jasa Keuangan. Melalui pelaksanaan berbagai program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) literasi dan inklusi keuangan, Perseroan berupaya memperluas akses masyarakat terhadap edukasi finansial yang membantu mereka mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi secara masif dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman tentang produk dan layanan keuangan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatur keuangan secara efektif, menumbuhkan kebiasaan menabung serta merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dengan demikian, Perseroan berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat di berbagai wilayah.

PROGRAM LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2025

Perseroan memiliki tanggung jawab untuk mendukung program literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan ketentuan dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui program ini, Perseroan berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi kelompok yang belum terjangkau. Peran tersebut tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti sosialisasi, pelatihan serta kerja sama dengan beragam mitra, guna membantu masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih bijak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi yang inklusif. Adapun program literasi dan inklusi keuangan yang dilaksanakan Perseroan adalah sebagai berikut:

INKLUSI KEUANGAN

1. Perseroan melaksanakan kegiatan inklusi keuangan melalui perluasan akses layanan keuangan berupa promosi produk pembiayaan kepada 80 orang masyarakat di sekitar kantor cabang wilayah Surabaya. Kegiatan ini diselenggarakan pada 30 Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan Perseroan serta memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.
2. Perseroan melaksanakan kegiatan inklusi keuangan dalam bentuk *workshop* menjadi agen layanan keuangan yang diikuti oleh 48 peserta, terdiri atas kelompok ibu ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok remaja putri. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Februari 2025 di Kelurahan Kemang Manis, Palembang. Melalui kegiatan ini, Perseroan bertujuan memperkenalkan produk yang dimiliki oleh Perseroan serta mengajak para perempuan untuk menjadi agen Perseroan yang bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga.
3. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat umum yang diikuti oleh 41 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 Maret 2025 di Mushola Al-Ikhsan, Bogor, dengan

implementing various Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) programs, promoting financial literacy and inclusion, the Company strives to expand public access to financial education to help them make more informed financial decisions. This program is also expected to increase literacy and inclusion on a massive and equitable basis across all levels of society.

This initiative focuses not only on increasing understanding of financial products and services, but also on empowering communities to manage their finances effectively, develop savings habits and better plan for the future. Thus, the Company contributes to creating sustainable economic growth and improving the financial well-being of communities in various regions.

FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION PROGRAM IN 2025

The Company is responsible for supporting financial literacy and inclusion programs in accordance with the provisions and directives of the Financial Services Authority (OJK). Through this program, the Company strives to increase public understanding of financial products and services while expanding access to financing for underserved groups. That role is realized through various educational activities, such as outreach, training and collaboration with various partners, to help communities manage their finances more wisely and encourage inclusive economic prosperity. The financial literacy and inclusion programs implemented by the Company are as follows:

FINANCIAL INCLUSION

1. The Company carried out financial inclusion activities by expanding access to financial services in the form of promoting financing products to 80 people in the community around its Surabaya branch office. This activity was held on January 30, 2025, with the aim of increasing public understanding of the Company's financing products and expanding the reach of financial services to the community.
2. The Company carried out financial inclusion activities in the form of a workshop on becoming a financial service agent, which was attended by 48 participants, consisting of a group of mothers who are members of the Family Empowerment and Welfare (PKK) and a group of young women. This activity was held on February 13, 2025, in Kemang Manis Village, Palembang. Through this activity, the Company aims to introduce its products and encourage women to become agents of the Company, which will be beneficial in improving household economies.
3. The Company organized a financial inclusion activity in the form of direct outreach to the general public, which was attended by 41 participants. This activity was held on March 17, 2025, at the Al-Ikhsan Mosque in Bogor, with

tujuan meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap produk syariah Perseroan serta memperkuat pemahaman mengenai layanan keuangan.

4. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan berupa sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang melibatkan 46 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 April 2025 di Kelurahan Drangong, Serang, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai produk-produk Perseroan serta mendukung peningkatan akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM.
5. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan melalui perluasan akses layanan keuangan berupa promosi produk di Cetiya Anurudha, Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Mei 2025 yang dihadiri oleh 14 orang dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan Perseroan serta memperluas jangkauan layanan keuangan Perseroan yang dapat bermanfaat untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya.
6. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat umum yang melibatkan 45 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 18 Juni 2025 di Kelurahan Neroktog, Tangerang, dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk-produk Perseroan serta memperkuat literasi layanan keuangan.
7. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan berupa sosialisasi langsung kepada penyandang disabilitas yang melibatkan 26 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Juli 2025 di Panti Sosial Bina Daksa Budhi Bakti 01, Jakarta Timur, dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta memperluas akses penyandang disabilitas terhadap produk dan layanan keuangan Perseroan.
8. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat umum dengan melibatkan 65 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Agustus 2025 di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Jakarta Utara, dengan tujuan meningkatkan kemudahan akses serta pemahaman masyarakat terhadap produk-produk Perseroan.
9. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan berupa sosialisasi langsung kepada komunitas perempuan dengan melibatkan 52 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 September 2025 di Kelurahan Sukakarya, Garut, dengan tujuan memperluas literasi masyarakat perempuan terhadap produk dan layanan Perseroan.
10. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan berupa sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melibatkan 54 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 Oktober 2025 di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, dengan tujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai produk-produk Perseroan serta mendukung akses pembiayaan yang lebih inklusif.

the aim of increasing public access to the Company's sharia products and strengthening understanding of financial services.

4. The Company organized a financial inclusion activity in the form of a socialization program for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), involving 46 participants. This activity was held on April 24, 2025, in Drangong Village, Serang, with the aim of providing a more comprehensive understanding of the Company's products and supporting improved access to financial services for MSMEs.
5. The Company organized a financial inclusion activity by expanding access to financial services in the form of product promotion at Cetiya Anurudha, Tangerang. This activity was held on May 15, 2025 and was attended by 14 people with the aim of increasing public understanding of the Company's financing products and expanding the reach of the Company's financial services that can be useful for business capital or other needs.
6. The Company organized a financial inclusion activity in the form of direct outreach to the general public, involving 45 participants. This activity was held on June 18, 2025, in Neroktog Village, Tangerang, with the aim of increasing public access to the Company's products and strengthening financial literacy.
7. The Company organized a financial inclusion activity in the form of direct outreach to persons with disabilities, involving 26 participants. This activity was held on July 15, 2025, at the Bina Daksa Budhi Bakti 01 Social Welfare Institution in East Jakarta, with the aim of increasing understanding and expanding access for persons with disabilities to the Company's financial products and services.
8. The Company organized a financial inclusion activity in the form of direct outreach to the general public, involving 65 participants. This activity was held on August 20, 2025, at RPTRA Sunter Jaya Berseri, North Jakarta, with the aim of increasing public access to and understanding of the Company's products.
9. The Company organized a financial inclusion activity in the form of direct outreach to women's communities, involving 52 participants. This activity was held on September 25, 2025, in Sukakarya Village, Garut, West Java, with the aim of expanding women's literacy regarding the Company's products and services.
10. The Company organized a financial inclusion activity in the form of a socialization program for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), involving 54 participants. This activity was held on October 16, 2025, at the Surakarta City Cooperative, SME and Industry Office, with the aim of increasing MSME players' understanding of the Company's products and supporting more inclusive access to financing.



11. Perseroan menyelenggarakan kegiatan edukasi digital melalui media sosial melalui akun Instagram resmi Perseroan dalam bentuk promosi produk yang menjangkau 736 *viewers*. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10-30 November 2025 dengan tujuan mengajak masyarakat untuk mengenal produk-produk Perseroan secara lebih mendalam dan mudah diakses.
12. Perseroan menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat umum dengan melibatkan 57 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 Desember 2025 di Kelurahan Bandar Khalipah, Medan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk-produk Perseroan serta memperkuat pemahaman mengenai layanan keuangan.

LITERASI KEUANGAN

1. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan melalui edukasi digital yang bekerja sama dengan *financial educator* dilaksanakan pada 24 Januari 2025 dan menjangkau 36 *viewers*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perusahaan pembiayaan serta pengelolaan keuangan yang bijak.
2. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan melalui publikasi digital pada media sosial Perseroan yang dilaksanakan pada 25-28 Februari 2025 dan menjangkau 571 *viewers*. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada calon konsumen dan konsumen mengenai pelindungan konsumen serta mendukung terwujudnya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.
3. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan berupa sosialisasi langsung alam rangka Gerakan Syariah dalam momen Bulan Suci Ramadan 1446 H kepada komunitas perempuan yang diikuti oleh 31 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Maret 2025 di Desa Ciangsana, Bogor, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai perusahaan pembiayaan dan pengelolaan keuangan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.
4. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan berupa sosialisasi langsung kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melibatkan 46 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 April 2025 di Kelurahan Drangong, Serang, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai perusahaan pembiayaan serta pengelolaan keuangan.
5. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan dalam rangka *Kick Off* Bulan Literasi Keuangan berupa *Training of Trainer* (ToT) kepada guru-guru SMA Islam Darussalam, Kota Depok, dengan melibatkan 22 orang guru. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 Mei 2025 dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan mengenai keuangan dan perencanaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, yang nantinya para guru dapat meneruskan edukasi keuangan kepada siswa dan siswi di lingkungan sekolah.

11. The Company conducted digital education activities through social media via its official Instagram account in the form of product promotions that reached 736 viewers. This activity was carried out on November 10-30, 2025, with the aim of encouraging the public to learn more about the Company's products in a more in-depth and accessible manner.
12. The Company organized a financial inclusion activity in the form of direct outreach to the general public, involving 57 participants. This activity was held on December 17, 2025, in Bandar Khalipah Village, Medan, with the aim of increasing public understanding and access to the Company's products and strengthening understanding of financial services.

FINANCIAL LITERACY

1. The company organized a financial literacy event through digital education in collaboration with a financial educator on January 24, 2025, reaching 36 viewers. This event aimed to increase public understanding of financing companies and wise financial management.
2. The Company organized financial literacy activities through digital publications on the Company's social media, which were held on February 25-28, 2025 and reached 571 viewers. This activity aimed to provide prospective and existing customer with an understanding of customer protection and to support the realization of a stable and sustainable financial system.
3. The company organized a financial literacy activity in the form of direct socialization as part of the Sharia Movement during the Holy Month of Ramadan 1446 H for a community of women, which was attended by 31 participants. This activity was held on March 13, 2025, in Ciangsana Village, Bogor, with the aim of increasing understanding of financing companies and financial management based on sharia principles.
4. The company organized a financial literacy event in the form of direct outreach to micro, small and medium enterprises (MSMEs), involving 46 participants. This event was held on April 24, 2025, in Drangong Village, Serang, with the aim of providing an understanding of financing companies and financial management.
5. The company organized a financial literacy event as part of the Kick Off of Financial Literacy Month in the form of Training of Trainers (ToT) for teachers at Darussalam Islamic High School, Depok City, involving 22 teachers. This activity was held on May 21, 2025, with the aim of providing knowledge about finance and financial planning based on sharia principles, which the teachers can then pass on to students in the school environment.

6. Dalam rangka Bulan Literasi Keuangan, Perseroan melakukan kegiatan literasi keuangan berupa sosialisasi langsung kepada 104 siswa di MTs Al Irfan Purwakarta pada tanggal 11 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi keuangan sejak dini kepada peserta agar dapat memahami konsep finansial dasar melalui teknik pengelolaan keuangan sederhana yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
7. Dalam upaya peningkatan tingkat literasi keuangan di kalangan siswa sekolah, Perseroan juga melakukan repost konten edukasi dari Instagram Sikapi Uangmu OJK terkait tiga skill finansial wajib untuk remaja dan mahasiswa dimana konten tersebut mendapatkan 1.005 views.
8. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan berupa sosialisasi kepada masyarakat umum dengan melibatkan 45 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 18 Juni 2025 di Kelurahan Neroktog, Tangerang, Banten, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan secara langsung mengenai hak dan kewajiban peserta sebagai konsumen, teknis pengaduan serta layanan pengaduan konsumen agar mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan adil.
9. Perseroan berpartisipasi dalam Bulan Literasi Keuangan dengan melakukan repost konten edukasi keuangan mengenai "SLIK OJK : Kenali Rekam Jejak Pinjamanmu" dari Sikapi Uangmu OJK yang bertujuan agar lebih bijak dan paham dalam pengajuan pinjaman. Konten ini mendapatkan 1.030 views.
10. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan berupa sosialisasi kepada penyandang disabilitas dengan melibatkan 26 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Juli 2025 di Panti Sosial Bina Daksa Budhi Bakti 01, Jakarta Timur, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan penyandang disabilitas mengenai perusahaan pembiayaan serta pengelolaan keuangan.
11. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan berupa kunjungan edukatif ke PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melibatkan 49 mahasiswa Universitas Esa Unggul. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Agustus 2025 dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan serta pengetahuan tentang pasar modal.
12. Perseroan menyelenggarakan kembali kegiatan literasi keuangan melalui edukasi digital bekerja sama dengan financial planner yang dilaksanakan pada 24 September 2025 dan menjangkau 24 *viewers*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai perusahaan pembiayaan dan pengelolaan keuangan.
13. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan melalui publikasi digital berupa video Instagram yang dilaksanakan pada 15-31 Oktober 2025 dan menjangkau 910 *viewers*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perusahaan pembiayaan dan pengelolaan keuangan.
14. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan melalui video Instagram internal Perseroan yang dilaksanakan pada 13-30 November 2025 dan

6. In conjunction with Financial Literacy Month, the Company conducted financial literacy activities in the form of direct outreach to 104 students at MTs Al Irfan Purwakarta on June 11, 2025. This activity aimed to provide early financial education to participants so that they could understand basic financial concepts through simple financial management techniques that can be applied in everyday life.
7. In an effort to improve financial literacy among school students, the Company also reposted educational content from the OJK's Sikapi Uangmu Instagram account related to three essential financial skills for teenagers and students, which received 1,005 views.
8. The Company organized financial literacy activities in the form of outreach to the general public, involving 45 participants. This activity was held on June 18, 2025, in Neroktog Village, Tangerang, Banten, with the aim of directly increasing knowledge about the rights and obligations of participants as consumers, complaint procedures, and consumer complaint services in order to obtain appropriate and fair legal protection.
9. The Company participated in Financial Literacy Month by reposting financial education content on “SLIK OJK: Know Your Loan History” from Sikapi Uangmu OJK, aimed at promoting wiser and more informed loan applications. This content received 1,030 views.
10. The Company organized a financial literacy program in the form of an outreach event for people with disabilities, involving 26 participants. This activity was held on July 15, 2025, at the Bina Daksa Budhi Bakti 01 Social Welfare Institution in East Jakarta, with the aim of increasing the knowledge of people with disabilities about financing companies and financial management.
11. The Company organized a financial literacy activity in the form of an educational visit to the Indonesia Stock Exchange (IDX) involving 49 students from Esa Unggul University. This activity was held on August 19, 2025, with the aim of increasing understanding of financial management and knowledge of the capital market.
12. The Company held another financial literacy activity through digital education in collaboration with a financial planner on September 24, 2025, reaching 24 viewers. This activity aimed to increase understanding of financing companies and financial management.
13. The company organized a financial literacy event through a digital publication in the form of an Instagram video on October 15-31, 2025, which reached 910 viewers. This event aimed to increase public understanding of financing companies and financial management.
14. The Company organized a financial literacy event through an internal Instagram video on November 13-30, 2025, which reached 1,900 viewers. This event aimed

menjangkau 1.900 *viewers*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai perusahaan pembiayaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan internal Perseroan.

15. Perseroan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan melalui Instagram dan Website Perseroan yang dilaksanakan pada 11-31 Desember 2025 dan menjangkau 805 *viewers*. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perusahaan pembiayaan dan pengelolaan keuangan guna mendukung tercapainya masa depan finansial yang lebih aman.

to increase understanding of financing companies and financial management within the Company.

15. The Company organized financial literacy activities through Instagram and the Company's website on December 11-31, 2025, reaching 805 viewers. This activity aimed to provide the public with an understanding of financing companies and financial management in order to support a more secure financial future.



TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN

Sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, pelanggan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Keputusan pelanggan untuk memilih dan menggunakan layanan pembiayaan Perseroan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan stabilitas serta mendukung perkembangan usaha. Kepercayaan yang terus diberikan oleh pelanggan menjadi fondasi bagi keberlanjutan dan kemajuan Perseroan ke depan.

Dengan memahami peran strategis pelanggan, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan setiap segmen pelanggan. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perseroan menerapkan kebijakan *service excellence* di seluruh kantor cabang sesuai dengan Surat Kebijakan No. 057/SK/OPP/02-25 tentang Layanan Pengaduan Konsumen, dengan tujuan menjaga kualitas layanan serta memastikan penanganan pengaduan dilakukan secara cepat, tepat dan konsisten. Upaya peningkatan layanan juga dilakukan melalui inovasi berkelanjutan dalam aspek pemasaran, distribusi

RESPONSIBILITY FOR SUSTAINABLE PRODUCTS/SERVICES DEVELOPMENT

As one of the main stakeholders, customers play a very important role in maintaining the sustainability and growth of the Company's business. Customers' decisions to choose and use the Company's financing services are a determining factor in maintaining stability and supporting business development. The trust that customers continue to place in the Company is the foundation for its sustainability and progress in the future.

Understanding the strategic role of customers, the Company is committed to providing quality products and services that meet the needs of each customer segment. In line with this commitment, the Company implements a service excellence policy in all branch offices in accordance with Policy Letter No. 057/SK/OPP/02-25 concerning Customer Complaint Services, with the aim of maintaining service quality and ensuring that complaints are handled quickly, accurately and consistently. Efforts to improve services are also carried out through continuous innovation in marketing, distribution and service quality, as well as the provision of

dan mutu pelayanan serta penyediaan saluran pengaduan yang responsif. Seluruh inisiatif tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis, peningkatan kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan Perseroan. [GRI 3-3]

UPAYA PERSEROAN UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN ATAS PRODUK DAN/ATAU JASA YANG SETARA KEPADA KONSUMEN [OJK F.17]

Sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, pelanggan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Keputusan pelanggan untuk memilih dan menggunakan layanan pembiayaan Perseroan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan stabilitas serta mendukung perkembangan usaha. Kepercayaan yang terus diberikan oleh pelanggan menjadi fondasi bagi keberlanjutan dan kemajuan Perseroan ke depan.

Dengan memahami peran strategis pelanggan, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan setiap segmen pelanggan. Upaya peningkatan layanan dilakukan melalui inovasi berkelanjutan dalam aspek pemasaran, distribusi dan mutu pelayanan serta penyediaan saluran pengaduan yang cepat dan responsif. Seluruh inisiatif tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis, peningkatan kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan Perseroan.

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK/ JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.26]

Sebagian besar pelanggan pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan berasal dari beragam segmen konsumen, termasuk individu dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan mobilitas melalui kepemilikan kendaraan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Perseroan menghadirkan produk pembiayaan yang sederhana, mudah dipahami dan mudah dengan tetap memperhatikan prinsip analisa yang *prudent* serta mitigasi resiko yang kuat.

Dalam upaya memperluas jangkauan layanan, Perseroan terus memperbesar jaringan operasional hingga ke berbagai kota besar dan kecil di Indonesia agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pembiayaan. Proses pembiayaan juga dipercepat melalui pengembangan portal layanan berbasis digital yang dapat diakses melalui perangkat seluler, sehingga proses identifikasi dan persetujuan pembiayaan menjadi lebih cepat dan akurat. Berbagai inisiatif digital telah dijalankan, termasuk peluncuran aplikasi KAWAN, penggunaan layanan komunikasi Whatsapp KEYLA serta *Website* Perseroan yang dapat memudahkan calon konsumen untuk mengajukan pembiayaan.

responsive complaint channels. All of these initiatives are aimed at increasing customer satisfaction, which ultimately contributes to business growth, improved performance and the achievement of the Company's targets. [GRI 3-3]

COMPANY'S STRIVE TO PROVIDING PRODUCTS AND/OR SERVICES EQUIVALENT TO CUSTOMER [OJK F.17]

As one primary stakeholder, customers play a crucial role in maintaining the Company's business continuity and growth. Customers' decisions to select and use the Company's financing services are a determining factor in maintaining stability and supporting business development. The continued trust given by customers serves as the foundation for the Company's sustainability and progress going forward.

By understanding the strategic role of customers, the Company is committed to providing quality products and services tailored to the needs of each customer segment. Service improvement efforts are carried out through continuous innovation in marketing, distribution and service quality, as well as providing a fast and responsive complaint channel. All of these initiatives are aimed at increasing customer satisfaction, which ultimately contributes to business growth, improved performance and target achievement set by f the Company's.

INNOVATION AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FINANCE PRODUCTS/ SERVICES [OJK F.26]

The majority of the Company's motor vehicle financing customers come from various customer segments, including individuals and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) who require mobility support through vehicle ownership. To address such needs, the Company offers simple, easy-to-understand and accessible while maintaining prudent analysis principles and strong risk mitigation.

To expand its service reach, the Company continues to expand its operational network to various large and small cities across Indonesia, to facilitate easier access to financing services. The financing process is also accelerated through the development of digital-based service portal accessible via mobile devices, making identification and approval process faster and more accurate. Various digital initiatives have been implemented, including the launch of KAWAN application, the use of KEYLA WhatsApp communication service and the Company's website, which makes it easier for potential customers to apply for financing.

Perseroan juga terus meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan berbagai opsi pembayaran angsuran melalui *platform* digital dan *marketplace* seperti DANA, Bukalapak, Shopee, GoBills, LinkAja, OVO dan Tokopedia serta melalui sistem pembayaran QRIS bekerja sama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI). Sejak tahun 2022, Perseroan meluncurkan Aplikasi KAWAN untuk mempermudah pelanggan melakukan pembayaran daring serta memantau tagihan dan saldo pembiayaan tanpa harus datang ke kantor cabang.

Selain itu, Aplikasi KAWAN terus dikembangkan dengan beragam fitur yang memperkuat fungsi *Credit Engine*, memungkinkan proses pengajuan hingga penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan sepenuhnya secara digital setelah survei selesai dilakukan. Ke depannya, Perseroan berencana mengintegrasikan aplikasi ini dengan berbagai *digital platform* populer untuk memperluas ekosistem layanan.

Untuk menjaga kualitas layanan dan penanganan pengaduan, Perseroan menerapkan kebijakan *service excellence* di seluruh kantor cabang sesuai dengan kebijakan Perseroan yang berlaku. Selain itu, pelatihan *service excellence* bagi karyawan *frontliner* dilakukan secara rutin guna memastikan peningkatan kualitas layanan yang konsisten dan berkelanjutan.

The Company also continues to improve its service quality by providing various installment payment options through digital platforms and marketplaces such as DANA, Bukalapak, Shopee, GoBills, LinkAja, OVO and Tokopedia, as well as through QRIS payment system in collaboration with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI). In 2022, the Company launched KAWAN App to make it easier for customers to make online payments and monitor bills and balances without having to visit a branch office.

Furthermore, KAWAN App is continuously developed with various features that strengthen Credit Engine function, enabling application process through to the signing of financing agreement to be carried out entirely digitally after the survey is completed. Going forward, the Company plans to integrate this app with various popular digital platforms to expand its service ecosystem.

To maintain service quality and complaint handling, the Company implements a service excellence policy in all branch offices in accordance with applicable Company policies. Furthermore, service excellence training for frontline employees is conducted regularly to ensure consistent and sustainable service quality improvements.

Peningkatan Akses Layanan bagi Konsumen Disabilitas
Improving Access to Services for Customer with Disabilities



Perseroan terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh konsumen, termasuk penyandang disabilitas. Pada tahun 2025, Perseroan melakukan penyesuaian standar pelayanan melalui pembaruan kebijakan dan prosedur operasional yang mengacu pada Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Implementasi kebijakan tersebut diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan kepada frontliner guna memastikan pemahaman yang selaras dalam memberikan layanan yang ramah, setara, dan menghormati kebutuhan khusus setiap konsumen. Melalui inisiatif ini, Perseroan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan yang tidak hanya berorientasi pada keunggulan operasional, tetapi juga pada pemerataan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

The Company continues to strengthen its commitment to providing inclusive and sustainable services to all consumers, including persons with disabilities. In 2025, the Company adjusted its service standards by updating its policies and operational procedures in accordance with the Guidelines for Access to Financial Services for Persons with Disabilities (SETARA) issued by the Financial Services Authority. The implementation of this policy was followed by socialization and training for frontliners to ensure a consistent understanding in providing friendly, equal, and respectful services that cater to the specific needs of each customer. Through this initiative, the Company reaffirms its commitment to improving service quality that is not only focused on operational excellence, but also on equal access to financial services for all levels of society.

PRODUK/JASA YANG SUDAH DIEVALUASI KEAMANANNYA BAGI PELANGGAN [OJK F.27]

Selain berfokus pada mitigasi risiko sosial, Perseroan juga menjamin keamanan proses pembiayaan serta perlindungan terhadap unit yang dijaminkan melalui penerapan standar operasional yang ketat dan transparan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai prinsip yang *prudent* dan memberikan rasa aman bagi konsumen.

DAMPAK PRODUK ATAU JASA [OJK F.28]

Secara umum, produk dan jasa pembiayaan yang disediakan Perseroan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas terhadap sarana mobilitas yang mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan dengan jaminan kendaraan yang ditawarkan turut memperkuat kapasitas pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam menjalankan operasionalnya serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai wilayah. Dengan skema angsuran yang terstruktur, proses yang transparan serta penerapan prinsip proses pembiayaan yang *prudent*, Perseroan memastikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap transaksi pembiayaan. Selain itu, kehadiran layanan pembiayaan di berbagai daerah berkontribusi pada perluasan akses keuangan formal, sehingga memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tingkat nasional.

PRODUK ATAU JASA YANG DITARIK KEMBALI [OJK F.29]

Sepanjang tahun pelaporan 2025, tidak terdapat produk maupun layanan Perseroan yang ditarik dari peredaran karena alasan atau pertimbangan apa pun.

PRIVASI PELANGGAN [GRI 418-1]

Perseroan menerapkan standar ketat dalam menjaga keamanan data dengan membentuk Data Protection & Control Department yang bertanggung jawab penuh atas pelindungan data pribadi pelanggan, didukung oleh Departemen IT Security, IT Compliance dan CX Management.

Komitmen Perseroan terhadap privasi dan pelindungan data pribadi tidak hanya berfokus pada aspek keamanan teknis, tetapi juga pada kepatuhan penuh terhadap Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Perseroan menjamin bahwa seluruh pemrosesan Data Pribadi pelanggan dilakukan secara transparan, didasari oleh tujuan yang jelas dan sah serta menghormati hak-hak Subjek Data sebagaimana diatur oleh regulasi. Hal ini meliputi hak pelanggan untuk mengakses, memperbaiki dan menarik persetujuan atas data mereka.

PRODUCTS/SERVICES WITH EVALUATED CUSTOMER SAFETY [OJK F.27]

In addition to focusing on social risk mitigation, the Company also guarantees the financing process security and collateralized units protection through the implementation of strict and transparent operational standards. This measure is taken to ensure that all transactions are conducted in accordance with prudent principles and provide a sense of security for customer.

IMPACT OF PRODUCTS OR SERVICES [OJK F.28]

In general, financing products and services provided by The Company have a positive impact on the community by increasing their accessibility to mobility facilities that support economic activities and daily needs. The financing offered with vehicle collateral also strengthens the capacity of businesses, including MSMEs, to carry out their operations and encourages economic growth in various regions. With a structured installment scheme, transparent processes and application of prudent principles, the Company ensures its security and convenience in every financing transaction. Furthermore, the presence of financing services in various regions contributes to expanding access to formal finance, thereby strengthening efforts to increase financial literacy and inclusion at the national level.

RECALLED PRODUCTS OR SERVICES [OJK F.29]

Throughout the 2025 reporting year, there were no Company products or services recalled from circulation for any reason or consideration.

CUSTOMER PRIVACY [GRI 418-1]

The Company implements strict standards in maintaining data security by establishing Data Protection & Control Department that is fully responsible for protecting customer personal data, supported by IT Security, IT Compliance and CX Management Departments.

The Company's commitment to privacy and personal data protection focuses not only on technical security aspects but also on full compliance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The Company ensures that all processing of customer Personal Data is carried out transparently, based on clear and legitimate purposes and respects the rights of Data Subjects as stipulated in regulations. This includes customers' rights to access, update and withdraw consent regarding their data.



Sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan informasi, Perseroan telah meraih sertifikasi ISO 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang berlaku sejak 24 November 2022 hingga 31 Oktober 2025 dan sudah diperpanjang sampai dengan 23 November 2028. Sertifikasi ini memperkuat upaya Perseroan dalam memperbarui dan menyempurnakan kebijakan internal serta standar prosedur operasional (SOP) terkait keamanan informasi, sekaligus meningkatkan infrastruktur dan sistem pelindungan data agar keamanan data pribadi pelanggan terjaga secara optimal. Selain itu, Perseroan memastikan seluruh alur bisnis yang melibatkan Data Pribadi telah mematuhi prinsip *Privacy by Design*.

Perseroan telah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko serangan siber dan potensi kebocoran data, antara lain melalui upaya-upaya berikut:
1. Sosialisasi *Security Awareness*
2. *Wallpaper Security*
3. *Email blast* ke semua karyawan
4. Peningkatan jaringan keamanan
5. Peningkatan penjagaan pada *Endpoint*

Komitmen Perseroan yang terintegrasi antara sistem keamanan (ISO 27001:2022) dan kerangka kepatuhan hukum (UU PDP) telah menghasilkan kinerja yang solid. Berkat berbagai langkah yang dilakukan, Perseroan berhasil menjaga keamanan dan memastikan ketersediaan serta integritas data pribadi pelanggan, sehingga tidak terjadi insiden kegagalan pelindungan data yang wajib diberitahukan selama tahun 2025.

PENGADUAN KONSUMEN [OJK F.24]

Menyadari tingginya harapan pelanggan terhadap kualitas produk pembiayaan dan layanan yang diberikan, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi tersebut dengan menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses. Pelanggan dapat menyampaikan keluhan melalui beragam kanal, antara lain telepon, email, situs web, surat, media sosial, WhatsApp, APPK OJK, Lapor Aja!, maupun mengunjungi secara langsung kantor operasional Perseroan. Seluruh pengaduan yang diterima dikelola oleh CX Management Department guna memastikan proses penanganan berlangsung cepat, tepat dan efektif.

Selain itu, Perseroan juga menerapkan kebijakan pelindungan data pelanggan yang ketat dengan membatasi akses terhadap informasi pribadi hanya kepada pejabat yang memiliki otorisasi khusus, selain *marketing officer* yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Sistem keamanan data yang diterapkan dirancang secara komprehensif untuk mencegah potensi peretasan maupun pembajakan sistem teknologi informasi, sehingga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan tetap terjaga dengan optimal.

Melalui berbagai upaya tersebut, sepanjang tahun pelaporan tidak terdapat laporan pengaduan yang berkaitan dengan kebocoran maupun kehilangan data pribadi pelanggan. [GRI 418-1]

As the manifestation of its commitment to information security, the Company has achieved the ISO 27001:2022 certification for its Information Security Management System, valid from November 24, 2022, to October 31, 2025 and has been extended until November 23, 2028. This certification strengthens the Company's efforts to update and refine internal policies and standard operating procedures (SOPs) related to information security, while simultaneously enhancing its data protection infrastructure and systems to optimally safeguard customer personal data. Furthermore, the Company ensures that all business flows involving Personal Data adhere to the Privacy by Design principle.

The Company has implemented various mitigation measures to anticipate the risk of cyberattacks and potential data breaches, including the following:
1. Security Awareness Dissemination
2. Security Wallpapers
3. Email blasts to all employees
4. Network security enhancements
5. Improved Endpoint security measures

The Company's commitment to integrating its security system (ISO 27001:2022) and legal compliance framework (PDP Law) has resulted in solid performance. Thanks to various measures taken, the Company has successfully maintained its security and ensured the availability and integrity of customer personal data, resulting in no data protection failure incidents that must be reported during 2025.

CUSTOMER COMPLAINTS [OJK F.24]

Recognizing high customer expectations on the quality of its financing products and services, the Company is committed to meeting such expectations by providing various easily accessible complaint channels. Customers can submit complaints through various channels, including telephone, email, website, mail, social media, WhatsApp, APPK OJK, Lapor Aja!, or by visiting the Company's operational offices in person. All complaints received are managed by CX Management Department to ensure prompt, accurate and effective handling.

Furthermore, the Company implements strict customer data protection policy, restricting access to personal information to authorized officials, excluding marketing officers who interact directly with customers. The implemented data security system is comprehensively designed to prevent potential hacking or hijacking of information technology systems, ensuring the confidentiality and security of customer data is optimally maintained.

By carrying out such efforts, throughout the reporting year, there were no complaints related to data breaches or loss of customer personal data. [GRI 418-1]

Media Saluran Penyampaian Pengaduan Konsumen
Media Channels for Customer Complaint Submission

A. Sistem Penanganan Pengaduan Konsumen

Perseroan menyediakan sarana penyampaian penanganan pengaduan konsumen untuk mendapatkan penjelasan atau solusi atas pengaduan yang telah disampaikan.

Pengaduan Lisan
Hotline : 150 999

Pengaduan Tertulis
Surat : Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor *Point of Service* (Kapos), & Kantor Penagihan (*Point of Collection*)
Email : wcare@wom.co.id

Social Media:
- Instagram: @womfinance_id
- Facebook: Wom Finance
- Twitter/X: @womfinance_id

Whatsapp Keyla (*Key of love and care*): 0811 1951 1888
Aplikasi KAWAN (termasuk melalui Google Play Store)
Website : www.wom.co.id
Lapor Aja! : Tersedia di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor *Point of Service* (Kapos), Kantor Penagihan (*Point of Collection*), & Kios SiDana.
Datang ke : Kantor Pusat, Cabang, & *Kantor Point of Service* (Kapos), Kantor Penagihan (*Point of Collection*), & Kios SiDana.
APPK OJK : kontak157.ojk.go.id

B. Proses Penanganan Pengaduan Konsumen

- **Langkah 1** : Konsumen menyampaikan pengaduan melalui *platform* yang tersedia di Perseroan
- **Langkah 2** : Verifikasi data konsumen
- **Langkah 3** : Pencatatan Pengaduan Petugas Perseroan menerima informasi dan dokumen persyaratan pengaduan serta mencatat pengaduan ke sistem
- **Langkah 4** : Konfirmasi dan Klarifikasi Petugas Perseroan memastikan atas informasi pengaduan tersebut dan memberikan nomor registrasi pengaduan kepada konsumen
- **Langkah 5** : Menindaklanjuti pengaduan
- **Langkah 6** : Penyelesaian Pengaduan Konsumen mendapatkan penjelasan atau solusi pengaduan.
- **Keterangan** : SLA pengaduan Perseroan mengikuti ketentuan internal Perseroan.

- Dokumen Persyaratan Pengaduan Tertulis yang wajib dilampirkan:
- Identitas Pelapor asli (paling sedikit memuat nama lengkap Pelapor alamat Pelapor sesuai identitas dan tempat tinggal lain (jika ada))
- Surat Kuasa Pelapor (apabila pengajuan Pengaduan Tertulis dikuasakan)
- Bukti transaksi keuangan (jika diperlukan)
- Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan.

Penolakan Pengaduan

Perseroan berhak menolak informasi pengaduan yang disampaikan apabila:
- Pelapor tidak dapat menyerahkan/melengkapi dokumen yang ditetapkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- Pengaduan sebelumnya sudah diselesaikan oleh salah satu fungsi Perseroan
- Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material, wajar dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan perusahaan.*
- Pengaduan tidak terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan/atau;**
- Pengaduan sedang dalam proses atau telah diutus oleh lembaga peradilan secara perdata.

A. Customer Complaint Handling System

The Company provides a means of conveying customer complaints handling system to obtain explanation or solution to the complaints that have been submitted. erseroan menyediakan sarana penyampaian penanganan pengaduan konsumen untuk mendapatkan penjelasan atau solusi atas pengaduan yang telah disampaikan.

Oral Complaints
Hotline : 150 999

Written Complaint
Mail : Head Office, Branch Office, Point of Service Office (Kapos), & Point of Collection Office
Email : wcare@wom.co.id

Social Media:
- Instagram: @womfinance_id
- Facebook: Wom Finance
- Twitter/X: @womfinance_id

Whatsapp Keyla (Key of love and care): 0811 1951 1888
KAWAN App (including via Google Play Store)
Website : www.wom.co.id
Just Report It! : Available at Head Office, Branch Office, Point of Service Offices (Kapos), Collection Offices (Point of Collection), & SiDana Kiosks.
Visit : Head Office, Branches, & Point of Service Offices (Kapos), Collection Offices (Point of Collection), & SiDana Kiosks.
OJK APPK : kontak157.ojk.go.id

B. Customer Handling Complaints Process

- **Step 1** : Customer submit complaints through the platforms available on the Company
- **Step 2** : Verify customer data
- **Step 3** : Recording Complaints, the Company Officers receive information and documents on complaint requirements and record complaints to the system
- **Step 4** : Confirmation and Clarification, the Company officer ascertains the complaint information and provides the complaint ticket number to the customer
- **Step 5** : Follow up on the complaint
- **Step 6** : Complaint Resolution, Customer get an explanation or complaint solution
- **Information** : The Company's complaint SLA follows the Company's internal provisions.

- Written Complaint Requirements Documents that must be attached:
- The identity of the Whistleblower (at least containing full name, address according to the identity and other place of residence (if any))
- Power of Attorney of the Whistleblower (if the filing of a Written Complaint is with proxy)
- Proof of financial transaction (if required)
- Other supporting documents directly related to the issue raised.

Refusal of Complaint

The Company reserves the right to refuse information on complaints submitted if:
- The whistleblower is unable to submit/complete the specified documents within the specified time period
- Previous complaints have been resolved by one of the Company's functions
- Complaints not related to material losses and/or potential material losses, reasonable and directly as specified in the financing agreement and/or documents of product and/or service utilization by the Company.*
- Complaints not related to the utilization of products and/or services issued by the Company and/or;**
- Complaints currently in process or have been delegated to civil judicial institutions.

Catatan:
* Hanya berlaku untuk Pengaduan berindikasi sengketa
** Dikecualikan untuk Pemanfaatan Produk dan/atau Layanan yang dikeluarkan berdasarkan kerjasama perusahaan dengan perusahaan lain
Note:
* Applies only to complaints with indications of disputes.
** Excludes the utilization of products and/or services issued under cooperation between the Company and other companies.

Mengacu pada Undang-Undang Pelindungan Konsumen serta POJK mengenai Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perseroan menerapkan prinsip penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen secara cepat dan sederhana, dengan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan internal. Sepanjang tahun 2025, Perseroan menerima 4 (empat) pengaduan konsumen, yang seluruhnya telah berhasil diselesaikan. Rincian status penyelesaian pengaduan disajikan sebagai berikut:

In accordance with Law on Customer Protection and POJK on Customer Protection in Financial Services Sector, the Company implements the principle of resolving customer complaints and disputes quickly and simply, ensuring that each report is followed up in accordance with internal regulations. Throughout 2025, the Company received 4 (four) customer complaints, all of which were successfully resolved. Details of the complaint resolution status are presented as follows:

Status Penyelesaian Pengaduan Konsumen
Customer Complaint Resolution Status

No.	Jenis Pengaduan Types of Complaints	Jumlah Pengaduan Total Complaints	Status Pengaduan Complaint Status		
			Selesai Resolved	Dalam Penyelesaian Ongoing	Tidak Selesai Not Resolved
2025					
1	Pelayanan Remedial Remedial Services	1	1	0	0
2	Pelayanan *Collection* Collection Services	1	1	0	0
3	Pelayanan Tele *Marketing* Telemarketing Services	1	1	0	0
4	Pelayanan *Marketing* Marketing Services	1	1	0	0
Sub Total		**4**	**4**	**0**	**0**
2024					
1	Pelayanan *Collection* Collection Services	5	5	0	0
2	Pelayanan *Marketing* Marketing Services	3	3	0	0
3	Pelayanan Remedial *Officer* Remedial Officer Services	0	0	0	0
4	Kebijakan Perusahaan Company Policy	3	3	0	0
5	Asuransi Insurance	1	1	0	0
Sub Total		**12**	**12**	**0**	**0**
2023					
1	Pelaporan SLIK OJK/BI *Checking* SLIK OJK/BI Checking Reporting	7	7	0	0
2	Pelayanan *Collection* Collection Services	2	2	0	0
3	Pelayanan *Marketing* Marketing Services	6	6	0	0
4	Tarik Unit Unit Recalled	2	2	0	0
5	Pelunasan Kontrak Contract Settlement	2	2	0	0
Sub Total		**19**	**19**	**0**	**0**

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK DAN/ATAU JASA KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK F.30]

Untuk memperoleh masukan mengenai tingkat kepuasan konsumen, Perseroan secara berkala melaksanakan survei kepuasan yang bertujuan merancang program peningkatan kualitas layanan. Survei ini berperan tidak hanya sebagai sarana

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY FOR SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCTS AND/OR SERVICES [OJK F.30]

To obtain input on customer satisfaction levels, the Company periodically conducts satisfaction surveys aimed at designing service quality improvement programs. These surveys serve not only as a means of communication but also as a platform

komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk menampung umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Melalui kegiatan tersebut, Perseroan mendapatkan masukan berharga dari konsumen sebagai pemangku kepentingan utama, guna menyempurnakan produk dan layanan agar semakin selaras dengan kebutuhan serta harapan mereka.

for collecting feedback from various stakeholders. Through such activities, the Company obtains valuable input from customer, as key stakeholders, to improve its products and services to better align with their needs and expectations.

Perseroan kembali melaksanakan survei kepuasan konsumen dengan menerapkan sejumlah indikator baru, antara lain sebagai berikut:

The Company again carries out customer satisfaction survey by using a number of new indicators, including the following:

1. *Survey After Sales* (SAS)
   Survey yang dilakukan kepada konsumen baru (*New Customer*) terkait proses pelayanan dari awal pembiayaan sampai dengan pencairan dana.
2. *Existing Customer Survey* (ECS)
   Survey yang dilakukan kepada konsumen terkait proses pelayanan di cabang dengan umur pembiayaan minimal 3 bulan.
3. *Survey Exit Customer* (SEC)
   Survey yang dilakukan kepada konsumen terkait proses pelayanan selama pembiayaan sampai dengan pengambilan BPKB
4. Loyalitas Konsumen
   Loyalty Score merupakan indikator untuk menilai seberapa setia pelanggan terhadap suatu merek, produk, atau layanan yang telah diberikan sejak awal sampai akhir pembiayaan. Parameter Penilaian *Loyalty Score* terbagi menjadi 2 yaitu:
   a. NPS *Score*
      Net Promoter Score merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat loyalitas konsumen berdasarkan perspektif utama bahwa setiap pelanggan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu *promotor*, *passive* dan *detractor*.
   b. RO *Score*
      Repeat Order Score adalah salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen/kesetiaan konsumen terhadap produk dan layanan perseroan.

1. Survey After Sales (SAS)
   A survey conducted for new customers related to service process from the start of financing to fund disbursement.
2. Existing Customer Survey (ECS)
   A survey conducted for customers related to service process at branches with a minimum financing tenure of 3 months.
3. Survey Exit Customer (SEC)
   A survey conducted for customers related to service process during the financing period until the retrieval of vehicle registration certificate (BPKB).
4. Customer Loyalty
   Loyalty Score is an indicator used to assess how loyal customers are to a brand, product, or service that has been provided from the beginning to the end of financing. Loyalty Score assessment parameters are divided into two categories, namely:
   a. NPS Score
      The Net Promoter Score is a method used to measure customer loyalty based on the primary perspective that every customer can be categorized into three groups: promoters, passives and detractors.
   b. RO Score
      The Repeat Order Score is one of the metrics used to determine the level of customer loyalty/fidelity toward he Company products and services.

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan konsumen dibandingkan dengan tahun 2024, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

In general, the survey results indicated an increase in customer satisfaction levels compared to that of 2024, as shown in the following table:

Hasil Survei Kepuasan Konsumen
Customer Satisfaction Survey Results

Parameter Penilaian Assessment Parameters	**2025**	**Kategori Kepuasan** Satisfaction Index	**2024**	**Kategori Kepuasan** Satisfaction Index
Indeks Kepuasan Konsumen (60%) **Customer Satisfaction Index (60%)**				
Survey After Sales	**3,78**	Cukup Puas Fairly Satisfied	3,45	Cukup Puas Fairly Satisfied
Existing Customer Survey	**3,92**	Cukup Puas Fairly Satisfied	3,84	Cukup Puas Fairly Satisfied
Survey Exit Customer	**3,94**	Cukup Puas Fairly Satisfied	3,81	Cukup Puas Fairly Satisfied

Hasil Survei Kepuasan Konsumen
Customer Satisfaction Survey Results

Parameter Penilaian Assessment Parameters	2025	Kategori Kepuasan Satisfaction Index	2024	Kategori Kepuasan Satisfaction Index
Nilai Loyalitas (40%) Loyalty Score (40%)				
Net Promotor Score	48,31	Puas Satisfied	49,20	Puas Satisfied
RO *Score*	4,10	Puas Satisfied	4,08	Puas Satisfied

Hasil Survei Kepuasan Konsumen tahun 2023
Customer Satisfaction Survey Results in 2023

Parameter Penilaian Assessment Parameters	2023
Hasil Survei Berdasarkan Indeks Kepuasan Konsumen **Survey Results Based on Customer Satisfaction Index**	
Tampilan Tangible	3,94
Kehandalan Reliability	3,94
Tanggapan Responsiveness	3,92
Jaminan Assurance	3,52
Empati Empathy	3,98
Indeks Kepuasan Konsumen Perseroan The Company's Customer Satisfaction Index	3,86
Hasil Survei Berdasarkan Indeks Loyalitas Konsumen Survey Results Based on Customer Loyalty Index	
Loyalitas Konsumen (NPS) Net Promoter Score (NPS)	48,17

Secara keseluruhan Indeks kepuasan konsumen Perseroan adalah Cukup Puas dimana untuk penilaian meliputi parameter penilaian terhadap:

1. *Survey After Sales*
   Hasil *survey after sales* menunjukkan konsumen Cukup Puas dengan nilai 3,78.
2. *Existing Customer Survey*
   Hasil *existing customer survey* menunjukkan konsumen Cukup Puas dengan nilai 3,92.
3. *Survey Exit Customer*
   Hasil *survey exit customer* menunjukkan konsumen Cukup Puas dengan nilai 3,94.
4. Loyalitas Konsumen
   Nilai loyalitas konsumen Perseroan masuk ke dalam kategori Puas dengan nilai *Net Promotor Score* dan *Repeat Order Score* masing-masing 48,31 dan 4,10.

Keterangan:

- 1 diartikan Sangat Tidak Puas,
- 2 diartikan Tidak Puas,
- 3 diartikan Cukup Puas,
- 4 diartikan Puas dan
- 5 diartikan Sangat Puas.

Overall, the Company's customer satisfaction index falls into Fairly Satisfied category, based on evaluations from the following parameters:

1. After-Sales Survey
   Results of the after-sales survey indicate that customers are Fairly Satisfied with a score of 3.78.
2. Existing Customer Survey
   Results of the existing customer survey indicate that customers are Fairly Satisfied with a score of 3.92.
3. Exit Customer Survey
   Results of the exit customer survey indicate that customers are Fairly Satisfied with a score of 3.94.
4. Customer Loyalty
   The Company's customer loyalty falls into Satisfied category, with a Net Promoter Score and Repeat Order Score of 48.31 and 4.10 respectively.

Information:

- 1 is defined as Very Dissatisfied,
- 2 is defined as Dissatisfied,
- 3 is defined as Fairly Satisfied,
- 4 is defined as Satisfied and
- 5 is defined as Very Satisfied.

Lembar Umpan Balik [OJK G.2]
Feedback Form

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Segala masukan dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara sangat penting bagi kemajuan penyampaian laporan Perseroan kedepannya.

Thank you for reading the 2025 Sustainability Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Any feedback and suggestions from you are highly valuable for improving the Company's reporting in the future.

PROFIL ANDA

YOUR PROFILE

Nama (bila berkenan) Name (Optional)	:	
Institusi/Perusahaan Institution/Company	:	
Email Email	:	
Telp/Hp (bila berkenan) Telephone/Mobile (Optional)	:	

GOLONGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

STAKEHOLDER GROUP

- ☐ Pemegang Saham dan Investor | Shareholders and Investors
- ☐ Konsumen | Customers
- ☐ Karyawan | Employee
- ☐ Komunitas | Community
- ☐ Mitra Kerja/Pemasok | Partners/Supplier
- ☐ Pemerintah dan Regulator | Government and Regulators
- ☐ Lain-lain | Others

		Setuju Agree	**Netral** Neutral	**Tidak Setuju** Disagree
1.	Laporan ini mudah dimengerti This report is easy to understand			
2.	Laporan tersebut telah menggambarkan informasi positif dan negatif dari perusahaan The report has described positive and negative information of the Company			
3.	Informasi terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) sudah memadai Informations related to Environmental, Social and Governance (ESG) are sufficient			
4.	Mohon berikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini: Kindly provide your feedbacks/suggestions/comments about this report:			



Tanggapan Umpan Balik atas
Laporan Keberlanjutan tahun 2024 [OJK G.3]
Feedback Response for the 2024 Sustainability Report

Selama periode pelaporan, Perseroan tidak menerima masukan terkait laporan keberlanjutan yang diterbitkan pada tahun sebelumnya. Perseroan terus berupaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan penyajian kinerja LST melalui Laporan Keberlanjutan.

Throughout the reporting period, the Company did not receive feedback on the previous year's sustainability report. The Company continuously strives to evaluate and enhance the presentation of its ESG performance in the Sustainability Report.

Indeks POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

No. Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
A.	**Strategi Keberlanjutan** Sustainability Strategy	
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation on Sustainability Strategy	496
B.	**Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan** Sustainability Performance Highlights	
B.1	Aspek Ekonomi Economic Aspect	478
B.1.a	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual Sales quantity of production or services	478
B.1.b	Pendapatan atau penjualan Revenue or sales	478
B.1.c	Laba atau rugi bersih Net profit or loss	478
B.1.d	Produk ramah lingkungan Environmentally friendly products	479
B.1.e	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan Local parties involved in business process of Sustainable Finance	479
B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspects	
B.2.a	Penggunaan energi Energy use	480
B.2.b	Pengurangan emisi yang dihasilkan Lowering generated emissions	480
B.2.c	Pengurangan limbah dan efluen Lowering waste and effluent	481
B.2.d	Pelestarian keanekaragaman hayati. Preserving biodiversity	525
B.3	Aspek sosial Social aspect	
	Dampak positif dan negatif penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah dan dana).	482
C.	**Profil Perusahaan** Company Profile	
C.1	Visi, Misi dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission and Value of Sustainability	76
C.2	Alamat Perusahaan Company's Address	63
C.3	Skala Usaha Business Scale	62
C.3.a	Total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban Total assets or capitalization of assets and liabilities	62
C.3.b	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan dan status ketenagakerjaan Number of employees according to gender, position, age, education and employment status	112, 530
C.3.c	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham Name of shareholder and percentage of share ownership	62, 132
C.3.d	Wilayah operasional Operational area	74
C.4	Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Current Products, Services and Business Activities	68
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Membership in the Association	80
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes of Issuers and Public Companies	72

No. Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
D.	**Penjelasan Direksi** Directors Statement	
D.1.a	Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan Responding to challenges in fulfilling the sustainability strategy	486
D.1.b	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Implementation of Sustainable Finance	488
D.1.c	Strategi pencapaian target Target achievement strategy	490
E.	**Tata Kelola Keberlanjutan** **Sustainability Governance**	
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Management of Sustainable Finance Implementation	502
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development on Sustainable Finance	504
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment for Sustainable Finance Implementation	505
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	508
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Challenges of Sustainable Financial Implementation	510
F.	**Kinerja Keberlanjutan** **Sustainability Performance**	
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Building a Culture of Sustainability	501
	Kinerja Ekonomi **Economic Performance**	
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Performance Targets and Production, Portfolios, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit and Loss	512
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Performance Targets and Production, Portfolios, Financial Targets, or Investment on Financial Instruments or Projects in Line with Sustainable Finance Implementation	514
	Kinerja Lingkungan Hidup **Environmental Performance**	
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	519
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan The Use of Environmentally Friendly Materials	520
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan The Number and the Intensity of Energy Use	521
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan The Efforts and Achievements of Energy Efficiency Including the Use of Renewable Energy Sources	520
F.8	Penggunaan Air Water Consumption	521
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati The Impact of Operational Areas Near or in the Area of Conservation or Biodiversity	525
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	525
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya The Number and Intensity of Emissions Produced by Type	522
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan The Efforts and Achievement of Emission Reductions Undertaken	523

No. Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The Amount of Waste and Effluent Generated by Type	526
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanism	526
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spill that Occurred (if any)	527
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan The Number and Material Environmental Complaints Received and Resolved	528
	Kinerja Sosial **Social Performance**	
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Provide Equal Services on Products and/or Services to Customers	529
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equality of Employment Opportunities	529
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	539
F.20	Upah Minimum Regional The Minimum Regional Wage	539
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Working Environment	542
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Competency Development for Employees	550
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impacts to Local Communities	556
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	556
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Social and Environmental Responsibility Activities	557
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and development of Sustainable Finance products and/or services	567
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Customer Safety	569
F.28	Dampak Produk/Jasa Impact of Products/Services	569
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali The Number of Products Recalled	569
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Survey of Customer Satisfaction	572
	Lainnya **Others**	
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Written Verification from an Independent Party (if Any)	493
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	575
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Feedback from the Prior Year	576
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/2017 List of Disclosures in accordance with POJK 51/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies	577

Indeks Isi Standar GRI

GRI Standard Content Index

Pernyataan Penggunaan Statement of Use	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah melaporkan informasi yang tercantum dalam indeks konten GRI ini untuk periode 1 Januari 2025-31 Desember 2025 dengan mengacu pada Standar GRI. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk has reported the information contained in this GRI content index for the period January 1, 2025, to December 31, 2025, using the GRI Standards.
Penggunaan GRI 1 Use of GRI 1	GRI 1: Landasan 2021 GRI 1: Foundation 2021

GRI – Sandard GRI – Standard	**No Indeks** Index No.	**Pengungkapan** Disclosure	**Lokasi** Location
PENGUNGKAPAN UMUM **GENERAL DISCLOSURE**			
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 General Disclosures 2021	2-1	Detail organisasi Organization details	62
	2-2	Entitas yang termasuk dalam laporan Keberlanjutan Entities included in the organization's sustainability report	493
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak Reporting period, frequency and contact point	493
	2-4	Penyajian kembali informasi Restatements of information	494
	2-5	Assurance oleh Pihak Eksternal External assurance	493
	2-6	Aktivitas, rantai nilai dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships	63,68, 71, 72, 74
	2-7	Karyawan Employees	112
	2-8	Pekerja yang bukan karyawan Workers who are not employees	112
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	254
	2-10	Nominasi dan seleksi badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	310
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	314
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	315
	2-13	Pendelegasian wewenang untuk tanggung jawab mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	502
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan Keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	58-59
	2-15	Konflik kepentingan Conflicts of interest	452
	2-16	Mengkomunikasikan hal-hal kritis Communication of critical concerns	506
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	336
	2-18	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	336

GRI – Sandard GRI – Standard	No Indeks Index No.	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location
	2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies	339
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	339
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	340
	2-22	Pernyataan mengenai strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	493, 496
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	499
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan dalam organisasi Embedding policy commitments	501
	2-25	Proses remediasi dampak negatif Processes to remediate negative impacts	506
	2-26	Mekanisme untuk saran dan masalah etika Mechanisms for seeking advice and raising concerns	507
	2-27	Kepatuhan hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	507
	2-28	Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations	80
	2-29	Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Approach to Stakeholder Engagement	508
	2-30	Kesepakatan perundingan kolektif Collective bargaining agreements	536
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-1	Proses Penentuan Topik Material Process to Determine Material Topics	494
	3-2	Daftar Topik Material List of Material Topics	494
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 Economic Performance 2016	3-3	Manajemen Topik Material Management of Material Topics	494
	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	515
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	517
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Defined benefit plan obligations and other retirement plans	518
GRI 205: Anti-Korupsi - 2016 Anti-Corruption - 2016	3-3	Manajemen Topik Material Management of Material Topics	494
	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for risks related to corruption	459
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training about anti-corruption policies and procedures	459
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	461
GRI 401: Kepegawaian Employment	3-3	Manajemen Topik Material Management of Material Topics	494
	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee hires and employee turnover	533
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	535
	401-3	Cuti Melahirkan Maternity Leave	536



GRI – Sandard GRI – Standard	**No Indeks** Index No.	**Pengungkapan** Disclosure	**Lokasi** Location
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	3-3	Manajemen Topik Material Management of Material Topics	494
	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Occupational health and safety management system	543
	403-2	Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko dan investigasi insiden Hazard identification, risk assessment and incident investigation	544
	403-3	Layanan kesehatan kerja Occupational health services	544
	403-4	Partisipasi, konsultasi dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja Worker participation, consultation and communication on occupational health and safety	545
	403-5	Pelatihan pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Worker training on occupational health and safety	545
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja Improving the quality of worker health	545
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	546
	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Workers covered by an occupational health and safety management system	547
	403-9	Kecelakaan kerja Occupational accident	547
	403-10	Penyakit akibat kerja Occupational diseases	547
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 Training and Education 2016	3-3	Manajemen Topik Material Management of Material Topics	494
	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average training hours per year per employee	550
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	550
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	550
GRI 413: Masyarakat Lokal Local Communities	3-3	Manajemen Topik Material Management of Material Topics	550
	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments and development programs	556
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat Operations that actually or potentially have a significant negative impact on the local communities	556
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016 Customer Privacy 2016	3-3	Manajemen Topik Material Management of Material Topics	494
	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	569

Indeks ESG IDX
IDX ESG Index

FORM E020

Klasifikasi ESG ESG Classification	ID	Nama Metrik Metrics Name	Deskripsi Metrik Metrics Description	Halaman Page
Lingkungan Environment	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission Report	Total emisi scope 1, 2 dan 3 dari operasional perusahaan (tCO_2e) Total scope 1, 2 and 3 emissions from company operations (tCO_2e)	522
	E-02	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Intensity of GHG Emissions	Intensitas emisi GRK dari scope 1 dan 2 dibandingkan dengan pendapatan perusahaan GHG emission intensity from Scope 1 and 2 compared to company revenue	522
	E-03	Konsumsi Energi Listrik Electricity Consumption	Jumlah total energi listrik yang dikonsumsi secara langsung dan tidak langsung oleh perusahaan Total amount of electricity consumed directly and indirectly by the company	521
	E-04	Konsumsi Air Water Consumption	Jumlah konsumsi air oleh perusahaan Total water consumption by the company	521
	E-05	Limbah yang Dihasilkan Waste Generated	Total jumlah limbah padat yang dihasilkan perusahaan Total amount of solid waste generated by the company	526
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target *Net Zero Emission* Commitment of the Company to Achieve Net Zero Emission Target	Komitmen yang dimiliki perusahaan untuk mencapai *net zero emission* dan tahun target perusahaan The company's commitment to achieving net zero emission and its target year	498
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Company Commitment to Reduce Greenhouse Gas Emissions	Target pengurangan emisi GRK, tahun pencapaian target dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk penurunan emisi GHG emission reduction target, target achievement year and measures taken for emission reduction	523
Sosial Social	S-01	Kesetaraan Gender Gender Equality	Komposisi gender pegawai dalam tingkat pekerjaan dari level terendah sampai tertinggi di perusahaan Gender composition of employees across job levels from the lowest to the highest within the company	112, 530
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur Employee by Gender and Age Group	Komposisi usia pegawai dalam tingkat pekerjaan dari level terendah sampai tertinggi di perusahaan Age composition of employees across job levels from the lowest to the highest within the company	113, 531
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai Employee Turnover	Jumlah pegawai yang resign dan jumlah pegawai baru dalam tahun pelaporan Number of employees who resigned and number of new employees in the reporting year	532
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara Total Non-Permanent Employee	Jumlah dan persentase pegawai sementara dibandingkan dengan total pegawai Number and percentage of non-permanent employees compared to the total employees	530

Klasifikasi ESG ESG Classification	ID	Nama Metrik Metrics Name	Deskripsi Metrik Metrics Description	Halaman Page
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Employee Training and Development	Jumlah rata-rata jam yang digunakan untuk pelatihan oleh setiap pegawai dalam tahun pelaporan Average number of hours spent on training per employee in the reporting year	535
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja Number of Occupational Accidents	Jumlah kecelakaan kerja dan persentase kecelakaan kerja berakibat cedera serius dan/ atau fatal Number of occupational accidents and the percentage of occupational accidents resulting in serious and/or fatal injuries	547
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Human Rights Violations Incidents	Jumlah kejadian pelanggaran hak asasi manusia Number of human rights violations incidents	537
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi Policy on Sexual Harassment and/or Non-discrimination	Kebijakan perusahaan mengenai pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi The company's policy on sexual harassment and/or non-discrimination	537
	S-09	Kejadian Mengenai Hak Asasi Manusia Incidents Concerning Human Rights	Jumlah kejadian pelanggaran hak asasi manusia Number of human rights violations incidents	537
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa Policy on Child Labor and/or Forced Labor	Kebijakan perusahaan mengenai pekerja anak dan/atau The company's policy on child labor and/or forced labor	539
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan The Company's Policy on Occupational Health and Safety and providing a Safe and Proper Working Environment for All Employees	Kebijakan yang diberlakukan pada tahun pelaporan mengenai kebijakan atau tunjangan umum dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja Policies implemented in the reporting year regarding general policies or benefits in occupational health and safety	542
	S-12	*Corporate Social Responsibility*	Aktivitas CSR, investasi atau sumbangan terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar CSR activities, investments, or donations to communities or registered non-profit organizations	483, 559

Klasifikasi ESG ESG Classification	ID	Nama Metrik Metrics Name	Deskripsi Metrik Metrics Description	Halaman Page
Tata Kelola Governance	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi Management Diversity and Independence	Komposisi gender dari dewan dan jumlah dewan yang berasal dari pihak independen Gender composition of the board and the number of independent board members	336
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan Total Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners in the Board Meeting	Jumlah kehadiran direksi/ komisaris ke rapat dewan dan presentase kehadiran direksi/ komisaris dalam rapat dewan Number of board meetings attended by the Board of Directors/Board of Commissioners and the percentage of the Board of Directors/Board of Commissioners attendance in board meetings	342
	G-03	Kebijakan Pemisahan *Chairman of the Board* dan CEO Policy on the Separation of the Chairman of the Board and the CEO	Kebijakan mengenai pemisahan *Chairman of the Board* dan CEO Policy regarding the separation of the Chairman of the Board and the CEO	309
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris Policy on the Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners	Kebijakan penilaian kinerja tahunan direksi/ komisaris dan pengungkapan kriteria serta proses penilaian yang dilakukan Policy on the annual performance assessment of the Board of Directors/ Board of Commissioners and disclosure of the criteria and assessment process conducted	336
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris Policy on Training for the Board of Directors and Board of Commissioners	Kebijakan perusahaan mengenai program pelatihan profesional bagi direksi/komisaris The company's policy on professional training programs for the Board of Directors/Board of Commissioners	303
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan Specific Criteria for Board Selection	Kriteria yang digunakan dalam pemilihan direksi dan komisaris baru serta kebijakan mengenai kriteria pemilihan ulang Criteria used for the selection of new Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the policy on re-election criteria	310
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi Code of Conduct and/or Anti-Corruption	Program dan prosedur dalam mengatasi praktik seperti korupsi, suap, balas jasa, gratifikasi dan lainnya yang relevan Programs and procedures for addressing practices such as corruption, bribery, kickbacks, gratuities and other relevant issues	459
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Policy on Fair Treatment of Shareholders	Kebijakan perusahaan yang melarang direksi/komisaris dan karyawan mengambil manfaat dari pengetahuan yang umumnya tidak tersedia di pasar The company's policy prohibiting the Board of Directors, Board of Commissioners and employees from benefiting from non-public market information	257
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan Prevention of Conflicts of Interest	Kebijakan perusahaan mengenai kewajiban direksi/ komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan The company's policy on the obligation of the Board of Directors/ Board of Commissioners to prevent conflicts of interest	452

07

Laporan Keuangan
Financial Report

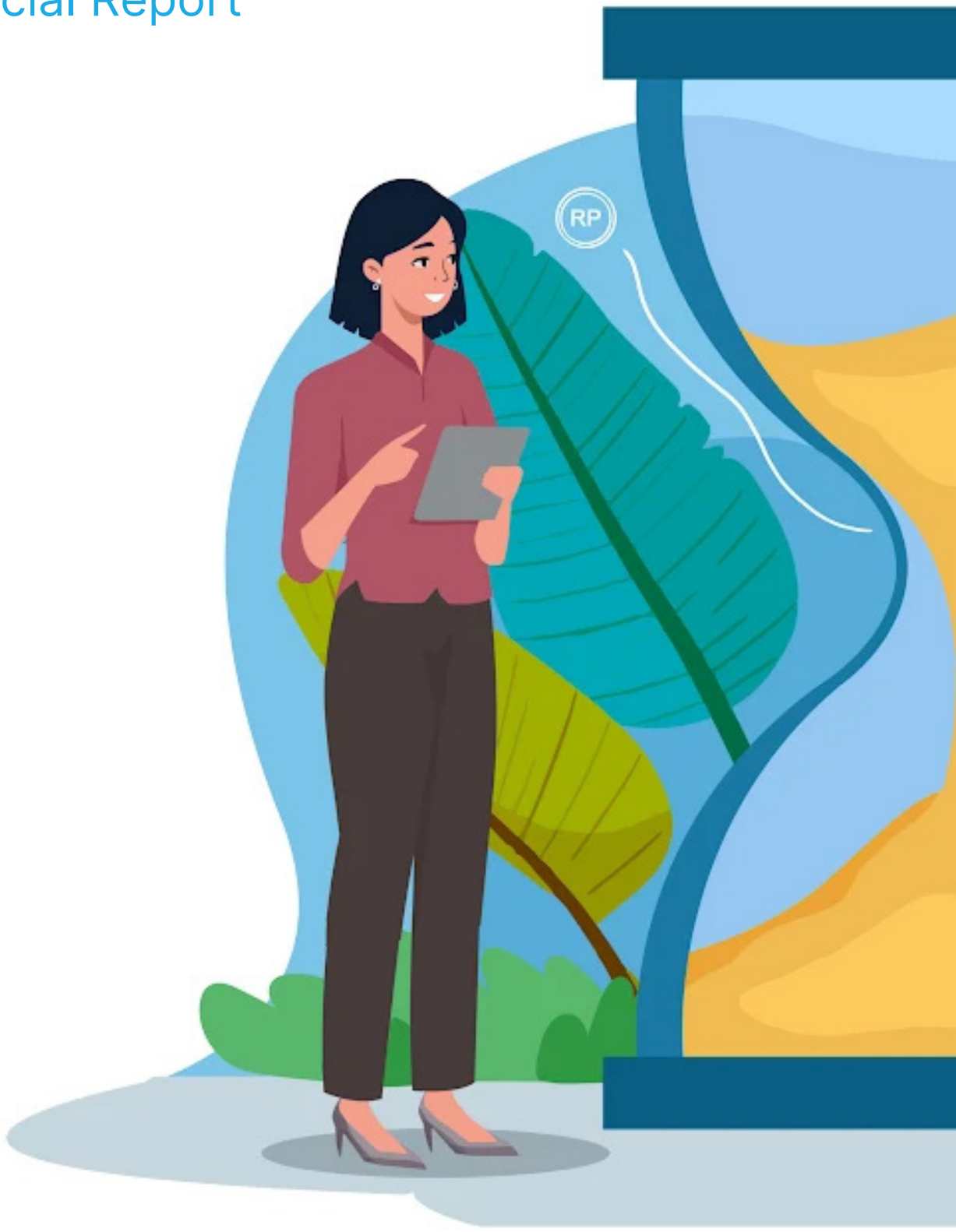


RP



PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements
as of December 31, 2025 and
for the year then ended
with independent auditor's report

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-4	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5-6	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	7	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	8-9	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	10-126	*Notes to the Financial Statements*

****

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower, Lantai 32,33 dan 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara - 14350
Ph. +62 21-2188 2400 (Hunting) Fx +62 21-2188 2420

WOMFinance
a member of Maybank group

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk

DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned below:*

1.	Nama	Djaja Suryanto Sutandar	*Name*
	Alamat kantor	Altira Office Tower, Lantai 32, 33, dan 35 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350	*Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Katamaran Indah 6 No. 2J RT 009/RW 007 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara	*Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	+62 21 - 2188 2400	*Telephone number*
	Jabatan	Presiden Direktur/*President Director*	*Title*
2.	Nama	Cincin Lisa Hadi	*Name*
	Alamat kantor	Altira Office Tower, Lantai 32, 33, dan 35 Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14350	*Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	Grand Poris Blok A. 10/2 RT 012/RW 009 Cipondoh Indah, Cipondoh, Tangerang	*Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	+62 21 - 2188 2400	*Telephone number*
	Jabatan	Direktur Keuangan/*Finance Director*	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;
2. Laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;*
2. *The financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*
   b. *The financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;*
4. *We are responsible for the internal control system of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made truthfully.*

Jakarta, 23 Februari 2026/*February* 23, *2026*

METERAI TEMPEL
D195FANX092333876

Djaja Suryanto Sutandar	**Cincin Lisa Hadi**
Presiden Direktur/*President Director*	Direktur Keuangan/*Finance Director*

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026

The Shareholders, the Board of Commissioners, and Directors
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal-hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami terhadapnya, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future
with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja dan piutang pembiayaan investasi (piutang pembiayaan)

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti tercantum dalam Catatan 5, 6, dan 7 atas laporan keuangan, nilai tercatat atas piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, piutang pembiayaan investasi dan cadangan kerugian penurunan nilai terkaitnya adalah signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan terlampir. Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja dan piutang pembiayaan investasi adalah masing-masing sebesar Rp147 miliar, Rp24 miliar, dan Rp109 miliar. Informasi kebijakan akuntansi material atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan diungkapkan dalam Catatan 2 dalam laporan keuangan terlampir.

Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan tersebut di atas, memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi mencakup penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Karena penentuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja dan piutang pembiayaan investasi melibatkan pertimbangan dan estimasi signifikan dari manajemen dan nilai tercatat yang signifikan, maka hal ini adalah hal audit utama bagi kami.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Allowance for impairment losses on multipurpose financing receivables, working capital financing receivables and investment financing receivables (financing receivables)

Description of the key audit matter:

As stated in Notes 5, 6, and 7 to the accompanying financial statements, the carrying value of multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, investment financing receivables and the related allowances are significant to the Company's accompanying financial statements. As of 31 December 2025, the amounts of allowance for impairment losses for multipurpose financing receivables, working capital financing receivables and investment financing receivables are Rp147 billion, Rp24 billion, and Rp109 billion, respectively. The material accounting policy information of allowance for impairment losses of financial assets are disclosed in Note 2 to the accompanying financial statements.

Determination of allowance for impairment losses of the above-mentioned financial assets requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models, including forward-looking macroeconomic factors.

Because the determination of allowance for impairment losses on multipurpose financing receivables, working capital financing receivables and investment financing receivables involves significant judgements and estimates from the management and the carrying amounts are significant, it is a key audit matter for us.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja dan piutang pembiayaan investasi (piutang pembiayaan) (lanjutan)

Respon audit:

Kami menguji kontrol utama atas proses pemberian, pencatatan, dan pengawasan piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja dan piutang pembiayaan investasi. Kami memperoleh pemahaman, menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, dan melakukan validasi model pencadangan kerugian penurunan nilai, serta data masukan, dasar dan menilai kewajaran atas asumsi signifikan yang digunakan oleh Perusahaan dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (staging) yang disusun oleh Perusahaan untuk piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja dan piutang pembiayaan investasi. Kami membandingkan pengalaman historis dengan keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja dan piutang pembiayaan investasi.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Allowance for impairment losses on multipurpose financing receivables, working capital financing receivables and investment financing receivables (financing receivables) (continued)

Audit response:

We tested the key controls over the process of origination, recording, and monitoring of the multipurpose financing receivables, working capital financing receivables and investment financing receivables. We obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, and validated allowance for impairment losses' models, inputs, and bases and assessed reasonableness of significant assumptions used by the Company in calculating the allowance for impairment losses. We tested the credit classification into three stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Company for multipurpose financing receivables, working capital financing receivables and investment financing receivables. We compared the historical experience with the current circumstances and the recent losses incurred in the portfolios, and assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for multipurpose financing receivables, working capital financing receivables and investment financing receivables.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future
with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja dan piutang pembiayaan investasi (piutang pembiayaan) (lanjutan)

Kami memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif. Kami menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit. Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Allowance for impairment losses on multipurpose financing receivables, working capital financing receivables and investment financing receivables (financing receivables) (continued)

We checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the collective impairment for the entire portfolio. We assessed whether the financial statements disclosures are adequately and appropriately reflecting the Company's exposures to credit risk. We involved our auditor's internal expert to assist us in the performance of the above procedures where their specific skills are needed.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report 2025 (the "Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan , manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuan
gan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Other information (continued)

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future
with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future
with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00053/2.1505/AU.1/09/0703-5/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto Sugianti dan Surja

Yasir

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703/*Public Accountant Registration No. AP.0703*

23 Februari 2026/*February 23, 2026*

00053

X

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31*, 2025	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31*, 2024	
ASET				***ASSETS***
KAS DAN SETARA KAS		2b,2c,2d,2e,		***CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Kas	5.569	3,4,32,34,35	5.640	*Cash on hand*
Bank				*Cash in banks*
Pihak ketiga	137.793		163.965	*Third parties*
Pihak berelasi	366.728		370.611	*Related party*
Total Kas dan Setara Kas	510.090		540.216	*Total Cash and Cash Equivalents*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(295)		(492)	*Allowance for impairment losses*
Neto	509.795		539.724	*Net*
PIUTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA		2d,2e,2h, 3,5,14,20, 34,35,37		***MULTIPURPOSE FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan multiguna - bruto	4.308.568		4.527.843	*Multipurpose financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan multiguna yang belum diakui	(1.042.718)		(1.054.012)	*Unearned multipurpose financing income*
Piutang pembiayaan multiguna	3.265.850		3.473.831	*Multipurpose financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(147.220)		(130.986)	*Allowance for impairment losses*
Neto	3.118.630		3.342.845	*Net*
PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA		2d,2e,2h,3,6, 14,20,34,35		***WORKING CAPITAL FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan modal kerja - bruto	1.147.130		621.028	*Working capital financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan modal kerja yang belum diakui	(241.973)		(119.266)	*Unearned working capital financing income*
Piutang pembiayaan modal kerja	905.157		501.762	*Working capital financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.168)		(10.484)	*Allowance for impairment losses*
Neto	880.989		491.278	*Net*
PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI		2d,2e,2h,3,7 14,20,34,35		***INVESTMENT FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan investasi - bruto	3.567.114		3.061.539	*Investment financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan investasi yang belum diakui	(993.402)		(833.355)	*Unearned investment financing income*
Piutang pembiayaan investasi	2.573.712		2.228.184	*Investment financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(108.865)		(69.243)	*Allowance for impairment losses*
Neto	2.464.847		2.158.941	*Net*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31*, 2025	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31*, 2024	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
PIUTANG LAIN-LAIN		2c,2d,2e,2i,		***OTHER RECEIVABLES***
Pihak ketiga	83.121	3,8,32,34,35	77.252	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	3.183		802	*Related parties*
Total Piutang Lain-lain	86.304		78.054	*Total Other Receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.528)		(4.103)	*Allowance for impairment losses*
Neto	77.776		73.951	*Net*
BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	17.111	2j,9	36.552	***PREPAID EXPENSES AND ADVANCES***
ASET TETAP - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp219.635 dan Rp208.025 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	84.013	2k,3, 10,18	86.017	***PROPERTY AND EQUIPMENT*** - *Net of accumulated depreciation of Rp219,635 and Rp208,025 as of December 31, 2025 and 2024, respectively*
ASET HAK-GUNA - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp103.695 dan Rp92.386 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	93.864	2l,11, 19,29	98.064	***RIGHT-OF-USE ASSETS*** - *Net of accumulated depreciation of Rp103,695 and Rp92,386 as of December 31, 2025 and 2024, respectively*
ASET TIDAK BERWUJUD - Setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp55.497 dan Rp50.030 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	45.485	2m,3,12	49.284	***INTANGIBLE ASSETS*** - *Net of accumulated amortization of Rp55,497 and Rp50,030 as of December 31, 2025 and 2024, respectively*
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	31.263	2s,3,17	24.691	***DEFERRED TAX ASSETS - Net***
ASET LAIN-LAIN	44.895	2d,13,17	44.994	***OTHER ASSETS***
TOTAL ASET	**7.368.668**		**6.946.341**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31*, 2025	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31*, 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
UTANG BANK		2f,5,6,7,14,16,		***BANK LOANS***
Pihak ketiga	2.419.878	29,34,35,38	2.190.467	*Third parties*
Total Utang Bank	2.419.878		2.190.467	*Total Bank Loans*
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR		2c,2f,14,15, 16,20,32		***ACCRUED EXPENSES***
Pihak ketiga	64.262		84.564	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	1.333		3.228	*Related parties*
Total Biaya yang Masih Harus Dibayar	65.595		87.792	*Total Accrued Expenses*
UTANG PAJAK	19.926	2s,3,17	32.733	***TAXES PAYABLE***
UTANG LAIN-LAIN		2c,2f,2p,		***OTHER PAYABLES***
Pihak ketiga	152.094	10,18,31,	145.683	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	20.199	32,34,35	21.169	*Related parties*
Total Utang Lain-lain	172.293		166.852	*Total Other Payables*
LIABILITAS SEWA		2c,2f,2l,		***LEASE LIABILITIES***
Pihak ketiga	23.768	19,29,32,	31.980	*Third parties*
Pihak berelasi	-	34, 35,38	34	*Related party*
Total Liabilitas Sewa	23.768		32.014	*Total Lease Liabilities*
UTANG OBLIGASI		2c,2f,2o,5,6,		***BONDS PAYABLE***
Pihak ketiga	2.375.285	7,16,20,29,	2.116.246	*Third parties*
Pihak berelasi	19.956	32,34,35, 38, 41	123.873	*Related party*
Total Utang Obligasi - Neto	2.395.241		2.240.119	*Total Bonds Payable - Net*
LIABILITAS IMBALAN KERJA	88.795	2w,3,33	104.263	***LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS***
UTANG SUBORDINASI	200.000	2c,2f,15,16,29, 32,34,35,41	200.000	***SUBORDINATED LOAN***
TOTAL LIABILITAS	**5.385.496**		**5.054.240**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31*, 2025	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31*, 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam nilai penuh) per saham Modal dasar - 5.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.481.481.480 saham	348.148	2u,21	348.148	*Capital stock - Rp100 (in full amount) par value per share Authorized - 5,000,000,000 shares Issued and fully paid - 3,481,481,480 shares*
Modal disetor lainnya	160.190	22	160.190	*Additional paid-in capital*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - neto setelah pajak tangguhan	77.175	2w,33	49.782	*Remeasurement of liability for employee benefits - net of deferred tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Cadangan umum	27.500	23	25.000	*Appropriated for general reserve*
Belum ditentukan penggunaannya	1.370.159	2v	1.308.981	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**1.983.172**		**1.892.101**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**7.368.668**		**6.946.341**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year then ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
PENDAPATAN				***REVENUES***
Pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi - neto	1.808.849	2c,2h,2q,5,6, 7,24,31,37	1.819.420	*Multipurpose financing, working capital financing, and investment financing - net*
Administrasi	39.841	2h,2q,25	37.387	*Administration*
Bunga bank	23.744	2c,2q,4,32	21.145	*Interest from banks*
Lain-lain	297.167	2h,2q,26	288.988	*Others*
Total Pendapatan	**2.169.601**		**2.166.940**	***Total Revenues***
BEBAN				***EXPENSES***
Umum dan administrasi	671.410	27	618.188	*General and administrative*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	452.770	2e,2h,3, 4,5,6,7,8	357.231	*Provision for impairment losses*
Gaji dan tunjangan	406.912	2c,28,32,33	410.387	*Salaries and benefits*
Beban pendanaan dan keuangan	353.162	2c,2f,14,15, 19,20,29,32	356.319	*Financing costs and financing charges*
Penyusutan dan amortisasi	90.769	2k,2l,2m, 3,10,11,12	81.052	*Depreciation and amortization*
Lain-lain	15.120	18,30,32	10.521	*Others*
Total Beban	**1.990.143**		**1.833.698**	***Total Expenses***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**179.458**		**333.242**	***INCOME BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND INCOME TAX EXPENSE***
Beban pajak final	4.749	2s,4,17	4.229	*Final tax expense*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**174.709**		**329.013**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**32.156**	2s,17	**66.098**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN	**142.553**		**262.915**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the year then ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan aktuarial	35.119	2w,33	5.361	*Actuarial gain*
Pajak penghasilan	(7.726)	2s,17	(1.179)	*Income tax*
Laba komprehensif lainnya - neto setelah pajak	**27.393**		**4.182**	***Other comprehensive income - net of tax***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**169.946**		**267.097**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	**40,95**	2u,21	**75,52**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (expressed in full Rupiah amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year then ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Modal Disetor Lainnya/ *Additional Paid-in Capital*	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Neto Setelah Pajak Tangguhan/ *Remeasurement of Liability for Employee Benefits - Net of Deferred Tax*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Total Ekuitas/ *Total Equity*	
					Cadangan Umum/ *Appropriated For General Reserve*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2023		**348.148**	**160.190**	**45.600**	**22.500**	**1.119.484**	**1.695.922**	***Balance December 31, 2023***
Pencadangan laba untuk cadangan umum	23	-	-	-	2.500	(2.500)	-	*Appropriated earnings for general reserve*
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak tangguhan	2w	-	-	4.182	-	-	4.182	*Actuarial gain - net of deferred tax*
Dividen	2v,23	-	-	-	-	(70.918)	(70.918)	*Dividend*
Total laba tahun berjalan		-	-	-	-	262.915	262.915	*Total income for the year*
Saldo 31 Desember 2024		**348.148**	**160.190**	**49.782**	**25.000**	**1.308.981**	**1.892.101**	***Balance December 31, 2024***
Pencadangan laba untuk cadangan umum	23	-	-	-	2.500	(2.500)	-	*Appropriated earnings for general reserve*
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak tangguhan	2w	-	-	27.393	-	-	27.393	*Actuarial gain - net of deferred tax*
Dividen	2v,23	-	-	-	-	(78.875)	(78.875)	*Dividend*
Total laba tahun berjalan		-	-	-	-	142.553	142.553	*Total income for the year*
Saldo 31 Desember 2025		**348.148**	**160.190**	**77.175**	**27.500**	**1.370.159**	**1.983.172**	***Balance December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year then ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari:				*Cash receipts from:*
Konsumen	6.377.422		6.443.958	*Consumers*
Bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama	-		33	*Bank in connections with the transaction of joint financing cooperation*
Pendapatan administrasi	39.841	25	37.387	*Administration income*
Pendapatan bunga bank	18.995	4	16.916	*Interest income from banks*
Pendapatan denda	84.899	26	88.005	*Penalty income*
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	81.944	26	61.827	*Collection of receivables previously written-off*
Pendapatan pelunasan awal konsumen	46.857	26	54.617	*Income from early consumer repayment*
Lain-lain	133.523		88.542	*Others*
Total penerimaan kas	6.783.481		6.791.285	*Total cash receipts*
Pembayaran kas untuk/kepada:				*Cash disbursements for/to:*
Transaksi sehubungan dengan pembiayaan	(5.481.357)		(5.041.558)	*Financing related transaction*
Bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama	-		(33)	*Bank in connection with the transaction of joint financing cooperation*
Beban gaji dan tunjangan	(439.880)		(391.368)	*Salaries and benefit expenses*
Beban umum dan administrasi serta beban lain-lain	(691.882)		(634.715)	*General and administrative expenses and other expenses*
Bank sehubungan dengan hak bank atas pendapatan pembiayaan konsumen	-		(3)	*Bank in connection with the bank rights on consumer financing income*
Beban pendanaan dan keuangan	(344.984)		(349.380)	*Financing costs and financing charges*
Beban pajak	(58.642)		(94.813)	*Tax expenses*
Lain-lain	(18.998)		(39.826)	*Others*
Total pengeluaran kas	(7.035.743)		(6.551.696)	*Total cash disbursements*
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**(252.262)**		**239.589**	***Net Cash (Used in) Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	2.883	10	1.486	*Proceeds from sales of property and equipment*
Perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud	(21.270)		(31.519)	*Acquisition of property and equipment and intangible assets*
Penambahan nilai aset hak-guna	(33.145)	11	(39.240)	*Addition of right-of-use assets*
Uang muka renovasi gedung	(10.263)		(16.532)	*Advance for building renovation*
Uang muka perangkat lunak, perangkat keras, dan lisensi	(8.077)		(12.302)	*Advance for software, hardware, and licenses*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(69.872)**		**(98.107)**	***Net Cash Used in Investing Activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the year then ended
December 31, 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan utang bank	2.050.000	38	1.625.000	*Proceeds from bank loans*
Penerimaan dari penerbitan utang obligasi	1.500.000	20,38	1.000.000	*Proceeds from issuance of bonds*
Penerimaan utang subordinasi	-	15	200.000	*Proceeds from subordinated loan*
Pembayaran utang bank	(1.819.897)	14,38	(2.061.468)	*Repayment of bank loans*
Pembayaran utang obligasi	(1.345.445)	38	(419.000)	*Repayment of bonds payable*
Pembayaran utang subordinasi	-	15	(200.000)	*Repayment of subordinated loan*
Pembayaran liabilitas sewa	(10.181)	19,38	(14.230)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran emisi obligasi	(3.940)	20	(4.890)	*Bonds emission payment*
Pembayaran dividen	(78.529)	23	(70.445)	*Dividend payment*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**292.008**		**54.967**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(30.126)**		**196.449**	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**540.216**		**343.767**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**510.090**		**540.216**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				***CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:***
Kas dan bank	510.090		540.216	*Cash on hand and in banks*
Kas dan setara kas	**510.090**		**540.216**	***Cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta No. 179 tanggal 23 Maret 1982 dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-3167-HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, Tambahan No. 1248, tanggal 1 April 1997.

Nama Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 5 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, dimana nama Perusahaan diubah dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha. Perubahan nama ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tanggal 27 Maret 2000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar yang memuat seluruh ketentuan Anggaran Dasar terakhir termuat dalam Akta No. 10 tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 15 April 2025 No. AHU-0024157.AH.01.02.TAHUN 2025.

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat tanggal 15 April 2025 No. AHU-AH.01.03-0102025 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2025 No. 40, Tambahan No. 13232.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") was established in the Republic of Indonesia as PT Jakarta-Tokyo Leasing based on the Notarial Deed No. 179 dated March 23, 1982 of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, which was subsequently amended by the Notarial Deed No. 96 dated December 15, 1982 of the same notary. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-3167-HT01.01.TH82 dated December 23, 1982 and was published in the State Gazette No. 26, Supplement No. 1248 dated April 1, 1997.

The Company's name has been changed several times, the latest of which was covered by the Notarial Deed No. 5 dated March 15, 2000 of Anna Wong, S.H., Notary in Tangerang, in which the Company's name was changed from PT Wahana Ometraco Multi Artha to PT Wahana Ottomitra Multiartha. This changes of name was approved by the Ministry of Laws and Regulations of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 dated March 27, 2000.

The Company's Articles of Association has been amended several times and the last amendment of Articles of Association contained all provision of Articles of Association which was covered by the Notarial Deed No. 10 dated March 25, 2025 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has obtained approval from Ministry of Law of Republic of Indonesia based on Decree Letter dated April 15, 2025 No. AHU-0024157.AH.01.02.TAHUN 2025.

Receipt of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System of Ministry of Law of the Republic of Indonesia based on Letter dated April 15, 2025 No. AHU-AH.01.03-0102025 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated May 20, 2025 No. 40, Supplement No. 13232.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Kegiatan usaha utama Perusahaan sebagaimana termuat pada Akta Anggaran Dasar tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
- Sewa Pembiayaan;
- Jual dan Sewa-Balik;
- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- Pembiayaan Proyek;
- Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara:
- Jual dan Sewa-Balik;
- Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
- Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara:
- Sewa Pembiayaan;
- Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- Fasilitas Dana; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The Company's main business activities as stated in Notarial Deed mentioned above are as follows:

a. Investment Financing is carried out in form:
- *Finance Lease;*
- *Sale and Leaseback;*
- *Factoring With Recourse;*
- *Factoring Without Recourse;*
- *Installment Purchases;*
- *Project Financing;*
- *Infrastructure Financing; and/or*
- *Other financing activities approved by Financial Services Authority.*

b. Working Capital Financing is carried out in form:
- *Sale and Leaseback;*
- *Installment Purchases;*
- *Factoring With Recourse;*
- *Factoring Without Recourse;*
- *Working Capital Facilities; and/or*
- *Other financing activities approved by Financial Services Authority.*

c. Multipurpose Financing is carried out in form:
- *Finance Lease;*
- *Installment Purchases;*
- *Fund Facilities; and/or*
- *Other financing activities approved by Financial Services Authority.*

d. Other financing business activities approved by Financial Services Authority.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Kegiatan usaha utama Perusahaan sebagaimana termuat pada Akta Anggaran Dasar tersebut di atas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan/atau Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagai berikut:
   a) Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Murabahah;*
      - *Salam;* dan/atau
      - *Istishna'.*
   b) Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Mudharabah;*
      - *Musyarakah;*
      - *Mudharabah Musytarakah;* dan/atau
      - *Musyarakah Mutanaqisah.*
   c) Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
      - *Ijarah;*
      - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik;*
      - *Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;*
      - *Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;*
      - *Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;*
      - *Ju'alah;* dan/atau
      - *Qardh.*

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha seperti yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.11/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Leasing kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing. Izin usaha ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 7 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada saat ini, izin usaha Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The Company's main business activities as stated in Notarial Deed mentioned above are as follows: (continued)

e. Provide financing and/or conduct business activities based on sharia principles in accordance with the regulation stipulated by Financial Services Authority, Government and/or Institutions that have the authority to issue fatwas in the field of sharia as follows:
   a) Buy and Sell Financing is carried out by using a contract:
      - *Murabahah;*
      - *Salam; and/or*
      - *Istishna'.*
   b) Investment Financing is carried out by using a contract:
      - *Mudharabah;*
      - *Musyarakah;*
      - *Mudharabah Musytarakah; and/or*
      - *Musyarakah Mutanaqisah.*
   c) Service Financing is carried out by using a contract:
      - *Ijarah;*
      - *Ijarah Muntahiyah Bittamlik;*
      - *Hawalah or Hawalah bil Ujrah;*
      - *Wakalah or Wakalah bil Ujrah;*
      - *Kafalah or Kafalah bil Ujrah;*
      - *Ju'alah; and/or*
      - *Qardh.*

The Company obtained a license to operate as a financing company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 135/KMK.06/2001 dated March 20, 2001 which was an extension of a previous license granted as mentioned in the Decision Letter of the Ministry of Finance No. KEP-028/KM.11/1982 dated June 30, 1982 regarding the Granting of the Operating License as a Leasing Company to PT Jakarta-Tokyo Leasing. This license was subsequently extended several times, the latest of which by the Decision Letter of the Ministry of Finance No. KEP-105/KM.13/1988 dated July 7, 1988 and changed by the Decision Letter of the Ministry of Finance No. 327/KMK.017/1997 dated July 21, 1997. Currently, the Company's license is based on Decision Letter of the Ministry of Finance No. 135/KMK.06/2001 dated March 20, 2001.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Altira Office Tower (lantai 32, 33, dan 35) Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. Perusahaan memiliki kantor cabang dan kantor selain kantor cabang dengan total 195 (seratus sembilan puluh lima) lokasi yang antara lain di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Nusa Tenggara (tidak diaudit).

Perusahaan merupakan entitas anak dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (''BMI'') dengan persentase kepemilikan sebesar 67,49%. Pemegang saham akhir BMI adalah Malayan Banking Berhad (''Maybank''), yang merupakan bank yang berkedudukan di Malaysia.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 30 November 2004, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) dengan Surat No. S-3551/PM/2004 untuk melakukan penawaran 200.000.000 lembar saham dengan total nilai nominal Rp20.000 atau Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp700 (dalam nilai penuh) per lembar saham. Saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 13 Desember 2004.

Pada tanggal 5 Februari 2015, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) kepada para pemegang saham Perusahaan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) berdasarkan Surat No. S-39/D.04/2015, sejumlah 1.481.481.480 lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp148.148 atau Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp135 (dalam nilai penuh) per lembar saham. Saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Februari 2015.

1. GENERAL (continued)

a. The Company’s Establishment (continued)

The Company’s head office is located at Altira Office Tower (32, 33, and 35 floor) Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. The Company has totally 195 (one hundred and ninety five) branch and non branch offices located in, among others, DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, and Nusa Tenggara (unaudited).

The Company is a subsidiary of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (''BMI'') with ownership percentage of 67.49%. The ultimate shareholder of BMI is Malayan Banking Berhad (''Maybank''), which is a bank based in Malaysia.

b. The Company’s Public Offerings

On November 30, 2004, the Company obtained the Effective Letter of the Registration Statement for the Initial Public Offering of Shares from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (“BAPEPAM”) in its Letter No. S-3551/PM/2004 for 200,000,000 shares with a total nominal value of Rp20,000 or Rp100 (in full amount) per share and initial offering price of Rp700 (in full amount) per share. The Company’s shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) on December 13, 2004.

On February 5, 2015, the Company obtained the Effective Letter of the Registration Statement for the Right Issue I (“PUT I”) of Shares to the shareholders of the Company in order to issue Rights based on Letter No. S-39/D.04/2015 for 1,481,481,480 shareholders’ new common shares with a nominal value of Rp148,148 or Rp100 (in full amount) per share and initial offering price of Rp135 (in full amount) per share. The Company’s shares were listed in Indonesia Stock Exchange on February 23, 2015.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings

Obligasi/ *Bonds*	Jumlah Pokok Obligasi/ *Nominal Value of Bonds*	Pernyataan Efektif/ *The Decision Letter*	Tanggal dan Tempat Obligasi Dicatat/ *Date and Place of Listed Bonds*
Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Bonds I WOM Finance Year 2003 With Fixed Interest Rate*	300.000/ *300,000*	Tanggal 31 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. S-2645/PM/2003/ *On October 31, 2003 based on Decision Letter No. S-2645/PM/2003 of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK")*	12 November 2003 di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia)/ *November 12, 2003 in Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange)*
Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Bonds II WOM Finance Year 2005 With Fixed Interest Rate*	500.000/ *500,000*	Tanggal 26 Mei 2005 berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM-LK No. S-1346/PM/2005/ *On May 26, 2005 based on Decision Letter No. S-1346/PM/2005 of BAPEPAM-LK*	8 Juni 2005 di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia)/ *June 8, 2005 in Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange)*
Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Bonds III WOM Finance Year 2006 With Fixed Interest Rate*	825.000/ *825,000*	Tanggal 24 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM-LK No. S-138/BL/2006/ *On May 24, 2006 based on Decision Letter No. S-138/BL/2006 of BAPEPAM-LK*	8 Juni 2006 di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia)/ *June 8, 2006 in Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange)*
Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Bonds IV WOM Finance Year 2007 With Fixed Interest Rate*	1.000.000/ *1,000,000*	Tanggal 14 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM-LK No. S-2265/BL/2007/ *On May 14, 2007 based on Decision Letter No. S-2265/BL/2007 of BAPEPAM-LK*	30 Mei 2007 di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia)/ *May 30, 2007 in Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange)*
Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Bonds V WOM Finance Year 2011 With Fixed Interest Rate*	1.400.000/ *1,400,000*	Tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM-LK No. S-1766/BL/2011/ *On February 23, 2011 based on Decision Letter No. S-1766/BL/2011 of BAPEPAM-LK*	7 Maret 2011 di Bursa Efek Indonesia/ *March 7, 2011 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds I Phase I WOM Finance Year 2014 With Fixed Interest Rate*	600.000/ *600,000*	Tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (dahulu BAPEPAM-LK) No. S-272/D.04/2014/ *On June 17, 2014 based on Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of Financial Services Authority ("OJK") (formerly BAPEPAM-LK)*	26 Juni 2014 di Bursa Efek Indonesia/ *June 26, 2014 in Indonesia Stock Exchange*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

Obligasi/ *Bonds*	Jumlah Pokok Obligasi/ *Nominal Value of Bonds*	Pernyataan Efektif/ *The Decision Letter*	Tanggal dan Tempat Obligasi Dicatat/ *Date and Place of Listed Bonds*
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds I Phase II WOM Finance Year 2014 With Fixed Interest Rate*	800.000/ *800,000*	Tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-272/D.04/2014/ *On June 17, 2014 based on Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of OJK*	8 Desember 2014 di Bursa Efek Indonesia/ *December 8, 2014 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds I Phase III WOM Finance Year 2015 With Fixed Interest Rate*	1.000.000/ *1,000,000*	Tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-272/D.04/2014/ *On June 17, 2014 based on Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of OJK*	6 April 2015 di Bursa Efek Indonesia/ *April 6, 2015 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds I Phase IV WOM Finance Year 2015 With Fixed Interest Rate*	600.000/ *600,000*	Tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-272/D.04/2014/ *On June 17, 2014 based on Decision Letter No. S-272/D.04/2014 of OJK*	23 Desember 2015 di Bursa Efek Indonesia/ *December 23, 2015 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds II Phase I WOM Finance Year 2016 With Fixed Interest Rate*	665.000/ *665,000*	Tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-295/D.04/2016/ *On June 16, 2016 based on Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK*	27 Juni 2016 di Bursa Efek Indonesia/ *June 27, 2016 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate*	720.500/ *720,500*	Tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-295/D.04/2016/ *On June 16, 2016 based on Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK*	23 Agustus 2017 di Bursa Efek Indonesia/ *August 23, 2017 in Indonesia Stock Exchange*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

Obligasi/ *Bonds*	Jumlah Pokok Obligasi/ *Nominal Value of Bonds*	Pernyataan Efektif/ *The Decision Letter*	Tanggal dan Tempat Obligasi Dicatat/ *Date and Place of Listed Bonds*
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds II Phase III WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate*	867.500/ *867,500*	Tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-295/D.04/2016/ *On June 16, 2016 based on Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK*	7 Desember 2017 di Bursa Efek Indonesia/ *December 7, 2017 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds II Phase IV WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate*	793.000/ *793,000*	Tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-295/D.04/2016/ *On June 16, 2016 based on Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK*	9 April 2018 di Bursa Efek Indonesia/ *April 9, 2018 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds II Phase V WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate*	360.500/ *360,500*	Tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-295/D.04/2016/ *On June 16, 2016 based on Decision Letter No. S-295/D.04/2016 of OJK*	20 Juni 2018 di Bursa Efek Indonesia/ *June 20, 2018 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds III Phase I WOM Finance Year 2018 With Fixed Interest Rate*	570.500/ *570,500*	Tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-184/D.04/2018/ *On December 14, 2018 based on Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK*	21 Desember 2018 di Bursa Efek Indonesia/ *December 21, 2018 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds III Phase II WOM Finance Year 2019 With Fixed Interest Rate*	1.675.000/ *1,675,000*	Tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-184/D.04/2018/ *On December 14, 2018 based on Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK*	31 Mei 2019 di Bursa Efek Indonesia/ *May 31, 2019 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds III Phase III WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate*	260.300/ *260,300*	Tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-184/D.04/2018/ *On December 14, 2018 based on Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK*	29 Mei 2020 di Bursa Efek Indonesia/ *May 29, 2020 in Indonesia Stock Exchange*

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

Obligasi/ *Bonds*	Jumlah Pokok Obligasi/ *Nominal Value of Bonds*	Pernyataan Efektif/ *The Decision Letter*	Tanggal dan Tempat Obligasi Dicatat/ *Date and Place of Listed Bonds*
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds III Phase IV WOM Finance Year 2020 With Fixed Interest Rate*	500.000/ *500,000*	Tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-184/D.04/2018/ *On December 14, 2018 based on Decision Letter No. S-184/D.04/2018 of OJK*	11 September 2020 di Bursa Efek Indonesia/ *September 11, 2020 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021 With Fixed Interest Rate*	500.000/ *500,000*	Tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-113/D.04/2021/ *On July 16, 2021 based on Decision Letter No. S-113/D.04/2021 of OJK*	29 Juli 2021 di Bursa Efek Indonesia/ *July 29, 2021 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022 With Fixed Interest Rate*	800.000/ *800,000*	Tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-113/D.04/2021/ *On July 16, 2021 based on Decision Letter No. S-113/D.04/2021 of OJK*	11 April 2022 di Bursa Efek Indonesia/ *April 11, 2022 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023 With Fixed Interest Rate*	1.000.000/ *1,000,000*	Tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-113/D.04/2021/ *On July 16, 2021 based on Decision Letter No. S-113/D.04/2021 of OJK*	12 April 2023 di Bursa Efek Indonesia/ *April 12, 2023 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024 With Fixed Interest Rate*	1.000.000/ *1,000,000*	Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-70/D.04/2024/ *On June 21, 2024 based on Decision Letter No. S-70/D.04/2024 OJK*	3 Juli 2024 di Bursa Efek Indonesia/ *July 3, 2024 in Indonesia Stock Exchange*
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap/ *Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025 With Fixed Interest Rate*	1.500.000/ *1,500,000*	Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-70/D.04/2024/ *On June 21, 2024 based on Decision Letter No. S-70/D.04/2024 OJK*	25 Juni 2025 di Bursa Efek Indonesia/ *June 25, 2025 in Indonesia Stock Exchange*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 1 tanggal 1 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 2025 No. AHU-AH.01.09-0346165 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan Susunan Komite Audit No. 056/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees

Based on Notarial Deed No. 1 dated October 1, 2025 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which the notification of data changes has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System of Ministry of Law of Republic of Indonesia dated October 3, 2025 No. AHU-AH.01.09-0346165 and Resolution Letter of Board of Commissioners concerning Determination Audit Committee Composition No. 056/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, and Audit Committee as of December 31, 2025 is as follows:

Dewan Komisaris				***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	:	Sarastri Baskoro	:	*President Commissioner (Independent Commissioner)*
Komisaris	:	Thilagavathy Nadason	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Taufik Aulia	:	*Commissioner*
Komisaris Independen	:	Rallyati Arianto Wibowo, S.E.	:	*Independent Commissioner*
Direksi				***Directors***
Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar	:	*President Director*
Wakil Presiden Direktur	:	Njauw Vido Onadi*	:	*Vice President Director*
Direktur Keuangan	:	Cincin Lisa Hadi	:	*Finance Director*
Direktur Pemasaran	:	Wibowo	:	*Marketing Director*
Direktur Operasional	:	Anthony Yuarez Panggabean	:	*Operations Director*
Dewan Pengawas Syariah				***Sharia Supervisory Board***
Ketua	:	Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.	:	*Chairman*
Anggota	:	Prof. Dr. Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen	:	*Member*
Komite Audit				***Audit Committee***
Ketua	:	Rallyati Arianto Wibowo, S.E.	:	*Chairman*
Anggota	:	Rijanti Witarsa	:	*Member*
Anggota	:	Anang Yudiansyah, S.E.	:	*Member*

* Pengangkatan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan, yang juga membawahi fungsi Manajemen Risiko, telah mendapat persetujuan dari OJK dan efektif menjabat sejak tanggal 5 Februari 2025.

* *The appointment of Njauw Vido Onadi as Vice President Director of the Company, which also supervise Risk Management function, has been approved by OJK and effective as of February 5, 2025.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 38 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 November 2024 No. AHU-AH.01.09-0271508 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan Susunan Komite Audit No. 056/XI/BOC-WOM/2024 tanggal 26 November 2024, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

Based on Notarial Deed No. 38 dated October 31, 2024 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which the notification of data changes has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System of Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia dated November 4, 2024 No. AHU-AH.01.09-0271508 and Resolution Letter of Board of Commissioners concerning Determination Audit Committee Composition No. 056/XI/BOC-WOM/2024 dated November 26, 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, and Audit Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Dewan Komisaris				***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	:	Sarastri Baskoro*	:	*President Commissioner (Independent Commissioner)*
Komisaris	:	Thilagavathy Nadason	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Taufik Aulia**	:	*Commissioner*
Komisaris Independen	:	Rallyati Arianto Wibowo, S.E.***	:	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin****	:	*Independent Commissioner*
Direksi				***Directors***
Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar	:	*President Director*
Wakil Presiden Direktur	:	Njauw Vido Onadi*****	:	*Vice President Director*
Direktur Keuangan	:	Cincin Lisa Hadi	:	*Finance Director*
Direktur Pemasaran	:	Wibowo	:	*Marketing Director*
Direktur Operasional	:	Anthony Yuarez Panggabean	:	*Operations Director*
Direktur Manajemen Risiko	:	Njauw Vido Onadi*****	:	*Risk Management Director*
Dewan Pengawas Syariah				***Sharia Supervisory Board***
Ketua	:	Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.	:	*Chairman*
Anggota	:	Prof. Dr. Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen	:	*Member*
Komite Audit				***Audit Committee***
Ketua	:	Rallyati Arianto Wibowo, S.E.******	:	*Chairman*
Anggota	:	Rijanti Witarsa	:	*Member*
Anggota	:	Anang Yudiansyah, S.E.	:	*Member*

* Pengangkatan Sarastri Baskoro sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perusahaan telah mendapat persetujuan dari OJK dan efektif menjabat sejak tanggal 17 Oktober 2024.

** Pengangkatan Taufik Aulia sebagai Komisaris Perusahaan efektif menjabat sejak tanggal 9 Oktober 2024.

*** Pengangkatan Rallyati Arianto Wibowo, S.E. sebagai Komisaris Independen Perusahaan telah mendapat persetujuan dari OJK dan efektif menjabat sejak tanggal 2 Oktober 2024.

**** Pengangkatan kembali Myrnie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perusahaan efektif sejak tanggal 1 Oktober 2024.

***** Selama persetujuan dari OJK belum diperoleh, Njauw Vido Onadi tetap menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko. Pengangkatan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden Direktur telah mendapat persetujuan dari OJK dan efektif menjabat sejak tanggal 5 Februari 2025 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 12 tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.09-0080187 tertanggal 14 Februari 2025.

****** Pengangkatan Rallyati Arianto Wibowo, S.E. sebagai Ketua Komite Audit efektif sejak tanggal 26 November 2024.

* *The appointment of Sarastri Baskoro as President Commissioner/Independent Commissioner of the Company has been approved by OJK and effective as of October 17, 2024.*

** *The appointment of Taufik Aulia as Commissioner of the Company effective as of October 9, 2024.*

*** *The appointment of Rallyati Arianto Wibowo, S.E. as Independent Commissioner of the Company has been approved by OJK and effective as of October 2, 2024.*

**** *Reappointment of Myrnie Zachraini Tamin as Independent Commissioner of the Company effective as of October 1, 2024.*

***** *As long as the approval from OJK has not been obtained, Njauw Vido Onadi will continue to serve as Risk Management Director. The appointment of Njauw Vido Onadi as Vice President Director has been approved by OJK and effective as of February 5, 2025 accordance with Notarial Deed No. 12 dated February 12, 2025 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta which the notification of data changes has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System of Ministry of Law of Republic of Indonesia - Directorate General of General Legal Administration No. AHU-AH.01.09-0080187 dated February 14, 2025.*

****** *The appointment of Rallyati Arianto Wibowo, S.E. as Chairman Audit Committee of the Company effective as of November 26, 2024.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pembentukan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Sekretaris Perusahaan No. 004/V/BOD-WOM/2022 tanggal 9 Mei 2022, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Cincin Lisa Hadi.

Pembentukan Divisi Audit Internal Perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 31 Agustus 2018, Kepala Unit Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Ignatius Prasetya.

Perusahaan memiliki masing-masing 2.170 dan 2.274 karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit).

e. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 23 Februari 2026.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

The establishment of the Company's Corporate Secretary is in compliance with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014.

Based on Decision Letter Concerning Change of Corporate Secretary No. 004/V/BOD-WOM/2022 dated May 9, 2022, the Corporate Secretary as of December 31, 2025 and 2024 is Cincin Lisa Hadi.

The establishment of the Company's Internal Audit Division is in compliance with OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015.

Based on Directors' Decision Letter of the Company dated August 31, 2018, the Internal Audit Division Head as of December 31, 2025 and 2024 is Ignatius Prasetya.

The Company has a total of 2,170 and 2,274 employees as of December 31, 2025 and 2024, respectively (unaudited).

e. Completion of the Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of the accompanying financial statements which were completed and authorized for issue by the Company's Directors on February 23, 2026.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of compliance and basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("FAS") and Sharia Financial Accounting Standards in Indonesia, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards and Board of Sharia Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Financial Services Authority ("OJK"), Regulation No. VIII.G.7 regarding "Issuer's or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure" as included in the Appendix of the Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the financial statements (continued)

The financial statements have been prepared on the accrual basis except for the statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements.

The statement of cash flows presents information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities using the direct method.

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency.

All figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

b. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and cash in banks, and not used as collateral for loans nor restricted.

c. Transactions with related parties

The Company applied SFAS No. 224, "Related Parties Disclosures". The revised SFAS requires disclosure of related parties relationships, transactions, and outstanding balances, including commitments, in the financial statements.

The transactions are entered into based on terms agreed by the parties, such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi sebagai berikut:

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas memenuhi salah satu hal berikut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1);

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are:

1) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a) Has control or joint control of the reporting entity;
   b) Has significant influence over the reporting entity; or
   c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   c) Both entities are joint ventures of the same third party;
   d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e) The entity is a employee benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is it self such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in 1);

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

2) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
   g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
   h) Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

d. Aset keuangan

Klasifikasi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are: (continued)

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)
   g) A person identified in 1) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
   h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

d. Financial assets

Classification

Financial assets have been classified as financial assets measured at amortized cost, financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and financial assets measured at fair value through profit or loss.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Perusahaan melakukan penilaian terhadap tujuan model bisnis dari kepemilikan suatu aset pada tingkatan portofolio, karena hal ini yang paling mencerminkan cara bisnis dikelola dan informasi diberikan kepada manajemen. Informasi yang dipertimbangkan meliputi:

- Kebijakan dan tujuan yang dinyatakan untuk portofolio dan pengoperasian kebijakan tersebut dalam praktiknya. Secara khusus, apakah strategi manajemen berfokus pada menghasilkan pendapatan bunga kontraktual, mencocokkan durasi aset keuangan dengan durasi kewajiban yang mendanai aset tersebut atau realisasi arus kas melalui penjualan aset;
- Bagaimana kinerja portofolio dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen Perusahaan;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis itu) dan strateginya untuk bagaimana risiko tersebut dikelola.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, "pokok" didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. "Bunga" didefinisikan sebagai:

- Imbalan untuk nilai waktu atas uang;
- Risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu;
- Risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi); dan
- Marjin keuntungan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets (continued)

Business model assessment

The Company makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management. The information considered includes:

- *The stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. In particular, whether management's strategy focuses on earning contractual interest revenue, matching the duration of the financial assets to the duration of the liabilities that are funding those assets or realizing cash flows through the sale of the assets;*
- *How the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Company's management;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and its strategy how those risks are managed.*

Assessment of whether contractual cash flows are solely payment of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, "principal" is defined as the fair value of the financial assets on initial recognition. "Interest" is defined as:

- *Consideration for the time value of money;*
- *Credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time;*
- *Other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs); and*
- *Profit margin.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:
- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Ketentuan percepatan pelunasan dan perpanjangan.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Perusahaan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets (continued)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payment of principal and interest ("SPPI") (continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial assets contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:
- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Prepayment and extension terms.*

The following table presents classification of financial instruments of the Company based on characteristic of those financial instruments:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 109/ ***Category as defined by SFAS No. 109***		**Golongan (ditentukan oleh Perusahaan)/** ***Class (as determined by the Company)***	**Subgolongan/** ***Subclasses***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*	Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents*	- Bank/*Cash in banks*
		Piutang pembiayaan multiguna/*Multipurpose financing receivables* Piutang pembiayaan modal kerja/*Working capital financing receivables* Piutang pembiayaan investasi/*Investment financing receivables*	
		Piutang lain-lain/*Other receivables*	
		Aset lain-lain/*Other assets*	- Uang jaminan/*Security deposits*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*	Utang bank/*Bank loans*	
		Biaya yang masih harus dibayar/*Accrued expenses*	
		Utang lain-lain/*Other payables*	
		Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	
		Utang obligasi/*Bonds payable*	
		Utang subordinasi/*Subordinated loan*	

Pengakuan dan Pengukuran

Klasifikasi aset keuangan menggunakan pendekatan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar melalui laba rugi.

Recognition and Measurement

The classification of financial assets uses the business model approach and contractual cash flow characteristic of the financial assets. After initial recognition, financial assets are measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer pengendalian atas aset.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Perhitungan cadangan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas aset keuangan dinilai secara kolektif yang dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan mempertimbangkan segmentasi pembiayaan berdasarkan model kerugian masa depan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets (continued)

Recognition and Measurement (continued)

All financial instruments are measured initially at their fair value. In the case that financial assets or financial liabilities are not designated at fair value through profit or loss, the fair value should be added with attributable transaction costs directly from acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

Financial asset classified as amortized cost and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Derecognition

The Company derecognizes a financial asset, if and only if, the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

e. Allowance for Impairment losses on financial assets

Calculation of allowances for expected credit losses ("ECL") on financial assets assessed collectively is grouped based on similar credit risk characteristic and taking into account the financing segmentation based on future loss model.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Perusahaan mengukur cadangan kerugian aset keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur ("ECL *Lifetime*") aset keuangan jika risiko kredit atas aset keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan akan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan.

ECL 12 Bulan dan ECL *Lifetime*

ECL 12 bulan adalah bagian dari ECL *lifetime* yang merepresentasikan ECL yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika umur aset keuangan yang diharapkan kurang dari 12 bulan). ECL 12 bulan dibobot dengan probabilitas terjadinya *default* dimaksud.

ECL *lifetime* adalah kerugian kredit ekpektasian yang dihasilkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Staging Criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (*stage* 1, *stage* 2, *stage* 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Stage 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai *stage* 1 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Allowance for Impairment losses on financial assets (continued)

The Company should measure the loss allowance of financial assets as much as lifetime expected credit losses ("Lifetime ECL") of financial assets if credit risk of the financial assets has increased significantly since the initial recognition. If at the reporting date, the credit risk of the financial assets has not increased significantly since the initial recognition, the Company measures the loss allowance for the financial assets as much as 12-month ECL.

12-Month ECL and Lifetime ECL

12-month ECL is the portion of the lifetime ECL that represents the ECL that results from default events on a financial assets that is possible within 12 months after the reporting date (or a shorter period if the expected life of the financial assets is less than 12 months). 12-month ECL is weighted by the probability of such a default occurring.

Lifetime ECL is the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of the financial instruments.

Staging Criteria

Financial assets have to be allocated to one of the three impairment stages (stage 1, stage 2, stage 3) by determining whether a significant increase in credit risk has occurred on financial instruments since initial recognition or whether the facility is defaulted on each reporting date.

Stage 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month ECL is recognized.

Financial assets categorized as stage 1 is financial assets with days overdue less or equal than 30 (thirty) days.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

Stage 2: mencakup instrumen keuangan yang tidak hanya mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan), tetapi juga tidak memiliki bukti penurunan nilai yang objektif. Untuk aset ini, ECL *lifetime* dihitung. ECL *lifetime* adalah kerugian kredit ekpektasian yang dihasilkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Aset keuangan yang dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dikategorikan sebagai *stage* 2 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan dari 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi, juga dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sehingga akan dikategorikan minimal sebagai *stage* 2 selama periode tertentu.

Stage 3: mencakup instrumen keuangan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah *impaired* (gagal bayar). Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan ECL 12 bulan (*stage* 1) atau ECL *lifetime* (*stage* 2) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit ("SICR"). Penentuan kriteria SICR memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai *stage* 3 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, aset pembiayaan yang ditarik, dan aset dengan status klaim asuransi.

Perusahaan menetapkan definisi peningkatan risiko kredit instrumen keuangan secara signifikan sejak pengakuan awal sesuai dengan praduga (*rebuttable presumption*) PSAK No. 109, yaitu ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Allowance for Impairment losses on financial assets (continued)

Staging Criteria (continued)

Stage 2: includes financial instruments that not only have had a significant increase in credit risk since initial recognition (unless they have low credit risk at the reporting date), but also do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL is recognized. Lifetime ECL is the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of the financial instruments.

Financial assets considered to experience significant increase in credit risk and categorized as stage 2 is financial assets with days overdue 31 (thirty one) to 90 (ninety) days.

Financial instrument that has proposed restructure program, will be considered to experience significant increase in credit risk, so will be categorised minimum as stage 2 during certain period.

Stage 3: includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has obligors that already impaired (defaulted). The key factor in determining whether a financial instrument attracts 12-month ECL (stage 1) or lifetime ECL (stage 2) is called by the criteria of Significant Increase in Credit Risk ("SICR"). Determining SICR criteria involves assessment of whether there has been a significant increase in credit risk on each reporting date.

Financial assets categorized as stage 3 is financial assets with days overdue more than 90 (ninety) days, repossessed asset, and asset with status claim insurances.

The Company has determined the definition of a significant increase in credit risk of financial instruments since initial recognition in accordance with presumption (rebuttable presumption) SFAS No. 109, is when contractual payments are overdue for more than 30 (thirty) days.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

PSAK No. 109 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam ECL harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan, perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi *forward-looking* dari *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD"), dan *Exposure At Default* ("EAD").

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* dan piutang *ijarah*

Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 402 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*", PSAK No. 407 "Akuntansi *Ijarah*", dan PSAK No. 109 tidak diterapkan untuk penurunan nilai dari aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa piutang *murabahah* dan piutang *ijarah* telah mengalami penurunan nilai. Piutang *murabahah* dan piutang *ijarah* mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

Perusahaan mengevaluasi penurunan nilai piutang murabahah dan piutang ijarah secara kolektif. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah dan piutang ijarah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Perusahaan. Piutang murabahah dan piutang ijarah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dengan mempertimbangkan, antara lain, tunggakan debitur. Perhitungan penurunan nilai ini membutuhkan estimasi PD, LGD, dan EAD.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Allowance for Impairment losses on financial assets (continued)

Staging Criteria (continued)

SFAS No. 109 requires inclusion of information about past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions. The estimates of changes in ECL should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period. The calculation of ECL requires estimation of forward-looking from Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), and Exposure At Default ("EAD").

Allowance for impairment losses on murabahah receivables and ijarah receivables

In accordance with Interpretation of Financial Accounting Standard (IFAS) No. 402 "Impairment of Murabahah Receivables", SFAS No. 407 "Ijarah Accounting", and SFAS No. 109 is not applied to impairment of assets from sharia-based transactions.

At each date of the statement of financial position, the Company assesses whether there is objective evidence that murabahah receivables and ijarah receivables are impaired. Murabahah receivables and ijarah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The Company assessed the impairment of murabahah receivables and ijarah receivables on collective basis. Calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables and ijarah receivables are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Company. Murabahah receivables and ijarah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering, among others, past due status of the debtors. The calculation of impairment losses requires estimation of PD, LGD, and EAD.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada awalnya diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Pendanaan dan Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak ditunaikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

g. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus atas jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal dan peristiwa kegagalan, kepailitan, atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost and financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

The Company determines the classification of its financial liabilities in initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value.

In the case of financial liabilities measured at amortized cost, these are initially recorded at fair value less directly attributable transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Financing Costs and Financing Charges" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses are recognized in the profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

g. Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount are reported in the statements of financial position if, and only if, there is currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must been forceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency, or bankruptcy of the company or all the counterparties.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, piutang pembiayaan investasi, piutang pembiayaan *murabahah*, piutang *ijarah*, dan cadangan kerugian penurunan nilai

Piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, dan piutang pembiayaan investasi merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara perpanjangan tenor, penundaan pokok, atau kombinasi keduanya.

Piutang yang tak tertagih dihapuskan berdasarkan evaluasi manajemen Perusahaan dan pada umumnya setelah menunggak lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat terjadinya.

Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi - neto, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai beban pendanaan dan keuangan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen.

Pada saat akad *murabahah*, piutang pembiayaan *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*).

Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan *margin* dari piutang pembiayaan *murabahah*.

Akad *murabahah* secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan *margin* dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan pembiayaan multiguna.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, investment financing receivables, murabahah financing receivables, ijarah receivables, and allowance for impairment losses

Multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, and investment financing receivables are presented net of unearned financing income and allowance for impairment losses.

Credit restructuring can be done by extending the tenor, postponing the principal payment, or a combination of both.

Receivables are written-off when they are deemed to be uncollectible based on Company's management evaluation and generally when they are overdue for more than 210 (two hundred and ten) days. Collection of receivables previously written-off is recognized as other income at the time of occurrence.

Total interest earned from customers is recorded as part of multipurpose financing, working capital financing, and investment financing income - net, while interest charged by the creditors is recorded as financing costs and financing charges.

Murabahah is goods sell-buy contract with a sold price amounting to acquisition cost plus agreed margin and the Company must disclose the acquisition cost to customer.

When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized as at acquisition cost plus agreed margin.

Murabahah margins are recognized over the period of the contract based on margin of the murabahah financing receivables.

Substantially, murabahah contract is a financing, so that margin recognition is based on standards which regulate financing, as mentioned in multipurpose financing policy.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, piutang pembiayaan investasi, piutang pembiayaan *murabahah*, piutang *ijarah*, dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Pada setiap akhir periode laporan keuangan, piutang pembiayaan *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi *margin* yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Ijarah adalah akad *ijarah* multijasa antara penerima jasa (*musta'jir*) dengan pihak yang memberikan jasa (*ajir*) untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*.

Piutang *ijarah* multijasa adalah porsi pokok atas pendapatan *ijarah* yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* multijasa disajikan sebagai pos lawan piutang *ijarah* multijasa. Perusahaan mencatat *ujrah ijarah* multijasa yang akan diterima sebagai piutang *ujrah*.

i. Piutang aset tarikan

Piutang ini merupakan piutang yang berasal dari jaminan piutang milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi, yang dinyatakan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat piutang atau nilai realisasi neto dari jaminan milik konsumen tersebut.

Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi neto piutang dicatat sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain dan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Konsumen memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual jaminan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, investment financing receivables, murabahah financing receivables, ijarah receivables, and allowance for impairment losses (continued)

At the end of each period of financial statements, murabahah financing receivables are stated at net realizable value, consist of outstanding murabahah receivables less unearned margin and allowance for impairment losses.

Ijarah is the multi-services ijarah contract between the recipient of the service (musta'jir) and the party who provide the service (ajir) to exchange benefits and ujrah.

Multi-services ijarah receivables are the principal portion of unpaid ijarah income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on multi-services ijarah receivables are presented as a contra account of multi-services ijarah receivables. The Company records ujrah receivables of multi-services ijarah as ujrah receivables.

i. Receivables from foreclosed collateral

This receivable represents receivables derived from collaterals owned by the customer for settlement of their multipurpose financing, working capital financing, and investment financing receivables, which is presented at the lower of the carrying value of the related receivables or the net realizable value of the collaterals.

The difference between the carrying value and the net realizable value of receivables is recorded as provision for impairment losses of other assets and is charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The customers give the right to the Company to sell the collaterals or take any other actions to settle the outstanding multipurpose financing, working capital financing, and investment financing receivables in the events of default.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang aset tarikan (lanjutan)

Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

j. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan.

k. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya. Aset tetap, kecuali tanah, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/*Year*	Persentase/ *Percentage*	
Bangunan	10	10,00%	*Buildings*
Renovasi kantor	1 - 10	10,00% - 100,00%	*Leasehold improvement*
Kendaraan	3 - 4	25,00% - 33,00%	*Vehicles*
Peralatan kantor	4	25,00%	*Office equipment*
Perabot kantor	4	25,00%	*Office furniture and fixtures*

Peralatan dalam proses instalasi dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Receivables from foreclosed collateral (continued)

Customers are entitled to the positive difference between the proceeds from sale of the collaterals and the outstanding multipurpose financing, working capital financing, and investment financing receivables. If the difference is negative, the resulting loss is charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited.

k. Property and equipment

Property and equipment are initially stated at acquisition cost. After initial measurement, property and equipment are measured using the cost model. Property and equipment, except land, are carried at its cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such acquisition cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when that cost is incurred if the recognition criterias are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property and equipment as a replacement if the recognition criterias are satisfied.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criterias are recognized in the profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the asset as follows:

Equipment under installation is stated at cost and presented as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak dipergunakan lagi atau dijual), biaya perolehan beserta akumulasi penyusutan yang terkait dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Pada setiap akhir periode pelaporan estimasi umur manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang.

l. Aset hak-guna

PSAK No. 116 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK No. 116 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK No. 30 Sewa. Oleh karena itu, pesewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

Perusahaan mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Aset hak-guna yang diakui adalah jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa dibayar dimuka atau terutang terkait sewa tersebut.

Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Aset sewa disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Property and equipment (continued)

When assets are derecognized (retired or otherwise disposed of), their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized as profit or loss for the current year.

At every reporting date the estimated useful lives, depreciation method, and residual values are reviewed.

l. Right-of-use assets

SFAS No. 116 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognize a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. SFAS No. 116 substantially carries forward the lessor accounting requirements in SFAS No. 30 Leases. Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.

The Company recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. The corresponding right-of-use asset recognized was an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of prepaid or accrued lease payments relating to those leases.

Finance expense is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri atas perangkat lunak.

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Perangkat lunak

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tidak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaatnya, yaitu 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) tahun.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat ekonomis dari perangkat lunak tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Intangible assets

Intangible assets consist of software.

Intangible assets are recognized if, and only if when its cost can be measured reliably and it is probable that expected future economic benefits that are attributable to it will flow to the Company.

Software

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible assets and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Cost of software consists of all expenses directly attributable cost to the preparation of such software and ready to be used for their intended purpose.

Subsequent expenditure on software can be added to the software acquisition cost or is capitalized as software only if those expenditure increases the future economic benefits of the software, so that it becomes larger than originally expected performance standards. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as expenses when incurred.

Software is amortized by using straight-line method over the estimated useful life of software, which is 4 (four) to 10 (ten) years.

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income from the date those software is available for use until the economic benefits of software is ended.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tidak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, biaya dibayar dimuka, dan uang muka ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, Perusahaan akan melakukan estimasi jumlah nilai aset yang dapat dipulihkan.

o. Biaya penerbitan emisi efek ekuitas dan emisi obligasi

Biaya penerbitan efek ekuitas disajikan sebagai pengurang modal disetor lainnya dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang terhadap hasil penerbitan dan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi (Catatan 2f).

p. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Intangible assets (continued)

Intangible assets are derecognized when disposed or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of intangible assets are determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset. Gains and losses are recognized in the statement profit or loss and other comprehensive income when the asset is derecognized.

n. Impairment of non-financial assets

Assets are considered as impaired when the carrying value of assets exceed the recoverable amount. The carrying amount of non-financial assets, except for deferred tax assets, prepaid expenses, and advances are reviewed each period to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the Company will estimate the assets recoverability.

o. Stock and bonds issuance costs

Stock issuance costs are presented as deduction from additional paid-in capital in the equity section in the statement of financial position.

Costs incurred relating to the bonds issuance are presented as deduction from the issuance proceeds and amortized using the effective interest rate over the term of the bonds (Note 2f).

p. Provision

Provision are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive), where as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Provisi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dipulihkan.

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan mengakui pendapatan atas pembiayaan konsumen seperti yang dijelaskan pada Catatan 2h di atas.

Pendapatan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi dinyatakan sebesar pendapatan neto setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank sehubungan dengan transaksi-transaksi kerjasama pembiayaan bersama.

Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan *margin* dari piutang pembiayaan *murabahah*.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara merata.

Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen diakui pada saat realisasi.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai suatu pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang timbul, diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

Perusahaan berhak menentukan suku bunga yang lebih tinggi ke konsumen daripada suku bunga yang ditetapkan oleh bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dari transaksi-transaksi tersebut bagi Perusahaan dan disajikan sebagai "Pendapatan Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Investasi - Neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Provision (continued)

Provision are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

q. Revenue and expense recognition

The Company recognizes revenue on consumer financing as explained in Note 2h above.

The multipurpose financing, working capital financing, and investment financing income are presented net of amounts of the bank portion on such income relating to the cooperation transactions of joint financing.

Murabahah margins are recognized over the period of the contract based on margin of the murabahah financing receivables.

Income from ijarah is recognised proportionately over the contract period.

Penalty income arising from late payments of consumer financing installments is recognized when realized.

Early termination is treated as cancellation of an existing agreement and the resulting gain or loss is recognized as profit or loss for the current year.

The Company has the right to set higher interest rates to customers than that stated by the bank for the cooperation transactions of joint financing. The difference is recognized as revenue from such transactions and presented as "Multipurpose Financing, Working Capital Financing, and Investment Financing Income - Net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Bunga bank merupakan pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penempatan giro pada bank yang diakui pada saat diperoleh atau saat terjadinya.

Pendapatan dan beban administrasi, kecuali biaya-biaya atau pendapatan yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen seperti dijelaskan pada Catatan 2h, diakui pada saat diperoleh atau terjadinya.

r. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi tahun berjalan.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, rata-rata kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang digunakan masing-masing sebesar Rp16.782 (dalam nilai penuh) dan Rp16.162 (dalam nilai penuh) untuk ASD1 (dalam nilai penuh).

s. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 212, "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam periode berjalan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Revenue and expense recognition (continued)

Interest from banks represents income obtained by the Company from its placement of current account in banks which is recognized when earned or incurred.

Administration income and expenses, except for the initial direct costs or income relating to the consumer financing as explained in Note 2h, are recognized when earned or incurred.

r. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Indonesian Rupiah to reflect the average of selling and buying exchange rate at such date as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are credited or charged to the profit or loss for current year.

As of December 31, 2025 and 2024, the average of selling and buying exchange rates used at such date as published by Bank Indonesia were Rp16,782 (in full amount) and Rp16,162 (in full amount) to USD1 (in full amount), respectively.

s. Taxation

The Company applied SFAS No. 212, "Accounting for Income Tax", which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position and transactions and other events of the current period.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final (lanjutan)

Mengacu pada revisi PSAK No. 212 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 212. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan deposito dan giro sebagai pos tersendiri.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau apabila diajukan permohonan keberatan atau banding, atau ketika hasil keberatan atau banding sudah ditetapkan, kecuali jika ada ketidakpastian yang signifikan mengenai hasil dari banding tersebut, di mana dampak dari amandemen kewajiban pajak berdasarkan ketetapan pajak tersebut diakui pada saat mengajukan banding.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Final Tax (continued)

Referring to revised SFAS No. 212 as mentioned above, final tax is no longer governed by SFAS No. 212. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from time deposits and current account as separate line item.

Current Tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on the applicable tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current period operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment letter is received or objection or appeal is submitted, or the result of the objection or appeal has been determined, unless there is significant uncertainty as to the outcome of such appeal, in which event the impact of the amendment of tax obligations based on an assessment is recognized at the time of making such appeal.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional (Direktur) untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Sehubungan dengan ini, segmen operasi dalam laporan keuangan disajikan berdasarkan pengklasifikasian umum atas daerah pemasaran sebagai segmen geografis. Rincian segmen operasi tersebut diungkapkan dalam Catatan 39.

u. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu sejumlah 3.481.481.480 (dalam nilai penuh) saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

v. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai suatu liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut diumumkan dan disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products and services (business segment), or providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and reward that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported is the measure reported to the chief operation decision maker (Directors) for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, result, assets, and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

Financial information is reported based on the information used by management in evaluating the performance of each segment and determining the allocation of resources. In this respect, the business operating segment in the financial statements are presented based on general classification of marketing areas as geographical segments. The details of operating segment are disclosed in Note 39.

u. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year with the weighted average number of shares outstanding during the year, which is 3,481,481,480 (in full amount) shares for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

v. Dividends

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 219, "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Perusahaan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan kerja dan pesangon pemutusan hubungan kerja.

Perusahaan mencatat penyisihan manfaat pasti untuk memenuhi imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan peraturan Perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja No. 6 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 ("Undang-undang Cipta Kerja"), dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021. Penyisihan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "*Projected Unit Credit*".

Perkiraan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program.

Biaya imbalan kerja yang diakui selama periode berjalan terdiri dari biaya jasa dalam laba rugi, bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dalam laba rugi dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja terdiri atas:
1. Keuntungan dan kerugian aktuarial.
2. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.
3. Setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Liability for employee benefits

The Company adopted SFAS No. 219, "Employee Benefits", which regulates accounting treatment and disclosure employee benefits, for both short-term and long-term employee benefits.

The Company recognizes employee benefits under formal and informal programs or agreements, legislative requirements or through industry arrangements, including employee benefits and termination benefits.

The Company made provision for defined benefit in order to meet the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Company's regulation, Job Creation Law No. 6 year 2023 dated March 31, 2023 ("The Job Creation Law"), and Government Regulation No. 35 year 2021. The said provision are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

The estimated liabilities as of the statement of financial position date represents the present value of the defined benefit obligation as of the statement of financial position date less the fair value of plan assets.

The employee benefits expense recognized during the current period consists of service cost in profit and loss, net interest on the net defined benefit liability in profit and loss and remeasurement of the net defined benefit liabilities in other comprehensive income.

Remeasurements of the net defined benefit liability consists of:
1. *Actuarial gains and losses.*
2. *Return on plan assets, excluding amount included in net interest on the net defined benefit liability.*
3. *Any change in effect of the asset ceiling, excluding amount included in net interest on the net defined benefit liability.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

Perusahaan telah memiliki program pensiun untuk kompensasi pesangon yang mana Perusahaan membayar iuran ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang dihitung berdasarkan jumlah tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan. Akumulasi saldo DPLK yang berasal dari kontribusi Perusahaan digunakan untuk membiayai imbalan pensiun normal sesuai dengan program imbalan pasti.

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa penghargaan masa kerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban imbalan ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja. Liabilitas ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan kerja jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

x. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Perusahaan telah menerapkan PSAK yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

  Amandemen PSAK No. 221 mengatur ketika kondisi ekonomi suatu negara memburuk, misalnya hiperinflasi, akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah mata uang negara tersebut tertukarkan menjadi mata uang lain serta kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Liability for employee benefits (continued)

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income are not reclassified to profit or loss in subsequent years.

The Company has a pension program for severance compensation where the Company pays contributions to a Financial Institution Pension Plan ("DPLK") which is calculated at a certain amount of fixed income of employees who meet the Company's criteria. The accumulated DPLK balance contributed by the Company is used to off set normal retirement benefit under the defined benefit plan.

The Company provides other long-term employee benefits in the form of long service award which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using a method which is applied in calculating liability for employee benefits. These liabilities are calculated minimum once a year by an independent actuary. Other long-term employee benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

x. Change in accounting policies and disclosures

The Company adopted SFAS which effective on or after January 1, 2025 which is considered relevant to the financial statements as follows:

- *Amendment of SFAS No. 221: the Impact of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability*

  The amendment of SFAS No. 221 regulated when a country's economic conditions deteriorate, such as hyperinflation, it can cause difficulties in determining whether the country's currency is exchangeable into another currency, as well as the exchange rate to be used when the currency is not exchangeable.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Perusahaan telah menganalisis penerapan standar akuntansi di atas dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Change in accounting policies and disclosures (continued)

The Company has assessed that the adoption of the above-mentioned accounting standards and does not have significant impact to the financial statements.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Judgements

The preparation of financial statements, in conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia requires management to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Uncertainty about these assumptions and estimation could result material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next financial reporting year.

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan *(input)* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia, bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Evaluasi atas cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada Catatan 2e dan 2h.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgements (continued)

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but when observable market data are not available, management judgement is required to establish fair values. The management judgements include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long-term derivatives and discount rates, early payment rates, and default rate assumptions.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial reporting year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters which are available when the financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future development, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Allowance for impairment losses on financial assets

Allowance for impairment losses on financial assets carried at amortized cost are evaluated as explained in Notes 2e and 2h.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, dan piutang pembiayaan investasi dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif.

Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi selisih antara estimasi kerugian dengan kerugian aktual yang dialami.

Liabilitas imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian.

Walaupun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Evaluation of allowance for impairment losses collectively assessed includes inherent credit losses in multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, and investment financing receivables portfolios with similar credit risk characteristics when objective evidence of impairment exist for those portfolios. In assessing the need for collective allowance for impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations, and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The methodology and assumptions used for estimating the allowance for impairment losses are reviewed regularly to reduces any differences between loss estimate and actual loss experience.

Liability for employee benefits

The determination of the Company's liability for employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such accounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age, and mortality rate.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud

Biaya perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud disusutkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset tidak berwujud antara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi.

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak Perusahaan. Perusahaan menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak.

Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak badan.

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation of property and equipment and amortization of intangible assets

The costs of property and equipment and intangible assets are depreciated and amortized on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these property and equipment and intangible assets ranging from 1 (one) to 10 (ten) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation and amortization charges could be revised.

Taxation

Significant judgement is involved in determining the Company's provision for tax. The Company provides tax provision based on estimates whether the additional taxes.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss. The Company recognizes liabilities for corporate income tax issues based on estimates of corporate taxable income.

Deferred tax

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference which can be deducted.

Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic tax planning.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/*December 31*, 2025	2024	
Kas	5.569	5.640	*Cash on Hand*
Bank			*Cash in Banks*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk	64.468	48.955	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.785	34.897	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17.711	17.506	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	13.751	6.322	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.346	5.865	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk	5.015	-	*PT Bank Sinarmas Tbk*
PT Bank Mega Syariah	1.280	-	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank Hibank Indonesia	4	50.004	*PT Bank Hibank Indonesia*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500)	433	416	*Others (each below Rp500)*
Subtotal	137.793	163.965	*Subtotal*
Pihak berelasi			*Related party*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Catatan 32)	366.728	370.611	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Note 32)*
Subtotal	366.728	370.611	*Subtotal*
Total Bank	504.521	534.576	*Total Cash in Banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Pihak ketiga	(103)	(183)	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 32)	(192)	(309)	*Related party (Note 32)*
Total cadangan kerugian penurunan nilai	(295)	(492)	*Total allowance for impairment losses*
Total Bank - neto	504.226	534.084	*Total Cash in Banks - net*
Total	**509.795**	**539.724**	***Total***

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait bank adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of cash in banks are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2025 *Stage 1*	31 Desember/ *December 31*, 2024 *Stage 1*	
Nilai tercatat bruto awal	534.576	338.755	*Beginning gross carrying amount*
Perubahan neto	(33.524)	145.813	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	7.710	50.195	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(4.241)	(187)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Nilai tercatat bruto akhir	**504.521**	**534.576**	***Ending gross carrying amount***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of cash in banks are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2025	**31 Desember/ *December 31*, 2024**	
	Stage 1	***Stage 1***	
Saldo awal	492	797	*Beginning balance*
Perubahan neto	(201)	(360)	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	4	55	*New assets originated*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**295**	**492**	***Allowance for impairment losses***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp197 dan Rp305.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, reversal provision for impairment losses during the current year amounted to Rp197 and Rp305, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas bank telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on cash in banks is adequate.

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Giro	0,10% - 4,00%	0,25% - 4,50%	*Current accounts*

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan saldo berikut berkaitan dengan bank:

Statement of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to cash in banks:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan bunga bank			*Interest income from banks*
Pihak ketiga	2.495	2.675	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 32)	21.249	18.470	*Related party (Note 32)*
Subtotal	23.744	21.145	*Subtotal*
Pajak penghasilan final			*Final income tax*
Pihak ketiga	499	535	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 32)	4.250	3.694	*Related party (Note 32)*
Subtotal	4.749	4.229	*Subtotal*
Total pendapatan bunga bank - neto setelah pajak final	**18.995**	**16.916**	***Total interest income from banks - net of final tax***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat jumlah saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dan yang dijaminkan oleh Perusahaan.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada Catatan 35.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, there are no cash and cash equivalent that is restricted and collaterized by the Company.

Refer to Note 32 for details of transactions and balances with related parties.

Information with respect to the classification and fair value of cash and cash equivalents is disclosed in Note 35.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA

5. MULTIPURPOSE FINANCING RECEIVABLES

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Piutang pembiayaan multiguna - bruto	4.308.568	4.527.843	*Multipurpose financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan multiguna yang belum diakui	(1.042.718)	(1.054.012)	*Unearned multipurpose financing income*
Piutang pembiayaan multiguna	3.265.850	3.473.831	*Multipurpose financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(147.220)	(130.986)	*Allowance for impairment losses*
Piutang Pembiayaan Multiguna - neto	**3.118.630**	**3.342.845**	***Multipurpose Financing Receivables - net***

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan	31,79%	33,07%	*Average effective annual interest rates*

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan multiguna dengan cara fasilitas dana, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, piutang yang dikenakan *margin* yang timbul dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan cara pembiayaan jual beli logam mulia dan kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, dan piutang yang dikenakan imbal jasa dari kegiatan pembiayaan jasa dengan menggunakan akad *ijarah*.

This account represents interest-bearing receivables arising from multipurpose financing activities in the form of fund facilities, with installment purchases, margin-bearing receivables arising from business activities based on sharia principles in the form of buy and sell financing of precious metal and two-wheeled by using a contract murabahah, and service fee-bearing receivables arising from service financing activities is carried out by using a contract ijarah.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait piutang pembiayaan multiguna adalah sebagai berikut:

5. MULTIPURPOSE FINANCING RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of multipurpose financing receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2025					
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Total/ *Total*	
Nilai tercatat bruto awal	3.100.345	89.947	72.027	211.512	3.473.831	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	5.032	(4.222)	(810)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(93.030)	93.282	(252)	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(61.739)	(3.277)	65.016	-	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(718.217)	(41.176)	178.261	(48.200)	(629.332)	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	1.980.422	26.331	21.634	178.518	2.206.905	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(1.356.749)	(77.250)	(70.757)	(66.627)	(1.571.383)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(200.928)	(13.243)	(214.171)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**2.856.064**	**83.635**	**64.191**	**261.960**	**3.265.850**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2025					
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Total/ *Total*	
Saldo awal	56.724	17.796	45.127	11.339	130.986	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	1.268	(773)	(495)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(2.911)	3.045	(134)	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(1.840)	(620)	2.460	-	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(10.135)	9.038	225.407	16.105	240.415	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	44.497	8.526	14.442	11.178	78.643	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(22.345)	(15.374)	(44.371)	(6.563)	(88.653)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(200.928)	(13.243)	(214.171)	*Write-off*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**65.258**	**21.638**	**41.508**	**18.816**	**147.220**	***Allowance for impairment losses***

	31 Desember/ *December 31*, 2024					
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Total/ *Total*	
Nilai tercatat bruto awal	3.368.093	106.127	94.495	176.599	3.745.314	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	5.507	(4.779)	(728)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(102.830)	103.175	(345)	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(67.346)	(4.034)	71.380	-	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(782.980)	(47.722)	205.312	(43.432)	(668.822)	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	2.137.526	28.120	25.719	154.657	2.346.022	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(1.457.625)	(90.940)	(93.179)	(65.546)	(1.707.290)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(230.627)	(10.766)	(241.393)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**3.100.345**	**89.947**	**72.027**	**211.512**	**3.473.831**	***Ending gross carrying amount***

5. PIUTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait piutang pembiayaan multiguna adalah sebagai berikut: (lanjutan)

5. *MULTIPURPOSE FINANCING RECEIVABLES (continued)*

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of multipurpose financing receivables are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2024					
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Total/ *Total*	
Saldo awal	62.919	20.379	58.209	10.184	151.691	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	1.280	(882)	(398)	-	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(3.486)	3.684	(198)	-	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(2.022)	(752)	2.774	-	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(14.687)	6.318	234.446	12.664	238.741	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	36.678	6.593	16.610	6.965	66.846	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(23.958)	(17.544)	(35.689)	(7.708)	(84.899)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(230.627)	(10.766)	(241.393)	*Write-off*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**56.724**	**17.796**	**45.127**	**11.339**	**130.986**	***Allowance for impairment losses***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp230.405 dan Rp220.688.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, provision for impairment losses during the current year amounted to Rp230,405 and Rp220,688, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah pendapatan transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan multiguna masing-masing sebesar Rp12.113 dan Rp16.401.

As of December 31, 2025 and 2024, the directly attributable transaction fee to the origination of multipurpose financing accounts amounted to Rp12,113 and Rp16,401, respectively.

Angsuran piutang yang akan diterima dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo kontraktualnya adalah sebagai berikut:

Installment receivables which will be collected from consumers in accordance with the contractual due dates are as follows:

Jatuh tempo dalam waktu	**31 Desember/*December 31*,** **2025**	**2024**	***Due in***
Telah jatuh tempo	69.579	76.997	*Due*
< 1 tahun	2.413.505	2.734.034	*< 1 year*
1 - 2 tahun	1.246.869	1.248.111	*1 - 2 years*
> 2 tahun	578.615	468.701	*> 2 years*
Total Piutang Pembiayaan Multiguna - bruto	**4.308.568**	**4.527.843**	***Total Multipurpose Financing Receivables - gross***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA (lanjutan)

Pengelompokan piutang pembiayaan multiguna - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

5. MULTIPURPOSE FINANCING RECEIVABLES (continued)

Classification of multipurpose financing receivables - gross based on overdue days are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Tidak ada tunggakan	3.775.183	3.960.366	*Current*
1-90 hari	442.572	470.589	*1-90 days*
91-120 hari	26.724	27.695	*91-120 days*
121-180 hari	40.232	43.273	*121-180 days*
> 180 hari	23.857	25.920	*> 180 days*
Total Piutang Pembiayaan Multiguna - bruto	**4.308.568**	**4.527.843**	***Total Multipurpose Financing Receivables - gross***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh piutang pembiayaan multiguna dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

As of December 31, 2025 and 2024, all multipurpose financing receivables were collectively assessed for impairment.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan multiguna.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible multipurpose financing receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang pembiayaan multiguna masing-masing sebesar Rp1.297.220 dan Rp1.874.246 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan masing-masing sebesar Rp125.452 dan Rp219.676 sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 14 dan 20).

As of December 31, 2025 and 2024, the multipurpose financing receivables amounted to Rp1,297,220 and Rp1,874,246, respectively, are pledged as collateral to the bank loans and amounted to Rp125,452 and Rp219,676 as collateral to the bonds payable, respectively (Notes 14 and 20).

Sebagai jaminan atas pembiayaan multiguna yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa kendaraan bermotor roda dua atau roda empat dengan dokumen bukti kepemilikan atas agunan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dan logam mulia yang menjadi objek pembiayaan dengan dokumen bukti kepemilikan atas objek pembiayaan dalam bentuk pencatatan secara elektronik pada sistem informasi milik penyedia barang.

As collateral to the multipurpose financing receivables, the Company receives collateral from consumers in the form of Ownership Certificates ("BPKB") of the two-wheeled or four-wheeled motor vehicles and precious metal which are the object of financing with the ownership certificate of the object financing in the form of electronic recording in the goods provider's information system.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan multiguna - neto diungkapkan pada Catatan 35.

Information with respect to the classification and fair value of multipurpose financing receivables - net is disclosed in Note 35.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA / *6. WORKING CAPITAL FINANCING RECEIVABLES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Piutang pembiayaan modal kerja - bruto	1.147.130	621.028	*Working capital financing receivables - gross*
Nilai sisa terjamin	666.167	401.401	*Guaranteed residual value*
Pendapatan pembiayaan modal kerja yang belum diakui	(241.973)	(119.266)	*Unearned working capital financing income*
Simpanan jaminan	(666.167)	(401.401)	*Security deposits*
Piutang pembiayaan modal kerja	905.157	501.762	*Working capital financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.168)	(10.484)	*Allowance for impairment losses*
Piutang Pembiayaan Modal Kerja - neto	**880.989**	**491.278**	***Working Capital Financing Receivables - net***

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan	30,87%	25,55%	*Average effective annual interest rates*

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dan jual dan sewa balik kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala dan jaminan berupa kendaraan roda dua dan roda empat.

This account represents interest-bearing receivables arising from working capital financing activities in the form of working capital facilities and sale and lease back to consumers with periodic installment payment schedule and as collateral is two-wheeled and four-wheeled motor vehicles.

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait piutang pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of working capital financing receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2025				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Nilai tercatat bruto awal	483.479	10.905	7.378	501.762	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	395	(373)	(22)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(12.476)	12.530	(54)	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(6.621)	(202)	6.823	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(106.084)	(6.224)	12.938	(99.370)	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	781.363	12.722	6.184	800.269	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(264.831)	(10.013)	(7.301)	(282.145)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(15.359)	(15.359)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**875.225**	**19.345**	**10.587**	**905.157**	***Ending gross carrying amount***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait piutang pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. *WORKING CAPITAL FINANCING RECEIVABLES (continued)*

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of working capital financing receivables are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2025				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Saldo awal	5.760	1.528	3.196	10.484	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	62	(53)	(9)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(310)	332	(22)	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(140)	(29)	169	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(986)	826	17.438	17.278	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	13.126	2.486	3.578	19.190	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(2.849)	(1.410)	(3.166)	(7.425)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(15.359)	(15.359)	*Write-off*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**14.663**	**3.680**	**5.825**	**24.168**	***Allowance for impairment losses***

	31 Desember/ *December 31*, 2024				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Nilai tercatat bruto awal	488.500	21.546	5.156	515.202	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	1.084	(946)	(138)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(9.835)	9.869	(34)	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(7.180)	(2.345)	9.525	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(101.429)	(5.625)	13.021	(94.033)	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	392.216	5.457	2.294	399.967	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(279.877)	(17.051)	(4.965)	(301.893)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(17.481)	(17.481)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**483.479**	**10.905**	**7.378**	**501.762**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2024				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Saldo awal	5.724	2.805	2.110	10.639	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	138	(83)	(55)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(240)	254	(14)	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(122)	(286)	408	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(1.338)	263	20.137	19.062	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	4.632	847	1.021	6.500	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(3.034)	(2.272)	(2.930)	(8.236)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(17.481)	(17.481)	*Write-off*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**5.760**	**1.528**	**3.196**	**10.484**	***Allowance for impairment losses***

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp29.043 dan Rp17.326.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah pendapatan transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan modal kerja masing-masing sebesar Rp33.180 dan Rp15.714.

Persentase piutang pembiayaan modal kerja yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar 0,00% dan 0,09% dari saldo piutang pembiayaan modal kerja - neto.

Metode restrukturisasi yang dilakukan Perusahaan adalah dengan memberikan keringanan pembayaran pokok dan bunga termasuk penambahan tenor selama 6-12 bulan dengan menyesuaikan kondisi keuangan debitur.

Angsuran piutang yang akan diterima dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo kontraktualnya adalah sebagai berikut:

6. WORKING CAPITAL FINANCING RECEIVABLES (continued)

For the years ended December 31, 2025 and 2024, provision for impairment losses during the current year amounted to Rp29,043 and Rp17,326, respectively.

As of December 31, 2025 and 2024, the directly attributable transaction fee to the origination of working capital financing accounts amounted to Rp33,180 and Rp15,714, respectively.

The percentage of restructured working capital financing receivables as of December 31, 2025 and 2024 is 0.00% and 0.09% of the working capital financing receivables balance - net.

The restructuring method carried out by the Company is to provide relief of principal and interest including additional in tenor payments for 6-12 months by adjusting to the debtor's financial condition.

Installment receivables which will be collected from consumers in accordance with the contractual due dates are as follows:

Jatuh tempo dalam waktu	31 Desember/*December 31*, 2025	2024	*Due in*
Telah jatuh tempo	15.402	8.437	*Due*
< 1 tahun	824.322	429.374	*< 1 year*
1 - 2 tahun	279.791	160.023	*1 - 2 years*
> 2 tahun	27.615	23.194	*> 2 years*
Total Piutang Pembiayaan Modal Kerja - bruto	**1.147.130**	**621.028**	***Total Working Capital Financing Receivables - gross***

Pengelompokan piutang pembiayaan modal kerja - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

Classification of working capital financing receivables - gross based on overdue days are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2025	2024	
Tidak ada tunggakan	1.031.229	564.450	*Current*
1-90 hari	103.287	48.507	*1-90 days*
91-120 hari	3.569	3.566	*91-120 days*
121-180 hari	5.368	3.010	*121-180 days*
> 180 hari	3.677	1.495	*> 180 days*
Total Piutang Pembiayaan Modal Kerja - bruto	**1.147.130**	**621.028**	***Total Working Capital Financing Receivables - gross***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh piutang pembiayaan modal kerja dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan modal kerja.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang pembiayaan modal kerja masing-masing sebesar Rp294.222 dan Rp56.434 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan masing-masing sebesar Rp13.154 dan Rp54.585 sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 14 dan 20).

Sebagai jaminan atas pembiayaan modal kerja yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) dari kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan modal kerja - neto diungkapkan pada Catatan 35.

6. WORKING CAPITAL FINANCING RECEIVABLES (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, all working capital financing receivables were collectively assessed for impairment.

The Company’s management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible working capital financing receivables.

As of December 31, 2025 and 2024, the working capital financing receivables amounted to Rp294,222 and Rp56,434, respectively, are pledged as collateral to the bank loans and amounted to Rp13,154 and Rp54,585 as collateral to the bonds payable, respectively (Notes 14 and 20).

As collateral to the working capital financing receivables, the Company receives the ownership certificates (“BPKB”) of the two-wheeled and four-wheeled motor vehicles.

Information with respect to the classification and fair value of working capital financing receivables - net is disclosed in Note 35.

7. PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI / *7. INVESTMENT FINANCING RECEIVABLES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Piutang pembiayaan investasi - bruto	3.567.114	3.061.539	*Investment financing receivables - gross*
Nilai sisa terjamin	1.524.384	1.207.461	*Guaranteed residual value*
Pendapatan pembiayaan investasi yang belum diakui	(993.402)	(833.355)	*Unearned investment financing income*
Simpanan jaminan	(1.524.384)	(1.207.461)	*Security deposits*
Piutang pembiayaan investasi	2.573.712	2.228.184	*Investment financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(108.865)	(69.243)	*Allowance for impairment losses*
Piutang Pembiayaan Investasi - neto	**2.464.847**	**2.158.941**	***Investment Financing Receivables - net***

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Tingkat suku bunga efektif rata-rata tahunan	24,01%	24,34%	*Average effective annual interest rates*

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik kendaraan roda empat kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

This account represents interest-bearing receivables arising from financing activities in the form of sale and leaseback of four-wheeled motor vehicles to consumers with periodic installment payment schedule.

7. PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI (lanjutan) / *INVESTMENT FINANCING RECEIVABLES (continued)*

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait piutang pembiayaan investasi adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of investment financing receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2025				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Nilai tercatat bruto awal	2.111.726	68.999	47.459	2.228.184	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	7.772	(6.394)	(1.378)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(95.148)	95.385	(237)	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(67.896)	(2.688)	70.584	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(377.381)	(28.276)	136.663	(268.994)	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	1.601.402	26.243	14.877	1.642.522	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(780.934)	(52.072)	(45.522)	(878.528)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(149.472)	(149.472)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**2.399.541**	**101.197**	**72.974**	**2.573.712**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2025				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Saldo awal	36.660	12.087	20.496	69.243	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	1.473	(882)	(591)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(2.838)	2.939	(101)	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(1.655)	(355)	2.010	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	425	12.015	175.008	187.448	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	32.225	6.309	6.934	45.468	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(14.595)	(9.557)	(19.670)	(43.822)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(149.472)	(149.472)	*Write-off*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**51.695**	**22.556**	**34.614**	**108.865**	***Allowance for impairment losses***

	31 Desember/ *December 31*, 2024				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Nilai tercatat bruto awal	1.810.218	48.238	29.580	1.888.036	*Beginning gross carrying amount*
Transfer ke *stage* 1	6.635	(5.696)	(939)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(61.400)	61.478	(78)	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(37.323)	(2.499)	39.822	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(318.049)	(17.348)	90.767	(244.630)	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	1.369.989	21.309	14.982	1.406.280	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(658.344)	(36.483)	(28.562)	(723.389)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(98.113)	(98.113)	*Write-off*
Nilai tercatat bruto akhir	**2.111.726**	**68.999**	**47.459**	**2.228.184**	***Ending gross carrying amount***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait piutang pembiayaan investasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

7. *INVESTMENT FINANCING RECEIVABLES (continued)*

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of investment financing receivables are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2024				
	Stage 1	***Stage 2***	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Saldo awal	29.573	8.645	12.140	50.358	*Beginning balance*
Transfer ke *stage* 1	1.225	(847)	(378)	-	*Transfer to stage 1*
Transfer ke *stage* 2	(1.513)	1.544	(31)	-	*Transfer to stage 2*
Transfer ke *stage* 3	(864)	(452)	1.316	-	*Transfer to stage 3*
Perubahan neto	(1.123)	5.812	115.901	120.590	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	21.624	4.228	6.492	32.344	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(12.262)	(6.843)	(16.831)	(35.936)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Penghapusbukuan	-	-	(98.113)	(98.113)	*Write-off*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**36.660**	**12.087**	**20.496**	**69.243**	***Allowance for impairment losses***

Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp189.094 dan Rp116.998.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, provision for impairment losses during the current year amounted to Rp189,094 and Rp116,998, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah pendapatan transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan investasi masing-masing sebesar Rp65.548 dan Rp51.641.

As of December 31, 2025 and 2024, the directly attributable transaction fee to the origination of investment financing accounts amounted to Rp65,548 and Rp51,641, respectively.

Persentase piutang pembiayaan investasi yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar 0,68% dan 2,01% dari saldo piutang pembiayaan investasi - neto.

The percentage of restructured investment financing receivables as of December 31, 2025 and 2024 is 0.68% and 2.01% of the investment financing receivables balance - net.

Metode restrukturisasi yang dilakukan Perusahaan adalah dengan memberikan keringanan pembayaran pokok dan bunga termasuk penambahan tenor selama 6-12 bulan dengan menyesuaikan kondisi keuangan debitur.

The restructuring method carried out by the Company is to provide relief of principal and interest including additional in tenor payments for 6-12 months by adjusting to the debtor's financial condition.

Angsuran piutang yang akan diterima dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo kontraktualnya adalah sebagai berikut:

Installment receivables which will be collected from consumers in accordance with the contractual due dates are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
Jatuh tempo dalam waktu	**2025**	**2024**	***Due in***
Telah jatuh tempo	48.095	33.000	*Due*
< 1 tahun	1.439.160	1.258.523	*< 1 year*
1 - 2 tahun	1.152.215	1.027.545	*1 - 2 years*
> 2 tahun	927.644	742.471	*> 2 years*
Total Piutang Pembiayaan Investasi - bruto	**3.567.114**	**3.061.539**	***Total Investment Financing Receivables - gross***

7. PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI (lanjutan)

Pengelompokan piutang pembiayaan investasi - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

7. *INVESTMENT FINANCING RECEIVABLES (continued)*

Classification of investment financing receivables - gross based on overdue days are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Tidak ada tunggakan	2.943.230	2.568.031	*Current*
1-90 hari	526.941	433.922	*1-90 days*
91-120 hari	25.429	23.419	*91-120 days*
121-180 hari	50.502	25.926	*121-180 days*
> 180 hari	21.012	10.241	*> 180 days*
Total Piutang Pembiayaan Investasi - bruto	**3.567.114**	**3.061.539**	***Total Investment Financing Receivables - gross***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh piutang pembiayaan investasi dinilai secara kolektif penurunan nilainya.

As of December 31, 2025 and 2024, all investment financing receivables were collectively assessed for impairment.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan investasi.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible investment financing receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang pembiayaan investasi masing-masing sebesar Rp766.994 dan Rp241.000 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan masing-masing sebesar Rp328.794 dan Rp472.140 sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 14 dan 20).

As of December 31, 2025 and 2024, the investment financing receivables amounted to Rp766,994 and Rp241,000, respectively, are pledged as collateral to the bank loans and amounted to Rp328,794 and Rp472,140 to the bonds payable, respectively (Notes 14 and 20).

Sebagai jaminan atas pembiayaan investasi yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dari kendaraan bermotor roda empat.

As collateral to the investment financing receivables, the Company receives the ownership certificates ("BPKB") of the four-wheeled motor vehicles.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan investasi - neto diungkapkan pada Catatan 35.

Information with respect to the classification and fair value of investment financing receivables - net is disclosed in Note 35.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Piutang aset tarikan	60.691	50.593	*Receivables from foreclosed collateral*
Piutang penerimaan angsuran konsumen	18.158	21.563	*Consumer installment receipt receivables*
Piutang transaksi insentif remedial	2.030	1.931	*Incentive remedial transaction receivables*
Piutang pengembalian premi asuransi	1.857	2.022	*Insurance premium refund receivable*
Pinjaman karyawan	288	445	*Loans to employees*
Lain-lain	97	698	*Others*
Subtotal	83.121	77.252	*Subtotal*
Cadangan kerugian penurunan nilai - pengembalian premi asuransi dan pinjaman karyawan	(8)	(22)	*Allowance for impairment losses - insurance premium refund receivable and loans to employees*
Cadangan kerugian penurunan nilai - piutang aset tarikan	(8.409)	(4.061)	*Allowance for impairment losses - receivables from foreclosed collateral*
Subtotal	(8.417)	(4.083)	*Subtotal*
Pihak ketiga - neto	74.704	73.169	*Third parties - net*
Pihak-pihak berelasi			*Related parties*
Pinjaman karyawan (Catatan 32)	3.183	802	*Loans to employees (Note 32)*
Cadangan kerugian penurunan nilai - pinjaman karyawan	(111)	(20)	*Allowance for impairment losses - loans to employees*
Pihak-pihak berelasi - neto	3.072	782	*Related parties - net*
Total	**77.776**	**73.951**	***Total***

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait piutang aset tarikan, piutang pengembalian premi asuransi, dan pinjaman karyawan adalah sebagai berikut:

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of receivables from foreclosed collateral, insurance premium refund receivable, and loans to employees are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2025			
	Stage 1	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Nilai tercatat bruto awal	3.269	50.593	53.862	*Beginning gross carrying amount*
Perubahan neto	(376)	-	(376)	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	4.457	57.944	62.401	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(2.022)	(47.846)	(49.868)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Nilai tercatat bruto akhir	**5.328**	**60.691**	**66.019**	***Ending gross carrying amount***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait piutang aset tarikan, piutang pengembalian premi asuransi, dan pinjaman karyawan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

An analysis of change in the gross carrying amount and the corresponding allowance for impairment losses of receivables from foreclosed collateral, insurance premium refund receivable, and loans to employees are as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2025			
	Stage 1	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Saldo awal	42	4.061	4.103	*Beginning balance*
Perubahan neto	(1)	167	166	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	93	7.772	7.865	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	(15)	(3.591)	(3.606)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**119**	**8.409**	**8.528**	***Allowance for impairment losses***

	31 Desember/ *December 31*, 2024			
	Stage 1	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Nilai tercatat bruto awal	3.243	23.098	26.341	*Beginning gross carrying amount*
Perubahan neto	26	-	26	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	-	49.137	49.137	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	(21.642)	(21.642)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Nilai tercatat bruto akhir	**3.269**	**50.593**	**53.862**	***Ending gross carrying amount***

	31 Desember/ *December 31*, 2024			
	Stage 1	***Stage 3***	**Total/*Total***	
Saldo awal	43	1.821	1.864	*Beginning balance*
Perubahan neto	(1)	12	11	*Net change*
Aset yang baru diterbitkan	-	3.592	3.592	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya (selain karena penghapusbukuan)	-	(1.364)	(1.364)	*Assets derecognized (other than write-off)*
Cadangan kerugian penurunan nilai	**42**	**4.061**	**4.103**	***Allowance for impairment losses***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan masing-masing sebesar Rp4.425 dan Rp2.239.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, provision for impairment losses during the current year amounted to Rp4,425 and Rp2,239, respectively.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang penerimaan angsuran konsumen merupakan pembayaran angsuran konsumen melalui *collecting agents* seperti PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Rintis Sejahtera, PT Sarana Yukti Bandhana, PT Indomarco Prismatama, dan PT Sinar Digital Terdepan yang akan dibayarkan ke Perusahaan melalui transfer ke rekening bank dengan jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penerimaan angsuran konsumen.

Pinjaman karyawan terdiri dari pinjaman karyawan dan pinjaman kepada direktur. Pinjaman karyawan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diangsur melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pinjaman kepada direktur dikenakan bunga sebesar 5,00% per tahun, yang diangsur melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Nilai wajar dari pinjaman karyawan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Piutang pengembalian premi asuransi merupakan tagihan yang diajukan kepada perusahaan asuransi atas kelebihan pembayaran premi asuransi.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa semua piutang pengembalian premi asuransi dapat tertagih.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 35.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Consumer installment receipt receivables are consumer installment payments through collecting agents which are PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Rintis Sejahtera, PT Sarana Yukti Bandhana, PT Indomarco Prismatama, and PT Sinar Digital Terdepan which will be paid to the Company by transfer to bank account within 1 (one) day up to 5 (five) working days from the date of receipt of the consumer installment.

Loans to employees consist of loans to employees and loans to directors. Loans to employees represent non-interest bearing loans, which are repaid through monthly salary deductions over the loan periods ranging from 1 (one) year to 3 (three) years. Loans to directors which bear annual interest rate at 5.00% per annum, are repaid through monthly salary deductions over the loan period of 10 (ten) years to 15 (fifteen) years.

The fair value of employee loans is determined by discounting cash flows using the market interest rate.

Insurance premium refund receivables represents receivables from insurance companies related to excess payment of insurance premium.

The Company's management believes that all insurance premium refund receivables can be collected.

The Company's management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible other receivables.

Information with respect to the classification and fair value of other receivables is disclosed in Note 35.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *9. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

	31 Desember/*December 31*, 2025	31 Desember/*December 31*, 2024	
Biaya dibayar dimuka:			*Prepaid expenses:*
Pemeliharaan sistem	2.955	3.509	*System maintenance*
Sewa gedung	2.754	5.623	*Office rental*
Asuransi	843	914	*Insurance*
Lain-lain	4.591	5.899	*Other*
Subtotal	11.143	15.945	*Subtotal*
Uang muka:			*Advances:*
Perangkat lunak, perangkat keras, dan lisensi	2.210	11.122	*Software, hardware, and licenses*
Dealer	1.718	4.292	*Dealer*
Renovasi gedung	1.709	4.534	*Building renovations*
Lain-lain	331	659	*Other*
Subtotal	5.968	20.607	*Subtotal*
Total	**17.111**	**36.552**	***Total***

10. ASET TETAP / *10. PROPERTY AND EQUIPMENT*

	31 Desember/*December 31*, 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya Perolehan					*Cost*
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Tanah	798	-	-	798	*Land*
Bangunan	5.115	-	-	5.115	*Buildings*
Renovasi Kantor	96.442	13.080	(14.314)	95.208	*Leasehold improvement*
Kendaraan	39.926	5.156	(7.556)	37.526	*Vehicles*
Peralatan kantor	127.268	21.720*)	(8.876)	140.112	*Office equipment*
Perabot kantor	24.493	1.133	(737)	24.889	*Office furniture and fixtures*
Total Biaya Perolehan	294.042	41.089	(31.483)	303.648	*Total Cost*
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Bangunan	(5.115)	-	-	(5.115)	*Buildings*
Renovasi Kantor	(64.936)	(14.413)	14.249	(65.100)	*Leasehold improvement*
Kendaraan	(19.527)	(8.037)	5.506	(22.058)	*Vehicles*
Peralatan kantor	(96.766)	(17.168)	8.778	(105.156)	*Office equipment*
Perabot kantor	(21.681)	(1.242)	717	(22.206)	*Office furniture and fixtures*
Total Akumulasi Penyusutan	(208.025)	(40.860)	29.250	(219.635)	*Total Accumulated Depreciation*
Jumlah Tercatat	**86.017**			**84.013**	***Carrying Amount***

*) Termasuk reklasifikasi dari uang muka perangkat keras

*) *Includes reclassification from hardware advances*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)*

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya Perolehan					*Cost*
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Tanah	798	-	-	798	*Land*
Bangunan	5.115	-	-	5.115	*Buildings*
Renovasi Kantor	81.505	15.162	(225)	96.442	*Leasehold improvement*
Kendaraan	34.311	13.044	(7.429)	39.926	*Vehicles*
Peralatan kantor	122.850	10.773	(6.355)	127.268	*Office equipment*
Perabot kantor	22.992	1.624	(123)	24.493	*Office furniture and fixtures*
Total Biaya Perolehan	267.571	40.603	(14.132)	294.042	*Total Cost*
Akumulasi Penyusutan					*Accumulated Depreciation*
Kepemilikan langsung:					*Direct ownership:*
Bangunan	(5.115)	-	-	(5.115)	*Buildings*
Renovasi Kantor	(51.778)	(13.383)	225	(64.936)	*Leasehold improvement*
Kendaraan	(19.147)	(6.743)	6.363	(19.527)	*Vehicles*
Peralatan kantor	(88.895)	(14.082)	6.211	(96.766)	*Office equipment*
Perabot kantor	(20.867)	(929)	115	(21.681)	*Office furniture and fixtures*
Total Akumulasi Penyusutan	(185.802)	(35.137)	12.914	(208.025)	*Total Accumulated Depreciation*
Jumlah Tercatat	**81.769**			**86.017**	***Carrying Amount***

Beban penyusutan adalah masing-masing sebesar Rp40.860 dan Rp35.137 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Depreciation charged to operations amounting to Rp40,860 and Rp35,137 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

Pengurangan aset tetap di atas termasuk penjualan aset dengan rincian sebagai berikut:

The above deductions in fixed assets include sale of assets with details as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Hasil penjualan aset tetap	2.883	1.486	*Proceeds from sale of property and equipment*
Nilai buku aset tetap	(2.096)	(1.180)	*Net book value of property and equipment*
Laba penjualan aset tetap	**787**	**306**	***Gain on sale of property and equipment***

Laba penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain - Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Gain on sale of property and equipment is recorded as part of "Other Revenues - Others" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Perusahaan mencatat penghapusbukuan aset tetap dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp137 dan Rp38 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Beban penghapusbukuan aset tetap tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Lain-lain - Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Company recorded a write-off of property and equipment with net book value amounted to Rp137 and Rp38 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively. The expense for the write-off of property and equipment is recorded as part of "Other Expenses - Others" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

10. ASET TETAP (lanjutan)

Hak Guna Bangunan ("HGB") atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Sunter, Jakarta seluas 74 meter persegi, Tangerang (Banten) seluas 150 meter persegi, Sidoarjo (Jawa Timur) seluas 150 meter persegi, Samarinda (Kalimantan Timur) seluas 74 meter persegi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 1.221 meter persegi akan berakhir masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2027, 15 Juli 2027, 4 Januari 2027, 7 Agustus 2026, dan 23 September 2040. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa HGB-HGB di atas dapat diperpanjang pada saat masa berlakunya berakhir.

Berdasarkan penelaahan penurunan nilai atas aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan keseluruhan sebesar Rp114.834 dan ASD295.524 (dalam nilai penuh) dan Rp166.454 dan ASD2.463.455 (dalam nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit). Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset tetap tersebut diasuransikan melalui PT Asuransi Sinar Mas, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

Seluruh perusahaan asuransi tersebut di atas adalah pihak ketiga.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset tetap dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp107.811 dan Rp143.509 telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perusahaan (tidak diaudit).

Selama belum lunas, aset tetap berupa kendaraan yang diperoleh melalui fasilitas pembiayaan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT Maybank Indonesia Finance, pihak berelasi (Catatan 32).

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Rights to Use the Building ("Hak Guna Bangunan - HGB") covering the land and buildings located at Sunter, Jakarta with area of 74 square metres, Tangerang (Banten) with area of 150 square metres, Sidoarjo (East Java) with area of 150 square metres, Samarinda (East Kalimantan) with area of 74 square metres, and Yogyakarta Province with area of 1,221 square metres will expire on August 2, 2027, July 15, 2027, January 4, 2027, August 7, 2026, and September 23, 2040, respectively. The Company's management believes that the above HGBs can be renewed at the expiry dates.

Based on the assessment for impairment of the property and equipment, the Company's management believes that there are no events or changes in circumstances, which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2025 and 2024.

Property and equipment are covered by insurance against losses from fire and other risks for a total coverage of Rp114,834 and USD295,524 (in full amount) and Rp166,454 and USD2,463,455 (in full amount) as of December 31, 2025 and 2024 (unaudited). As of December 31, 2025 and 2024, property and equipment are insured through PT Asuransi Sinar Mas, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, and PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

All the above insurance companies are third parties.

The Company's management believes that the sum insured is adequate to cover the possible losses from these insured risks.

As of December 31, 2025 and 2024, property and equipment with acquisition cost amounting to Rp107,811 and Rp143,509, respectively, have been fully depreciated and are still being used by the Company (unaudited).

Until fully paid, property and equipment in the form of vehicles which are acquired through financing facilities are used as collateral to the vehicles financing facilities obtained from PT Maybank Indonesia Finance, a related party (Note 32).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Estimasi nilai wajar tanah dan bangunan Perusahaan masing-masing berdasarkan nilai jual objek pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan laporan dari Penilai Independen dari KJPP Susan Widjojo & Rekan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.757 dan Rp30.417. Tanggal penilaian independen adalah 30 November 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara atau dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah dan tidak terdapat komitmen kontraktual signifikan dalam perolehan aset tetap.

10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

The estimated fair value of the Company's land and building based on tax object sale value as of December 31, 2025 and Independent Appraisal report which was performed by independent appraiser KJPP Susan Widjojo & Partner as of December 31, 2024 are Rp22,757 and Rp30,417, respectively. The independent revaluation date is on November 30, 2024.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no property and equipment that temporary unused or have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.

As of December 31, 2025 and 2024, there are no property and equipment originating from grants and there are no significant contractual commitments in acquiring property and equipment.

11. ASET HAK-GUNA

Rekonsiliasi kelompok-kelompok utama aset hak-guna adalah sebagai berikut:

11. RIGHT-OF-USE ASSETS

The reconciliation of right-of-use assets by major classifications is as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset hak-guna:					*Right-of-use assets:*
Bangunan					*Premises*
Nilai bruto	190.450	33.145	(26.036)	197.559	*Gross balance*
Akumulasi penyusutan	(92.386)	(37.106)	25.797	(103.695)	*Accumulated depreciation*
Neto	**98.064**	**(3.961)**	**(239)**	**93.864**	***Net***

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset hak-guna:					*Right-of-use assets:*
Bangunan					*Premises*
Nilai bruto	181.961	39.240	(30.751)	190.450	*Gross balance*
Akumulasi penyusutan	(89.688)	(35.990)	33.292	(92.386)	*Accumulated depreciation*
Neto	**92.273**	**3.250**	**2.541**	**98.064**	***Net***

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

Statement of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to leases:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban penyusutan aset hak-guna	37.106	35.990	*Depreciation expense of right-of-use assets*
Beban bunga (Catatan 19 dan 29)	1.992	2.673	*Interest expense (Notes 19 and 29)*
Total	**39.098**	**38.663**	***Total***

12. ASET TIDAK BERWUJUD / 12. INTANGIBLE ASSETS

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak. / *Intangible assets consist of software.*

	31 Desember/*December 31*, 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Perangkat lunak:					*Software:*
Biaya perolehan	99.314	10.258*)	(8.590)	100.982	*At cost*
Akumulasi amortisasi	(50.030)	(12.803)	7.336	(55.497)	*Accumulated amortization*
Jumlah Tercatat	**49.284**	**(2.545)**	**(1.254)**	**45.485**	***Carrying Amount***

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Perangkat lunak:					*Software:*
Biaya perolehan	89.568	9.746	-	99.314	*At cost*
Akumulasi amortisasi	(40.105)	(9.925)	-	(50.030)	*Accumulated amortization*
Jumlah Tercatat	**49.463**	**(179)**	**-**	**49.284**	***Carrying Amount***

*) Termasuk reklasifikasi dari uang muka perangkat lunak dan lisensi

*) *Includes reclassification from software and license advances*

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan saldo berikut berkaitan dengan aset tidak berwujud:

Statement of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to intangible assets:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
Beban amortisasi aset tidak berwujud	12.803	9.925	*Amortization expense of intangible assets*
Total	**12.803**	**9.925**	***Total***

Perusahaan mencatat penghapusbukuan aset tidak berwujud dengan nilai buku sebesar Rp1.254 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Beban penghapusbukuan aset tidak berwujud tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Lain-lain - Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Company recorded a write-off of intangible assets with net book value amounted to Rp1,254 for the year ended December 31, 2025. The expense for the write-off of intangible assets is recorded as part of "Other Expenses - Others" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

13. ASET LAIN-LAIN / 13. OTHER ASSETS

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	2024	
Taksiran tagihan pajak (Catatan 17)			*Claim for tax refund (Note 17)*
Tahun pajak 2018	691	691	*Fiscal year 2018*
Tahun pajak 2017	36.346	36.346	*Fiscal year 2017*
Tahun pajak 2016	622	622	*Fiscal year 2016*
Uang jaminan	4.725	4.487	*Security deposits*
PPh 21 dibayar dimuka	2.400	2.820	*Prepaid income tax 21*
Lain-lain	111	28	*Others*
Total	**44.895**	**44.994**	***Total***

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa semua aset lain-lain dapat terpulihkan.

The Company's management believes that all other assets are recoverable.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki fasilitas utang bank dengan rincian sebagai berikut:

14. BANK LOANS

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has bank loan facilities with details as follows:

Utang Bank/*Bank Loans*	Suku Bunga per Tahun/ *Interest Rate per Annum*		Jumlah Pinjaman/ *Loan Amount*		Jatuh Tempo Pinjaman/ *Maturity Date Loan*		Pembayaran Pokok Utang Bank untuk Tahun Yang Berakhir Pada/ *Payment of Bank Loans Principal for the Years Ended*	
	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*
Pihak ketiga/*Third parties*								
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6,75% - 7,25%	6,75% - 7,40%	770.586	630.497	12 Mei/*May 12*, 2028	12 Februari/ *February 12*, 2027	659.477	515.980
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,00%	-	488.447	-	10 Desember/ *December 10*, 2027	-	10.417	-
PT Bank Digital BCA	6,825% - 7,25%	6,85% - 7,25%	303.718	299.556	22 Maret/*March 22*, 2028	22 Desember/ *December 22*, 2027	245.833	166.667
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,30% - 7,35%	7,00% - 7,35%	215.698	365.386	2 Mei/*May 2*, 2027	2 Mei/*May 2*, 2027	250.000	480.465
PT Bank DBS Indonesia	6,80% - 7,00%	7,00%	178.882	116.449	24 Maret/*March 24*, 2028	2 April/*April 2*, 2027	87.500	33.333
PT Bank QNB Indonesia Tbk	6,85% - 7,15%	6,85% - 7,15%	173.407	162.117	21 Januari/ *January 21*, 2028	25 Juni/*June 25*, 2027	88.889	12.500
PT Bank IBK Indonesia Tbk	6,75% - 7,00%	7,00%	164.255	99.265	6 Maret/*March 6*, 2028	8 November/ *November 8*, 2026	84.920	46.825
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	7,00%	7,00%	70.925	169.054	25 September/ *September 25*, 2026	25 September/ *September 25*, 2026	98.333	98.333
PT Bank KEB Hana Indonesia	7,00% - 7,25%	6,00% - 7,25%	28.970	206.510	4 Maret/*March 4*, 2026	4 Maret/*March 4*, 2026	177.773	210.463
PT Bank DKI	7.25%	6,00% - 7,25%	24.990	99.893	9 Juni/*June 9*, 2026	9 Juni/*June 9*, 2026	75.000	83.333
PT Bank Shinhan Indonesia	-	6,00%	-	29.152	-	20 Juli/*July 20*, 2025	29.167	50.000
PT Bank DKI Unit Usaha Syariah	-	6,00%	-	9.810	-	16 September/ *September 16*, 2025	9.810	13.569
PT Bank Permata Tbk	-	6,50%	-	2.778	-	20 Januari/ *January 20*, 2025	2.778	50.000
PT Bank Hibank Indonesia	-	6,30%	-	-	-	1 Juli/*July 1*, 2024	-	100.000
PT Bank HSBC Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	200.000
Total/*Total*			**2.419.878**	**2.190.467**			**1.819.897**	**2.061.468**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki fasilitas utang bank yang belum ditarik dengan rincian sebagai berikut:

14. BANK LOANS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has unused bank loan facilities with details as follows:

Nama Bank/ *Bank Name*	Jenis Pinjaman/ *Loan Type*	Nomor Perjanjian/ *Agreement Number*	Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date*	Jumlah Fasilitas/ *Facility Amount*	Jumlah Fasilitas yang Belum Ditarik/ *Unused Facility Amount*	Jatuh Tempo Fasilitas/ *Maturity Date Facility*
		31 Desember/*December 31*, 2025				
Pihak ketiga/*Third parties*						
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pasar Uang/*Money Market*	002/IBD-MM/LEG/19/Per.X/ *002/IBD-MM/LEG/19/Per.X*	27 Mei/*May 27*, 2025	200.000/ *200,000*	200.000/ *200,000*	28 Mei/*May 28*, 2026
	Rekening Koran/*Overdraft*	002/IBD-PRK/LEG/19/Per.X/ *002/IBD-PRK/LEG/19/Per.X*	27 Mei/*May 27*, 2025	50.000/ *50,000*	50.000/ *50,000*	28 Mei/*May 28*, 2026
	Pinjaman Tetap/*Fixed Loan*	23/*23*	4 Desember/ *December 4*, 2025	800.000/ *800,000*	800.000/ *800,000*	4 September/*September 4*, 2029
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Jangka Pendek/ *Short Term Loan*	WCO-KP/302/KJP/2022/ *WCO-KP/302/KJP/2022*	12 Juni/*June 12*, 2025	100.000/ *100,000*	100.000/ *100,000*	15 Juni/*June 15*, 2026
PT Bank KEB Hana Indonesia	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Installment*	209/*209*	26 Maret/*March 26*, 2025	250.000/ *250,000*	250.000/ *250,000*	26 Maret/*March 26*, 2028
PT Bank HSBC Indonesia	Pasar Uang/*Money Market*	CDT/2020/03/0420/ *CDT/2020/03/0420*	16 Mei/*May 16*, 2019	200.000/ *200,000*	200.000/ *200,000*	Masih berlaku sampai informasi lebih lanjut/*Still valid*
PT Bank Shinhan Indonesia	Pinjaman Korporasi/ *Corporate Loan*	06/*06*	20 Agustus/*August 20*, 2025	200.000/ *200,000*	200.000/ *200,000*	20 Agustus/*August 20*, 2028
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	Pinjaman Tetap/*Fixed Loan*	83/*83*	30 Oktober/*October 30*, 2025	200.000/ *200,000*	200.000/ *200,000*	30 Oktober/*October 30*, 2028
PT Bank INA Perdana Tbk	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Facility*	37/*37*	18 Desember/ *December 18*, 2025	200.000/ *200,000*	200.000/ *200,000*	18 Desember/*December 18*, 2028
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Lokal (Rekening Koran)/ *Local Credit (Current Account)*	40059/GBK/2026/ *40059/GBK/2026*	14 Januari/*January 14*, 2026	25.000/ *25,000*	25.000/ *25,000*	20 April/*April 20*, 2026

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki fasilitas utang bank yang belum ditarik dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

14. BANK LOANS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has unused bank loan facilities with details as follows: (continued)

Nama Bank/ *Bank Name*	Jenis Pinjaman/ *Loan Type*	Nomor Perjanjian/ *Agreement Number*	Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date*	Jumlah Fasilitas/ *Facility Amount*	Jumlah Fasilitas yang Belum Ditarik/ *Unused Facility Amount*	Jatuh Tempo Fasilitas/ *Maturity Date Facility*
		31 Desember/*December 31*, 2024				
Pihak ketiga/*Third parties*						
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pasar Uang/*Money Market*	002/IBD-MM/LEG/19/Per.IX/ *002/IBD-MM/LEG/19/Per.IX*	12 Agustus/*August 12*, 2024	200.000/ *200,000*	200.000/ *200,000*	28 Mei/*May 28*, 2025
	Rekening Koran/*Overdraft*	002/IBD-PRK/LEG/19/Per.IX/ *002/IBD-PRK/LEG/19/Per.IX*	12 Agustus/*August 12*, 2024	50.000/ *50,000*	50.000/ *50,000*	28 Mei/*May 28*, 2025
	Pinjaman Tetap/*Term Loan*	08/*08*	13 November/ *November 13*, 2024	800.000/ *800,000*	800.000/ *800,000*	13 Mei/*May 13*, 2028
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Jangka Pendek/ *Short Term Loan*	WCO-KP/302/KJP/2022/ *WCO-KP/302/KJP/2022*	13 Juni/*June 13*, 2024	100.000/ *100,000*	100.000/ *100,000*	15 Juni/*June 15*, 2025
	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Loan*	185/*185*	25 September/ *September 25*, 2024	500.000/ *500,000*	500.000/ *500,000*	25 September/*September 25*, 2029
PT Bank DBS Indonesia	Pinjaman Berjangka/*Term Loan*	22/*22*	30 September/ *September 30*, 2024	150.000/ *150,000*	150.000/ *150,000*	30 Maret/*March 30*, 2028
PT Bank QNB Indonesia Tbk	Pinjaman Berjangka/*Term Loan*	54/*54*	25 Maret/*March 25*, 2024	275.000/ *275,000*	100.000/ *100,000*	17 Desember/*December 17*, 2027
PT Bank Permata Tbk	Pasar Uang/*Money Market*	1516/MM/ADD/VI/2024/CG6/ *1516/MM/ADD/VI/2024/CG6*	11 Juni/*June 11*, 2024	200.000/ *200,000*	200.000/ *200,000*	30 April/*April 30*, 2025
PT Bank HIBank Indonesia	Pinjaman Berjangka/*Term Loan*	20/*20*	13 Maret/*March 13*, 2024	100.000/ *100,000*	100.000/ *100,000*	13 Maret/*March 13*, 2025
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Lokal (Rekening Koran)/ *Local Credit (Current Account)*	038/Add-KCK/2024/ *038/Add-KCK/2024*	29 Januari/*January 29*, 2024	25.000/ *25,000*	25.000/ *25,000*	20 April/*April 20*, 2025
PT Bank HSBC Indonesia	Pasar Uang/*Money Market*	CDT/2020/03/0420/ *CDT/2020/03/0420*	16 Mei/*May 16*, 2019	200.000/ *200,000*	200.000/ *200,000*	Masih berlaku sampai informasi lebih lanjut/*Still valid*
PT Bank Digital BCA	Fasilitas Pinjaman/ *Installment Loan*	09/*09*	2 Oktober/*October 2*, 2024	300.000/ *300,000*	250.000/ *250,000*	22 Desember/*December 22*, 2027
PT Bank IBK Indonesia Tbk	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Loan*	117/*117*	9 Oktober/*October 9*, 2024	150.000/ *150,000*	150.000/ *150,000*	22 Desember/*December 22*, 2027
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Kredit Angsuran Berjangka/ *Term Installment Credit*	181/*181*	16 Desember/ *December 16*, 2024	500.000/ *500,000*	500.000/ *500,000*	16 Desember/*December 16*, 2027

14. UTANG BANK (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pinjaman-pinjaman ini dijaminkan dengan piutang pembiayaan multiguna masing-masing sebesar Rp1.297.220 dan Rp1.874.246 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang pembiayaan modal kerja masing-masing sebesar Rp294.222 dan Rp56.434 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan piutang pembiayaan investasi masing-masing sebesar Rp766.994 dan Rp241.000 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 5, 6, dan 7).

Perjanjian-perjanjian dengan bank-bank di atas, mensyaratkan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut ini, sebelum memperoleh persetujuan dari bank-bank tersebut, antara lain, melakukan konsolidasi, merger, akuisisi atau penyertaan saham; penjualan aset Perusahaan; melakukan investasi baru; perubahan Anggaran Dasar berupa penurunan modal; pembiayaan kepada perusahaan berelasi maupun perusahaan lainnya di luar transaksi usaha sehari-hari; mengikatkan diri sebagai penanggung kepada pihak lain atau menjaminkan aset Perusahaan kepada pihak lain; pelunasan pinjaman kepada seluruh pemegang saham; penawaran umum atas saham Perusahaan atau pembelian kembali saham Perusahaan; perubahan bentuk usaha Perusahaan; menjaminkan kembali BPKB kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lain kecuali untuk kegiatan usaha yang normal.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti *gearing ratio* dan *Non-Performing Loan ratio.* Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank seperti berikut ini:

Rasio/*Ratio*	Ratio maksimal/*Maximum ratio*
Gearing ratio	Bervariasi antara maksimal 10:1 dan 8:1/*Varied from maximum 10:1 and 8:1*
Non-Performing Loan - gross	Di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 4,00% - 5,00%/*Above 90 (ninety) days maximum of 4.00% - 5.00%*
Non-Performing Loan - net	Bervariasi dari di atas 60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari maksimal 3,00% - 5,00%/*Varied from above 60 (sixty) days and 90 (ninety) days maximum of 3.00% - 5.00%*
Current Ratio	Minimal 100,00%/*Minimum 100.00%*

14. BANK LOANS (continued)

During the years ended December 31, 2025 and 2024, the Company has paid the loan principal and interest installments on schedule.

These loans are secured by multipurpose financing receivables amounting to Rp1,297,220 and Rp1,874,246 as of December 31, 2025 and 2024, respectively, working capital financing receivables amounting to Rp294,222 and Rp56,434 as of December 31, 2025 and 2024, respectively, and investment financing receivables amounting to Rp766,994 and Rp241,000 as of December 31, 2025 and 2024, respectively (Notes 5, 6, and 7).

Under the agreements with banks mentioned above, without prior approval from those banks, is not allowed to, among others, enter into consolidation, merger, acquisitions or investments in shares of stock; sell the Company's assets; enter into new investments; change the Articles of Association relating to capital reduction; provide financing to other related parties and unrelated parties other than in the normal course of business; act as a guarantor of or collateralize the Company's assets to other parties; repay the loans to all stockholders; float the Company's shares to the public or buy back the Company's shares; alter the Company's nature of business; pledge the same BPKB as collateral to other parties and obtain loans or credits from other financial institutions except in the normal course of business.

Under the loan agreements, the Company is also obliged to comply with financial covenants such as gearing ratio and Non-Performing Loan ratio. As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. UTANG BANK (lanjutan)

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk modal kerja kegiatan usaha Perusahaan.

Seluruh utang bank adalah dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sehubungan dengan perjanjian dengan bank-bank tersebut di atas.

14. BANK LOANS (continued)

The loan facilities are used as a working capital for the Company's business activities.

All the bank loans are to third parties.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied with all significant loan covenants include maintaining financial ratios as required in the agreement with the aforementioned banks.

15. UTANG SUBORDINASI / *15. SUBORDINATED LOAN*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pihak berelasi (Catatan 32)			*Related party (Note 32)*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")	200.000	200.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Tingkat suku bunga efektif tahunan	7,35%	7,35%	*Effective annual interest rates*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 27 November 2019, BMI setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000, yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan atau perkembangan pasar uang dan suku bunga yang berlaku di bank. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan berakhir pada tanggal 28 November 2024.

Based on Credit Agreement Deed No. 14 dated November 27, 2019, BMI agreed to provide a Term Loan facility at the maximum amount of Rp200,000, which was used for strengthening the Company's capital structure. This facility has fixed interest rate at 12.00% per annum and subject to change at any time following changes in money market and interest rates applied in bank. Interest was paid every 3 (three) months and due on November 28, 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 29 November 2024, BMI setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar Rp200.000, yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 7,35% per tahun dan dapat diubah sewaktu-waktu dengan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Bank sebelumnya untuk disesuaikan dengan kondisi pasar uang. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan berakhir pada tanggal 29 November 2029.

Based on Credit Agreement Deed No. 21 dated November 29, 2024, BMI agreed to provide a Term Loan facility with a maximum amount of Rp200,000, which is used to strengthen the capital structure. This facility bears a fixed interest rate of 7.35% per year and can be changed at any time with prior written agreement between the Company and the Bank to suit money market conditions. Interest will be paid every 3 (three) months and will end on November 29, 2029.

15. UTANG SUBORDINASI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Utang Subordinasi No. 22 tanggal 29 November 2024, Pemegang Saham (BMI) diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan Pemegang Saham (berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 29 November 2024) terhadap tagihan dari kreditur Perusahaan yang lain.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp14.904 dan Rp17.032 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 29 dan 32).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mencatat bunga masih harus dilunasi masing-masing sebesar Rp1.307 dan Rp1.307 (Catatan 16 dan 32).

Selama masa berlakunya perjanjian ini, Perusahaan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

Pembatasan keuangan				
Gearing ratio	:	≤ 8 : 1	:	*Gearing ratio*
Non-Performing Loan	:	≤ 6,00%	:	*Non-Performing Loan*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BMI tersebut di atas.

15. SUBORDINATED LOAN (continued)

Based on Subordination Loan Agreement Deed No. 22 dated November 29, 2024, Shareholders (BMI) are required to subordinate the entire bill of Shareholders (pursuant to the Deed of Credit Agreement No. 21 dated November 29, 2024) of the bills of other creditors.

Interest incurred for this facility is amounting to Rp14,904 and Rp17,032 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively (Notes 29 and 32).

As of December 31, 2025 and 2024, the Company recorded accrued interest amounting to Rp1,307 and Rp1,307, respectively (Notes 16 and 32).

During the period of the agreement is still outstanding, the Company is obliged to maintain its financial position as follows:

Financial Covenants

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied with all significant loan covenants required by BMI.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *16. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Komisi dan bonus karyawan	40.000	57.500	*Employees' commissions and bonus*
Bunga	21.750	24.506	*Interest*
Lain-lain	2.512	2.558	*Others*
Subtotal	64.262	84.564	*Subtotal*
Pihak berelasi			*Related party*
Bunga			*Interests*
Utang subordinasi (Catatan 15 dan 32)	1.307	1.307	*Subordinated loan (Notes 15 and 32)*
Utang obligasi (Catatan 20 dan 32)	26	1.921	*Bonds payable (Notes 20 and 32)*
Subtotal	1.333	3.228	*Subtotal*
Total	**65.595**	**87.792**	***Total***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN / *17. TAXATION*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Utang pajak:			*Taxes payable:*
PPN	892	1.114	*VAT*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 29	18.128	30.316	*Article 29*
Pasal 23	510	429	*Article 23*
Pasal 21	241	193	*Article 21*
Pasal 4 (2)	155	681	*Article 4 (2)*
Total	**19.926**	**32.733**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	174.709	329.013	*Income before income tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Ditambah (dikurangi):			*Add (deduct):*
Beda temporer			*Temporary differences*
Penyisihan piutang aset tarikan, piutang pembiayaan, piutang pengembalian asuransi, giro, piutang karyawan, dan uang muka lain-lain	36.348	3.629	*Provision for receivables from foreclosed collateral, financing receivables, insurance refunds receivables, current account, employee receivables, and other advance payment*
Penyisihan imbalan kerja	19.651	16.733	*Provision for employee benefits*
Sewa gedung kantor	(2.261)	(117)	*Office building rental*
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud	5.820	2.370	*Property and equipment depreciation and intangible assets amortization*
Beda tetap			*Permanent differences*
Sumbangan	35	169	*Donations*
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	(4.152)	17.270	*Non-deductible expenses*
Pendapatan bunga giro	(23.744)	(21.145)	*Interest income from current accounts*
Pajak penghasilan final atas pendapatan bunga giro	4.749	4.229	*Final income tax on interest income from current accounts*
Laba kena pajak	**211.155**	**352.151**	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan	46.454	77.473	*Income tax expense*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak dibayar di muka	(28.326)	(47.157)	*Prepaid taxes*
Utang pajak penghasilan	**18.128**	**30.316**	***Income tax payable***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 74 pada tanggal 10 Oktober 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, Perusahaan harus menghitung cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan batasan tertentu yang diatur di dalam PMK No. 74. Perusahaan juga harus mulai menerapkan perhitungan nilai cadangan piutang tak tertagih tersebut mulai tanggal 1 Januari 2024. Pada tanggal 1 Januari 2024, terdapat selisih lebih nilai cadangan per fiskal sebesar Rp23.883. Sesuai dengan ketentuan di dalam PMK No. 74, maka Perusahaan memutuskan untuk membebankan selisih lebih tersebut di dalam perhitungan pajak penghasilan tahun 2024.

Rekonsiliasi antara beban pajak dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum beban pajak dengan beban pajak, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

The Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 74 on October 10, 2024. Based on this regulation, the Company must calculate reserves for bad debts in accordance with certain limits regulated in PMK No. 74. The Company must also implement the calculation of the reserves for bad debts starting January 1, 2024. On January 1, 2024, there is an excess value of reserves per fiscal amounting to Rp23,883. In accordance with the provisions in PMK No. 74, the Company decided to charge the excess difference in the 2024 income tax calculation.

Reconciliation between the tax expense calculated by applying the applicable tax rates to the income before tax expense and the tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	174.709	329.013	*Income before income tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	38.436	72.383	*Tax expense at the applicable tax rates*
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	(5.085)	115	*Tax effects on permanent differences at the applicable tax rate*
Penyesuaian pajak tangguhan	(1.195)	(6.400)	*Deferred tax assessment*
Beban pajak penghasilan	**32.156**	**66.098**	***Income tax expense***
Tarif pajak efektif	**18,41%**	**20,09%**	***Effective tax rate***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum beban pajak dengan beban pajak, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

Reconciliation between the tax expense calculated by applying the applicable tax rates to the income before tax expense and the tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pajak penghasilan:			***Income tax expense:***
Kini	46.454	77.473	*Current*
Tangguhan	(14.298)	(11.375)	*Deferred*
Total	**32.156**	**66.098**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pengaruh pajak atas beda temporer pada tarif pajak maksimum yang berlaku:			*Tax effects on temporary differences at the applicable maximum tax rate:*
Penyisihan piutang aset tarikan, piutang pembiayaan, piutang pengembalian asuransi, giro, piutang karyawan, dan uang muka lain-lain	(7.997)	(798)	*Provision for receivables from foreclosed collateral, financing receivables, insurance refunds receivables, current account, employee receivables, and other advance payment*
Penyisihan imbalan kerja	(4.323)	(3.681)	*Provision for employee benefits*
Sewa gedung kantor	497	25	*Office building rental*
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud	(1.280)	(521)	*Property and equipment depreciation and intangible assets amortization*
Penyesuaian pajak tangguhan	(1.195)	(6.400)	*Deferred tax assessment*
Total manfaat pajak tangguhan	**(14.298)**	**(11.375)**	***Total deferred tax benefit***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rincian aset pajak tangguhan - neto Perusahaan sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

The details of the Company's deferred tax assets - net are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi tahun berjalan/ *(Charged)/ credited to statement of profit or loss for the year*	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ *Charged to equity from other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Penyisihan piutang aset tarikan, piutang pembiayaan, piutang pengembalian asuransi, giro, piutang karyawan, dan uang muka lain-lain	6.637	7.997	-	14.634	*Provision for receivables from foreclosed collateral, financing receivables, insurance refunds receivables, current account, employee receivables, and other advance payment*
Penyisihan imbalan kerja	22.939	4.323	(7.726)	19.536	*Provision for employee benefits*
Sewa gedung kantor	159	(497)	-	(338)	*Office building rental*
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud	(5.044)	2.475	-	(2.569)	*Property and equipment depreciation and intangible assets amortization*
Aset pajak tangguhan - neto	**24.691**	**14.298**	**(7.726)**	**31.263**	***Deferred tax assets - net***

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi tahun berjalan/ *(Charged)/ credited to statement of profit or loss for the year*	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ *Charged to equity from other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Penyisihan piutang aset tarikan, piutang pembiayaan, piutang pengembalian asuransi, giro, piutang karyawan, dan uang muka lain-lain	-	6.637	-	6.637	*Provision for receivables from foreclosed collateral, financing receivables, insurance refunds receivables, current account, employee receivables, and other advance payment*
Penyisihan imbalan kerja	20.437	3.681	(1.179)	22.939	*Provision for employee benefits*
Sewa gedung kantor	184	(25)	-	159	*Office building rental*
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud	(6.126)	1.082	-	(5.044)	*Property and equipment depreciation and intangible assets amortization*
Aset pajak tangguhan - neto	**14.495**	**11.375**	**(1.179)**	**24.691**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan seluruhnya dapat dipulihkan.

Management believes that the deferred tax assets are fully realizable.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2016

Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Peninjauan Kembali tanggal 16 Oktober 2024 yang isinya menolak seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan yang akhir dan mengikat. Berdasarkan Keputusan Peninjauan Kembali tersebut, Perusahaan telah mengajukan permohonan pengembalian Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") masa Desember 2016 sebesar Rp622 dan masih menunggu pengembalian dari kantor pajak. Permohonan pengembalian pajak tersebut telah dicatat sebagai taksiran tagihan pajak pada aset lain-lain (Catatan 13).

Pemeriksaan tahun pajak 2017

Pada tanggal 11 Januari 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atas pemeriksaan pajak tahun 2017 untuk Pajak Penghasilan ("PPh") Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23 ("PPh Pasal 23"), Pajak Penghasilan Pasal 4.2 ("PPh Pasal 4.2"), dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Berdasarkan SKP tersebut, kantor pajak menetapkan kurang bayar pajak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp45.914 dan telah dibayarkan seluruhnya oleh Perusahaan.

Atas ketetapan kurang bayar PPh Badan sebesar Rp39.326, Perusahaan mengajukan keberatan dengan hasil kantor pajak yang hanya menyetujui keberatan pajak tersebut sebesar Rp2.980. Atas hasil keberatan pajak yang ditolak sebesar Rp36.346, Perusahaan mengajukan banding. Pembayaran SKP atas PPh badan tersebut telah dicatat sebagai taksiran tagihan pajak pada aset lain-lain (Catatan 13).

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan belum menerima putusan dari Pengadilan Pajak.

17. TAXATION (continued)

Tax assessment for fiscal year 2016

The Company has received a Judicial Review Decision Letter dated October 16, 2024 which is fully rejected the judicial review filed by the Director General of Tax. This Supreme Court decision is final and binding. Based on Judicial Review Decision Letter, the Company has filled refund of Tax Collection Letter ("STP") on Value Added Tax ("VAT") Underpayment Assessment Letter period December 2016 amounted to Rp622 and still awaiting refund from the tax office. Those tax refund request is recorded as claim for tax refund in other assets (Note 13).

Tax assessment for fiscal year 2017

On January 11, 2022, the Company received Tax Assessment Letters for fiscal year 2017 for Corporate Income Tax ("CIT"), Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4.2, and Value Added Tax ("VAT"). Based on the Assessment Letters, the tax office confirmed the underpayment of tax with aggregating amount to Rp45,914 and has been fully paid by the Company.

For the CIT underpayment assessment amounting to Rp39,326, the Company submitted tax objection with the result that the tax office only partially agreed the objection amounting to Rp2,980. On the rejected result amounted Rp36,346, the Company filed an appeal. Those CIT underpayment is recorded as claim for tax refund in other assets (Note 13).

Up to the issuance date of the financial statements, the Company has not received decision from the Tax Court.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2018

Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPh Badan tahun 2018 dan Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN masa Desember 2018 tanggal 18 September 2024 dan 16 Oktober 2024 yang isinya menolak seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Perusahaan telah mengajukan permohonan pengembalian STP atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN masa Desember 2018 sebesar Rp691 dan masih menunggu pengembalian dari kantor pajak. Permohonan pengembalian pajak tersebut telah dicatat sebagai taksiran tagihan pajak pada aset lain-lain (Catatan 13). Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan yang akhir dan mengikat.

Pemeriksaan tahun pajak 2023

Pada tanggal 6 Januari 2026, Perusahaan menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") No. S-16/RIKSIS/KPP.1901/2026 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tahun 2023. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan masih menunggu hasil pemeriksaan dari Kantor Pajak.

Dampak Penerapan Pilar Dua *Organization for Economic Co-operation and Development* ("OECD")

Grup Malayan Banking Berhad (selanjutnya disebut "Grup"), termasuk Perusahaan, berada dalam lingkup aturan model Pilar Dua OECD. Pada tanggal laporan, Indonesia telah memberlakukan PMK No. 136 Tahun 2024 untuk implementasi Pilar Dua yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Pada tahun ini, penilaian dilakukan berdasarkan informasi keuangan 2025 untuk entitas konstituen di Indonesia dengan mengadopsi ketentuan Transisi *Safe Harbour*. Oleh karena itu, pajak tambahan dianggap nihil. Pengadopsian ini tidak berdampak pada jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan ini. Perusahaan juga telah menerapkan pengecualian untuk mengungkapkan informasi tentang pajak tangguhan yang berkaitan dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

17. TAXATION (continued)

Tax assessment for fiscal year 2018

The Company has received The Supreme Court Judicial Review Decision Letter on CIT Underpayment Assessment Letter year 2018 and VAT Underpayment Assessment Letter period December 2018 dated September 18, 2024 and October 16, 2024 which is fully rejected the judicial review filed by the Director General of Tax. The Company has filed refund of STP on VAT Underpayment Assessment Letter period December 2018 amounted to Rp691 and still awaiting refund from the tax office. Those tax refund request is recorded as claim for tax refund in other assets (Note 13). This Supreme Court decision is final and binding.

Tax assessment for fiscal year 2023

On January 6, 2026, the Company received a letter from the Directorate General of Taxes ("DJP") No. S-16/RIKSIS/KPP.1901/2026 regarding the Audit Notification for all types of taxes in 2023. Up to the issuance date of the financial statements, the Company is still being reviewed by the Tax Office.

The Impact of Pillar Two of Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD")

Malayan Banking Berhad Group (the "Group") including The Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules. As at the reporting date, Indonesia has enacted PMK No. 136 Year 2024 for its Pillar Two implementation effective from January 1, 2025.

In the current year, an assessment was conducted based on the 2025 financial information for the constituent entities in Indonesia by adopting the Transitional Safe Harbour rules. Accordingly, the top-up tax deemed to be nil. The adoption did not have any impact on the amount reported in these financial statements. The Company has also applied the exception to disclosing any information about deferred tax relating to Pillar Two income taxes.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak untuk tahun fiskal 2008 dan tahun-tahun selanjutnya.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 17 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) Penghasilan Badan.

17. TAXATION (continued)

Administration

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Company calculates, determines, and pays tax payable based on self-assessment. DJP may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due for the fiscal year 2008 and subsequent years.

The income tax calculation for the year ended December 31, 2025 as disclosed in Note 17 will be the basis in filing Annual Corporate Income Tax Return.

18. UTANG LAIN-LAIN / *18. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang promosi	27.257	23.998	*Promotion payables*
Utang *dealer*	24.761	17.601	*Dealers payables*
Utang asuransi	17.108	17.395	*Insurance payables*
Provisi biaya pemulihan	13.052	12.363	*Restoration cost*
Setoran dana *Ta'zir*	8.836	8.774	*Ta'zir fund deposit*
Setoran konsumen	2.913	3.450	*Consumers' advances*
Lain-lain	58.167	62.102	*Others*
Subtotal	152.094	145.683	*Subtotal*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 32)			*Related parties (Note 32)*
Utang pembiayaan - kendaraan	16.846	19.987	*Financing loans - vehicles*
Utang asuransi	2.652	432	*Insurance payables*
Utang *dealer*	701	366	*Dealers payables*
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Catatan 32)	-	384	*Payables on joint financing (Note 32)*
Subtotal	20.199	21.169	*Subtotal*
Total	**172.293**	**166.852**	***Total***

Utang promosi merupakan utang untuk berbagai program promosi dalam rangka meningkatkan penjualan dan *branding* Perusahaan.

Promotion payables represent payables for various promotional programs in order to increase sales and Company's branding.

Utang *dealer* merupakan utang kepada *dealer* sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh Perusahaan untuk pembiayaan multiguna.

Dealers payables represent payables in connection with purchase transactions of two-wheeled motor vehicles by the Company for multipurpose financing.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Insurance payables represent insurance premiums that have not been paid yet to the insurance company.

18. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Setoran konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali dari *dealer* yang belum dilunasi.

Lain-lain terutama terdiri dari akrual biaya operasional Perusahaan.

Utang pembiayaan - kendaraan merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT Maybank Indonesia Finance, pihak berelasi (Catatan 32) dengan bunga efektif tahunan sebesar 9,63% - 16,34% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

18. OTHER PAYABLES (continued)

Consumers' advances represent payables in connection with the installment payment from customers and cash received from sales of repossessed motor vehicles from dealers that have not been settled.

Others mainly consist of accruals for the Company's operational expenses.

Financing loans - vehicles represent vehicles financing facilities obtained from PT Maybank Indonesia Finance, a related party (Note 32) with annual effective interest rates of 9.63% - 16.34% for the years ended December 31, 2025 and 2024.

19. LIABILITAS SEWA

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

19. LEASE LIABILITIES

Maturity analysis of lease liabilities is as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Jatuh tempo dalam waktu			*Due in*
Pihak ketiga			*Third parties*
1-5 tahun	421	710	*1-5 years*
> 5 tahun	23.347	31.270	*> 5 years*
Subtotal	23.768	31.980	*Subtotal*
Pihak berelasi (Catatan 32)			*Related party (Note 32)*
1-5 tahun	-	34	*1-5 years*
Subtotal	-	34	*Subtotal*
Total Liabilitas Sewa	**23.768**	**32.014**	***Total Lease Liabilities***

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa:

Movement of Lease Liabilities:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Saldo awal	32.014	41.142	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	151	2.429	*Additions for the current year*
Penghentian selama tahun berjalan	(208)	-	*Termination for the current year*
Penambahan bunga (Catatan 11)	1.992	2.673	*Accretion of interest (Note 11)*
Pembayaran	(10.181)	(14.230)	*Payments*
Subtotal	23.768	32.014	*Subtotal*
Dikurangi: bagian lancar	(373)	(168)	*Less: current portion*
Bagian Jangka Panjang	**23.395**	**31.846**	***Long-term Portion***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI / *20. BONDS PAYABLE*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Nilai nominal obligasi			*Nominal value of bonds*
Pihak ketiga	2.378.555	2.120.000	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 32)	20.000	124.000	*Related party (Note 32)*
	2.398.555	2.244.000	
Dikurangi biaya emisi obligasi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp7.696 dan Rp4.527 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)			*Less unamortized bonds issuance costs (net of accumulated amortization of Rp7,696 and Rp4,527 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)*
Pihak ketiga	(3.270)	(3.754)	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 32)	(44)	(127)	*Related party (Note 32)*
	(3.314)	(3.881)	
Total Utang Obligasi - neto	**2.395.241**	**2.240.119**	***Total Bonds Payable - net***

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Kisaran suku bunga kontraktual tahunan	6,45% - 7,00%	6,30% - 7,00%	*Range of contractual annual interest rates*

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	-	465.000	*Continuing Bonds IV Phase II*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	779.000	779.000	*Continuing Bonds IV Phase III*
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	119.555	1.000.000	*Continuing Bonds V Phase I*
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II	1.500.000	-	*Continuing Bonds V Phase II*
	2.398.555	2.244.000	
Dikurangi:			*Less:*
Beban emisi yang belum diamortisasi:			*Unamortized issuance cost:*
Saldo awal	(3.881)	(2.747)	*Beginning balance*
Penambahan	(3.940)	(4.890)	*Additions*
Amortisasi	4.507	3.756	*Amortization*
	(3.314)	(3.881)	
Total	**2.395.241**	**2.240.119**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 menurut tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

20. BONDS PAYABLE (continued)

The details of nominal value of the bonds payable as of December 31, 2025 and 2024, by year of maturity are as follows:

Tahun / *Year*	31 Desember/ *December 31, 2025*				
	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III/ *Continuing Bonds IV Phase III*	Obligasi Berkelanjutan V Tahap I/ *Continuing Bonds V Phase I*	Obligasi Berkelanjutan V Tahap II/ *Continuing Bonds V Phase II*	Total/ *Total*	
Pihak ketiga					*Third parties*
2026	779.000	-	595.000	1.374.000	*2026*
2027	-	119.555	-	119.555	*2027*
2028	-	-	885.000	885.000	*2028*
Subtotal	779.000	119.555	1.480.000	2.378.555	*Subtotal*
Pihak berelasi (Catatan 32)					*Related party (Note 32)*
2028	-	-	20.000	20.000	*2028*
Subtotal	-	-	20.000	20.000	*Subtotal*
Total	**779.000**	**119.555**	**1.500.000**	**2.398.555**	***Total***

Tahun / *Year*	31 Desember/ *December 31, 2024*				
	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II/ *Continuing Bonds IV Phase II*	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III/ *Continuing Bonds IV Phase III*	Obligasi Berkelanjutan V Tahap I/ *Continuing Bonds V Phase I*	Total/ *Total*	
Pihak ketiga					*Third parties*
2025	435.000	-	880.445	1.315.445	*2025*
2026	-	685.000	-	685.000	*2026*
2027	-	-	119.555	119.555	*2027*
Subtotal	435.000	685.000	1.000.000	2.120.000	*Subtotal*
Pihak berelasi (Catatan 32)					*Related party (Note 32)*
2025	30.000	-	-	30.000	*2025*
2026	-	94.000	-	94.000	*2026*
Subtotal	30.000	94.000	-	124.000	*Subtotal*
Total	**465.000**	**779.000**	**1.000.000**	**2.244.000**	***Total***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 menurut peringkat dan Perusahaan pemeringkatnya adalah sebagai berikut:

20. BONDS PAYABLE (continued)

The details of nominal value of the bonds payable as of December 31, 2025 and 2024, by ratings and the ratings Company are as follows:

Nama/ *Name*	Seri/ *Series*	Suku bunga/ *Coupon rate*	Nominal/ *Nominal*	Peringkat dan Perusahaan Pemeringkat/ *Ratings and Rating Company*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Total/ *Total*	Keterangan/ *Description*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I WOM Finance Tahun 2021/	Seri A/ *Series A*	5,50%/ *5.50%*	302.000/ *302,000*	AA (idn) Fitch Ratings 8 Desember/ *December 8,* 2023	8 Agustus/ *August 8,* 2022	500.000/ *500,000*	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo/ *Has been fully paid at maturity date*
Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021	Seri B/ *Series B*	7,00%/ *7.00%*	198.000/ *198,000*		28 Juli/ *July 28,* 2024		
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II WOM Finance Tahun 2022/	Seri A/ *Series A*	4,25%/ *4.25%*	335.000/ *335,000*	AA (idn) Fitch Ratings 29 November/ *November 29,* 2024	18 April/ *April 18,* 2023	800.000/ *800,000*	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo/ *Has been fully paid at maturity date*
Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022	Seri B/ *Series B*	6,30%/ *6.30%*	465.000/ *465,000*		8 April/ *April 8,* 2025		Telah dilunasi pada tanggal 27 Maret/ *Has been fully paid at March 27, 2025*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance Tahun 2023/	Seri A/ *Series A*	5,95%/ *5.95%*	221.000/ *221,000*	AA+ (idn) Fitch Ratings 21 November/ *November 21,* 2025	21 April/ *April 21,* 2024	1.000.000/ *1,000,000*	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo/ *Has been fully paid at maturity date*
Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023	Seri B/ *Series B*	7,00%/ *7.00%*	779.000/ *779,000*		11 April/ *April 11,* 2026		Belum jatuh tempo/ *Not yet mature*
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I WOM Finance Tahun 2024/	Seri A/ *Series A*	6,75%/ *6.75%*	880.445/ 880,445	AAA (idn) Pefindo 2 Februari/ *February 2,* 2026	12 Juli/ *July 12,* 2025	1.000.000/ *1,000,000*	Telah dilunasi sesuai tanggal jatuh tempo/ *Has been fully paid at maturity date*
Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024	Seri B/ *Series B*	6,95%/ *6.95%*	119.555/ 119,555		2 Juli/ *July 2,* 2027		Belum jatuh tempo/ *Not yet mature*
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II WOM Finance Tahun 2025/	Seri A/ *Series A*	6,45%/ *6.45%*	595.000/ 595,000	AAA (idn) Pefindo 2 Februari/ *February 2,* 2026	4 Juli/ *July 4,* 2026	1.500.000/ *1,500,000*	Belum jatuh tempo/ *Not yet mature*
Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025	Seri B/ *Series B*	6,85%/ *6.85%*	905.000/ 905,000		24 Juni/ *June 24,* 2028		

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak tanggal emisi dan jadwal pembayaran bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

20. BONDS PAYABLE (continued)

The bonds payable interest is paid on a quarterly basis (three-month) starting from the issuance date and the interest payment schedule for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follow:

Nama/*Name*	Seri/ *Series*	Awal-Akhir Pembayaran Bunga/ *Interest Payment Starting-Ending*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I WOM Finance Tahun 2021/ *The Continuing Bonds IV Phase I WOM Finance Year 2021*	A	28 Oktober/*October 28,* 2021 8 Agustus/*August 8,* 2022
	B	28 Oktober/*October 28,* 2021 28 Juli/*July 28,* 2024
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II WOM Finance Tahun 2022/ *The Continuing Bonds IV Phase II WOM Finance Year 2022*	A	8 Juli/*July 8,* 2022 18 April/*April 18,* 2023
	B	8 Juli/*July 8,* 2022 8 April/*April 8,* 2025
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III WOM Finance Tahun 2023/ *The Continuing Bonds IV Phase III WOM Finance Year 2023*	A	11 Juli/*July 11,* 2023 21 April/*April 21,* 2024
	B	11 Juli/*July 11,* 2023 11 Oktober/*October 11*, 2025
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I WOM Finance Tahun 2024/ *The Continuing Bonds V Phase I WOM Finance Year 2024*	A	2 Oktober/*October 2,* 2024 12 Juli/*July 12*, 2025
	B	2 Juli/*July 2,* 2024 30 Desember/*December 30*, 2025
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II WOM Finance Tahun 2025/ *The Continuing Bonds V Phase II WOM Finance Year 2025*	A	24 September/*September 24,* 2025 24 Desember/*December 24*, 2025
	B	24 September/*September 24,* 2025 24 Desember/*December 24*, 2025

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, biaya bunga yang dikenakan atas transaksi utang obligasi dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp6.270 dan Rp8.470 (Catatan 29 dan 32)

For the years ended December 31, 2025 and 2024, interest expense incurred for bonds payable transaction with related party amounting to Rp6,270 and Rp8,470, respectively (Notes 29 and 32).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mencatat bunga obligasi yang masih harus dilunasi kepada pihak berelasi masing-masing sebesar Rp26 dan Rp1.921 (Catatan 16 dan 32).

As of December 31, 2025 and 2024, the Company recorded accrued interest of bonds to related party amounting to Rp26 and Rp1,921, respectively (Notes 16 and 32).

Hal lainnya:

Other matters:

Seluruh penerbitan obligasi dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pihak ketiga.

All of the issuance of bonds are covered in the Trusteeship Agreement of Bonds between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, a third party.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Hal lainnya: (lanjutan)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok obligasi yang terutang untuk piutang pembiayaan multiguna masing-masing sebesar Rp125.452 dan Rp219.676 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, piutang pembiayaan modal kerja masing-masing sebesar Rp13.154 dan Rp54.585 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan piutang pembiayaan investasi masing-masing sebesar Rp328.794 dan Rp472.140 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 5, 6, dan 7).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Tahap II diterbitkan secara *clean basis.*

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi, serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perusahaan sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap Perusahaan, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha Perusahaan, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, mengubah bidang usaha utama Perusahaan dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan Perusahaan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang.

Perusahaan wajib mempertahankan *gearing ratio* tidak lebih dari 10 : 1.

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

20. BONDS PAYABLE (continued)

Other matters: (continued)

Issuance of The Continuing Bonds IV Phase I, Phase II, and Phase III are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of bonds payable for multipurpose financing receivables amounting to Rp125,452 and Rp219,676 as of December 31, 2025 and 2024, respectively, working capital financing receivables amounting to Rp13,154 and Rp54,585 as of December 31, 2025 and 2024, respectively, and investment financing receivables amounting to Rp328,794 and Rp472,140 as of December 31, 2025 and 2024, respectively (Notes 5, 6, and 7).

The issuance of The Continuing Bonds V Phase I and Phase II are issued on a clean basis.

Prior to the redemption of the entire Bonds principal and payments of the interest and other charges which are the responsibility of the Company in connection with the issuance of the bonds, the Company, without the written consent of the Trustee shall not undertake, among others, merger or business combination, which will have a negative effect to the Company, obtain new loans which have more priority position than those arising from the bonds, except loans obtained to finance the Company's business, declare or pay dividends as long as the Company failed in servicing the loans based on the Trusteeship Agreement, change the main business of the Company and pledge any of the present or future assets including the rights on the Company's revenues which became the collateral based on the Trusteeship Agreement and Indebtedness Agreement.

The Company is obliged to maintain the gearing ratio not more than 10 : 1.

The Company has complied with the covenants in those agreements for the years ended December 31, 2025 and 2024.

21. MODAL SAHAM / *21. CAPITAL STOCK*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rincian kepemilikan saham Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the details of the Company's shares of stock with a par value of Rp100 (in full amount) per share are as follows:

Pemegang Saham / *Shareholders*	31 Desember 2025 dan 2024 / *December 31, 2025 and 2024*		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Pemilikan / *Percentage of Ownership*	Jumlah / *Amount*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.349.646.729	67,49%	234.965
PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25,01%	87.060
Masyarakat umum (masing-masing dibawah 5,00%) / *Public (each below 5.00%)*	261.234.751	7,50%	26.123
Total	**3.481.481.480**	**100,00%**	**348.148**

Berikut ini adalah data yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan laba per saham dasar:

The computation of earnings per share is based on following data:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
Laba tahun berjalan	142.553	262.915	*Income for the year*
Jumlah saham biasa yang beredar (dalam nilai penuh)	3.481.481.480	3.481.481.480	*Number of ordinary shares outstanding (in full amount)*
Laba per saham dasar (dalam nilai Rupiah penuh)	**40,95**	**75,52**	***Basic earnings per share (in full Rupiah amount)***

22. MODAL DISETOR LAINNYA / *22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Modal disetor lainnya merupakan selisih antara jumlah harga jual dengan jumlah nilai nominal saham yang ditawarkan kepada masyarakat setelah dikurangi dengan seluruh beban yang berhubungan dengan penawaran umum saham Perusahaan. Rincian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Additional paid-in capital represents the difference between the selling price and the par value of the shares offered to the public after being deducted with the total expenses related to the public issuance of the Company's shares. The details as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2025	2024	
Selisih lebih harga jual atas nilai nominal	171.852	171.852	*Excess of selling price over par the value*
Dikurangi beban emisi efek ekuitas	(11.662)	(11.662)	*Less stock issuance costs*
Neto	**160.190**	**160.190**	***Net***

Seluruh biaya emisi efek berasal dari penawaran umum yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2004.

All stock issuance costs arose from the public offering conducted in 2015 and 2004.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DAN DIVIDEN KAS

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan No. 7 tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum dari laba bersih Perusahaan sebesar Rp2.500 serta pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan nilai maksimal sebesar Rp78.875 atau setinggi-tingginya 30,00% dari laba bersih Perusahaan dengan dividen sekitar sebesar Rp22,66 per lembar saham. Dividen tunai telah dibayarkan pada tanggal 25 April 2025 sebesar Rp78.529.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 44 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum dari laba bersih Perusahaan sebesar Rp2.500 serta pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan nilai maksimal sebesar Rp70.922 atau setinggi-tingginya 30,00% dari laba bersih Perusahaan dengan dividen sekitar sebesar Rp20,37 per lembar saham. Dividen tunai telah dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp70.445.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20,00% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Perusahaan akan terus menambah cadangan ini sampai cadangan tersebut mencapai jumlah yang diatur oleh Undang-Undang.

23. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS AND CASH DIVIDENDS

Based on Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") No. 7, dated March 25, 2025 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notary in South Jakarta, the Shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp2,500 and distribute cash dividend for the year ended December 31, 2024 with maximum amount of Rp78,875 or as high as 30.00% of Company's net income with dividend around Rp22.66 per share. The cash dividends have been paid on April 25, 2025 amounted to Rp78,529.

Based on Deed of Minutes of AGMS No. 44, dated March 28, 2024 of Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, the Shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp2,500 and distribute cash dividend for the year ended December 31, 2023 with maximum amount of Rp70,922 or as high as 30.00% of Company's net income with dividend around Rp20.37 per share. The cash dividends have been paid on May 2, 2024 amounted to Rp70,445.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20.00% of the issued and fully paid share capital. The Company will continue to build this reserve until such time the amount reaches the level required by Law.

24. PENDAPATAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA, PEMBIAYAAN MODAL KERJA, DAN PEMBIAYAAN INVESTASI

24. MULTIPURPOSE FINANCING, WORKING CAPITAL FINANCING, AND INVESTMENT FINANCING INCOME

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan pembiayaan multiguna	1.004.780	1.169.742	*Multipurpose financing income*
Pendapatan pembiayaan modal kerja	255.224	140.201	*Working capital financing income*
Pendapatan pembiayaan investasi	548.845	509.480	*Investment financing income*
Total pendapatan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi - bruto	1.808.849	1.819.423	*Total multipurpose financing, working capital financing, and investment financing income - gross*
Dikurangi hak bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama (Catatan 31)	-	(3)	*Less amounts of the bank rights on such income relating to the transaction of joint financing cooperation (Note 31)*
Pendapatan Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Investasi - neto	**1.808.849**	**1.819.420**	***Multipurpose Financing, Working Capital Financing, and Investment Financing Income - net***

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada pendapatan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi dari satu konsumen saja yang melebihi 10,00% dari total pendapatan konsumen.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, the Company has no multipurpose financing, working capital financing, and investment financing income from one customer exceeding of 10.00% of total consumer financing income.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pendapatan pembiayaan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi termasuk amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi piutang pembiayaan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi masing-masing sebesar Rp132.090 dan Rp106.919.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, multipurpose financing, working capital financing, and investment financing income includes amortization of income and transaction cost of multipurpose financing, working capital financing, and investment financing receivables amounting to Rp132,090 and Rp106,919, respectively.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pendapatan *margin* dari kegiatan pembiayaan *murabahah* dan pendapatan imbal jasa dari kegiatan pembiayaan jasa *ijarah* disajikan sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan multiguna masing-masing sebesar Rp78.100 dan Rp62.584 (Catatan 37).

For the years ended December 31, 2025 and 2024, margin income from murabahah financing activities and service fee income from ijarah service financing activities was presented as part of multipurpose financing income amounting to Rp78,100 and Rp62,584, respectively (Note 37).



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PENDAPATAN ADMINISTRASI / *25. ADMINISTRATION INCOME*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan komisi asuransi	39.841	37.387	*Insurance commission income*
Total	**39.841**	**37.387**	***Total***

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *26. OTHER REVENUES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan denda	84.899	88.005	*Penalty income*
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	81.944	61.827	*Collection of receivables previously written-off*
Pendapatan pelunasan awal konsumen	46.857	54.617	*Income from early consumer repayment*
Pendapatan klaim asuransi	10.946	11.464	*Insurance claim income*
Lain-lain	72.521	73.075	*Others*
Total	**297.167**	**288.988**	***Total***

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Alih daya	318.809	299.531	*Outsourcing*
Kerugian agunan yang ditarik kembali	100.808	71.853	*Losses on repossessed motor vehicle*
Premi asuransi	37.146	35.679	*Insurance premium*
Transportasi dan komunikasi	34.656	33.140	*Transportation and communication*
Pemasangan jaringan	29.250	26.164	*Network installation*
Perbaikan dan pemeliharaan	29.110	29.443	*Repairs and maintenance*
Sewa	22.168	21.034	*Rentals*
Promosi penjualan	21.323	20.494	*Sales promotions*
Legalitas	11.056	10.023	*Legal*
Pelatihan	10.564	9.826	*Training*
Listrik dan air	10.452	10.412	*Electricity & water*
Biaya aplikasi kredit	7.047	12.111	*Application credit expense*
Penanganan dan rugi *fraud*	6.724	5.199	*Fraud settlement and losses*
Materai	6.045	6.920	*Stamp*
Biaya aplikasi digital	5.209	5.541	*Application digital expense*
BPKB/STNK kendaraan	4.051	3.606	*Vehicle's BPKB/STNK*
Iuran keanggotaan	3.634	3.849	*Membership expense*
Perlengkapan kantor	2.713	2.681	*Office supplies*
Perjamuan tamu	2.688	2.018	*Entertainment*
Honorarium konsultan	2.512	2.688	*Consultancy fees*
Percetakan	1.739	2.402	*Printing*
Alat tulis kantor	1.477	1.457	*Stationery*
Kebersihan lingkungan	585	581	*Cleaning Service*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500)	1.644	1.536	*Others (each below Rp500)*
Total	**671.410**	**618.188**	***Total***

28. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *28. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Gaji dan tunjangan	386.819	390.673	*Salaries and benefits*
Insentif	20.093	19.714	*Incentives*
Total	**406.912**	**410.387**	***Total***

Beban gaji dan tunjangan adalah termasuk kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan beban imbalan kerja karyawan (Catatan 32 dan 33).

Salaries and benefits include compensation received by the Company's Board of Commissioners and Directors and employee benefit expense (Notes 32 and 33).

29. BEBAN PENDANAAN DAN KEUANGAN / *29. FINANCING COSTS AND FINANCING CHARGES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Bunga			*Interests*
Pihak ketiga	319.161	317.474	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi			*Related parties*
Utang subordinasi (Catatan 15 dan 32)	14.904	17.032	*Subordinated loan (Notes 15 and 32)*
Utang obligasi (Catatan 20 dan 32)	6.270	8.470	*Bonds payable (Notes 20 and 32)*
Amortisasi biaya-biaya emisi obligasi	5.483	4.664	*Amortization on bonds issuance costs*
Provisi dan administrasi bank	5.352	6.006	*Bank provision fees and administration charges*
Beban bunga atas liabilitas sewa			*Interest expense on lease liabilities*
Pihak ketiga (Catatan 11)	1.992	2.663	*Third party (Note 11)*
Pihak berelasi (Catatan 11,19, dan 32)	-	10	*Related party (Notes 11, 19, and 32)*
Total	**353.162**	**356.319**	***Total***

30. BEBAN LAIN-LAIN / *30. OTHER EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya balai lelang	4.267	3.570	*Auction fee*
Bunga atas utang pembiayaan - kendaraan			*Interest on financing loans - vehicle*
Pihak berelasi (Catatan 32)	2.027	1.965	*Related party (Note 32)*
Lain-lain	8.826	4.986	*Others*
Total	**15.120**	**10.521**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJASAMA

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penerusan Kredit No. 2 tanggal 1 November 2004, Perusahaan telah memperoleh persetujuan kerjasama dari BMI dimana fasilitas kerjasama untuk penyaluran kredit kendaraan bermotor roda dua ditingkatkan dari Rp300.000 menjadi Rp500.000.

Seluruh fasilitas tersebut bersifat berulang (*revolving*). Porsi pembiayaan BMI dan Perusahaan masing-masing 99,00% dan 1,00% (Catatan 32).

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Perubahan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor antara BMI dengan Perusahaan No. SPj.2025.175/DIR Global Banking - FIG dan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Multiguna Dengan Jaminan Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat antara BMI dengan Perusahaan No. SPj.2025.176/DIR Global Banking - FIG tanggal 12 Maret 2025, fasilitas kerjasama tersebut diubah menjadi Rp2.000.000 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2026.

Tingkat suku bunga efektif yang diberlakukan oleh BMI kepada Perusahaan adalah berkisar antara 11,75% sampai dengan 14,25% per tahun. Sebagai jaminan adalah kendaraan bermotor yang dibiayai oleh BMI melalui Perusahaan. Selain itu, Perusahaan wajib mempertahankan nilai rasio perbandingan jumlah seluruh kewajiban terhadap jumlah modal disetor (*gearing ratio*) *on-shore* dan *off-shore* tidak lebih dari 10 : 1.

Perjanjian dengan BMI adalah perjanjian *without recourse* sehingga utang bank dan piutang pembiayaan multiguna yang terkait disajikan secara neto.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BMI.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak memiliki saldo piutang atas transaksi pembiayaan bersama.

31. COOPERATION AGREEMENTS

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")

Based on the Credit Channeling Cooperation Agreement No. 2 dated November 1, 2004, the Company has obtained an approval letter from BMI in which the cooperation facility for the credit channeling of two-wheeled motor vehicles was increased from Rp300,000 to Rp500,000.

All of facility was on a revolving basis. The financing portion of BMI and the Company is 99.00% and 1.00%, respectively (Note 32).

The agreement has been amended several times, the latest Amendment to the Joint Financing Cooperation Agreement of Vehicle Credit Facility between BMI and the Company No. SPj.2025.175/DIR Global Banking - FIG and Joint Financing Cooperation Agreement of Two-Wheeled and Four-Wheeled Motor Vehicle Multipurpose Credit Facility between BMI and the Company No. SPj.2025.176/DIR Global Banking - FIG dated March 12, 2025, the facility was changed to Rp2,000,000 with maturity date on March 15, 2026.

The effective interest rate charged by BMI to the Company are ranging from 11.75% to 14.25% per annum. The motor vehicles financed by BMI through the Company serve as collateral. In addition, the Company is obliged to maintain the gearing ratio on-shore and off-shore of not more than 10 : 1.

The arrangement with BMI is on a without recourse basis therefore the related bank loans and multipurpose financing receivables are presented at net.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied with all significant terms and condition related to cooperation agreement as required by BMI.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company had no outstanding receivable balances related to joint financing transactions.

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("BMI")	Pemegang saham mayoritas Perusahaan/*The majority shareholder of the Company*	Rekening giro, utang obligasi, perjanjian kerjasama pembiayaan, utang subordinasi, pendapatan bunga, dan beban pendanaan/*Current accounts, bonds payable, joint financing, subordinated loan, interest income, and financing cost*
PT Maybank Indonesia Finance ("MIF")	Hubungan entitas pengendali dengan Perusahaan/*Under common ownership with the Company*	Fasilitas pembiayaan-kendaraan/*Financing facilities-vehicles*
PT Wahanaartha Ritelindo ("WARI")	Hubungan afiliasi dengan Perusahaan/*Under affiliation with the Company*	Liabilitas sewa, beban bunga atas liabilitas sewa, dan utang *dealer*/*Lease liabilities, interest expense on lease liabilities, and dealers payables*
PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ("Etiqa")	Mempunyai pemegang akhir yang sama/*Owned by the same ultimate holder*	Utang asuransi/*Insurance payables*
Dewan Komisaris dan Direksi/*Boards of Commissioners and Directors*	Personil manajemen kunci/*Key management personnel*	Pinjaman karyawan, gaji dan tunjangan/*Loans to employee, salaries and benefits*

Ringkasan saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset, liabilitas serta pendapatan dan beban adalah sebagai berikut:

The summary of related parties balances and percentages of related parties balances to total assets, liabilities, revenues and expenses are as follows:

Laporan Posisi Keuangan / ***Statement of Financial Position***

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	2024	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas			*Cash and cash equivalents*
Bank (Catatan 4)	366.536	370.302	*Cash in banks (Note 4)*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pinjaman karyawan (Catatan 8)	3.072	782	*Loans to employees (Note 8)*
Persentase terhadap total aset			***Percentage to total assets***
Kas dan setara kas			*Cash and cash equivalents*
Bank	4,97%	5,33%	*Cash in banks*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pinjaman karyawan	0,04%	0,01%	*Loans to employees*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Ringkasan saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset, liabilitas serta pendapatan dan beban adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

LIABILITAS			***LIABILITIES***
Biaya yang masih harus dibayar - bunga			*Accrued expenses - interest*
Utang subordinasi (Catatan 15 dan 16)	1.307	1.307	*Subordinated loan (Notes 15 and 16)*
Utang obligasi (Catatan 16 dan 20)	26	1.921	*Bonds payable (Notes 16 and 20)*
Utang obligasi - neto (Catatan 20)	19.956	19.956	*Bonds payable - net (Note 20)*
Utang subordinasi (Catatan 15)	200.000	200.000	*Subordinated loan (Note 15)*
Liabilitas sewa (Catatan 19)	-	34	*Lease liabilities (Note 19)*
Utang lain-lain			*Other payables*
Utang pembiayaan - kendaraan (Catatan 18)	16.846	19.987	*Financing loans - vehicles (Note 18)*
Utang asuransi (Catatan 18)	2.652	432	*Insurance payables (Note 18)*
Utang *dealer* (Catatan 18)	701	366	*Dealers payables (Note 18)*
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Catatan 18)	-	384	*Payables on joint financing (Note 18)*
Persentase terhadap total liabilitas			***Percentage to total liabilities***
Biaya yang masih harus dibayar - bunga			*Accrued expenses - interest*
Utang subordinasi	0,02%	0,03%	*Subordinated loan*
Utang obligasi	0,00%	0,04%	*Bonds payable*
Utang obligasi - neto	0,37%	2,45%	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	3,71%	3,96%	*Subordinated loan*
Liabilitas sewa	-	0,00%	*Lease liabilities*
Utang lain-lain			*Other payables*
Utang pembiayaan - kendaraan	0,31%	0,40%	*Financing loans - vehicles*
Utang asuransi	0,05%	0,01%	*Insurance payables*
Utang *dealer*	0,01%	0,01%	*Dealers payables*
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	-	0,01%	*Payables on joint financing*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

PENDAPATAN			***REVENUES***
Bunga bank - neto setelah pajak final (Catatan 4)	16.999	14.776	*Interest from banks - net of final tax (Note 4)*
Persentase terhadap total pendapatan			***Percentage to total revenues***
Bunga bank - neto setelah pajak final	0,78%	0,68%	*Interest from banks - net of final tax*

32. *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

The summary of related parties balances and percentages of related parties balances to total assets, liabilities, revenues and expenses are as follows: (continued)

Statement of Financial Position (continued)

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Ringkasan saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset, liabilitas serta pendapatan dan beban adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan)

32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The summary of related parties balances and percentages of related parties balances to total assets, liabilities, revenues and expenses are as follows: (continued)

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
BEBAN			***EXPENSES***
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 29)	-	10	*Interest expense on lease liabilities (Note 29)*
Beban pendanaan atas utang subordinasi (Catatan 15 dan 29)	14.904	17.032	*Financing costs on subordinated loan (Notes 15 and 29)*
Beban pendanaan atas utang obligasi (Catatan 20 dan 29)	6.270	8.470	*Financing cost on bonds payable (Notes 20 and 29)*
Beban lain-lain - bunga atas utang pembiayaan - kendaraan (Catatan 18 dan 30)	2.027	1.965	*Other expenses - interest on financing loans - vehicles (Notes 18 and 30)*
Persentase terhadap total beban			***Percentage to total expenses***
Beban bunga atas liabilitas sewa	-	0,00%	*Interest expense on lease liabilities*
Beban pendanaan atas utang subordinasi	0,75%	0,93%	*Financing costs on subordinated loan*
Beban pendanaan atas utang obligasi	0,32%	0,46%	*Financing cost on bonds payable*
Beban lain-lain - bunga atas utang pembiayaan - kendaraan	0,10%	0,11%	*Other expenses - interest on financing loans - vehicles*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
	Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*	**Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners***	
Imbalan kerja jangka pendek - gaji	3.260	2.931	*Short term employment benefits - salaries*
Imbalan kerja jangka pendek - tunjangan lainnya	1.252	700	*Short term employment benefits - others benefits*
Total	**4.512**	**3.631**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Ringkasan saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset, liabilitas serta pendapatan dan beban adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan)

32. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The summary of related parties balances and percentages of related parties balances to total assets, liabilities, revenues and expenses are as follows: (continued)

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
	Direksi/ *Directors*	Direksi/ *Directors*	
Imbalan kerja jangka pendek - gaji	8.896	8.270	*Short term employment benefits - salaries*
Imbalan kerja jangka pendek - tunjangan lainnya	7.731	6.733	*Short term employment benefits - others benefits*
Total	**16.627**	**15.003**	***Total***

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi usaha pada umumnya yang mungkin tidak sejenis sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga (Catatan 2c).

All significant transactions with related parties are conducted under commercial terms and condition which may not be similar to those conducted with third parties (Note 2c).

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp88.795 dan Rp104.263.

Nilai yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS

The Company accrued the liability for employee benefits and other long-term benefits as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp88,795 and Rp104,263, respectively.

Amounts recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	2024	
Karyawan tetap dan kontrak			*Permanent and contract employee*
Kewajiban imbalan pasti	66.751	89.999	*Defined benefit obligation*
Nilai wajar aset program	(14.579)	(11.350)	*Fair value of plan assets*
Status pendanaan	52.172	78.649	*Funded status*
Liabilitas imbalan pasti - neto	**52.172**	**78.649**	***Net defined benefit liabilities***
Karyawan alih daya dan kontrak			*Outsourcing and contract employee*
Kewajiban imbalan pasti - karyawan kontrak dan alih daya	36.623	25.614	*Defined benefit obligation - contract and outsourcing employees*
Liabilitas imbalan kerja	**88.795**	**104.263**	***Liability for employee benefits***

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

33. *LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Perubahan nilai kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The changes in the defined benefit obligation are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	89.999	87.879	*Defined benefit obligation at the beginning of the year*
Biaya jasa kini	12.642	12.026	*Current service cost*
Kerugian atas penyelesaian	1.478	-	*Loss on settlements*
Biaya bunga	6.262	5.315	*Interest cost*
Arus kas			*Cash flows*
Pembayaran imbalan dari aset program	(5.007)	(7.487)	*Benefit payments from plan assets*
Pembayaran imbalan dari pemberi kerja	(1.974)	(1.301)	*Benefit payments from employer*
Pembayaran penyelesaian dari aset program	(1.478)	-	*Settlement payments from plan assets*
Pengukuran kembali	(35.171)	(6.433)	*Remeasurements*
Kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun	**66.751**	**89.999**	***Defined benefit obligation at the end of year***

Perubahan nilai wajar atas aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The changes in the fair value of plan assets of the year are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Nilai wajar aset program pada awal tahun	11.350	10.202	*Fair value of plan assets at the beginning of the year*
Penghasilan bunga	766	697	*Interest income*
Arus kas			*Cash flow*
Iuran pemberi kerja	9.000	8.000	*Employer contributions*
Pembayaran langsung imbalan pemberi kerja	1.832	-	*Employer direct benefit payments*
Pembayaran imbalan dari aset program	(5.007)	(7.487)	*Benefit payments from plan assets*
Pembayaran imbalan dari pemberi kerja	(1.832)	-	*Benefit payments from employer*
Pembayaran penyelesaian dari aset program	(1.478)	-	*Settlement payments from plan assets*
Pengukuran kembali			*Remeasurements*
Imbal hasil atas aset program (tidak termasuk penghasilan bunga)	(52)	(62)	*Return on plan assets (excluding interest income)*
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	**14.579**	**11.350**	***Fair value of plan assets at the end of year***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Rekonsiliasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The reconciliation in the liabilities for employee benefits are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Karyawan tetap dan kontrak			*Permanent and contract employee*
Kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	78.649	77.677	*Defined benefit liability at the beginning of the year*
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	19.616	15.634	*Employee benefits expense during the current year*
Arus kas			*Cash flow*
Iuran pemberi kerja	(9.000)	(8.000)	*Employer contributions*
Pembayaran langsung imbalan pemberi kerja	(1.974)	(1.301)	*Employer direct benefit payments*
Jumlah yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	(35.119)	(5.361)	*Total amount recognized in other comprehensive income*
Kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun	**52.172**	**78.649**	***Defined benefit liability at the end of the year***
Karyawan alih daya dan kontrak			*Outsourcing and contract employee*
Kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	25.614	15.214	*Defined benefit liability at the beginning of the year*
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	12.072	10.502	*Employee benefits expense during the current year*
Arus kas			*Cash flows*
Pembayaran imbalan langsung pemberi kerja	(1.063)	(102)	*Employer direct benefit payments*
Kewajiban imbalan pasti Pada akhir tahun	**36.623**	**25.614**	***Defined benefit liability at the end of the year***
Liabilitas imbalan kerja	**88.795**	**104.263**	***Liability for employee benefits***

Total beban yang diakui pada laba rugi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The total expense recognized in the profit or loss for employee benefits are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	12.642	12.026	*Current service cost*
Kerugian atas penyelesaian	1.478	-	*Loss on settlements*
Biaya bunga - neto	5.496	4.617	*Interest cost - net*
Pengukuran kembali dari imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	(1.009)	*Remeasurement of other long-term employee benefits*
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	**19.616**	**15.634**	***Employee benefits expense during the current year***

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai investasi yang dikutip di pasar aktif atas instrumen pasar uang PPUKP masing-masing sebesar Rp14.579 dan Rp11.350.

Mulai tanggal 19 Oktober 2018, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial (pihak ketiga) terkait dengan pengelolaan program pensiun untuk kompensasi pesangon. Program tersebut memenuhi kriteria sebagai aset program.

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan berdasarkan laporannya pada tanggal 14 Januari 2026 No. 091/KKAGD/LAP/I/26 dan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Aktuaria Yusi dan Rekan berdasarkan laporannya pada tanggal 8 Januari 2025 Nomor 0126/KYR/I/25, menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, investment quoted in active market for Money Market instrument PPUKP amounting to Rp14,579 and Rp11,350, respectively.

Starting from October 19, 2018, the Company entered into Cooperation Agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial (third party) for the management of pension program for severance compensation. The program meets the criteria of plan assets.

The Company accrued the liability for employee benefits and other long-term benefits as of December 31, 2025 and 2024, based on the independent actuarial calculation prepared by Kantor Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan, an independent actuary based on their report dated January 14, 2026 No. 091/KKAGD/LAP/I/26 and based on the independent actuarial calculation prepared by Kantor Aktuaria Yusi dan Rekan, an independent actuary based on their report dated January 8, 2025 Number 0126/KYR/I/25, applied the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Tingkat diskonto (per tahun)	6,25%	6,88% - 7,13%	*Discount rate (per annum)*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	6,00%	7,00%	*Annual salary increases*
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) 2019/ *Indonesia Mortality Table (TMI) 2019*		*Mortality rate*
Tingkat cacat	10,00% dari TMI 2019 *10.00% from TMI 2019*		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri dari karyawan sebelum usia 30 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0,00% pada umur 54 tahun	10,00% - 15,00%	10,00%	*Resignation rate for employee before the age of 30 and will linearly decrease until 0.00% at the age of 54*
Usia pensiun	56 tahun/*56 years*		*Retirement age*

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit):

The following tables summarize the sensitivity to areasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the liability for employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 (unaudited):

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Kenaikan suku bunga dalam 1%	(3.796)	(7.764)	*Increase in interest rate in 1%*
Penurunan suku bunga dalam 1%	4.219	8.865	*Decrease in interest rate in 1%*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat kenaikan gaji masa depan, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit):

33. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The following tables summarize the sensitivity to areasonably possible change in future salary incremental rates, with all other variables held constant, of the liability for employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 (unaudited):

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Kenaikan gaji dalam 1%	4.331	8.351	*Increase in salary in 1%*
Penurunan gaji dalam 1%	(3.965)	(7.473)	*Decrease in salary in 1%*

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The maturity of the undiscounted liability for employee benefits are as follows (unaudited):

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
1 tahun	8.775	4.519	*1 year*
Antara 1 - 2 tahun	8.063	5.981	*Between 1 - 2 years*
Antara 2 - 5 tahun	23.458	26.412	*Between 2 - 5 years*
Antara 5 - 10 tahun	62.608	62.987	*Between 5 - 10 years*
Diatas 10 tahun	160.914	1.113.605	*Up 10 years*
Total	**263.818**	**1.213.504**	***Total***

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan dihadapkan pada risiko pasar (tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Kerangka Manajemen Risiko

Perusahaan memiliki Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*/"ROC") yang membantu Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko Perusahaan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, Perusahaan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*/"RMC") untuk membantu Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko Perusahaan sehari-hari.

Perusahaan telah menerapkan prinsip *three lines model* dalam pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal. Unit Kerja Bisnis sebagai lini pertama memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan risiko secara langsung. Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai lini kedua yang memastikan kecukupan adanya sistem, prosedur, dan metodologi risiko yang digunakan. Unit Kerja Audit Internal sebagai lini ketiga berperan sebagai *independent assurance*.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company is exposed to market risk (interest rate risk), credit risk, and liquidity risk.

Risk Management Framework

The Company has in place the Risk Oversight Committee ("ROC") that assists the Board of Commissioners in effective and comprehensive oversight and evaluation of the Company's risk management process. In addition, the Company has also established the Risk Management Committee ("RMC") to assist the Directors in implementing daily risk management in the Company.

The Company has implemented the three lines model principle in comprehensive and reliable risk control. Business Unit as the first line has direct responsibility on risk management. The Risk Management Unit as the second line ensures the adequacy of risk system, procedures, and methodology that are used. The Internal Audit Unit as the third line has a role as independent assurance.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Untuk mengakomodasi tren Perusahaan pembiayaan dan pertumbuhan bisnis, Perusahaan telah menyusun pedoman manajemen risiko dalam memastikan setiap aktivitas bisnis dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah pilar kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

a) Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
   - Komite Audit;
   - Komite Pemantau Risiko;
   - Komite Nominasi dan Remunerasi.

b) Kewenangan dan tanggung jawab Direksi:
   - Komite Manajemen Risiko;
   - Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Manajemen Risiko

Perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengelolaan profil risiko sebagai akibat tingkat kompetisi dan perubahan lingkungan bisnis. Perusahaan telah merumuskan *risk appetite*, kebijakan dan prosedur, dan penetapan batasan risiko maksimal yang dapat diambil.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perusahaan memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, terukur, terpantau, dan dapat dikendalikan sedini mungkin secara tepat dan baik yang mencakup:

- Reviu produk baru, *credit test*, *risk control self assessment*, *stress test*;
- *Credit scoring, liquidity gap, repricing mismatch, ECL* (*PD, LGD, EAD*);
- Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Manajemen Risiko, *fraud monitoring activities*;
- Aktivitas audit internal dan eksternal, mekanisme *whistleblowing, segregation of duties.*

34. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risk Management Framework (continued)

To accommodate the financing Company business trend and growth, the Company has developed risk management guidelines in ensuring the management of business activities with prudential principle. The following is the Company's risk management framework pillars:

Pillar 1: Active Supervision by the Board of Commissioners and the Directors

Active supervision is reflected since annual business planning, which includes:

a) Responsibility and authority of the Company's Board of Commissioner:
   - *Audit Committee;*
   - *Risk Oversight Committee;*
   - *Nomination Committee and Remuneration.*

b) Responsibility and authority of the Company's Directors:
   - *Risk Management Committee;*
   - *Information Technology Steering Committee.*

Pillar 2: Risk Management Policy and Procedures and Limit Setup Sufficiency

The Company takes proactive measures in managing risk profiles to address competition and business environment evolution. The Company has formulated the risk appetite, policy and procedures, and determined maximum risk thresholds that can be taken.

Pillar 3: Risk Identification, Measurement, Control and Monitoring, and Risk Management Information System Sufficiency

The Company ensures that all risks can be identified, measured, monitored, and controlled at the earliest in an accurate and proper manner, which includes:

- *Reviewing new product, credit test, risk control self assessment, stress test;*
- *Credit scoring, liquidity gap, repricing mismatch, ECL (PD, LGD, EAD);*
- *Management Information System and Risk Management Reporting, fraud monitoring activities;*
- *Internal and external audit activities, whistleblowing mechanism, segregation of duties.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Untuk mengakomodasi tren pembiayaan dan pertumbuhan bisnis, Perusahaan telah menyusun pedoman manajemen risiko dalam memastikan setiap aktivitas bisnis dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah pilar kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan: (lanjutan)

Pilar 4: Kecukupan Sumber Daya dan Infrastruktur

Keberhasilan fungsi dan tugas satuan kerja manajemen risiko termasuk di dalamnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia ("SDM") di bidang manajemen risiko yang profesional. SDM yang unggul dan didukung infrastruktur yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan proses penerapan manajemen risiko Perusahaan.

Risiko pasar (tingkat suku bunga)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Kebijakan Perusahaan mengatur agar suku bunga pinjaman dari bank atau obligasi (*cost of fund*) menggunakan suku bunga tetap (*fixed rate*) agar dapat menyesuaikan dengan suku bunga tetap yang dikenakan kepada konsumen.

Tabel dibawah ini menggambarkan rincian jatuh tempo aset dan liabilitas Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Framework (continued)

To accommodate the financing Company business trend and growth, the Company has developed risk management guidelines in ensuring the management of business activities with prudential principle. The following is the Company's risk management framework pillars: (continued)

Pillar 4: Resources and Infrastructure Sufficiency

The success of risk management unit function and duties includes the availability of infrastructure and human resources ("HR") with professional risk management field. Excellent HR and good support of infrastructure become the benchmark of successful risk management application process in the Company.

Market risk (interest rate risk)

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's policy is to manage its loans or bonds' interest rate (cost of fund) using fixed rate in order to match the fixed interest rate which are charged to consumers.

The following table represents a breakdown of maturity dates of the Company's assets and liabilities which are affected by interest rate:

	31 Desember/*December 31*, 2025						
	Bunga tetap/*Fixed rate*						
	Bunga mengambang/ *Floating rate*	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	1-5 tahun/ *1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Tidak dikenakan bunga/*Non interest bearing*	Total/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Kas dan setara kas	504.521	-	-	-	5.569	510.090	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan multiguna	-	1.778.754	1.487.096	-	-	3.265.850	*Multipurpose financing receivables*
Piutang pembiayaan modal kerja	-	642.796	262.361	-	-	905.157	*Working capital financing receivables*
Piutang pembiayaan investasi	-	950.077	1.623.635	-	-	2.573.712	*Investment financing receivables*
Piutang lain-lain	-	627	905	1.938	82.834	86.304	*Other receivables*
Uang jaminan	-	-	-	-	4.725	4.725	*Security deposits*
Total aset	**504.521**	**3.372.254**	**3.373.997**	**1.938**	**93.128**	**7.345.838**	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Utang bank	-	1.424.125	995.753	-	-	2.419.878	*Bank loans*
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	23.083	-	-	-	23.083	*Accrued expenses - interest*
Utang lain-lain	-	-	16.847	-	155.446	172.293	*Other payables*
Liabilitas sewa	-	-	421	23.347	-	23.768	*Lease liabilities*
Utang obligasi - neto	-	1.372.102	1.023.139	-	-	2.395.241	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	-	-	200.000	-	-	200.000	*Subordinated loan*
Total liabilitas	**-**	**2.819.310**	**2.236.160**	**23.347**	**155.446**	**5.234.263**	***Total liabilities***
Neto	**504.521**	**552.944**	**1.137.837**	**(21.409)**	**(62.318)**	**2.111.575**	***Net***

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (tingkat suku bunga) (lanjutan)

Tabel dibawah ini menggambarkan rincian jatuh tempo aset dan liabilitas Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga: (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (interest rate risk) (continued)

The following table represents a breakdown of maturity dates of the Company's assets and liabilities which are affected by interest rate: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2024						
	Bunga tetap/*Fixed rate*						
	Bunga mengambang/ *Floating rate*	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	1-5 tahun/ *1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Tidak dikenakan bunga/*Non interest bearing*	Total/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Kas dan setara kas	534.576	-	-	-	5.640	540.216	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan multiguna	-	2.056.940	1.416.891	-	-	3.473.831	*Multipurpose financing receivables*
Piutang pembiayaan modal kerja	-	345.206	156.556	-	-	501.762	*Working capital financing receivables*
Piutang pembiayaan investasi	-	825.706	1.402.478	-	-	2.228.184	*Investment financing receivables*
Piutang lain-lain	-	57	621	570	76.806	78.054	*Other receivables*
Uang jaminan	-	-	-	-	4.487	4.487	*Security deposits*
Total aset	**534.576**	**3.227.909**	**2.976.546**	**570**	**86.933**	**6.826.534**	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Utang bank	-	1.456.091	734.376	-	-	2.190.467	*Bank loans*
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	27.734	-	-	-	27.734	*Accrued expenses - interest*
Utang lain-lain	-	-	19.987	-	146.865	166.852	*Other payables*
Liabilitas sewa	-	-	744	31.270	-	32.014	*Lease liabilities*
Utang obligasi - neto	-	1.343.118	897.001	-	-	2.240.119	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	-	-	200.000	-	-	200.000	*Subordinated loan*
Total liabilitas	**-**	**2.826.943**	**1.852.108**	**31.270**	**146.865**	**4.857.186**	***Total liabilities***
Neto	**534.576**	**400.966**	**1.124.438**	**(30.700)**	**(59.932)**	**1.969.348**	***Net***

Analisis sensitivitas

Manajemen risiko suku bunga terhadap batas kesenjangan suku bunga dilengkapi dengan pemantauan sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap berbagai skenario suku bunga baku maupun non-baku. Skenario baku bulanan mencakup analisis kenaikan atau penurunan kurva imbal hasil sebesar 0,5%.

Dalam menyusun analisis sensitivitas, Perusahaan menggunakan perubahan tingkat suku bunga pasar sebesar 0,5%, dengan variabel lain dianggap tetap terhadap pendapatan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi, dan beban pendanaan dan keuangan.

Sensitivity analysis

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. Standard scenarios that are considered on a monthly basis include a 0.5% parallel fall or rise in all yield curves.

In preparing a sensitivity analysis, the Company uses changes in market interest rate of 0.5%, with other variables considered fixed on multipurpose financing, working capital financing, and investment financing income, and financing costs and financing charges.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar (tingkat suku bunga) (lanjutan)

Market risk (interest rate risk) (continued)

Analisis sensitivitas (lanjutan)

Sensitivity analysis (continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi:

The following tables demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the multipurpose financing, working capital financing, and investment financing income:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Kenaikan suku bunga dalam 0,5%	23.552	18.672	*Increase in interest rate in 0.5%*
Penurunan suku bunga dalam 0,5%	(23.477)	(18.608)	*Decrease in interest rate in 0.5%*

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap beban pendanaan dan keuangan:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the financing costs and financing charges:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Kenaikan suku bunga dalam 0,5%	26.449	23.227	*Increase in interest rate in 0.5%*
Penurunan suku bunga dalam 0,5%	(26.420)	(23.172)	*Decrease in interest rate in 0.5%*

Risiko kredit

Credit risk

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak konsumen, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisis dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang pembiayaan dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih.

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a customer contract, leading to a financial loss. The Company has maintained prudent analysis and credit approval, and also monitored financing receivable balances continuously in order to minimize the exposure to bad debts.

- Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

  Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, dan piutang pembiayaan investasi, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.

- *Maximum exposure to credit risk*

  The Company's exposure to credit risk mainly comes from the multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, and investment financing receivables, of which the maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- Jaminan dan perlindungan kredit lainnya

  Nilai dan jenis jaminan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari pihak lawan. Panduan tentang jenis jaminan dan parameter penilaian yang bisa diterima telah diimplementasikan.

  Umumnya, jaminan diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha ataupun pendapatan debitur.

  Jaminan yang dapat diterima oleh Perusahaan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan dan pencatatan secara elektronik pada sistem informasi milik penyedia barang atas logam mulia yang dibiayai oleh Perusahaan. Perusahaan melakukan penilaian internal terhadap unit jaminan pada saat proses inisiasi kredit.

  Perusahaan menerapkan kebijakan minimum uang muka atas pembiayaan multiguna sebesar 10% atau maksimum nilai pinjaman atas pembiayaan maksimal sebesar 90%.

- Analisis konsentrasi risiko kredit

  Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah debitur bergerak dari aktivitas usaha yang sejenis atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

  Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- *Collateral and other credit enhancements*

  The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters.

  Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations or income of the borrowers.

  Collaterals acceptable by the Company from debtor is the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicles and electronic recording in the goods provider's information system of the precious metal financed by the Company. The Company performs an internal assessment of collateral unit during the credit initiation process.

  The Company applies minimum down payment policy on multipurpose financing at minimum of 10% or maximum loan to value asset at maximum of 90%.

- *Concentration of credit risk analysis*

  Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

  The Company is currently engaged in multipurpose financing, working capital financing, and investment financing business which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in the specific geographic region.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko berdasarkan tipe pihak lawan atas kas dan setara kas, piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, piutang pembiayaan investasi, piutang lain-lain, dan uang jaminan yang dimiliki Perusahaan:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The following table sets out the total credit risk and risk concentration based on type of counterparty of cash and cash equivalents, multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, investment financing receivables, other receivables, and security deposits of the Company:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Kas dan setara kas - neto			*Cash and cash equivalents - net*
Bank	504.226	534.084	*Cash in banks*
Piutang pembiayaan multiguna - neto			*Multipurpose financing receivables - net*
Korporasi	6.380	16.735	*Corporate*
Individual	3.112.250	3.326.110	*Individual*
Subtotal	3.118.630	3.342.845	*Subtotal*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto			*Working capital financing receivables - net*
Korporasi	38.757	35.426	*Corporate*
Individual	842.232	455.852	*Individual*
Subtotal	880.989	491.278	*Subtotal*
Piutang pembiayaan investasi - neto			*Investment financing receivables - net*
Korporasi	140.435	188.628	*Corporate*
Individual	2.324.412	1.970.313	*Individual*
Subtotal	2.464.847	2.158.941	*Subtotal*
Piutang lain-lain - neto			*Other receivables - net*
Korporasi	20.047	23.928	*Corporate*
Individual	57.729	50.023	*Individual*
Subtotal	77.776	73.951	*Subtotal*
Uang jaminan			*Security deposits*
Korporasi	3.095	3.095	*Corporate*
Individual	1.630	1.392	*Individual*
Subtotal	4.725	4.487	*Subtotal*
Total	**7.051.193**	**6.605.586**	***Total***

Dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, Perusahaan mempertimbangkan faktor hari tunggakan, yaitu aset keuangan yang dikategorikan mengalami penurunan nilai (memiliki keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender).

In determining the allowance for impairment losses on financial assets, the Company considers the factor of day past due, which is financial assets categorized as impaired (having a late payment of principal and/or interest that has exceeded 90 (ninety) calendar days).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, credit risk exposure of financial assets is divided into:

	31 Desember/*December 31*, 2025					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/*Impaired*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Total/*Total*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas - bank - neto	504.521	-	-	(295)	504.226	*Cash and cash equivalents - cash in banks - net*
Piutang pembiayaan multiguna - neto	2.839.390	355.914	70.546	(147.220)	3.118.630	*Multipurpose financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto	809.553	85.017	10.587	(24.168)	880.989	*Working capital financing receivables - net*
Piutang pembiayaan investasi - neto	2.087.308	413.430	72.974	(108.865)	2.464.847	*Investment financing receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	25.613	-	60.691	(8.528)	77.776	*Other receivables - net*
Uang jaminan	4.725	-	-	-	4.725	*Security deposits*
Total	**6.271.110**	**854.361**	**214.798**	**(289.076)**	**7.051.193**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/*Impaired*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Total/*Total*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas - bank - neto	534.576	-	-	(492)	534.084	*Cash and cash equivalents - cash in banks - net*
Piutang pembiayaan multiguna - neto	3.014.978	383.140	75.713	(130.986)	3.342.845	*Multipurpose financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto	454.177	40.207	7.378	(10.484)	491.278	*Working capital financing receivables - net*
Piutang pembiayaan investasi - neto	1.850.740	329.985	47.459	(69.243)	2.158.941	*Investment financing receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	27.439	-	50.615	(4.103)	73.951	*Other receivables - net*
Uang jaminan	4.487	-	-	-	4.487	*Security deposits*
Total	**5.886.397**	**753.332**	**181.165**	**(215.308)**	**6.605.586**	***Total***

Tabel berikut menunjukkan analisis umur piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, dan piutang pembiayaan investasi yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

The following tables summarizes the aging analysis of multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, and investment financing receivables which are past due but not impaired:

	31 Desember/*December 31*, 2025				
	1-30 hari/*days*	31-60 hari/*days*	61-90 hari/*days*	Total/*Total*	
Piutang pembiayaan multiguna - neto	266.217	58.896	30.801	355.914	*Multipurpose financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto	65.672	13.717	5.628	85.017	*Working capital financing receivables - net*
Piutang pembiayaan investasi - neto	312.233	61.422	39.775	413.430	*Investment financing receivables - net*
Total	**644.122**	**134.035**	**76.204**	**854.361**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan analisis umur piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, dan piutang pembiayaan investasi yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai: (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The following tables summarizes the aging analysis of multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, and investment financing receivables which are past due but not impaired: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	1-30 hari/*days*	31-60 hari/*days*	61-90 hari/*days*	Total/*Total*	
Piutang pembiayaan multiguna - neto	288.999	64.723	29.418	383.140	*Multipurpose financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto	29.302	7.350	3.555	40.207	*Working capital financing receivables - net*
Piutang pembiayaan investasi - neto	260.986	45.344	23.655	329.985	*Investment financing receivables - net*
Total	**579.287**	**117.417**	**56.628**	**753.332**	***Total***

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Perusahaan telah menerapkan klasifikasi penurunan nilai berdasarkan ketentuan PSAK No. 109 sejak Januari 2020. Klasifikasi penurunan nilai terdiri dari 3 (tiga) *stage*: *stage* 1 atau *performing loan* atau *nonimpaired loan* yaitu kredit yang tidak mengalami penurunan nilai, *stage* 2 atau *under performing loan* yaitu kredit belum mengalami penurunan nilai namun mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, dan *stage* 3 atau *non-performing* atau kredit telah mengalami penurunan nilai. Klasifikasi untuk kredit lebih menekankan pada apakah terdapat indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal atau risiko gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Perusahaan melakukan pengukuran kerugian kredit ekspektasian ("ECL") tidak hanya menggunakan informasi masa lalu dan saat ini, tetapi juga termasuk informasi prakiraan (*forward looking*). Model dibangun untuk setiap portofolio dengan memodelkan *Observed Default Rate* ("ODR") setiap tahun pada tingkat portofolio dengan berbagai variabel makro ekonomi dengan metode statistik regresi berganda. Oleh karena itu perhitungan ECL diharapkan memasukkan penyesuaian berwawasan kedepan (*Forward-looking Adjustment*/"FLA") yang konsisten dengan kondisi makro ekonomi.

Estimasi perubahan ECL harus mencerminkan, dan secara konsisten dengan, perubahan dalam data observasi terkait dari periode ke periode (seperti perubahan tingkat pengangguran yang merupakan indikasi kerugian kredit atas instrumen keuangan atau kelompok instrumen keuangan dan besarnya perubahan tersebut).

Measurement of expected credit losses

The Company has implemented classification of impairment based on SFAS No. 109 since January 2020. Impairment classification consist of 3 (three) stage: stage 1 or performing loan or nonimpaired loan, stage 2 or under performing loan or nonimpaired loan but have significant increase in credit risk since the origination, and stage 3 or non-performing or impaired loan. The classification for credit places more emphasis on whether there is an indication of a significant increase in credit risk since initial recognition or risk of default at each reporting date.

The Company specifically requires to measure expected credit losses ("ECL") using not only past and current information, but also including forecast information (forward looking). The model is developed for each portfolio by modelling quarterly portfolio-level Observed Default Rate ("ODR") with a range of annually macroeconomic variables base on statistical method with multiple logistic of regression. The ECL calculations are therefore expected to include Forward-looking Adjustment ("FLA") accounting for the expected future macroeconomic conditions.

Estimates of changes in ECL should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period (such as changes in unemployment rates that are indicative of credit losses on the financial instrument or in the group of financial instruments and in the magnitude of those changes).

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko atas kekurangan dana dan untuk memitigasinya, Perusahaan telah menggunakan perangkat rencana likuiditas. Perangkat ini mempertimbangkan jatuh tempo untuk aset keuangan yaitu piutang pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi dan membuat rencana arus kas dari operasi. Perusahaan mempunyai jangka waktu pinjaman dari bank yang disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada konsumen.

Tabel di bawah ini menggambarkan profil jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual (tidak didiskontokan):

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk of a shortage of funds and to mitigate the risk, the Company has applied liquidity planning tool. This tool considers the maturity of its financial assets, which is multipurpose financing, working capital financing, and investment financing receivables and prepare projected cash flows from operations. The Company has term bank loan facilities which are adjusted with the tenure of financing given to consumers.

The tables below summarizes the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024, respectively, based on contractual remaining maturity (undiscounted):

	31 Desember/*December 31*, 2025					
	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3-12 bulan/ *3-12 months*	Lebih dari 1-5 tahun/ *More than 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total/ *Total*	
ASET						***ASSETS***
Kas dan setara kas - bank	504.521	-	-	-	504.521	*Cash and cash equivalents - cash in banks*
Piutang pembiayaan multiguna	760.074	1.723.010	1.825.230	254	4.308.568	*Multipurpose financing receivables*
Piutang pembiayaan modal kerja	257.702	582.022	307.406	-	1.147.130	*Working capital financing receivables*
Piutang pembiayaan investasi	420.005	1.067.251	2.079.786	72	3.567.114	*Investment financing receivables*
Piutang lain-lain	83.031	581	1.359	2.488	87.459	*Other receivables*
Uang jaminan	-	75	4.650	-	4.725	*Security deposits*
Total aset keuangan	**2.025.333**	**3.372.939**	**4.218.431**	**2.814**	**9.619.517**	***Total financial assets***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Utang bank	527.107	1.011.612	1.039.130	-	2.577.849	*Bank loans*
Utang lain-lain	171.043	4.177	11.266	-	186.486	*Other payables*
Liabilitas sewa	3.006	8.187	13.330	-	24.523	*Lease liabilities*
Utang obligasi	40.802	1.451.019	1.121.698	-	2.613.519	*Bonds payable*
Utang subordinasi	3.716	11.188	244.753	-	259.657	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**745.674**	**2.486.183**	**2.430.177**	**-**	**5.662.034**	***Total financial liabilities***
Perbedaan jatuh tempo	**1.279.659**	**886.756**	**1.788.254**	**2.814**	**3.957.483**	***Maturity gap***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel di bawah ini menggambarkan profil jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual (tidak didiskontokan): (lanjutan)

The tables below summarizes the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024, respectively, based on contractual remaining maturity (undiscounted): (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3-12 bulan/ *3-12 months*	Lebih dari 1-5 tahun/ *More than 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total/ *Total*	
ASET						***ASSETS***
Kas dan setara kas - bank	534.576	-	-	-	534.576	*Cash and cash equivalents - cash in banks*
Piutang pembiayaan multiguna	868.403	1.942.628	1.716.812	-	4.527.843	*Multipurpose financing receivables*
Piutang pembiayaan modal kerja	133.502	304.309	183.217	-	621.028	*Working capital financing receivables*
Piutang pembiayaan investasi	352.356	939.167	1.770.016	-	3.061.539	*Investment financing receivables*
Piutang lain-lain	76.809	54	621	570	78.054	*Other receivables*
Uang jaminan	10	30	4.372	75	4.487	*Security deposits*
Total aset keuangan	**1.965.656**	**3.186.188**	**3.675.038**	**645**	**8.827.527**	***Total financial assets***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Utang bank	428.338	1.136.997	764.110	-	2.329.445	*Bank loans*
Utang lain-lain	167.698	4.040	14.669	-	186.407	*Other payables*
Liabilitas sewa	2.573	8.082	24.250	-	34.905	*Lease liabilities*
Utang obligasi	37.891	1.414.756	938.284	-	2.390.931	*Bonds payable*
Utang subordinasi	3.716	11.188	259.658	-	274.562	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**640.216**	**2.575.063**	**2.000.971**	**-**	**5.216.250**	***Total financial liabilities***
Perbedaan jatuh tempo	**1.325.440**	**611.125**	**1.674.067**	**645**	**3.611.277**	***Maturity gap***

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan:

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY

The tables below present a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instrument that are carried in the financial statements:

	31 Desember/*December 31*, 2025				
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets measured at amortized cost*	**Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
ASET KEUANGAN					***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas - bank - neto	504.226	-	504.226	504.226	*Cash and cash equivalents - cash in banks - net*
Piutang pembiayaan multiguna - neto	3.118.630	-	3.118.630	3.070.350	*Multipurpose financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto	880.989	-	880.989	897.422	*Working capital financing receivables - net*
Piutang pembiayaan investasi - neto	2.464.847	-	2.464.847	2.501.981	*Investment financing receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	77.776	-	77.776	76.563	*Other receivables - net*
Uang jaminan	4.725	-	4.725	4.725	*Security deposits*
Total aset keuangan	**7.051.193**	**-**	**7.051.193**	**7.055.267**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN					***FINANCIAL LIABILITIES***
Utang bank	-	2.419.878	2.419.878	2.462.358	*Bank loans*
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	23.083	23.083	23.083	*Accrued expenses - interest*
Utang lain-lain	-	172.293	172.293	172.293	*Other payables*
Liabilitas sewa	-	23.768	23.768	23.768	*Lease liabilities*
Utang obligasi - neto	-	2.395.241	2.395.241	2.434.514	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	-	200.000	200.000	200.663	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**-**	**5.234.263**	**5.234.263**	**5.316.679**	***Total financial liabilities***

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets measured at amortized cost*	**Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
ASET KEUANGAN					***FINANCIAL ASSETS***
Kas dan setara kas - bank - neto	534.084	-	534.084	534.084	*Cash and cash equivalents - cash in banks - net*
Piutang pembiayaan multiguna - neto	3.342.845	-	3.342.845	3.290.022	*Multipurpose financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto	491.278	-	491.278	510.644	*Working capital financing receivables - net*
Piutang pembiayaan investasi - neto	2.158.941	-	2.158.941	2.181.956	*Investment financing receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	73.951	-	73.951	73.886	*Other receivables - net*
Uang jaminan	4.487	-	4.487	4.487	*Security deposits*
Total aset keuangan	**6.605.586**	**-**	**6.605.586**	**6.595.079**	***Total financial assets***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan: (lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

The tables below present a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instrument that are carried in the financial statements: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets measured at amortized cost*	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortized cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
LIABILITAS KEUANGAN					***FINANCIAL LIABILITIES***
Utang bank	-	2.190.467	2.190.467	2.255.820	*Bank loans*
Biaya yang masih harus dibayar - bunga	-	27.734	27.734	27.734	*Accrued expenses - interest*
Utang lain-lain	-	166.852	166.852	166.852	*Other payables*
Liabilitas sewa	-	32.014	32.014	32.014	*Lease liabilities*
Utang obligasi - neto	-	2.240.119	2.240.119	2.235.207	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	-	200.000	200.000	200.758	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**-**	**4.857.186**	**4.857.186**	**4.918.385**	***Total financial liabilities***

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Nilai wajar kas dan setara kas - bank, piutang lain-lain, uang jaminan, biaya yang masih harus dibayar - bunga, liabilitas sewa, dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Fair value of cash and cash equivalents - cash in banks, other receivables, security deposits, accrued expenses - interest, lease liabilities, and other payables approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

Nilai wajar dari piutang pembiayaan multiguna, piutang pembiayaan modal kerja, dan piutang pembiayaan investasi, ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga kontraktual pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The fair value of multipurpose financing receivables, working capital financing receivables, and investment financing receivables are determined by discounted cash flow using contractual interest rate as of December 31, 2025 and 2024.

Nilai wajar dari utang bank, utang obligasi, dan utang subordinasi ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The fair value of bank loans, bonds payable, and subordinated loan are determined by discounted cash flow using market interest rate as of December 31, 2025 and 2024.

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan

Fair value hierarchy of financial instruments

Perusahaan menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan teknik penilaian:

The Company adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique:

1. Tingkat 1: dikutip (tidak dapat disesuaikan) dari harga pasar aktif untuk aset dan liabilitas keuangan yang identik;

1. *Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;*

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Perusahaan menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan teknik penilaian: (lanjutan)

2. Tingkat 2: teknik lain dimana semua *input* yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

3. Tingkat 3: teknik lain dimana menggunakan *input* yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, tidak berdasarkan pada data yang diobservasi di pasar.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perusahaan memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen keuangan berikut:

Fair value hierarchy of financial instruments (continued)

The Company adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique: (continued)

2. *Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly; and*

3. *Level 3: other techniques which use inputs which have significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.*

As of December 31, 2025 and 2024, the carrying value of the Company's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

	31 Desember/*December 31*, 2025					
	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Nilai wajar/*Fair value*				
		Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total/ *Total*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Aset yang tidak diukur pada nilai wajar						*Assets not measured at fair value*
Piutang pembiayaan multiguna - neto	3.118.630	-	-	3.070.350	3.070.350	*Multipurpose financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto	880.989	-	-	897.422	897.422	*Working capital financing receivables - net*
Piutang pembiayaan Investasi - neto	2.464.847	-	-	2.501.981	2.501.981	*Investment financing receivables - net*
Total aset keuangan	**6.464.466**	**-**	**-**	**6.469.753**	**6.469.753**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Liabilitas yang tidak diukur pada nilai wajar						*Liabilities not measured at fair value*
Utang bank	2.419.878	-	2.462.358	-	2.462.358	*Bank loans*
Utang obligasi - neto	2.395.241	-	2.434.514	-	2.434.514	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	200.000	-	200.663	-	200.663	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**5.015.119**	**-**	**5.097.535**	**-**	**5.097.535**	***Total financial liabilities***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perusahaan memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen keuangan berikut: (lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

Fair value hierarchy of financial instruments (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the carrying value of the Company's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Nilai wajar/*Fair value*				
		Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total/ *Total*	
ASET KEUANGAN						***FINANCIAL ASSETS***
Aset yang tidak diukur pada nilai wajar						*Assets not measured at fair value*
Piutang pembiayaan multiguna - neto	3.342.845	-	-	3.290.022	3.290.022	*Multipurpose financing receivables - net*
Piutang pembiayaan modal kerja - neto	491.278	-	-	510.644	510.644	*Working capital financing receivables - net*
Piutang pembiayaan Investasi - neto	2.158.941	-	-	2.181.956	2.181.956	*Investment financing receivables - net*
Total aset keuangan	**5.993.064**	**-**	**-**	**5.982.622**	**5.982.622**	***Total financial assets***
LIABILITAS KEUANGAN						***FINANCIAL LIABILITIES***
Liabilitas yang tidak diukur pada nilai wajar						*Liabilities not measured at fair value*
Utang bank	2.190.467	-	2.255.820	-	2.255.820	*Bank loans*
Utang obligasi - neto	2.240.119	-	2.235.207	-	2.235.207	*Bonds payable - net*
Utang subordinasi	200.000	-	200.758	-	200.758	*Subordinated loan*
Total liabilitas keuangan	**4.630.586**	**-**	**4.691.785**	**-**	**4.691.785**	***Total financial liabilities***

36. LIABILITAS KONTINJENSI

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

36. CONTINGENT LIABILITY

The Company did not have any significant contingent liability as of December 31, 2025 and 2024.

37. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH

37. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - SHARIA UNIT

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
PIUTANG PEMBIAYAAN *MURABAHAH*			***MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan *murabahah* - bruto	327.176	276.972	*Murabahah financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan *murabahah* yang belum diakui	(75.551)	(65.460)	*Unearned murabahah financing income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.490)	(11.339)	*Allowance for impairment losses*
Piutang pembiayaan *murabahah* - neto	**233.135**	**200.173**	***Murabahah financing receivables - net***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH (lanjutan)

37. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - SHARIA UNIT (continued)

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
PIUTANG PEMBIAYAAN JASA *IJARAH*			***IJARAH SERVICE FINANCING RECEIVABLES***
Piutang pembiayaan jasa *ijarah* - bruto	10.460	-	*Ijarah service financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan jasa *ijarah* yang belum diakui	(125)	-	*Unearned ijarah service financing income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(326)	-	*Allowance for impairment losses*
Piutang pembiayaan jasa *ijarah* - neto	**10.009**	**-**	***Ijarah service financing receivables - net***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
PENDAPATAN SYARIAH			***SHARIA INCOME***
Pendapatan *margin* dari kegiatan pembiayaan *murabahah*	77.692	62.584	*Margin income from murabahah financing activities*
Pendapatan imbal jasa dari kegiatan pembiayaan jasa *ijarah*	408	-	*Service fee income from ijarah service financing activities*
Total pendapatan syariah	**78.100**	**62.584**	***Total sharia income***

38. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

38. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari/ *January 1, 2025*	Kas masuk/ *Cash in*	Kas keluar/ *Cash out*	Perubahan non-kas/*Non-cash changes*	31 Desember/ *December 31, 2025*	
Utang bank	2.190.467	2.050.000	(1.819.897)	(692)	2.419.878	*Bank loans*
Utang obligasi - neto	2.240.119	1.500.000	(1.345.445)	567	2.395.241	*Bonds payable - net*
Liabilitas sewa	32.014	-	(10.181)	1.935	23.768	*Lease liabilities*
Total	**4.462.600**	**3.550.000**	**(3.175.523)**	**1.810**	**4.838.887**	***Total***

	1 Januari/ *January 1, 2024*	Kas masuk/ *Cash in*	Kas keluar/ *Cash out*	Perubahan non-kas/*Non-cash changes*	31 Desember/ *December 31, 2024*	
Utang bank	2.626.237	1.625.000	(2.061.468)	698	2.190.467	*Bank loans*
Utang obligasi - neto	1.660.253	1.000.000	(419.000)	(1.134)	2.240.119	*Bonds payable - net*
Liabilitas sewa	41.142	-	(14.230)	5.102	32.014	*Lease liabilities*
Total	**4.327.632**	**2.625.000**	**(2.494.698)**	**4.666**	**4.462.600**	***Total***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. SEGMEN OPERASI

Perusahaan melakukan kegiatan pembiayaan di beberapa wilayah di Indonesia (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi - disingkat Jabodebek, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera), baik untuk kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjaman multiguna dengan jaminan dari konsumen berupa BPKB dari kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, penyediaan kendaraan bermotor roda dua, logam mulia, dan jasa *ijarah*. Untuk itu, informasi segmen operasi disajikan sebagai bentuk primer pelaporan segmen.

39. OPERATING SEGMENT

The Company has financing activities in several geographical areas in Indonesia (Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi - abbreviated Jabodebek, Banten, East Java, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan and Sulawesi, Central Java, West Java, and Sumatera), for financing activities in the form of multipurpose financing with BPKB of the two-wheeled and four-wheeled motor vehicles as collateral, providing two-wheeled motor vehicles, precious metal, and ijarah service. Therefore, geographical operating segment is presented as the primary basis of segment reporting.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut:

39. OPERATING SEGMENT (continued)

The operating segment based on marketing geographical are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2025

	Jabodebek, Banten/ *Jabodebek, Banten*	**Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi/*East Java, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi***	**Jawa Tengah/ *Central Java***	**Jawa Barat/ *West Java***	**Sumatera/ *Sumatera***	**Total/ *Total***	**Jumlah - Neto/ *Amount - Net***	
Pendapatan segmen	481.193	658.482	273.830	189.292	510.361	2.113.158	2.113.158	*Segment revenues*
Pendapatan tidak dapat dialokasi							56.443	*Unallocated revenues*
Total pendapatan	481.193	658.482	273.830	189.292	510.361	2.113.158	2.169.601	*Total revenues*
Beban segmen:								*Segment expenses:*
Beban usaha	181.049	233.227	98.885	64.639	170.708	748.508	748.508	*Operating expenses*
Beban pendanaan dan keuangan	76.587	114.672	43.358	31.944	85.251	351.812	351.812	*Financing costs and financing charges*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	75.580	150.181	59.738	43.330	124.060	452.889	452.889	*Provision for impairment losses*
Beban penyusutan	12.859	16.997	8.300	4.918	10.843	53.917	53.917	*Depreciation expenses*
Total beban	346.075	515.077	210.281	144.831	390.862	1.607.126	1.607.126	*Total expenses*
Hasil segmen	**135.118**	**143.405**	**63.549**	**44.461**	**119.499**	**506.032**	**562.475**	***Segment Results***
Beban tidak dapat dialokasi							344,934	*Unallocated expenses*
Beban pendanaan dan keuangan tidak dapat dialokasi							1.350	*Unallocated financing costs and financing charges*
Beban penyusutan dan amortisasi tidak dapat dialokasi							36.852	*Unallocated depreciation and amortization expenses*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai tidak dapat dialokasi							(119)	*Reversal on unallocated impairment losses*
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan							179.458	*Income before final tax expense and income tax expense*
Beban pajak final							4.749	*Final tax expense*
Laba sebelum beban pajak penghasilan							174.709	*Income before income tax expense*
Beban pajak penghasilan							32.156	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan							**142.553**	***Income for the year***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut: (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

The operating segment based on marketing geographical are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2025							
	Jabodebek, Banten/ *Jabodebek, Banten*	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi/*East Java, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Barat/ *West Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Total/ *Total*	Jumlah - Neto/ *Amount - Net*	
Aset segmen	1.260.779	2.154.627	814.030	584.204	1.487.801	6.301.441	6.301.441	*Segment assets*
Aset tidak dapat dialokasi							1.067.227	*Unallocated assets*
Total aset							**7.368.668**	***Total assets***
Liabilitas segmen	40.972	47.255	20.097	17.135	37.160	162.619	162.619	*Segment liabilities*
Liabilitas tidak dapat dialokasi							5.222.877	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas							**5.385.496**	***Total liabilities***
Perolehan aset tetap segmen	3.283	8.304	1.443	770	1.318	15.118	15.118	*Segment acquisitions of property and equipment*
Perolehan aset tetap kantor pusat							25.971	*Acquisitions of property and equipment in head office*
Total perolehan aset tetap							**41.089**	***Total acquisitions of property and equipment***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut: (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

The operating segment based on marketing geographical are as follows: (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2024

	Jabodebek, Banten/ *Jabodebek, Banten*	**Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi/*East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi***	**Jawa Tengah/ *Central Java***	**Jawa Barat/ *West Java***	**Sumatera/ *Sumatera***	**Total/ *Total***	**Dikurangi Hak Bank/ *Less Banks' Rights***	**Jumlah - Neto/ *Amount - Net***	
Pendapatan segmen	495.713	613.621	288.786	194.576	517.411	2.110.107	(3)	2.110.104	*Segment revenues*
Pendapatan tidak dapat dialokasi								56.836	*Unallocated revenues*
Total pendapatan	495.713	613.621	288.786	194.576	517.411	2.110.107	(3)	2.166.940	*Total revenues*
Beban segmen:									*Segment expenses:*
Beban usaha	177.563	201.033	95.683	64.120	167.478	705.877	-	705.877	*Operating expenses*
Beban pendanaan dan keuangan	73.805	107.098	49.046	33.792	90.355	354.096	(2)	354.094	*Financing costs and financing charges*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	61.080	91.358	60.050	37.101	107.648	357.237	-	357.237	*Provision for impairment losses*
Beban penyusutan	12.982	14.187	8.372	5.353	11.038	51.932	-	51.932	*Depreciation expenses*
Total beban	325.430	413.676	213.151	140.366	376.519	1.469.142	(2)	1.469.140	*Total expenses*
Hasil segmen	**170.283**	**199.945**	**75.635**	**54.210**	**140.892**	**640.965**	**(1)**	**697.800**	***Segment results***
Beban tidak dapat dialokasi								333.219	*Unallocated expenses*
Beban pendanaan dan keuangan tidak dapat dialokasi								2.225	*Unallocated financing costs and financing charges*
Beban penyusutan dan amortisasi tidak dapat dialokasi								29.120	*Unallocated depreciation and amortization expenses*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai tidak dapat dialokasi								(6)	*Reversal on unallocated impairment losses*
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan								333.242	*Income before final tax expense and income tax expense*
Beban pajak final								4.229	*Final tax expense*
Laba sebelum beban pajak penghasilan								329.013	*Income before income tax expense*
Beban pajak penghasilan								66.098	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan								**262.915**	***Income for the year***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Segmen operasi menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut: (lanjutan)

39. OPERATING SEGMENT (continued)

The operating segment based on marketing geographical are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2024							
	Jabodebek, Banten/ *Jabodebek, Banten*	Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi/*East Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Barat/ *West Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Total/ *Total*	Jumlah - Neto/ *Amount - Net*	
Aset segmen	1.214.370	1.864.468	800.070	545.772	1.516.309	5.940.989	5.940.989	*Segment assets*
Aset tidak dapat dialokasi							1.005.352	*Unallocated assets*
Total aset							**6.946.341**	***Total assets***
Liabilitas segmen	33.048	37.038	16.191	13.294	32.141	131.712	131.712	*Segment liabilities*
Liabilitas tidak dapat dialokasi							4.922.528	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas							**5.054.240**	***Total liabilities***
Perolehan aset tetap segmen	4.142	9.758	2.003	154	4.997	21.054	21.054	*Segment acquisitions of property and equipment*
Perolehan aset tetap kantor pusat							19.549	*Acquisitions of property and equipment in head office*
Total perolehan aset tetap							**40.603**	***Total acquisitions of property and equipment***

40. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan:

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang "Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"

Amandemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK No. 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*. Amandemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK No. 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

PSAK No. 118, “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan”

PSAK No. 118 menggantikan PSAK No. 201, memperkenalkan persyaratan baru untuk penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk total dan subtotal yang ditentukan. PSAK ini juga mengharuskan pengungkapan ukuran kinerja yang ditentukan oleh manajemen dalam catatan dan mencakup persyaratan baru untuk agregasi dan disagregasi informasi keuangan berdasarkan 'peran' yang diidentifikasi dari laporan keuangan utama dan catatan.

40. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company’s financial statements, but not yet effective are disclosed below. The Management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated until the report date:

Effective beginning on or after January 1, 2026

SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosures", about the "Classification and Measurement of Financial Instruments"

These amendments adding and clarify statement in SFAS No. 109 regarding derecognition of financial liabilities, as well as clarify the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranche. The amendments also revise the statement in SFAS No. 107 regarding the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adding statements related to financial instruments with contractual terms that alter the timing or amount of contractual cash flows.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2026. Earlier application is permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company’s financial reporting.

Effective beginning on or after January 1, 2027

SFAS No. 118, “Presentation and Disclosure of Financial Statements”

SFAS No. 118 which replaces SFAS No. 201, introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. It also requires disclosure of management-defined performance measures in the notes and includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information based on the identified ‘roles’ of the primary financial statements and the notes.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan" (lanjutan)

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

PSAK No. 413, "Penurunan Nilai"

Pada tanggal 24 Juli 2024, DSAS IAI telah mengesahkan PSAK No. 413 tentang Penurunan Nilai. PSAK ini mengatur tentang penurunan nilai atas instrumen keuangan yaitu aset keuangan berbasis syariah dan *kafalah* untuk penjaminan risiko kredit.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap industri jasa keuangan non bank pada saat efektif dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan industri jasa keuangan non bank masih diestimasi pada tanggal 31 Desember 2025.

PSAK No. 413 diterapkan pada aset keuangan syariah berupa hak tagih yang jumlah kas dan waktu pembayarannya sudah ditentukan dalam akad. Perhitungan penurunan nilai pada PSAK No. 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang (*unbiased and probability-weighted amount*) dan informasi wajar dan tersokong (*reasonable and supportable information*).

Perhitungan tersebut tidak mencerminkan nilai waktu atas uang *(time value of money)*. *Kafalah* penjaminan risiko kredit ditentukan jumlah yang lebih tinggi antara jumlah provisi yang dihitung berdasarkan PSAK No. 413 dengan jumlah liabilitas yang telah dibentuk. PSAK No. 413 berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 dan dapat diterapkan dini.

40. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2027 (continued)

SFAS No. 118, "Presentation and Disclosure of Financial Statements" (continued)

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after 1 January 2027. Earlier application is permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.

SFAS No. 413, "Impairment"

On July 24, 2024, DSAS IAI has ratified SFAS No. 413 related to Impairment. This SFAS regulates the impairment of financial instruments, namely sharia-based financial asset and kafalah for credit risk guarantees.

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements, but not yet effective are disclosed. The management intends to adopts this standard that are considered relevant to the non-bank financial services industry when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the non-bank financial services industry still being estimated as of December 31, 2025.

SFAS No. 413 is applied to sharia financial assets in the form of collection rights whose cash amount and scheduled payment have been determined in the contract. The calculation of impairment in SFAS No. 413 uses the concept of expected loss whose calculation reflects the unbiased and probability-weighted amount and reasonable and supportable information.

This calculation does not reflect the time value of money. The credit risk guarantee kafalah is determined buy the higher amount between the provision amount calculated based on SFAS No. 413 and the amount of liabilities that have been formed. SFAS No. 413 is effective for financial years starting on or after January 1, 2027, and early adoption is allowed.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Manajemen masih melakukan persiapan dalam penerapan standar baru tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan.

40. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

The management intends to adopt these new standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated until the report date.

41. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut disusun sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

41. ADDITIONAL INFORMATION

The following additional information is information that is not required to be disclosed by Financial Accounting Standards in Indonesia. Such additional information was prepared in accordance with regulations of Financial Services Authority.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Pengelolaan modal

Capital management

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholders value.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun penyajian.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year presented.

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

In managing capital, the Company pays attention to the enactments of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35/POJK.05/2018 regarding Business Operation of Multifinance Company as last amended to POJK No. 35 Year 2025 regarding amendement of POJK No. 46 Year 2024 regarding Development and Strengthening of Multifinance Company, Infrastructure Multifinance Company, and Venture Capital Company which have some provision as follows:

- Modal inti Perusahaan minimum sebesar Rp100.000;
- Rasio modal inti Perusahaan terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50,00%;
- Rasio permodalan Perusahaan mínimum sebesar 10,00%;

- *The Company's core capital minimum of Rp100,000;*
- *The Company's core capital ratio amounting to minimum 50.00% of fully paid capital;*
- *The Company's capital ratio of minimum 10.00%;*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan modal (lanjutan)

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut: (lanjutan)

- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan dengan selisih antara penjumlahan modal dan pinjaman subordinasi (ditetapkan paling tinggi 50,00% dari modal disetor) dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan serendah-rendahnya 0 (nol) dan setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang dihitung berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura adalah sebagai berikut:

41. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management (continued)

In managing capital, the Company pays attention to the enactments of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35/POJK.05/2018 regarding Business Operation of Multifinance Company as last amended to POJK No. 35 Year 2025 regarding amendement of POJK No. 46 Year 2024 regarding Development and Strengthening of Multifinance Company, Infrastructure Multifinance Company, and Venture Capital Company which have some provision as follows: (continued)

- *The amount of the Company's loan to capital and subordinated loan (set at a maximum of 50.00% of fully paid capital) deducted by investment (gearing ratio) is the minimum of 0 (zero) and the maximum of 10 (ten) times.*

Gearing ratio as of December 31, 2025 and 2024, calculated based on the POJK No. 35/POJK.05/2018 as last amended to POJK No. 35 Year 2025 regarding amendement of POJK No. 46 Year 2024 regarding Development and Strengthening of Multifinance Company, Infrastructure Multifinance Company, and Venture Capital Company are as follows:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pinjaman:			*Borrowing:*
Utang bank	2.419.878	2.190.467	*Bank loans*
Utang obligasi	2.395.241	2.240.119	*Bonds payable*
Utang subordinasi	200.000	200.000	*Subordinated loan*
Total pinjaman	5.015.119	4.630.586	*Total borrowing*
Modal	1.983.172	1.892.101	*Capital*
Utang subordinasi	174.074	174.074	*Subordinated loan*
Total modal dan utang subordinasi	2.157.246	2.066.175	*Total capital and subordinated loan*
Gearing ratio	**2,32x**	**2,24x**	***Gearing ratio***

41. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Rasio Keuangan Tertentu

Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.05/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, *gearing ratio* yang diperbolehkan serendah-rendahnya 0 (nol) dan setinggi-tingginya adalah 10 (sepuluh) kali. Dengan demikian Perusahaan telah mematuhi POJK.

Informasi lainnya

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio diatur dengan rincian sebagai berikut:

41. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Several Financial Ratios

In accordance with the POJK No. 35/POJK.05/2018 as last amended to POJK No. 35 Year 2025 regarding amendement of POJK No. 46 Year 2024 regarding Development and Strengthening of Multifinance Company, Infrastructure Multifinance Company, and Venture Capital Company, the minimum gearing ratio allowable is 0 (zero) and maximum gearing ratio allowable is 10 (ten) times. Hence, the Company has complied with the POJK.

Other Information

Based on the enactments of POJK No. 35/POJK.05/2018 regarding Business Operation of Multifinance Company as last amended to POJK No. 35 Year 2025 regarding amendement of POJK No. 46 Year 2024 regarding Development and Strengthening of Multifinance Company, Infrastructure Multifinance Company, and Venture Capital Company, the Company is required to comply with several financial ratios. The ratios are set with the following detail:

	Nilai/*Value*	Ketentuan/ *Requirement*	
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset	40,00%	Minimal/*Minimum*	*Financing to asset ratio*
Rasio *Non-Performing Financing* - neto	5,00%	Maksimal/*Maximum*	*Non-Performing Financing ratio - net*
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja terhadap total saldo piutang pembiayaan	10,00%	Minimal/*Minimum*	*Investment financing and working capital financing to total financing receivables ratio*
Rasio permodalan	10,00%	Minimal/*Minimum*	*Capital ratio*
Rasio modal inti terhadap modal disetor	50,00%	Minimal/*Minimum*	*Core capital to fully paid capital ratio*
Gearing ratio	10x	Maksimal/*Maximum*	*Gearing ratio*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

41. *ADDITIONAL INFORMATION (continued)*

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Informasi lainnya (lanjutan)

Other Information (continued)

Rasio-rasio selain yang disebutkan di atas tidak diatur batas minimal atau maksimal. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam POJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan, dimana rasio tersebut dapat berbeda jika rasio tersebut dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia (tidak diaudit).

Ratios other than stated above are not regulated for the minimum or maximum limit. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said POJK for regulatory compliance purposes, where such ratios may different than the ratios been computed based on Indonesian financial accounting standards (unaudited).

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset	87,73%	86,28%	*Financing to asset ratio*
Rasio *Non-Performing Financing* - neto	0,95%	0,88%	*Non-Performing Financing ratio - net*
Rasio *Non-Performing Financing* - bruto	2,17%	1,96%	*Non-Performing Financing ratio - gross*
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap pinjaman	128,90%	129,42%	*Net financing receivables to borrowings ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja terhadap total saldo piutang pembiayaan	51,58%	44,00%	*Investment financing and working capital financing to total financing receivables ratio*
Rasio permodalan	38,10%	37,71%	*Capital ratio*
Rasio modal inti terhadap modal disetor	569,63%	543,48%	*Core capital to fully paid capital ratio*
Gearing ratio	2,32x	2,24x	*Gearing ratio*


Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank

2025 **Annual Report and Sustainability Report**
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

Do The Right Things Right, Sustainable Growth

WOMFinance

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower floor 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350

Phone : +62 21 2188 2400
Fax : +62 21 2188 2420
Contact Center: 0804-1123888
Email : corporate_secretary@wom.co.id

www.wom.co.id